

PROSIDING

KONGRES INTERNASIONAL
BAHASA-BAHASA DAERAH SULAWESI TENGGARA
BAUBAU, 18--20 JULI 2010

EDITOR

Prof. Dr. H. Hanna, M.Pd.

Firman A.D., S.S., M.Si.

Sandra Safitri., S.S., M.A.



PEMERINTAH KOTA BAU-BAU



PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA



KANTOR BAHASA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

IPK Kalk

Kalk

PROSIDING
KONGRES INTERNASIONAL
BAHASA-BAHASA DAERAH SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2010
KOTA BAUBAU, 18--20 JULI 2010



EDITOR

- Prof. Dr. H. Hanna, M.Pd.**
- Firman A.D., S.S., M.Si.**
- Sandra Safitri, S.S., M.A.**

KANTOR BAHASA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PUSAT BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA	
Klasifikasi	No. Induk : 84
PB	Tgl. : 9-2-2014
499-25306	Ttd. : _____
PRD	

P

Prosiding Kongres Internasional Bahasa-bahasa Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2010

ISBN 978-979-069-055-4

Diterbitkan oleh
Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara
Kementerian Pendidikan Nasional
Jalan Haluoleo, Kompleks Bumi Praja, Anduonohu, Kendari.

Editor : Prof. Dr. H. Hanna, M.Pd., Firman A.D., S.S., M.Si., Sandra Safitri, S.S., M.A.
Penata Letak : Firman A.D. dan Harry
Pewajah Kulit : Harry

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Hak cipta pada Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

406.2
PRO Prosiding
p Prosiding Kongres Internasional Bahasa-bahasa Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2010. -- Kendari:
Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 2010, 440 hal., 19 cm x 28 cm.

ISBN 978-979-069-055-4

KATA PENGANTAR

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Bahasa menjadi ciri identitas satu bangsa. Melalui bahasa, orang dapat mengidentifikasi suatu kelompok masyarakat, bahkan dapat mengenali perilaku dan kepribadian masyarakat penuturnya. Oleh karena itu, masalah kebahasaan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat penuturnya, termasuk bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia.

Secara umum, ada tiga masalah kebahasaan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu masalah bahasa Indonesia, bahasa daerah, pemakaian bahasa asing. Ketiga masalah ini tidak terlepas dari kehidupan masyarakat pendukungnya. Namun, secara politik, ketiga fungsi dari bahasa-bahasa tersebut, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, jelas ditegaskan dalam Politik Bahasa Nasional dan Kebijakan Bahasa Nasional.

Sulawesi Tenggara sebagai salah satu provinsi di nusantara yang memiliki bahasa daerah yang relatif banyak membutuhkan suatu dasar pemikiran dan pijakan yang dapat dijadikan payung untuk melestarikan dan melindungi bahasa daerahnya. Tantangan yang dimunculkan oleh era globalisasi, mau atau tidak, harus dihadapi. Era globalisasi dan pelestarian bahasa daerah harus jalan beriringan, dan kalau bisa era globalisasi dapat menjadi pendukung dan penopang pelestarian bahasa daerah.

Otonomi daerah telah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada daerah untuk mengelola sendiri wilayahnya, termasuk di dalamnya bahasa dan sastra daerah. Dalam upaya mendukung pelestarian dan pembinaan bahasa daerah di daerah, pemerintah pusat telah mengeluarkan payung hukum yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan kebahasaan di daerah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah. Selain itu, pemerintah pusat juga telah membuat Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang menjadi rambu-rambu masalah kebahasaan di Indonesia.

Sejalan dengan itu, Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Pemerintah Kota Baubau menghimpun pandangan para tokoh dan pakar di bidang kebahasaan dan kesastraan melalui kongres untuk membahas masalah pelestarian, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan bahasa-bahasa daerah Sulawesi Tenggara di era globalisasi ini. Berbagai pokok persoalan yang dibahas beserta rumusan dan rekomendasi hasil kongres telah dihimpun dalam prosiding ini.

Mudah-mudahan prosiding ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya dalam memahami dan mengembangkan pelestarian bahasa-bahasa daerah di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara.

Prof. Dr. H. Hanna, M.Pd.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Kata Pengantar Kepala Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara

Daftar Isi

Sambutan Kepala Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional

Sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara

Laporan Pelaksanaan Kongres

Bahasa Daerah Sebagai Sarana Pencerdasan Bangsa Indonesia

Mansyur Ramly (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional) 1 ✓

Peranan Bahasa Daerah Sebagai Wahana Peningkatan Daya Apresiasi Budaya Daerah
Sugiyono dan Azhari Dasman Darnis (Pusat Bahasa, Jakarta) 7 ✓

Dialektika dan Kebijakan Keberaksaraan di Kota Baubau
Mz. Amirul Tamim (Wali Kota Baubau) 11

Pelestarian Bahasa Daerah di Kabupaten Buton

Ir. L.M. Syafei Kahar (Bupati Buton) 17 ✓

Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pemertahanan dan Pelestarian Bahasa Moronene di
Kabupaten Bombana

Atikurahman (Bupati Bombana) 23

Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Kulisusu

Harmin Hari (Wakil Bupati Buton Utara) 27

Bahasa Daerah di Era Globalisasi

Laode Ida (DPD Republik Indonesia) 32

Kaitan Pemetaan Bahasa dengan Potensi Bahasa Daerah

Multamia R.M.T. Lauder (Departemen Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia) 36 ✓

The Writing System of The Ciacia Language

Ho-Young Lee (Seoul National University), Tai Hyun Chun (Hankuk University of Foreign
Studies), and Hyosung Hwang (Seoul National University) 51

Pembelajaran Bahasa Daerah Muna dalam Konteks Muatan Lokal

La Ode Sidu Marafad (Universitas Haluoleo) 54

Ajaran Martabat Tujuh dan Pengaruhnya di Nusantara

Abdul Hadi W. M. (Universitas Paramadina) 59

Peran Bahasa Daerah Sebagai Sarana Pembangunan Berwawasan Kerakyatan dan Penawar
Dampak Negatif Globalisasi

Mashadi Said, Farid Thalib, dan A. Banri, E. (Universitas Gunadarma) 66

Pengembangan Kecerdasan dan Integritas Berdasarkan Teori Neurology

Hanna (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara) 71

Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara dalam Kaitannya dengan Genealogi Masao Yamaguchi (Universitas Setsunan, Osaka, Jepang)	74
Peran Media Massa dalam Pelestarian dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah: Surat Kabar Bahasa Daerah Sebagai Strategi untuk Mempertahankan Bahasa dan Sastra Daerah Timothy Friberg (Amerika Serikat)	91
Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Daerah Mahsun (Universitas Negeri Mataram)	100
Sejarah Kebudayaan Buton : Suatu Penelusuran ke Arah Rekonstruksi Susanto Zuhdi (Universitas Indonesia)	108
Bahasa Daerah Sebagai Sarana Pencerdasan dan Pengembangan Potensi Daerah Sulawesi Tenggara pada Era Globalisasi: Pelestarian dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah dalam Era Globalisasi Barbara Friberg (Amerika Serikat)	118
Penerapan Kaidah Algoritma Genetik dalam Pemulihan Bahasa Daerah dari Degradasi Farid Thalib dan Mashadi Said (Universitas Gunadarma).....	125
Relasi Kekerabatan Antarbahasa dalam Subkelompok Muna-Buton-Wakatobi, di Kepulauan Lepas Pantai Provinsi Sulawesi Tenggara: Kajian Linguistik Diakronis Inyo Yos Fernandez (Universitas Gadjah Mada)	133
Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Moronene T. David Andersen (<i>Summer Institute of Linguistics</i>)	139
Revitalisasi Peran Bahasa Ibu dalam Menangkal Arus Globalisasi Lukman (Universitas Hasanuddin)	148
Revitalisasi Bahasa Daerah dalam Konteks Sosial Indonesia Amrin Saragih (Balai Bahasa Medan)	154
Quo Vadis Bahasa Minoritas: Tantangan dan Solusinya Hamzah Machmoed (Universitas Hasanuddin)	161
Melindungi Bahasa dan Identitas Lokal Lalu Abd. Khalik (Universitas 45 Makassar).....	165
Perilaku Sintaksis Adjektiva Bahasa Muna Dialek Gu-Mawasangka Zalili Sailan (Universitas Negeri Jakarta)	170
Dua Pucuk Surat Kerajaan Buton dari Abad Ke-17: Kandungan Isi, Bahasa, dan Konteks Sosio-Historis Suryadi (Universitas Leiden, Belanda)	179
Menynergikan Pengajaran Bahasa Asing, Pengembangan Bahasa Nasional, dan Pemertahanan Bahasa Daerah Muhammad Amin Rasyid (Universitas Negeri Makassar)	193
Upaya Pelestarian Bahasa Daerah di Sulawesi Tenggara Melalui Kajian Kekerabatan Antara Bahasa-Bahasa Buton, Muna, dan Tolaki Ikhwan M. Said (Universitas Hasanuddin)	198
Cerita Bergambar Bersumber dari Cerita Rakyat Nusantara: Antara Jembatan Pemahaman Budaya dan Upaya Peningkatan Minat Baca B. Trisman (Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan)	204
Larangan Inses dalam Mitos "Koloimba": Menengok Jendela Budaya Masyarakat Tolaki Uniwati (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)	210

Jejak Bahasa Melayu (Indonesia) dalam Bahasa Muna Nurhayati (Universitas Hasanuddin)	217
Menggali Nilai-Nilai Budaya Melalui Kesantunan Berbahasa Artanti (Pusat Bahasa)	224
Pemertahanan Bahasa Muna di Daerah Rantau Sulawesi Tengah Siti Fatinah (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah)	228
Perbedaan Ejaan Latin Antara Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia dalam Pengaruh Skrip Arab Cho Tae Young (Universitas Hasanuddin)	236
Pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah Berbasis Multikultural dalam Mewujudkan Pendidikan yang Berkarakter di Era Globalisasi Edhy Rustan (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo)	247
Binongko: Bahasa, Besi, dan Tukang Besi Laila Kurniawaty (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)	250
Pemberdayaan Bahasa Daerah Sebagai Alat Komunikasi Berbasis Kearifan Lokal Anang Santoso (Universitas Negeri Malang)	254
Analisis Akustik Konsonan /-h/dalam Kata Terbitan Berimbuhan {-an} /-an/ Hirobumi Sato (Brunei Darussalam)	260
Pemberdayaan Bahasa dan Sastra Daerah Sebagai Upaya Pelestarian Bahasa dan Kearifan Lokal Sahlan (Universitas Haluoleo)	272
Buton, Feminisme, dan Wa Ode Wulan Ratna Syaifuddin (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)	278
Bahasa Wolio di Kerajaan Buton (Satu Kajian Berdasarkan Naskah Kuno) La Niampe (Universitas Haluoleo)	288
Seni Pertunjukan <i>Kabanti</i>: Soal Pewarisan Budaya dan Kebijakan Pemerintah Asrif (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)	293
Sintaksis Bahasa Kodeoha (Suatu Kajian Transformasi Generatif) Mantasiah R. (Universitas Negeri Makassar)	302
Nilai Etika dan Kesantunan dalam Berbahasa Daerah Hilaluddin Hanafi (Universitas Haluoleo)	309
Perubahan Makna Pungutan Kata Bahasa Arab dalam Bahasa Wolio Firman A.D. (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)	312
Pelestarian Bahasa Daerah Moronene Sebagai Kekayaan Budaya Daerah Sulawesi Tenggara Anton Ferdinan (Forum Ilmiah Guru Kabupaten Bombana)	318
Sastra Lisan <i>Kabanti</i> Sebagai Ruang Rekulturasi Budaya Buton Sumiman Udu (Universitas Haluoleo)	324
Pelestarian Bahasa Melalui Penelusuran Kekerabatan Bahasa-Bahasa dalam Wilayah Administratif yang Berbeda (Tinjauan terhadap Isolek Bonerate di Lepas Pantai Selatan Pulau Sulawesi) Sandra Safitri (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara).....	332
Nilai-Nilai Demokrasi dalam Sastra Wolio Rifai Nur (Universitas Haluoleo)	338

Bahasa Cia-cia dalam Peradaban di Lingkungannya La Ode Alirman (Tokoh Masyarakat Buton)	343
Makna Superioritas Tokoh Adik dalam Cerita Rakyat Moronene Heksa Biopsi P.H. (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)	350
Kognat Bahasa Wolio-Jawa Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka (Pusat Bahasa)	354
Relasi Bahasa Laiyolo dan Selayar di Pulau Selayar Sulawesi Selatan dengan Wolio di Sulawesi Tenggara (Kajian Lingustik Historis Komparatif) Rahmawati (Universitas Gadjah Mada)	361
Pemertahanan dan Pergeseran Bahasa Ibu di Poleang Kabupaten Bombana: Suatu Pengamatan Awal Asri (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)	367
Fenomena Sastracyber : Suatu Upaya Pembelajaran Sastra secara Independen Hasnarianti (Universitas Muhammadiyah Makassar)	371
Gaya Bahasa dalam Cerita Rakyat Tolaki: Upaya Menggali Potensi Lokal Sebagai Pemer kaya Budaya Bangsa Herianah (Balai Bahasa Ujung Pandang)	376
Peranan Sastra dalam Pemertahanan Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Pemer kukuh Identitas dan Ketahanan Bangsa dalam Era Globalisasi Rosida Tiurma Manurung (U.K. Maranatha Bandung)	383
Modalitas dalam Ungkapan Tradisional Muna: Analisis Wacana Kritis Ramlah Mappau (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)	387
Nilai-Nilai Sastra Lisan <i>Kabhanci</i> Cia-cia dalam Membangun Kebudayaan Masyarakat di Era Globalisasi La Jarubi (Guru di Kota Baubau) dan Edhy Rustan (Dosen STAIN Palopo)	392
Strategi Pemertahanan Bahasa dan Sastra Daerah di Era Globalisasi Muh. Alamsah (Universitas Muhammadiyah Kendari)	401
Komunikasi Lisan dalam <i>Kinoho Sara</i> : Puisi Tolaki Zakiah M. Husba (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)	406
Budaya yang Tercermin/Terungkap dalam Kata dan Kata yang Mencerminkan Budaya: Deskripsi Mengenai Budaya dan Bahasa Jawa Tri Saptarini (Balai Bahasa Bandung)	412
Upaya Pelestarian Dan Pemertahanan Bahasa Di Daerah Pluralis La Ode Mane Mbeu (Kepala SMA Negeri 1 Konda, Konawe Selatan)	415
Tema Ketidakadilan Gender dalam Cerita Rakyat Muna "Wa Ode Ginunduri" dan Cerita Rakyat Bali "Tuung Kuning" (Kajian Sastra Bandingan) Rahmawati (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)	419
Kondisi Bahasa Daerah Sebagai Aset Budaya di Era Globalisasi (Studi Bahasa Daerah Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan) Syamsul Bahri (Balai Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar)	426
Sistem Afiksasi Nomina dalam Bahasa Muna Dialek Mawasangka Aji Prasetyo (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)	431
Variasi Penggunaan Majas Perbandingan dalam Antologi Puisi <i>Baubau Seribu Bulan</i> Mulawati (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)	438

SAMBUTAN
KEPALA PUSAT BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PADA PEMBUKAAN KONGRES BAHASA-BAHASA DAERAH
SULAWESI TENGGARA

Baubau, 18 Juli 2010

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wb.

Yth. Gubernur Sulawesi Tenggara
Yth. Wali Kota Baubau dan bupati/wali kota se-Sultra
Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sultra
Yth. Direktur Pengembangan Pasar Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata R.I.
Yth. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan R.I.
Yth. Para Rektor dan Direktur Perguruan Tinggi se-Sultra
Yth. Para muspida provinsi, kabupaten/ kota se-Sultra;
Yth. Para SKPD provinsi, kabupaten/ kota se-Sultra
Yth. Para narasumber Kongres Bahasa-Bahasa Daerah dan peserta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
Yth tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pendidikan, dan tokoh pemuda;
Yang saya banggakan masyarakat Kota Baubau, peserta Festival Perairan Pulau Makassar dan peserta Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah;

Pada kesempatan yang amat terhormat ini marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah swt. atas karunia dan rahmat-Nya kita berada di tempat ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti upacara pembukaan Festival Perairan Pulau Makassar dan Kongres Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2010. Sesuai tema Festival III tahun ini yaitu: “menetapkan Baubau sebagai tujuan *eco-culture tourism* di kawasan timur Indonesia” mengandung makna dan manfaat yang dalam bagi daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Baubau. Berdasarkan tema tersebut kita dapat melihat arah pengembangan wisata Baubau sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memperkenalkan budaya daerah yang didasarkan atas keunikan budaya lokal dan keanekaragaman hayati. Keunikan budaya lokal ini tentunya dapat ditemui salah satunya karena keberadaan bahasa-bahasa daerah yang menjadi aset bangsa dan karakteristik daerah. Bahasa sebagai seperangkat simbol yang bukan hanya bagian dari budaya, tetapi bahasa menjadi instrumen utama untuk mempelajari budaya.

Oleh karena itu, Kongres Bahasa-Bahasa Daerah ini memiliki makna penting di tengah-tengah kita memasuki tatanan kehidupan era globalisasi. Dalam perjalanan sejarah bangsa, bahasa memainkan peran penting dalam menjembatani generasi masa lalu dan masa kini, merekam sejarah perkembangan tata kehidupan, dan mencerdaskan kehidupan umat manusia.

Di Indonesia, ada sekitar 746 bahasa daerah dan 9 di antaranya ada di Sulawesi Tenggara. Masih ada beberapa bahasa di Sulawesi Tenggara, khususnya di Baubau, yang perlu pengkajian yang lebih teliti. Untuk itu, ke depan, sebagaimana hasil pertemuan dengan Wali Kota Baubau dengan Pusat Bahasa akan membentuk moratorium bahasa-bahasa daerah Sulawesi Tenggara di Baubau. Tidak hanya pergaulan antarteman, bahkan dalam keluarga pun bahasa daerah bukan lagi hal yang mendasar sebagai alat komunikasi, padahal bahasa daerah sebagai salah satu sarana mencerdaskan bangsa dengan muatan kearifan lokal.

Bahasa daerah memiliki fungsi sebagai alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, sarana pembentukan kepribadian anak bangsa, lambang identitas dan kebanggaan daerah, sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, serta pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia. Dalam kenyataannya, bahasa daerah saling memengaruhi dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Penggunaan bahasa daerah diwarnai oleh bahasa Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan modern. Kosakata bahasa daerah juga diwarnai oleh kosakata bahasa asing melalui bahasa Indonesia.

Berbagai kenyataan tersebut memberikan gambaran bahwa permasalahan kebahasaan dan kesastraan menyangkut masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu dilakukan penegasan dan pemantapan kembali kedudukan dan fungsi bahasa daerah dalam kehidupan masyarakat pendukungnya pada tatanan kehidupan di era globalisasi ini.

Ranah penggunaan bahasa daerah meliputi berbagai sendi kehidupan mulai dari bahasa sehari-hari di lingkungan keluarga, upacara-upacara adat, seni pertunjukan, sastra, bahkan bahasa dalam pelayanan administrasi dan kedinasan pada situasi dan tempat tertentu. Pada ranah pendidikan, bahasa daerah digunakan

sebagai bahasa pengantar. Namun, dalam perkembangan di era globalisasi, terutama di kalangan generasi muda, bahasa daerah mulai ditinggalkan. Tidak hanya dalam pergaulan antarteman, dalam lingkungan keluarga pun mereka menggunakan bahasa Indonesia. Untuk itulah, bahasa daerah perlu terus dikembangkan penggunaannya dan dilestarikan, terutama di kalangan generasi muda melalui berbagai cara. Selain melalui lingkungan keluarga, pelestarian itu dilakukan melalui sistem pendidikan formal. Oleh karena itu, penelitian bahasa daerah dalam berbagai ranah penggunaannya, termasuk telaah kesejarahannya, perlu terus dilakukan untuk memperoleh landasan dan dasar hukum yang kuat dalam menyusun perencanaan bahasa daerah saat ini dan di masa yang akan datang. Untuk itu, Kongres ini saya harapkan dapat merumuskan kebijakan bahasa daerah secara komprehensif dan saya ingin meminjam slogan yang ada bahwa kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan di Baubau di mana lagi.

Saya selaku pimpinan Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional R.I. menyampaikan terima kasih atas kerja sama Pemerintah Kota Baubau dan Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, serta dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelenggaraan Kongres Bahasa-Bahasa Daerah ini. Demikian juga kepada seluruh pemakalah dan peserta serta panitia Kongres, dan selamat berkongres. Terima kasih, wassalamu alaikum wr. wb.

Baubau, 18 Juli 2010

a.n. Kepala Pusat Bahasa
Dra. Yeyen Maryani, M.Hum.
(Koordinator Intern Pusat Bahasa)

SAMBUTAN
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PADA PEMBUKAAN KONGRES BAHASA-BAHASA DAERAH
SULAWESI TENGGARA

Baubau, 18 Juli 2010

Syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah swt. atas perkenan-Nya Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara dapat dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Baubau.

Kami ucapkan selamat datang di Provinsi Sulawesi Tenggara kepada para pemakalah, peserta, baik dari dalam maupun luar negeri, panitia, dan seluruh undangan. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan petunjuk, hidayah, dan lindungan-Nya kepada kita semua.

Saya, atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Kota Baubau dan Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai penyelenggara kegiatan penting ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan seperti ini karena berorientasi pada pengembangan potensi budaya daerah.

Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi di wilayah Indonesia bagian Timur yang terdiri atas jazirah dan kepulauan dengan potensi sumber daya yang melimpah, baik alam, manusia, dan budayanya. Pemerintah telah dan akan terus memaksimalkan pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya yang ada melalui upaya yang konkrit, sistematis, dan terfokus demi peningkatan dan percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selain kekayaan tersebut, Provinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki kekayaan budaya yang berlimpah karena didiami oleh berbagai suku dan etnis, beragam jenis bahasa daerah, dan beraneka tradisi, serta kerajinan khas daerah Sulawesi Tenggara. Dengan dukungan budaya yang kaya tersebut, Provinsi Sulawesi Tenggara dapat memanfaatkan dan memberdayakannya untuk tujuan pembangunan ekonomi rakyat. Budaya dapat dijadikan komoditas yang memiliki nilai ekonomi, khususnya dalam kaitannya dengan pariwisata. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Provinsi Sulawesi Tenggara 2008—2013, yaitu pemantapan pembangunan budaya daerah, yang dimaksudkan untuk mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan, mengembangkan dan memperkuat citra dan identitas daerah, serta mendorong perkembangan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada pengembangan potensi budaya daerah.

Berbicara mengenai budaya berarti di dalamnya juga termasuk bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Keanekaragaman bahasa menjadi daya tarik bagi para peneliti dan peminat bahasa, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, pemerintah juga telah mengupayakan suatu langkah penting dalam upaya menjaga, memelihara, dan melestarikan bahasa daerah di Sulawesi Tenggara agar tidak berada dalam posisi/kategori hampir punah. Hal ini diwujudkan dalam materi muatan lokal (mulok) pengajaran bahasa daerah di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan bahasa yang dituturkan oleh masyarakatnya. Hal ini, tentunya, sejalan dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam UUD 1945, Pasal 32 ayat 2, yaitu "negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional." Selanjutnya, kewenangan bagi daerah untuk mengembangkan bahasa negara dan melestarikan bahasa daerah diatur dalam Permendagri No. 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.

Berdasarkan landasan hukum tersebut menjadi patron bagi pemerintah daerah untuk melakukan pelestarian, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan budaya nasional. Bahasa daerah, khususnya sastra daerah, juga mengandung banyak nilai kearifan lokal yang dijadikan tuntunan dan pegangan oleh masyarakat penuturnya dalam menjalani kehidupan sosial. Selain itu, bahasa daerah yang telah diangkat dan diteruskan sebagai kebudayaan nasional memiliki konsep-konsep yang tidak dimiliki oleh kebudayaan Barat atau kebudayaan maju lain. Inilah yang menjadi kekuatan kita dalam menjalani persaingan budaya di era global ini. Jadi, kita harus bangga dengan keunggulan dan kekuatan kita ini dan bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan dan peneliti luar negeri, baik sebagai objek wisata maupun objek kajian ilmiah.

Salah satu bentuk nyata kepedulian dan keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap pengembangan dan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia dan daerah di masyarakat adalah berhasilnya Provinsi Sulawesi Tenggara meraih predikat **Adibahasa**, yaitu provinsi pengguna bahasa Indonesia terbaik penghargaan ini merupakan kebanggaan kita bersama, termasuk seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, dan untuk penghargaan lima tahun ke depan menjadi kewajiban kita untuk mempertahankannya.

Melalui kesempatan yang megah dan berbahagia ini sekali lagi saya ingin menyampaikan "Selamat Datang di Provinsi Sulawesi Tenggara". Selamat berkongres dan selamat menikmati suguhan budaya dan panorama alam di Bumi Anoa. Tidak lupa juga dukungan semua pihak senantiasa kami harapkan demi

suksesnya rangkaian kegiatan ini. Kebesaran dan kejayaan nusantara yang menjadi kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah cita-cita yang harus terus dijaga yang mejadi pendorong semangat dan tekad untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan yang kokoh. Semoga penyelenggaraan rangkaian kegiatan ini memberi manfaat bagi kita semua dan senantiasa mendapat rida Allah swt. Amin.

Kendari, Juli 2010

H. NUR ALAM, S.E.

LAPORAN PELAKSANAAN KONGRES INTERNASIONAL BAHASA-BAHASA DAERAH SULAWESI TENGGARA 2010

Baubau, 18—20 Juli 2010

1. Latar Belakang

Bahasa daerah yang hidup dan berkembang di Indonesia mencapai 741 bahasa. Sebagian kecil bahasa daerah tersebut berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah lebih dari 15 bahasa, termasuk bahasa daerah pendatang.

Keberagaman bahasa daerah yang ditopang oleh keberagaman etnis dan tradisi menandakan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tenggara. Keberagaman bahasa ini perlu dipelihara dan dilestarikan sebagai identitas dan jati diri bangsa dan daerah.

Bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan yang hidup dan berkembang senantiasa akan mengalami perubahan. Perubahan itu sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap bahasa itu. Pada era globalisasi ini, ada kekhawatiran dari para ahli, peneliti, pemerhati bahasa, dan guru/dosen bahasa bahwa banyak bahasa daerah yang akan mengalami kepunahan atau terancam punah dalam waktu yang relatif cepat. Kekhawatiran tersebut patut mendapat perhatian karena hilangnya satu bahasa daerah mengindikasikan hilangnya satu kebudayaan dan peradaban di dunia ini.

Adanya pendapat bahwa bahasa daerah rawan punah, termasuk bahasa-bahasa daerah Sulawesi Tenggara, merupakan suatu realitas yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Permasalahan tersebut terjadi karena perkembangan suatu wilayah/daerah, sikap penutur bahasa daerah yang kurang positif terhadap bahasa daerahnya, sikap penutur bahasa daerah yang relatif kecil jumlahnya sehingga memandang dirinya sebagai kelompok minoritas yang kurang berprestise, lingkungan sosial yang didiami oleh berbagai etnis, adanya pernikahan campur (beda suku), dan adanya anggapan bahasa daerah kurang memiliki kegunaan praktis.

Pada umumnya, bahasa daerah yang jumlah penuturnya sedikit (rawan punah) cenderung merupakan bahasa yang tidak mempunyai tulisan. Dengan demikian, tradisi lisan yang berkembang pada bahasa-bahasa minoritas ini jika tidak segera didokumentasikan maka akan sangat sulit untuk mempertahankan eksistensinya.

Berbagai permasalahan tersebut, tentu saja, sangat tidak diinginkan terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut menjadi tanggung jawab kita bersama, baik linguist, peneliti bahasa, dosen/guru bahasa, pencinta bahasa, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Pusat yang terkait, dan kalangan masyarakat ilmiah internasional peminat bahasa daerah Sulawesi Tenggara. Tanggung jawab dan kepedulian itu dapat ditunjukkan dalam berbagai wujud yang berujung pada pelestarian, pengembangan, pembinaan, dan pemberdayaan bahasa-bahasa daerah Sulawesi Tenggara.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Baubau bekerja sama dengan Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara akan menghimpun pemikiran dari berbagai kalangan dalam upaya pelestarian, pengembangan, pembinaan, dan pemberdayaan bahasa-bahasa daerah Sulawesi Tenggara dalam bentuk “Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara” yang menghadirkan linguist, guru/dosen bahasa, para penentu kebijakan dari instansi/organisasi yang terkait lingkup Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara, dan pencinta/peminat bahasa-bahasa daerah Sulawesi Tenggara yang berasal dari dalam dan luar negeri.

Kongres internasional ini juga akan dirangkaikan dengan kegiatan festival budaya yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan Juli oleh Pemerintah Kota Baubau, yaitu Festival Pulau Makassar (Puma), sebagai pendukung penyelenggaraan kongres. Melalui rangkaian kegiatan ini, peserta kongres akan disuguhkan festival budaya yang penuh dengan kegiatan dan atraksi seni dan budaya lokal, termasuk atraksi seni tradisional daerah Sulawesi Tenggara.

2. Dasar/Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36 tentang Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia;
2. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32 Ayat 2 tentang Negara Menghormati dan Memelihara Bahasa Daerah Sebagai Kekayaan Budaya Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Otonom, Bab II, Pasal 2, Nomor 11 (Bidang Pendidikan dan Kebudayaan), dalam huruf j tentang Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Visi, Misi, Program Kerja, dan Rencana Strategis Pembangunan Kota Baubau;

8. Visitasi dan Sosialisasi Program Aksi Bahasa (Rabah) 2010—2012 dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, 5 November 2009 di ruang rapat Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Hasil Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah Provinsi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, 23—24 November 2009 di aula Merah Putih, Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. Tema

Tema Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara adalah Bahasa Daerah Sebagai Sarana Pencerdasan dan Pengembangan Potensi Daerah Sulawesi Tenggara pada Era Globalisasi. Subtema dan topik bahasan yang dalam Kongres tersebut sebagai berikut.

a. Bahasa Daerah dalam Komunikasi Sehari-Hari

Topiknya antara lain:

- a. Peran bahasa daerah dalam pengembangan potensi dan kebudayaan daerah
- b. Nilai etika dan kesantunan dalam berbahasa daerah
- c. Bahasa daerah sebagai sarana untuk mengasah kecerdasan dan kepekaan sosial
- d. Bahasa daerah dalam ranah administrasi dan pelayanan publik
- e. Bahasa daerah dalam ranah aktivitas sosial dan ekonomi
- f. Pembangunan karakter bangsa melalui bahasa daerah

b. Sastra Daerah dan Nilai-Nilai Budaya.

Topiknya antara lain:

- a. Pengungkapan dan pemantapan jati diri dan kearifan lokal dalam kerangka sastra daerah
- b. Penggalian potensi lokal dalam sastra daerah sebagai pemer kaya budaya nasional
- c. Identitas budaya dalam sastra daerah di era globalisasi
- d. Pengungkapan dan penerapan nilai-nilai luhur dalam sastra daerah
- e. Pengembangan dan pemberdayaan komunitas/sanggar sastra daerah di masa kini.

c. Pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah

Topiknya antara lain:

- a. Kompetensi pengajar bahasa dan sastra daerah
- b. Revitalisasi pembelajaran bahasa dan sastra daerah
- c. Bahan ajar bahasa dan sastra daerah dalam kurikulum dan perbukuan
- d. Model pembelajaran bahasa dan sastra daerah
- e. Pembelajaran bahasa dan sastra daerah pada pendidikan anak usia dini dan generasi muda
- f. Pelestarian bahasa dan sastra daerah melalui pendidikan informal

d. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah

Topiknya antara lain:

- a. Strategi pemertahanan bahasa dan sastra daerah di era globalisasi
- a. Pembangunan jati diri etnis dan bangsa generasi muda melalui bahasa dan sastra daerah.
- b. Pelaksanaan bahasa-bahasa daerah dalam rangka pelestarian dan pembinaan bahasa daerah
- c. Peran media massa dalam pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah
- d. Pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah melalui teknologi komunikasi dan infomrasi
- e. Pengenalan dan pelestarian budaya melalui bahasa dan sastra daerah

4. Tujuan

Kongres tersebut dimaksudkan untuk mendiskusikan dan merumuskan berbagai persoalan yang menyangkut bahasa dan sastra daerah Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, hasil tersebut menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk melestarikan, mengembangkan, membina, dan memberdayakan bahasa dan sastra daerah Sulawesi Tenggara di era globalisasi.

5. Pemakalah

Pemakalah yang tampil pada Kongres Internasional Bahasa-bahasa Daerah Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut.

- a. Pemakalah utama, yaitu: (1) Menteri Pendidikan Nasional yang diwakili oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas, (2) Kepala Pusat Bahasa yang diwakili oleh Koordinator Intern Pusat Bahasa, (3) Wali Kota Baubau, (4) Bupati Buton, Bupati Bombana, (5) Bupati Buton Utara diwakili oleh Wakil Bupati, (6) Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sulawesi Tenggara.
- b. Pemakalah luar negeri, yaitu (7) Ho-Young Lee (Seoul National University, Korea), (8) Tai Hyun Chun (Hankuk University of Foreign Studies, Korea), (9) Hyosung Hwang (Seoul National University, Korea), (10) Masao Yamaguchi (Universitas Setsunan, Osaka, Jepang), (11) Timothy Friberg (Amerika Serikat), (12) Barbara Friberg (Amerika Serikat), (13) T. David Andersen (*Summer Institute of Linguistics*,

Australia), (14) Hirobumi Sato (Brunei Darussalam), (15) Suryadi (Universitas Leiden, Belanda), (16) Cho Tae Young (Korea).

c. Pemakalah dalam negeri, adalah:

- (17) Prof. Dr. Multamia R.M.T. Lauder (Departemen Linguistik, FIB, Universitas Indonesia)
- (18) Prof. Dr. La Ode Sidu Marafad, M.S. (Universitas Haluoleo)
- (19) Prof. Dr. Abdul Hadi W. M. (Universitas Paramadina)
- (20) Dr. Mashadi Said, Dr. Farid Thalib, dan A. Banri, E. (Universitas Gunadarma)
- (21) Prof. Dr. Hanna (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)
- (22) Prof. Dr. Mahsun (Universitas Negeri Mataram)
- (23) Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum. (Universitas Indonesia)
- (24) Dr. Farid Thalib dan Dr. Mashadi Said (Universitas Gunadarma, Jakarta)
- (25) Dr. Inyo Yos Fernandez (Universitas Gadjah Mada)
- (26) Prof. Dr. Lukman (Universitas Hasanuddin)
- (27) Prof. Dr. Amrin Saragih (Balai Bahasa Medan)
- (28) Prof. Dr. Hamzah Machmoed (Universitas Hasanuddin)
- (29) Prof. Dr. Anang Santoso (Universitas Negeri Malang)
- (30) Dr. Lalu Abd. Khalik (Universitas 45 Makassar)
- (31) Drs. Zalili Sailan, M.Pd. (Universitas Negeri Jakarta)
- (32) Prof. Dr. Muhammad Amin Rasyid (Universitas Negeri Makassar)
- (33) Dr. Ikhwan M. Said (Universitas Hasanuddin)
- (34) Drs. B. Trisman, M.Hum. (Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan)
- (35) Uniawati, S.Pd., M.Hum. (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)
- (36) Dr. Nurhayati (Universitas Hasanuddin)
- (37) Artanti (Pusat Bahasa)
- (38) Siti Fatinah, S.Pd (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah)
- (39) Edhy Rustan (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo)
- (40) Laila Kurniawaty, S.Pd., M.A. (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)
- (41) Drs. Sahlan, M.Pd. (Universitas Haluoleo)
- (42) Syaifuddin, S.Pd. (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)
- (43) Dr. La Niampe (Universitas Haluoleo, Kendari)
- (44) Asrif, S.Pd., M.Hum. (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)
- (45) Dr. Mantasiah R. (Universitas Negeri Makassar)
- (46) Dr. Hilaluddin Hanafi, M.Pd. (Universitas Haluoleo, Kendari)
- (47) Firman A.D., S.S. (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)
- (48) Anton Ferdinan, S.Pd. (Forum Ilmiah Guru Kabupaten Bombana)
- (49) Sumiman Udu, S.Pd., M.Hum. (Universitas Haluoleo)
- (50) Sandra Safitri, S.S., M.A. (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)
- (51) Dr. Rifai Nur (Universitas Haluoleo)
- (52) Drs. La Ode Alirman (Tokoh Masyarakat Buton)
- (53) Heksa Biopsi P.H., S.S. (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)
- (54) Drs. Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka, M.Hum. (Pusat Bahasa)
- (55) Rahmawati (Universitas Gadjah Mada)
- (56) Asri, S.S., M.Hum. (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)
- (57) Hasanrianti (Universitas Muhammadiyah Makassar)
- (58) Herianah (Balai Bahasa Ujung Pandang)
- (59) Rosida Tiurma Manurung (U.K. Maranatha Bandung)
- (60) Ramlah Mappau, S.S., M.Hum. (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)
- (61) La Jarubi (Guru di Kota Baubau) dan Edhy Rustan (Dosen STAIN Palopo)
- (62) Muh. Alamsah (Universitas Muhammadiyah Kendari)
- (63) Zakiyah M. Husba, S.S. (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)
- (64) Dra. Tri Saptarini (Balai Bahasa Bandung)
- (65) La Ode Mane Mbeu (Kepala SMA Negeri 1 Konda, Konawe Selatan)
- (66) Rahmawati, S.S. (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)
- (67) Syamsul Bahri (Balai Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar)
- (68) Aji Prasetyo, S.S. (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)
- (69) Mulawati, S.Pd. (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)

6. Tim Perumus Kongres

Tim perumus dalam Kongres Bahasa-bahasa Daerah Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2010 adalah:

Prof. Dr. Hanna, M.Pd. (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)
Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Universitas Atma Jaya, Jakarta)
Prof. Dr. Lukman (Universitas Hasanuddin)
Drs. H. Hasidin Sadif, M.Sc. (Unsur Legislatif)
Drs. Zalili Sailan, M.Pd. (Peserta Kongres)

7. Peserta Kongres

Peserta kongres berjumlah lebih kurang 500 orang, terdiri atas:

- a. pakar, peneliti, dan pemerhati bahasa daerah, baik sebagai peserta maupun sebagai pemakalah;
- b. guru/dosen, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat umum;
- c. wakil-wakil instansi dan lembaga-lembaga pendidikan dan kebudayaan, budayawan, dan wartawan;
- d. pemakalah dan peserta dari luar negeri, yaitu dari Korea, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, dan Belanda.

8. Panitia Penyelenggara

Kongres ini terlaksana atas kerja sama Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kota Baubau dengan melibatkan beberapa unsur budayawan dan sastrawan. Adapun susunan panitia penyelenggara berdasarkan Surat Tugas Wali Kota Baubau adalah sebagai berikut.

Pelindung dan Penasihat : H. Nur Alam, S.E. (Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara)
Penanggung Jawab : Drs. Mz. Amirul Tamim, M.Si. (Wali Kota Baubau)
Pengarah : Suhufan (Sekda Kota Baubau)
Penanggung Jawab Teknis : Prof. Dr. Hanna, M.Pd. (Kepala Kantor Bahasa Prov. Sultra)
Ketua : La Ode Muh. Arif Rais, S.E., M.Si. (Asisten II Sekda Kota Baubau)
Wakil Ketua I : Drs. Muh. Djudul, M.Si. (Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kota Baubau)
Wakil Ketua II : H. Asri Raa, S.H. (Kadis Dikmudora Kota Baubau)
Sekretaris : Drs. Ali Arham, M.M.P.
Wakil Sekretaris : Juamdan Z.Z., S.S., M.Hum.
Pembantu Umum : Para Kepala Badan, Dinas, Kantor, Kabag Setda, dan Camat se-Kota Baubau

Seksi-Seksi

Seksi Kesekretariatan

Koordinator : Drs. Muh. Yunus, M.Si. (Dinas Budpar)
Wakil : La Ode Yusri, S.Pd. (Kantor Bahasa)
Anggota : A. Herlina Nur, S.S. (Kantor Bahasa)
Firman A.D., S.S. (Kantor Bahasa)
Uniawati, S.Pd., M.Hum. (Kantor Bahasa)
Mulawati, S.Pd. (Kantor Bahasa)
Heksa Biopsi, S.S. (Kantor Bahasa)
Syaiyuddin, S.Pd. (Kantor Bahasa)

Seksi Perlengkapan/Dekorasi

Koordinator : Drs. Mz. Tamsir Tamim, M.Si. (Dinas Kebersihan)
Wakil : Drs. Muh. Yunus, M.Si. (Dinas Budpar)
Anggota : Yansur, S.Pd. (Dinas Dikmudora)
Drs. Jaeruddin (Depag Kota Baubau)
Surasa, S.H. (Lapas Baubau)
Staf Dinas Budpar Kota Baubau
Staf Kantor Bahasa Prov. Sultra

Seksi Transportasi/Akomodasi/Penjemputan

Koordinator : Drs. Saifuddin Aziz (Dinas Pertambangan)
Wakil : La Ode Amran, S.H. (Dinas Perhubungan)
Anggota : Rahmat, S.Pd. (Dinas Budpar)
Abdul Karim, S.Pd. (Camat Murhum)
Abdul Salam (Lurah Melai)
Drs. Ahmad Baru (Lurah Baadia)

Seksi Acara

Koordinator : Drs. Sadarman, M.Si. (Badan Infokom dan P.D.)
Wakil : Wd. Ernawati Asman, S.Pd. (Bappeda dan P.M.)
Anggota : Aji Prasetyo, S.S. (Kantor Bahasa)
Ismail, S.E. (Bagian Umum dan Protokoler)
Israwati Zani (Dinas Budpar)

Seksi Pendamping Tamu

Koordinator : Rusdy, S.Pd., M.Pd. (Guru SMAN 1 Baubau)
Wakil : Muh. Rasyid, S.Pd., M.Pd. (Guru SMAN 2 Baubau)
Anggota : Kasman, S.Pd., M.Pd. (Guru SMAN 2 Baubau)
Yuni Satriani, S.Pd., M.Pd. (Guru SMKN 2 Baubau)
Habirun, S.Pd. (Guru SMPN Gonda Baru)
Jafar, S.Pd. (Guru SMKN 2 Baubau)
Zahaba, S.Pd., M.Pd. (Guru SMPN 1 Baubau)
Drs. Amran, M.Pd. (Guru SMAN 4 Baubau)
La Hidi, S.Pd., M.Pd. (Guru SMAN 1 Baubau)
La Emba, S.Pd. (Guru SMAN 1 Baubau)
Ariful Tajal, S.Pd. (Guru SMAN 6 Baubau)
Pemandu/Pendamping Wisata

Seksi Materi Sidang dan Kongres

Koordinator : Drs. Sudjiton, M.M. (Bappeda dan P.M. Kota Baubau)
Wakil : Dr. Rasman Manaf (Bappeda dan P.M. Kota Baubau)
Anggota : Moh. Abduh, S.T.P., M.Si. (Bappeda dan P.M. Baubau)
Drs. L.M. Budi Wahidin, M.Pd. (Dinas Dikmudora)
Drs. Muh. Djusni (Dinas Dikmudora)
Neil Armstrong, S.S., M.Hum. (Dinas Budpar)
Lia Amalia Muhlisi, S.T. (Bappeda dan P.M.)
Mahmudin Mulyadi, S.Pi. (Dinas Kelautan Perikanan)

Seksi Konsumsi

Koordinator : Tim Penggerak PKK Kota Baubau
Anggota : Staf Dinas Budpar Kota Baubau

Seksi Kunjungan Wisata dan Industri

Koordinator : Feto Daud, S.E., M.Si. (Dinas Perindagkop Baubau)
Wakil : Sadidi, S.Sos., M.Si. (Dinas Budpar Kota Baubau)
Anggota : La Ode Hafilu (Dinas Budpar Kota Baubau)
Rahmat Kurniawan, S.S. (Dinas Budpar Kota Baubau)

Seksi Kesehatan,

Koordinator : dr. H. Sudil Baenu, M.M., M.Kes. (Dinkes Kota Baubau)
Wakil : dr. Aminuddin Aumane, Sp.A. (RSUD Kota Baubau)
Anggota : Tim Media RSUD Kota Baubau

Seksi Keamanan

Koordinator : Drs. Amiruddin, M.Si. (Badan Kesbang Linmas Baubau)
Wakil : Drs. Hasan Ginca, S.E., M.Si. (Satpol PP Kota Baubau)
Anggota : Anggota Satpol PP Kota Baubau

9. Waktu dan Tempat

Kongres ini berlangsung selama tiga hari, yaitu 18 sampai dengan 20 Juli 2010, di aula Kantor Wali Kota Baubau, Palagimata, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, H. Nur Alam, S.E. di Pelataran Bukit Wantiro, Baubau. Adapun jadwal pelaksanaan sebagai berikut.

Jadwal Umum
Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara
Baubau, 18 - 20 Juli 2010

Hari/Tanggal	Waktu	Kegiatan	Keterangan
Sabtu, 17 Juli 2010	19.00 - selesai	Acara Makan Malam Bersama Gubernur Sulawesi Tenggara & Wali Kota Baubau di Restoran Lakeba	Pukul 18.30 dijemput masing-masing di hotel/penginapan
Minggu, 18 Juli 2010	08.00 - selesai	Pembukaan Kongres Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara & Festival Perairan Pulau Makassar III oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Pelataran Bukit Wantiro dengan Susunan Acara:	Pukul 07.30 dijemput masing-masing di hotel/penginapan
		1. Ucapan Selamat Datang oleh Wali Kota	
		2. Sambutan Kepala Pusat Bahasa Kemendiknas	
		3. Sambutan Direktur Pemasaran Pariwisata	
		4. Sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara Sekaligus Membuka Acara Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah & Festival Pulau Makassar	
	5. Pembacaan Doa		
	13.30 - selesai	Menuju Pesta Adat di Sorowolio	Wajib : Laki-laki berpakaian rapi memakai songkok & perempuan wajib berkerudung
	19.00 - selesai	Malam Kesenian di Pantai Kamali	Acara bebas, di luar tanggungan panitia
Senin, 19 Juli 2010	07.00 - 07.30	Registerasi Peserta	Aula Palagimata
	07.30 - 17.30	Sidang Pleno: Jadwal dapat dilihat pada jadwal sidang pleno	Pukul 07.00 dijemput masing-masing di hotel/penginapan menuju tempat kongres
	19.00 - selesai	Malam Kesenian di Pantai Kamali	Acara bebas, di luar tanggungan panitia
Selasa, 20 Juli 2010	07.30 - 13.00	Lanjutan Sidang Pleno	Pukul 07.00 dijemput masing-masing di hotel/penginapan menuju tempat kongres
	13.00 - 16.00	Sidang-sidang Komisi (dapat dilihat pada jadwal sidang komisi)	
	16.00 - 17.00	Perumusan Hasil Kongres	
	19.00 - selesai	Penutupan di Rumah Jabatan Wali Kota Baubau	Pukul 19.00 dijemput masing-masing di hotel/penginapan menuju Rujab Wali Kota

**Jadwal Pemakalah, Pemandu, dan Pencatat
Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2010
Baubau, 18 - 20 Juli 2010**

WAKTU	PEMATERI	MATERI	PEMANDU	PENCATAT	TEMPAT	
07.30 - 08.30	Registerasi Peserta					
Sidang Pleno I						
08.30 - 09.30	Kementerian Pendidikan Nasional (Kabalitbang)	"Bahasa Daerah Sebagai Sarana Pencerdasan Bangsa"	Drs. Sudjito, M. M.	Drs. L. M. Budi Wahidin M., M. Pd.	Aula Palagimata	
	Walikota Baubau	"Dealektika dan Kebijakan Keberakrasaan di Kota Baubau"				
Sidang Pleno II						
09.30 - 10.30	Prof. Dr. Multamia Lauder	"Kaitan Pemetaan bahasa dengan Potensi Bahasa Daerah"	Prof. Dr. Hamzah Machmoed	Asri, S.S., M. Hum.		
	Dr. La ode Ida	"Bahasa Daerah di Era Globalisasi"				
Sidang Pleno III						
10.30 - 12.30	Bupati Wakatobi	"Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pemertahanan dan Pelestarian Bahasa Wakatobi"	Prof. Dr. Mahsun	Sandra Safitri, S.S., M. A.		
	Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo	"Bahasa Daerah dan Pengembangan Kecerdasan"				
	Prof. Dr. La Ode Sidu Marafad	"Pembelajaran Bahasa daerah Muna dalam Konteks Muatan Lokal"				
	Kepala Pusat Bahasa	"Peranan Bahasa Daerah Sebagai Wahana Peningkatan Daya Apresiasi Budaya Daerah"				
12.30 - 13.00	Ishoma					
Sidang Pleno IV						
13.00 - 16.00	Prof. Dr. Abd. Hadi W. M.	"Filsafat Martabat Tujuh, Sejarah dan Pengaruhnya di Indonesia"	Prof. Dr. La Ode Sidu Marafad	Lia Amaliah Muhlisi, S. T.		
	Prof. Dr. Mashadi Said	"Peran Bahasa Daerah sebagai Sarana Pembangunan Berwawasan Kerakyatan dan Penawar Dampak Negatif Globalisasi"				
	Prof. Dr. Anang Santoso	"Pemberdayaan Bahasa Daerah Sebagai Alat Komunikasi Berbasis Kearifan Lokal"				
	Dr. Suryadi, M. Hum.	"Sistem-Sistem Tulisan di Indonesia"				
Sidang Pleno V						
16.00 - 17.30	Prof. Dr. Susanto Zuhdi	"Kebudayaan Buton: Suatu Penelusuran Sejarah dan Pelestariannya"	Drs. Zalili Saclan, M. Pd.	La Ode Yusri, S. Pd.		
	Prof. Dr. Lukman, M. S.	"Revitalisasi Peran Bahasa Ibu dalam Konteks Pergeseran dan Pemertahanan Bahasa"				
	Bupati Bombana	"Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pemertahanan dan Pelestarian Bahasa Moronene"				
	Bupati Buton Utara	"Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pemertahanan dan Pelestarian Bahasa Kufisusu"				

Senin, 19 Juli 2010

WAKTU	PEMATERI	MATERI	PEMANDU	PENCATAT	TEMPAT
07.30 - 09.00	Sidang Pleno VI				
	Bupati Buton	"Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pemertahanan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Daerah di Daerah Pluralis di Buton"	Dr. Muh. Rasman Manaf, S. P., M. Si.	Firman, A.D., S. S., M. Si.	
	Drs. Sutiman, M. Hum.	"Pelestarian dan Pemberdayaan Sastra Daerah"			
	Drs. H. Hasidin Sadik, M. Sc.	"Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Wolio"			
Prof. Dr. Ho Young Lee	"Pengaksaraan Bahasa Cia-Cia"				
09.00 - 11.00	Sidang Pleno VII				
	Prof. Dr. Hamzah Machmoed	"Qua Vadis Bahasa Minoritas"	Prof. Dr. Lukman, M.S.	Moh. Abduh, STP, M. Si.	
	Barbara Friberg, M. S., M. A.	"Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Daerah dalam Era Globalisasi"			
	T. David Anderson	"Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Moronene"			
Prof. Dr. Mahsun	"Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Daerah"				
11.00 - 12.30	Sidang Pleno VIII				
	Drs. Zalili Sailan, M. Pd.	"Perilaku Sintaksis Adjektiva Bahasa Muna Dialek Gu Mawasangka"	Drs. L. M. Budi Wahidin M., M. Pd.	Uniawati, S. Pd. M. Hum.	
	Dr. Hirobumi Sato	"Analisis Akustik Konsonan /h/ dalam Kata Terbitan Berimbuhan {-an} /-an/"			
	Prof. Dr. Hanna, M. Pd.	"Pengembangan Kecerdasan dan Integritas Berdasarkan Teori Neorologi"			
	Prof. Dr. Mohammad Amin Rasyid, M. A.	"Pendidikan dalam Kemajemukan Bahasa Daerah"			
Dr. Inyo Yos Fernandez	"Relasi Kekkerabatan Antarbahasa dalam Subkelompok Muna-Buton-Wakatobi, di Kepulauan Lepas Pantai Provinsi Sulawesi Tenggara: Kajian Linguistik Diakronis"				
12.30 - 13.00	Ishoma				
13.00 - 14.30	Sidang Pleno IX				
	Masao Yamaguchi	"Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara Dalam Kaitannya dengan Genealogi"	Prof. Dr. Hanna, M. Pd.	Uniawati, S. Pd. M. Hum.	
	Dr. Lalu Abdul Khalik, M.Hum.	"Melindungi Bahasa dan Identitas Lokal"			
Dr. Farid Thalib	"Penerapan kaidah Alogaritma Genetik dalam Pemulihan Bahasa Daerah dari Degradasi"				

Selasa, 20 Juli 2010

Aula Palagimata

Jadwal Pemateri, Pemandu, dan Pencatat
Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2010
Baubau, 18 - 20 Juli 2010

Sidang Komisi 1

WAKTU	PEMATERI	MATERI	PEMANDU	PENCATAT	TEMPAT	
Selasa, 20 Juli 2009	Dr. La Niampe	"Kedudukan dan Fungsi Bahasa Wolio pada Masa Pemerintahan Kesultanan Buton: Suatu kajian Berdasarkan Naskah-Naskah Buton"	Asrif, S. Pd. M. Hum.	Rahmawati, S.S.	RUANG A	
	Dr. M. Ikhwan Nur Said, M. Hum.	"Upaya Pelestarian Bahasa Daerah di Sultra Melalui Pelestarian Kajian Kekerabatan Antara Bangsa-Bangsa Buton, Muna, dan Tolaki"				
	Aji Prasetyo, S.S.	"Sistem Afiksasi Nomina dalam Bahasa Muna Dialek Mawasangka"				
	Dr. Nurhayati, M. Hum.	"Jejak Melayu (Indonesia) dalam Bahasa Muna"				
	Cho Tae Yung	"Perbedaan Sistem Ejaan Latin antara Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia dalam Pengaruh Tulisan Jawi"	Muh. Yunus	Laila Kurniawaty, S. Pd., M. A.	RUANG B	
	Firman A.D., S. S., M. Si.	"Perubahan Makna Pungutan Kata Bahasa Arab dalam Bahasa Wolio"				
	Siti Fatimah, S. Pd.	"Pemertahanan Bahasa Muna di Daerah Rantau Sulawesi Tengah"				
	13.00	Rosida Tiurma Manarung, M. Hum.	"Peranan Sastra dalam Pemertahanan Nilai-Nilai Budaya Lokal Sebagai Pemerkukuh Identitas dan Ketahanan bangsa"	Drs. Ali Arham M, M.P.	Mulawati, S. Pd.	RUANG C
	14.30	Dr. Rifai Nur, M. Hum.	"Nilai-Nilai Demokrasi dalam Sastra Wolio"			
	Zakiyah M. Husbah, S.S., M. Si.	"Komunikasi Lisan dalam Kinoho Sara: Puisi Lisan Tolaki"				
	La Ode Alirman, S.H.	"Bahasa Cia-Cia dalam Era Globalisasi"				
	Anton Ferdinan, S. Pd.	"Pelestarian Bahasa Moronene Sebagai Kekayaan Budaya Sulawesi Tenggara"	Moh. Abdul, STP., M. Si.	Neil Armstrong, S.S., M. Hum.	RUANG D	
	Ramlah Mappau, S. S., M. Hum.	"Modalitas dalam Ungkapan Tradisional Muna: Analisis Wacana Kritis"				
	Dr. Mantasiah Rifai	"Sintaksis bahasa Kodeoha"				
	Drs. B. Trisman, M.Hum.	"Kehadiran Cerita Bergambar Bersumber dari Cerita Rakyat Sulawesi Tenggara: Sebuah Harapan"	Drs. Muh. Djusni	Asri, S.S., M. Hum.	RUANG E	
	Heksa Biopsi P. H., S. S.	"Makna Superioritas Tokoh Adik dalam Cerita Rakyat Moronene"				
Uniwati, S. Pd. M. Hum.	"Larangan Inses dalam Mitos 'Koloimba': Menengok Jendela Budaya Masyarakat Tolaki"					
Syaifuddin, S.Pd.	"Buton, Feminisme, dan Wa Ode Wulan Ratna"					

Sidang Komisi 2

WAKTU	PEMATERI	MATERI	PEMANDU	PENCATAT	TEMPAT	
Selasa, 20 Juli 2009	Rahmawati, S.S.	"Tema Ketidakadilan Gender dalam Cerita Rakyat Muna "Wa Ode Ginunduri" dan Cerita Rakyat Bali "Tuung Kuning ": Kajian Sastra Bandingan"	Sry Satria Catur Wisnu Sasangka, M. Hum.	Syaifuddin, S. Pd.	RUANG A	
	Sumiman Udu, S.Pd., M.Hum.	"Tradisi Lisan Kabanti: Ruang Akulturasi Budaya Lokal dan Global dalam Masyarakat Buton"				
	Mulawati, S. Pd.	"Variasi Penggunaan Majas Perbandingan dalam Antologi Puisi Baubau"				
	Asrif, S. Pd., M. Hum.	"Seni Pertunjukan Kabanti: Soal Pewarisan Budaya dan Kebijakan Pemerintah"				
	14.30 - 16.00	La Ode Mane Mbeu, M. Pd.	"Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pemertahanan dan Pelestarian Bahasa-Bahasa Daerah di Daerah Pluralis di Kabupaten Konawe Selatan"	Syaifuddin Gani, S. Pd.	Aji Prasetyo, S.S.	RUANG B
		Dr. H. Hifaluddin Hanafi, M. Pd.	"Nilai Etika dan Kesantunan dalam Berbahasa"			
		Dra. Artanti, M. pd.	"Menggali Nilai-Nilai Budaya Melalui Kesantunan Berbahasa"			
		Edhy Rustan	"Pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah Berbasis Multikultural dalam Mewujudkan Pendidikan yang Berkarakter di Era Globalisasi "			
	Selasa, 20 Juli 2009	Sry Satria Catur Wisnu Sasangka, M. Hum.	"Kognat Wolio Jawa"	Neil Armstrong, S.S., M. Hum.	Mahmudin Mulyadi, S. Pi.	Ruang C
		Drs. Sahlan, M. Pd.	"Pemertahanan Bahasa Daerah dan Menggali Kearifan Lokal Melalui Pemberdayaan Bahasa dan sastra Daerah"			
Sandra Safitri, S. S., M. A.		"Pelestarian Bahasa Daerah Melalui Penelusuran Kekerabatan Bahasa dalam Wilayah Administratif yang Berbeda (tinjauan terhadap isolek Bonerate di Pantai Selatan Pulau Sulawesi)"				
Rahmawati, S.Pd.		"Relasi Bahasa Laiyolo dan Selayar di Pulau Selayar dengan Wolio di Sulawesi Tenggara"				
Selasa, 20 Juli 2009	Herianah, M. Hum.	"Gaya Bahasa dalam Cerita Rakyat Tolaki: Upaya Menggali Potensi Lokal sebagai Pemarkah Budaya Bangsa"	Ramlah Mappau, S.S., M. Hum.	Lia Amaliah Muhlisi, S.T.	RUANG D	
	Asri, S.S., M. Hum.	"Pergeseran & Pemertahanan Bahasa Ibu Di Tanah Poleang"				
	La Jarubi, S. Pd., M. Hum.	"Nilai-Nilai Budaya Sastra Lisan Kabanchi Cia-Cia"				
	Hasnarianti, S.Pd., M.Pd.	"Fenomena Pembelajaran Cyber: Suatu Upaya Pembelajaran Sastra Secara Independen"				
	14.30 - 16.00	Drs. Syamsul Bahri	"Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah Sebagai Aset Budaya"	Juamdan ZZ., S.S., M. Hum.	Zakiyah M. Hubbah, S.S., M. Si.	RUANG E
		Dra. Tri Saptarini	"Budaya yang Tercermin dalam Kata dan Kata yang Tercermin dalam Budaya"			
		Laila Kurniawaty, S. Pd., M.A.	"Binongko: Bahasa, Besi, dan Tukang Besi"			
		Muh. Alamsyah, S.Pd.	"Strategi Pemertahanan Bahasa dan Sastra Daerah di Era Globalisasi"			
16.00 - 17.00	PERUMUSAN HASIL KONGRES BAHASA-BAHASA DAERAH SULAWESI TENGGARA					

**Jadwal Acara Penutupan
Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara Tahun 2010
Baubau, 18 – 20 Juli 2010**

WAKTU	ACARA	TEMPAT
Selasa, 20 Juli 2010	Persiapan Penutupan	Rumah Jabatan Wali Kota Baubau
	19.00 - 19.15 Pewara	
	19.15 - 19.30 Laporan Ketua Panitia	
	19.30 - 19.45 Pembacaan Hasil Kongres	
	19.45 - 20.00 Sambutan Kepala Pusat Bahasa	
	20.00 - 20.15 Sepatah Kata Wali Kota Baubau sekaligus menutup Acara Kongres Internasional Bahasa-bahasa daerah Sulawesi Tenggara 2010	
	20.15 - 20.30 Doa	
	20.15 - selesai Istirahat/Hiburan	

10. Rumusan Hasil dan Rekomendasi Kogres

Rumusan Kongres Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara Mukadimah

Kongres Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara berlangsung mulai tanggal 18 sampai dengan 20 Juli 2010 bertempat di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kongres ini dilaksanakan dalam skala internasional yang dihadiri oleh pakar dari dalam dan luar negeri dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, H. Nur Alam, S.E.

Landasan yuridis kongres ini adalah: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XV, Pasal 32 dan pasal 36 beserta penjelasannya; 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah; 4) Politik Bahasa Nasional yang menggariskan kedudukan dan fungsi bahasa daerah sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang nilai sosial budaya, dan wahana untuk pembinaan, pengembangan, dan pelestarian nilai budaya; 5) Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 6) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Baubau dan Kebijakan Pemerintah Kota Baubau.

Kongres Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara di Baubau bertujuan untuk menghimpun gagasan, pikiran, dan pendapat pakar dan pemerhati bahasa daerah Sulawesi Tenggara guna dijadikan landasan perumusan kebijakan untuk revitalisasi, pemertahanan, pengembangan, dan pemberdayaan bahasa-bahasa daerah sebagai pembentuk dan pembangun karakter bangsa, penyusunan program pembakuan, penyusunan kurikulum muatan lokal, dan penyusunan buku teks bahasa daerah.

Rumusan Kongres

Kongres Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara dihadiri oleh 400 peserta dan 12 pemakalah dari luar negeri dan 72 pemakalah dari dalam negeri. Pemakalah yang hadir tersebut terdiri atas para ahli, peneliti bahasa dan sastra, dosen, guru, budayawan, tokoh adat, tokoh masyarakat, bupati/wali kota se-Sulawesi Tenggara, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kota Baubau, dan mahasiswa. Setelah menyimak dan memperhatikan (1) Sambutan Pembukaan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, (2) Sambutan Kepala Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, (3) Laporan Ketua Panitia Pelaksana, (4) serta pembahas makalah utama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pariwisata, makalah pleno, dan makalah komisi, tim perumus menetapkan putusan sebagai berikut.

1. Bahasa dan Sastra Daerah

Bahasa dan sastra daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional perlu dilestarikan, dikembangkan, dibina, dilindungi, dan diberdayakan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, yaitu sebagai lambang identitas daerah, lambang kebanggaan, alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat, sarana pendukung budaya dan bahasa Indonesia, dan pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia. Bahasa dan sastra daerah yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat penuturnya harus senantiasa diberi ruang yang lebih luas dan digalakkan pemakaiannya dalam berbagai aktivitas keseharian masyarakat penuturnya sebagai pembangun dan pembentuk karakter bangsa.

Sastra daerah mengandung nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang sejalan pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya sehingga memegang peranan penting dalam pembentukan watak sosial masyarakat pendukungnya. Sastra daerah merupakan warisan budaya daerah yang turun temurun dan mempunyai nilai-nilai luhur yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan, seperti nilai keagamaan, kesetiaan, sosial, historis, moral, pendidikan, etika, dan nilai kepahlawanan, dalam hubungannya dengan usaha menangkal efek negatif globalisasi sebagai pencerminan kearifan lokal. Namun, kita harus melihat kenyataan di masyarakat. Masih banyak masyarakat belum menyadari arti pentingnya penggunaan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah, baik sebagai aset budaya, sebagai identitas daerah maupun sebagai pembangun dan pembentuk karakter bangsa. Oleh karena itu, upaya pelestarian, pengembangan, pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut perlu diupayakan tindak lanjut sebagai berikut.

- a. Bahasa daerah harus tetap menjalankan perannya sebagai media pemersatu etnis, pembentuk jati diri etnis, pembentuk dan pembangun karakter bangsa, serta wahana komunikasi dalam kehidupan yang lebih maju, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.
- b. Bahasa daerah sebagai aset budaya di daerah perlu dimanfaatkan dalam penggunaannya pada nama instansi, baik pemerintah maupun swasta, dan pada tempat atau objek yang mengandung nilai kesejarahan.
- c. Bahasa dan sastra daerah perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah (perda) agar pembinaan dan pengembangannya semakin terjamin dari segi hukum yang didahului oleh surat keputusan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Bahasa daerah perlu diberdayakan dalam berbagai ranah komunikasi, termasuk dalam ranah administrasi dan pembangunan di daerah atau dalam penyampaian pesan-pesan pembangunan, acara sosial kemasyarakatan, dan budaya lokal.
- e. Bahasa dan sastra daerah perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah, terutama pengambil kebijakan di bidang pendidikan. Pengajaran bahasa dan sastra daerah perlu diberi ruang yang lebih luas dan alokasi waktu yang memadai yang diikuti oleh peraturan daerah sehingga dapat dijabarkan dalam bentuk program yang terencana, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam sistem pendidikan. Di samping itu, perlu pendidikan, pelatihan, dan pengangkatan tenaga pengajar (guru-guru) yang khusus mengajarkan bahasa dan sastra daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- f. Untuk keperluan pendidikan dan pelestarian serta pemertahanan bahasa dan sastra daerah perlu disusun kamus bahasa daerah, baik dalam bentuk kamus dwibahasa maupun tribahasa, buku tata bahasa daerah standar, dan inventarisasi sastra daerah yang berkembang dalam masyarakat.
- g. Pelestarian, pengembangan, pembinaan, perlindungan, dan pemberdayaan bahasa dan sastra daerah perlu dilaksanakan secara bersinergi oleh lembaga-lembaga terkait (seperti perguruan tinggi, badan penelitian dan pengembangan daerah, lembaga sosial masyarakat yang bergerak di bidang kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan) dan tokoh-tokoh masyarakat.
- h. Pemberian penghargaan kepada penggiat/pemerhati bahasa dan sastra daerah sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap pengembangan bahasa dan sastra daerah.
- i. Penerbitan bahan bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak dalam bentuk tabloid, majalah, surat kabar, pamflet, buku cerita bergambar dan sejenisnya yang mengangkat cerita-cerita rakyat, ilmu pengetahuan, informasi mutakhir diberbagai bidang yang dapat merangsang daya cipta, daya dorong, dan daya capai dalam melahirkan ide-ide kreatif yang berkarakter lokal berwawasan global.
- j. Sastra daerah, khususnya cerita rakyat yang berbahasa daerah, perlu dikembangkan, dikemas, dan disebarluaskan melalui multimedia seperti, (1) pementasan sastra, (2) musikalisasi puisi, dan (3) perlombaan sastra.
- k. Melibatkan media massa secara maksimal dalam pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, sastra daerah, dan budaya.

Rekomendasi Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah

Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah, yang dilaksanakan dengan tema "Bahasa Daerah Sebagai Sarana Pencerdasan dan Pengembangan Potensi Daerah Sulawesi Tenggara pada Era Globalisasi" tersebut berlangsung selama tiga hari dan menghasilkan rekomendasi sebagai berikut.

1. Pembuatan dan penetapan peraturan daerah (Perda) didahului oleh keputusan pemerintah provinsi dan kabupaten kota tentang revitalisasi, pemertahanan, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah Sulawesi Tenggara dengan implementasi sebagai berikut:
 - a. membentuk dan membangun karakter bangsa melalui pembelajaran dan pengajaran bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib untuk muatan lokal pada tingkat taman kanak-kanak, pendidikan dasar, dan menengah;
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota perlu mempersiapkan perangkat-perangkat pembelajaran seperti kurikulum, silabus dan bahan ajar;
 - c. pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota melalui Dinas Pendidikan bersama lembaga kebahasaan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembelajaran bahasa dan sastra daerah untuk guru bahasa dan sastra daerah;
 - d. dan mengangkat guru bahasa dan sastra daerah sebagai prioritas utama berdasarkan kebutuhan.
2. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bersama lembaga kebahasaan, dan pakar bahasa mendorong penelitian dalam upaya pengaksaraan bahasa daerah sesuai peraturan yang berlaku.
3. Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah melalui aksi bahasa .
4. Hari Bahasa Ibu Internasional tanggal 21 Februari setiap tahun diperingati dengan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah.

Penutup

Demikianlah rekomendasi ini disusun dengan penuh rasa tanggung jawab dan ditetapkan di Baubau pada hari Selasa, tanggal 20 Juli tahun 2010, pukul 15.30.

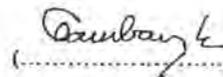
Tim Perumus

Ketua : Prof. Dr. H. Hanna, M.Pd. (Panita)



Anggota:

1. Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Pemakalah)



2. Prof. Dr. Lukman, M.S. (Pemakalah)



3. Drs. H. Hasidin Sadif, M.Sc. (Unsur Legislatif)



4. Drs. Zalili Sailan, M.Pd. (Pemakalah)



11. Sumber Dana

Kongres Bahasa-bahasa Daerah Sulawesi Tenggara ini dibiayai oleh APBD Pemerintah Kota Baubau dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta sumbangan dari beberapa pihak.

Mansyur Ramly
(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan Nasional)

1. Pengantar

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang multietnik, multibudaya, dan multibahasa. Kemultibahasaan itu ditandai dengan adanya banyak bahasa di wilayah Indonesia, yakni bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah, dan beberapa bahasa asing. Bahasa Indonesia yang menjadi bahasa nasional berfungsi sebagai jati diri bangsa, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahasa daerah berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah, serta sumber pengembangan bahasa Indonesia. Sementara itu, bahasa asing berfungsi sebagai sarana komunikasi antarbangsa, sarana pendukung penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta sumber pengembangan bahasa Indonesia.

Dalam hal bahasa daerah, bangsa Indonesia mempunyai kekayaan yang sangat besar. Pusat Bahasa, berdasarkan data yang terkumpul dari 2185 desa (daerah) pengamatan di seluruh wilayah Indonesia, sampai saat ini sudah menemukan 442 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah itu akan bertambah karena penelitian itu masih berlanjut. Bahasa-bahasa daerah itu digunakan oleh masyarakat pendukungnya di samping bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat Indonesia, baik secara individu maupun sosial, merupakan masyarakat dwibahasawan, yaitu menguasai dua bahasa, bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, saat ini sebagian kecil masyarakat Indonesia juga menguasai bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Arab, atau Belanda. Masyarakat Indonesia boleh menguasai bahasa asing apa saja, tetapi dia tidak boleh mengabaikan identitasnya. Kemampuan setiap individu dalam berbahasa Indonesia, berbahasa daerah, maupun berbahasa asing menunjukkan kelebihan individu itu sebagai masyarakat Indonesia, anggota etnik, sekaligus sebagai anggota masyarakat dunia.

Bahasa daerah sebagai identitas etnik menyimpan khazanah nilai budaya yang lazim disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah koleksi fakta, konsep, kepercayaan, dan persepsi masyarakat ihwal dunia sekitar. Kearifan ini juga merupakan proses bagaimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan, dikelola, dan diwariskan (Alwasilah dkk., 2009:51). Agar kearifan lokal ini tetap dimiliki masyarakat pendukungnya, pewarisan bahasa daerah perlu tetap dilakukan sebab kearifan yang terkandung dalam bahasa daerah ini dapat menjadi penyaring derasnya arus budaya global yang masuk ke dalam budaya Indonesia. Penguasaan budaya dan pengetahuan akan membentuk kemampuan berlogika. Dengan demikian, bahasa daerah berperan dalam mengembangkan kecerdasan masyarakat Indonesia.

2. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Daerah serta Peran Pemerintah dalam Penanganan Bahasa Daerah

Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah dari UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pembentuk kepribadian suku bangsa, (2) peneguh jati diri kedaerahan, (3) sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah. Di samping itu, dinyatakan pada ayat (2) bahasa daerah juga dapat berfungsi sebagai (1) sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah, (2) bahasa media massa lokal, (3) sarana pendukung bahasa Indonesia, dan (4) sumber pengembangan bahasa Indonesia.

Sebagai pendukung dan sumber pengembangan bahasa Indonesia, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada tingkat permulaan sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan/atau pelajaran lain. Dalam situasi tertentu, bahasa daerah dapat juga berfungsi sebagai pelengkap bahasa Indonesia di dalam peyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah. Dengan kedudukan dan fungsi bahasa daerah tersebut, pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa daerah harus dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan Perpres Nomor 24 Tahun 2009.

Dengan peran aktif pemerintah daerah dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa daerah berarti pemerintah daerah juga berperan dalam pencerdasan bangsa karena bahasa daerah juga berperan dalam mengembangkan kecerdasan masyarakat Indonesia melalui penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Melalui bahasa daerah atau bahasa ibu, mereka merasa lebih akrab dengan lingkungannya dan percaya diri dalam mengungkapkan isi hati mereka (Suratminto, 2010:582).

Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah perlu memfasilitasi penggunaan bahasa daerah di wilayah

masing-masing, melalui penyiapan bahan ajar, penerbitan buku-buku (kamus, tata bahasa, dan cerita) berbahasa daerah, penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah, pembentukan dan/atau pemberdayaan lembaga adat daerah, penyelenggaraan pertemuan dalam rangka pelestarian bahasa daerah, dan/atau kegiatan lain yang relevan. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat berbahasa daerah, pembinaan bahasa daerah dilakukan melalui pengajaran bahasa daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan program kesetaraan, penggunaan bahasa daerah di ranah keluarga, dan revitalisasi penggunaan bahasa daerah di masyarakat.

Pemerintah telah melakukan upaya penelitian, pengembangan, pembinaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian bahasa daerah. Penelitian bahasa daerah mencakup berbagai aspek kebahasaan untuk keperluan pengembangan, pembinaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian. Sementara itu, pengembangan bahasa daerah meliputi upaya pemekaran kosakata dan kodifikasi yang berupa penyempurnaan ejaan, kamus, dan tata bahasa agar bahasa itu tetap memenuhi tuntutan keperluan masyarakat pendukungnya. Adapun pembinaan bahasa daerah meliputi upaya pemertahanan ranah-ranah penggunaan bahasa daerah pada masyarakat pendukungnya dan penerusan penggunaan bahasa itu kepada generasi pelapis melalui proses pembelajaran bahasa daerah di lingkungan keluarga ataupun di sekolah. Upaya-upaya dilakukan dalam rangka pemeliharaan bahasa daerah dan perlindungan bahasa daerah agar tetap eksis dalam kehidupan masyarakat penuturnya.

Pembinaan terhadap masyarakat pengguna bahasa daerah dilakukan untuk meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap bahasa daerah; meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa daerah; dan meningkatkan mutu penggunaan bahasa daerah.

3. Bahasa Daerah Sebagai Sarana Pencerdasan Bangsa

Menurut Cummins (2008) sebagaimana dikutip oleh Suratminto (2010:583), dalam kemahiran berbahasa terdapat dua tahapan kemahiran berbahasa, yaitu *Basic Interpersonal Communicative Skills (BIC)* dan *Cognitive Academic Language Proficiency (CALP)*. Seorang anak akan lebih berhasil dalam CALP apabila BIC-nya kuat. Dengan kata lain, seorang anak akan mudah mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing apabila ia mempunyai kemampuan dasar bahasa ibu yang kuat. Oleh sebab itu, pengajaran bahasa daerah sebagai bahasa ibu menjadi penting. Hal itu juga diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab VII, Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

Sebagaimana dikatakan oleh Sugono (2009) dan Perpres Nomor 24 Tahun 2009 bahwa bahasa daerah memiliki peran dalam membangun kepribadian anak Indonesia. Sebagian besar anak-anak Indonesia mengenal lingkungan keluarga dan komunitas daerahnya, baik dalam perilaku sosial maupun perilaku bahasa melalui bahasa daerah. Dalam lingkungan tersebut dibangun dan dikembangkan potensi anak tentang etika dan estetika dalam berinteraksi sosial di lingkungan keluarga ataupun komunitas suku bangsa. Dengan demikian, bahasa daerah menjadi sarana pengembangan kecerdasan emosional.

Etika sebagai bagian dari pembentukan kepribadian anak ditumbuhkan dan dikembangkan di rumah oleh orang tua beserta seluruh anggota keluarga, bahkan lingkungan sekitar anak turut membentuk kepribadian anak. Kemampuan estetika pun sudah dikembangkan di lingkungan keluarga dan tempat tinggal anak. Potensi itulah yang melahirkan keberagaman masyarakat Indonesia dalam bahasa dan sosial budaya sebagai ciri jati diri bangsa Indonesia.

Di dalam keluarga, dengan bahasa ibu pula, anak-anak Indonesia mengenali Sang Pencipta. Kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dibangun dalam diri anak sejak mereka di dalam kandungan sang ibu dan lahir sebagai anak suku bangsa. Selain sebagai anak suku bangsa, anak-anak dibesarkan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat religius maka perilaku anak-anak Indonesia terbentuk sebagai anak-anak beragama. Kekuatan spiritual itu menjadi kendali anak dalam menjalani kehidupan sebagai anak yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kekuatan itu akan menjadikan anak selalu berada dalam jalur kepribadian menuju insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, kekuatan itu dapat menjadi fondasi dalam membangun insan Indonesia yang memiliki rasa saling menghargai dan toleransi terhadap teman atau pihak lain yang berbeda dengan dirinya. Semua itu dapat dilakukan dengan menggunakan bahasa daerah. Dalam hal ini, bahasa itu menjadi sarana dalam mengembangkan kecerdasan spiritual. Apabila peran yang sangat strategis itu dioptimalkan, pendidikan anak Indonesia akan menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian sebagai anak yang jujur, santun, cerdas, rukun dengan sesama, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui pengoptimalan peran bahasa daerah, persatuan dan kesatuan bangsa sebagai warisan para pejuang kemerdekaan akan terpatri dalam kehidupan generasi pelapis bangsa.

Pembelajaran bahasa ibu atau bahasa daerah kepada anak atau masyarakat penutur bahasa daerah dapat juga dilakukan melalui pengenalan cerita rakyat, peribahasa, ungkapan, nyanyian daerah, dan falsafah hidup yang di dalamnya sarat akan makna dan kearifan lokal, yang telah menjadi bagian kehidupan mereka. Seperti telah diketahui bahwa setiap etnik memiliki khazanah tersebut yang diungkapkan dalam bahasa daerah. Masyarakat Aceh, misalnya, mengenal peribahasa *Umu geutanyo hana siuroe siemalam, oleh seubab nyan*

taubat beuna yang berarti 'Umur kita tidak ada sehari semalam, oleh karena itu bertobatlah'. Peribahasa ini adalah anjuran kepada siapa pun yang banyak berbuat salah dan dosa agar bertobat kepada Allah Swt. serta memohon ampunan-Nya. Masyarakat Bugis mempunyai peribahasa *Pura babbara' sompekku, pura tangkisi' golikku, ulebbirenni tellenngé Nato'walié* yang artinya 'layarku sudah terkembang, kemudiku sudah terpasang, lebih baik tenggelam daripada kembali'. Makna yang terkandung dalam peribahasa ini adalah bahwa cita-cita harus diraih dengan tekad yang kuat dan persiapan yang matang walaupun menghadapi risiko yang terburuk.

Pada masyarakat Kei di Maluku terdapat ungkapan *Adat ni dok nain ne hukum ni wai* 'Adat punya kedudukan, hukum punya tempat'. Ungkapan ini mengingatkan agar orang selalu taat pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tempat ia tinggal. Ungkapan lain yang juga terdapat pada masyarakat Kei adalah *Nit enuuk, ne mav enahang* 'Mayat yang mengumpulkan, perantau yang menumpukkan'. Makna ungkapan ini adalah bahwa dalam suka maupun duka, semua harus bersatu dan bekerja sama. Contohnya, jika ada seseorang yang akan merantau, sanak keluarganya berkumpul dan memberikan doa restu; jika ada anggota keluarga yang meninggal, semua anggota keluarga baik yang dekat maupun yang jauh akan berkumpul dan seisi kampung ikut berduka dan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Masyarakat Makassar yang dikenal taat menjalankan ibadah mempunyai sastra lisan *kelong*. Sastra ini sarat dengan nilai-nilai keagamaan.

*Apa nuparek bokong
Bokong mange ri anja
Tena maraeng
Sambayang lima wattu*

....

Terjemahan:

Apa yang engkau jadikan bekal
Persiapan ke akhirat
Tiada lain salat lima waktu

....

Kelong di atas membicarakan bekal ke akhirat. Bekal yang dimaksud adalah amal kebajikan. Manusia harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi kehidupan yang abadi. Oleh karena itu, salat dianggap penting dalam syariat agama Islam karena itu merupakan tiang agama. Isi bait terakhir mengatakan bahwa ibadah apa saja jika tidak diiringi dengan salat dianggap belum sempurna.

Pada masyarakat Jawa, selain ungkapan atau peribahasa sebagaimana yang dimiliki oleh masyarakat-masyarakat daerah lain di Indonesia, juga dikenal adanya nyanyian atau lagu dolanan. Lagu-lagu dolanan yang diajarkan umumnya bersifat edukatif agar kelak anak mempunyai budi pekerti luhur atau hiburan. Lagu-lagu ini berfungsi untuk memperkuat fondasi bahasa ibu. Contoh lagu dolanan dalam masyarakat Jawa adalah lagu *Welingku*.

*Welingku
Welingku ngger-angger
Mumpung durung kadalarung
Marenana, marenana
Luwih ala, luwih ala
Melik darbeke wong liya*

Tejemahan:

Pesanku
Pesan saya, anakku
Mumpung belum terlanjur
Insyafilah, insyafilah
Lebih hina, lebih hina
Menginginkan milik orang lain

Lagu tersebut berisi nasihat supaya anak berperilaku jujur, tidak suka mencuri, dan mengambil kepunyaan orang lain karena itu adalah perbuatan hina. Ada hubungan yang erat antara lagu dolanan sebagai tanda yang dipersepsi secara bertahap membentuk konsep yang kemudian akan memengaruhi perilaku dan budaya anak tersebut berada. Konsep ini selanjutnya akan terbawa sampai anak tersebut dewasa.

Masyarakat Lampung memiliki lima falsafah hidup. Kelima prinsip dalam adat istiadat tersebut ialah (1) *Pi'il Pesengiri* diartikan sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku, dan sikap hidup yang dapat menjaga dan menegakkan nama baik dan martabat secara pribadi maupun berkelompok yang senantiasa dipertahankan; (2) *Sakai Sambayan* berarti gotong royong, tolong-menolong, bahu-membahu, dan saling memberi sesuatu yang bersifat materi maupun moril; (3) *Nemui Nyimah* berarti bermurah hati dan ramah tamah terhadap semua pihak;

(4) *Nengah Nyappur* adalah tata pergaulan masyarakat Lampung dengan kesediaan membuka diri dalam pergaulan masyarakat umum dan berpengetahuan luas; (5) *Bejuluk Badek* adalah didasarkan pada tata ketentuan pokok yang selalu diikuti (*Titei Gemattei*) yang diwariskan turun-temurun dari zaman dahulu. Prinsip itu jika disampaikan melalui pelajaran di sekolah dan keluarga akan berdampak positif dalam pembentukan insan Indonesia yang berbudi pekerti luhur.

Peribahasa, ungkapan, *kelong*, lagu dolanan, maupun falsafah dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana contoh-contoh di atas, dalam segi budaya mempunyai peranan yang sangat besar dalam mendukung lestari bahasa daerah karena adat istiadat, tata krama, religi, dan budaya lebih tepat pada sasaran apabila disampaikan menggunakan bahasa daerah.

4. Penutup

Hal-hal yang telah diuraikan tersebut menunjukkan bahwa bahasa daerah merupakan bahasa ibu bagi sebagian besar bangsa Indonesia. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan membuktikan bahwa bahasa daerah mampu menjadi sarana dalam pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan mampu membentuk kompetensi berkomunikasi dalam komunitas suku bangsa. Bahasa daerah juga berperan membangun kepribadian anak bangsa. Penguasaan bahasa daerah secara benar akan menuntun anak-anak berperilaku sopan dan penguasaan bahasa daerah secara benar akan menuntun anak-anak berpikir teratur dan logis.

Sastra lisan, peribahasa, ungkapan, lagu dolanan, dan falsafah hidup mempunyai peranan yang sangat besar dalam mendukung kelestarian budaya dan bahasa daerah karena pelestarian adat istiadat, tata krama, religi, dan budaya lebih tepat apabila menggunakan bahasa daerah dan mengajarkannya di sekolah.

Bahasa daerah merupakan bahasa yang harus ada dalam pendidikan sebagai bahasa pengantar pada pendidikan dasar dan/atau menengah. Hal ini disebabkan bahasa daerah merupakan jembatan bagi anak-anak Indonesia untuk mencapai penguasaan bahasa Indonesia pada taraf mampu berkomunikasi untuk keperluan sehari-hari sampai dengan suatu pencapaian yang disyaratkan bagi siapa pun agar dapat melaju ke peringkat pendidikan yang lebih tinggi. Bahasa daerah harus membuka diri terhadap masuknya kosakata dari bahasa lain, termasuk bahasa asing agar dapat menjadi sarana pencerdasan bangsa.

Daftar Pustaka

- Alwasilah, A. Chaedar. 2009. "Pemertahanan Bahasa Ibu dan Pendidikan Nasional". Makalah Seminar Internasional Bahasa dan Pendidikan Anak Bangsa, Bandung, 26 Mei 2009.
- Alwasilah, A. Chaedar, Karim Suryadi, dan Tri Karyono. 2009. *Etnopedagogi: Landasan Praktek Pendidikan dan Pendidikan Guru*. Bandung: Kiblat.
- Alwi, Hasan. 1999. "Pelestarian Bahasa Daerah". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VII, Jakarta, 26—30 Oktober 1998.
- Alwi, Hasan dan Dendy Sugono (editor), 2003. *Politik Bahasa: Risalah Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Progres.
- Departemen Dalam Negeri. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- , 2009. *Undang-Undang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Kurniawati, Wati. 2008. *Klasifikasi Dialek Bahasa Lampung*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Mahsun. 2009. "Beberapa Persoalan dalam Upaya Menjadikan Bahasa Ibu sebagai Bahasa Pengantar Pendidikan di Indonesia". Makalah Seminar Internasional Bahasa dan Pendidikan Anak Bangsa, Bandung, 26 Mei 2009.
- Purwo, Bambang Kaswanti. 2009. "Masyarakat Indonesia: dari Multilingual ke Monolingual?" dalam Kongres Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia (KIMLI).
- Santosa, Imam Budhi. 2009. *Kumpulan Peribahasa Indonesia dari Aceh sampai Papua*. Yogyakarta: Indonesia Tera.
- Soedirdja, Suryadi. 2001. "Peranan Bahasa dan Sastra Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi" dalam *Bahasa Daerah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sugono, Dendy dan Abdul Rozak Zaidan (editor). 2001. *Bahasa Daerah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sugono, Dendy. 2007. "Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Bahasa Daerah". Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- , 2009. "Bahasa Daerah, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Asing dalam Percepatan Realisasi Pendidikan Berkelanjutan Bagi Anak Indonesia". Makalah Seminar Internasional Bahasa dan Pendidikan Anak Bangsa, Bandung, 26 Mei 2009.

- Suratminto, Lilie. 2010. "Hubungan *Lagu Dolanan* dan Perilaku Anak Dilihat melalui Analisis Semiotik".
Prosiding Makalah pada Seminar Internasional Hari Bahasa Ibu, Bandung.
- Tupa, Nursiah. 2010. "*Sastra Kelong* Makassar merupakan Pencerminan Pribadi Masyarakat Makassar".
Makalah pada Seminar Internasional Hari Bahasa Ibu, Bandung.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Pleno I
Hari, Tanggal, Pukul	: Senin, 19 Juli 2010, 08.30—09.30 wita
Judul Makalah	: Bahasa Daerah Sebagai Sarana Pencerdasan Bangsa Indonesia
Penyaji/Pembicara	: Prof. Dr. Mansur Ramli
Pemandu	: Drs. Sudjiton, M.M.
Pencatat	: Drs. L.M. Budi Wahidin M, M.Pd.
Jumlah Peserta	: 400 orang

TANYA JAWAB

Drs. Salili Zailan, M.Pd. (Universitas Haluoleo, Kendari)

Pertanyaan/Saran

Di dalam Undang-Undang, khususnya UUD 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas secara tegas dikatakan bahwa bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah Bahasa Indonesia. Di sisi lain, di daerah juga dimungkinkan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada kelas permulaan. Ini adalah amanat Undang-Undang yang belum dilaksanakan secara merata di Indonesia termasuk di Sulawesi Tenggara, kecuali di beberapa daerah. Karena dasar hukumnya ada, sebaiknya amanat ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi, barangkali di setiap daerah perlu ada Peraturan Daerah (perda) yang menegaskan penggunaan bahasa pengantar bahasa Indonesia dan bahasa daerah pada kelas permulaan di daerah-daerah tertentu.

Jawaban/Tanggapan

1. Kebijakan nasional sudah mengatur yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Sisdiknas yang memberikan jaminan bahwa bahasa daerah dapat digunakan dalam pengantar pendidikan pada tahap awal. Lebih khusus aturan tersebut juga dimuat dalam Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang Sisdiknas pengaturannya lebih umum, bukan hanya pendidikan pada tahap awal tetapi sepanjang itu dibutuhkan yang dapat memperkaya dan memberikan pengertian/pemahaman yang lebih cepat kepada peserta didik.
2. Acuan untuk membuat perda sudah ada. Yang penting adalah tindakan dan aksi, baik dari pemerintah daerah maupun pemerhati bahasa, misalnya penulisan nama-nama jalan dan papan nama kantor dengan bahasa daerah dan penggunaan bahasa daerah dalam ranah administrasi.
3. Di tingkat pusat, dalam rangka mewujudkan dan menindaklanjuti Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 2009 dalam upaya pembinaan, perlindungan, dan pelestarian bahasa dan sastra, termasuk bahasa daerah, sistem keorganisasian dalam Kemdiknas pun berubah. Saat ini telah dibentuk suatu badan yang namanya Badan Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang tingkat eselonnya lebih tinggi, yaitu eselon I, daripada Pusat Bahasa sekarang. Kebijakan ini merupakan suatu upaya agar lembaga yang mengatur masalah kebahasaan dan kesastraan memiliki posisi yang lebih kuat dalam memperjuangkan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta melestarikan bahasa dan sastra daerah sebagai aset budaya nasional. Jadi, pemerintah dalam memperkuat dan memperhatikan masalah kebahasaan dan kesastraan tidak hanya sebatas dalam bentuk perundang-undangan atau kebijakan-kebijakan saja, tapi juga harus didukung oleh lembaga yang kuat dan mandiri.

La Ode Anshari (Tokoh Masyarakat Buton)

Pertanyaan/Saran

1. Wolio kecil tapi kelak akan menggemparkan dunia, seperti yang tertuang dalam isi sastra lisan dan naskah-naskah yang ada di Buton.
2. Pemerintah perlu memikirkan perda yang berkaitan dengan pelestarian bahasa daerah akibat arus pergerakan masyarakat (transmigrasi dan urbanisasi) dan kontak bahasa yang kian cepat dalam suatu daerah.

Jawaban/Tanggapan

1. Sebenarnya, tanpa perda pun pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah dapat dilaksanakan. Masalah pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah sebenarnya lebih dititikberatkan pada kesadaran dan tanggung jawab dari pemerintah daerah dan masyarakat penutur bahasa daerah itu sendiri untuk secara sadar dan peduli dengan eksistensi budayanya.
2. Ada nilai-nilai dalam bahasa daerah yang sangat berharga untuk membangun bangsa kita, khususnya dari kandungan kearifan lokalnya. Nilai-nilai yang terkandung tersebut sebaiknya bukan hanya diangkat secara lokal, tapi harus sampai di tingkat nasional dan dunia. Inilah maksud dari ungkapan "Wolio kecil tapi kelak akan menggemparkan dunia". Ada nilai-nilai yang kalau dikaji secara lebih dalam dapat digunakan dan diterapkan secara global (menggemparkan dunia).

PERANAN BAHASA DAERAH SEBAGAI WAHANA PENINGKATAN DAYA APRESIASI BUDAYA DAERAH

Sugiyono
Azhari Dasman Darnis
(Pusat Bahasa, Jakarta)

1. Pengantar

Judul tulisan ini sekurang-kurangnya mengisyaratkan dua hal, yaitu bahwa masyarakat kita belum mencapai tingkat apresiasi yang maksimal terhadap budaya daerah dan bahwa bahasa harian – baik yang berupa bahasa daerah maupun bahasa Indonesia – dapat menjadi wahana untuk meningkatkan apresiasi terhadap budaya daerah itu. Kaitan antara budaya daerah dan bahasa yang digunakan masyarakat itu dalam kehidupan sehari-hari semakin menguat apabila kita berbicara tentang apresiasi dalam kerangka lintas budaya. Bahasa harian dianggap penting sebab budaya pada dasarnya adalah kristalisasi interaksi manusia dengan alam, dengan makhluk lain, dan Sang Pencipta dalam kehidupan sehari-hari yang aktualisasinya pun dapat dirasakan dalam perilaku manusia itu dalam kehidupan sehari-hari.

Tulisan ini akan menguraikan perihal kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan yang selalu akan terjadi dan juga mencari rumusan bahasa harian seperti apa yang mampu mempertinggi daya apresiasi terhadap budaya daerah itu. Sehubungan dengan hal yang terakhir itu, bahasa Indonesia menjadi wahana yang lebih tepat dan untuk itu upaya pengadopsian istilah atau ungkapan daerah ke dalam bahasa Indonesia akan semakin memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai wahana peningkatan apresiasi budaya daerah.

2. Kesenjangan Pemahaman Budaya

Tidak dapat disangkal lagi bahwa perkembangan masyarakat selalu diwarnai kurangnya pemahaman generasi baru terhadap budaya yang telah dilembagakan oleh generasi pendahulunya. Kesenjangan pemahaman antara dua generasi itu muncul selain akibat tidak mulusnya proses transfer budaya dari generasi ke generasi meskipun proses itu telah dilalui dengan perencanaan yang matang – misalnya melalui pendidikan – juga akibat munculnya pola-pola perilaku baru yang pada akhirnya akan menjadi embrio budaya atau tradisi baru. Generasi baru yang cenderung berorientasi ke masa depan didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, pemahaman nilai-nilai luhur kebudayaan akan terabaikan. Alih-alih memegang teguh pola perilaku yang telah mapan, mereka cenderung mencari dan membentuk pola-pola perilaku yang baru.

Pergeseran atau perubahan nilai budaya bukanlah hal yang dapat dihindari sebab budaya pada dasarnya adalah kristalisasi respon manusia dalam interaksinya dengan alam atau makhluk-makhluk lain. Dalam pada itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa pengaruh yang amat besar terhadap respon yang diberikan manusia. Sudah barang tentu, respon akan berubah sejalan dengan perubahan atau perkembangan alam yang menjadi stimulusnya. Inilah yang menjelaskan mengapa manusia pada suatu waktu amat erat terkait dengan makhluk-makhluk gaib, kemudian ketika orang mulai mendewakan rasionalisme ikatan itu mengendor. Kini, keterpajanan terhadap alam gaib kembali merebak. Dahulu keterkaitan atau kerterikatan pada alam dimanifestasikan dalam perilaku menyembah terhadap benda-benda alam, agar tidak marah dan mendatangkan bencana, kini keterkaitan dan keterikatan itu kembali menguat dengan manifestasi yang berbeda, misalnya, menjaga kelestarian alam agar tidak banjir dan sebagainya. Hal itu semua merupakan cerminan bahwa pada akhirnya kristalisasi perilaku akan ditentukan oleh pola-pola hubungan stimulus-respon antara manusia dengan alam dan makhluk lainnya, selain tentu saja juga dengan Sang Pencipta itu sendiri.

Akan tetapi, berbicara tentang manusia dengan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, selalu membawa kita berhadapan dengan sisi-sisi yang bisa jadi amat berseberangan. Di antara kita ada orang tidak sedikit orang – biasanya generasi tua – yang masih memegang teguh norma yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi karena diyakini bahwa norma-norma itu adalah telah terbukti kemapanannya dalam kehidupan ini. Akan tetapi, di antara kita juga tidak jarang orang – biasanya generasi muda – yang begitu tidak peduli terhadap tradisi yang diyakininya tidak lebih hanya sebagai aturan yang akan menghambat kebebasannya. Oleh karena itu, orang-orang yang termasuk golongan kedua itu cenderung melanggar tradisi dan tanpa disadarinya mereka juga mengakumulasi pola-pola perilaku baru yang pada saatnya nanti akan menjadi budaya tandingan yang harus dipertahankan.

Kesenjangan serupa itu muncul dalam dimensi waktu. Dari waktu ke waktu, perubahan persepsi terhadap perilaku-perilaku yang akhirnya dilembagakan sebagai budaya itu semakin menambah besar kesenjangan antargenerasi. Dalam kesenjangan yang amat parah, budaya daerah dianggap menjadi penghambat pengembangan diri meskipun diyakini bahwa di dalam budaya itu banyak nilai luhur yang aplikasinya masih

dapat dirasakan hingga sekarang. Dari sudut pandang generasi yang melembagakan sebuah budaya, dalam kesenjangan itu mereka hanya melihat bahwa generasi muda tidak mampu mengapresiasi budaya secara baik dan karenanya mereka cenderung antikonservatisme. Alih-alih menghayati dan mengamalkan pola-pola perilaku yang telah mapan di dalam budaya daerah, mereka memilih merumuskan pola perilaku kelompoknya sendiri sebagai akibat atau bahkan sebagai reaksi budaya yang telah ada.

Pergeseran nilai budaya yang kemudian memicu rendahnya daya apresiasi masyarakat terhadap budayanya menjadi bukti pembenaran bahwa budaya itu sesungguhnya merupakan sistem yang adaptif. Para ahli yang *cultural adaptionist* menganggap budaya sebagai suatu sistem yang berfungsi menghubungkan komunitas manusia dengan lingkungannya. Perubahan budaya tidak lain merupakan proses adaptasi pemahaman manusia atas lingkungannya itu yang dinamis.

3. Bahasa Sebagai Wahana Apresiasi Budaya

Bahasa merupakan salah satu unsur budaya penting selain sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, kesenian, sistem mata pencaharian, serta sistem teknologi dan peralatan. Bahasa terbentuk akibat keperluan manusia untuk berinteraksi dengan sesamanya dan untuk melambangkan segala sesuatu baik yang ada di dalam realita maupun dunia konseptual agar dapat disebutnya dalam interaksi. Sebagai makhluk petanda, manusia cenderung membuat lambang semua hal dan peristiwa yang terjadi di dalam dunianya.

Dalam pandangan teori ideasional, selain merupakan sebuah sistem kognisi, sistem struktural, budaya diperlakukan sebagai sistem simbol atau semiotika. Sebagai sistem semiotika, bahasa mengambil posisi yang amat penting sebab antropologi meletakkan masalah interpretasi sebagai pekerjaan pokok. Jika bahasa adalah wahana penuangan gagasan, maka bahasa dipastikan mengambil peran penting juga sebagai wahana interpretasi budaya. Apresiasi budaya sebagai bentuk interpretasi terhadap simbol dan penuangan gagasan ke dalam simbol-simbol, sudah barang tentu amat bergantung kepada kemahiran berbahasa.

Dalam kaitannya dengan bahasa daerah atau bahasa harian, dapat dipastikan bahwa budaya daerah hanya akan dapat diapresiasi secara baik apabila masyarakat itu mempunyai kemahiran berbahasa daerah. Adalah tidak mungkin mengapresiasi bahasa daerah tertentu tanpa kemahiran berbahasa daerah itu. Akan tetapi, khususnya di Indonesia, mengingat kebudayaan nasional Indonesia merupakan puncak-puncak budaya daerah, sesungguhnya untuk dapat mengapresiasi budaya nasional secara baik, tidaklah mungkin masyarakat Indonesia ini harus pula menguasai sekian banyak bahasa daerah yang dibawa masuk ke dalam budaya nasional itu. Untuk itu, pemerayaan bahasa harian dengan unsur-unsur bahasa daerah akan mempertinggi kemampuan bahasa harian itu sebagai wahana apresiasi terhadap budaya daerah. Konsep perilaku yang tercermin dalam ungkapan-ungkapan khas bahasa daerah seperti *ing ngarso sung tulodho*, *ing madya mangun karto*, dan *tut wuri handayani* dapat dikatakan hampir menjadi milik masyarakat Indonesia secara luas. Budaya kepemimpinan Jawa yang harus memberi teladan, memberi motivasi, sekaligus menjadi pengontrol tampaknya dapat dipahami dan lebih dari itu juga dapat diterapkan dalam perilaku hidup sehari-hari.

Selain ungkapan-ungkapan Jawa seperti itu, masih banyak ungkapan-ungkapan dari bahasa daerah lainnya yang amat sarat dengan nilai moral yang amat luhur. Berikut ini contoh-contoh ungkapan dalam berbagai bahasa daerah di Indonesia.

- (1) *Tunjuak luruih, kelingkiang bakaik* (Minangkabau) 'apa yang dikatakan tidak sama dengan yang dipikirkan'
- (2) *Bia kepala baluluak, asa tanduak lai makan* (Minangkabau) 'bekerjalah apa saja asal bisa makan'
- (3) *Ngukur ka kujur* (Sunda) 'hendaknya selalu tahu kemampuan diri sendiri'
- (4) *Hirup teu neut paeh teu hos* (Sunda) 'hidup segan mati tak hendak'
- (5) *Hadep habaring hurung* (Ngaju) 'berdiri sama tinggi duduk sama rendah dalam kegotongroyongan'
- (6) *Penyang hinje simpei* (Ngaju) 'bersatu kita teguh bercerai kita runtuh'
- (7) *Ya mulek bengan turan* (Bayan) 'pantang menyerah sebelum berhasil'
- (8) *I yayat U santi* (Minahasa) 'maju terus pantang mundur'
- (9) *Si tou tumou tumou tou* (Minahasa) 'manusia memanusikan manusia'
- (10) *Mototabiaan mototanoban, bo mototompiaan* (Bolaang Mongondow) 'saling mengingatkan, saling menyayangi, dan saling memperbaiki'
- (11) *Somahe kai kehage, pantuhu makasalentiho* (Sangihe) 'tantangan adalah kesenjangan; kalau mengikuti arus harus pandai berkelit (maju terus pantang mundur)
- (12) *Sarasen sakate* (Palembang) 'satu tujuan dan satu perkataan'
- (13) *Widya Sastra dipanikang bhuana* (Bali) 'ilmu pengetahuan dan sastra adalah suluhnya negeri'
- (14) *Adik ka'talino bacuramin ka'suraga basemangat ka'jubata* (Dayak) 'berlaku pada manusia, bercermin pada kebaikan, bernaapas pada Tuhan'
- (15) *Sampun anyut tepian ada* (Dayak) 'walaupun sampannya hanyut, dermaga masih ada'
- (16) *Sintuvu maroso* (Poso) 'kebersamaan yang kuat; bersatu kita teguh'

Kemampuan mengapresiasi ungkapan seperti itu sepenuhnya bergantung kepada kemahiran seseorang dalam berbahasa daerah meskipun seringkali konsep perilaku yang dikandung ungkapan itu tidak begitu saja dapat dirumuskan dengan hanya mengetahui arti setiap unsur leksikal pembentuknya. Beruntung jika ungkapan-ungkapan itu juga mempunyai padanan dalam bahasa Indonesia – misalnya *hirup teu neu paeh teu hos* (Sunda) yang kurang lebih sama dengan *hidup segan mati tak hendak*, atau ungkapan *jaman tai kotok dilebuan* (Sunda) yang kurang lebih sama dengan *jaman kuda gigit besi* atau *somahe kai kehage, pantuhu makasalentih* (yang kurang lebih sama dengan *maju terus pantang mundur* atau *sintuvu maroso* dan *penyang hinje simpei* yang kurang lebih sama dengan *bersatu kita teguh bercerai kita runtuh*). Tentu saja pemahaman ungkapan-ungkapan itu akan lebih mudah karena dijumpai oleh padanannya. Jika tidak, mau atau tidak mau ungkapan-ungkapan itu harus diangkat menjadi unsur bahasa harian lebih dahulu agar dapat diapresiasi dengan baik.

Sebagai wahana apresiasi, suatu bahasa hendaklah mempunyai kelayakan leksikon dan kelayakan sistem bahasa itu. Apresiasi terhadap budaya daerah hanya dapat dilakukan jika seseorang mempunyai leksikon yang memadai dalam bahasa daerah itu. Bukan saja dari segi jumlah tipenya, tetapi juga token. Bukan saja kata-kata yang denotatif, tetapi juga konotatif. Selain itu, tentu saja secara umum mereka juga harus mempunyai kemahiran yang memadai terhadap bahasa daerah itu. Betapapun mereka berhadapan dengan budaya fisik, dengan ketersediaan leksikon dan kelayakan sistem bahasa itu, mereka akan dapat mulai memahami budaya itu.

4. Peningkatan Daya Apresiasi terhadap Budaya Daerah

Istilah *apresiasi* mengisyaratkan adanya kemampuan menerima pesan yang sesungguhnya bertingkat-tingkat. Istilah *dapat mengapresiasi* budaya daerah itu mengacu pada kemampuan memahami, menghayati, menghargai, hingga dapat mengaplikasikan nilai-nilai budaya daerah itu dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat disangkal bahwa tingkat apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah belumlah mencapai tingkat memuaskan. Akan tetapi, belum dapat ditentukan secara pasti tingkat apresiasi itu.

Peningkatan apresiasi selain dapat diartikan mengubah kemampuan memahami menjadi menghayati atau mengamalkan nilai luhur budaya daerah, juga berarti peningkatan secara kuantitatif masyarakat yang dapat mengapresiasi budaya. Sampai pada tingkat tertinggi, apresiasi nilai-nilai budaya akan membawa kita pada penghayatan terhadap nilai-nilai budaya suku bangsa dan penghayatan yang baik terhadap nilai tersebut akan menumbuhkan rasa memiliki. Lebih dari itu, akhirnya kedalaman apresiasi itu akan melahirkan sikap menghargai nilai budaya suku bangsa.

Ada dua hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah. Pertama dengan menuntut masyarakat untuk menguasai bahasa daerah sehingga proses apresiasi terhadap budaya daerah dapat berjalan dengan baik. Namun hal tersebut terkendala oleh menurunnya kualitas penguasaan bahasa daerah dan menurunnya jumlah penutur sehingga penguasaan bahasa daerah tertentu demi meningkatkan daya apresiasi terhadap budaya daerah amatlah tidak efektif, bahkan tidak mungkin.

Kedua dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai wahana apresiasi budaya daerah. Hal tersebut dapat dilakukan untuk menyiasati keragaman bahasa dan budaya daerah serta memicu apresiasi, tetapi upaya ini harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat berakibat pada penurunan bahkan penghilangan nilai-nilai luhur budaya daerah yang terkandung dalam bahasa daerah.

Pada tingkat yang lebih teknis hal tersebut dapat pula dilakukan, di antaranya, dengan mengangkat unsur-unsur budaya daerah menjadi leksikon bahasa Indonesia agar proses apresiasi dapat dilakukan lintas budaya dan unsur-unsur budaya daerah tersebut pada gilirannya akan menjadi bagian dari budaya nasional.

Upaya mengangkat unsur-unsur bahasa daerah yang merekam budaya daerah sudah lama dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari berita di media massa cetak maupun televisi yang seringkali diselipi dengan bahasa daerah. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terakhir yang terbit tahun 2009 merekam 3.631 kosakata bahasa daerah yang mewakili konsep atau budaya daerah yang khas yang berasal dari 76 bahasa daerah mulai istilah 'acekarom' dari Aceh sampai 'barapen' dari Papua.

Dalam keragaman budaya di Indonesia, dengan konsep pengembangan budaya nasional yang konon merupakan puncak-puncak budaya daerah, memilih bahasa Indonesia sebagai wahana peningkatan apresiasi terhadap budaya adalah pilihan yang tepat. Untuk itu, bahasa Indonesia harus dikembangkan dengan arah yang tepat.

Keragaman budaya dan bahasa daerah di satu sisi memang membanggakan, tetapi di sisi lain merupakan kendala bagi pengapresiasian budaya daerah secara lintas kultural. Padahal, peningkatan daya apresiasi masyarakat terhadap budaya daerah yang bernilai luhur harus dilakukan tanpa harus menghilangkan pluralitas kebudayaan Indonesia.

5. Penutup

Pengapresiasian budaya daerah secara baik akan dapat dilakukan apabila masyarakat menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa harian. Akan tetapi, mengingat keragaman budaya dan bahasa daerah, efektivitas peningkatan daya apresiasi terhadap budaya daerah akan dapat dilakukan dengan cara mengangkat budaya daerah dengan menggunakan wahana bahasa Indonesia secara utuh, atau mengangkat istilah dan ungkapan

bahasa daerah yang sangat esensial bagi budaya daerah ke dalam bahasa Indonesia. Cara ini efektif bukan saja untuk apresiasi terhadap budaya daerah, tetapi juga apresiasi terhadap budaya nasional yang konon merupakan puncak-puncak budaya daerah. Jadi, peningkatan apresiasi budaya daerah pada akhirnya merupakan tantangan bagi penanganan bahasa Indonesia, bukan saja dalam kaitan usaha memperkaya bahasa Indonesia dengan istilah dan ungkapan bahasa daerah, tetapi juga pemahiran masyarakat dalam berbahasa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Casson, Ronald W. 1981. *Language, Culture, and Cognition*. New York: MacMillan Publishing.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Sedyawati, Edi. 1995. "Keanekaragaman Budaya Indonesia: Kini dan Esok". Makalah dalam Diskusi ilmiah *Fenomena Kebinekaan Bangsa Indonesia Masa Kini dan Kemungkinan-Kemungkinannya di Masa Datang* (Bogor, 16–18 Januari 1995)
- Sugono, Dendy. 2003. "Peningkatan Kemampuan Apresiasi Siswa terhadap Nilai Budaya Suku Bangsa melalui Pelajaran Bahasa Indonesia". Makalah dalam dialog pakar tentang *Ketahanan Budaya Pelajar melalui Apresiasi Seni dan Budaya Suku Bangsa dan Apresiasi Budaya Suku Bangsa lewat Media Elektronika* (Bandung, 9–10 Juli 2003).
- Tim Lembaga Research Kebudayaan Nasional. 1984. *Kapita Selekta Manifestasi Budaya Indonesia*. Bandung: Alumni.



DIALEKTIKA DAN KEBIJAKAN KEBERAKSARAAN DI KOTA BAUBAU

Mz. Amirul Tamim
(Wali Kota Baubau)

1. Pendahuluan

Selaku Wali Kota Baubau, pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada semua hadirin di acara Kongres Bahasa Daerah ini. Saya merasa bangga sebab di kota ini kembali digelar sebuah pertemuan ilmiah dengan skala internasional yang gaungnya menggema hingga ke mancanegara. Pada tahun 2005 lalu, di kota ini juga telah digelar sebuah pertemuan ilmiah berskala internasional yang mempertemukan para peneliti pernaskahan dunia. Kini, pertemuan ilmiah internasional kembali digelar di kota ini. Bagi saya pribadi, baik sebagai warga kota maupun sebagai wali kota, dipilihnya Baubau sebagai tempat perhelatan adalah sebuah kehormatan besar. Saya bangga memperkenalkan kota ini ke publik yang lebih luas. Saya yakin bahwa berbagai pertemuan tersebut akan menjadi titik awal (*starting point*) yang baik dalam hal menggemakan Baubau sebagai kota budaya yang sarat sejarah serta kaya budayanya.

Kepada semua tamu undangan, para peneliti, dan pemakalah, saya ucapkan selamat menikmati keindahan panorama Kota Baubau, kota yang dijuluki sebagai kota dengan benteng terluas di dunia. Kota ini adalah kota yang sarat dengan bukti-bukti sejarah sebagai warisan masa silam yang menjadi mata air nilai bagi generasi hari ini. Kota ini adalah kota yang amat kaya dengan atraksi kebudayaan. Dalam satu publikasi di media nasional, kota ini disebut sebagai ratu cantik di jalur perdagangan dunia karena posisinya yang strategis dalam peta jalur pelayaran internasional pada abad pertengahan. Untuk itu, saya mengucapkan selamat menjelajahi kota yang indah ini.

Sebagai rangkaian dari Kongres Bahasa Daerah, pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah makalah yang berjudul **Kebijakan Keberaksaraan di Kota Baubau**. Makalah ini berangkat dari beberapa asumsi. *Pertama*, iklim keragaman atau multikultural telah melahirkan kondisi yang plural sehingga di Kota Baubau tumbuh berbagai macam kebudayaan yang saling memperkaya. *Kedua*, kebijakan aksara dan keberaksaraan di Kota ini adalah buah dari proses yang panjang dan telah dilaksanakan di sepanjang perjalanan sejarah masyarakat di kota ini. Kebijakan aksara lahir dari proses globalisasi yang kompleks dan terkait erat dengan posisi Baubau sebagai bagian dari jalur laut internasional. *Ketiga*, kebijakan aksara itu bisa disebut sebagai bagian dari dialog-dialog masyarakat dengan masyarakat kebudayaan asing yang berdialektika secara mengagumkan. Perjumpaan beragam budaya itu bisa saling mengisi dan memperkaya serta memberi kontribusi pada lahirnya kohesi sosial dan iklim penghormatan pada semua bangsa yang berinteraksi dalam posisi sejajar.

Untuk membahas asumsi tersebut, arsitektur makalah akan difokuskan pada tiga bahasan utama. *Pertama*, gambaran tentang kondisi kebudayaan di Baubau yang multikultural dan terdapat keanekaragaman bahasa. *Kedua*, aspek kesejarahan masyarakat Kota Baubau yakni lintasan panjang pertemuan bangsa Buton dengan berbagai unsur globalisasi, termasuk pertautan dengan pedagang internasional yakni bangsa Belanda, Inggris, Portugis, dan Arab. *Ketiga*, dialektika kebudayaan serta visi Pemerintah Kota (pemkot) Baubau terhadap kebijakan keberaksaraan serta upaya penyelamatan khasanah bahasa dan aksara.

2. Dinamika dan Keragaman Masyarakat Baubau

Kota Baubau bukanlah kota yang baru tumbuh dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Meskipun kota ini secara administratif baru berusia sekitar delapan tahun, kota ini sesungguhnya telah tumbuh dan semerbak dalam lintasan sejarah. Sejak ratusan tahun silam, di kota ini telah tumbuh sebuah peradaban yang mencatatkan dirinya sebagai salah satu peradaban yang berusia cukup tua di Nusantara. Kota ini dahulunya adalah ibukota imperium Kesultanan Buton yang jangkauan wilayahnya membentang di sepanjang wilayah kepulauan di Sulawesi Tenggara.

Dalam kitab *Negarakerlagama* yang ditulis tahun 1365 oleh pujangga Majapahit, Mpu Prapanca, Buton telah digambarkan sebagai salah satu wilayah Nusantara yang hendak ditaklukkan Mahapatih Gajah Mada. Catatan kuno dari Mpu Prapanca tersebut telah memberikan terang pandang bahwa wilayah ini telah lama dikenal oleh dunia luar sebagai kota yang pesat berkembang dan aktif dalam pergaulan internasional. Catatan itu telah menjelaskan bahwa wilayah ini telah lama menjadi persinggahan para penjelajah dan para pedagang internasional yang hendak menjangkau Maluku. Bahkan, sejumlah penjelajah asing yang masyhur seperti Jan Pieterzoon Coen, Cornelis Speelman, dan Pieter Both juga pernah mengunjungi kota ini. Merekalah yang kemudian menuliskan catatan dan mengabarkan keindahan wilayah ini ke dunia luar.

Beberapa studi dari sejarawan asing seperti J.W. Schorl juga menegaskan hal yang sama. Kota ini pernah menjadi pusat pemerintahan kesultanan yang juga menjadi pusat peradaban, pusat ilmu pengetahuan, dan pusat kemajuan wilayah di pesisir tenggara Pulau Sulawesi. Sebagaimana telah banyak dikemukakan,

Kesultanan Buton adalah salah satu kerajaan yang memiliki keragaman budaya yang tinggi, tetapi kesemuanya bisa berinteraksi dalam suasana yang harmoni, tanpa sebuah gejolak di kalangan warga yang beragam tersebut.

Catatan sejarah tersebut menjadi titik tolak yang baik untuk membahas bagaimana posisi Baubau pada masa kini. Pengalaman sebagai wilayah transit yang menjadi jalur perairan internasional telah memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat Baubau dalam berinteraksi dengan siapa saja. Interaksi tersebut tidak hanya bertukar kata atau bahasa, tetapi interaksi itu telah kian memperkaya kebudayaan setempat sebagai hasil dari perjumpaan kebudayaan. Oleh karena itu, iklim multikulturalisme atau iklim keragaman budaya tumbuh subur di kota ini sehingga masyarakatnya yang memiliki beragam bahasa dan budaya itu bisa hidup harmonis, tanpa sempat melahirkan konflik yang besar.

Salah satu fakta yang menarik untuk ditelaah adalah adanya keragaman bahasa serta kebudayaan di Kota Baubau. Dalam banyak kesempatan, saya sering bertemu dengan banyak orang yang mengatakan bahwa di kota ini terdapat banyak bahasa sehingga terkadang sukar untuk dipetakan satu per satu apa saja bahasa yang masih bertahan.

Bagi yang belum pernah ke wilayah ini, seringkali salah kaprah dan menganggap Baubau seperti halnya kota-kota besar lainnya yang memiliki satu bahasa daerah. Padahal tidaklah demikian. Pada beberapa kota besar di negeri ini, walaupun ada perbedaan bahasa, biasanya hanya berupa dialek sehingga masing-masing masih bisa saling memahami jika berkomunikasi dengan bahasa daerah. Namun, di Baubau justru sungguh berbeda. Ketika penutur satu bahasa berbincang dengan penutur bahasa lainnya dalam bahasa masing-masing, tidak terbangun kesepahaman, meskipun ada kosakata yang sama. Sebagai gambaran, dalam satu kecamatan saja, terkadang terdapat lebih dari satu bahasa lokal yang digunakan warga setempat.

3. Dialektika Bahasa dan Aksara di Baubau

Hasil pemetaan bahasa yang pernah dilakukan menunjukkan adanya sekitar 16 bahasa yang digunakan di Baubau sebagai bekas wilayah Kesultanan Buton (Fox dalam Southon; 1985). Pernah pula dilakukan pemetaan bahasa oleh tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa pada tahun 1994. Melalui pemetaan ini diketahui terdapat banyak bahasa di wilayah bekas Kesultanan Buton. Dalam peta bahasa yang dihasilkan terdapat beberapa nama bahasa yang diakui penduduk setempat: Moronene, Wawonii, Kulisusu, Kambowa, Kumbewaha, Ciacia, Gonda Baru, dan Todanga. Juga terdapat bahasa Wasilomata, Muna, Jawa, Siompu, Rahantari, Pulo (Kapota), Pulo (Kaledupa), Pulo (Binongko). Keempat bahasa terakhir ini banyak digunakan di Kepulauan Tukang Besi.

Namun, pemetaan ini sempat dibantah peneliti berkebangsaan Jerman bernama Horst Liebner yang menyebutkan ada 30 bahasa dan lebih seratus dialek (lihat Zuhdi 1999). Ini adalah jumlah yang mengejutkan untuk sebuah kota kecil seperti Baubau. Ini juga kian memperkuat fakta bahwa Baubau adalah wilayah yang sangat heterogen dengan banyak etnis serta bahasa di dalamnya. Satu hal yang sama dari sedemikian banyak bahasa itu adalah setiap akhir kata selalu dengan huruf vokal.

Saya kira, ini menjadi satu tantangan serius bagi para peneliti untuk memetakan berapa sesungguhnya bahasa daerah yang masih hidup di Baubau. Penelitian lebih lanjut akan membuka tabir kekayaan khasanah bahasa yang pernah hidup dan memberi napas bagi komunikasi warga Baubau sejak masa lampau. Satu hal yang perlu diapresiasi adalah persoalan keragaman bahasa itu tidak lantas membuat warga kehilangan kontak komunikasi satu sama lain, sebab bahasa Wolio -yang digunakan di sekitar keraton dan penyelenggaraan pemerintahan—kemudian dijadikan sebagai bahasa pemersatu.

Pada masa silam, bahasa Wolio menjadi *lingua franca* atau bahasa pemersatu yang digunakan di seluruh wilayah. Kesultanan Buton terbagi dalam empat bharata atau wilayah pertahanan luar serta 72 *kadie* (wilayah setingkat distrik) yang masing-masing memiliki pemerintahan otonom sendiri-sendiri. Inilah satu politik bahasa yang jenius pada zamannya. Bahwa berbagai macam etnis dan budaya itu mesti tetap berinteraksi dan saling memahami kebutuhan masing-masing sehingga mesti ada bahasa pemersatu yang mempertemukan komunikasi dan dialog di antara mereka.

Bersamaan dengan masuknya Baubau ke dalam atmosfer Indonesia, bahasa Indonesia yang kemudian menjadi paling sering digunakan sebagai bahasa pemersatu. Pada hari ini, sebagai bekas ibukota kesultanan, Baubau telah menjadi pusat pemerintahan yang masyarakatnya adalah miniatur dari masyarakat Buton itu sendiri. Ratusan bahasa yang masih dituturkan secara aktif oleh para penuturnya yang kian sedikit, dan sangat mendesak upaya-upaya untuk melestarikannya. Masalah ini telah coba dijawab oleh nenek moyang bangsa Buton pada masa silam. Ketika para penyebar agama Islam berdatangan, lahirlah sebuah sintesis berupa aksara *Buri Wolio* sebagai adaptasi aksara Arab untuk menuturkan Bahasa Wolio.

Prof. Rahim Yunus (1995) mencatat bahwa diperkirakan Islam sudah sampai ke Buton sejak abad ke-15, pada masa ketika penguasa Kerajaan Gowa belum memeluk Islam. Itu bisa diketahui melalui manuskrip Wan Muhammad Saghir yang menuliskan tentang kedatangan seorang ulama Patani (sebuah tempat di Thailand Selatan) di bagian timur Pulau Buton untuk menyebarkan agama Islam. Namun Islam diterima secara resmi sebagai agama kerajaan sejak pemerintahan Raja Buton VI Lakilaponto atau Murhum pada tahun 948 H atau 1540 Masehi.

Bagi saya, adaptasi aksara Arab untuk menuliskan bahasa Wolio menunjukkan dialog-dialog kebudayaan yang amat cerdas. Melalui aksara itu, bahasa Wolio kemudian dituliskan sehingga bisa lestari dan dibaca generasi sekarang. Berkat aksara itu pula, telah tertulis ribuan lembar naskah-naskah, baik keagamaan maupun dunia sosial, yang ditulis para ulama setempat dan sultan sebagai kabar kepada rakyat. Tulisan mereka bukan saja menyalakan pijar intelektualitas, tetapi telah mengabadikan khasanah kekayaan bahasa itu dan abadi dalam sejarah.

Melalui tradisi penulisan naskah pula, terbentang jaringan dengan ulama-ulama di tempat lain sehingga banyak kitab-kitab tasawuf yang hadir di Buton dan terbuka akses bagi seluruh masyarakat untuk merengkuh dunia pengetahuan. Terbentuk pula jaringan dengan kerajaan lain melalui tradisi menulis naskah atau persuratan. Sebagai bahasa korespondensi, surat tersebut dituliskan dalam bahasa Melayu dengan menggunakan aksara Arab.

Bagi kita yang hidup pada masa kini, adaptasi aksara Arab tersebut telah menunjukkan sisi dialektis untuk mengembangkan bahasa. Dialektika terjadi ketika bahasa Wolio mengalami pertemuan dengan aksara Arab sehingga lahirlah aksara *Buri Wolio*. Pertemuan ini menunjukkan kemampuan adaptasi serta strategi yang dikembangkan oleh nenek moyang Buton untuk mempertahankan kelestarian bahasa Wolio. Melalui aksara, bahasa daerah mengalami pelestarian. Kita, generasi yang hidup pada masa kini, menerima warisan berharga berupa bahasa daerah yang utuh dan telah dituliskan dalam sebuah aksara.

Seiring dengan kemajuan zaman dan terintegrasinya wilayah ini ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kembali masyarakat diperkenalkan dengan aksara latin yang menjadi aksara untuk menuliskan bahasa Indonesia. Pengadaptasian aksara latin dengan cepat menjadi cerminan dari kian cepatnya masyarakat mengadaptasi sebuah aksara, tanpa kehilangan akar kulturalnya sendiri. Malah, aksara Arab dan Latin tersebut kian memperkuat identitas Baubau sebagai wilayah yang multikultur dan terbuka dengan berbagai kebudayaan, namun tetap tidak kehilangan ciri khas kulturalnya sendiri.

4. Kebijakan Aksara di Baubau

Pada hari ini, Baubau masih memainkan posisi penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di jazirah tenggara Sulawesi. Baubau tidak bisa luput dari globalisasi yang melanda seluruh wilayah-wilayah dunia. Kian majunya teknologi komunikasi menyebabkan masyarakat Baubau mau tak mau harus berhadapan dengan berbagai penetrasi globalisasi yang merambah hingga ke sendi-sendi kehidupan masyarakatnya. Kekhawatiran akan infiltrasi budaya asing dan modern yang bersifat negatif sangat kuat, dan memasuki segala segi kehidupan masyarakat.

Gejala seperti ini, harus dilihat sebagai suatu ancaman terhadap tata nilai budaya dan peninggalan budaya bersejarah Kota Baubau yang dianggap sakral dan menjadi bagian dari kehidupan seluruh masyarakat Kota Baubau. Melalui penyelamatan tata nilai serta khasanah budaya yang ada, diharapkan eksistensi tata nilai budaya masyarakat Kota Baubau dapat terjaga dan terhindar dari degradasi kultural yang telah melanda sebagian wilayah Indonesia. Hal tersebut harus diekspresikan secara formal dalam bentuk program pemerintah, yang melibatkan komponen masyarakat dan pemuka agama.

Namun, pemaknaan globalisasi sebagai sesuatu yang negatif jelas tidak selalu benar. Globalisasi harus pula dilihat sebagai peluang yang akan melejitkan potensi suatu wilayah sehingga tidak terkungkung. Globalisasi bisa menjadi kekuatan pengubah sepanjang dialektikanya dipahami dan diarahkan untuk menggapai tujuan-tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Pengalaman sejarah di Kota Baubau telah menunjukkan bahwa globalisasi yang termanifestasikan dalam bentuk lahirnya adaptasi aksara Arab dan latin justru bisa menjadi kekuatan yang memelihara kelestarian budaya Wolio. Adaptasi aksara itu tidak lantas membuat warga Baubau menjadi Arab atau menjadi Latin. Mereka tetap menjadi masyarakat Baubau yang memelihara dan melestarikan tatanan budayanya. Justru melalui globalisasi di bidang aksara, terbuka gerbang emas untuk tetap melestarikan bahasa daerah sehingga tidak lekang oleh perkembangan zaman.

Dalam konteks bahasa, salah satu masalah besar yang mesti dihadapi adalah bagaimana melestarikan berbagai bahasa daerah yang bertebaran di seluruh penjuru kota ini. Tanpa upaya pelestarian, bahasa-bahasa tersebut akan menjadi monumen yang hanya bisa dikenang oleh orang-orang. Pada zaman global sebagaimana saat ini, bahasa lokal perlahan menjadi nyanyian sunyi yang tidak diperhatikan sehingga ada kekhawatiran akan kepunahan pada masa-masa mendatang. Untuk itu, upaya-upaya pelestarian dan revitalisasi mesti dilakukan demi menyelamatkan khasanah kebudayaan tersebut.

Pada saat ini, Pemerintah Kota Baubau telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Korea untuk melestarikan bahasa Ciacia melalui adaptasi aksara Hangeul ke dalam kurikulum muatan lokal. Kebijakan ini adalah sebuah langkah strategis untuk menyelamatkan bahasa Ciacia sebagai salah satu daerah yang banyak penggunaannya di kota ini. Pemkot Baubau dan Korea telah membangun kesepahaman untuk pelestarian bahasa Ciacia melalui adaptasi huruf Hangeul ke dalam kurikulum muatan lokal. Kerja sama ini akan diperluas sehingga tidak hanya menyentuh wilayah kebudayaan, tetapi juga merambah ke berbagai bidang, mulai dari pertanian, peternakan, hingga sektor lainnya.

Melalui kerja sama ini, bahasa Ciacia—yang pada masa silam tidak/belum memiliki aksara—akan didokumentasikan melalui huruf Hanggeul sehingga bisa dilestarikan. Pemerintah bersikap terbuka pada segala upaya pelestarian yang tidak menghilangkan karakter lokal. Dalam hal kerja sama tersebut, pemerintah menilai langkah tersebut sangat tepat untuk menjaga warisan bahasa Ciacia.

Kerjasama ini sering disalahpahami dengan berbagai macam isu-isu yang negatif. Ada yang mengatakan bahwa kerja sama itu akan menghilangkan identitas Ciacia dan kebutonan. Padahal, yang diajarkan hanyalah Ciacia dengan menggunakan huruf Hanggeul. Ada pula yang menilai kerja sama itu sebagai bentuk koreanisasi atas kebudayaan di Baubau. Ada yang mengaitkannya dengan isu nasionalisme. Malah, ada pula yang menilai kerjasama itu dengan kacamata politis sehingga kita terkesan jalan di tempat, tanpa beranjak sedikit pun.

Bagi saya, berbagai pandangan tersebut menunjukkan penafsiran yang berbeda terhadap upaya pelestarian. Ini menunjukkan perbedaan cara memandang kebudayaan serta bagaimana memelihara warisan budaya dari masa silam. Terhadap kelangsungan bahasa dan kebudayaan, terdapat dua pandangan yang saling bersaing dan menunjukkan posisi berpikir masing-masing.

Pertama adalah pandangan yang melihat kebudayaan sebagai sesuatu yang statis atau tetap sebagaimana adanya. Penganut pandangan ini ingin mempertahankan sesuatu sebagaimana adanya pada masa silam. Mereka melihat kebudayaan seperti porselen yang harus dijaga keasliannya, meskipun secara perlahan porselen itu digerosoti zaman. Oleh karena itu, kelompok ini cenderung anti-perubahan dan tidak bersedia menerima hal-hal yang baru. Dalam hal bahasa Ciacia, mereka berpandangan bahwa bahasa ini harus dibiarkan saja, sebagaimana adanya, tanpa melakukan upaya untuk menghalanginya dari kepunahan. Sejarah mencatat tentang banyaknya bahasa yang punah akibat tidak mampu beradaptasi dengan perubahan sosial yang tengah berlangsung. Pertanyaan yang kemudian mencuat adalah apakah kebudayaan Buton dan Ciacia harus punah di pentas sejarah? Pertanyaan ini mesti sama-sama dijawab.

Kedua, pandangan yang melihat kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamis dan terus berdialektika di sepanjang sejarah. Kelompok ini melihat dinamika sebagai sesuatu yang wajar dan mesti dikelola dengan positif sehingga memberikan manfaat bagi banyak pihak. Kebudayaan harus mengalami dinamika atau perkembangan sesuai dengan konteks zamannya sehingga tidak mengalami kepunahan. Kebudayaan laksana air yang terus mengalir, tetapi tidak pernah meninggalkan bumi. Pengalaman sejarah bangsa Buton dan dinamika di Kota Baubau telah memberikan pemahaman bahwa adaptasi aksara Arab dan Latin juga pernah terjadi dan sukses mentransformasikan bahasa menjadi khasanah yang lestari. Pengalaman itu menjadi pelajaran berharga bahwa untuk melestarikan dan merevitalisasi sesuatu, mesti ditempuh upaya-upaya yang maksimal demi mewariskannya kepada anak cucu di kemudian hari.

Posisi Pemerintah Kota Baubau adalah melihat kebudayaan tersebut sebagai sesuatu yang dinamik dan terbuka dengan gagasan-gagasan baru serta perjumpaan dengan kebudayaan lain. Tanpa mengembangkan dan memperkaya kebudayaan, kita akan berhadapan dengan kepunahan, sementara di saat bersamaan kita harus menjaga warisan masa silam sebagai suatu pusaka berharga bagi generasi pada masa depan. Saya berharap kerja sama ini bisa menjadi awal bagi upaya pelestarian khasanah bahasa daerah yang lebih luas. Tidak cuma Bahasa Ciacia saja, namun juga ratusan bahasa lainnya di kota ini.

Pemerintah menyadari betul adanya keragaman budaya serta tradisi sebagai hasil dari pertautan berbagai kebudayaan tersebut. Hingga kini, Baubau telah menjadi *melting pot* atau tempat bertemunya berbagai latar kebudayaan. Itu bisa dilihat dari keanekaragaman bahasa daerah yang ada. Untuk itu, dalam rangka pelestarian bahasa daerah dan nilai-nilai budaya lokal, prioritas pembangunan budaya perlu diarahkan pada upaya menumbuhkembangkan tata nilai budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat, bersamaan dengan upaya peningkatan informasi dan promosi serta kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang kebudayaan dan seni tradisional. Kebijakan ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah bahwa kontinuitas budaya masa lalu perlu dilestarikan dan dipertahankan oleh seluruh komponen masyarakat di Kota Baubau dan secara simultan diupayakan peningkatan perhatian kalangan ilmuan dan wisatawan.

5. Penutup: Segelas Cinta di Kota Baubau

Pada akhirnya, makalah ini hanyalah sebuah pemetaan terhadap keping-keping kenyataan sosial. Harapan terbesar adalah menemukan benang merah strategi kebudayaan yang tepat sebagai bahan masukan bagi lahirnya kebijakan tentang bahasa dan keberaksaraan di Kota Baubau. Makalah ini hanyalah pemetaan awal yang seyogianya bisa dilanjutkan ke dalam agenda riset para peneliti dan ilmuwan untuk menemukan strategi yang tepat untuk memelihara aneka ragam bahasa di Baubau.

Semoga Kongres Bahasa Daerah ini bisa menemukan jawaban atas semua pertanyaan mengenai upaya pelestarian bahasa. Semoga Kongres ini tertoreh dalam lembar sejarah sebagai tempat bersemainya gagasan untuk menyelamatkan bahasa, merawat kebudayaan, sekaligus menjaga warisan berharga yang kita terima. Semoga kita tercatat sebagai sosok-sosok yang menjaga pohon peradaban yang tumbuh semerbak di bumi tercinta ini.

Sebagai akhir, saya mengutip sebuah anekdot di kalangan mereka yang mengunjungi Baubau. Konon, mereka yang mengunjungi kota ini meyakini bahwa sekali meminum air di kota ini, maka pasti suatu saat akan kembali lagi. Dulu, saya tak paham apa maknanya. Namun, setelah berdiskusi dengan banyak orang, kini saya paham apa maknanya. Hal ini disebabkan di Bumi Kota Baubau ini terdapat air abadi yang selalu mengalir di relung-relung hati semua orang. Air itu adalah segelas cinta dan keramahan warga dan seluruh anggota masyarakat yang menerima semua orang di sini.

Semoga para hadirin menemukan air itu di sini. Saya percaya, kedatangan para hadirin di Baubau bukanlah akhir, tetapi sebagai awal dari rangkaian kunjungan di kota semerbak yang indah ini. Semoga tetes-tetes hikmah dan inspirasi akan lahir dari forum yang berbahagia ini.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Pleno I
Hari, Tanggal, Pukul	: Senin, 19 Juli 2010, 08.30—09.30 wita
Judul Makalah	: Dialektika dan Kebijakan Keberaksaraan di Kota Baubau
Penyaji/Pembicara	: Drs. Mz. Amirul Tamim, M.Si.
Pemandu	: Drs. Sudjiton, M.M.
Pencatat	: Drs. L.M. Budi Wahidin M, M.Pd.
Jumlah Peserta	: 400 orang

TANYA JAWAB

Prof. Dr. La Ode Sidu, M.S. (Universitas Haluoleo, Kendari)

Pertanyaan/Saran

1. Dalam upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah perlu dilibatkan secara langsung generasi muda sehingga mereka ikut merasakan dan mengemban dengan penuh tanggung jawab ini bahwa hidup matinya bahasa daerah berada di tangan mereka.
2. Sebaiknya kebijakan pemerintah tidak hanya harus memikirkan pembelajaran bahasa daerah tetapi perlu juga memikirkan dan mengatasi pembelajar itu sendiri.

Jawaban/Tanggapan

1. Berkaitan dengan Perda pelestarian dan pengembangan budaya sudah ada dan sudah diterapkan, misalnya melalui pembuatan muatan lokal bahasa daerah dan penulisan nama jalan dan papan nama instansi dengan bahasa daerah. Namun, dalam pembuatan dan penerapan suatu perda perlu ada kehati-hatian karena sering perda tersebut dibuat hanya untuk dilanggar, bukan untuk dilaksanakan. Kalau payung nasionalnya sudah kuat memayungi daerah, itulah yang digunakan dan diterapkan.
2. Regulasi secara nasional mengenai pelestarian dan pengembangan bahasa daerah dibutuhkan untuk memayungi aturan-aturan yang ada di bawahnya. Namun, aturan-aturan yang ada di bawah sering bertabrakan dengan kebijakan yang ada di atasnya. Hal ini disebabkan adanya fanatisme-fanatisme sempit yang bisa jadi bom waktu.

Kebijakan penggunaan aksara Hanggul dalam bahasa Ciacia di Kota Baubau merupakan upaya pemerintah meningkatkan daya tarik remaja untuk belajar bahasa daerah yang cenderung monoton. Kami meyakini bahwa penggunaan aksara Hanggul dalam bahasa Ciacia tidak mengurangi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Ciacia karena bahasa yang digunakan tetap bahasa Ciacia.

Ir. L.M. Syafei Kahar
(Bupati Buton)

1. Pendahuluan

"Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura dan sebagainya), bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup" (Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36)

Dalam kehidupan manusia, bahasa memainkan peran yang sangat vital dan menentukan. Melalui bahasa seseorang dapat berhubungan dengan orang lain atau bahkan dengan dirinya sendiri. Ketika digunakan untuk berhubungan dengan orang lain, bahasa berperan sebagai sarana komunikasi. Pada saat seseorang berhubungan dengan dirinya sendiri, bahasa tampil sebagai sarana berpikir. Sarana berpikir dan sarana komunikasi ini pada hakikatnya merupakan dua fungsi utama bahasa yang utama.

Sebagai sarana berpikir, bahasa digunakan dalam proses internalisasi dan konseptualisasi: mencerna gagasan, memantapkan konsep, dan menghubungkan pandangan yang satu dengan pandangan yang lain sehingga diperoleh sejumlah buah pikiran yang menurut bersangkutan pantas dan dapat disampaikan kepada orang lain, baik secara tertulis maupun lisan. Hal yang disebutkan terakhir ini memperlihatkan pemakaian bahasa sebagai sarana komunikasi.

Gambaran singkat mengenai fungsi bahasa itu berlaku untuk semua bahasa alami (*natural language*). Tinjauan terhadap bahasa daerah pada makalah ini juga berkenaan dengan dua macam fungsinya seperti disebutkan di atas, terutama pemakaiannya sebagai sarana komunikasi.

Bahasa daerah (BD) di Indonesia yang jumlahnya menurut Anton M. Moeliono (1998:1) tidak kurang dari 750 bahasa dan logat, yang dipakai oleh penduduk yang terdiri atas 250 suku dan etnis lebih, merupakan aset budaya bangsa yang tidak ternilai harganya karena melalui wahana BD dapat dilestarikan keanekaragaman budaya daerah yang ada, sekaligus menjadi wahana penyangga budaya bangsa, serta pemer kaya ilmu-ilmu linguistik.

Beberapa tahun terakhir, perhatian para ahli dan pemerhati bahasa daerah di seluruh Indonesia terpusat pada upaya pelestarian atau lebih tepatnya disebut penyelamatan bahasa daerah. Pemerhati bahasa daerah cemas dan khawatir akan nasib bahasa daerah yang perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya. Pada acara pembukaan Kongres Bahasa Jawa IV tahun 2008 yang lalu, Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo, menyatakan bahwa bahasa Jawa adalah bahasa daerah yang memiliki jumlah penutur yang besar. Namun, dalam perkembangan tatanan kehidupan baru, terutama di kalangan generasi muda, bahasa Jawa mulai ditinggalkan. Jika bahasa Jawa saja yang memiliki jumlah penutur besar mulai ditinggalkan, bagaimana nasib bahasa-bahasa daerah lain di Indonesia, termasuk bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Tenggara yang memiliki jumlah penutur lebih sedikit daripada bahasa Jawa?

Kita memafhumi bersama bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Buton adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan bahasa. Kabupaten Buton adalah daerah multibahasa. Empat suku besar di daerah ini memiliki bahasa daerah sendiri-sendiri. Wolio dengan bahasa daerah Wolio yang memiliki banyak varian dan dialek/subdialek. Muna dengan bahasa daerah Muna, juga memiliki banyak varian dan dialek/subdialek. Moronene dengan bahasa daerah Moronene. Syahrudin Kaseng, dkk. dalam penelitian pemetaan bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara menuliskan bahwa di Kabupaten Buton terdapat 18 bahasa daerah, di antaranya adalah bahasa Wolio, Ciacia, Pulo (Wakatobi), dan lain-lain. Kemajemukan bahasa tersebut menyebabkan situasi kebahasaan di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Buton, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Kemajemukan bahasa di Kabupaten Buton disebabkan oleh topografi dan keadaan alam daerah ini yang terdiri atas daratan dan sebagiannya adalah pulau-pulau yang terbentang dari ujung barat kaki jazirah Sulawesi Tenggara menuju ke arah tenggara sampai ke Laut Flores. Kemajemukan tersebut bisa juga terjadi karena peranan dan kedudukan daerah ini pada masa silam. Bahasa-bahasa daerah sebagai kekayaan dan aset daerah itu perlu terus dipelihara dan dikembangkan karena bahasa daerah mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu sebagai lambang kebanggaan daerah, sebagai lambang identitas daerah, sebagai alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, sebagai sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, dan sebagai pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia. Jika kita menyadari fungsi penting yang diemban bahasa daerah itu, sudah selayaknya kita tetap menggunakan dan mengembangkan bahasa daerah di tengah-tengah masyarakat pendukungnya. Bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai kebanggaan, identitas, alat penghubung, dan pendukung kebudayaan daerah. Punahnya bahasa daerah, berarti kepunahan kekayaan nilai budaya bangsa yang berimplikasi pada hilangnya keberadaan bangsa.

2. Buton Sebagai Daerah yang Memiliki Kemajemukan Bahasa

Studi variasi bahasa dan kekerabatan bahasa-bahasa di daerah Kabupaten Buton sudah cukup banyak dilakukan oleh para pakar dan peneliti bahasa, tetapi hasil yang diperoleh adalah masih terdapatnya kesimpangsiuran jumlah bahasa di daerah penghasil aspal ini. Kesimpangsiuran itu salah satu penyebabnya adalah ketidakseragaman teori dan metode yang digunakan dalam menyoroti bahasa-bahasa di daerah Kabupaten Buton. Lebih jauh lagi bahwa penelitian yang secara spesifik bertujuan untuk menentukan jumlah bahasa di daerah kabupaten Buton belum pernah dilakukan. Yang pernah dilakukan dalam jumlah yang lebih besar ialah kajian dialek geografi bahasa-bahasa tertentu melalui proyek pemetaan bahasa yang dilaksanakan mulai tahun 1970-an sampai dengan pertengahan 1980-an oleh Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional.

B.H. Burhanuddin, 1979, mengklasifikasi bahasa daerah di Kabupaten Buton berdasarkan monografi daerah Sulawesi Tenggara 1974—1975 sebagai berikut;

Bahasa Wuna (Muna) :

- dialek Mawasangka
- dialek Gu
- dialek Siompu
- dialek kadatua
- dialek Katobengke

Bahasa Pancana :

- dialek Lasalimu
- dialek Kamaru
- dialek Kapontori
- dialek Kaesabu

Bahasa Wolio :

- dialek Keraton
- dialek Pesisir
- dialek Bungi
- dialek Tolandona
- dialek Talaga

Bahasa Ciacia :

- dialek Wabula
- dialek Sampolawa
- dialek Laporo
- dialek Takimpo
- dialek Kondowa
- dialek Holimombo
- dialek Watuata
- dialek Wali

Klasifikasi di atas tentu saja masih sangat kabur dan tidak mengemukakan metode yang digunakan. Oleh karena itu, Burhanuddin kembali melakukan pengkajian untuk mengelompokkan bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara, termasuk Kabupaten Buton. Beliau menggunakan daftar 100 kosakata yang merupakan perbendaharaan dasar dari bahasa-bahasa yang diteliti itu dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- perbedaan salah satu fonem dapat diabaikan
- penentuan kata seasal mencakup kata-kata dari dialek bahasa-bahasa yang dibandingkan
- imbuhan dapat diabaikan
- hukum bunyi (korespondensi fonemus)

Dalam tulisan Burhanuddin dikemukakan pula asal dan persebaran bahasa-bahasa tersebut dilengkapi dengan perhitungan waktu pisah. Penelitian Burhanuddin ini menghasilkan pengelompokan sebagai berikut:

L. Kelompok bahasa Muna—Ciacia:

1. Bahasa Muna:

- dialek Wuna : subdialek Wuna
subdialek Bombonawulu
subdialek Mawasangka
- dialek Gu (Lakudo)
- dialek Katobengke
- dialek Kadatua
- dialek Siompu

2. Bahasa Pancana (Suai):

- dialek Kapontori
- dialek Kambowa

- dialek Kalende: subdialek Kalende
 subdialek Lawele
- dialek Labuandiri
- 3. Bahasa Ciacia:
 - dialek Sampolawa: subdialek Mambulu
 subdialek Laporo
 - dialek Wabula: subdialek Wabula
 subdialek Burangasi
 subdialek Wali
 subdialek Takimpo
 subdialek Kondowa
 subdialek Holimombo

- II. Bahasa Wolio
- III. Bahasa Kamaru
- IV. Bahasa Lasalimu

Pada tahun 1987 Syahrudin Kaseng melakukan penelitian pemetaan bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara. Sumber utama yang dipakai oleh Kaseng untuk mencari hubungan bahasa secara sinkronik ini adalah 200 daftar kata Morris Swadesh seperti yang biasa digunakan dalam metode leksikostatistik. Namun, dalam penelitian ini metode leksikostatistik tidak secara murni diterapkan karena penelitian yang dilakukan itu tidak mencari hubungan kekerabatan secara diakronik. Dalam mengusahakan pemetaan bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara, digunakan cara yang dilakukan J.C. Anceaux (1961) dalam memetakan bahasa-bahasa di Pulau Yapen.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam 18 bahasa yang ditemukan di daerah Kabupaten Buton, terdapat beberapa bahasa yang memperlihatkan hubungan yang sangat dekat. Akan tetapi, hal ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut apakah memang merupakan bahasa yang berdiri sendiri ataupun hanya merupakan dialek bahasa lainnya. Bahasa-bahasa yang memperlihatkan hubungan yang sangat dekat adalah sebagai berikut.

- (a) Bahasa Wabula dan Bahasa Ciacia
- (b) Bahasa Wolio dan Bahasa Kamaru
- (c) Bahasa Kulisusu dan Bahasa Kambowa
- (d) Bahasa Morunene dan Bahasa Kabaena
- (e) Bahasa Lawele, Kakenauwe, dan bahasa Kambowa
- (f) Bahasa Siompu, Laompo, Mawasangka, Gu, Lakudo, dan Bahasa Katobengeke.

Penelitian kekerabatan dan pemetaan bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara, khususnya di daerah Kabupaten Buton juga telah dilakukan oleh beberapa pakar/linguis seperti Multamia Lauder (2000), La Ode Sidu, dkk. (2001—2002), T. David Andersen (2006). Simpulan dan temuan para pakar/linguis itu pada umumnya sama yakni Buton adalah daerah yang memiliki pluralitas pada sisi bahasa, memiliki kekayaan tradisi dan sastra lisan daerah. Tentu saja pemerintah daerah akan menjadi lokomotif utama dan mengambil peran pada upaya menjaga dan menyelamatkan aset yang sangat berharga daerah dan nasional itu

3. Memantapkan dan Melestarikan Bahasa Daerah Kabupaten Buton.

Bahasa daerah yang dipelihara secara baik-baik oleh masyarakat pemakainya akan tetap mantap. Oleh karena itu, urutan prioritas yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan bahasa daerah harus didasarkan pada tingkat kemantapan bahasa daerah yang bersangkutan. Makin tinggi tingkat kemantapan suatu bahasa daerah akan makin tinggi pula kewajiban pemerintah daerah untuk memelihara dan menghormatinya.

Tingkat kemantapan bahasa daerah itu dapat diamati melalui beberapa faktor, misalnya (1) faktor jumlah penuturnya, (2) faktor budaya atau tradisi tulisnya, (3) faktor pemakaiannya dalam bidang pendidikan, dan (4) faktor peranannya sebagai sarana pendukung kebudayaan daerah yang bersangkutan (Ajib Rosidi, 1976)

Yang perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh adalah faktor ketiga, yaitu bahasa daerah yang digunakan dalam bidang pendidikan. Di atas telah dituliskan bahwa bahasa daerah digunakan sebagai bahasa pengantar pada tahap awal pendidikan di sekolah dan juga digunakan sebagai salah satu mata pelajaran. Yang disebutkan terakhir, dewasa ini memperlihatkan gejala yang memprihatinkan, sebagaimana terlihat, misalnya, pada makin menurunnya minat mahasiswa untuk memilih bahasa daerah sebagai bidang studinya. Selain itu, sering juga disampaikan keluhan tentang kurang memuaskannya pelaksanaan pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah sehingga diperlukan penataan kembali berbagai hal yang berkenaan dengan pengajaran bahasa daerah tersebut, seperti kurikulum, kualifikasi tenaga pengajar, mutu buku pelajaran, dan yang tidak kalah penting dan strategis adalah lingkungan yang mendukung. Masalah penataan kembali

pengajaran bahasa daerah itu cukup mendesak untuk segera ditangani karena mutu pemakaian bahasa daerah di kalangan generasi muda terlihat makin menurun.

Upaya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah di Kabupaten Buton hendaknya bermuara pada tujuan sebagai berikut.

1. Bahasa daerah, khususnya di Kabupaten Buton, makin mantap sehingga dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dan sarana ekspresi.
2. Mutu pemakaian bahasa daerah di Kabupaten Buton oleh para penuturnya makin meningkat.
3. Bahasa dan sastra daerah Kabupaten Buton benar-benar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan daerah dan juga menjadi bagian dari kebudayaan nasional.
4. Penelitian dan pengembangan sastra daerah Kabupaten Buton makin giat dilakukan.
Untuk mencapai tujuan-tujuan itu, hal-hal berikut perlu mendapat perhatian.
 - a. Bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar hendaknya benar-benar efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan atau isi mata pelajaran yang disajikan. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan bahwa untuk daerah dan sekolah tertentu, tersedia pengajar yang benar-benar menguasai bahasa daerah yang bersangkutan.
 - b. Bahasa daerah yang digunakan sebagai salah satu mata pelajaran, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, hendaknya merupakan bahasa yang tidak saja mencerminkan kekayaan budaya daerah yang bersangkutan, tetapi juga merupakan bahasa yang dapat dimanfaatkan untuk memperkaya khazanah bahasa dan budaya Indonesia pada umumnya.
 - c. Untuk memantapkan kedudukan bahasa daerah sebagai alat komunikasi yang dapat digunakan oleh para penuturnya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan semangat dan suasana budayanya, penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah perlu dilakukan secara lebih giat, berencana, dan terarah.
 - d. Kegiatan penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah itu sekurang-kurangnya harus diarahkan pada dua keperluan yang cukup mendesak, yaitu disusunnya kamus dan sketsa tata bahasa dari bahasa daerah di Kabupaten Buton. Untuk kepentingan yang lebih luas, kamus itu hendaknya kamus dwibahasa (kamus bahasa daerah-bahasa Indonesia dan atau bahasa Indonesia-bahasa daerah)
 - e. Untuk melaksanakan kegiatan yang disebutkan pada butir c dan d di atas, perlu ada koordinasi yang baik di antara berbagai pihak, misalnya, perguruan tinggi, pusat/lembaga penelitian, Pusat Bahasa/Balai dan Kantor Bahasa, dan tentu saja pemerintah daerah.
 - f. Kegiatan penerbitan bahasa daerah, baik yang berupa buku, surat kabar, maupun majalah perlu mendapat dorongan yang layak (bila dianggap perlu bahkan memperoleh subsidi)
 - g. Mengingat begitu majemuknya bahasa daerah di Kabupaten Buton, penelitian dan pemetaan bahasa-bahasa daerah sebagai lanjutan penelitian terdahulu sangat mendesak dilakukan.

4. Manfaat Pemetaan Bahasa bagi Pemerintah Daerah

Pemetaan terhadap bahasa-bahasa yang ada dalam suatu pemerintahan negara/daerah yang berciri multilingua merupakan tanggung jawab yang penting dalam rangka penyelamatan kekayaan budaya bangsa/daerah. Pemerintah sebagai perwakilan masyarakat tentunya sangat mengharapkan segala aspek budaya yang ada di dalam kelompok masyarakatnya dapat teridentifikasi demi kepentingan pelestarian dan pengembangan aset budaya tersebut.

Daerah Kabupaten Buton dengan ciri kemajemukannya, baik dari segi etnisitas maupun kebahasaan sepatutnya berupaya mengidentifikasi, menentukan, dan menetapkan kemajemukan berdasarkan kelompok-kelompoknya secara terarah dan teratur. Salah satu upaya untuk mengetahui secara tepat keragaman bahasa yang ada di daerah multilingua ini adalah dengan mengadakan pemetaan bahasa yang menyeluruh.

Peta bahasa yang merupakan hasil identifikasi yang lengkap mengenai keberadaan bahasa-bahasa daerah di Indonesia akan sangat bermanfaat bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil pemetaan bahasa-bahasa di Indonesia antara lain teridentifikasinya jumlah bahasa daerah di Kabupaten Buton. Identifikasi terhadap bahasa-bahasa daerah ini akan menunjukkan beragamnya etnis, budaya dan ciri sosial lainnya dalam satu masyarakat daerah tertentu. Melalui peta bahasa, pemerintah daerah dapat mengetahui jumlah etnis dan bahasa yang ada di daerahnya, yang nantinya dapat membantu pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan kemasyarakatan dengan menggunakan pendekatan sosial kebahasaan.

Kemajemukan etnis, bahasa, dan budaya yang ada dalam masyarakat sebuah daerah, menjadikan masyarakat daerah itu harus pandai memilih sikap yang sesuai. Pemahaman terhadap karakter dan budaya suatu kelompok masyarakat yang berbeda dengan kelompoknya dapat menjadi modal untuk tetap hidup rukun dan damai, satu dengan yang lainnya. Peta bahasa akan membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan mengetahui kelompok-kelompok masyarakat atau individu yang ada dalam wilayah pemerintahannya. Dengan

demikian konflik-konflik komunal yang kadang terjadi akibat ketidakkomunikatifan antarmasyarakat yang hidup bertetangga dapat dihindari.

Peta bahasa juga akan sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dan pertahanan keamanan nasional/daerah. Informasi yang lengkap dan akurat mengenai kondisi dan posisi kebahasaan yang ada di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat dijadikan acuan untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat.

Berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini seperti ancaman disintegrasi dapat saja menjadi ancaman yang serius terhadap bangsa Indonesia. Ancaman disintegrasi bukan hanya disebabkan oleh ancaman dari luar tetapi dapat juga disebabkan oleh kekuatan dari dalam negeri. Misalnya, masyarakat etnisitas di Indonesia beramai-ramai menggunakan bahasa daerahnya dan meninggalkan bahasa Indonesia, apa yang kemudian terjadi? Kemultietnisan di Indonesia memang telah menjadi perhatian yang serius dari pihak kementerian terkait. Kementerian Pertahanan Keamanan merupakan instansi yang paling aktif dalam menggalang persatuan dan kesatuan demi tetap langgengnya NKRI. Pendekatan sosiokultural selama ini telah digunakan oleh aparat keamanan dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya konflik di negeri ini.

Patut mendapat perhatian, perbedaan kultural suatu masyarakat dapat diidentifikasi melalui pengelompokan bahasa-bahasa daerah yang ada dalam masyarakat. Sampai saat ini, belum ada suatu referensi yang menampilkan secara keseluruhan potensi bahasa, budaya, dan ciri sosial lainnya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peta bahasa dapat dijadikan alat untuk mengetahui dan memahami kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan pendekatan perbedaan bahasa

Pemetaan bahasa di daerah juga memiliki nilai berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Bahasa-bahasa yang ada di wilayah Kabupaten Buton bukan saja merupakan bagian kekayaan budaya bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan sarana pendukung ilmu pengetahuan.

Sebagaimana telah dituliskan terdahulu bahwa peta bahasa dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan bahasa-bahasa di daerah yang multilingua berdasarkan ciri-ciri khususnya. Ciri-ciri khusus inilah yang nanti dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya pada ilmu kebahasaan, ilmu budaya, dan ilmu-ilmu sosial yang terkait. Pada aspek yang lain peta bahasa memiliki manfaat yang sangat penting dalam rangka perencanaan dan penyusunan kebijakan daerah terhadap bahasa-bahasa di daerah tersebut yang telah berhasil dipetakan. Peta bahasa juga akan sangat membantu perencanaan terhadap bahasa-bahasa yang mengalami pergeseran dan bahkan mengalami atau terancam kepunahan.

5. Penutup

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang telah dikemukakan, maka upaya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah itu harus merupakan upaya yang pada dasarnya akan mendukung keberadaan bahasa daerah agar mampu berperan dengan sebaik-baiknya sebagai sarana internalisasi/konseptualisasi, sarana komunikasi, dan sarana ekspresi.

Sementara itu, berbagai langkah perencanaan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah perlu disusun dengan tepat dan cermat agar diperoleh hasil yang berupa peningkatan, baik yang menyangkut kemandirian bahasa daerah itu sendiri, maupun yang berhubungan dengan mutu pemakaian yang diperagakan oleh para pemakainya.

Bahasa daerah yang mantap dan pemakaiannya yang bermutu pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi perkembangan dan pengembangan kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. 1996. "Situasi Kebahasaan Masa Kini: Kepungan Eksternal dalam Perkembangan Bahasa dan Wacana Indonesia". Dalam Yudi Latif dan Idi Subandi (Ed): 345—362. *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan
- Alwi, Hasan. 1993. "Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Daerah". Makalah Simposium Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jawa, Kaliurang, 26—27 Juli 1993
- Ayatrohaedi. 1991. *Pemetaan Bahasa dan Ketahanan Nasional*. Makalah pada Seminar Bahasa dan Ketahanan Nasional, diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bekerjasama dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional di Jakarta, 11—14 Maret.
- Halim, Amran (Ed). 1976. *Politik Bahasa Nasional*. Jilid 2. Jakarta; Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Koentjaraningrat. 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rosidi, Ajib. 1976. "Pengembangan Bahasa Daerah". Dalam Amran Halim (Ed): 103—115. *Politik Bahasa Nasional*. Jilid 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Wurm, S.A. dan Shiro Hattori. 1981. *Language Atlas of the Pacific Area*. Canberra: The Australian Academy of the Humanities/The Japan Academy.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Pleno VI
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 20 Juli 2010, 07.30 – 09.00
Penyaji/Pemakalah	: Bupati Buton
Judul Makalah	: Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Pemertahanan dan Pelestarian Bahasa- Bahasa Daerah di Daerah Pluralis
Pemandu	: Dr. Muh. Rasman Manaf, S. P., M. Si
Pencatat	: Firman A.D., S.S., M. Si.
Jumlah Peserta	: 400 orang

TANYA JAWAB

Sartiah (Guru)

Pertanyaan/Saran

Apa kebijakan pemerintah dalam pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah dan saran saya bagaimana kalau bahasa Ciacia dimasukkan di dalam muatan lokal saja?

Jawaban/Tanggapan

Sudah dicanangkan penggunaan bahasa daerah di lembaga pendidikan.

T. David Anderson (Australia)

Pertanyaan/Saran

Keanekaragaman bahasa di Pulau Buton tidak terlepas dari kemakmuran penduduk tersebut. Salah satu bukti keberhasilan pemerintahan kesultanan Buton dalam berabad-abad lamanya.

Drs. La Ode Asad Hambali (Asisten III)

Pertanyaan/Saran

Syarat untuk menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Buton adalah mampu berbahasa daerah setempat.

Jawaban/Tanggapan

Bergantung kepada undang-undang pilkada yang berlaku.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMERTAHANAN DAN PELESTARIAN BAHASA MORONENE DI KABUPATEN BOMBANA¹

Atikurahman
(Bupati Bombana)

1. Pendahuluan

Dalam *Epos Kada* sebagai nyanyian kepahlawanan orang Moronene diungkap bahwa manusia yang pertama tiba di daerah ini terdiri atas berpuluh-puluh kelompok keluarga yang dipimpin seorang kesatria bernama Dendeangi dengan julukan *Tongkimpu'u* dan *Waipode Lere*. Mengungkap istilah *Pu'uno Ronga Tekaleano Tomoronene* yang berarti asal mula perkembangan orang Moronene di Rumbia, Poleang, dan Kabaena, yaitu suku bangsa Moronene yang mendiami daratan Rumbia, Poleang, dan Kabaena. Perkembangan sejarah Moronene dinyatakan bahwa leluhur rumpun Moronene berasal dari seruas bambu gading (*Datebota Ao Gading*), sedangkan pihak istrinya berasal dari bunga Kayu Waru (*Haitolomeano Waru*) yang ada di *Kotu'a* (Kabaena) dan kalimat *Kotu'a* berasal dari kata *Kotuo* artinya potong sehingga diartikan memotong padi yang juga ditandai dengan melimpahnya padi di daerah ini yang sekarang dikenal dengan nama Bombana.

Seiring dengan perkembangan otonomi daerah pada tahun 2003, Kabupaten Bombana terbentuk sebagai kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003. Kabupaten ini menjadi salah satu simbol Bhineka Tunggal Ika karena jumlah suku sangat beragam, di dalamnya terdiri atas suku Moronene, suku Bugis, suku Bajo, suku Makassar, suku Muna, dan suku Tolaki, serta suku Jawa dan Bali. Sebagai konsekuensi dari wilayah hasil pemekaran, bahasa dan budaya pun ikut dalam kepingan bingkai politik, yang wilayah sebaran bahasa dibatasi oleh tapal batas wilayah administrasi. Keberadaan bahasa daerah merupakan salah satu kebanggaan bangsa Indonesia yang menunjukkan keanekaragaman budayanya. Bahasa Moronene merupakan salah satu dari sekian banyak bahasa daerah di Indonesia yang keberadaannya ikut mewarnai keragaman budaya bangsa Indonesia.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana tahun 2009, secara geografis Kabupaten Bombana memiliki batas-batas wilayah a) sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka dan Konawe Selatan, b) sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, c) sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton, dan d) sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone. Adapun luas daerah meliputi wilayah daratan sekitar 3.316,16 km² atau 331.616 ha dan wilayah perairan laut seluas 11.837,31 km² yang terdiri atas 22 wilayah kecamatan, yaitu 16 kecamatan yang terdapat di Pulau Sulawesi (Kecamatan Poleang Barat, Poleang, Poleang Tengah, Tontonunu, Poleang Selatan, Poleang Timur, Poleang Utara, Poleang Tenggara, Rumbia, Rumbia Tengah, Mata Oleo, Kep. Masaloka Raya, Rarowatu, Rarowatu Utara, Lantari Jaya, dan Mata Usu) dan 6 kecamatan (Kecamatan Kabaena, Kabaena Utara, Kabaena Selatan, Kabaena Barat, Kabaena Timur dan Kabaena Tengah) terdapat di kepulauan. Keseragaman memang merupakan sesuatu yang penting dalam membangun kesatuan bangsa, tetapi adalah kekeliruan besar bila menganggapnya sebagai alat yang efektif untuk membangun bangsa atas keberagaman etnik (Wijana dan Rohmadi, 2006:39).

Adanya transformasi suku yang masuk kedalam wilayah ini mengakibatkan heterogenitas penggunaan bahasa daerah. Tentu kondisi ini sangat memengaruhi penggunaan bahasa sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, dan masyarakat luas. Dari hasil observasi terlihat bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa menurut suku masing-masing dan pemersatu antarsuku adalah bahasa Indonesia. Namun, sebagian besar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia. Kekhawatiran akan punahnya bahasa daerah pun semakin menguat. Tentu kondisi ini harus segera diantisipasi sebab kematian suatu bahasa tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi terjadi melalui proses yang panjang (Sobarna, 2006:31; Mbete, 2001:79-87).

Menghadapi perubahan budaya global yang demikian cepat, termasuk di dalamnya komponen bahasa, refleksi, dan evaluasi atas kehidupan bahasa daerah menjadi sangat penting. Realita menunjukkan bahwa gejala kehidupan, keterpeliharaan dan keberhasilan usaha pemeliharaan bahasa-bahasa daerah, antara bahasa daerah yang satu dengan bahasa daerah yang lainnya, berbeda-beda. Ada bahasa daerah yang cukup terawat, tetapi juga ada sebagian yang lolos dari perhatian, apalagi pemeliharaan. Melihat persentase penduduk Bombana yang didominasi penduduk dari luar Suku Moronene, peluang terjadinya degradasi bahasa akan sangat besar. Keterpinggiran bahasa asli Moronene daerah ini disebabkan terjadi persaingan antara bahasa daerah dari suku pendatang, bahasa nasional dan bahasa asing. Keberadaan suku pendatang sangat memberikan pengaruh, terlebih

¹ Makalah disampaikan pada Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara di Kota Baubau tanggal 18 - 20 Juli 2010.

jika suku tersebut adalah pelaku dalam bidang pemerintahan atau bisnis sebagai bidang yang banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Oleh karena itu, kekhawatiran akan punahnya bahasa daerah semakin beralasan. Gejala kepunahan bahasa ditandai secara alami oleh merosotnya jumlah penutur karena adanya persaingan bahasa (desakan bahasa Indonesia, bahasa daerah lain, dan bahasa asing) dan semakin berkurangnya loyalitas penuturnya terhadap pemakaian bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Secara kewilayahan penggunaan bahasa Moronene dalam pergaulan keseharian terfokus pada wilayah Kecamatan Kabaena dan Rarowatu yang pada umumnya bermukim penduduk asli Moronene dan sebagian kecil, bermukim di wilayah Kasipute, Kecamatan Rumbia.

2. Loyalitas Bahasa Indonesia

Hampir di setiap wilayah hidup dan berkembang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa bahasa daerah hidup berdampingan dengan bahasa Indonesia. Kendatipun berdampingan, jelaslah bahwa bahasa Indonesia lebih dominan, memiliki loyalitas yang tinggi dan besar pengaruhnya atas bahasa daerah. Keloyalitasan bahasa Indonesia ini kadang-kadang menjadi sebuah hal yang mutlak dan wajar dalam bingkai negara kesatuan.

Belakangan ini bahasa Moronene sudah mengalami kemunduran secara fungsional. Hal ini disebabkan oleh terus menyempitnya pemahaman terhadap jagat kata bahasa Moronene. Selain itu, pengajaran bahasa terancam bubar karena tidak ada petunjuk pelaksanaannya, adanya rasa apatis di kalangan generasi muda terhadap upaya pembaharuan kreatif pemanfaatan kosakata bahasa Moronene secara maksimal menjadi salah satu penyebab kemunduran fungsional bahasa Moronene. Satu penyebab lagi yaitu terdesaknya bahasa Moronene oleh rekayasa nasionalisme bahwa kita harus mewedah dalam Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional (Mardianto, 1993: 4). Semua itu jelas terlihat pada kenyataan sekarang, anak-anak sekarang yang akan menjadi generasi penerus yang peduli dan diharapkan akan menjaga bahasa Moronene agar tetap lestari, lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Sikap kurang positif terhadap bahasa daerah yang melanda orang tua terutama dari golongan modern sudah sering kita jumpai. Biasanya mereka lebih memomorsatukan bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam keluarga, yang secara otomatis menganaktirikan bahasa daerah yang justru merupakan bahasa ibu (Widada 1993: 37).

Faktor yang paling dominan dari hal tersebut adalah kurangnya pendidikan bahasa Moronene dengan baik di lingkungan keluarga. Orang tua tidak memerhatikan bahwa kurangnya pendidikan dalam keluarga akan mengakibatkan anak-anak tidak dapat menggunakan bahasa Moronene dengan benar, yang akhirnya kaum muda jika berkomunikasi dengan orang tua menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan bahasa daerah merupakan kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, sedangkan bahasa daerah adalah bahasa budaya. Keduanya penting sebagai salah satu aset budaya yang harus dipelajari, dimengerti dan dilestarikan.

3. Paradigama Baru Pelestarian Bahasa Daerah

Secara umum upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah Moronene di Kabupaten Bombana masih sangat rendah, terutama dilakukan dan didorong oleh kesadaran masyarakat di daerahnya masing-masing untuk mempertahankan, memelihara, dan mengembangkan bahasa daerahnya sehingga Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menyikapi upaya pemertahanan dan pelestarian bahasa Moronene dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Pemberdayaan Masyarakat, yakni kesadaran akan khazanah bahasa dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan sebagai sumber daya pembangunan. Untuk itu, bahasa perlu didayagunakan bagi kepentingan masyarakatnya. Sikap mental dan perilaku kebahasaan yang positif dan kreatif menjadi tumpuan pembangunan manusia di Kabupaten Bombana. Pemberdayaan masyarakat dalam ranah agama, adat, dan aneka budaya etnis merupakan tumpuan hidup bahasa daerah. Bahasa daerah adalah warna ekspresi budaya daerah dalam pelbagai aspek.
- b. Penyadaran Jati Diri, yakni bahasa Moronene sebagai identitas masyarakat Kabupaten Bombana. walaupun sebagian masyarakat Kabupaten Bombana telah beralih bahasa Ibu mereka dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia. Lebih khusus kepada masyarakat yang bersentuhan langsung dengan dampak pembangunan, perkawinan campur antaretnik, serta pembinaan generasi muda yang terlalu keindonesiaan;
- c. Integrasi Pengajaran Bahasa, Sastra, dan Budaya, yakni model integrasi pendidikan yang menjadi syarat mutlak yang harus dijalankan dalam mengelola sumber daya masyarakat. Wujud integrasi pengajaran dapat membentuk sikap, pola, dan perilaku atau persepsi lokal terhadap kepemilikan kearifan lokal tersebut. Integrasi pengajaran ini dapat menggugah sedini mungkin masyarakat tentang pengetahuan lokal yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi pengembangan gagasan-gagasan alternatif dalam penjelajahan ilmiah yang sedang dan akan dikembangkan, seperti: sistem klasifikasi bahasa (rumpun/phylum) yang dapat digunakan sebagai acuan makna sosial budaya kehidupan masyarakat terhadap fenomena alam dan sosial tertentu. Masuknya bahasa Moronene dalam kurikulum pembelajaran dari pendidikan dasar hingga

pendidikan menengah yang saat ini dijadikan sebagai kurikulum muatan lokal menjadi upaya serius pemerintah.

- d. Peran Generasi Muda, yakni keterlibatan setiap generasi muda khususnya para pelajar harus ikut melestarikan bahasa daerahnya, kapan saja dan dimana saja. Menggali dan mengangkat kembali bahasa daerah Moronene yang mulai ditinggalkan kalangan generasi muda.
- e. Keseriusan Instansi Terkait Menyikapi Pelestarian Bahasa Daerah, yakni instansi terkait yang menangani langsung aspek budaya, perlu melakukan penetapan visi, cita-cita, atau target yang akan dicapai. Kondisi kuantitatif dan kualitatif bahasa Moronene yang diharapkan dan dapat dijadikan sebagai indikator untuk dijadikan tolok ukur pemerembangan bahasa Moronene meliputi: jumlah penutur $\geq 67\%$ (dua per tiga bagian penduduk Kabupaten Bombana), bahasa daerah sebagai bahasa rumah tangga $\geq 67\%$ khususnya yang memiliki suku asli Moronene, kemampuan baca/tulis bahasa daerah $\geq 67\%$ dan Bahasa Moronene digunakan sebagai bahasa pergaulan sehari-hari terutama untuk Suku Moronene sendiri serta penilaian kondisi riil bahasa-bahasa daerah. Hal ini dilakukan melalui survei yang intensif dilakukan.
- f. Evaluasi, yakni mengevaluasi hasil penilaian kondisi riil bahasa Moronene dan membandingkan dengan target yang hendak dicapai. Hasil evaluasi berupa kesenjangan antara target dengan kondisi riil menjadi masukan bagi pengambilan tindakan atau pengondisian. Masukan itu bisa berupa fakta dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan.
- g. Pengambilan tindakan dan pengondisian oleh pemerintah daerah
 - Pembuatan Peraturan Daerah
Peraturan yang dimaksudkan adalah penerbitan peraturan daerah sesuai dengan kondisi yang diharapkan, misalnya, di jenjang pendidikan sekolah, bahasa Moronene dijadikan muatan lokal dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.
 - Perumusan atau Penyempurnaan Kebijakan Pemerintah Daerah
Penjabaran Peraturan Daerah berupa langkah-langkah yang bersifat teknis, misalnya, penetapan rencana pembangunan jangka menengah yang lebih rinci mengenai pemerembangan bahasa-bahasa daerah.
 - Pengadaan kegiatan-kegiatan rutin secara formal dan informal;

Formal

- 1) Lomba pidato, baca puisi, prosa, dan pewara dalam bahasa Moronene
- 2) Lomba penulisan prosa dan puisi dalam aksara lontara
- 3) Penggunaan dwi-bahasa nama-nama jalan, tempat umum, seperti gedung pemerintah, swalayan, pasar, sekolah, tempat hiburan, rumah sakit, dan sejenisnya.
- 4) Penulisan karya sastra yang bernuansa budaya Moronene.
- 5) Pengadaan acara berbahasa daerah melalui radio dan televisi.
- 6) Penggubahan lagu-lagu berbahasa daerah dan musik tradisional, tari-tarian, dan seni tradisional lainnya.
- 7) Penggunaan bahasa Moronene dalam pidato-pidato (formal dan informal), komunikasi verbal pada acara-acara tidak resmi (pernikahan).
- 8) Lomba musik tradisional.

Informal

Pengembangan bahasa daerah yang bersifat informal dilakukan dalam lingkungan keluarga sebagai bahasa rumah tangga. Penanaman kecintaan terhadap bahasa dan kebudayaan daerah dapat dilakukan melalui cerita rakyat yang dikemas sedemikian rupa sehingga bisa lebih menarik, seperti dikemas dalam bentuk buku cerita bergambar, komik, cakram padat (cd). Banyak ceritera rakyat Kabupaten Bombana yang dapat membangun semangat berprestasi bagi generasi mendatang. Mc Clelland, seorang psikolog Amerika dari Universitas Harvard, menunjukkan bahwa bangsa maju didominasi oleh generasi produktif yang di masa kecilnya banyak membaca cerita perjuangan.

4. Penutup

Seiring dengan pesatnya perkembangan globalisasi terhadap bahasa-bahasa daerah, yang memungkinkan terancamnya keberadaan bahasa-bahasa daerah Sulawesi Tenggara pada umumnya dan bahasa Moronene khususnya, diperlukan usaha-usaha maksimal. Usaha-usaha maksimal itu tidak hanya diarahkan pada pelestarian bahasa Moronene, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu membuat bahasa Moronene lebih diperkembangkan. Dengan kata lain, diperlukan penciptaan kondisi-kondisi untuk membuat bahasa Moronene berkembang guna mengembalikan eksistensi bahasa daerah sebagaimana keadaannya sebelum tahun 1945. Model pengembangan bahasa yang ditawarkan di sini diyakini dapat mengantisipasi kepunahan dan mengimbangi dampak negatif pengaruh luar. Untuk memperkembangkan bahasa-bahasa daerah secara maksimal

diperlukan upaya-upaya dan pengondisian yang lebih optimal. Perealisasiannya dilaksanakan melalui aktivitas yang bersifat terencana, konsisten atau terus-menerus, dan dievaluasi secara berkala.

Daftar Pustaka

- Ogata, Katsuhigo. (2004). *Modern Control Engineering*. Tokyo: Prentice Hall.
- Mbete, Aron Meko. 2001. Paradigma Baru Pemertahanan dan Pengembangan Bahasa Daerah dalam LINGUISTIKA, Edisi Keempatbelas, Maret 2001. Denpasar: Program Pascasarjana Magister dan Doktor Linguistik UNUD.
- Sobarna, Cecep. 2006. Pemertahanan Bahasa Daerah: Menuju Kesetaraan Bahasa dalam Bumiku, Bahasaku, Mahmud, dkk (Ed.) 2006. Bandung: Jurusan Sastra Indonesian Fasa UNPAD.
- Wijana, I Putu Dewa dan Muhammad Rohmadi. 2006. *Sosiolinguistik. Kajian Teori dan Analisis*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana. 2009. *Kabupaten Bombana Dalam Angka*. Bombana: BPS.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA KULISUSU

Harmin Hari
(Wakil Bupati Buton Utara)

1. Pendahuluan

Bahasa Indonesia dan daerah adalah bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berperan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula bahasa daerah yang turut memegang peranan penting sebagai bagian dari bahasa daerah nusantara yang berjumlah keseluruhan sekitar 741 bahasa daerah dan memegang kontribusi yang penting bagi perkembangan bahasa Indonesia sendiri hingga saat ini.

Bahasa daerah dari segi kelestariannya berbeda dengan bahasa Indonesia yang secara nasional aktif dipergunakan. Bahasa daerah sewaktu-waktu dapat terancam kepunahan apabila penuturnya tidak lagi menggunakannya dalam interaksi komunitasnya sehari-hari. Ini bukanlah sebuah teori yang mustahil. Para pakar bahasa mengungkapkan bahwa umumnya krisis bahasa daerah terjadi karena pengaruh penggunaan bahasa modern, faktor geografis, dan psikologis. Masyarakat umumnya lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari. Kondisi ini jelas sangat mengkhawatirkan kelangsungan hidup bahasa daerah, terutama bagi penutur yang populasinya cukup sedikit.

Suatu kondisi yang tidak dapat dipungkiri adalah perkembangan bahasa di wilayah nusantara. Di satu sisi berkembang dengan baik, tetapi di sisi lain ada bahasa daerah lain yang terancam punah. Kurangnya peran pemerintah daerah turut memberikan andil bagi kepunahan suatu bahasa lokal. Upaya pelestarian oleh pemerintah itu setidaknya direalisasikan dalam bentuk-bentuk nyata seperti pembentukan lembaga kebudayaan atau institusi lokal yang relevan dalam rangka menjaga eksistensi bahasa daerah.

Bahasa Kulisusu merupakan salah satu bahasa daerah yang berada di Sulawesi Tenggara di antara 22 jenis bahasa menurut subetnik yang mendiami kawasan Sulawesi Tenggara. Kenyataan yang ada saat ini, bahasa Kulisusu turut mengalami krisis seperti yang dialami oleh daerah lain dalam hal ancaman kepunahan eksistensinya. Bahasa Kulisusu berbeda dengan bahasa Jawa, Minang, ataupun Madura yang saat ini mampu bertahan, bahkan dapat berkembang cepat seiring kemajuan zaman. Kepercayaan diri masyarakat dalam menggunakan bahasa daerahnya menjadi faktor utama dalam upaya menghindari kepunahan bahasa ibunya sendiri.

Hal ini menjadi perhatian yang cukup serius bagi semua pihak, utamanya Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara, bersama masyarakatnya dan semua pihak yang berhubungan dengan upaya pelestarian budaya dan bahasa lokal ini. Untuk itu, perlu komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam mengarahkan dan memotivasi sikap positif masyarakat dalam penggunaan maupun apresiasi terhadap Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Tanpa adanya komitmen dan peran pemerintah daerah serta dukungan masyarakatnya, upaya pemertahanan dan pelestarian bahasa Kulisusu menjadi sebuah hal yang mustahil.

2. Dasar Hukum

Beberapa landasan hukum yang dijadikan acuan penulisan ini adalah sebagai berikut.

- UUD 1945 Pasal 36 tentang Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia dan Pasal 32 Ayat 2 tentang Negara Menghormati dan Memelihara Bahasa Daerah Sebagai Kekayaan Budaya Nasional.
- Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan.
- PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- Permendagri No. 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah
- Perbup Nomor 28 Tahun 2009 tentang RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2009 – 2011.
- Visi, Misi Program Kerja Rencana Strategis Pembangunan Tahun 2010 – 2015 Kabupaten Buton Utara.

3. Peran Pemda Buton Utara

Bahasa Kulisusu merupakan salah satu bahasa yang digunakan dalam interaksi masyarakat Buton Utara, di antara bahasa lainnya di kawasan Buton Utara. Wilayah pemakaiannya mencakup seluruh 6 (enam) kecamatan yaitu Kulisusu, Kulisusu, Utara, Kulisusu Barat, Bonegunu, Kambowa, dan Wakorumba Utara. Bahasa daerah lain seperti Bahasa Pancana dan Muna juga dipergunakan dalam interaksi masyarakat di wilayah Kambowa, Bonegunu, dan Wakorumba Utara. Bahasa yang berasal dari luar Buton Utara seperti Wakatobi dan dari luar

Sulawesi Tenggara seperti bahasa Jawa dan Bali turut dipergunakan oleh komunitas etnis-etnis tersebut yang tersebar dan mendiami wilayah Buton Utara. Namun demikian, secara umum, mayoritas pengguna bahasa daerah di wilayah Buton Utara adalah pengguna bahasa Kulisusu. Dalam hal ini bahasa Kulisusu saat ini dianggap representatif sebagai bahasa daerah Buton Utara

Sejauh ini, pemeliharaan eksistensi bahasa daerah tersebut menjadi peran Pemerintah Kabupaten Buton Utara yang memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakat, menjaga kerukunan, dan keutuhan NKRI, serta melestarikan nilai sosial dan budaya daerah. Secara tersirat, makna itu tercantum dalam Pasal 2 huruf b Permendagri 40/2007 menyatakan bahwa pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sebagai unsur kekayaan budaya dan sebagai sumber utama pembentuk kosakata bahasa Indonesia.

Pada Pasal 3 Permendagri nomor 40 Tahun 2007 juga ditegaskan bahwa kepala daerah bekerja sama dengan instansi vertikal di daerah yang tugasnya melakukan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan kebahasaan serta memfasilitasi untuk pelestarian dan pengembangan bahasa daerah dan bahasa negara. Dalam ketentuan umum peraturan ini juga menjelaskan bahwa pelestarian bahasa adalah upaya untuk memelihara sistem kebahasaan yang digunakan oleh komunitas/kelompok masyarakat yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat tersebut. Pengembangan bahasa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sistem kebahasaan yang digunakan oleh komunitas/kelompok masyarakat yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat tersebut.

Dukungan peraturan perundang-undangan memiliki relevansi dengan visi pembangunannya untuk tahun 2009–2011 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Transisi Kabupaten Buton Utara, yakni **“Mewujudkan Kabupaten Buton Utara yang sejahtera, beradab, demokratis, akuntabilitas, transparan dan kompetitif”**.

Untuk merealisasikan visi pembangunan sebagaimana diuraikan di atas ditetapkan 6 (enam) agenda yang merupakan misi pembangunan Kabupaten Buton Utara tahun 2009–2011 sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas masyarakat yang religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kearifan lokal;
2. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, berkelanjutan dan bernilai ekonomi;
3. mewujudkan tata pemerintahan yang legitimasi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta adil bagi seluruh masyarakat;
4. menjadikan Kabupaten Buton Utara sebagai daerah budaya dan tujuan wisata;
5. menjadikan Kabupaten Buton Utara sebagai daerah sehat investasi;
6. mewujudkan akselerasi pembangunan di segala bidang;
7. mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

Berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang akan dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Buton Utara ke depan, strategi pembangunan daerah diarahkan pada 3 (tiga) agenda pokok yakni:

1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. meningkatkan kualitas SDA dan lingkungan hidup;
3. melestarikan nilai-nilai kearifan lokal;

Selanjutnya agenda pembangunan Kabupaten Buton Utara tahun 2009 – 2010 akan menjadi acuan bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan dalam berupaya meningkatkan harkat dan martabat daerah yang pada akhirnya visi misi yang telah dirumuskan akan dicapai.

Uraian visi dan misi serta isu strategis dalam upaya melaksanakan pembangunan Kabupaten Buton Utara tersebut cukup relevan dengan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Peraturan yang ada akan menjadi legitimasi penting bagi implementasi upaya pemertahanan dan pelestarian budaya, khususnya Bahasa Kulisusu.

4. Komitmen Pemda Buton Utara

Arah kebijakan umum pembangunan merupakan formulasi kebijakan daerah yang akan mendukung pencapaian agenda pembangunan daerah yang terdistribusi pada seluruh urusan kewenangan wajib pemerintah kabupaten. Berdasarkan pada agenda pembangunan daerah, arah kebijakan umum pembangunan daerah berdasarkan pada klasifikasi fungsi-fungsi pemerintahan sebagai berikut: Fungsi Pelayanan Umum, Fungsi Pemerintahan, Fungsi Ketertiban dan Keamanan, Fungsi Ekonomi, Fungsi Lingkungan Hidup, Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, Fungsi Kesehatan, Fungsi Pendidikan, Fungsi, Agama, serta Fungsi Pariwisata dan Budaya.

Khusus Fungsi Pariwisata dan Budaya, ada beberapa hal yang menjadi titik penting mengenai pembahasan tulisan ini. Kebudayaan memiliki peran serta dan fungsi yang cukup strategis dalam membangun moral dan mental masyarakat suatu daerah berdasarkan nilai-nilai leluhur dan budaya yang berlaku dalam lingkungan masyarakat tersebut. Peninggalan budaya merupakan kekayaan daerah, perangkat, dan alat persatu antargenerasi kebangsaan sekaligus warisan leluhur yang harus juga dilestarikan untuk mewujudkan

semangat juang dan cinta tanah air. Oleh karena itu, kekayaan budaya itu harus dijaga dan dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi aset yang memiliki nilai yang tinggi.

Dalam memantapkan fungsi pariwisata dan budaya, kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Buton Utara adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang diarahkan pada:

- Pengembangan pariwisata daerah yakni dengan meningkatkan kualitas dan atraksi wisata daerah;
- Pelestarian nilai-nilai budaya lokal seperti pembinaan dan pagelaran seni budaya daerah;
- Peningkatan sarana dan prasarana olah raga yang representatif.

Khusus pada upaya pelestarian nilai-nilai budaya lokal, kegiatan proaktif yang mendukung pelestarian dan pengembangan budaya lokal seperti kegiatan yang bersifat eksibisi ataupun kontes yang berbentuk festival budaya akan memotivasi masyarakat untuk kembali menggali ataupun merekonstruksi unsur-unsur budaya yang telah mengendap untuk kembali dikemukakan. Hal ini termasuk bahasa dan sastra Kulisusu.

Upaya pelestarian bahasa daerah ini tentu saja harus melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada. Sebagaimana dalam Pasal 4 Permendagri 40/2007 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut pemerintah daerah dapat melibatkan potensi masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan, badan usaha swasta, daerah, ataupun negara atau lembaga non-pemerintah.

Pelaksanaan kegiatan pelestarian ini (Pasal 6 ayat 1 dan 2) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan secara nasional di bawah pembinaan Menteri Dalam Negeri dan secara langsung oleh gubernur sebagai wakil pemerintah. Demikian pula halnya dengan Pemantauan dan Evaluasi (Pasal 7 ayat 1 dan 2) yang dilakukan Gubernur dengan membentuk Tim Evaluasi yang dipimpin oleh pejabat unsur sekretariat daerah beserta jajaran instansi daerah maupun instansi vertikal yang berkompeten dalam hal ini. Hal yang sama akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Utara secara langsung di bawah pembinaan Bupati/Wakil Bupati.

Adapun pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara. Hal ini sesuai ketentuan perihal Pendanaan pada Pasal 8 ayat (1) Permendagri 40/2007.

5. Strategi Pelestarian Bahasa Kulisusu

Dalam Permendagri 40/2007 dijelaskan pengertian bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antaranggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis di daerah-daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga kini telah teridentifikasi 22 etnis asli di Sulawesi Tenggara berdasarkan perbedaan bahasa yang dipergunakan (*etnolinguistics groups*) yang separuhnya berada di daratan maupun kepulauan. Potret kehidupan mereka relatif sama. Dua puluh dua etnis tersebut yakni: 1) Bajau/Bajo, 2) Busoa, 3) Ciacia, 4) Kaimbula, 5) Kamaru, 6) Kioko, 7) Kodeoha, 8) Kulisusu, 9) Kumbewaha, 10) Lasalimu, 11) Liabuku, 12) Moronene, 13) Muna, 14) Pancana, 15) Rahambuu, 17) Taloki, 18) Tolaki, 19) Tukang Besi Utara, 19) Tukang Besi Selatan, 20) Waru, 21) Wawonii, 22) Wolio.

Secara khusus Kulisusu yang juga biasa disebut Kalisusu, Kolinsusu, ataupun Kolencusu (95, SIL) memiliki 22.000 pengguna di Sulawesi Tenggara, di antaranya di Kecamatan Kulisusu dan Bonegunu di Pulau Buton Bagian Utara. Austronesia, Malayu-Polynesia, Malayu-Polynesia Barat, Sulawesi, Sulawsi Tengah, Tengah Barat, Bungku – Mori –Tolaki, Bungku. Dalam penghitungan tingkat kekerabatan, 81% kemiripan bahasa antardialek, 77% dengan Taloki, 75% dengan Koroni, 66% dengan Wawonii dan bungku, 65% dengan Moronene, 54% dengan Mori dan Tolaki.

Telah pula diungkapkan dalam daftar bahasa lokal Sulawesi Tenggara di atas bahwa dalam wilayah Buton Utara, selain bahasa Kulisusu, setidaknya ada bahasa Taloki (Taluki) diperkirakan lebih dari 500 penutur. Bahasa tersebut terletak di kawasan Pantai Barat Daya Pulau Buton seperti wilayah Wakorumba (Kecamatan Wakorumba Utara). Selain itu, bahasa Kioko (1991, Rene van den Berg, SIL) memiliki lebih dari 1000 penutur. Dialek Kioko - Kambowa, merupakan bagian dari bahasa Pancana memiliki kemiripan bahasa dari segala unsurnya dapat mencapai 74% dengan Bahasa Muna.

Dapat dibayangkan saat lima atau sepuluh tahun ke depan, apakah bahasa-bahasa lokal tersebut masih bisa bertahan atau tidak. Perkembangan bahasa internasional (Inggris, Perancis, dan sebagainya), bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa nasional sendiri sebenarnya turut menjadi andil bagi terancamnya eksistensi bahasa lokal ini. Oleh karena itu, beberapa solusi perlu dipikirkan segera untuk mengantisipasi kemungkinan buruk tersebut.

Dari pemaparan di atas, baik menyangkut peran maupun komitmen pemerintah daerah, dapat diuraikan pula beberapa upaya Pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam melestarikan Bahasa Kulisusu, antara lain:

1. Pembuatan peraturan daerah dan regulasi yang menyangkut upaya pelestarian budaya dan bahasa daerah Kulisusu ataupun bahasa lokal Buton Utara lainnya;
2. Memasukkan materi muatan lokal bahasa Kulisusu ke dalam kurikulum materi pelajaran sekolah, ataupun materi kajian hingga perguruan tinggi;
3. Menggalakkan dan memotivasi praktik penggunaan bahasa Kulisusu dalam lingkungan keluarga dan komunitas budaya setempat;

4. Pembentukan lembaga adat atau kebudayaan, yang dibina dan disokong oleh pemerintah daerah;
5. Pembentukan pusat studi ataupun lembaga penelitian bahasa setempat yang dibina dan didanai oleh pemerintah daerah;
6. Melaksanakan pertemuan ilmiah membahas sejarah adat budaya dan bahasa daerah Buton Utara;
7. Memperkenalkan produk bahasa dan sastra, serta naskah-naskah kuno Kulisusu kepada dunia luar, baik pada skala regional Sulawesi Tenggara, nasional, ataupun mancanegara.;
8. Mendukung pelaksanaan kegiatan yang bersifat mengembangkan dan memperkenalkan nilai-nilai kearifan lokal kepada seluruh masyarakat daerah sebagai upaya membangkitkan kecintaan jati diri dan apresiasi terhadap bahasa Kulisusu, seperti Festival Budaya Kulisusu.

Dari beberapa upaya tersebut, upaya yang paling konkret dalam rangka mempertahankan bahasa daerah adalah dengan menerapkan langsung bahasa daerah itu dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa daerah penting digunakan dalam percakapan di rumah, untuk penamaan jalan, nama bangunan umum, gedung pertemuan, kompleks perkantoran, merek dagang, maupun nama lembaga pendidikan. Nama-nama dalam bahasa Kulisusu dapat ditulis bersama dengan bahasa Indonesia. Selain itu, perlu didukung upaya pembuatan kamus bahasa Kulisusu agar dapat terinventarisasi kosakata yang digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Upaya pelestarian bahasa daerah ini tentu saja harus melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada. Pemerintah daerah dapat melibatkan potensi masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan, badan usaha swasta, daerah, ataupun negara atau lembaga nonpemerintah. Pelaksanaan kegiatan pelestarian ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dan secara nasional dibawah pembinaan Menteri Dalam negeri dan secara langsung oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah. Demikian pula halnya dengan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur dengan membentuk tim evaluasi. Hal serupa dilakukan pula oleh Pemerintah Kabupaten Buton Utara secara langsung di bawah pembinaan bupati/wakil bupati. Adapun pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara.

6. Penutup

Bahasa merupakan salah satu unsur kebudayaan dan merupakan jati diri bagi sebuah bangsa. Oleh karenanya, sebuah bangsa akan kehilangan jati dirinya apabila unsur-unsurnya terkikis atau hilang sama sekali. Demikian pentingnya unsur tersebut sehingga saat ini bahasa daerah menjadi sangat penting untuk dipertahankan dan dikembangkan keberadaannya demi kemajuan daerah tersebut.

Upaya pelestarian bahasa Kulisusu menjadi komitmen yang wajib bagi Pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam rangka mendukung pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan. Adanya komitmen yang kuat dan konsisten akan dapat membangkitkan kesadaran dan kepercayaan diri masyarakat Buton Utara, khususnya pengguna bahasa Kulisusu dalam upaya melestarikan kembali bahasa Kulisusu.

Pemerintah sebenarnya telah pula menunjukkan keberpihakannya dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 40 tahun 2007 yang menyangkut upaya pelestarian, pembinaan, serta pengembangan bahasa nasional dan daerah. Peraturan itu selanjutnya menjadi pedoman bagi setiap kepala daerah dalam melestarikan bahasa daerahnya masing-masing.

Bahasa Kulisusu memerlukan dukungan nyata dan kesungguhan pemerintah daerah setempat untuk membangkitkan kembali bahasa daerahnya. Di antara upaya tersebut antara lain adalah membuat regulasi yang mendukung upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah, memasukkan ke dalam kurikulum pengajaran dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi berupa materi muatan lokal; bahasa Kulisusu dan materi kajian yang bersifat referensi; menggalakkan bahasa Kulisusu dalam kehidupan sehari-hari, mendirikan pusat studi budaya Kulisusu dan pusat penelitian bahasa Kulisusu; lembaga adat/budaya dan lain-lain hal yang bersifat menyokong upaya pemertahanan dan pelestarian Bahasa Kulisusu.

Upaya yang paling konkret adalah dengan menerapkan langsung bahasa daerah itu dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa daerah juga perlu dipakai dalam pemberian nama jalan, nama bangunan umum, gedung pertemuan, kompleks perkantoran, merek dagang maupun nama lembaga pendidikan. Nama-nama dalam bahasa Kulisusu dapat ditulis berdampingan dengan bahasa Indonesia. Selain itu, perlu didukung upaya pembuatan kamus bahasa Kulisusu agar dapat terinventarisasi kosakata yang digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Upaya pelestarian bahasa daerah ini tentu saja harus melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada. Pemerintah daerah dapat melibatkan potensi masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan, badan usaha swasta, daerah, negara atau LSM. Pelaksanaan kegiatan pelestarian ini secara langsung di bawah pembinaan Bupati/Wakil Bupati. Adapun pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara.

Terwujudnya beberapa upaya tersebut akan menjamin eksistensi dan pengembangan bahasa serta budaya lokal, baik dari segi dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dan masyarakat Buton Utara maupun perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Eksistensi bahasa Kulisusu sebagai bahasa yang maju dan berkembang adalah sebuah keniscayaan.

Daftar Pustaka

Permendagri No. 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah
Perbup Nomor 28 Tahun 2009 tentang RPJMD Kabupaten Buton Utara Tahun 2009 – 2011.
Wikipedia Bahasa Indonesia “Bahasa Kulisusu, Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara”.

BAHASA DAERAH DI ERA GLOBALISASI¹

Laode Ida¹
(DPD Republik Indonesia)

1. Pengantar

Tulisan ini mengangkat posisi bahasa-bahasa daerah di Indonesia dalam percaturan nasional dan global dari perspektif sosiologis-fenomenologis. Tesis atau argumen-argumen yang dikedepankan di sini tentu saja berangkat dari hasil pencermatan dan pengalaman pribadi yang diharapkan bisa dijadikan bagian dari bahan diskusi bagi pihak-pihak yang berminat.

Tesis utama yang saya ajukan adalah bahwa telah dan sedang serta akan terus terjadi proses marginalisasi bahasa-bahasa daerah di Indonesia sebagai konsekuensi dari kebijakan uniformitas bahasa resmi nasional dan perkembangan atau tuntutan globalisasi. Perkembangan generasi dari waktu ke waktu, akibatnya, cenderung mengabaikan keutamaan bahasa daerah sebagai bahasa ibu.

2. Kekayaan Budaya

Mungkinkah bahasa daerah akan eksis di tengah derasnya arus globalisasi? Jawaban atas pertanyaan ini tentu saja tergantung dari mana kita mempersepsikannya. Tergantung pula pada level dan bidang mana bahasa daerah itu digunakan. Namun, harus dipasrahkan kalau di pentas global sudah pasti sulit memperoleh tempat yang layak, kecuali hanya menjadi alat komunikasi terbatas di antara orang-orang seetnis dan sebahasa yang mungkin atau kebetulan berada di dalam suatu forum multinasional. Bahkan pada tingkat tertentu sebuah bahasa daerah bisa digunakan sebagai alat komunikasi rahasia di tengah komunitas multietnis untuk suatu tujuan tertentu.

Pada level nasional (Indonesia) sendiri, bahasa daerah hanya diakui sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa, tidak digunakan sebagai alat komunikasi resmi di tingkat dan atau dalam penyelenggaraan negara/daerah. Pada tingkat ini sungguh berbeda dengan kebijakan di beberapa negara luar yang memberi apresiasi terhadap bahasa suatu etnik untuk digunakan sebagai bagian dari bahasa resmi. Bahasa lokal Skotlandia (Scottish) di Inggris, misalnya, menjadi bahasa resmi di Provinsi Skotlandia (tentu saja selain bahasa Inggris). Demikian juga di Amerika Serikat (A.S.), bahasa Mandarin dan Spanyol (Spain) digunakan sebagai bagian dari tiga bahasa resmi (Inggris, Spanyol, dan Mandarin) di negara bagian (state) California – terkait dengan proporsi etnik pengguna kedua bahasa itu yang mencapai 25% dari jumlah penduduk (dijamin oleh konstitusi).

Dengan sendirinya, bahasa daerah di Indonesia hanya fungsional bagi setiap suku dari daerah yang bersangkutan. Tentu saja, bagi etnis lain terbuka untuk belajar dan mendalami suatu bahasa daerah, terutama mereka yang terkait dengan domisili dan dengan alat komunikasi masyarakat umum adalah bahasa ibu. Pada kalangan yang sangat terbatas, pihak luar yang ingin mendalami budaya dari suatu daerah tertentu dengan keniscayaan terlebih dahulu memahami bahasa daerahnya.

3. Dominasi Budaya

Kendati demikian, sejumlah bahasa daerah ternyata sungguh eksis yang sebagian kosakatanya teradopsi ke dalam bahasa Indonesia. Pada tingkat ini, diakui atau tidak, muncul fenomena adanya dominasi atau stratifikasi budaya bangsa berdasarkan bahasa, yakni: bahasa Jawa, Sunda, Minang/Melayu, dan Bugis/Makassar. Sementara suku yang dialek bahasanya cenderung berpengaruh atau digunakan oleh komunitas di luar etnisnya (kendati pada derajat yang sangat terbatas) adalah Manado, Ambon, Madura, dan Batak. Yang terakhir ini, misalnya, ditandai juga dengan adanya sejumlah lagu-lagu populer daerah yang digandrungi atau banyak dilantunkan di berbagai acara.

Dominasi atau stratifikasi bahasa daerah tersebut agaknya sebagai konsekuensi dari beberapa faktor yang saling terkait.

Pertama, terkait dengan jumlah penduduk, suku Jawa dan Sunda menjadi bagian dari mayoritas warga bangsa ini sehingga sadar atau tidak, warga bangsa dari etnik lain kerap (terjebak) menggunakan bahasa etnik mayoritas. Malahan lebih dari itu, tata karma dalam pergaulan sehari-hari, termasuk dalam komunikasi penyelenggara, juga masuk perangkat suatu budaya dengan etnik mayoritas.

Kedua, terkait dengan kuantitas elite dari etnik yang berpengaruh baik di lini pengambil kebijakan, dalam pengembangan budaya bangsa, ilmu pengetahuan, sampai pada penguasaan media massa. Tidaak bisa dipungkiri, sejumlah etnik yang disebutkan tersebut para elitnya sangat berpengaruh di semua lini kehidupan negeri ini sehingga secara otomatis bahasa, budaya, dan karakternya pun menjadi bagian dari acuan.

¹Disajikan dalam Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah di Kota Baubau, 18—20 Juli 2010.

²Penulis adalah Sosiolog, sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Terpilih sebagai anggota DPD dari Prov. Sulawesi Tenggara untuk periode kedua 2009-2014.

Ketiga, dialeknya yang mengesankan. Ungkapan bahasa keseharian dari etnik tersebut pada tingkat tertentu sangat berkesan dan atau memiliki daya tarik sehingga tak sedikit orang yang menirunya. Pada saat itulah terjadi pemopuleran bahasa, mulai dari istilah sampai dengan ekspresi pengungkapannya. Maka tidak heran, misalnya, kalau sebagian dari kita bisa berdialek seperti Manado, orang Batak, orang Ambon, Bugis, Makassar, dan Madura.

Proses-proses sosiolingustik seperti itu, tanpa disadari telah menenggelamkan bahasa-bahasa daerah lain. Orang-orang yang berasal dari selain suku bangsa yang bahasa dan budayanya dominan tersebut, dengan sendirinya, akan sangat sulit memopulerkan bahasa dan budayanya – suatu kecenderungan adanya marginalisasi bahasa daerah-daerah. Sekali lagi, semua ini akibat dari kebijakan penyeragaman bahasa resmi nasional yakni hanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sungguh dipaksakan sebagai satu-satunya alat komunikasi resmi.

4. Globalisasi

Kecenderungan untuk tidak gemar belajar, mendalami bahkan 'tidak ingin' menggunakan 'bahasa daerah diperkuat dengan tuntutan globalisasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), termasuk teknologi informasi, niscayanya kekuatan ekonomi pasar, ditambah dengan kompetisi tenaga kerja lintas negara, menjadikan perkembangan generasi dari waktu ke waktu sudah lebih berorientasi ke luar, untuk kemudian mencoba beradaptasi dengan lingkungan global. Maklum, sadar atau tidak, kita semua ini tidak lagi hanya sekadar warga suatu daerah, atau warga negara Indonesia, melainkan sudah menjadi bagian dari warga negara global (*global citizens*).

Fenomena ini tentu saja sangat terkait dengan tingkat perekonomian suatu masyarakat atau keluarga. Tesis utamanya bahwa semakin tinggi daya saing ekonomi suatu masyarakat atau semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga akan semakin kuat dan besar pula peluangnya untuk beradaptasi atau mempersiapkan generasi/anak-anaknya menghadapi tuntutan global. Tepatnya, dalam perspektif ini, rendahnya perkembangan ekonomi suatu keluarga di negara-negara berkembang, seperti Indonesia ini, maka akan besar pula kemungkinan generasinya untuk mengabaikan bahasa lokal.

Bahasa global yang digunakan adalah umumnya bahasa Inggris, kendati kini sudah semakin bervariasi sesuai dengan kemajuan ekonomi dan iptek yang dikuasai atau dimiliki oleh negara bersangkutan. Bahasa Prancis dan Jerman merupakan dua bahasa asing yang sudah sering digunakan sebagai bahasa internasional. Belakangan, kecuali bahasa Arab dengan potensi ekonominya dan kekhasan budaya sumber tradisi Islam bahasa Al Qur'an, juga muncul bahasa Jepang, Mandarin, dan Korea. Singkat kata, semakin maju ekonomi dan iptek suatu negara, bahasanya pun lambat lain dipelajari dan bahkan dijadikan sebagai bagian dari bahasa yang digunakan di tingkat internasional. Begitulah, maka sudah pasti masyarakat di negara-negara seperti yang disebutkan di atas umumnya tidak gandrung untuk mempelajari bahasa asing lainnya, apalagi dengan bahasa daerah di Indonesia.

5. Bahasa Daerah dan Kaum Marginal

Lalu siapa yang mempertahankan bahasa daerah? Setidaknya ada dua elemen komunitas lokal yang, hemat saya, berperan penting dalam mempertahankan bahasa daerah.

Pertama, golongan masyarakat kebanyakan, mereka karena faktor ekonomi, kurang mampu berkompetisi mempersiapkan diri atau keturunannya untuk beradaptasi dengan tuntutan global. Tepatnya, mereka "terpaksa pasrah" dengan nasib untuk tetap berada di daerah asal dengan komunitas etnik berikut budayanya sendiri.

Kedua, komunitas pelestari budaya yang ada di setiap daerah. Mereka bukan sekadar mampu berbahasa daerah seperti pada umumnya masyarakat lokal kebanyakan, melainkan juga mampu mempertahankan derajat keagungan bahasa yang diekspresikan dalam lakon budaya dan tata krama komunikasi dengan bahasa lokal.

Terhadap kedua kelompok terakhir ini, seharusnya menjadi bagian dari fokus utama program budaya bagi setiap daerah otonom yang memiliki bahasa ibu.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Pleno II
Hari, Tanggal, Pukul	: Senin, 19 Juli 2010, 09.30—10.30 wita
Judul Makalah	: Bahasa Daerah di Era Globalisasi
Penyaji/Pembicara	: Dr. La Ode Ida
Pemandu	: Prof. Dr. Hamzah Machmoed
Pencatat	: Asri, S.S., M. Hum.
Jumlah Peserta	: 400 orang

TANYA JAWAB

Harmin Hari (Wakil Bupati Buton Utara)

Pertanyaan/Saran

Dalam upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah harus didukung oleh komponen dan unsur lain, misalnya, bahasa daerah harus didukung oleh nilai jual dari daerah itu, di antaranya dari sisi ekonomi dan budaya, seperti yang dilakukan di Baubau saat ini, yaitu merangkaikan Kongres Bahasa Daerah dengan Festival Perairan Pulau Makassar.

Jawaban/Tanggapan

Setiap daerah harus mengembangkan potensi daerahnya. Melalui pengembangan potensi daerah bisa terbentuk identitas lokal yang bisa membuat orang tertarik. Pada saat orang tertarik dan datang ke wilayah tersebut lama kelamaan orang tersebut akan belajar bahasa lokal dan budaya lokal.

Dr. Lalu Abdul Khalik (Universitas 45 Makassar)

Pertanyaan/Saran

Salah satu cara mempertahankan keberadaan bahasa adalah dengan memunculkan dan merangsang rasa kebanggaan terhadap daerah. Namun, saat ini, orang bangga ketika status ekonomi, sosial, dan pendidikannya sudah baik. Ancaman sebuah bahasa adalah adanya industrialisasi dan globalisasi yang tidak bisa dihindari. Olehnya itu, kita harus bersikap arif karena tidak ada satu obat atau resep yang tunggal dalam upaya pelestarian bahasa. Kita harus melakukan suatu upaya yang simultan dalam memajukan perekonomian dan pendidikan sambil mengajak kepada semua komponen masyarakat untuk melestarikan bahasanya. Jadi, harus ada kesadaran kolektif, baik dari pemerintah maupun masyarakat, secara bersama-sama merasa bangga berbahasa daerah yang didukung oleh status sosial, pendidikan, dan perekonomian yang baik.

Jawaban/Tanggapan

Setiap orang membutuhkan identitas diri sebagai alat untuk eksistensi diri dalam masyarakat. Untuk itu, setiap orang perlu menonjolkan identitasnya dan memperkenalkannya kepada orang lain sehingga membuat orang mengakui identitas itu (*the power of identity*). Dalam menampilkan identitas diri dibutuhkan keberanian dan dilakukan secara berkesinambungan. Namun, di Baubau dan Buton yang saya lihat belum ada yang berani secara terus menerus seperti itu, bahwa budaya dan bahasa di Baubau dan Buton seperti ini. sebagai contoh belum ada yang menampilkan lagu-lagu Buton di level nasional dan internasional sebagai bagian dari identitas lokal masyarakat Buton. Identitas yang menonjol dari suatu daerah merupakan sesuatu yang menarik untuk dipelajari, diamati, dan diikuti.

Memang industrialisasi dan urbanisasi dapat mengeliminasi peranan budaya lokal, kecuali dalam suatu masyarakat industri yang komunitasnya homogen dari segi subkultur, misalnya, kalau semua subkultur Buton di Baubau, sampai kapan pun orang tetap akan berbahasa Buton. Namun kenyatannya, urbanisasi yang terjadi saat ini sudah lintas kultur, lintas daerah, dan lintas etnik. Sudah pasti masalah itu akan mengikis budaya lokal dan mengikis perasaan kita terhadap perlu atau tidaknya kita menggunakan bahasa daerah. Kuncinya adalah ciptakan kebanggaan terhadap daerah. Bahasa daerah penting sebagai identitas diri dan etnik yang diharapkan dapat membanggakan di tingkat nasional maupun internasional.

Syaifuddin, S.Pd. (Kantor Bahasa Prov. Sulawesi Tenggara)

Pertanyaan/Saran

Apakah kemajuan sebuah daerah hanya bisa dilihat dari kemajuan ekonomi dan teknologi sehingga bahasa daerahnya hanya bisa bertahan jika bidang ekonomi dan teknologinya juga sudah maju?

Jawaban/Tanggapan

Bukan hanya faktor ilmu pengetahuan, ekonomi, dan teknologi yang menjadikan sebuah daerah dikenal identitasnya, tetapi juga budaya dan pariwisata, misalnya, Baubau memiliki benteng terluas di dunia yang bisa dijual untuk daya tarik wisata dan Wakatobi dengan wisata bawah laut yang sudah mendunia. Dalam hal kepariwisataan dibutuhkan proses pengalihan perhatian dari Bali, yang sudah mulai jenuh, ke daerah-daerah lain

yang lebih segar alam dan lingkungannya. Ini masuk dalam kebijakan nasional dan pencitraannya masih harus lebih didorong oleh Kementerian Pariwisata. Budaya, termasuk bahasa daerah, dan kekayaan alam menjadi potensi wisata di tingkat lokal untuk diangkat sebagai identitas lokal yang nasional dan mendunia. Jadi, perlu langkah-langkah promosi wisata terus menerus dari pemerintah daerah.

Perguruan tinggi/kampus sebagai satu wadah untuk memperkenalkan identitas daerah. Kampus tidak boleh mengerdilkan diri sendiri dengan hanya mengurus internalnya saja, seperti di Universitas Haluoleo (Unhalu). Dosen Unhalu harus dikirim ke luar daerah, misalnya ke Makassar, untuk mengajar, baik tiap minggu ataupun tiap bulan. Melalui cara ini Unhalu diperkenalkan ke luar dan memperkenalkan Unhalu berarti memperkenalkan daerah Sulawesi Tenggara. Selain itu, dari segi kuantitas tenaga dosen di Unhalu harus ditambah. Selanjutnya, dari segi kualitas, dosen tersebut di sekolahkan ke luar sambil mengajar di tempatnya belajar. Tentu saja, cara ini tidak menghilangkan identitas dosen sebagai pengajar dan pebelajar.

Asrif, S.Pd., M.Hum. (Kantor Bahasa Prov. Sulawesi Tenggara)

Pertanyaan/Saran

Konsep apa yang tepat dalam melaksanakan kebijakan muatan lokal bahasa Wolio agar bisa berhasil, bukan hanya angan-angan?

Kasus masyarakat bajo bisa loyal terhadap bahasanya sementara tingkat pendidikan, ekonomi, dan teknologi rendah?

Jawaban/Tanggapan

Saya setuju kalau bahasa Wolio dijadikan materi pengajaran muatan lokal. Bahasa Wolio bisa menjadi pemersatu di Kota Baubau karena sangat dominan dan terkenal, meskipun di dalam wilayah daratan Buton sendiri begitu banyak subkultur yang memiliki bahasa daerah masing-masing.

Perlu ada penelitian lebih lanjut dan khusus mengenai suku Bajo yang solid dan loyal terhadap bahasanya sendiri. Di mana pun mereka berada dan berdiam, di luar negeri sekali pun, masyarakatnya tetap menguasai bahasa Bajo. Dugaan saya karena suku Bajo dikenal sebagai komunitas nomaden sehingga perlu memelihara komunikasi untuk menjaga identitas dengan menggunakan bahasa Bajo.

Multamia R.M.T. Lauder

(Departemen Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia)

1. Pembuka

Upaya untuk menggali potensi bahasa daerah bukanlah hal yang mudah. Hal ini, agaknya terjadi, karena pengetahuan dasar kita mengenai variasi budaya di seluruh Indonesia belum tersusun secara lengkap. Usaha ke arah itu dari kalangan ahli antropologi baru muncul di tahun 90-an yaitu karya Masinambow (1994) *Paradigma Studi Bahasa dan Lingkungan Sosial-Budaya*, Melalatoa (1995) *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*, dan Masinambow (1995) *Kebudayaan Lain-Lain dalam Masyarakat Indonesia*. Namun, mereka belum sepenuhnya menelusuri variasi dan wilayah budaya karena masih memusatkan perhatian pada tataran inventarisasi. Bahkan sampai saat ini, tampaknya belum terlihat adanya kebijakan budaya yang menyeluruh dan operasional dari pemerintah.

Upaya menggali potensi bahasa daerah tidaklah dilaksanakan untuk alasan etika semata, tetapi lebih pada kebermaknaannya demi perkembangan dan kemajuan peradaban umat manusia. Hal itu justru memaksa kita untuk melihat dari perspektif yang lebih luas yaitu preservasi budaya yang membantu kita untuk melihat bagaimana upaya manusia membentuk kodifikasi untuk pemahaman dan penataan pengetahuan mengenai dunia ini. Kita tidak akan mungkin menggali potensi bahasa daerah apabila tidak mengetahui variasi budaya dan wilayah budaya yang ada di seluruh Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bahwa nilai-nilai budaya tidak bersifat universal. Dengan demikian, upaya untuk mengimpor nilai-nilai budaya asing untuk membangun Indonesia bukanlah jalan keluar yang terbaik dan juga belum tentu secara serta-merta dapat diterima oleh publik dan juga oleh rasa kebangsaan.

Untuk memahami secara langsung nilai-nilai budaya itu sendiri memang tidak bersifat gamblang. Salah satu jendela untuk memasuki ranah budaya bisa dilakukan melalui bahasa--yang memiliki salah satu fungsi sebagai penyimpan tata nilai budaya--dalam berbagai bentuk misalnya kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan. Sejalan dengan semangat membangun Indonesia berdasarkan jati dirinya maka pelacakan terhadap semua bahasa di seluruh Indonesia perlu dilakukan secara berkesinambungan.

2. Situasi Kebahasaan

Sebagai langkah awal perlu memahami situasi kebahasaan di dunia dan perlu melakukan pelacakan situasi kebahasaan di Indonesia.

Diperkirakan sekitar 10% dari jumlah bahasa-bahasa di dunia dituturkan di Indonesia dan sejumlah 50% di antara sekitar 6000 bahasa yang ada di dunia, terdapat di Asia dan Oceania. Dari segi jumlah bahasa, Indonesia menempati peringkat kedua sebanyak 742 bahasa sesudah Papua Nugini sebanyak 867 bahasa. Dari segi jumlah penutur bahasa, kondisi di Indonesia sangat bervariasi dari yang berpenutur puluhan juta orang seperti bahasa Jawa, ada pula yang berpenutur tidak lebih dari 1000 orang seperti bahasa Enggano di Sumatera, hingga yang berpenutur hanya 1 orang seperti bahasa Mapia di Papua (SIL Internasional 2000). Dari segi situasi kebahasaan, Indonesia tergolong rumit mengingat lebih banyak wilayah yang bersifat heterogen daripada homogen.

Bahasa adalah salah satu kemampuan alamiah yang dianugerahkan pada umat manusia. Sedemikian alamiahnya sehingga kita tidak menyadari bahwa tanpa bahasa, umat manusia tidak mungkin mempunyai peradaban yang di dalamnya termasuk agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa merupakan salah satu *properti* yang lekat secara biologis pada manusia dan hampir semua aktivitas manusia memerlukan bahasa. Dengan demikian, tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa kajian mengenai bahasa sangat bermanfaat untuk berbagai bidang dalam hal ini untuk bidang budaya.

Membangun sebuah bangsa yang masyarakatnya majemuk, bukanlah pekerjaan yang mudah. Banyaknya persoalan yang muncul, karena terkait dengan kemajemukannya itu, merupakan konsekuensi yang tak terelakkan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia sangat membantu dalam menyatukan pikiran dan langkah seluruh masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Berkaitan dengan hal itu, garis haluan pemerintah untuk bidang kebahasaan, menurut pendapat saya, mempunyai dua kepentingan nasional yang agaknya bersifat kontradiktif yaitu kegiatan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di satu pihak dan kegiatan

¹ Makalah ini merupakan elaborasi dari "*Pengembangan dan Pemanfaatan Kajian Dialektologi di Indonesia*" serta "*Kaitan Pemetaan Bahasa dan Preservasi Budaya*" untuk disampaikan pada Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara, dengan tema "*Bahasa Daerah sebagai Sarana Pencerdasan dan Pengembangan Potensi Daerah Sulawesi Tenggara pada Era Globalisasi*". Baubau, Sulawesi Tenggara, 18--20 Juli 2010.

pelestarian bahasa-bahasa daerah sebagai unsur kebudayaan nasional di lain pihak. Harus diakui bahwa kedua kegiatan itu memang kontradiktif karena sudah sewajarnya jika di dalam sebuah ruang gerak yang sama, sebuah bahasa pemersatu dikembangkan, maka secara tidak langsung akan mendesak ruang gerak dan daya hidup bahasa daerah, tetapi hal itu dapat ditanggulangi dengan Perencanaan bahasa yang baik.

Perkiraan adanya pergeseran ruang gerak dan daya hidup bahasa, sekurang-kurangnya ditunjang oleh data pemakaian bahasa yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik berdasarkan Sensus Penduduk 1980 dan 1990. Sebagai contoh, penduduk Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari di rumah pada tahun 1980 tercatat 11,93%, sedangkan pada 1990 tercatat 15,07%. Data tersebut memperlihatkan adanya peluasan penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi sehari-hari di rumah. Sementara itu, penduduk Indonesia yang menggunakan bahasa Jawa dalam kesehariannya pada tahun 1980 tercatat 50,44%, sedangkan pada tahun 1990 tercatat 38,08%. Secara sederhana, data itu memperlihatkan bahwa pemakaian bahasa Jawa mengalami penurunan. Barangkali, gejala itu merupakan isyarat bagi kita, untuk merenungkan kembali sejauh mana bahasa daerah dan bahasa Indonesia dikelola selama ini. Akan dibawa ke manakah pengembangan bahasa daerah dan bahasa Indonesia? Dengan sendirinya, jika kita tetap ingin melestarikan bahasa-bahasa daerah dan pada saat yang sama bahasa Indonesia juga berdiri kokoh sebagai bahasa persatuan, maka diperlukan informasi dasar mengenai situasi kebahasaan yang lengkap di seluruh Indonesia berdasarkan data empiris di lapangan. Informasi dasar tersebut sangat diperlukan untuk menyusun Perencanaan Bahasa dalam hal pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang terpadu dan operasional.

Banyak hal dan faktor yang berperan untuk melacak profil situasi kebahasaan di Indonesia. Antara lain, stratifikasi pembentukan bahasa dan distribusi keanekaragaman bahasa yang tidak seimbang, populasi penduduk lebih padat di wilayah barat Indonesia tetapi situasi kebahasaannya lebih homogen, berbanding terbalik dengan situasi di wilayah Timur Indonesia. Selain itu, pengetahuan kita tentang peran dan fungsi antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing belum lengkap. Bahkan, pengetahuan kita tentang sosok bahasa-bahasa daerah itu sendiri, satu per satu, di seluruh Indonesia masih sangat minim.

Hasil penelitian Proporsi Pemakaian Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah (Muhadjir dan Lauder, 1990) menunjukkan bahwa sekitar 85% penduduk Indonesia masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari di rumah, baik menurut usia, pendidikan, status sekolah, pekerjaan utama, maupun agama. Walaupun di sana-sini terdapat gejala penurunan pemakaian bahasa daerah, tetapi pemakaian bahasa daerah masih kuat. Dengan demikian, bahasa daerah masih dominan berfungsi sebagai bahasa ibu.

Bahasa ibu adalah "jendela" untuk "melihat" realitas dunia yang sangat kompleks. Pemahaman pada kenyataan, terbentuk melalui bahasa-ibu. Sebuah contoh sederhana *brother - sister* > < *adik - kakak*, Pemahaman kenyataan mengenai saudara seayah seibu oleh penutur bahasa Inggris "dilihat" berdasarkan jenis kelamin, sedangkan untuk penutur bahasa Indonesia kenyataan ini "dilihat" berdasarkan usia. Tidaklah mengherankan jika orang tua dan masyarakat "mendidik" kita untuk bersikap hormat kepada orang yang lebih tua, karena pemahaman kenyataan terhadap usia dianggap penting untuk masyarakat kita. Dengan demikian, bahasa-ibu selain sebagai "jendela" untuk memahami kenyataan hidup, pada saat yang sama juga merupakan pembentuk karakter perilaku dan jati diri. Sebagai contoh:

Contoh lainnya kata *besan* bukanlah sekadar istilah untuk menamai 'orang tua dari pihak menantu', di dalam kata itu juga tersimpan makna adanya interaksi di antara para orang tua yang anak-anaknya menjadi pasangan suami istri. Hubungan yang asri dan saling menghormati di antara *besan* mengandung harapan bahwa anaknya akan disayang oleh mertuanya dan memiliki hubungan yang harmonis dengan pasangannya. Sehubungan dengan hal itu, para orang tua itu diharapkan berperilaku tertentu dalam *berbesanan*.

Melihat dua contoh sederhana ini, dapatlah dikatakan bahwa pemahaman terhadap kosakata membantu kita untuk memahami hal-hal yang dianggap penting oleh sebuah masyarakat. Pada akhirnya, pemahaman terhadap makna kosakata merupakan jembatan untuk memahami ekspresi nilai, norma, aturan, hukum adat, dan kearifan lokal dalam menjaga lingkungan.

3. Kajian Linguistik

Mengapa pengetahuan kita mengenai bahasa-bahasa daerah sangat minim padahal manfaat yang dapat dipetik berlimpah? Terus terang saja, perhatian pemerintah terhadap masalah sosial budaya masih minim. Ditambah, banyaknya ahli bahasa yang ada saat ini belum cukup untuk menangani bahasa-bahasa daerah di seluruh Indonesia. Penelitian Lauder (1995) maupun Wahab (1999) mengenai profil seperempat abad kajian linguistik di Indonesia, menyimpulkan bahwa minat para linguis Indonesia masih terpusat di tataran sintaksis dengan pendekatan struktural. Lagi pula, para linguis kurang memakai data bahasa-bahasa Indonesia bagian Timur, bahasa yang diteliti cenderung yang itu-itu juga yaitu bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa besar di pulau Sumatera dan Jawa yang penuturnya di atas 1,5 juta. Berbagai kajian interdisipliner seperti dialektologi, sosiolinguistik, etnolinguistik, neurolinguistik, dan psikolinguistik tampaknya kurang terjamah. Di antara semua bidang interdisipliner yang agak populer hanyalah cabang sosiolinguistik. Sayangnya, perencanaan bahasa sebagai salah satu bidang cakupan sosiolinguistik yang saya anggap penting, justru kurang diminati. Padahal negara kita sangat membutuhkan beberapa orang ahli perencanaan bahasa untuk membuat *blue print*

perencanaan bahasa baik untuk bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun untuk bahasa asing. Agar kita tidak mengalami "kesemrawutan" berbahasa seperti saat ini dengan mengunggulnya bahasa Inggris sebagai pembentuk citra berwawasan luas, mutakhir, dan dinamis.

Peminatan yang dipilih oleh para ahli bahasa adalah hak individu dan sah, tetapi jika ditinjau dari skala nasional, kenyataan ini sungguh ironis. Di satu sisi kita sangat bangga bahwa di Indonesia terdapat ratusan bahasa daerah, di sisi lain, jika ada yang bertanya, "*Berapakah jumlah bahasa daerah di seluruh Indonesia?*" Tidak seorang pun dapat menjawabnya dengan tepat, baik ahli bahasa di Indonesia maupun di dunia. Mengapa pertanyaan mendasar seperti itu belum mampu dijawab secara akurat? Belum lagi ditambah sederet tanya lain seperti "*Bahasa daerah apa saja yang ada di Indonesia?*" lalu "*Bagaimanakah distribusi pemakaian bahasa-bahasa daerah itu di seluruh Indonesia?*" kemudian "*Berapakah jumlah penutur dari tiap bahasa daerah itu?*" dan "*Bagaimana profil pemakaian bahasa daerah dan bahasa Indonesia?*" dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut karena pertama, sumber daya manusia yang tertarik untuk menangani masalah itu dapat dihitung dengan jari. Kedua, diperlukan sumber dana yang besar untuk melakukan pengumpulan data kebahasaan di seluruh Indonesia. Ketiga, diperlukan sumber daya intelektual guna melakukan berbagai uji coba lapangan untuk menentukan teori atau konsep mana yang tepat untuk diterapkan sebagai dasar pemilahan bahasa dan dialek, mengingat teori barat tidak selamanya cocok untuk menangani situasi kebahasaan di Indonesia yang multilingual.

Pelacakan bahasa-bahasa nusantara sesungguhnya sudah lama diupayakan, hanya saja belum tercapai kesatuan pendapat. Perbedaan pendapat yang muncul, mungkin disebabkan oleh perbedaan metode penelitian yang digunakan serta dasar pemilihannya. Perbedaan pendapat itu dimungkinkan juga karena adanya sekelompok orang yang benar-benar melakukan penelitian lapangan dan ada pula sekelompok orang yang hanya menduga-duga, seperti:

Salzner (1960) berpendapat bahwa di seluruh kepulauan Indonesia hanya terdapat 69 bahasa.

Esser (1951); Alisjahbana (1954); Adinegoro (1954); Iskandar (1957); dan Hadidjaja (1961) berpendapat bahwa di seluruh kepulauan Indonesia terdapat lebih kurang 200 bahasa.

Lembaga Bahasa Nasional (1972) berusaha menengahi pertentangan pendapat itu dengan cara mengirimkan kuesioner ke tiap provinsi melalui Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk diisi oleh pejabat setempat. Hasilnya, di seluruh kepulauan Indonesia terdapat 418 bahasa dan dialek.

Summer Institute of Linguistics (2006) yang banyak melakukan penelitian di Indonesia Bagian Timur berpendapat bahwa di seluruh kepulauan Indonesia terdapat 742 bahasa.

Berdasarkan hal itu, tersirat bahwa pelacakan bahasa-bahasa daerah itu memerlukan metode penelitian lapangan serta kriteria yang sama untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Upaya pelacakan yang terpadu ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan akurat.

4. Kajian Dialektologi

Dialektologi '*ilmu tentang dialek*' adalah cabang ilmu pengetahuan bahasa yang secara sistematis menangani berbagai kajian yang berkenaan dengan dialek atau variasi bahasa. Kajian dialektologi melandaskan diri pada bukti-bukti linguistik berupa data variasi bahasa yang dikumpulkan secara spasial. Penelitian empiris secara spasial memungkinkan para ahli dialektologi untuk mengumpulkan data variasi bahasa secara simultan dari berbagai wilayah dan juga dari berbagai tataran kebahasaan. Obyek kajian dialektologi dapat berasal dari berbagai sumber berupa bahasa lisan maupun bahasa tertulis baik yang berada di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Analisis yang dilakukan dapat terfokus pada satu tataran saja atau mencakup semua tataran kebahasaan seperti fonologi, morfologi, leksikal, semantik, sintaksis, dan wacana. Dengan demikian, kajian dialektologi saya anggap dapat membantu mengimbangi kelangkaan sumber daya manusia yang berminat menangani keragaman bahasa. Sekurang-kurangnya mengatasi keterbatasan tenaga, waktu, sarana, dan dana. Selain itu, peneliti juga berkesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan penduduk setempat, sehingga mendapat gambaran umum mengenai variasi bahasa sambil mengamati kondisi sosial budaya setempat, termasuk informasi mengenai kondisi lingkungan geografis tempat bahasa itu dituturkan. Dengan demikian, kajian dialektologi sangat diperlukan untuk mengatasi kondisi kebahasaan yang multilingual seperti Indonesia.

Situasi kebahasaan kita yang multilingual, sekurang-kurangnya menyiratkan adanya dua kubu bahasa yang hidup berdampingan yaitu kubu bahasa daerah dan kubu bahasa Indonesia. Situasi diglosik seperti itu, secara alamiah kita dapati di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hasil Penelitian Kelompok LIPI dan FIBUI (2002) menyatakan bahwa apabila kita hendak memperoleh gambaran sinkronis tentang keadaan kebahasaan masyarakat Indonesia, maka keadaan itu hendaknya dipikirkan menurut dua perspektif, yaitu (1) menurut perspektif ketersediaan bahasa, dan (2) menurut perspektif penggunaan bahasa.

Menurut *perspektif ketersediaan bahasa*, bahasa-bahasa membentuk superimposisi dari tiga lapisan interaksi yaitu bahasa sukubangsa; bahasa antarsukubangsa; dan bahasa Indonesia. Pada lapisan dasar terdapat bahasa sukubangsa; di atas lapisan dasar itu terdapat suatu bahasa yang berfungsi sebagai bahasa pergaulan antarsukubangsa. Jika bahasa itu bahasa Melayu maka bahasa ini dapat berfungsi sebagai bahasa sukubangsa dan/atau bahasa perantara. Dengan demikian, bahasa Melayu pada lapisan ini dapat pula berperan sebagai bahasa

lisan nonformal dengan bahasa Indonesia sebagai mitra formalnya. Akhirnya, bahasa Indonesia berada pada lapisan teratas yang mencakupi semua bahasa yang berada pada lapisan-lapisan di bawahnya. Menurut *perspektif penggunaan bahasa*, bahasa-bahasa tersebut tadi terikat dalam suatu hierarki yang menentukan prioritas bahasa mana dapat dipilih dalam situasi apa. Dalam hal ini, bahasa perantara memainkan peranan yang penting.

Situasi kebahasaan di Indonesia memang tidak sesederhana yang kita duga. Apabila mengacu pada perspektif ketersediaan bahasa dan perspektif penggunaan bahasa, situasinya cenderung lebih bersifat multiglosik daripada diglosik. Kehadiran bahasa perantara, sebagai kenyataan yang hadir di dalam situasi kebahasaan di Indonesia, perlu mendapat perhatian karena bahasa ini seolah-olah menjembatani antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Bahasa perantara muncul semata-mata merupakan kebutuhan masyarakat untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya secara tepat dan mengena. Hibrida antara bahasa daerah setempat dengan bahasa Indonesia yang menghasilkan bahasa perantara itu, dirasakan dapat memenuhi kebutuhan mereka sebagai alat ekspresi diri sekaligus penanda jati diri. Menurut pendapat saya, sudah waktunya bahasa perantara mendapat perhatian yang serius. Kita perlu mengetahui fitur-fitur apa saja yang membuat bahasa perantara itu mampu mengekspresikan perasaan dan pikiran si penutur. Pengenalan pada fitur-fitur itu akan sangat membantu perencanaan program pengembangan bahasa agar dapat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat pemakainya. Selain itu, dasar dan arah kebijakan pengembangan bahasa harus berdasarkan situasi kebahasaan yang aktual. Pada titik inilah, dialektologi dapat memberikan kontribusi informasi. Dengan demikian, diharapkan "persaingan" di antara bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing dapat terkendali. Saya cenderung melihat pengendalian itu sebagai distribusi komplementer dalam masalah pemakaian bahasa. Tiap bahasa mempunyai fungsi dan perannya sendiri-sendiri sehingga dapat saling melengkapi.

Cukup banyak yang memahami bahwa dialektologi identik dengan pemetaan bahasa. Pemahaman itu tidak tepat. Dialektologi bukanlah sekedar pemetaan bahasa. Untuk memperoleh data visual mengenai distribusi variasi bahasa secara spasial, memang peta bahasa sangat diperlukan. Jadi, dalam hal ini, peta bahasa hanya merupakan alat untuk memvisualkan kerumitan distribusi variasi bahasa.

Salah satu isu teoretis yang tersulit untuk bidang dialektologi adalah penentuan kriteria yang tepat, akurat, dan komprehensif untuk membedakan antara sosok sebuah bahasa dan sosok sebuah dialek. Kriteria itu sangat diperlukan untuk menentukan status sebuah variasi bahasa pada satu wilayah tertentu, apakah variasi itu berstatus bahasa atau dialek. Hal ini sangat mendasar, karena kegiatan yang dilakukan oleh para ahli dialektologi, langsung atau tidak langsung berdampak pada pengelompokan dan penghitungan jumlah bahasa di seluruh dunia.

Masalah-masalah tersebut merupakan masalah mendasar yang harus ditangani oleh linguistik. Cabang ilmu linguistik yang terkait langsung dengan masalah-masalah tersebut antara lain *tipologi bahasa*, *linguistik historis komparatif*, dan *dialektologi*. Batasan mengenai bahasa dan dialek sampai saat ini masih merupakan perdebatan panjang di antara sesama ahli dialektologi. Secara sepintas, pembedaan antara bahasa dan dialek seharusnya tidak menjadi masalah karena secara konseptual, dialek adalah subdivisi dari bahasa. Dalam kenyataan sehari-hari di lapangan, hal itu tidak sesederhana yang dibayangkan. Tidak mudah untuk menentukan kriteria yang dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa *dua variasi bahasa yang terdapat di wilayah X adalah dua bahasa yang berbeda* atau *dua dialek yang berbeda dari satu bahasa yang sama*. Untuk melakukan pemilahan bahasa dan dialek, selama ini para ahli dialektologi mengandalkan bantuan isoglos, dialektometri, dan mata rantai pemahaman. Saya melakukan evaluasi penggunaan pemilah bahasa terhadap semua penelitian dialektologi (129 buah) dalam kurun waktu 50 tahun (1951—2001). Pada umumnya, seorang peneliti menggunakan beberapa alat bantu pemilah, hasilnya:

Konsep *mutual intelligibility* 'mata rantai pemahaman' dari Voegelin & Harris dipakai sebagai salah satu alternatif alat bantu pemilah bahasa dan dialek. Peneliti yang memakai konsep pemilah ini jumlahnya minim (3,87%) mengingat adanya kesulitan teknis mengenai *pengukuran pemahaman* di antara dua variasi bahasa.

Hampir semua peneliti (93,02%) memanfaatkan alat bantu isoglos. Masica (1976:170) menyatakan bahwa "*On the most general level, we may conclude that a great many linguistic features DO pattern areally that is, they are meaningfully mappable across language boundaries and across genetic lines. AREA is therefore an important dimension of linguistic features generally*". Masalah utama yang sering muncul adalah menyelesaikan perdebatan sejauh mana dua buah berian dapat dikatakan berasal dari satu etimon yang sama. Sebagai contoh, data mengenai kata *batu* dan *watu*; *bulan* dan *fulā*; lalu *abu* dan *abuw* dengan mudah dapat dipertanggungjawabkan sebagai pasangan kata yang berasal dari satu etimon yang sama, semuanya memperlihatkan adanya derajat kemiripan bunyi yang tinggi. Akan tetapi, bagaimana dengan data mengenai kata *daun* dan *ron*; lalu *empat* dan *wopato*. Derajat kemiripan bunyi di antara pasangan kata itu, termasuk rendah. Namun jika diuraikan proses evolusi bunyi yang terjadi secara berurutan, pasangan berian itu masih dapat digolongkan sebagai satu etimon. Sampai sejauh mana perbedaan bunyi masih dapat ditoleransi untuk dapat dianggap sebagai data yang berasal dari induk yang sama. Sama halnya dengan sampai sebesar apa sebuah gelas tetap teridentifikasi sebagai gelas sebelum diidentifikasi sebagai vas bunga.

Cara lain untuk melakukan pemilahan bahasa dan dialek, yaitu dengan melakukan penghitungan atas kemunculan aspek kebahasaan di tiap desa, hal ini dilakukan oleh 62,01% peneliti. Séguy (1973) dalam "*La*

Dialectométrie dans l'Atlas Linguistiques de la Gascogne" menyatakan jika kita mengenal antara lain ekonometri dan sosiometri, tidak ada salahnya jika kita "membaptis" kehadiran dialektometri. Sejauh ini tampaknya dialektometri dianggap masih mampu melakukan pemilahan bahasa secara objektif. Konsep pemilahan dengan menggunakan alat penghitungan dialektometri, secara umum dapat diterapkan dengan catatan perlu dimodifikasi berdasarkan situasi kebahasaan di Indonesia. Berdasarkan data-data bahasa barat, dirumuskan bahwa jika perbedaan unsur-unsur kebahasaan mencapai $\geq 80\%$ dapat dianggap sebagai bahasa yang berbeda. Padahal, hasil penelitian berbagai bahasa daerah memperlihatkan tingkat perbedaan sekitar 65%—70% saja. Jika angka ini diberi makna, maka kesimpulannya di seluruh Indonesia hanya terdapat satu bahasa saja, sedangkan 742 bahasa daerah yang tercatat itu, semuanya hanyaiah merupakan dialek. Hal ini nyata-nyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jika diinterpretasikan seperti itu, artinya penutur bahasa Batak dapat berkomunikasi dengan penutur bahasa Sunda, atau penutur bahasa Bali dapat berkomunikasi dengan penutur bahasa Tolaki. Sebagaimana penutur bahasa Indonesia dapat berkomunikasi dengan penutur bahasa Melayu di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, atau Thailand.

Berdasarkan ke 129 buah penelitian itu, dapatlah disimpulkan bahwa secara teoretis dapat dikatakan hasil penghitungan dialektometri berbanding lurus dengan hasil penghimpunan isoglos. Namun, hasil penghitungan dialektometri berbanding terbalik dengan hasil penghitungan derajat pemahaman timbal balik. Mata rantai gradasi pemahaman timbal balik tidak selamanya berbanding lurus dengan jarak spasial antara titik acuan dan titik uji. Bahkan, penghitungan dialektometri secara permutasi dapat dipakai sebagai alat bantu penghitungan mata rantai pemahaman.

5. Perkembangan Dialektologi

Sejak pertengahan tahun pertengahan 80-an, kajian dialektologi lebih menampilkan dirinya sebagai cabang linguistik yang multifaset dengan berupaya memanfaatkan perangkat analisis cabang ilmu linguistik lain. Hal ini dilakukan, untuk mendapatkan deskripsi dari berbagai sudut pandang, agar memperoleh profil karakteristik variasi bahasa itu sendiri maupun hubungan di antara berbagai variasi bahasa di wilayah tertentu secara komprehensif. Secara hakiki, data kebahasaan dari penelitian dialektologi menampilkan sosok variasi bahasa sinkronis. Seolah-olah merupakan "potret" kondisi variasi bahasa pada satu titik waktu. Namun, pada saat yang sama, "potret" itu juga menampilkan informasi yang memungkinkan penelusuran jejak-jejak proses perubahan variasi bahasa.

Thomas (1987) mencatat sekurang-kurangnya terdapat 50 buah penelitian dialektologi yang bereksperimen menggunakan perangkat analisis lain, selain isoglos, dialektometri, dan mata rantai pemahaman. Sebagai contoh:

Martin J. Ball dari Polytechnic of Wales melakukan penelitian dialektologi dengan fokus "*Investigating Performance and Competence in Variation Studies: Adapting Techniques from Speech Pathology*". Welsh sebagai salah rumpun bahasa Keltika, mempunyai sistem mutasi konsonan pada posisi di awal kata. Ball menemukan tiga set mutasi yaitu *Soft Mutation* (konversi dari hambat lenis ke frikatif lenis); *Nasal Mutation* (konversi dari hambat lenis dan fortis ke hambat homorganik fortis dan nasal lenis); dan *Aspirate Mutation* (konversi dari hambat fortis ke frikatif homorganik fortis). Selain itu, Ball mengamati bahwa perubahan bunyi konsonan di awal kata ternyata tidak terpicu oleh kondisi lingkungan fonologisnya tetapi lebih pada kondisi morfosintaksisnya. Penelitian mengenai perbedaan variasi bunyi dialek Welsh ini, mengharuskan Ball menyesuaikan metode pengambilan sampel dialektologi yang dikaitkan dengan konsep *performance* dan *competence*. Pengolahan data mengenai variasi bunyi dialek Welsh dilakukan dengan mengadaptasi teknik analisis dari *clinical linguistics* dan *psycholinguistics* (Ball, 1987: 1—10).

Martin K. L. Ching dari Memphis State University melakukan penelitian dialektologi dengan fokus "*Ma'am and Sir: Modes of Mitigation and Politeness in the Southern United States*". Penelitian variasi kesantunan dilakukan di wilayah Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Tennessee, Texas, dan Virginia. Informan kebahasaan berjumlah 640 orang baik yang berkulit hitam maupun berkulit putih. Informan terdiri atas empat kelompok yaitu (1) Tetua masyarakat dan (2) Pendeta yang pada umumnya dihormati secara alamiah, lalu (3) Polisi dan (4) Manajer perusahaan yang pada umumnya dihormati karena rasa takut. Penelitian ini secara sekilas tampak sebagai penelitian sosiolinguistik. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian mengenai variasi bahasa merupakan topik yang bersentuhan dengan sosiolinguistik. Dengan demikian, Ching memadukan metode penelitian dialektologi dan sosiolinguistik agar mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai variasi kesantunan berbahasa di wilayah Selatan Amerika Serikat (Ching, 1987: 20—45).

Rose Mary Babitch dari Université de Moncton melakukan penelitian dialektologi dengan fokus "*Diachronic Interlinguistic Contact as Reflected in the Typological Structure of Today's Acadian Fishermen's Terminology*". Penelusuran Babitch terhadap istilah pemancingan lobster pada Pulau Miscou dan Pulau Lamèque di Utara New Brunswick, Kanada menggunakan 132 nelayan sebagai informan. Usia para informan berkisar antara 20—60 tahun. Penjarangan data dilakukan dengan cara elisitasi berbagai istilah peralatan paucing maupun kegiatan memancing berdasarkan kuesioner yang telah disiapkan. Jawaban para nelayan ternyata sangat

bervariasi karena istilah yang mereka gunakan berasal dari bahasa Inggris, Prancis, Belanda, dan Akasia. Semua jawaban dicatat secara fonetis. Pengolahan data menggunakan berbagai alat bantu yaitu isoglos, dialektometri Séguy, metode Hamming (penghitungan jarak desa), penghitungan kognat, dilanjutkan dengan pembuatan diagram kekerabatan, dan analisis struktur morfosintaksis. Hasil analisis data lalu diinterpretasi dengan bantuan sejarah migrasi pemukiman pada Pulau Miscou dan Pulau Lamèque (Babitch, 1987: 121—137).

Dennis Girard dan Donald Larmouth (1987) dari University of Wisconsin-Green Bay melakukan penelitian dialektologi dengan fokus "*Log-Linear Statistical Models: Explaining the Dynamics of Dialect Diffusion*". Penelitian Girard dan Larmouth dilaksanakan di daerah Wisconsin yaitu di Green Bay, Manitowoc, Maribel, Keinersville, Whitejaw, dan Francis Creek. Ke-63 informan yang dipilih dari berbagai tempat itu, dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, usia, asal kota (kota kecil atau kota besar), dan strata sosial ekonomi. Analisis data pertama-tama menggunakan *notion of categorical and variable linguistic rules* dari Bailey. Lalu dilanjutkan dengan *log linear analysis*. Girard dan Larmouth menemukan bahwa dinamika difusi dialek secara signifikan juga ditentukan oleh jumlah populasi penduduk di kota asal dan juga oleh strata sosial ekonomi (Girard & Larmouth, 1987: 251—277).

Tsuneko Ikemiya (1987) dari Tezukayama University melakukan penelitian dialektologi dengan fokus "*Acoustic Comparative Study of Contradictory /a:/ and /æ/ between Maine Dialect and General American*". Ikemiya meneliti variasi pelafalan vokal dari dialek Maine dan bahasa Inggris Amerika Umum. Pengukuran dilakukan pada kelompok kosakata *ask; bath; aunt; answer; dan half* juga pada kelompok kosakata *garden; guard; park; car; dan farm*. Pengukuran dan analisis yang dilakukan berbantuan pendekatan fonologi akustik. Perekaman data dilakukan di Amerika, tapi analisis data *spectro-graphic* dilakukan di Tezukayama University di Kota Nara, Jepang. Rekaman data dibuat terhadap dua kelompok yaitu kelompok berdialek Maine dan kelompok berbahasa Inggris Amerika Umum. Masing-masing kelompok diwakili oleh lima orang informan wanita dan lima orang informan pria, sehingga berjumlah 20 orang informan baik pria maupun wanita. Usia para informan berkisar antara 50—85 tahun. Berdasarkan hasil analisis, secara umum, Ikemiya menyimpulkan bahwa menurut kelompok-kelompok kosakata yang diujikan, penutur dialek Maine memang cenderung melafalkan /a:/ sedangkan penutur bahasa Inggris Amerika Umum cenderung melafalkan /æ/. (Ikemiya, 1987: 302—325).

Sebagaimana dapat dilihat pada beberapa contoh di atas, penelitian dialektologi tidak terbatas pada pemetaan bahasa serta penentuan status bahasa atau dialek. Secara jelas tergambar bahwa semua penelitian dialektologi, secara sistematis berupaya memerikan variasi bahasa dengan cermat yang terdapat pada satu lokasi tertentu. Perkembangan kajian dialektologi bukanlah kecenderungan yang muncul secara mendadak. Jika membaca Moulton, ia telah memperkirakan perkembangan kajian dialektologi yang disebutnya sebagai *future directions* (1972: 214—218).

6. Kaitan Pemetaan Bahasa

Dialektologi sebagai salah satu cabang linguistik yang berpijak pada ruang lingkup kajian variasi bahasa secara spasial, secara tak langsung bersentuhan dengan permasalahan bahasa yang terancam punah (*endangered languages*), kematian bahasa (*language death*), hak berbahasa ibu (*linguistic human rights*), pemusnahan bahasa (*linguistic genocide*), dan ekologi bahasa (*ecolinguistic*). Berkenaan dengan itu, data yang tertera pada peta bahasa dapat membantu menyediakan informasi dasar bagi permasalahan tersebut.

Penyediaan informasi dasar sudah diupayakan oleh Pusat Bahasa (1992—2010) dengan membuat *Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-Bahasa Daerah di Seluruh Indonesia* yaitu sebuah penelitian terpadu guna menjaring distribusi dan keanekaragaman variasi bahasa daerah, kekerabatan di antara bahasa daerah dan pada saat yang sama dapat mendeteksi "penyusupan" bahasa Indonesia ke dalam bahasa daerah:

Tahun 1992, Provinsi Timor Timur (50 peneliti; 171 desa) dan Nusa Tenggara Timur (20 peneliti; 60 desa).

Tahun 1993, Provinsi Sulawesi Utara (28 peneliti; 88 desa), Sulawesi Tengah (29 peneliti; 99 desa), dan Sulawesi Selatan (42 peneliti; 132 desa).

Tahun 1994, Provinsi Kalimantan Timur (30 peneliti; 120 desa), Kalimantan Tengah (23 peneliti; 69 desa), Kalimantan Selatan (10 peneliti; 30 desa), dan Kalimantan Barat (22 peneliti; 75 desa).

Tahun 1995, Provinsi Sumatera Barat (15 peneliti; 48 desa), Bengkulu (15 peneliti; 45 desa), Riau (32 peneliti; 96 desa), dan Jambi (19 peneliti; 63 desa).

Tahun 1996, Provinsi Aceh (25 peneliti; 76 desa), Sumatera Utara (23 peneliti; 79 desa), Sumatera Selatan (25 peneliti; 85 desa), Lampung (10 peneliti; 31 desa), dan Sulawesi Tenggara (15 peneliti; 60 desa).

Tahun 1997, Provinsi Jawa Barat (12 peneliti; 48 desa), DKI Jakarta-Jabotabek (3 peneliti; 12 desa), Jawa Tengah (12 peneliti; 40 desa), DI Yogyakarta (2 peneliti; 8 desa), Jawa Timur (15 peneliti; 56 desa), Bali (5 peneliti; 16 desa), dan Nusa Tenggara Barat (18 peneliti; 63 desa).

Tahun 2006, Provinsi Papua (12 Peneliti, 41 desa) dan Papua Barat (19 peneliti, 29 desa)

Tahun 2007, Provinsi Papua (12 Peneliti, 41 desa), Papua Barat (16 peneliti, 71 desa), Maluku (20 peneliti, 87 desa), dan Maluku Utara (8 peneliti, 29 desa)

Tahun 2008, Provinsi Papua (14 Peneliti, 24 desa) dan Papua Barat (6 peneliti, 17 desa)

Tahun 2009, Provinsi Papua (14 Peneliti, 25 desa), Papua Barat (6 peneliti, 15 desa), dan NTT (6 peneliti, 13 desa)

Tahun 2010, Provinsi Papua (10 Peneliti, 25 desa) dan NTT (6 peneliti, 13 desa)

Pada tahun 1997 krisis moneter mulai melanda sehingga pada tahun 1998—2005 kegiatan penjarangan data terpaksa dihentikan. Ketika tahun 2006 kondisi ekonomi sudah memungkinkan untuk melakukan kegiatan penjarangan data, maka Pusat Bahasa segera mengiriskan peneliti ke Provinsi Maluku dan Papua, bahkan melakukan penjarangan data tambahan untuk wilayah NTT.

Mengingat pada awalnya, dialektologi adalah “anak” dari linguistik historis komparatif maka penjarangan data hanya dilakukan satu kali pada tiap desa, akan tetapi data itu dianalisis dua kali secara serentak dari sudut pandang dialektologi dan linguistik historis komparatif. Kedekatan yang tak terelakkan itu dimanfaatkan untuk mendapatkan gambaran mengenai distribusi dan kekerabatan bahasa yang lebih terpadu.

Informasi kebahasaan tidak akan pernah lengkap jika melupakan informasi mengenai bahasa-bahasa di daerah pencilan dan juga bahasa-bahasa suku terasing. Secara umum, variasi bahasa berurusan dengan tiga tipe dialek yaitu dialek temporal, dialek regional, dan dialek sosial. Upaya pendeteksian berbagai bahasa pencilan dan bahasa suku-suku terasing dapat digolongkan sebagai dialek regional. Dalam hal ini, perpindahan penduduk merupakan salah satu faktor yang patut dicermati. Kecermatan itu diperlukan, mengingat jika sejumlah penduduk pindah tempat maka otomatis bahasanya pun ikut berpindah. Bahasa-bahasa pencilan yang jumlah penuturnya kecil serta lokasinya dikelilingi oleh bahasa lain cenderung tergolong sebagai bahasa-bahasa yang terancam punah, kecuali jika ada faktor tertentu—seperti agama atau jati diri—yang dapat membantu proses pemertahanan bahasa. Tidak mudah untuk mendeteksi bahasa pencilan, tetapi lebih sulit lagi untuk mendeteksi lokasi suku-suku terasing, mengingat penelitian dan kepustakaan yang berkenaan dengan suku-suku terasing sangat minim dan sporadis. Belum ada satu penelitian pun yang mendeskripsikan lokasi suku-suku terasing di seluruh Indonesia secara lengkap dan komprehensif.

Sehubungan dengan hal itu, penjarangan data di lapangan untuk pembuatan peta bahasa dapat membantu pelacakan keberadaan mereka, dengan cara meningkatkan jumlah titik pengamatan di tiap wilayah. Dengan demikian, bahasa pencilan dan bahasa suku-suku terasing yang cenderung merupakan bahasa minoritas, dapat terdeteksi. Jika hanya beberapa ahli bahasa saja yang berminat mengurus bahasa daerah seperti sekarang ini, semua bahasa daerah yang semula tergolong bahasa yang terancam punah akan dengan cepat mengalami proses menuju ke bahasa sekarat (*moribund language*) hingga ke kematian (*language death*) dalam berbagai gradasi.

Secara operasional dikenal 5 (lima) tahap klasifikasi kondisi “kesehatan” bahasa (Crystal, 2000):

Potentially endangered languages: Bahasa-bahasa yang dianggap *berpotensi terancam punah* adalah bahasa yang secara sosial dan ekonomi tergolong minoritas serta mendapat tekanan yang cukup besar dari bahasa mayoritas. Generasi mudanya (anak-anak) sudah mulai berpindah ke bahasa mayoritas dan jarang menggunakan bahasa ibu.

Endangered languages: Bahasa-bahasa yang dianggap *terancam punah* adalah bahasa yang tidak mempunyai lagi generasi muda yang dapat berbahasa ibu. Penutur yang fasih hanyalah kelompok generasi menengah (dewasa).

Seriously endangered languages: Bahasa-bahasa yang dianggap *sangat terancam punah* adalah bahasa yang hanya berpenutur generasi tua berusia di atas 50 tahun.

Moribund languages: Bahasa-bahasa yang dianggap *sekarat* adalah bahasa yang dituturkan oleh beberapa orang yang sepuh yaitu sekitar 70 tahun ke atas.

Extinct languages: Bahasa-bahasa yang dianggap *punah* adalah bahasa yang penuturnya tinggal 1 orang sehingga tidak ada teman berkomunikasi dalam bahasa itu apalagi jika sudah tidak ada penuturnya lagi.

Di seluruh dunia, tercatat hanya sekitar 30% kegiatan transmisi bahasa ibu dari satu generasi ke generasi berikutnya berjalan lancar. Sementara itu, 70% kegiatan transmisi lainnya dapat dilaksanakan dengan berbagai kendala. Kendala yang mereka hadapi antara lain emigrasi, sikap bahasa yang negatif, tidak adanya perhatian dari pihak pemerintah, penjajahan, kawin campur, adanya diskriminasi kultural termasuk asimilasi oleh kelompok budaya yang dominan, minimnya jumlah penutur, tekanan dari pihak sekolah, peperangan, dan penyakit AIDS (Barreña dkk, 2000: 328—330). Khusus untuk Indonesia harus ditambahkan dengan tak terelakkannya penyusupan bahasa Indonesia ke dalam bahasa-bahasa daerah. Pendeteksian faktor-faktor yang mengantarkan sebuah bahasa ke ambang kepunahan perlu segera dikerjakan. Selanjutnya, setelah faktor-faktor penyebab dapat diidentifikasi, perlu segera dicarikan jalan keluar agar kematian bahasa dapat diminimalkan (Crystal, 2000).

Pada umumnya, bahasa daerah yang jumlah penuturnya sedikit cenderung merupakan bahasa yang tidak mempunyai tulisan. Dengan demikian, tradisi lisan yang berkembang pada bahasa-bahasa minoritas ini jika tidak segera didokumentasikan maka akan sangat sulit untuk mempertahankan eksistensi mereka. Langkah awal untuk melakukan antisipasi adalah mendaftarkan bahasa-bahasa yang jumlah penuturnya sedikit. Crystal (2000:20) menyatakan bahwa bahasa yang dapat dikategorikan sebagai *viable but small* adalah bahasa yang mempunyai

penutur sekurang-kurangnya 1000 orang. Oleh karena itu, bahasa-bahasa yang jumlah penuturnya 500 orang atau kurang dapat dikategorikan sebagai yang dianggap memasuki ambang proses berpotensi terancam punah.

Sehubungan dengan hal itu, data SIL (2001) memperlihatkan bahwa bahasa-bahasa daerah berpenutur 500 orang atau kurang¹ berjumlah 169 bahasa yang tersebar di wilayah Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua:

Wilayah Sumatra:

Bahasa Lom [MFB]: 50 penutur

Wilayah Sulawesi:

Bahasa Budong-budong [TGK]: 70, Dampal [DMP]: 90, Bahonsuai [BSU]: 200, Baras [BRS]: 250, Kumbewaha [XKS]: 250, Waru [WRU]: 350, Taje [PEE]: 400, Busoa [BUP]: 500, Kalao [KLY]: 500, Koroni [XKQ]: 500, Taloki [TLK]: 500, dan Talondo' [TLN]: 500 penutur.

Wilayah Kalimantan:

Bahasa Lengilu [LGI]: 10, Punan Merah [PUF]: 137, Kereho-Uheng [XKE]: 200, Punan Merap [PUC]: 200, Punan Aput [PUD]: 370, Bukat [BVK]: 400, dan Kayan, Wahau [WHU]: 500 penutur.

Wilayah Maluku:

Bahasa Hukumina [HUW]: 1, Kayeli [KZL]: 3, Naka'ela [NAE]: 5, Hoti [HTI]: 10, Hulung [HUK]: 10, Kamarian [KZX]: 10, Nusa Laut [NUL]: 10, Piru [PPR]: 10, Amahai [AMQ]: 50, Paulohi [PLH]: 50, Salas [SGU]: 50, Aputai [APX]: 150, Emplawas [EMW]: 250, Perai [WET]: 278, Huaulu [HUD]: 300, Kao [KAX]: 300, Malay, North Moluccan [MAX]: 300, Lorang [LRN]: 325, Serili [SVE]: 328, Kompene [KVP]: 330, Benggoi [BGY]: 350, Mariri [MQI]: 390, Kadai [KZD]: 400, Imroing [IMR]: 450, Kaibobo [KZB]: 500, dan Nuaulu, North [NNI]: 500 penutur.

Wilayah Papua:

Bahasa Mapia [MPY]: 1, Tandia [TNI]: 2, Bonerif [BNV]: 4, Dusner [DSN]: 6, Kanum, Badi [KHD]: 10, Saponi [SPI]: 10, Worja [WOR]: 12, Mander [MQR]: 20, Kembra [XKW]: 30, Burumakok [AIP]: 40, Masep [MVS]: 40, Marengi [MRX]: 47, Morori [MOK]: 50, Kwerisa [KKB]: 55, Kapori [KHP]: 60, Mor [MOQ]: 60, Kanum, Smärky [KXQ]: 80, Anus [AUQ]: 100, Awbono [AWH]: 100, Awera [AWR]: 100, Bayono [BYL]: 100, Burate [BTI]: 100, Diuwe [DIY]: 100, Duriankere [DBN]: 100, Iresim [IRE]: 100, Itik [ITX]: 100, Kanum, Sota [KRZ]: 100, Kofei [KPI]: 100, Korowai, North [KRG]: 100, Kwer [KWR]: 100, Liki [LIO]: 100, Marub [MJB]: 100, Narau [NXU]: 100, Sauri [SAH]: 100, Sowanda [SOW]: 100, Tefaro [TFO]: 100, Tofanma [TLG]: 100, Tokuni [TKO]: 100, Towei [TTN]: 115, Maklew [MGF]: 120, Senggi [SNU]: 120, Dubu [DMU]: 130, Obokuitai [AFZ]: 130, Kanum, Ngkälmpw [KCD]: 150, Taworta [TBP]: 150, Usku [ULF]: 150, Yafi [WFG]: 175, Arguni [AGF]: 200, Biksi [BDX]: 200, Dabe [DBE]: 200, Karas [KGV]: 200, Masimasi [ISM]: 200, Mer [MNU]: 200, Molof [MSL]: 200, Momina [MMB]: 200, Palamul [PLX]: 200, Podena [PDN]: 200, Rasawa [RAC]: 200, Wares [WAI]: 200, Yarsun [YRS]: 200, Yoke [YKI]: 200, Foau [FLH]: 232, As [ASZ]: 250, Bedoanas [BED]: 250, Biritai [BQZ]: 250, Burmeso [BZU]: 250, Dao [DAZ]: 250, Erokwanas [ERW]: 250, Kaiy [TCQ]: 250, Kirikiri [KIY]: 250, Kopkaka [OPK]: 250, Kosadle [KIQ]: 250, Meoswar [MVX]: 250, Mombum [MSO]: 250, Uruangnirin [URN]: 250, Yamna [YMN]: 250, Yeretuar [GOP]: 250, Citak, Tannim [TML]: 290, Abinomn [BSA]: 300, Bagusa [BQB]: 300, Elseng [MRF]: 300, Kawe [KGB]: 300, Koneraw [KDW]: 300, Kwerba Mamberamo [NOB]: 300, Legenyem [LCC]: 300, Sause [SAO]: 300, Saweru [SWR]: 300, Trimuris [TIP]: 300, Waigeo [WGO]: 300, Waritai [WBE]: 300, Warkay-Bipim [BGV]: 300, Doutai [TDS]: 335, Auye [AUU]: 350, Kimki [SBT]: 350, Mlap [KJA]: 350, Tause [TAD]: 350, Tobati [TTI]: 350, Yaur [JAU]: 350, Airoran [AIR]: 400, Awyi [AUW]: 400, Betaf [BFE]: 400, Fayu [FAU]: 400, Kauwera [QKX]: 400, Keder [KDY]: 400, Maden [XMX]: 400, Manem [JET]: 400, Papasena [PAS]: 400, Samarokena [TMJ]: 400, Wakde [WKD]: 400, Yelmek [JEL]: 400, Eritai [BAD]: 420, Bonggo [BPG]: 432, Kaure [BPP]: 450, Ndom [NQM]: 450, Sekar [SKZ]: 450, Demisa [DEI]: 500, Konda [KND]: 500, Kuri [NBN]: 500, Nisa [NIC]: 500, Tanahmerah [TCM]: 500, Tsakwambo [KVZ]: 500, Tunggare [TRT]: 500, dan Yahadian [NER]: 500 penutur.

Di bawah ini terdapat 44 bahasa di wilayah Sumatra, Jawa dan Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, serta Papua yang tidak tercatat jumlah penuturnya. Sebagian dari bahasa-bahasa tersebut, ada kemungkinan, jumlah penuturnya di bawah 500 orang yaitu:

Wilayah Sumatra:

Bahasa Loncong [LCE] dan Sungkai [SUU].

Wilayah Jawa & Bali:

Bahasa Kangean [KKV] dan Petjo [PEY].

¹ diurutkan mulai dari bahasa yang minim jumlah penuturnya berdasarkan nama bahasa, kode bahasa SIL, dan jumlah penutur.

Wilayah Nusa Tenggara:

Bahasa Adang [AND], Adonara [ADA], Bunak [BUA], Ile Ape [ILA], Kemak [KEM], Kepo' [KUK], Komodo [KVH], Lamalera [LMR], Lamatuka [LMQ], Lembata, South [LMF], Lembata, West [LMJ], Levuka [LVU], Lewo Eleng [LWE], Lewotobi [LWT], Rajong [RJG], Rembong [REB], Retta [RET], Rongga [ROR], Rote, Western [ROW], dan Wae Rana [WRX].

Wilayah Kalimantan:

Bahasa Biatah [BTH], Bukar Sadong [SDO], Bukitana [BKN], Iban [IBA], Kelabit [KZI], Kenyah, Upper Baram [UBM], Okolod [KQV], Sara [SRE], dan Selungai Murut [SLG].

Wilayah Sulawesi:

Bahasa Kwandang [KJW], Limboto [LJO], dan Lolak [LLQ].

Wilayah Maluku:

Bahasa Elpaputih [ELP], Horuru [HRR], Ibu [IBU], dan Loun [LOX].

Wilayah Papua:

Bahasa Murkim [RMH], Kehu [KHH], Iha Based Pidgin [IHB], dan Onin Based Pidgin [ONX].

Hal-hal yang telah dikemukakan berkenaan dengan bahasa daerah yang tergolong minoritas dapat dianggap sebagai informasi awal untuk ditindaklanjuti. Harus ada kemauan untuk menyelamatkan bahasa-bahasa itu mengingat daya saingnya sangat lemah sehingga sulit untuk bersaing dengan bahasa-bahasa daerah yang besar. Belum lagi tuntutan untuk mampu bersaing dengan bahasa Indonesia yang berstatus sebagai bahasa nasional.

Walaupun konsep Otonomi Daerah sudah mulai bergaung, tetap saja mustahil bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan pendidikan dasar dalam berbagai bahasa daerah yang tergolong minoritas wilayahnya karena bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa pendidikan. Fenomena ini ternyata merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara multilingual (Skutnabb-Kangas, 2000). Namun demikian, masih ada secercah harapan. Otonomi Daerah dapat diharapkan berpotensi untuk melakukan preservasi budaya termasuk menggali potensi bahasa daerah. Hal ini, sangat mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat karena mereka memerlukan ciri khas untuk provinsinya dan juga jati diri. Di satu sisi, krisis yang melanda Indonesia sangat meresahkan kita semua, tetapi di sisi lain ada harapan bahwa pendekatan multikultural mulai dipertimbangkan.

7. Potensi Bahasa Daerah

UNESCO World Languages Report, selain melaporkan bahasa-bahasa yang berpotensi terancam punah juga memunculkan permasalahan mengenai hak berbahasa ibu (*linguistic human rights*) yang merupakan salah satu topik hangat akhir-akhir ini (Lauder 2001). Berbagai hasil penelitian mengenai hak berbahasa ibu pada umumnya didominasi deskripsi bahasa-bahasa minoritas di dunia yang berjuang untuk mendapatkan pengakuan. Di Indonesia, tercatat upaya penduduk setempat memperjuangkan pengakuan terhadap bahasa Osing di sekitar pantai timur wilayah Jawa Timur. Mereka meminta agar bahasa Osing, yang diperkirakan berpenutur sekitar 500.000 orang, dianggap sejajar dengan bahasa daerah lainnya seperti Jawa, Sunda, dan Madura serta diakui eksistensinya oleh pemerintah. Perjuangan itu terus berlanjut dengan membuat Kamus Bahasa Osing.

Pada umumnya, para penutur bahasa minoritas berjuang agar bahasanya dipergunakan sebagai media komunikasi di koran, majalah, radio, dan televisi. Perjuangan itu tentunya berkelanjutan dengan mempersoalkan bahasa pengantar di sekolah. Secara ideal, setiap anak manusia mempunyai hak untuk bersekolah dengan menggunakan bahasa ibu. Kenyataannya, kita menghadapi kelangkaan guru dari kelompok bahasa minoritas yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan. Dengan demikian, karena minimnya guru dari kelompok mereka, pengajaran diserahkan kepada guru lain dengan menggunakan bahasa nasional. Oleh karena itu tanpa disadari, penggunaan bahasa nasional sebagai bahasa pengantar memicu pemusnahan bahasa (*linguistic genocide*) melalui bidang pendidikan (Campbell 1989; Kontra 1999; dan Skutnabb-Kangas 2000: 477—566). Perlu disadari bahwa proses pemusnahan bahasa dapat dipicu oleh faktor ekstern maupun faktor intern. Sikap bahasa sebagai salah satu faktor intern, ternyata memegang peranan penting dalam hal pemertahanan bahasa. Faktor transmisi antargenerasi merupakan salah satu faktor terpenting untuk kelangsungan hidup sebuah bahasa. Kondisi saat ini bertambah rumit dengan bermunculannya Sekolah Berbahasa Inggris dari tingkat Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang direstui oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Masalah keanekaragaman variasi bahasa, bahasa sekarat, kematian bahasa, hak berbahasa-ibu, dan pemusnahan bahasa dapat dipahami dengan lebih baik jika dikaji secara terpadu dan secara interdisipliner. Pembahasan mengenai hubungan, fungsi, dan peran berbagai bahasa diperlukan sebuah cabang linguistik baru yaitu *ecolinguistic* yang khusus menyimak ekologi di antara berbagai bahasa di dunia (Hale 1992 dan Kramsch 1998). Salah satu konsep yang disarankan oleh para pakar bidang ekologi bahasa yaitu toleransi terhadap keberagaman (*tolerance of diversity and pluralism*). Sikap ini akan menumbuhkan sikap kebahasaan yang positif sehingga dapat diharapkan berlanjut pada proses pelestarian bahasa. Globalisasi adalah sebuah fenomena konstruktif dan juga destruktif. Fenomena itu berfungsi sebagai pemersatu dan juga berfungsi sebagai pemecah pada saat yang sama. Dengan demikian, setuju atau tidak setuju, harus diakui bahwa globalisasi merupakan

motor penggerak pergeseran bahasa (*language shift*) dan juga perubahan bahasa (*language change*). Kondisi di Indonesia, bahkan berbagai program pemerintah seperti *Listrik Masuk Desa*, *Koran Masuk Desa*, *Radio Masuk Desa*, *Televisi Masuk Desa*, *Telepon Masuk Desa*, dan bahkan *Internet Masuk Desa* punya andil juga dalam mengakselerasi perubahan bahasa.

Saat ini, kondisi kebahasaan di dunia memperlihatkan wajah yang muram, namun Fishman (2001) membuktikan bahwa bahasa-bahasa sekarat dapat direvitalisasi sebagaimana dilakukan terhadap bahasa *Navajo*, *Otomi*, *Quechua*, *Irish*, *Frisian*, *Basque*, *Catalan*, *Oko*, *Ainu*, dan *Maori*. Di Jawa Barat, Alwasilah (2003) memberi contoh revitalisasi bahasa Sunda untuk kalangan remaja, dengan cara menerbitkan *Kamus Trilingual Sunda-Indonesia-Inggris*, lalu bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat agar perencanaan bahasa merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi atau politik kebudayaan daerah. Di Jawa Tengah, khususnya di Jogjakarta, terdapat sekelompok anak muda yang menamakan dirinya *Group Sarapan Pagi*. Mereka memproduksi *T-Shirt* dengan menampilkan alat musik, alat transportasi, alat bercocok tanam, buah-buahan, binatang lokal dan menggunakan kosakata bahasa daerah. Menggali potensi bahasa daerah bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana namun diminati masyarakat.

Ekologi bahasa sangat memperhatikan berbagai faktor yang menjadi lingkungan di mana bahasa itu dituturkan, termasuk Politik Bahasa Nasional, serta berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan, agama, dan media informasi. Perencanaan bahasa yang komprehensif dengan mempertimbangkan ekologi bahasa akan membantu memperlambat laju kematian bahasa.

Berbagai ilmu pengetahuan budaya dapat saling bahu-membahu untuk memahami sosok budaya Indonesia secara lebih cermat dan tajam. Data-data pemetaan bahasa dapat dimanfaatkan oleh disiplin ilmu budaya lainnya atau justru temuan disiplin ilmu budaya yang lain sangat bermanfaat untuk mempertajam analisis peta bahasa:

Bidang susastra: berbagai karya sastra yang dianggap sebagai “cerminan kehidupan masyarakat pendukungnya” sangat membantu ahli dialektologi untuk memahami “nafas” masyarakat setempat. Tradisi lisan juga membantu melalui rekaman data yang bermanfaat untuk mengevaluasi identifikasi bunyi-bunyi bahasa. Filologi dapat memanfaatkan peta bahasa untuk melacak asal-usul sebuah naskah kuno dari perbendaharaan kosakata yang tampil dalam naskah, sebaliknya data pada naskah kuno membantu proses penafsiran peta bahasa.

Bidang sejarah: analisis peta bahasa yang utuh dan lengkap memerlukan perspektif sejarah untuk dapat memahami mengapa distribusi variasi bahasa tertentu menunjukkan sebuah pola. Di sini, sejarah pemukiman, sejarah perdagangan, sejarah pergerakan, dan berbagai tinjauan sejarah lainnya mendukung ketepatan analisis.

Bidang arkeologi: pola pemukiman di masa lalu merupakan informasi yang sangat berharga bagi dialektologi, terutama untuk memahami letak “batas” bahasa atau dialek yang ada saat ini. Temuan-temuan arkeologis lainnya merupakan informasi yang sangat penting untuk pengidentifikasian pola stratifikasi gelombang budaya pada masa lalu yang masuk ke wilayah tertentu.

Bidang filsafat: hasil kajian filsafat yang menggali pandangan hidup, pandangan terhadap kosmos, eksistensi diri, norma, etika, dan ekspresi estetika penduduk setempat memberikan sumbangan untuk memahami “jiwa” masyarakat bahasa yang sedang diteliti dengan lebih baik.

Bidang linguistik: secara umum, data kebahasaan yang dipetakan merupakan satuan bunyi, kata, frase, klausa, dan kalimat. Dengan demikian, data yang berhasil dikumpulkan untuk keperluan bidang dialektologi dapat dianalisis dari berbagai tataran linguistik seperti fonologi, morfologi, dan sintaksis. Kesempatan ini memberi peluang untuk menghasilkan hipotesis baru atau sekurang-kurangnya merevisi teori yang ada berdasarkan bahasa-bahasa daerah. Apalagi jika menggunakan data bahasa suku terasing, ada kemungkinan dapat menyumbangkan sesuatu untuk teori *universal grammar* atau teori evolusi bahasa yang umumnya lahir berdasarkan data bahasa Inggris atau bahasa-bahasa Indo-Eropa. Lalu, kajian tipologi struktur dapat berkembang dengan baik di Indonesia dengan memanfaatkan data peta kalimat. Selanjutnya peta bahasa dapat memberikan gambaran mengenai situasi kebahasaan secara umum. Selain itu juga memberikan informasi sejauh mana bahasa Indonesia merasuki bahasa daerah sehingga dapat direncanakan dengan baik daerah mana saja yang membutuhkan penyuluhan bahasa Indonesia jangka pendek dan jangka panjang.

Bidang perpustakaan: hubungannya dengan kajian dialektologi tidaklah seperti cabang ilmu budaya lainnya, tetapi lebih bersifat teknis. Semua cabang ilmu berkembang dengan pesat, dalam hal ini nyata-nyata sudah muncul cabang-cabang ilmu linguistik baru. Perlu segera melakukan evaluasi sistem klasifikasi, misalnya sistem DDC 21 agar dapat mengikuti perkembangan keilmuan. Pada era teknologi dan informasi, masalah klasifikasi merupakan hal yang penting agar *retrieval* informasi dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat.

Selain itu, di bawah ini akan saya sampaikan pula manfaat dialektologi untuk bidang lain:

Peta bahasa dapat pula dimanfaatkan oleh bidang antropologi untuk melokalisasi suatu konsep budaya tertentu, sejauh konsep itu tercermin dalam kosakata. Informasi dari peta bahasa mengenai daerah-pakai, daerah-sebar, dan daerah-inti bahasa-bahasa nusantara itu dapat “menuntun” kita untuk mendeteksi wilayah budaya yang pada akhirnya akan memberikan informasi dasar kepada kita mengenai perkiraan jumlah budaya daerah di seluruh Indonesia. Informasi itu akan sangat membantu para penentu kebijakan budaya dalam skala nasional. Para pemikir serta penentu kebijakan budaya dapat membuat program yang operasional dalam jangka pendek, jangka

menengah, maupun jangka panjang dengan skala prioritas yang jelas. Sampai saat ini, tampaknya belum terlihat adanya kebijakan budaya yang menyeluruh dan operasional.

Di bidang pengajaran bahasa, peta-peta bahasa sangat dimanfaatkan untuk pengembangan bahasa. Sebagaimana dilakukan oleh Amerika dan Malaysia. Peta bahasa membantu "melihat" keragaman, para ahli bahasa yang mempertimbangkan bentuk mana yang dianggap sebagai bentuk baku. Selain itu, penentuan bahasa pengantar untuk sekolah juga perlu dipikirkan secara hati-hati. Pengajaran bahasa daerah, ternyata diputuskan berdasarkan batas administratif provinsi bukan berdasarkan batas wilayah bahasa. Sehingga tidak mengherankan banyaknya keluhan mengenai pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal.

Hasil pemetaan bahasa juga bermanfaat untuk membantu berbagai hal yang sifatnya nonlinguistik, misalnya, informasi mengenai migrasi penduduk dan distribusi penduduk. Pemekaran provinsi akan lebih tepat jika memperhatikan "batas" bahasa atau dialek. Pembangunan dan berbagai macam program pemerintah di pedesaan dapat lebih mencapai sasaran jika berbagai pengumuman didampingi dengan bahasa daerah. Peningkatan SDM harus segera dilakukan untuk membantu sekitar 15 juta penduduk Indonesia yang masih buta huruf. Berdasarkan penelitian, pelajaran baca tulis akan efektif jika dilaksanakan dalam bahasa-ibu. Retensinya jauh lebih tinggi dibandingkan jika pelajaran itu diberikan dalam bahasa Indonesia. Program pembuatan ejaan untuk bahasa daerah mendesak dilaksanakan, pertama bermanfaat untuk memperlambat laju kepunahan bahasa dan kedua untuk menjaga agar mereka tidak akan kembali buta huruf lagi setelah beberapa bulan. Kenyataannya, lulusan SD masih kesulitan baca tulis.

Di luar dugaan ternyata peta bahasa dapat dimanfaatkan oleh WHO (*World Health Organization*) untuk membantu membuat prediksi peta penyebaran wabah penyakit menular. Batas penyebaran epidemi pada umumnya sejalan dengan "batas" bahasa. Hal ini wajar karena epidemi mudah berjangkit pada orang-orang yang sering melakukan kontak, sedangkan orang-orang yang berlainan bahasa diperkirakan akan jarang atau kadang-kadang saja melakukan kontak.

8. Penutup

Sebagai catatan penutup, dialektologi berurusan dengan variasi bahasa dan bersentuhan dengan permasalahan bahasa sekarat, kematian bahasa, hak berbahasa ibu, pemusnahan bahasa, dan ekologi bahasa. Pokok pikiran yang memayungi semua permasalahan itu adalah preservasi kekayaan budaya. Satu bahasa memberikan satu "jendela" untuk memahami dan memandang realitas dunia. Kemahiran menguasai beberapa bahasa identik dengan penambahan jumlah "jendela" untuk memahami dan memandang realitas dunia. Dengan demikian, pemahaman seorang anak manusia terhadap dunianya menjadi semakin utuh. *Mysore Document 2000* sebagai kebijakan pelestarian keragaman bahasa di dunia secara jelas menyatakan bahwa pelestarian bahasa merupakan tugas berat yang harus dipikul oleh berbagai pihak seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, komunitas setempat, badan-badan internasional, dan individu.

Masih jauh perjalanan yang harus ditempuh untuk melacak bahasa-bahasa nusantara dalam upaya melacak budaya nusantara. Secara linguistik, punahnya bahasa daerah berkaitan langsung dengan hilangnya pengetahuan kita mengenai budaya yang menyimpan hukum adat, pandangan hidup, tata krama, teknologi, dan kearifan menangani lingkungan. Keanekaragaman budaya tidaklah berlebihan jika disejajarkan dengan keragaman hayati di hutan tropis yang terancam kelestariannya. Preservasi budaya harus dilaksanakan demi melestarikan warisan budaya seluruh umat manusia.

Bangsa kita merupakan bangsa yang multikultural dan multilingual dengan demikian semangat menghargai keanekaragaman bahasa dan budaya harus terus ditingkatkan. Balai Bahasa di seluruh Indonesia dapat membantu menggali potensi bahasa daerah dengan membuat ejaan bagi bahasa daerah dan juga membantu menghimpun kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan karena salah satu fungsi bahasa adalah penyimpan tata nilai budaya.

Untuk mengenali budaya secara utuh perlu proses yang cukup lama. Oleh karena itu, penelitian terhadap bahasa—antara lain melalui bantuan metode penelitian dialektologi—dapat membantu mengenali sosok budaya kita. Bahasa yang diteliti janganlah terfokus pada bahasa-bahasa yang besar saja. Bahasa-bahasa yang tergolong minoritas, khususnya yang tergolong sebagai bahasa-bahasa yang berpotensi terancam punah, juga perlu mendapatkan perhatian karena semua bahasa berfungsi sebagai penyimpan khazanah budaya. Kini saatnya melakukan sesuatu secara operasional untuk menggali potensi bahasa daerah.

Daftar Pustaka

- Barreña, Andoni dkk. 2000. "World Languages Report: a preliminary approach", *Linguistic Heritage of India and Asia Mysore, India*: Central Institute of Indian Languages.
- Campbell, George L. 1998. *Concise Compendium of the World's Languages*. New York: Routledge.
- _____. 1989. *Dialect and Education: Some European Perspective*. Clevedon-Philadelphia: Multilingual Matters Ltd.
- Crystal, David. *Language Death*. Great Britain: Cambridge University Press.
- Fishman, Joshua A. 2001. *Can Threatened Languages be Saved?* Clevedon: Multilingual Matters LTD.
- Grenoble, Lenore dan Lindsay J. Whaley. *Endangered Languages: Language Loss and Community Response*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hale, Ken. 1992. "Endangered languages: On endangered languages and the safeguarding of diversity", dalam *Language*, Halaman 1—3, Nomor 1, Volume 68.
- Kaswanti Purwo, Bambang. 2003a. "Penelitian Bahasa Nusantara di Indonesia" Makalah pada Seminar Hari Bahasa-Ibu Internasional. Jakarta: Unika Atmajaya.
- _____. 2003b. "Pengajaran Bahasa Nusantara di Indonesia" Makalah pada Seminar Hari Bahasa-Ibu Internasional. Jakarta: Unika Atmajaya.
- Kontra, Miklós, Robert Phillipson, Tove Skutnabb-Kangas, dan Tibor Várady. 1999. *Language: a Right and a Resource, Approaching Linguistic Human Rights*. Budapest: Central European University Press.
- Kramsch, Claire. *Language and Culture*. Oxford: Oxford University Press.
- Lauder, Multamia RMT. 1996. "Isolated Tribes of Indonesia: Language Mapping Issues" Makalah pada The Eleventh KITLV International Workshop on South-East Asian Studies dengan tema *The Study of Endangered Languages and Literatures of South-East Asia*, Leiden, Holland.
- _____. 2001. "Upaya Menjajagi Situasi Kebahasaan di Seluruh Dunia", dalam *Meretas Ranah: Bahasa, Semiotika, dan Budaya*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- _____. 2002. "Developing The ASEAN Community through an understanding of its Linguistic and Cultural Diversity", Makalah pada *ASEAN Linguistics Conference II* dengan tema *Language Consolidates ASEAN Solidarity*, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
- _____. 2005. "Language Treasures in Indonesia" dalam *Words and Worlds: World Languages Review*. Clevedon: Multilingual Matters Ltd & UNESCO ETXEA. ISBN 1-85359-827-5.
- _____. 2006. "Obstacles To Creating An Inventory Of Languages In Indonesia: A Dialectology Perspective," dalam *Language Diversity in the Pacific: Endangerment and Survival*, hlm: 40—53, Clevedon: Multilingual Matters Ltd. ISBN 1-85359-867-4.
- _____. 2007. "The Position of Regional Languages and Chinese in Indonesia" dalam *Asian Culture Journal*. No. 31, June. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Moulton, William G. 1972. *Geographical Linguistics*. Word: 196—222.
- Skutnabb-Kangas, Tove. 2000. *Linguistic Genocide in Education or Worldwide Diversity and Human Rights?* New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Sibarani, Robert. 2003. "Upaya Pelestarian bahasa-bahasa Etnik di Sumatra Utara" Makalah pada Seminar Hari Bahasa-Ibu Internasional. Jakarta: Unika Atmajaya.
- Thomas, Alan R. *Methods in Dialectology*. Clevedon-Philadelphia: Multilingual Matters Ltd.
- Veltman, Calvin. 1991. "Theory and Method in the Study of Language Shift", *Language and Ethnicity: Focusschrift in honour of Joshua A. Fishman*. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Wierzbicka, Anna. *Understanding Cultures through Their Key Words: English, Russian, Polish, German, and Japanese*. Oxford: Oxford University Press.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Pleno II
Hari, Tanggal, Pukul	: Senin, 19 Juli 2010, 09.30—10.30 wita
Judul Makalah	: Kaitan Pemetaan Bahasa dengan Potensi Bahasa Daerah
Penyaji/Pembicara	: Prof. Dr. R.M.T. Multamia Lauder
Pemandu	: Prof. Dr. Hamzah Machmoed
Pencatat	: Asri, S.S., M. Hum.
Jumlah Peserta	: 400 orang

TANYA JAWAB

Harmin Hari (Wakil Bupati Buton Utara)

Pertanyaan/Saran

1. Adakah kaitan antara banyaknya bahasa daerah dengan keanekaragaman hayati di sebuah daerah?
2. Lima puluh persen bahasa di dunia ada di Asia dan Oseania, sementara di negara-negara maju cenderung hanya sedikit bahasa. Apakah ada kaitannya dengan pertanyaan pertama saya?

Jawaban/Tanggapan

1. Itu hanyalah ungkapan saja dalam makalah saya. Kondisi bahasa di Indonesia, terutama di wilayah timur, bisa seperti itu karena kondisi dan situasi lokal serta daerahnya. Kalau di Indonesia bagian barat jumlah pulau lebih sedikit dibandingkan dengan di bagian timur, dengan demikian, masyarakat yang tinggal terpisah di pulau yang terpisah dalam jangka waktu ratusan tahun tanpa disadari membuat konvensi sendiri di antara mereka dalam satu pulau. Olehnya itu, mereka memiliki bentukan-bentukan lokal, salah satunya bahasa, yang makin lama makin berbeda dengan pulau-pulau sekitarnya yang pada akhirnya membentuk suatu dialek atau bahkan menjadi bahasa yang berbeda. Itu bukan sesuatu yang aneh, melainkan hal yang alamiah. Begitu juga dengan masyarakat yang tinggal di daerah yang terpencil, mereka kurang melakukan komunikasi dengan masyarakat di daerah lain karena lokasinya sulit dijangkau. Otomatis masyarakat dalam wilayah tersebut juga melahirkan konvensi-konvensi tersendiri di antara masyarakatnya sendiri. Itu berlangsung selama beratus tahun sehingga melahirkan bahasa yang tersendiri lagi. Jadi, intinya adalah masalah transportasi dan komunikasi. Tidak adanya jalur dan wadah transportasi menyebabkan masyarakat terpencil kurang melakukan kontak antara masyarakat satu dgn masyarakat lain sehingga memberi kesempatan kepada mereka untuk membuat konvensi sendiri.
2. Mengapa di luar negeri jumlah bahasa tidak sebanyak dengan kita karena tingkat pendidikannya jauh lebih baik, transportasi antarwilayah lancar, sarana komunikasi sudah canggih, dan kondisi alam yang berbeda.

Dr. Lalu Abdul Khalik (Universitas 45 Makassar)

Pertanyaan/Saran

Salah satu cara mempertahankan keberadaan bahasa adalah dengan memunculkan dan merangsang rasa kebanggaan terhadap daerah. Namun, saat ini, orang bangga ketika status ekonomi, sosial, dan pendidikannya sudah baik. Ancaman sebuah bahasa adalah adanya industrialisasi dan globalisasi yang tidak bisa dihindari. Olehnya itu, kita harus bersikap arif karena tidak ada satu obat atau resep yang tunggal dalam upaya pelestarian bahasa. Kita harus melakukan suatu upaya yang simultan dalam memajukan perekonomian dan pendidikan sambil mengajak kepada semua komponen masyarakat untuk melestarikan bahasanya. Jadi, harus ada kesadaran kolektif, baik dari pemerintah maupun masyarakat, secara bersama-sama merasa bangga berbahasa daerah yang didukung oleh status sosial, pendidikan, dan perekonomian yang baik.

Jawaban/Tanggapan

Pelestarian budaya, khususnya bahasa daerah, sebaiknya dimulai dari diri kita sendiri. Istilah yang lebih cocok digunakan adalah kembali ke pangkuan. Pangkullah anak dan cucu kita dengan kasih sayang dan ajarkan bahasa daerah. Ajaran tersebut kelak akan menjadi identitas diri anak dan cucu kita. Beberapa eksperimen yang telah dilakukan oleh ahli psikologi yang mendapati bahwa orang yang tidak mempunyai identitas diri dan eksistensi diri sebagai manusia maka hidupnya akan gamang. Sebaiknya seorang anak mempunyai identitas diri atau jati diri. Identitas diri itu didapat melalui penguasaan bahasa daerahnya tanpa harus melihat sedikit banyaknya penutur bahasa daerah yang ia kuasai. Yang penting adalah bahasa daerah perlu sebagai pembentuk jati diri. Pelestarian bahasa daerah harus serentak dilakukan dari berbagai segi dan komponen. Untuk mengangkat bahasa daerah harus berangkat dari rasa memiliki dan membanggakannya. Memang hal tersebut tidak gampang, baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Namun, mulai dari eksistensi diri, jati diri, dan identitas diri merupakan hal yang sangat pokok bagi seorang manusia. Kita mulai dari situ dulu kemudian kita kembangkan. Untuk menonjolkan keunikan daerah Baubau dan Buton sebenarnya dapat dimulai dari arsitektur tradisional yang dapat diterapkan di profil bangunan-bangunan. Terus terang, orang sudah bosan dan jenuh dengan budaya

McDonald dan Coca-Cola (budaya barat) yang cenderung bersifat penyeragaman karena budaya tersebut di mana-mana sama. Makanlah makanan tradisional yang lebih sehat. Kalau budaya Baubau dan Buton sama saja dengan budaya lain di Indonesia, untuk apa orang datang ke Baubau dan Buton. Budaya setempat diberdayakan dan dimanfaatkan untuk menonjolkan identitas unik daerah. Intinya adalah bukan hanya masalah kemodernan. Modern boleh tapi interior dan arsitektur harus tradisional. Dengan demikian, kita bisa menarik minat orang lain untuk berwisata ke Buton yang dapat berpengaruh langsung ke peningkatan ekonomi rakyat.

Bagi saya sebagai seorang akademisi, mulailah pelestarian itu dengan membantu pelaksanaan untuk bahasa-bahasa daerah yang belum memiliki aksara di Baubau dan Buton. Dengan aksara tersebut kita bisa mencatat semua kearifan lokal, ungkapan, cerita rakyat, dan teknologi lokal yang ada. Dengan aksara pengetahuan dan kearifan lokal tidak akan hilang dan ikut terkubur dgn para orang tua dan sesepuh kita. Dengan aksara kita bisa mengetahui peninggalan leluhur melalui naskah. Inilah saatnya kita catat semua kearifan lokal, ungkapan, cerita rakyat, dan teknologi lokal yang ada untuk pengembangan dan yang lebih penting adalah pembangunan karakter bangsa. Diri kita sendiri harus punya karakter yg khas dan unik melalui penguasaan bahasa daerah, selain penguasaan bahasa Indonesia dengan baik pada tingkat nasional dan bahasa asing dengan lancar untuk pergaulan internasional. Pangkulah dan ajarilah anak dan cucu kita dengan bahasa daerah demi untuk eksistensi dirinya.

La Ode Muh. Syarif Ma'Mum (Tokoh Masyarakat)

Pertanyaan/Saran

Pada era globalisasi bahasa daerah itu semakin termarginal. Sejalan dengan desakan arus globalisasi dan perkembangan ekonomi, bahasa-bahasa daerah di Buton perlu dipertahankan agar dapat mengungkapkan pengetahuan. Nilai-nilai luhur yang berakar pada masa lalu hampir terkikis habis oleh arus globalisasi. Jadi, perlu penekanan pada moralitas ilmu tentang pentingnya bahasa daerah dilestarikan.

Jawaban/Tanggapan

Memang benar bahwa bahasa daerah menyimpan banyak ilmu pengetahuan dan nilai-nilai luhur. Hanya saja masih banyak dalam bentuk naskah-naskah kuno yang menyebabkannya kurang terekspos keluar. Sebagai contoh, pengetahuan dan kearifan lokal tentang menanam melati di dekat beranda yang tujuannya untuk mengusir nyamuk, atau cara mengusir tikus yang menggunakan kunyit tanpa harus pakai racun tikus. Pada dasarnya, pengetahuan dan kearifan lokal kita sudah tinggi hanya saja tidak terekspos dan tersampaikan. Keunggulan ilmu kita sebenarnya sudah dalam tapi masih perlu penggalian bersama. Teknologi lokal di Buton seperti hasil tenunan yang bervariasi ragam, jenis, dan warnanya, sebenarnya, kalau didokumentasi dan dikembangkan akan menjadi sebuah kekayaan yang istimewa. Keterampilan itu akan menjadi teknik tenun yang istimewa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Semuanya bisa digali melalui sastra lisan, sejarah lisan, ungkapan-ungkapan, dan lagu-lagu daerah. Kelihatannya bahasa daerah itu sepele tapi penting sekali dalam pembentukan jati diri dan banyak sekali manfaatnya untuk pengembangan budaya daerah.

Drs. Zalili Sailan, M.Pd. (Universitas Haluoleo, Kendari)

Pertanyaan/Saran

1. Kata Baubau diucapkan dengan tepat menggunakan bunyi /b/ ingresif. Inilah salah satu keunikan bahasa daerah yang ada di Buton. Adanya bunyi ingresif.
2. Apakah pemetaan bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Tenggara sudah terpikirkan dan kalau sudah sampai sejauhmana?

Jawaban/Tanggapan

Penelitian Pemetaan dan Kekerabatan Bahasa-Bahasa Daerah di Sulawesi telah dilakukan tahun 1993, tetapi sebagian besar di wilayah Sulawesi Tenggara belum dilaksanakan. Alasannya karena saat itu tenaga pengumpul data yang dikirim oleh Pemprov Sulawesi Tenggara untuk mengikuti pelatihan bukan sarjana bahasa. Akibatnya dalam pelatihan mereka sama sekali tidak tahu-menahu mengetahui tulisan dan bunyi fonetis. Pada saat dilakukan tes awal, hasilnya kurang baik dan pengumpulan data pun ditunda. Namun, pada tahun 2006 penelitian serupa kembali dilakukan dengan menggunakan instrumen yang lama. Penelitian dan pemetaan tersebut dilaksanakan dan dilengkapi oleh Kantor Bahasa Prov. Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian dan pemetaan tersebut sudah diterbitkan oleh Pusat bahasa yang memuat 442 bahasa, termasuk bahasa-bahasa yang ada di Sulawesi Tenggara.

Syaifuddin, S.Pd. (Kantor Bahasa Prov. Sultra)

Pertanyaan/Saran

Apakah penutur bahasa-bahasa daerah di Buton yang tidak sampai satu juta jiwa dianggap berpeluang untuk punah, sementara ada banyak penutur bahasa-bahasa daerah di Buton di tempat lain yang belum terpetakan?

Jawaban/Tanggapan

Data tersebut saya rujuk dari SIL. Sah-sah saja kalau Anda tidak setuju dengan data yang saya kemukakan. Kalau memang tidak setuju bahwa bahasa-bahasa daerah di Buton tidak masuk dalam 13 bahasa daerah terbesar di Indonesia, harus dilakukan penelitian ulang untuk mengecek kebenaran data yang dikemukakan oleh SIL. SIL

sudah melakukannya dengan sangat baik. Informasi awal yang dikemukakan oleh SIL harus dihargai dan menjadi rujukan bagi penelitian bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Tenggara.

Asrif, S.Pd., M.Hum. (Kantor Bahasa Prov. Sultra)

Pertanyaan/Saran

Kami dari kalangan akademisi dan peneliti sangat berharap kepada para pemimpin daerah untuk memberi ruang dalam melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, kongres, dan penelitian.

Konsep apa yang tepat dalam melaksanakan kebijakan muatan lokal bahasa Wolio agar bisa berhasil, bukan hanya angan-angan?

Jawaban/Tanggapan

Setiap bahasa memiliki keunikan masing-masing. Pengajaran bahasa Wolio sebagai muatan lokal akan berhasil jika didukung oleh masyarakat dan pemerintah. Kebijakan pengajaran bahasa daerah di sekolah harus didukung oleh kesepakatan dari para pemangku adat. Setelah itu, para pemangku adat diundang untuk melakukan rapat adat dan dikeluarkanlah pertimbangan sosial budaya. Sebagai contoh, bahasa Wolio yang memiliki banyak kemiripan dengan bahasa daerah di sekitarnya dan dihasilkan kesepakatan bahwa Wolio yang dijadikan bentuk utama dari varian lainnya. Tentu saja, kebijakan seperti itu bisa dan harus diputuskan secara adat, tidak bisa ditentukan sendiri.

THE WRITING SYSTEM OF THE CIACIA LANGUAGE

Ho-Young Lee (Seoul National University)
 Tai Hyun Chun (Hankuk University of Foreign Studies)
 Hyosung Hwang (Seoul National University)

1. Introduction

According to the SIL International which offers the most authoritative information on the world's languages, currently 7,359 languages exist on earth. British linguist Andrew Dalby claimed in his book (Language in Danger) that languages of the world disappear at the rate of one for every two weeks. He also predicted that the half of the world's languages would become extinct within this century, and that only about 200 languages would survive on earth within two centuries. A tribe without a writing system cannot record their history and culture. Moreover, as the education of their mother tongue at school is impossible, the language is very likely to be extinct. The extinction of a language indicates not only the loss of the diversity of human culture but also the extinction of an important human heritage. To preserve endangered languages and to maintain the diversity of human culture, we need to make great efforts to establish writing systems and produce textbooks for the native speakers of those languages, so that they could teach their indigenous languages in elementary schools.

In July, 2009, we published a textbook of an unwritten language called 'Ciacia' that is spoken by about 80,000 people in Bau-Bau City and surrounding areas in Buton Island, Indonesia. Although young Ciacia people use their mother tongue in their daily lives, they prefer to talk to their children in Indonesian most of the time. So the Ciacia language is likely to be extinct within two or three generations. This is the main reason why we devised a writing system of Ciacia and wrote the textbook.

We devised the writing system of Ciacia using the Korean alphabet called 'Hangul'. This paper aims to discuss the phonological system of Ciacia and the writing system of this language.

2. The Phonological System of Ciacia

The consonant system of Ciacia is shown in (Table 1). The most noticeable phonological characteristics of this language is that it has implosives /ɓ/ and /ɗ/, which seem to be widely used in Sulawesi island and surrounding areas. We came across the implosives in Wolio and Pancana in Bau-Bau City, and Bugis in South Sulawesi. Ciacia has voiceless unaspirated plosives /p, t, k/ and their voiced counterparts /b, d, g/. But this language does not have velar implosive /g/ which corresponds to /k, g/.

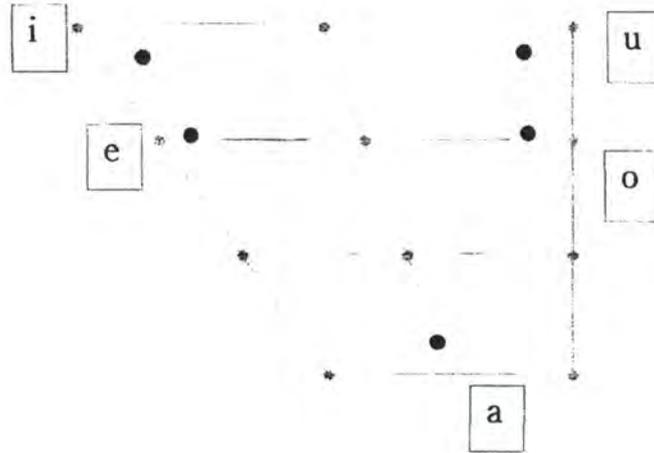
	Bilabial		Labiodental		Alveolar		Velar		Glottal
Plosive	p	b			t	d	k	g	(?)
Implosive		ɓ				ɗ			
Nasal	m				n		ŋ		
Fricative				v	s				h
Affricate					tʃ	ɟʒ			
Flap/trill						r			
Lateral Approximant						l			

<Table 1> The consonant system of Cia-Cia

Glottal stop [ʔ] is often inserted when a syllable begins with a vowel. But this sound does not occur consistently and the absence of this sound does not seem to cause a noticeable problem in communication. So the phonemic status of this sound is not clear.

Voiced labiodental fricative /v/ is often weakened to [w]. Alveolo-palatal affricate /tʃ/ is a voiceless unaspirated sound corresponding to /p, t, k/, and /ɟʒ/ is a voiced sound corresponding to /b, d, g/.

There is a phonological contrast between /r/ and /l/ in Ciacia. /r/ is realized as a flap as well as a trill. In a local dialect of Ciacia spoken in the Sorawolio region, /r/ is sometimes realized as velar fricative [ɣ] between vowels. But /r/ is not realized as a velar fricative in Indonesian loan words in the same context. So /r/ and /ɣ/ shows a partial contrast in this dialect. Voiced velar plosive /g/ does not get weakened and realized as [ɣ] between vowels, as [ɣ] exists as a separate sound in this dialect.



Like other Austronesian languages, Ciacia has five vowels of /a, e, i, o, u/. Since /e/ and /o/ are pronounced as close-mid vowels, sometimes non-native speakers might confuse these vowels with corresponding close vowels /i/ and /u/.

3. The Writing System of Ciacia

The writing system of Ciacia devised on the basis of the phonological system of Ciacia as follows:

	Bilabial		Labio-dental	Alveolar		Velar		Glottal
Plosive	ㅍ [p]	ㅂ [b]		ㄷ [t]	ㄸ [d]	ㅋ [k]	ㆁ [ŋ]	(ㅇ [ʔ])
Implosive		ㅃ [ɓ]			ㄹ [ɗ]			
Nasal	ㅁ [m]			ㄴ [n]		ㅇ [ŋ]		
Fricative			ㅍ [v]	ㅅ [s]				ㅎ [h]
Affricate				ㅆ [tɕ]	ㅈ [dʒ]			
Flap					ㄹ [r]			
Lateral Approximant					ㄹ [l]			
Vowel	아 [a], 에 [e], 이 [i], 오 [o], 우 [u]							

<Table 2> The writing system of Cia-Cia using the Korean alphabet

The consonants and vowels of Ciacia have almost the same sound qualities to the Korean sounds written with the same Korean letters, except for the two implosives /ɓ, ɗ/ and the labiodental fricative /v/. We decided to use 'ㅃ, ㄹ', which represent strongly aspirated sounds in Korean, for /ɓ, ɗ/. We also chose to use 'ㅍ', which was used to represent bilabial fricative in Korean in the past, for /v/. As mentioned above, /r/ and /l/ contrast with each other in Ciacia; the former is written as 'ㄹ' and the latter as 'ㄹ'. Since /ㄹ/ does not occur in the word initial position in Korean, we decided to insert a dummy vowel '으' as in '을리마 (five)'. The dummy vowel '으' is also used before nasal-plosive clusters occurring at the beginning of a word as in '웅오오(nose)'. The examples of Ciacia words written in Hangeul are as follows:

<Consonants>

ㅂ: 부꾸(bone), 품보(clothes)
ㅃ: 뼈나끼(disease), 아뻘(fire)
ㅅ: 포과(mouth), 파후(shoulder)
ㄷ: 도예(money)
ㄸ: 또물루(three), 우띠아라(silver)
ㅌ: 타티(live), 모테아(red)
ㄱ: 가라(salt), 모쟁기(high)
ㄴ: 꼬꼬티(small), 품보(wear)
ㅍ: 꺾아꺾어(Cia-Cia), 만쭈아나(old man)
ㅈ: 모이조(green)
ㅊ: 봉아(finger), 바보(above)
ㅍ: 사뻘(ox), 모계사(good)
ㅎ: 호네(grass), 모하로(hungry)
ㄹ: 루아(two), 뻘라에(what)
ㄹㄹ: 울리마(five), 살라따(south)
ㅍ: 미니아(food), 아마(father)
ㄴ: 니뻘아모(when), 이나(mother)
ㅇ: 응오오(nose), 뻘링아(ear)

<Vowels>

ㅏ: 하라가(price), 마누(chicken)
ㅑ: 엘라(tongue), 까끼(foot)
ㅓ: 이시(meat), 이사(fish)
ㅕ: 호네(grass), 아소(sell)
ㅗ: 쥘부루(east), 파후(shoulder)

4. Conclusion

'Bahasa Ciacia I', the Ciacia textbook written in Hangeul, was published on July 16, 2009 and the education of Ciacia has been in progress at Karya Baru Elementary School in Bau-Bau since July 22, 2009. As mentioned above, the current writing system of Ciacia has a couple of problems. First, the dummy vowel '으' is inserted before word initial /l/ and word initial nasal-plosive clusters whereas word final /l/ is written with a single 'ㄹ' as in Korean orthography. Second, syllable final /p, t, k/ of Indonesian loan words are written with /ㅂ, ㅅ, ㅈ/, not with /ㅃ, ㅆ, ㅉ/. We chose these notations in order for Ciacia people to use the keyboards and mobile phones produced in Korea without changing any software. But we can easily change these notations if Ciacia people prefer to use a more accurate writing system. In this case, we need to prepare software suitable for the revised writing system of Ciacia.

References

- Ho-Young Lee, Hyosung Hwang, Abidin. 2009. Bahasa Ciacia I, The Hunminjeonum Society.
- van den Berg, René. 1991. "Preliminary notes on the Ciacia language (South Buton)". In Harry A. Poeze and Pim Schoorl (eds.), *Excursies in Celebes: Een bundel bijdragen bij het afscheid van J. Noorduyt als directeur-secretaris van het KITLV*, 305-24. Leiden: KITLV.
- Mustafa, Abdullah. 1985. *Struktur bahasa Ciacia*. Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sulawesi Selatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

PEMBELAJARAN BAHASA DAERAH MUNA DALAM KONTEKS MUATAN LOKAL¹

La Ode Sidu Marafad²
(Universitas Haluoleo)

I. Pendahuluan

Dalam kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional, kurikulum disusun dalam dua ruang lingkup, yakni lingkup nasional dan lokal yang dikenal dengan Kurikulum Nasional (Kurnas) dan Kurikulum Lokal (Kurlok). Salah satu muatan Kurikulum Lokal ialah mata pelajaran bahasa daerah.

Strategi pembelajaran bahasa daerah sebenarnya memiliki ciri khusus karena bahasa daerah tidak diujikan secara nasional dan juga porsi waktu dalam kurikulum bahasa daerah sangat terbatas. Siswa yang tidak memiliki bahasa ibu atau bahasa daerah agak mengalami kesulitan belajar bahasa daerah karena bahasa daerah merupakan bahasa kedua setelah bahasa Indonesia. Bila tidak diubah strategi pembelajarannya, pembelajaran bahasa daerah sama nasibnya dengan bahasa asing, bahasa Inggris misalnya. Bahasa Inggris dipelajari seolah-olah hanya untuk mengisi rapor siswa, bukan untuk memperoleh keterampilan berbahasa meskipun tujuannya adalah untuk membentuk keterampilan berbahasa. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa daerah agaknya tidak terlalu menarik minat siswa, apalagi strategi dan model pembelajarannya biasa-biasa saja.

Sebenarnya, kurikulum muatan lokal mempunyai tujuan strategis, bukan sekadar menampilkan mata-mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal bahasa Inggris, jelas mempunyai tujuan yang strategis, muatan lokal bahasa daerah, jelas mempunyai tujuan yang strategis. Nah, apa jawabannya kalau kita bertanya, tujuan strategis apa dalam pembelajaran muatan lokal bahasa daerah?

Seharusnya, kepentingan bahasa daerah ikut serta menantang kehidupan masa depan siswa. Jika tidak, jelas motivasi siswa hanya sampai pada kebutuhan mengisi rapor. Setelah itu, selesai dan merdeka. Apa tantangan mereka jika siswa nantinya tidak dapat bercakap-cakap dalam bahasa daerah? Apakah ada konsekuensi? Jika tidak, ya, seperti itu. Tidak ubahnya dengan muatan lokal mata pelajaran lainnya.

Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara serta pembentukan karakter bangsa, bahasa daerah merupakan salah satu pilar dalam pembentukan *softskill* siswa. Untuk itu, bahasa daerah merupakan akar budaya bangsa. Budaya daerah sebagai pilar budaya bangsa Indonesia terkokohkan dalam bahasa daerah, terlestari dalam bahasa daerah. Oleh karena itu, bila kita ingin memelihara budaya bangsa marilah kita memelihara juga budaya daerah. Bila kita ingin memelihara budaya daerah marilah kita memelihara bahasa daerah dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Secara alami, bila dibiarkan begitu saja, tentu bahasa daerah akan mengalami nasib yang kurang menguntungkan, tidak bisa lagi bertahan lama. Bahasa Indonesia mulai memasuki wilayah pedesaan sebagai lumbung bahasa daerah. Itu sebabnya dengan perkembangan pemakaian bahasa Indonesia demikian cepat, bahasa daerah suatu saat akan tergusur secara alami. Untuk menghindari kejadian itu, perlu adanya upaya-upaya dini agar bahasa Indonesia tetap tersebar, tetapi bahasa daerah tetap juga bertahan sesuai dengan keperluan pengguna.

Saat ini penggunaan bahasa daerah di pesisir kota sudah sayup-sayup, anak-anak bermain-main dalam bahasa Indonesia. Dunia mulai terbalik, tadinya cucu yang belajar bahasa Indonesia, sekarang nenek-nenek dengan terpaksa belajar bahasa Indonesia, diajarkan oleh cucu-cucunya. Oleh si nenek tetap diusahakan demi cucunya walaupun nenek dan kakek terbata-bata dalam berbahasa Indonesia.

Lalu, apa akibat seseorang jika tidak tahu berbahasa daerah?

Apakah seseorang tidak tahu berbahasa daerah, tidak bisa menjadi pegawai negeri?

Apakah seseorang yang tidak tahu berbahasa daerah tidak dapat melanjutkan sekolah?

Sekiranya tidak mempunyai dampak, lalu untuk apa seseorang belajar bahasa daerah?

Apakah ada kesungguhan kita mempertahankan bahasa daerah, dan untuk apa kita mempertahankan bahasa daerah? Kalau jawabnya, ya, kita sungguh-sungguh ingin mempertahankan kehidupan bahasa daerah, maka marilah kita menyatukan tekad untuk mempertahankan hidupnya bahasa daerah sepanjang masa.

Akan tetapi, sebelumnya marilah kita menjawab pertanyaan berikut ini.

Untuk apa kita mempertahankan kehidupan bahasa daerah?

Jawabnya:

Kita sangat perlu mempertahankan kelanjutan hidup bahasa daerah karena:

¹ Makalah ini disajikan pada Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara tanggal 18–20 Juli 2010 di Kota Baubau.

² Guru Besar Linguistik pada FKIP Universitas Haluoleo, Kendari.

- a. bahasa daerah mengandung nilai-nilai luhur;
- b. bahasa daerah mengandung nilai moral yang sangat tinggi;
- c. bahasa daerah merupakan alat pelestari budaya daerah;
- d. bahasa daerah mengandung data kebahasaan yang kaya;
- e. bahasa daerah merupakan alat perekat suku bangsa yang kokoh dan kuat.

Jika jawaban itu dapat setuju dan berterima, perlu ada kesepakatan bersama dari seluruh lapisan masyarakat, keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk melestarikan kelangsungan hidup bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai kesepakatan itu, perlu ada kiat-kiat tertentu penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.

Penggunaan bahasa bergantung pada kebutuhan dalam kehidupan ini. Pada saat ini, kebutuhan penggunaan bahasa yang sangat dominan ialah (a) kebutuhan komunikasi sosial, (b) komunikasi ekonomi, dan (c) kebutuhan komunikasi politik.

Apakah bahasa daerah saat ini memiliki tiga kebutuhan pokok itu? Mari kita jawab bersama.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah strategi, model, pembelajaran bahasa daerah khususnya pembelajaran bahasa Muna agar siswa termotivasi secara sadar dan ikhlas belajar bahasa Muna?
- b. Bagaimana kemampuan dan keterampilan guru sebagai pembelajar bahasa daerah?

3. Tujuan Penulisan Makalah

Menyajikan sebuah strategi dan beberapa model pembelajaran bahasa daerah, khususnya bahasa daerah Muna.

4. Uraian

Sebagian sekolah menyelenggarakan pembelajaran bahasa daerah sebagai salah satu pelajaran muatan lokal. Kesepakatan ini sungguh mulia. Mulia karena bahasa daerah secara hukum tetap memiliki hak hidup dalam kehidupan manusia pendukungnya. Hak hidup bahasa daerah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945, Bab XV Pasal. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa daerah juga mendapat hak untuk dipelihara, dipelajari, dikembangkan, dan dilestarikan. Jadi, fungsinya tetap sebagai bahasa komunikasi, bahasa budaya, dan bahasa pelestari budaya.

Pembelajaran saat ini di sekolah-sekolah, khususnya pembelajaran bahasa daerah, masih berpusat pada guru (*teacher center*). Model pembelajaran seperti ini siswa menjadi sasaran penguangan konsep-konsep kebahasaan yang membosankan. Pembelajaran kontekstual masih dalam impian meskipun sosialisasi, penataran, pelatihan tentang itu sudah berkali-kali diselenggarakan.

A. Mendesain Pembelajaran

Sebelum diperkenalkan model-model pembelajaran, perlu membahas sepintas mengenai strategi mendesain pembelajaran.

Berbicara mendesain pembelajaran adalah sebagai berikut

Karakteristik:

1. Perencanaan

Apakah pembelajaran dipersiapkan dengan baik?

2. Pembelajaran:

- a. Apakah siswa aktif terlibat secara mental (berpikir)?
- b. Apakah pembelajaran terkait dengan kehidupan nyata?
- c. Apakah pembelajaran mendorong untuk berpikir tingkat tinggi (kritis, mengambil keputusan, memecahkan masalah, kreatif)?
- d. Apakah pembelajaran melayani gaya belajar siswa yang berbeda-beda.
- e. Apakah pembelajaran mendorong untuk berinteraksi multiarah (siswa-siswa-guru)?
- f. Apakah pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai media/sumber belajar?
- g. Apakah pembelajaran berpusat pada siswa?

3. Manajemen kelas

- a. Apakah ada kesepakatan tata tertib kelas yang perlu dipatuhi?
- b. Apakah penataan tempat duduk memudahkan untuk melakukan kegiatan belajar?
- c. Apakah ada pengaturan peran anggota kelompok?
- d. Apakah penggunaan alat dan sumber belajar diatur dengan baik?
- e. Apakah penataan lingkungan belajar ditata secara bervariasi (di dalam kelas, di luar kelas)

4. Penilaian/Pengukuran/Evaluasi

- a. Apakah guru memantau proses belajar siswa?
- b. Apakah dosen memberikan umpan balik terhadap hasil kerja siswa?

B. Strategi Pembelajaran

Strategi Pembelajaran → PAKEM

Apa itu PAKEM?

PAKEM itu sebuah akronim, singkatan dari

- P = pembelajaran** → Proses membelajarkan siswa
A = aktif → siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk berpikir, berinteraksi, berbuat untuk mencoba, menemukan konsep baru atau menghasilkan suatu karya.
K = kreatif → pembelajaran mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi; untuk mencari berbagai alternatif dalam memecahkan masalah, tanpa dipaksa-paksa.
E = efektif → berjalan lancar dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
M = menyenangkan → siswa bertindak sebagai pelaku belajar utama, tidak merasa takut, tertekan, berani bertanya, berpendapat, mencoba, tanpa rasa takut salah,

Tambahan: Pembelajaran diharapkan **kontekstual**, bermakna yang terkait dengan kehidupan dan pengalaman anak, dalam kegiatan, bahan, dan topiknya.

C. Model Pembelajaran:

1. Model Pembelajaran Kooperatif: Tipe *Team Game Tournament*

Intinya: Guru menjelaskan. Lalu, siswa dikelompokkan sesuai kebutuhan. Kemudian, guru memberi pertanyaan, dan kelompok berkompetisi menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Siapa juara?

2. Model Pembelajaran Berbasis Masalah

Intinya: Guru melemparkan masalah. Lalu, kelompok siswa berupaya memecahkan masalah itu secara bersama, lalu dibuatkan dalam laporan ringkas.

3. Model Pembelajaran Kooperatif *Jigsaw*

Intinya: Setiap anggota kelompok memiliki nomor diri. Lalu, nomor 1 berkelompok sama-sama nomor 1, nomor 2 berkelompok nomor 2, dst. Tiap kelompok membahas topik tertentu. Kemudian kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan apa yang telah diperoleh pada kelompok itu.

4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Think-Pair-Share*

Intinya: Guru melemparkan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran, siswa memikirkannya. Kemudian siswa diminta berpasangan. Setiap pasangan berdiskusi tentang apa yang sudah dipikirkan tadi. Lalu, akhirnya setiap kelompok menginformasikannya kepada kelompok lain.

5. Model Pembelajaran Langsung

Intinya: Guru mendemonstrasikan sesuatu, lalu dikerjakan oleh murid.

6. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi Kelompok

Intinya: Siswa berkelompok. Mereka memilih masalah yang sudah ditetapkan. Guru bersama siswa merumuskan prosedur, tugas, tujuan pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran. Setiap kelompok melakukan analisis dan evaluasi investigasi dan menyiapkan presentasi. Beberapa kelompok ditunjuk untuk mempresentasikan hasil investigasinya.

7. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Numbered Head Together*

Intinya: Guru membagi siswa dalam kelompok yang beranggota 3 – 5 orang. Setiap kelompok diberi nomor 1 sampai 3 atau 5. Guru mengajukan pertanyaan yang bervariasi. Siswa menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan itu. Guru memanggil siswa dengan nomor tertentu, kemudian siswa yang bernomor sama mencoba menjawab pertanyaan.

8. Model Pembelajaran Tipe *Student Team Achievement Divisions*

Intinya: guru membentuk kelompok, guru menyajikan pelajaran. Lalu, kelompok diberi tugas. Anggota kelompok mengerjakan tugas secara bersama. Guru memberi kuis/pertanyaan kepada semua siswa secara individu.

Metode Pembelajaran di Sekolah

Metode dan teknik pembelajaran yang digunakan sesuai dengan RPP, tetapi RPP sebaiknya mengikuti strategi pembelajaran PAKEM.

D. Bahan dan Alat

- a. LCD
- b. kertas warna
- c. papan tulis
- d. infokus
- e. spidol
- f. kertas plano
- g. foto/gambar tentang pasar, museum, sungai, batu, tumbuhan, dan sebagainya.
- h. bahan ajar,
- i. lembar kerja siswa
- j. gunting
- k. karton
- l. lem
- m. pensil
- n. pulpen
- o. kertas putih

Langkah Kegiatan

Sesuai dengan RPP, tetapi RPP sebaiknya mengikuti strategi pembelajaran PAKEM itu.

Ilustrasi Pembelajaran Model STAD

Pokok Bahasan: Kosakata

Guru: menyiapkan materi kosakata yang berkaitan dengan materi pembelajaran.

Misalnya:

- a. patida
- b. kasaera
- c. polulu
- d. kapulu
- e. piso
- f. kaseleghuti
- g. patota
- h. hatamu
- i. gurinda
- j. pandanga

Kosakata itu digandakan sebanyak jumlah kelompok siswa. Kertas itu digunting-gunting. Lalu, diisi di dalam amplop-amplop sesuai jumlah kelompok.

Guru menyediakan juga lembar kerja siswa (LKS).

Format LKS, misalnya:

Isilah titik-titik berikut dengan kata yang tersedia pada bagian kanan. Pilihlah kata yang paling sesuai.

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Nesurui karuku nepake | hatamu |
| 2. Nekangkiri karuku nepake..... | kapulu |
| 3. Netugho sau nepake..... | kasaera |
| 4. Nelako sau nepake | patida |
| 5. Nehiri foo nepake..... | piso |
| 6. Netidaki kontu nepake..... | polulu |
| 7. Nebhenta sau nepake..... | patota |
| 8. Nefekangelahi dopi nepake..... | pandanga |
| 9. Nefekaroko kapulu nepake..... | kaseleghuti |
| 10. Nelogha rusa nepake..... | gurinda |

Catatan:

Guru boleh menjanjikan penghargaan/hadiah berupa juara, atau apa saja yang menyenangkan siswanya.

Daftar Pustaka

- Arends, R.I. 2007. *Learning to Teach*. New York: McGraw Hill Companies.
- Betie, S. 2005. *Active Teaching strategies*. Bakker, College.
- Cotton, K. 2001. *Teaching Thinking Skills*. Northwest Regional Educational Laboratory.
- Keyser, M.W.. *Active Learning in Higher Education*. Centre for Learning and Teaching Excellence, Arizona State University.
- Paul, R. 2004. *The State of Critical Thinking Today*. <http://wwwcriticalthinking.org/>.
- Rusbult, c. 2001. Critical Thinking in Education. [http:// www asa 3 org/ASA/education/think/methods.htm](http://www.asa3.org/ASA/education/think/methods.htm).
- Suherman, E. Dkk. (2003). *Strategi Pembelajaran Aktif Kontemporer*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

AJARAN MARTABAT TUJUH DAN PENGARUHNYA DI NUSANTARA

Abdul Hadi W. M.
(Universitas Paramadina)

1. Pendahuluan

Dalam Kongres Bahasa-bahasa Daerah di Sulawesi Tenggara ini saya diundang untuk membahas ajaran tasawuf yang luas penyebarannya dan pengaruhnya di nusantara yaitu Martabat Tujuh. Andai kongres ini tidak diselenggarakan di Buton dan mengenai bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Tenggara, topik ini bukan tidak mungkin akan dirasakan janggal. Namun tidak demikian halnya karena kongres ini diselenggarakan di Buton.

Pada masa kejayaannya dalam abad ke-16 dan 17 Masehi, Buton merupakan kesultanan yang kuat di nusantara. Ia merupakan sebuah kerajaan maritim yang tangguh dengan benteng pertahanan yang kokoh pula. Kecuali itu, corak kehidupan sosial dan politik masyarakatnya dikenal egaliter dan demokratis, terutama setelah berkembangnya Islam, agama yang memang menganjurkan persamaan derajat sesama manusia di hadapan Tuhan. Kehidupan politik yang demikian bisa terjadi karena sistem pemerintahannya didasarkan pada teori kekuasaan sufi yang disebut Martabat Tujuh. Sebagai aliran pemikiran dalam tasawuf, Martabat Tujuh berkembang dari paham *Wahdat al-Wujud* atau *Wujudiyah* yang tidak jarang disebut sebagai mazhab Ibn 'Arabi. Aliran ini diasaskan oleh Syekh Syamsudin Sumatrani atau Syamsudin Pasai (w. 1630 M) di Aceh bersama guru dan sekaligus sahabatnya dari India, Syekh Fadlullah al-Burhanpuri. Pada akhir abad ke-17 M paham ini tersebar luas ke berbagai pelosok nusantara dibawa oleh guru-guru tarekat dan sufi yang lama tinggal dan belajar di Aceh.

Sebagai aliran pemikiran, Martabat Tujuh sebenarnya bukan semata-mata bentuk mistisisme atau spiritualitas. Melainkan sebuah sistem metafisika untuk menerangkan tatanan wujud dari dunia keberadaan, yang membentang dari alam ketuhanan yang transenden hingga alam jasad dan benda-benda yang menempati alam terbawah. Tatanan itu bersifat hierarkis, seperti bangunan piramid atau gunung yang mengerucut ke atas. Menurut ulama sufi bangunan sebuah pemerintahan seharusnya juga jelas tatanannya seperti tatanan wujud di alam keberadaan.

Dalam penafsiran sufi atas ajaran Islam mengenai kemasyarakatan, negara bukanlah sekadar refleksi dari kedirian/pribadi seorang raja. Negara mestilah juga merupakan pranata yang merupakan wadah terwujudnya kesatuan harmonis antara raja dan rakyat, dan antara Khalik dan makhluk. Ini ditegaskan oleh seorang cendekiawan sufi Aceh abad ke-16 Syekh Bukhari al-Jauhari dalam kitabnya *Taj al-Salatin* yang selesai ditulis pada tahun 1603 M, saat kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya (Taufik Abdullah 2002; Abdul Hadi W. M. 2005). Dalam konsep sufi raja bukan satu-satunya unsur utama dalam sebuah negara. Unsur lain yang tidak kalah penting bagi tegaknya sebuah negara ialah rakyat. Sama dengan alam semesta, tidak ada makhluk tanpa Khalik, dan tidak mungkin Khalik dikenal tanpa makhluk. Konsep kunci pemerintahan yang bertujuan mencapai keserasian raja dan rakyat seperti itu ialah *adil* dan *ihsan*. Dari konsep seperti inilah lahir perbendaharaan bahasa politik dan kenegaraan tersendiri dalam banyak bahasa daerah di nusantara yang dipengaruhi oleh pemikiran sufi, khususnya ajaran Martabat Tujuh.

Dalam metafisika sufi, yang salah satunya kemudian dirinci dalam ajaran Martabat Tujuh, secara garis besar alam keberadaan/wujud dibagi dua: alam Tuhan dan alam makhluk. Alam Tuhan atau Ketuhanan dibagi tiga martabat: Ahadiyah, Wahidiyah dan Wahdah. Alam makhluk terdiri dari empat peringkat: alam arwah, alam misal, alam ajsam, dan alam insan (Johns 1975). Karena pribadi manusia dalam dirinya merangkumi empat peringkat alam makhluk, maka ia pantas dipandang perantara (*barzakh*) antara alam makhluk dan alam ketuhanan. Karena itu manusia dalam al-Quran disebut sebagai khalifah Allah di muka bumi, sekaligus hamba-Nya. Mengapa Sebab tidak mungkin bisa menjadi khalifah atau wakil-Nya dengan baik dan mampu mengemban amanah-Nya tanpa terlebih dahulu menyadari bahwa ia adalah hamba-Nya. Seorang hamba sejati patuh dan tunduk kepada perintah-Nya yaitu hukum yang telah ditetapkan oleh-Nya.

Negara adalah miniatur alam semesta. Raja yang memerintah di situ berperan sebagai khalifah dari lembaga yang kedudukannya lebih tinggi. Sebagai khalifah ia adalah perantara antara alam makhluk dan alam ketuhanan/keruhanian, dalam arti mampu membawa rakyat yang diperintahnya mencapai kesejahteraan lahir dan batin sehingga dapat menjalankan amanah Tuhan. Dalam konsep sufi, kerajaan yang ideal bukanlah monarki, tetapi negara berdasarkan hukum (nomokrasi) yang di dalamnya raja memimpin dan mengatur jalannya pemerintahan berdasarkan undang-undang dan hukum yang telah ditetapkan. Raja tidak mesti dipilih berdasarkan garis keturunan. Yang penting raja harus dipilih berdasarkan musyawarah para ulama, cendekiawan, dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengerti seluk beluk politik, undang-undang dan pemerintahan.

Sistem pemerintahan kesultanan Buton yang ditegaskan berdasarkan ajaran Martabat Tujuh disebut Sarana Wolio. Tujuh martabat dalam ajaran wujudiyah diterjemahkan menjadi tujuh kedudukan dalam tatanan

pemerintahan. Tiga tingkatan pertama yang melambangkan martabat ilahiyah diduduki oleh tiga cabang bangsawan yang masing-masing membentuk lembaga tersendiri: Tanailandu, Tapi-tapi dan Kumbewaha (Kamboru-mboru Talu Palena). Empat martabat di bawahnya berupa jabatan-jabatan Sultan Sapati, Kenepulu, dan Kapitalao. Menurut Yunus (1995) dalam perkembangan selanjutnya muncul jabatan baru Lakina Sorawolio, yaitu pengganti sultan untuk daerah pertahanan di istana. Dalam sistem pemerintahan ini sultan berperan sebagai barzakh atau perantara antara alam yang di atas dan alam yang di bawah. Sapati, sama dengan jabatan Mahapatih, Wazir atau Perdana Menteri, berperan sebagai pelaksana pemerintahan. Kenepulu adalah Hakim Agung, sama dengan jabatan qadi agung atau qadi malik al-adl dalam sistem pemerintahan kesultanan Aceh, sedangkan Kapitalao adalah penguasa laut. Sama dengan panglima angkatan laut.

2. Tasawuf Wujudiyah di Nusantara

Wujudiyah adalah nama lain yang diberikan terhadap paham *wahdat al-wujud* di dalam tasawuf. Kata *wahdat al-wujud* diartikan, misalnya oleh Nasr, sebagai 'kesatuan transenden wujud'. Disebut demikian karena secara transenden wujud yang jamak dan bhineka di alam semesta ini dianggap bersumber dari Yang Satu dan dipertalikan satu dengan yang lain dalam sebuah kesatuan tersembunyi, yaitu sifat-sifat dan tindakan-Nya yang kreatif. Sifat-sifat dan tindakan-Nya yang kreatif digerakkan oleh 'Cinta-Nya', yang bersumber dari kunhi 'Dzat-Nya'. Karena ajaran ini didasarkan atas sebuah sistem metafisika dengan pemikiran yang bercorak filosofis, tidak jarang pula paham wujudiyah disebut sebagai bentuk dari sebuah tasawuf falsafah.

Akar pemikirannya dijumpai dalam pemikiran para filosof Muslim abad ke-9 – 11 M seperti al-Farabi dan Ibn Sina dan para sufi abad yang sama seperti Mansur al-Hallaj dan Niffari. Ajaran paham ini memperoleh rumusan yang sistematis dan mendalam di tangan seorang filosof sufi terkemuka abad ke-12 dari Andalusia (Spanyol) yaitu Muhyiddin Ibn 'Arabi, yang mendapat gelar sebagai Shaykh al-Akbar atau Guru Agung Falsafah Sufi. Lebih jauh falsafah ini dikembangkan oleh para sufi Arab dan Persia pada abad ke-13 – 15 M. Pemikir-pemikir wujudiyah yang terkenal pada abad-abad ini antara lain ialah Sadruddin al-Qunawi, Fakhrudin 'Iraqi, Mahmud Shabistari, Abdul Karim al-Jili, Maghribi dan Abdul Rahman Jami. Pemikiran mereka dikenal di nusantara pada abad ke-16 dan berkembang pesat pada abad-abad berikutnya, terutama setelah terbitnya karya-karya Hamzah Fansuri dan murid-muridnya di Sumatra seperti Syamsudin Pasai dan Syaiful Rijal (M. Naquib al-Attas 1971; Abdul Hadi W. M. 2001; Braginsky 2003). Disebut paham wujudiyah karena pokok pemikiran mereka ialah mengenai persoalan Wujud Tunggal yang daripada-Nya semua wujud lain yang berbagai-bagai di alam semesta berasal. Nama *wahdat al-wujud* diberikan pertama oleh Sadruddin al-Qunawi, sufi Persia yang hidup di Anatolia, Turki sekarang, pada akhir abad ke-13 (Kautsar Azhari Noer 1996).

Secara umum penganut paham wujudiyah berpandangan seperti berikut: (1) Tuhan sebagai Pencipta merupakan Wujud Hakiki dan Mutlak yang mendahului segala sesuatu di alam semesta dan juga meliputi segala keberadaan. Karena itu Dia disebut Yang Satu atau Yang Esa, tiada wujud hakiki selain Wujud-Nya; (2) Keberadaan makhluk atau ciptaan yang berbagai-bagai di alam semesta merupakan hasil dari *tajalli*-Nya atau penjawantahan ilmu-Nya di alam penampakan (*syahadah*), yang melaluinya Dia dan keesaan-Nya dapat dikenal; (3) Karena keberadaan dunia ciptaan yang berbagai-bagai ini tergantung pada keberadaan-Nya, maka wujud mereka tidak hakiki dan nisbi, berlawanan dengan 'Wujud-Nya' yang hakiki dan mutlak; Wujud hakiki disebut *al-wajib al-wujud* (wujud yang harus ada, sebab tanpa keberadaan-Nya wujud lain tidak mungkin lahir). Sebaliknya 'yang berbagai-bagai' sebagai wujud nisbi disebut *al-mumkinat al-wujud* (wujud yang hanya mungkin ada jika Yang Mutlak menghendaki adanya); (4) Makna bahwa segala sesuatu diliputi oleh Wujud-Nya ialah bahwa segala sesuatu itu diliputi oleh ilmu-Nya dan sifat-sifat-Nya. Diliputi oleh ilmu-Nya berarti berada dalam pengetahuan Tuhan, dan diliputi oleh sifat-sifat-Nya berarti bahwa segala sesuatu itu mencerminkan sifat-sifat-Nya. Sifat Tuhan yang paling utama ialah *al-rahman* dan *al-rahim* (maha pengasih dan maha penyayang). Karena segala sesuatu berasal dari Yang Satu, semua akan kembali kepada Yang Satu. Jadi, jalannya keberadaan di alam fenomena dari awal hingga akhir berjalan melingkar, diturunkan dari Yang Satu dan kembali naik menuju Yang Satu.

Aspek penting dari pemikiran 'Wujudiyah' dapat dicermati melalui gambaran Hamzah Fansuri tentang alam semesta. Menurut Hamzah Fansuri, seluruh isi alam – yang tampak secara lahir maupun tersembunyi – dapat digambarkan sebagai sebuah lingkaran, atau lebih tepat dua lengkungan yang kedua ujungnya (yang di atas dan di bawah) bertemu. Separuh dari lengkungan merupakan 'lengkungan jalan menurun' (*tanazzul*) yaitu jalannya penciptaan alam dan isinya, proses termanifestasikannya jagat raya dari Keesaan Mutlak Zat atau Wujud Maha Tinggi (yang serba gaib dan tidak dapat dikenali secara lahir) menjadi kepelbagaian wujud atau realitas yang nampak secara lahir. Separuh dari lengkungan pasangannya merupakan 'lengkungan jalan naik' (*taraqqi*) yaitu jalan naik ciptaan yang bersifat lahir berbagai-bagai menuju asalnya menuju wujud batin yang tunggal hingga akhirnya kembali kepada Sang Khalik. Seluruh peringkat atau tatanan wujud (yang lahir dan yang batin) terangkum dalam pribadi dan keberadaan manusia sebagai makhluk jasmani dan makhluk rohani yang sempurna di antara ciptaan-Nya yang lain. Karena itu, alam semesta hanya dapat kembali ke asalnya melalui manusia.

Di kepulauan nusantara ajaran wujudiyah telah dikenal pada abad ke-13 M. Penganjurinya ialah seorang sufi Arab abad ke-12 – 13 M, Abdullah 'Arif yang hadir di Sumatra sebagai pendakwah Islam yang gigih. Di tinggal lama dan menjelajah banyak negeri di Sumatra. Naskah kitab karangannya *Bahr al-Lahut al-Kitab fi Bayan al-Alif* ("Lautan Wujud Ketuhanan") yang disalin pada abad ke-13 ini, baru-baru ini telah dijumpai, begitu pula naskah terjemahannya dalam bahasa Melayu yang diperkirakan dikerjakan pada abad ke-15 M (Mahayudin Haji Yahaya 1998). Risalah tasawuf lain yang muncul agak awal dalam sejarah intelektual Muslim di Nusantara ialah kitab *Durr al-Manzum*, karangan Maulana Abu 'Ishaq, seorang sufi Arab pada abad ke-14. Menurut Tun Sri Lanang dalam *Sulalat al-Salatin* ("Sejarah Melayu") kitab ini diterjemahkan dalam bahasa Melayu pada pertengahan abad ke-15 oleh seorang ulama – ahli tasawuf terkenal Abdullah Patakan dari Pasai (Shellebear 1975:45-6). Dari teks-teks suluk dan risalah tasawuf Sunan Bonang (awal abad ke-16) dan Hamzah Fansuri (akhir abad ke-16) diketahui bahwa setidaknya pada abad ke-16, karangan-karangan sufi wujudiyah terkenal seperti Ibn 'Arabi (*Fusus al-Hikam* dan *Futuhat al-Makkiyah*), Fakhruddin 'Iraqi (*Lama'at*), Abdul Karim al-Jili (*al-Insan al-Kamil*), dan Abdul Rahman Jami (*Lawa'ih*) telah dibaca oleh banyak masyarakat tasawuf di Nusantara¹.

Dalam kitab *Bahr al-Lahut* dikemukakan bahwa 'Dzat Allah' dan Sifat-sifat-Nya (yaitu Wujud-Nya) seperti Qudrat, Iradat dan 'Ilm (ilmu-Nya) tiada terhingga, tidak bertempat dan berwaktu. 'Dzat Allah' itu *qadim* (abadi) dan diibaratkan sebagai cermin yang jernih dan cerlang. Di dalam cermin itu tergambar hakikat roh yang disebut *al-ruh idafi* (roh yang terpaut pada wujud tertinggi) dan karena bersinar-sinar cemerlang diberi nama Nur Muhammad (cahaya yang terpuji). Inilah manifestasi wujud ilmu Tuhan paling awal di dunia ciptaan, disebut *ta'ayyun awwal* atau kenyataan pertama. Dari ruh idafi tercipta pula Kursiy, bumi langit, makhluk sekalian seperti jiwa manusia, jin, dan setan yang menempati martabat *wahdah* (kesatuan) dalam hirarki ciptaan. Makhluk-makhluk yang dicipta itu disebut 'kenyataan yang dimaklumkan' (*ma'lum*) dari ilmu ('ilm) Tuhan. Namun, ciptaan yang disebut sebagai kenyataan yang dimaklumkan itu tidak dapat dianggap sebagai 'Dzat Tuhan' dan 'Sifat-Nya', karena 'Dzat Tuhan' dan 'Sifat-Nya' itu *qadim*, sedangkan makhluk-makhluk itu *muhdath* (baru) artinya mengenal awal dan akhir, sedangkan Wujud Mutlak itu tidak mengenal awal dan akhir (Mahayudin Haji Yahaya 1998).

Uraian tentang ajaran wujudiyah yang rinci untuk pertama kalinya dalam bahasa Melayu dijumpai dalam risalah-risalah tasawuf Hamzah Fansuri seperti *Syarab al-'Asyiqin*, *Asrar al-'Arifin* dan *Muntahi* (al-Attas 1970; ; Abdul Hadi W.M. 2001:146-162). Uraian berkenaan dengan prinsip-prinsip tentang *tajalli* 'Dzat Tuhan' terdapat antara lain dalam bab lima *Syarab al-'Asyiqin* (Minuman Orang Berahi) atau yang juga disebut *Zinat al-Muwahhidin* (Hiasan Ahli Tauhid). Hamzah Fansuri menerjemahkan *tajalli* sebagai 'kenyataan' (*ta'ayyun*) dan 'penampakan' (maksudnya penampakan ilmu Tuhan melalui penciptaan alam semesta dan seisinya). Penciptaan secara menurun tersusun dari lima martabat, yaitu dari tangga tertinggi ke tangga terendah, sesuai dengan peringkat kerohanian dan luas sempitnya sifat dari keberadaan dalam martabat masing-masing, yaitu dari 'yang umum' ke 'yang khusus'. Dzat Tuhan disebut *la ta'ayyun* karena akal pikiran, perkataan pengetahuan dan makrifat manusia tidak dapat menjangkau-Nya. Gagasan ini didasarkan pada Hadis Nabi, "Pikirkan apa saja yang diciptakan Tuhan, tetapi jangan pikirkan tentang Dzat-Nya" (*Tafakkaru fi khalqi 'l-Lah-i wa la tafakkaru fi dzat-i 'l-Lah*). (*Syarab V - 35*).

Menurut Hamzah Fansuri, makna dari perkataan "Jangan pikirkan tentang 'Dzat-Nya'" ialah bahwa pikiran, perkataan, pengetahuan dan makrifat manusia mustahil mengetahui dan memahami-Nya. Karena itu, apabila para sufi berbicara tentang prinsip-prinsip penciptaan dan manifestasi dari 'Wujud-Nya' yang tidak terhingga, mereka tidaklah berbicara tentang 'Dzat Tuhan' yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia yang terbatas. Yang dapat dicapai oleh pikiran manusia ialah jalannya penciptaan sesuai martabat kerohaniannya karena semakin tinggi tingkat rohani suatu ciptaan maka semakin dekat dia dengan Sang Pencipta. Menurut Hamzah Fansuri, walaupun 'Dzat Tuhan' itu *la ta'ayyun* (tidak nyata) Dia ingin dikenal, maka Dia mencipta alam semesta agar 'Diri-Nya' dikenal. Hadis qudsi menyatakan: "Aku adalah 'perbendaharaan tersembunyi' (*kanz mahfiy*), aku cinta (*ahbabbu*) untuk dikenal (*an u'rafa*) maka Aku mencipta dan dengan demikian dikenal." Cinta (*mahabbah*) lantas dipandang asas penciptaan segala sesuatu.

Sesudah menciptakan segala sesuatu, yaitu setelah *ta'ayyun* (menyatakan Diri) dengan mengejawantahkan ilmu-Nya menjadi alam semesta dan seisinya, maka Tuhan menjadi dikenal sebagai asal-usul dari segala sesuatu. Keadaan *ta'ayyun* inilah yang dapat dicapai oleh pikiran, pengetahuan dan makrifat (*Syarab V, 36*). Menurut Hamzah Fansuri *ta'ayyun* 'Dzat Tuhan' atau 'Wujud-Nya', yaitu ilmu-Nya, terbagi ke dalam empat martabat:

1. *Ta'ayyun awwal*. Kenyataan Tuhan dalam peringkat pertama berupa 'ilm (Pengetahuan), wujud (Ada), syuhud (Menyaksikan), dan nur (Cahaya). Dengan ilmu/pengetahuan maka Tuhan itu 'Alim (Maha Mengetahui) dan *ma'lum* (dikenal, diketahui). Karena 'Wujud' (yaitu Ada dengan sendiri-Nya), Dia disebut Yang Mengada, Yang Mengadakan atau Yang Ada. Karena 'Menyaksikan', Dia itu Maha Melihat.

¹ Lihat Drewes (1969) *The Admonition of Seh Bari*. The Hague: Martinus Nijhoff; Kitab-kitab karangan sufi Arab dan Persia itu disebut beberapa kali dan dirujuk oleh Hamzah Fansuri dalam risalah-risalah tasawufnya.

Karena 'Cahaya', Dia adalah Yang Menerangi, Yang Menerangkan (dengan Cahaya atau Petunjuk-Nya) dan juga Yang Diterangkan (oleh Cahaya, Ilmu dan Wujud-Nya).

2. *Ta'ayyun tsani* atau kenyataan kedua, disebut juga *ta'ayyun ma'lum*. Dalam martabat ini Dia mulai dikenal, karena Dia telah mulai mengejawantah ilmu-Nya dalam dunia ciptaan, yaitu obyek-obyek yang diketahui atau dikenal (*ma'lum*). Pengetahuan awal dari Tuhan yang dikenal itu disebut *al-a'yan al-tsabitah* (hakikat segala sesuatu), yang disebut juga *al-suwar al-ilmiyah* (gambaran ilmu-Nya), *al-haqiqat al-'ashya* (hakikat alam semesta) dan *al-ruh idafi* (roh yang terpaut). Semua ini merupakan prinsip kerohanian dari terjadinya segala sesuatu. Dalam diri manusia prinsip ini disebut *al=haqiqat al-muhammadiyah* (hakikat Muhammad) atau Nur Muhammad.

3. *Ta'ayyun tsalits* atau martabat ketiga dari kejadian atau penciptaan. Dalam peringkat ini roh manusia atau nyawa makhluk-makhluk tercipta.

4. *Ta'ayyun rabi'* dan *khamis* atau martabat keempat dan kelima penciptaan alam semesta. Dalam martabat ini manusia dan makhluk-makhluk telah dicipta secara jasmani. Pada tahapan ini Tuhan meniupkan roh ke dalam tubuh manusia dan meletakkan nyawa dalam makhluk-makhluk sehingga menjadi ciptaan yang hidup. Penciptaan ini tiada berkesudahan dan tiada berhingga (*Syarab V 37-41*). 'Ilmu', 'Wujud', 'Syuhud' dan 'Nur' tidak bercerai dari semua *ta'ayyun*, karena tanpa keempatnya itu segala sesuatu tidak dapat menempati alam keberadaan atau kejadian. Oleh karena itu, bagi ahli tasawuf (*ahl al-suluk*), wujud alam yang merupakan ciptaan dan tajalli ilmu-Nya sebenarnya juga merupakan wujud Tuhan, dalam arti keberadaannya berada di tangan Tuhan dan dengan demikian pula alam itu menjadi kendaraan bagi penampakan wujud-Nya, yaitu ilmu dan sifat-sifat-Nya yang Maha Pengasih (*al-rahman*) dan Maha Penyayang (*al-rahim*). Dilihat dari perspektif ini maka sebenarnya wujud alam ini tiada sebab berasal dari *wujud muta'ayyin*, yaitu 'Wujud Dia' yang maha menentukan wujud segala sesuatu (*Syarab V 42*).

Ta'ayyun awal disebut *ahad* (esa), apabila penampakan ilmu-Nya diasingkan dari 'Dzat-Nya' yang tidak dikenal, tetapi apabila disertakan ibarat dan sifat-Nya maka *ta'ayyun awal* disebut *wahid* (pertama). Oleh para sufi *ta'ayyun awal* itu diumpamakan sebagai laut tidak bertepi, sedangkan *ta'ayyun ma'lum*, yaitu *ta'ayyun* kedua diumpamakan sebagai ombak yang muncul dari dalam lautan dan penampakan ombak itu ditandai dengan datangnya gelombang penciptaan. Menurut Hamzah Fansuri, alam semesta dan isinya berasal dari Allah, bukan dari 'tiada' pulang kepada 'tiada', tetapi dari 'ada' melalui 'tiada' dan kembali ke 'ada'. Yang dimaksud "Ada" ialah Ilmu Tuhan. Cinta Tuhan atau kehendak-Nya untuk dikenal, seperti dikemukakan dalam hadis yang telah dikutip, dirujuk pada al-Qur'an 36:62, "Sesungguhnya tatkala Dia berkehendak kepada sesuatu maka Dia pun berkata, 'Jadilah!' (*kun*), maka segala sesuatu menjadi (*fayakun*)". Ciptaan, kata Hamzah Fansuri, adalah pemakluman (*ma'lumat*) dari 'Pengetahuan-Nya' yang melalui mereka Dia dikenal."

Wujud Tuhan juga disebut *al-rahman* (Maha Pengasih), yang di dalamnya tercakup tujuh sifat-Nya yang utama, yaitu *aHayy* (Maha Hidup), *'Ilm* (Maha Pengetahuan), *iradat* (Maha Berkehendak), *Quadrat* (Maha Kusa), *Sami'* (Maha Mendengar), *Basir* (Maha Melihat) dan *Kalam* (Maha Kata). Hamzah Fansuri menulis dalam syairnya seperti berikut:

Aho segala yang menyembah nama
Yogya diketahui Yang Pertama
Karena Tuhan kita Yang Sedia Lama
Dengan ketujuh sifat bersama-sama

Tuhan kita yang Empunya Dzat
Awwalnya Hayy pertama bilang sifat
Keduanya Ilmu dan rupa ma'lumat
Ketiga murid akan sekalian Iradat

Keempat qadir dengan Quadrat-Nya tammam
Kelimanya sifat bernama Kalam
Keenamnya Sami' dengan Ada-Nya dawam
Ketujuhnya Basir akan halal dan haram

(*Asrar al-'Arifin* bab awal).

Pada awal abad ke-17 ajaran 'martabat lima' wujudiyah dikembangkan menjadi ajaran 'martabat tujuh'. Pengasas ajaran martabat tujuh itu ialah Syamsuddin Sumatrani dari Aceh bersama gurunya Muhammad ibn Fadlullah al-Burhanpuri, sufi India dari Burhanpur.

Dalam kitabnya *Al-Tuhfa al-Mursala ila Ruh al-Nabi*, Syekh al-Burhanpuri, menyatakan bahwa *tajalli* Tuhan melalui pengewajawantahan ilmu-Nya terdiri dari tujuh martabat yaitu: *ahadiyah*, *wahdah*, *wahidiyah*,

'alam al-arwah (alam roh universal), *'alam al-mitsal* (alam roh individual), *'alam al-aqsam* (alam jasmani) dan *'alam al-insan* (alam jasmani). Ahadiyah adalah martabat keesaan 'Wujud Tuhan' sebagai 'Dzat Mutlak', sebelum turun menjadi Pencipta. Dalam martabat ini keadaan Tuhan tidak terpikirkan, sama dengan martabat *la ta'ayyun* dalam ajaran Hamzah Fansuri. Wahdah dan Wahidiyah adalah sama dengan *ta'ayyun awal* dalam ajaran Hamzah Fansuri. Alam arwah adalah martabat penciptaan hakekat segala sesuatu dalam wujud roh yang tidak dapat dilihat dengan mata (John 1972; Harun Hadiwijono 1985:29).

3. Ajaran Martabat Tujuh Syamsudin Sumatrani

Syekh Syamsudin Sumatrani adalah tokoh yang berperan besar dalam mengembangkan dan menyebarkan ajaran Martabat Tujuh. Dia adalah seorang mufti dan ulama kesayangan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M), yang selalu mendampingi dalam membuat semua kebijakan termasuk dalam menyusun strategi di medan perang. Bahkan dia sering dipandang sebagai pembantu dekatnya yang memiliki jabatan tinggi setara dengan wazier atau perdana menteri. Di antara risalah tasawufnya yang terkenal ialah *Mir'at al-Mu'minin* (Cermin Perbandingan Orang Mukmin), *Jawhar al-Haqa'iq* (Permata Kebenaran Hakiki), *Syarah Mir'at al-Qulub* (Uraian tentang Cermin Kalbu), dan lain sebagainya.

Ajaran Syekh Syamsudin Sumatrani tentang Martabat Tujuh dapat diringkas sebagai berikut.

Pertama, martabat ahadiyah atau keesaan mutlak. Tahapan ini dapat disebut juga sebagai martabat *wujud la ta'ayyuni* atau wujud Tuhan yang tidak menampakkan diri-Nya. Yang ada dalam alam ini hanya Tuhan semata dengan kunhi 'Dzat-Nya' yang mutlak.

Kedua, martabat wahidiyah atau penampakan pertama. Dalam martabat ini yang ada ialah pengetahuan Tuhan tentang 'Dzat' dan 'Sifat-Nya' yang mutlak secara umum (*ijmal*). Disebut juga martabat Haqiqat al-Muhammadiyah. Segala sesuatu baru merupakan hakikat dalam pengetahuan Tuhan alias merupakan hakikat segala sesuatu (*al-haqiqat al'-ashya*).

Ketiga, martabat wahdah. Dalam martabat ini yang ada ialah pengetahuan Tuhan tentang rincian sifat-sifat-Nya. Hamzah Fansuri menyebut sebagai 'Alam Kuntu Kanzan', dari hadits qudsi yang berbunyi: "*Kuntu kanzan makhfiyyan ahbabbu an 'urafa...*" (Aku perbendaharaan tersembunyi dan cinta untuk dikenal, maka Aku mencipta...). Artinya dalam alam ini segala sesuatu masih merupakan *potensia* atau perbendaharaan tersembunyi dalam ilmu-Nya Allah belum dihadirkan di dunia ciptaan. Ketiga martabat yang telah disebutkan ini disebut juga sebagai martabat-martabat ketuhanan yang kekal (*qadim*), tidak berawal dan tidak berakhir, dan bersifat batin atau transenden (*tanzih*).

Keempat, martabat alam arwah. Dalam peringkat ini tercipta alam kerohanian dari sekalian makhluk khususnya alam kerohanian manusia. Roh semesta sebagai substansi dasar penciptaan belum ditampakan secara rinci susunannya dan tidak pula mengandung unsur kebendaan.

Kelima, alam misal. Ini merupakan martabat terwujudnya alam semesta yang tersusun dari unsur-unsur murni dan halus dalam kesatuan yang utuh dan tidak akan pernah rusak.

Keenam, alam ajsam. Dalam martabat ini alam jasmani yang terdiri dari unsur-unsur kasar dan terpisah-pisah sudah terwujud.

Ketujuh, alam insan. Merupakan martabat terwujudnya manusia yang menghimpun semua martabat yang ada sebelumnya. Puncak penciptaan ialah hadirnya insan kamil (manusia sempurna) seperti terwujud dalam pribadi Nabi Muhammad S.A.W. dan para nabi yang lain serta segenap aulia serta orang suci.

Dalam *Mir'at al-Mu'minin* Syekh Syamsudin menerangkan bahwa rupa batin manusia, sebagaimana rupa batin alam semesta, merupakan salinan daripada wajah Tuhan, yaitu salinan dari Sifat-sifat-Nya (yang *al-rahman* dan *al-rahim*) dan tindakan kreatif-Nya. Sifat-sifat dan tindakan-kreatif-Nya itulah yang dimaksud sebagai rupa batin atau wujud Tuhan yang Esa. Tetapi tidak semua manusia dapat mengenal hakikat dirinya yang merupakan salinan dari sifat-sifat dan tindakan kreatif Tuhan. Hanya manusia yang mencapai martabat insan kamil, yaitu yang sempurna akal budinya seperti nabi dan wali, dapat mengenali hakikat ini dan berkemungkinan mencapai tipe ideal asalnya yang rupa batinnya mengandung gambaran sifat ketuhanan.

Menurut Syekh Syamsuddin Sumatrani sempurnanya makrifat seseorang terletak pada tujuh pengetahuan: (1) Pengetahuan tentang nama-nama-Nya; (2) Pengetahuan tentang *tajalli* Ilahi; (3) Pengetahuan taklif Tuhan terhadap hamba-Nya; (4) Pengetahuan tentang kesempurnaan dan kekurangan wujud alam semesta; (5) Pengetahuan mengenai alam akhirat; (6) Pengetahuan tentang hakikat diri; (7) Pengetahuan mengenai sebab-sebab dari penyakit batin dan obatnya.

4. Pengaruh Tasawuf

Demikian gambaran ringkas tentang ajaran 'Martabat Tujuh' yang dapat saya paparkan. Karena terbatasnya ruang saya tidak ingin mengurai bagaimana proses tersebar luasnya ajaran ini ke berbagai pelosok nusantara pada abad ke-17 dan 18 M, khususnya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang dapat saya kemukakan ialah bahwa pada abad tersebut banyak teks-teks sastra suluk dalam bahasa Jawa, Sunda dan Madura yang mencerminkan luasnya pengaruh ajaran tersebut. Naskah yang memuat teks-teks suluk wujudiyah dalam

bahasa Jawa dan Sunda, serta Madura, sangat melimpah. Bahkan juga mempengaruhi teks-teks hikayat atau roman petualangan seperti Hikayat Syekh Mardan.

Dalam sastra Sunda misalnya, tampak dalam risalah-risalah yang dinisbahkan kepada Syekh Muhyi Pamijahan dari Tasikmalaya sebagai pengarangnya. Syekh Muhyi adalah murid dari Syekh Yusuf Makassar ketika dia berada di Banten, sebelum diasingkan ke Afrika Selatan karena membantu Sultan Ageng Turtayasa dalam perang melawan VOC pada tahun 1680-82. Dalam sastra Jawa dijumpai dalam karangan pujangga abad ke-18 dan 19 M seperti Yasadipura I, Yasadipura II, dan terutama sekali Ranggawarsita. Karya Ranggawarsita yang jelas sekali menyajikan seluk beluk ajaran 'Martabat Tujuh' ialah *Wirid Hidayat Jati* yang telah dikaji oleh Simuh.

Dalam kehidupan kenegaraan dan budaya politik tidak sedikit pula pengaruh tasawuf di nusantara. Saya ingin memberi contoh di Aceh berupa penggunaan ajaran sufi dan pandangan hidupnya pada nama-nama tempat di kompleks istana sultan dan ibukota kerajaan. Begitu pula dalam bentuk mahkota yang digunakan raja-raja Melayu. Saya yakin ini berguna untuk dijadikan bahan bandingan dengan nama-nama tempat di bekas kompleks istana sultan Buton dan ibukota kerajaan. Istana Aceh Darussalam sejak Sultan Alauddin Ri'ayat Syah memegang tampuk pemerintahan pada akhir abad ke-16 M diberi nama *Dar al-Dunya*, sedangkan kursi tempatnya duduk diberi nama *Dar al-Kamal*. Benteng kota disebut *Kota Khawat*, pulau tempat sultan berlibur disebut Pulau Rahmat. Lapangan luas di ibukota kerajaan disebut Medan Khayali. Teluknya disebut Teluk Ishqidar atau Teluk Tapak Cinta. Nama sungai ada yang disebut Kuala Merdu Ishqi atau mulut cinta yang manis. Ada sungai besar yang disebut *Dar al-Ishqi* atau kediaman 'Cinta', sedangkan sungai lain diberi nama *Wadi al-Safa* atau Sungai Suci. Kapal sultan sendiri disebut *Mir'at al-Safa* atau Cermin Kemurnian.

Mahkota raja-raja Melayu berbentuk songkok yang bagian bawahnya tersusun dari empat dinding segi empat dan bagian atasnya segi tiga kerucut, juga dipengaruhi konsep sufi. Mahkota tersebut dapat dipandang sebagai bangunan radial atau jemari melingkar yang bersifat konsentrik atau memusat. Ia tampak seakan merupakan bangunan ganda empat dengan bagian atasnya dibentuk seperti segi tiga piramid. Pada puncaknya, yaitu pertemuan empat helai segi tiga dari mahkota tersebut, diberi tanda seperti bulu burung merak atau permata berlian yang berkilau-kilauan. Di sini cahaya melambangkan wujud tertinggi keberadaan yang menempati alam ahadiyah dan wahidiyah. Bangunan seperti itu mengingatkan kita kepada pembagian bab-bab dalam kitab *Taj al-Salatin* karangan Bukhari al-Jauhari.

Walaupun kitab *Taj al-Salatin* dibagi ke dalam 24 pasal, namun kalau lebih diringkas lagi berdasarkan tema pokok pembahasannya, kitab ini sebenarnya dibagi ke dalam empat bab utama. Pembicaraan dalam empat bab utama ini berisi konsep keadilan dan ihsan yang dicuatkan dan diletakkan sebagai konsep kunci pembahasan kitab ini. Ganda empat dari mahkota raja-raja Melayu, seperti empat bab atau ruas utama dari kitab *Taj al-Salatin*, membayangkan empat tatanan wujud dalam tasawuf Hamzah Fansuri di luar martabat *la ta'ayyun*. Yang dicuatkan ke atas sebagai konsep kunci pemerintahan Islam ialah konsep keadilan, yang berkaitan erat dengan konsep ihsan. Keadilan yang harus tercermin dalam suatu pemerintahan mesti dipandang pengejawantahan dari keadilan Tuhan, yang tersembunyi dalam sifat-sifat dan tindakan kreatif-Nya.

Kitab *Taj al-Salatin* yang sejak terbit dijadikan bahan bacaan utama raja-raja Melayu dan Jawa membicarakan berbagai persoalan kehidupan manusia dan tujuannya memberikan pedoman bagi raja dan pemimpin dalam menyelenggarakan sebuah pemerintahan. Bagian I, yaitu fasal 1-4, bagian II fasal 5-9, bagian III fasal 10-13; bagian IV fasal 14 - 24. Bagian I membicarakan pentingnya manusia mengenal hakikat dirinya yang berasal dari alam ketuhanan serta kedudukannya sebagai khalifah Allah dan sekaligus hamba-Nya di dunia. Kemudian dibahas tentang pentingnya manusia mengenal Tuhan dari mana dia berasal dan kepada siapa manusia akan kembali. Setelah itu dibahas arti kehidupan di dunia ini dan peri kesudahan segala kehidupan di dunia. Manusia harus senantiasa ingat bahwa setiap orang akan merasakan mati, tidak terkecuali raja. Dia harus kembali ke kampung halamannya di akhirat dengan membawa bekal amal saleh dan pengetahuan yang benar tentang Pencipta.

Bagian II membicarakan arti adil dan tidakadilan, tanda-tanda kebesaran dan kemuliaan seorang raja, kekuasaan dan kedaulatan negeri yang diperintahnya, melaksanakan keadilan dalam pemerintahan, budi pekerti raja-raja yang adil, raja non-Islam tetapi adil, dan juga dibicarakan tentang raja yang zalim. Kalau raja yang adil merupakan bayang-bayang Tuhan di muka bumi (*zill Allah fi al-'ardh*) maka raja yang zalim merupakan bayang-bayang iblis di muka bumi. Bagian III membicarakan pekerjaan sekretaris kerajaan, pekerjaan duta dan keadaan pegawai kerajaan. Bagian IV membicarakan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan seorang raja seperti cara berdiplomasi, memelihara anak, melindungi rakyat, mendidik anak, cara menghemat uang negara, keutamaan akal budi, pentingnya mengetahui ilmu quyah dan firasat, hubungan penduduk negeri beragama Islam dengan seorang raja beragama Islam, kedermawanan dan kemurahan hati, tentang wafat dan ahd. Ringkas kata secara keseluruhan apa yang dikemukakan Bukhari al-Jauhari dalam *Taj al-Salatin* berangkat gagasan para filosof seperti Aristoteles, al-Farabi dan Mawardi. Menurut para filosof ini hal yang terbaik dalam kehidupan di dunia ini dapat dijumpai dalam tiga hal: Pertama, dalam akal pikiran yang luas dan jembar. Kedua, dalam undang-undang atau hukum yang benar. Ketiga, dalam masyarakat yang berkeadilan, berperimanusiaan, sejahtera, serta beriman dan bertakwa. Karena itu, pemerintahan yang baik tercermin dalam kepedulian pemimpinnya terhadap:

pertama, perkembangan ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan; *kedua*, pelaksanaan undang-undang dan hukum secara konsisten dan adil; *ketiga*, masalah-masalah yang dihadapi khalayak ramai.

Sayang sekali pengetahuan saya juga terbatas mengenai sejarah kesultanan Buton dan perkembangan tarikat sufi di Sulawesi Tenggara, sehingga tidak dapat menggambarkan bagaimana prosesnya hingga ajaran 'Martabat Tujuh' demikian berpengaruh di Buton, khususnya dalam sistem pemerintahannya. Yang saya ketahui ialah bahwa sistem pemerintahan dan perundang-undangan kesultanan Buton diserap dari sistem pemerintahan dan perundang-undangan kesultanan Aceh Darussalam, tempat ajaran 'Martabat Tujuh' mula-mula tumbuh dan berkembang. Karena itu, sekadar untuk menutupi kekurangan ini saya hanya bisa merujuk secukupnya kepada kitab *Taj al-Salatin* karangan Bukhari al-Jauhari seperti telah saya kemukakan. Dalam uraian ringkas itu sedikit banyak telah disinggung mengapa falsafah sufi, termasuk ajaran 'Martabat Tujuh', berpengaruh bukan saja dalam ajaran kerohanian atau ilmu suluk nusantara, tetapi juga dalam adab yang salah satu cabangnya termasuk seluk-beluk atau manajemen pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Abdul Hadi W. M. (2001). *Islam: Cakrawala Estetik dan Budaya*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- (2002) *Tasawuf Yang Tertindas: Kajian Hermeneutik Terhadap Karya-karya Hamzah Fansuri*. Jakarta: Yayasan Paramadina.
- Abu Hassan Sham (1993). *Puisi-puisi Raja Ali Haji*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Al-Attas, S. M. Naquib (1970). *The Mysticism of Hamzah Fansuri*. University Malay Press.
- Ali Hasymi (1995). *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Arnold, M. (1968). *The Preaching of Islam*. Lahore: Ashraf Press.
- Edwar Djamaris (1981). *Naskah Undang-undang dalam Sastra Lama*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI
- Hawash Abdullah (tanpa tahun). *Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-tokohnya di Nusantara*. Surabaya: al-Ikhlâs.
- Jumsari Jusuf (1979). *Tajussalatin*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Khalid Hussain (1966). *Tajus Salatin*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Nieuwenhujze, C. A. O. (1945). *Shamsu'l-Din van Pasai: Bijdrage tot de Kennis der Sumatransche Mystiek*. Disertasi Rijkuniversiteit Leiden.
- Taufik Abdullah (2002). "Pemikiran Islam di Nusantara Dalam Perpektif Sejarah". Makalah Diskusi Peluncuran Buku *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta, 5 September 2002.

PERAN BAHASA DAERAH SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAN BERWAWASAN KERAKYATAN DAN PENAWAR DAMPAK NEGATIF GLOBALISASI¹

Mashadi Said²
Farid Thalib³
A. Banri, E.⁴

1. Pendahuluan

Dampak tekanan arus globalisasi telah melanda bangsa-bangsa yang sedang berkembang dan telah menimbulkan perubahan yang semakin cepat dan luas dalam berbagai wilayah kehidupan, termasuk dalam bidang kebahasaan. Pertama, mari kita cermati pengaruh bahasa Inggris yang sedang mewarnai penggunaan bahasa Indonesia saat ini. sebagai contoh, dalam sebuah tabloid ibu kota yang terbit tanggal 15 Juni 2010, dijumpai bahasa Indonesia seperti ini:

“Mispersepsi dan misinterpretasi ini tentunya merugikan negara-negara Islam di dunia termasuk Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, di sisi lain nilai-nilai moderasi yang ada dan tumbuh berkembang di Indonesia belum sepenuhnya.”

Dalam kutipan di atas, ada 4 kata asing yang digunakan oleh penulis, yaitu *mispersepsi*, *misinterpretasi*, *mayoritas*, dan *moderasi*. Keempat kata tersebut merupakan kata serapan yang kemungkinan besar sangat sulit dipahami masyarakat awam sebagai sasaran utama pembangunan nasional. Kata *mispersepsi* adalah dua gabungan dua morfem: ‘mis-’ dan ‘persepsi.’ Kedua morfem itu berasal dari bahasa Inggris. Morfem bebas ‘persepsi’ telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti ‘kesan’, ‘tanggapan’, ‘pemahaman’, ‘pengertian’ (Endarmoko, 2007; Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008), tetapi morfem terikat ‘mis-’ adalah awalan yang berasal dari bahasa Inggris yang bermakna ‘salah’. Morfem ini belum resmi diserap ke dalam bahasa Indonesia. Begitu pula kata ‘misinterpretasi’ dan ‘moderasi’ sama sekali sangat asing di telinga masyarakat awam. Akibatnya, kelompok sasaran yang tidak mengetahui bahasa Inggris pasti akan kewalahan memahaminya. Pertanyaan kita sekarang adalah: Mengapa penulis tersebut tidak menggunakan kata bahasa Indonesia yang lebih mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, mari kita tilik sejenak foto di bawah ini:



Foto oleh A. Banri, Juni, 2010

Pada foto di atas, terpampang di depan mata kita “Jawa Timur Park”: **Taman belajar dan rekreasi**. Perhatikan kata “**park**” yang berasal dari bahasa Inggris yang sesungguhnya ada bahasa Indonesianya, yaitu ‘taman’. Perhatikan pula struktur bahasanya yang mengikuti struktur bahasa Inggris, yaitu hukum “M + D”. Pertanyaan kita sekarang adalah “mengapa pengambil kebijakan tidak menggunakan kosa kata dan struktur bahasa Indonesia?” Padahal kalau dibuat “**Taman belajar dan bersantai Jawa Timur**” akan lebih mudah dipahami dan akan lebih melekat di hati para pengunjung? Apakah pengambil kebijakan bangga memamerkan kekayaan budaya orang asing, ketimbang kekayaan budaya sendiri? Apakah pengambil kebijakan ingin menunjukkan bahwa mereka “menggloabal”, atau “menginternasional” sementara mereka menindas kebudayaan sendiri? Banyak pertanyaan yang bisa muncul dari situasi seperti ini. Namun, jawaban atas semua pertanyaan itu

¹ Disajikan pada Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara, tanggal 18-20 Juli 2010.

² Mashadi Said adalah dosen pada Program Magister Sastra, Universitas Gunadarma, Jakarta.

³ Farid Thalib adalah dosen pada Program Doktor Teknologi Informasi, Universitas Gunadarma, Jakarta.

⁴ A. Banri, E. adalah guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 109, Jakarta.

adalah sebagian masyarakat kita, khususnya para pengambil kebijakan dan agen perubahan, secara tidak sadar telah bertindak ceroboh yang justru melecehkan dan meremehkan budaya sendiri atau karena kurangnya kepercayaan diri bangsa kita?

Selanjutnya, banyak fakta yang menunjukkan ketidakpercayaan diri bangsa dalam bidang kebahasaan. Di Jakarta, misalnya, proyek bus lintas Jakarta diberi nama "transjakarta" untuk nama bisnya dan "busway" untuk nama jalurnya. Bahkan ada kecenderungan masyarakat Jakarta mengatakan "mari kita naik busway". Jadi, mereka bukannya naik dan menggunakan bis, tetapi naik ke "jalur bis" dan berkendara dengan "jalur bis" (Said & Thalib, 2008).

Singkatnya, keadaan ini merupakan pertanda bahwa sebagai bangsa yang berdaulat yang memiliki kekayaan bahasa nasional dan bahasa-bahasa daerah yang tersebar di seluruh nusantara mulai dibaikan dan identitas sebagai bangsa mulai terancam (Said & Thalib, 2007).

2. Pembangunan Berwawasan Kerakyatan

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun, tujuan pembangunan nasional yang telah didengungkan selama 65 tahun belum mampu mengangkat derajat masyarakat Indonesia secara merata. Kesenjangan sosial antara pemilik modal besar dengan sektor informal masih menganga demikian lebar. Ekonomi Pancasila yang diharapkan memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya sektor informal, ternyata gagal total. Pasar tradisional yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat umum mulai terusik dengan hadirnya pasar swalayan di mana-mana. Warung-warung tradisional yang dijalankan oleh pemilik modal kecil tersungkur dengan tidak terkendalinya pasar swalayan waralaba milik pemodal besar yang masuk ke gang-gang. Inilah yang menjadi kegusaran Berger. Berger dan Kellner (1973) serta Poole (1991) berargumentasi bahwa masyarakat modern dewasa ini sedang dilanda suatu penyakit moral dengan citranya yang menonjol, yaitu berupa rasionalitas ilmiah teknologis yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan. Bertindak rasional dalam pengertian yang dominan (bagi kapitalis) adalah mengejar keuntungan demi kepentingan diri sendiri.

Terlepas dari kebijakan ekonomi global yang lebih berpihak pada kaum kapitalis, peran para agen pembangunan di lapangan masih sangat menentukan. Konsep pembangunan sebagai kegiatan terencana dan sistematis yang dilakukan untuk mengubah bentuk kehidupan lama ke bentuk kehidupan baru yang lebih berkualitas harus dapat diwujudkan dengan baik. Untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas pada suatu masyarakat, model pembangunan mutakhir yang dapat digunakan adalah paradigma pembangunan "berbasis lokal" yang berwawasan kemasyarakatan. Paradigma ini mengandung makna bahwa program pembangunan yang dilaksanakan di wilayah tertentu hendaknya memanfaatkan potensi setempat yang tersedia. Potensi itu dapat berupa benda, misalnya, dalam bentuk sumber daya alam (tanah, hutan, mineral, laut, sungai, flora, dan fauna) atau berupa bukan benda, misalnya, sumber daya manusia dan kebudayaan (nilai, norma, kepercayaan, gagasan) masyarakat setempat (Mansoben, 2010).

Di samping potensi lokal yang disebutkan di atas, potensi lokal yang sering terlupakan adalah sarana komunikasi pembangunan, yaitu bahasa. Masyarakat, sebagai sasaran pembangunan sering tidak menangkap pesan-pesan pembangunan secara komprehensif karena mereka tidak memahami bahasa yang digunakan oleh para agen pembangunan (penyampai pesan). Ketidapahaman masyarakat awam atas pesan pembangunan bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, agen pembangunan yang terdidik di kota atau yang berasal dari latar belakang bahasa yang berbeda menggunakan bahasa Indonesia yang sama sekali asing di telinga para anggota masyarakat sasaran pembangunan. Bahasa Indonesia yang digunakan penuh dengan istilah asing yang menyebabkan pesan yang hendak disampaikan tidak tersampaikan dengan baik. Sebagai contoh, 'intensifikasi', 'ekstensifikasi', 'nutrisi', 'mayoritas', 'intrusi', 'drainase', 'destinasi', 'total', 'kontribusi', 'akuntabel', 'first line', 'second line', 'front liner', 'opini', 'way of thinking', 'way of life', 'kredibel', 'good governance' dan banyak lagi istilah yang benar-benar semakin menjauhkan masyarakat sasaran pembangunan dari pemahaman yang seharusnya. Kedua, agen pembangunan enggan mempelajari dan menggunakan bahasa daerah masyarakat sasaran. Dalam suatu kesempatan memberi kuliah di Universitas Indonesia, Ibu Mutia Hatta, mantan menteri Pemberdayaan Perempuan, bercerita seperti ini: *ada agen pembangunan di Irian Jaya mengalami kesulitan menyampaikan pesan kepada masyarakat karena mereka tidak menguasai bahasa lokal*¹. Ini menunjukkan bahwa bahasa daerah sebagai sarana untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan ke masyarakat harus mendapat tempat istimewa.

Dengan demikian, agar pesan pembangunan dapat terpahami dengan baik oleh masyarakat sasaran pembangunan di daerah, bahasa masyarakat sasaran harus digunakan oleh penganjur pembangunan. Penganjur pembangunan tidak boleh bangga dan puas dengan banyaknya istilah asing yang digunakannya, tetapi ia patut berbangga dan puas karena karena pesan pembangunan dapat terpahami dengan baik.

¹ Sumber informasi: A. Nur faizah, mahasiswi pada jurusan Antropologi Sosial, Universitas Indonesia.

3. Bahasa Daerah Sebagai Sarana Komunikasi Efektif

Dalam berbagai sumber dijelaskan bahwa komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yg terlibat dalam komunikasi. Dalam teori komunikasi, salah satu unsur penting dari 4 unsur—pesan, penyampai pesan, media, dan penerima pesan—yang terlibat dalam suatu komunikasi adalah media, yaitu bahasa yang digunakan. Artinya, bila pesan yang disampaikan diharapkan dipahami dengan baik oleh penerima pesan, maka syarat berikut haruslah menjadi perhatian.

- a. Sarana komunikasi haruslah menggunakan bahasa yang dipahami masyarakat sasaran.
- b. Bahasa yang digunakan haruslah jelas.
- c. Kosakata yang digunakan akrab dengan masyarakat sasaran.
- d. Tercapainya pengertian antara penyampai pesan dan masyarakat sasaran.

Bila kita bersepakat bahwa bahasa merupakan salah satu syarat berhasilgunanya komunikasi, maka agen pembangunan dituntut untuk menguasai bahasa yang digunakan oleh masyarakat sasaran. Bila masyarakat sasaran pembangunan hanya mampu memahami bahasa daerah, agen pembangunan harus bisa menggunakan bahasa yang digunakan masyarakat sasaran. Model komunikasi seperti ini telah lama digunakan oleh para penganjur agama yang bila hendak memasuki daerah tertentu, mereka berusaha mempelajari bahasa yang digunakan masyarakat bersangkutan dan berusaha melebur dengan budaya setempat. Model lain yang dapat digunakan adalah putra daerah—yang menguasai bahasa daerah—yang potensial dibina dan dididik untuk menjadi agen pembangunan yang nantinya akan memanfaatkan bahasa daerahnya secara efektif dalam komunikasi pembangunan.

4. Kearifan dalam Bahasa Daerah

Berbicara soal bahasa tidak hanya dapat dipandang sebagai sarana komunikasi, tetapi juga mengandung pesan moral, kebijaksanaan, pengetahuan setempat, atau kecerdasan setempat yang sering disebut sebagai kearifan lokal. Banyak kecerdasan setempat sulit diungkapkan dalam bahasa lain karena terkait dengan simbol-simbol lokal. Mari kita cermati syair Bugis yang mengandung pesan moral tentang pentingnya setiap individu untuk selalu mawas diri agar selalu memperbaiki niat dalam bertindak dan bersikap jujur dalam segala aspek kehidupan.

*/duai kuala sappo/
/unganna panasae/
/belo kanukue/
(dua kujadikan perisai
bunga angka
hiasan kuku)*

Maksud syair tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) “Dua hal yang kujadikan perisai”. Perisai adalah pelindung, pembatas, penjaga diri, pemawas diri. Jadi, ungkapan itu berarti “ada dua hal yang saya jadikan pemawas diri”.
- 2) “Bunga angka”, atau bahasa Bugis “*unganna panasae*” atau bunga “*panasai*” sinonim dengan kata “*lèmpu*.” Dalam bahasa Indonesia, “*Lèmpu*” berarti “jujur” atau “kejujuran”. Jadi, ungkapan itu bermakna “kejujuran”.
- 3) “*Belo kanuku* (hiasan kuku, pemerah kuku)”, tetapi dalam aksara Bugis:  dapat diucapkan dengan */paccing/* yang berarti bersih atau tidak ternoda. Jadi, “*belo kanuku*” bermakna ‘kesucian.’

Dengan demikian, syair di atas mengandung pesan bahwa ada dua unsur pokok yang menjadi prinsip dalam kehidupan, yaitu berhati bersih, berpikir, bersikap, dan bertindak jujur dalam mengarungi kehidupan. Kejujuran dan kesucian merupakan dua hal yang jika selalu hadir dalam kehidupan setiap orang maka kehidupan akan lebih baik (Said, 2007). Bertindak jujur disertai dengan niat baik merupakan unsur penting dalam kehidupan.

Pasal 32 UUD 1945 menyatakan: “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.” Ini berarti bahwa masalah kebudayaan nasional adalah masalah kenegaraan, sehingga perlu ditangani secara sungguh-sungguh oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia guna membentuk suatu kebudayaan nasional modern. Memajukan kebudayaan nasional tersebut adalah melestarikan kearifan lokal bangsa. Melestarikan kearifan lokal bangsa bukan merupakan usaha untuk menghantarkan kembali bangsa kita ke masa silam, melainkan untuk merevitalisasinya untuk dijadikan sebagai perisai dalam tantangan kehidupan global.

Menurut Said (2008), etos kebudayaan setiap etnik merupakan inti kebudayaan suku bangsa yang berkualitas tinggi, dinamis, dan menggambarkan identitas masyarakat pendukungnya yang menjadi modal dasar bagi pembangunan kebudayaan nasional Indonesia. Adapun syarat dalam penyeleksian etos kebudayaan etnik tersebut adalah: (1) mencerminkan kualitas, martabat, dan peradaban bangsa serta (2) komunikatif, yaitu dapat dihayati oleh pendukung kebudayaan etnik lainnya. Mari kita cermati syair Bugis yang mengandung kearifan Bugis yang tetap relevan dengan perkembangan zaman:

Rusa' taro arung, tēnrusa' taro adē'
Rusa' taro adē', tēnrusa' taro anang
Rusa' taro anang, tēnrusa' taro to maega

(Batal ketetapan Raja, tidak batal ketetapan adat (*adē'*)
Batal ketetapan Adat, tidak batal ketetapan Kaum
Batal ketetapan Kaum, tidak batal ketetapan orang banyak)

Dalam syair itu, tergambar dengan jelas bahwa kedudukan rakyat amat besar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Rakyat berarti segalanya bagi suatu negara. Penguasa hanyalah merupakan segelintir kecil manusia yang mendapat mandat untuk mengurus administrasi, keamanan, dan pelaksanaan pemerintahan negara. Selanjutnya, kepemimpinan dengan sistem itu disebut dalam kearifan Bugis sebagai kepemimpinan 'dari bawah' yang dalam ungkapan *Lontara*¹ disebut:

'Mangngēllē pasang massolompawo'
(Bagaikan air pasang yang tak terbendung).

Kearifan itu mengisyaratkan bahwa konsep kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan 'rakyat'. Rakyat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan bernegara. Cermati pula kearifan Jawa berikut ini yang menunjukkan betapa pentingnya setiap individu untuk berbuat yang terbaik, baik terhadap diri sendiri, keluarga, sesama manusia, maupun pada lingkungan:

Memayu hayuning pribadi;
Memayu hayuning kaluarga;
Memayu hayuning sasomo;
Memayu hayuning bawana.
(Berbuat baiklah terhadap diri sendiri;
Berbuat baiklah terhadap keluarga;
Berbuat baiklah terhadap sesama manusia;
Berbuat baiklah terhadap alam semesta)

Namun, dalam kehidupan sehari-hari, tampak dengan jelas di depan mata kita bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami keterasingan dari etos kebudayaannya sendiri. Ada kecenderungan bahwa mereka hanyut dan silau oleh kemajuan kehidupan material sebagai dampak negatif dunia kapitalis-monopoli yang menganut prinsip bahwa pelaku pembangunan adalah "aku", bukan "aku dan Anda", yaitu "Kita": "keuntungan adalah milikku sendiri." Berbagai kasus, khususnya penyelewengan keuangan negara, telah merebak dan menjadi biasa dalam kehidupan kenegaraan kita, sehingga bangsa kita, bukannya unggul dalam bidang prestasi yang membanggakan, tetapi unggul dalam "perampokan."² Keadaan yang sangat memprihatinkan ini seharusnya mengusik setiap individu bangsa Indonesia, mulai dari pemimpin tertinggi sampai pada masyarakat awam untuk kembali pada hakikat kehidupan bernegara, yaitu terciptanya masyarakat yang damai dan sejahtera yang mendapat rida Tuhan.

Peran kearifan lokal dalam menata kehidupan kenegaraan tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebagai contoh, Jepang dengan semangat "*On*", "*Giri*", dan "*Gimu*" yang dimotori oleh semangat etos Bushido telah berhasil mengangkat derajat, harkat, dan martabat bangsa Jepang yang disegani masyarakat dunia. Kekuatan yang mendorong bangsa Jepang untuk meraih kemajuan itu, bukannya merupakan adopsi dari etos budaya luar, melainkan merupakan etos budaya asli bangsa Jepang sendiri.

Kenyataan tersebut merupakan suatu bukti bahwa keunggulan dan ketinggian martabat bangsa tidaklah harus dilakukan dengan hanya meniru kebudayaan dari luar, melainkan dapat juga dilakukan dengan merevitalisasi kekayaan budaya sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui penggalian kembali kearifan lokal yang merupakan etos kebudayaan asli bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bisa jadi tingginya tingkat pengadopsian budaya asing yang melanda masyarakat Indonesia dewasa ini disebabkan oleh masih kurangnya informasi,

¹ *Lontara* adalah naskah klasik Bugis yang mengandung kearifan lokal.

² "Perampokan" adalah istilah untuk korupsi yang dipinjam dari M. Jusuf Kalla dalam menanggapi kasus bank Century.

pemahaman, dan penghayatan terhadap kecerdasan lokal budaya sendiri. Kebudayaan asli bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh persada nusantara, sesungguhnya masih sangat sesuai dengan perkembangan zaman (*up-to-date*) dan perlu diramu dalam diri bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia diharapkan tidak hanya mampu menampakkan ciri kepribadiannya yang khas, tetapi juga mampu menunjukkan keunggulan dan ketinggian harkat dan martabat bangsa. Menurut Magnis-Suseno (2003), tercapainya pembangunan dalam bidang kebudayaan nasional tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia Indonesia, jati diri, dan kepribadian bangsa yang kuat.

5. Simpulan dan Saran

Dampak negatif globalisasi telah menampakkan coraknya dalam berbagai wilayah kehidupan. Generasi muda Indonesia mulai terasing dari budayanya sendiri. Mereka mulai menyangsikan identitas dirinya sebagai bangsa. Kebanggaan sebagai bangsa yang berperadaban tampaknya menyusut setiap hari. Dunia global dengan media komunikasi yang demikian canggihnya telah memungkinkan individu dari belahan dunia lain mengomunikasikan pesannya dalam waktu yang sangat cepat. Ngugi Wa Thiong'o, seorang penulis asal Kenya, menengarai bahwa dunia Barat, khususnya Amerika Serikat sedang melemparkan bom budaya terhadap masyarakat dunia. Mereka telah berusaha menghancurkan tradisi dan bahasa pribumi sehingga bangsa-bangsa tersebut kebingungan dalam upaya mencari identitas budayanya sendiri. Selanjutnya, dia berpendapat bahwa budaya asing yang berkuasa di berbagai bangsa dulu dipaksakan melalui penjajahan dan kini dilakukan dengan modus operandi yang berbeda, yaitu atas nama globalisasi¹.

Bahasa daerah yang di dalamnya terdapat kearifan dan nilai yang masih relevan dengan kehidupan mengakar di masyarakat harus diangkat ke permukaan sehingga kekayaan peradaban bangsa yang tidak pernah lekang dalam percaturan globalisasi dapat direvitalisasi untuk menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan sekaligus sebagai penawar dampak negatif globalisasi.

Daftar Pustaka

- Astuti, S.I. (2010). Pendidikan holistik dan kontekstual dalam mengatasi krisis karakter di Indonesia. *Jurnal Kependidikan. Edisi Khusus, Tahun XXIX*, 41-58.
- Berger, P. L., Berger, B., dan Kellner, H. *Pikiran Kembara: Modernisasi dan Kesadaran Manusia*. Terjemahan oleh A. Widyartaya. (1992). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Endarmoko, E. (2008). *Tesaurus bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia
- Magnis-Suseno, F. (2003). *Etika Jawa: sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.
- Mansoben, J.R. (2010). Kebudayaan dan pembangunan dalam kerangka Otonomi khusus. *Simposium Nasional Papua: Menuju Pembangunan Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan*. Kerjasama FISIP Universitas Indonesia, Jakarta dan FISIP Universitas Cenderawasih, Jayapura di Jakarta pada tanggal 7 – 9 April 2010. Diakses pada tanggal 28 Juni 2010 dari <http://www.fisip.ui.ac.id/papua/images/oziodownload/mansoben.pdf>
- Poole, R. *Moralitas dan Modernitas: Di Bawah Bayang-bayang Nihilisme*. Terjemahan oleh F.B. Hardiman. (1993). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Said, M. (2007). *Konsep Jati Diri Manusia Bugis: Sebuah Telaah Falsafi tentang Kearifan Bugis*. Ciputat: Churia Press.
- Said, M. dan Thalib, F. (2007). Model pemerembangan bahasa-bahasa daerah Sulawesi-Selatan. *Prosiding Kongres internasional I bahasa-bahasa daerah Sulawesi Selatan, Makassar, 22-25 Juli 2007*.
- Said, M. dan Thalib, F. (2008). Model pemertahanan budaya nusantara dalam era globalisasi: melebur atau melebur? *Prosiding Seminar antara bangsa dialek-dialek Austronesia di Nusantara III*. Jabatan bahasa Melayu dan Linguistik, Fakultas Sastra dan Sains Sosial, Brunei Darussalam, 24-26 Januari 2008.

¹ <http://indonesian.tribe.ir/index.php/politik/63-sosial/4476-seni-budaya-dan-globalisasi-di-millennium-ketiga.html>

PENGEMBANGAN KECERDASAN DAN INTEGRITAS BERDASARKAN TEORI NEUROLOGY

Hanna¹

(Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)

Dalam pertemuan ini izinkan saya ingin mengajukan pertanyaan mendasar yakni: (1) apakah seorang guru itu harus profesional?; (2) apakah Anda sudah professional?; (3) apa perlunya guru professional?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengetengahkan beberapa aturan sebagai pijakan hukum kita yang berhubungan dengan itu. Pertama, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa standar nasional pendidikan yang terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengisyaratkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa profesionalisme dalam pendidikan perlu dimaknai antara lain bahwa guru haruslah orang yang memiliki naluri sebagai pendidik, mengerti dan memahami peserta didik, harus menguasai secara mendalam, minimal satu bidang keilmuan, harus memiliki sikap integritas profesional.

Dalam kehidupan sosial kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang dalam hal ini berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Artinya sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) guru berperan antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat kompetensi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut.

- (1) Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, sekurang-kurangnya meliputi (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (b) pemahaman terhadap peserta didik, (c) pengembangan kurikulum/silabus, (d) perancangan pembelajaran, (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (f) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (g) evaluasi proses dan hasil belajar, dan (h) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- (2) Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup (a) berakhlak mulia, (b) arif dan bijaksana, (c) mantap, (d) berwibawa, (e) stabil, (f) dewasa, (g) jujur, (h) mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, (i) secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan (j) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
- (3) Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat, sekurang-kurangnya meliputi (a) berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat, (b) menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, (c) bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta didik, (d) bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku, dan (e) menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan.
- (4) Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan (a) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampunya, dan (b) konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampu.

Keempat kompetensi tersebut bersifat holistik dan integratif dalam kinerja guru. Oleh karena itu, secara utuh sosok kompetensi guru meliputi (a) pengenalan peserta didik secara mendalam; (b) penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu (*diciplinary content*) maupun bahan ajar dalam kurikulum sekolah (*pedagogical content*); (c)

¹ Guru Besar Psikolinguistik pada FKIP Unhalu, Kepala Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara

penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak lanjut untuk perbaikan dan pengayaan; dan (d) pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara berkelanjutan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 menyatakan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dan (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban, (a) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (b) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (c) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran, (d) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan, (e) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Saya pernah membaca Surat Kabar Harian Kompas yang memberikan data kelayakan mengajar bagi guru-guru di Indonesia yang dikutip dari data Depdiknas (Kemdiknas). Pada data tersebut ditunjukkan bahwa kelayakan guru tahun 2008: (1) TK : 88 %, (2) SD 77.85%, (3) SMP 78.33% (4) SMA 15%, dan (5) 23 09% (Kompas, 20/11/2009). Salah satu indikator dari kondisi ini karena kemampuan guru belum mampu mengoptimalkan kompetensi siswa.

Kompetensi (*competency*) oleh Suherman (2009) adalah kata baru dalam Bahasa Indonesia yang artinya setara dengan kemampuan atau pangabisa dalam Bahasa Sunda. Siswa yang telah memiliki kompetensi mengandung arti bahwa siswa telah memahami, memaknai, dan memanfaatkan materi pelajaran yang telah dipelajarinya. Dengan perkataan lain, ia telah bisa melakukan (psikomotorik) sesuatu berdasarkan ilmu yang telah dimilikinya, yang pada tahap selanjutnya menjadi kecakapan hidup (*life skill*). Inilah hakikat pembelajaran, yaitu membekali siswa untuk bisa hidup mandiri kelak setelah ia dewasa tanpa tergantung pada orang lain, karena ia telah memiliki kompetensi dan kecakapan hidup. Dengan demikian, belajar tidak cukup hanya sampai mengetahui dan memahami.

Kompetensi siswa yang harus dimiliki selama proses dan sesudah pembelajaran adalah kemampuan kognitif (pemahaman, penalaran, aplikasi, analisis, observasi, identifikasi, investigasi, eksplorasi, koneksi, komunikasi, inkuiri, hipotesis, konjektur, generalisasi, kreativitas, dan pemecahan masalah); kemampuan afektif (pengendalian diri yang mencakup kesadaran diri, pengelolaan suasana hati, pengendalian impuls, motivasi aktivitas positif, dan empati); dan kemampuan psikomotorik (sosialisasi dan kepribadian yang mencakup kemampuan argumentasi, presentasi, dan perilaku). Istilah psikologi kontemporer, kompetensi / kecakapan yang berkaitan dengan kemampuan profesional (akademik terutama kognitif) disebut dengan *hard skill*, yang berkontribusi 40% terhadap kesuksesan individu. Sedangkan kompetensi lainnya yang berkenaan dengan afektif dan psikomotorik berkaitan dengan kemampuan kepribadian, sosialisasi, dan pengendalian diri disebut dengan *soft skill*, yang berkontribusi 60% terhadap kesuksesan individu. Ini menjadi sebuah informasi yang sangat penting dan sekaligus peringatan bagi kita semua.

Otak bagian kanan (emosional) menghasilkan pola pikir kreatif, imajinatif, dan abstraktif. Sebaliknya otak bagian kiri (kecerdasan) menghasilkan pola pikir logis, analitis, dan sistematis. Otak kanan dan otak kiri keduanya dihubungkan oleh segumpal serabut yang disebut *corpus collasum* (Haliday dan Richard Leviton, 1995:246-247). Buzan (dalam Bachtiar, 2009) mengatakan bahwa kemampuan seorang anak dalam memproses informasi berupa bahasa adalah 600-800 kata per menit melalui pengamatan, membaca, dan mendengar.

Sebenarnya jika kita berpikir secara logika, teori Buzan ini akan gugur dengan sendirinya. Oleh karena hal itu tidak mungkin dilakukan oleh guru jika dilihat dari kompetensi siswa. Namun, jika kita coba memikirkan secara pragmatik dalam proses belajar mengajar, teori ini bisa kita terima. Hal ini dapat kita lihat pada proses pembelajaran dengan pendekatan kualitatif, artinya proses belajar mengajar itu mengutamakan pemahaman dan argumentasi dan proses pengembangan kecerdasan anak. Hanna (2010) mengutip pendapat dan kesepakatan beberapa ahli psikologi bahwa anak kecil pada dasarnya memiliki kreativitas alamiah. Ini nyata dari perilakunya

seperti, (1) senang menjajaki lingkungan, (2) banyaknya bertanya, (3) mempunyai rasa ingin tahu yang kuat, (4) suka bereksperimen, (5) terbuka untuk rangsangan baru, (6) berminat untuk melakukan bermacam hal, (7) ingin mendapat pengalaman baru, dan (8) tidak pernah merasa bosan.

Disamping itu, anak yang kreatif menunjukkan kelancaran, keluwesan, dan originalitas dalam ungkapan dan gagasannya, dalam pemikiran maupun perilakunya. Ia mempunyai daya imajinasi yang kuat. Dalam kamus Oxford dikemukakan bahwa (1) *quality of being honest and having strong moral principles*, (2) *the state of being whole and undivided*, dan (3) *the condition of being unified or sound in construction*. Sedangkan dalam perkataan "integritis" berasal dari istilah Latin "integritas" berarti bahwa tidak terjejas (*unaffected*), kukuh (*intact*), benar (*upright*), dan boleh diharapkan (*reliable*).

Sedangkan dalam konsep dalam pendidikan konsep integritas dimaknai sebagai usaha untuk memfasilitasi anak didik mencapai potensi pada dirinya, intelek, rohani, emosi dan jasmani, atau menanamkan nilai-nilai kecerdasan spritual, intelektual, emosional, dan kecerdasan sosial berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Orang tua dan guru diharapkan membawa anak dan muridnya ke pribadi yang positif. Optimis, mengendalikan keadaan, kebebasan memilih, punya alternatif, partisipatif dalam untain berbangsa dan bernegara akan mengantar mereka berjiwa integritas yang memiliki nilai-nilai kejuangan, berilmu, berahlak dan berbudi pekerti, jujur, sopan, dan beretika. Biarkan mereka belajar efektif mengenal lingkungan untuk menjadi satu kesatuan yang integritas dalam satu bingkai keilmuan, kenegaraan yang bermakna melalui bahasa. Dalam agama Islam integritas berhubungan dengan sifat-sifat benar, amanah, setia, teguh, pribadi teguh, peribadi mulia, dan mukmin yang bertakwa. Jika semua ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh guru dan orang tua, integritas itu akan terwujud sebagai insan yang cerdas dan memiliki integritas yang tinggi.

Simpulan

Kompetensi guru yang dilaksanakan secara profesional berdasarkan etika profesi akan berpengaruh secara signifikan terhadap proses pembelajaran kreatif yang berimplikasi pada peningkatan potensi individu siswa dengan baik, yakni membentuk kemampuan berpikir kritis dan kreatif sehingga mampu memproses kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik.

Daftar Pustaka

- Leviton, Richard. 1995. *The location on the shoulder of the body*
Malingi, Bahtiar. ... Mempersiapkan Kompetensi Menuju Serifikasi Guru.
Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Kompas: 20/11/2009
(<http://kreatifproduktif-blog.blogspot.com/>)
(Diktat Dirjen pendidikan tinggi Depdiknas)
(<http://kreatifproduktif-blog.blogspot.com/>)

BAHASA-BAHASA DAERAH SULAWESI TENGGARA DALAM KAITANNYA DENGAN GENEALOGI

Masao Yamaguchi
(Universitas Setsunan, Osaka, Jepang)

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pulau Sulawesi terdiri atas enam provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Luasnya Pulau Sulawesi sekitar 189.216km², dan ditambah pulau-pulau sekitarnya yang termasuk wilayah administrasi provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi, seluas 227.654km². Dalam pulau seluas itu terdapat 114 buah bahasa [ethnologue, 2010].

Di seluruh dunia terdapat sebanyak hampir 7.000 buah bahasa, dan di Republik Indonesia terdapat 722 buah bahasa [ethnologue, 2010]. Artinya, di Indonesia terdapat lebih 10% bahasa dari seluruh dunia. Luasnya Pulau Sulawesi dan sekitarnya kira-kira 10% dari luasnya Indonesia. Di Pulau Sulawesi yang luasnya 10% dari keseluruhan Indonesia, terdapat sekitar 16% bahasa di Indonesia. Pulau Sulawesi (termasuk pulau-pulau sekitarnya) dapat dikatakan kaya akan bahasa daerah.

B. Masalah

Dari segi sejarah penelitian bahasa daerah di Pulau Sulawesi dan pulau-pulau sekitarnya, dapat dikatakan tidak begitu banyak penelitian bahasa daerah di Sulawesi Tenggara, dibandingkan dengan daerah lain seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah (antara lain subkelompok bahasa Kaili-Pamona), dan Sulawesi Utara. Kecuali beberapa bahasa daerah, seperti bahasa Muna, Tolaki, dan Wolio.

Dapat dikatakan juga, penelitian bahasa yang terdapat di sekitar perbatasan administrasi, biasanya kurang atau ditinggalkan penelitiannya. Situasi seperti itu terjadi juga di Sulawesi. Penulis sendiri pernah merasa begitu juga sewaktu meninjau keadaan penelitian di wilayah perbatasan Sulawesi Selatan (pada waktu itu, termasuk juga Sulawesi Barat sekarang) dengan Sulawesi Tengah. Di daerah tersebut terdapat beberapa bahasa daerah yang tergolong di bawah subkelompok bahasa Kaili dan kelompok bahasa Sulawesi Selatan. Seperti bahasa Baras, Sarudu, dan Topoiyo tergolong ke dalam subkelompok bahasa Kaili. Bahasa Panasuan, Seko Padang, Seko Tengah, dan Tangkou (Budong-budong) tergolong ke dalam kelompok bahasa Sulawesi Selatan. Dan bahasa yang seperti itu relatif sedikit penuturnya, yaitu bahasa minoritas. Dalam zaman pesat perkembangan ekonomi dan transportasi, bahasa minoritas menghadapi keadaan diancam punah. Keadaan seperti itu, terdapat juga pada bahasa daerah Sulawesi Tenggara. Misalnya, pecahan dari subkelompok bahasa Muna-Buton dan kelompok bahasa Wotu-Wolio, terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan seperti bahasa Bonerate (9.500 orang), Karao (500 orang), dan Laiyolo (800 orang).

C. Ruang Lingkup

Dalam makalah ini dibahas penelitian yang berhubungan dengan bahasa daerah di Sulawesi Tenggara dalam kaitannya dengan genealogi. Akan tetapi, disinggung juga penelitian nonbahasa yang ada perhubungan dengan daerah Sulawesi Tenggara dan disinggung juga yang ada perhubungan dengan bahasa daerah di sekitar Sulawesi Tenggara.

D. Tujuan

Setelah ditinjau penelitian pelopor di Sulawesi berhubungan dengan baik bahasa maupun nonbahasa, ditinjau penelitian bahasa daerah selanjutnya di Sulawesi Tenggara. Dan diadakan juga perbandingan bahasa dari segi linguistik komparatif historis supaya mendapat gagasan tentang perhubungan genealogi bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Tenggara.

II PENELITI-PENELITI SULAWESI SELAMA INI

A. Penelitian Periode Sebelum Merdeka

Penelitian bahasa secara akademis mengenai bahasa di Sulawesi dimulai oleh B.F. Matthes. Matthes meneliti bahasa Makassar dan Bugis. Di bawah ini, diterangkan penelitian-penelitian berkaitan dengan Sulawesi baik di bidang bahasa maupun di bidang nonbahasa sebelum Indonesia merdeka.

I. Penelitian Bahasa

a. Peta Bahasa dan Kumpulan Kosakata oleh K.F. Holle (1829-1896)

Menurut peta bahasa Holle (1894), Sulawesi Tenggara terdapat Toradjasche dialecten (dialek-dialek Toraja), Toboengkoesch (bahasa Bungku), Laiwisch of Tokeasch (dialek Laiwui bahasa Tolaki atau bahasa Tokia), dan Boetonsch dialect (dialek bahasa Buton). Dalam peta Holle, wilayah tersebar dialek-dialek Toraja terlalu luas dan tidak sesuai dengan penggolongan bahasa sekarang.

Kumpulan kosakata oleh Holle, disusun untuk diterbitkan oleh W.D.L. Stokhof. Yang berkaitan dengan Sulawesi adalah *Holle Lists: Vocabularies in Languages of Indonesia Vol. 4* (No. 17, 1982), Vol. 7/1 (No. 24, 1983), Vol. 7/2 (No. 23, 1983), Vol. 7/3 (No. 25, 1984), Vol. 7/4 (No. 66, 1985), dan Vol.11 (No. 39, 1987).

Dalam Vol. 7/4 termuat bahasa yang terdapat di Sulawesi Tenggara seperti: Kendari; Toelaki, Kendari; Mori; Bungku; Mekongga; Wawoni; The Island of Buton; Wolio (The Island of) Buton; Muna.

b. Penelitian N. Adriani (1865-1926) dan A.C. Kruijt (1869-1949)

Dalam karya Adriani dan Kruijt (1912-1914), terdapat peta bahasa pada bagian akhir jilid pertama. Yang ditandai dengan huruf kapital E adalah *Oost-Toradjasche Groep* (kelompok bahasa Kaili), G adalah *Boengkoesch-Morisische Groep* (kelompok bahasa Bungku-Mori), dan H adalah *Moenasch-Boetonsche Groep* (subkelompok bahasa Muna-Buton). Setelah huruf kapital, ditambah angka dan huruf kecil untuk menentukan bahasa. Misalnya G1f, menurut keterangannya dialek *To Moronene* dari *Boengkoesch*, H1 *Moenasch*, H2 *Boetonsch*, dan H3 *Wandjisch* (dialek dari bahasa Tukang Besi Utara).

c. Peta Bahasa dan Penelitain oleh S.J. Esser (1900-1944)

Bahasa daerah di Sulawesi Selatan dapat digolongkan dalam beberapa kelompok bahasa. Menurut Esser, di Pulau Sulawesi terdapat sembilan kelompok bahasa [Esser, 1938: 9, 9b].

- V *Philippijnsche groep*
- VI *Gorontalosche groep*
- VII *Tominische groep*
- VIII *Toradjasche groep*
- IX *Loinangsche groep*
- IXa *Banggaische groep*
- X *Boengkoesch-Lakische groep*
- XI *Zuid-Celebes-Talen*
- XII *Moenasch-Boetongsche groep*

Di antara kelompok bahasa tersebut di atas, yang tersebar di Sulawesi Tenggara adalah X *Boengkoesch-Lakische groep* dan XII *Moenasch-Boetongsche groep*.

2. Penelitian Nonbahasa

Selain peneliti bahasa (seperti penterjemah injil dan pegawai bahasa), ada lagi peneliti bidang nonbahasa yang meneliti Sulawesi.

a. A.R. Wallace (1823-1913)

Dalam karya Wallace, *The Malay Archipelago* (1869), terlampir daftar kosakata sejumlah sembilan buah dari 59 bahasa nusantara. Ada juga daftar kosakata sejumlah 107 buah dari 33 bahasa nusantara. Di antaranya terdapat bahasa *Bouton* (Buton) [Wallace, 1989: 468-493].

b. P. Sarasin (1856-1929) dan F. Sarasin (1859-1942)

Kakak beradik P. Sarasin dan F. Sarasin, menjelajahi Pulau Sulawesi. Wilayah penjelajahannya Sulawesi Utara-Grontalo, Buol-Malisa (di Provinsi Gorontalo sekarang), Palu-Palopo, Poso-Teluk Bone, daerah Enrekang-Duri, sekitar Gowa, dan Kolaka-Kendari.

c. W. Kaudern (1881-1942)

Seorang bangsa Swedia, Kaudern yang terkenal dengan penelitian mengenai pemukiman di Sulawesi Tengah, pernah datang juga di Baubau pada tanggal tiga Maret 1920, dan berangkat pada tanggal delapan Juli 1920 [Kaudern, 1925: 5-6]. Selama di Baubau, mengunjungi kraton dekat Baubau.

B. Periode Sesudah Merdeka

Setelah Indonesia merdeka, bahasa daerah di Sulawesi diteliti baik oleh peneliti Indonesia maupun oleh peneliti asing. Perkembangan penelitian oleh peneliti Indonesia sejajar dengan usaha cabang instansi penelitian bahasa (seperti balai bahasa atau kantor bahasa sekarang) dan kegiatan perguruan tinggi setempat.

Di bawah ini diterangkan usaha-usaha penelitian bahasa daerah di Sulawesi Tenggara berkaitan dengan genealogi dan bidang lain yang berkaitan dengan kebahasaan.

1. Peta Bahasa Salzner

Penggolongan bahasa di Sulawesi Tenggara sebagai berikut [Salzner, 1960b: 14-15]:

II *Indonesisch*

A *Westindonesisch*

a) *Bungku-Mori-Gr.* = *Bungku-Laki-Gr.*:

- 1) *Bungku* = *Nahina*
- 2) *Mori* = *Aikoa*:
- 3) *Laki* = *Lalaki* = *Tambuoki*:
- 4) *Mekongka* = *Norio*:

b) *S-Celebes-Gr.*:

c) *Muna-Butung-Gr.*:

- 1) *Muna* = *Mina*
- 2) *Butung*
- 3) *Tukangbesi-Bonerate-Gr.*:
- 4) *Lajolo* = *Da'ang*

2. Peta Bahasa Sneddon

Peta bahasa yang dibuat oleh J.S. Sneddon dalam Wurm and Hattori, bahasa di Sulawesi Tenggara dan sekitarnya sebagai berikut [Sneddon, 1981]:

Central Super Group

West-Central G

Kaili-Pamona (Toraja) SG (lima bahasa)

Bungku-Mori SG (lima bahasa)

Banggai G

-----batas *Super Group*-----

South Sulawesi G (delapan bahasa)

Muna-Buton G (sembilan bahasa)

Unclassified

Bahasa di Sulawesi Tenggara, menurut Sneddon, dapat dibagi *Kairi-Pamona SG*, *Muna-Buton G*, *South Sulawesi G* (bahasa Bugis), dan *Sama G* (bahasa Bajau).

3. Penelitian SIL

Di bawah ini, berdasarkan penggolongan SIL, diterangkan penyebaran bahasa daerah di Sulawesi Tenggara.

a. Kelompok Bahasa Sulawesi Selatan (*South Sulawesi*)

Bahasa Bugis yang tergolong ke dalam kelompok bahasa Sulawesi Selatan terdapat di beberapa daerah pantai di Sulawesi Tenggara.

Bugis	Tamanic	Embaloh Taman	Kalimantan Kalimantan Sulsel & Selteng, & Sultra, dll.
Lemolang	Bugis Campalagian Lemolang		Sulsel Sulsel

Selain itu, di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan terdapat bahasa Lemolang yang tergolong ke dalam kelompok bahasa Sulawesi Selatan. Akan tetapi, menurut penulis, bahasa Lemolang

Wotu-Wolio	Kalao	Kalao	Sulsel
		Laiyolo	Sulsel
	Wolio-Kamaru	Kamaru	Sulteng
		Wolio	Sulteng
	Wotu		Sulsel

Bahasa Kalao dan Liyolo terdapat di Pulau Selayar dan kepulauan sebelah selatan dan tenggara.

Bahasa Wotu yang penuturnya sekitar 5.000 orang, terdapat di Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai pulau bahasa (*language island*) yang dikelilingi oleh dialek Luwu bahasa Bugis.

4. Penelitian Bahasa Masing-masing

Di sini, dicatat penerbitan-penerbitan yang berkaitan dengan bahasa di Sulawesi Tenggara dan bahasa di sekitarnya yang berkaitan dengan bahasa di Sulawesi Tenggara, yang penulis saksikan langsung selama ini (dalam subbab ini dicantumkan berdasarkan tahun terbit).

a. Subkelompok Bahasa Bungku-Tolaki

Bungku

Kadjia, D., dkk. 1998.

Moronene

Muthalib, A., dkk. 1991.; Karhunen, M. [1991].

Tolaki

Pattiasina, J.F., dkk. 1983.; Muthalib, A. 1985.; Muthalib, A., dkk. 1985.; Muthalib, A. 1990.; Mahmud, dkk. 1995.; Sailan, Z., dkk. 1995.; Mulya, A.K., dkk. 2004.

b. Subkelompok Bahasa Muna-Buton

Ciacia

Mustafa, A., dkk. 1991.

Muna

Yatim, N. *Bahasa Wuna*. 1981.; Mattalitti, M.A., dkk. 1985.; Sande, J.S., dkk. 1986.; Berg, R.v.d. 1989.; Mulya, A.K., dkk. 1990.; Atakasi, L. 1991.; Mokui, L., L.K. Batoa. 1991.; Mursalin, S., dkk. 1992.; Yatim, N., dkk. 1992.; Mulya, A.K., dkk. 1994.; Gazali, M., dkk. 1995.; Berg, R.v.d. 1996.

Tukang Besi South

Manyambeang, A.K., dkk. 1984/1985.; Usmar, A., dkk. 1991.

c. Kelompok Bahasa Wotu-Wolio

Wolio

Anceaux, J.C. 1988. (cetakan pertama pada tahun 1952); Abas, H., dkk. 1983.; Abas, H., Shaidy, L. Jaya. 1985.; Mattalitti, M.A., dkk. 1985.; Gani, H.A., dkk. 1986.; Anceaux, J.C. 1987.; Arief, A., M.N. Haddade, A.K. Mulya. 1992.; Muthalib, A., Z. Sailan, A.K. Mulya. 1993.; Manuputty, D.G., dkk. 1998.

Wotu

Salombe, C., dkk. 1987.; Sande, J.S., dkk. 1991.; Dola, A. 2003.

d. Yang Berkaitan dengan Beberapa Bahasa

Di bawah ini diterangkan karya-karya yang melingkupi beberapa bahasa. Yang dicatat adalah bahasa yang berkaitan dengan makalah ini.

Barr, D.F., S.G. Barr., C. Salombe. [1979].

Bungku; Mori Bawah; Menui (dialek bahasa Wawonii); Mori Atas

Wumbu, I.B., dkk. 1986.

Bungku; Mori; Padoe

Grimes, C.E. and Grimes, B.D. 1987.

Padoe; Bonerate; Kalaotoa (bahasa Kalao); Laiyolo; Wotu

Kaseng, S., dkk. 1987.

Kulisusu; Wawonii; Moronene; Kabaena (dialek dari Moronene); Tolaki; Ciacia; Masiri (dialek bahasa Ciacia); Wabula (dialek bahasa Ciacia); Kambowa (dialek Bahasa Kioko); Kakenauwe (bahasa Pancana?); Lawele (dialek bahasa Pancana?); Busoa; Laompo (bahasa Busoa); Muna; Katobengke (dialek bahasa Muna); Mawasangka (dialek bahasa Muna); Siompu (dialek bahasa Muna); Wakatobi (North Tukang Besi); Kamaru; Wolio.

Liebner, H. 1990.

Ciacia; Binongko (bahasa North Tukang Besi atau dialek bahasa Ciacia di Binongko?); Muna; Siompu (dialek bahasa Muna); Wanci (dialek bahasa North Tukang Besi); Tomea (dialek bahasa South Tukang Besi); Wolio

Lauder, M.RMT., dkk. 2000a.

Soroako (dialek bahasa Mori Bawah); Padoe; Bonerate

Lauder, M.RMT., dkk. 2000b.

Bungku; Torete (dialek bahasa Bungku); Menui (dialek bahasa Wawonii)

Lauder, M.RMT., dkk. 2000c.

Kulisusu; Wowonii (Wawonii); Morunene (di Wumbu Bangka. Bahasa Moronene?); Morunene; Tolaki (di Wanggudu); Tolaki (di Laeya); Tolaki dialek Mekongga (di Desa Patikala); Tolaki dialek Mekongga (di Desa Sanggona); Kumbewaha; Ciacia (di Desa Gonda Baru); Ciacia (di Desa Masiri); Ciacia (di Desa Lapandewa); Kambowa (dialek bahasa Kioko); Muna; Siompa (dialek bahasa Muna); Wasilomata di Wakambangura (Mawasangka?); Todanga di Todanga (bahasa Pancana?); Kaledupa (dialek bahasa North Tukang Besi); Pulo (Kapota) di Kapota (bahasa North Tukang Besi?); Binongko (bahasa North Tukang Besi di Biongko?); Tomia (dialek bahasa South Tukang Besi)

III TEORI LINGUISTIK KOMPARATIF HISTORIS

A. Linguistik Komparatif Historis dan Genealogi

Seorang dokter Jerman yang terkenal dan penting sekali karyanya dalam bidang linguistik komparatif histories untuk keluarga bahasa Austronesia adalah Otto Dempwolff (1870-1938). Dempwolff pernah bekerja sebagai dokter militer di Afrika Timur dan Nugini yang dijajah oleh Jerman pada waktu itu. Setelah pulang kembali di Jerman, menjadi dosen (kemudian menjadi guru besar) Universitas Hamburg di bawah bimbingan Carl Meinhof (1857-1944) yang berhasil menggunakan teori linguistik komparatif histories untuk keluarga bahasa Bantu.

Karya Dempwolff yang merekonstruksi proto bahasa Austronesia terdiri atas tiga jilid (1934, 1937, 1938). Jilid ketiganya berupa kamus proto bahasa Austronesia - Jerman beserta register bahasa Jerman - proto bahasa Austronesia. Dan di sini harus diketahui bahwa Dempwolff membagi keluarga bahasa Austronesia menjadi tiga rumpun bahasa, yaitu rumpun bahasa Indonesia, rumpun bahasa Melanesia, dan rumpun bahasa Polinesia.

Jumlah kata entri proto bahasa Austronesia yang direkonstruksi 2.212 buah kata (termasuk kata pinjaman yang sengaja direkonstruksi). Di antaranya direkonstruksi berdasarkan hanya kata yang terdapat dalam rumpun bahasa Indonesia 1.403 buah. Sedangkan yang direkonstruksi berdasarkan kata yang terdapat ketiga rumpun bahasa 283. Masing-masing 63% dan 13%. Artinya rumpun bahasa Indonesia bagaimana dipentingkan oleh Dempwolff untuk merekonstruksi proto bahasa Austronesia.

Setelah Dempwolff, linguistik komparatif historis dikembangkan oleh sejumlah pakar seperti R. Brandstetter (1860-1942), O.C. Dahl (1903-1995), I. Dyen (1913-2008), dan R.A. Blust.

Diterangkan penelitian linguistik komparatif historis untuk daerah tertentu di Pulau Sulawesi dulu.

Mengenai Sulawesi Utara, terdapat karya J.N. Sneddon yang merekonstruksi Proto bahasa Minahasa [Sneddon, 1978]. Mengenai Gorontalo, terdapat karya H.T. Usup yang merekonstruksi proto bahasa Gorontalo-Mongondow [1986]. Dan terdapat juga karya R.F. Mills yang merekonstruksi proto bahasa Sulawesi Selatan [1975].

Sepengetahuan penulis, belum ada penelitian rekonstruksi proto bahasa madya (proto bahasa tengahan) yang berkaitan dengan bahasa daerah di Sulawesi Tenggara.

Dalam bab berikut, penulis mencoba membandingkan bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Tenggara dan bahasa yang berkaitan secara genealogis yang terdapat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

IV PERBANDINGAN

A. Beberapa Ciri Khas Bahasa Daerah di Sulawesi Tenggara

Sebelum membandingkan bahasa-bahasa Sulawesi Tenggara, diperiksa dulu beberapa ciri khas bahasa daerah di Sulawesi Tenggara dan sekitarnya.

1. Suku Kata Terakhir yang Terbuka

Pada dasarnya dapat dianggap bahwa bahasa daerah di Sulawesi Tenggara, posisi akhir kata dasar terbuka. Misalnya, bahasa Moronene [Muthalib, 1991: 15], Ciacia [Mustafa, 1991: 21-22], Muna [Sande, 1986: 15-16], dan Wolio [Salombe, 1987: 14-23].

2. N + K pada Posisi Awal Kata Dasar

Pada awal kata dasar terdapat nasal (titik artikulasinya sama dengan konsonan sesudahnya) + konsonan (titik artikulasinya sama dengan nasal sebelumnya). Misalnya sebagai berikut:

Bungku-Tolaki	
Padoe	<i>mbio</i> 'apa'
Tolaki	<i>mbule</i> 'pulang', <i>ndowu</i> 'tebu', <i>ngguro</i> 'periuk'
Muna-Buton	
Ciacia	<i>mbule</i> 'pulang', <i>ndole</i> 'baring', <i>ntoaru</i> 'banyak', <i>ngkoo</i> 'jongkok'
Muna	<i>mbadha</i> 'enak', <i>ndawu</i> 'jatuh', <i>ngkora</i> 'duduk'
Wotu-Wolio	
Wolio	<i>mbuta</i> 'kucing', <i>ndalo</i> 'jalan', <i>ntalea</i> 'terang', <i>ngkowo</i> 'cekung'

Gejala N + K pada awal kata dasar, terdapat dalam anggota bahasa dari ketiga (sub)kelompok bahasa.

3. Keberadaan Vokal Panjang

Dalam bahasa daerah di Sulawesi Tenggara terdapat vokal panjang. Misalnya contoh berikut:

Bungku-Tolaki	
Tolaki	<i>aahua</i> 'sumur', <i>meena</i> 'sangat', <i>kiikii</i> 'lihat', <i>aandoolo</i> 'hutan', <i>tuu</i> 'tusuk'
Muna-Buton	
Muna	<i>paa</i> 'empat', <i>nee</i> 'hidung', <i>miina</i> 'tidak', <i>koolu</i> 'mendung', <i>utuutu</i> 'keluh'
Bonerate	<i>maara</i> 'busuk', <i>keene</i> 'dengan', <i>daliika</i> 'abu', <i>amoota</i> 'benih', <i>ruulu</i> 'alir'
Wotu-Wolio	
Wolio	<i>baa</i> 'kepala', <i>booboo</i> 'apak, bau', <i>buu</i> 'bunyi kentut/tenguk'

Mengenai bahasa Wolio, tidak begitu banyak contoh vokal panjang dan sebagian besarnya *aa*. Dan ada kemungkinan deretan vokal, bukan vokal panjang. Vokal *aa* dalam bahasa Wolio, berkecenderungan muncul pada kata pinjaman dari bahasa Arab.

aaheera 'akhirat', *ibhaarati* 'ibarat', *iisa* 'Nabi Isa'.

4. Konsonan *bh*, *dh*, dan *gh*

Dalam bahasa Muna terdapat *bh*, *dh*, dan *gh*. Menurut Berg sebagai berikut [Berg, 1989: 16-21]:

<i>b</i> bilabial plosif bersuara	<i>bh</i> bilabial implosif bersuara
<i>d</i> apiko-alveolar bersuara	<i>dh</i> lamino-dental bersuara
<i>g</i> dorso-velar plosif bersuara	<i>gh</i> dorso-uvular frikatif bersuara

Menurut keterangan Berg, perbedaannya berdasarkan titik artikulasi.

Dalam bahasa Wolio terdapat *bh* dan *dh*. Menurut Anceaux sebagai berikut [Anceaux, 1988: 4-6]:

<i>b</i> bilabial hambat bersuara ketegangan otot lemah	<i>bh</i> bilabial hambat bersuara dengan ketegangan otot keras
<i>d</i> alveolar hambat bersuara ketegangan otot lemah	<i>dh</i> alveolar hambat bersuara dengan ketegangan otot keras

Menurut keterangan Anceaux, perbedaannya berdasarkan ketegangan otot.

5. Tentang /c/ dan /j/

Apakah fonem /c/ dan /j/ terdapat atau tidak, memperlihatkan perbedaan yang nyata tergantung pada kelompok bahasa. Menurut penelitian penulis, perbedaannya sebagai berikut [Yamaguchi, 2006: 105-106]:

	/c/	/j/
Sulawesi Selatan		
Subkelompok Utara		
Tae'	c	j
Toala'	c	j
Bukan Subkelompok Utara		
Bugis	c	j
dialek Luwu	c	j
Kaili-Pamona		
Pamona	c	j
dialek Tomoni	c	j
Rampi	c	j
Bungku-Mori		
Mori Atas	-	-
Mori Bawah	-	-
Padoe	-	-
Tolaki	-	-
dialek Mekongga	-	-
Muna-Buton		
Muna	(c)	-
Wolio	c	j
Wotu	c	j
Belum Tergolong		
Lemolang	c	j

Dalam subkelompok Bungku-Mori tidak terdapat fonem /c/ dan /j/. Dalam kamus bahasa Muna yang disusun oleh Mattalitti, terdapat sejumlah kosakata yang diawali c, tetapi dapat dianggap kata pinjaman [Mattalitti, 1985: 25].

B. Perbandingan Bahasa-Bahasa di Sulawesi Tenggara

Di bawah ini diperbandingkan beberapa fonem proto bahasa Austronesia untuk mengetahui korespondensi fonem. Untuk itu diperbandingkan juga, bahasa yang terdapat di provinsi lain, tetapi mempunyai perhubungan genealogi.

1. Beberapa Perwujudan yang Penting

Sebelum diperbandingkan secara total bahasa daerah di Sulawesi Tenggara, diteliti dulu beberapa perwujudan yang penting.

a. *z- dan *-z-

Bungku-Tolaki

Bungku	*zalan 'jalan' > sala; *huzan 'hujan' > usa
Mori Bawah	*zalan 'jalan' > sala; *huzan 'hujan' > usa
Wawonii	*huzan 'hujan' > uusa
Moronene	*zalan 'jalan' > sala; *huzan 'hujan' > usa
Mori Atas	*zalan 'jalan' > sala; *huzan 'hujan' > use
Padoe	*zalan 'jalan' > sala; *huzan 'hujan' > use
Tolaki	*zadi 'jadi' > dadi; *zaLing 'jaring' > dari; *zalan 'jalan' > o/sala

Muna-Buton	Ciacia	<i>*zalan/*dalam</i> 'jalan' > <i>lala</i>
	Muna	<i>*zahit</i> 'jahit' > <i>deu</i> ; <i>*jadi</i> 'jadi' > <i>dhadi</i>
Wotu-Wolio	Laiyolo	<i>*dalam</i> 'jalan' > <i>dala</i> ; <i>*uDan</i> 'hujan' > <i>uda</i>
	Kamaru	<i>*zalan/*dalam</i> 'jalan' > <i>laloo</i>
	Wolio	<i>*dalam</i> 'jalan' > <i>dala</i> ; <i>*zajit</i> 'jahit' > <i>jai</i> ; <i>*zizi[L]</i> ; 'jejer' > <i>jejere</i> ; <i>*zadi</i> 'jadi' > <i>dadi</i>
	Wotu	<i>*tazEm</i> 'tajam' > <i>taja</i>

Perwujudan **z-*, **-z-* > *s-* *-s-* hanya terdapat dalam subkelompok bahasa Bungku-Tolaki. Ada kemungkinan **z-*, **-z-* > *s-*, *-s-* menjadi fonem pembeda untuk membedakan subkelompok bahasa Bungku-Tolaki dengan kelompok bahasa lain. Untuk membuktikannya diperlukan contoh perwujudan lebih banyak lagi.

b. **-t-* dan *-t-*

Bungku-Tolaki	Mori Bawah	<i>*tanduk</i> 'tidur' > <i>tandu</i> ; <i>*tiduR</i> 'tidur' > <i>mo/turi</i> ; <i>*atay</i> <i>*hatay</i> 'hati' > <i>ate</i> ; <i>*mata</i> 'mata' > <i>mata</i> ; <i>*batu</i> 'batu' > <i>βatu</i> ; <i>*kutu</i> 'kutu' > <i>kutu</i>
	Mori Atas	<i>*tanduk</i> 'tidur' > <i>tandu</i> ; <i>*tiduR</i> 'tidur' > <i>mo/turi</i> ; <i>*atay/*hatay</i> 'hati' > <i>ate</i> ; <i>*mata</i> 'mata' > <i>mata</i> ; <i>*batu</i> 'batu' > <i>βatu</i> ; <i>*kutu</i> 'kutu' > <i>kusu</i>
	Padoe	<i>*tanduk</i> 'tanduk' > <i>tandu</i> ; <i>*tahi</i> 'tahi' > <i>taqi</i> ; <i>*tuha/*tuwa</i> 'tua' > <i>mo/suqo</i> ; <i>*kita</i> 'kita' > <i>i/kita</i> ; <i>*mata</i> 'mata' > <i>mata</i> ; <i>*batu</i> 'batu' > <i>βasu</i> ; <i>*kutu</i> 'kutu' > <i>kusu</i>
	Tolaki	<i>*taytay</i> 'lorong' > <i>tete</i> (<i>metete</i> 'meniti'); <i>*tEngah</i> 'tengah' > <i>tonga</i> ; <i>*atay/*hatay</i> 'hati' > <i>ate</i> ; <i>*mata</i> 'mata' > <i>mata</i>
Muna-Buton	Muna	<i>*tanduk</i> 'tanduk' > <i>tandu</i> ; <i>*tEbu</i> 'tebu' > <i>tawu</i> ; <i>*kutu</i> 'kutu' > <i>otu</i> ; <i>*mata</i> 'mata' > <i>mata</i>
Wotu-Wolio	Laiyolo	<i>*tanah/*tanEh</i> 'tanah' > <i>tana</i> ; <i>*tElinga</i> 'telinga' > <i>talinga</i> ; <i>*tanduk</i> 'tanduk' > <i>tanru</i> ; <i>*tahi</i> 'tahi' > <i>taqi</i> ; <i>*atay/*hatay</i> 'hati' > <i>ati</i> ; <i>*batu</i> 'batu' > <i>batu</i> ; <i>*tuha/*tuwa</i> 'tua' > <i>tuqa</i>
	Wolio	<i>*tanah/*tanEh</i> 'tanah' > <i>tana</i> ; <i>*tElinga</i> 'telinga' > <i>talinga</i> ; <i>*kutu</i> 'kutu' > <i>kutu</i> ; <i>*matay</i> 'mati' > <i>mate</i>
	Wotu	<i>*tazEm</i> 'tajam' > <i>taja</i> ; <i>*tuha/*tuwa</i> 'tua' > <i>tua</i> ; <i>*atEp/*hatEp</i> 'atap' > <i>ata</i> ; <i>*batu</i> 'batu' > <i>batu</i>

Dalam bahasa Mori Atas dan Padoe, sebagian **-t-* mengalami perubahan **-t-* > *-s-*. Perwujudan ini dapat dirumuskan bahwa **-t-* > *-s-*/ u (**-t-* menjadi *-s-* sebelum *u*). Gejala ini dianalisis lagi dengan contoh selanjutnya juga.

2. Perwujudan **b-*

Di bawah ini diterangkan perwujudan **b-* dalam bahasa di Sulawesi Tenggara.

	<i>*batu</i> 'batu'	<i>*binih</i> 'benih, biji'
Bungku-Tolaki		
Kulisusu	<i>wacu</i>	(<i>oliso</i>)
Bungku	<i>φatu</i>	(<i>pae</i>)
Wawonii	<i>watu</i>	(<i>pombulo</i>)
Moronene	<i>watu</i>	<i>ini</i>
Padoe	<i>wasu</i>	(<i>wukumpahoa</i>)
Tolaki	<i>owatu</i>	<i>wine</i>
Muna-Buton		
Ciacia	<i>wacu</i>	<i>βine~wie</i>
Muna	(<i>konto~kanto</i>)	<i>wine</i>
Bonerate	<i>ra/atu</i>	(<i>amOOta</i>)
Wotu-Wolio		
Laiyolo	<i>batu</i>	---- (tidak ada data)
Kamaru	<i>batu</i>	<i>wine</i>

Wolio	<i>batu</i>	<i>wine</i>
Wotu	<i>batu</i>	<i>bine</i>

Kelompok Wotu-Wolio mempertahankan *b*, sedangkan anggota bahasa dari subkelompok Bungku-Tolaki dan Muna-Buton memperlihatkan perwujudan dari bilabial hambat menjadi bilabial frikatif. Adanya bunyi bilabial/labial frikatif yang berasal dari **b-/*-b-*, terdapat juga dalam kelompok bahasa Kaili-Pamona [Yantaguchi, 2001: 13-14].

Dari contoh **binih*, **b- > w-* terjadi juga dalam kelompok bahasa Wotu-Wolio.

	<i>*bulu</i> 'bulu, rambut'	<i>*buuk</i> 'bulu'
	<i>bulu</i>	<i>rambut</i>
Bungku-Tolaki		
Kulisusu	<i>wulu</i>	<i>wu</i>
Bungku	<i>ɸulu</i>	
Wawonii	<i>wulu</i>	<i>wu</i>
Moronene	<i>wulu</i>	<i>wu</i>
Padoe	<i>wulu</i>	<i>wu</i>
Tolaki	<i>wulu</i>	<i>wu</i>
Muna-Buton		
Ciacia	<i>wulu</i>	<i>wulu</i>
Muna	<i>wulu</i>	<i>wulu/no</i>
Bonerate	<i>wulu</i>	<i>(hOOtu)</i>
Wotu-Wolio		
Laiyolo	<i>bulu</i>	<i>bɛlua</i>
Kamaru	<i>bulu</i>	<i>wuluna baa</i>
Wolio	<i>bulu</i>	<i>bulua</i>
Wotu	<i>bulu</i>	<i>balua</i>

Dapat dipikirkan bahwa **b > w > β/ɸ > Ø*, dan perubahan tersebut lebih maju pada subkelompok bahasa Bungku-Tolaki dan Muna-Buton daripada kelompok bahasa Wotu-Wolio.

**baRu, *bahaRu, *baru, *bERu, *bahERu* 'baru'

Bungku-Tolaki	
Kulisusu	<i>(tonia)</i>
Bungku	<i>baru</i>
Wawonii	<i>(sarai)</i>
Moronene	<i>(tonia)</i>
Padoe	<i>(damuiko)</i>
Tolaki	<i>wuohu</i>
Muna-Buton	
Ciacia	<i>wukou</i>
Muna	<i>boghau</i>
Bonerate	<i>rOəwuwu</i>
Wotu-Wolio	
Laiyolo	<i>bau</i>
Kamaru	<i>(siimpo/katimo)</i>
Wolio	<i>baau</i>
Wotu	<i>kuba</i>

Dari perwujudan tersebut di atas, sudah jelas **b > w > β/ɸ > Ø* tidak secara total. Sebagian **b* tetap diwujudkan sebagai *b*. Mengenai bahasa Wotu, belum ditemukan **b* menjadi bilabial/labial frikatif.

3. Kehilangan Konsonan pada Posisi Akhir

Di bawah ini diterangkan konsonan posisi akhir dari proto bahasa Austronesia.

	<i>*langit</i> 'langit'	<i>*ikuR</i> 'ekor'
Bungku-Tolaki		
Kulisusu	<i>langi</i>	<i>iki</i>
Bungku	<i>(lahumoWa)</i>	<i>iki</i>

Wawonii	<i>langi</i>	<i>iki</i>
Moronene	<i>langi</i>	<i>iki</i>
Padoe	<i>langi</i>	<i>iki</i>
Tolaki	<i>(lahuene)</i>	<i>iku</i>
Muna-Buton		
Ciacia	<i>langi</i>	<i>(pui)</i>
Muna	<i>lani</i>	<i>(punda)</i>
Bonerate	<i>laangi</i>	<i>iiku</i>
Wotu-Wolio		
Laiyolo	<i>langiq</i>	<i>iku</i>
Kamaru	<i>langi(bula)</i>	<i>(lensi)</i>
Wolio	<i>(layana)</i>	<i>(lenci)</i>
Wotu	<i>(bula)</i>	<i>(iyu)</i>

*-t dan *-R tidak dipertahankan oleh semua bahasa di atas. Konsonan nasal juga tidak dipertahankan pada posisi akhir seperti contoh yang telah diterangkan di atas, *zalan dan *huzan.

4. Palatalisasi dalam Beberapa Bahasa

Dalam beberapa bahasa terjadi palatalisasi.

	<i>*kutu</i> 'kutu'	<i>*tunu</i> 'bakar'
Bungku-Tolaki		
Kulisusu	<i>kucu</i>	<i>mon/cunu</i>
Bungku	<i>kutu</i>	<i>mon/tunu</i>
Wawonii	<i>kutu</i>	<i>mon/tunu</i>
Moronene	<i>kutu</i>	<i>mon/tunu</i>
Padoe	<i>kusu</i>	<i>(sumoneo)</i>
Tolaki	<i>kutu</i>	<i>mon/dunu</i>
Muna-Buton		
Ciacia	<i>cucu</i>	<i>cunue</i>
Muna	<i>otu</i>	<i>ne/tunu</i>
Bonerate	<i>kuutu</i>	<i>tuunu</i>
Wotu-Wolio		
Laiyolo	<i>kutu</i>	<i>sinunu</i>
Kamaru	<i>kutu</i>	<i>(sule)</i>
Wolio	<i>kutu</i>	<i>a/tunu</i>
Wotu	<i>utu</i>	<i>tunu</i>

*t- > c-/__u terjadi pada bahasa Kulisusu dan Ciacia. Dan *-t- > -c-/__u juga terjadi pada bahasa Kulisusu dan Ciacia. Dan hanya pada bahasa Ciacia terjadi *k- > -c-/__u.

5. Penambahan o- pada kata dasar

Sebagian bahasa daerah di Sulawesi Tenggara, terdapat penambahan o- pada awal kata.

	<i>*Duwa</i> 'dua'	<i>*tElu</i> 'tiga'
Bungku-Tolaki		
Kulisusu	<i>orua</i>	<i>otolu</i>
Bungku	<i>orua</i>	<i>otolu</i>
Wawonii	<i>arua</i>	<i>otolu</i>
Moronene	<i>orua</i>	<i>otolu</i>
Padoe	<i>ruwo</i>	<i>otolu</i>
Tolaki	<i>ruo</i>	<i>otolu</i>
Muna-Buton		
Ciacia	<i>dua</i>	<i>totolu</i>
	<i>(ddorua [Kaseng, 1987: 68])</i>	
Muna	<i>dua</i>	<i>tolu</i>
Bonerate	<i>duuwa</i>	<i>iOOlu</i>
Wotu-Wolio		
Laiyolo	<i>rua</i>	<i>talu</i>
Kamaru	<i>dua</i>	<i>talu</i>

Wolio	<i>rua</i>	<i>talu</i>
Wotu	<i>duango</i>	<i>talluango</i>

Dari contoh kata bilangan 'dua' dan 'tiga', telah jelas penambahan *o-* terjadi pada bahasa yang tergolong subkelompok Bungku-Tolaki saja. Yang terjadi pada bahasa Ciacia bukan penambahan *o-* melainkan dwipurwa.

Dan dari contoh tersebut di atas, dapat diketahui korespondensi fonem **D* > *r* subkelompok Bunku-Tolaki, > *d* Muna-Buton. Sedangkan Wotu-Wolio > *r/d*.

C. Sedikit tentang Perbandingan Morfem

Biasanya penelitian linguistik komparatif historis, terbatas tentang perbandingan fonem. Akan tetapi, untuk tahap selanjutnya penting juga perbandingan morfologi. Walaupun begitu, di bawah ini sedikit mencoba perbandingan prefiks pembentuk ajektiva.

Menurut penulis, prefiks pembentuk ajektiva penting sekali untuk membedakan kelompok/subkelompok bahasa. Misalnya, kelompok bahasa Sulawesi Selatan terdapat prefiks *ma-* yang membentuk ajektiva (*ka-* dan *ba-* jarang ditemui). Subkelompok bahasa Kaili-Pamona terdapat kedua jenis prefiks pembentuk ajektiva *na-* dan *mV-* (vokal ada beberapa variasi), dan kedua prefiks dapat digunakan sebagai pembeda subkelompok [Yamaguchi, 2000: 54-55; 2001: 14-17].

	*iRah 'merah', *iRang 'menjadi merah' *i(n)tEm, *<iREng 'hitam'	
Bungku-Tolaki		
Kulisusu	<i>mo/mea</i>	(<i>mo/halo</i>)
Bungku	<i>mo/mea</i>	(<i>mo/halo</i>)
Wawonii	<i>me/mea</i>	(<i>mo/halo</i>)
Moronene	(<i>mo/toha</i>)	(<i>mo/lori</i>)
Padoe	(<i>mo/taha</i>)	<i>meq/eto</i>
Tolaki	<i>mo/mea</i>	<i>me/eto</i>
Muna-Buton		
Ciacia	<i>mo/dea</i>	(<i>mo/kio</i>)
Muna	<i>ka/dea</i>	<i>ka/hito</i>
Bonerate	<i>me/eha</i>	(<i>biru</i>)
Wotu-Wolio		
Laiyolo	<i>leqi</i>	<i>etta</i>
Kamaru	<i>mo/wea</i>	<i>ma/eta</i>
Wolio	<i>ma/lei</i>	<i>ma/eta</i>
Wotu	<i>puti</i>	(<i>eja</i>)
	*bug'a 'busa', *putih 'putih'	*bERat 'berat'
Bungku-Tolaki		
Kulisusu	<i>mo/bula</i>	<i>mobe</i>
Bungku	<i>mo/pute</i>	<i>mo/benya</i>
Wawonii	<i>mo/wula</i>	<i>mo/bea</i>
Moronene	(<i>mo/pila</i>)	<i>mo/bea</i>
Padoe	<i>mo/puts</i>	<i>mo/bæa</i>
Tolaki	(<i>mo/wila</i>)	<i>mo/bea</i>
Muna-Buton		
Ciacia	<i>mo/pute</i>	<i>boa</i>
Muna	<i>ka/pute, pute</i>	<i>bie</i>
Bonerate	<i>mo/huute</i>	<i>mOO/bOOha</i>
Wotu-Wolio		
Laiyolo	<i>puti</i>	---- (tidak ada data)
Kamaru	<i>ma/puti</i>	(<i>ma/tamo</i>)
Wolio	<i>ma/puti</i>	(<i>ma/tamo</i>)
Wotu	<i>puti</i>	(<i>ma/tamo</i>)

(arti bahasa modern di atas semuanya 'putih')

Ternyata dalam subkelompok bahasa Bungku-Tolaki dan Muna-Buton, menonjol penggunaan prefiks *mo-*. Hanya dalam bahasa Padoe dan Tolaki terdapat *me~me-*. Prefiks *ka-* yang membentuk ajektiva terdapat dalam bahasa Muna. *ka-* berasal dari **ka-*, dan fungsi **ka-* adalah membentuk verba tak transitif atau ajektiva. Dalam kelompok Wotu-Wolio menggunakan *ma-*. Dalam contoh tersebut di atas, untuk 'baru', digunakan *mo-* dalam bahasa Kamaru.

Walaupun ada kekecualian, pada dasarnya prefiks pembentuk ajektiva *mo-* dapat menjadi pembeda subkelompok Bungku-Mori dan Muna-Buton dengan kelompok bahasa Wotu-Wolio, juga dengan kelompok bahasa Sulawesi Selatan (*ma-*) dan subkelompok Kaili-Pamona (*na-/mV-*).

PENUTUP

Melalui perbandingan bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Tenggara tersebut di atas, baru diberikan garis besar penggolongan (sub)kelompok. Akan tetapi, hasil yang penulis capai, tahap awal atau jauh sekali dari memuaskan. Untuk selanjutnya diperlukan beberapa tahap. Bentuk rekonstruksi yang digunakan dalam makalah ini, bentuk rekonstruksi proto bahasa Austronesia. Untuk diadakan penelitian lebih teliti, diperlukan usaha rekonstruksi bahasa madya dari (sub)kelompok masing-masing.

Penulis sendiri, untuk meneliti perhubungan genealogi bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Tenggara, dihadapi oleh beberapa kesulitan.

Yang pertama, kekurangan pengetahuan penulis sendiri terhadap bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara. Memang untuk meneliti perhubungan bahasa diperlukan pengetahuan tentang bahasa-bahasa tujuan dan diperlukan juga pengalaman penelitian terhadap bahasa-bahasanya.

Kedua, kekurangan data bahasa yang dapat digunakan untuk bidang linguistik komparatif historis. Untuk penelitiannya diperlukan jumlah kosakata yang cukup banyak. Dan tidak usah dikatakan bahwa sebagai dasar penelitian, diperlukan fonologi yang telah ditentukan untuk bahasa-bahasa tujuannya.

Ketiga, walaupun masalahnya tidak besar, tetapi kadang-kadang yang menimbulkan kesalahan besar adalah nama bahasa/dialek yang memiliki banyak variasi. Sebaiknya disatukan saja supaya jangan terjadi kekacauan.

Keempat, penyatuan ejaan bahasa daerah yang sedapat mungkin disempurnakan. Di Sulawesi Selatan, pernah disusun ejaan bahasa daerah [Balai Penelitian Bahasa, 1984]. Walaupun belum lengkap, diperlukan usaha tersebut. Jangan bunyi yang sama dieja dengan huruf/cara lain.

SARAN

Dalam keadaan banyak bahasa daerah terancam punah, penulis ingin menyarankan beberapa hal untuk melestarikan bahasa daerah. Oleh karena keadaan waktu, dana penelitian, dan tenaganya kurang cukup, terpaksa memberi urutan untuk mulai melaksanakan usaha untuk melestarikan bahasa daerah. Urutannya ditentukan setelah ditimbang beberapa faktor.

Yang pertama, jumlah penutur bahasa berapa orang. Hal ini boleh diutamakan, tetapi berkaitan dengan beberapa faktor lain yang diterangkan di bawah ini.

Yang kedua, lingkungan bahasanya bagaimana. Yang dimaksud, seperti transportasi dan banyak atau sedikit pendatang yang bahasanya berbeda. Kemajuan transportasi kadang-kadang mempercepat punahnya bahasa minoritas. Sebagai dampak kemajuan transportasi membuat penutur asli merantau ke daerah lain (yang berbeda bahasanya), dan tergantung pada usaha baru (seperti kebun kelapa rawit, cengkeh, dan kopi) semakin banyak pendatang yang berbeda bahasa daerahnya.

Yang ketiga, suatu bahasa daerah yang cukup banyak penuturnya, biasanya memiliki beberapa dialek. Dan biasanya jumlah penutur dialek masing-masing, tidak sama rata. Artinya sebagai bahasa belum terancam punah pun ada kemungkinan di antaranya ada dialek yang penuturnya sedikit telah terancam punah.

Barangkali, masih ada banyak faktor tertentu yang berkaitan dengan daerah masing-masing. Setelah diputuskan, biaya dan tenaga harus dipusatkan bahasa tujuan berdasarkan urutannya.

Bagi Indonesia yang pesat perkembangan negara, antara lain kemajuan di bidang perekonomian, penulis yakin bahwa masalah dana penelitian dapat diatasi. Akan tetapi, masalah tenaga, boleh dikatakan belum cukup. Melatih tenaga yang memadai bidang penelitian lapangan belum begitu banyak. Untuk melatih tenaga untuk meneliti bahasa sulit dalam waktu singkat. Hal ini berkaitan dengan unsur yang satu lagi, yaitu waktu.

Dalam kongres mengenai bahasa yang terancam punah di Asia-Pasifik yang diadakan di Kyoto, Jepang pada November 2000, pakar bahasa Amerika Serikat, M. Krauss berceramah dengan judul *Mass Language Extinction, and Documentaion: The Race against Time*. Kita, peneliti bahasa Sulawesi, baik peneliti Indonesia maupun peneliti asing, ada di dalam perlombaan waktu dengan punahnya bahasa daerah. Diharapkan supaya jangan terjadi kasus sewaktu dana penelitian dan tenaga ahli sudah cukup, bahasa yang harus diteliti telah punah.

Daftar Pustaka

- Abas, H., dkk. 1983. *Struktur Bahasa Wolio*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , Shaidy, L. Jaya. 1985. *Kamus Wolio-Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Adriani, N. en Kruijt, A.C. 1912-1914. *De Bare'e Sprekende Toradja's van Midden-Celebes* (3 Banden). Batavia: Landsdrukkerij.
- Anceaux, J.C. 1987. *Wolio Dictionary (Wolio-English-Indonesian) Kamus Bahasa Wolio (Wolio-Inggris-Indonesia)*. Dordrecht, Providence: Foris.
- . 1988 (second edition). *The Wolio Language: Outline of Grammatical Description and Text*. Dordrecht, Providence: Foris.
- Arief, A., M.N. Haddade, A.K. Mulya. 1992. *Kamus Ungkapan Wolio-Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Atakasi, L. 1991. *Kadadihi ne Witeno Wuna*. Raha: Tim Penelitian dan Pengembangan Bahasa Muna.
- Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang, 1984. *Pedoman Ejaan Bahasa-bahasa Daerah di Sulawesi Selatan yang Disempurnakan*.
- Barr, D.F., Barr, S.G., and Salombe, C. [1979]. *Languages of Central Sulawesi*. Ujung Pandang: [SIL and Hasanuddin University].
- Berg, R.v.d. 1989. *A Grammar of the Muna Language*. Dordrecht, Providence: Foris.
- (ed). 1991. *Sulawesi Phonologies*. Workpapers in Indonesian Languages and Cultures Vol. 12. Ujung Pandang: The Summer Institute of Linguistics in Cooperation with the Department of Education and Culture.
- . 1996. *Muna-English Dictionary*. Leiden: KITLV Press.
- Brink, H. van den. 1943. *Dr. Benjamin Frederik Matthes zijn leven en arbeid in dienst van het Nederlandsche Bijbelgenootschap*. Amsterdam: Bijbelgenootschap.
- Dempwolff, O. 1934, 1937, 1938. *Vergleichende Lautlehre des austronesischen Wortschatzes*. 3 Bde. Berlin, Hamburg. Verlag von Dietrich Reimer (rep. ed. 1969: Nendeln: Kraus Reprint).
- Dola, A. 2003. *Urutan Konstituen Bahasa Wotu: Suatu Pendekatan Tipologi*. Desertasi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Ensiklopedia Indonesia*. [1950?]. Bandung, -'s Gravenhage: W. Van Hoeve.
- Esser, S.J. 1926, 1933. *Klank- en Vormleer van het Morisch*. eerste gedeelte, tweede gedeelte. Leiden: A Vlos, Bnadoeng: A.C. Nix & Co.
- . 1938. Talen. (Blad 9, 9 b). *Atlas van Tropisch Nederland*. Amsterdam: Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundige Genootschap (rep. ed. 1999. Landmeer: Gemilang).
- Friberg, B. (ed). 1990. *Sulawesi Language Texts*. Dallas: The Summer Institute of Linguistics in Cooperation with Hasanuddin University.
- Gani, H.A., dkk. 1986. *Morfologi Kata Kerja Wolio*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Gazali, M., dkk. 1995. *Sistem Morfologi Nomina Bahasa Muna*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Grimes, C.E. and Grimes, B.D. n.d. *Languages of South Sulawesi* (pre-publication copy). Ujung Pandang: SIL in cooperation with Hasanuddin University.
- . 1987. *Languages of South Sulawesi*. Canberra: The Australian National University.
- Holle, K.F. 1894. Schets-Taalkaart van Celebes. *Koloniaal Verslag van 1894*.
- Kadja, D., dkk. 1998. *Morfologi dan Sintaksis Bahasa Bungku*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Karhunen, M. [1991]. Phonology of Padoe. Berg, R.v.d. (ed). *Sulawesi Phonologies. Workpapers in Indonesian Languages and Cultures vol 12*. [Ujung Pandang]: The Summer Institute of Linguistics in Cooperation with the Department of Education and Culture.
- Kaseng, S., dkk. 1987. *Pemetaan Bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kaudern, W. 1925^a. *Results of the Author's Expedition to Celebes 1917-1920. I. Structures and Settlements in Central Celebes*. Göteborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag.
- . 1925^b. *Resultsof the Author's Expedition to Celebes 1917-1920. II. Migrations of the Toradja in Central Celebes*. Göteborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag.
- Kraemer, H., A.E. Adriani. 1930. *Dr. Adriani*. Amsterdam: H.J. Paris
- Krauss, M. 2000. Mass Language Extinction, and Documentaion: The Race against Time. *Conference Hanbook on Endangered Languages. November 24-25, 2000/Kyoto, Japan*.
- Kruyt, Alb.C. 1938. *De West-Toradjas op Midden-Celebes*. Deel I-IV, Deel Platen. Amsterdam: Noord-Hollandsch Uitgeversmaatschappij.

- Lauder, M.RMT, dkk. 2000^a. *Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-bahasa Daerah di Indonesia: Propinsi Sulawesi Selatan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- . 2000^b. *Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-bahasa Daerah di Indonesia: Propinsi Sulawesi Tengah*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- . 2000^c. *Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-bahasa Daerah di Indonesia: Propinsi Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Liebner, H. 1990. Istilah-istilah Kemaritiman dalam Bahasa-bahasa Buton. Abas, H., T.D. Andersen (ed). *Bahasa-bahasa Daerah Sulawesi dalam Konteks Bahasa Nasional*. Ujung Pandang: UNHAS-SIL.
- Mahmud, dkk. 1995. *Struktur Bahasa Mekongga*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Manyambeang, A.K., dkk. 1984/1985. *Struktur Bahasa Binongko*. [Ujung Pandang]: Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Sulawesi Selatan.
- Manuputty, D.G., dkk. 1998. *Kata Tugas Bahasa Wolio*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Mattalitti, M.A., dkk. 1985^a. *Kamus Muna-Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , dkk. 1985^b. *Sastra Lisan Wolio*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Mills, R.F. 1975. *Proto South Sulawesi and Proto Austronesian Phonology*. 2 vols. Disertasi. The University of Michigan.
- Mokui, L., L.K. Batoa. 1991. *Wata-watangke Wuna: Tekateki Muna: Muna Riddles*. Ujung Pandang: UNHAS-SIL.
- Mulya, A.K., dkk. 1990. *Morfologi dan Sintaksis Bahasa Mawasangka*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , dkk. 1994. *Sistem Morfologi Verba Bahasa Mawasangka*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , dkk. 2004. *Sistem Sapaan Bahasa Tolaki*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Mursalin, S., dkk. 1992. *Struktur Bahasa Mawasangka*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Mustafa, A., dkk. 1991. *Struktur Bahasa Ciacia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Muthalib, A. 1985. *Kamus Tolaki-Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , dkk. 1985. *Kata Tugas dalam Bahasa Tolaki*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- . 1990. *Kata Tugas Bahasa Tolaki*. Abas, H., T.D. Andersen (ed). *Bahasa-bahasa Daerah Sulawesi dalam Konteks Bahasa Nasional*. Ujung Pandang: UNHAS-SIL.
- , dkk. 1991. *Struktur Bahasa Moronene*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , Z. Sailan, A.K. Mulya. 1993. *Morfologi Nomina Bahasa Wolio*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Noorduyn, J. 1963. Mededelingen uit de verslagen van DR S.J. Esser: Taalambtenaar voor Celebes 1928-1944. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*. Deel 119: 328-370.
- . 1991. *A Critical Survey of Studies on the Languages of Sulawesi*. Leiden: KITLV Press.
- Pattiasina, J.F., dkk. 1983. *Sistem Morfologi Kata Kerja Bahasa Tolaki*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Sailan, Z., dkk. 1995. *Tata Bahasa Tolaki*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Salombe, C., dkk. 1987. *Struktur Bahasa Wotu*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Salomez, C., dkk. 1987. *Struktur Bahasa Wotu*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Salzner, R. 1960. *Sprachenatlas des Indopazifischen Raumes* (2 bd.). Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
- Sande, J.S., dkk. 1986. *Morfosintaksis Bahasa Muna*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , dkk. 1991. *Morfologi dan Sintaksis Bahasa Wotu*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Sarasin, P., F. Sarasin. 1905. *Reisen in Celebes ausgeführt in den Jahren 1893-1896 und 1902-1903*. 2 Banden. Wiesbaden: C.W. Kreidel's Verlag.
- Sinampu, L., M. Kartunen, P. Vuorinen. [1990]. *Pepau-pau Olo-olo Pau Padoe: Percakapan Sehari-hari Bahasa Padoe: Everyday Conversations in Padoe* (Publikasi UNHAS-SIL, Penyajian Bahasa-bahasa Daerah Sulawesi, Seri A Jilid 7). n.p.
- Sneddon, J.N. 1978. *Proto-Minahasan: Phonology, Morphology and Wordlist*. Canberra: The Australian National University.
- . (comp). 1981. South Part of Celebes (Sulawesi), Wurm, S.A. and S. Hattori (eds). *Language Atlas of the Pacific Area*. Canberra: The Australian National Academy of Humanities, Japan Academy, The Australian National University.
- Stokhof, W.D.L. (ed. In cooperation with Lia Saleh-Bronkhorst). 1980. *Holle Lists: Vocabularies in Languages of Indonesia Vol. 1: Introductory Volume* (Materials in Languages of Indonesia No. 1). Canberra: The Australian University.
- (ed). 1982. *Holle Lists: Vocabularies in Languages of Indonesia Vol. 4 Talaud and Sangir Islands* (Materials in Languages of Indonesia No. 17). Canberra: The Australian University.
- (ed). 1983. *Holle Lists: Vocabularies in Languages of Indonesia Vol. 7/1 North Sulawesi: Gorontalo Group and Tontolo* (Materials in Languages of Indonesia No. 24). Canberra: The Australian University.

- (ed). 1983. *Holle Lists: Vocabularies in Languages of Indonesia Vol. 7/2 North Sulawesi: Philippine Languages* (Materials in Languages of Indonesia No. 23). Canberra: The Australian University.
- (ed). 1984. *Holle Lists: Vocabularies in Languages of Indonesia Vol. 7/3 Central Sulawesi, South-West Sulawesi* (Materials in Languages of Indonesia No. 25). Canberra: The Australian University.
- . 1985. *Holle Lists: Vocabularies in Languages of Indonesia Vol. 7/4 South-East Sulawesi and Neighbouring Islands, West and North-East Sulawesi* (Materials in Languages of Indonesia No. 66). Canberra: The Australian University.
- . 1987. *Holle Lists: Vocabularies in Languages of Indonesia Vol.11 Celebes, Alor, Ambon, Irian Jaya, Madura, and Lombok* (Materials in Languages of Indonesia No. 39). Canberra: The Australian University.
- Tim Pusat Bahasa Unhas. 1990. *Laporan Penelitian Pemetaan Bahasa-bahasa Daerah di Sulawesi Selatan dan Tenggara*. Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.
- Usmar, A., dkk. 1991. *Morfologi dan Sintaksis Bahasa Binongko*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Usup, H.T. 1986. *Rekonstruksi Protobahasa Gorontalo-Mongondow*. Disertasi. Universitas Indonesia.
- Wallace, A.R. 1869 (1989. unabridged reprint of last revised edition). *The Malay Archipelago*. Scotland: Tynron Pres
- Wumbu, I.B., dkk. 1986. *Inventarisasi Bahasa Daerah di Propinsi Sulawesi Tengah*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Yamaguchi, M. 2000. Minami Surawesi Gogun ni okeru Keiyoushi Keisei Settouji no Saikou. *Journal of Linguistic and Cultural Studies* No. 14: 33-64.
- . 2001. Hikaku Gengogaku ni motozuku Topoiyogo no Kenkyuu -Kairi-Pamona Gogun ni okeru Keitoujou no Ichi- *The Setsunan Review of Humanities and Social Sciences* No. 9: 3-38.
- . 2003. Remorango no Keitou Kenkyu Houhou. *Journal of Linguistic and Cultural Studies* No. 20: 165-182. (Cara Penelitian untuk Menentukan perhubungan Genealogis Bahasa Lemolang)
- . 2003-2005. Proyek Penelitian *The Study on Northern Sub-Group of South Sulawesi Language Group*. Grant-in-Aid for Scientific Research, Japan Society for the Promotion of Science.
- . 2006. On the Genetic Relationships the Languages in the East District of South Sulawesi Province and its Areas of the Republic of Indonesia. *Journal of Linguistic and Cultural Studies* No. 27: 93-119.
- (ed). 2010. *Penelitian Bahasa Daerah di Sulawesi Selatan dan Sekitarnya*. Kyoto: Hokuto.
- Yatim, N. *Bahasa Wuna*. 1981. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , dkk. 1992. *Morfologi Kata Kerja Bahasa Muna*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Pleno VII
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 20 Juli 2010, 11.00 – 12.30
Penyaji/Pemakalah	: Masao Yamaguchi
Judul Makalah	: Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara dalam Kaitannya dengan Geneologi
Pemandu	: Drs. L. M. Budi Wahidin M., M. Pd.
Pencatat	: Uniwati, S. Pd. M. Hum.
Jumlah Peserta	: 400 orang

TANYA JAWAB

La Ode Hasirun (Tokoh Masyarakat Buton)

Pertanyaan/Saran

Kiat-kiat apa yang dapat dilakukan sehingga bahasa daerah dapat dipertahankan, sebagaimana halnya bahasa Jepang?

Jawab/Tanggapan

Bahasa Jepang berkembang karena orang Jepang masih mempertahankan penggunaan bahasa daerahnya sendiri.

✓

**PERAN MEDIA MASSA DALAM PELESTARIAN DAN PEMBINAAN
BAHASA DAN SASTRA DAERAH: SURAT KABAR BAHASA DAERAH SEBAGAI STRATEGI
UNTUK MEMPERTAHANKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH**

**Timothy Friberg
(Amerika Serikat)**

Berdasarkan keyakinan bahwa bahasa dan sastra daerah harus dipertahankan, kita mencari strategi yang praktis untuk itu. Strategi itu seharusnya dapat dilaksanakan oleh penutur-penutur bahasa daerah setempat sendiri. Strategi itu harus juga sederhana dan tidak membutuhkan terlalu banyak dana, pengetahuan tinggi, atau bantuan dari luar. Strategi yang memberdayakan seluruh masyarakat setempat dalam semua aspek kehidupannya akan kami kemukakan dalam makalah ini.

1. Pada mulanya, mungkin kita dapat menyetujui beberapa **pemahaman dasar** termasuk yang berikut.

Bahasa-bahasa daerah di mana-mana mengalami tekanan besar oleh karena, antara lain, urbanisasi dan globalisasi. Termasuk bahasa-bahasa daerah Sulawesi Tenggara.

Bahasa merupakan kendaraan bagi kebudayaan. **Benturan bahasa juga berakibat pada budaya, baik ringan ataupun berat.** Kerusakan pada bahasa akan mengakibatkan kerusakan budaya.

Seseorang dapat memperoleh dan atau menggunakan sampai dengan lima atau lebih bahasa sekaligus, masing-masing yang cocok pada lingkungannya (biasanya dikatakan untuk pemerolehan bahasa anak, tetapi kadang-kadang juga benar untuk pemerolehan dewasa).

Misalnya, seseorang Bugis fasih berbahasa **Bugis** yang dipakai terus dengan keluarganya di kampung halamannya. Dia bersekolah dan jelas menjadi lancar dalam **bahasa nasional** sampai perguruan tinggi. Dia pasti fasih mengaji dengan **Bahasa Arab**, dan karena dia orang saleh dia juga belajar bahasa tersebut lebih lanjut supaya dia dapat mempelajari kitab sucinya. Oleh karena dia bekerja di Makassar dia juga menguasai **bahasa Makasar** untuk bergaul dengan tetangga atau pekerja. Dia pernah bersekolah di Bandung di mana dia bertemu teman hidupnya yang orang Sunda. Pasti dia juga belajar **bahasa isterinya**. Dalam bidang sekolah tinggi dan pergaulan dengan orang dari luar negeri dia harus menggunakan **bahasa Inggris** yang lumayan bagus. Dia sempat belajar tiga tahun di Jepang dan di sana berbahasa **Jepang** cukup lancar, dan sering juga menerima tamu dari Jepang di rumahnya di Jakarta.

Semua bahasa yang digunakannya berperan dalam bagian hidupnya masing-masing. Bahkan dalam satu hari ada kemungkinan semuanya akan digunakan. **Tidak usah menghilangkan satu bahasa untuk memperoleh yang lain.** Jadi, ada peranan dan maksud dan ruang untuk bahasa nasional, bahasa internasional, bahkan untuk bahasa daerah.

Bahasa-bahasa yang sendiri memiliki kesastraan tertulis (memang ada kesastraan lisan juga) lebih lamban dampak negatifnya dan lebih cepat berubah secara positif. **Bahasa-bahasa yang akan punah pada umumnya tidak memiliki kesastraan tertulis.** Banyak bahasa pribumi di Australia sudah tidak ada lagi, dan salah satu unsur besar adalah bahwa bahasanya tidak pernah tertulis. Padahal di India banyak bahasa daerah masih kuat karena memiliki kesastraan tertulis.

Pelestarian bahasa (boleh juga dikatakan pemeliharaannya) **tidak mungkin dicapai kecuali melalui penggunaan.** Apabila satu suku bangsa berhenti menggunakan bahasanya, bahasa itu akan punah. Kesastraan tertulis pun akan menjadi artefak saja dalam museum.

Pada umumnya suatu suku bangsa tidak usah diberi bantuan dari luar untuk menggunakan, mengembangkan, atau memelihara bahasa dan kebudayaannya. Mungkin bantuan dari luar hanya dibutuhkan pada situasi darurat.

2. Berdasarkan pemahaman dasar tadi kita dapat menambah beberapa **pengamatan** yang pada umumnya benar untuk setiap suku bangsa, baik di Indonesia maupun di luar tanah air Indonesia.

Di mana-mana ada kesastraan lisan, termasuk dongeng yang sebagai hafalan diturunkan dari satu angkatan kepada angkatan berikutnya. **Tetapi ada juga sastrawan lisan itu yang dapat menciptakan cerita baru tepat pada waktunya,** asalkan ada yang siap mendengarnya.

Ada perbedaan yang penting di antara kesastraan lisan, yang pada dasarnya lebih kaku bentuknya dan lebih kuno kosakatanya, **dengan pembicaraan sehari-hari di pasar, di sumur, dan di dapur,** yang lebih

spontan dan bebas bentuk kalimatnya dan sifatnya lebih menciptakan (juga meminjamkan) kosakatanya. Pembicaraan sehari-hari yang memelopori bahasa dan masa depannya.

Setiap bahasa ada beberapa aspek penggunaannya. Yang dipakai di rumah tidak sama dengan yang dipakai di pasar. Yang dipakai seorang pemaarah beda dengan yang digunakan seorang pendiam. Pemuda menggunakan bahasa yang berbeda daripada bahasa orang tuanya, meskipun mereka saling mengerti. Sebenarnya kita tidak bertutur dengan bahasa yang sama; melainkan kita masing-masing memiliki bahasa yang unik (namanya idiolek). Sebab kita dapat berkomunikasi satu sama lain itu berdasarkan pertindihan, baik pengalaman maupun ungkapan.

Apa yang benar dan baku pada suatu bahasa ditentukan bukan oleh instansi pemerintah, bukan juga oleh tokoh-tokoh masyarakat, melainkan oleh semua penuturnya, pada dasarnya tanpa disadari. Yang memberikan makna, yang berkomunikasi, yang digunakan, itulah bahasa yang benar dan baku.

Meskipun kita dapat tertarik pada bahasa oleh karena beberapa maksud, yang kita utamakan di sini ialah bahwa bahasa adalah ungkapan batin. Bahasa selalu berubah sesuai dengan keadaan luar maupun keadaan dalam, dalam hal ini batin kita. Bilamana bahasa berubah terlalu cepat, bahkan punah, ungkapan kita akan mengalami kerusakan ringan sampai dengan berat.

3. (1) Untuk menyelamatkan bahasa daerah dari kemungkinan kepunahan, (2) untuk memberikan masukan dalam perkembangannya, (3) untuk melengkapinya dalam perjalanannya memasuki hari esoknya, dan (4) untuk melestarikannya (bukan sekadar sebagai isi buku kesimpulan penelitian seseorang yang disimpan pada perpustakaan tingkat universitas, melainkan sebagai sarana ungkapan untuk angkatan-angkatan yang akan datang), apakah yang dapat kita buat?

Menurut pengalaman kami yang cukup kaya didukung juga oleh pengamatan yang begitu luas, yang dapat kita buat adalah membesarkan hati penutur-penutur setiap bahasa yang tanpa kesastraan tertulis itu untuk mulai melangkah mengucapkan isi batinnya melalui dawat di atas kertas.

Hal ini amat mudah diusulkan, tetapi bagaimana memulainya? Bahasa-bahasa yang memiliki kesastraan luas dan mendalam tidak muncul dalam semalam, melainkan berkembang berabad-abad dalam berbagai situasi dan kondisi. Apakah kita dapat berharap bahwa bahasa-bahasa yang terancam kepunahannya, biar singkat atau lama, dapat diselamatkan melalui perkembangan kesastraan? Apakah bahasa yang sudah mengalami kemerosotan dapat dipulihkan, sehingga makin banyak kesastraannya dan makin sehat serta tepat penggunaannya? Berdasarkan teori dan praktiknya, kami berpendapat bahwa surat kabar dalam bahasa daerah adalah pendekatan yang paling bermanfaat untuk melestarikan bahasa daerah setempat.

4. Surat kabar yang dimaksud bukan setara dengan *Kompas* atau *Kendari Pos* atau *Kendari Ekspres*. Tebalnya dengan kehalusan dapat kita tunda; memang harus kita tunda. Mulai saja dengan selebaran. Kumpulkan saja beberapa ungkapan penutur asli yang tertulis dan itulah langkah pertama.

Jelas kebutuhan akan adanya pengarang dan penulis merupakan suatu tantangan yang berat. Tantangan itu memang berat, tetapi tidak mustahil. Titik keberangkatan ialah penutur bahasa daerah yang juga berbahasa nasional, yang saat ini di mana saja tidak kurang dari 50% penutur dan dapat sampai dengan 100%. Dan kalau kebetulan dari antara kelompok itu ada yang suka atau pandai menulis dalam bahasa nasional, itu merupakan keuntungan tambahan.

Hampir secara mutlak penulis Bahasa Indonesia berpendapat bahwa tidak mungkin mereka dapat menulis dalam bahasa daerahnya. Pendapat itu tidak seluruhnya benar. Ada beberapa cara untuk menjelaskan hal tersebut. Cara pertama yang baik untuk perseorangan, yaitu dengan merekam ceritanya, kemudian ditranskripsikan ke aksara bahasa daerah; kemudian disajikan kepada perekamnya kembali untuk dibaca. Biasanya dia heran. Lama-lama dia mulai memberikan usul-usul untuk memperbaiki karangannya sendiri.

Cara kedua, sebaiknya untuk kelompok, lokakarya diadakan untuk lima belas sampai dua puluh lima orang peserta sekali. Siapa saja yang mau boleh juga ikut, tetapi menurut pengalaman kami yang mudah ditarik perhatiannya pada permulaan adalah guru-guru sekolah. Hanya tiga sampai empat jam diberikan penjelasan teori dan penerapan praktek. Teorinya tergantung peserta, tetapi biasa termasuk kesimpulan huruf aksara yang diusulkan dipakai (mungkin dengan tekanan pada bunyi "hamzah," biar dilambangkan sebagai "koma," huruf "k" atau "q"), penjelasan mengenai apa adanya kalimat, alinea, dan lain-lain, kemudian mengenai jenis-jenis karangan yang termasuk penjelasan, desakan, cara menggerakkan, dan penceritaan. Sebaiknya, teorinya tidak lebih mendalam daripada itu, karena kita tidak bermaksud menentukan dari luar yang seharusnya muncul dari dalam.

Kegiatan dalam lokakarya yang agak mengherankan (baik peserta maupun pelatihnya), yaitu usaha setiap peserta dalam kurang lebih satu jam menulis sesuatu dari pengalamannya di atas kertas. Kita tidak mengutamakan ejaan, tetapi ungkapan pikiran dalam bahasa daerah yang alamiah. Kegembiraan peserta nampak.

Mereka masing-masing sudah menjadi penulis bahasa ibunya. Hasilnya dikumpulkan dan dikembalikan hari esoknya dalam keadaan sudah disesuaikan dengan huruf aksara yang diusulkan.

Cara memproduksi surat kabar penting juga tetapi di sini untuk sementara ini diabaikan.

5. Kalau surat kabarnya sudah dicetak—tebal atau tipisnya tidak menjadi masalah penting—yang berikutnya adalah bagaimana merasakan kepuasan yang tidak terlupakan seumur hidup. Pengalaman kami, baik secara pribadi maupun sebagai laporan dari loper-loper, adalah bahwa orang yang memegang hasil surat kabar di tangannya untuk sementara tidak lagi sadar terhadap lingkungannya. Mereka tertarik pada bahasanya sendiri yang sekarang tertulis hitam di atas putih dan ada di tangannya.

Ada sebagian pembaca yang langkah pertamanya membaca seperti berjalan dengan terhuyung-huyung. Tetapi dalam beberapa saat saja, yang mulanya membaca dengan gagap sudah dapat membaca dengan lancar. Mengapa tidak? Bagaimanapun juga itu bahasanya. Meskipun sudah terbukti di seluruh dunia bahwa membaca bahasa sendiri menjadi batu loncatan memperoleh bahasa nasional dengan mudah, yang sebaliknya juga terbukti bagi kami: **apabila orang sudah fasih membaca menulis dalam bahasa Indonesia, ketidak-senangannya membaca bahasa sendiri akan hilang dalam waktu singkat.**

Walaupun seseorang dapat belajar membaca materi apa saja, sebaiknya yang dibaca adalah yang menarik perhatiannya. Juga benar (mungkin lebih benar lagi) bahwa pengarang jauh lebih menghasilkan apabila dia menulis tentang yang diminatinya. Untuk hal ini dapat kami ungkapkan prinsip yang penting sekali: **Isi surat kabar ditentukan oleh penutur setempat sesuai dengan selera, baik penulis maupun pembaca.**

Jelas ada pokok muatan surat kabar yang sama sekali tidak diminati orang yang tinggal di pedalaman, termasuk berita internasional dan politik Jakarta. Semakin lokal muatannya semakin tertarik penutur-penutur bahasa daerah. Yang mungkin mengherankan ialah yang menarik perhatian dari kemungkinan kabar lokal. Menurut pengamatan kami, yang paling banyak dipuji adalah nama-nama yang terlibat dalam kolom/rubrik tentang kelahiran, pernikahan dan kematian. Mungkin koran-koran di kota-kota besar mau mencoba rubrik yang mendaftarkan angka-angka statistik untuk orang-orang yang berdiam di kota! Antara lain, tulisan-tulisan yang baik untuk dibaca (dan dikarang) termasuk petunjuk-petunjuk khusus bagi petani, nelayan, bisnis kecil/industri rumah, dan penyusunan keuangan pribadi. Sebagian dari ini mungkin harus diterjemahkan dari Bahasa Indonesia dan tidak apa-apa. Tetapi yang lebih disukai adalah petunjuk-petunjuk tadi yang sudah dialami orang setempat dan dikarang dengan kata-katanya sendiri.

Topik-topik tadi khusus untuk menjelaskan gaya hidup yang lebih bermanfaat. Ada juga penjelasan umum seperti petunjuk belajar Bahasa Inggris dan lain-lain. Untuk Bahasa Inggris yang kami temukan sebagai bantuan tepat adalah rubrik tiga bahasa, yaitu bahasa daerah, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris dalam bentuk pembicaraan lokal yang diterjemahkan ke dalam bahasa nasional dan Bahasa Inggris, keduanya yang idiomatik, dengan kolom yang paralel, masing-masing penerbitan beda topiknya.

Ada juga berita saja (terutama berita lokal) sebagai informasi, biar berita sudah ketinggalan—karena prosesnya yang panjang—tidak akan diabaikan. Hampir apa saja yang ditulis dalam bahasa daerah akan dibaca. Siapa tidak mau mendengar sesuatu yang mungkin bermanfaat untuk memperbaiki diri, menghibur, bahkan sebagai bahan gosip?

Yang pernah kami coba adalah rubrik untuk bertukar pendapat (“setiap koin mempunyai dua sisi”). Dengan itu ada kesempatan orang setempat belajar mendengarkan beberapa pendapat yang berlawanan dengan pendapatnya sendiri. Bukan saja bahan untuk menjadi dewasa, melainkan bahan untuk menjadi warga di kampung global kita. Contoh-contoh yang dapat dibicarakan termasuk baik-buruknya mengadakan arisan, pro-kontranya mencicil, dan risiko-keuntungan menanam percobaan jenis baru.

Semua orang membutuhkan hiburan, biar petani yang baru kembali dari kebunnya dengan keadaan lelah. Untuk itu, koran dapat memuat cerita dalam bahasa daerah yang menghibur, termasuk dongeng setempat dan dongeng daerah lain, cerita ciptaan yang fiktif, pengalaman yang baik menghibur maupun yang mendidik, puisi, lagu lama dan lagu baru, dan lain sebagainya.

Diakui atau tidak bahwa banyak program pemerintah sulit untuk berhasil di pedalaman. Meskipun program-program itu baik, penerapannya di lokasi biasa gagal karena persyaratan, penjelasan, pengertian atas apa yang diharapkan, dan lain-lain tidak begitu dimengerti oleh orang setempat. Surat kabar dalam bahasa daerah mempunyai kesempatan baik untuk menjelaskan program pemerintah melalui bahasa hati. Yang mencapai hati kita biasa juga berdampak pada dunia kita.

Tidak ada masyarakat yang dapat bertahan bahkan berhasil tanpa pemerintah. Tetapi yang jelas di pedalaman kebanyakan rakyat tidak mengerti sistem pemerintah yang ada (yang dimaksud di sini, pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten). Surat kabar adalah kesempatan pemerintah menjelaskan dirinya kepada masyarakat: apa yang dapat pemerintah buat bagi masyarakat; apa yang diharapkan pemerintah dari masyarakat.

6. Satu prinsip yang dasar sekali adalah bahwa **semakin sedikit materi yang diterjemahkan ke dalam bahasa daerah semakin baik.** Kenapa demikian? Bukan saja karena tata bahasa bahasa daerah tidak sama dengan tata bahasa bahasa nasional, melainkan pola pikir keduanya pun berbeda sekali. Jauh lebih banyak

orang dapat mengarang sesuatu dalam bahasa ibunya daripada yang dapat menerjemahkan sesuatu dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain.

Perhatikan kasus berikut: dua orang dapat melihat kebakaran rumah yang sama, satu orang yang tahu bahasa daerah tertentu dan satu lain yang hanya tahu bahasa nasional. Keduanya diajak menulis yang disaksikannya sebaik-baiknya, satu langsung ke dalam bahasa daerah, yang lain menggunakan Bahasa Indonesia. Kedua hasilnya sama panjangnya. Yang memakai bahasa nasional diterjemahkan ke dalam bahasa daerah yang sama. Kedua hasil di bahasa daerah dibaca penutur setempat. Hampir pasti yang langsung dikarang dalam bahasa daerah lebih disukai. Kosakatanya lebih beraneka ragam, strukturnya lebih alamiah, pola pikirnya lebih menarik perhatian.

Kalau kita bermaksud menolong bahasa-bahasa daerah berkembang dan dilestarikan sebagai bahasa yang hidup, mari kita menghormatinya sebagai kendaraan ungkapan batin yang cocok untuk setiap suku bangsa tertentu.

Berkaitan dengan itu surat kabar bahasa daerah sebaiknya dimuat secara penuh dengan bahasa daerah, paling sedikit sampai dengan pemantapan surat kabar sebagai kebiasaan adat istiadat yang tidak dapat diabaikan. Kalau tidak, kemudahan penutur bahasa daerah menulis dan membaca dalam Bahasa Indonesia selalu akan mengesampingkan kegiatan kesastraan bahasa daerah. Yang diutamakan adalah penulisan dan pembacaan bahasa daerah sampai dengan ada lapangan yang datar, artinya, sampai dengan bahasa daerah dapat bersaing dengan bahasa nasional, kedua-duanya sama kuat.

7. Surat kabar bahasa daerah yang kami amati hanya menerima kosakata dari bahasa daerah sendiri. Artinya, kata pinjaman dari bahasa nasional (atau dari yang lain lagi) ditolak, terkecuali sama sekali tidak ada kesamaannya dalam bahasa daerah. Jumlah yang sedikit itu ditulis dengan huruf *miring*; misalnya, *satelit*, *handphone*, *mal*, *flu burung*. Larangan terhadap kata pinjaman itu disebabkan khusus untuk menolong pengarang bahasa daerah berpikir dalam bahasa ibunya itu, sebab hampir secara otomatis pena di tangan berarti lampu bahasa nasional dihidupkan.

Semua bahasa meminjam kata dari kelompok bahasa lain; hal yang sama juga terjadi pada bahasa daerah. Itu bukan masalah. Yang mungkin menjadi masalah adalah apabila bahasa daerah yang tertulis dibanjiri dengan kosa-kata dari bahasa lain sehingga sistem penerimaan bunyi dan kata asing menjadi rusak. Misalnya, pasti setiap bahasa daerah di tanah air tahu artinya kata "kantor." Yang berbeda adalah cara masing-masing menerima kata itu dalam sistemnya sendiri. Ada yang mengubahnya menjari "kanto'," ada yang menjadikannya "kantoro," ada yang sama sekali tidak mengubahnya.

Satu pikiran dasar linguistik adalah bahwa setiap bahasa memiliki kemampuan mengungkapkan apa saja. Yang kadang-kadang tidak hadir adalah kosakata yang tepat. Apa saja yang kita alami dapat juga kita ungkapkan. Tetapi cara mengucapkan suatu pengalaman berbeda-beda, tergantung pola pikir, struktur tata bahasa, dan kosakata. Ada kata-kata bahasa daerah yang hanya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain dengan frasa; sebaliknya, ada kata-kata tunggal Bahasa Indonesia yang kesamaan artinya dalam bahasa daerah satu frasa. Misalnya, "sibuk" dalam beberapa bahasa daerah diungkapkan sebagai "banyak pekerjaan" atau "kurang kesempatan," bahkan dengan sepasang kata yang sama, yaitu (dalam terjemahan) "tidak sempat tidak sempat" (di mana kata "sempat" kedua dalam bahasa daerah sinonimnya "sempat"). Yang jelas, kita mau memberi kesempatan kepada masing-masing bahasa daerah mempertahankan ekspresi-ekspresi yang mungkin di seluruh dunia hanya terdapat pada bahasa tersebut.

8. Dengan pengalaman mengarang, membuat, dan membaca surat kabar bahasa daerah, kita menghormati secara praktis slogan tanah air, yaitu, *Bhinneka Tunggal Ika*. Memang dengan semua kegiatan yang meliputi kelahiran surat kabar di antara satu kelompok penutur-penutur bahasa daerah ada suatu daya cipta, daya capai, dan daya dorong yang muncul di masyarakat. Mengamati seperti itu menakjubkan dan secara luar biasa mengherankan. Bahasa sudah menjadi dewasa.

Kalau surat kabar betul-betul akan membawa perubahan yang baik buat suatu suku bangsa, kehadirannya sebaiknya bukan sebentar saja, melainkan untuk jangka panjang. Sebenarnya surat kabar sebaiknya menjadi bagian yang hakiki buat suatu suku bangsa. Yang dicari, memang bukan pelastarian surat kabar—yang hanya alat penolong itu—melainkan kebiasaan menulis dan membaca bahasa daerah.

9. Sebaiknya juga usaha membuat surat kabar dijadikan suatu kegiatan bisnis yang dapat menjadikan tambahan pendapatan buat suatu komunitas. Perkiraan kami suatu surat kabar yang sukses dapat meliputi usaha seorang per seratus jumlah penduduk. Sebagai pekerja yang digaji penuh waktu, mungkin sepersepuluh dari semua karyawannya. Tambahan yang paruh waktu termasuk looper, pengarang, wartawan, dan sebagainya. Jelas surat kabar yang dibuat dengan bahan materi yang baik akan menjadi berdampak positif pada suatu masyarakat. Sikap perorangan terhadap dirinya, bahasanya dan komunitasnya akan berubah secara positif. Berbagai sikap komunitas sendiri (secara keseluruhan) akan berubah juga, baik penilaian diri dan pandangannya terhadap dunia luar, termasuk suku tetangga. Urbanisasi yang berdampak secara negatif

bahasa-bahasa daerah sampai sekarang akan ditekan kembali oleh komunitas yang sehat kembali. Mengapa pergi ke kota kalau ada kesempatan kerja di desa?

Selalu harus ada uang, dan untuk gagasan ini itu juga betul. Tetapi yang menggembirakan ialah bahwa hanya uang muka dibutuhkan dan itu sedikit saja. Kegiatan-kegiatan membuat surat kabar dapat dimulai dari rumah-rumah peminat sendiri dengan bahan-bahan yang sederhana dan murah. Lama-lama penjualan hasil penulisan itu menjadi penghasilan untuk membayar gaji dan untuk perkembangan lebih lanjut.

10. Sebagai titik pembicaraan terakhir kita dapat menjelaskan bahwa kemungkinan mendirikan kegiatan penulisan dan pembacaan bahasa daerah meliputi beberapa pertimbangan yang tidak boleh dikompromi.

Salah satunya ialah bahwa **aksara yang dipilih harus berdasarkan prinsip fonemis dan bukan fonetis**. Fonemis adalah sistem di mana lambang bunyi yang dipilih merupakan bunyi yang penting (signifikan). Bunyi yang dapat diwujudkan penutur dalam pembicaraannya bukan semuanya penting. Selanjutnya, **kita ikut prinsip-prinsip ilmu kemelekakan huruf (*literacy*)/pembacaan sehingga kecepatan dan kemudahan pembacaan diutamakan**. Mungkin untuk ini saja harus ada petunjuk dari ahli bahasa. Setelah itu ditentukan dan disesuaikan oleh masyarakat sendiri, sudah terbuka pintu untuk pembacaan (dan penulisan) yang akan menentukan hari esok suku bangsa yang makin lama makin baik.

Satu prinsip yang lain adalah bahwa **orang setempat menentukan apa yang dikarang dan apa yang dimuat di koran, bukan orang luar**. Sebagaimana penutur-penutur sendiri yang mengambil keputusan sendiri, begitu juga mereka dapat berdiri sendiri dan masuk ke masa depannya dengan kepercayaan diri.

11. Dua tindakan penting terhadap masa depan bahasa-bahasa daerah di Indonesia

Telah dikemukakan oleh para penentang pengendalian populasi bahwa jika pasangan suami-isteri di dunia ini berhenti menghasilkan anak-anak, sekitar tiga puluh lima tahun (atau mungkin lebih lama sedikit) umat manusia akan melewati titik dibangkitkan kembali dalam bentuk apa pun. Saya tentunya tidak ingin mendiskusikan tentang keluarga berencana (karena bukan keahlian saya yang menjadi dasar untuk mendiskusikannya). Tetapi di sini kita mendapatkan gambaran yang sama (analogi) yang sangat tepat bila kita berbicara mengenai pelestarian dan pembinaan bahasa.

Jika kita berhenti menggunakan bahasa daerah dan bahasa ibu kita, sekitar tiga puluh lima tahun lamanya bahasa itu akan memburuk dan sangat jauh melewati harapan untuk ada perbaikan. Tentu saja bahasa, sebagaimana juga budaya manusia, selalu berubah. Bila demikian, jelas bukan tentangan perubahan yang kita bicarakan. Seharusnya kita berbicara—secara positif—tentang dukungan kita terhadap kelanjutan hidup bahasa. Sama seperti dokter-dokter memeriksa gejala-gejala paling penting bagi pasiennya, kita harus memeriksa tanda-tanda paling penting tentang bahasa-bahasa yang keluar dari mulut kita.

Saya merasa ada dua hal yang sangat penting dan praktis yang sesuai dengan kemampuan kita. Kita dapat bertindak (atau tidak bertindak) untuk memastikan kelangsungan hidup, bahkan pembinaan bahasa-bahasa daerah kita. Satu adalah yang sedang kita lakukan yang seharusnya segera diberhentikan. Yang lain adalah yang sedang kita tidak lakukan yang seharusnya kita mulai dengan cepat dan dengan tekad.

a. Yang sedang kita lakukan yang seharusnya segera diberhentikan

Terus terang, kita sedang “mencekik” bahasa-bahasa lokal bagi angkatan berikutnya dengan pendekatan yang berlebihan untuk memberi anak-anak kita pendahuluan pada permulaan belajar bahasa nasional untuk pendidikan dan komunikasi lebih luas. Pertama beberapa analogi. Kalau nasi sudah masak, kita mengecilkkan api. Kalau kopi sudah siap, kita mengangkatnya dari kompor. Kalau ember sudah penuh, kita mematikan air.

Pada setiap analogi di atas ada langkah yang perlu diambil, dan ada juga suatu titik yang kalau dilewati ada kerusakan pada hasilnya dan/atau kekurangan yang sia-sia pada yang disediakan.

Demikian juga dengan usaha-usaha kita untuk mengajar anak-anak kita Bahasa Indonesia. Dari pengamatan saya selama lebih dari dua puluh lima tahun di Indonesia, orang tua ingin memberi anak-anaknya kesempatan dahulu di sekolah, jadi yang mampu berkata kepada anak-anaknya dalam bahasa Indonesia. Pada mulanya hanya anak-anak pegawai negeri atau guru yang menikmati keuntungan ini. Tetapi secara berangsur-angsur, semakin luas daerah yang menggunakan Bahasa Indonesia dengan efektif, sehingga hampir semua orang yang dapat berbahasa Indonesia menggunakannya dengan anak-anaknya.

Tetapi hal itu berlebihan sekali dan sungguh menyia-nyiakan waktu bagi tahun-tahun perkembangan anak-anak untuk memperoleh dan meneruskan bahasa ibunya. Oleh karena seorang anak akan menghabiskan sedikitnya enam jam per hari dan enam hari per minggu selama dua belas tahun atau lebih untuk belajar dan menggunakan Bahasa Indonesia, cukup banyak waktu untuk mengembangkan dan memperkuat penggunaan bahasa nasional.

Terbanyak yang perlu dibuat orang tua untuk anaknya ialah menyediakan bahan-bahan dasar bahasa nasional. Sebenarnya, dengan televisi dan radio yang sudah ada di mana-mana, bahkan jika orang tua tidak pernah bicara satu kata pun Bahasa Indonesia dengan anak-anaknya, keturunannya tetap memperoleh bahasa

pendidikan yang cukup sehingga mereka tidak kesulitan pada hari pertamanya di sekolah dan pada tahun-tahun kemudian.

Tetapi apa yang terjadi? Kedua orang tua selalu bicara Bahasa Indonesia kepada anak-anaknya. Kemudian tante dan paman dan para tetangga juga ikut bicara kepada anak-anak yang sama itu dalam bahasa nasional. Hampir semua pelajaran bahasa ibunya diturunkan ke kegiatan mendengarkan secara pasif. Bahasa ibu anak itu bukan lagi bahasa lingkungan. Tentu saja, penguasaan bahasa ibunya menjadi cacat. Anak itu menjadi asing terhadap bahasa yang dipakai di tempat kelahirannya sendiri. Dan karena bahasa menjadi pembawa budaya, budaya lokal secara tidak sempurna diwarisi ke angkatan baru.

Apa yang sebaiknya dapat dilakukan? Idealnya hanya satu orang tua seharusnya bicara sama anaknya dalam bahasa Indonesia, baik itu sebagian waktu atau waktu penuh. Orang-orang lain dalam lingkungan keluarga terus menggunakan bahasa lokal dengan anak tersebut. Sesungguhnya bahasa lokal harus merupakan bahasa yang dipakai dalam rumah tangga kecuali untuk hal-hal tertentu dan jelas sekali, seperti menolong anak memperoleh Bahasa Indonesia cukup untuk mulai bersekolah. Bahkan itu tidak juga perlu. Guru kelas satu dapat secara mudah menjadi jembatan satu-satunya untuk setiap anak menambah bahasa nasional ke bahasa ibunya yang diperlukannya untuk tahun-tahun sekolahnya.

Yang biasanya tidak dimengerti adalah bahwa kita tidak dibatasi pada satu bahasa dalam lingkungan komunikasi kita. Pada masa pertumbuhannya warga negara India biasa berbicara lima atau enam bahasa, sesuai dengan masyarakat di sekelilingnya. Semua bahasa itu bertahan dan digunakan secara baik. Tetapi di Indonesia kita telah mendapat gagasan bahwa kita harus memilih satu bahasa. Kita kurang pintar memilih untuk kelangsungan hidup kekayaan warisan bahasa lokal kita.

Sedikit upaya kreatif dari masyarakat dapat dengan mudah mengubah kemerosotan penggunaan bahasa lokal. Masyarakat perlu menentukan bahwa mereka akan selalu berbicara dalam bahasa ibu kepada semua anak-anak yang bukan anaknya sendiri. Kepada anak-anaknya sendiri mereka akan berbicara Bahasa Indonesia secara terbatas hanya supaya anaknya dapat menikmati bahasa nasional pendidikan.

Jika kita saling menganjurkan dalam hal ini, bahasa lokal akan berkembang dan akan pulih dari kemerosotan penggunaannya yang makin cepat tidak digunakan dan juga kurang diperhatikan. Bahasa-bahasa ibu kita akan menguat dan menjadi sangat penting. Anak-anak kita akan menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik sebagai alat tambahan saja di antara sekian banyak metode komunikasi.

Tetapi kita harus merencanakan hal itu. Oleh karena kebiasaan pemakaian Bahasa Indonesia dalam rumah tangga kita telah ditetapkan teguh, kita harus memilih untuk menolaknya pada tingkat lokal keluarga dan kampung. Guru-guru di sekolah dan kepala-kepala desa, dengan juga camat-camat dan bupati-bupati dapat membantu kita. Tetapi hal itu harus menjadi keputusan dan upaya masyarakat sendiri; kalau tidak, rencana itu tidak akan berhasil. Walaupun anak-anak secara mudah dan secara alami mempelajari banyak bahasa yang ada pada lingkungan lokalnya dengan tidak mencampurkannya dan selalu tahu persis kapan menggunakan masing-masing bahasa itu, namun mereka perlu melihat dari pemakaian masyarakat bahasa mana yang digunakan sebagai bahasa dasar dalam lingkungannya. Jika orang tua tidak bersimpati pada bahasa ibunya, anak-anaknya juga tidak bersimpati. Jika orang tua bersemangat tentang bahasa daerahnya, anak-anaknya akan bersemangat juga.

Lingkungan-lingkungan adalah tempat unik untuk mengendalikan solidaritas bahasa dan budaya. Jika ancaman timbul berkenan dengan ekspresi agama atau pengalaman kebudayaan atau penerapan budaya atau pemilikan tanah (termasuk perbatasan antar-lingkungan) atau kesehatan umum—dan hal ini mendatangkan perhatian dari masyarakat—kita yakin bahwa masyarakat berdiri bersama dan menolak ancaman apapun dari luar. Tetapi apa yang terjadi ketika bahasa kita diambil dari kita secara perlahan sehingga akibatnya sama dengan ancaman-ancaman tadi? Kita letih saja dan tidak memperhatikan hal itu. Yang perlu kita lakukan adalah bekerja sama sebagai masyarakat untuk mengawetkan bahasa kita dengan tindakan dan praktek dan penggunaan yang semuanya umum.

Dengan kehilangan bahasa-bahasa lokal juga akan jadi ketegangan pada budaya-budaya lokal. Bukankah sangat mengherankan bagi kita bahwa makin bertambah masalah-masalah tingkah laku sekelilingi kita? Anak-anak kita melihat banyak persaingan dan ketegangan budaya di dunia luas. Mereka tertarik bagi yang baru dan lebih menarik. Tetapi mereka tidak akan pernah meninggalkan bahasa dan budaya ibunya jika bahasa dan budaya itu dihormati dan digunakan dan diteruskan kepada angkatan baru dengan semangat.

Jadi ada sesuatu yang kita lakukan saat ini yang perlu kita berhentikan atau kita ubah dengan segera. Jika tidak, kitalah yang dapat disalahkan karena hilangnya bahasa-bahasa lokal dan ketegangan pada budaya-budaya lokal. Sebanyak apapun upaya untuk membukukan bahasa-bahasa lokal, kita tetap tidak akan melestarikannya jika kita tidak tetap menggunakannya tiap-tiap hari di keluarga kita dan membiarkannya berkembang secara alami melalui tantangan dan kesempatan di masa depan.

b. Yang tidak kita lakukan saat ini yang seharusnya segera mulai dilakukan

Ya, ada sesuatu yang kebanyakan kita tidak lakukan, dan ketika kita mulai melakukannya, itu akan memastikan kelangsungan hidup dan penggunaan bahasa-bahasa dan budaya-budaya lokal dengan baik dan tentu

saja termasuk juga kesatuan sosial masyarakatnya yang memilikinya dan dari itu tidak dapat dipisahkan. Sedikit latar belakang akan menolong kita mengerti situasi yang merupakan sebuah kesempatan yang dapat diambil.

Kita semua mempelajari bahasa ibu kita hampir tanpa disadari, asal digunakan di sekeliling kita. Kita mendengarnya dari napas pertama di dunia baru dan aneh ini. Kita mendengar orang berbicara di mana-mana, dan tanpa memikirkannya, kita mulai mengerti yang kita dengar. Makin berkembanglah kita dalam bulan-bulan pertama, kita mulai meniru dengan mulut sendiri apa yang dibicarakan di sekeliling kita. Orang tidak hanya saling berbicara, tetapi—mengherankan juga—mereka berbicara juga dengan kita. Tidak mengherankan bila kita juga merasa terdorong untuk menggunakan alat komunikasinya itu.

Pada awalnya, hanyalah bunyi-bunyi yang keluar dari mulut kita, yang mungkin membuat kita disayangi tetapi sama sekali tidak mempunyai arti. Kemudian rangkaian bunyi mulai keluar dari mulut kita yang kelihatannya dimengerti oleh pendengarnya. Pada suatu waktu di dalam perkembangan diri kita, kita mulai membentuk kata nyata dan kita belajar untuk mengulanginya khusus karena kata itu memperoleh respons dari orang dekat kita. Tidak lama lagi kita mengeluarkan kelompok kata, dua atau tiga kata sekali, kemudian anak kalimat. Berikutnya lagi kalimat yang lengkap. Sebelum kita sadari—dan sama sekali tanpa berpikir—kita sudah memperoleh bahasa masyarakat kita. Bukan hanya kita dapat mengatakan apa saja yang kita inginkan dan harapan dimengerti, tetapi kita juga dapat mendengar dan mengerti tujuannya dari semua orang di sekeliling kita.

Berbicara dan mendengarkan. Itulah yang disebut komunikasi. Kamu bicara dan aku mendengar kamu. Aku membalas dengan pembicaraan sendiri dan kamu mendengar dan mengerti aku.

Tetapi beribu-ribu tahun lalu, orang mulai memperhatikan bahwa kegiatan berbicara dan mendengarkan mempunyai kekurangan yang sangat serius. Saya tidak dapat mengingat sebenarnya apa yang saya katakan lima menit yang lalu, walaupun dasar idenya saya tahu, dan apa yang saya percakapkan kemarin adalah hanyalah sebuah memori yang kurang jelas. Apa saja dari kata-kata saya yang begitu mengesankan Saudara?

Beberapa ribu tahun yang lalu seseorang mengemukakan cara menulis, suatu metode untuk merekam ucapan manusia yang bertahan lebih lama daripada ingatan jangka pendek. Kalau tulisan akan berguna sebanding dengan ucapan (yang nyata tulisan disamakan dengan ucapan), jelas kegiatan mendengarkan juga harus mempunyai pasangan, yaitu kegiatan membaca. Sama seperti berbicara dan mendengarkan berpasangan, begitu juga menulis dan membaca (walaupun untuk Bahasa Inggris lebih alami kita mengatakan membaca dan menulis, urutan yang biasanya kita peroleh untuk ketrampilan itu).

Hampir semua orang dapat berbicara dan mendengar. Jauh lebih terbatas bagian dari keluarga besar manusia yang juga dapat menulis dan membaca. Tetapi betapa kemampuan yang dinyatakan olehnya. Sungguh menakjubkan perubahan kehidupan masyarakat dan pribadi orang yang dapat membaca dan menulis. Apakah Saudara ingat ketika belajar di kelas satu dan dua, bagaimana dunia terbuka waktu belajar membaca dan menulis? Dengan membaca dan menulis kita dapat beruntung, bukan hanya dari pemikiran penutur bahasa kita yang tidak ada di lingkungan kita, tetapi kita beruntung juga dari pengetahuan dan pelajaran yang diturunkan abad ke abad dan yang melintasi perbatasan nasional, bahkan melewati bahasa dan budaya kita sendiri (melalui penerjemahan). Betapa mengagumkan dunia yang dibukakan oleh pengetahuan dari buku-buku.

Semua hal ini sangat kurang menarik bagi Saudara masing-masing karena Saudara bukan hanya dapat bicara dan mengerti (mendengarkan) beberapa bahasa, melainkan membaca dan menulis—mungkin dalam beberapa tulisan atau ejaan—juga sudah mendarah daging bagi Saudara. Tetapi ada poin yang ingin saya kemukakan berdasarkan pendahuluan tadi yang mungkin akan memengaruhi pikiran Saudara.

Hanya bahasa-bahasa yang dapat dibaca dan ditulis yang memiliki kekuatan untuk bertahan ke angkatan berikutnya—bahkan lebih lama lagi. Semua bahasa yang tidak dituliskan (maka dari itu tidak juga dibaca) akan punah. Tentu kita mengetahui hal itu secara dangkal, karena usaha yang lebih nyata harus dilakukan pemerintah untuk melestarikan bahasa-bahasa lokal—dan semuanya itu berhubungan dengan menulis (atau merekam) dan membaca. Tetapi pelestarian bahasa-bahasa kita sebagai barang-barang yang dimuseumkan saja bukanlah pelestarian bahasa yang sesungguhnya.

Ketika kita sendiri mulai menulis dan membaca bahasa kita, bahasa itu akan bertahan sampai masa depan. Mengapa begitu? Oleh karena aspek yang sangat penting di kegiatan menulis dan membaca: kegiatan langsung dengan perhatian yang disengaja untuk berkomunikasi.

Kebanyakan dari kita sedikitnya setengah sadar ketika kita meminta informasi atau memproses permintaan untuk menolong. Namun juga ada banyak komunikasi—ngobrol-ngobrol atau basa basi pun—yang boleh dikatakan berada di bawah perhatian. Akan tetapi dalam menulis atau membaca sesuatu, adalah yang perlu kita perhatian dan upayakan sungguh-sungguh daripada hanya interaksi sosial. Itu sebabnya bahasa menjadi lebih sehat dan berkembang baik.

Begini, Saudara dapat dengarkan sesuatu, baik program televisi maupun ceramah pegawai pemerintah, dan setelahnya Saudara kurang dapat memberitahu apa yang baru Saudara dengar. Mendengarkan biasanya seotomatis bernapas, sedangkan mendengarkan dengan baik adalah pekerjaan berat. Begitu juga dengan berbicara. Berbicara dengan baik adalah komunikasi yang bertanggung jawab, tetapi kita semua tahu bagaimana mudahnya berbicara dan tidak berkata apa-apa sama sekali.

Dari segi lain, membaca dan menulis adalah lebih sulit dilakukan bila tanpa perhatian yang baik. Jauh lebih sulit melamun sambil membaca, walaupun tidak mustahil. Ketika perhatian menyimpang, biasanya kemajuan membaca suatu halaman berhenti dan diteruskan hanya ketika perhatian diperbaiki. Yang paling susah—dan barangkali paling menyenangkan—adalah menulis. Sangat sulit menulis karangan atau surat tanpa memberikan perhatian penuh kepada tugas. Perhatian itu jauh lebih sulit tetapi keuntungannya juga jauh lebih besar.

Berkenaan dengan menghidupkan kembali bahasa lokal kita, membaca dan menulis adalah jalan menuju kesuksesan. Ketrampilan bahasa—di sini, membaca dan menulis—yang kita buat dengan perhatian yang penuh, memberi dampak bagi kita sebagai proses berpikir dan hasilnya yang jauh lebih besar. Bukan hanya membaca dan menulis sangat membantu memperkuat dan mengarahkan pengembangan bahasa, melainkan juga mencapai hasil yang lebih luas di bidang pengembangan pribadi dan masyarakat.

Suatu program untuk melaksanakan membaca dan menulis dalam bahasa lokal adalah hal yang perlu sangat dihargai. Hanya beberapa orang yang diperlukan untuk melakukannya, tetapi dapat dengan cepat menjangkau keseluruhan masyarakat. Berbagai macam penulisan dapat digunakan, tetapi saya mau merekomendasikan surat kabar masyarakat untuk beberapa alasan. Pertama, walaupun penulis mungkin kurang jumlahnya, mereka akan menarik pembaca dari lingkaran sesuai dengan tulisannya yang menarik dan bermanfaat. Kedua, siapa saja dapat belajar menulis. Surat kabar dapat mengembangkan kemampuan menulis yang bermacam-macam daripada menulis buku saja. Ketiga, kabarnya mutakhir. Walaupun penulis mungkin menyajikan sejarah, itu mutakhir bagi pembaca karena baru membacanya. Keempat, ini adalah upaya yang menghasilkan upaya lagi terus-menerus. Setelah waktu awal dengan pekerjaan berat untuk menjalankannya, surat kabar lokal akan makin bergerak lancar dan mendukung sukses masa depannya sendiri. Kelima, makin lama masyarakat menganggapnya kepunyaannya sendiri.

Penyebab bahasa-bahasa lokal kita mengalami tekanan ekstrim dewasa ini adalah sederhana saja, yaitu bahwa terlalu mudah mengabaikannya. Tetapi jika kita mengabaikannya, dengan segera kita tidak memilikinya lagi untuk mengabaikannya. Mereka akan berakhir. Tetapi jika kita berusaha melestarikan dan mengembangkannya—dengan melalui membaca dan menulis—bahasa kita akan menjadi pokok untuk masyarakat yang sehat dan berkembang baik. Tekanan dari dunia modern yang mendorong dengan kejam melawan nilai-nilai lokal dan adat istiadat akan dikalahkan. Tetapi kita harus memutuskan untuk menjadi orang pertama yang melakukannya.

Diperkirakan bahwa lebih dari sembilan puluh persen dari semua bahasa dunia akan punah dalam dua puluh lima sampai empat puluh tahun ke depannya. Berarti lebih dari 5400 bahasa, dan belum termasuk dialek-dialeknya. Kira-kira enam ratusan yang akan bertahan mempunyai satu kesamaan: Semua bahasa itu memiliki pengalaman dalam menulis dan membaca. Banyaknya penutur bahasa adalah faktor kurang penting bagi kelangsungan hidup dan berkembangnya bahasa dibandingkan dengan kenyataan menulis dan membaca.

Dalam makalah saya "*Surat kabar bahasa daerah sebagai strategi untuk mempertahankan bahasa dan sastra daerah*" Saudara dapat mendengar (atau bahkan lebih baik membaca!) banyak rincian tentang permulaan mendirikan suatu surat kabar lokal. Cobalah dan Saudara akan melihat apakah itu berhasil dengan gemilang bagi pelestarian dan perkembangan bahasa lokal Saudara sendiri.

Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bahasa-bahasa lokal, ada satu hal yang banyak sekali kita lakukan yang harus dihentikan atau ubah dengan cepat. Demikian pula, ada hal yang lain yang tidak kita lakukan yang harus kita segera lakukan dengan kesungguhan. Hal-hal lain apa saja yang dibuat, dua hal ini paling penting. Saya yakin bahwa program-program besar dan pendanaan yang banyak dan konferensi hebat dan bahkan banyak pembicaraan akan sangat kurang mempengaruhi keadaan bahasa-bahasa lokal kita pada masa depan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bahasa-bahasa lokal akan bertahan dan berkembang ketika paling sedikit kita memperhatikan dua hal yang dibahas di makalah ini.

12. Kesimpulan.

Surat kabar dalam bahasa-bahasa daerah adalah alat penting untuk mencapai keadaan penulisan dan pembacaan umum bagi setiap perorangan dan masyarakat. Dukungannya disukai karena keseluruhan masyarakat terlibat. Hampir tanpa sadar keseluruhan komunitas merasakan dampaknya, mau tidak mau. Walaupun fokus makalah ini ada pada pertolongan untuk melestarikan bahasa-bahasa daerah, efek samping yang ada lebih bermanfaat, kalau boleh dikatakan demikian. Artinya manusia, baik perseorangan maupun keseluruhan satu kampung, diberdayakan hidup yang lebih bagus, dengan arti pribadi yang lebih-lebih, dengan hubungan sosial yang lebih damai.

Andaikata kita merasa tergerak untuk menolong sesama kita, apa yang kita buat? Dengan sekian juta rupiah kita dapat mengongkosi seorang menjadi dokter dengan harapan bahwa sesudah itu dia kembali ke kampung halamannya menolong sesamanya. Mudah-mudahan jadi, tetapi tidak tentu juga. Pendekatan ini diberi nama *kesatuan* karena kemiripannya dengan proyek kelapa hibrida yang begitu sempit dampaknya; begitu juga pengongkosan perkuliahan. Mudah-mudahan jadi dengan dampak luas, tetapi tidak tentu juga.

Sebaliknya, pendekatan surat kabar dalam bahasa daerah dapat kita namakan yang sesuai dengan dampaknya, yaitu *keseluruhan*. Dengan bantuan dana yang sama contoh di atas pengungkasan calon dokter, kita dapat menyentuh lebih luas dan lebih dalam juga. Biar mungkin hanya sampai satu persen penduduk terlibat membuat surat kabar secara langsung, yang menjadi pembacanya lebih dari sepuluh kali lipat. Memang itu perkiraan yang berhati-hati. Pengamatan kami ialah bahwa satu eksemplar surat kabar dibaca oleh paling sedikit sepuluh kenalan pemegangnya.

Andaikata penutur-penutur bahasa daerah sendiri tidak berminat untuk melaksanakan strategi-strategi untuk melestarikan bahasanya, berarti bagi mereka tidak menjadi masalah kalau bahasa ibunya punah. Mereka juga tidak memahami kepentingan kebudayaannya, jadi kehilangan bahasanya tidak penting baginya. Hampir semua suku bangsa di Sulawesi Selatan (bagaimana di Sulawesi Tenggara?) sering terdengar kata, "Semuanya dapat berubah, tetapi adat tidak mungkin akan berubah." Bagi orang yang tidak memperhatikan bahasa dan kebudayaannya sendiri, kata itu hanya kosong. Adat sudah mengalami banyak perubahan yang dampaknya negatif.

Mari kita memandang lagi bahasa-bahasa daerah Sulawesi Tenggara dengan kegiatan memberdayakan penutur-penuturnya dengan menulis dan membaca ungkapan batinnya.

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH¹⁾

Mahsun
(Universitas Negeri Mataram)

1. Pendahuluan

Unesco mencatat bahwa 50% dari 6700 bahasa di dunia yang ditemukan di delapan negara: Papua Nugini, Indonesia, Nigeria, India, Meksico, Kamerun, Australia, dan Brazil dalam satu sampai empat generasi mendatang menghadapi ancaman kepunahan yang sangat serius (Rachman, 2006). Itu sebabnya, berbagai upaya yang dilakukan oleh organisasi dunia tersebut demi mempertahankan eksistensi bahasa daerah (yang sebagian besar menjadi bahasa ibu) terus digalakkan. Namun, sejauh mana efektivitas upaya itu yang kini tengah bersaing dengan arus modernisasi dan globalisasi yang setiap saat selalu mengancam eksistensi bahasa-bahasa tersebut? Padahal, bahasa daerah/ibu merupakan bahasa pertama yang digunakan oleh manusia dalam mentransmisi nilai-nilai etika dan estetika pada generasi penerusnya. Melalui bahasa daerah/ibu itulah anak manusia dibentuk untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, hilangnya bahasa daerah/ibu berarti hilang salah satu media pembentukan diri manusia.

Dalam hubungan ini, Poedjosoedarmo (2003) mensinyalir dari hasil temuannya, bahwa mengendurnya nilai-nilai etika dalam tata pergaulan generasi muda Jawa bersamaan dengan mulai melemahnya penguasaan generasi muda pada sistem tingkat tutur Bahasa Jawa. Tanda ini, jelas menggambarkan bagaimana peran strategis bahasa daerah/ibu (yang sebagian besar di Indonesia merupakan bahasa daerah) dalam membentuk kepribadian manusia Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya nyata untuk pelestarian dan pengembangan bahasa daerah demi menyelamatkan bahasa (termasuk sastra) daerah dari ancaman kepunahan, yang salah satunya melalui pembelajaran sebagai materi muatan lokal.

Lalu persoalannya, sudah siapkah bangsa Indonesia menjadikan bahasa daerah untuk tujuan di atas, dilihat dari jumlah bahasa daerah yang hidup dan berkembang di wilayah ini cukup besar? Anton Moeliono (1985) mencatat hanya enam bahasa besar, yaitu Jawa, Sunda, Madura, Batak, Bali, dan Aceh yang selama ini menjadi bahasa pengantar di tingkat awal sekolah dasar.

Berdasarkan uraian di atas, berikut ini akan dipaparkan beberapa hal yang terkait dengan upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah melalui kegiatan pembelajaran bahasa dan sastra daerah sebagai salah satu materi muatan lokal.

2. Beberapa Persoalan dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra Daerah

Secara teoretis, masalah pembelajaran bahasa, baik itu bahasa nasional, daerah, ataupun bahasa asing, akan selalu berkutat dengan persoalan bahasa standar. Hal ini penting karena untuk mengukur capaian keberhasilan dalam proses pembelajarannya haruslah didasarkan pada satu kriteria penilaian yang baku atau standar. Oleh karena itu, penentuan standar evaluasi capaian hasil belajar tentunya akan berpedoman pada satu kerangka acuan berbahasa secara baik dan benar, dan itulah yang disebut bahasa standar.

Standardisasi bahasa tentu tidak hanya menyangkut standardisasi bahasa itu sendiri, tetapi juga menyangkut standardisasi aspek-aspek kebahasaan dari bahasa tersebut. Menyangkut standardisasi bahasa, dimaksudkan bahwa dalam suatu bahasa, apakah itu bahasa nasional, bahasa asing, atau bahasa daerah, dalam praktik pemakaiannya, tidak pernah hadir dalam suatu sosok yang homogen. Ia hadir dalam berbagai varian, baik itu berupa variasi sosial maupun variasi dialektal (geografis). Oleh karena itu, untuk penentuan bahasa standar dari bahasa itu haruslah dilakukan kajian secara sosiolinguistik dan melakukan musyawarah penentuan bahasa standar yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan/*stakeholders* dengan bertumpu pada hasil kajian secara sosiolinguistik tersebut. Dalam pada itu, penentuan varian tertentu sebagai representasi dalam berbahasa secara baik dan benar pada bahasa itu haruslah didahului oleh suatu kajian yang komprehensif tentang jumlah varian, jumlah penutur serta daerah sebaran geografis dari penggunaan varian-varian tersebut.

Adapun yang menyangkut standardisasi aspek tertentu dari suatu bahasa, maksudnya adalah upaya kodifikasi aspek-aspek kebahasaan seperti standardisasi aspek ejaan (tata tulis), tata bahasa dan lainnya. Standardisasi dalam pengertian yang terakhir ini, tentu akan memanfaatkan hasil kajian linguistik teoretis, seperti hasil kajian fonologi untuk dasar penentuan standardisasi ejaan, hasil kajian bidang morfologi, dan sintaksis untuk standardisasi tata bahasa.

Selanjutnya, oleh karena dalam pengajaran bahasa tercakup pula pengajaran kesastraan diperlukan pula bahan-bahan yang menyangkut kesastraan. Dalam hal ini, informasi yang menyangkut bentuk, jenis, sikap

¹⁾ Makalah ini disajikan dalam Kongres Internasional Bahasa-bahasa Daerah di Sulawesi Tenggara

masyarakat pendukung, kapan karya itu digunakan, serta kira-kira berapa jumlah peminat dan pencipta sastra yang masih hidup dalam komunitas tutur bahasa tertentu, yang akan dijadikan bahan materi pengajaran tersebut. Dalam hubungan ini, kajian yang menyangkut persoalan distribusi bentuk dan jenis karya sastra yang masih tumbuh dan berkembang pada masyarakat tutur yang menjadi objek pengembangan materi muatan lokal ini haruslah dilakukan secara komprehensif. Selain itu, kajian sastra harus pula diarahkan pada kebutuhan dalam mendesain materi pengajaran yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang ingin dikaji dalam studi ini. Dalam hal ini, harus tergambar misalnya bentuk dan jenis sastra yang relevan bagi materi untuk tingkat TK, yang berbeda dengan misalnya untuk tingkat SD. Perbedaan itu tidak hanya menyangkut bentuk dan jenis tetapi juga menyangkut isi. Atas dasar itulah nantinya akan dilakukan seleksi materi kebahasaan dan kesastraan yang akan dijadikan bahan pada lokakarya pengembangan Garis-garis Besar Program Pengajaran dan pengembangan materi pengajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan tempat materi itu akan diajarkan. Pada akhirnya, materi yang tersusun itu haruslah diuji coba tentang kelayakannya, kesesuaiannya dengan tujuan pengajaran, mengevaluasi pelaksanaannya, serta membuat rekomendasi. Tentunya, kegiatan ini haruslah diawali dengan kegiatan pelatihan calon guru yang akan mengajarkan materi yang akan diujicobakan itu. Hasil dari uji coba tersebut di samping akan berimplikasi pada penataan dan perapian kembali materi pengajaran, juga akan dimanfaatkan dalam penataan dan perapian GBPP, sehingga diperoleh sebuah GBPP materi pengajaran bahasa dan sastra dalam ketiga bahasa tersebut yang lebih representatif.

Berangkat dari pemikiran di atas, pengembangan materi pembelajaran bahasa dan sastra daerah sebagai materi muatan lokal dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini.

A. Seleksi Bahan dalam Rangka Pengembangan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP), dengan berbagai kegiatan yang bertujuan memecahkan masalah:

- a. penentuan jumlah varian dalam bahasa sasaran;
- b. penentuan ragam dan jenis hasil cipta sastra yang menggunakan medium bahasa sasaran;
- c. penentuan salah satu varian dalam bahasa itu sebagai acuan dalam berbahasa secara baik dan benar (bahasa standar);
- d. standardisasi aspek ejaan dan tatabahasanya;
- e. standardisasi kosa kata (pengembangan kamus);
- f. pengembangan Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP).

B. Pengembangan Bahan Pengajaran dan Aplikasinya dalam Proses Pembelajaran, dengan kegiatan yang ditujukan pada upaya pemecahan masalah:

pengembangan materi pembelajarannya sebagai representasi dari GBPP yang telah disusun.

C. Uji Coba Pembelajaran Materi, dengan kegiatan yang ditujukan pada upaya pemecahan masalah:

- a. penyusunan Buku Petunjuk Pembelajaran;
- b. penyediaan tenaga pengajar melalui pelatihan;
- c. pengembangan alat evaluasi;
- d. uji coba pengajaran.

Dari semua kegiatan yang dilakukan dalam upaya menjadikan bahasa dan sastra daerah sebagai materi muatan lokal di atas, ada dua hal yang dipandang cukup penting untuk dipaparkan secara terinci dalam makalah ini, yaitu masalah standardisasi ejaan dan penataan materi pembelajaran. Kedua hal tersebut dipaparkan secara berturut-turut berikut ini.

2.1 Beberapa Persoalan Standardisasi Ejaan

Dalam beberapa bahasa daerah biasanya memiliki tradisi tulis setempat dengan sistem tata tulis tersendiri. Sebagai contoh, apabila Bahasa Sasak memiliki aksara Jejawen, yang diadopsi dari sistem Hanacaraka Bahasa Jawa, Bahasa Samawa dan Mbojo mengadopsi sistem tata tulis dari aksara Lontarak, Bugis. Untuk keperluan pengembangan mulok, dengan harapan dapat tercapainya manfaat di atas, sistem tata tulis dalam bahasa lokal diusulkan menggunakan aksara Latin, dengan prinsip-prinsip bahwa ejaan yang dikembangkan itu harus memiliki karakter berikut ini.

1. Kecermatan: tidak boleh mengandung kontradiksi dalam pelambangan: bunyi [e] dilambangkan dengan [a] dalam B. Sasak
2. Kehematan: hemat tenaga dan pikiran dalam berkomunikasi: bunyi Plosif-Bilabial: dan Plosif Apikoposdental: Dalam Bahasa Mbojo
3. Keluwesan: terbuka bagi perkembangan bahasa di kemudian hari, Contoh: [ny] dalam bahasa Mbojo meskipun tidak ditemukan, tetapi karena bahasa tersebut memiliki bunyi [c], [j], maka berdasarkan hukum implikasional, lambang untuk bunyi itu disediakan untuk mengantisipasi pengembangan bahasa Mbojo terutama untuk mengantisipasi penyerapan dari bahasa lain.
4. Praktis: tidak menggunakan huruf baru yang mengharuskan perubahan mesin ketik

Berdasarkan prinsip di atas, semua bunyi dalam bahasa daerah, misalnya dalam bahasa Sasak yang memiliki kesepadannya dengan bunyi bahasa Indonesia dilambangkan sebagaimana lambang dalam bahasa Indonesia yang menggunakan aksara Latin, kecuali beberapa bunyi berikut ini.

1. bunyi [e] pada posisi akhir dalam bahasa Sasak ditulis dengan lambang <e> bukan <a>, tidak mengikuti ejaan Bahasa Bali atau Jawa: *cakre negare* bukan *cakra negara*; kecuali memang dilafalkan [*cakra negara*]
2. Bunyi glotal (Arab: hamzah) pada ketiga bahasa dilambangkan dengan <q> bukan <k>, misalnya Bahasa Sasak: [*amaq*] bukan [*amak*]; B. Samawa: <asq> bukan <asuk> 'anjing'; B. Mbojo:
3. Bunyi [ə], seperti dalam kata Bahasa Indonesia: <perang> ditulis <perang> baik dalam Bahasa Sasak, Samawa, maupun Mbojo
4. Bunyi [é] seperti dalam kata Bahasa Indonesia: <elok> ditulis: <éloq>
5. Bunyi [ó] seperti dalam kata Bahasa Indonesia: <tokoh> ditulis <tókoh>
6. Konsonan hambat plosif-bilabial dan plosif-Afrikodental dalam bahasa Mbojo: [ʔ] dan [ɖ]: *Zatu* 'ikut' dan *ɖari* 'mengiris', tidak ditulis dengan titik di bawah atau digarisbawahi, tetapi dengan menggunakan garis di atas.

2.2 Ihwal Penataan Materi

Penataan materi muatan lokal difokuskan pada pengembangan ketiga aspek, yaitu pengembangan logika, etika, dan estetika.

Setiap kompetensi dijabarkan dalam dua aspek perubahan, yaitu perubahan pada aspek kognitif dan psikomotorik. Sekadar contoh garis besar pengembangan materi berikut ini akan ditunjukkan dari salah satu hasil pengembangan materi pembelajaran TK dalam kegiatan pengembangan mulok Bahasa Samawa di NTB.

No.	Fokus Pembelajaran	Aspek Perubahan	
		Kognitif	Psikomotorik
1.	Pengem. Logika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami cara pengucapan kata-kata tertentu 2. Mengetahui pemakaian kata-kata tertentu dalam kalimat 3. Dapat menceritakan isi cerita 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan Pengucapan 2. Ketepatan penempatan kata dalam kalimat 3. Ketepatan kronologi/sistematika cerita yang dibuat 4. Ketepatan isi
2.	Pengem. Etika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat membedakan pemakaian bentuk yang memiliki oposisi jamak/minhalus dengan halus 2. Dapat membedakan tokoh yang memiliki karakter baik dan buruk 3. Dapat menyebutkan akibat yang ditanggung tokoh yang berkarakter baik dan buruk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan penempatan kata sesuai konteks dan situasi pertuturan (kesesuaian dengan mitra wicara) 2. Memperlihatkan tingkah laku yang santun, jujur, toleran dalam berbahasa dll.
3.	Pengem. Estetika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghafal syair-syair lagu dalam bahasa Samawa 2. Memahami penggunaan kata-kata ganti: <i>aku, kaji, kajulin, kauq, dan sia</i>; kata kekerabatan: <i>inaq, bapak, kakaq, dan adiq</i> dalam permainan peran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat memperagakan pembacaan syair dengan mimikri dan akting yang sepadan 2. Intonasi dan lafal 3. Dapat menyanyikan syair lagu dalam bahasa Samawa 4. Dapat memerankan peran tertentu dalam permainan peran 5. Kebersesuaian tuturan dengan peran yang diemban 6. Kelancaran gerak 7. Kesungguhan

Patut ditambahkan bahwa dalam praktek berbahasa sesungguhnya, antara perubahan yang terjadi pada aspek kognitif dengan perubahan pada aspek psikomotorik kadang-kadang terlihat dengan jelas, misalnya antara perubahan akibat pembelajaran pada fokus pembelajaran pengembangan etika butir (1) dapat terlihat dengan jelas pada perubahan aspek psikomotorik. Siswa dapat saja dari pembelajaran itu mengalami perubahan pada aspek kognitif, misalnya dia mampu menjelaskan perbedaan penggunaan pronomina: *aku, kaji, dan kajulen*, tetapi mungkin saja ketika diminta memberikan contoh pemakaiannya dalam tuturan, dia belum mampu menunjukkannya. Dari kasus ini jelas bahwa salah satu hasil dari pembelajaran materi itu baru mencapai hasil yang berupa perubahan pada aspek kognitif, belum mencapai perubahan pada aspek psikomotoriknya. Sebaliknya, dapat saja dari pembelajaran materi tertentu pencapaian kedua aspek itu bersifat simultan, artinya kedua-duanya muncul secara bersamaan, misalnya pencapaian aspek kognitif untuk fokus pembelajaran pengembangan logika butir (1) baru dapat terlihat jika siswa memang benar-benar mampu mengucapkan kata-kata itu secara tepat (pemuahan butir (1) aspek psikomotorik). Untuk kasus ini, hanya melalui pencapaian aspek

psikomotoriklah, pencapaian aspek kognitif dapat diukur. Persoalannya, ialah di antara kedua aspek itu yang manakah yang lebih tinggi bobot penilaiannya. Tentu, dengan mengingat bahwa bahasa dipelajari sebagai sebuah keterampilan bukan sebagai sebuah pemahaman, bobot yang tertinggi terletak pada pencapaian aspek psikomotorik. Jika dilihat dalam bentuk perbandingan, skor untuk aspek kognitif = 30 dan skor untuk psikomotorik = 70.

Berdasarkan garis besar pengembangan materi tersebut, maka disusunlah materi pembelajaran dengan berbasis pada tema pembelajaran, dan setiap tema mengemban amanat pencapaian ketiga kompetensi: pengembangan logika, etika, dan estetika. Sekadar contoh, sebaran ketiga kompetensi itu dalam pengembangan mulok, dapat dilihat dalam contoh pengembangan mulok Bahasa Samawa untuk tingkat TK berikut ini.

PELAJARAN I AKU

No.	Jenjang	Kompetensi	Realisasi Materi dan Pembelajaran	Konteks
1.	TK A	Logika	<p>Tema I: Aku</p> <p>-Guru mempertegas pengucapan kata ganti orang pertama: <i>aku, kajulin, dan kaji</i>.</p> <p>-Guru menugaskan siswa bertanya jawab dengan teman untuk memper-tegas pengucapan dan rujukan yang diacu kata ganti-kata ganti tersebut.</p> <p>-Guru menugaskan siswa untuk menyebutkan dengan kata-kata yang tepat perlengkapan atau ciri yang membedakan laki-laki dengan wanita.</p>	<p>-Tuturan guru yang mempertegas pengucapan kata ganti: <i>aku, kajulin, dan kaji</i>.</p> <p>-Percakapan seorang siswa dengan teman barunya saat saling menanyakan nama masing-masing.</p> <p>-Tuturan seorang sis-wa yang mengidentifikasi-kasikan diri sebagai individu yang ditampakkan dalam gambar dengan menyebut ciri-ciri khas yang menandai jenis kelaminnya.</p>
		Etika	<p>Tema I: Aku</p> <p>- Guru menugaskan siswa bertanya jawab dengan teman untuk mempertegas perbedaan penggunaan kata ganti <i>aku, kaji, dan kajulin</i>.</p>	<p>- Tuturan guru yang mempertegas perbedaan penggunaan kata ganti: <i>aku, kajulin, dan kaji</i></p> <p>-Percakapan siswa yang menunjukkan perbedaan penggunaan kata ganti jamak dan halus: <i>aku, kaji, dan kajulin</i>.</p>
		Estetika	<p>Tema I: Aku</p> <p>-Guru menugaskan siswa mendeklamasikan syair lagu bahasa Samawa.</p> <p>- Guru menyuru siswa bernyanyi bersama-sama syair lagu bahasa Samawa.</p>	<p>-Pembacaan syair lagu dengan gerak mimik oleh siswa.</p> <p>-Menyanyikan syair lagu samawa oleh siswa.</p>

PELAJARAN II AKU KE KAUQ

No.	Jenjang	Kompetensi	Realisasi Materi dan Pembelajaran	Konteks
1.	TK A	Logika	<p>Tema II: Aku ke Kauq</p> <p>-Guru mempertegas pengucapan kata ganti orang pertama: <i>aku, kajulin, kaji, kauq, dan sia</i>.</p> <p>-Guru menugaskan siswa bertanya jawab dengan teman untuk memper-tegas pengucapan dan rujukan yang diacu kata ganti-kata ganti tersebut.</p>	<p>-Tuturan guru yang mempertegas pengucapan kata ganti: <i>aku, kajulin, kaji, kauq, dan sia</i>.</p> <p>-Percakapan tiga orang siswa, untuk-tiap kelompok, dengan peran sendiri-diri yang mempertegas pemakaian kata ganti <i>aku, kajulin, kaji, kauq,</i></p>

				dan <i>sia</i> . -Bermain peran sesuai dengan kata ganti yang diperoleh dari pembagian.
		Etika	Tema II: Aku ke Kauq - Guru menugaskan siswa bertanya jawab dengan teman untuk mempertegas perbedaan penggunaan kata ganti <i>aku, kaji, kajulin, kauq, dan sia</i> .	-Tuturan guru yang mempertegas pengucapan kata ganti: <i>aku, kajulin, kaji, kauq, dan sia</i> . -Percakapan siswa yang menunjukkan perbedaan penggunaan kata ganti jamak dan halus: <i>aku, kaji, dan kajulin, kauq, dan sia</i> . -Bermainan peran menurut kata ganti jamak dan halus: <i>aku, kaji, dan kajulin, kauq, dan sia</i> yang didapat dari pembagian peran.
		Estetika	Tema II: Aku ke Kauq -Guru menugaskan siswa mendeklamasikan syair lagu bahasa Samawa - Guru menugaskan siswa bernyanyi bersama-sama syair lagu bahasa Samawa	-Pembacaan syair lagu dengan gerak/mimik oleh siswa. -Menyanyikan syair lagu -Bermainan peran menurut kata ganti jamak dan halus: <i>aku, kaji, dan kajulin, kauq, dan sia</i> yang didapat dari pembagian lembaran yang bertuliskan kata-kata tersebut.

PELAJARAN III BINATANG

No.	Jenjang	Kompetensi	Realisasi Materi dan Pembelajaran	Konteks
I.	TK A	Logika	Tema IV: Binatang -Guru menyuruh siswa menyimak cerita yang dituturkan guru. -Guru memberi contoh penyusunan kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya: <i>Me ade ..., Me pang/ apa..., Apa ade ...</i> dalam kalimat lengkap. -Guru memberi contoh penggunaan kata tanya (a) <i>Me ade ... (Me ade balóng përangé Ne Sisoq ke Ne Mayong?)</i> ; (b) <i>Me pang/apa... (Me pang/apa kabalóng Ne Sisoq ke me pang/apa kaléngé na? Me pang/apa kabalóng Ne Mayong ke me pang/apa kaléngé na?)</i> (c) <i>Apa ade ... (Apa ade tudapat lamén tuturet përangé Ne Sisoq ke apa ade tudapat lamén tuturet përangé Ne Mayong?)</i> . -Guru menyuruh siswa memberi contoh lain pemakaian kata tanya tersebut.	Guru bercerita tentang kisah "Ne Sisoq ke Ne Mayong" kemudian membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya tersebut. -Tuturan siswa yang berupa penceritaan kembali cerita di atas dengan kalimat sendiri. -Tuturan siswa dalam bentuk kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya: <i>me ade, me pang, apa, apa ade</i> .
		Etika	Tema IV: Binatang -Guru menugaskan siswa untuk membedakan karakter tokoh yang baik dan tidak baik serta akibat dari masing-masing karakter tersebut dengan memulai kalimat dengan kata atau kelompok kata:	-Tuturan siswa yang berisi pandangannya tentang sifat baik dan buruk.

			<i>kabalóng... kaléngé... ade yadapat leng...</i>	
		Estetika	<p>Tema IV: Binatang</p> <p>-Guru meminta siswa mengamati dan memperhatikan kerapian yang dikembangkan siput sehingga mampu memenangkan pertandingan.</p>	<p>- Mengamati gambar barisan siput yang bertanding dengan rusa dan disuruh komentar dari segi estesisnya.</p>

Untuk mengetahui secara lebih mendalam ihwal penataan materi pembelajaran mulok dengan penekanan pada ketiga kompetensi di atas serta bagaimana cara pembelajarannya dapat dilihat dengan membandingkan antara buku materi mulok dengan buku panduan pembelajaran yang telah disusun serta diujicobakan.

3. Catatan Penutup

Dengan berpatokan pada produk akhir penelitian ini berupa materi pembelajaran bahasa dan sastra daerah dengan penekanan pada pengembangan materi untuk pengembangan: logika, etika, dan estetika, dan berbasis pada sistem tata tulis aksara Latin, sehingga pembelajaran bahasa dan sastra daerah tidak hanya merupakan media pembelajaran bahasa sebagai sarana komunikasi, tetapi juga memiliki manfaat praktis berikut ini.

- Salah satu penunjang dalam pencapaian tujuan akhir pendidikan, yaitu di samping sebagai ikhtiar pengembangan kemampuan berpikir (logika) pada peserta didik (siswa), juga menjadi ikhtiar dalam pengembangan kemampuan etika dan estetika.
- Dapat mendukung program pemberantasan keniraksaraan (buta huruf), pada anak-anak usia sekolah yang terpaksa harus meninggalkan sekolahnya sebelum waktunya (sebelum tamat SD).

Untuk kemanfaatan yang pertama dapat dijelaskan bahwa melalui keruntutan berbahasa yang tercermin pada kemampuan berbahasa secara baik dan benar, pada dasarnya menyangkut pula kemampuan berpikir (logika). Kemudian, melalui kemampuan memilih penggunaan bentuk bahasa tertentu dalam bahasa yang digunakan itu ketika harus berbicara dengan mitra wicara tertentu, dengan topik serta tempat tertentu pada dasarnya terkait dengan masalah etika (moral dan kesantunan). Dalam pada itu pula, pembentukan etika dan estetika dalam pengajaran muatan lokal dapat dilakukan pula melalui pemberian materi kesastraan yang sudah terseleksi untuk tujuan itu, yang terdapat dalam kehidupan masyarakat pendukung bahasa dan sastra yang hendak diajarkan tersebut.

Selanjutnya, untuk kemanfaatan yang kedua akan dijelaskan dengan mengemukakan beberapa hasil survei yang dilakukan Tim Survei *World Bank* dan Pusat Kurikulum Depdikbud 1993 berikut ini.

Pada tahun 1993, Tim Survei *World Bank* dan Pusat Kurikulum Depdikbud mendatangi sebuah sekolah di Lombok Timur. Di sekolah itu, tim menemukan seorang anak kelas 5 setara SD, yang ketika diminta membaca dalam hati sebuah teks cerita, ternyata masih mengeja dengan bantuan jari-jarinya menapaki dari huruf satu ke huruf lainnya, dan berjuang untuk dapat menyatukan serentetan huruf menjadi kata. Jika dalam membaca rentetan huruf, kata, kalimat masih terasa lamban apalagi akan membaca untuk memahami isinya (Kaswanti Purwo, 2003). Kasus ini tentu sangat menarik, karena kesulitan yang cukup ekstrim dialami oleh anak itu jelas-jelas disebabkan oleh pergulatan ganda yang dihadapinya, yaitu pergulatan dalam mengenal bunyi-bunyi Bahasa Indonesia dan sekaligus pergulatan dalam memahami dan mengenali bagaimana bunyi-bunyi itu direpresentasikan dalam bentuk lambang-lambang tertulis.

Tentunya, kenyataan ini bukan berarti anak-anak Indonesia itu bodoh-bodoh. Seandainya selama lima tahun pertama itu mereka belajar dengan bahasa pengantar bahasa daerah mereka, belum tentu akan gagal. Hasil penelitian yang dilakukan Elly (1992) mengenai kemampuan membaca anak-anak Indonesia yang dibandingkan dengan kemampuan membaca anak-anak dari seluruh dunia (32 negara), anak-anak Indonesia berada pada peringkat kedua dari bawah, yang paling atas adalah anak-anak Finlandia dan yang paling bawah adalah anak-anak Venezuela. Penelitian ini dilakukan 1990-1991 dengan mengelompokkan responden pada dua kategori usia, yaitu pertama, kelompok usia antara 9 s.d. 9,11 tahun dan kedua, kelompok usia antara 14 s.d. 14,11 tahun. Data yang masuk untuk Indonesia adalah kelompok usia yang pertama. Hal ini berarti, rendahnya kemampuan membaca dari hasil penelitian itu terjadi pada usia sekolah dasar (sekitar kelas 3 SD).

Apa yang menarik dari hasil penelitian di atas serta cerita tentang kemampuan membaca seorang anak kelas 5 SD di Lombok Timur tersebut? Yang menarik dari hasil penelitian dan kasus di atas adalah betapa belajar membaca hakikatnya adalah belajar memahami simbol-simbol yang digunakan untuk melambangkan bunyi-bunyi tertentu yang terdapat dalam bahasa yang sedang dipelajari itu. Oleh karena itu, syarat dasar untuk dapat memahami lambang bunyi adalah memahami bunyi yang akan dilambang itu dulu, baru disertai dengan pemahaman tentang sistem perlambangan yang berlaku. Artinya, kemampuan berbahasa yang pertama-tama harus dikuasai dan memang realitas alamiahnya demikian, adalah kemampuan berbahasa secara lisan, bukan

berbahasa tulis. Itu artinya pula, bahwa yang paling ideal untuk belajar membaca dan menulis, untuk yang pertama kalinya, adalah bahasa yang dipakai adalah bahasa yang sudah dikuasai dengan baik secara lisan. Dalam hal ini, bahasa yang telah dikuasai dengan baik oleh siswa pada tingkat permulaan itu adalah bahasa daerah (ibu) mereka. Sebab, belajar membaca sampai memahami isi suatu teks adalah suatu proses kognitif yang sangat kompleks. Begitu keterampilan membaca dan menulis (termasuk mengarang) sudah dikuasai anak, keterampilan itu akan dengan mudah dapat mereka alihkan pada saat mereka harus membaca dalam bahasa lain. Lebih-lebih jika aksara yang digunakan adalah sama (aksara Latin). Perjuangan yang cukup berat untuk menguasai ketrampilan membaca ini cukup sekali saja dilakukan di dalam hidup seseorang. Pada saat mereka harus belajar membaca teks dalam bahasa lain, mereka cukup berkonsentrasi untuk mempelajari sistem di dalam bahasa baru tersebut. Tanpa harus belajar membaca (juga mengarang) lagi. Mereka yang belum menguasai suatu bahasa secara lisan dengan baik, kemudian harus belajar ragam tulis (membaca), untuk pertama kalinya dalam bahasa yang bersangkutan maka yang akan ditemui adalah munculnya berbagai kesulitan yang tidak jarang membuat mereka putus asa dan frustrasi. Mungkin sebagian dari yang putus sekolah yang digambarkan dari hasil penelitian Sommerset di atas adalah korban dari kondisi ini. Hal ini, tentunya akan sangat mengganggu program wajib belajar dan pemberantasan keniraksaraan yang dicanangkan pemerintah. Oleh karena itu, melalui pengajaran muatan lokal bahasa daerah, khususnya pada tingkat SD yang sudah mulai diperkenalkan dengan lambang-lambang bunyi (huruf) yang menjadi representasi dalam bentuk tulisan dari bahasa daerahnya, serta penggunaan lambang itu masih dalam bentuk aksara Latin, yang juga digunakan untuk lambang bunyi dalam sebagian besar bahasa-bahasa di dunia, termasuk Indonesia, maka upaya menggairahkan wajib belajar dan pemberantasan keniraksaraan bagi siswa SD (minimal kelas 3) yang terpaksa putus sekolah niscaya dapat diatasi.

Daftar Pustaka

- Elly, Warwick B. 1992. *How in The World do Student Read: IEA Study of Reading*. The Hague: The International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
- Kaswanti Poerwo, Bambang. 2003. *Dinamika Bahasa Lokal dalam Wacana Global*. Dalam **Dinamika Budaya Lokal dalam Wacana Global**. Yogyakarta: Unit Pengkajian dan Pengembangan Fakultas Budaya, UGM.
- Mahsun. 2000. "Pengembangan Materi Muatan Lokal yang Berdimensi Kebhinnekatunggalikaan dan Pengajarannya: Penyusunan Bahan pelajaran Bahasa Sasak dengan Memanfaatkan Variasi Bahasa yang Berkerabat. Laporan Penelitian RUT V, Dewan Riset Nasional.
- Mahsun. 2000. *Bahasa Daerah sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Kondisi Kebhinnekaan dalam Ketunggalikaan Masyarakat Indonesia: ke Arah Pemikiran dalam Mereposisi Fungsi Bahasa Daerah*. Dalam **Politik Bahasa 2000**. Pusat Bahasa: Jakarta.
- Moeliono, Anton M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- Parasher, S.N. 1980. "Mother-tongue-English Diglosia: a Case Study of Educated India Bilinguals' Language Use", *Antropological Linguistics*, 22(4): 151-168.
- Poedjosoedarmo, Soepomo. 2003. *Dinamika Bahasa*. Dalam **Dinamika Budaya Lokal dalam Wacana Global**. Yogyakarta: Unit Pengkajian dan Pengembangan Fakultas Budaya, UGM.
- Rachman, Arif. 2006. "UNESCO's Roles in Saving the Endangered Languages and Fostering the Development of Language Education". Makalah pada Seminar Internasional Pemeliharaan Bahasa-bahasa yang Hampir Punah. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sommerset, H.C.A. 1990. *Developing Curriculum: Some Back-ground Issues*. Makalah seminar di Pusat Kurikulum, Depdikbud, 28-30 Mei 1990.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Pleno VII
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 20 Juli 2010, 09.00 – 11.00
Penyaji/Pemakalah	: Prof. Dr. Mahsun
Judul Makalah	: Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Daerah
Pemandu	: Prof. Dr. Lukman
Pencatat	: Firman A.D., S.S., M. Si.
Jumlah Peserta	: 400 orang

TANYA JAWAB

Prof. Dr. Anang Santoso (Universitas Negeri Malang)

Pertanyaan/Saran

Seberapakah resahkan persoalan bahasa di bawah ke lini politik dalam rangka pembentukan wilayah baru?

Jawaban

Bahasa terkait dengan politik, bahasa adalah identitas bangsa. Tiap-tiap daerah masing-masing ingin mempertahankan bahasa daerahnya.

Prof. Dr. Hamzah Machmoed (Universitas Hasanuddin)

Pertanyaan/Saran

Terkait persoalan bahasa ibu di Indonesia harus menyediakan tenaga pengajar yang siap pakai, bahasa terkait dengan politik, bahasa yang punah bisa dihidupkan lagi. Bergantung keseriusan kita.

Persoalan bahasa terpulang pada pendukung bahasa itu sendiri.

SEJARAH KEBUDAYAAN BUTON : SUATU PENELURUSAN KE ARAH REKONSTRUKSI

Susanto Zuhdi¹
(Universitas Indonesia)

Tidak sebagaimana Gowa, Bone, Ternate, dan Tidore, masa lampau Buton tidak banyak disinggung di dalam sejarah Indonesia, kecuali "hanya" menjadi bagian saja dalam kaitan kisah kerajaan-kerajaan besar tersebut. Suatu hal yang menarik dicatat agaknya adalah ketika terjadinya peristiwa konflik di Ambon dan sekitarnya pada tahun 1999 hingga awal 2001, mencuatlah BBM sebagai akronim di berbagai media. BBM adalah Bugis, Buton, Makasar, terlibat konflik di sana, dan sebagai akibatnya mengungsi ke berbagai tempat dan di antaranya kembali ke "kampung halaman"-nya.

Dalam perspektif historis, Buton merupakan salah satu kesultanan bercorak maritim di Nusantara, yang diperkirakan berdiri pada abad ke-14 dan berakhir pada tahun 1960. Dalam pengertian ini Buton dikenal sebagai wilayah politik dengan pusatnya di Wolio-Baubau di Pulau Buton. Bekas wilayah kesultanan Buton meliputi hampir seluruh daerah yang sekarang menjadi Provinsi Sulawesi Tenggara². Wilayah politik yang dibangun oleh Kesultanan Buton tidaklah identik dengan wilayah budaya yang berada di dalamnya. Dengan kata lain, Buton bukanlah penyebutan yang tepat untuk beragam suku dan bahasa serta tradisi masyarakatnya: sebut saja Buton, Muna, Kepulauan Wakatobi dsb. Meskipun demikian bukan berarti tidak terdapat unsur-unsur yang memperlihatkan pertautan satu sama lain.

Merumuskan suatu pengertian mengenai Sejarah Kebudayaan dan apalagi menuliskannya memang bukan pekerjaan yang mudah. Kecuali kalau dipisah-pisah antara sejarah dan kebudayaan. Artinya untuk membicarakan atau menulis sejarah Buton tersendiri dan menulis tentang Kebudayaan Buton secara tersendiri pula akan lebih jelas. Itu karena kedua disiplin ilmu itu diperlakukan secara berbeda dan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Sejarah adalah hal ikhwal manusia pada masa lampau. Akan tetapi secara konvensional sejarah lebih ditekankan pada peristiwa politik. Tentang kebudayaan juga tidak gampang dibatasi pengertiannya. Sebab pengertian atau batasan apa itu "kebudayaan" merupakan konsep yang perlu dijelaskan. Mungkin lebih dari seratus definisi tentang kebudayaan bisa diajukan.

Uraian tentang kebudayaan pada umumnya mengenai unsur-unsur atau aspek-aspek tertentu saja yakni yang bercorak etnografis. Dalam Antropologi, etnografi merupakan bagian pokok dan yang paling awal dikerjakan para sarjana atau petualang terutama dalam masa kolonial Barat di Asia dan Afrika. Karya etnografis mereka pada umumnya bersifat tinjauan menyeluruh dengan memperhatikan aspek-aspek kehidupan masyarakat suku bangsa tertentu.

Sejumlah literatur yang sudah cukup banyak mengenai kebudayaan dan sejarah Buton tampaknya masih bersifat fragmentaris. Hal itu wajar saja terjadi karena tergantung dari sudut pandang yang digunakan dan unsur atau aspek yang dipilih. Akan tetapi suatu penulisan sejarah yang komprehensif mengenai kebudayaan sejauh ini belum ada. Makalah ini berupaya menelusuri berbagai aspek dan faktor yang menunjukkan pertalian unsur-unsur kebudayaan di wilayah ini melalui proses historis. Tujuan makalah ini pertama, adalah untuk menawarkan kerangka konseptual yang diharapkan dapat dijadikan landasan bagi penulisan Sejarah Kebudayaan Buton yang komprehensif. Kedua, menawarkan kerangka periodisasi penulisan sejarah Kebudayaan Buton. Terakhir diajukan suatu pemikiran mengenai konsep pelestarian kebudayaan, baik dalam arti penggalian, pengembangan, dan pemanfaatannya.

1. Historiografi

Dalam historiografi (penulisan sejarah) tema kebudayaan merupakan pokok kajian yang menarik. Akan tetapi biasanya tulisan mengenai kebudayaan tidak mengenai keseluruhan aspek kebudayaan. Pada umumnya tulisan mengenai kebudayaan terarah pada unsur atau aspek kebudayaan dalam suku bangsa atau dalam suatu wilayah tertentu. Beberapa bentuk dan corak penulisan kebudayaan dalam suatu dunia kehidupan suku bangsa tertentu di Indonesia misalnya dapat dilihat dalam karya Nico L. Kana "Dunia Orang Sawu" (Kana 1978) dan Abdurrauf Tarimana "Dunia Orang Tolaki" (Tarimana 1985). Kedua karya tersebut tampaknya merupakan "proyek doktor" Prof. Koentjaraningrat sebagai pembimbing mereka dalam menulis disertasi di Universitas Indonesia.

¹ Guru Besar Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

² Suatu buku yang menggambarkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan kesultanan Buton dalam Abad XVII dan XVIII, lihat Susanto Zuhdi, "Sejarah Buton Yang Terabaikan: Labu Rope Labu Wana". (Segera terbit oleh Rajagrafindo Jakarta).

Dalam karya tulis yang lebih lepas mengenai kebudayaan biasanya berupa bunga rampai seperti dalam jurnal "Bingkisan Bunga Rampai Budaya Sulawesi Selatan" (Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan 1999). Dari beberapa buku mengenai tema sejarah kebudayaan, misalnya Sejarah Kebudayaan Sulawesi (Mukhlis PaEni dkk., 1995). Rupanya yang dimaksud dengan Kebudayaan Sulawesi adalah kebudayaan-kebudayaan daerah yang terdapat di Sulawesi secara umum. Buku tersebut cukup komprehensif akan tetapi tampak menghadapi kesulitan dalam menetapkan periodisasi, seperti tampak dalam penyebutan bab-bab yang mencakupi abad XIV–XVII dan bab yang mencakupi abad XVII–XIX. Untuk bab-bab tersebut hanya diberi penanda temporal berupa abad-abad tertentu bukan ciri atau semangat zaman yang menjadi karakternya. Dalam buku itu pun tidak digunakan istilah tertentu. Selain itu juga tidak dijelaskan konsep sejarah kebudayaan yang digunakan untuk merangkum berbagai aspek. Dalam bab mengenai "Pengaruh Barat" dalam buku itu pada umumnya hanya memaparkan tentang pendidikan (saja).

Sementara itu dapat disebut terbitnya sebuah buku baru berjudul Sejarah Kebudayaan Indonesia (SKI) yang dibiayai oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2009 (Penerbit Rajagrafindo). Buku ini tentu memberi sumbangan yang besar. Akan tetapi jika dicermati, terdapat ruang diskusi yang menarik untuk meletakkan dasar pengertian dan konsep mengenai sejarah kebudayaan itu. Tujuh jilid buku SKI tidak spesifik merumuskan konsep sejarah kebudayaan melainkan menggunakan konsep unsur-unsur kebudayaan yang diajarkan Prof. Koentjaraningrat. Setiap jilid SKI diberi judul ketujuh unsur kebudayaan: Sistem Religi, Sistem Pengetahuan, Sistem Teknologi, Sistem Sosial, dan seterusnya. Dengan pendekatan seperti itu maka tidak terlihat pembahasan mengenai kebudayaan sebagai suatu yang bulat atau komprehensif, tetapi terfragmentarisasi atau terpilah-pilah ke dalam jilid yang ditulis secara berbeda. Belum lagi konsep sejarah yang seharusnya merangkai aspek-aspek menjadi kesatuan analisis dalam dimensi temporal tidak terjadi.

Ketika unit analisis tidak ditetapkan secara jelas maka terjadilah pergeseran tema sebagaimana terdapat dalam SKI jilid tentang Sistem Sosial. Bukan saja pendekatan politik masih terasa kental, malahan substansi politik sangat menonjol. Masalahnya bukan tidak diizinkan membahas isu politik dalam sistem sosial Indonesia. Sayangnya di dalam jilid sistem sosial itu beberapa bagian membahas bukan saja organisasi politik tetapi juga peristiwa sejarah. Jadi masih tampak kuat perspektif politik dan sejarahnya daripada sistem sosial sebagai aspek kehidupan masyarakat dalam konteks kebudayaan.

2. Kerangka Konseptual

Sejarah kebudayaan sebagai suatu konsep di dalam historiografi Indonesia memang tidak mudah untuk dirumuskan. Menurut hemat saya, belum ada sejarah kebudayaan yang memenuhi harapan yang memuaskan secara konseptual apalagi dalam bentuk tulisan. Memang konsep sejarah kebudayaan tidak mudah dirumuskan untuk diterapkan ke dalam penulisan. Mengenai konsep untuk penulisan sejarah kebudayaan tampaknya perlu dibahas terlebih dahulu meskipun dengan sekilas saja.

Dilihat dari perkembangannya penulisan tentang sejarah kebudayaan berasal dari tulisan monografi, apakah itu dalam bidang sastra, seni, dan bahasa, atau aspek material dari kebudayaan yang umumnya ditulis para ahli arkeologi. Secara konseptual Peter Burke dalam bab "*Unity and Variety in Cultural History*", mengajak kita mendalami lingkup kajian tentang sejarah kebudayaan dengan melihatnya dari segi "keseragaman dan keberagaman" (Burke 1997:183-212). Burke lebih dahulu menggiring perhatian kita dengan mengatakan bahwa di akhir abad ke-20, kita hidup di masa apa yang disebut sebagai "*cultural turn*" yang ditandai oleh kajian humaniora dan masyarakat. Dari titik tolak ini kemudian "*cultural studies*" berkembang di berbagai institusi pendidikan terutama dalam "*English-speaking world*". Kecenderungan ini tidak dapat dipungkiri karena jika berbicara sejarah umumnya mengenai politik. Bahkan adagium klasik mengatakan "sejarah adalah politik masa lampau". Kalau analogi boleh dilakukan, "politik adalah sejarah masa kini". Sejarah memang berkembang pada awalnya tentang orang besar dan peristiwa besar yang bersifat politik atau kekuasaan. Dalam perkembangannya kini, sejarawan didorong menjadi "*cultural historian*" (Burke 1997:183) atau setidaknya harus memperhatikan pendekatan atau kerangka kebudayaan dalam kajiannya.

Burke mengajak kita berdiskusi dengan cara yang menarik yakni dengan memberikan kritik terhadap sejarah kebudayaan klasik. Burke menengahkan ketiga pakar seperti Matthew Arnold, Jacob Burckhardt, dan Johan Huizinga yang memaknai kebudayaan sebagai unsur-unsur utama: seni, kesusasteraan, gagasan, simbol, konsep, gaya, dan perasaan. Pemaknaan terhadap kebudayaan tersebut ditemukan dalam tradisi Barat sejak zaman Yunani dan seterusnya. Pemberian makna tersebut pada umumnya diletakkan ke dalam konteks zamannya sehingga dikenal sebagai "*spirit of the ages*". Namun, menurut Burke model itu tidak lagi cocok dengan tuntutan model sejarah kebudayaan sekarang. Oleh karena itu terdapat lima kritik terhadap sejarah kebudayaan klasik tersebut. Pertama, tentang rasa hayat yang mengabaikan (*sense of ignoring*) atau paling tidak hanya sedikit terkait dengan struktur politik dan sosial. Burckhardt dalam karyanya, *Kultur der Renaissance in Italien*, misalnya memberikan perhatian kecil saja pada dasar ekonomi Renaisans, sedangkan Huizinga dalam "*The Task of Cultural History*" tanpa sama sekali mengaitkan dengan wabah penyakit yang memporakporandakan Eropa sejak tahun 1348 ke depan. Kedua, kritik utama terhadap sejarah kebudayaan klasik adalah tergantung pada postulat kesatuan budaya atau konsensus (*cultural unity or consensus*). Beberapa contoh

karya besar dalam konteks ini misalnya Paul Hazard yang dengan studinya dalam akhir abad XVII tentang kehidupan intelektual *"The Crisis of the European Mind"* (1935). Perry Miller dengan *"The New England Mind"* (1939) dan karya monumental serial dari sejarawan terkemuka Inggris Arnold Toynbee berjudul *"The Study of History"* (1934-61). Padahal persoalan besar kesatuan budaya merupakan hal yang sulit dibenarkan.

Ketiga, bahwa perhatian utama sejarah kebudayaan klasik adalah berasal dari Gereja sebagai 'tradisi' mengenai obyek, praktik, dan nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bagaimana misalnya *"the pagan gods"* yang ternyata masih tetap hidup di dalam zaman Pertengahan (dalam pembabakan sejarah Eropa). Hal yang bertentangan dengan tradisi adalah gagasan tentang 'resepsi' atau yang diperluas dengan teori tentang resepsi. Keempat, kritik terhadap gagasan budaya secara implisit terlalu sempit, yang pada umumnya dikaitkan dengan budaya luhur (*high culture*). Oleh karena itu sejarawan disarankan agar cukup seimbang dengan kenyataan kebudayaan lainnya, yang juga mengungkap kembali kebudayaan orang kebanyakan (*ordinary people*). Kajian seperti itu antara lain *pop culture*, *folksong*, *popular art*, yang merupakan ekspresi kolektif yang digunakan Emile Durkheim. Akhirnya, yang kelima, sejarah kebudayaan klasik sibuk dengan karya yang bersifat kanon. Dalam sejarah karya itu disebut sebagai narasi besar (*grand narration*). Padahal betapa menarik dan juga penting kisah-kisah kecil di dalam masyarakat yang mestinya diperhatikan.

Pemikiran Burke di atas sesuai dengan hakikat kebudayaan itu sendiri. Pada prinsipnya kebudayaan adalah milik setiap orang dan kelompok masyarakat. Pada dasarnya ekspresi kebudayaan suatu masyarakat mencerminkan kebebasan budaya (*cultural freedom*). Meskipun dalam kenyataan terdapat kendala struktural (*structural constraint*) di pihak lain. Akan tetapi keduanya tidak harus dilihat sebagai hal yang bersifat dikotomistik. Dalam kenyataan keduanya berkecenderungan terus menerus berinteraksi dan dapat menggambarkan konfigurasi dan dinamika tertentu. Dalam tataran pembicaraan kebudayaan yang lebih kuat dan besar, seperti Gowa atau suku Bugis-Makasar, yang oleh karena landasannya pada politik, maka Buton tidak dianggap setara. Jadi berlaku apa yang disebut hegemoni, atau dalam sejarah ini selalu ditekankan pada sejarah dengan narasi besar, atau secara lebih ekstrim sejarah hanya berpihak bagi "sang pemenang".

Dalam konteks itulah Buton berada dalam kendala struktur-struktur yang mengitarinya: terutama geografi dan politik dan kebudayaan lainnya: dapat berarti positif dan negatif dalam lingkungan budayanya sendiri dan atau lingkungan eksternalnya. Namun demikian, Buton dalam arti kekuasaan pusatnya di Wolio, juga dianggap mengabaikan daerah-daerah pinggirannya. Dalam konsep perahu "Barata", keempat kerajaan pendukung/penguatnya yaitu Muna, Tiworo, Kulisusu, dan Kaledupa, dalam perkembangannya tidak selamanya merasa puas dengan kedudukannya. Dua barata yang berpotensi dan memperlihatkan sikap menentang adalah Muna dan Kulisusu.

Ekspresi budaya berkembang oleh sejarahnya, atau dapat juga dikatakan kebudayaan dibentuk oleh sejarah masyarakat pendukungnya dan akulturasi dengan kebudayaan lainnya. Dalam perkembangannya suatu kebudayaan tidak akan lepas dari konteks lingkungan geopolitik yang didukung oleh kekuasaan yang berlandaskan ideologi dan budaya tertentu. Dalam hal ini, Buton berada dalam lingkungan geopolitik Bone, Gowa, dan Ternate. Kehadiran VOC berpengaruh dalam arti positif dan negatif. Landasan filosofis menjadi unsur penting dalam pembentukan kebudayaan setidaknya cara berpikir dan pandangan yang membentuk kebudayaan Buton. Dalam lingkup yang lebih luas berbicara mengenai suatu kebudayaan tertentu tidak lepas dari konsep akulturasi dan difusi kebudayaan. Sebagai tinjauan historis, makalah ini tidak terlalu ketat menggunakan konsep-konsep antropologi tersebut.

Menurut Burke, kebudayaan perlu mendapat redefinisi dari apa yang selama ini bersandar pada aliran Malinowski yang mencakup *"inherited artefacts, goods, technical processes, ideas, habits, and values"* atau seperti yang dikemukakan oleh aliran Geertz yakni *"the symbolic dimensions of social actions"* (Burke, 1997:194). Dengan kata lain, makna dari terminologi yang berkembang itu mencakupi lingkup luas daripada sebelumnya, bukan hanya seni tetapi juga kebudayaan material; bukan hanya tertulis juga yang lisan, tidak hanya drama juga ritual, bukan hanya filsafat juga *mentelite* dari orang biasa. Jadi dapat dikatakan kehidupan sehari-hari adalah 'kebudayaan sehari-hari', yang merupakan sebuah pendekatan (ibid). Dengan demikian, batasan kebudayaan dalam pembicaraan ini pun dikenakan secara longgar. Kebudayaan yang dibincangkan di sini pada prinsipnya mengenai tiga komponen yakni yang berkaitan dengan ide, gagasan atau yang bersifat nilai; yang berkenaan dengan kehidupan sosial; dan yang ketiga berkaitan atau yang berupa benda (*material culture*). Sesungguhnya dalam pengertian yang lebih mudah dipahami kebudayaan yang hendak dilihat sebagai yang bersifat *intangibile* (tak benda) dan *tangible* (benda). Dalam kategori yang pertama termasuk sistem nilai, ide, gagasan, atau dunia pandang (*world-view*). Sedangkan kategori kedua yang berupa benda: artefak, candi, bangunan, dan monumen sezaman. Secara sederhana sejarah kebudayaan adalah seluruh aktivitas manusia masa lampau tentang kebudayaannya, yang sudah tentu mencakup seluruh unsur-unsurnya.

3. Konsep "Sejarah Kebudayaan Buton"

Sejarah berbicara mengenai aspek temporal, spasial, dan tema yang menjadi bahan kajian. Dimensi waktu yang perlu ditetapkan adalah dari masa prasejarah hingga masa kontemporer. Sedangkan materi atau substansi yang dibahas adalah seluruh unsur-unsur kebudayaan dengan penekanan pada fokus tertentu yaitu

tentang gagasan, kehidupan sosial, dan artefak/benda budaya. Sebutan Buton perlu ditetapkan dalam arti wilayah budaya yang dalam proses sejarah diintegrasikan oleh suatu kesatuan politik Kesultanan Buton. Jadi dapat dinyatakan ia mencakupi konsep geo-budaya dan geo-politik. Seperti sepintas telah dikemukakan di atas, Buton bukan penyebutan atas pengertian tunggal yang mencakupi baik suku, bahasa, dan tradisi di daerah-daerah yang dahulu diikat oleh kesatuan kekuasaan politik bernama Kesultanan Buton. Artinya konsep Buton jelas memperlihatkan cakupan keberagaman juga, meskipun dalam konteks yang lain dalam hal ini politik, menunjukkan keseragaman.

Pakar sosiologi dari Belanda, Pim Schoorl dapat disebut sebagai sarjana yang paling awal mengkaji berbagai segi sejarah dan kebudayaan Buton. Beberapa karyanya kemudian diterbitkan dalam bahasa Indonesia di antaranya tentang budaya dan masyarakat (Schoorl 2005). Dua unsur pokok kebudayaan yang ditulis Schoorl dengan sangat baik mengenai Buton hemat saya adalah mengenai ideologi kekuasaan Buton dan alam pikiran masyarakat Buton, khususnya yang dipengaruhi oleh kepercayaan pra-Islam. Dalam satu babnya, Schoorl memaparkan ideologi Kesultanan Buton dengan baik sekali. Kemaritiman merupakan salah satu unsur pembentuk karakter negara dan masyarakat Buton (Zuhdi 2009). Hanya suatu hal yang perlu ditolak adalah pendapatnya yang mengatakan bahwa dengan perjanjian tahun 1613 dengan VOC/Belanda, Buton sudah masuk ke dalam *Pax Nerlandica*. Ini merupakan anakronisme karena *Pax Nerlandica* barulah terjadi pada awal abad ke-20. Selain itu, kontrak kerja sama itu harus dilihat sebagai masih adanya kedaulatan Kesultanan Buton. Salah satu bukti perlawanan atas dominasi VOC atas Buton dengan terjadinya perlawanan Sultan La Karambau pada tahun 1752, sehingga benteng Wolio diserang pasukan Kompeni. Bagi masyarakat Buton, ingatan kolektif itu sebagai *zamani kaheruna walanda* (zaman huru hara Belanda).

Ditinjau dari istilah atau namanya, Buton merupakan sebutan Belanda sejak masa VOC dan bahkan dipertegas sebagai konstruksi dalam masa kolonial. Residensi Boeton en Laiwui (1906) adalah wilayah yang dibentuk oleh pemerintah kolonial untuk menyebut daerah-daerah di jazirah Sulawesi dan kepulauan di bagian tenggaranya. Nama yang diberikan oleh penduduknya untuk menyebut suatu kepulauan yang dipersatukan oleh suatu kekuasaan politik bercorak kesultanan adalah Butuni. Terdapat beberapa versi nama Butuni (lazim diucapkan Butun) ini berasal. Sebut saja misalnya, sebagai penanda pulau yang dimaksud itu karena banyak tumbuhan berupa pohon yang dikenal sebagai Butu (*baringtona asiatica*). Butun juga berasal dari kata *butn*, berarti perut dalam bahasa Arab. Butung adalah pengucapan orang Bugis-Makassar. Dalam catatan Tome Pires, wilayah yang kita bicarakan ini disebut Butum. Orang Belandalah yang menyebut sebagai Buton, yang lebih dikenal hingga kini.

Buton bukan merupakan suatu pengertian homogen, baik dalam arti suku atau bahasa yang melekat pada orang-orang yang berada dalam lingkup wilayah tersebut. Begitulah, penyebutan orang Buton tergantung dari lingkup wilayah yang dimaksud. Pada umumnya seseorang mengatakan dirinya orang Buton kalau berada di luar wilayahnya. Padahal kalau ditanyakan lebih lanjut dari daerah mana mereka berasal maka akan ada jawaban seperti: dari Muna atau Kepulauan Wakatobi (dahulu Kepulauan Tukang Besi). Memang terdapat ciri kuat pada orang Buton, yang karena kemaritimannya merantau ke berbagai daerah di Nusantara. Ciri kemaritiman yang paling menonjol berasal dari Wakatobi. Jadi dapat disimpulkan berdiasporanya orang Buton ke berbagai daerah itu berasal dari Wakatobi, atau bahkan dapat dikatakan lebih spesifik lagi dari Binongko.

Begitu pula dengan bahasa di Buton, yang terdiri atas beberapa kelompok bahasa: Kelompok Bungku-Mori, yang erat berhubungan dengan bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara dan kelompok Buton-Muna. Kelompok pertama adalah bahasa-bahasa digunakan di Pulau Kabaena, di utara dan timur laut Buton dan di daerah Rumbia/Poleang di daratan Sulawesi. Kelompok kedua bahasa yang digunakan di kesultanan. Kelompok terakhir ini terdiri atas empat sub-kelompok: Bahasa Wolio digunakan oleh masyarakat di pusat kesultanan oleh golongan bangsawan *kaomu* dan *walaka* di keraton dan masyarakat yang berada di sekitarnya. Sub-kelompok Bahasa Muna digunakan oleh penduduk di Pulau Muna dan di pesisir barat Buton; sub-kelompok Bahasa Buton selatan dan tenggara. Keempat, sub-kelompok bahasa di Kepulauan Tukang Besi (Wakatobi). Semua cabang bahasa ini termasuk cabang Bahasa Indonesia dari Austronesia (Schoorl 1993:2-3).

Selain Schoorl, orang Belanda pada masa kolonial telah pula memaparkan mengenai Buton sebagai suatu wilayah budaya. Untuk menunjukkan bahwa Buton mencakupi keragaman kebudayaan yang terdapat di dalamnya, Couvreur seorang residen yang pernah bertugas di Muna menjelang akhir kolonial Belanda di Sulawesi Tenggara pun menulis dengan judul terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia "Sejarah Kebudayaan Kerajaan Muna" (Couvreur 2001). Karya yang diberi judul sejarah, sebenarnya tidak sesuai dengan isinya yang lebih merupakan tinjauan menyeluruh tentang aspek-aspek kehidupan masyarakat suku bangsa Muna. Hal itu dapat dilihat bahwa karya ini semula dalam Bahasa Belanda berjudul "*Ethnografische Overzicht van Moena*" (1935). Penulisnya, Jules Couvreur (1900-1970) adalah seorang Belanda yang bekerja sebagai pejabat pemerintahan kolonial Belanda dengan jabatan kontrolir di Moena antara tahun 1933-1935. Akan tetapi, tentu saja terdapat segi-segi kesejarahan yang tampil di dalam karya itu. Misalnya ia menggambarkan bagaimana perkembangan masalah yang selalu muncul, khususnya dalam masa ia bertugas, antara Buton dan Muna dalam hubungan kekuasaan dan pemerintahan (Couvreur 2001: 20-25).

Salah satu pendekatan atau kerangka konseptual yang dapat dipilih untuk menulis sejarah kebudayaan adalah dengan menggunakan konsep klasik Robert Redfield yakni "*great tradition*" yaitu kebudayaan yang terpancar dari tradisi keraton, istana atau pusat kekuasaan dan "*little tradition*" yang terjadi sebaliknya yaitu yang berkembang di luar istana atau dengan kata lain di dalam masyarakat biasa. Sejarah kebudayaan klasik pada prinsipnya melihat kebudayaan secara homogen dan terintegratif. Ini terjadi karena pada dasarnya terdapat unsur pengikat yang datang dari pusat kekuasaan yang bersifat hegemonik. Dalam kondisi seperti ini tidak terdapat peluang yang cukup bagi daerah-daerah (di luar pusat kekuasaan) untuk mengembangkan kebudayaannya. Padahal sesungguhnya selalu muncul keinginan atau kebebasan budaya (*cultural freedom*) yang dimiliki suatu masyarakat.

Dalam kaitan itu, menarik disimak bahwa penduduk di Pulau Buton menyebut penduduk lainnya sebagai orang pulau, artinya mereka yang berdiam di Kepulauan Wakatobi. Dalam konteks ini sudut atau dunia pandang di dalam suatu kebudayaan yang dianggap merupakan suatu kesatuan saja memperlihatkan perbedaan. Itu artinya keseragaman atau yang bersifat homogen itu tidak berlaku di dalam kenyataan. Apalagi kalau dilihat dari sudut pandang itu umumnya melahirkan apa yang disebut sebagai etnosentrisme.

Berbicara mengenai kebudayaan pada prinsipnya tidak dapat dipilah di antara unsur yang berupa benda (*tangible*) dan tak-benda (*intangible*). Pemilahan kedua unsur tersebut adalah dengan maksud untuk memudahkan penjelasan saja. Dari unsur kebendaan terdapat nilai sejarah dan nilai budaya yang dikandungnya.

Unsur Benda (*Tangible*)

Jika saya lebih dahulu mengemukakan pembahasan kebudayaan materi atau yang bersifat *tangible*, tidak bermaksud mengecilkan kebudayaan dalam arti yang *intangible*. Pilihan ini hanya karena untuk mengenali kebudayaan suatu masyarakat dengan mudah dengan melihat kebudayaan materialnya (*material culture*). Fakta benda budaya berupa benteng (kecil maupun ukuran besar) yang banyak terdapat di Buton, mungkin lebih layak Buton untuk menyatakan dirinya daerah dengan "seribu benteng" daripada Kota Sabang, yang sudah lebih dahulu mengklaim, khususnya dalam kaitan dengan promosi daya tarik pariwisata daerah.

Pendekatan yang merangsang untuk mengkaji sejarah kebudayaan dari sumber benda budaya (*material culture*) adalah apa yang dikemukakan Ivan Gaskell dalam tulisannya "*History of Images*" (dalam Burke, 1991: 168). Sejarawan pada prinsipnya lebih mudah bekerja dengan sumber dokumen tertulis (*written documents*). Oleh karena itu, mereka miskin dengan peralatan untuk menangani materi visual (*visual materials*) yang mengungkap citra (*image*) yang tersembul dari jenis sumber tersebut. Umumnya termasuk ke dalam sumber ini adalah barang seni (artefak) baik yang memperlihatkan unsur pokok lingkungan visual buatan manusia (*human-made visual environment*) atau yang mempunyai nilai untuk berbagai alasan; dan yang memperlihatkan unsur pokok lingkungan visual buatan manusia, terutama yang komunikatif, termasuk disain grafis dan fotografi. Inilah yang dimaksud Gaskell sebagai "*visual material*" (Ibid 169).

Suatu kajian yang menarik untuk menanggapi fenomena benda budaya itu adalah dengan melihatnya dari konteks historisnya. Dalam ingatan kolektif Buton, keadaan yang menyangkut keamanan masyarakat yang sering diganggu oleh kedatangan perompak Tobelo. Masyarakat Buton bukan tidak berusaha melawan, tetapi karena pemimpin bajak laut yang bernama Labolontio seorang yang sakti, sehingga selalu gagal. Lakilaponto, putera Raja Muna, dapat mengalahkan Labolontio. Karena keberhasilannya itu, ia dikawinkan dengan putri Raja Buton dan diangkat sebagai raja selanjutnya. Dialah sultan pertama Buton, dikenal juga sebagai Sultan Murhum, yang ditandai dengan masuknya Islam. Hal menarik sebagai penanda ingatan kolektif atas perompak itu, istilah Tobelo masuk ke dalam kamus bahasa Wolio, selain artinya "orang dari Tobelo" juga bermakna "perompak; raksasa; dan penggertak" (Anceaux 1987:181).

Kisah perbentengan dan aksi bajak laut dalam perspektif sejarah kebudayaan Buton, dewasa ini lebih dimungkinkan untuk dieksplorasi lebih jauh dengan kerangka yang dibuat James Warren. Secara makro kisah mengenai bajak laut di Asia Tenggara diletakkan ke dalam dunia laut Sulu (*Sulu Zone*). Di wilayah dunia kehidupan laut ini terdapat Iranun dan Balangingi dua suku (bangsa) yang beraktivitas sebagai perompak yang ditakuti di seluruh Asia Tenggara. Melalui kajiannya, Warren membahas kedua suku laut itu untuk mengkesplorasi persoalan etnisitas, kebudayaan, dan perubahan material dalam sejarah yang bertransformatif di laut dan samudera, mengenai komoditas dan penduduk, angkatan laut dan kapal, serta perampasan dan pengungsian di Asia Tenggara. Sejak abad-abad sebelumnya dan terutama dalam awal abad XIX, seluruh kelompok suku spesialis perompak dalam sebuah negara maritim yang dilandasi hukum—Iranun dan Balangingi—menyerang penduduk di pesisir Asia Tenggara dan terhadap perahu-perahu dagang yang berlayar ke kepulauan rempah-rempah, atau ke Singapura, Manila, dan Batavia (Warren 2002: xiii-xiv).

Dalam kaitan dengan unsur budaya materi patut dicatat mengenai adanya alat tukar mata uang dari kain, corak dan jenis pakaian yang dihasilkan masyarakat Buton menunjukkan tingkat peradaban tertentu. Hasil industri dari kerajinan tangan dan kuliner memperlihatkan kekhasan masyarakat maritim itu tersendiri. Meskipun dalam bentuknya sebagai benda (*tangible*) manuskrip dapat dianggap tidak sekadar benda yang disamakan dengan bekas benteng misalnya naskah jelas menyimpan kekayaan intelektual masyarakat lokal yang sangat penting dan besar maknanya.

Unsur Tak Benda (*Intangible*)

Setelah melihat kebudayaan yang bersifat material termasuk geografi dan alam fisik suatu masyarakat, biasanya melalui perbincangan dengan individu atau kelompok orang yang kita jumpai barulah sedikit demi sedikit mulai terbuka jendela untuk mengetahui lebih jauh tentang 'isi' kebudayaannya. Siapa orang yang hidup bermasyarakat dan berkebudayaan (di) Buton. Tampaklah bahwa dijumpai beragam variasi yang ditemukan di Buton. Stereotip dalam memandang suku (bangsa) di kepulauan tidak bisa dihindari juga. Pada umumnya orang Buton digambarkan adalah mereka yang "berprofil merendah" (*low profile*). Kalau tinjauan historis menjadi salah satu faktor pembentukan perilaku, maka dapat juga merasa untuk bersikap "merendah (kan) diri" di kalangan suku di Sulawesi pada umumnya, khususnya Selatan, karena "stigma sejarah". Untuk periode yang cukup lama, sebutan orang "Selatan" masih merupakan momok bagi orang Buton. Faktor politik, yang diwujudkan dengan perebutan kekuasaan dan jabatan di pemerintahan, tampaknya merupakan penyebab terbentuknya sikap ini.

Jika tinjauan sejarah diletakkan dalam konteksnya, sikap itu tidak perlu terjadi. Juga tidak beralasan pula hingga orang luar mencap orang Buton sebagai "pengkhianat". Sumber informan saya tahun 1990-an memberitahukan bahwa mengapa orang Buton banyak yang "poge" pada kedua ujung mulutnya. Jawabannya adalah karena mereka berbohong kepada orang Makassar. Anggapan bahwa orang Buton berbohong itu dikaitkan dengan ketika pasukan Gowa mengejar Aru Palakka yang bersembunyi dikatakan tidak ada "di atas" tanah Buton. Dalam kenyataan memang Raja Bone itu "memang" tidak di atas tanah Buton, tetapi di sebuah lubang di pinggiran benteng Wolio. Untuk masuk ke lubang persembunyian itu orang harus melalui "*Lawana Kampebuni*".

Karakter lain orang Buton dengan falsafah "*Pabinci binci kuli*" dikenal sebagai apa yang pada orang Jawa disebut "tepo seliro" atau "tenggang rasa". Diaspora orang Buton, meminjam ikon NOKIA, dapat dikatakan sebagai "*connecting people*" yang berperan istimewa terutama di kawasan timur Indonesia, dalam merajut simpul-simpul masyarakat membentuk bangsa. Karakteristik kemaritiman orang Buton dengan perahu *Lambo*-nya, adalah merupakan hasil perpaduan perahu tradisi Barat dengan tradisi kepulauan Nusantara (Liebner 2005: 86-87).

Tradisi lisan dan ingatan kolektif yang dapat digali dan dikembangkan dari pulau-pulau yang terpencar tetapi disatukan dengan jaringan pelayaran yang tetap, merupakan sumber sejarah kebudayaan yang penting. *Kabanti* yang merupakan tradisi lisan di wilayah Buton menjadi sumber utama untuk menggambarkan kebudayaan dalam arti yang luas di masyarakat maritim.

Dalam catatan Schoorl pada tahun 1993, Buton tidak memiliki kekayaan yang cukup banyak pada aspek kesenian tradisional. Pada umumnya bentuk kesenian tarian, selain yang mencerminkan tarian pergaulan dan penyambutan tamu, umumnya bergerak seperti ombak, yang menonjol adalah tari perang. Alat persenjataan atau peralatan perang yang dihasilkan dari kepulauan Tukang Besi (Wakatobi sekarang) khususnya dari Binongko, dipertunjukkan dalam festival Simposium Internasional Tradisi Lisan di Wanci, Wangi-Wangi tahun 2008. Suatu hal yang unik adalah dipamerkan "perang terpanjang" (kira-kira 15 meter) yang pernah dibuat.

4. Kebudayaan dalam Dinamika Sejarah: Persoalan Periodisasi

Pada prinsipnya sejarah adalah gerak masyarakat dalam dimensi temporal yang mengalir. Periodisasi yang konvensional tentu dapat digunakan sebagai acuan awal untuk merekonstruksi sejarah kebudayaan Buton. Akan tetapi patokan itu perlu disesuaikan dengan karakter lokal. Periode sejarah yang secara konvensional dimulai dengan ditemukannya sumber tertulis, perlu ditinjau ulang. Kalau penggunaan kriteria sejarah kritis artinya sumber sezaman atau dalam metode sejarah disebut sebagai sumber primer yang menjadi acuan, bagaimana dengan tradisi lisan yang mestinya jauh sudah ada sebelum manusia menemukan cara untuk mengabadikan ucapannya dalam bentuk aksara.

Justru sejarah dalam arti yang dikenal pertama adalah sejarah yang dikomunikasikan secara lisan (*orally communicated history*). Sejarah dalam arti ini adalah "suara masa lampau" yang diungkap melalui sejarah lisan (*the voice of the past: oral history*) seperti diulas Jan Vansina (1988). Yang menarik adalah bahwa kelisanan terus berkembang sementara orang terus juga menulis. Jadi keduanya berjalan beriringan: kelisanan dan ketertulisan. Kelisanan terutama terdapat dalam masyarakat umum dan orang kebanyakan, atau dari kalangan orang yang "terpinggirkan" atau jauh dari pusat kekuasaan. Dalam tradisi lisan yang penulis jumpai dari pengalaman selama Festival Tradisi Lisan di Wanci (2008), Wangi-Wangi, menarik untuk dicatat misalnya bahwa penduduk Wakatobi khususnya Binongko memiliki kemandirian. Melalui *kabanti* "*Une-unene*" terungkap representasi negeri Binongko yang meskipun "terpencil" tetapi jangan disepelekan karena di situlah salah satu sumber sejarah lisan yang belum dikenal (wawancara dengan La Rabu Mbaru (55 th), Wanci, 3 Desember 2008).

Buton yang identik dengan kesultanan berdasarkan Islam yang kuat, merupakan tonggak masuknya Islam dapat dijadikan dasar periodisasi sejarah kebudayaan Buton. Masa sebelum Islam yang disebut pra-Islam mencakupi masa PraHindu dan masa Hindu. Dalam periode ini jelas pengaruh Majapahit terhadap masyarakat Buton, baik dalam aspek politik dan kepercayaan. Masa Pra Hindu, dalam masyarakat Buton masih terlihat dari kajian Schoorl. Kepercayaan yang merupakan unsur Hindu di masyarakat Buton, yakni reinkarnasi dalam

penelitian Schoorl masih dijumpai sampai tahun 1980-an. Bukti bahwa pernah berlangsung zaman Hindu, terungkap dari ungkapan "*katauna baramana*". Istilah itu muncul dari para orang tua untuk menegur anak-anaknya tidak bersikap Islami (Zahari 1977). Selain itu, karakter masyarakat Buton umumnya dikenal dengan kemaritiman yang kuat. Mengutip Howard Dick, Southon mengatakan bahwa orang Buton adalah suku maritim (terakhir) yang masih menggunakan angin musim dalam melakukan pola perdagangan, yang berlayar ke barat ke Jawa dengan angin timur dan kembali ke Sulawesi dan selanjutnya ke Maluku dengan angin barat (Southon 1995:5).

Periode berikut dalam abad XVII dan XVIII, dalam aspek politik dan ekonomi terutama karena kapitalisme VOC, perlu diangkat semangat zaman yang mempengaruhi pandangan masyarakat (elite) Buton terhadap kekuasaan Barat tersebut. Kebudayaan dalam arti dimensi simbolik tertentu, menarik untuk melihat ungkapan "*ayahanda*" kepada Gubernur Jenderal atau Pejabat VOC di Makassar atau Batavia, oleh sultan Buton, yang menyebut dirinya "*Anaknda*". Surat-surat atau *kontarati* antara sultan Buton dan VOC, menunjukkan sikap dan posisi yang tampaknya tak setara, meskipun kedaulatan Buton tetap ada. Sementara itu dalam pihak lain, masyarakat pada umumnya, kehadiran VOC terutama di pulau-pulau, merupakan ancaman nyata. Model "*hongie tochten*" di Maluku juga dijalankan di kepulauan di Buton untuk menebangi pohon cengkeh. Selain itu patroli kapal VOC mengejar dan menumpas para pedagang di Kepulauan Buton yang dianggap sebagai penyelundup (*sluijkhandel*).

Abad XIX Buton memperlihatkan suasana kehidupan yang semakin mantap terutama dilihat dari aspek politik. Perang-perang telah selesai. Buton telah berada pada posisi yang aman, karena tidak lagi menjadi sasaran terutama dari serangan Gowa dan Ternate. Dalam konteks itulah Abdul Ganiyu menulis Kabanti berjudul "*Ajonga Inda Malusa*" (Pakaian Yang Tidak Luntur). Isi kabanti memperlihatkan nilai-nilai filosofis yang dalam. Menurut Rahman Yunus, pada masa ini kesultanan Buton tumbuh subur pandangan tarekat yang mengkomodasi keselarasan hidup (Yunus 1985).

Dalam perkembangan tradisi menulis yang menakjubkan kita dapati suatu masa yang paling produktif telah terjadi dalam abad XIX Buton. Banyak karya-karya berisi filsafat, hukum, dan sejarah dihasilkan dari tangan-tangan Abdul Ganiyu (mantan *Kenepulu Bula*) dan Sultan Muhammad Idris. Kebudayaan Buton dalam konteks ini dapat dipelajari dari berbagai naskah yang merupakan sumber berharga bagi kajian filsafat, hukum, sejarah, dan bahasa. Bahkan terdapat pula naskah yang memuat mengenai jenis tumbuh-tumbuhan dan obat-obatan (Ikram, 2002).

Perang dan revolusi (1942—1949) merupakan masa dalam sejarah Indonesia yang memberi kebanggaan dan sekaligus masalah. Kemerdekaan dapat direbut dari kolonial Belanda tetapi banyak prasarana rusak dan hancur. Begitu pula dengan persoalan feodalisme yang dianggap masih menyisakan persoalan dan menimbulkan konflik dalam pascarevolusi. Di Jawa dan Sumatera terjadi revolusi sosial, konflik yang membawa korban orang di kalangan istana/keraton dan bangsawan. Pascarevolusi di Buton, seperti banyak dialami daerah luar Jawa, masih dalam suasana pergolakan daerah: PRRI/Permesta (1957-58). Sulawesi Selatan-Tenggara mengalami pergolakan daerah dengan "*Pemberontakan Kahar Muzakkar*" yang berakibat pula terhadap kehidupan masyarakatnya dalam perubahan demografi dan sosial ekonomi (Anhar Gonggong, 1993). Isu politik masa Pemilu tahun 1955 memasukkan Buton ke dalam kancah perebutan pengaruh politik. Dalam masa itu dikenal dalam sejarah sosial politik Buton sebagai "*democratiseering*". Perwujudan 'pendemokratisasian' di Buton dilakukan dengan pencopotan dan pengunduran diri para pejabat yang dulu diangkat berdasarkan undang-undang kesultanan (Zahari 1977 jilid III :128-9). Dengan kata lain, terjadi suatu upaya untuk menghapus struktur kerajaan yang dianggap berbau feodal, yang sudah tidak cocok lagi di alam kemerdekaan. Secara politik memang hal itu tidak dimungkinkan lagi karena Bangsa Indonesia telah memilih bentuk republik di dalam mengatur negara yang merdeka. Akan tetapi persoalan di tataran masyarakat, terjadi perebutan pengaruh politik antara golongan komunis dengan bangsawan di Buton.

Peristiwa G-30-S/1965 dan sesudahnya dalam sejarah kebudayaan Buton dapat dimasukkan ke dalam pembahasannya tidak dalam dimensi politik, melainkan dalam pembentukan "*ingatan kolektif yang menikam*" (Darmawan 2009). Rupanya tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur atau Bali dalam kaitan dengan korban yang ditimbulkan dari akibat Gerakan 30 September 1965. Di Buton dampaknya baru terjadi tahun 1969. Bupati Muhamad Kasim diseret orang di depan isterinya, dan tidak pernah kembali setelah itu, karena ia dituduh terlibat dengan partai komunis. Sementara itu, La Mane dengan tuduhan yang sama diberhentikan dari pekerjaannya. Sejak itu hidupnya seperti tidak memiliki masa depan. Suara-suara membisu seperti itu baru dapat diungkap jauh sesudah peristiwanya berlangsung. Mungkin melalui pendekatan kebudayaan dalam hal ini bidang ilmunya, Antropologi maka peristiwa sejarah yang tersisa dan diendapkan untuk sekian lama, dapat dimunculkan. Begitulah tesis Darmawan yang dibicarakan ini menarik dan sangat patut disimak sebagai media untuk mengingatkan adanya peristiwa yang terabaikan dalam sejarah Buton.

Pascarevolusi, perubahan masyarakat Indonesia memperlihatkan mobilitas sosial, baik secara horizontal dan vertikal. Kebudayaan di perkotaan mulai tampak setelah Bangsa Indonesia keluar dari masa perang kemerdekaan dan masa pergolakan daerah. Kota-kota semakin bertumbuh dan berkembang. Urbanisasi terus berkembang. Tentu saja perlu dibedakan pendekatan yang ditujukan di Jawa dan Sumatera dengan pulau dan

daerah lainnya di Indonesia. Dalam suasana revolusi dan gejolak daerah tentu memengaruhi kehidupan kebudayaannya. Suasana zaman mempengaruhi kehidupan masyarakat. Semangat kebersamaan dengan landasan unsur budaya gotong royong justru menjadi warna yang kuat untuk seluruh daerah di Indonesia. Namun, nilai-nilai ini berkecenderungan turun dan merosot ketika zaman atau Orde Baru, pembangunan secara fisik semakin menonjol. Sementara itu, persoalan mengenai nilai-nilai luhur bangsa sering dipertanyakan dalam masa pembangunan dan terutama dalam era reformasi ini.

Dalam periode yang lalu orientasi pembangunan lebih diletakkan pada daratan, padahal kondisi obyektif geografis negeri ini lebih luas laut dan perairannya. Keseimbangan "Tanah-Air" sebagai konsep yang seharusnya menjadi perspektif membangun negeri tidak dijadikan orientasi. Padahal persoalan besar sebuah negeri dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia bernama NKRI adalah bagaimana memelihara kedaulatan laut dan memanfaatkan potensi laut yang sangat melimpah untuk kesejahteraan masyarakatnya (Zuhdi 2006).

Begitulah belakangan ini mencuat disuarakan dari provinsi-provinsi yang berkarakter kelautan untuk tidak menyamaratakan dana anggaran pembangunan dengan provinsi berwilayah daratan. Barangkali demikian pula yang dirasakan oleh kabupaten-kabupaten di kepulauan dalam wilayah Sulawesi Tenggara. Sementara itu suatu kecenderungan yang umum terjadi di berbagai daerah dalam derap pembangunan perkotaan periode lalu, yang tidak berarti kini berakhir, ditandai dengan dihancurkannya banyak bangunan bernuansa kolonial atau monumen bersejarah lainnya. Jika hal ini terus terjadi, akan tampak ketidaksungguhan baik pemerintah pusat dan daerah dalam mempertahankan apalagi memelihara kebudayaan materi itu. Padahal dari bukti fisik tersebut banyak tersimpan nilai-nilai arkeologis maupun sejarah, tidak jarang menunjukkan kejayaan dan keluhuran jiwa dan semangat Bangsa Indonesia, yang berterbaran di berbagai daerah. Demikian pula sikap dan perhatian terhadap naskah, seharusnya lebih ditingkatkan lagi.

5. Catatan Penutup

Dalam catatan penutup ini perlu diulas kembali pokok pembahasan makalah yakni mengenai suatu upaya penelusuran rekonstruksi sejarah kebudayaan Buton. Kepingan dari berbagai unsur-unsur sejarah dan kebudayaan serta ingatan kolektif yang terdapat di suatu wilayah geo-budaya dan politik Buton, dapat dilacak kembali sebagai upaya untuk menyusun bentuk dan gambaran tentang kehidupan masyarakat Buton di masa lampau dengan tema kebudayaan yang komprehensif. Pendekatan terhadap sejarah kebudayaan yang dimaksud adalah dalam kerangka "keragaman dan kesatuan". Aspek "keragaman" itu dipahami sebagai format untuk menerima berbagai perbedaan sudut pandang dan representasi budaya dari daerah-daerah yang terutama berada di luar pusat-pusat kekuasaan politik. Aspek "kesatuan" dimaksudkan sebagai unit analisis yang diharapkan dapat mengintegrasikan bagian-bagian yang terpecah. Selain itu, konteks regional dan global, yakni kawasan Asia Tenggara dan hubungan dengan Asia Timur dan Eropa, tidak dapat dihindari sebagai jaringan yang membentuk sejarah kebudayaan Buton.

Periodisasi tampak yang dipaparkan disini masih dipengaruhi oleh pembabakan peristiwa politik. Kecenderungan ini sepertinya sulit dihindari, tetapi suatu kajian yang lebih dalam dengan menggunakan sumber lokal primer diharapkan dapat ditemukan patokan-patokan untuk penentuan periodisasi yang lebih bernuansa peristiwa budaya.

Selain itu mengenai pelestarian budaya kiranya patut juga ditekankan. Sepintas kata lestari artinya tetap atau langgeng. Meskipun dalam bahasa Sunda artinya "mati" atau "lenyap". Di sini istilah lestari bukan hanya berarti "langgeng" tetapi juga sesuatu yang "berkembang". Jadi "melestarikan" artinya kegiatan menggali, mengembangkan, dan memanfaatkan dalam hal ini yang berkaitan dengan kebudayaan. Kegiatan pelestarian kebudayaan tidak hanya yang berkaitan dengan benda budaya (*tangible*) dengan ekskavasi di situs-situs purbakala tetapi juga pelestarian naskah dan perekaman tradisi lisan menjadi sangat penting.

Pada umumnya, saya kira belum banyak dilakukan baik penggalian dan pemeliharaan terhadap benda-benda budaya baik secara arkeologis dan tertulis seperti dalam bentuk manuskrip atau naskah. Dengan keterbatasan dana dan anggaran pemerintah pusat dan daerah, banyak benda budaya tersebut tidak tertangani atau malahan sudah banyak yang "berpindah" ke luar negeri. Sebenarnya tindakan paling awal adalah memelihara agar tetap ada di daerah masing-masing. Perlu didorong untuk menjadikan sumber sejarah lokal berupa tertulis (naskah) dan lisan serta benda budaya termasuk (*visual materials*) sebagai bahan kajian. Program itu perlu didanai cukup karena memiliki arti penting bukan hanya bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya, tetapi juga diharapkan dapat bermanfaat khususnya di bidang pendidikan antara lain dalam bentuk muatan lokal untuk mata pelajaran di sekolah.

Suatu hal yang patut dicatat bahwa masih berdirinya banyak bangunan bersejarah di Kota Baubau dan daerah lainnya, merupakan hal positif. Visi membangun Baubau dengan perpaduan sejarah dan budaya guna menyongsong masa depan yang sejahtera bagi masyarakat yang semakin terbuka dengan arus globalisasi akan dicatat oleh sejarah itu sendiri. Kalau dalam abad XVI—XVII, Buton dan sekitarnya telah masuk dan ikut memainkan peran dalam perdagangan laut jarak jauh atau antarbenua (*long distance/intercontinental sea trade*) dengan peradabannya, perspektif itu tampak pula dalam kekinian Buton. Pembangunan Kota Baubau dalam

konteks perpaduan sejarah dan budaya masa lampau dengan tuntutan perkembangan masa kini tampaknya ingin diwujudkan oleh pemimpin dan masyarakatnya (Rudyansjah 2009).

Pemanfaatan kebudayaan dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, khususnya untuk pendidikan dan pencerdasan bangsa serta keuntungan ekonomi-pariwisata. Melalui pendidikan itulah transformasi nilai atau pewarisan nilai-nilai budaya dapat dilakukan secara efektif. Program pariwisata tidak harus diterjemahkan semata-mata keuntungan materi saja melainkan juga dapat menjadi sarana pendidikan dalam arti luas. Ungkapan "Kenali Negerimu Cintai Negerimu" merupakan motto pariwisata Indonesia yang jika diturunkan ke dalam rancangan program yang jelas akan menjadi sarana yang efektif bagi pembentukan karakter bangsa. Hanya bangsa yang berkarakter kuatlah yang mampu merespon arus globalisasi dalam segala masa.*****

Daftar Pustaka

- Anceaux, J. *Wolio Dictionary (Wolio-English-Indonesian) Kamus Bahasa Wolio (Wolio-Inggris-Indonesia)*. Dordrecht, 1987.
- Anhar Gonggong. *Abdul Kahar Mudzakkar: Dari Patriot hingga Pemberontak*. Jakarta: Penerbit Grasindo, 1992.
- Burke, Peter (ed). *New Perspectives on Historical Writing*. Cambridge: Polity Press, 1995 (cetakan pertama 1991)
- Burke, Peter. *Varieties of Cultural History*. Cambridge: Polity Press 1997.
- Darmawan, M. Yusran. "Ingatan Yang Menikam (Orang Buton memaknai Tragedi PKI 1969)", Tesis Magister Program Pascasarjana Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, 2009.
- Ikram, Achadiati, editor, *Katalog Naskah Buton*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor, 2002.
- Kana, Nico L. *Dunia Orang Sawu*, Disertasi UI 1978.
- Liebner, Horst, H. "Perahu-Perahu Tradisional Nusantara: Suatu Tinjauan Sejarah Perkapalan dan Pelayaran", dalam Edy Sedyawati ed. *Eksplorasi Sumber Daya Maritim*. Jakarta, Departemen Kelautan dan Perikanan dan LPUI, 2005: 53—123.
- Mukhlis PaEni dkk, *Sejarah Kebudayaan Sulawesi*. Jakarta: Depdikbud 1995.
- _____ (ed umum) *Sejarah Kebudayaan Indonesia: 8 Jilid*. Jakarta: Penerbit Rajagrafindo, 2009.
- Schoorl, Pim. *Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton*. Penerbit Djembatan: 2003.
- Southon, Michael. *The Navel of the Perahu: Meaning and values in the Maritime Trading Economy of a Butonese Village*. Canberra 1995.
- Tarimana, Abdurrafuf, "Kalo Sebagai Fokus Kebudayaan Tolaki" Disertasi Universitas Indonesia, 1985.
- Thompson, Paul. *The Voice of the Past : Oral History*. Oxford: Oxford University Press, 1988.
- Tony Rudiansyah. *Kekuasaan, Sejarah, dan Tindakan*. Jakarta: Penerbit Rajagrafindo, 2009.
- Warren, James Francis. *Iranun and Balangingi: Globalization, Maritime Raiding and the Birth of Ethnicity*. Singapore: Singapore University Press, 2002.
- Zahari, A. Mulku. *Sejarah dan Adat Fiy Butuni (Buton)* Jilid III. Jakarta: Depdikbud, 1977.
- Zuhdi, Susanto. "Perspektif Tanah-Air Dalam Sejarah Indonesia" Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 25 Maret 2006.
- _____ . "Kabanti Kanturuna Mohelana Pedoman Berlayar Orang Buton: Suatu Refleksi Mengenai Dunia Kemaritiman Melayu-Nusantara" dalam Prosiding Persidangan Antarbangsa Manuskrip Melayu 2009: Manuskrip Melayu Warisan Negara, Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya (Kuala Lumpur), 23—25 November 2009: 360—374.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Pleno V
Hari, Tanggal, Pukul	: Senin, 19 Juli 2010, 16.00 – 17.30
Penyaji/Pemakalah	: Prof. Dr. Susanto Zuhdi
Judul Makalah	: Kebudayaan Buton: Suatu Penelusuran Sejarah dan Pelestariannya
Pemandu	: Prof. Dr. La Ode Sidu Marafad
Pencatat	: Lia Amaliah Muhlisi, S. T.
Jumlah Peserta	: 400 orang

TANYA JAWAB

La Ode Muh. Ansyari (Tokoh Masyarakat Buton)

Pertanyaan/Saran

Apa perbedaan definisi sejarah dan kebudayaan Buton?

Jawaban

Sejarah Buton memperlihatkan dinamika sebuah kesultanan dan masyarakat yang mencakupi wilayah politik, berhubungan dengan sejarah masyarakat pada zaman itu baik menyangkut politik, sosial budaya, tradisi lisan, dan bahasa.

Kebudayaan Buton adalah proses dan hasil kreativitas pemikiran dan karyanya pada sebuah masyarakat yang hidup pada zamannya.

**BAHASA DAERAH SEBAGAI SARANA PENCERDASAN DAN PENGEMBANGAN POTENSIS
DAERAH SULAWESI TENGGARA PADA ERA GLOBALISASI:
Pelestarian dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah dalam Era Globalisasi**

**Barbara Friberg
(Amerika Serikat)**

Ada istilah dalam Bahasa Inggris *collocational clash* [perselisihan sanding kata] yang digunakan apabila ada dua kata atau ide yang tidak dapat diijarkan dalam satu frasa/klausa. Misalnya, suatu contoh yang sering muncul dalam bidang linguistik adalah, "*colorless green ideas sleep furiously* (Ide hijau tanpa warna tidur terengah-engah)." Bagaimana *hijau* bisa *tanpa* warna? Apa hubungannya *ide* dengan warna, atau bagaimana *ide tidur*? Bagaimana ada sesuatu yang *terengah-engah* kalau sudah *tidur*? Artinya kata-kata seperti itu tidak mempunyai arti satu pun kalau diijarkan pada satu ucapan.

Yang harus kita tanyakan: apakah kata pelestarian dan pembinaan bahasa dan sastra daerah adalah *collocational clash* kalau disebut atau disandingkan dengan kata "dalam era globalisasi"? Benarkah bahwa era globalisasi mengakibatkan kepunahan bahasa dan sastra daerah?

Sampai sekarang banyak orang, bahkan pemerintah Indonesia, mengakui bahwa bahasa-bahasa daerah masih penting sekali dan harus dilestarikan. Dalam Risalah Pembangunan Lima Tahun Ketujuh salah satu poin dari ratusan rencana adalah "5) Pembinaan dan pelestarian bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan budaya bangsa terus dilanjutkan untuk mengembangkan dan memperkaya Bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional dengan meningkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah serta penyebarannya dengan menggunakan berbagai media yang mudah dipahami masyarakat Indonesia pada umumnya."

Apakah pernyataan tersebut sesuai dengan fakta di lapangan? Banyak orang tua sekarang beranggapan bahwa pendidikan dwi-bahasa menjadi penghalang proses pendidikan anak sehingga mereka berbahasa Indonesia dengan anaknya (walaupun bahasanya bercampur bahasa atau susunan bahasa daerah). Jelas dewasa ini tanpa kita sadari anak-anak kita diajar bahwa bahasa ibunya sudah kuno dan harus ditinggalkan. Walaupun anak-anak mengerti bahasa ibunya yang digunakan di rumah dan lingkungannya, mereka merasa malu untuk menggunakannya.

Saya mempunyai pengalaman menarik (yang mudah-mudahan menjadi pelajaran penting bagi semua pembaca) pada Kongres Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Selatan di Makassar yang dilaksanakan tiga tahun yang lalu. Entah berapa ratusan juta rupiah dana disediakan pemerintah pusat untuk kongres itu yang cukup ramai dihadiri. Pembukaan Kongres dihadiri oleh Wakil Presiden, Bapak Jusuf Kalla, bersama banyak bupati dan pejabat tinggi di Sulsel. Dalam ceramahnya, Jusuf Kalla beberapa kali mengatakan, "Bahasa Bugis sudah mulai hilang; jangan menangis. Anaku sendiri tidak tahunya, apalagi cucuku. Kalau mereka mau bicara sama neneknya, mereka mengajar dia Bahasa Indonesia." Pengalaman ini menggelitik saya dan saya berpikir apabila seorang petinggi daerah tidak mengerti bahasa daerahnya bagaimana masyarakatnya dapat memiliki kebanggaan atas bahasa daerah yang merupakan bahasa ibunya sendiri? Bahasa daerah haruslah tetap dilestarikan, terlebih lagi pada era globalisasi yang tanpa kita sadari secara perlahan mengubur bahasa ibu kita.

Setelah pembukaan Kongres tersebut selesai semua bupati menandatangani MOU yang menjamin setiap sekolah di daerahnya akan mengajar bahasa daerah yang pantas sampai kelas tiga SMP. Para peserta kongres menyambut dengan sangat antusias untuk melaksanakan peningkatan pengajaran bahasa daerah. Beberapa dosen mengambil keputusan untuk "*strike while the iron is hot*" (segera mengambil tindakan ketika semangat masih menyala). Mereka mendapatkan dana untuk melaksanakan seminar peningkatan penggunaan bahasa daerah dan sebagainya. Ada yang bersedia membuat bahan pelajaran dalam bahasa daerahnya sendiri, yang bukan bahasa Bugis atau Makasar. Panitia dibentuk di kantor walikota untuk pembinaan bahasa daerah.

Setelah beberapa bulan apa hasilnya? Setahu saya, kurang ada. Program-program komputer yang diajar dan diinstal pada komputer canggih pada suatu universitas di Makassar dikalahkan oleh *virus*. Pada suatu SMP guru Bahasa Indonesia dialihkan untuk mengajar bahasa daerah. Walaupun dia sendiri asli Makasar dan pasti berbahasa Makasar di rumah dan di kampung, dia sama sekali tidak mengetahui aksara Lontara yang merupakan dasar pelajaran bahasa daerah. Apa lagi hanya sebagian kecil siswanya tahu bahasa Makasar; ada yang diajarkan bahasa Indonesia oleh orang tuanya, ada juga yang dari Jawa atau Sulawesi Tengah, dan lain-lain.

Di Makassar ada beberapa siaran radio dan TVRI yang menggunakan bahasa daerah. Dalam siaran radio banyak obrolan yang mencampuradukkan bahasa nasional dengan bahasa daerah. Ada sifat budaya yang muncul yang tidak pantas sebagai teladan. Siaran TVRI kebanyakan berisi berita daerah dari daerah Bugis, Makasar, Mandar, dan Toraja, empat bahasa yang diakui di Sulsel. Menarik juga bagi penutur masing bahasa daerah namun sangat terbatas. Wartawan-wartawannya berasal dari daerah tersebut supaya interaksinya lebih

akrab dan berbau daerahnya sendiri. Namun begitu siaran itu kurang berhasil melestarikan atau membina bahasa-bahasa daerah karena banyak dicampurkan bahasa nasional. Menurut pendapat kami, penggunaan bahasa nasional untuk istilah-istilah yang kurang tepat dalam bahasa daerah justru membuktikan bahwa bahasa daerah tidak mampu mengekspresikan hal-hal yang penting dalam kegiatan/kehidupan masyarakat, apa lagi dalam era globalisasi. Sebenarnya, ada bahasa daerah yang tepat, tetapi orang yang maju merasa jauh lebih baik kalau menggunakan istilah-istilah pemerintah atau masa kini. Contoh yang sederhana: *narkoba* bukan saja istilah bahasa nasional, tetapi juga kata pinjam dari bahasa Inggris *narcotics*, yang sebenarnya diminjam dari bahasa Yunani *narkotikos*. Memang dalam era globalisasi kata seperti itu dianggap kata internasional dan semua orang pada semua daerah harus tahu artinya. Kalau betul, seharusnya kata itu dijelaskan dalam bahasa daerah, kemudian barulah mengajarkan istilah *narkoba*. Misalnya, artinya dalam Bahasa Makasar adalah "*pa'balle ammanraki*" obat yang merusakkan. Jelas sekali bagi orang bahwa "*pa'balle ammanraki*" yang dinamakan *narkoba* bukan hanya suatu program pemerintah lagi yang tidak berarti bagi orang kampung, walaupun anaknya sudah mencoba *narkoba* di kota.

Setelah Kongres bahasa daerah Sulsel, nampaknya ada guru yang bersemangat melaksanakan program bahasa daerah di sekolahnya di daerah. Ada seorang guru bahasa daerah di suatu SMP di luar kota yang berusaha sendiri untuk membuat pelajaran dalam bahasa daerahnya supaya siswanya yang seratus persen asli daerah tersebut dapat mempelajari bahasa ibunya. Sering dia mengurus izin pada kantor pendidikan daerah untuk meresmikan programnya, bahkan meminta kepada bupati, tetapi tidak ada yang mau ikut campur tangan. Lebih menyedihkan lagi dia diancam oleh orang-orang fanatik yang marah kalau bahasa daerah maju.

Saya kurang tahu berapa lagi pengalaman buruk orang yang pernah bersemangat untuk melestarikan dan membina bahasa daerahnya, tetapi yang jelas kurang sekali hasilnya. Itulah yang mendorong saya untuk bertanya, Apakah ada perselisihan sanding frasa *pelestarian dan pembinaan bahasa dan sastra daerah* dengan frasa *dalam era globalisasi*? Apakah era globalisasi memaksa kita untuk meninggalkan bahasa ibu kita? Pendapat saya, tidak; sama sekali tidak. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita ubah kalau bahasa daerah, yang sebenarnya masih kuat dalam Sulawesi Selatan, Tengah, and Tenggara, tidak ditinggalkan.

Bahasa lisan dan bahasa tertulis:

Tanpa bahasa tertulis, bahasa daerah akan punah! Materi tulisan harus ada. Sering kali kalau kami membicarakan masalah membuat materi tulisan dalam Bahasa Bugis/Makasar, orang langsung bicara tentang aksara Lontara. Memang semua tulisan yang ada dalam bahasa daerah di Sulsel berbentuk naskah lontara dan aksara Lontara dianggap mempunyai semacam hubungan "spiritual" bagi kebudayaannya. Abdul Wahad mengomentari tentang Bahasa Bali, "Aksara daerah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan budaya daerah. Melihat fungsinya, aksara daerah telah dan dapat digunakan lagi dalam kehidupan bersastra, berseni, pendidikan, adat, agama, serta komunikasi tulis sehari-hari. Dengan lain perkataan, aksara daerah itu dapat diberi kedudukan yang tinggi seperti yang terdapat pada mata uang logam zaman Belanda berikut ini." Mungkin begitu pada daerah yang sangat tergantung pada budayanya untuk menarik turis-turis, tetapi apakah ada fungsi lain bagi orang di daerahnya sendiri yang mendorong mereka membina aksara daerah?

Dewasa ini orang Bugis/Makasar merasa mereka tidak dapat membaca bahasa ibunya. Pasti kalau penutur bahasa Bugis/Makasar di bawah 40 tahun umurnya diberi bacaan dengan aksara Lontara, hampir tidak ada yang dapat membacanya, walaupun mereka pernah belajar aksara Lontara di SD dan SMP. Sekalipun mereka dapat membaca hurufnya, mereka kurang mengerti juga kecuali isinya gampang sekali dimengerti, karena aksara Lontara tidak ada huruf mati atau double/huruf ganda atau huruf-akhir kata (*final consonants*).

Jika kita sungguh memikirkan hal pelestarian bahasa daerah, aksara Lontara (atau aksara lain) harus dilestarikan. Tetapi kalau bahasa daerah akan dibina, penggunaannya tidak dapat tergantung bahasa sehari-hari yang digunakan untuk berbicara dalam rumah tangga atau dengan temannya saja. Masing-masing bahasa daerah harus mempunyai bacaan yang dapat dibaca oleh semua penutur, baik orang sudah tua maupun anak-anak muda. Dewasa ini hampir semua orang dapat membaca sekalipun hanya dalam bahasa Indonesia. Sudah dibuktikan di mana-mana bahwa orang yang dapat membaca bahasa Indonesia dapat juga membaca bahasa ibunya, asal huruf yang digunakan huruf Latin seperti bahasa Indonesia, bukan aksara Lontara atau Wolio.

Satu contoh sederhana:

- a) *Sanging jai ana'-ana' akkare'-karena ri balla'na Baso'. Napattutui patana balla', "Teako geggeri!"*
- b) *Sanging jai anak-anak akkarek-karena ri ballakna Basok. Napattutui patana ballak, "Teako geggeri!"*
- c) *sR jA an-an aker-kern R bln bso.*
npŠŠA ptn bl, "etako egegr!"

Selalu ada banyak anak kecil yang bermain di rumah Baso.

Pemilik rumah memperingatkannya, "Jangan ribut!"

Meskipun bukan penutur bahasa Makasar, Saudara dapat membaca kalimat a) dan b) ini yang ditulis dengan huruf Latin, baik yang memakai apostrof ' , maupun yang memakai k. Kalau ada yang dapat membaca c)

yang ditulis dengan aksara Lontara, tentu Saudara adalah orang Makasar yang berumur lima puluh ke atas. Ternyata, anak-anak yang sudah dapat membaca buku sekolah dapat membaca bahasa ibunya.

Betapa menariknya sejarah daerah atau pahlawan dari suatu suku bangsa yang ditulis dengan huruf Latin dilengkapi gambar dan dicetak dalam buku, bukan? Dalam era globalisasi ini kita sudah mempunyai komputer yang canggih dengan program-program untuk penerbitan (*publish*) sehingga gampang sekali membuat buku-buku atau selebaran yang menarik sekali dalam bahasa daerah.

Gampang juga merekam cerita pengalaman orang tua atau dongeng kemudian menyebarkannya dalam bentuk *mp3* atau *CD* yang gampang didengarkan atau *upload* ke *webpage* suatu bahasa daerah. Tidak ada batasan untuk membina bahasa daerah sekarang.

Haruskah ada program pemerintah atau proyek resmi sebelum bertindak?:

Maman pernah berkata bahwa pemerintah layak memfasilitasi masyarakat agar tetap membaca karya sastra. "Sastra daerah khususnya, berisikan muatan lokal, yang justru bisa disosialisasikan lagi lewat penerapan kurikulum pendidikan di sekolah maupun di perguruan tinggi. Sastra menjadi aplikatif dan apresiatif."

Betul bahwa pemerintah sudah berupaya dengan memasukkannya dalam bahasa daerah yang wajib diberikan di sekolah-sekolah. Tetapi apakah bahasa daerah yang diajar di sekolah mendorong siswa-siswa bangga atas bahasa ibunya atau ada hasil negatif padanya? Mungkin Saudara menjawab bahwa itu tergantung gurunya. Betul juga, tetapi kurang sekali guru yang bersemangat mengajar bahasa daerah, dan kalau kebetulan ada satu-satu guru yang berusaha mengajar bahasa daerah dengan semangat apakah dia didukung oleh kepala sekolahnya atau pemerintah setempat? Biasanya digunakan buku pelajaran yang sudah tersedia dalam salah satu bahasa daerah, meskipun bahasa daerah yang digunakan setiap hari tidak sama dengan yang dianggap resmi.

Menurut pendapat kami, hal yang sangat penting adalah bahwa bukan hanya proyek resmi atau program pemerintah yang akan berhasil untuk melestarikan dan membina bahasa daerah dalam era globalisasi ini. Penting sekali bahwa pemerintah mendukung dan sama sekali tidak menolak atau menghalanginya, Tetapi pemerintah sewajarnya bersangkutan dengan perkara-perkara yang jauh lebih penting. Bahwa pemerintah memperhatikan masalah bahasa-bahasa daerah adalah hal yang patut dipuji, Meskipun bukan pemerintah yang harus membina bahasa-bahasa daerah. Penuturnya sendiri yang harus bertindak kalau bahasa ibunya betul penting baginya.

Tindakan yang harus dilakukan oleh para penutur bahasa daerah:

- Tenaga sukarelawan. Sesungguhnya untuk mewujudkan ketersediaan bacaan bahasa daerah dan pembinaan sastra bahasa ibu dalam era globalisasi ini pertama-tama diperlukan para sukarelawan bahasa daerah, dalam artinya mereka yang bersedia membantu tanpa dibayar.
- Membuat pekerjaan rumah atau perlombaan membuat tulisan dalam bahasa daerah: guru bahasa daerah dapat mendorong siswa-siswanya supaya mereka mencari cerita daerah atau pengalaman orang tuanya lalu membuat rekaman atau membuat tulisan berdasarkan cerita tersebut. Untuk pelajaran/pelatihan komputer, siswa dapat merekam atau menulis cerita tersebut, bahkan menggunakan aksara bahasa daerah, kalau mampu. Cerita-cerita yang baik itu dapat juga menjadi muatan untuk *webpage* bahasa daerah di *internet*.
- *Weekly readers*: Yang paling gampang untuk memperoleh bahan pelajaran bahasa daerah adalah Bacaan Mingguan. Kami sangat senang sekali bila mengingat waktu belajar di SD. Setiap minggu ada beberapa lembar sebesar tabloid yang berisi cerita menarik, kartun, dan teka-teki. Kami membawa materi-materi itu pulang ke rumah dan membacanya berulang-ulang. Biasanya guru-guru juga mengambil bahan dari *weekly reader* sebagai tambahan pelajaran biasa. Guru yang rajin dapat membuat Bacaan Mingguan muatan bahasa daerah hanya dalam satu atau dua jam.

Yang berikut di sini adalah contoh-contoh dari *weekly reader* yang pernah dibuat dalam bahasa daerah Konjo, yang juga biasa dianggap satu dialek Bahasa Makasar oleh beberapa orang di Makassar.



Kalorang Panggu'rangi

Pa'pilajarang Basa na Ada' Konjo ri SMP No. 1

iTinggi Minasa

Riolo rie' tau sikalabini, malling-mallingmi maengna bunting na anre'pa ana'na. Rie'mo se're hattu ri ammono'namo battu ri kokonna na'cidong-cidong a'bica'-bicara naruntu'mi nanaha-naha bahinenna ilalang ri atinna na nakua: "Haji'na kuitte injo mange tau nurie'a ana'na nakare'-karenai, nariha-riha, nabombo-bombo. Rie'mo nasuro-suroangi, rie' to'mo landarepai tau toana punna toami, punna anre'mo nakullei, iareka naallei apa-apanna nunauppaya tau toana."

A'pakua'mi injo kedo-kedona sanggenna a'dappo' ri buhunga. Pakua'mi injo cari'-caritanna iTinggi Minasa.
(Puang Ilyas, Kalimporo 1992)

Punna maengmi nubaca caritaya injo irate, pihalimi pa'kuta'nang rie'a iraha inni:

1. *Angngurai na niarengi iTinggi Minasa?*
2. *Apaji naisse' najama iTinggi Minasa na tulolomo?*
3. *Apa jamaangna tau toana iTinggi Minasa?*
4. *Apa saba'na na'dabbung ri buhunga iTinggi Minasa?*
5. *Inaiji pa'bungasa antulungi iTinggi Minasa?*
6. *A'bojako annang pau nutala nupahanga battuangangna.*
7. *Pa'basa Malajui barrisi se're a'genna barrisi tuju.*

Caritanna kamponga ri Tombolo riolo

Sitojeng-tojengna kamponga ri Tombolo inni mae riolo kurang sikali balla'. A'kulleji nirekeng iareka nibilang manna tala niukiri. Anre'ja na kimmiti' mangel-mange ambilangi. Nasaba' tala sikurang batui balla'. Injo na kuisse'i ancaritai iareka ampau' nasaba' maeng to'a napauang boheku riolo, jari kulle to'i kucarita iareka kupau. Na inakke kurapikang sipolong to'ji pole anre' to'pa na ta'lalo lohe balla', batattana anre' to'pa, sabangji bahang naa'runji tau siurang olo'-olo'.

...

Sikua'ji injo inakke kurapi' kucarita sanggenna inni alloa. Na kitarimai ballo manna sikidi mamu caritanku. (Andi Mappanyompa 1990)

Pipahangii injo rate caritaya na nupihali pa'kuta'nang inni iraha:

1. *Inai bungasa anjari kapala desa ri Tombolo?*
2. *Apa saba'na taua riolo natala sikola?*
3. *Taung sikurapi narie' sikola ri Tombolo?*
4. *Pa'basa Malaju injo rate caritaya!*

Tappu-tappuna tuKonjoo

1. *Punna niu'rangii, anre' nierangi; punna nikaluppai, nierangi amminahang. Apaya?*
2. *Ahangna nikanre, assinna nipela'. Apaya?*
3. *Ana' lolo toppang na paenteng kulantu'. Apaya?*
4. *Punna bangngii, labbu uhu'na, punna alloi a'kulu-kulu bebbe'i. Apaya?*
5. *Apanna a'bulusumi' bahinea?*
6. *Kamua lopi ta'tompangpi nallurang. Apaya?*
7. *Rapang-rapang tau a'jallo' anrongna a'kohe, ana'na annobo'. Apaya?*
8. *Rapang-rapang tau nurie' babana angngura na bokona ammuni. Apaya?*

Punna maengmo nupipahangii injo irate tappu-tappua, a'bajumako ta'ruanu tappu-tappu nampa nubaca, nupa'kuta'nangang ri dallekang kalasaya ri urangnu!

Perhatikan bahwa semua yang ada di Bacaan Mingguan ini adalah bahasa daerah sendiri. Ada beberapa macam bagian: pertama, cerita menarik yang ditulis salah satu orang tua desa yang terkenal sebagai penulis/pecerita yang baik. Cerita itu lucu dan juga berisikan nasehat atau teladan. Yang kedua, beberapa pertanyaan tentang cerita yang baru dibaca. Nomor 6 berarti "Carilah enam kata yang belum kamu tahu artinya." Nomor 7 berarti "Terjemahkan kalimat satu sampai tujuh ke dalam bahasa Indonesia."

Yang ketiga, cerita juga, tetapi tentang sejarah satu desa di daerah itu, ditulis oleh salah satu tokoh masyarakat. Yang berikut pertanyaan tentang cerita. Yang keempat, adalah beberapa teka-teki yang menarik. Hanya guru yang mempunyai jawabannya. Misalnya, nomor 5. "Apanya yang berkumis perempuan?" [bapaknya ☺]. Akhirnya ada pekerjaan rumah: "Kalau kamu sudah mengerti teka-teki di atas, buatlah masing-masing dua teka-teki kemudian bacakanlah dan tanyakanlah di depan teman kelasmu."

Contoh-contoh lain yang dapat menjadi bahan untuk Bacaan Mingguan atau buku kecil adalah sebagai berikut:

—pelajaran tentang imbuhan-imbuhan

Yang pertama ini adalah contoh prefiks-prefiks/awalan; semua kata sudah ada dalam bacaan yang pernah dibaca.

Pa'tamba riolo basa Konjo

a. Buangangna pa'tamba riolo basa Konjo:

<i>cidong</i>		<i>a'cidong pa'cidongang</i>	
<i>bicara</i>		<i>a'bicara sipa'bicara</i>	
<i>hoja</i>		<i>a'boja pa'boja</i>	
<i>tangnga</i>		<i>a'tangnga</i>	<i>sitangnga</i>
<i>langngere</i>		<i>allangngere</i>	<i>pallangngere</i>
<i>lungang</i>	<i>a'lungang</i>	<i>pa'lungang</i>	<i>a'pa'lungang</i>
<i>kuta'nang</i>	<i>a'kuta'nang</i>	<i>pa'kuta'nang</i>	<i>sikuta'nang</i>
<i>suling</i>	<i>a'suling</i>	<i>pa'suling</i>	<i>ta'suling</i>
<i>sengo</i>	<i>a'sengo</i>	<i>pa'sengoa'pa'sengo</i>	

Yang kedua ini adalah contoh sufiks-sufiks/akhiran basa Konjo.

Pa'tamba riboko basa Konjo

a. Buangangna pa'tamba riboko basa Konjo:

<i>pole</i>		<i>poleang</i>	
<i>danggang</i>		<i>danggangang</i>	
<i>pau</i>		<i>pauang</i>	
<i>haji'</i>		<i>hajikang</i>	<i>hajikangang</i>
<i>pantara</i>		<i>pantarang</i>	<i>pantarangang</i>
<i>siri'</i>		<i>siriki</i>	
<i>cidong</i>		<i>cidongi</i>	

-Nyanyian yang lazim terdengar di daerah

Sebaiknya nyanyian dinyanyikan siswa-siswa beberapa kali sampai lancar. Nyanyian diikuti oleh beberapa pertanyaan tentunya tentang nyanyian tersebut, kemudian siswa diajak menulis nyanyian dalam bahasa daerah yang biasa mereka dengar.

Kelong Basa Konjo

- Punna a'ra'ko labunting*
Bunting nai'ko ri Doa'
Tanning dumpina
Latto'-latto' kampilona
- Battu ratema ri bulang*
Ma'kuta'nang ri bintoeng
Apa nakua?
Bunting lompojako sallo'
...
- Sampang se're-se're samo*
Sampang rua se're samo
A'ra'jako injo rua tallu
Pa'risi'nu
- Punna sallo' na kisibokoi*
Jaki na kispau kodl
Paua golla
Na kupauko kaluku.

Punna maengmi nupipahangii injo irate kelonga pihalimi pa'kuta'nanga inni iraha:

- 1. Pa'nassai apa nikua kelong Konjo!*
- 2. Apaii buangangna Kelong Konjoa?*
- 3. Apa matu-matunna injo rate kelonga?*
- 4. Angngukiriko se're kelong Konjo nubiasaya nulangngere.*

-Pelajaran tri-bahasa berbentuk percakapan.

Salah satu pelajaran yang sangat bermanfaat adalah percakapan tiga bahasa. Yang di bawah ini termasuk juga aksara Lontara supaya anak-anak mempelajarinya juga.

A: Ante'ko anngguppa bukkuru intu?
 B: Kunjo ri sikalingku.
 A: Nadahuangko iareka nuhallii?
 B: Kuhallii.
 A: Sikura nuhalliangi intu?
 B: Ruang pulo sabbu rupia.
 A: Lohe bukkuru'nu, di?
 B: Io, kupiarai.
 A: Apa nuhajuangi bukkurua injo?
 B: Kungai angkanrei, na kukanre todo' bajaona.

Dari mana Kamu mendapat tekukur itu?
 Dari sepupu sekali saya.
 Dia berikan Kamu atau Kamu membelinya?
 Saya membelinya.
 Berapa Kamu membayarkan itu?
 Dua puluh ribu rupiah.
 Kamu punya banyak tekukur, bukan?
 Ya, saya memeliharanya.
 Apa yang Kamu baut dengan tekukur itu?
 Kami suka memakannya, na kami juga memakan telurnya.

A: Ante'ko anngguppa bukkuru intu?
 B: Kunjo ri sikalingku.
 A: Nadahuangko iareka nuhallii?
 B: Kuhallii.
 A: Sikura nuhalliangi intu?
 B: Ruang pulo sabbu rupia.
 A: Lohe bukkuru'nu, di?
 B: Io, kupiarai.
 A: Apa nuhajuangi bukkurua injo?
 B: Kungai angkanrei, na kukanre todo' bajaona.



Dari mana Kamu mendapat tekukur itu?
 Dari sepupu sekali saya.
 Dia berikan Kamu atau Kamu membelinya?
 Saya membelinya.
 Berapa Kamu membayarkan itu?
 Dua puluh ribu rupiah.
 Kamu punya banyak tekukur, bukan?
 Ya, saya memeliharanya.
 Apa yang Kamu baut dengan tekukur itu?
 Kami suka memakannya, na kami juga memakan telurnya.

Where did you get that wood pigeon?
 From my cousin.
 Did he give it to you or did you buy it?
 I bought it.
 How much did you pay?
 Twenty thousand rupiahs.
 You have lots of bukkuru, don't you?
 Yes, I raise them.
 What do you do with them?
 We like to eat them, and we eat the eggs, as well.

Where did you get that wood pigeon?
 From my cousin.
 Did he give it to you or did you buy it?
 I bought it.
 How much did you pay?
 Twenty thousand rupiahs.
 You have lots of bukkuru, don't you?
 Yes, I raise them.
 What do you do with them?
 We like to eat them, and we eat the eggs, as well.

Pelajaran susun kata atau grammar dapat berdasarkan percakapan tadi. Semua kata yang terdapat pada percakapan diulang dan dijelaskan bagiannya masing-masing.

Pa'pau nurie'a ri pa'bica'-bicaraang irate:

KONJO	POKO' PAU	MALAJU	ANGGARISI
ante'ko	ante' + -ko	di mana? + kamu	where? + you
apa	Apa	apa?	what?
bajaona	bajao + -na	telur + -nya	egg + its/his
bukkuru	Bukkuru	Tekukur	wood pigeon
bukkuru'nu	bukkuru + -nu	tekukur + -mu	wood pigeon + your
nadahuangko	na- + dahu + -ang + -ko	dia + memberi + -kan + kamu	he + give + to + you
Di'?	di'	bukan?	right?
nuhaju	nu- + haju	kamu + buat	you + do
nuhallii	nu- + halli + -i	kamu + membeli + -nya	you + buy
kuhallii	ku- + halli + -i	saya + membeli + -nya	I + buy
nuhalliangi	nu- + halli + -ang + -i	kamu + membeli + -kan + -nya	you + buy + for + it
iareka	iareka	Atau	or
injo	Injo	Itu	that
intu	Intu	Itu	that
lo	lo	Ya	yes
angkanrei	ang- + kanre + -i	memakan + -nya	eat + it
kukanre	Ku- + kanre	saya/ku- + makan	I + eat + it
kunjo	kunjo	di situ	there
sikura?	si- + kura	berapa?	how much?
lohe	lohe	Banyak	much/many
na	na	Dan	and
kungai	ku- + ngai	saya/ku- + suka	I + like
kupiarai	ku- + piara + -i	saya/ku- + pelihara + -nya	I + raise/take care of + them/it/him
ri	ri	di/dari	at/from/on/in ...
ruang pulo	rua pulo	dua puluh	twenty

rupia	rupia	Rupiah	rupiah
sabbu	sabbu	Ribu	thousand
sikalingku	sikali + -ku	sekali + -ku	first (cousin) + my
todo'	todo'	Juga	also
angnguppa	ang- + uppa	Mendapat	find

Sebenarnya, tidak ada batasan pelajaran yang dapat dibuat kalau ada guru yang sedikit kreatif.

–Perlombaan membuat karangan. Tanpa banyak persyaratan atau dana, guru dapat memperoleh banyak bahan untuk pelajaran minggu-minggu di kelas bahasa daerahnya. Dengan hadiah kecil saja atau janji bahwa beberapa karangan/cerita paling menarik akan digunakan dalam pelajaran untuk semua sekolah di daerahnya, guru dapat mendorong siswa-siswa untuk mencari cerita daerah. Kalau perlombaan membuat karangan termasuk pekerjaan rumah untuk beberapa minggu, semua siswa harus ikut. Siswa-siswa diusulkan untuk mencari orang tua yang dapat membantu. Boleh membagi dalam beberapa kategori, misalnya, dongeng, cerita sejarah daerah, cerita pahlawan daerah, asal nama suatu desa atau dusun atau tempat menarik, bahkan pengalaman yang menarik. Yang penting siswa terlibat untuk berkarya. Mereka dapat merekam cerita orang tua mereka, atau dapat juga menulis ulang cerita tersebut dengan tulisan tangan. Yang penting, hasilnya jelas. Mereka harus berusaha supaya cerita asli bahasa daerah, jangan bercampur-campur dengan bahasa nasional.

–*Website*. Kalau ada guru atau orang lain yang sudah biasa menggunakan komputer dengan internet, mereka dapat membuat *website* bahasa daerah. Memang sudah ada macam-macam *website* tentang orang Bugis/Makasar dan suku-suku lain, tetapi kurang ada yang berfokus kepada bahasa daerah. Pak Muhammad Hasri, seorang asli bahasa daerah Tae' di Kabupaten Luwu pernah membuat *website* khusus Bahasa Tae'. Dia berusaha untuk memperoleh bahan bahasa daerah Tae' yang dapat dibaca orang pada *websitenya*. Barangkali ada lagi *website* bahasa daerah dan mudah-mudahan para pembuatnya menghadiri kongres ini dan bersedia menjelaskan tentang *website* tersebut.

–Buku-buku kecil. Ternyata penutur bahasa daerah di SulTeng sudah rajin membuat buku-buku tentang bermacam-macam hal seperti kesehatan, cerita daerah, dan lain-lain. Kami mengajak supaya orang lain mulai membuat buku dengan program-program komputer dan alat-alat yang sudah lazim dipakai dewasa ini. Lihatlah contoh-contoh buku yang dipamerkan kongres ini baru buatlah juga yang sama dalam bahasa daerah Saudara sendiri.

–Gramar kecil, kamus, dan lain-lain. Seperti yang sudah saya katakan, tidak ada hal yang terbatas yang dapat dibuat kalau ada kemauan. Siapa berani menjadi teladan bagi orang-orang di daerahnya. Kalau orang sudah mulai membaca dan mendengar yang menarik dalam bahasa ibunya, siapa tahu, akan banyak tawaran agar bahan bahasa daerah dibuat lebih banyak lagi, agar semakin banyak yang dapat dinikmati orang-orang di daerah.

PENERAPAN KAIDAH ALGORITMA GENETIK DALAM PEMULIHAN BAHASA DAERAH DARI DEGRADASI¹

Farid Thalib²

farid@staff.gunadarma.ac.id

Mashadi Said³

mashadi@staff.gunadarma.ac.id

(Universitas Gunadarma, Jakarta)

1. Pendahuluan

Teori evolusi biologis menggambarkan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dalam kurun waktu yang relatif lama. Evolusi biologis mempunyai tiga kaidah utama, yaitu: **regenerasi** atau **reproduksi**, **mutasi**, dan **persilangan**. Mutasi dan persilangan termasuk jenis variasi genetik, sedangkan regenerasi termasuk jenis seleksi alam. Evolusi dapat berlangsung akibat **variasi genetik** dan **seleksi alam**. Variasi genetik dalam satu keturunan disebabkan oleh adanya mutasi gen dan persilangan gen dalam satu keturunan. Sedangkan seleksi alam terjadi berdasarkan kemampuan makhluk hidup bertahan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan (regenerasi) (David, 1989 & Heistermann, 1994).

Teori evolusi yang menjelaskan prinsip adaptasi biologis ini, dalam ilmu komputer atau informatika lebih populer dengan istilah algoritma genetik. Dalam sistem kecerdasan buatan (*artificial intelligent*) dan komputasi lunak (*soft computing*), algoritma genetik banyak digunakan dalam penyelesaian persoalan dengan metode optimasi (David, 1989).

Dalam makalah ini diutarakan penerapan prinsip algoritma genetik untuk menjelaskan gejala kepunahan dan peluang keberlangsungan bahasa dari zaman ke zaman serta tindakan pencegahannya dari kepunahan. Gejala kepunahan bahasa daerah dapat dimaknai sebagai (a) berkurangnya jumlah penutur bahasa daerah dan (b) hilangnya kesinambungan makna antara bahasa daerah masa lampau dan bahasa daerah sekarang. Dalam teori algoritma genetik, berkurangnya jumlah penutur bahasa daerah dapat dianalogikan dengan peluang **regenerasi**, sedangkan kehilangan kesinambungan makna antara bahasa daerah masa lampau dan bahasa daerah sekarang dapat dianalogikan dengan peluang variasi (perubahan) tata bahasa dan kosakata yang meliputi **mutasi** dan **persilangan**.

Kaidah **regenerasi** mengukur peluang keberlangsungan fungsi bahasa daerah dan peluang kepunahan bahasa daerah akibat proses seleksi alam, sedangkan kaidah **mutasi** dan **persilangan** mengukur peluang berubahnya bentuk bahasa daerah terutama perubahan bentuk tata bahasa dan lenyapnya (tertindasnya) kosakata asli bahasa daerah, sehingga tidak ada lagi kesinambungan makna antara hakikat bahasa daerah masa lampau dan bahasa daerah sekarang. Kasus kedua ini juga merupakan penganalogian dengan kedudukan Bahasa Indonesia dalam tataran dunia global.

2. Model Algoritma Genetik dalam Pemaknaan Kepunahan Bahasa

a. Regenerasi (seleksi alam)

Secara alami, sebuah generasi dalam populasi memiliki kemampuan mempertahankan keasliannya jika generasi tersebut (induk) dapat mewariskan sifatnya kepada turunannya (generasi anak) atau anak dapat mewarisi sifat induknya. Jika sifat induk tidak diwarisi oleh anak secara sempurna, hal ini berarti telah terjadi penyimpangan sifat anak (jati diri) dari induknya. Peluang anak untuk mewarisi sifat induknya disebut peluang regenerasi. Secara kuantitatif, kejadian ini dapat diukur dengan "teori kebolehjadian" (probabilitas) dan dinyatakan dalam persen. Semakin besar peluang anak untuk mewarisi sifat induknya, semakin besar pula peluang sifat induk tersebut bertahan dalam kurun waktu yang relatif lama.

Kaidah regenerasi ini bisa dianalogikan dengan peluang bahasa daerah untuk bertahan atau berfungsi sebagai bahasa komunikasi di sebuah daerah. Hal ini berkaitan dengan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa percakapan dalam rumah tangga dari zaman ke zaman. Jika sebuah keluarga menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa rumah tangganya, ada peluang bahwa bahasa daerah tersebut akan digunakan juga oleh anak (turunan) dari keluarga tersebut dalam keluarganya kelak jika si anak telah berkeluarga.

Dengan penganalogian tersebut dapat disimpulkan bahwa peluang bahasa daerah untuk tetap berfungsi sebagai bahasa komunikasi di sebuah daerah bergantung kepada keinginan atau tekad masyarakatnya (pemulihan atau revitalisasi fungsi) dan demikian sebaliknya, ada peluang degradasi fungsi bahasa daerah. Degradasi fungsi

¹ Disajikan pada Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara, tanggal 18-20 Juli 2010.

² Farid Thalib adalah dosen pada Program Doktor Teknologi Informasi, Universitas Gunadarma, Jakarta.

³ Mashadi Said adalah dosen pada Program Magister Sastra, Universitas Gunadarma, Jakarta.

bahasa daerah mungkin disebabkan oleh (a) salah satu pimpinan keluarga berasal dari keluarga yang tidak menguasai bahasa daerah sehingga bahasa komunikasi dalam rumah tangga adalah bahasa yang disepakati oleh keluarga. (b) adanya anggapan "kampungan" jika seseorang menggunakan bahasa daerah, (c) adanya anggapan bahwa bahasa daerah adalah bahasa suku/ras. Bahasa daerah bukanlah warisan genetik sebuah suku bangsa melainkan sarana komunikasi yang merupakan warisan masyarakat daerah yang terdiri atas beragam suku bangsa dan ras.

Salah satu acuan yang dapat dipakai untuk mengetahui tingkat degradasi fungsi sebuah bahasa daerah adalah pengukuran jumlah penutur bahasa daerah tersebut secara berkala dan dibandingkan dengan jumlah penduduk daerah tersebut, selanjutnya hasil perbandingan dinyatakan dalam persen.

Gambar 1 menyajikan model ideal yang memaparkan berkurangnya jumlah penutur bahasa daerah di sebuah daerah dalam perjalanan waktu. Sumbu tegak menyajikan jumlah penutur dalam ukuran persen, sumbu datar menyajikan perjalanan waktu dalam ukuran tahun. Model ini disajikan dengan anggapan bahwa:

"kecepatan berkurangnya jumlah penutur bahasa daerah di sebuah daerah pada suatu masa sebanding dengan jumlah penuturnya pada masa itu". (Said & Thalib, 2007).

Secara matematik, pernyataan di atas dapat ditulis dengan rumus

$$J(t) = J_0 \exp(-at), \dots\dots\dots (1)$$

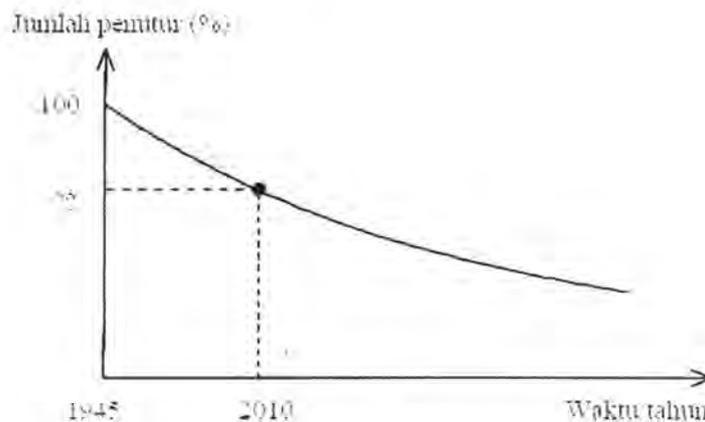
dengan

$J(t)$ = jumlah penutur bahasa daerah pada suatu masa (%),

J_0 = jumlah penutur bahasa daerah pada masa penghitungan (waktu awal, %),

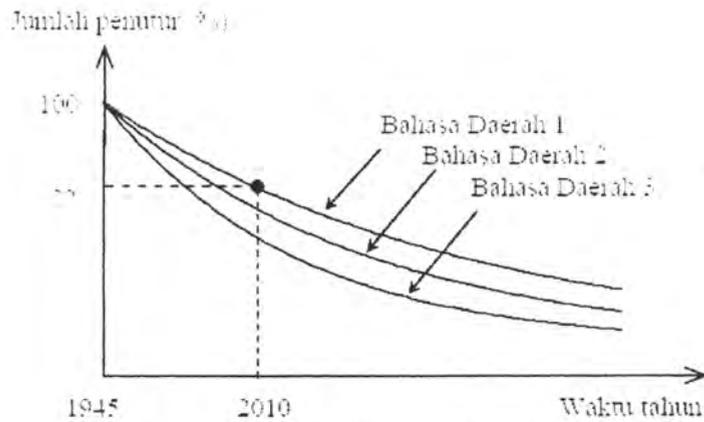
a = faktor perkurangan jumlah penutur per tahun (%), dan

t = kurun waktu (tahun).



Gambar 1. Model gejala kepunahan sebuah bahasa daerah

Jika dianggap bahwa pada tahun 1945 jumlah penutur bahasa daerah di sebuah daerah sebanyak 100 persen (100%) dari jumlah penduduknya dan pada tahun 2010 jumlahnya berkurang menjadi 70 persen (70%) dari jumlah penduduknya maka secara matematik dengan rumus (1) dapat dihitung kecepatan berkurangnya jumlah penutur dalam kurun waktu 65 tahun (2010-1945), yaitu sebesar **0,0055 persen per tahun**. Jika keadaan sekarang dibiarkan saja berjalan secara alami tanpa ada upaya pemulihan fungsi bahasa daerah sebagai sarana komunikasi di masyarakat, secara teoretik matematik dalam waktu 126 tahun (lebih 9 hari) ke depan jumlah penutur bahasa daerah tersebut berkurang lagi hingga menjadi **35 persen** saja dari jumlah penduduknya pada masa itu, yaitu pada tahun 2136. Gambar 2 menyajikan gambaran variasi kecepatan kepunahan bahasa daerah.



Gambar 2. Model variasi kecepatan kepunahan bahasa

b. Variasi Genetik 1 (Mutasi)

Mutasi berarti penghilangan atau penggantian salah satu unsur sifat bawaan induk oleh sifat bawaan induk lain lalu diwariskan pada generasi anak (turunan) sehingga tidak semua sifat bawaan induk diwarisi oleh anaknya (turunannya).

Kaidah mutasi ini dapat dianalogikan dengan penggantian kosakata sebuah bahasa dengan kosakata bahasa lain (misalnya kosakata bahasa daerah dengan kosakata Bahasa Indonesia, kosakata Bahasa Indonesia dengan kosakata Bahasa Inggris). Selain itu, hal ini bisa juga dimaknai dengan penggantian kaidah tata bahasa sebuah bahasa dengan kaidah tata bahasa lain. Hal ini bisa menimbulkan peluang hilangnya kesinambungan makna antara bahasa masa lampau dan bahasa sekarang. Kasus ini mungkin disebabkan oleh (a) anggapan adanya ketidaksepadanan makna antara kosakata bahasa yang dipakai dengan kosakata bahasa lain yang menjadi sumber asal berita, (b) adanya perasaan lebih modern jika seseorang banyak menggunakan kosakata asing atau struktur bahasa yang asing (modern atau kampungan?), dan (c) alasan pengayaan bahasa melalui penyerapan bahasa lain (penyerapan atau penindasan?). Penyerapan secara berlebihan bisa berakibat penindasan.

Contoh Mutasi dalam Bahasa Indonesia

Dalam Bahasa Indonesia, kata "kabar" sering digantikan dengan kata "informasi". Kata informasi berasal dari Bahasa Latin "*informare*" bentuk verbanya, "*information*" bentuk nominanya. Kata ini masuk ke Indonesia melalui Bahasa Inggris "*information*". Kata "*information*" diserap menjadi kata "informasi" dan secara umum dalam kalimat bisa dipadankan dengan kata "bakar" atau "berita". Akan tetapi dalam praktiknya kata "informasi" sering menggantikan fungsi kata "kabar" sehingga frekuensi penggunaan kata "kabar" berkurang. Penggantian ini dinamakan **Mutasi**. Demikian halnya frekuensi penggunaan kata "berita" semakin berkurang dan digantikan dengan kata "informasi".

Berikut ini disajikan contoh gejala **Mutasi** dalam Bahasa Indonesia yang berhasil dikumpulkan dengan menggunakan mesin cari "google" di Internet pada tanggal 23 Juni 2010 mulai pukul 16:07. Catatan: klausa yang dicari harus diberi tanda petik. Hasil pencarian adalah

"kami memperoleh informasi" ada sebanyak 25.900 klausa,
 "kami memperoleh kabar" ada sebanyak 753 klausa, dan
 "kami memperoleh berita" ada sebanyak 527 klausa.

Tabel 1 Hasil pencarian melalui Internet dengan mesin cari *google* yang menggambarkan **mutasi**

No.	Hasil Pencarian dengan "google"	Jumlah klausa/ frasa/kata	Keterangan (anggap semua kata yang dipakai hanya digunakan oleh orang Indonesia)
Contoh persaingan penggunaan kosakata Indonesia dengan kosakata asing			
1	Kami memperoleh <u>informasi</u> kami memperoleh kabar kami memperoleh berita	25.900 753 527	informasi = 95,29%, kabar = 2,77%, berita = 1,94% dalam frasa "kami memperoleh informasi/kabar/berita"

2	bagian <i>marketing</i> bagian pemasaran	63.600 519.000	pengayaan atau penindasan?
3	Mengadakan <i>kolaborasi</i> Mengadakan kerja sama Mengadakan kerjasama	1.810 282.000 54.600	terkesan modern atau kampung ?
4	<i>Berkolaborasi</i> dengan Bekerja sama dengan Bekerjasama dengan	89.600 3.960.000 1.560.000	terkesan modern atau kampung ?
5	<i>Mengedukasi</i> masyarakat Mendidik masyarakat	26.300 41.200	terkesan modern atau kampung ?
6	menjadi <i>member</i> menjadi anggota	345.000 749.000	pengayaan atau penindasan?
7	<i>developer</i> perumahan pengembang perumahan	43.500 28.500	Kata "pengembang" belum tersebar luas dengan baik
8	<i>mendownload</i> dari internet <i>men-download</i> dari internet mengunduh dari internet mengambil dari internet	42.000 143.000 17.800 29.900	Kata "unduh" sudah mulai tersebar luas dengan baik
9	<i>mengupload</i> ke internet <i>mengupload</i> di internet <i>meng-upload</i> ke internet <i>meng-upload</i> di internet mengunggah ke internet mengunggah di internet menaruh ke internet menaruh di internet	6.330 10 20.000 19.600 6 9 0 11.600	Kata "unggah" belum diketahui secara luas dengan baik
10	<i>mengupdate</i> data <i>meng-update</i> data memperbarui data memperbaharui data	21.500 162.000 11.700 1.060	Perlu ada kamus padanan kata untuk masyarakat umum
Contoh penyerapan kaidah bahasa asing			
11.	rata-rata lama studi lama studi rata-rata rata-rata IPK IPK rata-rata	176.000 5.520 15.100 36.300	Hukum MD Hukum DM
12	standar deviasi deviasi standar	72.400 11.300	Bahasa asalnya " <i>standard deviation</i> ", diterjemahkan menjadi "simpangan baku" atau diserap menjadi "deviasi "standar"
13	pipanisasi pemipaan pipanisasi gas pemipaan gas	59.800 513.000 15.000 2.140	"pipa+nisasi" bukan kaidah pembentukan kata dalam Bahasa Indonesia Peluang kata "pemipaan" untuk muncul dalam persaingan dengan "pipanisasi" = 89,56%
14	rayonisasi Perayonan	31.700 160	"rayon+isasi" bukan kaidah pembentukan kata dalam Bahasa Indonesia Peluang kata "perayonan" untuk muncul dalam persaingan dengan "rayonisasi" = 0,5% Anggapan: kata rayonisasi dan perayonan hanya dipakai oleh orang Indonesia

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa ada peluang mutasi atau penggantian kosakata dan kaidah Bahasa Indonesia dengan kosakata dan kaidah bahasa asing, demikian halnya berlaku pada bahasa daerah.

c. Variasi Genetik 2 (Persilangan)

Persilangan (pindah silang) berarti pertukaran timbal balik unsur sifat bawaan antara dua induk atau lebih lalu diwariskan pada anak (turunan). Persilangan ini dapat dianalogikan dengan pertukaran kosakata (yang

sepadan) atau pertukaran kaidah bahasa antara dua bahasa yang dipakai secara bersamaan dalam sebuah masyarakat (misalnya bahasa daerah dan Bahasa Indonesia). Persilangan dalam bahasa mungkin terjadi karena (a) penguasaan bahasa yang terbatas, (b) kurang disiplin dalam berbahasa, (c) kesengajaan agar dianggap modern dan menjadi pelopor pembaruan (pelopor atau pengekor?)

Rangkuman

Kaidah **Regenerasi** mengukur peluang pemulihan fungsi bahasa daerah dan peluang kepunahan bahasa daerah akibat proses seleksi alam, sedangkan faktor **Mutasi** dan **Persilangan** mengukur peluang berubahnya bentuk bahasa daerah terutama perubahan bentuk tata bahasa dan lenyapnya kosakata asli daerah sehingga tidak ada lagi kesinambungan makna antara hakikat bahasa daerah masa lampau dan bahasa daerah sekarang.

Secara garis besar prinsip adaptasi biologis dapat dibagi menjadi dua, yakni (a) **regenerasi** yang mewakili peluang untuk menghasilkan jumlah turunan dengan sifat yang sama dengan induknya akibat proses seleksi alam dan (b) **variasi genetik**, yang meliputi *mutasi gen* dan *persilangan gen* yang mewakili peluang untuk mempertahankan keaslian sifat turunan karena variasi genetik.

Analogi dengan algoritma genetik, gejala kepunahan bahasa daerah dapat diukur dengan dua parameter, yaitu (a) berkurangnya jumlah penutur bahasa daerah yang dapat dianalogikan dengan **Regenerasi** dalam algoritma genetik dan (b) hilangnya kesinambungan makna antara bahasa daerah masa lampau dan bahasa daerah sekarang yang dapat dianalogikan dengan **variasi genetik** yang meliputi Mutasi dan Persilangan.

3. Model Pengukuran Ketahanan Bahasa Daerah dengan Parameter Algoritma Genetik

Pengukuran keberlanjutan sebuah bahasa daerah dengan algoritma genetik dilakukan dengan cara pengukuran besar nilai peluang dari ketiga kaidah algoritma genetik dalam perjalanan waktu, yaitu **Regenerasi**, **Mutasi**, dan **Persilangan**. Ketiga kaidah tersebut diukur sebagai parameter keberlanjutan sebuah bahasa daerah setelah mengalami proses seleksi alam dan variasi dinamika berbahasa karena pengaruh bahasa lain dalam perjalanannya dari zaman ke zaman. Parameter **Regenerasi** mewakili peluang penambahan atau pengurangan jumlah penutur sebuah bahasa daerah yang dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut, parameter **Mutasi** mewakili peluang tergantinya sebuah kosakata asli sebuah bahasa daerah dengan kosakata bahasa lain atau mewakili peluang tergantinya sebuah kaidah bahasa dalam tata bahasa daerah dengan tata bahasa lain, dan parameter **Persilangan** mewakili peluang pertukaran kosakata atau pertukaran kaidah bahasa antara sebuah bahasa daerah dengan bahasa lain yang dipakai secara bersamaan pada sebuah daerah (bahasa daerah dan Bahasa Indonesia).

a. Pengukuran Parameter Regenerasi

Parameter Regenerasi diukur dengan cara pengukuran jumlah penutur bahasa daerah pada suatu waktu tertentu, lalu dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut dan dinyatakan dalam bentuk persen. Kegiatan ini dilakukan secara berkala tiap kurun waktu tertentu.

b. Pengukuran Parameter Mutasi

Pengukuran parameter Mutasi dapat dilakukan dengan cara pemilihan kosakata serapan yang dianggap berlebihan karena sudah ada padanan katanya. Selanjutnya, dilakukan pengukuran frekuensi penggunaannya di dalam bahasa daerah. Dengan cara yang sama dapat dilakukan pengukuran frekuensi penggunaan kaidah bahasa lain dalam bahasa daerah (pangayaan atau penindasan?).

c. Pengukuran Parameter Persilangan

Parameter persilangan juga diukur sama seperti pada parameter mutasi, selanjutnya diukur juga frekuensi penggunaan sebuah kosakata bahasa daerah atau kaidah bahasa daerah yang dipakai dalam bahasa lain yang dipakai oleh masyarakat daerah secara bersamaan (misalnya bahasa daerah dan Bahasa Indonesia).

Parameter Regenerasi mencerminkan peluang keberlanjutan (dan juga peluang kepunahan) sebuah bahasa daerah dari aspek jumlah penuturnya, sedangkan parameter Mutasi dan Persilangan mencerminkan variasi struktur bahasa daerah dalam perjalanan waktu yang menimbulkan peluang kehilangan (dan peluang keberlanjutan) kesinambungan makna antara hakikat bahasa masa lampau dan bahasa sekarang.

4. Pemulihan Fungsi Bahasa Daerah Sebagai Sarana Komunikasi

Pemulihan fungsi bahasa daerah dapat dilakukan dengan cara memperbesar peluang Regenerasi dan memperkecil peluang Mutasi dan Persilangan. Hasil upaya tersebut akan menghasilkan jumlah penutur bahasa daerah yang bertambah dalam ukuran persen dari jumlah penduduk daerah tersebut dan memperkecil peluang perubahan hakikat bahasa daerah dari zaman ke zaman sehingga kesinambungan makna antara hakikat bahasa masa lampau dan bahasa sekarang tetap terpelihara. Untuk pemulihan, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu (a) penyamaan pandangan dan (b) penerapan program pemulihan fungsi bahasa daerah secara bertahap, yakni penerapan program strategis jangka panjang.

a. Penyamaan Pandangan

Salah satu kendala terhambatnya upaya pemulihan fungsi bahasa daerah dari gejala kepunahan adalah perbedaan pandangan tentang kebangsaan, modernisasi, dan globalisasi. Berikut ini, diutarakan beberapa pandangan tentang: nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika, bahasa daerah bukan warisan genetik, modernisasi, dan globalisasi.

(1) Nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika: Kesatuan atau Persatuan?

Makna nasionalisme dan negara kesatuan harus diturunkan dari dasar negara, yaitu Pancasila. Sila ke-3 berbunyi "Persatuan Indonesia". Persatuan berasal dari kata "bersatu", artinya tiap daerah dipandang sebagai subjek yang bersatu membentuk satu negara, bukan objek yang dilebur menjadi satu negara. Selain itu, kata "Bhinneka Tunggal Ika" pada lambang negara, berarti persatuan dalam keberagaman. Dengan demikian, perlu disadari bahwa semua bahasa daerah dan segala bentuk kearifan lokal dari berbagai daerah berkedudukan sama pada tataran nasional dan tidak dilebur menjadi satu.

(2) Bahasa Daerah: Warisan Genetik atau Warisan Budaya?

Dalam praktiknya, sebagian orang berpandangan bahwa bahasa daerah adalah bahasa milik suku yang tinggal di daerah tersebut, sehingga para pendatang yang tinggal di daerah tersebut merasa bahwa suku bangsa tersebutlah yang paling bertanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah tersebut dari kepunahan. Karena itu, perlu diupayakan munculnya kesepahaman bahwa bahasa daerah bukan warisan genetik dari suku bangsa penggunanya, bahasa daerah adalah warisan budaya dan merupakan bahasa milik masyarakat daerah yang tinggal di daerah tersebut dan bertanggung jawab secara bersama untuk menjaga kelangsungan penggunaannya.

(3) Modernisasi: Modern atau Kampungan?

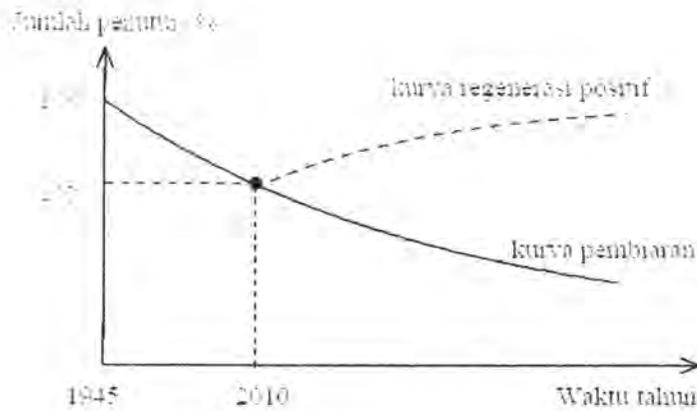
Ada anggapan bahwa seorang dianggap modern jika orang tersebut suka menerima segala sesuatu yang baru dikenalnya yang datang dari luar daerahnya, termasuk bahasa atau istilah yang baru dipahaminya tanpa menyaringnya. Selanjutnya, dia meninggalkan nilai-nilai dan kearifan yang selama ini membentuk jati dirinya. Sikap menerima secara serampangan ini sesungguhnya adalah ciri masyarakat terkebelakang, atau lebih populer dengan istilah kampungan. Salah satu ciri masyarakat modern yang sesungguhnya adalah selalu berorientasi ke masa depan dengan melihat masa sekarang dan mengambil pengalaman dari masa lampau. Artinya, manusia modern itu adalah manusia yang kritis dan tidak serta merta mengambil pengalaman-pengalaman baru tanpa kajian penyaringan terlebih dahulu (Said, 2008).

(4) Globalisasi: Melebur atau Membaur?

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa globalisasi adalah upaya penyatuan masyarakat dunia dari sisi gaya hidup, orientasi, dan budaya. Semuanya serba seragam; cara pandang, kebiasaan sehari-hari, bentuk bangunan, bahasa yang digunakan dan lain sebagainya semuanya sama. Penyatuan diri secara serampangan juga merupakan ciri masyarakat terkebelakang atau lebih populer dengan istilah kampungan (ikut-ikutan). Ada dua model sikap menghadapi arus globalisasi, yaitu "Model Pembauran" dan "Model Peleburan". Sikap ini merupakan pilihan bagi masyarakat daerah di seluruh Nusantara, melebur atau membaur. Sikap membaur berarti bila suatu sistem bergabung dengan sistem yang lain, jati diri sistem itu tetap melekat pada dirinya sebagai suatu kesatuan, bahkan dapat memberikan sumbangan terhadap sistem yang lain. Sikap melebur berarti bergabungnya suatu sistem dengan sistem yang lain tanpa memperhatikan keberadaan jati dirinya. Jati diri bukan lagi hal penting baginya. Unsur itu tertindas oleh sistem lain atau sistem yang lebih besar. Di sinilah masyarakat daerah diperhadapkan pada suatu pilihan, melebur atau membaur? Hal ini bisa dianalogikan dengan keberadaan bahasa daerah dan kearifan lokal pada tataran nasional dan keberadaan Bahasa Indonesia pada tataran dunia global (Said & Thalib, 2008).

b. Peningkatan Nilai Peluang Regenerasi

Peningkatan peluang regenerasi sama dengan penurunan peluang terciptanya generasi yang tidak berbahasa daerah. Program ini bisa diwujudkan melalui pengajaran bahasa daerah sejak dini di sekolah dasar melalui kurikulum muatan lokal. Jika program tersebut dijalankan dengan konsisten dan berkesinambungan, peluang terbentuknya generasi yang menguasai bahasa daerah akan meningkat. Dengan demikian, kurva regenerasi akan naik (positif), seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.



Gambar 3. Model regenerasi jumlah penutur sebuah bahasa daerah

c. Penurunan Nilai Peluang Mutasi dan Persilangan

Program penurunan nilai peluang mutasi dan persilangan yang berarti penurunan peluang terjadinya variasi struktur bahasa. Hal ini akan mencegah hilangnya kesinambungan makna antara hakikat bahasa masa lampau dan bahasa sekarang. Program ini diwujudkan dengan cara pembakuan tata bahasa daerah dalam bentuk bahasa tulis.

5. Simpulan dan Saran

Teori evolusi biologis yang menerangkan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dalam kurun waktu yang relatif lama, dapat juga dianalogikan dengan evolusi sebuah bahasa dalam kurun waktu relatif lama. Evolusi biologis dapat berlangsung karena variasi genetik (karena pengaruh lingkungan) dan seleksi alam. Variasi genetik merupakan akibat mutasi gen dan persilangan gen, sedangkan seleksi alam terjadi berdasarkan kemampuan makhluk hidup untuk bertahan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan (regenerasi). Dalam hal kebahasaan, variasi genetik dapat dianalogikan dengan variasi struktur bahasa yang meliputi mutasi dan persilangan, yang dapat mengakibatkan hilangnya kesinambungan makna antara hakikat bahasa zaman dahulu dan bahasa sekarang. Selanjutnya, seleksi alam dapat dianalogikan dengan berkurangnya jumlah penutur sebuah bahasa yang diukur terhadap jumlah penduduk dan dinyatakan dalam persen. Dengan demikian, ukuran kepunahan dapat diukur dari dua hal, yaitu (a) berkurangnya jumlah penutur yang dinyatakan dalam persen dan (b) hilangnya kesinambungan makna antara hakikat bahasa zaman dahulu dan bahasa sekarang. Selanjutnya, untuk mencegah kepunahan bahasa harus dilakukan rencana strategis jangka panjang yang diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara memperbesar peluang regenerasi melalui pendidikan bahasa secara dini dari sekolah dasar dan memperkecil peluang variasi struktur bahasa melalui pembakuan tata bahasa dan pembuatan kamus padanan kata antara kata asing dan kata bahasa yang dipakai masyarakat (bahasa daerah).

Daftar Pustaka

- David E. Goldberg, D. (1989). *Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning*, University of Alabama, Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- Heistermann, J. (1994). *Genetische Algorithmen*, B.G. Teubner Verlagsgesellschaft, Stuttgart
- Said, M. (2008). *Konsep jati diri manusia Bugis: sebuah telaah falsafi tentang kearifan Bugis*. Ciputat: Churia Press.
- Said, M. dan Thalib, F.(2007). Model Perkembangan Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Selatan. *Prosiding Kongres internasional I bahasa-bahasa daerah Sulawesi Selatan, Makassar, 22-25 Juli 2007*.
- Said, M. dan Thalib, F. (2008). Model Pemertahanan Budaya Nusantara dalam Era Globalisasi: Membaur atau Melebur? *Prosiding Seminar antara bangsa dialek-dialek Austronesia di Nusantara III*. Jabatan bahasa Melayu dan Linguistik, Fakultas Sastra dan Sains Sosial, Brunei Darussalam, 24-26 Januari 2008.
- Sugono. D. Dkk. (2003). *Pengindonesiaan kata dan ungkapan asing*, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

LAPORAN SIDANG

Sidang : Pleno VII
Hari, Tanggal, Pukul : Selasa, 20 Juli 2010, 11.00 – 12.30
Penyaji/Pemakalah : Dr. Farid Thalib
Judul Makalah : Penerapan Kaidah Alogaritma Genetik dalam Pemulihan Bahasa Daerah dari Degradasi
Pemandu : Drs. L. M. Budi Wahidin M., M. Pd.
Pencatat : Uniawati, S. Pd. M. Hum.
Jumlah Peserta : 400 orang

TANYA JAWAB

Tokoh Masyarakat Buton

Pertanyaan/Saran

Apa buktinya kalau saya lebih tertarik tidak mengambil bukti dan lebih senang membuat cara sendiri sehingga orang lain menyontek saya. Mobilisasi dari atas ke bawah atau partisipasi dari bawah ke atas. Perlu ada perda untuk mengatur bahasa daerah dan otomatis dilaksanakan.

**RELASI KEKERABATAN ANTARBAHASA DALAM SUBKELOMPOK
MUNA-BUTON-WAKATOBI, DI KEPULAUAN LEPAS PANTAI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA: KAJIAN LINGUISTIK DIAKRONIS**

**Inyo Yos Fernandez
(Universitas Gadjah Mada)**

1. Latar Belakang

Diskusi panjang tentang kekerabatan bahasa subkelompok Muna-Buton sebagai objek kajian linguistik di Sulawesi Tenggara sejak lama telah menarik perhatian dari para linguis, baik yang berasal dari mancanegara maupun dari pribumi. Penelitian dari para linguis seperti yang diungkapkan Noorduyn (1991) dan Sneddon (1995), di dalam lingkup kajian itu telah memberikan informasi awal mengenai situasi kebahasaan pada komunitas maritim di kawasan itu.

Perbedaan pendapat seperti diungkapkan Elbert (1911-1912), yang didukung Kriebel (1920 dan Salzner, 1960), dengan pendapat Adriani (1914) tentang relasi historis kekerabatan bahasa di wilayah itu menarik jika dikaitkan dengan pandangan Esser (1938) yang tercermin dalam peta bahasa Nusantara pertama. Collins (2007) menjelaskan keberpihakannya pada pendapat Elbert antara lain terkait dengan relasi antarbahasa Bonerate di Kepulauan Selayar dengan Bahasa Binongko di Kepulauan Wakatobi yang memiliki hubungan kekerabatan yang erat. Penjelasan Collins itu dikukuhkan melalui penyajian sejumlah evidensi linguistik tambahan secara kualitatif.

Jika dihubungkan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang dihasilkan antara lain Abdullah Mustafa (1991), Madiambeang (1985), Asrif (2007, 2008) dan Kurniawati (2008); demikian pula Abas, dkk. (1983), yang pada dasarnya menyuguhkan informasi deskriptif tentang keadaan bahasa-bahasa di kawasan ini secara sinkronis telah disumbangkan. Demikian pula, kajian Sidu, dkk. (2002) secara diakronis (dalam penjelasan parsial) telah menginformasikan garis silsilah relasi kekerabatan antarbahasa di Sulawesi Tenggara pada umumnya, dan merupakan rintisan awal kajian kekerabatan bahasa di kawasan lepas pantai Sultra. Dalam pengelompokan bahasa kerabat secara genetik yang dikaji oleh Sidu, dkk. (2000/2001) itu, lima bahasa dari daratan Sultra dan lima bahasa dari kepulauan lepas pantai Sultra, dijadikan sampel kajian dan ingin membuktikan tentang Protobahasa Sulawesi Tenggara (BST) dan relasi antarbahasa anggota subkelompok itu.

Sesuai dengan hasil kajian itu, bahasa-bahasa kerabat di kawasan lepas pantai Sultra termasuk Wolio (WL), Ciacia (CC), dan Wakatobi (WT) yang membentuk subkelompok bersama Bahasa Busoa (BS) di daratan Sulawesi Tenggara dan, Bahasa Kambowa (KB) di Pulau Siompu dan Bahasa Muna (MN). Kajian terhadap kekerabatan yang erat antarsemua bahasa itu menunjukkan sejumlah inovasi fonologis baik dengan mengadopsi teknik rekonstruksi induktif (*bottom up reconstruction*) yang memperlihatkan adanya evidensi seperti inovasi fonem glotal antarvokal dan evidensi lain seperti inovasi fonem lateral (*flap*), dilengkapi pula sejumlah kaidah sporadis seperti fenomena apokop, sinkop, dan metatesis. Melalui teknik rekonstruksi deduktif (*topdown reconstruction*), disertakan pula sejumlah evidensi inovasi berupa *split* (pisah) PMP*b > b (PWKT) dan > w (PWKT) di samping PMP*d > d (PWKT) dan > r (PWKT). Evidensi inovasi lain berupa substitusi PMP*e > e (PMBK) dan PMP*p > f (PMBK).

Menurut catatan SIL (2006), Mawasangka (MS) termasuk salah satu subdialek MN sehingga tidak diperhitungkan serta dengan Bahasa Busoa, Kambowa yang bersama MN membentuk sebuah kelompok bahasa yang erat relasinya dengan bahasa Wolio (WL), Ciacia (CC), dan Wakatobi (WT) sebagai sebuah subkelompok bahasa di Kepulauan lepas pantai Sultra. Demikian pula, Kambowa hanya dialek Bahasa Pancana (Burhanuddin, 1997). Jika informasi itu dapat diterima, menurut relasi kekerabatan antarbahasa di kepulauan lepas pantai Sultra bahasa Busoa (di daratan Sultra) dan dialek Kambowa disarankan tidak disertakan dalam perbandingan antarbahasa subkelompok MN (terdiri atas Busoa, Kambowa, dan MN). Relasi antarbahasa yang perlu dibandingkan yaitu bahasa MN yang membentuk subkelompok MN-WL-CC yang berlabel subkelompok MN-Buton yaitu nama yang selama ini secara populer telah dikenal, karena secara geografis dan historis begitu terkesan terpadu. Kajian perbandingan dengan bahasa Wakatobi (WT) perlu dipertimbangkan karena sebagai satu bahasa WT yang terdiri atas dialek-dialek dapat dilakukan secara terpisah. Rekonstruksi Protobahasa Muna-Buton-Wakatobi (PMBW) diniscayakan untuk memahami secara komprehensif relasi kekerabatan antarbahasa di kawasan kepulauan lepas pantai Sultra. Dalam makalah ini, kajian itu masih terbatas pada upaya menemukan evidensi inovasi leksikal dan fonologis subkelompok Muna-Buton dalam lingkup terbatas, yaitu penerapan teknik rekonstruksi induktif dan deduktif antara bahasa MN-WL-CC sebagai anggota subkelompok pembentuknya. Dengan demikian, kajian ini berbeda dengan kajian diakronis terdahulu dalam hal kajian terhadap relasi kekerabatan antarbahasa di kepulauan lepas pantai Sultra. Pada tahap ini, makalah ini terbatas mendiskusikan kasus khusus tentang relasi antarbahasa subkelompok Muna-Buton. Lebih lanjut, keterkaitannya

dengan bahasa WT masih belum terjangkau saat ini. Diharapkan peluang itu menjadi tantangan bagi peneliti lain, terkait misalnya dengan kajian yang telah dirintis Sandra (2009), yang telah menjajaki awal studi diakronis tentang bahasa WT melalui kontribusinya kajian tentang relasi antarsubdialek WT (seperti kajian relasi antara Binongko dan Bonerate). Relasi kekerabatan antarbahasa di kepulauan lepas pantai Sultra sekilas itu dapat memberi gambaran secara integral melalui evidensi kebahasaan yang perlu dilanjutkan dengan kajian relasi antarbahasa di kepulauan lepas pantai Sulawesi Selatan yang masih perlu dikaji dalam suatu paket yang tidak terpisahkan untuk mengetahui secara komprehensif. Relasi kekerabatan antarbahasa yang terdapat di Kepulauan Selayar, seperti relasi antarbahasa WL dengan Bahasa Laiyolo dan Bahasa Selayar dapat menjembatani jurang kesenjangan pemahaman yang komprehensif tentang situasi sosiokultural suatu kawasan maritim cikal bakal provinsi kepulauan yang ke-8 di Nusantara. Hasil kajian bahasa serupa ini, menjadi kontribusi yang dapat memperkuat relasi sosial yang mendasari integritas, solidaritas, dan keharmonisan dengan semangat unifikasi kawasan maritim demi kesejahteraan masyarakat di kawasan ini. Keeratan relasi kekerabatan bahasa memperlihatkan keeratan masyarakatnya, seperti tersirat dalam ungkapan pepatah: "Bahasa menunjukkan bangsa".

2. Relasi Kekerabatan Subkelompok bahasa Muna-Buton (Tinjauan Kembali)

Dalam makalah ini didiskusikan alasan linguistik yang lebih mendasar dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh penjelasan yang bersifat eksplanasi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan peninjauan kembali penetapan subkelompok Muna-Buton dalam diskusi ini.

Kajian kekerabatan antarbahasa di kepulauan lepas pantai Sultra ini menyertakan asumsi tentang relasi bahasa MN yang dipilih sebagai sampel yang terjalin dengan bahasa bahasa WL dan CC yang diduga membangun subkelompok Muna-Buton. Relasi kekerabatan antarbahasa dalam subkelompok ini secara kualitatif belum banyak didiskusikan. Urgensi tinjauan kembali relasi kekerabatan antarbahasa di kawasan maritim di kepulauan lepas pantai jazirah tenggara Sulawesi ini diperlukan untuk menemukan evidensi kualitatif sebagai bukti penyokong yang dapat memberi eksplanasi tentang persoalan sosiokultural masyarakat di kawasan ini dalam rangka pemberdayaannya membangun solidaritas yang diperlukan menggalang keharmonisan dan integritas yang telah diwariskan secara turun temurun. Penjelasan secara kualitatif dari evidensi kebahasaan tentang relasi kekerabatan bahasa dalam subkelompok itu menjadi kontribusi alternatif ketika faktor sosiokultural dipandang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat di kawasan maritim ini.

Relasi historis yang dibangun di masa lampau di antara kepulauan Muna-Buton sebagai daerah pusat budaya wilayah maritim dengan daerah perifer di luar lingkup pusat budaya itu seperti dengan kepulauan Selayar dan Wakatobi di bagian barat dan tenggaranya. Wilayah itu dalam relasinya dengan daerah pusat budaya Muna-Buton menjadi andalan seperti halnya pula dengan deretan Pulau Sagori, Talaga, Kadatua dan Siompu.

Relasi bahasa kerabat merupakan salah satu dari simbol keberadaan komunitas karena bahasa merupakan tempat perubahan (evolusi) terwadahi dan ampu memberi gambaran tentang situasi politik yang terjadi pada masa lampau dan masa kini. Dalam masyarakat yang berkerabat keharmonisan dapat dicapai dengan menyadari kebersamaan dalam relasi yang sudah dibina oleh leluhur. Studi tentang keharmonisan masyarakat yang dipengaruhi oleh bahasa dan budaya ini dapat dicapai melalui kajian atau penelitian relasi sejarah antarbahasa yang berkerabat erat.

Untuk mengkaji keeratan relasi antarbahasa dalam sebuah subkelompok diperlukan evidensi atau bukti penyokong yang memadai. Bukti-bukti itu dapat ditemukan melalui analisis bahan-bahan kebahasaan, dapat dilakukan melalui perbandingan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Perbandingan kualitatif dalam kajian linguistik diakronis lazimnya dilakukan dengan menggunakan teknik rekonstruksi sebagai pirantinya baik dengan metode induktif maupun deduktif. Secara teoretis penelitian kualitatif dapat menghasilkan garis silsilah kekerabatan bahasa yang hasilnya dipandang lebih tepat dibandingkan yang dihasilkan melalui penelitian kuantitatif, khususnya berdasarkan perspektif kajian linguistik diakronis.

Dalam pengamatan Bahasa Muna yang mengenal salah satu subdileknya Mawasangka, jika databahasa untuk melihat hubungan antarbahasa Muna dan Mawasangka dianalisis, dapat dijelaskan bahwa relasi antarbahasa MN dan subdileknya Mawasangka, memperlihatkan kemiripan kognat yang cenderung menunjukkan bahwa keduanya merupakan dialek dari satu bahasa yang diturunkan dari Prabahasa Muna (PM). Beberapa contoh berikut memperlihatkan evidensi serupa itu.

Prabahasa Muna (PM)

PMM * api > MN, MS ifi 'apai' (PMP *apuy > ifi (MM) > api (CC)

* nain(i,a) > MN, naini MS naina 'di sini'

* nein taha > MN, MS (83) 'memegang'

* ane > MN, MS (88) 'kalau'

* pongko > MN, MS (90) 'bunuh'

* te(h)i (56) 'takut'

* neta (70) 'baik'

- * karuku (71) 'rumput'
- * bie (80) 'berat'
- * naini (81) 'di sini'
- * intara (83) 'pegang'
- * pande (91) 'tahu'
- * roo? (94) 'daun'
- * kema (95) 'kiri'

Jika bahasa Wolio (WL) diambil sebagai sampel lain untuk mengkaji relasi kekerabatan dengan bahasa MN dan Ciacia (CC), maka dimaksudkan kajian terhadap ketiga bahasa tersebut akan menghasilkan subkelompok bahasa Muna-Buton yang keanggotaannya meliputi ketiga bahasa itu. Apabila dalam perbandingan itu data bahasa WL tidak memiliki kemiripan yang sama dengan bentuk kognat dalam bahasa MN dan CC. Hal yang sama juga dapat terjadi apabila ketika relasi antara bahasa WL dan CC ternyata tidak memiliki kemiripan dengan Muna, demikian pula hal yang sama dapat terjadi pula pada bahasa WL dan MN yang tidak mempunyai kemiripan dengan bahasa CC. Dalam hal demikian dapat diasumsikan bahwa etimon PMB dapat melipti pula etimon pada peringkat yang lebih rendah, seperti PWM, PMC, dan PWC. Berikut ini ditampilkan sejumlah etimon PMB dan mezobahasa pada peringkat yang lebih rendah.

Menurut prinsip mezobahasa, seperti dikemukakan Nothofer (1975), etimon PMC, PWC, PWM, sudah terhitung masuk PMB, karena diasumsikan adakalanya salah satu bhs dari anggota PMB yang tidak memiliki kesepadanan kognat dan sudah mengantikan bentuk kognatnya dengan bentuk kata lain, sehingga tidak lagi memiliki kemiripan bentuknya.

- PMB
- *(n)dawu (10) 'jatuh'
 - *kadadi (15) 'binatang'
 - *abu (16) 'abu'; PMP *qabu
 - *sau, kau (20) 'kayu' PAN *qaSiuw
 - *rampa (21) 'sebab'
 - *rea (27) 'darah'
 - *buku (29) 'tulang'
 - *olu (33) 'awan'
 - *tumpo (37) 'potong'
 - *ole (38) 'hari'
 - *(N)abu (46) 'debu'
 - *ndawu (52) 'jatuh'
 - * lola (64) 'terbang'
 - * gawu (65) 'kabut'
 - * bulu (74) 'rambut' PMP *bulu
 - *bake (79) 'jantung' PMP *pusu
 - * bebe (82) 'pukul'
 - * mo-hane (86) 'suami'
 - * dadii? (98) 'hidup' PMP *maquDip > MwsK uhi 'hidup'
 - *hate (99) 'hati' PMP *qatey > Muna ghate
 - * kutu (101) 'kutu'; PMP kutu > Cia2 cucu

PWM (Protobahasa Wolio-Muna)

- PWM
- * bari-baria (13) 'semua'
 - * seli (40) 'gali'
 - * tana (48) 'tanah' PMP *taneq¹.
 - * rompu (54) 'gemuk' PWM *rompu > lompo (WL) > rompu (MN)
 - * ama (55) 'bapak' PWM *ama > uma (WL)
 - * pogira (58) 'kelahi'
 - * rombu (41) 'kotor'

PWC (Proto Wolio-Ciacia)

- * tolu (50) 'telur' PMP *qiteluR² (CC)
- * gau (97) 'bohong'
- * kema (95) 'kiri'
- * wa(n)ta (100) 'panjang'

¹ Selain itu, PWM *wita > wita (MN) > wuta 'tanah' (CC)

² PMM *(gh)unteli sulit dijelaskan > tolu (Wlio) > kolu (CC)

Dari contoh yang dikemukakan di atas dapat diamati lebih lanjut kaidah primer (korespondensi fonologis) yang terjadi dalam subkelompok Muna Buton dan kaidah sekunder atau kaidah sporadis yang berlaku dalam kekerabatan di antara bahasa-bahasa itu. Berikut ini ditemukan sejumlah kaidah primer yang memperlihatkan hubungan kekerabatan yang erat antar subkelompok WMC (bhs WL-MN dan CC) seperti diajikan berikut.

- 1) *t-c (WL-MN-CC): 31, 37, 77, 101
 - 2) *k-s (WL-CC) : 20, 20, 60,
 - 3) *p-f (WL, CC – MM) : 3, 43, 77, 93 (WL-M)
 - 4) *b-w (MN- WL, CC) : 16, 74 (WL-M),
 - 5) *h-gh (C-M): 18, 99, 102
 - 6) *h-Ø (C-M): 18, 86, (kecuali)¹
 - 7) *k-(g)h (CC- MN-MS): 26, 43, 66, 102
 - 8) *k-Ø- (c) (WL- M –C): 101, 66, 26,
 - 9) *r ~h (WL-MN-CC ~ MS) : 27, 58, 71, 83,
 - 10) *r~ h (Ø) (MN-CC): 16, 83 (kecuali)²
- *t ~nt (CC-MN): 100, (kecuali)

Dalam contoh di atas tampak kaidah primer antarbahasa anggota subkelompok MB, yang didukung oleh keanggotaan subkelompok bahasa yaitu MN, WL, dan CC. Dapat diamati pula inovasi fonologis yang pada dasarnya memperlihatkan sejenis kaidah berupa inovasi fonologis dan leksikal. Di antaranya terdapat pula inovasi fonologi berwujud merger seperti pada PMB *r > MN h dan *r > MN (Ø). Demikian juga, PMB *k > CC gh dan *k > h (Ø); Inovasi fonologis lainnya berupa substitusi atau pergantian seperti PMB *t > c (WL-MN-CC); PMB *k > s (WL-CC); demikian pula, PMB *p > f (WL, CC – MM). PMB (WL-MN) *b > w (MN-WL, CC) : 16, 74 (WL-M),

Dalam analisis diakronis seperti yang diuraikan di atas, tampak bahwa terdapat evidensi berupa bukti pemisahan kelompok WL-MN dari CC. Bukti serupa itu menandakan bahwa bahasa CC dalam hal ini mengalami inovasi substitusi (inovasi individual/kognitif) terpisah dari WL dan MN. Selain itu bukti pisah kelompok (WL-)MN dari CC lainnya memperlihatkan beberapa kenyataan seperti yang diuraikan berikut, bahwa kaidah primer lainnya seperti CC h ~ MN gh, misalnya *buhu* ~ *bughu* 'punggung', *hate* ~ *ghate* 'hati'; *hane* ~ *ghane* 'laki-laki' atau CC h ~ MN Ø, misalnya *hane* ~ *moane* 'suami'; kecuali *kake?* (CC) ~ *ghaghe* (MN) 'kaki'; bandingkan dengan CC *kito* yang ~ dengan MN *hito* 'hitam' (PMP *qitēm). Berarti CC dlm perubahannya sangat konsisiten pada bhs awalnya. Kesetiaan CC sangat konsisiten dalam hal ini.

Apabila PMP *qatey > hate (CC) dan > *ghate* 'hati', tetapi PMP *qaqay > *kake?* (CC) dan > *ghaghe* (MN) 'kaki'. Dengan demikian kemungkinan PMP *q > h dan *q > k pd CC, tetapi tetap konsisiten > gh (MN); maka ada inovasi fonologis berupa split pada CC tetapi fenomena itu tidak terjadi pada MN; maka MN pun dalam mengalami inovasi tetap konsisten dalam contoh PMP *q > MN gh, seperti diperlihatkan melalui evidensi di atas.

Korespondensi WL-CC p ~ MN f seperti tampak dalam contoh *api* ~ *ifi* 'api'; *poroku* ~ *foroghu* 'minum'; *pocu* ~ *fotu* 'kepala'; *pota* ~ *fota* 'tertawa'. Demikian pula, korespondensi MN b ~ WL-CC w dalam contoh *bulu* ~ *wulu* 'rambut'; *abu* ~ *awu* 'abu';

Evidensi yang memperlihatkan bukti pemisahan kelompok (WL-)MN dari CC dapat dijelaskan sebagai berikut. Kaidah primer yang berikut terkait dengan hubungan CC-MN k ~ MS (g)h seperti tampak pada contoh CC ~ MN *kito* ~ *hito* 'hitam'; CC ~ MN *poroku* ~ *foroghu* 'minum'; *kake?* ~ *ghaghe* 'kaki'. Dalam contoh itu tampak bahwa adakalanya terdapat perbedaan antara MN dan MS, pada hal ditempat lain CC k ~ MN gh. Namun dalam contoh ini MN adakalanya memperlihatkan variasi antara /gh/ dan /k/ ketika MS memperlihatkan /gh/. Diduga bahwa dalam relasi MN dan MS, Prabahasa MN *k mengalami inovasi > MN /gh/ dan /k/ tetapi Prabahasa MN *k > MS gh; maka ada inovasi kognif pada MN dan MS secara individual. Relasi MN ~ MS juga terlihat pada bukti MN gh ~ MS Ø seperti pada contoh MN (*tolo*)*bughu* ~ MS (*tolo*)*buu* 'punggung' (cf. CC *tolo buhu*) 'punggung'.

Dari evidensi yang diperlihatkan dalam contoh di atas dapat dijelaskan bahwa telah terjadi pemisahan bhs WL-Muna (Muna-Buton) dari bhs Ciacia. Walaupun terdapat cukup bukti bahwa ketiga bahasa itu memiliki sejumlah kaidah primer yang memperlihatkan keeratn hubungan mereka, namun patut dicatat bahwa tampaknya ada evidensi yang memperlihatkan bahwa bukti pisah WL dari bhs CC seperti korespondensi:

¹ Terdapat pengecualian juga dalam hal itu seperti (MN-CC) h ~ Ø; seperti dalam contoh MN *ahu* ~ *au* (CC) 'anjing'.

² Pengecualian juga ditemukan seperti dalam contoh *harabu* (MN) ~ *hawu* (CC) dan *tara* (MN) ~ *tae* (CC).

WL k ~ CC s seperti dalam contoh WL *kau* ~ CC *sau* 'kayu'; WL *kulina* ~ CC *silina* 'kulit(nya); WL *yika* ~ CC *isa?* 'ikan'.

Demikian pula, dalam contoh berikut tampak bahwa relasi kekerabatan antara WL-MN (MS) lebih dekat jika dibandingkan dengan CC. Dalam kaidah primer WL-MN t ~CC c seperti dalam contoh: *tunu* ~ *cunu* 'bakar'; *tumpu* ~ *cumpu* 'potong'; *potu* ~ *pocu* 'kepala', *kutu* ~ *cucu* 'kutu'. Dari evidensi itu, tampak bahwa kekerabatan antara WL-MN (MS) lebih erat jika dibandingkan dengan CC walaupun antarbahasa itu masih terjalin relasi yang akrab. Evidensi kaidah primer WL-MN t ~CC c seperti dalam contoh: *tunu* ~ *cunu* 'bakar'; *tumpu* ~ *cumpu* 'potong'; *potu* ~ *pocu* 'kepala', *kutu* ~ *cucu* 'kutu' mengasumsikan bahwa terdapat protobahasa WL-MN-CC dalam wujud rekonstruksi etimon PMB-CC **tunu* 'membakar', **tumpu* 'memotong', **potu* 'kepala' dan **kutu* 'kutu' Demikian pula terdapat bukti sejumlah evidensi leksikal bersama yang menguatkan relasi kekerabatan yang erat antara WL-MN-CC, dalam sejumlah bentuk etimon Protobahasa MB seperti terdaftar berikut.

- *(n)dawu 'jatuh'
- *kadadi 'binatang'
- *abu 'abu'; (PMP *qabu)
- *sau, kau 'kayu' (PMP *qaSiuw)
- *rampa 'sebab'
- *rea 'darah'
- *buku 'tulang'
- *olu 'awan'
- *tumpu 'potong'
- *ole 'hari'
- *(N)abu 'debu'
- *ndawu 'jatuh'
- *lola 'terbang'
- *gawu 'kabut'
- *bulu 'rambut' PMP *bulu
- *bake 'jantung' PMP *pusu
- *bebe 'pukul'
- *mo-hane 'suami'
- *dadil? 'hidup' PMP *maquDip > Mwsk *uhi* 'hidup'
- *hate 'hati', PMP *qatey .> Muna *ghate*
- *kutu 'kutu'; PMP *kutu* > Cia2 *cucu*
- *potu 'kepala'

Bentuk etimon serupa itu masih dapat ditambahkan terus dengan berpegang pada prinsip mezobahasa. Prinsip itu mengingatkan bahwa jika adakalanya terjadi bahwa data bahasa Wolio misalnya tidak memiliki kemiripan yang sama dalam bentuk kognatnya dengan bahasa Muna dan Ciacia. Demikian pula, seperti halnya apabila ketika data Wolio dan Ciacia yang memperlihatkan kemiripan kata kerabat, namun kemiripan itu tidak ditemukan pada MN (atau Mawasangka (MS)). Demikian pula, kemungkinan terjadi bahwa bahasa WL dan MN tidak ada kemiripan dengan CC. Apabila ditemukan fenomena yang demikian itu, dapat diasumsi bahwa sebetulnya etimon PMB yang dapat direkonstruksi dengan kenyataan dukungan bukti yang ada dalam hal itu melingkupi juga kemiripan kata kerabat pada setiap bahasa anggota kelompok itu. Namun, dapat dijelaskan bahwa bukan mustahil dalam perjalanan sejarah bahasa-bahasa itu, ada di antaranya yang memang telah menggantikan kata kerabat itu dengan bentuk lainnya dengan berbagai alasan yang mungkin terjadi.

Studi diakronis mengenai bahasa Wakatobi dialek Binongko (yang mengkaji data bahasa penutur Binongko dan Bonerate secara diakronis (Safitri, 2010), belum menghasilkan studi tentang prabahasa Wakatobi karena melalui teknik rekonstruksi induktif harusnya dapat menghasilkan prabahasa Wakatobi jika variasi dialek Wakatobi yang lain dipertimbangkan. Meskipun demikian, menurut pandangan para linguis komparatif diakronis, data bahasa Wakatobi variasi Binongko dan Bonerate dapat dikomparasikan secara paralel dengan data bahasa WL, MN, dan CC, dengan memanfaatkan hasil kajian seperti yang dibahas dalam makalah ini.

3. Penutup dan Kesimpulan

Gambaran garis silsilah kekerabatan bahasa yang dibahas di dalam makalah ini dibuktikan dengan menggunakan kajian kualitatif bahasa-bahasa yang dilabeli dengan subkelompok Muna-Buton. Evidensi kekerabatan bahasa WL- MN – CC diperoleh melalui evidensi inovasi bersama secara fonologis dan leksikal. Dalam diskusi ini tidak dibicarakan kajian kekerabatan dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik leksikostatistik. Namun, dengan mengacu kepada pengelompokan yang dilakukan oleh La Ode Sidu dkk.

(2000/2001) penerapan metode komparatif dengan pendekatan induktif dan deduktif melalui teknik rekonstruksi dielaborasi sesuai dengan kepentingan menemukan evidensi berupa inovasi fonologis dan lekikal bersama secara eksklusif.

Para linguist yang berkecimpung dalam kajian linguistik komparatif diakronis pada umumnya memandang bahwa jika hasil kajian kuantitatif bertentangan dengan hasil kajian kualitatif dalam kajian pengelompokan bahasa serupa yang ditempuh dalam makalah ini, maka evidensi hasil kajian kualitatif lah yang dapat menjadi pegangan dalam rangka pemahaman masalah pengelompokan bahasa kerabat yang dikaji.

Daftar Pustaka

- Abas, Husen, A. K. Manyambeang, Ibnu Nandarn dan Shaidy. 1983. *Struktur Bahasa Wolio*. Jakarta: Pusat Bahasa, Depdikbud.
- Abdullah Mustafa, Syahrudin Kaseng, Said Mursalin, Kulla Ligousi, Zaili Sailan. 1991. *Struktur Bahasa Ciacia*. Jakarta: Pusat Bahasa. Depdikbud.
- Adriani, N. And A.C. Kruijt. 1914. *De Bare'e – spreken de Toradja' van Midden Celebes. Taal en Leterkundige schets de Bare'e Taal en overzicht van het taalgebied: Celebes Zuid-Halmahera*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Asrif 2008. "Bentuk Afiks Bahasa Wakatobi" dalam *Kandai*, Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra volume I, tahun III. halaman 126-135. Kendari: Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Asrif 2007. "Kata Tugas Bahasa Wakatobi" dalam *Kandai*, Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra volume I, tahun II. halaman 62-73. Kendari: Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Burhanuddin, 1979. "Bahasa-Bahasa Daerah di Sulawesi Tenggara". Laporan Penelitian. Kendari.
- Collins, James J. (2007) "Sejarah Perbandingan Bahasa-Bahasa Sulawesi Selatan" dalam Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Selatan. Makassar: Panitia Kongres.
- Esser, S. J. 1938. *Atlas van Tropisch Nederland*. The Hague: Martinus Nijhoff
- Kurniawati, Laila (2008). "Reduplikasi Bahasa Pulo Dialek Binongko", dalam *Kandai*. Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra 1(3): hlm 107-115. Kendari: Kantor Bahasa Provinsi Sultra..
- Madiambeang, A. Kadir. 1985. *Struktur Bahasa Binongko*. Jakarta: Pusat Bahasa. Depdikbud.
- Noorduyn, J. 1991. "The Language of Sulawesi" dalam Hein Steinhauer (ed.) *Papers in Austronesian Linguistics* No. 1 *Pacific Linguistics*. Canberra..
- Nothofer, Bernd. 1975. "The Proto Malayo-Javanic". Leiden: KITLV.
- Salzner, Richard. 1960. *Sprachenatlas des Indopafischen Raumes*. Wiesbaden Otto Horrossowitz.
- Safitri, Sandra. 2010. "*Binongko dan Bonerate, Dua Isolek di Kepulauan Lepas Pantai Tenggara dan Selatan Pulau Sulawesi (Kajian Linguistik Historis Komparatif dan Dialektologi)*". Tesis. Yogyakarta: Program Studi Linguistik Pascasarjana UGM
- Sidu, La Ode, Haerun, H., Tambunan, Asrun Lio. 2000/2001 *Pengelompokan Genetis Bahasa-Bahasa di Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Laporan Penelitian Depdikbud.
- Sneddon, J.N. 1995. "Situasi Linguistik di Pulau Sulawesi" dalam *PELLBA* 8. halaman. 139-175. Editor: Soejono Dardjowidjojo. Jakarta: Lembaga Bahasa UNIKA Atma Jaya.

PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA MORONENE

T. David Andersen
(*Summer Institute of Linguistics*)

1. Pendahuluan

Menurut Ethnologue 16th edition (Lewis 2009), ada 114 bahasa daerah di Sulawesi. Dalam Andersen (2006) didaftarkan 26 bahasa daerah di Sulawesi Tenggara, tidak termasuk bahasa pendatang. Sebagai orang yang termasuk pecinta bahasa daerah, satu pertanyaan yang sering muncul di hati adalah: berapa banyak bahasa daerah yang masih bertahan hidup lima puluh atau seratus tahun dari sekarang? Dari 114 atau 26 bahasa daerah tadi, yang mana yang akan masih kuat dan berkembang di masa depan, dan yang mana terancam merosot terus sampai akhirnya punah?

Kalau kita mencari hasil penelitian yang membahas masalah ini, tidak banyak yang telah diterbitkan. Sumber utama ada berbagai laporan survei bahasa di Sulawesi. Misalnya Barr dan Barr (1979), Wumbu et al (1986), Grimes dan Grimes (1987), Noorduyn (1991), Merrifield dan Salea (1996), Mead (1999), Himmelmann (2001), dan lain-lain. Tetapi kebanyakan survei tersebut telah dilaksanakan lebih dari sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu. Sehingga tidak menggambarkan situasi yang sekarang. Juga survei-survei itu lebih banyak terfokus kepada hal mengidentifikasi bahasa daerah yang ada, dan membuat peta bahasa. Tidak terlalu memperhatikan masalah daya tahan bahasa daerah dan pergeseran bahasa.

Belum banyak makalah yang khusus membahas masalah bahasa-bahasa daerah di Sulawesi yang terancam punah. Yang saya temukan hanya Himmelmann (2010) yang membahas bahasa-bahasa rumpun Tomini-Tolitoli di Sulawesi Tengah yang terancam punah.

Makalah ini akan membahas empat masalah:

1. Bagaimana caranya mengukur pergeseran bahasa?
2. Sejauh mana Bahasa Moronene terancam punah?
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan jumlah penutur Bahasa Moronene merosot?
4. Langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk melestarikan Bahasa Moronene?

2. Cara Efisien Mengukur Pergeseran Bahasa

Masalah pergeseran dan kepunahan bahasa daerah dapat diumpamakan seperti suatu penyakit yang berkembang pelan-pelan dan akhirnya dapat menyebabkan kematian pasien yang kena. Tantangan ahli bahasa menghadapi masalah ini dapat diumpamakan dengan tantangan Departemen Kesehatan menanggulangi penyakit menular. Kalau para petugas kesehatan akan berhasil mengobati masyarakat yang kena penyakit dan mencegah penularannya, sangat penting untuk mendapat informasi tentang lokasi dan jumlah orang yang sakit. Diharapkan setiap orang sakit dilaporkan, supaya obat yang cocok bisa dikirim ke Puskesmas terdekat. Demikian juga kalau mau mencegah atau mengobati kepunahan bahasa daerah, sangat penting untuk mendapat laporan tentang jumlah dan lokasi bahasa daerah yang sakit dan membedakan bahasa yang sakit parah dan yang sakit ringan.

Cara yang umum dipakai untuk mengevaluasi tingkat pergeseran bahasa adalah melaksanakan survei sosiolinguistik. Seorang peneliti mengunjungi suatu sampel desa dari bahasa yang diteliti dan memakai kuesioner, wawancara, beserta mengamati sendiri pola pemakaian bahasa di desa tersebut. Dikumpulkan informasi mengenai berbagai bahasa yang diketahui, pemakaian masing-masing bahasa di berbagai situasi kehidupan, sikap terhadap bahasa, kelancaran penutur dalam masing-masing bahasa, dan lain-lain.

Karena survei yang demikian menuntut banyak waktu dan uang, biasanya hanya diadakan satu kali. Tetapi masalah pergeseran bahasa adalah proses yang berkembang terus, sehingga informasi yang dikumpulkan beberapa tahun yang lalu sudah tidak berlaku lagi.

Demikian masalah yang saya hadapi di Sulawesi Tenggara. Saya dengan isteri saya memulai penelitian Bahasa Moronene pada tahun 1991, waktu saya menjadi dosen di Program Pascasarjana Linguistik di Universitas Hasanuddin. Waktu itu kami mengadakan survei sosiolinguistik di beberapa Desa Moronene. Dari hasil penelitian itu (Andersen 1993), ternyata pemakaian Bahasa Moronene masih kuat di desa-desa tersebut, yang merupakan desa homogen tanpa banyak penutur bahasa daerah lain. Kebanyakan penduduk lancar dalam Bahasa Indonesia, tetapi hampir semua anak-anak masih belajar bahasa daerah dari orang tuanya. Ada beberapa desa lain di mana ada banyak penduduk pendatang, terutama orang Bugis, dan di desa-desa tersebut dilaporkan pergeseran bahasa dari Bahasa Moronene ke Bahasa Bugis. Tetapi pergeseran bahasa yang demikian tidak kentara dalam desa-desa homogen. Pergeseran bahasa juga terjadi di keluarga yang salah satu orang tua berasal dari suku lain, dan juga di keluarga yang pindah ke luar daerah bahasa Moronene.

Sejak tahun 1991 kami mengadakan kegiatan pengembangan bahasa daerah Moronene, terutama waktu kerja sama dengan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Sulawesi Tenggara. Mulai sekitar lima tahun yang

lalu, waktu saya mengunjungi desa-desa yang pernah saya survei pada tahun 1991, saya mulai mengamati perubahan pola pemakaian Bahasa Moronene. Saya memperhatikan semakin banyak orang tua yang berbahasa Indonesia kepada anaknya, dan semakin banyak anak yang berbicara Bahasa Indonesia satu dengan yang lain. Saya juga bertemu dengan beberapa anak yang kurang lancar Bahasa Moronene.

Ada rekan-rekan ahli bahasa yang meneliti Bahasa Tolaki dan Bahasa Muna, dan mereka menceritakan kepada saya bahwa mereka memperhatikan pergeseran bahasa kepada Bahasa Indonesia yang semakin nampak di desa-desa tertentu yang dihuni oleh orang Tolaki dan orang Muna. Pengamatan saya sendiri beserta laporan-laporan dari rekan mendorong saya untuk coba mengukur pergeseran bahasa yang terjadi di berbagai bahasa daerah di Sulawesi. Tetapi saya tidak ada waktu untuk mengadakan survei sosiolinguistik. Maka saya berusaha mencari cara untuk mengukur pergeseran bahasa yang lebih efisien tanpa harus mengunjungi banyak desa.

2.1 Pengembangan Kuesioner Singkat Pengukuran Pergeseran Bahasa

Survei sosiolinguistik biasanya memakan banyak waktu karena ada banyak pertanyaan yang diajukan kepada responden. Selain itu, harus berjalan dari desa ke desa, yang banyak makan waktu dan uang. Oleh karena itu saya coba membuat kuesioner singkat yang bisa dipakai dengan responden yang jauh dari desa asalnya.

2.2 Pertanyaan yang diajukan

Dalam kuesioner sosiolinguistik biasanya diajukan pertanyaan mengenai pemakaian bahasa dalam berbagai situasi kehidupan, misalnya di rumah, di kantor, di sekolah, di pasar, di tempat ibadah, dan sebagainya. Saya memutuskan untuk membatasi pertanyaan saya kepada empat situasi komunikasi yang paling menentukan dalam hal cara anak belajar bahasa daerah dari orang tua. Empat situasi komunikasi sebagai berikut:

1. Orang tua berbicara kepada anaknya di rumah
2. Anak berbicara kepada orang tuanya di rumah
3. Anak saling berbicara waktu main di luar
4. Suami/isteri saling berbicara di rumah

Saya merasa keempat situasi komunikasi ini lebih berpengaruh dalam proses anak belajar bahasa daerah dari orang tua daripada situasi komunikasi lain seperti pasar, kantor pemerintah, sekolah, tempat ibadah, dan radio. Saya menduga bahwa umur anak yang paling menentukan adalah dari umur dua tahun sampai dengan umur sepuluh tahun. Asumsi yang mendasari kuesioner ini sebagai berikut: kalau kita ingin mengevaluasi apakah bahasa daerah tertentu terancam punah, tidak terlalu penting bahasa apa yang dipakai di pasar, di tempat ibadah, di sekolah, di kantor dan sebagainya, asal bahasa daerah tetap dipakai di rumah waktu orang tua berbicara kepada anak kecil. Sebaliknya, kalau cukup banyak orang tua berhenti memakai bahasa daerah kepada anaknya, bahasa daerah itu pasti akan terancam punah.

Selain mengajukan pertanyaan mengenai pemakaian bahasa di empat situasi komunikasi ini, saya menambah beberapa pertanyaan mengenai umur anak mulai lancar berbahasa daerah. Ada juga pertanyaan mengenai responden dan desa yang diteliti. Ada beberapa pertanyaan untuk mengevaluasi kemampuan responden untuk mengetahui pola pemakaian bahasa di desa yang diteliti. Pertanyaan tersebut perlu karena sering kali responden yang diwawancarai tidak lagi berada di desa yang diteliti. Maka harus bertanya kapan terakhir kali dia pernah ke desa tersebut, dan berapa lama dia tinggal dan berapa rumah yang dikunjunginya. Kuesioner dapat dilihat di Apendiks A.

2.3 Cara melaksanakan kuesioner

Bagaimana melaksanakan kuesioner tanpa melakukan survei? Dalam kegiatan saya sehari-hari di Sulawesi Tenggara dari tahun 2007 s.d. 2009, saya mencari kesempatan untuk mewawancarai orang dari banyak desa. Ada tiga jenis responden.

1. Yang paling baik adalah responden yang saya temui waktu saya mengunjungi desa tertentu. Mereka adalah penduduk desa itu dan data kuesioner berdasarkan pengamatan mengenai pemakaian bahasa di desanya mereka tiap-tiap hari.
2. Responden jenis kedua adalah penduduk desa yang saya temui di luar desanya: mungkin di kota Kendari atau di desa lain.
3. Responden jenis ketiga adalah orang yang pernah mengunjungi desa tertentu, tetapi bukan penduduk desa itu.

Mutu informasi dari responden pengunjung kemungkinan tidak sebaik data yang didapat daripada penduduk. Semakin singkat jangka waktu kunjungannya, semakin meragukan mutu datanya. Walaupun demikian, saya tetap mencatat data dari pengunjung, dengan alasan bahwa data yang bermutu rendah lebih baik daripada tidak ada data sama sekali.

2.4 Sejauh mana hasil akurat?

Dalam usaha untuk membuat cara efisien memperoleh data mengenai pergeseran bahasa, saya rela mengumpulkan data dari responden yang bermutu kurang baik, karena mungkin mereka tidak tinggal lama di desa yang diteliti. Ada responden yang tidak terlalu mengerti pertanyaan tertentu, sehingga jawaban kurang tepat. Hal-hal ini dapat mengakibatkan sebagian data yang dikumpul kurang akurat.

Kalau dua responden memberi informasi tentang desa yang sama, kita dapat membandingkan jawabannya untuk menilai keakuratan data. Hal ini terjadi untuk lima desa Moronene, yaitu: Pusu'ea, Pongkalaero, Kasipute, Doule, Taubonto. Kalau kita memperhatikan jawaban masing-masing responden dari desa yang sama (lihat Apendiks B), ternyata ada jawaban yang cukup berbeda. Apakah itu berarti bahwa data tidak akurat?

Ada tiga responden yang melaporkan keadaan pemakaian bahasa di Kelurahan Taubonto, tetapi yang dilaporkan bukan seluruh desa, tetapi dusun tertentu. Satu melaporkan keadaan di Dusun Huhubi, satu di Dusun Kampung Baru, dan yang ketiga melaporkan Taubonto pada umumnya. Tetapi karena responden ketiga tinggal di Dusun Labaiu, kemungkinan keadaan di dusun itu yang mendasarkan laporannya. Ternyata pola pemakaian bahasa di tiga dusun ini cukup berbeda. Oleh karena itu, kita harus sadari bahwa pola pemakaian di desa tertentu tidak homogen. Malah mungkin akan sedikit berbeda untuk tiap rumah tangga.

Pertimbangan ini dapat menjelaskan kasus lain di mana dua responden melaporkan keadaan di desa yang sama, dan jawabannya agak berbeda. Walaupun dua responden tinggal di desa yang sama, mereka tidak biasa mengunjungi rumah yang sama, dan mungkin tinggal di lingkungan berbeda di desa itu. Walaupun perbedaan jawaban yang diberikan oleh responden mungkin dikarenakan pengamatan yang kurang teliti, atau ingatan yang merosot, mungkin juga dikarenakan oleh perbedaan pola pemakaian bahasa yang diamati masing-masing responden, karena memang pola pemakaian bahasa di desa itu tidak homogen. Kalau demikian, bisa jadi pola pemakaian yang dilaporkan masing-masing responden dapat dianggap seperti gambaran tidak lengkap dari pola pemakaian menyeluruh di desa tersebut. Oleh karena itu, agak sulit menentukan apakah perbedaan jawaban antara responden dikarenakan oleh data yang tidak akurat, atau dikarenakan oleh keanekaragaman keadaan pola pemakaian bahasa di desa tersebut.

Ada beberapa pertimbangan lain berhubungan dengan masalah keakuratan data. Dapat ditegaskan bahwa data yang dikumpul dalam survei sosiolinguistik yang lengkap juga akan menghadapi masalah yang sama. Kalau kita mengunjungi desa tertentu mengadakan survei dan menanyakan responden mengenai persentasi orang yang memakai bahasa tertentu di lingkungan tertentu, bisa saja responden memberi jawaban yang kurang akurat karena pengamatan yang kurang teliti. Peneliti mungkin mencatat pengamatannya langsung mengenai pemakaian bahasa, tetapi data tersebut belum tentu mewakili pola pemakaian yang umum, karena peneliti hanya tinggal di desa sebentar saja.

Walaupun mungkin ada data dari responden tertentu yang kurang akurat, data yang dikumpul dari responden lain yang matang pertimbangannya mungkin sangat akurat. Kalau kita mengumpulkan data dari banyak responden dan banyak desa, kemungkinan besar termasuk cukup banyak data yang akurat. Walaupun kita tidak bisa memastikan bahwa data dari desa tertentu pasti akurat, tetapi gambaran secara menyeluruh akan mendekati keadaan sebenarnya. Yang penting adalah mendapat sampel yang besar. Kalau kita mendapat informasi dari banyak responden dan banyak desa, jumlah data yang banyak akan mengurangi pengaruhnya data dari beberapa responden yang mungkin kurang akurat.

Kita juga dapat mempertimbangkan tujuan survei ini. Kita ingin mengidentifikasi desa di mana pemakaian bahasa daerah sedang merosot. Untuk hal itu, tidak perlu kita mengetahui secara persis berapa persen orang tua memakai bahasa daerah dengan anaknya. Yang paling penting, kita membedakan antara desa yang 100% atau hampir 100% orang tua berbahasa daerah dengan anaknya, dengan desa di mana persentasinya sudah kurang. Kalau persentasi sudah mulai berkurang, kemungkinan akan semakin berkurang, dan proses pergeseran bahasa akan berlangsung. Jadi tidak terlalu penting untuk mendapat jawaban yang akurat sekali. Jawaban yang agak meleset dalam hal persentasi tidak akan mengganggu tujuan survei ini.

2.5 Analisis hasil kuesioner

Untuk Bahasa Moronene, data telah dikumpulkan dari tujuh belas responden dari sebelas desa, seperti terpapar di Apendiks B. (Apendiks B juga memuat data dari desa Tolaki, Muna dan beberapa bahasa lain sebagai perbandingan.) Data dari tujuh belas responden tersebut dapat dibagi dalam empat kategori berikut:

2.5.1 Bahasa Daerah Dominan

Pola pemakaian bahasa ini terdapat di desa Rahampuu.

Dalam pola pemakaian bahasa ini, kebanyakan orang tua memakai bahasa daerah dengan anaknya, hanya sedikit yang memakai Bahasa Indonesia. Kalau anak berbicara kepada orang tua, lebih banyak pakai bahasa daerah (70%) daripada Bahasa Indonesia.

Pemakaian Bahasa Indonesia lebih banyak dalam komunikasi antara orang tua dan anak-anak dibandingkan dengan interaksi antara anak. Hal ini mendukung dugaan bahwa inisiatif untuk berbahasa Indonesia berasal dari orang tua, bukan dari anak-anak.

Dengan pola pemakaian bahasa ini, anak-anak masih cepat belajar bahasa daerah dari orang tuanya. Walaupun ada Bahasa Indonesia dipakai di rumah, bahasa daerah yang terutama dipakai di lingkungan di luar rumah, dan selalu dipakai antara suami dan isteri. Hal ini menyebabkan anak-anak cepat belajar bahasa daerah, sehingga mereka sudah lancar pada umur 5 s/d 7 tahun.

2.5.2 Pemakaian bahasa campur

Pola pemakaian bahasa ini terdapat di Pusu'ea (a), Rau-Rau, Balo, Pongkalaero (b), Kasipute (b), dan Doule (a).

Dalam pola pemakaian bahasa ini, orang tua memakai baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah kepada anaknya. Anak-anak juga memakai dua bahasa. Dalam komunikasi antara suami isteri, bahasa daerah yang dominan. Dengan pola ini, orang tua dan anak-anak sering beralih dari satu bahasa kepada bahasa lain di lingkungan rumah.

Dengan pola ini, hampir semua anak menjadi lancar dalam bahasa daerah, tetapi ada yang agak terlambat. Sejauh mana keterlambatannya, tergantung desanya. Di desa tertentu, kebanyakan anak menjadi lancar bahasa daerah pada umur 8 tahun. Di desa lain, kebanyakan anak baru lancar umur 10 tahun, dan ada yang belum lancar pada umur 12 tahun. Adakalanya ada yang belum lancar sampai umur 19 tahun, atau lebih.

2.5.3 Bahasa Indonesia dominan

Pola pemakaian bahasa ini terdapat di desa Pusu'ea (b), Pongkalaero (a), Toburi, Taubonto, Taubonto Dusun Huhubi, Taubonto Dusun Kampung Baru, Rompu-Rompu, dan Kasipute (a).

Dalam pola pemakaian bahasa ini, orang tua lebih banyak memakai Bahasa Indonesia dengan anaknya, dan anak banyak memakai Bahasa Indonesia. Tetapi anak tetap berbahasa daerah sebagian waktu di rumah. Dalam komunikasi antara suami isteri bahasa daerah yang dominan, tetapi ada juga yang kadang-kadang memakai bahasa Indonesia. Dalam pola ini, ada perbedaan yang telak antara bahasa yang dipakai oleh orang tua dan bahasa yang dipakai oleh anak.

Dengan pola ini, anak agak terlambat untuk lancar dalam bahasa daerah. Sejauh mana keterlambatannya tergantung desanya. Di desa tertentu kebanyakan anak menjadi lancar bahasa daerah pada umur 8 tahun. Di desa lain, kebanyakan baru lancar umur 12 tahun dan ada yang belum lancar pada umur 15 tahun.

2.5.4 Bahasa Indonesia sangat dominan

Pola pemakaian bahasa ini terdapat di desa Lakomea dan Doule (b).

Dalam pola ini, anak-anak hampir selalu memakai Bahasa Indonesia. Orang tua memakai dua bahasa, tetapi pemakaiannya ditentukan oleh lawan bicara. Waktu berbicara kepada anak, mereka kebanyakan memakai Bahasa Indonesia. Waktu berbicara antara suami isteri, mereka kebanyakan memakai bahasa daerah.

Dalam pola pemakaian bahasa ini, anak-anak terlambat menjadi lancar berbahasa daerah, atau sebagian tidak pernah menjadi lancar. Di Desa Lakomea, kebanyakan anak baru lancar pada umur 14 tahun. Di Desa Doule, dilaporkan kebanyakan anak belum lancar bahasa daerah. Ini berarti bahwa proses mewariskan bahasa daerah kepada generasi berikut sudah tidak berhasil lagi.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan jumlah penutur bahasa Moronene merosot¹

Hasil kuesioner yang dipaparkan di atas menggambarkan bahwa jumlah penutur Moronene di sebagian desa cenderung merosot. Faktor apa yang menyebabkan pemerosotan ini? Banyak orang Moronene yang telah saya temui sering mengeluhkan merosotnya penggunaan Bahasa Moronene. Ada beberapa gejala yang sering disebut-sebut, antara lain:

- anak-anak di kota sudah tidak tahu Bahasa Moronene.
- Bahasa Moronene sudah banyak dicampuri dengan kata-kata Bahasa Indonesia.
- Kata-kata halus Bahasa Moronene sudah jarang dimengerti.
- Pemuda yang pernah sekolah di kota pulang ke kampung tetap mau menggunakan Bahasa Indonesia.
- Ketika bertemu sesama suku Moronene di luar daerah, sudah malu memakai Bahasa Moronene.

Walaupun gejala-gejala ini memang menandakan suatu kemerosotan Bahasa Moronene, itu belum tentu berarti bahwa Bahasa Moronene terancam punah. Kalaupun Bahasa Moronene sudah kurang dipakai di kota, hal tersebut tidak menjadi masalah, asal Bahasa Moronene tetap kuat di pedesaan. Tetapi seperti sudah disinggung di atas, faktor yang akan menjadi penyebab utama kepunahan Bahasa Moronene adalah: **Orang tua di kampung tidak memakai Bahasa Moronene dengan anaknya.**

Kalau kebanyakan orang tua di pedesaan tetap memakai Bahasa Moronene dengan anak-anak mereka di rumah, hampir tidak mungkin Bahasa Moronene akan punah. Walaupun Bahasa Moronene jarang dipakai di kota, atau ada banyak kata-kata serapan dari Bahasa Indonesia, atau banyak kata-kata halus yang hilang, tetapi

¹ Kebanyakan bahan di bagian ini diambil dari Andersen dan al-Hajj (2007).

Bahasa Moronene akan tetap hidup turun-temurun, asal sebagian besar orang tua menggunakannya dengan anak-anak mereka di rumah.

Sebaliknya, kalau banyak orang tua di pedesaan sudah mulai memakai Bahasa Indonesia dengan anak-anak mereka, hal ini sudah merupakan langkah pertama menuju kepunahan Bahasa Moronene. Proses kepunahan ini akan melalui tiga tahap, sebagai berikut:

Tahap 1

Orang tua di desa memakai bahasa Moronene antara suami-isteri, tetapi memakai Bahasa Indonesia dengan anak-anak mereka.

Akibatnya anak-anak belajar bahasa Indonesia terlebih dulu, dan baru belajar bahasa Moronene kemudian. Karena anak-anak ini sering mendengar bahasa Moronene di rumah, mereka mengerti cukup banyak. Namun demikian, kemampuan berbicara bahasa Moronene menyusul di belakang. Mungkin saja waktu seorang anak berumur sepuluh tahun ke atas dia mulai agak fasih bercakap-cakap dalam bahasa Moronene, tetapi dia tetap lebih fasih berbahasa Indonesia daripada bahasa Moronene. Dengan teman-teman sebayanya dia cenderung berbahasa Indonesia. Ketika anak-anak ini sudah dewasa dan kawin, bahasa Moronene akan memasuki Tahap 2.

Tahap 2

Orang tua memakai Bahasa Indonesia antara suami-isteri, dan juga berbahasa Indonesia dengan anak.

Bahasa Moronene hanya dipakai dengan nenek dan orang tua lain. Akibatnya, anak-anak lancar berbahasa Indonesia, dan tidak bisa bercakap-cakap dalam Bahasa Moronene, meskipun masih mengerti Bahasa Moronene sebagian. Kalau anak-anak ini sudah dewasa dan kawin, Bahasa Moronene akan memasuki Tahap 3.

Tahap 3

Orang tua hanya memakai Bahasa Indonesia di rumah.

Akibatnya, anak-anak mereka sama sekali tidak tahu Bahasa Moronene. Pada Tahap 3 masih ada sebagian orang di kampung yang tahu Bahasa Moronene, yang berumur 50 tahun ke atas, tetapi mereka jarang sempat memakainya, karena kebanyakan penduduk kampung sudah tidak mengerti. Ketika semua orang tua ini sudah meninggal, Bahasa Moronene sudah akan punah sama sekali. Apa sebabnya orang tua Moronene mau memakai Bahasa Indonesia dengan anak-anak mereka? Beberapa alasannya yang pernah diutarakan orang tua Moronene kepada penulis termasuk:

- Supaya anaknya pintar di sekolah.
- Bahasa Indonesia lebih penting daripada Bahasa Moronene.
- Mereka ikut contohnya orang yang dihormati di desa, misalnya guru yang sudah biasa memakai Bahasa Indonesia dengan anaknya.
- Anak diharapkan nantinya akan belajar Bahasa Moronene dari orang lain.

Ternyata banyak orang tua tidak sadar bahwa pilihan mereka untuk berbahasa Indonesia kepada anaknya bisa mengakibatkan pemerosotan bahasa daerah. Mereka masih melihat hampir semua orang di kampungnya masih lancar Bahasa Moronene sehingga mereka yakin anaknya bisa belajar bahasa daerah dari orang lain di kampung. Mereka mengharapkan Bahasa Moronene akan terus bertahan dan tidak sadar bahwa mereka sendiri memilih tindakan yang cenderung akan pelan-pelan mematikan bahasa daerah mereka sendiri.

4. Langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk melestarikan bahasa Moronene?

Bagaimana caranya mencegah kepunahan Bahasa Moronene, kalau sudah masuk Tahap 1? Dan ternyata gejala tersebut sudah kelihatan di banyak kampung di Bombana seperti dipaparkan di Apendiks B. Apalagi di berbagai desa di Poleang yang sebagian orang Moronene lebih fasih berbahasa Bugis daripada Bahasa Moronene.

Ada orang yang mengandalkan pengajaran Muatan Lokal di sekolah sebagai cara melestarikan Bahasa Moronene. Memang pengajaran Bahasa Moronene sebagai Muatan Lokal bermanfaat dalam hal membuktikan bahwa Bahasa Moronene dihargai oleh Pemerintah. Hal itu dapat meningkatkan kebanggaan penutur terhadap bahasanya. Tetapi kalau orang tua tidak memakai Bahasa Moronene dengan anaknya, pengajaran muatan lokal kurang menolong. Anak sulit mempelajari Bahasa Moronene hanya dari satu dua jam pengajaran di sekolah. Tidak ada cara yang lebih bagus untuk mempelajari Bahasa Moronene daripada belajar dari orang tua sendiri di rumah.

Satu-satunya cara untuk mencegah kepunahan Bahasa Moronene adalah dengan meyakinkan ibu-ibu muda dan ayah-ayah muda untuk memakai Bahasa Moronene dengan anak-anak mereka di rumah. Untuk itu, harus meyakinkan mereka bahwa berbahasa Moronene dengan anak akan membuat si anak lebih pintar. Sebaliknya, kalau berbahasa Indonesia dengan anak akan membuat anak lebih bodoh. Mengapa demikian? Karena kalau kita berbahasa Moronene dengan anak di rumah, dia akan sangat fasih Bahasa Moronene. Ketika si anak bermain dengan teman-temannya di luar, atau pergi ke sekolah, dia akan menjadi sangat fasih berbahasa Indonesia juga. Hal ini akan membuat si anak menjadi orang yang menguasai dua bahasa dengan baik waktu

masih muda. Dengan demikian, kemampuannya belajar bahasa lain, seperti bahasa Inggris, akan ditingkatkan, karena bagian otak yang dipakai untuk berbahasa menerima banyak rangsangan sejak si anak masih kecil.

Sebaliknya, kalau kita berbahasa Indonesia dengan anak kita di rumah, walaupun kemampuan bahasa Indonesiannya baik, kemampuan Bahasa Moronene hanya setengah-setengah. Otaknya tidak terbiasa cepat pindah dari satu bahasa ke bahasa yang lain, atau selalu menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dia hanya menguasai satu setengah bahasa, bukan dua bahasa. Jadi jelas, dia menjadi lebih bodoh daripada orang yang menguasai dua bahasa dengan sempurna.

Siapa yang bisa meyakinkan ibu-ibu muda dan ayah-ayah muda di kampung untuk berbahasa Moronene kepada anak-anak mereka, agar mereka menjadi pintar? Yang paling berperan adalah tokoh-tokoh masyarakat di masing-masing kampung. Antara lain, guru, bidan, mantri kesehatan, imam, dan aparat pemerintahan desa. Mereka yang bisa mengangkat masalah ini dalam berbagai pertemuan dan forum di desa, misalnya pertemuan dengan orang tua di sekolah, posyandu, rapat desa, selain pertemuan informal di rumah masyarakat. Kalau mereka menghargai Bahasa Moronene sebagai harta yang diwariskan dari nenek moyang yang mengandung banyak nilai budaya dan sastra, mereka akan berulang kali mencoba meyakinkan sesama warga desa untuk memakai Bahasa Moronene dengan anak-anak mereka. Alangkah baiknya kalau mereka sendiri bisa menjadi teladan. Tetapi kalau tokoh-tokoh masyarakat tidak berbuat apa-apa, kemungkinan besar semakin banyak orang tua yang akan beralih kepada Bahasa Indonesia dengan anak-anak mereka, dan Bahasa Moronene semakin lama semakin terancam punah.

4.1 Kanker yang Mematikan Pelan-Pelan

Masalah ini bisa diumpamakan sebagai penyakit kanker. Pada saat pertama kali muncul, penyakitnya hanya berupa benjolan kecil yang tidak mengganggu, sehingga tidak cepat diobati. Tetapi lama kelamaan, mulai menyebar semakin luas di tubuh si penderita. Pada waktu itu dokter sudah tidak sanggup lagi. Sudah terlalu parah, hanya bisa menunggu kematian.

Demikian juga, penyakit yang mematikan bahasa daerah, pada waktu awal masih tidak kelihatan berbahaya. Hanya muncul sebagai gejala bahwa sebagian anak-anak kecil di kampung tidak bisa berbahasa Moronene. Tetapi orang belum khawatir karena hampir semua orang lain masih lancar sekali. Tetapi penyakit kankernya sudah mulai berkembang pelan-pelan. Mungkin orang baru sadar akan bahayanya waktu penyakitnya sampai ke tahap 2, atau boleh kita katakan stadium 2, dan banyak orang tua di kampung tidak memakai Bahasa Moronene di rumah. Tetapi kalau sudah sampai stadium 2, sudah sulit diobati. Karena kalau kita suruh ibu-ibu muda itu berbahasa Moronene dengan anak-anak mereka, mereka sudah tidak terlalu bisa karena kemampuan berbahasa Moronene mereka tinggal setengah saja. Sama halnya dengan kanker, jauh lebih baik cepat berobat sewaktu penyakit masih ada di tahap awal. Begitu melihat gejala awal muncul, langsung mengambil tindakan. Sekarang masih banyak pemuda di kampung yang pintar berbahasa Moronene. Jadi kalau mereka bisa diyakinkan untuk berbahasa Moronene dengan anak-anak mereka nantinya, penyakitnya masih bisa diobati. Tetapi kalau menunggu lima atau sepuluh tahun lagi, mungkin agak terlambat. Karena kaum muda angkatan itu, yang nantinya akan menjadi ayah dan ibu, mungkin sudah terlalu merosot kemampuan Bahasa Moronene, sehingga sulit bagi mereka untuk mewariskannya secara utuh kepada anak-anak mereka.

4.2 Meyakinkan Pengantin Baru

Orang yang akan menentukan hidup matinya bahasa daerah adalah para pengantin baru di kampung. Bagaimana caranya memberi pengertian kepada mereka bahwa mereka mesti berbahasa Moronene dengan anak mereka yang baru lahir?

Mungkin yang dibutuhkan adalah sebuah kampanye, yang menyampaikan pesan ini secara menarik dan meyakinkan di masing-masing kampung. Sebaiknya kampanye tersebut memakai berbagai jalur secara berulang-ulang supaya pengobatan penyakit ini tidak putus-putus. Mungkin yang paling tepat adalah melalui kegiatan yang biasa dihadiri oleh ibu muda dan ayah muda di kampung, yaitu Dasa Wisma (PKK) dan Posyandu. Selain itu, masalah ini mesti diangkat media massa yang diminati orang desa, terutama radio. Mungkin yang paling sanggup menyelenggarakan kampanye seperti ini adalah instansi yang memiliki jaringan sampai ke tingkat desa, antara lain Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun instansi yang sanggup mengkaji masalah ini dan memberi pengarahan dan masukan adalah Pusat Bahasa.

Tentu saja usaha yang demikian tidak bisa dilakukan tanpa dana. Di mana sumber dana yang paling bisa diharapkan? Dalam hal pemeliharaan Bahasa Moronene, tingkat pemerintahan yang paling berkepentingan adalah tingkat kabupaten. Seandainya bupati dan anggota DPRD di Kabupaten Bombana sangat peduli atas hidup matinya bahasa daerah setempat, mereka akan rela menganggarkan sejumlah dana setiap tahun untuk dipakai secara tepat dalam usaha memelihara dan mengembangkan Bahasa Moronene. Sebaliknya, kalau masalah itu dianggap prioritas yang kurang penting, tidak akan diberi perhatian atau pendanaan, dan proses alami menuju kepunahan Bahasa Moronene akan berlangsung terus.

5. Kesimpulan

Nasib bahasa Moronene ada di tangan tokoh-tokoh masyarakat Moronene. Terserah mereka apakah akan membiarkan bahasa mereka mati pelan-pelan, atau bergotong-royong mengambil tindakan yang tepat untuk melestarikan dan mengembangkan warisan dari nenek moyang. Penulis yakin masih banyak pemimpin di Kabupaten Bombana yang sangat menghargai keanekaragaman budaya dan bahasa yang menjadi kekayaan masyarakat kita dan rela berjuang supaya semboyan Bhinneka Tunggal Ika tetap berlaku sampai ke cucu dan cicit kita.

Daftar Pustaka

- Andersen, T. David. 1993. "Measuring Bilingualism in Rural Sulawesi." *Notes on Scripture in Use and Language Programs* 36:42-64. [Makalah dibaca di BAND91, Brunei, December 9-12, 1991]
- Andersen, T. David. 2006. *Suku bahasa di Sulawesi Tenggara*. Kendari: Kerjasama SIL International-Indonesia & Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Andersen, T. David dan Istihsan al-Hajj, 2007. "Gejala Menuju Kepunahan Bahasa Daerah" *Kendari Pos*, 11 April, hal. 4.
- Barr, Donald F., Sharon G. Barr (in cooperation with C. Salombe), 1979, *Languages of Central Sulawesi: Checklists, Preliminary Classification, Language Maps, Word Lists*. Ujung Pandang: Hasanuddin University.
- Grimes, Charles E. and Barbara D. Grimes. 1987. *Languages of South Sulawesi*. Pacific Linguistics D, 78. Canberra: Australian National University.
- Himmelman, Nikolaus P. 2001. *Sourcebook on Tomini-Tolitoli Languages. General Information and Word Lists*. Canberra: Pacific Linguistics.
- Himmelman, Nikolaus P. 2010. "A case study from northern Central Sulawesi." Dalam Margaret Florey (ed.) *Endangered Languages of Austronesia*. Oxford: Oxford University Press.
- Lewis, M. Paul (ed.). 2009. *Ethnologue: Languages of the World*, Sixteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. *Versi online*: <http://www.ethnologue.com/>. Diakses 10 Juni, 2010.
- Mead, David E. 1999. *The Bungku-Tolaki languages of South-Eastern Sulawesi, Indonesia*. Pacific Linguistics D, 91. Canberra: Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University.
- Merrifield, Scott dan Martinus Salea. 1996. *North Sulawesi language survey*. Publications in Sociolinguistics, 1. Dallas: Summer Institute of Linguistics.
- Noorduyn, J. 1991. *A Critical Survey of Studies on the Languages of Sulawesi*. Leiden: KITLV Press (=KITLV Bibliographical Series 18).
- Wumbu, Indra B., Amir Kadir, Nooral Baso dan Sy. Maranua. 1986. *Inventarisasi Bahasa Daerah di Propinsi Sulawesi Tengah*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Lampiran A

Kuesioner Peralihan Bahasa

Nama peneliti:	Tanggal:
----------------	----------

Nama responden:	Suku:
Tempat wawancara:	Umur:

1. Desa apa yang Bpk/Ibu paling kenal atau paling sering kunjungi?

Nama desa:	
Kecamatan:	Kabupaten:

2. Di desa itu pakai bahasa apa dan berapa persen penduduk yang memakai bahasa itu?

Bahasa mayoritas:	Persen:
Bahasa minoritas:	Persen:

3. Bulan apa Bpk/Ibu terakhir mengunjungi / berada di desa itu?

Selama 12 bulan sebelumnya, berapa hari/malam atau bulan Bpk/Ibu berada di desa itu?

Bulan:	Tahun:	Jumlah malam/bulan:
--------	--------	---------------------

4. Selama 12 bulan itu, Bpk/Ibu pernah masuk berapa rumah penduduk yang berbahasa mayoritas di desa itu?

5. Di rumah-rumah itu, yang suami istri dua-duanya suku mayoritas, dan di rumah itu ada anak berumur 2 s/d 10 tahun, bahasa apa yang dipakai orang tua berbicara kepada anaknya? Berapa persen pakai bahasa daerah, berapa persen pakai bahasa Indonesia?

6. Kalau anak berumur 2 s/d 10 tahun berbicara kepada orang tuanya di rumah, berapa persen pakai bahasa daerah, berapa persen pakai bahasa Indonesia?

7. Kalau anak berumur 2 s/d 10 tahun main di luar, berapa persen pakai bahasa daerah, berapa persen pakai bahasa Indonesia?

8. Kalau suami berbicara kepada istri di rumah, atau sebaliknya, tidak ada tamu luar, dua-duanya suku mayoritas, berapa persen pakai bahasa daerah, berapa persen pakai bahasa Indonesia?

Jumlah

Bahasa ...%
Bahasa Indonesia ...%

Bahasa ...%
Bahasa Indonesia ...%

Bahasa ...%
Bahasa Indonesia ...%

Bahasa ...%
Bahasa Indonesia ...%

9. Umur berapa kebanyakan anak suku mayoritas menjadi lancar bahasa daerah?

10. Apakah ada pemuda suku mayoritas yang berumur 13 s/d 19 tahun yang belum lancar bahasa daerah, sehingga sulit berbicara?

Berapa persen pemuda berumur 13 s/d 19 tahun yang demikian? _____%

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Pleno VII
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 20 Juli 2010, 09.00 – 11.00
Penyaji/Pemakalah	: T. David Anderson
Judul Makalah	: Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Moronene
Pemandu	: Dr. Muh. Rasman Manaf, S. P., M. Si
Pencatat	: Firman A.D., S.S., M. Si.
Jumlah Peserta	: 400 orang

TANYA JAWAB

La Ode Hasirun (Tokoh Masyarakat Buton)

Pertanyaan/Saran

Pemasyarakatan bahasa daerah dimulai pada ranah keluarga. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini?

Jawaban/Saran

Pengenalan bahasa daerah harus dimulai pada saat menikah, ijab kabul harus memakai bahasa daerah. Pada saat punya anak harus memperkenalkan bahasa daerah yang dipakai orang tuanya.

Lukman
(Universitas Hasanuddin)

1. Pendahuluan

UNESCO (Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan) telah menetapkan tanggal 21 Februari sebagai hari Bahasa Ibu Internasional. Hal itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya bahasa ibu untuk terus diperingati dalam artian dipertahankan pemakaiannya dan diberdayakan fungsinya (Alwasilah, 2007:1). Meskipun 21 Februari itu sudah ditetapkan sebagai hari Bahasa Ibu Internasional, peringatannya belum banyak dilakukan. Masih banyak orang yang belum mengetahuinya apalagi memperingatinya. Hal ini menandakan bahwa kepedulian masyarakat terhadap masalah bahasa ibu yang jumlahnya cukup banyak itu yang terancam akan punah masih sangat rendah. Padahal, masalah bahasa ibu ini sangat relevan dengan konteks kebahasaan di Indonesia. Data saat ini menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 700 bahasa daerah yang didukung oleh jumlah penutur yang bervariasi, mulai yang kurang dari 100 orang sampai pada puluhan juta penutur.

Sebagaimana peringatan hari Bahasa Ibu Internasional pada tahun 2008 yang dilaksanakan di Departemen Pendidikan Nasional terungkap fakta bahwa semakin banyak bahasa ibu/bahasa etnis/bahasa daerah yang punah. Dendy Soegono (Kepala Pusat Bahasa Depdiknas) ketika itu mengemukakan bahwa bahasa-bahasa daerah yang tidak didukung oleh penutur yang besar cenderung punah. Kecenderungan kepunahan bahasa ibu itu terjadi di seluruh dunia. Hal yang paling mengejutkan ketika terungkap data bahwa 50% dari 6700 bahasa di dunia sudah mengalami kepunahan dalam satu abad terakhir. Anak-anak muda atau generasi muda meninggalkan bahasa ibunya (bahasa etnis/daerahnya). Hal ini diakibatkan oleh pengaruh globalisasi yang sangat kuat (Kompas 25 Februari 2008).

Selanjutnya, di Indonesia sendiri gejala kepunahan bahasa tidak terelakkan. Sejumlah bahasa ibu sudah mulai punah. Berdasarkan catatan Pusat Bahasa sejumlah bahasa ibu telah mengalami kepunahan di antaranya bahasa-bahasa ibu di Papua dan Maluku. Di Papua misalnya, sudah ditemukan sebanyak 9 bahasa yang sudah punah, sedangkan di Maluku dari 132 bahasa yang ada kini sisa 129 yang aktif dituturkan oleh penuturnya (berarti tiga di antaranya sudah punah). Sementara SIL (sebuah lembaga swadaya internasional yang berusaha mendokumentasikan bahasa-bahasa yang hampir punah di dunia) telah mencatat bahwa dari sebanyak 52 bahasa di Sumatera pada tahun 2000, yang tersisa kini hanya tinggal 49 bahasa. Berarti 3 di antaranya sudah punah atau hilang.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas bahwa kepunahan bahasa ibu sudah tampak jelas dihadapan kita. Kepunahan bahasa kadang-kadang memang tidak cukup menarik perhatian pendukungnya sendiri. Mereka kadang-kadang tidak menyadarinya dan membiarkannya bahasanya itu mati bersamaan dengan matinya sejarah dan budaya masyarakat tersebut. Punahnya sebuah bahasa memang tidak menyebabkan pendukung bahasa itu kehilangan alat komunikasi karena mereka bisa saja beralih ke bahasa lain yang lebih berprestise dan menarik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan praktis dan pragmatis. Untuk itu, kebanyakan orang yang berpandangan modern berpendapat bahwa punahnya sebuah bahasa apalagi sebuah bahasa ibu/bahasa daerah yang tidak didukung oleh penutur yang mayoritas tidak perlu ditangisi.

2. Revitalisasi Peran bahasa Ibu

Bahasa ibu dalam konteks tulisan ini adalah bahasa yang pertama kali diperoleh dari ibu ketika kita lahir. Dalam konteks pemerolehan bahasa, biasa dipakai istilah bahasa ibu (B-1), yaitu bahasa yang pertama kali diperoleh dan (B-2) adalah bahasa yang diperoleh setelah B-1 dikuasai. Namun, B-1 itu tidak selamanya berupa bahasa daerah (seperti halnya di Indonesia), B-1 dapat berupa bahasa nasional/bahasa Indonesia. Akan tetapi, dalam makalah ini istilah bahasa ibu yang dimaksudkan adalah bahasa daerah. Memang dari segi istilah untuk bahasa ibu ini ada yang menyebutnya bahasa daerah, bahasa etnis, dan ada yang menyebut bahasa lokal. Fredrick Engels dalam (*Origin of Family, State, and Private Property*) yang dikutip oleh Ardiansyah (2009:1) mengatakan bahwa bahasa ibu itu lahir pada saat terbentuknya suatu institusi sosial yang disebut dengan keluarga pada zaman purba. Keluarga-keluarga purba pada dasarnya terdiri atas ibu dan anak. Untuk itu, tidak salah bila keluarga pada zaman purba itu bersifat matrilineal, akibat belum dikenalnya lembaga perkawinan. Menurutny, interaksi ibu dan anak itulah yang kemudian melahirkan "bahasa" sebagai suatu upaya untuk mensistematisasikan pengetahuan dan kepentingan kelangsungan hidup. Berdasarkan penjelasan Engels tersebut diperoleh informasi bahwa selain penjelasan tentang aspek-aspek historis lahirnya bahasa, diperoleh pula keterangan tentang latar belakang penyebutan bahasa asal dengan sebutan 'bahasa ibu'.

¹Disajikan dalam Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara pada Tanggal 18 s.d. 20 Juli 2010 di Baubau

Kecenderungan kepunahan atau kematian bahasa ibu memang mulai menarik perhatian banyak orang saat ini. Hal itu terbukti dari hasil Kongres Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Selatan Pertama pada tahun 2007 yang lalu yang mengkhawatirkan bahwa generasi muda di Sulawesi Selatan sudah banyak yang tidak tahu atau tidak bisa berbahasa daerah. Kecenderungan generasi muda untuk tidak mempelajari bahasa daerahnya sudah menggejala pada hampir semua etnik. Mereka lebih tertarik kepada bahasa nasional atau bahasa Internasional daripada bahasa ibunya (bahasa daerah). Hal itu boleh jadi karena pertimbangan ekonomi dan atau kemodernan sehingga mereka lebih tertarik pada bahasa nasional/bahasa Indonesia atau bahasa

Inggris sebagai bahasa Internasional. Bahasa daerah relatif kehilangan peran dan fungsi dalam masyarakat. Tentu saja masalah itu tidak hanya disebabkan oleh generasi muda itu sendiri, tetapi generasi tua juga harus mengambil tanggung jawab. Ketidaktertarikan generasi muda pada bahasa ibunya juga dipengaruhi oleh sikap generasi tua yang tidak bersedia mewariskan bahasa daerah itu kepada anak-anaknya dengan menggunakannya sebagai bahasa komunikasi sehari-hari dalam keluarga. Banyak orang tua atau keluarga tidak menyadari hal itu terutama mereka-mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan.

Berdasarkan kenyataan itu revitalisasi peran dan fungsi bahasa ibu perlu dilakukan. Revitalisasi itu dimaksudkan sebagai upaya mengembalikan fungsi-fungsi bahasa ibu sebagai bahasa komunikasi utama dalam lingkup keluarga. Keluarga merupakan ranah paling utama dan penting dalam menghidupkan suasana pemakaian bahasa daerah. Di dalam keluarga hendaknya antara orang tua dan anak, antara anak dengan saudara, dan antara anggota keluarga lainnya memilih bahasa ibu atau bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia seyogyanya menjadi bahasa kedua (B-2) bagi bangsa Indonesia. Kalau bahasa ibu ini tetap menjadi komunikasi utama dalam keluarga, masa depan bahasa ibu akan tetap bertahan. Sebaliknya, apabila keluarga tidak lagi memilih bahasa ibu atau bahasa daerah dalam keluarga sebagai alat komunikasi utama itu sudah menunjukkan tanda bahwa bahasa ibu itu sudah memiliki ciri-ciri kematian. Untuk itu, ibu sebagai guru bahasa yang paling mula mengajarkan bahasa kepada anak-anaknya diharapkan tetap konsisten memilih bahasa daerahnya atau bahasa etniknya sebagai bahasa ibu bagi anakanaknya. Meskipun diakui bahwa hak keluarga untuk memilih bahasa yang akan digunakan sebagai alat komunikasi dalam keluarganya masing-masing. Namun, perlu disadari bahwa pemilihan bahasa ibu atau bahasa daerah sebagai alat komunikasi dalam keluarga perlu didasari atas sebuah kesadaran dan pertimbangan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi bahasa juga sebagai medium untuk mengenalkan berbagai bentuk perilaku kehidupan yang mengandung nilai-nilai tertentu. Melalui bahasa ibu, pesan-pesan dan nilai-nilai kearifan dapat tersampaikan. Setiap kelompok etnis memiliki kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, cerita-cerita rakyat (folklore) yang mengandung nilai-nilai budaya yang dipandang tinggi yang penerusannya dapat dipahami dengan baik melalui bahasa ibu.

Revitalisasi peran bahasa ibu sebagai bahasa komunikasi utama sehari-hari dalam lingkungan keluarga dan kelompok etnik tidak dimaksudkan untuk menandingi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional bagi orang Indonesia menjadi suatu kebutuhan karena fungsinya memang sangat penting sebagai alat pemersatu dan penghubung antaretnis yang berbeda-beda. Selain itu, bahasa Indonesia semakin menjadi penting karena fungsi yang diberikan kepadanya sebagai bahasa komunikasi resmi dalam bidang pemerintahan, pendidikan, pembicaraan-pembicaraan resmi, dan wacana-wacana resmi lainnya. Namun, dalam politik bahasa pembinaan bahasa Indonesia tidak seharusnya mengusur lalu mematikan bahasa daerah. Itulah sebabnya oleh Alwasilah (2009:1) dijelaskan bahwa

terdapat kekeliruan dalam politik bahasa yang harus diluruskan di antaranya, yaitu mengartikan pelestarian bahasa daerah sebagai penguasaan pengetahuan bahasanya termasuk undak usuk yang melelahkan. Padahal yang terpenting adalah memfungsikan bahasa daerah secara diglosik, yakni pemakaian secara bilingual, fungsional, dan kontekstual. Setiap bahasa dalam kehidupan yang semakin kompleks ini memiliki karakteristik internal dan peran sosial masing-masing. Selanjutnya, menurut Alwasilah sejarah politik kebudayaan nasional kita mewariskan asumsi bahwa bahasa daerah akan menjadi pemicu disintegrasi bangsa sebagaimana dikhawatirkan dalam seminar politik bahasa nasional tahun 1975. Namun, kekhawatiran itu hanya mengada-ada saja. Bila sekarang ini ada gejolak politik kedaerahan, gejolak itu bukan karena sentimen bahasa daerah, melainkan lebih karena politik kebudayaan nasional sentralistik selama ini yang difasilitasi dengan bahasa nasional.

Revitalisasi peran bahasa ibu merupakan upaya mewujudkan diversitas budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang menyangkut dengan akal dan budi. Ahli antropologi C Kluckhohn dalam *Universal categories of Culture* mengemukakan bahwa ada tujuh unsur pokok kebudayaan dan bahasa adalah salah satunya. Posisi bahasa dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Bahasa merupakan hasil karsa masyarakat (kebudayaan) yang dijadikan alat untuk memenuhi kebutuhannya dalam melangsungkan hidupnya, yaitu kebutuhan untuk berkomunikasi. Karsa masyarakat mewujudkan norma dan nilai-nilai sosial yang sangat perlu untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Norma-norma dan nilai-nilai yang nantinya membentuk standar moral masyarakat. Itulah yang menyebabkan antara bahasa dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, sehingga bahasa dikatakan identik dengan moralitas (Terpaan Globalisasi Menghantam Bahasa Daerah, 2009:1)

Alwasilah (2007:2) mengemukakan bahwa revitalisasi bahasa ibu seyogyanya berorientasi kebudayaan dengan berdasar pada tiga alasan, yakni nilai bahasa yang disimbolkan oleh bahasa, rujukan budaya nasional

yang bersumber dari budayabudaya etnis, dan peminatan belajar bahasa daerah dan bahasa Indonesia atas dasar minat mempelajari budaya. Berdasarkan nilai yang disimbolkannya, bahasa Indonesia misalnya menyimbolkan nilai-nilai nasionalisme, bahasa Inggris menyimbolkan nilai-nilai modernisme, bahasa Arab menyimbolkan agama Islam. Lalu, bahasa ibu/etnis menyimbolkan apa? Yang jelas bahasa ibu menyimbolkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Bahasa ibu yang sering dipandang menyimbolkan nilai-nilai tradisional dan budaya lokal yang menyebabkan apresiasi para generasi muda terhadap bahasa ibu menjadi rendah. Padahal, tanpa disadari bahwa budaya nasional yang diakui saat ini bersumber dari budaya-budaya etnis lokal/daerah. Terbentuknya Negara kesatuan ini merupakan kesepakatan kelompok-kelompok etnis untuk membangun sebuah Negara kesatuan. Untuk itu nilai-nilai budaya nasional tentu saja dibangun atas akumulasi nilai-nilai lokal yang membentuk puncak-puncak kebudayaan. Begitu pula, minat orang asing untuk mempelajari bahasa daerah lebih banyak dimotivasi oleh minat mempelajari budaya etnis. Itulah sebabnya, sangat mengherankan kalau kebudayaan etnis harus terpinggirkan atas desakan budaya pop global.

Kesadaran akan arti dan peran bahasa ibu sudah mulai muncul di berbagai wilayah/daerah. Misalnya, di Jawa Barat dan Banten yang dikenal dengan etnis Sunda dengan jumlah penutur lebih dari 21 juta telah melakukan berbagai program dalam merevitalisasi peran bahasa Sunda sebagai bahasa ibu bagi etnis Sunda. Untuk memfungsikan bahasa Sunda secara maksimal telah ditempuh beberapa langkah sebagai bagian dari perencanaan bahasanya. Langkah-langkah tersebut meliputi penetapan tiga peraturan daerah (Perda), yaitu Perda nomor 5 Tahun 2003 tentang pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah, Perda Nomor 6 tahun 2003 tentang pemeliharaan kesenian, dan Perda Nomor 7 2003 tentang pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum. Ketiga Perda itu ditandatangani oleh Gubernur Jawa barat pada tanggal 13 Januari 2003 dan merupakan fondasi kebijakan perencanaan bahasa yang menempatkan bahasa daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari strategi atau politik kebudayaan daerah (Alwasilah, 2007:3).

Selain penetapan Perda di atas, mereka juga membentuk lembaga-lembaga kebudayaan, pusat studi, penerbitan berbahasa daerah, penulisan ensiklopedia Sunda, pendirian yayasan kebudayaan, dan penerbitan majalah hiburan dan kebudayaan. Atas dasar upaya tersebut bahasa Sunda memiliki kekuatan untuk tetap bertahan sebagai bahasa ibu yang dicintai oleh pendukungnya. Di samping itu, apresiasi masyarakat yang didukung oleh institusi pemerintahan menjadi modal utama dalam pembinaan dan pengembangan bahasa daerahnya. Kedudukan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah dan bahasa ibu di Jawa barat menjadi semakin kuat dengan ditetapkannya sebagai bahasa pengantar pembelajaran di kelas-kelas awal (SD/MI) dan ditetapkannya dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA/SMK (Ansyari dkk. 2007).

Hal tersebut merupakan contoh yang menarik dijadikan perbandingan dalam merancang program pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra, dan budaya di Sulawesi Selatan. Beberapa program yang mereka sudah laksanakan misalnya lomba dongeng bahasa daerah, lomba pidato dalam bahasa daerah, debat dalam bahasa daerah, dll. Lomba-lomba seperti itu dapat dilakukan berkenaan dengan peringatan hari-hari bersejarah atau momen tertentu seperti peringatan bahasa ibu internasional yang jatuh pada tanggal 21 Februari. Begitupula dengan program pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan seperti lomba cipta lagu daerah, lomba pantun, berbusana daerah, pembuatan laman budaya daerah, penerbitan buku aksara daerah (lontara), dan pemberian penghargaan kepada penulis dan pengarang bahasa dan sastra daerah. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah program yang terkait dengan program pendidikan khususnya pengajaran muatan lokal yang meliputi penyusunan dan penerbitan kurikulum mulok bahasa dan sastra daerah, penyusunan buku pedoman penilaian bahan ajar bahasa dan sastra daerah sebagai mata pelajaran mulok, lomba-lomba berbahasa daerah, dan penetapan hari berbahasa daerah.

Program-program tersebut merupakan upaya nyata dalam merevitalisasi peran dan fungsi bahasa ibu. Merevitalisasi peran dan fungsi bahasa ibu berarti turut menjaga atau melestarikan seni dan budaya daerah karena antara bahasa, seni, dan budaya sulit dipisahkan. Kalau punahnya sebuah bahasa yang mengakibatkan hilangnya alat komunikasi bagi sebuah etnis, itu bukanlah sebuah masalah karena kita masih bisa memilih bahasa lain yang lebih baik, yang lebih berprestise. Akan tetapi, punahnya sebuah bahasa tidak berarti bahwa kita hanya kehilangan alat komunikasi saja, bahkan jauh lebih dari itu, yaitu kita akan kehilangan nilai-nilai budaya yang merupakan nilai-nilai dasar atau nilai-nilai utama bagi kelompok etnis tertentu.

Di Sulawesi Selatan saat ini terdapat 4 bahasa ibu (bahasa daerah) yang termasuk kelompok besar yang memiliki penutur yang cukup besar, yaitu bahasa Bugis, bahasa Makassar, Bahasa Toraja, dan bahasa Massenrengpulu. Selain keempat kelompok bahasa itu, di Sulawesi Selatan juga terdapat sejumlah bahasa daerah yang digunakan termasuk bahasa Jawa oleh warga transmigran Jawa yang tersebar di berbagai daerah yang di Sulawesi Selatan, begitupula dengan bahasa Bali dan Lombok yang ikut meramaikan transmigrasi di Sulawesi Selatan. Meskipun keempat kelompok bahasa daerah di Sulawesi Selatan itu memiliki penutur yang cukup besar, fakta menunjukkan bahwa terjadi penurunan pemilihan atau penggunaan bahasa daerah itu sebagai bahasa komunikasi utama bagi pendukungnya. Meskipun belum ada hasil penelitian yang lengkap yang mengungkap profil bahasa-bahasa daerah yang lengkap di Sulawesi Selatan, masyarakat Sulawesi Selatan sudah mulai khawatir akan keadaan bahasa daerah di wilayahnya. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa generasi mudah

pada umumnya sudah mulai tidak tertarik lagi untuk menggunakan bahasa daerahnya. Mereka lebih banyak memilih atau menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, ada dua pilihan yang dapat dilakukan, yakni (1) membiarkan bahasa BD (bahasa ibu) itu diintervensi secara terus menerus oleh BI sehingga bergeser dan akhirnya punah atau (2) mengupayakan penanggulangannya dalam arti mengupayakan pelestariannya. Memang ada ahli yang berpandangan bahwa terhadap kasus-kasus bahasa ibu ada dua pilihan yang dapat dilakukan, yaitu (1) terhadap bahasa-bahasa daerah (bahasa ibu) yang didukung oleh penutur yang tidak besar dan cenderung bergeser dan sudah susah dipertahankan, terpaksa dibiarkan terdevitalisasi, tetapi (2) terhadap bahasa-bahasa yang masih didukung oleh penutur yang relatif besar dan masih diberi peran dan fungsi oleh pendukungnya, bahasa seperti itu perlu direvitalisasi agar peran dan fungsinya tetap dipertahankan (Poerwadi, 2008) Untuk itu, berikut ini beberapa langkah yang dipandang relevan dan strategis diupayakan dalam merevitalisasi peran dan fungsi bahasa daerah (bahasa ibu), yaitu (1) perlu ada gerakan atau kampanye untuk menjadikan bahasa ibu itu sebagai bahasa komunikasi utama sehari-hari dalam keluarga, (2) diupayakan agar bahasa ibu itu tetap ditransmisikan kepada generasi berikutnya, (3) perlu diupayakan agar terbentuk sikap dan perilaku positif terhadap bahasa ibu, (4) penyerapan berbagai istilah dari bahasa Indonesia atau bahasa asing untuk memer kaya kosakata dan perbendaharaan kata bahasa daerah agar pamor bahasa daerah berada tidak terlalu jauh di bawah bahasa Indonesia, (5) menjadikan bahasa ibu atau bahasa daerah sebagai sumber dalam pemberian nama diri, nama jalan, dan tempat-tempat umum lainnya, dan (6) ditetapkannya bahasa ibu sebagai mata pelajaran wajib muatan lokal di sekolah-sekolah.

Upaya atau langkah-langkah seperti tersebut di atas merupakan langkah strategis dalam merevitalisasi peran dan fungsi bahasa ibu. Namun, langkah-langkah seperti itu tidaklah memadai kalau tidak ada dukungan secara institusional khususnya dari pemerintah. Apalagi di Indonesia saat ini era otonomi daerah gencar-gencarnya disuarakan. Dalam era otonomi ini daerah diberikan kesempatan seluas-luasnya dalam membangun dan mengembangkan daerahnya, termasuk aspek bahasa daerah dan budaya daerah yang merupakan salah satu aset daerah yang tak ternilai harganya. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sulawesi selatan diimbau agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat diupayakan adanya Perda tentang pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, seperti halnya yang dilakukan oleh provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, seperti Jawa Barat, Yogyakarta, dan Bali. Dengan adanya Perda tersebut, bahasa daerah mendapat peluang atau jaminan untuk hidup berdampingan dengan bahasa nasional tanpa harus saling menggeser dan mematikan.

3. Bahasa Ibu dan Globalisasi

Norma dan moral suatu masyarakat dilahirkan dari kebudayaan suatu masyarakat. Namun, dalam perjalanannya tidak lagi ditentukan oleh kebudayaan itu, tetapi ditentukan oleh penetrasi arus informasi yang semakin terbuka akibat adanya globalisasi. Globalisasi yang lahir akibat dominasi rezim kapitalisme terhadap peradaban dunia telah membuat kebudayaan dunia seragam. Proses globalisasi akan menghapus identitas dan kebudayaan lokal yang ditelan oleh kekuatan budaya besar atau kekuatan budaya global. Kebudayaan global yang merambah ke hampir seluruh penjuru dunia merupakan dampak dari *overproduksi* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang kebanyakan berasal dari barat. *Overproduksi* tersebut telah memaksa masyarakat untuk mengonsumsi produk-produk tersebut hingga akhirnya masyarakat secara tidak sadar telah menjadi konsumtif. Konsumtif, yang berarti mengonsumsi produk karena keinginan bukan karena kebutuhan, telah menjadi budaya global akibat mendominasinya rezim kapitalisme dengan perusahaan-perusahaan multinasionalnya yang berekspansi ke seluruh penjuru dunia demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. (wordpress.com.)

Budaya konsumtif yang terjadi pada masyarakat turut memengaruhi produk-produk lokal termasuk budaya lokal. Masyarakat lebih memilih produk-produk asing seperti baju, sepatu, jam tangan dengan merek dari luar negeri sampai cara berpakaian tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kesopanan sebagai penganut budaya ketimuran. Generasi muda lebih senang mengadopsi secara mentah-mentah budaya dari luar (budaya barat) karena mereka tidak lagi mampu menfilter budaya mana yang menjadi miliknya. Bukan hanya itu, bahasa pun sudah diadaptasi dengan bahasa asing. Hal itu dilakukan demi memperoleh status kemodernan yang menjadi *style* masyarakat modern pada abad ini. Bahasa daerah atau bahasa Ibu tidak lagi diberi ruang untuk mengisi ranah-ranah percakapan sehari-hari atas dasar globalisasi.

Tidak sedikit masalah yang timbul di masyarakat saat ini akibat pengaruh budaya global itu. Seperti dikemukakan di atas bahwa beberapa aspek kehidupan sudah dilanda oleh pengaruh global yang sangat hebat. Aspek-aspek itu bisa saja meliputi mode atau cara berpakaian, cara bergaul, berkesenian, berkomunikasi dsb. Hal itu terjadi karena kesiapan mental generasi muda kita menghadapinya tidak tangguh akibat tidak adanya persiapan sejak awal. Kalau generasi muda sejak awal dibiasakan hidup dalam suasana budaya dan nilai-nilai atau norma-norma kehidupan kultur etnisnya, gempuran globalisasi sedikit-tidaknya dapat ditangkal. Hal itu bisa terjadi karena sejak awal mereka sudah mengenal dan yakin dengan jati dirinya sebagai kelompok etnis yang membanggakan. Akan tetapi, generasi muda kita tidak memiliki kebanggaan terhadap nilai-nilai budaya yang seharusnya menjadi miliknya. Mereka merasa asing dengan lingkungannya sendiri, lalu mengadopsi nilai-

nilai dari luar yang sedang populer. Akibatnya, mereka tidak mengenali jati dirinya sendiri sebagai bangsa atau etnik yang membanggakan.

Sebagai contoh di Tanah Bugis akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan hiburan tau musik *candoleng-doleng*. Musik atau hiburan ini cukup fenomenal karena meskipun sudah dilarang oleh pihak berwajib atau ditangkap oleh polisi, jenis hiburan ini masih saja dipertontonkan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sekarang sudah bingung dan kurang mengenal mana nilai-nilai seni atau estetika yang patut dan tidak patut. Seolah-olah masyarakat kita sudah terlalu longgar atau sudah tidak yakin lagi dengan identitas dan jati dirinya sebagai etnis. Hal ini tentu saja ada kaitannya dengan hilangnya unsur-unsur kebudayaan daerah atau kesenian daerah yang cocok dengan nilai-nilai dasar yang bersumber dari kelompok etnik itu, tetapi tidak lagi dikenal atau dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Untuk itu, dengan menghidupkan kembali atau dengan merevitalisasi kembali peran dan fungsi bahasa ibu sebagai bahasa komunikasi utama sehari-hari, itu berarti turut merevitalisasi juga peran dan fungsi seni dan budaya daerah. Dengan menghidupkan kembali bahasa daerah, seni, dan budaya daerah tidak menutup kemungkinan akan menjadi sumber kesejahteraan masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, kita harus memandang bahwa permasalahan berkurangnya penutur bahasa ibu yang membuat bahasa daerah itu hampir punah bukan merupakan masalah moral, tetapi lebih kepada masalah aset bangsa yang harus diselamatkan. Dengan merevitalisasi peran dan fungsi bahasa ibu berarti turut merevitalisasi nilai-nilai budaya daerah/lokal yang saat ini mendapat serangan budaya global akibat kapitalisme yang mengglobal.

4. Penutup

Revitalisasi peran dan fungsi bahasa ibu dimaksudkan bukan untuk menandingi atau menyaingi bahasa nasional atau bahasa internasional sekalipun, melainkan dimaksudkan agar bahasa ibu sebagai aset bangsa yang mendukung tumbuhnya nilai-nilai budaya lokal yang relevan dengan kepribadian kelompok pendukungnya dapat diselamatkan. Bahasa ibu memiliki ranah penggunaan yang berbeda dengan penggunaan bahasa Indonesia. Pembagian fungsi antara bahasa ibu/bahasa daerah dan bahasa Indonesia sudah diatur dengan jelas. Revitalisasi peran dan fungsi bahasa ibu dimaksudkan agar tumbuh situasi pemakaian bahasa yang diglosik. Kedua bahasa ini, baik bahasa ibu/daerah dan bahasa Indonesia memiliki peran dan fungsi yang sama pentingnya. Kita tidak perlu terperangkap dengan anggapan yang keliru bahwa dengan menguatnya penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah akan memperkuat dorongan munculnya isu disintedresi bangsa. Tentu saja hal itu adalah keliru. Yang perlu dipahami bersama adalah bahwa dengan menguatnya penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah berarti menguat pulalah upaya penyelamatan nilai-nilai budaya lokal dari ancaman globalisasi.

Daftar Pustaka

- Afrinal. 2002. "Bahasa Indonesia Menggeser Fungsi Bahasa Daerah di Tingkat Pendidikan Dasar" Makalah dalam MLI X, Denpasar.
- Alwasilah, A. Chaedar. 2009. "Meluruskan Politik Bahasa Bahasa Ibu". diakses pada tanggal 7 Mei 2009.
- Ardiansyah, Syamsul. 2009. "Mengubah Nasib Bahasa Ibu" — <http://putarbumi.wordpress.com/2008/03/13/mengubah-nasib-bahasa-ibu/> diakses 12 Mei 2009
- Gunarwan, Asim. 2005. "Kasus-Kasus Pergeseran Bahasa Daerah: Akibat Persaingan dengan Bahasa Indonesia". Makalah dalam Kongres MLI XI, Padang.
- Lukman. 2007. "Kontinuitas Pewarisan Bahasa Daerah Sebagai Strategi Pemertahanan Bahasa dan Sastra Daerah". Makalah dalam Kongres Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Selatan I, Makassar.
- Poerwadi, Petrus. 2008. "Penanganan Bahasa Dayak yang Hampir Punah dan Sudah Punah" Makalah dalam Kongres IX Bahasa Indonesia, Jakarta.
- Rahim, A. Rahman. 1985. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Ridwan, Fauzi. 2009. "Bahasa Ibu dalam Arus Globalisasi." Diakses pada tanggal 12 Mei 2009.
- Salleh, Zulkifli. 2002. "Perang Bahasa" dalam *Jurnal Dewan Bahasa*, jilid 2, Bilangan 10, Kuala Lumpur.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Pleno IV
Hari, Tanggal, Pukul	: Senin, 19 Juli 2010, 10.30—12.30 wita
Judul Makalah	: Revitalisasi Peran Bahasa Ibu dalam Konteks Pergeseran dan Pemertahanan Bahasa
Penyaji/Pembicara	: Prof. Dr. Lukman, M.S.
Pemandu	: Prof. Dr. La Ode Sidu Marafad, M.S.
Pencatat	: Lia Amaliah Muhlisi, S.T.
Jumlah Peserta	: 400 orang

TANYA JAWAB

Pertanyaan/Saran

Prof. Dr. David Andersen (SIL)

Mengenai muatan lokal di Sulawesi Selatan, apakah pemerintah dan masyarakat menyadari bahwa untuk meningkatkan bahasa ibu sebagai bahasa muatan lokal masing-masing sekolah dapat menentukan muatan lokal bahasa daerah sesuai dengan bahasa daerah mayoritas siswa di sekolah itu, misalnya kalau bahasa Toraja mayoritas, diajarkan bahasa Toraja?

Kalau kasus di Sulawesi Tenggara selama ini di beberapa kabupaten, hanya salah satu bahasa daerah yang dipaksakan untuk diajarkan kepada anak di sekolah. Padahal bahasa daerah yang diajarkan itu bukan bahasa daerah sebagian siswa di sekolah itu. Bagaimana kalau desa-desa di wilayah ini, misalnya ada mayoritas yang merupakan suku Bugis dari Sulawesi Selatan, diajarkan muatan lokal yang bahan ajarnya dari Sulawesi Selatan? Apakah mungkin ada koordinasi kepala-kepala sekolah atau dinas pendidikan Sulawesi Tenggara dengan kepala-kepala sekolah atau dinas pendidikan Sulawesi Tenggara dalam upaya memperoleh bahan muatan lokal dari Sulawesi Selatan untuk pengajaran muatan lokal yang siswanya mayoritas dari Sulawesi Selatan? Ini merupakan upaya untuk saling menolong antarprovinsi sehingga semua anak bisa belajar bahasa ibunya sendiri.

Jawaban/Tanggapan

Sebenarnya masalah tersebut sejak dulu sudah diperhitungkan. Sulawesi Selatan didiami oleh empat kelompok besar penutur bahasa daerah, yaitu Bugis, Makassar, Toraja, dan Massenrengpulu. Jadi dalam kaitannya dgn penancangan pembinaan guru bahasa daerah, kita berikan jatah secara proporsional keempat bahasa daerah tersebut.

Bahasa daerah yang dipilih untuk diajarkan sebagai muatan lokal adalah bahasa ibu yang dominan yang digunakan dalam wilayah itu. Memang ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti di daerah Palopo, ada penutur bahasa Bugis dan juga ada penutur bahasa Tae. Namun, berdasarkan sumber daya yg kami miliki dalam mencetak guru bahasa daerah hanya didasarkan pada empat kelomppk bahasa daerah tersebut. Untuk kelompok bahasa daerah yg penuturnya sedikit, walaupun ada, bisa dipertimbangkan juga mencetak guru bahasa daerah untuk wilayah penutur tersebut pada masa yang akan datang.

Amrin Saragih
(Balai Bahasa Medan)

1. Pendahuluan

Revitalisasi merupakan proses penambahan daya (*vitality*) bahasa yang terancam kemusnahan dengan tujuan agar bahasa itu memenuhi fungsinya untuk komunitas penutur (Grenoble dan Whaley 2006: 7-21). Penambahan daya bahasa mencakup upaya perlindungan dan pengembangan bahasa serta pembinaan penutur bahasa. Lazimnya, upaya penguatan sumber daya bahasa terkait dengan ancaman kepunahan bahasa karena penutur bahasa (mulai) meninggalkan bahasa itu. Kenyataan menunjukkan bahwa bahasa daerah di Indonesia dicuaikan dan ditinggalkan penuturnya karena bahasa lain yang lebih luas daya jangkau komunikasinya (*language of wider communication*) dapat menggantikan bahasa itu dalam berbagai ranah (*domain*) penggunaan bahasa untuk mencapai peluang sosial dan ekonomi yang lebih luas. Penyuaian dan perpindahan ke bahasa dengan komunikasi lebih luas itu terjadi karena berbagai faktor luar dan dalam bahasa. Untuk menyelamatkan bahasa daerah yang terancam punah diperlukan upaya revitalisasi. Upaya revitalisasi ini bervariasi dan berlangsung sejalan dan sesuai dengan kebijakan di dalam masyarakat atau suatu negara. Di Indonesia kebijakan bahasa mencakup kebijakan atas bahasa daerah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan bahasa asing. Bahasa daerah perlu diberdayakan karena bahasa daerah, yang menjadi bahasa ibu sebagian besar penduduk Indonesia dan sumber pemerikaya dan pemberdaya bahasa Indonesia, terancam punah. Makalah ini membahas kondisi bahasa daerah saat ini dan upaya revitalisasinya dalam konteks sosial Indonesia.

2. Tingkat Keterancaman dan Kepunahan Bahasa Daerah

Tingkat keterancaman dan kepunahan suatu bahasa dikaitkan dengan daya tahan bahasa dalam menghadapi tekanan dari luar dan dari dalam bahasa. Sejumlah faktor menjadi penentu daya atau kekuatan bahasa. Berdasarkan daya atau kekuatan bahasa itu disusun skala untuk menentukan kondisi bahasa dalam menghadapi ancaman dan bahaya kepunahan. Skala itu digunakan untuk menunjukkan tingkat keterancaman dan kepunahan bahasa daerah.

3. Faktor Penentu Daya Tahan Bahasa

Kadar keterancaman atau kepunahan suatu bahasa tergantung pada daya atau kekuatan bahasa itu. Kekuatan suatu bahasa dideskripsi berdasarkan sejumlah kriteria atau faktor. UNESCO (2003) dengan dokumen *Language Vitality and Endangermentnya* menggunakan sembilan faktor untuk menentukan daya tahan atau kekuatan bahasa, sebagai berikut.

- (1) Transmisi bahasa antargenerasi
- (2) Jumlah penutur yang besar
- (3) Perbandingan penutur dengan jumlah penduduk
- (4) Kecenderungan dalam ranah pemakaian bahasa
- (5) Daya tanggap terhadap ranah baru dan media
- (6) Materi untuk pendidikan bahasa dan keberaksaraan
- (7) Kebijakan bahasa oleh pemerintah dan institusi, termasuk status resmi dan pemakaiannya
- (8) Sikap komunitas penutur terhadap bahasa mereka
- (9) Jumlah dan kualitas dokumentasi bahasa

Faktor (1)—(3) terkait dengan penutur bahasa dan sebarannya berdasarkan generasi dan jumlah penduduk seluruhnya dalam suatu komunitas. Bahasa dengan penutur yang tersebar antargenerasi: tua, menengah, dan muda memiliki daya tahan yang lebih kuat daripada bahasa yang penuturnya pada satu generasi saja. Demikian juga bahasa yang jumlah penuturnya lebih besar dalam satu komunitas lebih tahan dari ancaman dibandingkan dengan bahasa dengan jumlah penuturnya kecil. Faktor (4)—(7) berkenaan dengan bagaimana dan di (ranah) mana suatu bahasa digunakan. Semakin banyak ranah penggunaan bahasa semakin kuat atau berdaya bahasa itu. Faktor (8) menyangkut sikap dan nilai oleh penutur bahasa terhadap bahasa. Faktor (9) berkenaan dengan materi yang sudah dibuat atau tersedia tentang suatu bahasa.

Yang paling menentukan daya suatu bahasa adalah faktor penutur. Bahasa yang kuat memiliki jumlah penutur paling tinggi di antara bahasa yang lain dalam satu komunitas atau negara dan pemakaiannya diwariskan antargenerasi. Bahasa yang diwariskan oleh generasi tua (kakek dan nenek) ke generasi menengah (ayah dan ibu) dan ke generasi muda (anak-anak) dengan keterampilan yang baik memiliki daya tahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa yang penuturnya hanya pada generasi tua. Tentunya pewarisan (keterampilan)

bahasa ini terjadi karena bahasa dapat memenuhi kebutuhan penuturnya dalam berbagai ranah pemakaian untuk mencapai peluang sosial dan ekonomi yang lebih baik.

4. Skala Keterancaman dan Kepunahan

Kondisi suatu bahasa dapat ditentukan berdasarkan skala tingkat keterancamannya dari kepunahan. Skala ini disusun berdasarkan daya tahan atau kekuatan bahasa dan ranah pemakaiannya. Berdasarkan daya tahannya, tingkat keterancaman atau kepunahan bahasa dideskripsi dalam satu skala atau kontinum. Skala itu menunjukkan rentang dengan satu titik di ujungnya merupakan bahasa yang aman atau selamat dari ancaman kepunahan dan di titik ujung lain bahasa yang punah. Dengan mengikut pendapat Grenoble dan Whaley (2006: 18) yang merujuk kriteria yang digunakan UNESCO itu, tingkat keterancaman dan kepunahan bahasa di deskripsi sebagai mencakup enam skala, yakni bahasa yang

- (1) Aman,
- (2) Beresiko,
- (3) Mulai Terancam,
- (4) Kondisi Parah,
- (5) Hampir Punah, dan
- (6) Punah.

Bahasa yang **aman** atau **selamat** (*safe*) adalah bahasa yang semua generasi penuturnya menggunakan bahasa itu dalam semua ranah pemakaian bahasa dalam komunitas penutur bahasa. Jika dibandingkan dengan bahasa lain yang ada dalam komunitas penuturnya, bahasa yang aman berfungsi sebagai bahasa dalam ranah pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan. Dengan sifatnya yang demikian, bahasa yang aman dan selamat menjadi bahasa negara dan memiliki marwah, wibawa, atau prestise tertinggi di antara bahasa lain karena bahasa ini berfungsi di semua aspek kehidupan penuturnya.

Bahasa yang **beresiko** (*at risk*) adalah bahasa dengan ranah pgunaan yang terbatas dan jumlah penuturnya lebih kecil daripada bahasa lain yang ada dalam komunitasnya. Umumnya bahasa ini memiliki penutur dari berbagai kelompok umur dan jumlah penutur yang masih bertahan.

Bahasa yang **mulai terancam** (*disappearing*) punah adalah bahasa, jika diamati, jumlah penuturnya menyusut dari generasi ke generasi, ranah pemakaiannya terbatas, dan ranah pemakaiannya terutama di rumah tangga mulai digantikan oleh bahasa lain dengan daya komunikasi yang lebih luas.

Bahasa yang dalam **kondisi parah** (*moribund*) adalah bahasa yang tidak digunakan lagi generasi muda atau oleh anak-anak. Dengan kata lain, bahasa ini tidak diwariskan atau diteruskan oleh gererasi tua ke generasi muda. Kecuali oleh para penutur lanjut usia untuk tujuan khusus, bahasa ini tidak digunakan oleh generasi muda.

Bahasa yang **hampir punah** (*nearly extinct*) adalah bahasa yang jumlah penuturnya hanya hitungan jari saja terutama generasi tua.

Bahasa yang **punah** (*extinct*) adalah bahasa yang penuturnya tidak ada lagi yang hidup atau penuturnya tidak mau lagi menggunakan bahasa itu. Berdasarkan laju atau kecepatan berlangsungnya kepunahan, Campbell dan Muntzel (1989: 183—183) membedakan kepunahan bahasa ke dalam empat kategori, yakni kepunahan mendadak (*sudden attrition*), kepunahan radikal (*radical attrition*), kepunahan bertahap (*gradual attrition*), dan kepunahan dari bawah ke atas (*bottom-to-top attrition*).

Kepunahan mendadak terjadi karena penutur bahasa meninggal semua karena wabah penyakit, seperti kolera, AIDS, dan sebagainya. Kepunahan bahasa juga terjadi serta-merta karena semua penutur bahasa meninggal akibat bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, dan kebakaran. Selanjutnya, kepunahan terjadi akibat pertentangan antarsuku atau antarkelompok yang mengakibatkan satu suku dengan pemimpin yang bersimharajalela memerintahkan anggota sukunya membantai semua anggota suku lain yang menjadi seterunya, seperti yang terjadi di Afrika atau kawasan lain.

Kepunahan radikal terjadi akibat kondisi politik yang dalam kondisi itu penguasa melarang penutur suatu bahasa menggunakan bahasa mereka. Konsekuensi dari situasi dan kondisi politik yang tidak menguntungkan ini adalah terputusnya pewarisan berbahasa dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kepunahan bertahap terjadi ketika penutur suatu bahasa pindah ke bahasa lain yang lebih luas daya komunikasinya karena berbagai faktor eksternal dan internal penutur bahasa. Umumnya kepunahan itu didahului oleh situasi dwibahasa sampai pada suatu tahap ketika upaya revitasisasi tidak mungkin dilakukan lagi.

Kepunahan dari bawah ke atas mula-mula terjadi dengan berhentinya pemakaian bahasa pada ranah keluarga. Namun demikian, bahasa itu masih digunakan dalam acara ritual dalam bentuk bahasa lisan. Ketika ritual agama itu tidak lagi dilakukan penuturnya dan penutur terahir meninggal, bahasa itu punah.

Berbeda dengan skala berdasarkan daya atau ketahanan bahasa, Grenoble dan Whaley (2006: 8), dengan merujuk panduan yang dibuat UNESCO, membuat skala kepunahan bahasa berdasarkan ranah

pemakaian bahasa. Skala ini mulai dari bahasa dengan ranah pemakaian universal atau umum di satu titik rentang skala dan bahasa dengan kepunahan pemakaiannya di titik lain kontinum itu sebagai berikut.

- (1) Pemakaian Universal
- (2) Multibahasa
- (3) Ranah Menyusut
- (4) Ranah Terbatas atau Formal
- (5) Ranah Sangat Terbatas
- (6) Kepunahan

Pemakaian universal menunjukkan pemakaian aktif suatu bahasa oleh penuturnya di semua ranah. Penutur bahasa berpuas hati menggunakan bahasa itu dalam semua situasi.

Pemakaian multibahasa menunjukkan bahwa dalam satu komunitas terdapat satu bahasa atau lebih yang dominan untuk ranah resmi dan umum dan satu bahasa atau lebih yang tidak dominan untuk ranah kebutuhan lokal dan yang lebih spesifik. Bahasa yang dominan lebih disenangi karena dianggap memberi peluang sosial dan ekonomi yang lebih luas. Selanjutnya, bahasa yang kurang dominan menjadi bahasa kedua (yang tidak dipelajari) bagi penutur bahasa yang dominan dan ranah pemakaiannya lebih terbatas.

Ranah pemakaian menyusut atau berkurang mengacu ke bahasa lokal yang tidak dominan dengan jumlah ranah pemakaian terus menerus menurun. Penurunan ranah pemakaiannya berahir dengan berpindahnya penutur ke bahasa lain dan para orang tua tidak mewariskan keterampilan bahasa ini kepada anak mereka.

Ranah terbatas atau formal menunjukkan pemakaian bahasa hanya dalam ranah yang terbatas atau formal, seperti dalam ranah acara agama, ritual, dan perayaan. Ranah pemakaiannya hanya melibatkan penutur dari generasi tua dan mungkin juga ranah pemakaiannya di rumah saja oleh para tetua. Para penuturnya mungkin masih memahami bahasa ini tetapi tidak menggunakannya lagi secara aktif sebagai bahasa lisan.

Ranah sangat terbatas adalah pemakaian bahasa yang terbatas hanya pada kesempatan tertentu dengan penuturnya orang yang sudah lanjut usia. Pemakaiannya hanya pada satu ranah saja, misalnya pada upacara ritual. Dengan pemakaian bahasa dalam ranah ritual saja, masih ada orang yang mampu mengingat pemakaian bahasa ini.

Ahirnya, **kepunahan** yang berarti bahasa tidak memiliki satu ranah pemakaian lagi.

Dari keenam tingkat penggolongan bahasa berdasarkan daya atau kekuatan, penutur, dan ranah pemakaiannya, bahasa yang kuat, aman, sehat (*healthy*), dan selamat dari ancaman kepunahan adalah bahasa yang digunakan penutur dalam semua ranah kehidupan. Umumnya bahasa ini digunakan untuk semua fungsi dan tujuan dengan jumlah penuturnya paling tinggi dibandingkan dengan penutur bahasa lain yang ada di dalam komunitasnya. Penuturnya juga lintasgenerasi dengan pengertian anak-anak sebagai generasi muda aktif mempelajari bahasa ini; demikian juga orang tua mereka, kakek, dan nenek aktif menggunakan bahasa ini di semua ranah pemakaian bahasa. Berbeda dengan itu bahasa yang punah sama sekali tidak digunakan lagi dalam ranah apapun.

5. Keterancaman dan Kepunahan Bahasa Daerah

Tidak ada bahasa daerah yang aman atau selamat dari ancaman kepunahan. Dengan merujuk kedua skala keterancaman dan kepunahan bahasa yang telah dikemukakan terdahulu dan menghubungkannya dengan kenyataan tentang keadaan bahasa daerah saat ini diperoleh bahwa kondisi terbaik dan tertinggi yang dimiliki bahasa daerah adalah skala dua **Beresiko** sampai pada tingkat skala terendah **Kepunahan**. Demikian juga berdasarkan ranah pemakaiannya tidak ada bahasa daerah dengan Pemakaian Universal. Kondisi terbaik dan tertinggi adalah pada skala **Multibahasa** sampai pada skala terendah **Kepunahan**. Dengan kata lain, semua bahasa daerah terancam punah.

Menurut Crystal (2000: 2—11) terdapat 6000-7000 bahasa di dunia dengan laju kepunahan rata-rata satu bahasa dalam waktu dua minggu. Laju atau kecepatan kepunahan bahasa ini mungkin telah berubah sejak ahir abad yang lalu karena adanya program revitalisasi bahasa di berbagai kawasan. Dari ribuan bahasa itu sekitar 746 bahasa daerah terdapat di Indonesia. Pusat Bahasa baru berhasil memetakan 442 bahasa daerah sejak 1991 (Pusat Bahasa 2008). Kenyataan ini menguatkan bahwa bahasa daerah terancam punah dan bahkan sejumlah bahasa daerah sudah punah.

Sebagai contoh, kondisi bahasa Batak di Sumatra Utara berada pada skala tiga yakni **Mulai Terancam**. Jumlah penutur bahasa Batak menyusut dari generasi ke generasi karena suku Batak cenderung merantau ke luar Sumatra Utara dan desa atau permukiman orang Batak cenderung didiami oleh penutur dengan usia lanjut. Mereka yang merantau ke luar daerah membangun keluarga dengan istri atau suami dari suku bukan Batak dan hidup dalam komunitas bukan penutur bahasa Batak. Ranah pemakaian bahasa Batak yang semula masih berlangsung di rumah tangga digantikan oleh bahasa lain atau bahasa Indonesia dengan daya komunikasi yang lebih luas. Di beberapa tempat di Sumatra Utara kondisi pemakaian bahasa Batak bahkan telah mencapai skala empat dengan **Kondisi Parah**. Hal ini terjadi di Simalungun di sekitar perkebunan atau perbatasan dengan pantai timur yang di lokasi itu anak dari orang tua penutur bahasa Batak (Simalungun) pindah ke bahasa Jawa

atau bahasa Melayu. Kondisi seperti di Sumatra Utara ini tidak banyak bedanya dengan kondisi di daerah lain di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, semua bahasa daerah menghadapi cabaran musnah. Dengan demikian, diperlukan upaya revitalisasi untuk menambah daya bahasa daerah atau menyelamatkan bahasa daerah dari kepunahan.

6. Penyebab Keterancaman dan Kepunahan Bahasa

Penyebab kemusnahan bahasa mencakup penyebab umum sebagai variabel makro dan penyebab khusus sebagai variabel mikro. Variabel makro terdapat di luar bahasa yang terjadi pada tingkat global, nasional, regional, dan lokal. Variabel mikro berasal dari komunitas penutur bahasa. Variabel atau faktor penyebab kemusnahan bahasa menjadi bahan pertimbangan dalam upaya revitalisasi bahasa. Dengan merujuk klasifikasi penyebab kemusnahan bahasa oleh Grenoble dan Whaley (2006: 21—45) dan menghubungkannya dengan keadaan di Indonesia, penyebab keterancaman dan kepunahan bahasa daerah di Indonesia diuraikan sebagai berikut.

- (1) Globalisasi. Globalisasi merupakan kesalingtergantungan dan kesalingmenyatuan proses ekonomi, politik, sosial, dan budaya pada tingkat lokal, nasional, regional dan dunia (Young dan Fitzgerald 2006: 264). Gejala globalisasi ditandai oleh pertukaran barang, dan jasa, simbol, dan budaya dan perpindahan orang yang berlangsung lebih cepat, sering, dan intensif. Dalam pemakaian bahasa, isu globalisasi menjadi faktor luar bahasa yang memaksakan pemakaian bahasa dengan daya jangkauan komunikasinya lebih luas daripada bahasa nasional dan bahasa daerah. Secara umum di Indonesia bahasa yang dipromosikan globalisasi adalah bahasa Inggris. Dengan daya komunikasi yang lebih luas bahasa Inggris memberi peluang sosial dan ekonomi yang lebih luas pula dan membuat penutur bahasa daerah dan bahasa Indonesia pindah ke bahasa ini atau mencuaikan bahasa daerah.
- (2) Kebijakan Bahasa dan Pendidikan. Sejak ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sampai saat ini kebijakan bahasa di Indonesia adalah menjunjung bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia dengan kebijakan proporsional terhadap bahasa daerah, dan asing. Kebijakan pemakaian bahasa dalam pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan adalah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan nasional (pasal 29 ayat 1). Kebijakan bahasa dan pemakaian bahasa Indonesia dalam pendidikan dengan berbagai implikasinya menjadi penyebab tidak langsung terhadap daya tahan bahasa daerah.
- (3) Kebijakan Pemerintah. Kebijakan pemerintah mencakup kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi). Di Indonesia pemerintah bertanggung jawab terhadap perlindungan bahasa daerah. Akan tetapi, dalam kenyataannya pelaksanaan operasional kebijakan ini berbeda di setiap daerah dengan pemerintah tanggap atau cuai terhadap perlindungan bahasa daerah. Akibatnya, kekuatan bahasa daerah bervariasi di seluruh Indonesia dengan daerah yang pemerintah daerah cuai terhadap bahasa daerah mengakibatkan cabaran dan ancaman kepunahan lebih besar.
- (4) Sikap Penutur Bahasa. Penutur bahasa daerah yang memiliki sikap positif terhadap bahasanya menguatkan pertahanan bahasa itu dari pengaruh bahasa lain. Sebaliknya sikap negatif atau cuai di berbagai daerah mengakibatkan percepatan kepunahan bahasa daerah karena penutur bahasa pindah ke bahasa yang lebih luas daya komunikasinya untuk mengejar peluang sosial dan ekonomi yang lebih baik dan luas pula. Kebijakan bahasa di Indonesia adalah mengayomi bahasa daerah, mengutamakan bahasa Indonesia, dan menggiatkan pembelajaran bahasa asing untuk tujuan komunikasi antarbangsa yang lebih luas. Akan tetapi, kebijakan bahasa yang proporsional ini tidak menghasilkan atau tidak terealisasi dalam sikap penutur bahasa di Indonesia yang proporsional. Penutur yang merasa harus mengutamakan bahasa asing untuk tujuan komunikasi yang lebih luas dalam mencapai peluang sosial dan ekonomi cenderung bersikap negatif terhadap bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, penutur yang merasa harus mengutamakan bahasa Indonesia dalam membentuk sentimen nasionalisme cenderung bersikap negatif terhadap bahasa daerah dan bahasa asing. Lalu, pencinta bahasa daerah cenderung fanatik dalam bahasa leluhurnya dan bersikap negatif terhadap bahasa Indonesia dan bahasa asing. Dengan demikian, bagi sebagian besar penduduk Indonesia terjadi pertentangan dalam sikap terhadap ketiga bahasa itu, yang umumnya cenderung ke kecuaian atau pengabaian yang terbesar terhadap bahasa daerah karena anggapan bahwa bahasa daerah sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan dengan kehidupan modern.
- (5) Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia mencakup jumlah, kualitas, dan keterampilan penutur bahasa terhadap bahasa daerah. Bahasa daerah dengan sumber daya yang jumlah penuturnya besar, berpengetahuan baik, dan terampil menggunakan bahasa akan memiliki daya tahan yang tangguh dalam menghadapi ancaman kepunahan. Sebaliknya, bahasa daerah dengan penutur yang jumlahnya kecil, tidak berkualitas, dan kurang terampil lebih cepat punah.
- (6) Agama. Agama menjadi sarana menaikkan atau menurunkan daya tahan bahasa daerah. Hampir semua ritual agama dilakukan dalam bahasa tertentu. Hal ini berimplikasi pemakaian bahasa akan bertahan

lebih lama karena acara keagamaan dilakukan dalam bahasa itu. Tetapi sebaliknya ajaran agama dapat mengurangi kekuatan bahasa daerah. Misalnya, penutur bahasa Batak yang beragama Islam cenderung kehilangan kemampuan berbahasa Batak karena ajaran animisme dan praktik adat atau budaya yang bertentangan dengan aqidah atau ajaran Islam ditinggalkan dan tidak digunakan. Berbeda dengan itu, penutur bahasa Batak yang tidak bergama Islam masih melaksanakan praktik agama, adat atau budaya Batak asli karena praktik itu tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya. Di kalangan penutur bahasa Batak ada anggapan bahwa Batak yang beragama Islam bukan orang Batak lagi. Mereka dianggap telah menjadi orang Melayu karena umumnya ajaran Islam di Sumatra Utara disampaikan melalui bahasa Melayu. Penanda yang jelas adalah kecenderungan penurunan praktik adat dan budaya Batak oleh orang Batak yang beragama Islam. Di samping itu, terjadi kecenderungan orang Batak yang beragama Islam untuk menggunakan nama yang bernuansa bahasa Arab dan tidak menggunakan marga mereka lagi. Keadaan yang hampir sama juga terjadi di kalangan penutur bahasa Dayak dengan Dayak yang bergama Islam dianggap bukan orang Dayak lagi tetapi menjadi Melayu dan hanya Dayak yang bukan beragama Islam dianggap Dayak asli karena mereka masih terus melaksanakan praktik budaya atau adat leluhur.

- (7) Aksara. Bahasa daerah yang memiliki aksara lebih lama bertahan dari ancaman daripada yang tidak memiliki aksara.
- (8) Dukungan Dana. Dukungan dana dari berbagai pihak (individu, pemerintah, institusi) diperlukan untuk mendukung upaya revitalisasi dalam upaya menambah kekuatan bahasa daerah. Bahasa dengan ketidakadaan dana akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan upaya revitalisasi.

7. Manfaat Revitalisasi

Revitalisasi bahasa daerah perlu dilakukan untuk menyelamatkan bahasa daerah dari kepunahan. Revitalisasi perlu dilakukan karena sejumlah manfaat diperoleh dari upaya itu, yang diuraikan sebagai berikut.

- (1) Penyelamatan Hikmah Budaya dan Ideologi. Halliday (2003; 2004) dan Martin (1992) berpendapat bahwa bahasa merupakan semiotik sosial. Sebagai semiotik sosial bahasa merupakan realisasi konteks sosial, yang mencakupi konteks situasi, budaya, dan ideologi. Sistem dan struktur tata bahasa dan wacana merupakan realisasi situasi, budaya, dan ideologi penutur bahasa. Fought (2006: 155-166) mengatakan bahwa ciri wacana dan pragmatik merupakan realisasi identitas etnis. Di Indonesia bahasa daerah umumnya berhubungan dengan etnis. Dengan demikian, dengan revitalisasi bahasa hikmah budaya dan ideologi diselamatkan.
- (2) Pemertahanan Sumber Pemer kaya Bahasa dan Sastra Indonesia. Kebijakan bahasa di Indonesia mengimplikasikan bahwa bahasa daerah, di samping fungsinya sebagai sarana pemersatu pada tingkat daerah, secara nasional diharapkan menjadi sumber pemer kaya dan penambah daya bahasa Indonesia. Sejumlah kosakata dan makna budaya telah dan akan terus memper kaya bahasa dan sastra Indonesia. Dengan upaya revitalisasi sumber pemer kaya bahasa Indonesia tidak akan pernah surut atau kering. Jikalau 746 bahasa daerah dapat diselamatkan melalui upaya revitalisasi, bahasa dan sastra Indonesia akan terus dapat dikembangkan dengan sumber pemer kaya yang banyak sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.
- (3) Pemertahanan Keberagaman sebagai Keharmonisan. Bahasa dan identitas etnis erat terkait (Grenoble dan Whaley 2006: 167). Di Indonesia bahasa daerah umumnya terkait dengan etnis, dengan pengertian satu etnis umumnya memiliki satu bahasa. Jika bahasa merupakan identitas etnis, di Indonesia akan terdapat keberagaman identitas. Keberagaman ini berarti keberagaman melihat diri sendiri dan orang lain. Keberagaman ini diperlukan untuk saling mengenal dan menghargai. Dari sifat mengenal dan menghargai ini timbul sifat saling menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial.
- (4) Keseimbangan Sosial. Penyelamatan bahasa daerah di Indonesia berimplikasi pemeliharaan keserasian dan keseimbangan sosial. Keseimbangan alam wujud dengan berbagai aneka ragam fauna dan flora yang masing-masing berfungsi dan saling mendukung. Jika satu spesies hewan atau tumbuhan musnah, akan terjadi gangguan terhadap keseimbangan alam. Beranalogi dengan keadaan ini, jika satu bahasa daerah punah, keseimbangan sosial yang telah terbina antar penutur bahasa dalam satu komunitas akan terganggu.

8. Upaya Revitalisasi Bahasa Daerah dalam Konteks Sosial Indonesia

Upaya atau kegiatan revitalisasi bahasa daerah harus disesuaikan dengan konteks sosial Indonesia, yang secara spesifik upaya itu disesuaikan dengan kebijakan bahasa yang proporsional terhadap bahasa Indonesia, daerah, dan asing. Dalam kebijakan bahasa di Indonesia ketiga bahasa itu dicakup dengan fungsinya masing. Misalnya, bahasa Indonesia berfungsi utama dalam kegiatan kenegaraan, pendidikan, dan perdagangan, bahasa daerah menjadi pemersatu suku bangsa dan pembangun kedewasaan emosional/spritual, dan bahasa asing berfungsi sebagai sarana komunikasi dengan dunia luar dan memperoleh ipteks. Kebijakan bahasa secara

nasional mengutamakan bahasa nasional yakni bahasa Indonesia, akrab dengan/tidak memusuhi bahasa asing, dan melestarikan/tidak mencuaikan bahasa daerah.

Dengan kebijakan bahasa ini, upaya revitalisasi harus tidak mengganggu peran dan fungsi bahasa Indonesia yang harus dijunjung oleh bangsa Indonesia. Misalnya, upaya revitalisasi bahasa daerah tidak dapat disamakan dengan yang dilakukan di negara lain dan tidak diharapkan menjadikan bahasa daerah menjadi bahasa pengantar dalam administrasi pemerintahan atau pendidikan di daerah karena hal ini akan bertentangan atau merusak kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Demikian juga revitalisasi bahasa daerah dengan tujuan agar pengajaran keberaksaraan (fungsional) dan mata pelajaran dilakukan dalam bahasa daerah karena praktik seperti itu akan merusak fungsi bahasa Indonesia dan perlambatan pemerolehan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat memupuk gerakan separatisme di daerah. Upaya revitalisasi yang dikemukakan berikut ini mencakupi tiga hal, yakni upaya perlindungan, pengembangan, dan pembinaan terhadap bahasa daerah.

Pelindungan bahasa daerah mencakupi pelindungan terhadap bahasa dan sastra daerah serta penutur bahasa daerah. Beberapa upaya yang dapat dan sedang dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut.

- (1) Mendokumentasikan bahasa dan sastra daerah. Upaya ini dapat dilakukan oleh Pusat Bahasa dengan pengkajian bahasa dan sastra daerah, pemetaan bahasa daerah, penulisan kamus bahasa daerah, pembakuan dan pembukuan tata bahasa bahasa daerah, penulisan ensiklopedia bahasa dan sastra daerah, dan pencatatan kosakata budaya daerah.
- (2) Menjaga bahasa dan sastra daerah dari penjualan atau pengalihannya kepada pihak asing. Naskah dan aksara bahasa daerah harus diselamatkan dari jangkauan asing yang memiliki agenda dan kepentingan lain. Peraturan pemerintah daerah dan pusat untuk perlindungan aset bahasa dan sastra daerah yang sudah ada harus dikuatkuasakan.
- (3) Penutur bahasa daerah, terutama penutur bahasa daerah yang sudah berada pada skala lima **Hampir Punah** perlu dan harus dilindungi. Para penutur ini menjadi nara sumber yang sangat penting dalam upaya revitalisasi bahasa daerah. Perangkat undang-undang dan peraturan daerah telah dibuat untuk melindungi penutur dan penggunaan bahasa daerah.

Pengembangan bahasa daerah sebagai realisasi upaya revitalisasi mencakupi upaya berikut.

- (1) Memantapkan dan meningkatkan fungsi bahasa daerah dalam kerangka kebijakan bahasa di Indonesia. Banyak bahasa daerah telah kehilangan fungsi yang diharapkan. Misalnya, ada bahasa daerah yang digunakan hanya dalam acara adat atau ritual saja. Kebijakan bahasa telah menetapkan bahwa bahasa daerah berfungsi sebagai sarana komunikasi dan pemersatu penutur bahasa daerah. Dengan demikian, fungsi bahasa daerah yang semula sebagai sarana upacara adat atau ritual saja perlu dimantapkan dan dikembangkan ke fungsi sebagai sarana komunikasi dan pemersatu di daerah sebagaimana yang disarankan di dalam kebijakan bahasa di Indonesia. Di samping itu, bahasa daerah dikembangkan agar memenuhi fungsinya sebagai sarana pengungkapan seni dan sastra daerah.
- (2) Memperkaya kosakata dan membakukan tata bahasa bahasa daerah. Dengan pemantapan dan pengembangan fungsi bahasa daerah diperlukan daya ungkap yang lebih luas dan spesifik dari bahasa daerah, khususnya dalam pengungkapan budaya, seni, sastra, dan warisan daerah dalam konteks masyarakat terkini. Untuk ini diperlukan pemerikayaan kosa kata dan pembakuan tata bahasa bahasa daerah.
- (3) Mengembangkan acuan dan pedoman pemakaian bahasa daerah. Dengan berkembangnya fungsi bahasa daerah dan adanya lebih dari satu bahasa daerah dalam satu kawasan, acuan dan pedoman penggunaan bahasa daerah perlu dibuat. Dengan kata lain, kondisi multibahasa di satu kawasan perlu dilengkapi dengan pengaturan untuk menghindari konflik.
- (4) Menyumbangkan kosakata atau puncak hikmah budaya dari bahasa daerah untuk pengembangan bahasa Indonesia. Dengan pengembangan bahasa daerah melalui kajian yang mendalam akan ditemukan keunikan makna atau hikmah yang bermanfaat bukan hanya untuk penutur bahasa daerah tetapi juga untuk penutur bahasa Indonesia.

Pembinaan (penutur) bahasa daerah sebagai upaya revitalisasi bahasa daerah secara rinci dilakukan melalui sejumlah kegiatan sebagai berikut.

- (1) Meningkatkan kemahiran penutur bahasa daerah. Kemahiran atau keterampilan bahasa mencakupi kemahiran menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Keterampilan ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dengan memasukkan bahasa daerah sebagai mata pelajaran di sekolah. Di samping itu, keterampilan ini dapat dilakukan secara non-formal, misalnya melalui latihan yang diselenggarakan perorangan dan badan atau institusi swasta.
- (2) Menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa daerah. Berbagai jenis kegiatan dapat dilakukan untuk menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa daerah, misalnya melakukan sayembara menulis karya sastra, seni dan budaya daerah, debat dalam bahasa daerah, pemberian hadiah, insentif, atau

penghormatan kepada tokoh yang berjasa atau berprestasi dalam pengembangan bahasa daerah. Kegiatan lain, dapat dilakukan berupa acara tahunan pulang ke kampung saat hari-hari perayaan keagamaan, pagelaran seni dan budaya daerah.

- (3) Memperluas sebaran pemakaian bahasa daerah. Penyebaran pemakaian bahasa daerah dapat dilakukan dengan sarana media cetak dan elektronik. Majalah dalam bahasa daerah, siaran radio atau televisi dalam bahasa daerah merupakan sarana untuk menyebarluaskan pemakaian bahasa dan sastra daerah. Ranah yang paling efektif untuk penyebaran pemakaian bahasa daerah adalah pendidikan. Melalui sarana pendidikan, bahasa daerah dapat dilestarikan.

Upaya-upaya revitalisasi ini harus didukung secara jujur dan berkesinambungan oleh penutur bahasa, pemerintah (pusat dan daerah), perancang bahasa, pencinta bahasa dan pihak lain yang berkepentingan dalam bentuk dukungan moral dan dana. Banyak upaya revitalisasi berlangsung sangat efektif pada awal pelaksanaan program atau suatu kurun waktu karena komitmen yang kuat dari pihak yang terkait. Akan tetapi, dalam perjalanan waktu akibat perubahan personal, kegiatan itu berubah menjadi sia-sia karena dikendalikan oleh orang yang tidak memberi dukungan.

9. Simpulan

Dengan melihat kondisi bahasa daerah saat ini dan menghubungkannya dengan skala seperti diuraikan terdahulu, ditemukan bahwa tidak ada bahasa daerah yang aman atau selamat dari ancaman kepunahan. Bahasa daerah berada pada skala **Beresiko** sampai pada **Punah**. Bahasa daerah perlu diselamatkan karena bahasa daerah merupakan sumber pemer kaya dan pemberdaya bahasa Indonesia, sumber hikmah yang tidak pernah kering, dan penjaga keseimbangan sosial. Pemertahanan bahasa daerah dilakukan melalui upaya penguatan kembali atau revitalisasi bahasa daerah, yang mencakupi upaya perlindungan, pengembangan, dan pembinaan bahasa daerah.

Daftar Pustaka

- Campbell, L. dan M. C. Muntzel. 1989. *The Structural Consequences of Language Death*. Dalam Dorian, N. C. (ed.) *Investigating Obsolescence: Studies in Language Contraction and Death*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Crystal, D. 2000. *Language Death*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fought, C. 2006. *Language and Ethnicity*. New York: Cambridge University Press.
- Grenoble, L. A dan L. J. Whaley. 2006. *Saving Languages: an Introduction to Language Revitalization*. New York: Cambridge University Press.
- Halliday, M. A. K. 2003. Introduction: on the "Architecture" of Human Language. Dalam Webster, J. J. *On Language and Linguistics*. London: Continuum. 1—29.
- Halliday, M. A. K. 2004. *An Introduction to Functional Grammar*, third edition. London: Arnold.
- Martin, J. R. 1992. *English Text: System and Structure*. Amsterdam: John Benjamins
- Pusat Bahasa. 2008. *Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia*. Pusat Bahasa, Depatemen Pendidikan Nasional.
- Young, L. dan B. Fitzgerald 2006. *The Power of Language: How Discourse Influences Society*. London: Equinox
- UNESCO. 2003. Language Vitality and Endangerment. http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=9105&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

QUO VADIS BAHASA MINORITAS: TANTANGAN DAN SOLUSINYA

Hamzah Machmoed
(Universitas Hasanuddin)

1. Pendahuluan

Perkembangan tatanan baru kehidupan dunia dan teknologi informasi yang jelas-jelas semakin penuh dan sarat dengan tuntutan dan tantangan globalisasi telah memosisikan bahasa impor pada posisi yang strategis dan menguntungkan serta memungkinkan potensi bahasa tersebut masuk ke setiap sendi kehidupan bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan tersebut akan memengaruhi perkembangan bahasa daerah dan mengubah perilaku penuturnya.

Di era perubahan yang sangat cepat yang dibarengi dengan derasnya arus budaya global yang melintas, menerpa kehidupan dan tata nilai manusia terutama manusia Indonesia pada kurun milenium ketiga ini. Pada awal kesempatan ini ingin saya mengajak para peserta Kongres Internasional Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara menyempatkan diri sejenak merenungkan urgensi bahasa sebagai warisan leluhur yang telah terpatrit menjadi ciri dan isi kandungan jati diri kita. Di era yang telah mengguncang tata nilai manusia ini, pada awal pemaparan ini saya menawarkan kepada peserta sebuah paradigma alternatif "bergaya hidup global namun tetap berakar lokal dan berjiwa nasional" (*think globally but act locally*) dengan pemaknaan lain yaitu berbaur secara global tetapi tetap menampilkan keunikan lokal yang dalam hal ini mungkin dapat kita istilahkan "glokalisasi" ~ *glocalisation*(?).

2. Kedudukan Bahasa Daerah

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah (lokal) beroleh landasan luas bagi bangsa Indonesia seperti yang tertera dalam pasal 36, Bab XV UUD 1945 disebutkan, "di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, Bugis, Batak, dan sebagainya) bahasa-bahasa itupun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup". Jika disimak dalam perspektif sosiopolitik-linguistik dan konstitusi, sesungguhnya kedudukan bahasa daerah semakin kuat setelah hadirnya pasal 36 tersebut di atas. Sebaliknya yang tampak sekarang adalah munculnya "panik budaya" berupa kekhawatiran dan keprihatinan tentang arah perkembangan bahasa dan budaya akibat berkembangnya revolusi industri. "Kepanikan" tersebut malah lebih tinggi lagi apabila kita telaah lebih cermat butir (f) GBHN 1993 yang menyatakan bahwa "pembinaan bahasa daerah perlu terus dilanjutkan dalam rangka mengembangkan dan memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khazanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur jati diri dan kepribadian bangsa."

Jika kita cermati lebih dalam lagi, tampak dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan pengembangan bahasa daerah pada galibnya bukanlah untuk kehidupan bahasa daerah itu sendiri an sich akan tetapi seakan-akan bahasa daerah hanya dijadikan sebagai performa atau alat untuk pemerdayaan perbendaharaan bahasa Indonesia.

Lebih mengejutkan lagi, Menteri Dalam Negeri dalam Instruksinya no. 20, tanggal 28 Oktober 1991 menyebutkan bahwa "Salah satu wujud kebhinekatunggalikaan itu adalah kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini diupayakan antara lain melalui **pemasyarakatan dan pembudayaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari** Pemasyarakatan bahasa Indonesia adalah segala upaya memasyarakatkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar."

Instruksi ini bertendensi berat sebelah karena diktum yang berbunyi "pemasyarakatan dan pembudayaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari" sangatlah identis dengan usaha memojokkan bahasa daerah.

Pada seminar bahasa nasional yang diadakan di Jakarta pada tahun 1975 telah ditetapkan bahwa fungsi bahasa daerah adalah: a. sebagai lambang bahasa daerah; b. sebagai lambang identitas daerah; c. sebagai alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat daerah; d. sebagai pendukung bahasa nasional; e. sebagai bahasa pengantar di Sekolah Dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pelajaran bahasa Indonesia dan materi pelajaran lain; f. sebagai alat pengembang dan pendukung kebudayaan daerah.

Telah terasakan sekarang ini bahwa bahasa lokal minoritas (daerah) mulai terpojok oleh deras arus dan himpitan pengindonesiaan dan ditambah lagi dengan hampasan gelombang globalisasi seperti telah disinggung di atas. Himpitan ini telah dirasakan pula oleh para bahasawan dunia yang berkumpul di Quebec, Kanada, sewaktu mereka menghadiri Kongres Linguistik Internasional pada tahun 1992. Mereka bersepakat menyetujui pernyataan bahwa hilangnya bahasa apa saja dalam kehidupan umat manusia adalah sesuatu yang mustahil didapat kembali. Dalam laporan UNESCO (lihat Kaswanti Purwa 2000; Lauder 1999) dimaklumkan bahwa setiap tahun ada sepuluh bahasa yang mati. Sebagian besar bahasa khususnya bahasa-bahasa kecil dan lemah

diramalkan akan mati dalam satu atau dua generasi. Menjadi tugas UNESCO, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk secepatnya menanggapi keadaan ini dengan mempromosikan dan, jika memungkinkan, mensponsori program-program organisasi linguistik dalam penulisan tata bahasa, kamus dan teks termasuk perekaman sastra lisan bahasa-bahasa yang sedang terancam kepunahan atau yang mulai "sekarat" yang luput dari sentuhan penelitian dan pendokumentasian. Memang selama ini kita ketahui juga bahwa UNESCO *World Language Report* selain melaporkan bahasa-bahasa yang berpotensi punah juga memunculkan masalah hak berbahasa ibu (*linguistic human rights*) yang akhir-akhir ini menjadi topik yang cukup hangat diperbincangkan oleh pakar bahasa maupun pemerhati bahasa (Lauder 2001b).

3. Kondisi dan Ekspektasi terhadap Bahasa Daerah

Lewat sejarah kita telah menyaksikan kepunahan bahasa, akan tetapi apa yang kita hadapi sekarang adalah proses ketergusuran dan kepunahan bahasa secara besar-besaran. Hal yang mungkin dapat terjadi bahwa bahasa yang kita pelajari, teliti, dan tulis sekarang ini tidak akan ditemukan lagi oleh generasi mendatang apabila kita hanya menjadi penonton terhadap apa yang sedang dialami oleh warisan kebudayaan ini. Oleh karena itu, **penyamanan dan pemahaman** tanda-tanda awal ketergusuran, penyusutan fungsi secara drastis bahasa-bahasa lokal minoritas, kemunculan dan atau juga kesirnaan pijin dan kreol dalam situasi kebahasaan dan kedwibudayaan dalam kawasan lintas-batas bahasa, tekanan bahasa nasional, dan bahasa asing, sangatlah penting. Adalah sesuatu yang sangatlah diprihatinkan dan disayangkan bahwa tanda-tanda ancaman kepunahan warisan leluhur kita kurang disimak, dibaca dan dimengerti, bahkan lebih-lebih lagi tidak dipedulikan oleh banyak pihak, oleh ahli warisnya, maupun oleh pemerintah.

Sudah seyogyanya pewaris bahasa daerah dan pihak-pihak yang meprihatinkan ketergusuran bahasa daerah menyadari munculnya gelombang peradaban yang ikut memicu laju peradaban pasar yang mengusung homogenisasi budaya dan mengancam eksistensi dan ketahanan bahasa dan kebudayaan daerah. Appadurai menamakan gelombang peradaban tersebut sebagai berikut: 1) *Etnoscapes*, yang terkait dengan migrasi berbagai kelompok etnis dari satu tempat ke tempat lain. Kelompok etnis tersebut tidak hanya menyebarkan dan menularkan informasi baru akan tetapi termasuk juga melakukan penetrasi kebudayaan mereka dan tata kehidupan yang masih termasuk baru dan asing bagi penghuni asli. 2) *Medioscapes*, yang terkait dengan penyebaran informasi melalui berbagai media seperti surat kabar, majalah, stasiun televisi, dan film yang memiliki begitu banyak peminat dan mencuatkan citra-citra baru. 3) *Finanscapes*, yang terkait dengan gelombang modal yang terkait dengan penyaluran modal dan bantuan finansial dari pemodal yang tentu saja, dalam hal ini, para kapitalis dari negara yang adi kuasa dan adi daya. 4) *Technoscapes*, yakni gelombang yang terkait dengan teknologi canggih dan gelombang 5) *Ideoscapes*, yang terkait dengan berbagai macam ideologi, baik yang serupa maupun bertentangan, baik moderat maupun radikal, yang bagaikan air mengalir ke pelbagai penjuru negeri (Appadurai dalam Uncapher 1995:2).

Foundation for Endangered Languages yang didirikan di Inggris Raya pada tahun 1995 sebagai yayasan pemerhati kepunahan bahasa secara ringkas melaporkan estimasi informal tentang tingkat permasalahan yang pada prinsipnya para bahasawan sependapat bahwa keadaan kebahasaan memperlihatkan, bahwa lebih setengah dari bahasa-bahasa dunia yang berjumlah kurang lebih 6703 itu hampir menemui ajal (*moribund*). Antara lain dicontohkan bahwa, dengan tidak efektifnya proses pengalihan bahasa kepada generasi berikutnya, akan mengakibatkan kita dan anak-anak kita akan hidup pada ujung sejarah manusia yang dalam kurun waktu dua generasi kebanyakan bahasa dunia akan punah atau tergusur. Berkaitan dengan kondisi "kesehatan" bahasa yang disinggung di atas, Stephen Wurm (1984) menguraikan bahwa secara operasional ada 5 (lima) tahap klasifikasi kondisi "kesehatan" bahasa (lihat juga Crystal 2000:21).

- a. *Potentially endangered languages*: yakni bahasa-bahasa yang berkemungkinan besar berpotensi terancam punah. Contohnya ialah bahasa-bahasa yang secara sosial dan ekonomi tergolong "terbelakang" karena mendapat tekanan yang cukup besar dari bahasa yang "terdepan". Hal ini tampak dengan jelas ketika anak-anak mulai meninggalkan bahasa ibu mereka.
- b. *Endangered languages*: yaitu bahasa-bahasa yang terancam punah karena hanya memiliki segelintir penutur dan bahkan mungkin tidak ada lagi generasi mudanya yang bertutur dengan bahasa ibunya. Penutur yang masih boleh dikelompokkan sebagai penutur fasih hanyalah kelompok yang meningkat dewasa. Contoh, bahasa Yolngu Matha di Australia Utara yang dalam bahasa tersebut terdapat hampir 600 kosakata bahasa Makassar sebagai bukti keberadaan orang Makassar di sana hampir 300 tahun lalu sebelum bangsa kulit putih menginjakkan kakinya di benua Australia (harap lihat Machmoed 1987).
- c. *Seriously endangered languages*: ialah bahasa yang sungguh-sungguh terancam punah dan penuturnya hanyalah kelompok umur di atas 50 tahun seperti bahasa Aramaic di Syria.
- d. *Moribund languages*: adalah bahasa yang dalam kaitannya dengan istilah medis "sedang sekarat" karena penuturnya yang ada hanyalah kelompok usia tua dan telah uzur. Contoh bahasa Yaku di Etiopia
- e. *Extinct languages*: adalah bahasa yang telah punah oleh sebab semua penuturnya telah tiada dan tidak ada lagi tanda-tanda kebangkitannya. Contoh bahasa Tambora di NTB oleh karena semua penuturnya terkubur

oleh debu dan lahar pada waktu gunung Tambora meletus; bahasa Aborigin di Tasmania, Australia, oleh karena semua penuturnya punah dilenyapkan secara sangat tidak manusiawi oleh bangsa kulit putih yang mengaku "beragama" dengan menaburkan bakteri penyebar maut pada blanket atau dengan jalan memabukkan mereka dengan miras gratis berkadar alkohol tinggi dsb.

Situasi kebahasaan di Indonesia yang cukup pelik sekurang-kurangnya dapat memberikan gambaran kepada kita adanya situasi diglosik karena keberadaan dua kubu bahasa yakni kubu bahasa daerah dan kubu bahasa Indonesia. Hasil penelitian kelompok LIPI dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia pada tahun 2002 menyatakan bahwa apabila kita hendak memperoleh gambaran sinkronis tentang situasi kebahasaan di Indonesia, maka keadaan itu perlu dipikirkan melalui dua perspektif, yakni menurut perspektif ketersediaan bahasa dan menurut perspektif penggunaan bahasa.

Bila kita meninjau dari perspektif ketersediaan bahasa, bahasa-bahasa membentuk superimposisi atas tiga lapisan interaksi yaitu **bahasa sukubangsa**, **bahasa antarsukubangsa**, dan **bahasa Indonesia** sebagai bahasa nasional. Di sini terlihat dengan jelas bahwa bahasa Indonesia berada pada lapisan teratas yang mencakup semua bahasa yang berada pada lapisan-lapisan yang berada di bawahnya. Menurut perspektif penggunaan bahasa, bahasa-bahasa tersebut terikat dalam situasi hierarki yang menentukan bahasa apa yang akan dipilih untuk digunakan dalam situasi tertentu. Apabila kita mengacu pada kedua perspektif di atas, maka situasinya lebih cenderung bersifat *multiglosic* daripada *diglosic* (Lauder 2003).

Berdasarkan pandangan di atas, dapat kita simpulkan bahwa bahasa merupakan salah satu komponen rasa kebangsaan, di samping komponen-komponen yang lain, seperti komponen kesamaan nasib, sejarah, budaya, dan ideologi. Bahasa yang dipilih yang berkaitan dengan nasionalisme ialah bahasa yang mempunyai daya ikat yang paling kuat. Tampak di sini bahwa derasnya daya dorong bahasa Indonesia menempatkan bahasa-bahasa lokal pada posisi yang semakin 'terpuruk'. Oleh karena adanya pilihan bahasa lain, para pengguna bahasa akan cenderung menggunakan analisis yang cenderung lebih bersifat ekonomis yaitu **analisis biaya-maslahat** (*cost benefit analysis*) dalam artian mereka akan memilih bahasa yang lebih bergengsi, lebih bergaya, lebih berjaya, dan lebih menguntungkan. Banyak kalangan kaum muda yang kurang trampil bertutur bahasa daerah, malu, dan tidak mau lagi berbahasa daerah di tengah kehidupan modern ini. Ini sesungguhnya kemiskinan kultural-lingual yang berakar dari kemiskinan struktural dan ketimpangan paradigma kebijakan bahasa.

Dipandang dari sudut lain patutlah kita sama akui dan sama sesalkan bahwa **dominasi budaya tutur** masih menggejala di sebagian besar bangsa Indonesia. Perilaku *ngalor-ngidul* atau mengobrol tanpa ujung pangkal, *ngrumpi* lebih digandrungi daripada membaca. Pola tingkah laku yang serba verbalistis seperti ini cenderung mengerdilkan budaya ilmu serta turut memberikan andil dalam memprakondisikan keterpurukan bahasa-bahasa daerah menuju kearah kematian dan kepunahan. Keberaksaraan masyarakat (*societal literacy*) yang seharusnya menjadi modal dasar pemeliharaan, perekaman, pengembangan, dan pewarisan kebudayaan, baik yang lama maupun yang baru **kurang ditumbuh-kembangkan** secara wajar.

Kondisi objektif bahasa-bahasa minoritas di Indonesia memang variatif meskipun banyak yang dalam kondisi dan tahapan kegawatan yang hampir sama. Derajat mutu dan keterampilan berbahasa serta ranah-ranah pakai bahasa (*language domain*) dapatlah dijadikan takaran penting dalam melihat perubahan dan pergeseran bahasa baik yang berkembang menuju masyarakat dwibahasa (*societal bilingualism*) maupun yang menjadi multi bahasa (*societal multilingualism*). Dalam situasi yang mengalami perubahan dan pergeseran bahasa seperti itu maka visi, kultur, dan paradigma baru pembelajaran bahasa-bahasa menjadi tumpuan harapan. Ruang dan waktu pergeseran, pergesekan, dan penggusuran bahasa-bahasa minoritas bahkan mungkin bahasa nasional dapat mungkin tercipta apabila terdapat ketimpangan sikap dan perilaku bahasa, kesalahan pendekatan dan metodologi pembelajaran yang cenderung monolingual, terbaikannya modal dasar kebahasaan bahasa ibu. Apabila hal seperti ini terjadi, maka hukum ekologi bahasa akan benar-benar tak tertampikkan oleh karena bahasa yang memiliki kedudukan sosial-politik dan prestise yang lebih tinggi, dominan, kuat, dan memiliki jangkauan dan jaringan keuntungan praktis-ekonomi yang luas akan menekan, menggeser, dan menggusur bahasa-bahasa daerah (Haugen 1972).

4. Penutup

Sebagai penutup, bahasa dikatakan berkaitan erat dengan budaya secara indeksikal karena hanya dengan bahasa yang bersangkutanlah artifak yang dihasilkan budaya itu dapat disebutkan atau diungkapkan dengan tepat. Menurut Fishman, hal itu dimungkinkan oleh karena bahasa dan budaya telah tumbuh bersama-sama selama jangka waktu yang cukup lama sehingga tercipta hubungan yang sangat serasi di antara keduanya. Sedemikian erat hubungan di antara bahasa dan budaya sehingga dapat dikatakan pola sosialisasi penutur bahasa, langgam budaya hubungan antarpersonal, prinsip-prinsip etika yang menopang kehidupan sehari-hari, semuanya berkaitan dengan bahasa yang secara tradisional dipakai untuk itu. Tidaklah berlebihan jika Bassnett (1992:14) mengibaratkan bahwa bahasa sebagai "jantung" ketika dia mengatakan "*language is the heart within the body of culture*".

Sudah selayaknyalah kita harmonisasikan hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah yang oleh sebagian sebagian anggota masyarakat dianggap kurang "bersahabat." Langkah yang paling mudah ialah dengan pengadopsian kosakata bahasa-bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia mengingat begitu banyak ungkapan-ungkapan yang masih sulit dibahasaindonesiakan.

Daftar Pustaka

- Crawford, James. 1996. *Seven hypotheses on languages loss: Cause and cures*. Arizona: Center for excellences in education: Northern Arizona University Press.
- Crystall, David. *Language Death*. Great Britain: Cambridge University Press.
- Grimes, Barbara F (Ed). 1988. *Ethnologue: Languages of the world*. Dallas, Texas: Summer Institute of Linguistics (SIL) Inc.
- Lauder, RMT. 2001b. Upaya menjajaki Siiituasi Kebahasaan di Seluruh Dunia. *Dalam Meratas Ranah Bahasa, Semiotika dan Budaya*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.
- Haugen, Einer. 1972. *The Ecology of Language*. California: Stanford University Press.
- Fishman, Josua A., Charles A. Ferguson, Jyotirindra Das Gupta. 1972. (Eds.). *Language Problems of Developing Nations*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Kaswanti Purwo. 2000. *Bangkitnya Kebhinekaan Dunia Linguistik dan Pendidikan*. Orasi Ilmiah Pengukuhan guru besar linguistik di Univesitas Katolik Atmajaya, Jakarta. Jakarta: Mega Media
- Lauder, R.M.T. 2001b. Upaya menjajaki Situasi Kebahasaan di Seluruh Dunia. *Dalam Meratas Ranah Bahasa, Semiotika dan Budaya*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya.
- Machmoed, Hamzah. 1987. *Sistem Bunyi Bahasa Makassar dalam Bahasa Aborigin Yolngu Matha*, Australia Utara. Lembaga Penelitian UNHAS Makassar.
- Uncapher, Willard. 1995. "Placing the Mediascape in the Transnational Cultural Flow: Learning to Theorize an Emerging Global Grassroots Infrastructure". (online).(<http://www.well.com/~willard/global3b.html>) diakses 27 Maret 2010
- Wurm, Stephen A. 1984. *Language Atlas: Pacific Area*. Canberra: Pacific Linguistic Series C-66.

MELINDUNGI BAHASA DAN IDENTITAS LOKAL

Lalu Abd. Khalik
(Universitas 45 Makassar)

I. Pendahuluan

Hidup ini menjadi indah karena keberagaman termasuk keberagaman bahasa. Keberagaman itu menciptakan dinamika yang menggerakkan manusia dalam ekologi. Apa yang menjadi daya tarik kehidupan sebuah masyarakat adalah karena adanya perbedaan dengan masyarakat lain. Salah satu pembeda adalah bahasanya karena bahasa dan identitas masyarakat menurut Tabouret-Keller dalam Coulmas (2000:315) merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Ia menambahkan, *tindak bahasa merupakan tindak identitas*.

Hampir tidak ada satu negara pun yang dapat menyamai Indonesia dalam hal keberagaman budaya dan bahasanya. Kita dapat menyaksikan betapa dari Sabang sampai Merauke terdapat begitu banyak budaya dan bahasa. Di satu sisi, ini merupakan aset yang dapat menjadikan kita bangga menjadi bangsa yang besar yang pada gilirannya menjadi daya tarik bagi dunia luar. Keberagaman seperti itu akan menjadi modal besar apabila dapat dikelola dengan arif, utamanya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai di sini kita bisa bersepakat bahwa aset bangsa tersebut harus dipertahankan dan dikembangkan untuk dapat hidup dalam segala tantangan zaman. Di sisi lain, perbedaan-perbedaan seperti itu sering menjadi sumber instabilitas yang menimbulkan masalah laten berupa SARA. Ingat bahwa bahasa bisa berperan sebagai pemersatu (*unifying function*) dan juga sebagai pemisah (*separatist function*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Garvin dan Mathiot (1956) dalam Fasold (1987:3).

Semenjak bahasa Melayu diproklamkan menjadi bahasa Indonesia oleh Kongres Pemuda yang pertama pada tanggal 28 Oktober 1928, secara politis kita telah menyatakan keinginan dan tekad yang sama untuk memperkuat rasa persatuan dalam suatu ikatan persamaan nasib sebagai bangsa yang terjajah. Ini adalah suatu langkah maju untuk mebinas persatuan agar dapat segera keluar dari permasalahan yang mencekik dan menjadi bangsa yang bermartabat. Sejak saat itu bahasa rakyat ini, yang dipakai dalam percakapan sehari-hari, pertemuan, dan surat kabar, dengan gigih dikembangkan dan diluaskan pemakaiannya oleh para pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahkan secara tidak langsung pemerintah Belanda turut menyebarkannya karena orang Belanda menggunakannya untuk berhubungan dengan kaum pribumi.

Di balik kegemilangan di atas, salah satu tantangan besar yang kita hadapi di era globalisasi sekarang ini adalah bagaimana mempertahankan bahasa dan identitas daerah (lokal) di tengah-tengah semakin tumbuh kembangnya multilingualisme. Suka atau tidak, sudah merupakan fakta dan argumen para ahli bahasa bahwa multilingualisme merupakan ancaman yang paling nyata dan menakutkan terhadap eksistensi bahasa daerah yang ada di Indonesia. Multilingualisme dalam berbagai bentuknya sering dianggap yang paling bertanggung jawab terhadap fenomena pergeseran bahasa (*language shift*) di samping sebab lain seperti migrasi, industrialisasi, pendidikan dan tekanan pemerintah, urbanisasi, karena bahasa lain dianggap lebih berprestise atau karena sebab lain seperti jumlah penutur bahasa yang terancam tersebut tidak terlalu banyak (Fasold, 1984:217).

Sebagai jawaban atas kerisauan akan dampak multilingualisme terhadap pergeseran bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa nasional (bahasa Indonesia) maka pemerintah melakukan berbagai upaya yang bersifat protektif melalui perundangan atau peraturan pemerintah misalnya pada dekade yang lalu bahasa iklan yang berjejeran di jalanan diwajibkan ditulis dalam bahasa Indonesia. Demikian juga muatan lokal berupa pembelajaran bahasa dan budaya daerah telah diberikan di sekolah-sekolah, baik di tingkat sekolah dasar maupun sekolah lanjutan. Kekhawatiran seperti ini bukan saja dialami oleh bangsa Indonesia tetapi juga dirasakan oleh berbagai negara. Pada tahun 1994 pemerintah Prancis misalnya mengeluarkan suatu undang-undang perlindungan bahasa yang dikenal dengan nama "Toubon Law" dan ide ini telah diikuti oleh banyak negara (Graddol, 2006:116). Demikian juga badan dunia PBB turut mengekspresikan kekhawatirannya. Namun demikian, berbagai upaya protektif yang telah dilakukan masih terasa belum optimal.

2. Pemertahanan dan Pergeseran Bahasa

Istilah "pemertahanan" (*maintenance*) dan "pergeseran" (*shift*) pertama kali dipopulerkan oleh Joshua Fishman pada tahun 1964 (Mesthrie, dkk., 2000:253). Pemertahanan bahasa merujuk pada suatu keadaan keberlanjutan pemakaian suatu bahasa dalam pertaruangannya terhadap bahasa yang lebih kuat, baik secara regional maupun secara sosial. Fasold, (1987:213) secara tegas mengemukakan bahwa pemertahanan merupakan karakteristik guyub dwibahasa maupun aneka bahasa. Tentu kita semua sungguh menyadari bahwa bahasa itu senantiasa mengalami perubahan dalam semua dimensinya sebagaimana segala sesuatu itu berubah kecuali perubahan itu sendiri. Itu merupakan hukum kehidupan yang tidak terelakkan. Tetapi paling tidak yang kita

inginkan terjadi dalam hubungannya dengan bahasa daerah adalah perubahan yang terkendali dan bukannya kepunahan. Upaya pemertahanan bahasa tidak harus dimaknai sebagai pandangan puritanisme yang sempit karena belum ada masyarakat dunia yang mampu menjaga bahasanya dari infiltrasi bahasa lain. Era keterbukaan, teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan bumi ini menjadi suatu perkemahan yang luas karena batas-batas antara satu masyarakat dengan masyarakat lain menjadi samar. Namun di balik itu semua, banyak contoh bahasa yang masih kuat bertahan dan masih terus bertahan dari terpaan berbagai pengaruh yang disebutkan di atas. Dari berbagai hasil penelitian telah mengemuka berbagai faktor yang mendukung pemertahanan bahasa-bahasa tersebut. Pertama, harus diakui bahwa bahasa yang penuturnya cukup banyak mampu bertahan dari terpaan zaman karena tingginya kesadaran kolektif yang dimiliki oleh penuturnya yang dipelopori oleh tokoh masyarakat dan pemerintah daerah. Di samping itu, pengembangan kebudayaan daerah turut memicu penguatan bahasa daerah karena kebudayaan daerah memberikan konteks dan iklim yang kondusif untuk tumbuh suburnya bahasa daerah. Yang tidak kalah pentingnya adalah upaya segala pihak baik masyarakat maupun pemerintah untuk merumuskan suatu formula jitu sehingga bahasa daerah dapat berkembang sebagaimana bahasa lain yang pada ahirnya ranah pemakaiannya semakin meluas dan berterima. Khalik (2009) mencatat berbagai faktor penting yang mendorong terjadinya pemertahanan bahasa antara lain sebagai berikut.

1. Adanya kecenderungan para politisi lokal maupun nasional menarik simpati masyarakat terutama masyarakat adat dalam konstelasi perpolitikan dengan menggunakan bahasa daerah dalam kampanyenya.
2. Timbulnya kesadaran baru dari para pejabat daerah untuk menggunakan bahasa daerah dalam berinteraksi dengan masyarakat.
3. Masih ada alim ulama yang lebih senang menyampaikan ceramah agama dalam bahasa daerah.
4. Adanya kebijakan pemerintah tentang muatan lokal di sekolah-sekolah.
5. Adanya kesadaran kolektif masyarakat luas untuk mempertahankan bahasa ibunya.

Sebaliknya, pergeseran bahasa mengacu pada pergantian suatu bahasa oleh bahasa lain sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi utama pada suatu komunitas. Sedangkan istilah "kepunahan" bahasa (*language death*) digunakan ketika suatu komunitas merupakan pemakai yang terahir terhadap suatu bahasa seperti nasib Bahasa Tasmania yang punah setelah 73 tahun melakukan kontak dengan bangsa Inggris pada tahun 1803 (lihat Mesthrie dkk., 2000).

Pergeseran dan pemertahanan bahasa merupakan dua sisi mata uang yang senantiasa lengkap bila dibicarakan tidak terpisah. Pergeseran bahasa merupakan dampak jangka panjang dari fenomena pilihan bahasa (*language choice*). Pergeseran bahasa mengandung arti bahwa suatu guyub berhenti menggunakan suatu bahasa secara total dan digantikan dengan bahasa yang lain. Sedangkan dalam pemertahanan bahasa, suatu guyub secara kolektif memutuskan untuk terus menggunakan bahasa atau bahasa-bahasa yang secara turun temurun mereka gunakan (Fasold, 1987:213). Bila suatu guyub mulai memilih suatu bahasa baru pada ranah yang dahulunya menggunakan bahasa lain, dikatakan sebagai pertanda pergeseran sedang berlangsung. (*language shift in progress*).

Pergeseran bahasa kadang-kadang disinonimkan dengan kematian bahasa, (lihat Fasold, 1987:213) meskipun sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Pergeseran bahasa dapat bermakna suatu keadaan ranah penggunaan suatu bahasa semakin meluas atau menyempit misalnya sebagian ranah bahasa daerah tergantikan oleh bahasa Indonesia. Keadaan yang demikian itu masuk dalam cakupan pergeseran bahasa meskipun belum menyebabkan kematian bahasa-bahasa daerah yang dimaksud. Bila keadaan perambahan seperti itu terus berlangsung dan tak terbendungkan, kematian bahasa niscaya akan terjadi.

3. Sebab-Sebab Pergeseran Bahasa

Mesthrie dkk., mengidentifikasi paling tidak ada empat jenis kepunahan bahasa:

1. **kepunahan gradual** (*gradual death*) yakni terjadinya pergantian satu bahasa oleh bahasa lain (yang juga melibatkan pergeseran bahasa) seperti pergantian bahasa Gaelic oleh bahasa Inggris di Skotlandia.
2. **kepunahan seketika** (*sudden death*) yakni kepunahan bahasa yang terjadi sangat cepat tanpa melau periode antara biligualisme seperti kasus bahasa Tasmania.
3. **kepunahan radikal** (*radical death*) biasanya disebabkan oleh tekanan politik yang kuat misalnya kasus pembunuhan masal di El Salvador pada tahun 1932 menyebabkan penutur Bahasa Cacaopera da Lenca yang tersisa tidak menggunakan bahasa tersebut untuk menyembunyikan identitas Indiannya.
4. **kepunahan dari bawah ke atas** (*bottom-to-top death*) yakni situasi suatu bahasa tidak lagi digunakan sebagai bahasa percakapan tetapi masih digunakan pada situasi tertentu seperti pada upacara agama atau dalam lagu-lagu daerah misalnya Bahasa Tzeltal di Mexico atau Bahasa Kawi di Lombok.

Dari berbagai contoh kasus yang terjadi di Amerika maupun Australia dapat dikemukakan berbagai sebab kematain bahasa. Ada kelompok masyarakat yang dipindahkan dengan paksa dari tanahnya sendiri dan

dibawa ke suatu tempat permukiman baru yang masyarakat di sekelilingnya menggunakan bahasa yang berbeda. Akibatnya generasi muda mulai menunjukkan pelemahan dalam penggunaan bahasa ibunya.

Sebenarnya pergeseran bahasa hampir tidak pernah disebabkan oleh faktor tunggal tetapi berbagai faktor yang kait mengait (Mesthrie dkk.,2000). Kloss (1966) misalnya mengatakan terdapat berbagai faktor yang bersifat dua arah penyebab pemertahanan atau pergeseran seperti: (1) adanya atau tidak adanya pendidikan tinggi di sekitar wilayah suatu bahasa yang didominasi itu, (2) banyak atau sedikitnya penutur bahasa yang didominasi itu, (3) jauh dekatnya persamaan dan perbedaan antara bahasa yang dominan dan bahasa yang didominasi tersebut, (4) positif atau tidaknya perilaku kelompok dominan terhadap kelompok minoritas. Sementara itu Fasold, (1987:216) menduga bahwa ada sejumlah keadaan yang cenderung mendorong ke pergeseran bahasa. Salah satu yang ia sebut paling mendasar adalah keadaan yang ia istilahkan dengan "*societal bilingualism*", sebagaimana kita yakini bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tergolong dalam kelompok ini. Dapat dipahami bahwa suatu masyarakat dwibahasa atau ekabahasa kemungkinan tidak akan mewariskan semua bahasa yang mereka kuasai kepada generasi berikutnya. Bahasa yang tidak diwariskan tadi bisa saja bahasa ibu, maka disini dapat dikatakan bahwa bahasa ibu berpotensi mengalami kepunahan. Fasold juga menyimpulkan dari berbagai kajian bahwa ada kecenderungan kuat penyebab pergeseran bahasa relatif sama. Penyebab yang paling sering disebut adalah *migrasi* baik dalam kelompok kecil maupun dalam kelompok besar yang segera beradaptasi dengan lingkungan barunya; *industrialisasi* dan perubahan ekonomi lainnya; *bahasa sekolah* dan tekanan pemerintah lainnya; *urbanisasi*; bahasa lain yang lebih *berprestise*; dan *sedikitnya jumlah penutur* bahasa yang terancam. Tentu penjelasan ini tidak sederhana karena banyak bahasa masih bertahan meskipun dalam kondisi yang disebut di atas.

Namun demikian, ahli bahasa seperti Giles dkk. (1977) dan Appel & Muysken (1987) menyebutkan sejumlah faktor yang lebih spesifik tentang penyebab pergeseran bahasa seperti; perubahan ekonomi, status, demografi, dan dukungan institusional.

Ekonomi

Motif-motif ekonomi seperti invasi, imigrasi pekerja secara besar-besaran, pengungsi atau pencari suaka sering menyebabkan terjadinya pergeseran bahasa. Di berbagai belahan dunia, modernisasi, industrialisasi dan urbanisasi sering menyebabkan situasi bilingualisme yang pada akhirnya mengantarkan pada suatu keadaan pergeseran bahasa misalnya orang Madura yang bekerja di daerah Jawa Barat akan segera menjadi penutur bahasa Sunda dan dalam waktu yang lama akan mengalami atrisi Bahasa Madura.

Demografi

Semakin sedikit jumlah penutur suatu bahasa maka semakin rentan terhadap ancaman pergeseran atau kepunahan bahasa meskipun tidak selalu demikian. Faktor lain seperti perkawinan indogami bisa sebaliknya memperkuat pemertahanan suatu bahasa.

Dukungan Institusional

Pergeseran atau kepunahan bahasa bisa terjadi karena kurangnya dukungan institusional. Penggunaan bahasa minoritas dalam dunia pendidikan, agama, administrasi, dan media dapat memperkuat pemertahanan suatu bahasa atau sebaliknya.

Status

Suatu bahasa dapat segera bergeser karena penuturnya menganggap bahwa status bahasa tersebut cukup prestisius dibandingkan dengan bahasa lain yang ada, misalnya Bahasa Jawa dapat bertahan karena masyarakat Jawa dan non-Jawa menganggap bahasa tersebut berprestise.

Diperkirakan selama periode 1490-1990 sekitar setengah bahasa dunia ditinggalkan oleh penuturnya alias punah. Dari yang masih bertahan yakni sekitar lima ribu atau enam ribu bahasa dunia sekarang ini berada dalam kondisi yang beraneka ragam dan sebagian masih berjuang menjadi bahasa pertama atau bahasa kedua. Seorang linguis, Michael Krauss, sebagaimana yang dikutip oleh Mesthrie dkk.(2000:273) mengingatkan bahwa bila kita tidak melakukan sesuatu sekarang, "abad yang akan datang kita akan menyaksikan kematian atau kiamatnya 90% bahasa umat manusia", demikian ungkapnya.

Mesthrie selanjutnya menjelaskan bahwa di akhir abad XX, bahasa-bahasa Aborigin yang dahulunya diperkirakan berjumlah sekitar dua ratus kini mengalami penurunan dalam jumlah. Hal yang serupa juga terjadi di Amerika Serikat pada bahasa-bahasa Indian. Bahkan di Eropa, Bahasa-bahasa Celtic (Welsh, Gaelic, Breton) berjuang untuk tetap hidup terhadap dominasi Bahasa Inggris dan Prancis. Di Afrika, bahasa-bahasa seperti Bahasa Khoi dan rumpun Bahasa San telah menjadi korban pergeseran dan kepunahan oleh dominasi Bahasa Afrika yang lebih besar dan yang dianggap lebih berprestise dibanding bahasa-bahasa Eropa.

Perencanaan Bahasa

Lahirnya konsep perencanaan bahasa merupakan suatu langkah penyelesaian atas suatu masalah kebahasaan yang dihadapi oleh suatu masyarakat atau bangsa yang menggunakan lebih dari satu bahasa sebagai alat komunikasinya. Masalah utama pada masyarakat seperti ini adalah bagaimana dapat memperoleh satu bahasa yang mampu mengomunikasikan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dengan kata lain, harus ada satu bahasa yang dapat dijadikan *lingua franca* antarkelompok dalam suatu masyarakat yang multilingual seperti itu. Contoh perencanaan bahasa yang sangat sukses di abad modern ini adalah berhasilnya Bahasa Melayu Riau ditetapkan dan dikembangkan menjadi bahasa nasional dan bahasa resmi negara (Sumarsono & Partana, 2004:372) melalui serangkaian kebijakan sejak ikrar Sumpah Pemuda 1928.

Konsekuensi logis dari suatu perencanaan bahasa adalah ditetapkannya satu atau lebih bahasa sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Di satu sisi, kita bersyukur telah memiliki Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu berbagai suku dan telah berterima dan berkembang sangat gemilang. Di sisi lain, keputusan itu dapat menimbulkan masalah yang serius bagi bahasa-bahasa daerah terutama bagi negara yang memiliki banyak bahasa daerah seperti yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Perencanaan bahasa tentu lahir karena adanya perubahan perilaku dan sikap kebahasaan, periksa Daoust dalam Coulmas (2000:451). Dalam perkembangannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara ranah pemakaian Bahasa Indonesia telah merambah luas dan menggantikan berbagai ranah yang dahulunya ditempati oleh bahasa daerah. Peristiwa seperti ini dikenal dengan istilah *kebocoran diglosia*. Kebocoran diglosia yang semakin meluas dapat membawa pada suatu situasi pergeseran bahasa dan yang lebih serius lagi mengantar pada terjadinya kepunahan bahasa. Banyak pihak yang telah mengungkapkan keprihatinannya akan nasib bahasa daerah yang kian terancam.

Perencanaan bahasa menurut Weinstein yang dikutip oleh Wardaugh (1987:334) adalah upaya sungguh-sungguh dan bersifat jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengubah fungsi suatu bahasa dalam suatu masyarakat yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah komunikasi. Agar upaya ini dapat terwujud, dua langkah perencanaan yang harus dilakukan yakni (1) perencanaan status dan, (2) perencanaan korpus Wardaugh (1987:336). Perencanaan status bahasa meliputi penentuan kedudukan suatu bahasa dan tata hubungannya dengan bahasa lain sedangkan perencanaan korpus bahasa meliputi pembakuan norma dalam bentuk buku tata bahasa, pedoman pelafalan, pedoman ejaan, pedoman istilah dan penyusunan kamus.

Lalu apa yang terjadi dengan sebagian besar bahasa daerah yang ada di Nusantara ini? Fakta menunjukkan bahwa langkah kongkrit penyelamatan bahasa-bahasa daerah masih jauh dari harapan. Upaya pemertahanan bahasa tidak bisa dilakukan tanpa melalui suatu perencanaan yang sungguh-sungguh dan terarah. Bahasa yang tidak dikembangkan dengan perencanaan yang menyeluruh, terperinci, bertahap dan berkesinambungan niscaya akan menjadi bahasa yang senantiasa terancam oleh perkembangan zaman.

4. Kesimpulan

Pergeseran bahasa sesungguhnya bisa diprediksi, meskipun tidak mudah, dengan melihat berbagai indikator. Sementara itu kepunahan atau kematian suatu bahasa mungkin terjadi bila:

1. masyarakat tidak menyadari bahwa bahasa adalah identitas atau jati diri masyarakat tersebut,
2. suatu masyarakat mau menghilangkan identitasnya seperti pada kasus kepunahan Bahasa Cacaopera da Lenca.
3. masyarakat yang tidak menghormati dan menghargai leluhurnya alias kacang lupa kulitnya.
4. masyarakat yang menganggap bahasa lain lebih berprestise atau bergengsi dari pada bahasanya sendiri.

Perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk menanamkan kesadaran kolektif dalam suatu masyarakat untuk menjaga bahasanya dari keterancaman karena dominasi bahasa lain atau pengaruh lainnya. Dalam hal ini, pemerintah dan berbagai pihak terkait harus melakukan upaya-upaya perencanaan yang menyeluruh, terperinci, bertahap, dan berkesinambungan untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah agar tidak tergerus oleh perubahan zaman. Kita harus senantiasa menyadari bahwa eksistensi suatu bahasa dalam masyarakat tidak terlepas dari kekuatan politik, sosial dan kultural.

Kita perlu menumbuhkembangkan perilaku dan sikap yang positif serta rasa nasionalistik yang kuat untuk terus mempertahankan dan mengembangkan bahasa daerah yang beraneka ragam serta bahasa Indonesia. Kehadiran bahasa yang satu tidak harus melemahkan bahasa yang lain akan tetapi haruslah dapat saling melengkapi dalam kewajaran konteks sosiolinguistik. Kita tidak ingin menyaksikan generasi terakhir penutur suatu bahasa daerah, paling tidak di republik ini.

Daftar Pustaka

- Coulmas Florian.2000.*The Handbook of Sociolinguistics*. Massachusetts. Balackwell Publishers Inc.
- Fasold, Ralph.1987. *The Sociolinguistics of Society*. Basil Blackwell, London
- Gradol, David.2006.*English Next*. British Council United Kingdom.
- Khalik, Lalu Abdul.2009. *The Patterns of Sasak Code Chbice*. Hasanuddin University; Unpublished Dissertation.
- Mesthrie, Rajend et.all .2000.*Introducing Sociolinguistics*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Sumarsono & Paina Partana.2004. *Sosiolinguistik*. Sabda, Yoyakarta
- Wardagh, Ronald.1987.*An Introduction to Sociolinguistics*. Basil Blackwell, London.

PERILAKU SINTAKSIS ADJEKTIVA BAHASA MUNA DIALEK GU-MAWASANGKA

Zalili Sailan
(Universitas Negeri Jakarta)

1. Pendahuluan

Bahasa daerah (BD) di Indonesia yang jumlahnya menurut Anton M. Moeliono (1998:1) tidak kurang dari 750 bahasa dan logat, dan dipakai oleh penduduk yang terdiri atas 250 suku dan etnis lebih, merupakan aset budaya bangsa yang tidak ternilai harganya karena melalui wahana BD dapat dilestarikan keanekaragaman budaya daerah yang ada, sekaligus menjadi wahana penyangga budaya bangsa, serta pemer kaya ilmu-ilmu linguistik.

Salah satu BD yang sampai saat ini masih menjadi alat komunikasi bagi masyarakat penuturnya dan masih terpelihara dengan baik, adalah bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka. Masyarakat penutur bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka ini mendiami bagian selatan Pulau Muna Sulawesi Tenggara, yang secara administratif wilayah pemakaian bahasa tersebut termasuk dalam Kabupaten Buton dengan luas wilayah pemakaian sekitar 887 km bujur sangkar, dengan jumlah penutur sebanyak 50.579 orang (Mulya, 1990). Pemakaian bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka tersebar pada enam kecamatan (awalnya tiga kecamatan), yakni Kecamatan Gu, Kecamatan Mawasangka Induk, Kecamatan Mawasangka Timur, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kecamatan Lakudo, ditambah dengan Kecamatan Sangiawambu.

Memperhatikan uraian di atas maka untuk keperluan kajian linguistik, hasil penelitian tentang bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka masih tergolong belum memadai jika dibandingkan dengan hasil penelitian bahasa-bahasa daerah lain di Indonesia. Sampai saat ini baru tercatat beberapa hasil penelitian yang menyangkut bahasa Muna, di antaranya oleh Nurdin Yatin (1977) dengan judul, "*Struktur Bahasa Muna*", Nurdin Yatin, et. al. (1991) dengan judul, "*Morfologi Kata Kerja Bahasa Muna*". Sementara itu ada pula penelitian bahasa Mawasangka yang dilaksanakan oleh Abdul Kadir Mulya, dkk. (1990) dengan judul, "*Morfologi dan Sintaksis Bahasa Mawasangka*", Abdul Kadir Mulya, dkk. (1994) dengan judul, "*Sistem Morfologi Verba Bahasa Mawasangka*". Ada pula penelitian lain yang dilaksanakan oleh Said Mursalin, dkk. (1983) dengan judul, "*Struktur Bahasa Mawasangka*". Selain itu, ada pula seorang linguist asing yang pernah menulis tentang bahasa Muna, yakni yang bernama van den Berg (1989) dengan judul tulisan adalah "*A Grammar of the Muna Language*".

Nampaknya di antara penelitian itu belum ada pembahasan mendalam tentang aspek adjektiva, baik *Bahasa Muna* maupun *Bahasa Mawasangka*. Namun demikian, hasil-hasil penelitian di atas tetap dapat diperhatikan sekaligus dijadikan acuan pemerolehan data dalam makalah ini, ditambah dengan posisi penulis sebagai penutur bahasa yang bersangkutan.

Makalah ini menggunakan istilah *Bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka* sebagaimana tertera pada judul, dengan pertimbangan bahwa antara *Bahasa Muna* dengan *Bahasa Mawasangka* ditinjau dari aspek kosakata, sistem morfologi, maupun sistem sintaksis tidak ada perbedaan. Pada bidang fonologi pun hanya ditemukan dua bunyi bahasa yang berbeda, yakni bunyi palatal /c/ dan /j/. Bunyi palatal /c/ tidak dijumpai dalam *Bahasa Muna*, tetapi ada dalam *Bahasa Mawasangka*. Contoh kata *tunu* 'bakar' dalam *Bahasa Muna* menjadi *cunu* 'bakar' dalam *Bahasa Mawasangka*. Lain halnya bunyi palatal /j/, bahwa bunyi tersebut dijumpai dalam *Bahasa Muna*, tetapi tidak dijumpai dalam *Bahasa Mawasangka*, misalnya kata *jamba* 'jamban' dalam *Bahasa Muna*, mejadi *Damba* 'jamban' dalam *Bahasa Mawasangka*, (konsonan /D/ yakni konsonan ingresif, istilah Said Mursalin, karena pengucapannya, dengan menghirup udara ke dalam). Di bidang kosakata, sama sekali tidak dijumpai adanya perbedaan makna yang memungkinkan ketergangguan komunikasi antara dua kelompok pemakai bahasa yang bersangkutan. Yang ada hanyalah kesamaan atau sinonim dari kata-kata yang bersangkutan. Misalnya kata *buhuto* dan *konunu*, kedua kata tersebut mempunyai makna sama, yakni 'nyamuk', wilayah pemakaiannya saja yang berbeda. Kata *buhuto* 'nyamuk' dipakai di wilayah pemakaian *Bahasa Muna*. Kesamaan kosakata seperti itu cukup banyak dan dapat dipahami oleh kedua kelompok masyarakat pengguna dua dialek bahasa yang bersangkutan dan tidak menjadi pengganggu dalam berkomunikasi. Apabila kita merujuk pada penelitian-penelitian yang disebutkan di atas, terutama yang menyangkut kategori kata berupa nomina maupun verba, baik pada *Bahasa Muna* maupun pada *Bahasa Mawasangka*, tampaknya memiliki kesamaan sistem, bahwa baik pada verba maupun nomina terdiri atas bentuk dasar dan turunan atau afiksasi. Demikian pula keduanya memiliki sistem perulangan dan pemajemukan. Baik afiks pembentuk nomina maupun pembentuk verba, keduanya ada yang bersifat infleksional dan ada pula yang bersifat derivasional, kecuali pada perulangan semuanya bersifat infleksional dalam arti perulangan itu tidak mengubah kelas kata. Atas dasar uraian di atas maka *Bahasa Mawasangka* sesungguhnya hanyalah berupa *dialek* dari *Bahasa Muna*. Nurdin

Yatim berpendapat bahwa Bahasa Muna hanya terdiri dari dua dialek, yakni *Bahasa Muna dialek Tongkuno* dan *Bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka*.

2. Kerangka Teori

2.1 Acuan Teoretis

Makalah ini inti pembahasannya adalah *perangai sintaksis adjektiva dalam bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka*. Gambaran tentang Bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka sudah dikemukakan di atas, kecuali *perangai sintaksis adjektiva* masih perlu dijelaskan. *Perangai sintaksis* adalah peristiwa linguistik untuk menentukan *kategori kata* dalam setiap bahasa, sehingga dikenal adanya *verba, nomina, adjektiva, pronominal, dan numeralia*. Adjektiva adalah salah satu kategori kata yang kita kenal selama ini. Untuk itu makalah ini akan menjawab pertanyaan, apakah adjektiva itu memiliki tempat dan kedudukan tertentu dalam kalimat Bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka. Inilah yang dimaksudkan dengan *perangai sintaksis adjektiva* dalam Bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka. Makalah ini disusun dengan mengacu pada teori linguistik yang sifatnya eklektis, artinya tidak bertumpu pada satu teori tertentu, tetapi berpegang pada beberapa teori yang dianggap cocok dan sejalan dengan tujuan makalah ini. Namun yang paling dominan adalah *teori linguistik struktural*. Teori ini menganalisis bahasa hanya melibatkan unsur lingual yang mengandung *makna*. Dengan demikian analisis bahasa menurut *aliran struktural* hanya pada *sintaksis* dan *morfologi*, sementara *fonologi* tidak, dengan alasan *morfem* sebagai unsur kata jadian dan *konstituen sintaksis* sebagai unsur kalimat atau unsur bagian kalimat adalah *bermakna, fonem* yang menjadi unsur kata dalam fonologi tidak *bermakna*, meskipun *membedakan makna*. Pandangan struktural ini berbeda dengan pandangan aliran tata bahasa lainnya yang selama ini memandang bahasa dengan pengertian "*struktur*" sehingga muncullah *struktur sintaksis, struktur morfologi, dan struktur fonologi*.

Selanjutnya aliran struktural ini dalam menganalisis bahasa titik beratnya lebih pada *sintaksis* daripada *morfologi*, karena sesuai dengan prinsip struktural bahasa yang memberitahukan bahwa *sintaksislah* yang mengendali *morfologi*. Jadi dalam analisis *morfologi* tetap akan *berpijak* pada *sintaksis*. Dalam bahasa Muna *verba* atau *kata kerja* misalnya, muncul demi pendukung terhadap tugas kata yang bersangkutan dalam dan bagi kalimatnya. Di samping bentuk *nopakhaso* 'berjualan' ada pula bentuk *neaso* 'menjual'. Keduanya merupakan kata jadian atau *polimorfemis* dengan bentuk dasar *aso* 'jual' dengan afiks jenis prefiks *no+pakha-* dan *ne-*, serta muncul bentuk lain lagi seperti *asoe* 'jual', *taa asomo* 'jual saja'. Kesemuanya itu muncul sesuai dengan tugas *verba* yang bersangkutan untuk mendukung perbedaan konstituen sintaksis lain yang berupa kata atau *frasa nominal*.

Aliran struktural ini memandang bahasa lisan adalah primer, sementara bahasa tulis pada dasarnya adalah alat untuk merepresentasikan bahasa lisan dalam medium lain. Pandangan ini sekaligus mengingatkan kita bahwa bahasa lisanlah yang lebih tua dan lebih tersebar luas dibandingkan dengan bahasa tulisan.

Mengacu pada pandangan di atas, maka dapat dipastikan bahwa yang paling tahu baik buruknya, atau tepat kelirunya kaidah bahasa yang digunakan seorang penutur tentu saja penutur-penutur bahasa yang bersangkutan. Merekalah yang telah menguasai sepenuhnya penghayatan akan bahasa yang digunakannya. Pengetahuan bahasa yang dikuasainya bahkan sudah menjadi bagian dari dirinya.

Ada beberapa rujukan teori struktural yang digunakan dalam makalah ini, yakni seperti yang dikemukakan oleh tokoh struktural Amerika yakni *Leonard Bloomfield* dengan judul bukunya *Language* (1933); *Eugene A. Nida* (1970) dalam *Morphology, the Descriptive Analysis of Word*; *Mattews* (1978) dalam *Morphology an Introduction to the Theory Word Structure*; dan *W.N. Francis* (1958) dalam *The Structure of American English*. Selain itu masih ada buku lain yang menjadi acuan antara lain, *Qirk, dkk.* (1985), yaitu *A Comprehensive Grammar of the English Language*, di dalamnya antara lain menganalisis tentang *komplemen verba* dan *adjektiva*. Demikian pula bukunya *Kenneth L. Pike* dan *Evelyn G. Pike* (1977) dengan judul *Gramatikal Analisis*.

Sepintas tentang *Kenneth L. Pike*, beliau adalah seorang tokoh dari *Summer Institute of Linguistics* sekaligus pelopor aliran tagmemik dengan pandangan-pandangannya mewarisi pandangan *Bloomfield*, sehingga aliran tagmemik ini bersifat *strukturalis* dan *antropologis*.

Dalam menganalisis kalimat, *L. Pike* tidak hanya berdasar pada fungsi saja seperti *Subjek + Predikat + Objek*, dan tidak juga pada bentuk atau kategori, seperti frasa benda, frase kerja, frase adjektiva dan seterusnya, tetapi sekaligus Analisis Peran atau Pengisi Makna, bahkan sampai pada *Kohesi*. Jadi *L. Pike* terkenal dengan *analisis sel empatnya* seperti berikut:

Fungsi	Kategori
Peran	Kohesi

Khusus bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka kalimat hanya dimungkinkan untuk dianalisis atas tiga sel saja, yaitu aspek-aspek *kekategorian, kefungsiannya, dan keperannya*, karena aspek *kohesi* tidak dijumpai dalam bahasa Muna. Makalah ini tentu lebih ke aspek adjektiva sebagai bagian dari *kekategorian*. Di bawah ini

hanya berupa contoh dalam bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka, dengan mengacu pada analisis sel yang digunakan L. Pike.

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">S</td> <td style="text-align: center; width: 50%;">KG</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Peran</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Inodi 'saya'</td> <td></td> </tr> </table>	S	KG	Peran		Inodi 'saya'		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">P</td> <td style="text-align: center; width: 50%;">KKt</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">ak</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">aebuhi 'menulis'</td> <td></td> </tr> </table>	P	KKt	ak		aebuhi 'menulis'		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">O</td> <td style="text-align: center; width: 50%;">KB</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">tuj</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">suha 'surat'</td> <td></td> </tr> </table>	O	KB	tuj		suha 'surat'		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">K</td> <td style="text-align: center; width: 50%;">FD</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">al</td> <td style="border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">be potolo 'dengan pensil'</td> <td></td> </tr> </table>	K	FD	al		be potolo 'dengan pensil'	
S	KG																										
Peran																											
Inodi 'saya'																											
P	KKt																										
ak																											
aebuhi 'menulis'																											
O	KB																										
tuj																											
suha 'surat'																											
K	FD																										
al																											
be potolo 'dengan pensil'																											

Dalam analisis bahasa telah dikenal adanya tataran analisis *fungsi*, *kategori*, dan *peran* sebagaimana telah disinggung di atas. Analisis fungsi menyangkut pada tataran klausa, meliputi *subjek*, *predikat*, *objek*, *pelengkap*, dan *keterangan*. Analisis kategori menyangkut jenis atau kelas kata, misalnya *verba*, *nomina*, *pronomina*, *adverbia*, *preposisi*, *numeralia*, dan *adjektiva*; dan peran menyangkut *fungsi semantik*, seperti *pelaku*, dan *penderita*. Dengan demikian, berbicara tentang adjektiva berarti berbicara tentang salah satu kategori dalam Bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka. Dalam menganalisisnya dapat dilihat, baik dalam hubungannya dengan fungsi maupun dalam hubungannya dengan peran khususnya yang menyangkut fungsi semantik.

2.2 Adjektiva

Dengan mengacu pada prinsip dan teori struktural seperti telah dikemukakan di atas, ada beberapa pengertian adjektiva yang perlu dipaparkan di sini demi pendukung analisis data yang akan dibahas dalam makalah.

Secara umum adjektiva memiliki perilaku yang hampir sama dengan verba. Dalam tataran kalimat tunggal adjektiva seperti juga verba dapat mengisi atau menempati fungsi P secara dominan, dan dalam tataran frasa dia juga menjadi atribut, misalnya dalam Bahasa Muna, *anai ndiidi* 'anak kecil'. Kata *ndiidi* 'kecil' menjadi atribut dari kata *anai* 'anak'. Demikian pula dalam kata ingkar *miina* 'tidak' dalam Bahasa Muna yang menjadi ciri verba seperti juga dalam Bahasa Indonesia, kata ingkar tersebut dapat pula menjadi ciri adjektiva. Contoh dalam Bahasa Muna, (1) *miina naosuhea* 'tidak cantik'; (2) *miina naekadiua* 'tidak mandi', yang pertama menyatakan adjektiva dan yang kedua menyatakan verba.

Walaupun adjektiva dan verba memiliki ciri atau perilaku yang sama atau yang hampir sama, tetapi sebagai kelas kata adjektiva tetap mempunyai ciri dan perilaku yang berbeda dengan verba. Dalam berbagai pendapat teoretis yang dikemukakan oleh para ahli linguistik tentang adjektiva, mereka memiliki pandangan yang sama bahwa pengertian adjektiva dapat ditelusuri lewat *watak semantis* dan *perangai sintaksis*. Atas dasar itu, muncul sebuah pendapat bahwa secara semantis adjektiva adalah jenis kata yang menerangkan keadaan atau sifat suatu benda.

Pendapat di atas secara semantis mungkin dapat diterima, tetapi tidak pada aspek sintaksisnya. Dalam bahasa Muna misalnya ada frasa *pagala uci* 'pagar besi' dan *mieno wuna* 'orang Wuna'. Baik kata *uci* 'besi' maupun kata *wuna* 'wuna' sepiantas lalu kita menganggapnya sebagai adjektiva, karena seakan-akan kata-kata tersebut menerangkan kata atau keadaan benda yang ada di depannya. Namun setelah dicermati ternyata tidak demikian halnya. Kedua kata itu masing-masing menerangkan dari apa atau berasal dari mana *pagala* 'pagar' dan *mieno* 'orang' itu dibuat atau *mieno* 'orang' itu berasal. Jadi jelas *uci* 'besi' dalam frasa *pagala uci* 'pagar besi' adalah menerangkan asal *pagala* 'pagar' itu dibuat, dan tidak menerangkan tentang keadaan *pagala* 'pagar' itu. Hal yang sama terdapat pula pada frasa *mieno wuna* 'orang Wuna' bahwa *wuna* 'Wuna' menerangkan tentang asal dan tidak menerangkan tentang keadaan *mieno* 'orang'. Dengan demikian, kedua kata tersebut adalah atribut dari kata yang ada di depannya. Atas dasar itu, penentuan adjektiva dengan mengandalkan semantik rasanya belum cukup karena di dalam frasa tidak selamanya kata di belakangnya menyatakan keadaan kata di depannya.

Di bawah ini masih akan ditambahkan dengan pendapat beberapa ahli linguistik, di antara (1) Slamet Moeliana, et.al. berpendapat bahwa adjektiva adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang dan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. adjektiva dapat diberi keterangan pendamping, seperti *lebih*, *kurang*, dan *paling*: *lebih besar*, *kurang baik*, *paling mahal*;
2. adjektiva dapat diberi keterangan penguat seperti *sangat*, *amat*, *benar*, *sekali* dan *terlalu* *sangat indah*, *amat tinggi*, *pandai benar*, *murah sekali*, *terlalu mahal*;
3. adjektiva dapat diingkari dengan kata ingkar *tidak*: *tidak bodoh*, *tidak salah*, *tidak benar*;
4. adjektiva dapat diulang dengan awalan *se-* dan akhiran *-nya*; *sebaik-baiknya*, *serendah-rendahnya*, *sejelek-jeleknya*.

5. adjektiva pada kata tertentu dapat berakhir dengan *-er*, *-wi*, *-iah*, *-if*, dan *ik*: *honorer*, *duniawi*, *ilmiah*, *negative*, *formal*, *elektronik* (Moeliono, et al, 1980)

Tampaknya Slamet Moeliono, memberi ciri adjektiva, tidak hanya pada sintaksis dan semantik, tetapi juga pada ciri morfologis, karena ciri adjektiva yang berakhir dengan *-er*, *-wi*, dan *-iah* jelas ciri morfologis. Karena itu (2) Kridalaksana, (1990) menyempurnakannya dengan memberi pendapat, bahwa adjektiva sebagai kategori kata ditandai oleh (a) kemungkinan didampingi *lebih*, *sangat*, *agak*, atau (b) berciri morfologis seperti, *-er*, *-if*, dan *-i*. Dari segi bentuk, dibedakan atas adjektiva dasar yang meliputi (a) yang dapat diuji dengan *sangat*, *lebih*, dan (b) adjektiva turunan yang terdiri dari *berafiks*; *bereduplikasi*; berafiks *ke-reduplikasi-an*; atau *ke-an*; berafiks *-i*; *deverbalisasi*, *denominalisasi*, *deadverbialisasi*, *denumeralia*, dan *deinterjeksi*. (3) Samsuri membagi adjektiva atas dua, yaitu (a) adjektiva dasar yang juga dapat dibagi atas bentuk sederhana, seperti: *cabul*, *cepat*, *gembur*, dan bentuk rumit, seperti *terharu*, *terbata-bata*, *tertegun*, dan (b) adjektiva turunan yang meliputi *ber+nomina*, misalnya *berjasa*, *berharga*, *berbahaya*; *ter+verba* seperti *tergencet*, *terbuka*, *terlarang*, dan *meN+kan* seperti *membosankan*, *mencemaskan*, *menakutkan*. (4) Rusyana, memberi komentar tentang adjektiva sebagai kata yang tidak dapat menduduki *tempat objek*, dan hanya dapat dinegatifkan dengan kata *tidak* atau dapat dinegatifkan dengan kata *bukan* apabila dipertentangkan dengan keadaan lain, misalnya, "*Ya bukan menulis, melainkan membaca.*". Atas dasar itu pula, kata adjektiva dibedakannya atas (1) kata sifat, yakni kata adjektival yang dapat didahului oleh kata *agak*, *sangat*, dan *lebih*, misalnya *sakit*, *tinggi*, *rajin*, *besar*, *kuat*; (2) kata kerja sebagai kata adjektival yang dapat didahului oleh kata *boleh* misalnya *makan*, *belajar*, *tidur*, *mandi*, (Rusyana, et al, 1976).

Ada pendapat menarik tentang adjektiva Bahasa Muna yakni yang dikemukakan oleh van den Berg yang beranggapan bahwa adjektiva tidak dapat diberlakukan untuk bahasa Muna dengan alasan tidak ada satu kriteria independen yang bisa mendefinisikan adjektiva sehingga ia dapat dibedakan dari verba. Seperti dikatakannya berikut ini, "*It turns out, for example, that the category 'adjektiva' cannot be maintained for Muna, as there is no independent criterion by which supposed adjectives can be satisfactorily defined apart from verbs*" (Berg, 1989:43).

Tidak jelas apa yang dimaksud oleh van den Berg dengan kriteria independen adjektiva Bahasa Muna. Mungkin beliau hanya melihatnya dari sudut pandang kata dasar, bahwa adjektiva Bahasa Muna dalam penggunaannya dalam kalimat tidak pernah berdiri sendiri sebagai kata dasar kecuali muncul bersama morfem lainnya. Jadi bersifat *polimorfemis* atau *bermorfem ganda*. Mungkin juga van den Berg tidak setuju kalau ciri adjektiva dipandang mirip dengan ciri verba.

Kalau itu yang menjadi alasannya, tentu tidak bisa juga mengabaikan kenyataan lainnya, bahwa ciri keadjektivaan Bahasa Muna harus pula dilihat dari kemampuan afiks-afiks lain pembentuk adjektiva dalam tataran morfologi, atau dalam perangai sintaksisnya, bahwa adjektiva Bahasa Muna bisa menjadi predikat, bisa menjadi atribut, dan dapat pula diletakkan di kiri dan di kanan penanda adjektiva sebagaimana bahasa-bahasa lainnya.

3. Temuan dan Pembahasan

Pada uraian terdahulu sudah dikemukakan bahwa dalam berbagai bahasa di Nusantara pada umumnya adjektiva memiliki perangai yang hampir sama dengan verba, yakni keduanya dapat mengisi fungsi P secara dominan dalam tataran kalimat tunggal (adjektiva menyertai nomina, menyifati nomina), dan menempati fungsi atribut dalam tataran frasa. Dalam Bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka pun demikian halnya, bahwa baik verba maupun adjektiva dalam tataran kalimat tunggal dapat mengisi fungsi P dan dalam tataran frasa dia menjadi atribut. Contoh kata *pasole* 'gagah' dalam (1) *anai nopasole* 'anak itu gagah' dan (2) *Anai pasole* 'anak gagah'. Contoh pertama *pasole* berupa P dan yang kedua *pasole* berupa atribut.

Berdasarkan temuan di lapangan, baik berupa hasil penelitian maupun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan penulis selaku penutur asli bahasa yang bersangkutan, dengan mengacu pada watak semantis dan wujud morfemisnya, sebagaimana persepsi orang pada umumnya terhadap aspek sifat benda-benda yang berupa warna, bentuk, ukuran, rasa, dan mental, dapat dikemukakan adjektiva Bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka sebagaimana dalam uraian berikut.

Berdasarkan watak semantisnya adjektiva Bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka dapat dikelompokkan menjadi (1) warna: *kapute* 'putih', *kadea* 'merah' *kaito* 'hitam', *kangkuni* 'kuning'; (2) bentuk: *khete* 'rata', *khoko* 'tajam', *bungku* 'bongkok', *onu* 'bundar'; (3) ukuran: a) jarak - *komao* 'dekat', *kodoo* 'jauh'; b) panjang - *ubu* 'pendek', *wanta* 'panjang'; c) tinggi - *panda* 'pendek', *langke* 'tinggi'; d) kedalaman - *oci* 'dangkal', *undalo* 'dalam'; e) ketebalan - *nifi* 'tipis', *kapa* 'tebal'; f) isi - *pono* 'penuh', *koso* 'kosong'; g) jumlah - *bhahi* 'banyak', *sendahdi* 'sedikit'; h) waktu - *sebantaha* 'sebentar', *mpona* 'lama'; i) berat - *sape* 'ringan', *bhie* 'berat'; j) besar - *ndiihdi* 'kecil', *bhala* 'besar'; k) usia - *khanguku* 'muda', *cua* 'tua'; (4) rasa: a) suasana hati/pikiran - *tongo* 'tenang', *bhidha* 'gembira', *mahasai* 'sulit'; b) dalam indera- *tembe* 'tawar', *meko* 'manis', *kolo* 'masam', *sodho* 'panas', *khindi* 'dingin', (5) mental: *tongo* 'diam'; *bhokhe* 'bodoh', *makidha* 'pintar' *maende* 'sombong', *sabakha* 'tabah', *ambano* 'malu'. (6) cara: *ricu* 'curang', *seonu* 'kompak', *mau* 'lambat', *kadhehe-dhehe* 'ceroboh'.

Dalam wujud morfologis, adjektiva Bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka ditandai dengan kecenderungan hadirnya bentuk dasar kata yang berafiks dengan pola *noka (N) + adjektiva + R*, baik seluruh maupun sebagaimana dengan arti '*sangat atau agak*'

Contoh:

- noka (N) + ndiidhi* 'kecil' → *nokandii-ndiidhi* 'sangat kecil'
noka (N) + bhala 'besar' → *nokabhala-bhala* 'agak besar'
noka (N) + komao 'dekat' → *nokakoma-komao* 'sangat dekat'
noka (N) + pai 'pahit' → *nokapai-pai* 'agak pahit'
noka (N) + ompona 'lama' → *nokaompo-ompona* 'agak lama'

Apabila kita memperhatikan contoh-contoh di atas nampaknya dengan bentuk morfologis keadjektivaannya sudah dimiliki sebelum diimbuhkan dengan afiks pada bentuk dasar yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan verba, karena kekategorian verba keberbaannya itu baru dimiliki setelah diimbuhkan dengan salah satu dari berbagai afiks pada bentuk dasar yang bersangkutan.

Kaitannya dengan perangai sintaksis adjektiva di bawah ini akan dikemukakan uji klasifikasi adjektiva bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka dengan menggunakan format yang telah tersedia, dengan catatan setiap kata dapat digolongkan sebagai kategori adjektiva bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. dapat berfungsi sebagai *predikatif*;
2. dapat berfungsi sebagai *atribut*;
3. dapat diletakkan di sebelah kiri kata *mpu* '*benar*', *mpeuhi* '*sekali*', dan *sepalia* '*sangat atau terlalu*' ;
4. dapat diletakkan di sebelah kanan kata *noanga* '*sangat*', *notolau* '*amat*', *noula* '*agak*', *nokuha* '*kurang*'

Tabel Pengklasifikasian Adjektiva Bahasa Muna Dialek Gu-Mawasangka Secara Sintaksis

adjektiva	predikatif	atributif	mpu 'benar'	mpeuhi 'sekali'	sepalia 'terlalu'	noanga 'sangat'	notolau 'amat'	noula 'agak'	nokuha 'kurang'
Sanaa 'senang'	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kele 'gersang'	+	+	+	+	+	+	+	+	+
kadoho- doho 'ceroboh'	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kodhoo 'jauh'	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Meko 'manis'	+	+	+	+	+	+	+	+	+
hombu 'kekar'	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ali 'mahal'	+	+	+	+	+	+	+	+	+
kokaoha 'cemburu'	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ntuhu 'sering'	+	+	+	+	+	+	+	+	-

Keterangan :

- + : adjektiva yang dapat menjadi predikat dan atribut, serta dapat bergabung dengan kata yang terdapat di atasnya.
 - : adjektiva yang tidak dapat bergabung dengan kata yang ada di atasnya.
 ? : adjektiva yang diragukan dapat menjadi predikat dan diragukan pula dapat bergabung dengan kata yang ada di atasnya.

Berdasarkan tabel di atas dapat dikemukakan bahwa *sanaa* '*senang*' pada konstruksi:

- (1) Inodhi *asanaa* a poawa bhe hintua
 'Saya *kusenang* bertemu dengan Anda'
 (Saya *senang* bertemu dengan Anda)

adalah adjektiva yang menduduki fungsi predikat karena bentuk dasar tersebut dapat bergabung dengan bentuk *mpu* '*benar*', *mpeuhi* '*sekali*', *sepalia* '*terlalu*', *noanga* '*sangat*', *notolau* '*amat*', *noula* '*agak*', *nokuha* '*kurang*'.

Perhatikan contoh pemakaiannya dalam kalimat (1a) sampai dengan (1h) berikut:

- (1a) *Inodhi asanaa mpu apoawa bhe hintua.*
'Saya kusenang *benar* bertemu dengan Anda.' (Saya senang *benar* bertemu dengan Anda.)
- (1b) *Inodho asanaa mpeuhi a poawa bhe hintua.*
'Saya kusenang *sekali* bertemu dengan Anda.' (Saya senang *sekali* bertemu dengan Anda.)
- (1c) *Inodhi asanaa sepalia a poawa bhe hintua.*
'Saya kusenang *terlalu* bertemu dengan Anda.' (Saya *terlalu* senang bertemu dengan Anda.)
- (1d) *Inodhi noanga kasanaakua a poawa bhe hintua.*
'Saya *sangat* kesenanganku bertemu dengan Anda.' (Saya *sangat* senang bertemu dengan Anda.)
- (1e) *Inodhi notolau kasanaakua a poawa bhe hintua.*
'Saya *amat* kesenanganku bertemu dengan Anda.' (Saya *amat* senang bertemu dengan Anda.)
- (1f) *Inodhi nula asanaa a poawa bhe hintua.*
'Saya *agak* kusenang bertemu dengan Anda.' (Saya *agak* senang bertemu dengan Anda.)
- (1g) *Inodhi nokuha kasanaakua a poawa bhe hintua.*
'Saya *kurang* kesenanganku bertemu dengan Anda.' (Saya *kurang* senang bertemu dengan Anda.)

Berdasarkan contoh di atas sesuai sifat adjektiva dalam Bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka yang selalu polimorfemis (bermorfem ganda), pada contoh (1a), (1b), (1c) dan (1f) adjektiva muncul bersama proklitik *a* 'ku' dan pada contoh (1d), (1e), dan (1g) adjektiva muncul bersama prefiks *ka-* dan enklitik *kua* 'ku'. Jadi berpola *ka + adjektiva + kua*.

Dalam kedudukannya sebagai predikat adjektiva *sana* 'senang' dapat pula di kedepankan mendahului subjek (inversi), sebagai ciri khas predikat, seperti

- (2) *Nosanaa apoawa bhe hintua.*
'*Senang* kubertemu dengan Anda' (*Senang* saya bertemu dengan Anda.).

Bagaimana halnya dengan kalimat (3) *Anaino sampe nosanaa nowoha inano nofotaa.* 'Anaknya menjadi dia senang dia lihat ibunya dia tertawa' (Anaknya menjadi senang melihat ibunya tertawa.).

Konstruksi *sampe nosana* 'menjadi senang' pada kalimat di atas seakan-akan *sanaa* atau *nosana* 'senang' adalah bukan inti dan yang inti adalah *sampe* 'menjadi', tetapi bila dilihat dari aspek semantik, yang menjadi inti adalah *nosanaa* 'senang', bukan *sampe* 'menjadi'. Perhatikan kalimat (3a) *Anaino nosanaa nowoha inano nofotaa* 'anaknya dia senang dia lihat ibunya dia tertawa' (Anaknya senang melihat ibunya tertawa.). Bandingkan dengan kalimat (3b) **Anaino sampe \varnothing nowoha inano nofotaa* 'anaknya menjadi \varnothing dia melihat ibunya dia tertawa' (Anaknya menjadi \varnothing melihat ibunya tertawa.). Jelas kalimat (3b) adalah kalimat yang tidak berterima karena tidak gramatikal dan ketidakgramatikalannya itu disebabkan oleh tidak hadirnya bentuk *nosanaa* 'senang', dan yang berterima adalah kalimat (3a) walaupun unsur *sampe* 'menjadi' tidak muncul. Kalimat (3a) unsur *sampe* 'menjadi' kehadirannya bersifat tidak wajib, kecuali *nosanaa* 'senang' kehadirannya bersifat wajib.

Perhatikan pula kalimat (4) *Galuno nofeome wulano oleo inia.* 'Kebunnya gersang bulan kemarau ini' (Kebunnya gersang dalam musim kemarau ini.).

Nofeome 'gersang' kalimat di atas adalah adjektiva yang menduduki fungsi predikat karena dapat bergabung dengan kata yang terdapat di atasnya, seperti *mpu* 'benar', *mpeuhi* 'sekali', *sepalia* 'terlalu', *anga* 'sangat', *tolau* 'amat', *nula* 'agak', *kuha* 'kurang'. Perhatikan contoh pemakaiannya dalam kalimat (4a) sampai dengan (4h) berikut ini.

- (4a) *Galuno nofeome mpu wulano oleo inia.* 'Kebunnya gersang *benar* bulan kemarau ini.'
(Kebunnya gersang *benar* dalam musim kemarau ini.)
- (4b) *Galuno nofeome mpeuhi wulano oleo inia.* 'Kebunnya gersang *sekali* bulan kemarau ini.'
(Kebunnya gersang *sekali* dalam bulan kemarau ini.)
- (4c) *Galuno nofeome sepalia wulano oleo inia.* 'Kebunnya gersang *terlalu* bulan kemarau ini.'
(Kebunnya *terlalu* gersang dalam musim kemarau ini.).
- (4d) *Galuno noanga kafeomea wulano oleo inia.* 'Kebunnya *sangat* gersang bulan kemarau ini.'
(Kebunnya *sangat* gersang dalam musim kemarau ini.)
- (4e) *Galuno notolau kafeomea wulano oleo inia.* 'Kebunnya *amat* gersang bulan kemarau ini.'
(Kebunnya *amat* gersang dalam musim kemarau ini.)
- (4f) *Galuno nula kafeomea wulano oleo inia.* 'Kebunnya *agak* gersang bulan kemarau ini.'
(Kebunnya *agak* gersang dalam musim kemarau ini.)
- (4g) *Galuno nokuha kafeomea wulano oleo inia.* 'Kebunnya *kurang* gersang bulan kemarau ini.'
(Kebunnya *kurang* gersang dalam musim kemarau ini.)

Data di atas secara konsisten menunjukkan bahwa kata *feome* 'gersang' menjadi *nofeome* jadi bersama prefiks *no-* apabila diikuti oleh penunjuk adjektiva (lihat kalimat 4a s.d. 4c), dan menjadi *kafeomea* jadi bersama konfiks *ka-a* kalau didahului oleh penunjuk adjektiva (lihat kalimat 4d s.d. 4g). Kecuali pada kalimat. Jadi di sini terjadi keunikan proses morfologis dalam Bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka yang mungkin peristiwa morfologis semacam ini tidak dijumpai dalam bahasa lain.

Bentuk *feome* 'gersang' dalam kalimat inverse berikut tetap berfungsi predikatif.

(5) *Nofeome galunoa wulano oleo inia*. 'Gersang kebunnya bulan kemarau ini.'

(*Gersang kebunnya dalam musim kemarau ini.*)

Perhatikan pula kalimat (6) *Galuno mina natumabhaiea, ulanomo sampe nofeome sungku dhamani*. 'Kebunnya tidak dipupuk, akhirnya menjadi gersang sepanjang waktu.' (Kebunnya tidak dipupuk, akibatnya gersang sepanjang waktu.)

Sama dengan uraian sebelumnya, bahwa secara sintaksis *nofeome* 'gersang' terasa seperti atribut dari *sampe* 'menjadi'. Namun secara semantik dan memang itu yang benar, *nofeome* 'gersang' adalah inti dari frase *sampe nofeome* 'menjadi gersang'. Bandingkan dengan kalimat (7) *Galuno mina natumabhaiea, ulanomo sampe \emptyset sungku dhamani*. 'Kebunnya tidak dipupuk, akibatnya menjadi \emptyset sepanjang waktu.' Kalimat (7) di atas tidak gramatikal karena dalam kalimat di atas yang bersifat wajib adalah hadirnya unsur *nofeome* 'gersang' dan bukan *sampe* 'menjadi'.

Semua penanda adjektival seperti yang sudah dipaparkan di atas dapat pula dipersandingkan dengan bentuk-bentuk kata *kadhoho-dhoho* 'ceroboh', *kodhoo* 'jauh', *meko* 'manis', *hombu* 'kekar', *ali* 'mahal', dan *kokaoha* 'cemburu'. Dengan demikian, kata-kata tersebut berkategori adjektiva.

Selain menggunakan penanda adjektival dalam menentukan keadjektivalan Bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka dapat pula digunakan penanda verba, yakni *tangasano* 'sedang'. Jika penanda verba *tangasano* 'sedang' dapat dipersandingkan dengan kata tertentu, kata tersebut berarti berkategori adjektiva.

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa contoh lain.

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | <i>noliwaso</i> 'cemas' | |
| | <i>noamaha</i> 'marah' | |
| | <i>nowule</i> 'lelah' | |
| | <i>nebhidha</i> 'gembira' | |
| (a) <i>tangasano</i> 'sedang' | <i>nohengku</i> 'gemetar' | |
| | <i>noaho</i> 'lapar' | |
| | <i>nomarunggasa</i> 'kacau' | |
| | <i>nolimpu</i> 'lengah' | |
| | <i>nokowatu</i> 'rindu' | |
| | <i>nodhai</i> 'rusak' | |
| | <i>noliwaso</i> 'cemas' | |
| | <i>noamaha</i> 'marah' | |
| | <i>nowule</i> 'lelah' | |
| | <i>nebhidha</i> 'gembira' | |
| (b) | <i>nohengku</i> 'gemetar' | <i>mpu</i> 'benar' |
| | <i>noaho</i> 'lapar' | |
| | <i>nomarunggasa</i> 'kacau' | |
| | <i>nolimpu</i> 'lengah' | |
| | <i>nokowatu</i> 'rindu' | |
| | <i>nodhai</i> 'rusak' | |
| | <i>noliwaso</i> 'cemas' | |
| | <i>noamaha</i> 'marah' | |
| | <i>nowule</i> 'lelah' | |
| (c) | <i>nebhidha</i> 'gembira' | <i>mpeuhi</i> 'sekali' |
| | <i>nohengku</i> 'gemetar' | |
| | <i>noaho</i> 'lapar' | |
| | <i>nomarunggasa</i> 'kacau' | |
| | <i>nolimpu</i> 'lengah' | |
| | <i>nokowatu</i> 'rindu' | |
| | <i>nodhai</i> 'rusak' | |
| | <i>noliwaso</i> 'cemas' | |
| | <i>noamaha</i> 'marah' | |
| | <i>nowule</i> 'lelah' | |
| (d) | <i>nebhidha</i> 'gembira' | <i>sepalia</i> 'terlalu' |

noaho 'lapar'
nomarunggasa 'kacau'
nolimpu 'lupa'
nokowalu 'rindu'
nodhai 'rusak'

noliwaso 'cemas'
noamaha 'marah'
nowule 'lelah'
nebhidha 'gembira'
noaho 'lapar'
nomarunggasa 'kacau'
nolimpu 'lupa'
nokowalu 'rindu'
nodhai 'rusak'

(e) *notolau, noanga* 'amat, sangat'

nobhala 'besar'
nokomao 'dekat'
nokodhoo 'jauh'
nohubu 'kecil'
nomeko 'manis'
nokesa 'megah'
nopai 'pahit'
nolala 'pedas'
nepanda 'pendek'
nelaa 'lurus'
nelola 'tinggi'

mpu, mpeuhi, sepalia 'sangat, amat'

(f)

nobhala 'besar'
nokomao 'dekat'
nokodhoo 'jauh'
nohubu 'kecil'
nomeko 'manis'
nokesa 'megah'
nopai 'pahit'
nolala 'pedas'
nepanda 'pendek'
nelaa 'lurus'
nelola 'tinggi'

(g) *noanga, notolau, noula, nokuha* 'sangat, amat, agak, kurang'

Berdasarkan data (a) s.d. (g) adjektiva dalam Bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka, selain menggunakan penanda adjektiva juga menggunakan penanda verba, baik letak kiri maupun letak kanan, dan sebagaimana sifatnya yang begitu polimorfemis adjektiva selalu hadir bersama afiks lainnya dan yang terbanyak frekuensi kehadirannya yakni afiks *no-*, atau *ne-*. Kecuali penanda *nokuha* 'kurang' seperti yang tertera pada contoh (g) apabila muncul bersama adjektiva, afiks pendamping adjektiva selalu dengan prefiks *ka-*, misalnya *nokuha kabhala* 'kurang besar', *nokuha kakesa* 'kurang manis', *nokuha kalala* 'kurang pedas' *nokuha kalaa* 'kurang lurus'.

4. Simpulan dan Saran

Ada beberapa simpulan yang perlu dikemukakan dalam mengakhiri makalah ini, antara lain: (1) berdasarkan perangai sintaksis, adjektiva Bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka adalah salah satu kategori kata yang sejajar dengan kategori kata lainnya seperti verba, nomina, dan seterusnya, (2) adjektiva Bahasa Muna dialek Gu-Mawasangka dapat ditetapkan dengan menggunakan penanda adjektiva maupun penanda verba, (3) penanda-penanda itu dapat menempati letak kiri maupun letak kanan, (4) penanda adjektiva maupun penanda verba meliputi bentuk *mpu* 'benar', *mpeuhi* 'sekali', *sepalia* 'terlalu', *anga* 'sangat', *tolau* 'amat', *ula* 'agak', *kuha* 'kurang', (5) bersifat polimorfemis, baik berupa afiks maupun berupa reduplikasi, (6) dapat berupa predikatif maupun atributif, (7) dapat menempati posisi awal pada kalimat inversi.

Perlu dilakukan penelitian yang lebih cermat lagi, tidak hanya untuk keperluan inventarisasi tetapi lebih jauh dari itu, dapat pula memberi sumbangan dalam kajian linguistik.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan. Et.al. 1993. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas
- Alwasila, Chaedar. 1984. *Linguistik Suatu Pengantar*. Bandung : Angkasa.
-, 1985. *Beberapa Mazab dan Dikotomi Teori Linguistik*. Bandung: Angkasa.
- Anceaux, J.C. 1952. *The Wolio Language. Outline of Grammatical Description and Texts*. S'Gravenhage: Martinus Nijhoff.
-1987. *Wolio Dictionary (Wolio-English-Indonesia)*. Dardrecht Holland: Foris Publications Holland.
- Ba'dulu, Muis. 2000. *Morfosintaksis*. Makassar: UNM.
- Berg, R. van. Den. 1989. *A Grammar of the Muna Language*. Dordrecht- Holland: Foris Publications.
- Bloomfield, Leonard. 1933. *Language*. New York: Henry Holt S Company.
- Brown, H. Douglas. 1987. *Principle of Language Learning and Teaching*. Englewood Cliffe, New York: Princtice-Hall.
- Elson, Benyamin and Elma Pickett. 1969. *An Introduction to Morphology and Sintax*. Santa Anna: Summer Institute of Linguistics.
- Gleason, H.A. 1961. *An Introduction to Descriptive Linguistics (Revised Edition)*. New York: Holt, Rinehart, Winston, Ins.
- Halim, Amran. (ed.). 1976. *Politik Bahasa Nasional*. Jilid 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Halliday, M.A.K. 1978. *Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*. London: Edward Arnold.
- Hockett, Ch.F. 1959. *A Course in Modern Linguistics*. New York: The Ronald Press Company.
- Kaseng, Syahrudin. Et.al. 1987. *Pemetaan Bahasa di Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kridalaksana, Harimurti. 1989. *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
-1990. *Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia'
- Nida, EugeneA. 1976. *Morphology, The Descriptive Analysisist of Word*. Second Edition, Ann Arbor: The University of Michigan Press.
- Pike, Kenneth L. & Evelyn G Pike. 1977. *Grammatical Analysis*. Dallas Summer Institute of Linguistics (SIL)
- Rusyana, Yus. & Samsuri (Ed.). 1976. *Pedoman Penulisan Tata Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud.
- Sailan, Zalili. et.al. 1999. *Sistem Morfologi Nomina Bahasa Mawasangka*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdiknas.
- Yatim, Nurdin. 1981. *Struktur Bahasa Wuna*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

DUA PUCUK SURAT KERAJAAN BUTON DARI ABAD KE-17: KANDUNGAN ISI, BAHASA, DAN KONTEKS SOSIO-HISTORIS

Suryadi¹
(Universitas Leiden, Belanda)

1. Pendahuluan

Dalam penelitian mengenai permuskahan Nusantara, genre surat sudah menjadi objek kajian tersendiri yang telah menarik banyak peneliti untuk membahas kandungan isi, iluminasi, bahasa dan aksara, mohor (*seal*), yang dikaitkan dengan latar historisnya. Demikianlah umpamanya, belum lama ini telah terbit pula kajian Mu'jizah mengenai iluminasi 50 surat Melayu dari berbagai daerah di Nusantara (Mu'jizah 2009). Umumnya surat-surat Melayu dari abad ke-17 yang sekarang masih tersimpan di beberapa perpustakaan di dunia dianggap cukup tua. Tercatat ada dua pucuk surat yang dikirim oleh Sultan Ternate yang masih kecil, Bayan Sirullah, kepada Raja Portugal, John III, masing-masing bertarikh 1521 dan 1522 yang menurut Gallop (1994: 120, 123) adalah naskah Melayu yang tertua di dunia² yang sekarang tersimpan di Arquivos Nacionais Torre do Tombo, Cidade Universitaria, Lissabon, Portugal.³

Dalam makalah ini saya membahas dua pucuk surat berusia hampir 350 tahun dari Kerajaan Buton yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden (Universiteitsbibliotheek Leiden; selanjutnya akan ditulis 'UB Leiden'), Belanda. Salah satu di antara surat itu, yang masih dalam bentuk aslinya (berbahasa Melayu dan beraksara Arab-Melayu [Jawi]) sudah pernah dibicarakan oleh W.G. Shellabear kurang dari 170 tahun yang lalu dalam *Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society* (Shellabear 1898: 130-35). Surat tersebut berkode K.Ak.98 (4). Surat kedua adalah terjemahan dalam bahasa Belanda dari versi aslinya yang juga berbahasa Melayu dan beraksara Jawi. Namun, surat aslinya belum ditemukan atau besar kemungkinan tidak ada lagi. Surat kedua itu juga tersimpan di UB Leiden dengan kode K.Ak.98 (5).⁴

Sejauh yang saya ketahui, K.Ak.98 (4) dan K.Ak.98 (5) adalah surat dari Kerajaan Buton yang tertua yang masih terselamatkan sampai sekarang. Surat-surat lainnya dari Kerajaan Buton, termasuk yang ada di Buton sendiri, khususnya yang terdapat dalam koleksi naskah Abdul Mulku Zahari⁵, umumnya berasal dari abad ke-18 dan ke-19 (lihat Ikram 2002; Suryadi 2007a,b).

2. Riwayat Naskah

Dari kodnya dapat diketahui bahwa K.Ak.98 (4) dan K.Ak.98 (5) tidak termasuk dalam koleksi naskah-naskah nusantara yang *dihadiahkan* oleh para pemilik naskah semula kepada UB Leiden—seperti H.C. Klinkert, H.N. van der Tuuk, dan C. Snouck Hurgronje—yang dalam koleksi khusus (*bijzonder collecties*) di UB Leiden selalunya diberi kod 'Or' (singkatan dari *Orientalis*). Melainkan kedua surat itu rupanya termasuk dalam koleksi naskah-naskah milik beberapa orang kolektor yang sudah meninggal atau suatu lembaga yang statusnya dipinjamkan atau dititipkan (*loan-collections*) di UB Leiden. Dua di antara *loan collections* itu adalah naskah-naskah milik De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (disingkat KNAW) yang diberi kod K.Ak.) yang mulai disimpan di UB Leiden sejak tahun 1856 dan koleksi milik Het Nederlandsch Bijbelgenootschap atau Lembaga Alkitab Belanda (NBG).⁶ Jelas bahwa K.Ak.98 (4) dan K.Ak.98 (5) berasal dari koleksi KNAW (yang dikenali dari kata '*Acad*' yang ditulis pada pinggir naskah-naskahnya).⁷

Menurut Jong (1862: 291-2) K.Ak.98 (4) adalah:

¹ Dosen dan peneliti pada Leiden Institute for Area Studies / School of Asian Studies, Leiden University, Belanda. Email: s.suryadi@hum.leidenuniv.nl.

² Walau bagaimanapun pendapat ini tentu tidak berlaku lagi setelah Uli Kozok menemukan *Kitab Undang-undang Tanjung Tanah* di Kerinci yang diperkirakan ditulis pada abad ke-14 atau awal abad ke-15 (lihat Kozok 2006).

³ Mengenai ikhtisar isi dan transliterasi kedua surat itu, lihat Gallop (1994: 122, 196); mengenai aspek kebahasaannya, lihat Ab. Razak (1994).

⁴ Ketika saya mengadakan penelitian mengenai naskah-naskah Sultan Buton Mahyuddin Abdul Gafur (1791-1799), Dayan Asraruddin (1799-1822), dan Kaimuddin I (1824?-1851) yang tersimpan di UB Leiden (Suryadi 2007a,b), keberadaan K.Ak.98 (4) sudah saya sebut-sebut, namun baru berupa informasi secara sepintas lalu saja (lihat Suryadi 2007a: 189).

⁵ Penelitian Ab. Razak Ab. Karim (2009: 16-18) mengenai naskah-naskah Buton dengan tidak mengikutsertakan koleksi Abdul Mulku Zahari, tampaknya juga menemukan beberapa pucuk surat pembesar Buton di Kaledupa, namun tarikh surat-surat itu berkisar antara abad ke-18 dan ke-19 dan tidak ada yang bertarikh lebih tua lagi, misalnya dari abad ke-16 atau ke-17.

⁶ Sebagai catatan, ada dua kelompok koleksi NBG yang disimpan di UB Leiden, yaitu: 1) koleksi NBG yang berisi naskah-naskah Jawa dan Sunda ditempatkan di UB Leiden sejak tahun 1905; 2) koleksi yang disebut NBG-Klinkert (umumnya berisi naskah-naskah Melayu) mulai disimpan di UB Leiden sejak tahun 1915.

⁷ Naskah-naskah koleksi KNAW yang dititipkan di UB Leiden umumnya berbahasa Arab, dan hanya sedikit di antaranya yang berbahasa Melayu, seperti beberapa surat yang terdapat dalam bundel K.Ak.98 (lihat Jong 1862).

Epistola Malaica (2¹) praetoris navalis Boetonensis, Laut, mense Oct. a. 1669 ad eundem missa. Excusat se, quod, bello finito, Bataviae non comparuit, quippe morte Radjae Boetoni impeditus.

Terjemahannya:

Surat dalam bahasa Melayu oleh Komandan Laut [Kapitalao] Buton, Laut, bulan Oktober 1669, dikirimkan kepada orang yang sama [Gubernur Jendral VOC, Joan Maetsuycker]. Ia [Kapitalao] sendiri mohon maaf atas ketidakhadirannya di Batavia setelah perang [antara VOC dan Gowa] berakhir karena ia dicegah untuk pergi [ke Batavia] disebabkan oleh mangkatnya Raja Buton.

Sedangkan K.Ak.98 (5) menurut Jong (1862: 292) adalah:

Versio Belgica epistole Malaicae a Sultano Boetoni, a^o 1670 scriptae ad eundem. Sultanus queritur de tumultu, in urbe Boeton exorto, et a Gubernatore auxilium petit.

Terjemahannya:

Terjemahan bahasa Belanda atas surat dalam bahasa Melayu dari Sultan Buton, ditulis pada tahun 1670 kepada orang yang sama [maksudnya: Gubernur Jendral VOC, Joan Maetsuycker]. Sultan mengeluh tentang kerusuhan yang pecah di kota Buton [Baubau] dan memohon bantuan kepada Gubernur [Jendral untuk mengatasinya].

Makalah ini menyajikan transliterasi K.Ak.98 (4²) dan ketikan K.Ak.98 (5) yang semula ditulis dalam bahasa Belanda abad ke-17 yang sangat sulit dibaca dan cukup sukar menerjemahkannya ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Selanjutnya saya membahas aspek-aspek intrinsik K.Ak.98 (4) dan K.Ak.98 (5) dan konteks sosio-historis (kesejarahan) kedua surat tersebut.

Transliterasi K.Ak.98 (4)

/1³ Bahwa surat ini pada menyatakan tulus dan ikhlas dari Paduka Sahabat Kaicil Jitangkalawu⁴, Kapiten /2/ Laut Buton, menyampaikan tabe banyak² datang kepada Paduka Sahabat Heer Gurnadur Jenral Yohan /3/ Metsuycker⁵ yang memegang kuasa Kompanyi dalam kota Betawih, akan memerintahkan segala pekerjaan Kompanyi /4/ serta dengan segala sahabatnya raja² dari bawah angin. Maka dianugerahkan Allah subhanahuwataala bertambah² /5/ kebajikan dalam dunia dan yang diterangkan hatinya, maka kharijlah segala akal budi bicaranya /6/ yang baik dan menolong daripada orang yang kena kesukaran dan yang mengetahui daripada hati orang, /7/ maka termasyhurlah dari atas angin dan di bawah angin yang memujikan harapnya lagi budiman /8/ serta dengan bijaksanaannya dan ialah meneguhkan setianya perjanjian pada segala raja², tiada akan /9/ berubah² lagi demikian itu, maka dipanjangkan Allah umur dan selamat dan berkat supaya kita /10/ bersahabat, Ternate serta Buton dan Kompanyi, agar jangan bercera² selama-lamanya.

Adapun kemudian /11/ dari itu bahwa sahabat Kapiten Laut memeri maklum kepada Gurnadur Jenral tatkala disuruh oleh /12/ sahabat Raja Buton, kami mengiringkan Paduka Sri Sultan Ternate sama² mengikut pada Amiral /13/ Cornelis Speelman ke Tanah Mengkasar supaya kami mengerjakan kerja kita, hanya maklumlah Kapiten /14/ Laut apabila kuasa Kompanyi serta dengan kuasa Allah akan menyudahi daripada pekerjaan kita hendaklah /15/ Kapiten Laut menunjukkan muka pada Heer Gurnadur Jenral juga supaya puaskan hati. Tetapi /16/ pada sekarang ini Admiral pulang ke Jakarta, hanya Tuan kami Raja Ternate lagi duduk dari Mengkasar, maka /17/ sahabat Kapiten Laut pun duduk sama² dengan Tuan kami Raja Ternate.

¹ Nomor ini dalam Katalog Jong (1862) merujuk kepada naskah-naskah (termasuk surat-surat) yang berbahasa Melayu dan beraksara Jawi.

² Walaupun Shellabear (1898) telah menyajikan versi tulis ulang K.Ak.98 (4) dalam aksara Jawi, transliterasi Latinnya yang memakai sistem pelafalan menurut dialek Melayu Semenanjung Malaysia dan terjemahannya dalam bahasa Inggris, saya kira tetap bermanfaat jika transliterasi surat itu disajikan kembali dalam makalah ini yang saya lengkapi dengan foto naskah aslinya dan pembicaraan yang lebih detil mengenai konteks sosio-historis surat itu yang tidak dibahas secara mendalam oleh Shellabear dalam artikelnya itu. Lagipula, publikasi Shellabear yang sudah sangat klasik dan oleh karenanya pasti cukup sulit ditemukan di Malaysia atau Indonesia, menjadi pertimbangan pula bagi saya untuk menyajikan kembali transliterasi K.Ak.98 (4) dalam makalah ini.

³ Angka yang diapit oleh tanda // merujuk kepada urutan baris pada surat aslinya (lihat Gambar 1 & 2).

⁴ Shellabear (1898: 132) mentransliterasikannya '*Jinggalawu*', dan '*Jipalawu*' menurut filolog Buton, Hasaruddin, (komunikasi pribadi, 27 April 2009). Namun menurut saya, kata itu harus dibaca '*Jitangkalawu*', jika tidak '*Jitangdaawu*'. Persoalannya adalah keragu-raguan untuk memastikan huruf kelima: *k*, *g*, atau *d*. Namun tampaknya dalam surat ini antara *k* dan *g* dibedakan, dimana yang terakhir dilambangkan dengan huruf *kaf* yang diberi titik di bawahnya. Keraguan saya bahwa huruf kelima itu adalah *d* yang diberi pemarkah *~* di atasnya (kelihatannya memang tidak bersambung) beralasan karena mirip dengan huruf *d* di baris-baris lain. Jika demikian halnya, maka kata itu juga bisa dibaca '*Jitangdaawu*'. Sayangnya, nama ini hanya disebut sekali saja dalam surat ini, sementara saya belum menemukan sumber pertama (*bron*) yang lain dari pihak pribumi yang menyebut nama ini, sehingga sulit untuk mencari perbandingan. Ligetvoet (1878: 59) menyebut nama "kapitan-laoet hette La-Djipalaoe" (dikutip oleh Zahari 1977: II, 58) yang boleh jadi tiada lain adalah Kapitalao Jitangkalawu sendiri, tapi mungkin namanya salah dieja oleh lidah Eropa Ligetvoet.

⁵ Jelas yang dimaksud adalah Joan Maetsuycker, Gubernur Jendral VOC ke-12. Ia lahir di Amsterdam tanggal 14 Oktober 1606 dari orang tua yang menganut agama Roman Katolik; memperoleh pendidikan di bidang hukum dari Universiti van Leuven; pertama kali menjejakkan kaki di Hindia Belanda pada 26 September 1636; kariernya dalam administrasi VOC dimulai sebagai pegawai biasa tapi terus menanjak; pernah menduduki kursi Gubernur VOC di Ceylon (sekarang Sri Lanka) antara 1646-1650. Joan Maetsuycker adalah Gubernur Jendral VOC yang terlama memegang kekuasaan, yaitu sejak 18 Mei 1653 sampai meninggal tanggal 24 Januari 1678 di Batavia (sekitar 25 tahun) (Stapel 1941: 28-9). Tapi menurut Putten (2002: 85) ia meninggal di Batavia tanggal 4 Januari 1678.

Seperkara pula ada<pun¹> raja /18/ Buton pun sudahlah pulang ke rahmatullah, kembali daripada asalnya, meninggalkan dunia mengadap ke Negeri /19/ akhirat, sebab itulah maka sahabat Kapiten Laut tiada jadi pergi ke Jakatra menunjukkan muka kepada /20/ Heer Gurnadur Jenral di Betawi, karena adat kami demikian itu apabila raja yang mati /21/ upama seperti datang hari kiamat, jadilah haru biru dalam negeri itu. Oleh pada pikir /22/ Sahabat Kapiten Laut baiklah kami sama2 dengan r^2 Tuan Raja Ternate duduk lagi di Mengkasar. /23/ Ampun2 seribu ampun kepada Sahabat Heer Gurnadur Jenral juga, tiada ada cendera mata /24/ pada sesuatu kepada Heer Jenral melainkan budak laki dua orang akan tanda tulus dan ikhlas /25/ juga, upamanya seperti dua biji sawi, jangan diaibkan. Karena Sahabat Kapiten Laut /26/ orang yang bebal lagi daif mengatur perkataan surat ini, maka jikalau ada salah pun melainkan /27/ maaf juga kepada Heer Gurnadur Jenral. Tamat.

Tertulis dalam Benteng Pa'ring³ yang bedekatan dengan kota Rotterdam dualapan⁴ sembilan⁵ likur hari dari bulan Jumadilawal pada tahun Jim hijrat al-Nabi Salallahu alaihi wasalam seribu dualapan puluh genap.⁶



Gambar 1 : K.Ak.98 (4) (Koleksi Universiteitsbibliotheek Leiden)

Ketikan K.Ak.98 (5) dan terjemahannya⁷

/1/ Translaet uit Maleijts ges⁸

Terjemahan dari bahasa Melayu

/2/ door Paducca Sirij Sulthan⁹ in Bouton

oleh Paduka Sri Sultan di Buton

¹ 'Pun' tersalah letak: diletakkan setelah kata 'Buton' di awal baris 18, namun kemudian diberi tanda pembetulan.

² Sesuai dengan naskah aslinya: sepertinya ada huruf 'r' yang salah tulis (lihat Gambar 1).

³ Melihat bentuk Jawi-nya (lihat Gambar 1), kata ini lebih cocok dibaca 'pa'ring' (menurut bahasa Makassar) daripada 'pa'renring' (menurut bahasa Bugis). Shellabear (1898) membacanya 'Parinringa'.

⁴ Dualapan dalam konteks ini berarti 'delapan' (8), bukan 'dua puluh delapan' (28). Lihat juga bilangan tahun di akhir kolofon surat ini.

⁵ Kata yang disisipkan (lihat Gambar 1).

⁶ Tampaknya ada kesalahan dalam menuliskan tanggal pada kolofon ini: pertama ditulis 'dualapan [8] Jumadilawal', kemudian diubah menjadi 'sembilan [9] Jumadilawal'. Oleh karena kata 'sembilan' disisipkan (berrti ditambahkan kemudian), maka logikanya mungkin 'sembilan likur hari bulan Jumadilawal... tahun Jim...seribu dualapan puluh genap [1080 H]' adalah tarikh surat ini yang benar. Apabila dipadankan (dikonversikan) ke tahun Masehi, maka 9 Jumadilawal 1080 H = Sabtu, 5 Oktober 1669, dan 8 Jumadilawal 1080 H = Jumat, 4 Oktober 1669. Huruf Jim dengan tiga titik di atas merujuk kepada nilai numerik tahun Jim yang digunakan dalam sirkulasi delapan tahunan sistem kalender Islam klasik di Asia Tenggara (lihat Proudfoot 2006). Menurut Ian Proudfoot tanda seperti itu biasanya hanya ditemukan pada naskah-naskah primbon Jawa dan jarang ditemukan dalam kolofon surat-surat Melayu (komunikasi pribadi, 18-4-2009).

⁷ Pembacaan K.Ak.98 (5) ini dan penterjemahannya ke dalam bahasa Indonesia berhasil saya lakukan berkat bantuan Nico van Horn dan Hein Steinhauer. Kepada beliau berdua saya mengucapkan banyak terima kasih.

⁸ Sepertinya singkatan dari 'gesien', artinya 'dilihat'.

⁹ Huruf awal nama orang, gelar, dan jabatan serta nama tempat yang dalam naskah aslinya ditulis dengan huruf kecil, dalam ketikan ini diganti dengan huruf besar, sesuai dengan ejaan sekarang.

- /3/ aen de HE^{del} Heer Gouv^t. Generael
kepada Tuan Gubernur Jendral
- /4/ Joan Maetsuijker, ontfangen X^{s2}
Johan Maetsuijker, diterima di
- /5/ 'traethuys³ den 12 November 1670.
Balai Kota pada 12 November 1670.
- /6/ Gesz⁴. uijt een zuijver en opregt gemoet van
dengan keadaan jiwa yang tulus dan jernih
- /7/ Paducka⁵ u vrint Sirij Sulthan in Bouton nevens
dari Paduka sahabatmu Sri Sultan di Buton beserta
- /8/ alle de raetgevers van Bouton, die altoos verenigt
semua menteri Buton yang senantiasa ingin tetap bersatu
- /9/ willen blijven uit wederzijtse genegentheijt, aen
karena persahabatan yang timbal balik kepada
- /10/ onsen vrint den Gouv^t Generael op Batavia en de
sahabat kami Gubernur Jendral di Batavia dan kepada
- /11/ Comp^{ic} wien den hogen godt wil helpen in al haer
Kompeni yang ingin dibantu oleh Tuhan yang Maha Tinggi dalam semua
- /12/ gedaente, en befaem werden door haer weldoen,
wujudnya, dan menjadi termasyhur berkat kebaikannya
- /13/ soo boven als benedens wints, en dat door de hulpe
baik di atas maupun di bawah angin, dan bahwa berkat segala bantuan
- /14/ die sij bewijsen aen alle haere vrinden die in noot en
yang mereka berikan kepada semua sahabatnya yang terjebak dalam keadaan
darurat dan
- /15/ in moeijelijkheden vallen wien god haer leven of dese
kesulitan-kesulitan, yang semoga Tuhan memperpanjang kehidupannya di
- /16/ werelt wil verlengen. Amen!
dunia ini. Amin!
- /17/ Verders near dit soo maken Paducka Sirij Sulthan
Kemudian daripada itu begitu dimaklumkan Paduka Sri Sultan
- /18/ u vrint nevens alle de raetsherens aen de Gouv^t
sahabatmu beserta semua menteri kepada Gubernur
- /19/ Generael en de Comp^{ic} bekent dan ten tijde wanneer
Jendral dan Kompeni bahwa pada waktu ketika
- /20/ den admirael Speelman nevens Paducca Sirij Sulthan
Laksamana Speelman beserta Paduka Sri Sultan
- /21/ van Ternate u soon en alle de raetsheren van
Ternate, Ananda, dan semua menteri
- /22/ Bouton met Radia⁶ Bone en Arampalacca⁷ gesa-
Buton dengan Raja Bone dan Arung Palaka bersa-
- /23/ mentlijk gesproken hadden wegens de stadt⁸ Wowana,
ma berbicara mengenai kota Wowona⁹
- /24/ soo is vasgesteld, dan wanneer 't volck van
begitu ditetapkan bahwa bila rakyat
- /25/ Bouton met de Comp en Paducca Sirij Sulthan
Buton dengan Kompeni dan Paduka Sri Sultan
- /26/ conink van Ternate u soon nevens Radja Bone
Raja Ternate, Ananda, beserta Raja Bone
- /27/ en Arampalacca naer Macaassar gingen, dat

¹ Tampaknya ini singkatan dari *Hoog Eedelheiden*, panggilan kehormatan kepada Gubernur Jendral dan para pegawai tinggi VOC yang biasa dipakai zaman itu.

² Tidak bisa dibaca.

³ Jelas 'traethuys' (Balai Kota) yang dimaksudkan di sini adalah kantor Gubernur Jendral VOC di Batavia.

⁴ Huruf awal kemungkinan G, walaupun tak dapat dipastikan benar. Kata ini tampaknya disingkatkan.

⁵ Lihat juga baris 17, 41, dan 58. Di baris lain kata ini ditulis *paducca* (lihat baris 20, 25, 31, 37, 48, 60, dan 63).

⁶ Jelas maksudnya adalah 'raja'.

⁷ Yang dimaksud adalah tokoh sejarah asal Bugis, Arung Palaka (lihat Andaya 2004) atau sering juga ditulis Aru Palaka (lihat Batong dkk [1993]). Lihat juga baris 27 dan 32.

⁸ Tampaknya pertama ditulis 'staet', dengan huruf e yang dicoret. Selanjutnya ditulis 'stadt'.

⁹ Hampir dapat dipastikan bahwa yang dimaksud adalah Wowoni, salah satu pulau dalam gugus pulau di wilayah Kesultanan Buton.

- dan Arung Palakka pergi ke Makassar bahwa*
- /28/ *gelast soude werden de stadt Wowana onder
akan diperintahkan bahwa kota Wowona harus membawahi*
- /29/ *Bouton haer soude moeten begeben en dit is soo
Buton dan hal ini telah*
- /30/ *geaccordeert bij den admirael Speelman en de
disetujui begitu Laksamana Speelman dan*
- /31/ *Comp^{ie} nevens Paducca Sirij Sultan¹ conink van
oleh Kompeni beserta Paduka Sri Sultan Raja
{2}²*
- /32/ *Ternate u soon en Radja Bone en Arampalacca
Ternate, Ananda, Raja Bone dan Arung Palakka.*
- /33/ *aen alle de raetsheren in Bouton, en nu soo willen
dan semua menteri di Buton, dan sekarang*
- /34/ *die van Wowana dat gansch niet volgen en ons
yang dari Wowana sama sekali tidak mau mengikuti itu dan*
- /35/ *ten dienste zijn of in de stadt Bouton comen, daerom
mengabdikan kepada kita ataupun pergi ke kota Buton³. Maka*
- /36/ *soo sijnder in de stadt Bouton machtige onlusten
dengan begitu pecahlah kerusuhan besar di kota Buton,*
- /37/ *alsoo der 20 a 30 Ternatanen sijn die Paducca Sirij
di situ terdapat pula 20-30 orang Ternate yang oleh Paduka Sri*
- /38/ *Sulthan ~~xxxx~~⁴ conink van Ternate daer gestelt
Sultan Raja Ternate ditempatkan di situ*
- /39/ *heeft om op de mont van de Boutonese rivier de
untuk menjaga di muara Sungai Buton.*
- /40/ *wacht te houden. Dese en willen niet volgen de ordre
Mereka ini tidak mau mengikuti perintah*
- /41/ *die haer gegeven is door u soon Paducca Sirij
yang diberikan kepada mereka oleh Ananda Paduka Sri*
- /42/ *Sultan conink van Ternate, maer eeneljik haer
Sultan Raja Ternate, akan tetapi hanya*
- /43/ *eijgen lusten en begeerten, ook soo sijnse vrienden ge-
hasrat dan kemauan mereka sendiri. Juga mereka bersahabat*
- /44/ *worden van 2 a 3 kinderen van de conink die in de
dengan 2-3 anak raja yang di*
- /45/ *stadt Bouton haer wederspannigh thoonen en soo
kota Buton menunjukkan dirinya sebagai pemberontak dan*
- /46/ *sijn ook gevolgelijk tegens de Comp^{ie} weder-
dengan demikian mereka juga berontak*
- /47/ *spannigh.
kepada Kompeni.*
- /48/ *Noch eens soo maken Paducca Sirij Sulthan u vrint
Sekali lagi dimaklumkan oleh Paduka Sri Sultan sahabatmu*
- /49/ *nevens alle de raetsheren en de onderdanen van
beserta semua menteri dan rakyat*
- /50/ *Bouton aen den Gouv^t Generael bekent, soo onse vrint
Buton kepada Gubernur Jendral, karena sahabat kami*
- /51/ *den Gouv^t Generael en de Comp^{ie} genegen sijn
Sang Gubernur Jendral dan Kompeni pastilah menyukai*
- /52/ *tot de stadt Bouton, soo versoeken wij dan het volck
kota Buton, maka kami mohon agar rakyat*
- /53/ *van Ternate die in Bouton woonen gelast werden
Ternate yang berada di Buton diperintahkan*
- /54/ *van daer te vertrecken, want soo haer niet gelast wordt*

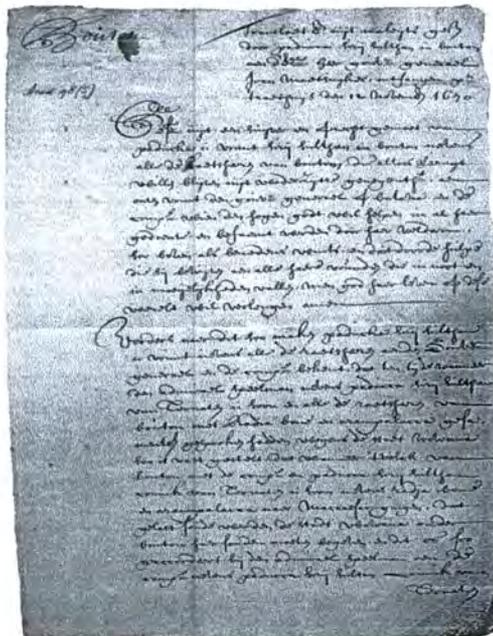
¹ Di sini ditulis 'Sultan', bukan 'Sulthan'. Lihat juga baris 38, 42, dan 60.

² Tanda pergantian halaman pada naskah aslinya.

³ Maksudnya ke Baubau, ke istana Wolio.

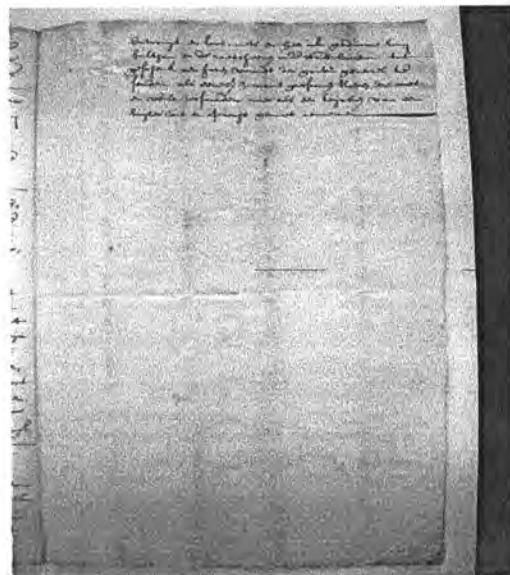
⁴ Dalam naskah aslinya (lihat Gambar 2, hlm.2) ada kata salah tulis yang dicoret di sini.

- untuk pergi dari situ, karena jika mereka tidak disuruh
- /55/ te vertrecken sal de stadt Bouton geruineert worden
 untuk berangkat, kota Buton akan dimusnahkan
- /56/ ende soo wanneer Bouton geruineert wort en isset¹
 dan bila Buton dimusnahkan, maka tiada
- /57/ niemant anders schande noch schade als eenelijck de Comp^{ie}
 yang rugi dan malu melainkan hanyalah Kompeni
- /58/ en Paducka Sirij Sulthan conink in Ternate
 dan Paduka Sri Sultan Raja di Ternate
- /59/ en dit is 't gedoente in Bouton.
 Dan inilah kejadian-kejadian di Buton.
- /60/ Op nieuws noch eens Paducca Sirij Sultan in Bouton
 Sekali lagi Paduka Sri Sultan di Buton
- /61/ u vrint versoekt aen sijn vriendt de Gouv^t Generael
 sahabatmu memohon kepada Sahabat Sang Gubernur Jendral
- /62/ dat hem mach gesonden werden een weijnigh
 agar sudi mengirimi sedikit
- {3}
- /63/ buscruijt en loot xxx² en heb ick Paducca Sirij
 mesiu dan xxx, dan saya Paduka Sri
- /64/ Sulthan en de raetsheren in de stadt Bouton tot
 Sultan serta para menteri di kota Buton mengirimi sebagai
- /65/ geschenk aen hare vrint de Gouv^t Generael te
 bingkisan kepada sahabat mereka Sang Gubemur Jendral
- /66/ senden als eenelijck 3 manspersoonen slaven die niet
 hanya tiga budak laki-laki yang
- /67/ en wilt versmaden maer als seen blijcken van een
 yang mudah-mudahan tidak akan ditolak tetapi diterima sebagai tanda
- /68/ zuyver wit en oprecht gemoet aennemem.
 keadaan jiwa yang tulus dan jenih.



¹ Ketepatan penulisan kembali kata ini masih meragukan, aslinya tertulis.

² Tidak bisa dibaca, aslinya tertulis , mungkin *plumbum*?



Gambar 2: K.Ak.98 (5), halaman 1-3 (Koleksi Universiteitsbibliotheek Leiden)

Catatan tentang Bahasa Surat

Sampai batas tertentu kedua surat yang dibahas di sini menginformasikan kepada kita fungsi bahasa Melayu sebagai media komunikasi resmi antara petinggi kerajaan Buton dengan pihak luar seperti Belanda dan orang asing lainnya. Rupanya pada abad ke-17, bahkan mungkin lebih awal lagi, bahasa Melayu sudah menjadi *lingua franca* yang biasa digunakan untuk komunikasi (tertulis) lintas kerajaan-kerajaan lokal, termasuk Buton. Masuknya Islam ke Buton jelas memberi peluang pula bagi pengenalan bahasa Melayu ke dalam kalangan elit Buton karena Islam membawa tradisi penulisan naskah-naskah yang biasanya memakai bahasa Melayu.

Ketuaan usia K.Ak.98 (4) dapat dikesan dari beberapa kata yang memang jarang ditemukan dalam surat-surat Melayu pada masa yang lebih kemudian. Sama halnya dengan ketuaan bahasa Belanda yang dipakai dalam resume surat kedua (K.Ak.98 (5)). Kata '*Kompanyi*' (maksudnya VOC, *Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) jelas menunjukkan ketuaan surat ini. Bentuk '*kompanyi*' lebih arkais daripada bentuk '*Kompeni*' yang lebih sering dipakai dalam surat-surat Melayu, termasuk juga surat-surat dari Buton (2005; 2007a,b), yang berasal dari abad yang lebih belakangan (abad ke-18 dan 19).

Setidaknya ada beberapa kata lagi yang menunjukkan K.Ak.98 (4). Kata '*jenral*' pada '*Gurnadur Jenral*' (Gubernur Jendral) juga sering dipakai dalam surat-surat Melayu dari abad ke-17, tetapi cenderung berubah menjadi '*jendral*' (atau '*jenderal*') dalam surat-surat Melayu dari abad-abad sesudahnya (abad ke-18 dan 19); demikian pula kata '*amiral*' (pangkat kemiliteran; dalam konteks surat ini disebut nama '*Amiral Speelman*') yang dari abad-abad sesudahnya sering ditulis '*admiral*'. Kata '*Jakarta*' – nama lain untuk Betawi (Batavia) yang sekarang bernama '*Jakarta*' – amat jarang ditemukan dalam surat-surat Melayu abad ke-18 dan 19; kata itu biasanya dipakai dalam surat Melayu dari kurun yang lebih awal lagi, seperti dapat dikesan dalam K.Ak.98 (4).

Kata '*memeri*' (untuk bentuk dasar '*beri*') juga terkesan cukup arkais, walaupun sebenarnya dalam periode yang lebih belakangan (abad ke-18 dan 19) bentuk ini masih dipakai dalam naskah-naskah Melayu, termasuk surat-surat, dari wilayah tertentu di Nusantara. Tentu saja cukup mengherankan pula bahwa kota yang sekarang disebut '*Makassar*' dalam surat-surat raja-raja lokal dari Indonesia timur pada abad ke-16 sampai awal abad ke-20 selalu ditulis '*Mengkasar*'. Saya belum tahu kapan terjadi perubahan pelafalan ini dan apa penyebabnya. Namun, menurut dugaan saya, pelafalan '*Makassar*' seperti dikenal sekarang mungkin didasarkan atas dokumen-dokumen Belanda dari zaman kolonial, bukan berdasarkan penulisan yang ditemukan dalam dokumen-dokumen pribumi seperti surat-surat Melayu dari raja-raja lokal tersebut.

Isi dan konteks Sosio-historis K.Ak.98 (4) & (5)

Menilik kolofon kedua surat di atas, dapat dipastikan bahwa konteks sejarah K.Ak.98 (4) dan (5) adalah Kerajaan Buton pada tahun 1670-an. Surat pertama bertarikh 1669 dan surat kedua bertarikh 1670. Dengan demikian berarti bahwa isi kedua surat ini terkait dengan keadaan sosial dan politik Buton akibat perubahan konstelasi politik kawasan Sulawesi Selatan dan sekitarnya menyusul kekalahan Kerajaan Gowa melawan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) pada 1669. Pada pertengahan abad ke-17 Gowa menjadi salah satu kerajaan terkuat dan terbesar di Nusantara, terlebih-lebih lagi di Nusantara bagian timur. Kerajaan ini terus memperluas pengaruhnya di kawasan timur Nusantara sambil membawa misi pengembangan Islam. Penguasa Gowa mengirim bala tentaranya menyerang kerajaan-kerajaan tetangganya sejauh Lombok di Barat sampai Kepulauan Aru-Kei di timur. Buton yang tidak begitu jauh terletak di timur Gowa menjadi salah satu kerajaan yang sering menjadi sasaran ekspansi politik kerajaan tersebut. Namun tentu saja kerajaan-kerajaan kecil yang menjadi sasaran ekspansi Gowa itu tidak menyerah begitu saja. Mereka berusaha mempertahankan diri, antara lain dengan menerima VOC sebagai patron pelindung yang memberikan bantuan senjata dan pasukan.

Namun rupanya kejayaan Gowa berakhir dengan cepat karena kerjasama yang tak terduga antara Kompeni dengan orang-orang Bugis, musuh bebuyutan Gowa. VOC yang dibantu oleh orang Bugis dan Soppeng berhasil mengalahkan Gowa dalam perang dahsyat dan habis-habisan, seperti digambarkan oleh Enci' Amin, jurutulis Raja Gowa Sultan Hasanuddin (1631-1670), dalam *Syair Perang Mengkasar* (lihat Skinner 2008). Pada 18 November 1667 VOC dan Bugis di satu pihak dan Gowa di lain pihak menandatangani Perjanjian Bongaya—sering juga ditulis Bungaya—untuk mengakhiri perang yang telah menelan banyak korban itu, baik di pihak Gowa maupun di pihak VOC. Akan tetapi usaha itu tampaknya sudah terlambat: orang-orang Gowa sudah merasa kepalang basah dan perdamaian yang sesungguhnya gagal dicapai. Perang Konflik itu kian rumit karena usaha perdamaian itu prematur, dan di antara penjuang dan penduduk Gowa sendiri muncul perpecahan apakah akan menyerah kalah kepada VOC atau meneruskan perlawanan. Marwah Gowa benar-benar habis setelah benteng mereka yang paling tangguh, Sombaopu, jatuh ke tangan VOC pada 1669. Ranah politik Sulawesi Selatan kemudian ganti didominasi oleh orang-orang Bugis-Bone-Soppeng yang kemudian memunculkan pemimpin mereka yang berpengaruh yang saling bekerjasama dengan VOC: Arung Palakka (Arumpone atau Sultan Sa'aduddin) asal Bone.¹

Arung Palakka, yang namanya disebut dalam K.Ak.98 (5) adalah seorang raja yang sejak diangkat menjadi *arumpone* (raja/penguasa Bone) sejak 1672 hingga akhir hayatnya pada 1696 berhasil mempersatukan Sulawesi Selatan. Ia adalah sahabat sejati Kompeni dan oleh karena itu namanya mendapat stigma negatif dalam peta sejarah nasional Indonesia sampai sekarang. Arung Palakka dan pemimpin armada VOC, Admiral Cornelis Speelman, saling bekerjasama untuk mengalahkan Gowa yang waktu itu berada di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin. Berkat kepintaran, keberanian, dan kelicikan Arung Palakka, Bone, dengan bantuan VOC berhasil meruntuhkan domonasi Gowa di Sulawesi Selatan. Persengkongkolan Arung Palakka dan Speelman itu dicatat dalam *Syair Perang Mengkasar*: "*Demikian asal mula pertama / Welanda dan Bugis bersama-sama / Kornilis*

¹ Lebih jauh mengenai perang Gowa-VOC dan sepak terjang politik Arung Palakka, serta akibat-akibat dari perang itu, lihat Andaya (2004).

Sipalman Welanda ternama / Raja Palakka jadi panglima”, demikian tulis Enci’ Amin dalam syair itu (lihat Skinner 2008: 79).

Setelah Gowa ditaklukkan oleh VOC, Makassar dijadikan pusat administrasi VOC untuk mengontrol Kepulauan Nusantara bagian timur. Kemenangan VOC atas Gowa melempangkan jalan bagi mereka untuk menguasai rempah-rempah di bagian timur Nusantara. Perjanjian Bongaya (1667) yang melucuti kekuasaan Gowa mencakup 29 pasal. Pasal 16 perjanjian itu menyatakan “*Sultan [Gowa] harus melepaskan segala haknya atas kerajaan Buton*” (lihat Pettanabba 2006: 143). Selain harus melepaskan hak-haknya atas Buton, Gowa juga harus melepaskan pengaruh politiknya terhadap Kerajaan Bima, Dompu, Tambora, dan Sanggar di Pulau Sumbawa (Pasal 15). Sedangkan Pasal 18 berbunyi: “*Pemerintah Kerajaan Gowa harus melepaskan kekuasaannya atas Kerajaan Bone dan Kerajaan Luwu dan harus berjanji memerdekakan Datu Soppeng (La Tenribali) dari pengasingannya*”.¹ Seperti tercermin dalam K.Ak.98 (4), Buton merasa tertolong oleh kekalahan Gowa atas VOC itu sehingga raja Buton mengirim *kapitalao*-nya ke Makassar untuk memberi selamat kepada Admiral Speelman yang memimpin pasukan VOC mengalahkan Gowa, walaupun akhirnya ia tidak dapat bertemu dengan Speelman karena dia sudah berangkat ke Batavia. Malah sang *kapitalao* Buton itu berencana datang ke Batavia untuk menghadap Gubernur Jendral Johan Maetsuijker, tapi dia tidak jadi berangkat karena raja Buton mangkat (lihat uraian di bawah).

Alih aksara K.Ak.98 (4) memberikan informasi kepada kita bahwa si penulis surat itu menyebut dirinya “*Paduka Sahabat Kaicil Jitangkalawu, Kapiten Laut Buton*” (baris 1). Surat itu ditujukan kepada “*Paduka Sahabat Heer Gurnadur Jenral Yohan Metsyaker yang memegang kuasa Kompanyi dalam kota Betawi(h)*” (baris 2-3). Jelas bahwa maksudnya adalah Gubernur Jendral ‘Kompeni’ VOC ke-12, Joan Maetsuycker (1653-1678). Isi K.Ak.98 (4) cukup penting karena sampai batas tertentu menggambarkan posisi politik Buton selepas kekalahan Gowa melawan VOC. Narasi K.Ak.98 (4) antara lain menyebutkan: “[*Sahabat Kapiten Laut [Jatinggalawu] memerikan maklum kepada Gurnadur Jenral tatkala disuruh oleh Sahabat Raja Buton kami mengiringkan Paduka Sri Sultan Ternate sama2 mengikut pada Amiral Cornelis Speelman ke Tanah Mengkasar supaya kami mengerjakan kerja kita*” (baris 11-13). Jadi, Kapiten Laut (*Kapitalao*) Jatinggalawu datang ke Makassar untuk mewakili Sultan Buton, rajanya, yang tampaknya tidak bisa datang ke Makassar untuk bertemu dengan Cornelis Speelman², Admiral VOC yang telah berhasil menaklukkan Gowa. Sangat mungkin pada waktu itu Raja Buton sakit, sehingga terpaksa *kapitalao*-nya, Jitangkalawu, yang datang ke Makassar untuk menyampaikan ucapan selamat atas kemenangan Arung Palakka dan Speelman atas Sultan Hasanuddin.

Kemenangan VOC atas Gowa membuat kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya merasa terbebaskan, termasuk Buton yang kemudian menjadi dekat dengan Ternate yang juga sudah lama menjadi saingan Gowa. Sebagai imbalannya, kerajaan-kerajaan yang saling bersaing itu terpaksa harus mengikuti kemauan politik dan ekonomi VOC yang telah membebaskan mereka dari tekanan politik Gowa. Isi K.Ak.98 (4) merefleksikan konsolidasi politik yang dilakukan oleh Gubernur VOC di Makassar tidak lama setelah Gowa berhasil mereka taklukkan.³ Dalam surat itu (baris 15) dikatakan bahwa “*hendaklah Kapiten Laut [Jitangkalawu] menunjukkan muka [ke]pada Heer Gurnadur Jenral juga supaya puaskan hati*” Gubernur Jendral VOC itu. Artinya, Speelman (dan Arung Palakka) mencoba menghimpun raja-raja dari kerajaan-kerajaan kecil yang mereka bebaskan dari hegemoni politik Gowa. Malah, seperti yang akan diuraikan di bawah, Kapitalao Jitangkalawu harus menghadap Gubernur Jendral VOC di Batavia, karena dia terlambat datang ke Makassar sehingga tidak sempat bertemu dengan Cornelis Speelman.

¹ Selengkapnya mengenai pasal-pasal Perjanjian Bongaya, lihat antara lain Pettanabba (2006: 141-6).

² Cornelis Janzoon Speelman lahir pada 3 Maret 1628 dari satu keluarga pedagang di Rotterdam. Pada umur 16 tahun ia bergabung dengan awak kapal VOC *Hillegersberg* yang berlayar ke Hindia Belanda. Ia sampai di Batavia pada 1645. Kariernya dalam jajaran administrasi VOC dimulai sebagai *boekhouder* (1648) sampai kepada tingkat tertinggi, Gubernur Jendral (25 November 1681 – 25 Januari 1684). Speelman termasuk salah seorang pegawai tinggi VOC yang kontroversial. Demikianlah umpamanya, pada bulan September 1665 ia didenda oleh petinggi VOC *de Heeren XVII* sebesar 3000 gulden ketika menjabat sebagai Gubernur dan Direktur VOC di Coromandel karena ia memanfaatkan jabatannya untuk membelikan istrinya sejumlah intan yang mahal, kemudian menjualnya lagi untuk mengumpulkan kekayaan pribadi. Oleh karena praktek korupsi yang merugikan kas VOC itu, ia diskors selama 15 bulan. Namun karier Speelman naik lagi setelah pada 1666 ia memimpin ekspedisi tentara VOC ke Sulawesi Selatan untuk menaklukkan Kerajaan Gowa yang akhirnya memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bongaya (18 November 1667). Pada tahun itu juga Speelman lalu diangkat menjadi komisaris VOC untuk Amboina, Banda, dan Ternate, kemudian ia dipromosikan lagi menjadi *Raad extra-ordinaris van Nederlands-Indië*. Tahun 1669—terkait dengan konteks K.Ak.98 (4)—Speelman diangkat menjadi Admiral VOC di Makassar, pusat bandar dari kerajaan yang sudah ditaklukkannya, Gowa. Untuk jasanya itu, pada 1670 VOC menganugerahinya rantan emas dan medalnya (*een gouden keten met medaille*). Speelman masih memimpin beberapa ekspedisi militer VOC lagi sepanjang 1680-an yang berlangsung sukses, termasuk ekspedisi ke Jawa Tengah melawan pasukan Trunajaya tahun 1676. Faktor itulah yang antara lain membawanya sebentar ke kursi empuk Gubernur Jendral VOC di Batavia. E.S. Ito dalam novelnya *Rahasia Meede: Misteri Haria Karun VOC* (2007) melakukan interpretasi fiktional yang bagus terhadap kehidupan Speelman sebagai pegawai tinggi VOC. Speelman meninggal pada 11 Januari 1684 di sebuah kastil di Batavia. Lebih jauh mengenai Speelman, lihat Putten 2002; lihat juga (<http://www.vocsite.nl/geschiedenis/personalia/speelman.html>; dikunjungi 26-4-2009).

³ Mengenai sejarah Kerajaan Gowa, lihat antara lain Erkelens (1897), Matthes (1883), Andaya (1984), Patunru (1993), dan Cummings (2007).



Gambar 3: Cornelis (Corneille) Janzoon Speelman (3/3/1628 – 11/1/1684) (Sumber: KITLV Leiden 37B627)

Selanjutnya diceritakan bahwa Admiral Speelman kembali ke Batavia (tertulis: *Jakarta*), sementara “*Sahabat Kapiten Laut [Jitangkalawu] pun duduk sama2 dengan Tuan [...] Raja Ternate*” di Makassar. Tidak disebutkan nama Raja Ternate itu, tapi sangat mungkin beliau adalah Sultan Mandarsyah (1645-1675) (lihat Widjojo 2007: 262). Sultan inilah yang menandatangani perjanjian antara Ternate dan Cornelis Speelman di Casteel Oranje (tidak disebutkan lokasinya) pada 30 Mac 1667 (Ligtvoet 1878: 55-6).

Penyebab batalnya Kapitalao Jitangkalawu pergi ke Batavia jadi jelas menjelang akhir surat ini, yaitu karena “*Raja Buton [...] pun sudahlah pulang ke rahmatullah, kembali daripada asalnya, meninggalkan dunia mengadap ke negeri akhirat*”. Oleh karena itulah Kapitalao Jitangkalawu membatalkan niatnya “*pergi ke Jakarta [untuk] menunjukkan muka kepada Heer Gurnadur Jen[d]ral di Betawi*”, karena dalam adat Buton “*apabila raja yang mati u[m]pama seperti datang hari kiamat, jadilah haru biru dalam negeri*” (baris 18-21). Jadi, tampaknya Kapitalao Jitangkalawu tidak berani pergi jauh ke Batavia (Jakarta) karena rajanya baru saja mangkat.



Gambar 4: Joan Maetsuycker (14/10/1606 – 24/1/1678) (Sumber: KITLV Leiden 37B622)

Dengan membaca kutipan di atas, menjadi jelas juga bagi kita sekarang bagaimana reaksi masyarakat Buton masa lampau jika raja mereka meninggal: seluruh lapisan masyarakat berkabung dan berduka. Berhari-hari mereka berada dalam kesedihan yang mendalam. Abdullah bin Muhammad al-Misri dalam karyanya, *Hikayat Raja-Raja Siam* (1823 atau 1824) menggambarkan kebiasaan yang berlaku di kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia timur pada masa lampau apabila seorang raja mangkat:

Sebermula adapun raja-raja di tanah Bugis dan Ternate dan tanah sebelah timur, apabila ada raja-raja itu mati, maka berkeliling segala perempuan yang baik rupanya dan suaranya memegang kipas, maka bersyair menembang itu berpuluh-puluh hari, maka baru ditanam, dan tetapi tiada dibakar seperti [di]

Siam dan Bali, maka inilah dikata ada lagi agama Hindu kepada segala negeri bawah angin ini dan banyak lagi orang yang menyembah yang lain daripada Allah taala.¹

Catatan Abdullah bin Muhammad al-Misri di atas merefleksikan pengamalan unsur kepercayaan pra-Islam di kalangan penduduk kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia timur pada abad ke-17, ke-18, dan ke-19, termasuk Buton, seperti dibahas dengan cukup detil oleh Pim Schoorl dalam bukunya, *Masyarakat, Sejarah, dan Budaya Buton* (2003).

Siapakah gerangan Raja Buton yang mangkat itu? Sebelum membahas itu, baiklah saya kutipkan dulu alih aksara kolofon K.Ak.98 (4) yang berbunyi: “*Tertulis dalam Benteng Pa’rinring yang bedekatan dengan kota Rotterdam dua lapan <sembilan>² likur hari dari bulan Jumadil Awal pada tahun Jim hijrat al-Nabi Salallahu alaihi wassalam seribu dua lapan puluh genap*” (lihat transliterasi).

Dari catatan pada kolofon itu jelas bahwa K.Ak.98 (4) ditulis di Benteng Pa’rinring, dekat Benteng Rotterdam, di Makassar pada 8 (atau 9) Jumadilawal 1080 H”. Jika dikonversikan ke tahun Masehi: 8 Jumadilawal 1080 H = 4 Oktober 1669 dan 9 Jumadilawal 1080 H = 5 Oktober 1669. Kata “sembilan” disisipkan belakangan, tampaknya karena semula ada kesalahan penulisan tanggal, kemudian dibetulkan. Kalau begitu, sangat mungkin tanggal penulisan surat ini yang benar adalah 5 Oktober 1669.

Nama benteng Pa’rinring rupanya jarang disebut dalam kajian-kajian mengenai sejarah Sulawesi Selatan. Dengan adanya penjelasan dalam surat ini tentang satu benteng lain yang bernama Pa’rinring, maka dapat diketahui bahwa dulu di Makassar rupanya terdapat satu benteng lagi selain benteng-benteng yang sudah biasa disebut dalam studi-studi sejarah tentang Sulawesi Selatan.³ Sejauh ini saya belum menemukan bibliografi lain mengenai benteng Pa’rinring ini. Kata ‘pa’rinring’ sendiri berasal dari bahasa Makassar yang berarti ‘tembok penghalang’. Boleh jadi yang dimaksud oleh Kapitalao Jitangkalawu dalam suratnya itu adalah salah satu dinding benteng atau mungkin bastion dalam jajaran benteng yang ada di pantai Makassar. Walau bagaimanapun kajian lanjutan mengenai sejarah Sulawesi Selatan sebaiknya juga memberi perhatian pada rekonstruksi ‘benteng Parinring’ ini, yang menurut redaksi dalam K.Ak.98 (4) terletak tidak jauh dari benteng Rotterdam.



Gambar 5: Denah Benteng Fort Rotterdam, Makassar (Direproduksi dari Carey 2007: 737; Sumber asli: Arsip Nasional, Koleksi Loupe 1309)

Merujuk kembali kepada tarikh dalam kolofon K.Ak.98 (4), maka sangat mungkin bahwa Raja Buton yang diberitakan mangkat oleh Kapitalao Jitanggalawu dalam suratnya itu adalah La Simbata atau Sultan Adilil Rakhiya alias La Simbata alias Mosabuna I Lea-Lea (1664-1669), Sultan Buton ke-10. Seperti kebiasaan di Kerajaan Buton, dengan sedikit pengecualian⁴, Raja diganti apabila mangkat. Keterangan dalam surat ini

¹ Dikutip dari transliterasi *Hikayat Raja-Raja Siam* yang dikerjakan oleh Zaini-Lajoubert (2008: 145) berdasarkan naskah KITLV Leiden Or.75 dengan membandingkannya dengan versi UB Leiden Cod.Or.2011 (lihat Wieringa 1998: 227).

² Kata ini disisipkan (lihat transliterasi dan Gambar 1).

³ Para sejarawan hanya mengidentifikasi 14 benteng di Makassar, yaitu 1) Tallo; 2) Ujung Tanah; 3) Ujung Pandang (yang kemudian diubah namanya oleh Cornelis Speelman menjadi ‘Fort Rotterdam’; lihat Gambar 5); 4) Baro’ Boso; 5) Mariso; 6) Somba Opu; 7) Garassi; 8) Panakkukang; 9) Barombong; 10) Kalegowa; 11) Ana’Gowa; 12) Galesong; 13) Sanro Bone; 14) Pattunuang. Lihat misalnya deskripsi nama dan posisi benteng-benteng ini di Museum A La Galigo di Benteng Rotterdam, Makassar.

⁴ Misalnya Sultan Buton ke-25, Alimuddin (La Masalimu) yang kekuasaannya cukup singkat (1788-1791). Ada petunjuk bahwa ia dipaksa turun tahta karena tekanan VOC dengan memanfaatkan tangan-tangan siluman mereka yang ditanam di dalam istana Buton sendiri (Ligtvoet 1878; Zahari 1977, II: 148-54). Alimuddin adalah salah seorang sultan Buton yang sangat kritis kepada Belanda yang dianggapnya makin berani ikut campur tangan dalam urusan internal Kerajaan Buton, seperti terefleksi dalam butir-butir klausul Perjanjian

memperjelas lagi tentang tarikh mangkatnya Sultan Adilil Rakhiya yang sebelum ini masih samar-samar. Sekarang cukup jelas bahwa Sultan Adilil Rakhiya mangkat sebelum bulan Oktober 1669. Sultan Adilil Rakhiya turun tahta dengan melepaskan kekuasaannya. Baginda digantikan oleh Sultan Kaimuddin atau La Tangkaraja (1669-1680).¹

Sampai batas tertentu, kolofon surat itu juga memberi petunjuk tentang wewenang dan kekuasaan seorang Kapitalao Buton. Rupanya dalam keadaan darurat, Kapitalao boleh menulis surat dari tempat yang jauh dari Istana Buton. Kapitalao Jitanggalawu sudah berada di Makassar ketika dia menerima berita tentang kemangkatan Sultan Adilil Rakhiya. Pembatalan kunjungannya ke Batavia menghadap Gubernur Jendral VOC terpaksa diberitahukan sesegera mungkin lewat surat tanpa harus kembali dulu ke Baubau untuk melayat jenazah Sultan Adilil Rakhiya. Oleh karena itu dia segera menulis K.Ak.98 (4) di Makassar untuk dikirim ke Batavia sebelum kembali ke Baubau.

Surat itu diakhiri dengan penutup yang menyebut beberapa hadiah berupa "budak laki dua orang" (K.Ak.98 (4): baris 25).

Narasi K.Ak.98 (5) juga mengandung beberapa penjelasan yang mencerminkan suasana politik tempatan setelah VOC (dan Arung Palakka) berhasil mengalahkan Gowa. Salah satu informasi yang penting dalam surat ini adalah penjelasan tentang huru-hara yang terjadi di Wowoni. Rupanya menurut kesepakatan antara Arung Palakka, Sultan Ternate, Raja Bone, dan Raja Buton selepas kekalahan Gowa, Wowoni harus dimasukkan ke dalam wilayah Buton. Namun rupanya ada pihak-pihak di Wowoni tidak mau tunduk kepada peraturan yang sudah dibuat dan disepakati oleh keempat pemimpin itu. Maka terjadilah kerusuhan di Wowoni yang tampaknya didalangi oleh orang-orang Ternate yang tinggal di sana dan juga yang ada di Buton (di Kota Baubau). Kelompok ini tampaknya tidak senang dengan perubahan politik yang terjadi yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada VOC, bekerja sama dengan Arung Palakka, untuk mengontrol wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Sultan Buton khawatir orang-orang Ternate yang ada di Buton (Baubau) akan membuat kerusuhan dan membakar kota. Oleh sebab itu ia minta bantuan senjata dan amunisi kepada Kompeni. Ini menunjukkan munculnya konflik-konflik politik domestik di berbagai wilayah kerajaan lokal tempatan akibat kekalahan Gowa, tidak saja konflik internal dalam Kerajaan Gowa sendiri sebagaimana telah dibahas dengan mendalam oleh Andaya (2004). Selama bertahun-tahun sebelum dikalahkan oleh VOC, Gowa telah menghegemoni bagian timur Nusantara. Di daerah-daerah yang berada di bawah hegemoni Gowa tentu terdapat kelompok-kelompok orang yang mendukung Gowa, di samping tentunya ada juga yang menentangnya. Dengan kekalahan Gowa melawan VOC, kelompok yang mendukung akan tersingkir di panggung politik daerah masing-masing, dikalahkan oleh kelompok yang menentang tadi. Dimana-mana tempat, terjadinya perubahan konstelasi politik tentu akan mengakibatkan pula terjadinya pertukaran aktor-aktor politik.

Seperti digambarkan dengan rinci oleh Andaya (*ibid.*), Perang Gowa-VOC, dengan segala akibatnya, ternyata lebih rumit. Perang itu tidak sekadar berhadapannya dua musuh bebuyutan: VOC dan Bugis di satu pihak melawan Gowa di lain pihak. Perang itu penuh dengan intrik politik lokal: pembelotan, pengkhianatan, negosiasi, kompetisi, dan ambisi politik di antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam suasananya seperti itulah Arung Palakka, dengan segala kecerdikannya menghadapi para rival lokalnya sendiri dan Belanda, berhasil menduduki posisi puncak kekuasaan di Sulawesi Selatan, dan mempertahankannya hampir selama 3 dekade.

3. Penutup

Surat-surat Melayu klasik seperti surat raja-raja Buton merupakan sumber pribumi yang belum dimanfaatkan secara maksimal dalam studi sejarah, bahasa, dan kebudayaan Indonesia. Surat-surat tersebut adalah semacam 'pintu' untuk melongok berbagai peristiwa di sekitar lingkungan istana kerajaan-kerajaan lokal Nusantara pada zaman lampau. Membaca dua surat Buton yang cukup tua ini, kita mendapat banyak informasi mengenai masa lampau Buton dan kawasan sekitarnya: kont(r)ak politik, peperangan, intrik-intrik politik, dan unsur-unsur sosial-budaya dan kepercayaan setempat. Di dalam surat-surat tersebut juga terepresentasi pola pikir, ucapan, dan tindakan para penguasa lokal dalam menghadapi berbagai macam situasi (sosial, ekonomi, dan politik) semasa. Melalui pembahasan terhadap narasi K.Ak.98 (4) dan (5) dalam makalah ini, diperoleh sejumlah

Buton-VOC tahun 1766, khususnya pasal 28 yang mengharuskan istana Buton mendapat persetujuan lebih dulu dari VOC bila ada raja baru yang akan diangkat menggantikan raja sebelumnya yang mangkat atau diberhentikan. Pasal ini sangat tidak disukai oleh Sultan Alimuddin karena sangat merendahkan marwah dan wibawa istana Buton dan dianggap bentuk campur tangan VOC yang sudah sangat keterlaluan dalam urusan politik dalam negeri Buton. Sultan Alimuddin memrotes pasal ini dan tidak mau menjalankannya. Akibatnya, ia (Kerajaan Buton) diancam akan diserang oleh VOC, seperti terefleksi dalam nada isi surat panjang balasan VOC kepada Sultan Alimuddin yang sekarang tersimpan dalam koleksi Abdul Mulku Zahari dengan Kod 23/Jawi/18/4 bertarikh 1791 (lihat Suryadi 2007a: 213-21; Ab. Razak 2009: 14-15). Oleh sebab itu Sultan Alimuddin kurang disenangi VOC dan sering berada dalam dilema di kalangan bangsawan Buton (*kaomu* dan *walaka*) yang memihak kepada VOC di satu sisi dan yang anti atau kritis kepada VOC di sisi lain. Pada tahun 1791 tiba-tiba Sultan Alimuddin (di)turun(kan dari) tahtanya dan digantikan oleh Sultan Mahyuddin Abdul Gafur (1791-1799) yang kemudian cukup akrab dengan VOC (Suryadi, *op cit.*).

¹ Keterangan ini merujuk kepada Abdul Mulku Zahari, *Sejarah dan adat fuy Darul Butuni (Buton)* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1977, Jilid II, hlm. 46-66) yang banyak merujuk kepada A. Ligtoet, "Beschrijving en geschiedenis van Boetoon", *Bijdragen to de Taal-, Land- en Volkenkunde* 26 (1878): 1-112.

informasi baru mengenai keadaan di dalam Kerajaan Buton selepas kemenangan VOC atas Gowa. Melaluinya, misalnya, diperoleh lagi keterangan yang makin menjelaskan tarikh wafatnya Sultan Adilil Rakhiya (Sultan Buton ke-10) serta konflik internal yang terjadi di Wowoni antara pendukung rezim lama (Gowa) dan rezim baru (VOC yang berkerjasama dengan Arung Palakka). Berbeda dengan sumber-sumber Belanda yang sering hanya memberikan urutan kronologis peristiwa sejarah secara sederhana dan bersifat statistik, sumber-sumber pribumi seperti surat-surat raja Buton ini sering merepresentasikan emosi dan perasaan penulisnya. Sumber-sumber pribumi seperti surat-surat raja Buton adalah bagian integral dari budaya lokal. Melaluinya kita tidak hanya dapat memahami berbagai ketegangan, konflik, dan keprihatinan pada pemimpin lokal itu tetapi juga cara mereka memandang dunianya dan orang asing.

Selain itu, bahasa surat-surat tersebut juga memperlihatkan kelokalan sekaligus fungsi bahasa Melayu sebagai *lingua franca* di Kepulauan Nusantara pada abad-abad lampau. Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa sebuah negara bangsa (*nation-state*), sama ada Indonesia atau Malaysia, sudah punya akar tunjang pemersatu jauh sebelum Belanda menciptakan peta Hindia Belanda yang kemudian kita warisi. Surat-surat Melayu klasik seperti surat-surat raja Buton ini adalah salah satu sumber pertama yang penting untuk studi sejarah politik, diplomatik, dan ekonomi Nusantara di masa lampau dan juga sejarah perkembangan bahasa Melayu. Dengan mempertimbangkan hal ini akan banyak manfaatnya jika penelitian dan transliterasi terhadap surat-surat raja Buton perlu dilanjutkan dan terus digalakkan.

Akhirnya makalah ini saya tutup dengan mengutip kata-kata Kapitalao Jitangkalawu: “*Sahabat [Suryadi] orang yang bebal lagi daif mengatur perkataan [dalam makalah ini]. Maka jikalau ada salah pun melainkan maaf juga [dimohon] kepada [para peserta kongres ini]. Tamat.*”

Daftar Pustaka

- Ab. Razak bin Ab. Karim. 1994. “Surat Sultan Ternate 1521: beberapa analisis linguistik”, *Jurnal Dewan Bahasa* 38.1: 66-74.
- Ab. Razak Ab. Karim. 2009. “Naskhah-naskhah pulau Buton – antara realiti dan harapan”, *Jurnal Filologi Melayu* 16: 1-25.
- Andaya, Leonard. 2004. *Warisan Arung Palakka: sejarah Sulawesi Selatan abad ke-17* (penterjemah: Nurhady Sirimorok). Makassar: Ininnawa.
- Batong, Hermin dkk. [1993]. *Biografi Aru Palaka* (diterjemahkan dari bahasa Belanda oleh Ham Mappasanda). Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Carey, Peter. 2007. *The power of prophecy: Prince Dipanagara and the end of an old order in Java, 1785-1855*. Leiden: KITLV Press.
- Cummings, William P. 2007. *A chain of kings: the Makassarese chronicles of Gowa and Talloq*. Leiden: KITLV Press (Bibliotheca Indonesica 33).
- Erkelens, E. 1897. “Geschiedenis van het Rijk Gowa”, *Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* 50: 81-121.
- Gallop, Annabel Teh. 1994. *The legacy of Malay letter; Warisan warkah Melayu* [with an essay by E. Ulrich Kratz]. London: The British Library.
- Ikram, Achadiati dkk.(eds.). 2002. *Katalog naskah Buton: koleksi Abdul Mulku Zahari*. Jakarta: Manassa [etc.].
- Inci' Amin. 2008. *Syair Perang Mengkasar* (ed.: C. Skinner; penterjemah ke bahasa Indonesia: Abdul Rahman Abu). Jakarta: Ininawa & KITLV Jakarta [Naskah asli berupa salinan beraksara Jawi oleh Cornelia Valentijn, c. 1710].
- Ito, E.S. 2007. *Rahasia Meede; misteri harta karun VOC*. Jakarta: Hikmah.
- Jong, P. de.1862. *Catalogus codicum orientalium Bibliothecae Academiae Regiae Scientiarum*. Lugduni Batavorum: E.J. Brill & Academiae Typographus.
- Kozok,Uli. 2006. *Kitab Undang-undang Tanjung Tanah: naskah Melayu yang tertua*. Jakarta: Yayasan Naskah Nusantara & Yayasan Obor Indonesia.
- Ligtvoet, A. 1878. “Beschrijving en geschiedenis van Boetoen”, *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 26: 1-112.
- Matthes, Benjamin Frederijk. 1883. *Makassarsch geschrift bevattende de oudste geschiedenis van Gôwa, Tällô en eenige andere rijken van Zuid-Celebes*. Amsterdam: C.A. Spin & Zn.
- Mu'jizah. 2009. *Illuminasi dalam surat-surat Melayu abad ke-18 dan ke-19*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia – École française d'Extrême-Orient – Pusat Bahasa-Departement Pendidikan Nasional – KITLV-Jakarta.
- Patunru, Abd Razak Daeng. 1993. *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Proudfoot, Ian. 2006. *Old Muslim calendar of Southeast Asia*. Leiden-Boston: Brill.

- Putten, L.P. van. 2002. *Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië. Deel 1: ambitie en onvermogen: 16-10-1796*. Rotterdam: ILCO-Productions.
- Schoorl, Pim. 2003. *Masyarakat, sejarah, dan budaya Buton*. Jakarta: Djambatan.
- Shellabear, W.G. 1898. "An account of some of the oldest Malay MSS. Now extant", *Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society* 31: 107-151.
- Stapel, F.W. 1941. *Gouverneurs-generaal van Nederlandsch-Indië*. Den Haag: W.P. v. Stockum & Z.^N.
- Suryadi. 2007a. "Warkah-warkah Sultan Buton Muhyiuddin Abdul Gafur kepada Kompeni Belanda, koleksi Universiteitsbibliotheek Leiden", *Sari (Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, ATMA Universiti Kebangsaan Malaysia)* 25: 187-239.
- Suryadi. 2007b. "Surat-surat Sultan Buton, Dayyan Asraruddin dan Kaimuddin I, koleksi Universiteitsbibliotheek Leiden, Belanda", *Jurnal Humaniora (FIB UGM Yogyakarta)* Vol. 19, No.3 (Oktober): 284-301.
- Wieringa, E.P. 1998. *Catalogue of Malay and Minangkabau manuscripts in the Library of Leiden University and other collections in the Netherlands*, vol 1. Leiden: Legatum Warnerianum in Leiden University Library.
- Widjojo, Muridan. 2007. 'Cross-cultural alliance-making and local resistance in Maluku during the revolt of Prince Nuku, c.1780-1810' [PhD dissertation, Leiden University].
- Zahari, A.M. 1977. *Sejarah dan adat fty Darul Butuni (Buton)*, Jilid II. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Kebudayaan (3 Jilid).
- Zaini-Lajoubert, Monique. 2008. *Karya lengkap Abdullah bin Muhammad al-Misri*. Jakarta: École française d'Extrême-Orient & Komunitas Bambu.

MENYINERGIKAN PENGAJARAN BAHASA ASING, PENGEMBANGAN BAHASA NASIONAL, DAN PEMERTAHANAN BAHASA DAERAH

Muhammad Amin Rasyid
(Universitas Negeri Makassar)

1. Pengantar

Selain dari kurang lebih 675 bahasa daerah yang tersebar di kepulauan Indonesia, bangsa Indonesia memiliki sebuah bahasa persatuan dan bahasa resmi negara, yakni Bahasa Indonesia. Kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tercantum dalam UUD 1945 Bab XV Pasal 36.

Keragaman bahasa yang ada di Indonesia semakin beragam dengan diberikannya ruang dan peluang bagi bahasa asing untuk diajarkan secara formal di sekolah dengan tujuannya masing-masing. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Pengembangan Bahasa Indonesia melalui penyerapan kata/istilah yang berasal dari bahasa – bahasa daerah diharapkan menjadikan peran Bahasa Indonesia sebagai perekat bangsa semakin mantap. Di sisi lain, bahasa –bahasa daerah pada umumnya memiliki pemertahanan hidup yang lemah sehingga mereka mengalami keterdesakan bahkan pergeseran penggunaan dalam interaksi sosial sehingga dikhawatirkan mereka akan punah. Tulisan ini mencoba merangkai keterkaitan pengajaran bahasa asing, pengembangan bahasa Indonesia, dan pemertahanan hidup bahasa daerah dalam sebuah bingkai hidup berdampingan secara saling menguatkan.

2. Pengajaran Bahasa Asing di Indonesia

Fungsi kependidikan bahasa di Indonesia dapat dikelompokkan kedalam (1) *fungsi kognitif* yakni untuk tujuan penalaran, (2) *fungsi integratif* yakni untuk tujuan sosialisasi agar dapat menjadi anggota masyarakat penutur asli bahasa yang dipelajari, (3) *fungsi kultural* yakni untuk tujuan memperdalam pengetahuan tentang kebudayaan, (4) *fungsi kecerdasan spiritual*, yakni untuk tujuan lebih mendekatkan diri kepada yang Maha Pencipta, dan (5) *fungsi instrumental*, yakni untuk dijadikan alat peraih kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, atau sebagai alat untuk mendapatkan pekerjaan, kemajuan dalam karir, dan keuntungan material

Sejarah telah mencatat bahwa jauh hari sebelum bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, pengajaran bahasa asing telah dilakukan di nusantara ini. Suhaib (1988) menyatakan bahwa bahasa Arab mulai memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat nusantara pada permulaan abad ke 12 bersamaan dengan masuknya agama Islam di nusantara ini.

Agama Islam adalah agama yang mengajarkan ketauhidan, keadilan, kasih sayang, kedamaian, dan tuntunan hidup untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, yang disampaikan dan dicontohkan oleh rasulullah Muhammad saw., mendapatkan tempat yang istimewa di hati masyarakat nusantara. Anak-anak kaum Muslimin diajar membaca Alquran, kitab suci orang Islam yang ditulis dalam bahasa Arab, mulai dari usia dini oleh orang tuanya atau oleh guru mengaji. Setelah merdeka, kebijakan untuk mengajarkan bahasa Arab tersebut dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia. Bahasa Arab diajarkan di madrasah (sekolah) di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia mulai dari tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah, aliah, bahkan sampai pada perguruan tinggi. Jones (1978) mencatat sekitar 2750 kosakata bahasa Arab yang telah diserap kedalam Bahasa Indonesia

Pada kenyataannya, bahasa Arab ini akan senantiasa memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kecerdasan spiritual kaum Muslimin Indonesia karena mulai dari menit-menit pertama kelahiran seorang bayi Muslim akan diperdengarkan azan di telinga kanannya, dan iqamat di telinga kirinya, sampai pada saat seorang Muslim yang mendekati sekarat akan dituntun untuk mengucapkan kalimat tauhid dalam bahasa Arab – *La ilaha illallah* (Tiada tuhan yang disembah selain Allah).

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia menyadari bahwa pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam untuk mengakselerasi pembangunan negara dan bangsa belum dapat secara maksimal dilakukan hanya dengan media bahasa Indonesia karena ilmu pengetahuan dan teknologi dunia sebagian besar tertuang dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, pemerintah menyadari pula bahwa bahasa Inggris harus diajarkan kepada siswa sekolah lanjutan. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 096/1967 tentang Fungsi dan Pengajaran Bahasa Inggris di Sekolah Lanjutan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Isi pokok keputusan menteri tersebut antara lain adalah bahwa (1) bahasa Inggris adalah bahasa asing pertama yang diajarkan di sekolah lanjutan, (2) tujuan pengajaran bahasa Inggris tersebut adalah mengembangkan kemampuan komunikatif siswa, dan (3) keterampilan berbahasa Inggris yang dikembangkan meliputi keterampilan membaca, menyimak, menulis, dan berbicara (Halim, 1980).

Era globalisasi dan pasar bebas semakin menjadikan masyarakat, baik masyarakat terdidik maupun masyarakat biasa, memiliki persepsi tentang pentingnya penguasaan bahasa Inggris tersebut untuk lebih maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun bangsa dan negara ini. Kepedulian banyak kalangan dalam memikirkan peranan bahasa Inggris dan hasil pengajarannya dalam pembangunan bangsa, dan dalam mempersiapkan bangsa Indonesia sebagai anggota masyarakat dunia yang mampu berkomunikasi mahir-aktif secara internasional, bersaing secara global, dan yang lebih penting lagi adalah berkolaborasi dengan bangsa-bangsa lain di dunia secara adil dan jujur dalam berbagai aspek kehidupan ditandai oleh: (1) pernyataan-pernyataan yang dimuat dalam media massa, dan yang diungkapkan dalam berbagai pertemuan ilmiah/seminar tentang pentingnya penguasaan bahasa Inggris untuk meraih prestasi keilmuan dan teknologi maju, (2) lontaran keritikan terhadap kurang berhasilnya pengajaran bahasa Inggris di tanah air dengan memosisikan guru sebagai sasaran empuk kritikan, (3) ungkapan rasa ketidakpuasan yang ditujukan kepada institusi yang mendidik dan mempersiapkan calon guru bahasa Inggris, dan (4) pertanyaan yang meminta jawaban konkret tentang pengajaran bahasa Inggris yang bagaimana yang memiliki peluang untuk berhasil dengan baik (Rasyid, 1998:5).

Pemerintah tidak tak responsif terhadap hal tersebut di atas. Berbagai upaya dan langkah yang ditempuh, seperti penyempurnaan kurikulum, memperbaharui metode pengajaran, memberi ruang dan peluang bagi bahasa Inggris untuk diajarkan pada sekolah dasar mulai dari kelas 4, bahkan dalam peraktek ada sekolah yang memulai dari kelas 1, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah, dan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru. Namun demikian, hasil yang dicapai belum memenuhi harapan. Pada hakekatnya, kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah tersebut tidak sepenuhnya mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan.

Kalau kita tinjau dari sudut pandang pengajaran bahasa Inggris itu sendiri, kita akan mengakui bahwa kebelumhasilan pengajaran bahasa Inggris di Indonesia disebabkan oleh belum terpenuhinya faktor-faktor penentu keberhasilan pengajarannya sebagaimana mestinya, yakni *belum sepadannya prinsip belajar-mengajar bahasa Inggris dengan kebijakan yang menentukan proses belajar-mengajarnya*.

Untuk berhasil dengan baik dalam proses belajar-mengajar bahasa Inggris (termasuk bahasa asing lainnya) di Indonesia, ada sejumlah prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan pengajaran bahasa itu, seperti berikut ini.

- a. Jumlah siswa dalam satu kelas harus kecil. Ini akan memberikan kesempatan kepada siswa secara individu untuk mempermahir dan menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas, yang sampai sekarang ruang kelas adalah tempat yang paling memungkinkan menjadi latar menggunakan bahasa Inggris.
- b. Frekuensi pertemuan harus tinggi/intensif. Untuk situasi sekarang ini, nampaknya hanya interaksi belajar-mengajar di kelas yang intensitasnya tinggi yang dapat mewartakan dan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Di luar kelas, kesempatan untuk menggunakan bahasa Inggris masih sangat terbatas.
- c. Tersedia pusat sumber belajar atau perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang menyiapkan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga mereka tertarik dan memungkinkan mereka belajar secara optimal.
- d. Siswa memiliki motivasi belajar bahasa Inggris yang tinggi.
- e. Penguasaan bahasa Indonesia siswa harus memfasilitasi pengajaran bahasa Inggris, dan
- f. Guru bahasa Inggris harus kompeten dan profesional, yakni mereka dapat berbahasa Inggris dengan baik, menguasai ilmu bahasa Inggris, menguasai prinsip-prinsip ilmu bahasa, berpengetahuan cukup tentang kebudayaan penutur asli bahasa Inggris, berpengetahuan umum yang luas, dan terampil dalam melaksanakan tugas sebagai motivator, fasilitator dan evaluator dalam proses belajar mengajar (Rasyid, 1992).

Di sisi lain, kebijakan yang menentukan proses belajar bahasa Inggris di Indonesia belum mendukung kemungkinan implementasi prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas, sebagaimana kenyataan yang dikemukakan berikut ini.

- a. Jumlah siswa dalam satu rombongan belajar di SMP dan SMA masih rata-rata di atas 30 orang (kelas besar). Kalau jumlah ini akan diperkecil, konsekuensi pembiayaannya terlalu besar yakni penyediaan ruang kelas dan guru bahasa Inggris yang lebih banyak.
- b. Frekuensi/intensitas pengajaran bahasa Inggris di SMP dan SMA masih rendah - sekitar 33 hari seluruhnya, yakni kalau jam pelajaran bahasa Inggris di SMP dan SMA dijumlahkan seluruhnya dalam waktu enam tahun. Kalau jam pelajaran bahasa Inggris di SMP dan SMA ditambah, hal itu akan mengurangi waktu mata pelajaran yang lain, yang pada hakekatnya mereka juga membutuhkan tambahan waktu, karena semuanya tidak kurang pentingnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Belum tersedianya pusat sumber belajar atau perpustakaan yang lengkap di SMP dan SMA. Besarnya dana yang dibutuhkan untuk pengadaan sebuah pusat belajar atau perpustakaan adalah kendala utama pemenuhan fasilitas pengajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolah itu.

- d. Sebagian besar siswa SMP dan SMA tidak memiliki sikap positif terhadap bahasa Inggris. Sebagian besar mereka menganggap pelajaran bahasa Inggris sebagai momok. Mereka tidak memiliki motivasi belajar yang tinggi.
- e. Penguasaan bahasa Indonesia siswa secara linguistis belum memfasilitasi pengajaran bahasa Inggris. Memang secara fungsional, mereka mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, tetapi mereka pada umumnya masih kurang memahami tentang bahasa Indonesia.
- f. Masih banyak guru bahasa Inggris yang belum kompeten dan profesional.

Gambaran di atas menunjukkan betapa luasnya kesenjangan yang ada di antara prinsip pengajaran bahasa Inggris dan kebijakan yang menentukan keberhasilan proses belajar-mengajarnya, sekaligus menjadi pemetaan masalah yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah lanjutan di Indonesia. Kalau Pemerintah Indonesia benar-benar bertekad untuk meningkatkan kualitas pengajaran bahasa Inggris untuk tujuan pembangunan bangsa, kebijakan yang menentukan keberhasilan proses belajar-mengajar bahasa Inggris harus ditangani dan dibenahi secara sistemik karena masalah-masalah tersebut terkait antara satu sama lain dan tidak saling mengecualikan. Penanganan yang tepat adalah penanganan yang holistik dan komprehensif, mulai dari tataran kebijakan sampai pada tataran teknis. Pengajaran bahasa asing tersebut diharapkan pula secara konkret memberikan sumbang dalam pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai bagian dari pembangunan bangsa.

3. Pengembangan Bahasa Indonesia

Dalam kedudukannya sebagai *bahasa nasional*, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai (1) lambang kebangsaan bangsa, (2) lambang identitas bangsa, (3) alat yang memungkinkan penyatuan berbagai-bagai suku bangsa di Indonesia dengan latar belakang budaya dan bahasa yang beragam ke dalam satu kesatuan kebangsaan Indonesia, dan (4) alat perhubungan vokal anatar daerah dan antarbudaya di Indonesia

Keempat fungsi di atas merikat batin dan kehidupan fisik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merasa menjadi satu karena memiliki simbol pemersatu – *bahasa Indonesia* - sebagai bangsa Indonesia yang sekaligus menjadi identitas tersendiri yang membedakan diri dari bangsa lain, dan simbol tersebut menjadi kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

Dalam kedudukannya sebagai *bahasa negara*, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai (1) bahasa resmi negara, (2) bahasa pengantar di dunia pendidikan, (3) alat penghubung di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerataan, dan (4) alat pengembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keempat fungsi di atas memperjelas bahwa melalui bahasa Indonesia, kita bangsa Indonesia tidak hanya sekadar merikat batin dan kehidupan fisik kita pada masa kini, tetapi juga semakin menguatkan untuk masa-masa yang akan datang. Melalui bahasa Indonesia, kita bangsa Indonesia menghasilkan bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia, yang akan mengisi kemerdekaan ini dengan kemampuan dan keterampilan dalam pembangunan bangsa seutuhnya.

Orang Indonesia harus mencintai bahasa nasionalnya dan memakainya dengan kebanggaan dan kesetiaan. Sikap bahasa seperti ini insya Allah akan membuat bangsa Indonesia berdiri tegak di dunia ini, yang dilanda arus globalisasi, dan tetap dapat mengatakan dengan bangga bahwa orang Indonesia adalah bangsa yang berdaulat, tuan di tanah airnya sendiri, yang menggunakan bahasa nasionalnya sendiri untuk semua keperluan modern. Masyarakat bahasa Indonesia harus mampu menunjukkan ketahanan budayanya. Melalui peningkatan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia diupayakan agar penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar serta dengan rasa bangga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan memantapkan kepribadian bangsa.

Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap kosa kata/istilah bahasa-bahasa daerah. Pengambilan kata/istilah bahasa daerah yang demikian itu memungkinkan budaya-budaya daerah yang diwadahi oleh kata/istilah bahasa daerah itu diangkat menjadi budaya Indonesia. Penyerapan kosa kata bahasa-bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia semakin perlu digiatkan karena memiliki pengaruh positif pada penguatan persatuan nasional, dan sekaligus menjadi bagian upaya pemeliharaan bahasa-bahasa daerah yang semakin melemah daya pemertahanannya dalam interaksi sosial.

Sejalan dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia, sangat diperlukan sebagai sumber kata dan ungkapan yang memuat konsep baru sekaligus menjadi pemodernan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyerap banyak kata/istilah yang berasal dari bahasa asing, khususnya yang berkaitan dengan ilmu, teknologi dan seni modern. Namun demikian, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional bertindak sangat hati-hati dalam menyerap kata/istilah bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, yakni kata/istilah bahasa asing yang sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah sebaiknya dihindari.

4. Pemertahanan Bahasa Daerah

Pemertahanan bahasa dimaksudkan bahwa jika dan bila warga masyarakat atau suatu etnik secara kolektif memutuskan untuk terus menggunakan dan mengembangkan bahasa mereka dalam ranah yang disepakati, baik ranah tinggi (agama, pendidikan, pekerjaan), maupun ranah rendah (rumah/keluarga, persahabatan), bahasa mereka dikatakan bertahan, dan kasusnya disebut pemertahanan bahasa.

Pemertahanan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa, bahasa Indonesia memiliki pemertahanan yang kuat dengan alasan, seperti yang tercantum dalam (1) Ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga (*Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia*) pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, dan (2) UUD 1945, Bab XV, pasal 36 yang menyatakan bahwa *bahasa Indonesia adalah bahasa negara*. Dengan demikian selama Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap tegak, selama itu pula bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa persatuan dan bahasa negara yang akan terbina dan terpelihara terus dan akan mengalami pengembangan sebagaimana tuntutan yang dihadapi.

Lain halnya dengan bahasa-bahasa daerah yang jumlahnya sekitar 675 buah, mereka dari hari ke hari mengalami kemerosotan dalam pemakaiannya yang ditandai dengan semakin berkurangnya penutur usia muda bahasa tersebut karena mereka cenderung menggunakan bahasa yang dianggap lebih berprestise –bahasa Indonesia. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka lambat laun banyak bahasa daerah yang akan mengalami kepunahan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya penangkalan. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian bahasa daerah untuk konteks kebudayaan nasional, bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sebagai muatan lokal di sekolah sekolah dasar dan menengah. Implikasinya adalah bahasa daerah digunakan sebagai alternatif bahasa pengantar pendidikan mengiringi bahasa Indonesia. Penekanan diberikan pada aspek afektif agar siswa memiliki sikap positif dan mencintai bahasa daerahnya. Oleh karena itu, pengajaran bahasa daerah seyogyanya tidak menjurus ke simbolisme belaka, seperti menulis aksara daerah- walaupun hal ini memang tidak boleh ditinggalkan.

Dalam upaya pemertahanan bahasa-bahasa daerah ini, media massa (cetak dan elektronik) memegang peranan penting. Namun, kita harus menyadari bahwa pengajaran bahasa daerah di sekolah dan upaya media massa belum mampu menjamin pemertahanan bahasa daerah sebagaimana yang diharapkan. Kita masih membutuhkan upaya yang lebih jitu.

Upaya yang lebih jitu dan **mutlak** dilakukan dalam pemertahanan bahasa-bahasa daerah adalah **kecintaan dan kesetiaan** penuturnya menggunakan bahasa daerahnya terutama sekali dalam ranah rumah/keluarga dan persahabatan. Mereka **harus selalu** berbicara dalam bahasa daerah kepada anggota keluarganya, tetangganya dan sahabatnya yang seetnis setiap saat di manapun mereka bertemu. Mereka harus menyadari bahwa hidup atau matinya bahasa mereka bergantung pada mereka sendiri, yakni bergantung pada vitalitas etnolinguistik mereka. Menurut pengamatan penulis, pasar tradisional di ibu kota Kabupaten di pulau Sulawesi mewadahi penggunaan bahasa Daerah secara luas. Para penjual dan pembeli masih setia menggunakan bahasa Daerah.

5. Dalil Sociolinguistik Sebagai Pemilih Fungsi dan Penggunaan

Pengajaran bahasa asing di Indonesia hendaknya tidak dimaknai untuk mengecilkan peran bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah dalam segala aspek interaksi bahasa, tetapi diharapkan memberikan sumbangan positif dalam pengembangan bahasa di tanah air dan upaya pengakselerasian pemerolehan ilmu dan teknologi. Bahasa asing tetap menjadi bahasa asing, bukan bahasa kedua di Indonesia. Kata/istilah yang diserap bahasa Indonesia dari bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, hendaknya menjadi pengembangan bahasa-bahasa daerah juga.

Bahasa-bahasa daerah dengan segala upaya pemertahanannya tidak boleh memosisikan bahasa Indonesia sebagai pesaing dan pemenang, tetapi dijadikan sebagai wadah pengembangan. Biarlah hubungan bahasa asing, bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa daerah dikembangkan ke arah bagi tugas yang lengkap-melengkapi, dan dalam penggunaannya, dalil sociolinguistik seyogyanya diterapkan yakni, *who says what to whom and why, where, when, and how*. Dalil sociolinguistik ini memberikan ruang kepada semua bahasa untuk digunakan secara damai, yakni selain bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan pada waktu, tempat dan kondisi yang sesuai dengan fungsinya. Penggunaan bahasa seperti inilah yang disebut penggunaan bahasa bebas-preferensi, terlepas dari berapa pun jumlah bahasa yang dikuasai secara mahir-aktif oleh para penutur. Ini berarti pula bahwa peluang untuk menyinergikan pengajaran bahasa asing, pengembangan bahasa Indonesia dan pemertahanan bahasa daerah tetap terbuka lebar.

6. Penutup

Secara konseptual hubungan antara bahasa Indonesia, bahasa asing, dan bahasa-bahasa daerah yang didasarkan pada bagi tugas yang *lengkap-melengkapi*, dan dalam penggunaan *bebas-preferensi* dengan menggunakan *dalil sociolinguistik* mungkin tidak terlalu sulit untuk dituangkan. Tetapi, implikasinya dalam pengajaran bahasa di sekolah-sekolah akan semakin menghadapi tantangan yang lebih hebat. Pada era otonomi daerah sekarang ini, kita membutuhkan pemimpin yang memiliki visi kebahasaan dan kebudayaan; pemimpin

yang mampu mengartikulasikan visi tersebut kepada masyarakat; pemimpin yang mampu mentransfer visi tersebut ke dalam tindakan konstruktif untuk tujuan pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial yang lebih besar.

Daftar Pustaka

- Bawa, I Wayan. 2005. 'Bahasa Indonesia Perekat Bangsa?' dalam *Linguistik Indonesia*. Februari 2005. Tahun ke 23. No.1.
- Gunarwan, Asim. 2006. 'Kasus-kasus pergeseran Bahasa Daerah: Akibat Persaingan dengan Bahasa Indonesia?' dalam *Linguistik Indonesia*. Februari 2006. Tahun ke 24. No.1.
- Halim, Amran (ed.). 1980. *Politik Bahasa Nasional 2*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hymes, D. 1962. The ethnography of Speaking. In Gladwin and Sturtevant (eds.) *Anthropological and Human Behaviour*. Anthropological Society of Washington, Washington.
- Nurkamto, Joko. 'Problema Pengajaran Bahasa Inggris di Indonesia' dalam *Linguistik Indonesia*. Agustus 2003. Tahun ke 21. No.2.
- Rasyid, Muhammad Amin. 1992. *Developing Communicative Competence through Topik of Interest and Learning Styles Using the Integrated Skills Approach*. (Unpublished Dissertation). Universitas Hasanuddin.
- , 1998. Kesepadanan Prinsip Pengajaran Bahasa Inggris dengan Kebijakan yang Menentukan Proses Belajar Mengajarnya. (Pidato Pengukuhan dalam Penerimaan Jabtan Guru Besar pada FPBS IKIP Ujung Pandang).
- Tampubolon, Daulat P. 2001. 'Peran Bahasa dalam Pembangunan Bangsa' dalam *Linguistik Indonesia*. Februari 2001. Tahun ke 19 No. 1.

UPAYA PELESTARIAN BAHASA DAERAH DI SULAWESI TENGGARA MELALUI KAJIAN KEKERABATAN ANTARA BAHASA-BAHASA BUTON, MUNA, DAN TOLAKI¹

Ikhwan M. Said²
(Universitas Hasanuddin)

1. Pengantar

Terima kasih kepada panitia penyelenggara Kongres Internasional Bahasa-bahasa Daerah Sulawesi Tenggara atas kesempatan dan kepercayaannya kepada penulis melalui penerimaan abstrak yang telah diajukan. Judul makalah di atas sengaja penulis utarakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan topik-topik yang disediakan panitia pelaksana kongres. Perumusan judul seperti demikian didasarkan pada hasil penelitian penulis beberapa waktu lalu bersama beberapa mahasiswa peserta mata kuliah dialektologi sebagai bagian praktek lapangan mereka. Salah satu yang dikajinya adalah mengenai hubungan kekerabatan di antara ketiga bahasa tersebut, yaitu Buton (Wanci), Muna, dan Tolaki. Penelitian tersebut menggunakan teknik leksikostatistik. Hasilnya bukan merupakan sesuatu yang luar biasa, namun tetap dapat menjadi inspirasi lebih lanjut bagi penulis karena penelitian tersebut di bawah bimbingan langsung penulis dengan menggunakan metode dan teknik yang sudah sangat standar dalam penelitian dialektologi. Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya, penulis tidak membahas secara mendalam mengenai hasil penelitian tersebut, tetapi lebih mengedepankan hasil tinjauan dan pandangan penulis terhadap peran ketiga bahasa itu dalam upaya melestarikan bahasa-bahasa daerah di Sulawesi Tenggara pada umumnya dan bahasa-bahasa Buton, Muna, serta Tolaki pada khususnya.

2. Pendahuluan

Bahasa daerah di Indonesia sangat banyak jumlahnya, yakni 726 bahasa daerah (Sugono, 2005:8). Jumlah tersebut belum termasuk bahasa-bahasa yang ada di Papua dan Irian Jaya. Konsekuensi lebih lanjut dari banyaknya jumlah itu dapat menjadikan situasi kebahasaan di Indonesia menjadi kompleks dan sejak lama hal itu telah disadari oleh para ahli bahasa. Penelitian dan pengkajian telah banyak dilakukan, baik oleh peneliti asing maupun peneliti lokal. Namun, persoalan yang dihadapi tidak kunjung berakhir, ada saja persoalan baru bermunculan terus. Misalnya, bagaimana keberlanjutan dan masa depan bahasa-bahasa yang tidak memiliki tradisi tulis (seperti halnya kebanyakan bahasa di Sulawesi Tenggara ini)? Bagaimana cara melestarikan bahasa daerahnya bagi masyarakat yang melakukan kawin campur (etnik)? Bagaimana pula keberlangsungan suatu bahasa (daerah) di zaman teknologi informasi seperti saat ini? Sederet pertanyaan masih dapat dimunculkan.

Penulis setuju dengan pernyataan Alwasilah bahwa angka kematian bahasa lebih tinggi daripada angka kelahiran bahasa. Dapat saja jumlah bahasa yang telah dikemukakan di atas menjadi berkurang pada beberapa dekade kemudian mengingat sebagian di antara bahasa daerah tersebut hanya digunakan oleh jumlah penutur yang dapat dihitung dengan jari. Sementara untuk melahirkan sebuah bahasa daerah yang baru sangatlah sulit, apalagi adanya desakan penggunaan Bahasa Indonesia atau bahkan bahasa asing di beberapa wilayah tertentu.

Dibandingkan dengan beberapa bahasa daerah yang lain, bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara (Sultra) umumnya dan bahasa-bahasa Buton, Muna, dan Tolaki khususnya memiliki perbedaan dalam dua hal, yaitu jumlah penutur dan sistem tulisan/aksara. Dari segi jumlah penutur, hampir semua bahasa di sini (Sultra) memiliki jumlah penutur kurang dari seratus ribu, kecuali bahasa Muna yang berpenutur di atas dua ratus ribu (Parera, 1991:188-191), sedangkan sejumlah bahasa daerah yang lain ada yang berpenutur puluhan juta seperti bahasa Jawa dan Sunda dan bahasa-bahasa berpenutur jutaan seperti bahasa Bugis, Batak, Madura, Aceh, dan Banjar. Akan tetapi ada pula bahasa-bahasa yang berpenutur sangat minim (kurang dari seratus penutur seperti Bahasa Maku'a di NTT).³ Semua bahasa di Sultra ini tidak memiliki sistem aksara/tulisan seperti halnya Bahasa Bugis dan Makassar dengan aksara *Lontaraqnya* atau Bahasa Jawa dengan huruf Kawinya. Baik dari segi jumlah penuturnya maupun sistem aksaranya dapat menimbulkan kekhawatiran kita terhadap keberadaan bahasa-bahasa di Sultra ini. Karena itu penulis mencoba memanfaatkan hasil penelitian kecil tersebut untuk sedikit ikut berbicara dalam forum ini.

3. Sekilas Hasil Penelitian

Disadari oleh penulis bahwa metode leksikostatistik bukanlah satu-satunya metode yang dapat diterapkan dalam penelitian dialektologi karena masih ada tiga metode lainnya, yakni mata rantai pemahaman

¹ Makalah disajikan dalam Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah di Sulawesi Tenggara, Baubau: 18-21 Juli 2010.

² Dosen Fakultas Sastra / Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Makassar.

³ Sensus penduduk tidak dapat dijadikan tolak ukur penetapan jumlah penutur suatu bahasa.

(*mutual intelligibility*), isogloss, dan dialektometri (lihat Lauder, 2002:38). Setiap metode memiliki teknik dan kelebihan serta kekurangan masing-masing.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen daftar 200 kosakata dari Swadesh dan memilih tiga orang informan untuk setiap bahasa. Semua syarat informan yang diajukan Samarin telah dipenuhi, kecuali dalam hal tidak/belum meninggalkan tempat tinggal yang terlalu lama karena rata-rata informan yang terpilih adalah mereka yang sudah agak lama merantau ke Makassar. Namun, mereka masih aktif menggunakan bahasa daerahnya dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-harinya. Hal yang menarik berkaitan dengan informan adalah masih terdapat dua informan yang sama sekali tak mengerti Bahasa Indonesia sehingga kami harus menggunakan mahasiswa sebagai penerjemahnya.

Persentase kekerabatan antara keiga bahasa tersebut adalah:

BUTON		
39%	MUNA	
42%	47%	TOLAKI

Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan antara Bahasa Buton dan Bahasa Muna lebih kecil jika dibandingkan dengan hubungan kekerabatan antara Bahasa Buton dan Bahasa Tolaki, yaitu 39% : 42% atau jumlah kata kerabatnya masing-masing 78 : 84 buah kosakata dari 200 kosakata instrument. Kemudian, hubungan kekerabatan antara Bahasa Muna dan Bahasa Tolaki lebih besar lagi jika dibandingkan dengan hubungan antara Bahasa Muna dan Bahasa Buton, yakni 47% : 39% atau dengan jumlah kosakata kerabat 96 : 78 dari 200 kosakata instrumen. Hal ini mengindikasikan bahwa Bahasa Tolaki memiliki hubungan yang lebih dekat, baik dengan Bahasa Buton maupun dengan Bahasa Muna, sedangkan hubungan antara Bahasa Buton dan Bahasa Muna sudah agak lebih jauh.

Sebagai tambahan dapat dijelaskan bahwa jarak perbedaan antara bahasa-bahasa Buton dengan Muna, Buton, dengan Tolaki, dan Muna dengan Tolaki tidak terlalu signifikan, artinya tidak ada yang terlalu menonjol jaraknya seperti halnya ditemukan penulis ketika membandingkan hubungan kekerabatan antara Bahasa Bima, Bugis, dan Makassar. Hasilnya: Bima – Bugis = 37%, Bima – Makassar = 29%, dan Makassar – Bugis = 40% (Said, 1997:38). Jarak kedekatan hubungan kekerabatan antara Bahasa Buton, Muna, dan Tolaki hampir selaras dengan jarak hubungan kekerabatan bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara terhadap dialeknya masing-masing. Menurut Sabir (2008) bahwa di Sulawesi Tenggara terdapat 22 etnis asli berdasarkan perbedaan bahasa yang digunakan (*ethnolinguistic groups*) dan sejumlah bahasa di antaranya masih memiliki sejumlah dialek. Persentase kekerabatan antara bahasa dengan dialeknya masing-masing rata-rata berkisar antara 60-80% (ada beberapa yang di atas 80%). Misalnya, Muna – Pancana = 71%, Muna – Ciacia = 62%, Tolaki – Waru = 78%, Tolaki – Kodeoha dan Rahambuu = 70%, Buton – Ciacia = 61%, Buton – Masiri dan Lantoi = 60%.

Mengacu kepada klasifikasi Morris Swadesh, tampaknya ketiga bahasa tersebut (Buton, Muna, dan Tolaki) masih berada dalam satu kelompok keluarga bahasa (*family*), yakni kelompok yang memiliki tingkat kekerabatan antara 81-36 persen. Hasil ini agak berbeda dibandingkan dengan yang pernah diperoleh Hasrudin, dkk. (1990) yang mengatakan bahwa persentase tingkat kekerabatan antara Bahasa Buton dan Muna sebesar 58% (misalnya). Penulis beranggapan bahwa perbedaan ini adalah sesuatu yang wajar karena di samping perbedaan waktu pengumpulan data juga adanya perbedaan tempat pengambilan data. Hasrudin, dkk. memilih tempat pengumpulan data di Raha dan Kabupaten Buton serta dilakukan pada awal tahun 1990. Sementara data ini diperoleh di luar kedua lokasi tersebut (Makassar) dan waktu pelaksanaannya adalah awal tahun 2010. Dengan demikian, hasil yang diperoleh pun pastilah berbeda. Akan tetapi, yang menjadi persoalan di sini bukanlah terletak pada metode pengumpulan datanya, melainkan lebih kepada bagaimana hasil penelitian kecil ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan bahasa-bahasa yang menjadi objek kajian (Bahasa Buton, Muna, dan Tolaki). Sebab dengan melihat adanya perubahan dan perbedaan seperti itu dapat membukakan mata kita untuk lebih memperhatikan atau paling tidak ada rasa kepedulian kita terhadap masalah kebahasaan seperti itu.

4. Situasi dan Kondisi Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara

Situasi dan kondisi yang dimaksudkan pada subtopik ini adalah keadaan jumlah penuturnya, prestise sosiokultural, dukungan pemerintah terhadap pemakaian bahasa daerahnya dan lain-lain. Secara kondisional, Krauss (1992) mengklasifikasikan bahasa-bahasa yang ada di dunia menjadi tiga kelompok, antara lain (a) *Moribund*, yaitu bahasa yang tidak dikuasai dan tidak digunakan oleh anak-anak dari penutur suatu bahasa, (b) *Endangered*, yaitu bahasa yang dalam satu atau dua generasi berikutnya tidak lagi dikuasai dan juga tidak dipelajari oleh keturunan penutur suatu bahasa, dan (c) *Safe* 'aman', yaitu bahasa yang termasuk kategori aman.

Seperti telah diutarakan sebelumnya bahwa dari segi jumlah penutur bahasa-bahasa daerah yang ada di Sultra ini rata-rata di bawah seratus ribu penutur, kecuali Bahasa Muna. Dikaitkan dengan klasifikasi Krauss di atas, bahasa-bahasa di Sultra termasuk dalam kategori yang mana (*moribund, endangered, atau safe*)? Di bagian lain dalam sumber yang sama (Krauss, 1992) memprediksikan bahwa kira-kira separuh dari ±6.000 bahasa-bahasa di dunia (data Grimes, 1988) termasuk kategori *moribund* seperti halnya bahasa-bahasa di Alaska dan

Soviet Utara, sebagian di Amerika Serikat dan Kanada, juga di Aillerika, ± 2.400 bahasa masuk kategori *endangered* seperti halnya bahasa-bahasa di Papua Nugini, Nigeria, India, Australia, Kamerun, dan termasuk bahasa-bahasa daerah di Indonesia, sedangkan bahasa yang tergolong *safe* 'aman' ada sekitar 600 bahasa dengan didasari dua alasan, yaitu berfungsi sebagai bahasa resmi (minimal bagi wilayah pemakaiannya) dan berpenutur lebih dari seratus ribu.

Melihat jumlah penuturnya yang rata-rata kurang dari seratus ribu, maka dapat dikatakan bahwa bahasa-bahasa di Sultra termasuk dalam kategori *endangered*. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Krauss bahwa bahasa *endangered* umumnya berkembang di negara-negara multibahasa, seperti di Indonesia (termasuk di Sultra) ini. Lebih lanjut Krauss mengungkapkan bahwa timbulnya bahasa *endangered* agak mirip dengan fenomena *moribund*, yaitu bahasa daerah pelan-pelan terdesak keberadaannya karena diberlakukannya kebijakan pemakaian bahasa nasional menyeluruh pada aspek perikehidupan masyarakat (meskipun tak ada anjuran langsung). Situasinya di Indonesia umumnya dan Sultra khususnya berbeda dengan kasus kebijakan yang terjadi di Amerika Serikat karena adanya penggalakan kampanye antipemakaian dwibahasa oleh Presiden Theodore Rosevelt (misalnya). Kasus yang terjadi di Indonesia seolah-olah tanpa disadari namun pasti. Pemakai bahasa daerah menjadi berkurang jumlahnya karena generasi penerusnya tidak lagi menguasai dan mempelajari bahasa ibu mereka.

Dilihat dari aspek prestise sosiokulturalnya, sikap para penutur bahasa-bahasa di Sultra tidak jauh berbeda dengan sikap penutur bahasa daerah lain selain penutur bahasa Jawa dan atau Batak. Mereka tidak begitu percaya diri dan kurang berbangga dengan bahasa daerahnya sendiri, terutama ketika keluar dari wilayah pemakaian bahasanya atau pada situasi setingkat nasional. Lain halnya dengan penutur Bahasa Jawa yang begitu bangga dengan kepemilikan bahasa daerahnya serta adanya berbagai upaya pelestarian melalui berbagai bentuk aktivitas dan kegiatan. Paling tidak hal semacam ini cukup berpengaruh terhadap keberlangsungan bahasa daerahnya masing-masing. Dalam hal dukungan pemerintah terhadap pemakaian bahasa daerah hampir merata di seluruh Indonesia, bahwasanya pemerintah telah mendukung dan sejumlah daerah pun telah mengaturnya dengan menerbitkan perda tentang penggunaan bahasa daerah. Hanya saja kesadaran masyarakat pemakainya yang belum optimal. Pada skala nasional pun (misalnya), masyarakat kita lebih bangga menggunakan istilah-istilah asing daripada istilah bahasa Indonesia.

Hingga kini belum didapati informasi mengenai bahasa daerah di Sultra atau di Indonesia yang sudah pasti tergolong *moribund*, akan tetapi peluang ke arah itu tak dapat dihindarkan jika tidak ada upaya-upaya serius yang dilakukan untuk mencegahnya agar bahasa daerah kita dapat tetap lestari. Sejauh pengamatan penulis, ada beberapa gejala yang mengindikasikan kearah kondisi seperti itu. *Pertama*, sejumlah besar di antara semua bahasa daerah di Indonesia (juga di Sultra) memiliki penutur asli yang sangat minim dan secara geografis mereka berada di tempat-tempat terpencil. Sebetulnya keterpencilan tempat tinggal mereka tidak begitu berpengaruh terhadap proses penghilangan suatu bahasa daerah, namun karena adanya proses mobilisasi, urbanisasi, transmigrasi, pengaruh era teknologi dan informasi dapat menjadi dampak buruk bagi keberlanjutan kehidupan sebuah bahasa daerah.

Kedua, bahasa-bahasa di Sultra tidak memiliki tradisi bahasa tulis dan tidak memiliki tradisi berkomunikasi dalam bentuk tertulis. Sejarah dan nilai-nilai budayanya hanya terekam melalui komunikasi lain sehingga pemahaman dan apresiasi terhadap bahasa mereka sendiri bervariasi dari generasi ke generasi dan dari orang ke orang. Kondisi seperti ini merupakan salah satu hal yang menjadikan anak-anak kita sekarang kurang atau bahkan tidak memiliki kebanggaan terhadap kultur dan bahasa (daerahnya). Ketiadaan bahasa tulis karena tidak adanya aksara tersendiri dalam bahasa mereka. Tradisi tulis-menulis berhubungan erat dengan keaksaraan. *Ketiga*, adanya dominasi Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dapat menyebabkan semakin terancamnya bahasa daerah jika saja tanpa upaya pembendungannya dan pemertahanan terhadap bahasa daerah itu sendiri. Hampir semua jenis komunikasi, baik formal maupun nonformal (terlebih komunikasi massa dan komunikasi melalui audiovisual) menggunakan bahasa Indonesia (Nasional).

Mencermati berbagai situasi dan kondisi kebahasaan di Sultra di atas dan ditambah lagi dengan sekelumit hasil penelitian, maka dirasa perlu ada upaya-upaya kongkret yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak berkompeten (pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta lembaga terkait seperti Balai Bahasa setempat) guna melestarikan bahasa-bahasa daerah di wilayah Sultra tersebut.

5. Upaya Pelestarian Bahasa-Bahasa Daerah Sultra

Dalam era globalisasi dan informasi seperti sekarang bahasa daerah telah terkontak dengan bahasa-bahasa asing dan tidak terkecuali dengan Bahasa Indonesia dan sesama bahasa daerah. Dari situasi seperti inilah bahasa daerah diharapkan dapat memainkan peranan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, juga tak terlepas kaitannya dengan upaya mengantisipasi dampak negatif era globalisasi.

Berbicara tentang upaya pelestarian bahasa-bahasa daerah di Indonesia sepatutnya kita berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Nasional melalui Pusat Bahasa (Jakarta) yang hingga kini masih tetap getol memenuhi keinginan bangsa seperti itu. Selama ini, Pusat Bahasa, terutama melalui kantor-kantor cabang dan UPT yang tersebar di berbagai daerah aktif melakukan penginventarisasian, penelitian, dan pengkajian terhadap

bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Bahkan dalam dekade terakhir ini bermunculan satu per satu UPT Balai Bahasa, termasuk di Sultra ini sendiri. Keberadaan lembaga ini menjadi peluang besar bagi pengembangan bahasa daerah di sekitarnya hingga upaya pelestariannya tetap dapat dipertahankan. Namun, kita tak boleh terlena dengan adanya suatu peluang seperti itu sehingga kita melupakan adanya tantangan yang muncul di baliknya. Kita pun ikut berterima kasih kepada kritikan Sudaryanto (1991) terhadap Pusat Bahasa yang lebih menonjolkan dan mengutamakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia ketimbang bahasa-bahasa daerah. Pihak Pusat Bahasa cukup peka juga atas kritikan tersebut sehingga terbaliklah keadaan kini perhatian mereka lebih besar kepada bahasa daerah daripada bahasa Indonesia.

Sebagai hasil pengamatan dan perenungan sesaat setelah mencoba membeberkan beberapa hal seperti di atas, berikut ini penulis mengajukan usaha dan upaya kongkret yang perlu dilakukan guna pelestarian bahasa-bahasa daerah di Sultra.

a. Balai Penelitian Bahasa Sulawesi Tenggara (UPT)

Pemberian peluang yang lebih besar kepada Balai Penelitian Bahasa setempat (Sultra) sebagai perpanjangan tangan dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta pemaksimalan fungsinya, terutama dalam hal pembinaan sikap positif terhadap bahasa daerah, peningkatan mutu pemakaian daerah, serta pengembangan bahasa daerah berupa pembakuan ejaan, penyusunan kamusnya, dan pembakuan tata bahasanya merupakan upaya terpenting untuk tetap melestarikan bahasa-bahasa daerah yang ada dalam wilayah kerjanya atau bahasa daerah di sekitarnya.

Pembinaan sikap positif terhadap bahasa daerah dan peningkatan mutu pemakaian bahasa daerah perlu direncanakan dan diupayakan melalui berbagai cara seperti penyuluhan bahasa daerah, penerbitan buku-buku pelajaran bahasa daerah, atau penerbitan media-media berbahasa daerah. Untuk mencapai dan mewujudkan hal demikian, pihak UPT Balai Penelitian Bahasa dapat mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai organisasi profesi kebahasaan seperti Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI), Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (Hiski), Masyarakat Pernaskahan dan Kesusastraan (Manasa), atau dengan perguruan tinggi.

Sebagai tambahan, pihak UPT Balai Penelitian Bahasa Sultra juga perlu berupaya merencanakan dan menyusun serta merumuskan aksara dari tiap-tiap bahasa daerah, terutama bagi bahasa yang berpenutur agak banyak seperti bahasa Muna, Buton, atau Tolaki.

b. Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pemerintah Provinsi Sultra dan pemerintah kabupaten/kota se-Sultra patut meniru langkah yang ditempuh Pemprov Sulsel yang telah bekerja sama dengan Jurusan Sastra Daerah (Bugis dan Makassar) Universitas Hasanuddin. Melalui *MoU*-nya tersebut, sudah tahun kedua mereka menyelenggarakan ikatan dinas bagi putra/putri daerah kabupaten/kota dalam bentuk Pendidikan Sekolah Guru Bahasa Daerah (PSGBD). Setelah selesai nantinya, mereka (alumni) langsung diangkat sebagai PNS (guru bahasa daerah) bagi sekolah-sekolah dasar dan sekolah lanjutan di daerah/kota yang mengutusnya. Animo masyarakat terhadap program ini sangat bagus yang ditandai dengan banyaknya peminat. Untuk itu, pihak pemerintahan (provinsi dan kabupaten/kota) harus menyediakan lapangan pekerjaan dan siap menampung para alumnusnya. Jika hal ini terpenuhi, motivasi masyarakat terutama generasi muda untuk mempelajari dan mengajarkan bahasa daerah dapat meningkat terus.

Pada dasarnya, *political will* dari pemerintah pusat sudah ada dan pemerintah daerah juga (barangkali), tetapi samar-samar. Sampai saat ini langkah-langkah serius ke arah itu belum ada, kecuali dalam bentuk-bentuk retorika politis semata. Sepertinya kebijakan kebudayaan, walaupun ada, sama halnya dengan kebijakan-kebijakan yang ada di bidang politik dan ekonomi yang masih *sentralisasi*. Hak-hak dan otonomi daerah masih selalu dinomorduakan, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan tentang bahasa dan budaya daerah. Karena itu, upaya yang dapat ditempuh berupa pembentukan semacam *multilinguals program* yang terdiri atas para ahli bahasa, para ahli sejarah lokal, ahli budaya, dan ahli-ahli sastra atau ahli lainnya.

c. Masyarakat (pemakai Bahasa)

Hal utama dan terpenting bagi masyarakat pengguna bahasa daerah untuk melestarikan bahasanya adalah menumbuhkembangkan rasa percaya diri (*self image*) yang kian hari semakin pudar (gejala umum pada hampir semua penutur di luar bahasa Jawa). Manakala hal ini terwujud, kemungkinan faktor-faktor lain ikut berpengaruh terhadap pertumbuhan bahasanya. Seyogyanya setiap pemakai bahasa daerah untuk tetap memelihara bahasanya dengan cara minimal menggunakannya dalam berbagai kesempatan, termasuk peristiwa-peristiwa penting seperti kongres bahasa daerah yang sedang dilangsungkan ini. Idealnya penelitian terhadap bahasa-bahasa daerah bukan hanya menjadi beban dan tanggung jawab para ahli bahasa melainkan seluruh lapisan masyarakat pemilik bahasa yang bersangkutan. Satu hal diusulkan pada kesempatan ini bahwa masyarakat Sultra perlu berupaya memberdayakan bahasa daerahnya dalam bentuk

mendongeng atau bercerita yang dapat berfungsi untuk membangun kembali tradisi lean yang tergesur oleh media elektronik. Upaya seperti dirasa perlu terutama bagi bahasa-bahasa yang tidak memiliki aksara.

6. Penutup/Simpulan

Salah satu masalah kebahasaan yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius dan sungguh-sungguh dari semua pihak adalah bahasa daerah. Bangsa Indonesia umumnya, dan Provinsi Sultra khususnya memiliki beraneka bahasa daerah yang harus dipelihara, dijaga, dan dilestarikan sehingga tidak akan punah dan musnah. Pengupayaan kosakata bahasa daerah sebagai sumber pungutan pengembangan kosakata Bahasa Indonesia perlu diperhatikan, terutama kosakata yang berkenaan dengan istilah budaya dan seni.

Banyak kalangan yang menganggap bahwa era globalisasi seperti sekarang ini merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup bahasa daerah. Pandangan yang demikian tidak perlu terlalu dikhawatirkan, justru sebaliknya masyarakat Sultra dapat menjadikan era globalisasi sebagai pendorong untuk memperlancar dan memperkokoh kedudukan dan fungsi bahasa daerahnya, sehingga jati diri dan kepribadian daerah kita akan tetap terpelihara. Hal ini akan berkonsekuensi lebih lanjut kepada pemertahanan jati diri bangsa sebagaimana diinginkan masyarakat Indonesia. Agar khazanah intelektual dan kultural daerah Sultra bisa dilestarikan, maka bahasa-bahasa daerah sebagai alat ekspresi utamanya perlu mendapatkan perhatian khusus, baik dari pihak pemerintah/swasta, akademisi, maupun masyarakat pengguna bahasa yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Fernandez, Inyo Yos. 2005. "Pengelompokan Mikro dan Makro dalam Kajian Linguistik Austronesia secara Diakronis".
- Lauder, Multamia RMT. 2002. "Reevaluasi Konsep Pemilah Bahasa dan Dialek untuk Bahasa Nusantara" Dimuat dalam Jurnal Makara, Sosial Humaniora Vol. 6 No. 1, hal 37-44, Juni. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Keraf, Gorys. 2001. *Linguistik Bandingan Historis. Cet. III*. PT Gramedia, Jakarta
- Krauss, Michael. 1992. "The World's Languages in Crisis." *Language* Vol.68 No. 1, p.4-10.
- Mantasiah R. 2007. "Sintaksis Bahasa Kodeoha: Suatu Kajian Transformasi Generatif" (Disertasi). Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Parera, Jos Daniel. 1991. *Kajian Umum Linguistik Historis Kompartif dan Tipologi Struktural*. Erlangga, Jakarta.
- Poedjosoedarmo, Gloria, R.. 1996. *Linguistik Historis: Sebuah Pengantar yang Memusatkan Perhatian kepada Bahasa-bahasa Austronesia*. Universiti Brunei Darussalam, Brunei.
- Said, Ikhwan M. 1997. "Kajian Kekerabatan Bahasa Bima, Makassar, dan Bugis: Suatu Analisis Leksikostatistik". Laporan Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sudaryanto. 1991. "Bahasa Jawa: Prospeknya dalam Tegangan antara Pesimisme dan Optimisme" dalam Sudaryanto (Ed). *Prosiding Kongres Bahasa Jawa I 1991. Harapan Masa*, Surakarta.
- Sugono, Dendy. 2005. "Perencanaan Bahasa di Indonesia dalam Era Globalisasi." (Makalah disajikan dalam Persidangan Linguistik Asean III di Jakarta, 28-30 November 2005.
- Tambunan. 2006. "Rekonstruksi Proto Bahasa Kulisusu, Wawonii, dan Morenene di Sulawesi Tenggara" (Disertasi). Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar
<http://id.wikipedia.org>. (Sabir, 2008)

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Komisi A
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 20 Juli 2010, 13.00—14.30 wita
Judul Makalah	: Upaya Pelestarian Bahasa Daerah di Sulawesi Tenggara Melalui Kajian Kekerabatan Antara Bahasa-Bahasa Buton, Muna, Dan Tolaki
Penyaji/Pembicara	: Dr. Ikhwan M. Said, M.Hum.
Pemandu	: Asrif, S.Pd., M.Hum.
Pencatat	: Rahmawati, S.S.
Jumlah Peserta	: 40 orang

TANYA JAWAB

Abdul Hadi W.M. (Universitas Paramadina)

Pertanyaan/Saran

Dalam upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah masyarakat harus ditumbuhkan rasa percaya diri terhadap bahasa daerahnya. Kepercayaan diri itu dapat ditunjukkan melalui penggunaan bahasa daerahnya di mana pun ia berada dan dalam kondisi apapun sepanjang itu lawan tutur adalah berasal dari daerah yang sama. Kecenderungan beberapa penutur bahasa daerah hanya menggunakan bahasa daerahnya jika berada di daerahnya sendiri. Kalau sudah berada di daerah lain, misalnya daerah perkotaan, identitas kedaerahan itu akan hilang oleh heterogenitas masyarakat perkotaan yang cenderung menggunakan Bahasa Indonesia walaupun sudah berhadapan dengan lawan bicara dari daerah yang sama. Di sisi lain, ada daerah yang sangat percaya diri dengan bahasa daerahnya sehingga kemana pun ia berada identitas tersebut akan selalu dibawa. Masyarakat yang sangat percaya diri ini akan menghegemoni daerah lain. Umumnya masyarakat seperti ini memiliki jumlah penutur yang banyak dan dominan dalam suatu wilayah sehingga dimana pun bumi mereka pijak akan tetap mempertahankan budaya dan bahasanya dengan tetap melakukan penyesuaian diri dengan masyarakat dan tempat mereka. Olehnya itu, masyarakat seperti ini kadang bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya.

Selain itu, upaya melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah dapat dilakukan dengan penelitian dan pengkajian yang berkesinambungan dan mendalam. Dalam hal ini, selain peran dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, juga dibutuhkan peran dari para pengusaha lokal untuk ikut andil dan berperan serta, khususnya hal pendanaan, dalam penelitian dan pengkajian bahasa dan sastra di daerah.

Jawaban/Tanggapan

Saya setuju dengan Bapak. Masyarakat harus percaya diri dengan budaya dan bahasa daerah yang mereka miliki karena hal itu menyangkut identitas diri dan daerah. Sebagai contoh, ketika saya berada dalam kapal laut yang menuju ke Baubau, saya menyimak percakapan dua orang yang sedang berbahasa Wolio. Kemudian saya sela dan bertanya kepada mereka, bahasa apa yang mereka pergunakan itu? Salah seorang menjawab bahwa itu adalah Bahasa Wolio. Mereka pun kembali melanjutkan percakapan mereka dengan suasana penggunaan bahasa yang berbeda, yaitu mereka menggunakan Bahasa Indonesia. Tentu saja, ini menjadi pertanyaan bagi saya, mengapa mereka tidak lagi menggunakan Bahasa Wolio? Sesampainya di Pelabuhan Murhum, pertanyaan yang menggajal di hati saya kemukakan bahwa kenapa mereka mengubah bahasa percakapan mereka. Mereka pun menjawab bahwa kami merasa tidak enak dan tidak sopan kepada jika kami menggunakan Bahasa Wolio yang Bapak tidak pahami. Sekelumit kasus ini menjadi gambaran kepada kita bahwa masih ada perasaan untuk menghormati orang lain walaupun sebenarnya masalah yang dibicarakan itu bukan masalah siapa pun. Tentu saja ini memunculkan suatu pertanyaan bahwa di satu sisi mereka berusaha menghargai orang lain dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan di sisi lain mereka harus meninggalkan bahasa daerah yang menjadi identitas diri mereka. Bagaimana menurut pendapat Anda?

CERITA BERGAMBAR BERSUMBER DARI CERITA RAKYAT NUSANTARA: ANTARA JEMBATAN PEMAHAMAN BUDAYA DAN UPAYA PENINGKATAN MINAT BACA

B. Trisman
(Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan)

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan berlimpah, baik kekayaan sumber daya manusia, kekayaan sumber daya alam, maupun kekayaan budaya. Akan tetapi, belum semua kekayaan tersebut belum tergali secara optimal sehingga belum pula termanfaatkan secara maksimal. Khazanah budaya, misalnya, yang berpotensi dalam menumbuhkan pemahaman antarbudaya dan meningkatkan mutu sumber daya manusia belum tergarap oleh segenap komponen bangsa. Cerita rakyat yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa di Indonesia seyogianya termanfaatkan dalam pengembangan minat anak Indonesia sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan sumber daya manusia bangsa.

Dalam hubungannya dengan itu, membaca merupakan suatu proses pengayaan diri (Leksono, 1999:4). Dalam kaitannya dengan dunia anak-anak, aktivitas membaca merupakan sebuah langkah bagi mereka dalam memperkaya wawasan dan pengalamannya. Melalui bacaan, anak dapat menyerap berbagai pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat dalam mengembangkan wawasan dan pemahamannya tentang hidup dan kehidupan. Cerita yang bersumber pada kekayaan khazanah sastra Nusantara dapat berperan sebagai wahana ke arah itu. Di samping itu, cerita lokal Nusantara juga dapat memperkenalkan anak pada berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, khazanah bacaan anak Indonesia saat ini “mungkin” belum mampu memenuhi kebutuhan bacaan anak Nusantara.

Khazanah bacaan anak Indonesia setakat ini diisi oleh beragam jenis bacaan, baik cerita bersumber dari Nusantara maupun cerita terjemahan atau yang datang dari luar Negara. Jika berkunjung ke toko buku saat ini, anak-anak Indonesia akan sangat mudah menemukan cerita-cerita asing daripada cerita-cerita yang berasal dari Indonesia. Pada beberapa kota besar, pengelola toko buku menata buku-buku cerita anak pada salah satu bahagian ruangan yang biasanya sangat mudah dan menarik perhatian pengunjung, terutama anak-anak. Meskipun berada pada tempat yang sama, buku-buku cerita produk lokal tampaknya belum menjadi sasaran pengunjung. Di samping jumlahnya yang relatif sedikit, tampilan cerita produk lokal juga kurang menarik di mata pengunjung.

Dalam hubungan dengan kebiasaan membaca, tentu saja kita berharap agar anak Indonesia memperoleh bahan bacaan yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Serbuan cerita asing ke Indonesia jelas menguntungkan karena dapat memperkaya khazanah bacaan anak Nusantara. Akan tetapi, kebutuhan anak Indonesia juga berkaitan dengan pemahaman budaya bangsanya. Untuk itu, kehadiran cerita anak yang bersumber dari kekayaan khazanah sastra Nusantara seyogianya sudah harus menjadi perhatian segenap komponen bangsa ini.

2. Anak dan Bacaan

Maria Montessori, seorang wanita dokter berkebangsaan Italia, pernah mengembangkan filsafat pendidikan yang berkaitan dengan anak. Menurut Maria, anak adalah tabula rasa (meja lilin). Maksudnya, alam sadar seorang anak itu seperti meja lilin. Seorang pendidik dapat menulis meja itu dengan apa saja, sesuai dengan keinginannya. Di samping itu, faktor lingkungan—menurut Maria—turut berpengaruh pada perkembangan anak (Maraihim, 1998:4). Jika pendapat Maria itu kita jadikan tolok ukur, rasa-rasanya bacaan atau cerita dapat berpengaruh pada perkembangan anak.

Dalam kaitannya dengan itu, menarik menyimak pandangan yang dikemukakan oleh Mc Cleland tentang pengaruh bacaan dan cerita terhadap sebuah bangsa. Cleland membandingkan dua negara, Inggris dan Spanyol, yang pada abad ke-16 merupakan dua kerajaan besar. Kedua kerajaan itu sama-sama melakukan pengembangan daerah jajahan. Namun, Inggris dapat memperluas wilayah jajahan lebih cepat daripada Spanyol. Bangsa Inggris bergerak bersama-sama membangun negeri, sedangkan bangsa Spanyol tertinggal. Bahkan, Spanyol—akhirnya—menjadi salah satu bangsa yang terkebelakang di daratan Eropa.

Cleland mengamati penyebab kondisi itu terjadi. Ia melakukan pengamatan terhadap sistem pemerintahan, hukum, ekonomi, pendidikan, adat dan kebiasaan, makanan, dan dongeng serta cerita rakyat yang ada di kedua negeri. Cleland menemukan jawaban yang meyakinkan pada sektor dongeng dan cerita rakyat. Ia menemukan dongeng dan cerita rakyat yang berbeda di kedua negeri. Dongeng dan cerita rakyat Inggris sarat dengan “virus” yang menyebabkan orang mendengar atau membaca cerita. Virus itu disebut *The Need for Achievement* (kebutuhan berprestasi). Sementara itu, dongeng dan cerita rakyat Spanyol—dari masa yang

sama—hanya cerita semata dan tidak mengandung unsur kebutuhan berprestasi. Kebanyakan dongeng dan cerita rakyat Spanyol mengandung kisah-kisah yang lucu dan licik (maraihimin, 1998:5).

Cerita rakyat di Nusantara mengandung kedua unsur tersebut. Kisah-kisah petualangan yang bermuara kepada keberhasilan dalam cerita rakyat Nusantara antara lain juga mengandung unsur prestasi. Di samping itu, cerita-cerita rakyat Nusantara sarat mengandung nilai budaya. Perpaduan kedua unsur tersebut seyogianya menjadi kebutuhan dan diterima oleh kanak-kanak Nusantara sebagai bahan bacaan.

3. Khazanah Bacaan Anak Indonesia Saat Ini

Khazanah bacaan anak-anak Indonesia saat ini “diserbu” oleh cerita-cerita yang berasal dari luar negeri. Untuk sekadar menyebutkan nama, Jepang dan Amerika merupakan dua negara yang sangat mendominasi khazanah cerita anak Indonesia saat ini. *Doraemon, Kungfu Boy, Shincan, Saint Saiya, Dragon Ball, Detektif Conan, Ladies, Imadoki* antara lain cerita-cerita berbentuk komik buatan Jepang yang banyak menghiasi bacaan anak-anak Indonesia saat ini. Sementara itu, komik-komik buatan Amerika antara lain *Donald Duck, Spiderman, Batman, Nina, Tintin, Micky Mouse, Flash Gordon* juga banyak dan mudah ditemukan di berbagai toko buku di tanah air.

Pada dekade 1950-1960-an, khazanah cerita anak berbentuk komik Indonesia pernah mengalami masa jaya. Pada saat itu, pembaca Indonesia mudah mendapatkan cerita-cerita bergambar yang dihasilkan oleh penulis dan komikus Indonesia. Tercatat beberapa nama yang dikenal sebagai penghasil komik Indonesia antara lain Taguan Hardjo, R.A. Kosasih, Ardisoma. Mereka pernah mendominasi penulisan komik di tanah air. Sementara itu, cerita bergambar yang beredar saat itu bermuatan cerita sejarah seperti *Cerita Mahabrata, Ramayana, Wayang Purwa*; cerita kepahlawanan seperti *Si Buta dari Gua Hantu, Gundala, dan Godam*. Di samping itu, pembaca Indonesia juga dapat menemukan cerita-cerita silat seperti yang ditulis oleh Koo Ping Hoo dan cerita-cerita (kisah Nabi dan Rasul) yang diadaptasi dari kisah-kisah Nabi dan Rasul.

Pada dekade 1990-an, komik-komik Indonesia tampaknya kalah bersaing dengan komik-komik Jepang dan Amerika. Perlahan-lahan, komik-komik Indonesia mulai hilang dari peredaran Menyikapi kondisi tersebut, bermunculan berbagai pendapat dari para pencinta dan pengamat komik di tanah air. Seno Gumira Ajidarma, cerpenis dan pengamat komik Indonesia, pernah mengemukakan bahwa kemunduruan komik Indonesia antara lain disebabkan kesalahan manajemen. Sebagai sebuah produk industri, komik Indonesia seyogianya dikelola dengan menggunakan dasar manajemen yang kuat. Akan tetapi, hal itu terabaikan Sebagai akibatnya, ketersediaan komik-komik lokal di pasaran kurang terjamin.

Di samping itu, ada hal-hal yang bersifat teknis yang kelihatannya terabaikan oleh para komikus Indonesia, yaitu teknik penyajian. Komik-komik luar negeri mampu merebut pangsa pasar karena disajikan sesuai dengan perkembangan pasar. Meskipun ceritanya sangat sederhana, teknik penyajian komik-komik luar negeri itu mampu menawan hati pembacanya. Mereka sudah memanfaatkan teknologi canggih dalam merancang gambar-gambar pendukung cerita.

Kita tidak perlu meratapi keterpinggiran cerita bergambar produksi lokal oleh komik luar negeri. Dilihat dari segi ketersediaan bahan bacaan bagi anak, kehadiran komik luar negeri itu sangat membantu anak-anak dalam menyediakan bahan apresiasi. Namun, kita juga berharap agar khazanah komik Indonesia juga diperkaya kembali dengan cerita-cerita dari dalam negeri. Setakat ini, yang perlu kita cermati adalah beredarnya komik-komik bergambar yang sebetulnya kurang cocok bagi anak-anak, baik dari segi bahasa maupun isi ceritanya.

4. Membaca dan Ketersediaan Bahan Bacaan

Membaca merupakan suatu proses pengayaan diri (Leksono, 1999:4). Membaca merupakan sebuah langkah bagi anak untuk memperkaya wawasan dan pengalamannya. Melalui bacaan, anak dapat menyerap berbagai pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat dalam mengembangkan wawasan dan pemahamannya tentang hidup dan kehidupan. Dalam kaitan dengan itu, komik-komik lokal dapat berperan sebagai wahana ke arah itu. Di samping itu, komik-komik lokal dapat memperkenalkan anak pada berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia.

Komik-komik lokal (Indonesia) yang diharapkan mampu berperan ke arah pengayaan wawasan anak Indonesia itu setakat ini hidup “bagai kerakap tumbuh di batu”. Ketidakterediaan komik lokal sebagai sarana pemenuhan kebutuhan bacaan anak Indonesia agaknya perlu menjadi bahan renungan kita bersama. Akan tetapi, kita tidak mungkin berlama-lama hanyut dalam renungan tersebut. Kita harus berterima kasih karena komik-komik luar negeri setakat ini mampu memenuhi kebutuhan bahan bacaan anak-anak Indonesia. Yang perlu dipikirkan adalah upaya untuk menumbuhkan kembali gairah penulisan komik lokal yang bernuansa Indonesia.

Dalam kaitannya dengan kebiasaan membaca anak-anak Indonesia saat ini, kita berharap agar aktivitas membaca yang mereka lakukan tidak hanya sekadar mampu mengeja huruf dalam sebuah kalimat (istilah Sapardi Djoko Damono), tetapi bermuatan pencapaian pemahaman dari hasil proses membaca tersebut. Cerita bergambar antara lain dapat dijadikan salah satu ajang untuk mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi, di sisi lain, kita pun menyadari bahwa tidak semua cerita bergambar saat ini dapat memenuhi misi tersebut.

Dari sudut ketersediaan bacaan, derasnya arus komik-komik luar negeri jelas sangat membantu anak-anak Indonesia. Akan tetapi, dari segi cerita dan teknik penyajiannya—seperti telah dikemukakan terdahulu—tidak semua komik luar tersebut cocok untuk bacaan anak-anak, terutama untuk usia tertentu. Berkaitan dengan itu, diperlukan kearifan dan kehati-hatian kita bersama dalam menyikapi cerita-cerita anak yang ada saat ini.

Bacaan yang menjadi konsumsi anak adalah kisah-kisah yang dekat dengan dunia anak. Dunia anak adalah dunia bermain dan menyenangkan.. Komik-komik bergambar menawarkan kesenangan tersebut pada mereka. Akan tetapi, kesenangan yang mereka raih tentu saja kita harapkan memiliki nilai positif bagi pertumbuhan mereka. Dalam arti bahwa bacaan-bacaan mereka diharapkan mampu membangkitkan dan mengembangkan fantasi dan imajinasi anak ke arah sikap-sikap positif.

Harapan tersebut antara lain dapat diwujudkan dengan bahan bacaan yang berisi muatan moral. Kita berharap agar cerita dan tokoh cerita komik-komik tersebut dapat menuntun pembacanya ke arah penumbuhan kreativitas sang anak. Di samping itu, sebuah cerita bergambar tersebut juga diharapkan mengandung nilai moral yang diharapkan mampu menjadi teladan bagi anak.

Ada bacaan anak yang dikemas dalam bentuk komik, tetapi isinya dan ceritanya—pada dasarnya—tidak untuk konsumsi anak (terutama untuk usia tertentu).. Sementara itu, ada bacaan yang sebetulnya sangat cocok buat anak, tetapi tidak menarik minat anak-anak. Sesuai dengan hakikatnya, ketertarikan anak-anak terhadap sesuatu didasarkan rasa senang dan rasa suka terhadap sesuatu tersebut. Dalam kaitannya dengan itu, penghasil cerita-cerita anak (lokal) yang sebenarnya cocok untuk bacaan anak tersebut harus berani “mereformasi” diri dengan berinovasi dalam melahirkan bacaan yang memiliki daya tarik pembacanya.

5. Komik Berwarna Nusantara: Sebuah Harapan

Nusantara, di dalamnya ada Sulawesi Tenggara, merupakan sekumpulan kelompok bangsa yang kaya dengan khazanah budaya. Sulawesi Tenggara, misalnya, merupakan salah satu saja dari sekian daerah di Indonesia yang memiliki sumber daya alam dan khazanah budaya yang berlimpah. Ketika orang menyebut Sulawesi Tenggara saat ini, ingatan orang akan tertuju ke Kendari, Buton, dan Wakatobi. Nama terakhir itu, Wakatobi, merupakan salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang menjadi buah bibir masyarakat Nusantara karena kemolekan alam dan geliat budaya Sulawesi Tenggara dalam kancah Nusantara.

Dalam kaitannya dengan sisi budaya, Sulawesi Tenggara memiliki karakter yang hampir sama dengan beberapa daerah lain di Nusantara, yaitu sama-sama didiami oleh beragam kelompok etnis. Namun, keberagaman itu merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Sulawesi Tenggara karena menyiratkan kekayaan yang dimiliki Haluhuleo ini.

Khazanah sastra Sulawesi Tenggara yang kaya dengan berbagai ragam cerita rakyat, baik yang disampaikan secara lisan maupun tulis. Hampir di seluruh daerah Sulawesi Tenggara terdapat cerita rakyat, baik berupa legende, mite, maupun fable. Kekayaan khazanah sastra Sulawesi Tenggara itu baru dimanfaatkan untuk bidang tertentu saja. Sebut saja untuk kajian-kajian akademik. Jika kita mengunjungi toko-toko buku, kita dapat menemukan cerita anak yang ditulis berdasarkan cerita rakyat Sulawesi. Pusat Bahasa—melalui Proyek Pembinaan Buku Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah—telah mengupayakan ketersediaan bacaan anak dengan tajuk Penulisan Cerita Anak. Buku cerita anak yang dihasilkan Pusat Bahasa merupakan transformasi dari cerita-cerita rakyat Nusantara.

Ada dua kategori pembaca sasaran dari buku-buku cerita anak yang dihasilkan Pusat Bahasa, yaitu tingkat sekolah dasar dan tingkat sekolah menengah. Format buku cerita anak Pusat Bahasa tidak berbeda dengan cerita-cerita anak yang dihasilkan penerbit swasta atau instansi lainnya. Dalam beberapa halaman, cerita disertakan ilustrasi gambar yang mendukung bagian cerita.

Jika Pusat Bahasa menghasilkan cerita anak berdasarkan cerita rakyat Nusantara, perlu diupayakan juga ketersediaan bacaan anak (komik-komik bergambar) yang bersumber dari cerita-cerita rakyat Nusantara tersebut. Hal itu sebetulnya telah dilakukan oleh komikus-komikus dekade 1950—1960-an. Akan tetapi, kesinambungan kerja mereka terputus oleh derasnya serangan komik luar negeri.

Keterputusan itu antara lain disebabkan rendahnya kreativitas dan inovasi penulis komik lokal sehingga kurang mampu bersaing dengan komik luar negeri. Di samping itu, bantuan teknologi canggih tampaknya belum menjangkau komikus dalam negeri sehingga susah bagi mereka berkreasi dalam karya-karyanya. Untuk sekadar menyebut beberapa judul cerita rakyat Sulawesi Tenggara, seperti cerita *Laontolu*, *La Sirimtone*, *Landoke-ndoke te Manu: Kera dan Ayam*, *Anak Yatim*, *Burung Garuda*, *Rusa dan Kura-kura*, *Si Dunggu* mungkin akan “melanglang buana” pada pemikiran anak jika disajikan dalam komik bergambar yang inovatif.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu dahsyat sangat berpengaruh pada cara berpikir manusia, termasuk anak-anak. Perkenalan anak-anak Nusantara dengan komik-komik bergambar luar negeri meredam minat mereka untuk membaca komik-komik lokal. “Keterasingan” komik lokal dari pembacanya sungguh sangat disayangkan. Kehadiran komik lokal pun akan diterima pembaca asal memenuhi selera mereka. Hal itu dapat disimak dari komentar beberapa pencinta cerita bergambar yang disiarkan pada Koran lokal Palembang *Sriwijaya Post* edisi Minggu, 4 Mei 2001 (hal. 4). Rata-rata mereka tertarik pada komik Jepang dan Amerika karena kreativitas penulis dan komikus dalam menyelaraskan cerita dan gambarnya.

Kemasan atau sampul luar dirancang begitu indah sehingga menjadi pempunan perhatian (daya tarik) pertama bagi mereka ketika melihat buku-buku tersebut. Keindahan seperti itu juga mereka temukan dalam teknik penyajian cerita sehingga mereka tidak akan “melepaskan” buku tersebut sebelum tuntas membacanya. Di samping itu, komik-komik luar negeri—di mata mereka—menyajikan cerita yang sederhana dengan alur yang menarik dan menyertakan penyelesaian masalah yang sangat sederhana meskipun kisahnya kadang-kadang sangat kompleks.

Beberapa pembaca mengemukakan bahwa mereka tidak antipati pada komik-komik lokal. Jika mampu memenuhi selera mereka, komik-komik lokal pasti mereka baca. Harapan-harapan seperti itu antara lain tertuang dalam komentar beberapa orang pembaca yang dimuat pada harian lokal Sumatera Selatan tersebut.. Harapan lain yang lain yang termaktub dalam komentar-komentar mereka dan dapat dijadikan pemikiran kita bersama adalah tentang kehadiran komik-komik lokal dengan jati dirinya sendiri. Dalam arti bahwa komik-komik lokal tersebut tidak merupakan tiruan dari komik-komik yang sudah ada di pasaran. Mereka berharap bahwa komik lokal itu tampil dengan wajah dan kreasi yang juga baru.

Harapan tersebut merupakan ungkapan yang tulus dari lubuk hati mereka. Sebagai sebuah harapan, ungkapan yang tulus itu seyogianya menjadi masukan bagi penulis dan komikus Indonesia khususnya, masyarakat sastra Indonesia umumnya. Cerita bergambar luar negeri yang banyak beredar di Indonesia merupakan sumbangan yang berharga bagi masyarakat Indonesia. Khazanah sastra Indonesia yang kaya dengan cerita-cerita rakyat merupakan aset yang sangat berharga dalam pelahiran komik-komik bernuansa lokal.

Aset itu akan menjadi sesuatu yang tidak berharga jika dibiarkan saja terpendam dalam bumi Nusantara. Untuk itu, sudah saatnya khazanah cerita bergambar Indonesia disemarakan kembali dengan cerita-cerita berwarna lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut, sumbangan pemikiran dan dorongan berbagai pihak—termasuk insan sastra Indonesia—kepada penulis dan komikus Indonesia untuk menghasilkan komik-komik lokal yang ditransformasi dari cerita rakyat Nusantara.

6. Kekayaan Khazanah Sastra Nusantara dalam Konstelasi Nasional

Dalam konteks regional, sebagai sebuah negara besar (dilihat dari luas wilayah dan populasi penduduk), Indonesia—mau atau tidak—akan selalu dihadapkan pada berbagai persoalan. Setakat ini, krisis yang melanda bangsa Indonesia sudah menjalar pada semua elemen masyarakat. Di samping yang disebabkan oleh pengaruh dunia global, ada pula krisis yang muncul karena ketimpangan penanganan masalah ekonomi, sosial, dan politik dalam negeri. Semua krisis tersebut (krisis multidimensi) menyebabkan munculnya benih-benih perpecahan dalam masyarakat yang akhirnya membawa bangsa ini pada persoalan yang berkepanjangan. Begitu akutnya “penyakit” yang mendera bangsa ini, beberapa waktu yang lalu tersiar isu bahwa Indonesia berada pada jurang kehancuran.

Menyikapi keadaan demikian, muncullah berbagai keprihatinan dari anak bangsa yang peduli terhadap kemaslahatan masyarakat. Di samping itu, tidak sedikit “oknum” anak bangsa yang sama sekali tidak menghiraukan “penyakit” yang sedang diderita bangsanya. Tidak sekadar itu saja, ada juga yang masih sempat berpesta ria di atas penderitaan saudara-saudaranya. Kenyataan seperti itu menunjukkan bahwa negeri ini juga dihuni oleh orang-orang yang hanya memikirkan dirinya saja, tanpa mempedulikan orang lain.

Berkaitan dengan krisis multidimensi yang menimpa bangsa Indonesia, berbagai pendapat dan pemecahannya pun disampaikan oleh pihak-pihak yang betul-betul peduli atas kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pendapat dari pihak-pihak yang “pura-pura” peduli. Namun, persoalan tetap saja menjadi persoalan karena krisis yang melanda bangsa ini tidak kunjung berakhir.

Ada yang berpendapat bahwa krisis yang melanda negeri ini karena kesalahan “oknum” dalam mengurus negeri ini. Di samping itu, ada juga yang berpendapat yang menyatakan bahwa krisis itu disebabkan oleh melemahnya rasa kebangsaan, melemahnya rasa kepedulian, melemahnya moral bangsa, melemahnya kemampuan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Kita sepakat bahwa semua itu benar karena berbagai kesalahan dan kelemahan itulah penyebab berkembangnya berbagai krisis tersebut.

Dalam kaitan dengan itu, bermunculan pula beragam pendapat yang memaktubkan kiat dan cara agar bangsa ini dapat keluar dari berbagai krisis tersebut. Pakar ekonomi menawarkan pemecahan dengan menggunakan perspektif ekonomi, pakar hukum menawarkan kiat yang menggunakan perspektif hukum, pakar politik menawarkan pemecahan dengan menggunakan sudut pandang, politik, pakar-pakar bidang lainnya menawarkan pemecahan menurut sudut pandang keahlian mereka masing-masing. Namun, semua kiat dan cara yang ditawarkan belum mujarab dalam menyembuhkan “penyakit” bangsa ini. Ada yang kurang tersentuh dari beragam pendapat pakar tersebut, yaitu membangun kembali karakter bangsa yang dilandasi nilai moral.

Dalam kaitan dengan itu, menarik disimak pemecahan masalah yang ditawarkan oleh Remy Silado, sastrawan dan ahli sastra, dalam sebuah wawancara di sebuah televisi swasta nasional. Remy menawarkan sebuah cara agar bangsa ini dapat keluar dari krisis adalah dengan membaca karya sastra. Tawaran Remy itu sebetulnya bukanlah saran yang mengada-ada. Sebagai seorang sastrawan dan pemerhati sastra, Remy sangat paham sejarah perjalanan sastra dunia. Pada kurun waktu tertentu, karya sastra pernah memegang peran penting

dalam kehidupan bermasyarakat. Kala itu, posisi penyair dipandang sejajar dengan nabi. Fatwa penyair dianggap sebagai penyejuk hati masyarakat. Pwenyair menempati posisi tertinggi dari semua elemen masyarakat saat itu.

Krisis multidimensi yang terjadi di tanah air sudah merambah ke semua lapisan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, berat rasanya untuk keluar dari krisis tersebut dalam waktu yang singkat. Untuk memaksa para koruptor untuk mengembalikan uang curiannya rasa-rasanya tidak mungkin. Sementara itu, sistem hukum Indonesia belum mampu berperan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan upaya penumbuhan nilai moral sebagai alat kontrol diri masyarakat.

Tampaknya, penumbuhan kembali nilai moral tersebut harus dimulai lagi pada semua lapisan masyarakat, terutama generasi penerus bangsa ini. Tawaran Remy Silado agar bangsa ini membaca karya sastra agar dapat keluar dari krisis multidimensi idealnya disikapi secara arif. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan tawaran tersebut. Salah satu adalah memperkenalkan kembali kepada generasi mendatang nilai-nilai moral yang terkandung dalam khazanah sastra Indonesia, termasuk cerita rakyat Sulawesi Tenggara.

Kekayaan khazanah sastra Nusantara, misalnya, dapat diolah menjadi semacam jembatan pemahaman antarmasyarakat dalam menumbuhkan rasa kebersamaan. Cerita rakyat Nusantara yang diolah menjadi buku cerita anak dapat digunakan sebagai media peningkatan minat baca anak. Di samping itu, cerita-cerita rakyat Nusantara yang sudah diolah menjadi cerita anak tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pemahaman anak terhadap keberagaman bangsanya. Pemahaman itu diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian antarsesama dan sekaligus dapat menjadi ajang peningkatan kreativitas berpikir mereka.

7. Penutup

Cerita bergambar (baca komik) Indonesia pernah mendapat tempat di hati pembaca pada dekade waktu 1950-an—1960-an. Pada waktu itu, penulis komik Indonesia mengangkat cerita sejarah, cerita kepahlawanan, dan cerita Nabi dan Rasul ke dalam karya cipta mereka. Akan tetapi, pada periode waktu selanjutnya, komik-komik Indonesia mulai menghilang dari peredaran seiring dengan derasnya arus masuk komik luar negeri ke dalam belantara khazanah cerita bergambar Indonesia. Komik-komik luar negeri itu mampu menarik minat pembaca Indonesia.

Domikasi komik luar negeri di kalangan pembaca Indonesia tidak perlu dirisaukan. Sebagai sumber pengayaan wawasan dan pengetahuan anak, kita patut bersyukur karena telah disediakan bahan bacaan begitu rupa. Namun, kita juga berharap agar anak-anak Indonesia juga disuguhi cerita-cerita yang bersumber dari negerinya sendiri.

Cerita rakyat Nusantara sebagai salah satu kekayaan khazanah bangsa pernah dijadikan sumber dalam pelahiran penulis dan komikus Indonesia pada kurun waktu tertentu. Akan tetapi, kehadiran komik-komik luar negeri di belantara khazanah cerita anak Indonesia menjadikan komik-komik lokal sebagai bacaan “pinggiran”. Banyak hal yang ditenggarai sebagai penyebab kondisi itu terjadi. Namun, kita menyadari bahwa komik-komik luar negeri tersebut dihasilkan dalam sebuah kerangka kerja yang kreatif dan inovatif, termasuk jaringan pemasarannya. Namun, perimbangan antara nilai kekhikmatan dan kenikmatan sangat kental dalam komik-komik luar negeri tersebut sehingga mampu merebut hati pembaca Indonesia.

Kedua nilai tersebut sebetulnya juga terpancar dari khazanah cerita rakyat Indonesia. Namun, unsur kenikmatan dalam komik-komik lokal belum mampu menyejajarkan diri dengan komik-komik luar negeri tersebut. Di samping dapat dimanfaatkan sebagai sarana penghibur, komik-komik lokal yang ditransformasi dari cerita rakyat Nusantara dapat juga dimanfaatkan sebagai jembatan pengenalan budaya antardaerah di Nusantara. Namun, diperlukan inovasi dan kreativitas yang tinggi dari penulis dan komikus lokal agar komik-komik lokal dapat berdampingan dengan komik-komik luar negeri. Pencinta komik Indonesia sudah terlanjur akrab dengan komik-komik luar negeri yang notabenehnya disajikan dalam bentuk dan rancangan yang mampu memikat hati pembaca.

Agar cerita bergambar produksi lokal mampu merambah kembali belantara khazanah cerita bergambar Indonesia, para penulis dan komikus dituntut memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi dalam melahirkan karya-karya mereka. Di samping itu, diharapkan ada pihak-pihak terkait—seperti penerbit—mau terlibat dalam memikirkan manajemen pengelolaan cerita bergambar tersebut sehingga terjamin penyebarluasannya ke seluruh Indonesia.

Mutu sumber daya manusia Indonesia antara lain dapat ditumbuhkembangkan melalui tradisi membaca. Semoga cerita bergambar yang bersumber dari cerita rakyat Nusantara memiliki kontribusi dalam meningkatkan minat baca anak bangsa dan dalam mengembangkan karakter bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Damono, Sapardi. 1992. *Keterampilan Membaca dan Menulis* dalam Muljanto Sumardi (ed.) **Berbagai Pendekatan dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra**. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hidayah, Syamsul. 2003. *Komik "Made in" Indonesia Timbul untuk Tenggelam* dimuat dalam **Sriwijaya Post** edisi Minggu, 4 Mei, hal. 4.
- Leksono, Karlina. 1999. "Membaca dan Menulis: Sebuah Pengayaan Eksistensial". Makalah yang disajikan pada **Simposium Peran Buku dalam Masyarakat Baru Indonesia** yang diselenggarakan oleh Yayasan Obor Indonesia di Jakarta. Februari 1999.
- Marahimin, Ismail. 1998. "Nilai-Nilai dan Norma-Norma dalam Bacaan Pemula" (makalah disajikan dalam Pelatihan Penulisan Cerita Anak yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa).

LARANGAN INSES DALAM MITOS “KOLOIMBA”: MENENGGOK JENDELA BUDAYA MASYARAKAT TOLAKI

Uniwati
(Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)

1. Pendahuluan

Mitos pada intinya adalah sebuah “proses komunikasi” lintas generasi dalam tataran simbolis untuk mengatasi atau memecahkan berbagai kontradiksi empiris yang tidak dipahami oleh nalar manusia (Ahimsa-Putra, 2006: 256 – 260). Dengan demikian, mitos merupakan pesan yang diformulasikan secara khusus oleh orang tua dulu untuk menyampaikan larangan atau aturan-aturan agar diperhatikan oleh generasi dalam suatu kelompok masyarakat. Kemunculan mitos merupakan suatu kepatutan yang sengaja diciptakan agar masyarakat menaati segala pranata atau aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Junus (1981:74) bahwa mitos tidak dibentuk melalui penyelidikan, tetapi melalui anggapan berdasarkan observasi kasar yang digeneralisasi. Oleh karena itu, mitos lebih banyak hidup di dalam masyarakat.

Sebagai proses komunikasi, mitos tersusun dalam tataran sistem simbol yang memaksa manusia untuk menerjemahkannya secara logis. Untuk itu, manusia perlu memandang, menafsirkan, dan memahami realitas empiris sehari-hari suatu masyarakat tempat mitos tersebut berada agar dapat menerjemahkan sebuah mitos dengan masuk akal. Jadi, melalui mitos manusia pada dasarnya berusaha mencari benang merah antara realitas dalam mitos dengan realitas kehidupan sehari-hari sehingga ketidakmasukakalan dalam sebuah mitos dapat dipandang sebagai sesuatu yang logis atau masuk akal. Hal ini penting untuk menghindari kebingungan dan kecemasan dalam memandang sebuah mitos.

Untuk memahami pesan yang termuat dalam sebuah mitos diperlukan sebuah paradigma yang mampu memberikan penjelasan yang dapat diterima akal mengenai pesan-pesan yang sebenarnya ingin disampaikan melalui sebuah mitos (Wirajaya, 2008: 48). Dalam hal ini, paradigma yang akan digunakan adalah paradigma struktural ala Levi-Strauss dengan maksud agar dapat diketahui struktur mitosnya, sekaligus juga dapat diketahui rangkaian relasinya dengan struktur-struktur lain yang ada di dalam masyarakat pemilikinya. Analisis yang akan dilakukan itu dapat membantu dalam mengungkapkan struktur budaya masyarakat pemilik mitos, sehingga mitos dalam konteks ini dapat dijadikan sebagai sebuah jendela budaya untuk melihat batin sosial suatu masyarakat.

Pemilihan mitos *Koloimba* ini sesungguhnya hanya faktor kebetulan saja. Maksudnya, dalam mitos ini memuat berbagai informasi tentang peristiwa geologis yang terjadi di tanah Mekongga pada masa lampau. Oleh sebab itu, mitos ini menarik untuk dikaji karena selain memiliki kedekatan batin dengan masyarakat Tolaki Mekongga, juga memiliki kedekatan fisik dengan tempat-tempat yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, mitos *Koloimba* merupakan salah satu contoh mitos yang gagal dicerna oleh masyarakat pemilikinya. Mitos ini hanya mampu dipandang sebagai sebuah cerita biasa yang menceritakan tentang asal-usul terjadinya rawa Koloimba yang kemudian oleh masyarakat setempat dikeramatkan. Ada kesan bahwa pesan-pesan yang terbungkus dalam mitos ini kurang dapat dipahami oleh masyarakat penuturnya sehingga timbul sikap ketidakpedulian terhadap mitos tersebut.

Alasan lain pemilihan mitos *Koloimba* adalah kurang tersentuhnya mitos ini dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten. Kajian yang tertulis dalam buku *Prosa dalam Sastra Lisan Tolaki* oleh Nasruddin dan Haruddin (1998) baru sebatas mentranskripsikan cerita lisannya. Untuk itulah analisis mitos *Koloimba* di sini bertujuan untuk memberikan uraian secara jelas tentang hakikat pesan yang ingin disampaikan lewat mitos tersebut.

2. Konsep Strukturalisme Levi-Strauss

Menganalisis mitos secara struktural sebenarnya bukan hal yang baru dalam kajian folklore, khususnya mitologi. Strukturalisme Levi-Strauss juga bertolak dari konsep oposisi biner (*binary opposition*). Konsep ini dianggap sama dengan organisasi pemikiran manusia dan juga kebudayaannya. Seperti kata-kata hitam dan putih. Hitam sering dikaitkan dengan kegelapan, keburukan, kejahatan, sedangkan putih dihubungkan dengan kesucian, kebersihan, dan ketulusan. Contoh lain adalah kata rasional dan emosional. Rasional dianggap lebih istimewa dan diasosiasikan dengan laki-laki. Sementara emosional dianggap inferior yang diasosiasikan dengan perempuan. Semua konsep mengenai struktur bahasa tersebut dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan sosial. Untuk membuktikan adanya keterkaitan atau beberapa kesamaan antara bahasa dan budaya, Levi-Strauss mengembangkan teorinya dalam analisis mitos. Levi-Strauss sangat tertarik pada logika mitologi. Itu sebabnya ia mulai dengan mitos, menggabungkan fungsi-fungsi hanya secara vertikal, dan mencoba menerangkan paradigmatis mereka yang tumpah-tindih dengan varian-varian mitos. Model strukturalnya tidak linier (Meletinskij, 1969 via Fokkema, 1978).

Strukturalisme Levi-Strauss secara implisit menganggap teks naratif, seperti mitos, sejajar atau mirip dengan kalimat berdasarkan atas dua hal. Pertama, teks tersebut adalah suatu kesatuan yang bermakna (*meaningful whole*), yang dapat dianggap mewujudkan, mengekspresikan, dan keadaan pemikiran seseorang pengarang seperti halnya sebuah kalimat memperlihatkan atau mengejawantahkan pemikiran seorang pembicara. Kedua, teks tersebut memberikan bukti bahwa dia diartikulasikan dari bagian-bagian, sebagaimana halnya kalimat-kalimat diartikulasikan oleh kata-kata yang membentuk kalimat tersebut. Strukturalisme Levi-Strauss secara implisit menganut pandangan bahwa sebuah cerita (naratif), seperti halnya sebuah kalimat, maknanya merupakan hasil dari suatu proses artikulasi yang seperti itu (lihat Ahimsa, 2006: 31 – 32).

Mitos di mata Levi-Strauss adalah suatu gejala kebahasaan yang berbeda dengan gejala kebahasaan yang dipelajari oleh ahli linguistik. Mitos sebagai 'bahasa' dengan demikian memiliki tata bahasanya sendiri yang diungkapkan dengan cara menganalisis unsur terkecil dari bahasa mitos, yakni *mytheme* (miteme).

a. Mencari *Mytheme* (Miteme)

Miteme menurut Levi-Strauss adalah unsur-unsur dalam konstruksi wacana mitis (*mythical discourse*) yang juga merupakan satuan-satuan yang bersifat kosokbali (*oppositional*), relatif, dan negatif. Dalam menganalisis suatu mitos, makna kata yang ada dalam cerita harus dipisahkan dengan makna miteme, yang juga berupa kalimat atau rangkaian kata-kata dalam cerita tersebut.

b. Menyusun *Mytheme* (Miteme)

Setelah menemukan berbagai miteme yang ada dalam sebuah mitos, miteme tersebut kemudian dituliskan dalam sebuah kartu indeks yang masing-masing telah diberi nomor sesuai dengan urutannya dalam cerita. Setiap kartu ini akhirnya akan memperlihatkan suatu subjek yang melakukan fungsi tertentu, dan inilah yang disebut 'relasi'. Selanjutnya, miteme-miteme yang ditemukan disusun secara sinkronis dan diakronis, paradigmatis dan sintaksis.

3. Mitos dan Larangan Inses dalam Pandangan Levi-Strauss

Tujuan Levi-Strauss menganalisis mitos adalah pertama, untuk dapat mengungkapkan logika-logika yang ada di balik mitos sebagai wujud dari cara bekerjanya nalar manusia. Oleh karena itu, menganalisis mitos selain dapat memberikan pemahaman tentang logika-logika yang dianggap ada di balik mitos, juga sebuah pemahaman yang cukup mendalam dan luas atas mitos dan budaya masyarakat yang terkait dengan mitos. Kedua, adanya konsep *mytheme* (miteme) yang mengacu pada unit-unit dalam sebuah mitos yang menunjukkan relasi tertentu antartokoh di situ. Konsep ini merupakan implikasi dari strategi Levi-Strauss menggunakan linguistik struktural sebagai model untuk analisis mitos. Ketiga, perhatian Levi-Strauss pada fenomena pernikahan antarkelompok, pertukaran sosial, dan relasi-relasi kekerabatan, serta strategi analisis struktural yang menghubungkan relasi-relasi sosial ini dengan relasi-relasi lain dalam mitos.

Salah satu kajian utama Levi-Strauss mengenai sistem kekerabatan dan pernikahan adalah gejala larangan inses, yaitu larangan untuk menikah dengan kerabat-kerabat dari kategori tertentu. Menurut Levi-Strauss larangan inses merupakan fenomena sosial yang berada dalam bidang *culture* dan *nature* sekaligus, seperti halnya fenomena bahasa, yaitu fonem (Ahimsa, 2006: 382).

Di mata Levi-Strauss larangan inses juga merupakan ambang peralihan dari dunia alam dengan dunia budaya, dunia universal dengan dunia kultural. Larangan inses adalah sebuah aturan yang berada pada tataran alami, karena bersifat universal, artinya ada dalam semua masyarakat atau kebudayaan. Setiap masyarakat selalu memiliki larangan inses. Akan tetapi, larangan inses ini berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Pada masyarakat Tolaki di Indonesia misalnya, seorang laki-laki dilarang menikah dengan saudara sekandung perempuannya. Ini larangan inses mereka. Kesamaan antara larangan inses dan fonem, yakni sama-sama berada pada posisi di antara *nature* dan *culture*, itulah yang membuat strategi Levi-Strauss memanfaatkan metode dan prosedur analisis linguistik untuk menganalisis gejala kebudayaan (dalam hal ini sistem kekerabatan dan pernikahan) menjadi sah dan masuk akal.

Mitos *Koloimba* cukup jelas menunjukkan adanya kecenderungan untuk melakukan pernikahan inses di antara tokoh-tokohnya yang kemudian melahirkan sebuah peristiwa alam sebagai akibat dari pernikahan terlarang tersebut. Isi mitos yang semacam inilah yang membuat pendekatan struktural ala Levi-Strauss menjadi pendekatan yang paling cocok untuk digunakan dalam analisis ini.

4. Analisis Struktural Mitos *Koloimba*

a. Mitos *Koloimba*

Ada sebuah negeri di Mekongga yang bernama Lalolae. Penduduknya gagah-gagah dan cantik-cantik. Ada seorang wanita yang bernama Imba yang sangat cantik dan tidak ada satu gadis pun yang dapat menandingi kecantikannya. Dialah yang paling cantik dengan warna kulitnya yang putih. Imba mempunyai kakak laki-laki yang belum menikah. Kakanya itu baru hendak menikah jika menemukan seorang gadis yang kecantikannya setara dengan adiknya, Imba.

Pekerjaan Imba sehari-hari adalah menganyam. Segala teknik anyaman dia kuasai. Suatu peristiwa, dia kehabisan bahan anyaman. Dia pun bersama kakaknya yang masih bujang pergi mengambil daun *tio-tio*¹ untuk dianyamnya. Sementara mereka mencabuti daun *tio-tio*, tiba-tiba kakaknya diserang nafsu birahi. Pada saat itu juga ditangkanya adiknyanya lalu disetubuhinya.

Tiada berapa lama mereka tinggal bersama, Imba mengandung anak hasil hubungan terlarang mereka. Karena khawatir kandungan Imba diketahui oleh penduduk setempat, mereka pun akhirnya pergi meninggalkan perkampungan dan memilih untuk tinggal di hutan. Mereka lalu mendirikan pondok kecil di atas bukit. Beberapa bulan kemudian, kandungan Imba menampakkan tanda-tanda hendak melahirkan. Perut Imba sakit selama tujuh hari tujuh malam. Namun sampai sejauh itu belum juga ada tanda-tanda anaknya akan segera lahir. Pada malam kedelapan, di waktu fajar akan menyingsing, darah pun keluar sangat deras seperti air dari perian. Pada saat itu, keluarlah seorang bayi yang tidak menyerupai manusia. Bayi itu berwujud seperti buaya yang kebiru-biruan. Setelah anak itu keluar dan sampai di lantai, Imba meninggal karena kehabisan nafas dan darah yang keluar terus-menerus.

Di bawah lantai rumah mereka keluarlah air dari mata air yang tampak seperti tertuang dari dalam guci. Darah Imba bertemu dengan air hujan yang jatuh dari langit dan air yang keluar dari dalam tanah. Tenggelamlah rumah itu dan Imba pun tenggelam pula. Anaknya berenang-renang menjadi buaya kuning, sementara kakanya selama tujuh hari tujuh malam terapung-apung dalam keadaan lemas. Lama-kelamaan, dia berubah wujud menjadi seekor ikan gabus.

Negeri Lalolae tenggelam seluruhnya. Penduduknya banyak yang meninggal. Yang masih hidup lari dan naik ke gunung, kemudian turun di Loea dan Rate-Rate.² Pondok tempat tinggal Imba selalu mengeluarkan mata air yang lama-kelamaan berubah menjadi sebuah rawa yang diberi nama *Koloimba*³. Air rawa itu berwarna merah karena diduga berasal dari air nifas Imba ketika melahirkan. Sementara itu, anak Imba bertempat tinggal di rawa tersebut dan diberi nama *Bokeo Sorume*.

b. Larangan Inses dalam Mitos *Koloimba*

Ada beberapa peristiwa penting yang dapat ditemukan dalam rangkaian beberapa peristiwa seperti yang tergambar dalam mitos *Koloimba*. Untuk keperluan analisis dan tafsir, beberapa miteme yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

1. Seorang wanita cantik bernama Imba memiliki seorang kakak laki-laki.
2. Kakak Imba tidak mau menikah kecuali dengan perempuan yang kecantikannya sama dengan Imba.
3. Kakak Imba tidak mampu mengatasi nafsu birahinya sehingga disetubuhinya Imba.
4. Imba mengandung anak dari kakak kandungnya sendiri.
5. Imba dan kakaknya meninggalkan kampung dan tinggal di dalam hutan.
6. Imba melahirkan seorang anak yang rupanya seperti buaya lalu berubah menjadi buaya kuning.
7. Imba meninggal dan tenggelam, kakaknya berubah menjadi ikan gabus, sedangkan pondok tempat tinggal mereka berubah menjadi rawa bernama *Koloimba*.

Butir-butir miteme di atas merupakan miteme-miteme utama dalam kisah *Koloimba*. Untuk itu, analisis dan tafsir yang akan dilakukan terhadap mitos ini akan dibangun di atas miteme-miteme tersebut. Miteme-miteme tersebut dapat menunjukkan relasi-relasi antartokoh.

Miteme pertama menunjukkan relasi kekerabatan antara Imba dengan kakak laki-lakinya. Dalam cerita tidak disebutkan siapa nama kakak laki-lakinya, tetapi hanya disebutkan bahwa laki-laki itu adalah kakak Imba yang belum menikah dan hanya mau menikah apabila menemukan perempuan yang sama cantiknya dengan Imba (miteme kedua). Pernikahan di antara mereka akan merupakan pernikahan inses yang dilarang dalam budaya Tolaki.

Miteme ketiga menggambarkan peristiwa yang mendorong terjadinya inses. Artinya, mereka telah melakukan suatu pelanggaran besar yang sama sekali tidak dapat diizinkan. Pelanggaran yang telah dilakukan oleh mereka membuahkan sanksi yang harus ditebus oleh keduanya. Apalagi perbuatan itu menyebabkan Imba mengandung, seperti yang ditunjukkan pada miteme keempat. Miteme selanjutnya merupakan sanksi yang harus dijalani oleh mereka, yakni keluar dari kampung dan mengasingkan diri di dalam hutan. Tindakan ini menunjukkan bahwa keduanya sesungguhnya menyadari bahwa mereka telah melakukan suatu pelanggaran besar, yaitu melakukan inses dan tahu apa yang harus mereka lakukan sebagai akibat dari perbuatan mereka. Meninggalkan kampung adalah keharusan untuk menjauhkan penduduk kampung dari malapetaka yang akan terjadi sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh keduanya. Selain itu, ada motif bahwa keduanya hendak menutupi aib mereka dari penduduk kampung. Mereka merasa malu dengan perbuatan mereka melakukan inses.

¹ Sejenis daun pandan

² Peristiwa tersebut dinamakan *moluwu*

³ *Koloimba* diartikan sebagai tempat persetubuhan wanita yang bernama Imba.

Miteme keenam sudah menunjukkan akibat dari hubungan inses dua orang bersaudara itu, yakni kelahiran anak mereka yang menyerupai buaya dan lama-kelamaan menjelma menjadi buaya kuning bernama *Bokeo Sorume*. Penjelmaan buaya di sini sebagai simbol dari hasil perbuatan buruk, serakah, dan rakus sebagaimana yang dilakukan oleh kakak Imba dengan menyetubuhi adik kandungnya sendiri (Imba). Perbuatan buruk akan menghasilkan hasil yang buruk pula.

Miteme ketujuh yakni meninggalnya Imba dan perubahan kakaknya menjadi ikan gabus merupakan puncak dari akibat perbuatan mereka melakukan inses. Pada miteme ini dapat ditafsirkan bahwa kematian dan perubahan wujud itu merupakan sanksi terbesar yang harus mereka terima. Sanksi yang timbul akibat dari suatu pelanggaran besar bukan hanya berasal dari masyarakat (mereka harus pergi meninggalkan kampung), melainkan dapat juga berasal dari alam. Ini menunjukkan bahwa alam pun akan murka dan tidak akan pernah dapat menerima serta memaafkan perbuatan serupa itu. Peristiwa ini merupakan bentuk dari penyelesaian pernikahan inses yang terjadi dalam budaya Tolaki. Siapapun yang berani melakukan pelanggaran harus disingkirkan agar tidak menimbulkan malapetaka bagi masyarakat di sekitarnya.

Terkait dengan upaya untuk menyingkirkan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap larangan inses dalam budaya masyarakat Tolaki, disebutkan dalam cerita bahwa pondok tempat tinggal Imba melahirkan anaknya lama-kelamaan berubah menjadi sebuah rawa yang dinamakan rawa *Koloimba*. Hingga sekarang rawa itu konon masih dapat dijumpai di Lalolae dan oleh masyarakat penutur mitos ini tetap meyakini bahwa terjadinya rawa itu terkait dengan mitos ini. Penjelmaan pondok Imba menjadi rawa dapat ditafsirkan sebagai simbolisasi keinginan para leluhur untuk menegakkan pranata dalam masyarakat agar tidak melanggarnya. Wujud dari rawa *Koloimba* sebagai bukti nyata untuk menguatkan peringatan pada masyarakat agar tidak nekad melakukan hubungan inses.

c. Pernikahan dalam Mitos *Koloimba*

Dalam mitos *Koloimba* tidak diceritakan tentang pernikahan. Meskipun demikian, hal itu tidak berarti bahwa dalam mitos ini tidak dapat ditemukan keterangan tentang sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan. Peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pernikahan secara implisit terdapat pada miteme: (1) kakak Imba tidak mau menikah kecuali dengan perempuan yang kecantikannya sama dengan Imba; (2) kakak imba tidak mampu mengatasi nafsu birahinya sehingga disetubuhinya Imba; (3) Imba dan kakaknya meninggalkan kampung dan tinggal di dalam hutan. Berikut ini tafsir yang dapat dikemukakan atas miteme-miteme tersebut.

Pertama, kakak Imba tidak mau menikah kecuali dengan perempuan yang kecantikannya sama dengan Imba. Miteme ini menunjukkan adanya dorongan inses antara dua orang bersaudara kandung. Hal itu terjadi karena kakak Imba sangat terpesona dengan kecantikan adiknya sendiri sehingga dia seolah-olah menutup pintu hatinya untuk gadis-gadis yang menurutnya tidak secantik adiknya. Sikap ini merupakan sikap yang sangat buruk dalam budaya Tolaki karena mempunyai hasrat terhadap saudara kandungnya sendiri yang seharusnya dilindunginya. Sikap seperti itu biasanya akan mendapatkan cemoohan dari masyarakat, misalnya seperti tidak ada orang lain saja yang akan menikahi adiknya.

Sesungguhnya, miteme ini mengemukakan tentang dorongan inses yang datangnya dari satu pihak saja, yaitu kakak Imba. Imba dalam cerita tidak digambarkan pada bagian awal bahwa dia memiliki perasaan yang sama dengan kakaknya. Dalam hal ini, jika mitos *Koloimba* dibandingkan dengan mitos Dewi Sri sifatnya tidak linear karena kalau dalam mitos Dewi Sri, dua orang bersaudara dinyatakan sama-sama saling menyukai. Perasaan yang sama itu ditunjukkan dengan keinginan mereka untuk mendapatkan pasangan yang satu sama lain harus memiliki rupa yang sama persis dengan rupa saudaranya. Sementara itu, dalam mitos *Koloimba*, tokoh yang memiliki perasaan cinta hanya dimiliki oleh kakak Imba.

Kedua, kakak Imba tidak mampu mengatasi nafsu birahinya sehingga disetubuhinya Imba. Miteme ini menunjukkan terjadinya inses antara dua orang bersaudara kandung. Sikap yang dilakukan oleh kakak Imba terhadap adik kandungnya sendiri merupakan simbolisasi dari sifat-sifat hewani sebab sangat jarang seorang manusia tega menyetubuhi adiknya kandungnya sendiri. Hal itu menunjukkan tentang kurangnya peradaban yang dimilikinya sebagai seorang manusia sehingga akibat dari itu, mereka tidak seharusnya tinggal bersama-sama dengan masyarakat yang beradab. Mereka lebih pantas tinggal di dalam hutan, dikucilkan dari masyarakat. Hutan dalam mitos ini sebagai simbol dari dunia yang tidak terikat dengan norma-norma. Oleh karena itu, mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran selayaknya tinggal dalam lingkungan yang hanya dihuni oleh hewan. Dalam hal ini, karena perbuatan yang mereka lakukan, mereka disamakan dengan hewan. Untuk itu, mereka ketika meninggalkan kampung lebih memilih mengasingkan diri di dalam hutan. Anak yang mereka lahirkan kelak pun tidak ubahnya seperti hewan, yaitu seorang anak yang rupanya menyerupai buaya dan lama-kelamaan anak itu menjelma menjadi buaya yang tinggal di dalam rawa.

Penggambaran akibat dari sifat-sifat kebinatangan ini juga terdapat pada perubahan tokoh kakak Imba ketika terjadi malapetaka, yaitu menjadi ikan gabus. Perubahan itu menunjukkan bahwa tidak seharusnya mereka hidup menjadi manusia, tetapi lebih tepat sebagai hewan. Kakak Imba berubah menjadi hewan air sebagai manifestasi dari hubungan yang nantinya akan terjadi antara kakak Imba dengan anak hasil hubungan terlarangnya yang lebih dahulu telah berubah menjadi buaya. Mereka tinggal bersama-sama dalam tempat yang

sama, yaitu dalam rawa. Sementara itu, Imba sendiri diceritakan meninggal dunia lalu jasadnya tenggelam setelah melakukan persalinan.

Ketiga, Imba dan kakaknya meninggalkan kampung dan tinggal di dalam hutan. Miteme ini mengungkapkan akibat dari pernikahan inses yang dilakukan oleh kakak beradik. Mereka keluar dari kampung menuju ke hutan untuk tinggal dapat ditafsirkan sebagai (1) penolakan dari masyarakat atas diri mereka karena dianggap telah melanggar tabu, oleh karena itu mereka harus rela keluar dari kelompok masyarakat; (2) menuju ke hutan berarti mereka dianggap sama rendahnya dengan binatang sehingga layak untuk tinggal bersama di dalam hutan; dan (3) upaya untuk menghindarkan dan menjauhkan penduduk dari ancaman bencana atau malapetaka yang dapat menimpa seluruh warga perkampungan sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukan.

Kepergian Imba bersama kakaknya untuk menghindari bencana yang dapat menimpa warga di sekitarnya tidak urung menimbulkan korban. Ironisnya, bencana itu timbul bertepatan pada saat Imba akan melahirkan anaknya. Peristiwa ini dapat dianggap sebagai simbol dari puncak kemurkaan alam akibat perbuatan dua anak manusia yang telah melanggar ketentuan adat. Hujan yang turun terus-menerus tiada henti menyebabkan air menggenangi daerah di sekitar pemukiman Imba dengan kakaknya dan pada akhirnya menenggelamkan kampung beserta warganya. Air yang tidak henti-hentinya keluar dari perut bumi menyebabkan air tergenang di sekitar tempat itu dan menjelma menjadi rawa yang hingga sekarang dikenal dengan nama rawa *Koloimba*.

Peristiwa tenggelamnya perkampungan beserta warga yang ada di sekitar tempat itu merupakan sebuah simbol tentang sikap tanggung jawab bersama. Pelanggaran yang dilakukan oleh Imba dan kakaknya bukan hanya menjadi tanggung jawab mereka berdua, melainkan seluruh warga perkampungan turut bertanggung jawab terhadap terjadinya pelanggaran itu. Sebagai warga masyarakat yang baik, seharusnya bersama-sama menegakkan aturan yang ada sehingga tidak mudah terjadi pelanggaran. Aturan itu dapat dianggap sebagai pengikat di antara sesama warga sehingga apabila salah satu warganya dianggap telah memilih jalan yang keliru, sudah menjadi kewajiban bersama untuk saling memperingatkan. "Pengusiran" bukanlah satu-satunya cara penyelesaian yang baik, melainkan bagaimana meluruskan kembali hal-hal yang dianggap keliru sehingga bersama-sama akan memperbaiki kembali kekeliruan itu. Sebagai wujud dari cara penyelesaian yang kurang baik itu, seluruh warga kampung ikut pula ditenggelamkan pada tempat yang sama, yaitu rawa *Koloimba*.

d. Pernikahan Ideal Masyarakat Tolaki: Pembalikan Mitos *Koloimba*

Pantangan pernikahan inses dalam budaya Tolaki sesungguhnya dilatarbelakangi oleh asas eksogami, yakni merumpun seperti yang menjadi tujuan pernikahan dalam masyarakat Tolaki. Menurut Tarimana, (1993: 142 – 147) dalam hal pernikahan, masyarakat Tolaki memakai tiga istilah, yaitu *medulu* yang berarti berkumpul, bersatu; *mesanggina* yang berarti makan bersama dalam satu piring; dan istilah yang paling umum adalah *merapu* yang berarti merumpun, keadaan ikatan suami istri, anak-anak, mertua-menantu, paman-bibi, ipar, kemenakan, sepupu, kakek-nenek, dan cucu, yang merupakan suatu pohon yang rimbun dan rindang. Adapun mitos dan serangkaian kepercayaan akan timbulnya malapetaka atau bencana sebagai akibat pelanggaran pantangan kawin yang terdapat dalam masyarakat Tolaki adalah serangkaian usaha para pendahulu untuk menegakkan norma itu agar rumpun keluarga itu tetap menyatu dan semakin subur.

Sebagai pembalikan dari pantangan pernikahan yang terimplisit dalam mitos *Koloimba*, penulis akan menguraikan sedikit mengenai pernikahan ideal dalam masyarakat Tolaki. Dalam masyarakat Tolaki, pernikahan yang dianggap paling ideal adalah pernikahan yang terjadi antara sepupu sekali (*poteha monggo aso*), sepupu derajat dua kali (*poteha monggo ruo*), dan sepupu derajat tiga (*poteha menggotolu*). Perkawinan antara saudara sepupu itu dimaksudkan untuk menciptakan perkawinan *mekaputi* (ikat-mengikat) antarkeluarga. Perkawinan yang ideal semacam ini dalam masyarakat Tolaki pada dasarnya ditujukan pada adanya harapan agar harta kekayaan tidak jatuh pada pihak lain di luar lingkungan luas dan agar potensi dan integrasi keluarga asal dari satu nenek moyang tetap terbina dan dipertahankan.

Dari gambaran mengenai pernikahan ideal dalam masyarakat Tolaki serta tujuan dan harapan yang terkandung dalam pernikahan itu dapat dipahami bahwa keberadaan mitos *Koloimba* sebagai salah satu bentuk dari upaya yang dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Tolaki untuk tetap menegakkan dan mempertahankan norma-norma dan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat tersebut.

5. Penutup

Analisis struktural yang telah dilakukan pada mitos *Koloimba* memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut. **Pertama**, mitos *koloimba* dapat dikatakan sebagai mitos yang mengandung pesan larangan inses. Inses yang terjadi adalah inses antara saudara kandung, saudara laki-laki dan saudara perempuan.

Kedua, mitos *Koloimba* dapat dikatakan sebagai salah satu unsur budaya yang menguatkan dan melegitimasi suatu aturan tentang pernikahan yang terdapat dalam masyarakat Tolaki. Mitos ini membuka cakrawala berpikir untuk mengetahui lebih dalam mengenai jodoh yang sepatasnya dinikahi menurut budaya

Tolaki sebab adanya larangan tentu disertai pula dengan suatu anjuran atau pengarahannya tentang perkawinan eksogami.

Ketiga, sebagai "proses komunikasi", mitos *Koloimba* memuat pesan mengenai aturan pernikahan menurut budaya Tolaki. Untuk dapat memahaminya diperlukan sebuah paradigma yang dapat memberikan penjelasan mengenai hal itu. Untuk itulah digunakan paradigma struktural Levi-Strauss sehingga mampu menampilkan struktur cerita, relasi-relasi dengan struktur lain, serta struktur budaya masyarakat penutur mitos tersebut (Tolaki). Dengan demikian, mitos ini dapat menjadi jendela budaya masyarakat Tolaki.

Keempat, terbentuknya Rawa *Koloimba* sebagai akibat dari pernikahan inses Imba dengan kakaknya merupakan peristiwa geologis yang terjadi di masa lampau yang dihubungkan dengan mitos ini untuk mengukuhkan pranata atau norma dalam masyarakat Tolaki. Yang jelas, masyarakat masih memercayai keterkaitan antara peristiwa geologis itu, yaitu keberadaan Rawa *Koloimba* dengan mitos *Koloimba*.

Daftar Pustaka

- Ahimsa-Putra, Hedy Shry. 2006. *Strukturalisme Levi-Strauss: Mitos dan karya Sastra*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Fokkema, D.W., 1998, *Teori Sastra Abad Kedua Puluh (Theories of Literature in the Twentieth Century)*, Gramedia, Jakarta.
- Junus, Umar. 1981. *Mitos dan Komunikasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Nasruddin dan Haruddin. 1998. *Prosa dalam Sastra Tolaki*. Ujung Pandang: Balai Bahasa Ujung Pandang.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tarimana, Abdurrauf. 1993. *Kebudayaan Tolaki*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wirajaya, Asep Yudha. 2008. "Larangan Incest dalam Mitos *Sangkuriang*: sebuah Telaah Struktural Antropologi Lavi-Strauss". *Seranta*. Semarang: Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Hlm. 48 – 63.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Komisi E
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 20 Juli 2010, 13.00—14.30 wita
Judul Makalah	: Larangan Inses dalam Mitos Koloimba: Analisis Struktural Levi-Strauss
Penyaji/Pembicara	: Uniawati, S.Pd., M.Hum.
Pemandu	: Drs. Muh. Djusni
Pencatat	: Asri, S.S., M.Hum.
Jumlah Peserta	: 40 orang

TANYA JAWAB

Drs. Syamsul Bahri (Balai Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Makassar)

Pertanyaan/Saran

Anda menyajikan makalah tentang sastra yang menurut hemat saya kurang tepat dalam kegiatan Kongres Bahasa Daerah yang dilaksanakan saat ini. Sebaiknya Anda menulis bahasa yang bersentuhan langsung dengan bahasa.

Jawaban/Tanggapan

Kongres Bahasa Daerah yang dilaksanakan sekarang bukan hanya membahas masalah kebahasaan semata, melainkan juga memberikan ruang untuk membicarakan persoalan kesastraan. Berbicara tentang sastra secara tidak langsung telah menyinggung persoalan kebahasaan sebab pada hakikatnya media sastra adalah bahasa.

Muh. Alamsyah, S.Pd., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Kendari)

Pertanyaan/Saran

Dalam mitos *Koloimba*, seperti yang tertuang dalam makalah Saudara, tidak disebutkan nama tokoh Laki-laki sebagai pelaku inses, tetapi hanya nama tokoh perempuannya saja. Apakah memang benar seperti itu adanya atau sesungguhnya memiliki nama?

Jawaban/Tanggapan

Sepanjang penelusuran saya mengenai mitos *Koloimba*, memang belum pernah mendengar siapa nama laki-laki itu.

La Taridi (Tokoh Masyarakat Bau Bau)

Pertanyaan/Saran

Menurut hemat saya, pengusiran pelaku inses ke luar dari kampung bukan penyelesaian yang baik. Dalam adat kami, pelaku yang melakukan pelanggaran seperti itu harus dibunuh dengan ditenggelamkan ke dalam laut. Bagaimana menurut Ibu tentang adat kami itu kaitannya dengan mitos yang dibahas?

Jawaban/Tanggapan

Ya, memang tindakan itu dinilai bukan penyelesaian terbaik sebab masyarakat sesungguhnya ikut bertanggung jawab terhadap kejadian seperti itu. Dalam mitos diceritakan bahwa seluruh penduduk kampung tenggelam akibat pelanggaran yang dilakukan oleh dua orang bersaudara itu. Hal itu menunjukkan bahwa pengusiran dengan tujuan menghindarkan penduduk dari malapetaka bukan solusi yang terbaik sebab pada akhirnya seluruh penduduk kampung pun ikut pula tenggelam.

JEJAK BAHASA MELAYU (INDONESIA) DALAM BAHASA MUNA

Nurhayati
(Universitas Hasanuddin)

1. Pengantar

Menurut John Crawfurd dalam bukunya berjudul “*On The Malayan and Polinesia Languages and Races*” bahwa bahasa-bahasa yang ada di Nusantara ini menunjukkan adanya keserumpunan bahasa. Kemudian istilah tersebut menjadi populer untuk menyebut keserumpunan bahasa-bahasa dari semenanjung Melayu sampai Polinesia. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan Bahasa Muna (salah satu bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara) masuk dalam rumpun bahasa Austronesia tepatnya rumpun Austronesia Barat Daya.

Untuk mengetahui apakah dua bahasa itu serumpun atau tidak maka dapat kita gunakan teori linguistik historis komparatif yang dikemukakan oleh Grimm yang dilengkapi oleh Verner. Metode linguistik historis komparatif sebenarnya sudah lama diterapkan dalam telaah kekerabatan antara bahasa-bahasa Indo-Eropa.

Di Jerman pada abad ke-19 merupakan abad Linguistik Historis Komparatif karena didorong oleh beberapa kenyataan bahwa adanya persamaan-persamaan bahasa yang dapat dilihat dalam perbandingan bunyi dan makna. Pada abad itu pula ditemukan adanya persamaan antara Bahasa Sanskrit dengan bahasa di Eropa (Bahasa Yunani dan Latin).

Salah satu tokoh linguistik historis komparatif adalah Rasmus Rask berasal dari Denmark telah menulis bahasa-bahasa *Old Norse* dan *Old English* dalam bahasa Denmark tahun 1818. Tokoh lain adalah Jacob Grimm yang terkenal dengan Hukum Grimm. Hukum Grimm menyatakan bahwa dalam Bahasa Latin dan Yunani terdapat kata-kata yang berbunyi p, t, k maka dalam bahasa-bahasa Germania akan berbunyi f, th, h misalnya dalam bahasa Latin kata *pater* (bapak) berkorespondensi dengan bahasa Jerman *vater*, Latin *frater* (saudara laki-laki) menjadi *brother* dalam Bahasa Inggris

Selanjutnya, Dalam Bahasa Latin *genu* (lutut) menjadi *knee* dalam Bahasa Inggris dan *knie* dalam Bahasa Jerman. Teori Grimm ini dilengkapi oleh Karl Verner tahun 1877, misalnya dalam bahasa Indo-Eropa perubahan bunyi [s] ke [r] seperti *was* menjadi *war* dan *were* disebut perubahan rotasi.

Berdasarkan teori perbandingan bahasa dalam bahasa Indo-Eropa tersebut di atas dapat digunakan pula pada bahasa-bahasa Austronesia. Dalam hubungan tersebut tulisan ini akan memaparkan jejak bahasa Melayu (Indonesia) dengan Bahasa Muna. Seperti kita ketahui bahwa bahasa Melayu dan Bahasa Muna berasal dari rumpun Austronesia khususnya Austronesia Barat Daya (Parera, 1991: 116-121).

Dalam beberapa kata dalam bahasa Melayu (Indonesia) juga terdapat dalam Bahasa Muna. Misalnya kata *mati* (Melayu) menjadi *mate* (dalam Bahasa Muna), kata *lima* (Melayu) menjadi *dima* (Muna), kata *lidah* (Melayu) menjadi *lila* (Muna). Kata-kata sekerabat tersebut sebagai pertanda adanya kekerabatan antara bahasa Melayu dengan Bahasa Muna. Berdasarkan teori perbandingan bahasa tersebut, seberapa banyakkah jejak bahasa Melayu dalam Bahasa Muna melalui perbandingan bunyi dan makna kata dengan menggunakan daftar 200 kata oleh Morris Swadesh. Untuk menentukan apakah kata-kata kedua bahasa ini sekerabat, untuk membuktikannya dilakukan pengecekan pada kata-kata dalam bahasa lain yang serumpun.

Setelah diketahui bahwa bahasa Melayu dan Bahasa Muna serumpun, maka perlu diketahui pula kapan kedua bahasa tersebut terpisahkan dari bahasa induknya. Untuk mengetahui ini digunakan metode leksikostatistik. Jadi, yang menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini adalah:

1. seberapa jauh jejak bahasa Melayu dalam bahasa Muna?
2. kapan bahasa Melayu dan bahasa Muna terpisah dari bahasa Induknya?

2. Jejak Bahasa Melayu dalam Bahasa Muna

2.1 Metode Historis Komparatif

Telaah kekerabatan antara bahasa dengan menggunakan metode komparatif telah banyak dilakukan dalam bahasa-bahasa Indo-Eropa. Salah seorang pakar historis komparatif adalah Ludwig Karl Grimm dalam bukunya *Deushe Grammatik* telah membandingkan bahasa-bahasa Germania yang menyatakan bahwa bahasa-bahasa Indo-Germania diturunkan dari Bahasa Sanskrit. Beliau mencontohkan bahwa kata *vahati* (Bahasa Sanskrit) menjadi *vehit* dalam Bahasa Latin. Berdasarkan telaahnya ini maka lahirlah hukum Grimm.

Karakteristik bunyi setiap bahasa tentu berbeda. Meskipun hukum Grimm ini tidak diterapkan pada semua bahasa, akan tetapi Grimm telah meletakkan dasar untuk menganalisis kekerabatan bahasa-bahasa. Teori Grimm ini dilengkapi Karl Verner dengan sistem rotasi. Misalnya, untuk bahasa Indo-Eropa perubahan bunyi [s] ke [r] dalam kata *was* menjadi *war* dan *were*.

2.1.1 Sistematika dan Penerapan Metode Komparatif

Metode komparatif bertumpu pada korespondensi bunyi dan makna. Oleh karena itu, maka perhatian utama adalah melakukan satu sistem bandingan bunyi. Perbandingan bunyi konsonan dimulai dari bunyi yang homorgan. Palmer telah membandingkan induk bahasa Indo-Eropa memiliki seri konsonan hambatan tak bersuara /p, t, k, q/ dan beraspirasi /ph, th, kh, qh/ serta konsonan hambat bersuara / b, d, g, g^w/ dan beraspirasi /bh, dh, gh, g^wh/.

Dalam menentukan kata sekerabat dalam bahasa-bahasa serumpun bukanlah pekerjaan ringan, sebab ada kata yang berkorespondensi tapi belum tentu diturunkan dari satu induk yang sama. Misalnya kata dua (Bahasa Indonesia), kata ini mirip dengan kata *duo* dalam Bahasa Latin, *two* Bahasa Inggris, *dva* dalam Bahasa Sansekerta. Tetapi setelah dikaji ternyata kata tersebut bukan dari Indo-Eropa tetapi dari kata Austronesia karena kata ini ditemukan dalam kata *rua* (Sikka), *rwa* (Kawi), *rua* (Makassar), *da'dua* (Mandar), *dua* (Bugis), *dalwa* (Tagalog), dan *duha* (Bisaya). Untuk pengecekan kata sekerabat adalah: (1) kesesuaian dalam kaidah-kaidah sintaksis, morfologi, dan bunyi; (2) kesesuaian dalam kosakata deskriptif dan anomatopea; (3) kesesuaian dalam kosakata yang mudah dipinjam; (4) kesesuaian yang sering dan banyak/besar dalam format (prefiks, sufiks, kata bantu, dan korespondensi bunyi); (5) banyak kesesuaian dalam kosakata dasar dan korespondensi bunyi (Raimo dalam Parera, 1991: 99).

Penerapan metode komparatif untuk menentukan keserumpunan bahasa-bahasa Indo-Eropa lahiriah Hukum Grimm dan Hukum Verner. Atas dasar hukum tersebut juga diterapkan dalam menentukan keserumpunan bahasa di Asia, Samudra India, dan Pasifik, Tiongkok dan Jepang. Untuk bahasa-bahasa di Nusantara beberapa pakar telah menggunakan metode komparatif ini dalam penelitiannya. Di antara para pakar tersebut adalah Prof. J. Gonda dalam bukunya "*Opmirkingen Over de Toepassing der Comparative Methode op de Indonesche Talen, Voornamelijk in Verband Met Hun Woordstructuur*". Dalam bukunya Gonda memberikan catatan tentang penerapan metode komparatif dalam bahasa-bahasa nusantara. Salah seorang pelopor telaah bandingan historis bahasa-bahasa Austronesia adalah Herman Neobronner van der Tuuk (1882-1894). Beliau benar-benar tokoh linguistik komparatif dalam bahasa-bahasa Austronesia dengan menekuni bahasa Batak. Beberapa karya beliau adalah Kamus Tata Bahasa Batak-Toba, Batak Dairi, Batak Angkola Mandailing. Karya terakhirnya adalah Kamus Kawi-Bali-Jerman. Untuk metode historis komparatif, beliau dikenal dengan Hukum van der Tuuk I RGH, Hukum van der Tuuk II RLD diperluas, RDGH dan RDGL.

Tokoh lain adalah Prof. Dr. H. Kern (1833-1917) dengan bukunya berjudul "*Taalkundige Gegevens ter Bepaling van Stamland der Maleisch-Polynesische Volken*". Intinya buku ini melihat negeri asal bahasa-bahasa Melayu-Polinesia dengan menggunakan 30 daftar kosakata Kern.

Dr. Renward Brandstetter (1860-1942) menulis buku "*Wurzel und Word ini den Indonesischen Sprachen*". Tujuan utama buku ini ditulis untuk mengungkap akar kata dan kata dalam bahasa-bahasa Indonesia. Dalam penelitiannya ia menemukan akar kata "lit" untuk kata belit, sulit, kulit, lilit dan akar kata "suk untuk kata tusuk, masuk, rasuk, pasok, dan susuk. Beliau menyimpulkan bahwa struktur akar kata bahasa Indonesia bersuku satu dengan pola KV dan KVK.

2.3 Jejak Bahasa Melayu dalam Bahasa Muna

2.3.1 Perubahan Bunyi

a. Perubahan Bunyi Vokal

B. Melayu		B. Muna	
baru	[a]	buou	[u]
basah	[a]	bekhe	[e]
gali	[a]	seli	[e]
ular	[a]	ule	[e]
takut	[a]	tei	[e]
benar	[e]	banakha [a]	
besar	[e]	bala	[a]
benih	[i]	wine	[e]
hati	[i]	ate	[e]
lidah	[i]	lela	[e]
air	[i]	oe	[e]
mati	[i]	mate	[e]
pikir	[i]	fekikhi	[e]
pohon	[o]	puu	[u]

Dari data di atas terlihat bahwa bunyi [a] berrubah menjadi bunyi [o], [u], dan [e] baru menjadi *buou*, *basah* menjadi *bekhe*, *gali* menjadi *seli*, ular menjadi ule, takut menjadi takut menjadi tei. Bunyi [e] menjadi [a] pada kata benar menjadi banakha, kata *besar* menajadi *bala*, kata *pikir* menjadi *fikikhe*. Bunyi [i] menjadi

[e] pada kata *benih* menjadi *wine*, kata *hati* menjadi *ate*, kata *lidah* menjadi *lela*, kata *air* menjadi *oe*, dan kata *mati* menjadi *mate*, bunyi [o] menjadi [u] pada kata *pohon* menjadi *puu*.

Untuk perubahan bunyi vokal dari bahasa Melayu dengan bahasa Muna tersebut apakah benar-benar kata yang sekerabat. Untuk pembuktian ini akan dibandingkan dengan kata bahasa daerah lainnya yang masuk dalam rumpun Austronesia Barat Daya. Misalnya kata *baru* (Melayu), *buou* (Muna), *beru* (Makassar), *baru* (Mandar, Bugis). Kata *basah* (Melayu), *bekhe* (Muna), *base* (Mandar), *basa* (Makassar). Kata *ular* (Melayu), *ule* (Muna), *ula* (Bugis), *ulara* (Makassar), *ulo* (Mandar). Kata *benih* (Melayu), *bine* (Bugis, Makassar), *banne* (Mandar), kata *hati* (Melayu), *ate* (Muna), *ati* (Bugis), *ate* (Mandar). Kata air (Melayu), *oe* (Muna), *we* (Bugis), *wai* (Mandar). Kata *mate* (Melayu), *mate* (Muna), *mate* (Bugis, Makassar, Mandar). Kata pikir (Melayu), *fekikki* (Muna), *pikkir* (Mandar), *pikkiri* (Bugis, Makassar), dan kata *pohon* (Melayu), *puu* (Muna), *ponna* (Mandar), *pong* (Bugis).

Dari hasil perbandingan perubahan bunyi vokal pada kata Melayu dan Muna di atas menunjukkan bahwa kata-kata dengan perubahan vokal tersebut adalah kata sekerabat.

b. Perubahan Konsonan

Bhs. Melayu		Bhs. Muna	
buah	[b]	wuah	[w]
buluh	[b]	wuluh	[w]
debu	[b]	ngawu	[w]
lebar	[b]	ewa	[w]
kabut	[b]	pakakhawu	[w]
balik	[b]	doli	[d]
belah	[b]	kela	[k]
busuk	[s]	bukhu	[kh]
besar	[s]	bala	[l]
api	[p]	ifi	[f]
tipis	[p]	nifis	[f]
dimana	[d]	namai	[n]
di situ	[d]	naicu	[n]
di sini	[d]	naini	[n]
dorong	[d]	sokho	[s]
	[r]		[kh]
kering	[r]	kele	[l]
dua	[d]	khuwa	[kh]
lidah	[d]	lelah	[l]
langit	[ŋ]	lani	[n]
lima	[l]	dima	[d]
tua	[t]	cua	[c]
gali	[g]	seli	[s]

Data di atas ditunjukkan bahwa bunyi [b] berubah menjadi bunyi [w], [d], [k]. Pada kata *buah* dalam bahasa Melayu menjadi *wuah* dalam bahasa Muna, *buluh* menjadi *wuluh*, *debu* menjadi *ngawu*, *lebar* menjadi *ewa*, *kabut* menjadi *pakakhawu*. Bunyi [p] menjadi [f] pada kata *api* menjadi *ifi*, *tipis* menjadi *nifis*. Bunyi [d] menjadi [n], [s], [kh], dan [l] pada kata *di situ* menjadi *naicu*, *di sini* menjadi *naini* dan kata *sorong* menjadi *soho*, kata *dua* menjadi *khuwa*, *lidah* menjadi *lelah*. Bunyi [ŋ] menjadi [n] kata *langit* menjadi *lani*, bunyi [l] menjadi [d] kata *lima* menjadi *dima*, bunyi [t] menjadi [c] kata *tua* menjadi *cua*, bunyi [g] menjadi [s].

Seperti halnya perubahan bunyi vokal di atas, perubahan konsonan pada kata di atas apa juga merupakan kata sekerabat. Untuk pembuktiannya akan dilihat dalam bahasa Bugis, Makassar, dan Mandar. Kata *buah* (Melayu), *wuah* (Muna), *buah* (Bugis dan Mandar). Kata *buluh* (Melayu), *bulu* (Mandar, Bugis, dan Makassar), kata *debu* (Melayu), *ngawu* (Muna), *dabbu* (Mandar), *awu* (Bugis), kata *lebar* (Melayu), *ewa* (Muna), *lebba* (Bugis), *luara* (Makassar), kata *kabut* (Melayu), *pakakhawu* (Muna).

Kata *belah* (Melayu), *kela* (Muna), *balla* (Mandar), kata *busuk* (Melayu), *bukhu* (Muna), *bonno* (Makassar), *kebbong* (Bugis), *bosi* (Mandar), kata *tipis* (Melayu), *nifis* (Muna), *nipi* (Bugis), *nipis* (Mandar), *tipisi* (Makassar), kata *di mana* (Melayu), *namai* (Muna), *innaroi* (Mandar), kata *dorong* (Melayu), *sorong* (Muna), *sorong* (Bugis, Mandar), *sorongi* (Makassar). Kata *dua* (Melayu), *khuwa* (Muna), *dua* (Bugis, Makassar, Mandar), kata *langit* (Melayu), *lani* (Muna), *langi'* (Mandar, Bugis, Makassar), kata *lima* (Melayu), *dima* (Muna), kata *tua* (Melayu), *cua* (Muna), *toa* (Bugis dan Makassar), kata *gali* (Melayu), *seli* (Muna), *kali* (Mandar), *kae* (Bugis).

Perubahan konsonan kata Melayu dan Muna kemudian dibandingkan tiga bahasa serumpun, dapat disimpulkan bahwa bahasa Melayu dan Muna sekerabat.

c. Perubahan Konsonan ke Vokal

baru	[r]	buou	[o]
berat	[r]	bie	[e]

Perubahan konsonan [r] ke vokal [o] pada kata baru dan buou dan perubahan konsonan [r] ke vokal [e] pada kata berat dan bie. Kata *baru* (Melayu), *buou* (Muna), *baru* (Bugis dan Mandar), *beru* (Makassar), kata berat (Melayu), *bie* (Muna), *bekkel* (Mandar). Untuk perubahan konsonan ke vokal seperti dua contoh di atas, maka dapat dikatakan bahasa Melayu dan Muna sekerabat.

2.3.2 Penambahan Bunyi/Suku Kata

a. Penambahan Bunyi/Suku Kata di Awal Kata

Bahasa Melayu	Bahasa Muna
abu	ngawu [ŋ]
akar	pakhaha /pa/
kabut	pakhakhawu /pakha/
kuning	kangkhuni /kang/
putih	kapute /ka/
isap	soso [s]
telur	unteli /un/

Penambahan bunyi [ŋ], [s] dan penambahan suku kata /pa/, /pakha/, /kang/, /ka/, un/ pada kata-kata yang dicontohkan di atas sekerabat dengan membandingkan dengan kata serumpun lainnya. Kata abu (Melayu), ngawu (Muna), abu (Mandar, Makasar), awu (Bugis), kata akar (Melayu), wake (Mandar), akara (Makassar), kuning (Melayu), *kangkhuni* (Muna), *unyir* (Bugis), *kunis* (Mandar), *kunyi* (Makassar), kata *putih* (Melayu), *kapute* (Muna), *pute* (Bugis, Mandar), kata *isap* (Melayu), *soso* (Muna), *sussur* (Mandar), kata *telur* (Melayu), *unteli* (Muna), *tello* (Bugis), *tallo* (Mandar).

b. Penambahan Bunyi Konsonan di Tengah Kata

Bahasa Melayu	Bahasa Muna
kuku	konisi /on/

Untuk penambahan bunyi/suku kata di tengah hanya di temukan satu kata yaitu pada kata kuku (Melayu), *konisi* (Muna), *kanuku* (Bugis, Makassar, Mandar). Dengan demikian kata ini dinyatakan sekerabat.

c. Penambahan Bunyi Konsonan/Suku Kata di Akhir Kata

Bahasa Melayu	Bahasa Muna
benar	banakha /kha/
pikir	fekikhi /khi/

Hanya ada dua kata yang ditemukan untuk penambahan bunyi/suku kata di tengah yaitu kata *benar* (Melayu), *banakha* (Muna), kata *pikir* (Melayu), *fikikhi* (Muna), *pikkir* (Mandar, Bugis), *pikkiri* (Makassar). Dengan demikian dua kata ini sekerabat.

2.4.1 Penghilangan Bunyi

a. Konsonan di Awal Kata

hati	ate [h]
kutu	ucu [k]
lebar	ewa [l]
sempit	impi [s]
hijau	idho [h]

Penghilangan bunyi di awal kata pada contoh di atas dapat disimpulkan bahwa kedua bahasa tersebut sekerabat. Untuk kata *hati* (Melayu), *ate* (Muna), *ate* (Mandar), *ati* (Makassar dan Bugis). Kata *kutu* (Melayu), *ucu* (Muna), *utu* (Bugis), *kutu* (Mandar dan Makassar), kata *sempit* (Melayu), *impi* (Muna), *nipi* (Bugis), *nipis* (Mandar), *tipisi* (Makassar), kata *hijau* (Melayu), *idho* (Muna),

b. Penghilangan Bunyi di Tengah Kata

di situ	naicu [s]
di sini	naini [s]
Pohon	puu [h]

Tiga contoh kata di atas terdapat penghilangan bunyi di tengah kata memperlihatkan kekerabatan dua bahasa yakni bahasa Melayu dan Muna. Kata *di situ* (Melayu), *naicu* (Muna), *kotu* (Bugis), *dittu* (Mandar), kata *di sini* (Melayu), *naini* (Muna), *dinne* (Mandar), *okkohe* (Bugis), kata *pohon* (Melayu), *puu* (Muna), *ponna* (Mandar).

c. Penghilangan Bunyi di Akhir Kata

balik		doli	[k]
busuk		bukhu	[k]
benih		weni	[h]
buah		wua	[h]
buluh		wulu	[h]
lidah		lila	[h]
putih		kapute	[h]
dorong		sokho	[ŋ]
gunung	gunu		[ŋ]
kuning		kangkuni	[ŋ]
potong		dodo	[ŋ]
tahun		tau	[n]
kulit		kuli	[t]
sempit		impi	[t]
berat		bie	[r]
telur		unteli	[r]
ular		ula	[r]
lebar		ewa	[r]
isap		soso	[p]

Ada 19 kata bahasa Melayu, dalam bahasa Muna hilang di akhir kata. Penghilangan konsonan [k] dalam kata *balik* (Melayu) menjadi *doli* (Muna), *bale'* (Bugis, Makassar, Mandar), kata *busuk* (Melayu), *bukhu* (Muna), *bohi* (Mandar), *botto* (Makassar). Penghilangan bunyi [h] pada kata *benih* (Melayu), *weni* (Muna), *bine* (Bugis), *banni* (Mandar), kata buah (Melayu), *wua* (Muna), *bua* (Mandar dan Bugis), kata *putih* (Melayu), *pute* (Makassar, Bugis, Mandar). Penghilangan bunyi [ŋ] pada kata *sorong* (Melayu), *sokho* (Muna), *sorong* (Makassar, Bugis, Mandar), kata *gunung* (Melayu), *gunu* (Muna), *bulu* (Bugis), kata *potong* (Melayu), *dodo* (Muna), *polong* (Makassar, Bugis, Mandar). Penghilangan bunyi [n] pada kata *tahun* (Melayu), *tau* (Muna), *taung* (Makassar, Bugis, mandar). Penghilangan bunyi [t] pada kata *kulit* (Melayu), *kulu* (Muna), *uli'* (Bugis). Penghilangan bunyi [r] pada kata *berat* (Melayu), *bie* (Muna), *bea* (Mandar), *battala'* (Makassar), kata *telur* (Melayu) *unteli* (Muna), *tallo* (Mandar), *tello* (Bugis), kata *ular* (Melayu), *ula* (Muna), *ulara* (Makassar), *ula* (Bugis), *ulo* (Mandar), kata *lebar* (Melayu), *ewa* (Muna), *lebba* (Bugis), *loang* (Mandar). Penghilangan bunyi [p] pada kata *isap* (Melayu) menjadi *soso* (Muna). Adanya penghilangan konsonan di akhir kata dalam bahasa Muna dengan pengecekan beberapa kata serumpun maka dapat disimpulkan kata-kata kedua bahasa itu serumpun.

2.5 Tahun Pisah Bahasa Melayu (Indonesia) dan Bahasa Muna dari Bahasa Induk

Dari 200 kosakata bahasa Melayu (Indonesia) dibandingkan dengan 200 kosakata bahasa Muna ditemukan 52 kata kerabat. Dengan demikian persentase kekerabatan kedua bahasa tersebut adalah 26 %. Berdasarkan persentasi tersebut dapat dihitung tahun pisah antara bahasa Melayu (Indonesia) dengan bahasa Muna dari bahasa induknya adalah:

$$\begin{aligned}
 t &= \frac{\log 26\%}{2 (\log 81\%)} \\
 &= \frac{-0,585}{-0,183} \\
 &= 3,197
 \end{aligned}$$

Tahun pisah adalah: 2010 - 3197 = - 1187 M atau 1187 SM

Jadi bahasa Muna terpisah dengan bahasa Melayu (Indonesia) diperkirakan berpisah dengan induknya pada tahun 1187 SM

3. Kesimpulan

Adanya korespondensi bunyi yang terlihat dalam perubahan bunyi, penambahan bunyi, dan penghilangan bunyi dengan makna yang sama terdapat 52 kata yang sekerabat. Setelah melalui pengecekan pada bahasa Makassar, Bugis, dan Mandar dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahasa Melayu dan bahasa

Muna sekerabat dengan persentase kekerabatan 26%. Berdasarkan rumus leksikostatistik diperoleh tahun pisah bahasa Melayu dan bahasa Muna dari bahasa induknya adalah 1187 SM.

Daftar Pustaka

- Collins, James. 1981. *Pertumbuhan Linguistik di Indonesia Timur: Bahasa Melayu dan Bahasa Asilulu di Pulau Ambon*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa.
- Collins, James. 2008. "Sejarah, Diversitas, dan Kompleksitas bahasa Melayu di Indonesia Timur, Pusat Studi Melayu Unhas.
- Keraf, Gorys. 1990. *Linguistik Bandingan Historis*. Jakarta, Gramedia.
- Muthalib, Abdul. 1986. *Sistem Perulangan Bahasa Mandar*. Makassar. Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia, Sulawesi Selatan.
- Nurhayati, 1985. "Sistem Perulangan dalam Bahasa Mandar". Skripsi Fakultas Sastra Unhas.
- Parera, Jos Daniel. 1991. *Kajian Lingusitik Umum Historis Komparatif dan Tipologi Struktural*. Jakarta, Erlangga.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Komisi A
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 20 Juli 2010, 13.00—14.30 wita
Judul Makalah	: Jejak Bahasa Melayu (Indonesia) dalam Bahasa Muna
Penyaji/Pembicara	: Dr. Nurhayati, M.Hum.
Pemandu	: Asrif, S.Pd., M.Hum.
Pencatat	: Rahmawati, S.S.
Jumlah Peserta	: 40 orang

TANYA JAWAB

Abdul Hadi W.M. (Universitas Paramadina)

Pertanyaan/Saran

Saya hanya akan menyarankan bahwa sebaiknya judul yang Saudari berbunyi “Kemiripan Bahasa Muna dalam Bahasa Melayu”, bukan “Jejak Melayu dalam Bahasa Muna”. Jika berbicara mengenai Bahasa Melayu, hampir semua bahasa daerah di Indonesia mengadopsi dan menyerap beberapa kosakata dari Bahasa Melayu. Kemudian bunyi kosakata tersebut disesuaikan dengan bunyi yang berlaku dalam bahasa daerah setempat. Olehnya itu, lahirlah bunyi-bunyi bahasa yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain pada kosakata yang mirip. Ada juga kosakata yang secara kebetulan (*by accident*) sama. Dalam ilmu bahasa, hal ini biasa terjadi.

MENGGALI NILAI-NILAI BUDAYA MELALUI KESANTUNAN BERBAHASA

Artanti
(Pusat Bahasa)

1. Pendahuluan

Letak geografis Provinsi Sulawesi Tenggara antara 3 derajat sampai 6 derajat Lintang Selatan dan 120 derajat—124 derajat Bujur Timur. Batas-batas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebelah utara berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, dan sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores; sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda dan sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.

Berdasarkan pembagian wilayah administratif, wilayah provinsi ini terdiri atas dua kota, yaitu Kendari dan Baubau. Selain itu, juga terdiri atas 10 kabupaten, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Muna, Buton, Kolaka Utara, Bombana, Konawe Selatan, Wakatobi, Konawe Utara, dan Buton Utara.

Keadaan alam provinsi ini sebagian besar merupakan daerah pegunungan dan perbukitan. Seratus dua puluh tiga buah gunung, 214 sungai yang mengalir di seluruh wilayah ini. Kondisi alam ini tercermin dalam sistem bahasa daerah di wilayah tersebut. Gunung dan sungai menjadi pembatas antara daerah satu dengan daerah lain yang menyebabkan adanya dugaan beberapa perbedaan dalam berkomunikasi.

Alkisah sejarah daerah Sulawesi Tenggara baru mulai dengan tumbuh dan berkembangnya beberapa kerajaan di wilayah tersebut bersamaan dengan masuknya pengaruh agama dan kebudayaan Islam. Kisah kerajaan yang sebagian bercampur mitos pada umumnya dianggap sebagai awal munculnya kerajaan di Sulawesi Tenggara. Pada masa pemerintahan Melamba sebagai *mokole* 'raja' Konawe (awal abad ke-16) datang utusan Sultan Buton yang mengimbau agar Konawe memeluk agama Islam. Masuknya agama Islam ke wilayah Sulawesi Tenggara memengaruhi pola pikir masyarakat berdasarkan aturan atau norma keislaman. Pola pikir ini terwujud dalam budaya daerah tersebut

2. Bahasa Sebagai Sarana Kebudayaan.

Dalam rangka menjunjung kebudayaan nasional sangat perlu dikembangkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai sosial budaya daerah. Bahasa dan sastra daerah perlu terus dibina dan dilestarikan dalam upaya mengembangkan serta memperkaya kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur kepribadian bangsa. Berkaitan dengan hal ini bahasa dan sastra daerah perlu dipelihara dan dilestarikan agar mampu menjadi ungkapan budaya suatu masyarakat. Ungkapan budaya masyarakat itu sebagai wujud kreativitas bangsa. Dikemukakan oleh Nababan (1986:38) fungsi bahasa dalam kebudayaan dapat diperinci menjadi 3 yakni (1) sarana perkembangan kebudayaan, (2) jalur penerus kebudayaan, dan (3) sebagai inventarisasi ciri-ciri kebudayaan. Dalam hubungan ini, kebudayaan Indonesia dikembangkan melalui bahasa. Diperkaya khazanah kebudayaan Indonesia disokong oleh kebudayaan daerah. Kebudayaan itu bisa terwujud apabila kebudayaan itu dimengerti, dipahami, dan dijunjung masyarakat pemilik kebudayaan itu sendiri. Dengan demikian, bahasa memainkan peranan penting bahkan sebagai promosi budaya.

Bahasa dikemas sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat memahami inti kebudayaan yang dipromosikan itu. Berikut ini dikemukakan beberapa adat masyarakat Sulawesi Tenggara.

Mosehe

Mosehe adalah suatu upacara sakral bermakna untuk kedamaian dan kemakmuran. *Mosehe Wonua* adalah salah satu dari tiga macam *Mosehe* yang ada mengandung hikmah sebagai upaya pemulihan kedamaian dan kemakmuran dari berbagai pertikaian yang terjadi. Guna mencapai kedamaian masyarakat Tolaki sangat diperlukan upacara *Mosehe* tersebut. Maksud dan tujuan upacara itu untuk menyampaikan permohonan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa agar semua anak bangsa diberi jalan yang benar agar mampu mengatasi segala bentuk kegiatan.

Mombesara

Upacara adat dengan menyampaikan suguhan *Osara* kepada para pejabat atau pemimpin yang patut dihormati. Maksud dan tujuan upacara ini untuk menyampaikan amanah dan harapan rakyat kepada pemimpinnya agar tidak terjadi penyimpangan sosial dan hukum serta adat. Rakyat menyadari sepenuhnya bahwa terganggunya kedamaian dan kemakmuran seluruh rakyat disebabkan telah banyaknya terjadi pelanggaran adat-istiadat hukum dan hak azasi manusia. *Osara* adalah kaidah hukum adat yang tidak tertulis. Adapun fungsi *Osara* adalah sebagai tempat penyampaian ide atau gagasan dalam kebudayaan Tolaki, sebagai pedoman hidup untuk terciptanya ketertiban sosial dan moral, serta sekaligus sebagai pemersatu dari pertentangan konseptual dan sosial dalam kebudayaan suku Tolaki.

Tari Lulo

Tari *Lulo* adalah salah satu tari tradisional suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. Tari ini dilakukan dengan cara menginjak-injak onggokan padi untuk melepaskan butir dari tangkainya dalam mempersiapkan benih yang akan ditanam. Berdasarkan kepercayaan suku Tolaki bahwa Dewi Padi /Dewi Sri senang apabila dipuja-puji oleh manusia. Pada saat menari diiringi gong dengan empat irama tertentu yakni *mude-mude salaka, pundi-madi telopo, tolongi dongi-dongi* serta *tundu watungganeko*.

Pola hidup, tingkah laku, adat-istiadat, cara berpakaian, dan unsur-unsur kebudayaan lainnya hanya biasa disampaikan, diterangkan atau ditranmisi melalui bahasa. Jadi, kebudayaan nenek moyang dapat kita terima dan diwariskan kepada anak cucu hanya melalui bahasa. Bahasa digunakan sebagai sarana ekspresi nilai-nilai budaya yang dapat disampaikan melalui bahasa sebagai jalur penerus kebudayaan.. Jika ditinjau lebih jauh, kebudayaan terbagi atas kebudayaan ekspresi, kebudayaan tradisi, dan kebudayaan fisik. Kebudayaan ekspresi meliputi perasaan, keyakinan, intuisi, ide, dan imajinasi kolektif. Kebudayaan tradisi meliputi nilai-nilai religi, adat-istiadat, dan kebiasaan. Kebudayaan fisik meliputi hasil-hasil karya asli yang dimanfaatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Hartoko, 1986:85).

Pendapat yang senada dikemukakan oleh Levi—Strauss, 1972:68) bahwa bahasa merupakan hasil kebudayaan, artinya bahasa yang digunakan atau diucapkan oleh suatu kelompok masyarakat adalah refleksi atau cermin keseluruhan kebudayaan masyarakat tertentu. Kondisi ini dijumpai pada masyarakat di Sulawesi Tenggara yang banyak menggunakan upacara ritual. Budaya semacam ini akan menghasilkan bahasa. Amatan peneliti upacara ritual banyak ditemukan di lokasi Sulawesi Tenggara. Pada saat pelaksanaan upacara selalu diawali dengan permohonan kepada Tuhan. Dengan ucapan *basmallah* sebagai awal upacara ritual. Hal ini menunjukkan hubungan keyakinan masyarakat terhadap agama yang dipeluknya..Ucapan permohonan kepada Tuhan menunjukkan kesantunan berbahasa yang mengacu pada maksim pujian (*approbation*) (Leech, 1983:123). Selanjutnya, Leech menambahkan bahwa kesantunan berbahasa mempertimbangkan skala antara penutur dan mitra tutur. Hal ini dijelaskan kaitan pematuhan antara penutur dan mitra tutur. Ketiga skala tersebut dikaitkan dengan pragmatik yakni skala biaya-keuntungan, skala keopsionalan, dan skala ketidaklangsungan. Skala keuntungan dihubungkan dengan daya ilokusioner tindak tutur. Misalnya, kupaskan jeruk terdengar santun, dengarkan lagu kesukaanmu Dewi Yul.... bagi pendengar terasa santun. Skala keopsionalan digunakan untuk menghitung berapa penutur memberi kepada pendengar atas pilihan dalam melaksanakan suatu tindakan. Perhatikan contoh kalimat dalam skala berikut ini.

Pindahkan gelas ini.....	lebih sedikit pilihan
Kalau tidak lelah, pindahkan gelas ini.....	pilihan dan santun
Kalau tidak lelah, dan ada waktu pindahkan gelas ini..	lebih banyak pilihan dan santun
Kalau tidak lelah, dan ada waktu, pindahkan gelas ini, itu kalau mau	pilihan santun.

Skala ketidaklangsungan dipakai untuk mengukur ketidaklangsungan tidak ujaran. Perhatikan contoh berikut ini.

Jelaskan permasalahanya	lebih kurang	santun
Saya ingin Saudara menjelaskan permasalahannya	langsung	santun

Masalah kesantunan berbahasa dalam Bahasa Bugis berdasarkan skala keuntungan dalam berkomunikasi seperti berikut ini.

<i>Tapapaccingi onrong jambanku</i>	biaya	kurang santun
<i>Talellekekka pao</i>	bagi pendengar	santun
<i>Tawerekka sure karebae ongko mejangnge</i>	keuntungan	santun
<i>Appesauki riolo</i>	keuntungan	lebih santun
<i>Taengkalingai iyare elong upojie</i>	bagi pendengar	santun
<i>Taenungngi kopitta</i>		santun.

Berikut ini kesantunan berbahasa berdasarkan skala keopsionalan, artinga digunakan untuk menghitung berapa penutur memberi pilihan dalam melaksanakan tindakannya. Semakin besar jumlah pilihan, makin santunlah berbahasa.

<i>Tapalettei iyare kotak 'e</i>	lebih sedikit	kurang santun
<i>Narekko de tamatekko, tapalettei iyare kotak 'e</i>	pilihan	santun
<i>Narekko de tametekko na engka mato wettuta,</i>		
<i>tapaletti iyare kotak 'e</i>	lebih banyak	

*Narekko de tamatekko na engka mato wettuta,
tapalettei iyare sibawa iyaro kotak'e*

pilihan

Skala ketidaklangsungan dipakai untuk mengukur ketidaklangsungan tindak ujaran. Perhatikan contoh berikut ini.

<i>Tapakenessai persoalanna</i>	lebih	kurang santun
<i>Uwellau 'wi ridi pakenessai persoalanna</i>	langsung	santun
<i>Maeloki ga pakennesai persoalanna?</i>	lebih banyak	santun
<i>Idi maeloki ga pakenessai persoalanna?</i>	lebih	santun
<i>Maweweki ga pakenessai persoalanna?</i>	tak langsung	santun

3. Permasalahan

Bagaimanakah cara tutur masyarakat di Sulawesi Tenggara? Hasil amatan peneliti dalam komunikasi dengan salah seorang penutur asli Sulawesi Tenggara menggunakan prinsip santun berbahasa. Amatan lain dari segi mantra-mantra suku Bugis menunjukkan santun berbahasa. Hal ini tercermin dalam upacara adat yang selalu diawali dengan permohonan kepada Tuhan agar tujuan dapat sukses.

Marilah kita perhatikan contoh kalimat berikut ini

Mantra Mappalili adalah mantra yang digunakan pada saat awal membuka atau mengerjakan lahan persawahan yang akan digunakan untuk menanam padi.

Syair	Makna Syair
<i>Bissimillahirrahmannirrahim</i>	Dengan menyebut Nama Allah
<i>Assalamu Alaikum</i>	Assalamu Alaikum
<i>Upasipai alek tanea</i>	Sifatku sama dengan tanah
<i>Yukung asekku yukung</i>	namaku
<i>Ikung asenna tanae</i>	ikung nama tanah
<i>Koeka makkatejja</i>	Di sini aku menginjak
<i>Koe mangolo Nagae</i>	Di sini menghadap Nagae
<i>Koe tokka mangolo</i>	Di sini juga asaya berdiri
<i>Koeka pallawangena Nagae</i>	Aku berdiri di antara Nagae
<i>tettong</i>	
<i>koeka ritanruna tudang</i>	di tanduknya aku berdiri
<i>Napa suppalingi tanruna nade</i>	semoga membalikan
<i>tomasala</i>	tanduknya tidak sakit
<i>Oh, Baco bolong</i>	Wahai penjaga Malam
<i>Iko mampirika essona wenninna Engka</i>	menjaga kami siang malam
<i>Barraka Allah Taala</i>	Berkat Allah.

Berdasarkan temuan penulis mantra yang digunakan di daerah Sulawesi Tenggara sangat berkenaan dengan kehidupan manusia yang menyatu dengan Tuhan, alam dan menghormati sesama manusia. Selain mantra di atas terdapat mantra lain seperti mantra *Mappano Bine* adalah mantra yang digunakan pada saat mulai menyemaikan benih pada. Mantra *Pajjaga Ase*, merupakan mantra yang digunakan petani Bugis untuk memelihara padi. Mantra *Pattapona Anangoe* adalah mantra yang digunakan untuk penangkal hama. Mantra merupakan salah satu sastra lisan di Sulawesi Tenggara yang perlu dilestarikan karena jenis sastra lisan ini jarang dijumpai di kalangan masyarakat lain. Keberadaan mantra ini akan memperkaya khazanah kesusasteraan Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, sangat perlu pengkajian, penelitian, serta pelestarian bahasa dan sastra lisan tersebut.

Di samping mantra ditemukan pula seni yang lain seperti seni suara yang mendukung budaya setempat.

4. Penutup

Pemakai bahasa daerah di Sulawesi Tenggara masih mempertimbangkan kesantunan berbahasa baik dalam komunikasi lisan ataupun komunikasi tulis. Komunikasi tulis terjadi pada surat pribadi yang disampaikan antarsesama komunitasnya. Adapun secara lisan terjadi pada saat pembacaan mantra-mantra waktu akan diadakan upacara adat. Tampaknya mantra-mantra ini memiliki nilai budaya yang khas yang tidak terdapat pada masyarakat lain. Oleh sebab itu, perlu kita gali nilai budaya masyarakat Sulawesi Tenggara ini agar tidak punah.

Daftar Pustaka

- Gunarwan, Asim.1992. *Persepsi kesantunan Direktif di dalam Bahasa Indonesia di antara Beberapa Kelompok Etnik di Jakarta dalam Pellba 5*. Jakarta:Lembaga Bahasa Unika Atma jaya.
- Halim, Amran 1974. *Intonation in Relation to Syntax in Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Halliday M..A..K.1976. *Cohesion in English*. London:Longman
- Hartoko.D.1986 *Tonggak Perjalanan Budaya Sebuah Antologi*. Jakarta:Kanisius
- Koentjaraningrat.1980.*Pengantar Antropologi*. Jakarta:Aksara Baru.
- Leech, Geoffrey.1980. *Eksplorations in Semantics and Pragmatics*. Amsterdam:John Benyamins.
- Levi-Strauss, Claude.1972.*Structural Anthropology*.Great Britain:PenguinBooks.
- Nababan.1986.*Sosiolinguistik:Suatu Pengantar*.Jakarta:PT Gramedia.

PEMERTAHANAN BAHASA MUNA DI DAERAH RANTAU SULAWESI TENGAH

Siti Fatimah
(Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah)

1. Pendahuluan

Bahasa Muna (atau lebih dikenal dengan bahasa Wuna) merupakan salah satu bahasa daerah yang dituturkan di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahasa itu merupakan bahasa mayoritas di Kabupaten Muna. Akan tetapi, di daerah rantau Sulawesi Tengah, bahasa Muna merupakan bahasa minoritas. Jumlah penutur yang relatif kecil itu sangat memungkinkan bahasa tersebut akan ditinggalkan oleh penuturnya (terancam punah). Hal itu sudah mulai tampak dari perlakuan penuturnya. Sebagian kecil penutur Bahasa Muna (selanjutnya disingkat BM) sudah mulai meninggalkan BM, terutama penutur yang menikah dengan suku lain atau suku-suku yang ada di Sulawesi Tengah, seperti Kaili, Poso, Tialo, Buol, dan Saluan. Di samping itu, orang Muna yang lahir di Sulawesi Tengah sebagian besar sudah tidak menggunakan Bahasa Muna sebagai bahasa ibunya. Meskipun demikian, secara umum orang Muna yang merantau di Sulawesi Tengah masih menggunakan BM dalam keperluan berkomunikasi.

Masyarakat Muna sebagai masyarakat dwibahasawan atau anekabahasawan, berusaha untuk mempertahankan BM sebagai bahasa ibu (*mother tongue*). Hal itu sejalan dengan pernyataan Fasold (1991: 213) bahwa pemertahanan bahasa merupakan ciri masyarakat dwibahasawan atau anekabahasawan. Usaha pemertahanan bahasa daerah tersebut dilandasi adanya dominasi dari bahasa yang secara ekonomi lebih kuat, yaitu Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat BI). Bergeser atau bertahannya bahasa bergantung pada tiga pilar penyangga, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Di Sulawesi Tengah, keluarga Muna, terutama keluarga muda, cenderung mendidik anak-anaknya untuk berbahasa Indonesia di rumah. BI sudah dijadikan sebagai bahasa Ibu di kalangan anak-anak mereka. Dalam berkomunikasi di rumah, anak-anak sudah tidak diajarkan BM padahal dalam BM sarat dengan ajaran moral dan etika. Di samping itu, BM merupakan lambang identitas suku Muna. Hal itu tidak hanya dilakukan oleh keluarga Muna yang kawin dengan suku lain, tetapi juga keluarga Muna yang kawin dengan sesama suku Muna. Sungguh ironis sekali. Keadaan itu menunjukkan bahwa masyarakat Muna yang baru berumah tangga cenderung menggunakan BI sebagai bahasa ibu anak-anaknya. Fakta itu menunjukkan adanya pergeseran bahasa ibu dari BM ke BI bagi keluarga muda (keluarga yang masih berusia muda). Keluarga tua (keluarga yang sudah tua) masih mempertahankan BM sebagai bahasa ibu, terutama di lingkungan keluarga di rumah.

Pilar kedua adalah pendidikan. Pendidikan ikut menentukan bertahan atau bergesernya suatu bahasa, termasuk BM. Dalam dunia pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi para pendidik menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar sehingga anak-anak penutur BM lebih terbiasa menggunakan BI daripada BM. Bahkan di beberapa sekolah favorit, termasuk sekolah yang bertaraf internasional, di samping BI, juga menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Dengan masuknya bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, kedudukan dan fungsi bahasa-bahasa daerah semakin memprihatinkan. Di samping itu, di Sulawesi Tengah pada tingkat SD dan SMP diajarkan muatan lokal bahasa daerah asli seperti Kaili atau Saluan. Bahasa Muna sebagai bahasa pendatang tidak pernah diajarkan di sekolah. Hal itu semakin memperkecil ruang penggunaan BM di daerah rantau.

Dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah suku pendatang—penuturnya minoritas—dan untuk keperluan pemetaan bahasa daerah di Indonesia (persebaran BM), bahasa itu perlu diselamatkan dari kepunahan. Masalah yang akan dipaparkan dalam tulisan ini adalah strategi apakah yang harus ditempuh agar bahasa Muna sebagai bahasa minoritas di Sulawesi Tengah tetap dipertahankan oleh penuturnya sehingga bahasa itu tidak mengalami kepunahan. Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan langkah-langkah strategi pemertahanan bahasa Muna di daerah rantau Sulawesi Tengah.

Untuk memperoleh data, penulis melakukan pengamatan (observasi), perekaman, dan wawancara. Pengamatan dilakukan dengan berperan serta karena penulis juga merupakan anggota masyarakat tutur BM sehingga dapat 'memancing' ujaran-ujaran yang diperlukan. Perekaman dilakukan secara tertutup dan terbuka. Perekaman tertutup dilakukan untuk mendapatkan ujaran-ujaran yang alamiah, misalnya perekaman yang dilakukan di rumah atau di lingkungan tetangga. Perekaman terbuka dilakukan dalam pertemuan kerukunan, pertemuan perkumpulan, acara kematian, dan acara-acara adat. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melestarikan BM, hambatan-hambatan yang dihadapi, dan cara-cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Data dianalisis secara kontekstual berdasarkan 'dalil sociolinguistik', yaitu siapa berbicara dengan siapa, di mana, tentang apa (partisipan, latar atau setting, dan topik pembicaraan).

2. Kerangka Teoretis

2.1 Pengertian Pemertahanan Bahasa

Kajian tentang pemertahanan bahasa tidak terlepas pada konsep/pembicaraan tentang kekhawatiran perubahan bahasa (*language change*), peralihan bahasa (*language shift*) dan kematian bahasa (*language death*).

Kematian bahasa terjadi kalau bahasa tertentu tidak memiliki penutur lagi. Hal itu terjadi karena penuturnya sudah meninggal semua, mungkin karena bencana alam (seperti bahasa Tambora di Sumbawa), atau secara alamiah (penutur yang terakhir meninggal dunia). Di Sulawesi Tengah, ada beberapa bahasa yang hampir punah, di antaranya bahasa Njedu yang penuturnya sisa tiga orang. Di Australia sudah banyak bahasa asli Aborigin yang mati atau akan segera mati karena penuturnya sekarang bisa dihitung dengan jari dan sudah tua. Istilah kematian bahasa sering dipergunakan dalam konteks hilangnya bahasa (*language loss*) atau beralihnya penutur bahasa ke bahasa lain (*language shift*). Kematian bahasa adalah titik akhir suatu proses, yang biasanya didahului oleh adanya kontak bahasa (*language contact*) yang mengondisikan adanya perubahan dan/atau peralihan bahasa. Proses ini umumnya bersifat pelan dan bertahap dalam jangka waktu yang relatif lama (*gradual*) pada situasi diglosia ke arah bahasa yang lebih berprestise (Dorian 1982; Fasold 1992: 213).

Dalam kenyataannya bahasa selalu berubah. Hal itu merupakan hukum alam yang tidak bisa dicegah. Sesuatu yang memprihatinkan adalah jika perubahan bahasa itu bersifat negatif dan mengarah pada kematian bahasa. Hal itu sudah terjadi pada bahasa minoritas yang mengalami perubahan dewasa ini (lihat misalnya, Dixon 1991; Krauss 1992). Perubahan tersebut terjadi seiring dengan meluasnya penggunaan bahasa (inter)nasional tertentu, misalnya bahasa Inggris di Australia yang menggeser bahasa asli Aborigin, bahasa Rusia di Rusia. Di Indonesia, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu regional telah terbukti mengancam bahasa daerah minoritas.

Bahasa yang selalu mengalami perubahan diharapkan mengalami perubahan berkelanjutan yang positif dan stabil. Artinya, bahasa tersebut tetap dipergunakan oleh penuturnya dan diturunkan kepada generasi berikutnya secara berkelanjutan. Hal seperti itulah yang merupakan konsep/pengertian pemertahanan bahasa. Dengan kata lain, bahasa bertahan secara dinamis walaupun mengalami perubahan (dalam sub-sistemnya, misalnya leksikon, bunyi, dan konstruksi-konstruksi tertentu) dari generasi ke generasi.

Pemertahanan bahasa tidak bermasalah pada kelompok penutur bahasa besar dan kuat. Semua berjalan dengan baik dan pemertahanan tidak dilakukan sepenuhnya secara sadar. Berbeda dengan bahasa minoritas, terpinggirkan, dan terancam punah, yang pemertahanannya perlu dilakukan dengan berbagai upaya dan penuh kesadaran. Sejalan dengan itu, definisi pemertahanan bahasa yang ada biasanya dikaitkan dengan pemertahanan bahasa untuk bahasa yang terdesak/minoritas, yang di dalamnya terkandung usaha terencana dan sadar untuk mencegah merosotnya penggunaan bahasa dalam kaitannya dengan berbagai kondisi tertentu yang bisa mengarah pada perpindahan bahasa (*language shift*) atau kematian bahasa (*language death*), (lihat, Nahir 1984; Marshall 1994).

Perlu digarisbawahi, istilah pemertahanan bahasa dan perpindahan bahasa terjadi pada tataran kelompok tutur (*societal level*) bukan pada tataran individu tutur.

2.2 Kompleksitas Variabel Terkait

Bahasa Muna tidak berada pada kategori bahasa terancam punah secara kritis (*critically endangered languages*) (lihat di antaranya, Fishman 1991; Grenoble and Whaley 1998; Crystal 2000).¹ Meskipun demikian, bahasa tersebut tergolong bahasa yang terpinggirkan, lemah, dan semakin terancam keberadaannya.

Untuk bisa memahami posisi dan keberadaan BM dan juga bahasa kecil lainnya di Indonesia secara komprehensif, sebaiknya mengamati kompleksitas variabel yang terkait dalam hubungannya dengan ekologi bahasa yang tidak stabil dari generasi ke generasi dalam konteks Indonesia seperti digambarkan pada.² (Tanda panah dua arah artinya 'kompetisi yang saling mempengaruhi' dan tanda panah satu arah artinya 'menentukan'.)

Keberadaan bahasa tidak terlepas dari keberadaan penuturnya dalam konteks ruang waktu dan ekologinya. Ruang waktu linear yang relevan adalah transisi antargenerasi, digambarkan pada (oleh tanda panah horizontal paling atas). Ruang ekologinya terdiri atas ekologi sociolinguistik diglosia terkait dengan bahasa-bahasa lain dan sejumlah variabel makro lain yang relevan (socio-historis-kultural, ekonomis, dsb.).

Ekologi sociolinguistik (lihat bagan 1) menggambarkan situasi diglosia kebahasaan di Nusantara: bahasa Indonesia baku merupakan bahasa yang berprestise tinggi dan target yang diinginkan. Target ini dicapai lewat pendidikan formal sampai perguruan tinggi dan pada berbagai situasi, bahasa baku ini terlalu 'tinggi' dan tidak pernah tercapai oleh banyak orang. Bahasa daerah merupakan 'basilek' pada ruang diglosia ini dan

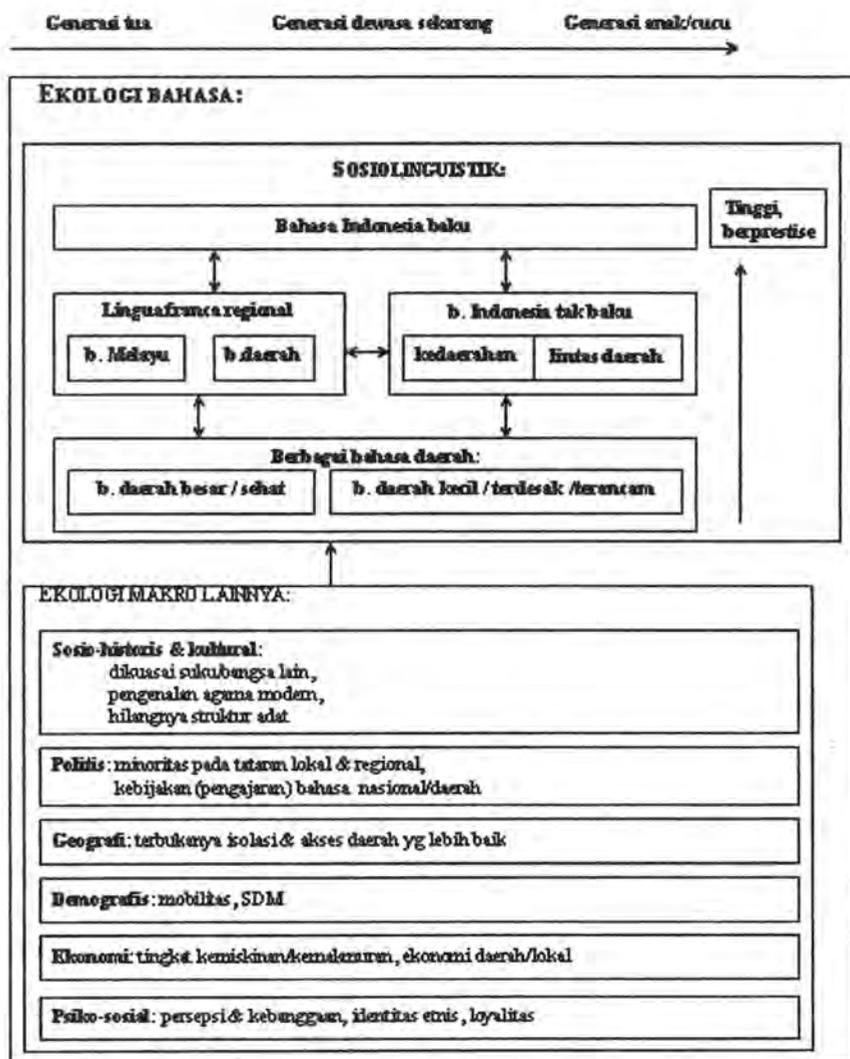
¹ Tingkat keterancamannya bahasa tidak bisa dengan mudah ditentukan karena keterlibatan berbagai variabel (Grenoble and Whaley 1998). Pembagian tingkat oleh Crystal (2000) berdasarkan klasifikasi orang lain, utamanya (Kinkade 1991), menunjukkan lima tingkat: (i) bertahan (*viable*), (ii) bertahan tetapi kecil, (iii) terancam, (iv) hampir punah, dan (v) punah. BM di Sulawesi Tengah bisa dikategorikan di antara (ii) dan (iii).

² Bagan yang mencerminkan kompleksitas situasi diglosia di Indonesia ini diinspirasi oleh Paauw (2007).

dianggap kurang atau tidak berprestise. Pada hierarki vertikal diglosia ini, antara bahasa daerah (rendah) dan bahasa baku (tinggi) ini terdapat variasi bahasa Indonesia tidak baku dan bahasa Melayu regional. Dua variasi yang belakangan ini, walaupun bisa dibedakan secara ilmiah kebahasaan, tetapi dari sudut persepsi penutur lokal, masyarakat umum sering menganggapnya sebagai varian bahasa Indonesia (tidak baku).

BI tidak baku mempunyai rentangan variasi yang besar. Tetapi, dapat diklasifikasikan atas dua variasi (Paauw 2007): BI lisan umum sehari-hari (*colloquial Indonesian*) yang dikenal lewat media massa TV dan BI tidak baku yang dicirikan oleh banyak fitur kedaerahan penuturnya (BI yang dipengaruhi bahasa daerah tertentu). Kedua ragam itu seakan tidak bisa dipilah-pilah ada karena ciri lokal bisa menyebar lewat media. Misalnya, bahasa Indonesia variasi Jakarta (Sneddon 2006) kini semakin dikenal lintas daerah di Nusantara karena penggunaannya pada media TV.

Ciri-ciri ketidakkakuan tercermin dalam berbagai aspek kebahasaan. Misalnya penggunaan intonasi, leksikal dan partikel wacana tertentu dari bahasa daerah. Juga kecenderungan bersifat analitis/isolasi, yakni hilangnya morfologi verba dan semakin banyaknya struktur serialisasi. Penggunaan/lesapnya preposisi tertentu juga menjadi ciri bahasa Indonesia tidak baku misalnya, kata *baku* searti dengan *saling* (misalnya *anak itu baku peluk*. Searti dengan *anak itu saling memeluk*). Penggunaan partikel tertentu juga sangat jelas mencirikan kedaerahan/ketidakkakuan variasi Indonesia tertentu.



Bagan 1. Diglosia di Indonesia dan variabel terkait

Situasi diglosia di Indonesia berkaitan dengan bahasa daerah minoritas yang bersifat tidak stabil. Artinya, kompetisi yang terjadi yang tercermin dari kedwibahasaan atau keanekabahasaan komunitas penutur tidak seimbang (*imbalanced*) dan cenderung terus menggeser bahasa minoritas. Bahasa daerah minoritas

mendapat tekanan dari berbagai bahasa bukan hanya BI (baku dan tidak baku) melainkan juga bahasa *lingua franca* regional. Misalnya, bahasa minoritas Muna di Sulawesi Tengah mendapat tekanan dari bahasa daerah sekitarnya, utamanya bahasa Saluan dan bahasa Banggai, di samping Bahasa Indonesia. Bahasa-bahasa daerah minoritas di Sulawesi Tengah mendapat ancaman dari bahasa Melayu regional, yakni Melayu Manado. Selain itu, bahasa Indoenesia turut serta mengancam kepunahan BM. Bahasa Melayu regional mengancam bahasa-bahasa daerah di tempat lain, misalnya bahasa Melayu Makassar mengancam bahasa-bahasa daerah Sulawesi Selatan, di Maluku, ancaman datang dari Melayu Ambon. Di Papua semakin banyak generasi muda yang mengadopsi bahasa Malayu Papua sebagai bahasa ibu (pertama) dan tidak lagi menguasai bahasa daerah orang tuanya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi situasi diglosia yang tidak stabil dan tidak menguntungkan bahasa minoritas ini sesungguhnya disebabkan oleh ekologi makro-non-linguistik. Pada faktor ini digambarkan pada kotak sebelah bawah dan arah pengaruh digambarkan dengan arah tanda panah.

Di antara faktor-faktor tersebut, yang berperan pada kasus BM di Sulawesi Tengah adalah sosio-historis dan kultural, demografis, geografis, politis, ekonomi, dan psiko-sosial. Faktor-faktor itu sudah lama dikenal pada literatur studi sosiolinguistik dan ancaman kepunahan bahasa (*language endangerement*).

Faktor demografis yang berperan adalah semakin tingginya mobilitas orang Indonesia yang hidup di luar wilayah kebahasaan tradisionalnya dan semakin banyaknya kawin campur antarsuku. Generasi berikutnya dari orang-orang tersebut hampir dipastikan memperoleh bahasa Indonesia atau bahasa Melayu regional sebagai bahasa pertama. Anak-anak Muna di Sulawesi Tengah sekarang sudah semakin banyak yang memperoleh bahasa Melayu Manado atau Bahasa Indonesia variasi kedaerahan sebagai bahasa ibu. Kecenderungan untuk memperoleh bahasa Indonesia (variasi tak baku kedaerahan) ini tidak hanya terjadi di daerah urban/perkotaan, tetapi juga sudah meluas ke pedalaman.

Faktor sosio-kultural penyebaran agama modern (Islam) juga kelihatan berperan. Penyebaran agama Islam menggunakan bahasa Indonesia dan ritual/kegiatan keagamaan dalam keseharian juga lebih cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Di daerah Sulawesi Tengah, khutbah di mesjid menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun terkadang menggunakan bahasa daerah, bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Kaili, Saluan, Pamona, dan bahasa daerah asli yang lain.

Faktor psikososial ekonomis sangat berperan. Penguasaan bahasa Indonesia (baku) sangat berprestise dan dijadikan tujuan utama. Hal ini berkaitan dengan faktor ekonomi dan masa depan (pekerjaan, keberhasilan bisnis, karir dsb.) dalam mengarungi kehidupan pada zaman Indonesia modern. Sebaliknya, bahasa minoritas tidak memiliki nilai itu sehingga penuturnya tidak menganggap penting untuk mempertahankan bahasanya. Kenyataan di lapangan, hal yang paling sulit saya hadapi adalah ketika generasi muda Muna di Sulawesi Tengah menanyakan tentang keuntungan ekonomi apa yang bisa mereka peroleh jika tetap mempertahankan bahasa kecil seperti BM.

Presepsi dan kebanggaan mereka yang rendah terhadap bahasa sendiri, yang mempengaruhi loyalitas yang rendah pula merupakan salah satu kendala yang sangat sulit dipecahkan. Hal itu berakar pada posisi relatif bahasa mereka dalam konteks diglosia, terutama dalam kaitannya dengan kepentingan sosial ekonomi bahasa dalam alam Indonesia kini dan ke depan. Dengan kata lain, meningkatkan loyalitas dan kebanggaan berarti meningkatkan peringkat bahasa ini pada hierarki diglosia. Hal itu merupakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan dengan menangi sejumlah variabel terkait pada ekologi non-linguistik, yang tentu tidak gampang, kalau tidak mustahil. Seorang linguist tidak akan pernah mampu menanganinya sendiri.

Pada tataran yang lebih luas, yakni politik lokal, ketiadaan SDM yang baik dalam jumlah yang memadai menyebabkan etnis minoritas memang selalu 'dikuasai' etnis lain sehingga mereka tidak bisa menentukan dan memenuhi kepentingannya. Artinya, dalam alam demokrasi dan otonomi daerah pada tingkat kabupaten, kepemimpinan (eksekutif dan legislatif) lokal tidak akan pernah dipegang oleh etnis minoritas. Oleh karena itu, kepentingan etnis minoritas termasuk pemertahanan budaya/bahasa minoritas sering tidak diperhatikan atau diperjuangkan oleh penguasa daerah, yang sudah pasti berasal dari etnis mayoritas daerah, misalnya etnis Saluan di Kabupaten Banggai, etnis Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan, etnis Kaili di Kota Palu dan sekitarnya.

3. Strategi Pemertahanan Bahasa Muna di Daerah Rantau Sulawesi Tengah

Bahasa Muna tumbuh dan berdampingan dengan bahasa-bahasa daerah Sulawesi Tengah, di antaranya bahasa Kaili, Saluan, Pamona, dan Kulawi. Bahasa itu didukung oleh penuturnya masing-masing. Sebagai bahasa minoritas, bahasa Muna harus tetap dijaga dan dilestarikan oleh pendukungnya. Untuk melestarikan dan mempertahankan bahasa Muna dari kepunahan perlu ditempuh 3 strategi, yaitu (1) penyediaan pangkalan data, (2) pemekaran kosakata, dan (3) pembinaan bahasa.

3.1 Penyediaan Pangkalan Data

Sebagai upaya pemertahanan BM dari ancaman kepunahan perlu dilakukan beberapa strategi. Salah satunya adalah penyediaan pangkalan data. Langkah ini berupa kegiatan riset yang berhubungan dengan penyediaan pangkalan data. Pangkalan data yang ada dapat dikembangkan sebagai upaya pembinaan BM.

Dengan adanya pangkalan data, BM bisa diselamatkan dari ancaman kepunahan bahasa. Kegiatan riset pada tahap ini berupa riset dasar. Riset dasar itu merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam bidang bahasa melalui pendayagunaan perkembangan iptek. Perkembangan iptek itu sendiri tidak terlepas dari dukungan berbagai teori, informasi iptek, yang berasal dari pemikiran, pengetahuan mendasar, atau paradigma baru yang hanya dapat diperoleh melalui kegiatan riset dasar. Dengan demikian, riset dasar dalam bidang kebahasaan dimaknai sebagai upaya penyediaan teori, informasi kebahasaan yang berasal dari pemikiran, pengetahuan mendasar, atau paradigma baru.

Riset dasar bidang kebahasaan terdiri atas riset dasar yang pertama dan utama, yakni riset pemetaan BM, disusul riset deskriptif yang menyangkut deskripsi aspek BM, misalnya aspek fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik, penyusunan kamus, penelitian historis komparatif terhadap beberapa bahasa berkerabat; kemudian kajian deskriptif lintas bidang linguistik, seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, atau antropobio-linguistik. Penelitian pemetaan BM dikategorikan sebagai salah satu bentuk riset dasar yang pertama dan utama karena sebelum meneliti aspek-aspek BM terlebih dahulu harus mengetahui status kebahasaan isolek Muna (bahasa, dialek, atau subdialek). Sungguh sangat ironis kita akan melakukan kajian deskripsi tentang aspek tertentu dari isolek Muna, dengan topik: Morfologi BM atau Struktur BM, misalnya, jika isolek itu belum teridentifikasi sebagai bahasa. Selain itu, sungguh menggelikan jika kita melakukan riset tentang kekerabatan BM dengan bahasa-bahasa daerah asli di Sulawesi Tengah sebelum isolek BM teridentifikasi sebagai bahasa. Begitu pula halnya dengan penelitian antropobio-linguistik. Kita tidak bias melakukan kajian antropobio-linguistik sebelum melakukan riset dasar pemetaan kekerabatan BM dan varian-varianannya. Untuk menyingkronkan apakah terdapat kesepadanan antara pola migrasi populasi manusia antara hasil kajian bidang antropobiologi, khususnya biologi molekuler DNA Virus Hepatitis B dengan kajian linguistik, kita terlebih dahulu harus mengidentifikasi status isolek BM sebagai bahasa atau dialek serta mengidentifikasi relasi kekerabatannya.

3.2 Pemekaran Kosakata

Gejala perubahan perilaku masyarakat dalam bertindak dan berbahasa, jika tidak ditangani dengan sungguh-sungguh akan menimbulkan dampak luar biasa terhadap peri kehidupan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Penggunaan bahasa asing makin mendesak ruang penggunaan bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Manado telah menggeser ruang penggunaan BM. Kebanggaan masyarakat terhadap BM sebagai lambang identitas suku Muna mulai memudar. Untuk itu, perlu dilakukan penanganan secara sungguh-sungguh, berencana, dan berkelanjutan.

Upaya yang harus dilakukan ialah mengembalikan kewibawaan BM. Langkah ke arah itu dilakukan melalui pengembangan kosakata agar bahasa itu mampu memenuhi tuntutan keperluan masyarakat penuturnya, baik sebagai sarana berpikir, ekspresi maupun sebagai sarana komunikasi masyarakat penuturnya dalam berbagai bidang kehidupan modern, termasuk bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

3.2.1 Kosakata Bidang Ilmu dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari waktu ke waktu melaju dengan pesat. Untuk mengimbangi perkembangan itu, BM yang dipertahankan eksis perlu mengembangkan kosakata bidang ilmu dan teknologi. Pengembangan istilah bidang itu tentu akan diwarnai kosakata bahasa asing. Karena bahasa daerah tidak langsung berinteraksi dengan bahasa asing, tetapi berinteraksi dengan bahasa Indonesia, kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa daerah melalui bahasa Indonesia, seperti *radio*, *film*, *farmasi*, *semester*, *telepon seluler (HP)*, *warung internet (warnet)*, dan *multimedia*. Kosakata BM akan kesulitan mencari padanan kata-kata seperti itu. Pengungkapan semua itu merupakan kebutuhan masyarakat pengguna bahasa daerah yang tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masa kini.

3.2.2 Pengembangan Kosakata Budaya

Pengungkapan budaya dalam BM memerlukan kosakata baru, terutama budaya dalam tata kehidupan masa kini. Kosakata budaya BM perlu dikembangkan dengan memanfaatkan kosakata budaya lokal. Kearifan lokal perlu digali dan dimutakhirkan sehingga tata kehidupan masa lalu dapat dimanfaatkan dalam pengembangan tata kehidupan masa kini. Pengembangan kosakata BM bidang budaya ini dapat memanfaatkan sumber pengayaan dari bahasa daerah lain di seluruh Nusantara ini. Ratusan bahasa daerah di Indonesia merupakan sumber pengayaan BM sehingga terjadi saling interaksi antarbahasa daerah di bumi Indonesia ini. Pemanfaatan kosakata BM sekaligus merupakan upaya pelestarian budaya daerah di samping juga merupakan upaya pemberian warna keragaman daerah dalam pengembangan kosakata bahasa daerah. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian kosakata budaya daerah Muna. Jika terdapat perbedaan dalam lafal atau dalam penulisannya dengan sistem bahasa yang bersangkutan perlu dilakukan penyesuaian. Upaya pelibatan bahasa-bahasa daerah lain dalam pengembangan kosakata BM merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat pendukung bahasa daerah itu berinteraksi dengan masyarakat lain dan masyarakat bahasa lain pun merasa ikut menanamkan budayanya dalam lingkungan masyarakat penutur bahasa di luar komunitasnya sehingga tumbuh rasa ikut

memberi sumbangan yang pada akhirnya memupuk rasa kebersamaan dalam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

3.3 Pembinaan Bahasa

Pembinaan bahasa yang dimaksud adalah pembinaan BM yang meliputi upaya pemertahanan ranah-
ranah penggunaan BM dan pewarisan penggunaan bahasa itu kepada generasi penerus. Pembinaan itu
merupakan salah satu upaya untuk melestarikan BM agar BM tetap memainkan peran dalam kehidupan
masyarakat penuturnya. Pelestarian peran BM di kalangan generasi masa kini dilakukan melalui revitalisasi
ranah-
ranah penggunaan BM, seperti ranah keluarga, pertunjukkan kesenian daerah Muna, dan upacara-upacara
adat daerah Muna. Sementara itu, pelestarian BM untuk generasi penerus dilakukan melalui jalur pendidikan
informal di lingkungan keluarga. Di sinilah peran orang tua sangat diperlukan dalam proses pembelajaran BM
kepada anak-anaknya sebagai generasi penerus. Peran orang tua dan lingkungan rumah sangat menentukan
proses pewarisan BM. Selain itu, pewarisan BM dapat dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah. Siswa
sebagai generasi penerus perlu mempelajari BM, bahasa daerah tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan.
Penguasaan terhadap bahasa itu sangat penting karena dalam BM sarat dengan nilai-nilai moral sehingga dapat
dijadikan sebagai sarana pembentukan kepribadian anak-anak suku Muna. Penguasaan bahasa itu dilakukan
melalui pengajaran muatan lokal, BM, di sekolah. Pengajaran BM yang komprehensif dilakukan melalui
pedidikan formal yang berkelanjutan mulai pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.

3.3.1 Pemutakhiran Pengajaran Bahasa Muna

Permasalahan di atas memberikan gambaran betapa penting penguasaan BM bagi generasi penerus,
baik dalam memahami maupun menggunakan bahasa itu. Penguasaan itu mempersyaratkan
wawasan/pengetahuan dan keterampilan berbahasa Muna secara baik dan benar oleh para pelaku dalam proses
pengajaran dan pembelajaran serta penyediaan sarana belajar. Para pelaku itu adalah guru dan siswa. Oleh
karena itu, pendidikan BM di sekolah mencakup perencanaan, pengelolaan proses belajar-mengajar, dan
lingkungan sekolah yang kondusif. Pendidikan BM di sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah, bukan
semata-mata tanggung jawab guru BM saja. Oleh karena itu, sistem pengajaran dan pembelajaran BM perlu
dimutakhirkan, mulai dari kurikulum, bahan ajar, media belajar, pengajar, dan lingkungan belajar.

3.3.2 Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal

Sekolah merupakan pusat belajar bagi siswa. Oleh karena itu, sekolah seharusnya menyediakan fasilitas
belajar yang memadai, baik tempat belajar maupun ruang perpustakaan dan koleksi buku sebagai sarana belajar.
Penguasaan BM sebagai sarana berpikir akan menuntun siswa di sekolah bertindak tertib dan santun karena
bahasa menuntun pemakainya ke arah itu. Penguasaan BM sebagai sarana ekspresi akan membawa para siswa
pada suasana kreatif karena bahasa sebagai sarana pengungkap pemikiran tentang ilmu, teknologi, dan seni
membentuk kecerdasan. Sementara itu, penggunaan BM sebagai sarana berkomunikasi akan menciptakan
suasana keakraban dan kebersamaan yang pada akhirnya memupuk rasa kekeluargaan di lingkungan sekolah
yang menjadi sumber belajar para siswa. Pengelolaan sekolah dengan penguasaan BM, bahasa Indonesia, dan
bahasa asing sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing akan mendukung penciptaan insan yang
cerdas kompetitif dan memiliki kepekaan terhadap etika dan estetika. Penciptaan suasana berbahasa seperti itu
menjadi tanggung jawab semua pihak di sekolah, terutama kepala sekolah selaku pemimpin tertinggi di sekolah.
Kepedulian kepala sekolah terhadap penggunaan BM di sekolah akan memacu dan mengendalikan proses
belajar-mengajar di sekolah. Semua itu harus tergambar dalam perencanaan pengajaran BM di sekolah yang
tertampung dalam kurikulum pengajaran bahasa daerah di tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan
menengah.

3.3.3 Bahan Ajar

Bahan ajar harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan siswa. Siswa belajar BM supaya bisa
memahami tuturan atau tulisan dalam BM sehingga mereka mampu menggunakan BM, baik secara lisan
maupun tulis. Bahan ajar itu disusun berdasarkan empat keterampilan/kemampuan berbahasa, yakni
mendengarkan/menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat kemampuan berbahasa itu dituangkan
dalam bahan ajar yang diambil dari berbagai bidang kehidupan, di antaranya pertanian, ekonomi, acara adat, dan
kebudayaan. Bahan ajar tersebut disusun berdasarkan psikologi belajar dan harus dipelajari secara terpadu.
Pengorganisasian bahan ajar itu dilakukan sedemikian rupa agar siswa bisa tertarik dan tertantang sehingga
tujuan pembelajaran bias tercapai secara maksimal.

3.3.4 Pengajar

Penyelenggaraan pengajaran BM banyak mengalami hambatan. Salah satu hambatannya adalah
pengajar/guru BM. Di Sulawesi Tengah hanya beberapa orang guru yang mampu berbahasa Muna secara baik
dan benar. Meskipun demikian, mereka tidak semuanya mampu mengajar BM. Untuk itu, lembaga pendidikan

dan tenaga kependidikan (guru) perlu melakukan penelitian untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan tenaga pengajar BM, jumlah guru yang diperlukan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, serta kendala-kendala yang dihadapi di dalam proses belajar-mengajar. Sementara itu, potensi guru BM yang telah ada harus diberdayakan sesuai dengan bidang kekhususannya supaya bisa memutakhirkan wawasan dan kemampuannya sebagai guru yang profesional.

3.3.5 Lingkungan

Lingkungan di rumah dan sekitar tempat tinggal siswa, harus memberikan dukungan pada proses belajar BM. Rumah merupakan tempat pertama anak mendapatkan kesempatan belajar BM. Oleh karena itu, orang tua dan seisi rumah harus berperan sebagai guru bahasa. Mereka yang mengenalkan BM dan yang melatih proses pembiasaan memahami dan menggunakan BM. Pada kesempatan itu pula anak belajar memahami dan menerapkan tata sopan santun/etika berinteraksi sosial dengan anggota keluarga, bahkan pada tingkat lingkungan di sekitar, baik dengan teman sebaya maupun dengan orang dewasa/tua. Di samping itu, rumah dan lingkungan juga harus menyediakan bahan-bahan bacaan yang menarik minat anak-anak membaca dalam BM.

3.3.6 Perkumpulan atau Kerukunan

Di Sulawesi Tengah para suku pendatang dari Sulawesi Tenggara membentuk suatu perkumpulan, yakni **Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST)**. Kerukunan itu beranggotakan semua suku yang berasal dari Sultra, di antaranya suku Muna, Buton, Tolaki, Wawoni. Selain itu, suku Muna membentuk perkumpulan tersendiri yang diberi nama **Perkumpulan Muna Soliwunto**. Kedua perkumpulan itu setiap bulan mengadakan pengajian. Dengan demikian suku Muna bisa bertemu minimal dua kali sebulan.

Terbentuknya kedua perkumpulan itu sangat memungkinkan BM selalu dituturkan oleh pendukungnya dan tidak mustahil tetap dilestarikan. Agar BM tetap lestari sebaiknya para orang tua selalu mengajak anak-anaknya dalam setiap pertemuan supaya mereka bisa mengenal sesama suku. Selain itu kehadiran anak-anak pada setiap pertemuan dapat dijadikan wadah untuk memperkenalkan budaya Muna dan BM sebagai bahasa Ibu mereka yang sesungguhnya.

3.3.7 Kesenian Khas Daerah

BM dapat juga diajarkan melalui pembiasaan mendengarkan lagu-lagu daerah Muna. Di Raha, Ibu Kota Kabupaten Muna banyak dijual CD dan kaset lagu-lagu daerah Muna. Lewat kerabat kita bisa memesan CD dan kaset tersebut. Ketika memutar CD atau kaset, para orang tua harus mendampingi anak-anaknya agar dapat menjelaskan arti kata-kata yang tercantum dalam lagu-lagu itu sehingga perbendaharaan kosakata Muna anak-anak bertambah.

3.3.8 Dongeng

Pada zaman dahulu di Muna ketika meninabobokan anak-anak, para orang tua selalu mendongeng dalam BM. Dongeng mereka bermacam-macam dan sarat dengan nilai-nilai moral, pendidikan, dan agama. Selain mempunyai nilai yang bermanfaat, dongeng berbahasa Muna dapat mengajari anak-anak tentang kosakata BM. Anak-anak dibiasakan mendengarkan kata-kata BM sambil dijelaskan arti bahasa-Indonesianya sehingga kosakata anak-anak bertambah. Dengan demikian, BM tetap dapat dipertahankan para penuturnya dari kepunahan bahasa.

4. Simpulan

BM sebagai bahasa minoritas di Sulawesi Tengah harus tetap dipertahankan mengingat bahasa itu masih tetap digunakan oleh masyarakat penuturnya, termasuk generasi penerusnya. Keberadaan BM di Sulawesi Tengah menambah kekayaan bahasa daerah yang ada di wilayah itu. Oleh karena itu, BM perlu dipertahankan dari kepunahan bahasa. Melalui berbagai strategi penelitian, pengembangan, pembinaan, pendidikan BM melalui jalur sekolah, perkumpulan atau kerukunan, kesenian khas daerah, dan dongeng, BM akan tetap bertahan, termasuk dalam kehidupan masyarakat generasi penerus, dalam tatanan kehidupan baru di daerah rantau Sulawesi Tengah. Dengan demikian, BM sebagai bagian dari kebudayaan nasional akan tetap lestari dan tidak terancam dari kepunahan. Penelitian lebih lanjut sangat diharapkan agar dapat merumuskan strategi yang dapat digunakan dalam rangka pemertahanan BM di daerah rantau Sulawesi Tengah.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan dan Dendy Soegono. 2000. *Politik Bahasa*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Crystal, David. 2000. *Language Death*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dorian, N. 1982. "Language Loss and Maintenance". In *Endangered Languages*. Edited by R.H. Robins and E.M. Uhlenbeck. Providence: Berg Publisher Ltd.
- Dixon, R.M.W. 1991. "The Endangered Languages of Australia, Indonesia, and Oceania". In *Endangered Languages*. Edited by R.H. Robins and E.M. Uhlenbeck. Providence: Berg Publisher Ltd.
- Fasold, R. 1992. *The Sociolinguistics of Society*. Cambridge, MA: Blacwell.
- Fishman, Joshua A. 1991. *Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Languages*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Greenoble, L.A. and L.J. Whaley. 1998. *Toward a Typology of Language Endangerment*. In *Endangered Languages: Current Issue and Future Prospects*. Edited by L.J. Whaley, 22—54. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gunarwan, Asim. 2005. "Kasus-kasus Pergeseran Bahasa Daerah Akibat Persaingan dengan Bahasa Indonesia?". Makalah Kongres Linguistik Indonesia, MLI, Padang, 18—21 Juli 2005.
- Krauss, Michael. 1992. *The World's Languages in Crisis*. Dalam *Language*. Vol. 68, 1: 4—10.
- Mahsun. 2006. *Kajian Distribusi dan Pemetaan Varian-Varian Bahasa Mbojo*. Yogyakarta: Gama Media.
- Marshall, D.F. 1994. "Language Maintenance and Revival". In *Annual Review of Applied Linguistics*. (14): 20—33.
- Nahir, M. 1984. "Language Planning Goals: a Classification". In *Language Problems and Language Planning*. 8 (3): 294—327.
- Poedjosoedarmo, Soepomo. 2003. *Dinamika Bahasa*. Dalam **Dinamika Budaya Lokal dalam Wacana Global**. Yogyakarta: Unit Pengkajian dan Pengembangan Fakultas Budaya, UGM.
- Rachman, Arif. 2006. "UNESCO's Roles in Saving the Endangered Languages and Fostering the Development of Language Education. Makalah pada Seminar Internasional Pemeliharaan Bahasa-bahasa yang Hampir Punah. Jakarta: Pusat Bahasa.
- _____. 2007. "Kepunahan Bahasa Daerah Karena Kehadiran BI dan Bahasa Inggris serta Upaya Penyelamatannya". Pidato Pengukuhan Guru Besar UNJ, 22 Mei 2007. Jakarta.
- Sneddon, James. 2006. *Colloquial Jakartan Indonesian*. Canberra: Pasific Linguistics.
- Sugono, Dendy. 2004. "Strategi Perancangan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia". Makalah Kongres Bahasa Utama Dunia. Kuala Lumpur, 5—8 Oktober 2004.
- _____. 2005. "Perencanaan Bahasa di Indonesia". Makalah Pertemuan Linguistik ASEAN.
- Sumarsono. 1993. *Pemertahanan Bahasa Melayu Loloan di Bali*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

PERBEDAAN EJAAN LATIN ANTARA BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INDONESIA DALAM PENGARUH SKRIP ARAB*

Cho Tae Young**
(Universitas Hasanuddin)

1. Pendahuluan

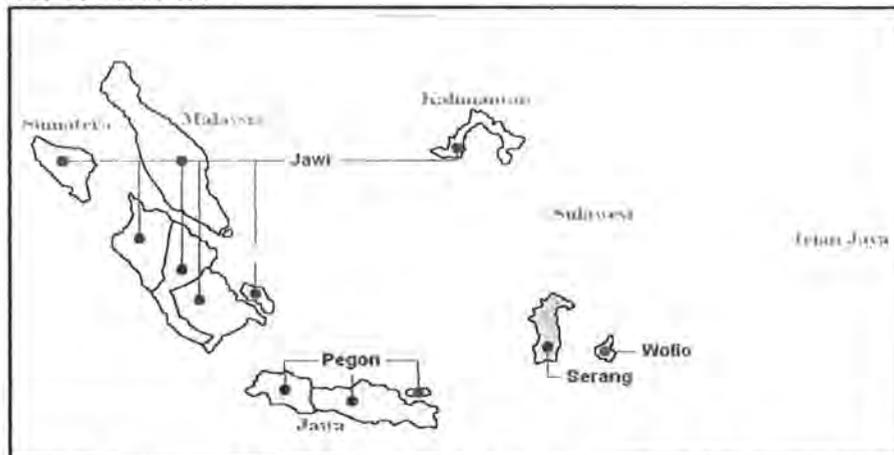
Di suatu wilayah yang menutur berbagai jenis bahasa, bahasa-bahasa saling bercampur satu dengan yang lain. Sehubungan dengan itu, Bahasa Indonesia menyerap kebanyakan kosakata dari berbagai bahasa daerah. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada bahasa lisan, tetapi juga pada bahasa tulisan. Aksara-aksara dalam sistem grafemnya, dapat pengaruh-memengaruhi pula satu dengan yang lain di wilayah yang menggunakan berbagai jenis aksara.

Nusantara¹ dapat dikatakan sebagai suatu wilayah yang memakai berbagai jenis aksara. Jenis aksara ini dapat dibagi ke dalam: 1) aksara India; 2) skrip Arab; dan 3) aksara Latin (Endang, 2022: 2-3). Di antara ketiga jenis aksara, makalah ini membahas, bagaimana penggunaan skrip Arab memengaruhi sistem ejaan Latin yang sekarang digunakan di masyarakat Bahasa Malaysia (BM) dan Bahasa Indonesia (BI), sehingga kedua ejaan Latin berbeda. Sebuah kata '*khobar*' dan '*kabar*' di masyarakat BM dan BI, sistem ejaannya berbeda. Kata tersebut sebagai kata serapan dari bahasa Arab, dieja <kh b r> (خبر) dalam ejaan skrip Arab. Jika menurut sistem ejaan skrip Arab, masyarakat BM mengeja benar bila dibandingkan BI. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ejaan skrip Arab menyebabkan perbedaan ejaan Latin di antara kedua masyarakat bahasa.

Untuk menyoroti hal ini, pembahasan ini dilakukan dengan pendekatan Sociolinguistik, yang menjelaskan bahwa perbedaan ejaan Latin antara BM dan BI berkaitan dengan sikap kedua masyarakat bahasa terhadap penggunaan skrip Arab, yakni budaya tradisi Islam. Sebelum mulai membahas, pada bab berikut, perlu dipahami dulu mengenai penggunaan skrip Arab di nusantara.

2. Penggunaan Skrip Arab di Nusantara

Pada umumnya, penggunaan skrip Arab di Nusantara dimulai sekitar abad ke-11 Masehi. Yang membuktikan penggunaan skrip Arab di Nusantara, dapat ditegaskan dalam peninggalan prasasti. Sebuah prasasti yang dibuat di Brunei pada tahun 1048 (H 440), lazim diketahui sebagai prasasti Arab yang bermunculan pertama di Nusantara (Othman·Abdul, 1990: 7, 92-95). Pada prasasti tersebut, termuat kandungan mengenai kematian seorang muslimat bernama 'Makhdarah' dalam Bahasa Arab yang memakai skrip Arab. Setelah itu, dua buah prasasti dibuat di Leran pada tahun 1082 (H 475), dan di Aceh pada tahun 1297 (H 696), yang memuat pula tentang kematian seorang muslimat dan sultan (Othman·Abdul, 1990: 7-8). Ketiga prasasti tersebut menunjukkan bahwa penyebaran peradaban Islam dan penggunaan skrip Arab di Nusantara, dimulai pada abad antara ke-11 dan ke-13.



Gambar 1) Penggunaan Variasi Skrip Arab di Nusantara (Cho Tae Young, 2010: 103)

* Makalah ini ditulis untuk "Kongres Internasional Bahasa-bahasa Daerah Sulawesi Tenggara" yang diadakan pada 18-20 Juli 2010 di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia.

** Kandidat Doktor di Universitas Hasanuddin dalam bidang Ilmu Linguistik (e-mail: nusantara@hufs.ac.kr).

¹ Dalam makalah ini, istilah 'nusantara' menunjuk bukan hanya Malaysia dan Indonesia, tetapi juga seluruh wilayah yang menggunakan bahasa Melayu, yaitu Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura.

Pada awal abad ke-14, kekuasaan terhadap penggunaan skrip Arab di Nusantara dipindah ke bahasa daerah dari bahasa Arab. Dengan kata lain, skrip Arab mulai menuliskan bahasa-bahasa daerah di Nusantara. Prasasti Terengganu yang dibuat di Terengganu, Semenanjung Melayu pada tahun 1303 (H 702), berukirkan skrip Arab yang melambangkan bunyi bahasa Melayu. Setelah kemunculan prasasti Terengganu, skrip Arab menjadi sistem tulisan utama untuk menuliskan bahasa-bahasa daerah di Nusantara. Dengan demikian, penggunaan skrip Arab menyebabkan kebanyakan ilmu di Nusantara menjadi lebih produktif. Akhirnya skrip Arab menjadi wahana yang penting untuk mengembangkan masyarakat bahasa daerah di Nusantara.

Gambar 1) di atas menunjukkan masyarakat bahasa daerah di Nusantara yang menerima penggunaan skrip Arab sebagai sistem tulisan. Seperti telah diperlihatkan di atas, skrip Arab di Nusantara, telah lama memainkan peranan sebagai sistem tulisan utama bagi bahasa-bahasa daerah. Oleh karena itu, pengaruh penggunaan skrip Arab masih dapat menguasai sistem ejaan aksara Latin, namun skrip Arab sudah digantikan oleh aksara Latin sebagai sistem tulisan utama. Akhirnya, pengaruh skrip Arab menyebabkan kemunculan perbedaan ejaan Latin antara BM dan BI. Sebelum membahas secara mendalam perbedaan ejaan Latin antara BM dan BI, pada bab yang berikut akan ditinjau dulu mengenai proses kesepakatan ejaan Latin antara BM dan BI.

3. Proses Kesepakatan Ejaan Latin BM dan BI

BM dan BI lazim diketahui sebagai masing-masing variasi bahasa tersendiri yang berasal dari bahasa Melayu. Istilah 'Bahasa Malaysia' diciptakan oleh pemerintah Malaysia pada tanggal 13 bulan Mei tahun 1969 untuk menguatkan persatuan antarbangsa di Malaysia. Sedangkan sebutan 'Bahasa Indonesia' yang dari 'bahasa Melayu', dibuat oleh rapat Pemuda-Pemudi pada tahun 1928. Oleh karena itu, BM dan BI agak susah dibedakan satu dengan yang lain, meskipun asalnya sama, dari bahasa Melayu.

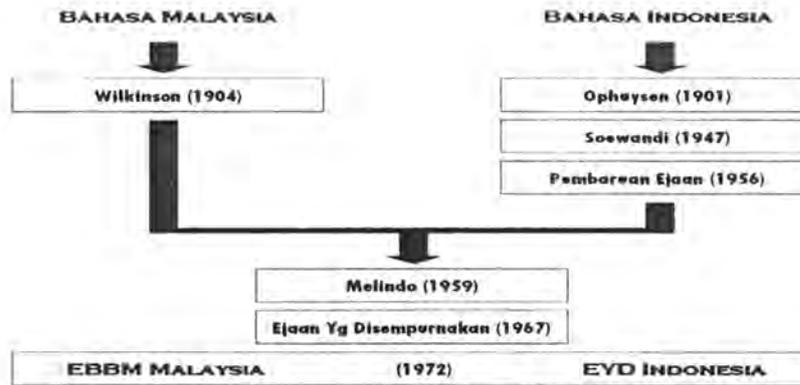
Bagaimana pun, perbedaan antara BM dan BI bukan hanya terdapat pada sebutan nama bahasa, tetapi juga pada sistem bunyi, ejaan, kosakata, dan tata bahasa. Di antara perbedaan-perbedaan tersebut, berikut adalah beberapa kosakata yang menampilkan perbedaan ejaan Latin antara BM dan BI.

Gambar 2) memperlihatkan bahwa ejaan Latin antara BM dan BI berbeda, namun makna kosakatanya sama. Yang menarik dalam daftar kosakata di atas, adalah semua kosakata tersebut berasal dari Bahasa Arab. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan ejaan Latin antara BM dan BI berkaitan dengan penggunaan skrip Arab dan kata serapan dari bahasa Arab.

BAHASA MALAYSIA	BAHASA INDONESIA
fikir	pikir
ghaib	gaib
khabar	kabar
zahir	lahir
ubat	obat
wang	uang

Gambar 2) Perbedaan Ejaan Latin BM dan BI

Sistem ejaan tulisan yang sekarang digunakan di Malaysia dan Indonesia, adalah berdasarkan pada ejaan Latin yang dibuat oleh pakar dari barat. Sistem 'Wilkinson' yang berdasarkan ejaan Inggris, mulai dipakai untuk BM pada tahun 1904. Sedangkan sistem 'Ophuysen' yang dipengaruhi ejaan Belanda, digunakan di Indonesia sejak tahun 1901. Setelah perang dunia kedua, Malaysia dan Indonesia membutuhkan sistem ejaan Latin baru untuk membangun masyarakat yang baru. Untuk itu, pada tahun 1947 Indonesia memperbaiki sistem ejaan *Ophuysen* dengan nama menteri departemen pendidikan, yaitu 'Ejaan Soewandi'. Setelah itu, pada tahun 1956 Indonesia membuat lagi sistem ejaan baru, yaitu 'Pembaruan Ejaan'. Selanjutnya, pada tahun 1959 Malaysia dan Indonesia bersepakat untuk mempersatukan sistem ejaan Latin.



Gambar 3) Proses Sepakatan Ejaan Latin BM dan BI

Sebagai hasil dari kesepakatan itu, kedua negara membuat 'Ejaan Melindo'. Setelah itu, pada tahun 1967 kedua negara membuat lagi 'Ejaan Yang Disempurnakan' yang berdasarkan Ejaan Melindo. Akan tetapi, pengumuman dan penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan tidak dilakukan, karena hubungan politik antarkedua negara menjadi buruk. Akhirnya, pada tahun 1972 Indonesia mengumumkan Ejaan Yang Disempurnakan dengan Perintah Presiden No. 57, sedangkan Malaysia pada tahun yang sama, mengumumkan pula 'Ejaan Baru Bahasa Malaysia' yang sama dengan Ejaan Yang Disempurnakan di Indonesia. Melalui kedua sistem ejaan Latin tersebut, ejaan Latin di kedua masyarakat sudah hampir dipersatukan sampai sekarang.

Bagaimana pun, seperti diperlihatkan pada gambar 2), perbedaan ejaan Latin antara BM dan BI, khususnya dalam kata serapan bahasa Arab masih terdapat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa skrip Arab yang lama digunakan, masih memengaruhi sistem ejaan Latin antara BM dan BI sehingga ejaan Latin di kedua masyarakat tidak dapat dipersatukan.

4. Perbedaan Ejaan Latin BM dan BI

Dalam Kamus Dewan (KD, 1970), dimuat 1.353 kata serapan dari Bahasa Arab (11% dari seluruh kata kepala, *entry*). Hal ini menunjukkan bahwa kosakata serapan dari Bahasa Arab yang masuk ke Bahasa Melayu tidak sedikit. Dari 1.353 kata serapan tersebut, pembahasan ini mengumpulkan 205 kata sebagai data *Corpus*, yang menampilkan jelas perbedaan ejaan Latin antara BM dan BI. 205 kata yang diambil, digolongkan lagi menjadi dua bagian, yakni perbedaan grafem konsonan dan vokal. Dalam dua bagian tersebut, kata yang menampilkan perbedaan grafem konsonan berjumlah 143 kata, sedangkan yang grafem vokal 62 kata.

Berikut adalah beberapa kata yang diambil dari 205 kata tersebut, yang menampilkan perbedaan grafem konsonan dan vokal dalam ejaan Latin antara BM dan BI. Dalam bab ini, 205 kata tidak semua ditampilkan karena halamannya tidak cukup untuk memuat semua kata tersebut. Daftar 205 kata sebagai data *corpus*, dilampirkan di belakang makalah ini.

Daftar kata di bawah ini, menampilkan perbedaan grafem konsonan antara BM dan BI. Jika melihat daftar kata tersebut secara terinci dapat ditemui bahwa ejaan Latin BM menuruti ejaan skrip Arab secara lebih benar dan tepat daripada BI. Salah satu contohnya dari daftar kata di atas, di antara kata 'fikir' dan 'pikir' di BM dan BI, grafem konsonan depan dieja <f> dalam skrip Arab. Sehubungan dengan fakta yang diperlihatkan dalam daftar kata, dapat disimpulkan bahwa penggunaan ejaan Latin BM masih dipengaruhi ejaan skrip Arab.

Konsonan)¹

Malaysia	Jawi	Indonesia
nekad	نیکد	nekat
fikir	فیکیر	pikir
ghaib	غاء یب	gaib
rukya	روءیه	rukya
khobar	خبر	kabar
wabah	وابق	wabah
qisas	قصاص	kisas
syukur	شکور	sukur (syukur)
watas	واتس	batas
hafaz	حفظ	hafal
nusyuz	نشوز	nusyus

¹ Dalam daftar kata ini, BM dirujuk dari Kamus Dewan (KD, 1970), BI dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1988), dan Skrip Arab, yaitu tulisan Jawi dirujuk dari Daftar Ejaan Rumi-Jawi (1989). Sebutan 'Jawi' dalam daftar kata, menunjuk skrip Arab yang melambangkan bunyi bahasa Melayu, yaitu BM dan BI.

Berikut adalah daftar kata yang menampilkan perbedaan grafem vokal antara BM dan BI. (Vokal)

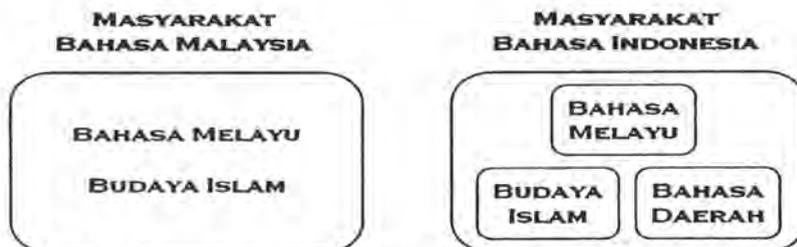
Malaysia	Jawi	Indonesia
rasmi	راسمي	resmi (rasmi)
biasiswa	بياسيسوا	beasiswa
salji	تالجي	salju
cuba	چوبا	coba
ubat	اوبت	obat
wang	واغ	uang

Bahasa Arab mempunyai tiga vokal /a/, /i/, dan /u/ oleh karena itu, grafem vokal pun hanya terdiri dari tiga grafem <a>, <i>, dan <u> dalam skrip Arab. Sedangkan bahasa Melayu (BM, dan BI) mempunyai sebelas vokal /a/, /e/, /i/, /o/, /u/, /a', /a^w/, /o', /w/, dan /y/ (termasuk separa vokal dan diftong). Hal ini menunjukkan bahwa sebelas vokal tersebut dalam bahasa Melayu tidak dapat termuat seluruhnya dalam skrip Arab yang mempunyai hanya tiga grafem vokal. Oleh karena itu, satu grafem vokal dalam skrip Arab harus melambangkan lebih daripada satu bunyi bahasa Melayu. Akhirnya, bermunculan perbedaan ejaan Latin antara BM dan BI seperti diperlihatkan pada daftar kata di atas.

5. Kesimpulan

Seperti telah diperlihatkan pada bab di atas, dapat dikatakan bahwa ejaan Latin di masyarakat BM dan BI masih dipengaruhi skrip Arab, sehingga bermunculan perbedaan ejaan Latin antara BM dan BI. Berdasarkan uraian pada bab di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Pengaruh penggunaan skrip Arab, terutama atas konsonan ejaan Latin BM lebih nyata, dibandingkan dengan pengaruh atas BI. Hal ini dapat dipahami bahwa sikap masyarakat BM yang dipengaruhi tradisi Islam, lebih kuat dan lebih positif dibandingkan dengan masyarakat BI. Dengan kata lain, dalam masyarakat BM, adanya bahasa Melayu sudah lama diperkokoh oleh budaya Islam. Sedangkan keberadaan bahasa Melayu dalam masyarakat BI, masih menjaga jarak dengan budaya Islam.



Gambar 4) Sikap masyarakat BM dan BI terhadap skrip Arab (Budaya Islam)

- 2) Ketidak-sesuaian sistem skrip Arab dengan bahasa Melayu menyebabkan perbedaan ejaan Latin antara BM, dan BI. Bahasa Arab adalah bahasa yang mempunyai hanya tiga vokal, sementara bahasa Melayu mempunyai sebelas vokal seperti telah dijelaskan pada bab di atas. Oleh karena itu, skrip Arab yang hanya mempunyai tiga grafem vokal, tidak dapat melambangkan sebelas vokal dalam bahasa Melayu secara baik. Dengan demikian, ketidak-sesuaian sistem skrip Arab dengan bahasa Melayu berhubungan dengan kemunculan perbedaan ejaan Latin antara BM dan BI.



Gambar 5) Ketidak-sesuaian sistem skrip Arab dengan Bahasa Melayu (BM dan BI)

Daftar Pustaka

- Asmah Haji Omar (1992), *The Linguistics Scenery in Malaysia*, Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.
- Cho Tae Young (2006), "A Study on Roman Orthographical Differences between Bahasa Malaysia and Bahasa Indonesia: with special reference to the influence of Jawi script", Tesis di Department of South East-South Asian Studies, Hankuk University of Foreign Studies: Seoul.
- Cho Tae Young (2010), 'A Paper of Arabic-based Sérang Script in South Celebes, Indonesia', Paper for Seminar The Linguistic Society of Korea 2010, 11~12 June 2010, Kunsan University: Kunsan, 101~111.
- Chun Tai Hyun (1996), *Bahasa Indonesia*, dalam *Aksara Dunia*, Seoul Arts Center: Seoul.
- Dewan Bahasa dan Pustaka (1989), *Daftar Ejaan Rumi:Jawi*, Kuala Lumpur.
- Endang Sri Hardiati (2002), *Pameran Perkembangan Aksara di Indonesia*, Departemen Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata: Jakarta.
- Iskandar, T (1970), *Kamus Dewan*, Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.
- James T. Collins (1998), *Malay World Language: A Short History*, Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.
- Othman Mohd. Yatim-Abdul Halim Nasir (1990), *Epigrafi Islam Terawal di Nusantara*, Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1988), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta.
- Ramli Harun-Aliudin Mahyudin-Achmad Patoni (1984), *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: Jakarta.
- Suzanne Romaine (1994), *Language in Society An Introduction to Sociolinguistics*, Oxford University Press: London.

ghalat	غالت	galat
ghalib	غالب	galib
ghazal	غزال	gazal
ghuyub	غيوب	guyub
loghat	لغة	logat
maghrib	مغرب	magrib
masyghul	مشغول	masgul
mubaligh	مبلغ	mubalig
tabligh	تبليغ	tablig

(4) <h> - <θ>

Malaysia	Jawi	Indonesia
lawah	لاوه	lawa
mahu	ماهو	mau
kahwin	كاهوين	kawin

(5) <ha> - <θ>

Malaysia	Jawi	Indonesia
baharu	بهارو	baru
bahari	بھاري	bari (bahari)
merbahaya	مربھاي	merbaya

(6) <h> - <t>

Malaysia	Jawi	Indonesia
mahkamah	محكمة	mahkamah(h)
muhibah	محبه	muhibat (muhibah)
munasabah	مناسبة	munasabat(h)
risalah	رسالة	risalat (risalah)
rukayah	رؤية	rukayat

(7) <t> - <h>

Malaysia	Jawi	Indonesia
musibat	مصيبة	musibah (musibat)
rahmat	رحمة	rahmah (rahmat)
zuriah	ذورية	zuriah (zuriat)

(8) <kh> - <h>

Malaysia	Jawi	Indonesia
syekh	شيخ	syeh (syekh)
takhta	تختا	tahta (takhta)

(9) <kh> - <k>

Malaysia	Jawi	Indonesia
khabar	خبر	kabar
Khamis	خميس	Kamis
khanjar	خنجر	kanjar
khuatir	خواطر	kawatir (khawatir)
nakhoda	نخودا	nakoda (nakhoda)
naskhah	نسخه	naskah
sakhlat	سخت	sakelat (sekelat)
sakhrat	صخرة	sakrat

(10) <k> - <θ>

Malaysia	Jawi	Indonesia
dakwa	دعوا	dawa
dakwat	دعوت	dawat

makyung	مَيُونُغ	mayung
makzul	مَزُول	mazul
Riak	رِيَاء	ria
takwil	تَاوِيل	tawil
takziah	تَزِيَه	taziah
takzim	تَهْظِيم	tazim

(11) <k> - <h>

Malaysia	Jawi	Indonesia
wabak	وَابِق	wabah

(12) <n> - <θ>

Malaysia	Jawi	Indonesia
Sendu	سِنْدُو	sedu

(13) <θ> - <n>

Malaysia	Jawi	Indonesia
loceng	لُوْجِج	lonceng

(14) <q> - <k>

Malaysia	Jawi	Indonesia
buraq	بِرَاق	borak
fasiq	فَاسِق	pasik
furqan	فُرْقَان	furkan
muqaddam	مُقَدِّم	mukadam
musabaqah	مُسَابَقَه	musabak(q)ah
qadar	قَدَر	kadar
qadim	قَدِيم	kadim
qamat	قَامَة	kamat
qari	قَارِيء	kari
qasidah	قَاصِدَة	kasidah
qidam	قَدَم	kidam
qisas	قِصَاص	kisas
qunut	قُنُوت	kunut
quraisy	قُرَيْش	kuraisi
Quran	قُرْآن	Kuran (Quran)
syuruq	شُرُوق	syuruk
talqin	تَلْقِين	talkin
tariqat	طَرِيقَة	tarikah

(15) <r> - <d>

Malaysia	Jawi	Indonesia
renyut	رَبُوت	denyut (renyut)

(16) <s> - <c>

Malaysia	Jawi	Indonesia
sebik	سَبِيْق	cebik

(17) <sy> - <ś>

Malaysia	Jawi	Indonesia
asyura	عَشُورَاء	asura
lasykar	لَشْكَر	laskar
mahsyar	مَحْشَر	mahsar (mahsyar)
masyghul	مَشْغُول	masgul

musykil	مُسْكِيل	muskil
romu ^{sy} a	رُومُوشَا	romusa
Syaaban	شَعْبَان	Saban (syaban)
syabas	شَبَاس	sabas
syahadat	شَهَادَة	sahadat
Syair	شَعِير	sair (syair)
syaitan	شَيْطَان	setan
syampu	شَمْفُو	sampo
syarat	شَرَط	sarat (syarat)
syarbat	شَرِبَة	serbat
syarikat	شَرِيكَة	serikat
Syok	شَوْق	sok
syukur	شُكُور	sukur (syukur)
syurga	شَرَف	surga (sorga)

(18) <w> -

Malaysia	Jawi	Indonesia
Watas	واتس	batas

(19) <ʒ> - <d>

Malaysia	Jawi	Indonesia
Beza	بيذا	beda
Nazar	نذر	nadar (nazar)
Nazir	ناظر	nadir

(20) <ʒ> - <j>

Malaysia	Jawi	Indonesia
rezeki	رزقي	rejeki (rezeki)
ziarah	زيارة	jiarah (ziarah)

(21) <ʒ> - <ʒ>

Malaysia	Jawi	Indonesia
Hafaz	حفظ	hafal
Lafaz	لفظ	lafal
mahfuz	محفوظ	mahful
Zahir	ظاهر	lahir
Zalim	ظالم	lalim
Zuhur	ظهر	lohor
takzim	تعظيم	taklim

(22) <ʒ> - <ʒ>

Malaysia	Jawi	Indonesia
mubazir	مبازر	mubasir (mubazir)
nusyuz	نشوز	nusyus

2. Vokal

(1) Penggunaan Alif

(1)-1 <a> - <ø>

Malaysia	Jawi	Indonesia
bahawa	بهاوا	bahwa
mufakat	موافقة	mupakat
bidaah	بدعة	bidah

Jum a t	جمعة	Jumat
--------------------	------	-------

(1)-2 <ø> - <a>

Malaysia	Jawi	Indonesia
rahsia	رهسيا	rahasia

(1)-3 <a> - <e>

Malaysia	Jawi	Indonesia
rakam	رقم	rekam
rasmi	راسمي	resmi (rasmi)
ritma	ريتما	ritme

(1)-4 <i> - <ø>

Malaysia	Jawi	Indonesia
Isnin	اثنين	Senin

(2) Penggunaan Ya

(2)-1 <e> - <a>

Malaysia	Jawi	Indonesia
rejam	رجم	rajam
sayembara	سايامبارا	saya(e)mbara

(2)-2 <e> - <i>

Malaysia	Jawi	Indonesia
selera	سليرا	selira
serondeng	سرونديع	serunding
Sebak	سبق	sibak

(2)-3 <i> - <e>

Malaysia	Jawi	Indonesia
biasiswa	بياسيسوا	beasiswa
rimbat	ريمبات	rembat (rimbat)

(2)-4 <i> - <u>

Malaysia	Jawi	Indonesia
Salji	ثلجي	salju

(2)-5 <ya> - <a>

Malaysia	Jawi	Indonesia
tahiyat	تحية	tahiat

(2)-6 <ya> - <i>

Malaysia	Jawi	Indonesia
mayat	ميت	mait (mayat)
sayat	سايات	sait (sayat)

(2)-7 <yi> - <i>

Malaysia	Jawi	Indonesia
sayid	سويد	said

(3) Penggunaan Wau

(3)-1 <o> - <u>

Malaysia	Jawi	Indonesia
bodek	بوديق	budek

bogel	برنگيل	bugil
bunda	بندا	bunda
bongsu	برعسو	bungsu
kosa	كوسا	kusa
longkang	لوعكع	lungkang
losen	لوسن	lusin
ponok	فونوق	punuk (ponok)
roh	روح	ruh (roh)
rosak	روسق	rusak
serodok	سرودوق	seruduk
serondeng	سرودنوع	serunding
songsang	سونوع	sungsang
sorok	سوروق	suruk
syok	شوع	syuk (syok)
syor	شور	syur

(3)-2 <u> - <o>

Malaysia	Jawi	Indonesia
buraq	براق	borak
cuba	چوبا	coba
khutbah	خطبه	khotbah
kudrat	قدرة	kodrat
kuntul	كوتنول	kontol
mabuk	مابوق	mabok (mabuk)
mudin	مودين	modin
nyunyut	نيونوت	nyonyot (nyunyut)
ubat	اوبت	obat
pacuk	فاچوق	pacok (pacuk)
pudi	فودي	podi (pudi)
puding	فونوع	poding (puding)
sagun	ساگون	sagon (sagun)
sarung	سارونغ	sarong (sarung)
sedut	سدوت	sedot
senduk	سنديق	sendok
senuh	سنوه	senoh (senuh)
syampu	شمفو	sampo

(3)-3 <u> - <ø>

Malaysia	Jawi	Indonesia
suhu	سوهو	suh (suhu)

(3)-4 <w> - <u>

Malaysia	Jawi	Indonesia
wang	واغ	uang
wap	واف	uap

(3)-5 <u> - <w>

Malaysia	Jawi	Indonesia
jadual	جدوال	jadwal
mesyuarat	مشوارت	musyawarat
peguam	فكوام	pegawam

(3)-6 <a^w> - <o>

Malaysia	Jawi	Indonesia
taubat	توباة	tobat (taubat)

PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH BERBASIS MULTIKULTURAL DALAM MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKARAKTER DI ERA GLOBALISASI

Edhy Rustan
(Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo)

1. Pengantar

Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, budaya, dan bahasa daerah. Realitas tersebut secara positif menggambarkan kekayaan masyarakat yang bertipe pluralis. Adanya suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang kehidupannya turut memberikan corak kebudayaan tersendiri bagi hidup dan kehidupan masyarakatnya.

Adanya potensi daerah, budaya dan bahasa yang beragam sering menjadi pemicu lahirnya suatu masalah pada suatu daerah. Setiap etnik atau ras cenderung mempunyai semangat dan ideologi yang etnosentris, yang menyatakan bahwa kelompoknya lebih superior daripada kelompok etnik atau ras lain. Kondisi tersebut disebabkan oleh masyarakat yang tidak merasa nyaman karena tidak saling mengenal identitas budaya orang lain. Salah satu penyebabnya adalah ketidakpahaman dengan nilai-nilai budaya yang dikomunikasikan melalui bahasa daerah setiap etnik. Adanya pengetahuan yang minim tentang budaya-budaya yang ada, mendorong meningkatnya prasangka terhadap orang lain, bahkan berujung sikap antipati yang didasarkan pada kesalahan generalisasi.

Selain masalah di atas, masalah lain yang sangat mengancam adalah mudahnya rasa memiliki generasi muda terhadap peninggalan budaya dalam bentuk bahasa dan sastra daerah sebagai akibat Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi pada era globalisasi ini yang telah mampu meniadakan batasan-batasan negara dan waktu. Adanya pandangan generasi muda sekarang, bahwa mempelajari bahasa dan sastra daerah merupakan hal yang kolot dan tidak modern. Pemikiran seperti itu harus secepatnya dikurangi karena dapat berpengaruh pada punahnya potensi lokal yang memiliki nilai-nilai yang sangat tinggi yang sekaligus merupakan karakter bangsa sendiri.

Salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengantisipasi terjadinya masalah tersebut adalah melakukan pembelajaran dengan berbasis multikultural yang mengedepankan potensi lokal di sekolah dalam membentuk generasi muda yang berkarakter dan tetap maju. Selain hal tersebut, kesadaran diri siswa terhadap nilai-nilai keberbedaan dan keberagaman yang melekat dapat dijadikan sebagai potensi dalam membangun cara pandang generasi muda yang berwawasan nasionalis di era globalisasi ini.

2. Pembelajaran Berbasis Multikultural

Secara etimologi, multikulturalisme berasal dari kata "multi" yang berarti plural, dan "kultural" yang berarti budaya, sedangkan "isme" berarti paham atau aliran. Jadi multikulturalisme secara sederhana adalah paham atau aliran tentang budaya yang plural. Dalam pengertian yang lebih mendalam, istilah multikulturalisme bukan hanya sekadar pengakuan terhadap budaya yang beragam, melainkan pengakuan yang memiliki implikasi-implikasi politis, ekonomi, dan sosial. Dalam perkembangannya, gagasan multikulturalisme ini menjadi sebuah gagasan yang dipandang perlu untuk dipromosikan sehingga menjadi bagian yang melekat pada diri masyarakat global, di mana setiap masyarakat pasti memiliki perbedaan dengan yang lainnya.

Gagasan multikultural ini muncul pada tahun 1960-an, pertama kali di Amerika dan negara-negara Eropa Barat, melalui gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak sipil (*civil right movement*). Tujuan utama dari gerakan ini adalah mengurangi praktik-praktik diskriminasi di tempat publik, rumah, tempat kerja, dan lembaga pendidikan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Selanjutnya gagasan multikulturalisme pun berkembang ke arah dunia pendidikan dan dikenal dengan pembelajaran multikulturalisme.

Pembelajaran multikulturalisme adalah kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan budaya, gender, ras, dan kelas sosial. Pembelajaran multikultural ini diterapkan di lingkungan sekolah untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang keberagaman. Melalui pembelajaran berbasis multikultural, sikap dan pemikiran (*mindset*) siswa akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman.

Pendidikan multikultural sangat penting diterapkan guna meminimalisasi dan mencegah terjadinya pengotak-ngotakan pada diri siswa. Melalui pendidikan berbasis multikultural, sikap dan pemikiran siswa akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman dalam hal ini adalah keberagaman budaya yang tertuang dalam kesusatraan setiap etnik. "Dengan pengembangan model pendidikan berbasis multikultural diharapkan mampu menjadi salah satu metode pembelajaran yang dapat mempersatukan bangsa yang memiliki

budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Selain itu, pendidikan multikultural dapat menanamkan sekaligus mengubah pemikiran peserta didik untuk benar-benar tulus menghargai keberagaman, etnis, dan agama (Samion dalam Yohanes Supriadi, 2009:1).

Pengenalan model pendidikan multikultural dapat dilakukan dengan menggunakan wadah sastra daerah yang sekaligus merupakan aset budaya lokal. Pembelajaran ini dikemas dengan menghadirkan sastra tiap-tiap daerah ke dalam kelas tanpa ada yang dikecualikan. Berdasarkan penerapan pembelajaran seperti inilah naantinya yang diharapkan untuk menumbuhkan rasa memiliki siswa terhadap budaya yang lain, sehingga kebersamaan dengan sendirinya akan tercipta. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Atok (dalam Yohanes Supriadi, 2009:1) yang menjelaskan bahwa, melalui model pembelajaran berbasis multikultural, siswa diperkenalkan dan diajak mengembangkan nilai-nilai dan sikap toleransi, solidaritas, empati, musyawarah, dan egaliter. "Dengan begini, siswa juga memahami kearifan lokal yang merupakan bagian dari budaya bangsa ini. Hal ini bisa mencegah terjadinya pengotak-ngotakan dan pendiskriminasi suatu etnik tertentu".

3. Pendidikan yang Berkarakter pada Era Globalisasi

Doni Koesoema A (2007:80) memahami bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai "ciri, atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya lingkungan keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir." Lebih lanjut Dodi Koesoema, A. (2007) mengatakan bahwa, karakter merupakan struktur antropologis manusia. Pendidikan karakter akan memberikan bantuan sosial agar individu dapat tumbuh dalam menghayati kebebasannya dalam hidup bersama dengan orang lain di sekitarnya maupun di dunia. Pendidikan karakter di Indonesia telah lama berakar dalam tradisi pendidikan. Namun, saat sekarang ini perlu lebih digalakkan dalam rangka menjaga pudarnya jati diri bangsa pada era globalisasi ini. Ki Hadjar Dewantara, Soekarno, dan Hatta, telah mencoba menerapkan semangat pendidikan karakter sebagai pembentuk kepribadian dan identitas bangsa sesuai dengan konteks dan situasinya.

Untuk itu, pendidikan di Indonesia diarahkan untuk mampu membentuk insan yang berkarakter dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa pada era globalisasi. Adapun perekat pendidikan yang dipakai ialah pembangunan karakter dan semangat kebangsaan atau *nation and character building (NCB)*. Dalam hal ini, karakter kebangsaan merupakan pengembangan jati diri bangsa Indonesia yang pernah dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur berbudaya yang tertuang dalam bahasa dan sastra daerah masing-masing etnik. Sedangkan semangat kebangsaan adalah keinginan yang amat mendasar dari setiap komponen masyarakat untuk berbangsa. Karakter dan semangat seperti itu akan berkembang, baik secara natural maupun kultural, menuju tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI.

4. Manfaat Pembelajaran Berbasis Multikultural yang Berkarakter

Manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan metode pembelajaran bahasa dan sastra daerah, di antaranya memberikan pemahaman kepada pengajar maupun peserta didik akan perlunya pengertian dan wawasan akan kebudayaan tempat berada. Melalui pembelajaran bahasa dan sastra daerah berbasis multikultural, secara otomatis akan diberikan suatu pelajaran tentang budaya pada tempat yang bersangkutan. Berdasarkan pemahaman yang telah ditanamkan tersebut, peserta didik diharapkan mampu beradaptasi dengan keadaan di sekitar.

Keadaan yang saat ini terlihat adalah adanya sekat-sekat antarsiswa. Sekat-sekat tersebut cenderung disebabkan adanya perbedaan asal siswa. Dengan adanya pembelajaran multikultural diharapkan dapat menghilangkan prasangka siswa dengan siswa lain yang berasal dari budaya yang berbeda. Prasangka budaya tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan dan pengertian akan keberadaan budaya lain. Prasangka tersebut juga disebabkan karena adanya sikap antipati terhadap budaya tertentu.

Pembelajaran multikultural diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang berwawasan nasional tanpa meninggalkan karakter lokal. Pembelajaran multikultural ini merupakan salah satu media untuk menumbuhkan wawasan sosial yang tentunya sangat diperlukan bagi integritas bangsa ke depannya.

Adanya pemahaman siswa tentang persamaan yang tertanam melalui pembelajaran multikultural, juga dapat menumbuhkan semangat berkompetisi. Semangat berkompetisi ini meliputi suatu keadaan di mana setiap siswa memiliki keinginan, semangat, serta kepercayaan diri akan kemampuan yang dimiliki. Dalam hal ini, aspek yang masih belum dimiliki oleh sebagian siswa. Kekurangan selama ini terjadi akibat kurang percaya dirinya siswa karena tidak memahami orang lain, sehingga merasa tidak mampu bersaing dengan orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda dengannya.

Melihat kondisi tersebut, yang di kaitkan dengan kota Baubau yang didiami oleh masyarakat dari berbagai suku dan etnis sangat cocok menerapkan pembelajaran bahasa dan sastra daerah berbasis multikultural. Selain bermanfaat untuk melestarikan budaya setempat, juga turut menyukseskan program pendidikan nasional dalam menciptakan generasi yang berkarakter.

5. Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Berbasis Multikultural dalam Membangun Generasi yang Berkarakter

Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah berbasis multikultural dapat dipahami sebagai suatu metode pendidikan yang memandang siswa memiliki keberagaman budaya dan salah satu di antaranya adalah bahasa dan sastra daerah. Melalui bahasa dan sastra tersebut siswa diajak untuk menyatukan cara pandangnya dan memberikan pemahaman lintas etnik dalam berbagai kebudayaan yang berbeda-beda pada suatu masyarakat di sekitarnya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam membentuk pendidikan yang berkarakter di tengah masyarakat yang beragam adalah mengkaji secara bersama-sama, bahasa dan sastra daerah yang ada pada kelompok-kelompok masyarakat sebagai kekayaan nasional. Metode pendidikan seperti ini akan mendorong siswa mengakui keberadaan budaya yang beragam, membantu siswa dalam mengembangkan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka, menyadarkan siswa bahwa konflik nilai sering menjadi penyebab konflik antarkelompok masyarakat, dan melahirkan generasi yang memiliki cara pandang nasionalis. Selain hal tersebut, melalui pengetahuan awal bahasa daerah yang beragam, menjadi modal utama siswa dalam mempelajari budaya lainnya.

Selain hal tersebut, dalam konteks pendidikan multikultural yang berkarakter, pengajar harus mampu memberikan contoh-contoh pengaplikasian nilai dalam tingkah laku kesehariannya. Hal ini akan mengilhami siswa untuk membentuk karakternya sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Karakter yang terbentuk akan tercermin pada karya dan ide kreatif inovatif siswa sehingga siswa akan mampu untuk meningkatkan dirinya dalam berkompetisi di tingkat dunia tanpa kehilangan jati dirinya.

6. Penutup

Berdasarkan pembahasan makalah ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa dan sastra daerah berbasis multikultural dapat meningkatkan kesadaran diri siswa terhadap nilai-nilai keberbedaan dan keberagaman yang melekat pada kehidupan lokal, sebagai faktor yang sangat potensial dalam membangun cara pandang generasi muda yang berwawasan nasionalis pada era globalisasi ini.

Pembelajaran bahasa dan sastra daerah berbasis multikultural sangat bersinergi dengan pembangunan bangsa yang berkarakter. Melihat potensi yang dimiliki kota Baubau secara khusus dan Indonesia pada umumnya, sangat berpotensi dilaksanakan pembelajaran berbasis multikultural, karena Kota Baubau didiami oleh masyarakat dari berbagai suku dan etnis. Kemajemukan masyarakat Kota Baubau dengan kekayaan bahasa daerahnya merupakan suatu karakter tersendiri yang harus dijaga dan dilestarikan.

Daftar Pustaka

- Ainul, Yaqin. 2005. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Anonim. 2007. *Pembelajaran Berbasis Multikultural* dalam <http://lubisgrafura.wordpress.com/> pembelajaran-berbasis-multikultural diunduh hari Kamis, 13 Mei 2010, pukul 23: 00 WITA
- Koesoema, A. D., 2007. *Pendidikan Karakter : Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mahfud Choerul. 2006. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putero, Susetyo Hario. Dkk., 2008. Pendidikan Karakter bagi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Teknologi Nuklir. Makalah Disajikan dalam Seminar Nasional IV SDM Teknologi Nuklir. Yogyakarta: 25-26 Agustus 2008
- Rustan, Edhy. 2010. Budaya Leluhur Dalam Memperkukuh Tatanan Masyarakat di Era Globalisasi. Makalah. Disajikan dalam Seminar Internasional Bahasa dan Sastra Pemertahanan Identitas Masyarakat Multikultural di Era Global: 23-24 Juni 2010.
- Yohanes Supriyadi. 2009. Pentingnya Pendidikan Berbasis Multikultural Rabu, 29 Juli 2009 09:20. diunduh hari Kamis, 13 Mei 2010, pukul 22: 16 WITA

BINONGKO: BAHASA, BESI, DAN TUKANG BESI

Laila Kurniawaty
(Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)

1. Pendahuluan

Bahasa sebagai salah satu sarana komunikasi yang memungkinkan seorang berkomunikasi dengan manusia yang lain. Salah satu yang membedakan bahasa sebagai alat komunikasi yaitu ranah pekerjaan yang digeluti.

Wakatobi yang baru saja menjadi salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara merupakan akronim dari empat pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Selain itu, Wakatobi dikenal juga dengan sebutan Pulau Tukang Besi. Sebutan tersebut muncul karena masyarakat di pulau tersebut memiliki pekerjaan sebagai tukang besi yang sebagian besarnya pembuat parang. Sebagian besar masyarakat yang membuat parang sebagai lahan mencari nafkah terdapat di Pulau Binongko.

Saat seseorang berbicara tentang masyarakat dan bahasa berarti dia telah masuk dalam ranah sosiolinguistik. *Sociolinguistics is an interdisciplinary field of research which attaches great significance both to the variability of language and to the multiplicity of languages and language forms in a given society* (Coulmas, 2001:563).

Setiap bahasa merupakan produk sosial dan setiap masyarakat memiliki kekhususan dalam bahasanya. Bidang pekerjaan termasuk salah satu yang memiliki kekhususan untuk bahasa yang digunakan oleh orang yang bergelut dalam bidang pekerjaan tertentu. Orang-orang yang bergelut dalam satu bidang tertentu akan lebih mudah berkomunikasi dengan sesamanya untuk istilah-istilah khusus yang digunakan dalam bidang mereka.

Dalam minat bidang kajian sosiolinguistik luas, terdapat sejumlah subkajian yang mengkaji beberapa aspek interaksi bahasa dan masyarakat seperti bagaimana bahasa berkorelasi dengan kategori sosial yang bermacam-macam, termasuk bagaimana bahasa yang digunakan oleh masyarakat tukang besi di Pulau Binongko. Hal inilah yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini, yaitu istilah-istilah yang digunakan oleh masyarakat tukang besi di Pulau Binongko.

2. Pembahasan

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, bahasa memiliki kekhususan sesuai bidang pekerjaan. Pada masyarakat di Pulau Binongko, ada beberapa istilah yang digunakan oleh para pandai besi dalam melakukan pekerjaan mereka. Istilah yang mereka gunakan sudah biasa di kalangan mereka, akan tetapi mungkin tidak bagi orang lain. Berikut akan dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam bidang pembuatan parang.

Beberapa istilah yang digunakan oleh pandai besi dalam masyarakat pembuat parang di antaranya yaitu: *Busoa, Kontarama Buso, Mbalo Buso, Hengkede'a Mbalo, Tandasa'a Winaka, Tandasa'a Kau, Pande Busoa, Pande Kontarapa, Pande Dandu, Kabali, Hawu, Mata, Uti, Uti'a, dan Soropue*.

Menurut alat yang digunakan, istilah yang digunakan yaitu *Busoa, Kontarama Buso, Mbalo Buso, Hengkede'a Mbalo, Tandasa'a Winaka, Tandasa'a Kau*. Menurut orang yang mengerjakan, istilah yang digunakan yaitu *Pande Busoa, Pande Kontarapa, dan Pande Dandu*. Istilah untuk parang itu sendiri dan kegiatan yang dilakukan yaitu *Kabali, Hawu, Mata, Uti, Uti'a, dan Soropue*.

2.1 Istilah untuk Peralatan yang Digunakan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, istilah peralatan yang digunakan untuk membuat parang yaitu *Busoa, Kontarama Buso, Mbalo Buso, Hengkede'a Mbalo, Tandasa'a Winaka, Tandasa'a Kau*.

2.1.1 *Busoa*

Busoa adalah seperangkat peralatan yang digunakan oleh pembuat parang dalam membuat parang. Perangkat ini terdiri dari *Kontarama buso, mbalo buso, dan hengkede'a mbalo*.

Asal mula penamaan buso untuk perangkat peralatan tersebut yaitu bunyi yang dihasilkan dari hasil memompa. Bunyi "bush" yang muncul saat tangkai busoa ditekan membuat para pandai besi menamakannya busoa.

2.1.2 *Kontarama Buso*

Kontarama Buso adalah tangkai yang digunakan oleh *pande busoa* untuk menghasilkan angin agar bara tetap membara dengan memompa. Secara harfiah, *kontarama* berarti pegangan. Jadi, *Kontarama Buso* adalah pegangan *buso*.

2.1.3 *Mbalo Buso*

Mbalo Buso adalah pipa besar yang di dalamnya terdapat *Kontarama Buso*. *Mbalo* berarti pipa. Sebelumnya, tempat menaruh pipa ini yaitu batang kayu yang dilubangi. Seiring dengan perkembangan zaman, balok kayu tersebut diganti dengan pipa.

2.1.4 *Hengkede'a Mbalo*

Hengkede'a berarti tempat duduk. Jadi, *hengkede'a Mbalo* adalah tempat yang disiapkan untuk mendudukkan pipa.

2.1.5 *Tandasa'a Winaka*

Tandasa'a Winaka adalah salah satu peralatan yang digunakan untuk menaruh besi yang akan ditempa. Secara harfiah, *Tandasa'a* berarti talenan dan *Winaka* berarti besi. Jadi, *Tandasa'a Winaka* berarti talenan yang terbuat dari besi.

2.1.6 *Tandasa'a Kau*

Tandasa'a Kau adalah juga merupakan salah satu peralatan yang digunakan untuk menaruh besi yang akan ditempa. Akan tetapi bahannya berbeda. Secara harfiah, *Tandasa'a* berarti talenan dan *Kau* berarti kayu. Jadi, *Tandasa'a Kau* berarti talenan yang terbuat dari kayu.

2.2 Istilah untuk Orang yang Mengerjakan

Sebutan yang digunakan untuk orang-orang yang mengerjakan parang ada tiga, yaitu *Pande Busoa*, *Pande Kontarapa*, dan *Pande Dandu*.

2.2.1 *Pande Busoa*

Pande Busoa adalah orang yang kerjanya memompa agar bara tetap membara. Dia dinamakan *Pande Buso* karena alat yang dia gunakan untuk menjaga bara tetap menyala berupa busoa yang terdiri dari *tangkai busoa* dan *mbalo busoa* yang telah dijelaskan sebelumnya.

2.2.2 *Pande Kontarapa*

Pande Kontarapa adalah orang yang memegang penjepit untuk menjepit besi yang telah dipanaskan untuk kemudian ditempa. Secara harfiah, *pande* berarti pandai. *Kontarapa* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *konta* dan *rapa*; *konta* berarti pegang, dan *rapa* berarti penjepit. Jadi, dapat diartikan *pande Kontarapa* sebagai Pandai yang memegang penjepit.

Pande Kontarapa tidak hanya bertugas memegang penjepit tetapi juga bertugas menempa besi. Namun, palu yang dipegang hanya seberat $\pm 2\text{Kg}$. Jadi, *Pande Kontarapa* menggunakan salah satu tangannya untuk menjepit besi yang membara dan tangan yang lain untuk menempa besi yang dipegangnya.

2.2.3 *Pande Dandu*

Pande Dandu, kedua kata ini memiliki makna tersendiri. Secara etimologi, *pande* termasuk dalam kategori ajektiva yang berarti 'pandai,' dan *dandu* termasuk dalam kategori verba yang berarti 'berbalasan.' Dalam kegiatan membuat parang, *pande dandu* tidak lagi berkategori ajektiva atau verba tetapi sudah berkategori nomina. Maknanya pun bukan lagi 'pandai berbalasan'. Namun, karena kegiatan yang dilakukan berbalasan dalam artian, orang yang disebut sebagai *Pande Dandu* yaitu orang yang memukul parang secara bergantian dengan *Pande Kontarapa*.

Pande Dandu yang bertugas menempa parang bergantian dengan *Pande Kontarapa* menggunakan palu yang lebih berat dari yang digunakan oleh *Pande Kontarapa*. Palu yang digunakan oleh *Pande Dandu* seberat $\pm 5\text{Kg}$.

2.3 Istilah untuk Parang dan Kegiatan yang Dilakukan

Istilah yang digunakan untuk parang itu sendiri ada beberapa yaitu *kabali*, *hawu*, *uti*, dan *mata*. Istilah yang digunakan untuk kegiatan yang dilakukan dalam membuat parang ada dua yaitu *uti'a* dan *Soropue*.

2.3.1 *Kabali*

Kabali merupakan nama yang diberikan untuk parang secara keseluruhan yang sudah selesai dibuat.

2.3.2 *Hawu*

Hawu merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut hulu atau tempat pegangan parang yang biasanya terbuat dari kayu.

2.3.3 Mata

Mata yaitu sepanjang bagian parang yang tajam yang dapat digunakan untuk memotong atau menebang.

2.3.4 Uti dan Uti'a

Uti dan *Uti'a* dua istilah yang berbeda dalam kategori kata. *Uti* termasuk dalam kelas kata nomina sedangkan *uti'a* termasuk dalam kategori verba. *Uti* yaitu bagian parang yang kecil untuk dimasukkan ke hulu parang. *Uti'a* yaitu kegiatan yang dilakukan dalam membuat bagian parang yang kecil untuk dimasukkan ke dalam hulu.

2.3.5 Soropue

Soropue termasuk dalam kategori verba. Kata ini berarti cara yang dilakukan untuk mengeraskan ujung parang yang tajam dengan menyelupkan sebagian parang yang tajam ke dalam air dan bagian yang tidak tajam di tetap di atas air.

3. Penutup

Beberapa istilah yang digunakan oleh tukang besi di Pulau Binongko memperkaya khasanah bahasa di Indonesia. Beberapa istilah yang ditemukan dan digunakan oleh pandai besi untuk tulisan awal ini dibagi tiga yaitu istilah menurut peralatan yang digunakan, orang yang mengerjakan, dan istilah parang itu sendiri dan kegiatan yang dilakukan.

Istilah yang digunakan menurut peralatan yang digunakan yaitu *Busoa*, *Kontarama Buso*, *Mbalo Buso*, *Hengkede'a Mbalo*, *Tandasa'a Winaka*, dan *Tandasa'a Kau*. Istilah yang digunakan untuk orang yang mengerjakan yaitu *Pande Busoa*, *Pande Kontarapa*, dan *Pande Dandu*. Istilah untuk parang itu sendiri dan kegiatan yang dilakukan yaitu *Kabali*, *Hawu*, *Mata*, *Uti*, *Uti'a*, dan *Soropue*.

Mudah-mudahan tulisan singkat ini dapat menambah pengetahuan kita sekalian mengenai istilah-istilah yang digunakan oleh masyarakat pandai besi.

Daftar Pustaka

- Coulmas, Florian. 2001. "Sociolinguistics" dalam Aronof, Mark & Rees-Miller, Janie (ed). *The Handbook of Linguistics*. Oxford and Massachusetts: Blackwell.
- Holmes, Janet. 1992. *An Introduction to Sociolinguistics*. London and Newyork: Longman.
- Hymes, Dell. 1972. "Model of the Interaction of Language and Social Life" dalam Gumperz, John & Hymes, Dell (ed). *Direction in Sociolinguistics*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Trudgill. 1924. *Sociolinguistics an Introduction to Language and Society*. Harmondswarth: Penguin Books Ltd.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Komisi E
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 20 Juli 2010, 14.30 – 16.00
Penyaji/Pemakalah	: Laila Kurniawaty Paada, S.Pd., M.A.
Judul Makalah	: Pemertahanan dan Pergeseran Bahasa Ibu di Poleang Kabupaten Bombana: Suatu Pengamatan Awal
Pemandu	: Juamdan Z.Z., S.S., M. Hum.
Pencatat	: Zakiyah M. Husba, S.S.
Jumlah Peserta	: 40 orang

TANYA JAWAB

Jufri Ahmad, S.Pd. (Guru SDN di Kota Baubau)

Pertanyaan/Saran

Di makalah ini disebutkan kemungkinan bahasa daerah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Apa yang dapat dilakukan jika ada kata dalam bahasa daerah dan ingin ditawarkan untuk diserap dalam Bahasa Indonesia?

Jawaban/Tanggapan

Jika ada suatu kata yang dapat menjelaskan sesuatu dengan satu kata saja dalam bahasa daerah, Bapak dapat memberi masukan lewat kantor bahasa yang ada di daerah Bapak. Kalau di Sulawesi Tenggara ada Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari Kantor bahasa tersebut akan diteruskan ke pusat bahasa untuk dipertimbangkan menjadi kosa kata baru dalam bahasa Indonesia.

La Ode Habirun

Pertanyaan/Saran

Apa yang sudah dilakukan oleh Kantor Bahasa untuk menampung kosakata daerah yang sangat banyak, termasuk dalam tulisan saudara, kosakata dalam bidang pembuatan parang?

Jawaban/Tanggapan

Di Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara, juga di kantor-kantor bahasa yang lain, sudah menerbitkan kamus budaya yang menginventarisasi kosa kata budaya yang ada di daerah tersebut. Termasuk di dalamnya antara lain, pakaian adat, upacara-upacara tradisional, rumah ada, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan budaya.

PEMBERDAYAAN BAHASA DAERAH SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL¹

Anang Santoso
Universitas Negeri Malang (UM)

Sebuah seminar dan lokakarya nasional yang bertema “Dialog Nasional Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah Nusantara” yang digagas oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada Rabu 20 Maret 2002 telah memunculkan sebuah fakta tentang keprihatinan, ketakutan, keterkejutan, serta perasaan minor lainnya tentang sudah berkurangnya frekuensi pemakaian—bahkan tidak dipakainya lagi—bahasa daerah sebagai komunikasi oleh kaum remaja. Paling tidak begitulah pengakuan beberapa pakar yang hadir, antara lain mewakili masyarakat bahasa Jawa (Timur dan Tengah), Sunda, Bali, Makassar, Gorontalo, Lampung, Minangkabau, Sasak, dan masyarakat bahasa lainnya. Mungkin saja pengakuan itu bukan hasil dari penelitian yang serius dan “hanya” berasal dari kesan sesaat. Kalau pun menggunakan bahasa daerah, bahasa mereka itu lebih bernuansa bahasa Indonesia. Sebuah fenomena yang juga mengemuka dari pemakaian bahasa daerah di Yogyakarta—sebuah daerah yang menjadi ukuran daya pakai bahasa Jawa, ternyata radio-radio swasta di Yogyakarta yang berjumlah lebih dari 20 stasiun itu menggunakan dialek Jakarta untuk acara-acara yang berlabel remaja itu, dan bukan bahasa Jawa.

Apa arti fenomena di atas? Bahasa daerah ternyata cenderung tidak lagi menjadi bahasa komunikasi oleh sebagian lapis masyarakat Indonesia. Jika generasi muda dimaknai calon anggota masyarakat di kemudian hari atau masa depan, betapa suramnya wajah bahasa daerah kita setelah delapan tahun semlok di Yogyakarta itu. Mungkin saja, apa yang terjadi di Yogya itu juga terjadi di daerah lain di Indonesia.

Akankah bahasa daerah menjurus kepada keadaan yang disebut dengan *language shift*, dan selanjutnya akan menjadi *language death*. Akankah penutur bahasa daerah sudah tidak memiliki keterampilan yang baik dalam berbahasa daerah—seperti yang terjadi di Jawa Timur—yang selanjutnya mereka “terpaksa” mencampurnya dengan bahasa Indonesia. Jika ini yang terjadi aroma awal kematian bahasa sudah mulai tercium. Dengan demikian, sebaliknya, bahasa daerah tidak akan mati atau punah selama para penuturnya masih menggunakannya dan menghormatinya sebagai kekayaan rohaniah atau batin mereka.

Bagaimanakah bahasa daerah dapat bertahan hidup di tengah gempuran bahasa Indonesia dan bahasa asing? Bagaimanakah bahasa daerah dapat menjadi instrumen yang tepat di tengah gencarnya pembangunan Indonesia? Bagaimana bahasa daerah dapat direvitalisasi sehingga disenangi oleh para pemakainya dan selanjutnya digunakan oleh para pemakainya itu dalam komunikasi di lingkungan keluarga dan masyarakat? Bagaimana usaha pemerintah daerah dalam menjaga daya tahan hidup bahasa daerah? Bagaimanakah kearifan lokal dapat digali melalui revitalisasi bahasa daerah itu? Itulah sejumlah pertanyaan yang menurut saya penting untuk dijawab meskipun pertanyaan-pertanyaan itu bukan pertanyaan yang baru lagi. Hanya saja, karena selama ini pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab secara tuntas maka pertanyaan akan kembali muncul ke permukaan.

BEBERAPA KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN BAHASA DAERAH

Sudah banyak kebijakan pemerintah terhadap keberadaan bahasa daerah dalam konteks keindonesiaan, mulai dari UUD 1945 sampai peraturan-peraturan perundangan di bawahnya. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36 menyatakan bahwa “Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik..., bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.” Rumusan ini menunjukkan bahwa peran rakyat pemakai bahasa daerah itu menjadi amat penting, sementara negara—melalui pemerintah—akan mendukung apa yang akan dilakukan para pemakai bahasa. Pemerintah tidak dapat mengambil kebijakan terhadap bahasa daerah tertentu apabila para pemakainya tidak memiliki inisiatif tentang bahasa daerah mereka. Pemerintah pusat lebih banyak memberikan payung hukum dan motivasi untuk pengembangan dan pelestarian bahasa daerah.

Rumusan hasil sidang MPR RI tahun 1988 tentang keberadaan bahasa daerah juga perlu dicamkan.

“Bahasa daerah perlu terus dibina dan dilestarikan dalam rangka mengembangkan serta memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khazanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur kepribadian bangsa. Dalam pada itu, bahasa daerah perlu terus dipelihara agar tetap mampu menjadi ungkapan budaya masyarakatnya yang mendukung kebhinnekaan budaya sebagai unsur kreativitas dan

¹ Anang Santoso adalah dosen pada Fakultas Sastra dan Program Pascasarjana, Universitas Negeri Malang (UM). Makalah disajikan dalam Kongres Internasional Bahasa-bahasa Daerah Sulawesi Tenggara di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara tanggal 18—20 Juli 2010.

sumber kekuatan bangsa. Sejalan dengan itu, perlu ditingkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah.”

Hasil Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 yang melegenda itu juga telah meletakkan kedudukan dan fungsi bahasa daerah. Bahasa-bahasa daerah merupakan salah satu unsur kebudayaan nasional yang dilindungi oleh negara dan dijamin dengan undang-undang. Dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa-bahasa daerah berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Di dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa nasional, (2) bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan (3) alat penembangan serta pendukung kebudayaan daerah (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1975:5—6).

Pertanyaannya adalah sudahkah bahasa daerah di Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, dan alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat? Temuan Jufrizal (2004) tentang semakin mengeringnya bahasa Minangkabau ragam adat karena gempuran aspek luar bahasa, seperti dinamika masyarakat, ekonomi, sosial budaya, politik negara, politik bahasa, teknologi, perubahan pandangan hidup, dan lain-lain. Bahasa Minang telah terdesak pemakaiannya oleh bahasa Indonesia. Loyalitas kaum muda terhadap bahasa Minang sudah mulai luntur. Bahasa Minang dianggap kalah masyhur dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Seperti diketahui bahwa masyarakat Sumatera Barat yang identik dengan suku Minang selama ini dipersepsikan sebagai masyarakat yang memiliki kesetiaan bahasa yang tinggi terhadap bahasa daerahnya.

Selain itu, atas alasan praktis-ekonomis, keluarga-keluarga muda—yang *notabene* berasal dari daerah yang sama—banyak yang memutuskan tidak menggunakan bahasa daerah ketika mereka berkomunikasi dengan anaknya. Akibatnya, anak tidak memiliki keterampilan berbahasa daerah yang dipelajari dari orang tuanya. Mereka cenderung menguasai bahasa daerah di tempat permainan, hasil komunikasi dengan teman-teman sepermainan. Hal ini dapat menginformasikan seberapa kualitaskah input bahasa yang dikuasai oleh anak, serta ragam bahasa yang dikuasai oleh anak dari temannya itu.

Sudah banyak penelitian bahasa dan sastra daerah yang dilakukan oleh Pusat Bahasa di Jakarta, Balai Bahasa Provinsi, Jurusan Linguistik dan Jurusan (Pendidikan) Bahasa dan Sastra, bahkan oleh perorangan. Sudah tidak terhitung lagi berapa kali pengkajian dan pembinaan bahasa dan sastra daerah dilakukan melalui seminar, lokakarya, penyuluhan, perlombaan, dan sebagainya. Hanya saja, dalam pandangan saya kegiatan-kegiatan itu masih bersifat mozaik, sendiri-sendiri, terpisah-pisah antara satu dengan yang lainnya.

Mengenai pengembangan pengajaran bahasa daerah, Seminar Politik Bahasa Nasional merumuskannya sebagai berikut.

Pengembangan pengajaran bahasa daerah bertujuan meningkatkan mutu pengajaran bahasa daerah sedemikian rupa sehingga penuturnya memiliki (1) keterampilan berbahasa daerah, (2) pengetahuan yang baik tentang bahasa daerah, dan (3) sikap positif terhadap bahasa daerah dan sastranya (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1975:9—10).

Fakta terbaru tentang kondisi pengajaran bahasa daerah, khususnya di perkotaan, semakin memprihatinkan. Pengajaran bahasa daerah cenderung tidak disukai oleh anak didik. Hal ini mungkin saja disebabkan bahasa daerah bukan mata pelajaran wajib. Nilai bahasa daerah lebih rendah daripada nilai bahasa asing, misalnya bahasa Inggris. Hal ini lebih diperparah dengan para guru bahasa daerah yang tidak memiliki kompetensi berbahasa daerah. Di Kabupaten Malang Jawa Timur, misalnya, guru bahasa daerah yang memiliki ijazah Pendidikan Bahasa Jawa kalau tidak salah tidak lebih dari 20 persen(?). Mereka rata-rata adalah pemegang ijazah sarjana PPKn, pendidikan ekonomi dan koperasi, pendidikan teknik mesin, pendidikan teknik sipil, dan ijazah lainnya. Mereka dipilih mengajarkan bahasa Jawa karena mereka berasal dari daerah Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Madiun, Ponorogo, dan Pacitan yang bahasa daerahnya masih cukup intensif dipakai dalam komunikasi keluarga dan masyarakat.

PLUS MINUS KONDISI PENGGUNAAN BAHASA DAERAH DI DAERAH: PENGAMATAN SEPINTAS

Beberapa kondisi objektif—plus dan minus—tentang penggunaan bahasa daerah di daerah. Bahasa daerah cenderung ke arah kematian bahasa. Ini ditunjukkan oleh hal-hal berikut. Pertama, bahasa daerah menjadi bahasa sekunder untuk kepentingan komunikasi, khususnya bagi generasi muda. Ketika mereka berkomunikasi yang menjadi bahasa primernya adalah bahasa Indonesia. Kedua, bahasa daerah dipandang oleh generasi muda sebagai bahasa tidak menarik, zaman dahulu, tidak gaul, kuno, dan sebutan negatif lainnya. Menggunakan bahasa daerah berarti mengakrabi dengan hal-hal bersifat kuno itu. Bagi generasi muda inilah yang paling tidak disenangi. Ketiga, majalah-majalah sebagai sarana pemertahanan bahasa daerah semakin sedikit dan hidupnya semakin memprihatinkan. Di Jawa Timur, misalnya, dua majalah bahasa Jawa yang relatif terdengar suaranya, yakni *Jayabaya* dan *Penyeban Semangat* dalam pandangan saya sudah memprihatinkan.

Keempat, radio-radio untuk remaja sudah tidak menggunakan bahasa daerah, bahkan mereka memilih bahasa Indonesia dialek Betawi. Di Jawa Timur, beberapa radio memiliki mata acara yang menggunakan bahasa daerah. Hanya saja mata acara itu hanya terkait dengan kesenian daerah yang pendengarnya adalah para orang tua. Kelima, pengajaran bahasa daerah di sekolah hanya sekadar formalitas yang disebabkan oleh banyak faktor. Dalam pengajaran bahasa Jawa di Jawa Timur, misalnya, cukup banyak syarat yang belum terpenuhi dalam pengajaran bahasa Jawa. Banyak guru yang tidak menguasai “timbangan macapat”—sebagai salah satu indikator penting tentang kecakapan mengajarkan bahasa Jawa—sehingga siswa juga semakin tidak mengenal, apalagi menguasai bentuk dan maknanya. Guru “hanya” menguasai lagu-lagu dolanan yang lebih populer yang maknanya relatif tidak dalam.. Meskipun sudah banyak guru bahasa Jawa yang tersertifikasi, pengajaran bahasa Jawa masih jauh dari kata memuaskan.

Bahasa daerah juga memiliki peluang bertahan dan hidup. Ini ditunjukkan oleh hal-hal berikut. Pertama, bahasa daerah tetap digunakan sebagai bahasa pengantar di kelas-kelas permulaan SD. Meskipun ini adalah kontradiksi dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sesuai dengan rumusan dalam politik bahasa nasional, keadaan yang darurat ini masih diharapkan dalam mempertahankan bahasa daerah. Bahkan, di pelbagai daerah, bahasa daerah masih terus digunakan melewati kelas permulaan. Kedua, bahasa daerah masih digunakan dalam beberapa mata acara di RRI atau TVRI daerah. TVRI Surabaya, misalnya, bahasa daerah digunakan dalam acara kesenian “Campur Sari”. Meskipun masih dalam skala yang terbatas pada generasi tua, paling tidak bahasa daerah masih menjadi bahasa komunikasi. Ketiga, bahasa daerah masih diberi kesempatan berkembang melalui majalah dan surat kabar, atau paling tidak ada kolom atau rubrik untuk bahasa daerah. Keempat, bahasa daerah masih digunakan dalam khotbah di masjid atau gereja, serta penyuluhan di lapangan. Di banyak daerah, khotbah di masjid memang menunjukkan pemakaian bahasa daerah. Hanya saja, fakta ini semakin hari semakin berkurang karena desakan penggunaan bahasa Indonesia. Kelima, bahasa daerah masih digunakan dalam lamaran-lamaran peminangan. Hanya saja, banyak tamu yang tidak memahami bahasa yang digunakan dalam peminangan itu. Keenam, bahasa daerah masih digunakan dalam acara-acara kematian. Ketika memberangkat orang mati ke tempat peristirahatan terakhir, mulai berangkat dari rumah sampai prosesi memasukkan jenazah ke liang lahat bahasa daerah masih digunakan. Ketujuh, bahasa daerah masih digunakan untuk mengantarkan acara-acara kesenian. Kedelapan, bahasa daerah masih digunakan “bahasa politik” pejabat daerah ketika berkomunikasi dengan para calon pemilihnya. Ini dipilih dengan tujuan agar visi dan misinya sebagai calon pejabat publik itu dapat dipahami oleh akar rumput.

Jika plus minus itu ditimbang-timbang, keberadaan generasi muda dalam penggunaan bahasa daerah perlu mendapat penekanan. Sebagai ahli waris bahasa daerah, mereka adalah calon pelestari bahasa daerah itu. Di pundak merekalah keberlangsungan kehidupan bahasa daerah diharapkan. Mereka yang sekarang lebih akrab dengan bahasa yang bukan bahasa daerah—misalnya bahasa Indonesia dialek Betawi—tentu saja tidak mudah kita harapkan mau dan rela menggunakan serta melestarikan bahasa daerah. Perlu ada strategi khusus agar para generasi muda itu mau menggunakan dan melestarikan bahasa daerah.

Saya tidak punya data tentang bagaimana generasi muda di daerah Sulawesi Tenggara menyikapi bahasa daerahnya. Saya mempunyai keyakinan kondisinya tidak separah yang terjadi di kota-kota besar di Jawa. Saya yakin generasi muda di Sultra masih peduli dan memiliki *sense of belonging* terhadap bahasa-bahasa daerah mereka. Mereka masih menggunakan bahasa daerah mereka dalam berkomunikasi. Senyampang masih belum terlalu metropolis, kita dapat merancang sebuah program yang bertujuan untuk terus mendayagunakan bahasa daerah sebagai bahasa komunikasi.

BAHASA DAERAH, NILAI BUDAYA, DAN KEARIFAN LOKAL

Setiap bangsa menginginkan kemajuan dalam pelbagai bidang. Bangsa Indonesia yang multikultur itu juga menginginkan hal yang sama. Pemerintah telah menyusun sejumlah program yang bertujuan untuk memajukan Indonesia. Ada sebuah dilema ketika bangsa itu sudah berada pada taraf kemajuan. Pertama, masyarakat maju telah memaksa kita menjadi manusia global. Menjadi manusia global berarti terbentuknya nilai-nilai budaya baru yang sifatnya transnasional dan mondial. Kemajuan TIK semakin mendukung terbentuknya nilai-nilai budaya baru itu. Kedua, di tengah gencarnya menjadi manusia global ada sebuah ketakutan terhadap adanya dampak global, yakni hilangnya dan semakin marginalnya nilai budaya lokal. Inilah yang mengilhami munculnya pemikiran kembali kepada kearifan lokal.

Kearifan lokal (*local wisdom*) adalah kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan budaya lokal yang berupa tradisi, petatah-petith, dan semboyan hidup. Mengapa kita kembali memikirkan dan mempertimbangkan kearifan lokal? Beberapa catatan dapat dikemukakan terkait dengan kearifan lokal ini.

Pertama, menggali dan menghidupkan kembali kearifan lokal bukan mengobarkan spirit sukuisme, bukan pula provinsionalisme. Akan tetapi, kegiatan itu berupa menggali semangat-semangat “lokal” yang telah dilupakan, padahal semangat lokal itu amat lebih bermakna universal dalam wajahnya yang lokal itu. Era autonomi daerah ini semakin memperoleh momentumnya untuk mengakselerasi revitalisasi kearifan lokal.

Kedua, menggali dan menghidupkan lagi kearifan lokal adalah manifestasi baru dari kebhinnekaan kita. Dasar dari kebhinnekaan adalah "keberbedaan". Manusia Indonesia harus sadar bahwa ketika mereka lahir ke dunia mereka berhadapan dengan sebuah keadaan wujud berbeda-beda itu. Berbeda-beda adalah sebuah keniscayaan, bersatu adalah sebuah impian, sebuah cita-cita yang harus terus diperjuangkan.

Ketiga, menggali dan menghidupkan kearifan lokal adalah memperkuat penyaring nilai-nilai dari luar yang destruktif. Suka atau tidak suka, kita hidup dalam masyarakat yang semakin mengglobal di mana batas-batas negara menjadi bersifat administratif saja. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah memperpendek, mempercepat, & mempermudah komunikasi.

Keempat, menggali dan menghidupkan kearifan lokal dapat menjadi sarana meredam gejala yang bersifat internal. Banyak gejala di daerah yang memiliki warna lokal kedaerahan dan tidak cocok dibaca dari kacamata Indonesia. Kearifan lokal lebih tepat dioptimalkan untuk meredam gejala-gejala kedaerahan yang dapat menjalar menjadi isu-isu nasional bahkan internasional.

Kelima, menggali dan menghidupkan kearifan lokal pada hakikatnya adalah menemukan kembali akar dari budaya sebuah bangsa. Dalam konteks keindonesiaan, akar dan budaya bangsa Indonesia didasari oleh akar budaya lokal. Menjadi Indonesia pada hakikatnya adalah mencita-citakan—bahkan memimpikan—sebuah bangsa yang "baru" yang didasari oleh kekokohan masyarakat lokal itu. Tanpa kekokohan masyarakat lokal, Indonesia baru yang diimpikan juga mudah rapuh. Indonesia sudah menunjukkan bahwa kita mampu menyaring dan menyesuaikan unsur asing ke dalam budaya Indonesia sedemikian rupa sehingga terasa "layak", "cocok", dan "tidak dipaksakan". Tentu saja, akar budaya yang digali adalah akar budaya lokal yang memiliki sifat-sifat menuju kemajuan, menghargai waktu, menghargai sesama manusia, menghargai demokrasi, mengurangi atau meniadakan hak-hak istimewa yang berlebihan pada sebagian kelompok tertentu, menempatkan Tuhan sang Pencipta di atas segala-galanya.

Hanya saja, kearifan lokal yang ada sering dilupakan. Sesuatu yang berupa tradisi oleh banyak masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang jumud, masa lalu, tidak *gaul*, ketinggalan zaman, antikemajuan, dan sebagainya. Kondisi itu semakin diperparah dengan kebijakan-kebijakan yang mencoba meniadakan kearifan lokal. Tenggelamnya kearifan lokal (*local wisdom*) tidak lepas dari kebijakan sentralisasi pada waktu Orde Baru. Pengesahan UU No. 5. Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, merupakan awal dari penghapusan hak-hak komunitas adat yang digantikan dan diseragamkan menjadi desa. Berikut Pasal Satu berbunyi:

"Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan bentuk penyelenggaraan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Desa pada era Orde Baru telah menggantikan wilayah dan komunitas adat. Desa juga telah meminggirkan—bahkan juga meniadakan—hak-hak adat. Pemerintah Orde Baru telah melakukan pencabutan nilai-nilai tradisional melalui berbagai produk peraturan, perundangan, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Seluruh masyarakat-adat di Indonesia dipaksa menjadi konsep desa yang *notabene* hanyalah salah satu konsep masyarakat adat di Indonesia dan dipaksakan ke seluruh masyarakat adat di Indonesia. Hegemoni Orde Baru telah merampas keberagaman komunitas adat untuk menuju keseragaman dalam format negara bangsa Indonesia ala Orde Baru itu.

Mengapa kearifan lokal memperoleh tempat lagi dalam cara pandang kita? Ada beberapa penjelasan dapat dikemukakan. Pertama, ada kekhawatiran oleh generasi yang lebih tua terhadap generasi yang lebih muda tentang adanya krisis atau dekadensi di pelbagai bidang. Sistem norma yang sudah "dirumuskan" oleh generasi yang lebih tua sudah tidak dihormati dan dipatuhi oleh generasi muda. Untuk itu, para generasi tua mengajak kembali kepada kearifan lokal di tengah semakin kuatnya gerusan "kearifan global". Para generasi muda merasa perlu menghasilkan cetak biru bagi arah jalan generasi muda ke depan.

Kedua, pada generasi muda, sebaliknya, mereka lebih mengidolakan kearifan lain yang dipandang lebih mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian yang serba cepat, permisif, dan massal. Kearifan lain itu pada umumnya terbungkus oleh warna keemasan yang amat menarik bagi siapa saja. Dan warna keemasan itulah yang membuat generasi muda—bahkan mungkin sebagian generasi tua—melupakan, atau paling tidak menomorduakan kearifan lokal. Kemajuan dunia TIK, seperti handphone dan internet, generasi muda kita dengan mudahnya memperoleh idola-idola lain yang bukan nilai budayanya sendiri. Ketika kearifan lain itu dipandang tidak mampu memecahkan persoalan-persoalan kekinian itu, orang mulai melirik lagi kearifan lokal. Kita kembali merindukan kearifan yang sudah lama dilupakan.

Sarana yang dipandang tepat untuk merevitalisasi kearifan lokal itu adalah melalui pemberdayaan bahasa daerah. Salah satunya adalah melalui pembelajaran bahasa daerah. Pembelajaran bahasa diyakini sebagai sarana yang andal untuk merevitalisasi kearifan lokal itu. Tickoo (1995) menegaskan bahwa "pendidikan bahasa lebih dipercayai sebagai sumber pencerahan kebudayaan". Bacaan-bacaan dalam materi bahasa dan sastra tidak

sekadar menjadi masukan (input), lebih dari itu bacaan-bacaan itu dapat menjadi “asupan” bagi pencerahan kebudayaan itu. Hanya saja, tidak semua daerah menyelenggarakan pembelajaran bahasa daerah. Daerah yang sudah melakukan pembelajaran bahasa daerah pun—misalnya Jawa Timur—mengeluh bahwa pembelajaran bahasa daerah sering hanya bersifat formalitas dan kurang bermakna. Siswa lebih banyak hanya menghafal seperangkat nama-nama pohon, anak binatang, sifat binatang, nama-nama bunga, nama-nama tempat, dan sebagainya yang sudah tidak kontekstual lagi dengan kehidupan anak. Bahasa daerah terasa amat sulit bagi siswa. Bahkan, bahasa daerah lebih sulit dan asing dibandingkan bahasa Inggris yang *notabene* adalah bahasa asing. Nilai bahasa daerah anak dalam rapor lebih jelek daripada bahasa Inggris. Ini semakin menggelikan sekaligus memprihatinkan.

KEARIFAN LOKAL DAN BUDAYA NASIONAL

Tidak semua yang berwajah lokal direvitalisasi. Tentu saja, nilai budaya lokal yang bersifat menghambat kemajuan tidak penting untuk direvitalisasi. Sebaliknya, nilai-nilai budaya yang dapat mendukung kemajuanlah yang direvitalisasi. Amatlah mudah berbicara dalam tataran teoretis. Dalam tataran praktis, pelbagai kendala akan muncul yang menyebabkan dialektika budaya lokal dan nasional tidak selalu muncul. Beberapa rambu-rambu revitalisasi nilai budaya lokal adalah sebagai berikut.

Pertama, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan kepada yang lain. Masyarakat Indonesia yang religius tentu saja tidak dapat menghindar dari rambu pertama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang selalu mengakui adanya kekuatan adikodrati yang mengatasi kekuatan manusia.

Kedua, pencarian kebenaran duniawi melalui jalan ilmiah. Rambu-rambu kedua ini adalah nilai prasyarat kemajuan sebuah bangsa. Jalan ilmiah yang mempersyaratkan sebuah prosedur harus menjadi garda depan jika masyarakat itu menginginkan kemajuan.

Ketiga, penghargaan yang tinggi atas kreativitas dan inovasi. Penciptaan, pemikiran baru, penafsiran baru, bahkan penemuan baru harus dikedepankan dan direvitalisasi.

Keempat, efisiensi tindakan dan waktu. Nilai budaya lokal yang mengajarkan untuk menghormati waktu patutlah kita hidupkan dan lestarikan. Ajaran-ajaran untuk selalu bangun lebih awal, mementingkan kecepatan, dan sebagainya dapat direvitalisasi.

Kelima, penghargaan terhadap sesama atas dasar prestasi, bukan atas dasar kedudukannya. Orang akan dinilai dari sesuatu yang dihasilkannya melalui proses berpikir dan bekerja yang tidak mudah. Orang tidak dinilai dari mana dia berasal, memiliki golongan apa, keturunan siapakah dia, dan sebagainya.

Keenam, penghargaan yang tinggi pada kedaulatan rakyat. Nilai-nilai autokrasi yang sudah lama mendominasi masyarakat tradisi telah bertransformasi menjadi nilai demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Nilai budaya yang menghormati pilihan banyak orang harus dikedepankan.

Ketujuh, bersikap toleran dan simpati kepada budaya suku bangsa yang bukan suku bangsanya sendiri (*others*). Sikap mementingkan *self* dan menafikan keberadaan *others* amat tidak kondusif dalam membangun budaya nasional.

PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Pembelajaran bahasa dan sastra daerah adalah sebuah kebutuhan. Dengan pembelajaran bahasa dan sastra daerah, anak-anak Indonesia menguasai tidak saja persoalan kata, istilah, dan idiom yang khas daerah dan tidak tepat jika terpaksa harus dibahasaindonesiakan. Lebih dari itu, dengan pembelajaran bahasa daerah anak semakin mengenal dan menghayati nilai-nilai budaya daerah. Banyak persoalan yang bersifat lokal lebih cocok diwadahi dalam bahasa daerah. Dalam pandangan saya, pembelajaran bahasa daerah adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kebutuhan.

Dalam menghadapi tantangan era industri IT, masyarakat—dalam hal ini orang tua—menaruh harapan besar kepada lembaga pendidikan sekolah untuk mengasuh putra-putrinya. Dalam konteks kelokalan, pembelajaran bahasa daerah amat dinantikan perannya dalam membentuk anak didik menjadi manusia yang arif. Melalui pembelajaran bahasa daerah, anak didik memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengelola dunia secara lebih produktif melalui kemahirwacanaan, membaca pelbagai bidang pengetahuan, terampil menulis, terampil berkomunikasi lisan, dan peka terhadap perubahan (Ghazali, 2010).

Pembelajaran bahasa dan sastra daerah—tentu saja bersama-sama dengan pelajaran lainnya—diharapkan dapat menjadi “benteng” terhadap hegemoni efek negatif perkembangan teknologi informasi itu, seperti tayangan televisi, siaran radio, internet, pemberitaan di media cetakan. Anak sering mengalami apa yang disebut dengan “dilema moral”, yakni kondisi kebimbangan dalam menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik akibat kompleks dan semakin absurdnya kehidupan. Di rumah atau di sekolah anak mendapat nilai-nilai yang baik, setelah ke luar rumah anak-anak berkenalan dengan nilai-nilai yang mungkin saja tidak baik, tetapi yang terbungkus warna kuning keemasan.

Lembaga pendidikan mempunyai tanggung jawab untuk membangun moral anak. Melalui Proyek Perluasan dan Peningkatan Mutu SLTP, Depdiknas sejak 2001 telah mengimplementasikan Program Pembangunan Karakter Bangsa yang berupa upaya sadar untuk memperbaiki, meningkatkan seluruh perilaku

yang mencakup adat istiadat, nilai-nilai, potensi, kemampuan, bakat, pikiran, dan cita-cita bangsa Indonesia, nilai-nilai luhur yang dibangun sebagai prioritas karakter bangsa, yakni iman, takwa, jujur, disiplin, demokrasi, adil, bertanggung jawab, cinta tanah air, mandiri, sehat, kreatif, berilmu/berkeahlian, dan berakhlak mulia. Pembelajaran bahasa dan sastra daerah tentu saja dapat mengadopsi dari rumusan itu.

Dengan merujuk pada kasus di Jawa Timur, misalnya, revitalisasi pengajaran bahasa dan sastra daerah mutlak untuk dilakukan. Pemerintah daerah, balai bahasa, perguruan tinggi, dan sekolah dapat duduk bersama-merevitalisasi pelbagai aspek pembelajaran: mulai dari rumusan standar kompetensi, kompetensi dasar, standar isi, standar proses, media dan model pembelajaran, asesmen. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memposisikan pengajaran bahasa daerah tidak sebagai mata pelajaran pinggiran, tetapi secara hakiki menempatkan mata pelajaran bahasa daerah yang kedudukannya sama dengan pelajaran yang lain.

PENUTUP

Bahasa daerah di banyak daerah di Indonesia sudah tidak terlalu dipedulikan oleh para pemakainya. Bahasa daerah telah terdesak oleh bahasa Indonesia. Mereka hanya menguasai bahasa daerah untuk keperluan “komunikasi yang dangkal”. Tentu kita amat berharap “bahasa daerah tidak boleh mati”. Bahasa daerah harus tetap eksis. Kematian bahasa daerah juga berarti kematian kearifan lokal itu. Kematian bahasa daerah akan menjadi bencana kebudayaan Indonesia sebab salah satu tiang penyangga sudah roboh.

Pembelajaran bahasa dan sastra daerah dapat menjadi salah satu solusi. Melalui pembelajaran bahasa dan sastra daerah eksistensi bahasa daerah tetap kita pertahankan.

Daftar Pustaka

- Alisjahbana, Sutan Takdir. 1982. *Sejarah Kebudayaan Indonesia Dilihat dari Segi Nilai-nilai*. Jakarta: Penerbit PT Dian Rakyat.
- Ghazali, A. Syukur. 2010. Pengaruh Kearifan terhadap Bahasa dan Sastra Indonesia dan Pembelajarannya. Makalah dibentangkan pada Seminar *in Talk Show*, diselenggarakan oleh Program Pascasarjana, Universitas Islam Malang, 20 Juni 2010.
- Horison: Majalah Sastra*, nomor 7 tahun XXI, Juli 1986.
- Jufrizal. 2002. Bahasa Minangkabau Ragam Adat: Ke Arah “Pengeringan” dalam Himpitan Hegemoni Bahasa Indonesia. *Linguistik Indonesia: Jurnal Ilmiah Masyarakat Linguistik Indonesia*, XXII(2): 165—178.
- Santoso, Anang. 2010. Pembentukan Karakter melalui Pemanfaatan Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. Makalah dibentangkan pada Seminar *in Talk Show*, diselenggarakan oleh Program Pascasarjana, Universitas Islam Malang, 20 Juni 2010.
- Suseno, Franz Magnis. 2002. Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah di Nusantara dalam Konteks Multikultural. Makalah disajikan dalam Dialog Nasional Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah Nusantara yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 20 Maret.
- Tickoo, Makhan L. (Ed.). 1995. *Language and Culture in Multilingual Societies*. Singapore: RELC.

ANALISIS AKUSTIK KONSONAN /-H/ DALAM KATA TERBITAN BERIMBUHAN {-AN} /-AN/

Hirobumi Sato
(Brunei Darussalam)

Pengenalan

Fonem /h/ dalam bahasa Melayu dapat muncul di awal suku kata atau di akhir suku kata dari segi fonologis. Dalam hal terakhir, apabila kata dasar yang berakhir dengan fonem /-h/ diberi imbuhan {-an} /-an/ dalam proses penerbitan kata, fonem konsonan berkenaan dianggap membentuk satu suku kata fonologis /han/, seperti *pilihan* (< pilih) /pi.li.han/, *kemudahan* (< mudah) /k←→.mu.da.han/ dan *pertumbuhan* (< tumbuh) /p←→r.tum.bu.han/. Dari segi auditori pula, sesetengah pengkaji berpendapat bahawa fonem /-h/ dalam struktur tersebut menghasilkan konsonan ganda [hh] atau konsonan panjang [h^o], seperti *pilihan* [pilihhan] [pilih^oan], *kemudahan* [k←→mudahhan] [k←→mudah^oan], dan *pertumbuhan* [p←→rtumbuhhan] [p←→rtumbuh^oan].

Bagaimana pun, penilaian auditori terhadap fenomena fonetik yang sedemikian sebenarnya diberi secara subjektif sahaja oleh tiap-tiap pengkaji, dan bukannya dibuktikan secara objektif. Oleh hal yang demikian, fenomena auditori tersebut perlu diuji secara saintifik dari segi kesan akustik, berdasarkan kaedah fonetik eksperimental. Kaedah ini juga akan memberi suatu sudut pandangan baru untuk mengkaji hal-hal fonetik dari segi artikulatori dan fisiologis secara timbal-balik.

Makalah ini bertujuan untuk meneliti semula nilai fonem /h/ yang hadir dalam lingkungan /-han/ dalam kata terbitan bahasa Melayu, berdasarkan analisis akustik berkomputer. Data ujaran untuk kajian ini diperoleh daripada 30 orang penutur jati bahasa Melayu.¹ Analisis akustik berkomputer dalam kajian ini menggunakan perisian komputer SFS (*Sound Filing System*).²

1.0 Kajian Fonetik Artikulasi

Kajian fonetik dapat dibahagikan kepada tiga subbidang, iaitu fonetik artikulasi, fonetik akustik, dan fonetik auditori. Antaranya, fonetik artikulasi tradisional, pada umumnya, mengutamakan deskripsi statik terhadap unit bunyi yang dipetik daripada serentetan fenomena fonetik yang bersifat dinamik yang dihasilkan dalam aktiviti artikulasi ujaran (Jo'o, 2008a:30). Maksudnya, pergerakan alat artikulasi semasa pengujaran diberhentikan pada suatu saat tertentu sehingga tiap-tiap bunyi yang dihasilkan itu dianggap seolah-olah berdiri sendiri dalam serentetan ujaran itu. Oleh kerana itu, gabungan bunyi [ha], misalnya, diertikan sebagai terbentuk dari konsonan [h] dan vokal [a] sahaja, iaitu dalam bentuk [ha] = [h]+[a]. Akan tetapi, analisis akustik berkomputer membuktikan bahawa pemenggalan gabungan bunyi [ha] mengikut paksi waktu mendekodkan bunyi peralihan (*transitional sound*) [+ha+] di antara konsonan [h] dan vokal [a], seperti dalam bentuk [ha]_(masa 1-n) = [h+ha+a]_(masa 1-n). Dalam hal ini, artikulasi bunyi peralihan [+ha+] dapat digambarkan secara imaginatif seperti [+ha+]_(masa 1-n) = [+ha+ha+ha+...+ha+]_(masa 1-n). Hal ini demikian kerana tiap-tiap unit bunyi sebenarnya terbentuk dari serentetan bahagian yang lebih kecil yang berterusan (bukan berulang) dalam suatu masa artikulasi yang tertentu. Lihat Sato (2009:242).

1.1 Kajian Fonetik Akustik Berkomputer

Ujaran bahasa yang bersifat dinamik itu sepatutnya diberi lebih banyak perhatian dalam kajian fonetik. Hal ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan salah satu kaedah fonetik eksperimental, iaitu analisis gelombang bunyi (*sound wave*) dan kesan akustiknya yang diperhatikan dalam ilmu fizik. Dengan kaedah ini, sesuatu ujaran dapat dianalisis, misalnya, melalui pemerhatian terhadap bentuk gelombang bunyi (*waveform*), spektrogram (*spectrogram*), surihan tekanan bunyi (*energy trace*), surihan gegaran gelombang bunyi (*noise trace*), dan surihan penyuaran bunyi (*voicing trace*). Hal ini bermakna bahawa unit-unit bunyi yang dicatatkan dalam gelombang bunyi dianalisis dalam serentetan ujaran, dengan seteliti-telitinya, dengan memperhatikan ciri-ciri akustiknya yang memperlihatkan pola dan corak yang tertentu dalam rentetan itu.

1.2 Ciri-Ciri Akustik Bunyi

- (a) Bunyi dihasilkan oleh gegaran udara. Antaranya, bunyi bahasa dilahirkan oleh gegaran arus udara yang melalui saluran suara, dengan dipengaruhi oleh pergerakan alat artikulasi dan perubahan bentuk rongga mulut. Bentuk rongga hidung dianggap tidak berubah pada dasarnya. Gegaran arus udara yang demikian

¹ Dalam kajian akustik berkomputer, bilangan subjek eksperimen tidak semestinya diperluas kepada jumlah yang banyak. Hal ini sudah menjadi prinsip dalam bidang kajian ini di peringkat antarabangsa. Lihat Jo'o (2008b:10-11). Pengkaji dalam makalah ini mendapat kerjasama daripada 30 orang mahasiswi Universiti Brunei Darussalam (UBD) yang berumur awal 20-an.

² SFS (*Sound Filing System*): Department of Speech, Hearing & Phonetic Sciences, University College London (UCL).

dapat dicatatkan sebagai gelombang bunyi (*sound wave*). Gelombang bunyi ini dicirikan oleh pola bentuk gelombang (*waveform*) yang memperlihatkan perubahan amplitud mengikut paksi waktu. Dalam hal ini, perbezaan amplitud menggambarkan perbezaan besar suara (*loudness of voice*), manakala perubahan frekuensi pula mempengaruhi nada (*pitch*) dalam sesuatu ujaran.

- (b) Gegaran udara juga menghasilkan gema di dalam rongga mulut dan rongga hidung. Spektrogram (*spectrogram*) menggambarkan gema yang disebabkan oleh gegaran udara itu, dan tiap-tiap formant (F) yang diberi tekanan bunyi yang kuat ditunjukkan dengan warna yang pekat. Nilai formant (F1) dan (F2) dapat dikira pada nilai koordinat yang ditunjukkan pada paksi waktu dan paksi frekuensi. Dalam hal ini, pergerakan lidah dan perubahan bentuknya mempengaruhi nilai formant (F1) dan (F2). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam analisis vokal. Oleh sebab itu, nilai formant (F1) dan (F2) yang ditunjukkan dalam spektrogram itu masing-masingnya menggambarkan proses perubahan saiz dua ruang yang terbentuk di bahagian belakang lidah dan di bahagian depan lidah di dalam rongga mulut. Dengan perkataan lain, hasil formant (F1) dan (F2) juga membantu menggambarkan pergerakan lidah di dalam rongga mulut. Bagaimana pun, nilai formant bagi sesuatu ujaran sebenarnya berbeza-beza antara seorang penutur dengan penutur yang lain. Oleh sebab itu, mengenal pasti pola formant itu bermanfaat bagi membezakan bunyi-bunyi dalam sesuatu bahasa yang sama, dari segi kajian fonetik.
- (c) Tekanan bunyi dipengaruhi oleh saiz rongga dan kekuatan arus udara yang melaluinya. Surihan tekanan bunyi (*energy trace*) menggambarkan turun naik tekanan bunyi dalam sesuatu ujaran. Bunyi aspirasi dalam ujaran yang natural memperlihatkan penurunan tekanan bunyi dalam masa yang singkat.
- (d) Bunyi bahasa dihasilkan, dengan pelbagai pola frekuensi, menurut kadar gegaran gelombang bunyi. Vokal biasanya mempunyai pola frekuensi yang agak tetap yang berkala (*periodic*), manakala konsonan memperlihatkan pola frekuensi yang tidak berkala (*aperiodic*). Surihan gegaran gelombang bunyi (*noise trace*) yang semakin tinggi menggambarkan sifat tak-berkala (*aperiodicity*) yang mencirikan frekuensi konsonan.
- (e) Perbezaan bunyi bersuara dan bunyi tak-bersuara disebabkan oleh kadar keluasan glotis dan kadar getaran pita suara yang dipengaruhi oleh kelajuan arus udara. Surihan penyuaran (*voicing trace*) menggambarkan turun naik kadar getaran pita suara itu. Oleh sebab itu, makin tinggi kadar getaran pita suara, makin naik surihan penyuaran sesuatu bunyi.

2.0 Lingkungan Kehadiran Fonem /h/ dalam Bahasa Melayu

Dalam tradisi kajian fonetik dan fonologi bahasa Melayu, bunyi geseran glotis tak-bersuara [h] dianggap sebagai satu-satunya fon yang mewakili fonem /h/, melainkan pengguguran bunyi [h] atau penggantiannya dengan bunyi hentian glotis [ʔ].¹ Hal ini dipengaruhi oleh prinsip kaedah ejaan bahasa Melayu yang didasarkan kepada unit fonem. Maksudnya, lambang grafem <h> mendahului penilaian bunyi /h/ secara terbalik.²

Untuk menilai alofon dari fonem /h/, lingkungan kehadirannya perlu dipastikan dari segi fonologis terlebih dahulu. Fonem /h/ dalam bahasa Melayu dapat hadir di awal suku kata atau di akhir suku kata sahaja dari segi fonologis. Akan tetapi, semua konsonan dalam bahasa Melayu, termasuk konsonan /h/, tidak dapat hadir di tengah suku kata dari segi fonologis, kecuali dalam kata pinjaman seperti *strategi* /στρα.τε.γι/. Berhubung dengan ini, perlu diperhatikan bahawa konsep “tengah suku kata” dan “tengah kata” membawa makna yang berlainan. Misalnya, fonem /h/ yang menduduki tengah kata dalam kata *bahan* /ba.han/ hadir di awal suku kata kedua KVK /han/, dan bukan di tengah suku kata

Dalam bahagian yang selanjutnya, kehadiran fonem /h/ akan dilihat dalam lingkungan (i) /h-/ di awal suku kata, (ii) /-h/ di akhir suku kata, dan (iii) /-h/ yang diikuti oleh akhiran {-an} /-an/ dalam kata terbitan.

2.1 Analisis (I): fonem /h-/ yang hadir di awal suku kata

Fonem /h-/ dapat hadir di awal suku kata dalam lingkungan fonologis KV atau KVK (catatan: V = vokal, K = konsonan) dan berkombinasi dengan fonem vokal /i, e, a, o, u, ə/, seperti dalam kata *lahir* /la.hir/, *leher* /le.her/, *tahan* /ta.han/, *bohong* /bo.hoŋ/, *leluhur* /le.lu.hur/, dan *hembus* /hə.βu.s/. Dalam bahagian ini diberikan beberapa contoh /h-/ yang memperlihatkan persamaan ciri fonetik antara semua data yang dianalisis.

Lampiran 1 menunjukkan hasil eksperimen terhadap kata *tahan* /ta.han/ yang didekodkan dari rakaman ujaran (1) yang diartikulasikan dengan kelajuan dan tekanan yang natural.

- (1) *Beras dalam tong ini tahan sekurang-kurangnya satu bulan.* (masa 3.7023 saat)

¹ Lihat M. Yunus Maris (1980:66-67).

² Jespersen (1913:91-101) menghuraikan bunyi [h] dengan panjang lebar.

Hasil pemenggalan gelombang bunyi dari kata *tahan* /ta.han/ (masa 0.3470 saat) mengikut paksi waktu mendekodkan [ta], [a], [ah], [h], [ha], [a], [an], dan [n], iaitu [tahan] = [ta+a+ah+h+ha+a+an+n]. Dalam eksperimen ini, fonem /h-/ direpresentasikan oleh bunyi tak-bersuara [ɿ-].

Bunyi tunggal/Bunyi peralihan	[ah+]	[h]	[+ha]
Masa artikulasi	0.0200 saat	0.0496 saat	0.0105 saat
Surihan tekanan bunyi (<i>energy trace</i>)	menurun	rendah mendatar	menaik
Surihan gegaran gelombang bunyi (<i>noise trace</i>)	menaik	tinggi mendatar (konsonan)	menurun
Surihan penyuaran bunyi (<i>voicing trace</i>)	menurun	tiada (tak-bersuara)	menaik

Rajah 1. kata *tahan* /ta.han/ [tahan] (masa 0.3470 saat)

Hasil eksperimen dalam **Rajah 1** menunjukkan kehadiran konsonan geseran glotis tak-bersuara [h] (masa 0.0496 saat). Dalam kajian fonetik am, sesetengah pengkaji menganggap konsonan tak-bersuara [h] sebagai salinan bunyi tak-bersuara dari vokal yang mengikutinya, seperti yang dapat dilihat pada garisan formant dalam gambar spektrogram. Jika demikian, konsonan bersuara [ɦ] pula berfungsi sebagai pengganti vokal bersuara. Namun, corak spektrogram konsonan bersuara [ɦ], seperti dapat dilihat dalam **Lampiran 3**, jauh berbeza dengan vokal bersuara [e]. Tambahan lagi, kedua-dua surihan gegaran gelombang bunyi bagi [h] dan [ɦ] tetap menunjukkan ciri konsonan dengan kadar yang tinggi. Oleh kerana itu, konsonan tak-bersuara [h] dan konsonan bersuara [ɦ] tidak dapat dianggap sebagai salinan vokal tak-bersuara dan vokal bersuara masing-masing.¹

Lampiran 2 dan **3** menunjukkan hasil eksperimen terhadap kata *leher* /le.her/ yang didekodkan dari rakaman ujaran (2) dan (3) yang diartikulasikan dengan kelajuan dan tekanan yang natural.

(2) *Dia mempunyai leher yang panjang.* (masa 2.1878 saat)

(3) *Dia mempunyai leher yang panjang.* (masa 1.9549 saat)

Dalam eksperimen (2), hasil pemenggalan gelombang bunyi dari kata *leher* /le.her/ (masa 0.3799 saat) mengikut paksi waktu mendekodkan serentetan bunyi [l], [le], [e], [eɳ], [ɳ], [ɳe], [e], [er], dan [p], iaitu [lehep] = [l+le+e+eɳ+ɳ+ɳe+e+er+p]. Dalam eksperimen ini, fonem /h-/ direpresentasikan oleh bunyi tak-bersuara [ɿ-].

Bunyi tunggal/Bunyi peralihan	[eɳ+]	[ɳ]	[+ɳe]
Masa artikulasi	0.0547 saat	0.0345 saat	0.0652 saat
Surihan tekanan bunyi (<i>energy trace</i>)	menurun	rendah mendatar	menaik
Surihan gegaran gelombang bunyi (<i>noise trace</i>)	menaik	menaik (konsonan)	menurun
Surihan penyuaran bunyi (<i>voicing trace</i>)	menurun	tiada (konsonan)	menaik

Rajah 2. kata *leher* /le.her/ [lehep] (masa 0.3799 saat)

Konsonan geseran glotis tak-bersuara [h] (masa 0.0345 saat) dalam **Rajah 2** memperlihatkan ciri-ciri fonetik yang berikut: (i) corak bar suara (*voice bar*) yang mencirikan bunyi bersuara tidak muncul di bawah garisan formant (F1) dalam gambar spektrogram, (iaitu ciri bunyi tak-bersuara), (ii) bentuk gelombang yang beramplitud kecil menghasilkan gegaran gelombang bunyi yang tak-berkala sehingga surihannya semakin menaik, (iaitu ciri konsonan), dan (iii) surihan penyuaran bunyi semakin menurun sehingga lenyap. Hal ini bermakna bahawa kadar getaran pita suara semakin berkurangan, (iaitu ciri bunyi tak-bersuara).

Di samping ciri-ciri akustik tersebut, perlu diperhatikan kehadiran bunyi peralihan [eh+] dan bunyi peralihan [+he] terhadap konsonan tunggal [h] dalam proses peralihan. Daripada eksperimen ini terbukti bahawa bunyi peralihan akhir (*off-glide*) [eh+] (masa 0.0547 saat) yang semakin bersifat konsonan tak-bersuara tidak dapat dipisahkan kepada dua fon yang berdiri sendiri, iaitu [eh+] ≠ [e+h+]. Hal ini dapat digambarkan secara imaginatif seperti dalam bentuk bunyi peralihan akhir [eh+]_(masa 1-n) = [eh+eh+eh+...+eh+]_(masa 1-n). Begitu juga,

¹ Ladefoged (2006:265) tidak menganggap bunyi [h/ɦ] sebagai bunyi geseran glottis.

bunyi peralihan awal (*on-glide*) [+he] (masa 0.0652 saat) yang semakin bersifat vokal bersuara tidak dapat dipisahkan kepada dua fon yang berdiri sendiri, iaitu [+he] ≠ [+h+e]. Bunyi peralihan awal [+he]_(masa 1-n) = [+he+he+he+...+he]_(masa 1-n).

Dalam eksperimen (3) juga, hasil pemenggalan gelombang bunyi dari kata *leher* /le.her/ (masa 0.4062 saat) mengikut paksi waktu mendekodkan serentetan bunyi [l], [le], [e], [eʰ], [ʰ], [ʰe], [e], [eʰ], dan [ʰ], iaitu [lehe] = [l+le+e+eʰ+ʰ+ʰe+e+eʰ+ʰ].¹ Dalam eksperimen ini, fonem /h-/ direpresentasikan oleh bunyi bersuara [ʰ-].

Bunyi tunggal/Bunyi peralihan	[eʰ+]	[ʰ]	[+ʰe]
Masa artikulasi	0.0353 saat	0.0702 saat	0.0500 saat
Surihan tekanan bunyi (<i>energy trace</i>)	menurun	menaik-menurun menaik-menurun	Menaik
Surihan gegaran gelombang bunyi (<i>noise trace</i>)	menaik	menaik (konsonan)	Menurun
Surihan penyuaran bunyi (<i>voicing trace</i>)	menaik	tinggi mendatar (bersuara)	Menaik

Rajah 3. kata kata *leher* /le.her/ [leʰe] (masa 0.4062 saat)

Konsonan geseran glotis bersuara [ʰ] (masa 0.0702 saat) dalam **Rajah 3** memperlihatkan ciri-ciri fonetik yang berikut: (i) corak bar suara yang mencirikan bunyi bersuara muncul di bawah garisan formant (F1) dalam gambar spektrogram, (iaitu ciri bunyi bersuara), (ii) bentuk gelombang yang beramplitud besar menghasilkan gegaran gelombang bunyi yang tak-berkala sehingga surihannya semakin menaik, (iaitu ciri konsonan), dan (iii) surihan penyuaran bunyi mendatar pada tahap tinggi. Hal ini bermakna bahawa kadar getaran pita suara masih tinggi, (iaitu ciri bunyi bersuara). Bunyi geseran glotis bersuara [ʰ] dapat hadir apabila diapit oleh dua vokal bersuara dalam lingkungan VKV. Seperti yang terbukti daripada eksperimen (2) dan (3), kedua-dua [h] dan [ʰ] berfungsi sebagai alofon dari fonem /h/.

Di samping ciri-ciri akustik tersebut, perlu diperhatikan kehadiran bunyi peralihan [eʰ+] dan bunyi peralihan [+ʰe] terhadap konsonan tunggal [ʰ] dalam proses peralihan. Bunyi peralihan akhir [eʰ+] (masa 0.0353 saat) yang semakin bersifat konsonan bersuara tidak dapat dipisahkan kepada dua fon yang berdiri sendiri, iaitu [eʰ+] [e+ʰ+]. Hal ini dapat digambarkan secara imaginatif seperti dalam bentuk bunyi peralihan akhir [eʰ+]_(masa 1-n) = [eʰ+eʰ+eʰ+...+eʰ+]_(masa 1-n). Begitu juga, bunyi peralihan awal [+ʰe] (masa 0.0500 saat) yang semakin bersifat vokal bersuara tidak dapat dipisahkan kepada dua fon yang berdiri sendiri, iaitu [+ʰe] ≠ [+ʰ+e]. Bunyi peralihan awal [+ʰe]_(masa 1-n) = [+ʰe+ʰe+ʰe+...+ʰe]_(masa 1-n).

- (a) Fonem /h-/ yang hadir di awal suku kata fonologis mempunyai dua jenis alofon, iaitu konsonan tak-bersuara [h-] dan konsonan bersuara [ʰ-] dalam lingkungan berkenaan.
- (b) Bunyi peralihan akhir yang mendahului konsonan [h] dan [ʰ] semakin memperlihatkan sifat konsonan.

2.2 Analisis (II): fonem /-h/ yang hadir di akhir suku kata

Fonem /-h/ yang hadir di akhir suku kata fonologis juga dilambangkan dengan grafem <h> dalam bahasa Melayu. Fonem ini dapat hadir dalam lingkungan fonologis VK atau KVK (catatan: V = vokal, K = konsonan) dan berkombinasi dengan fonem vokal /i, a, o, u/, seperti *berbuih* /b↔r.bu.ih/, *membuahkan* /m↔m.bu.ah.kan/, *bodoh* /bo.doh/, dan *sunnguh* /suN.ɣuh/. Dalam bahagian ini diberikan beberapa contoh /-h/ yang memperlihatkan persamaan ciri fonetik antara semua data yang dianalisis.

Kehadiran fonem /-h/ memainkan peranan penting untuk membezakan makna kata dalam bahasa Melayu seperti pasangan kata *muda* /mu.da/ dengan *mudah* /mu.dah/. Penutur asing yang tidak mengenali fonem /-h/ di akhir suku kata dalam bahasa ibunda mengalami kesusahan dalam pembelajaran sebutan bahasa Melayu.

Lampiran 4 menunjukkan hasil eksperimen terhadap kata *muda* /mu.da/ dan *mudah* /mu.dah/ yang didekodkan dari rakaman ujaran (4) yang diartikulasikan dengan kelajuan dan tekanan yang natural.

(4) *Budak-budak muda mudah terpengaruh.* (masa 2.1479 saat)

¹ Dalam contoh ini, fonem /r/ direpresentasikan oleh bunyi hampiran gusi [rʰ].

Dalam eksperimen (4), kehadiran fonem /-h/ dalam kata *mudah* /mu.dah/ dapat dilihat dengan jelas di bahagian yang bercorak cair dalam gambar spektrogram, sedangkan corak yang demikian tidak muncul selepas bunyi /a/ dalam kata *muda* /mu.da/. Fonem /-h/ tersebut direpresentasikan oleh bunyi aspirat tak-bersuara [^h]: kata *mudah* /mu.dah/ [muda^h].¹ Bunyi aspirat ini mempunyai kesan akustik yang berbeza dengan bunyi geseran glotis tak-bersuara [h]. Hal ini akan dilihat dalam analisis contoh (5) dan (6).

Lampiran 5 menunjukkan hasil eksperimen terhadap kata *sedih* /s↔.dih/ yang didekodkan dari rakaman ujaran (5) yang diartikulasikan dengan kelajuan dan tekanan yang natural.

(5) *Aku merasa sedih mengenangkan arwah nenek.* (masa 2.4627 saat)

Hasil pemenggalan gelombang bunyi dari kata *sedih* /s↔.dih/ (masa 0.4253 saat) mengikut paksi waktu mendekodkan serentetan bunyi [s], [s↔], [↔], [di], [i], [i^h], dan [^h], iaitu [s↔di^h] = [s+s↔+↔+di+i+i^h+^h]. Dalam eksperimen ini, fonem /-h/ direpresentasikan oleh bunyi aspirat tak-bersuara [^h].

Bunyi tunggal/Bunyi peralihan	[di]	[i]	[i ^h]	[^h]
Masa artikulasi	0.0399 saat	0.0257 saat	0.0361 saat	0.0288 saat
Surihan tekanan bunyi (<i>energy trace</i>)	menaik	tinggi mendatar	menurun	menurun
Surihan gegaran gelombang bunyi (<i>noise trace</i>)	tinggi mendatar	menurun (vokal)	tiada	menaik (konsonan)
Surihan penyuaran bunyi (<i>voicing trace</i>)	tinggi mendatar	tinggi mendatar (bersuara)	tinggi mendatar	menurun (tak-bersuara)

Rajah 4. kata *sedih* /s↔.dih/ [s↔di^h] (masa 0.4253 saat)

Dalam eksperimen ini, bunyi aspirat tak-bersuara [^h] (masa 0.0288 saat) dalam **Rajah 4** memperlihatkan ciri-ciri fonetik yang berikut: (i) corak bar suara yang mencirikan bunyi bersuara tidak muncul di bawah garisan formant (F1) dalam gambar spektrogram, (iaitu ciri bunyi tak-bersuara), (ii) hembusan udara semakin berkurang dan surihan tekanan bunyi turut menurun, (iii) bentuk gelombang yang beramplitud kecil menghasilkan gegaran gelombang bunyi yang tak-berkala sehingga surihannya semakin menaik, (iaitu ciri konsonan), dan (iv) surihan penyuaran bunyi semakin menurun sehingga hampir lenyap. Hal ini bermakna bahawa kadar getaran pita suara semakin berkurang, (iaitu ciri bunyi tak-bersuara).

Lampiran 6 menunjukkan hasil eksperimen terhadap kata *menuduh* /m↔.nu.duh/ yang didekodkan dari rakaman ujaran (6) yang diartikulasikan dengan kelajuan dan tekanan yang natural.

(6) *Jangan menuduh saya melakukan kesalahan.* (masa 2.5947 saat)

Hasil pemenggalan gelombang bunyi dari kata *menuduh* /m↔.nu.duh/ (masa 0.4384 saat) mengikut paksi waktu juga mendekodkan serentetan bunyi [m], [m↔], [↔], [↔n], [n], [nu], [u], [du], [u], [u^h], dan [^h], iaitu [m↔vudu^h] = [m+m↔+↔+↔n+n+nu+u+du+u+u^h+^h]. Dalam eksperimen ini, fonem /-h/ direpresentasikan oleh bunyi aspirat tak-bersuara [^h].

Bunyi tunggal/Bunyi peralihan	[du]	[u]	[u ^h]	[^h]
Masa artikulasi	0.0398 saat	0.0191 saat	0.0303 saat	0.0340 saat
Surihan tekanan bunyi (<i>energy trace</i>)	menaik	tinggi mendatar	menurun	menurun
Surihan gegaran gelombang bunyi (<i>noise trace</i>)	tinggi mendatar	hampir tiada (vokal)	hampir tiada	menaik (konsonan)
Surihan penyuaran bunyi (<i>voicing trace</i>)	menaik	tinggi mendatar (bersuara)	tinggi mendatar	menurun (bersuara)

Rajah 5. kata *menuduh* /m↔.nu.duh/ [m↔nudu^h] (masa 0.4384 saat)

¹ Dalam sesetengah data yang dianalisis, fonem /-h/ yang hadir di akhir suku kata direpresentasikan oleh bunyi aspirat bersuara [^h].

Dalam eksperimen ini, kehadiran bunyi aspirat tak-bersuara [ʰ] (masa 0.0340 saat) dalam **Rajah 5** memperlihatkan ciri-ciri fonetik yang berikut: (i) corak bar suara yang mencirikan bunyi bersuara muncul di bawah garisan formant (F1) dalam gambar spektrogram, (iaitu ciri bunyi bersuara), (ii) hembusan udara semakin berkurang dan surihan tekanan bunyi turut menurun, (iii) bentuk gelombang yang beramplitud kecil menghasilkan gegaran gelombang bunyi yang tak-berkala sehingga surihannya semakin menaik, (iaitu ciri konsonan), dan (iv) surihan penyuaran bunyi semakin menurun tetapi masih tinggi. Hal ini bermakna bahawa kadar getaran pita suara semakin berkurang tetapi masih bersifat bunyi bersuara, (iaitu ciri bunyi bersuara).

Bunyi aspirat [ʰ]-[ʰ] dan bunyi geseran glotis [h]-[ʰ] dapat dibandingkan berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan dalam **Rajah 1** hingga **Rajah 5**. Artikulasi bunyi aspirat [ʰ] dan [ʰ] yang hadir di akhir suku kata memperlihatkan penurunan kadar tekanan bunyi, manakala artikulasi bunyi geseran glotis [h-] dan [ʰ-] yang hadir di awal suku kata mengekalkan kadar tekanan bunyi yang rendah.

Satu lagi ciri bunyi aspirat [ʰ] dan [ʰ] dapat dilihat dari segi ciri bunyi peralihan akhir yang menyertainya. Bunyi peralihan akhir [iʰ+] (**Rajah 4**) dan [uʰ+] (**Rajah 5**) yang masing-masingnya mendahului bunyi aspirat [ʰ] dan [ʰ] masih memperlihatkan ciri vokal bersuara: (i) surihan gegaran gelombang bunyi hampir lenyap, dan (ii) surihan penyuaran bunyi masih tinggi. Ciri yang demikian tidak dapat dilihat dalam bunyi peralihan akhir yang mendahului bunyi geseran glotis [h-] dan [ʰ] yang hadir di awal suku kata.

- (c) Fonem /-h/ yang hadir di akhir suku kata fonologis mempunyai dua jenis alofon, iaitu bunyi aspirat tak-bersuara [ʰ] dan bunyi aspirat bersuara [ʰ] dalam lingkungan berkenaan.
- (d) Bunyi aspirat [ʰ] dan [ʰ] yang hadir di akhir suku kata memperlihatkan penurunan surihan tekanan bunyi.
- (e) Bunyi peralihan akhir yang mendahului bunyi aspirat [ʰ] dan [ʰ] memperlihatkan sifat vokal bersuara.

2.3 Analisis (III) fonem /-h/ yang diberi imbuhan {-an} /-an/ dalam kata terbitan

Seperti yang terbukti dalam bahagian 2.2, fonem /-h/ yang hadir di akhir suku kata fonologis direpresentasikan oleh bunyi aspirat [ʰ] atau [ʰ]. Akan tetapi, apabila kata dasar yang berakhir dengan fonem /-h/ diberi imbuhan {-an} /-an/ dalam proses penerbitan kata, fonem /-h/ itu menghasilkan kesan auditori seperti konsonan ganda [-hhan] atau konsonan panjang [-h:an] dalam struktur berkenaan. Hal ini perlu diteliti berdasarkan analisis akustik.

Lampiran 7 menunjukkan hasil eksperimen terhadap kata *pilihan* /pi.li.han/ yang didekodkan dari rakaman ujaran (7) yang diartikulasikan dengan kelajuan dan tekanan yang natural.

(7) *Ibu tidak suka gadis pilihan anaknya itu.* (masa 3.1471 saat)

Hasil pemengkodekan gelombang bunyi dari kata *pilihan* /pi.li.han/ (masa 0.3850 saat) mengikut paksi waktu mendekodkan serentetan bunyi [pi], [i], [ɿ], [l], [li], [i], [iʰ], [ʰ], [ʰ], [ʰa], [a], [an], dan [n], iaitu [piliʰan] = [pi+iɿ+l+i+iʰ+ʰ+ʰa+a+an+n]. Dalam eksperimen ini, fonem /-h/ direpresentasikan oleh bunyi aspirat bersuara [ʰ] lalu diikuti oleh bunyi geseran glotis tak-bersuara [-ʰ], iaitu dalam bentuk [ʰʰ].

Bunyi tunggal/Bunyi peralihan	[iʰ]	[ʰ]	[ʰ]	[ʰa]
Masa artikulasi	0.0240 saat	0.0308 saat	0.0147 saat	0.0243 saat
Surihan tekanan bunyi (<i>energy trace</i>)	Menurun	menurun	menengah mendatar	menengah mendatar
Surihan gegaran gelombang bunyi (<i>noise trace</i>)	hampir tiada	menaik (konsonan)	tinggi mendatar (konsonan)	menurun
Surihan penyuaran bunyi (<i>voicing trace</i>)	tinggi mendatar	menurun (bersuara)	rendah mendatar (bersuara)	menaik

Rajah 6. kata *pilihan* /pi.li.han/ [piliʰʰan] (masa 0.3850 saat)

Dalam eksperimen ini, kehadiran bunyi aspirat bersuara [ʰ] (masa 0.0308 saat) dalam **Rajah 6** memperlihatkan ciri-ciri fonetik yang berikut: (i) corak bar suara yang mencirikan bunyi bersuara muncul sedikit di bawah garisan formant (F1) dalam gambar spektrogram, (iaitu ciri bunyi bersuara), (ii) surihan tekanan bunyi hampir

menurun, (iii) bentuk gelombang yang beramplitud sederhana menghasilkan gegaran gelombang bunyi yang tak-berkala dan surihannya menaik, (iaitu ciri konsonan), dan (iv) surihan penyuaran bunyi semakin menurun. Hal ini bermakna bahawa kadar getaran pita suara berkurang tetapi bersifat bunyi bersuara, (iaitu ciri bunyi bersuara).

Bagaimana pun, bunyi aspirat bersuara [ʰ] tersebut tidak diikuti oleh bunyi /a/ [a] dalam imbuhan {-an} /-an/ secara terus. Konsonan geseran glotis bersuara [ʰ] (masa 0.0147 saat) muncul di antara bunyi aspirat [ʰ] dan vokal /a/ [a]. Konsonan [ʰ] itu memperlihatkan ciri-ciri fonetik yang berikut: (i) corak bar suara yang mencirikan bunyi bersuara muncul sedikit di bawah garisan formant (F1) dalam gambar spektrogram, (iaitu ciri bunyi bersuara), (ii) surihan tekanan bunyi mendatar pada tahap menengah, (iii) bentuk gelombang yang beramplitud sederhana menghasilkan gegaran gelombang bunyi yang tak-berkala dan surihannya mendatar pada tahap menengah, (iaitu ciri konsonan), dan (iv) surihan penyuaran bunyi hampir mendatar pada tahap rendah. Hal ini bermakna bahawa getaran pita suara berterusan dan menghasilkan bunyi bersuara.

Lampiran 8 menunjukkan hasil eksperimen terhadap kata majmuk gandaan *mudah-mudahan* /mu.dah-mu.da.han/ yang didekodkan dari rakaman ujaran (8) yang diartikulasikan dengan kelajuan dan tekanan yang natural.

(8) *Saya harap mudah-mudahan semuanya akan berjaya.* (masa 2.8879 saat)

Hasil pemenggalan gelombang bunyi dari kata *mudah-mudahan* /mu.dah-mu.da.han/ (masa 0.8378 saat) mengikut paksi waktu mendekodkan serentetan bunyi [m], [mu], [δα], [a], [a^h], [ʰ], [μ], [mu], [da], [a], [a^h], [ʰ], [h], [ηa], [a], [an], dan [n], iaitu [muδa^h-muda^hηan] = [m+mu+δα+a+a^h+ʰ+μ+mu+da+a+a^h+ʰ+h+ηa+a+an+n].

Dalam eksperimen ini, fonem /-h/ dalam bahagian pertama *mudah-* /mu.dah-/ direpresentasikan oleh bunyi aspirat bersuara [ʰ], manakala fonem /-h/ dalam bahagian kedua *-mudahan* /-mu.da.han/ pula direpresentasikan oleh bunyi aspirat tak-bersuara [ʰ] yang diikuti oleh bunyi geseran glotis tak-bersuara [h], iaitu dalam bentuk [ʰh].

Bunyi tunggal/Bunyi peralihan	[da]	[a]	[a ^h]	[ʰ]
Masa artikulasi	0.0302 saat	0.0398 saat	0.0255 saat	0.0299 saat
Surihan tekanan bunyi (<i>energy trace</i>)	menaik	menengah mendatar	menurun	menurun
Surihan gegaran gelombang bunyi (<i>noise trace</i>)	tinggi mendatar	hampir tiada (vokal)	hampir tiada	hampir tiada (konsonan)
Surihan penyuaran bunyi (<i>voicing trace</i>)	tinggi mendatar	tinggi mendatar (bersuara)	tinggi mendatar	tinggi mendatar (bersuara)

Rajah 7. bahagian pertama *mudah* /mu.dah-/ [muδa^h-] (masa 0.3210 saat)

Dalam eksperimen ini, kehadiran bunyi aspirat bersuara [ʰ] (masa 0.0299 saat) dalam **Rajah 7** memperlihatkan ciri-ciri fonetik yang berikut: (i) corak bar suara yang mencirikan bunyi bersuara muncul sedikit di bawah garisan formant (F1) dalam gambar spektrogram, (iaitu ciri bunyi bersuara), (ii) surihan tekanan bunyi menurun, (iii) bentuk gelombang yang beramplitud sederhana menghasilkan gegaran gelombang bunyi yang tak-berkala. Surihannya hampir tiada tetapi mendatar pada tahap rendah, (iaitu ciri konsonan), dan (iv) surihan penyuaran bunyi mendatar pada tahap tinggi. Hal ini bermakna bahawa kadar getaran pita suara tinggi dan bersifat bunyi bersuara, (iaitu ciri bunyi bersuara).

Bunyi tunggal/Bunyi peralihan	[a ^h]	[ʰ]	[h]	[ha]
Masa artikulasi	0.0245 saat	0.0251 saat	0.0346 saat	0.0238 saat
Surihan tekanan bunyi (<i>energy trace</i>)	menurun	Menurun	rendah mendatar	menaik
Surihan gegaran gelombang bunyi (<i>noise trace</i>)	menaik	Menaik (konsonan)	tinggi mendatar (konsonan)	menurun
Surihan penyuaran bunyi (<i>voicing trace</i>)	menurun	Menurun (tak-bersuara)	tiada (tak-bersuara)	menaik

Rajah 8. bahagian kedua *-mudahan* /-mu.da.han/ [-muδa^hηαv] (masa 0.5168 saat)

Kehadiran bunyi aspirat bersuara [h] (masa 0.0251 saat) dalam **Rajah 8** memperlihatkan ciri-ciri fonetik yang berikut: (i) corak bar suara yang mencirikan bunyi bersuara tidak muncul di bawah garisan formant (F1) dalam gambar spektrogram, (iaitu ciri bunyi tak-bersuara), (ii) surihan tekanan bunyi menurun, (iii) bentuk gelombang yang beramplitud sederhana menghasilkan gegaran gelombang bunyi yang tak-berkala dan surihannya menaik, (iaitu ciri konsonan), dan (iv) surihan penyuaran bunyi semakin menurun. Hal ini bermakna bahawa kadar getaran pita suara berkurang, (iaitu ciri bunyi tak-bersuara).

Bagaimana pun, bunyi aspirat tak-bersuara [h] tersebut tidak diikuti oleh vokal /a/ dalam imbuhan {-an} /-an/ secara terus. Konsonan geseran glotis tak-bersuara [h] (masa saat) muncul di antara bunyi aspirat [h] dan vokal /a/ [a]. Konsonan [h] itu memperlihatkan ciri-ciri fonetik yang berikut: (i) corak bar suara yang mencirikan bunyi bersuara tidak muncul di bawah garisan formant (F1) dalam gambar spektrogram, (iaitu ciri bunyi tak-bersuara), (ii) surihan tekanan bunyi mendatar pada tahap rendah, (iii) bentuk gelombang yang beramplitud sederhana menghasilkan gegaran gelombang bunyi yang tak-berkala dan surihannya mendatar pada tahap tinggi, (iaitu ciri konsonan), dan (iv) surihan penyuaran bunyi tiada. Hal ini bermakna bahawa kadar getaran pita suara sangat rendah, (iaitu ciri bunyi tak-bersuara).

- (f) Apabila kata dasar yang berakhir dengan fonem /-h/ diberi imbuhan {-an} /-an/ dalam proses penerbitan kata, suku kata akhir /-han/ diwujudkan dalam dua bentuk fonetik, iaitu [h^hhan] atau [h^hhan].
- (g) Bunyi aspirat [h] dan [h^h] memperlihatkan penurunan tekanan bunyi.
- (h) Bunyi geseran glottis [h] dan [h^h] mengekalkan tekanan bunyi pada tahap rendah atau menengah.

Kesimpulan

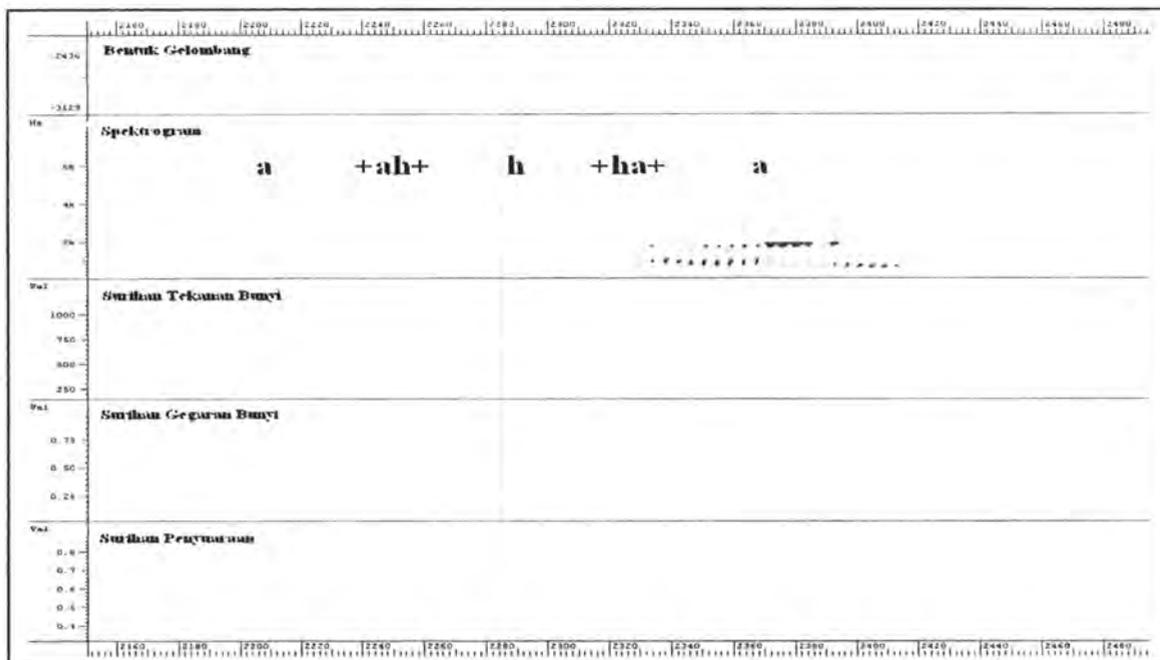
Makalah ini meneliti nilai fonem /-h/ dalam kata dasar yang diikuti oleh imbuhan {-an} /-an/ dalam proses penerbitan kata, iaitu dalam lingkungan /-han/. Dari segi fonetik auditori, sesetengah pengkaji berpendapat bahawa fonem /-h/ dalam struktur tersebut menghasilkan konsonan ganda [hh] atau konsonan panjang [h:].

Daripada analisis akustik berkomputer terbukti bahawa suku kata /-han/ diwujudkan dalam dua bentuk fonetik [h^hhan] atau [h^hhan]. Dalam hal ini, bunyi [h] dan [h^h] digolongkan ke dalam bunyi aspirat, manakala bunyi [h] dan [h^h] pula digolongkan ke dalam konsonan geseran glotis. Bunyi aspirat adalah sejenis bunyi letupan. Maksudnya, bukan konsonan yang sama digandakan dalam lingkungan /-han/.

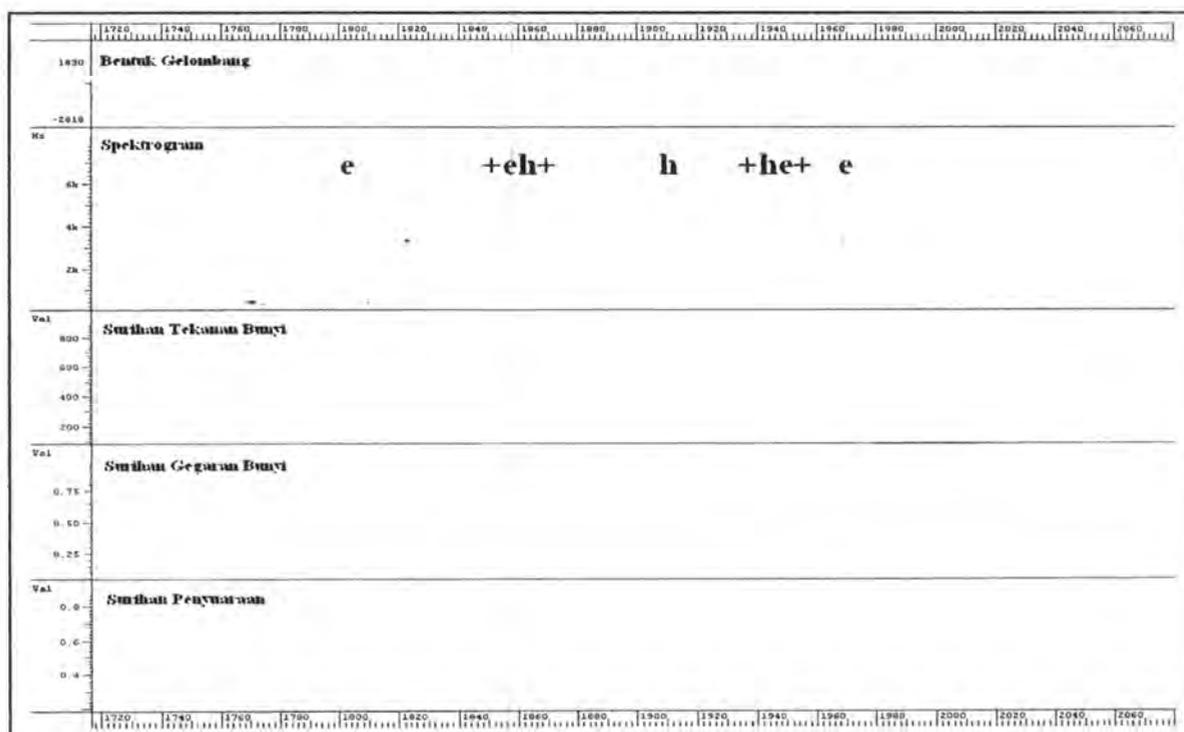
Dalam bentuk fonetik [h^hhan] atau [h^hhan], unsur pertama [h] atau [h^h] berfungsi sebagai bunyi akhir di suku kata praakhir seperti *tuduh-an*, manakala unsur kedua [h] atau [h^h] berfungsi sebagai bunyi awal di suku kata terakhir seperti *tudu-han*. Maksudnya, *tuduhan* /tu.du.han/ [tudu^h-han] atau [tudu^h-han]. Bunyi gabungan [h^h] atau [h^hh] kedengaran seperti konsonan panjang dalam struktur /-han/ dalam proses penerbitan kata bersama akhiran {-an} /-an/. Namun, bentuk fonetik tersebut tidak dapat disamakan dengan konsonan ganda [hh] atau konsonan panjang [h:]. Hal ini terbukti daripada hasil analisis akustik berkomputer.

Daftar Pustaka

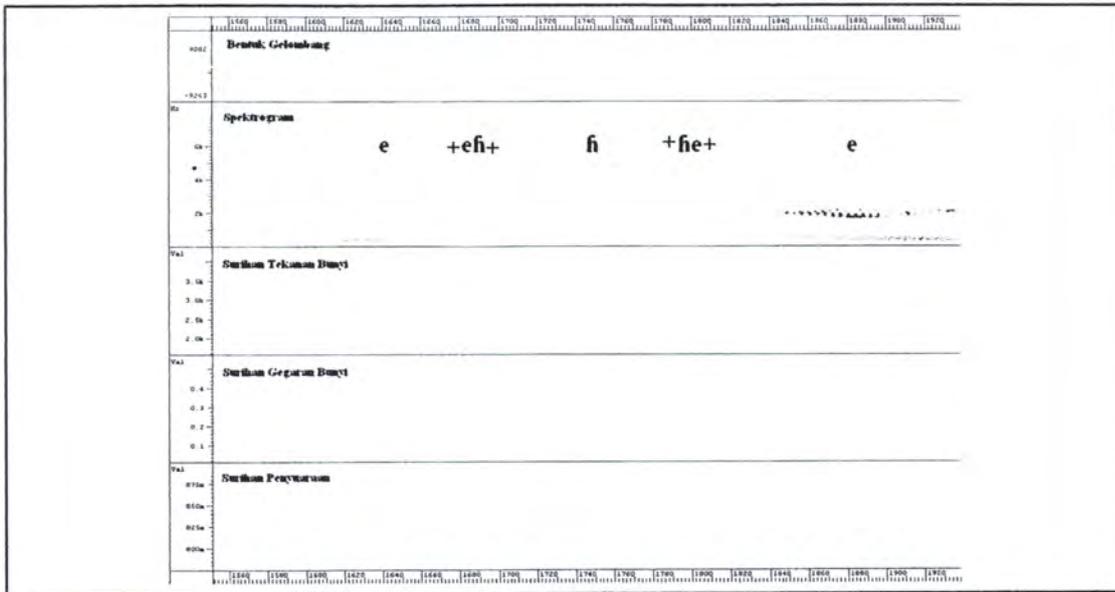
- Davenport, Mike & Hannahs, S.J., 1998. *Introducing Phonetics & Phonology*. London: Arnold.
- International Phonetic Association, 1949. *The Principles of the International Phonetic Association*. London: University College London.
- International Phonetic Association, 1999. *Handbook of the International Phonetic Association: A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet*. Cambridge University Press.
- Jespersen, Otto, 1913. *Lehrbuch der Phonetik*. 2^{te} Auflage. Leipzig und Berlin: B.G. Teubner.
- Jo'o, Hakutaro, 2008a. *Ippan Onseigaku Kogi*. Tokyo: Benseishuppan.
- Jo'o, Hakutaro, 2008b. *Jikken Onseigaku Nyumon*. Tokyo: Benseishuppan.
- Koizumi, Tamotsu, 1998. *An Introduction to Phonetics*. 6th edition. Tokyo: Daigakushorin.
- Ladefoged, Peter, 2006. *A Course in Phonetics*. 5th edition. Australia: Thomson.
- M. Yunus Maris, 1980. *The Malay Sound System*. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.
- Phonetic Society of Japan, 1976. *A Dictionary of Phonetics*. Tokyo: Sanshusha.
- Sato, Hirobumi @ Rahmat, 2009. "Kesan Akustik Gugus Vokal dalam Kata Terbitan Berimbuhan {-an} /-an/", dlm. *Jurnal Bahasa* 9:2 (Disember), hlm. 240-270. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.



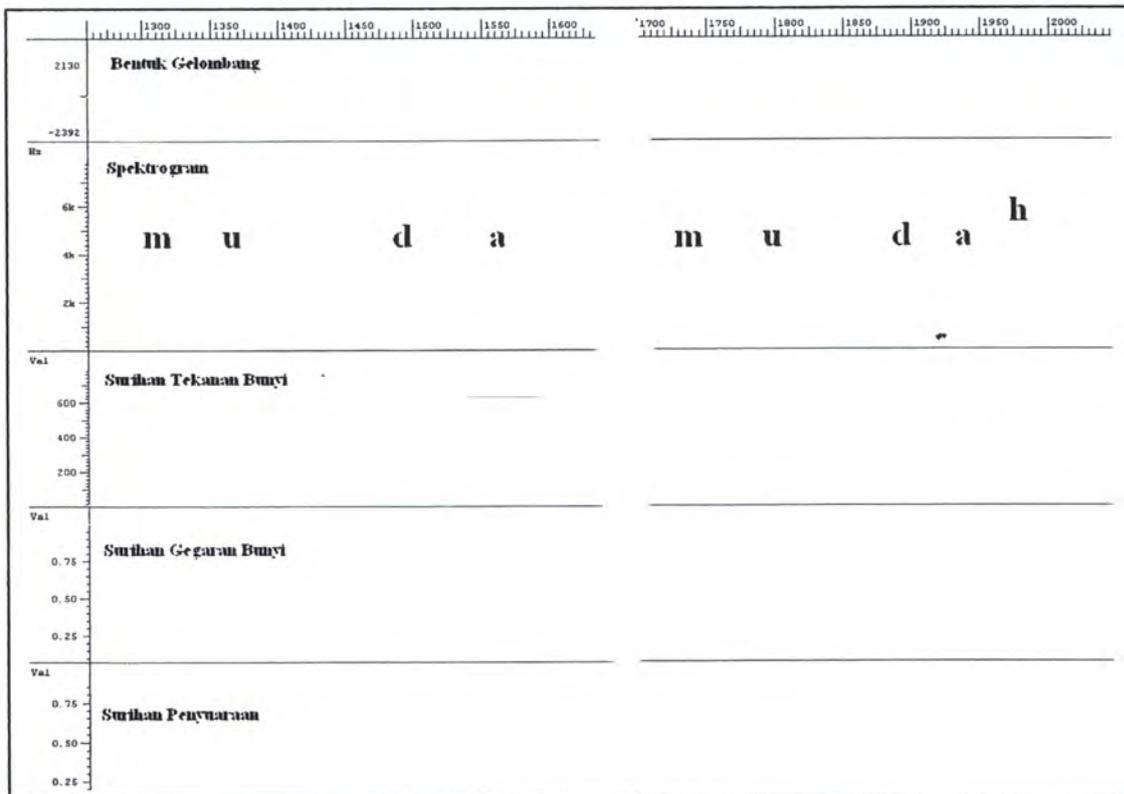
Lampiran 1. kata *tahan* /ta.han/ [tahan] (masa 0.3470 saat)



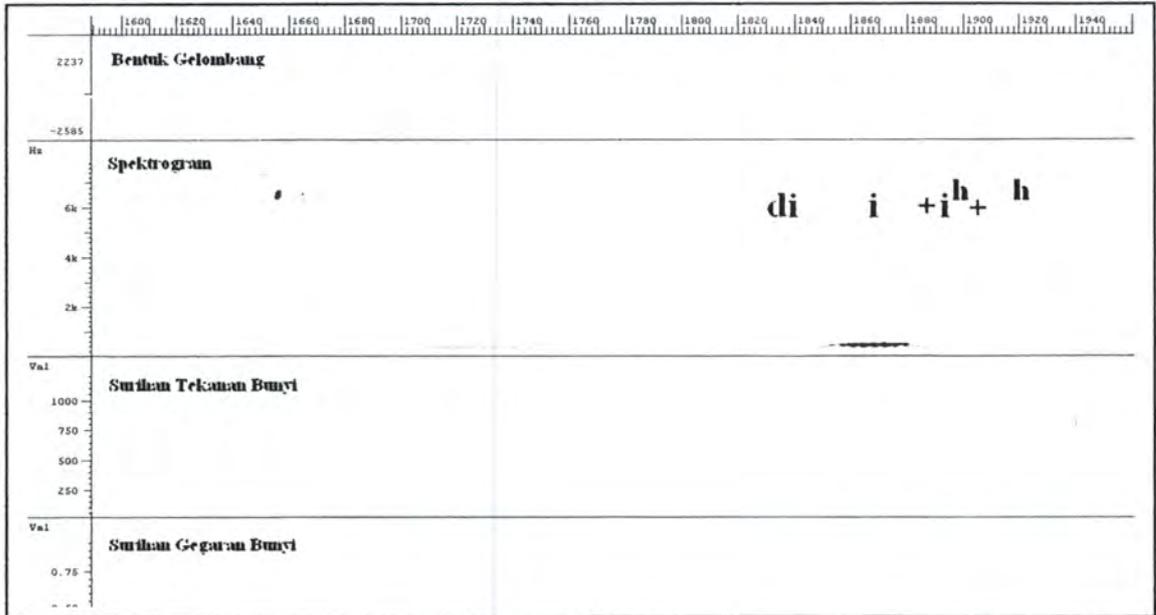
Lampiran 2. kata *leher* /le.her/ [leher] (masa 0.3799)



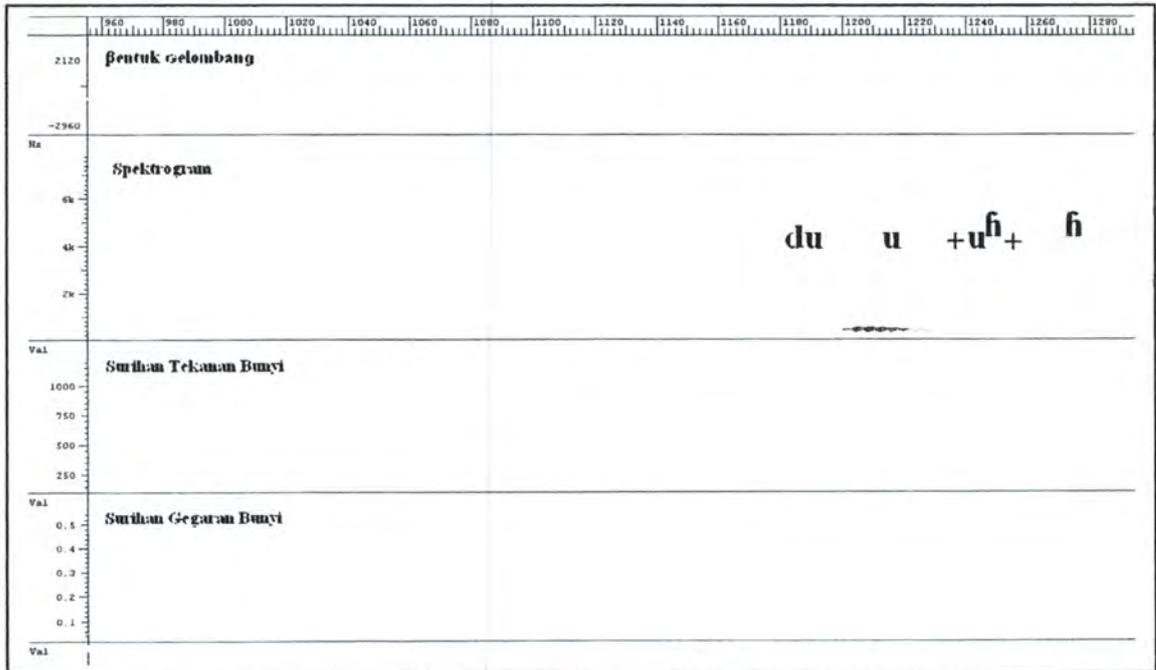
Lampiran 3. kata *leher* /le.her/ [le'ŋe.] (masa 0.3799)



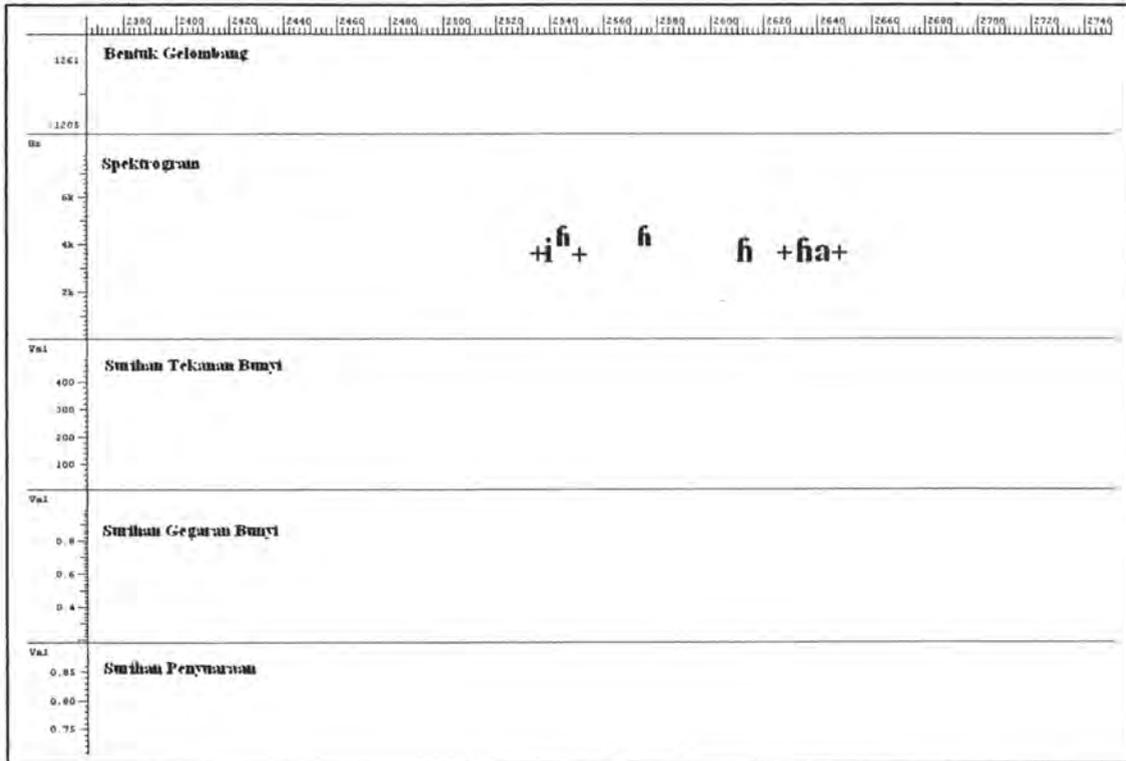
Lampiran 4. kata *muda* /mu.da/ [muda] dan kata *mudah* /mu.dah/ [muda^h].



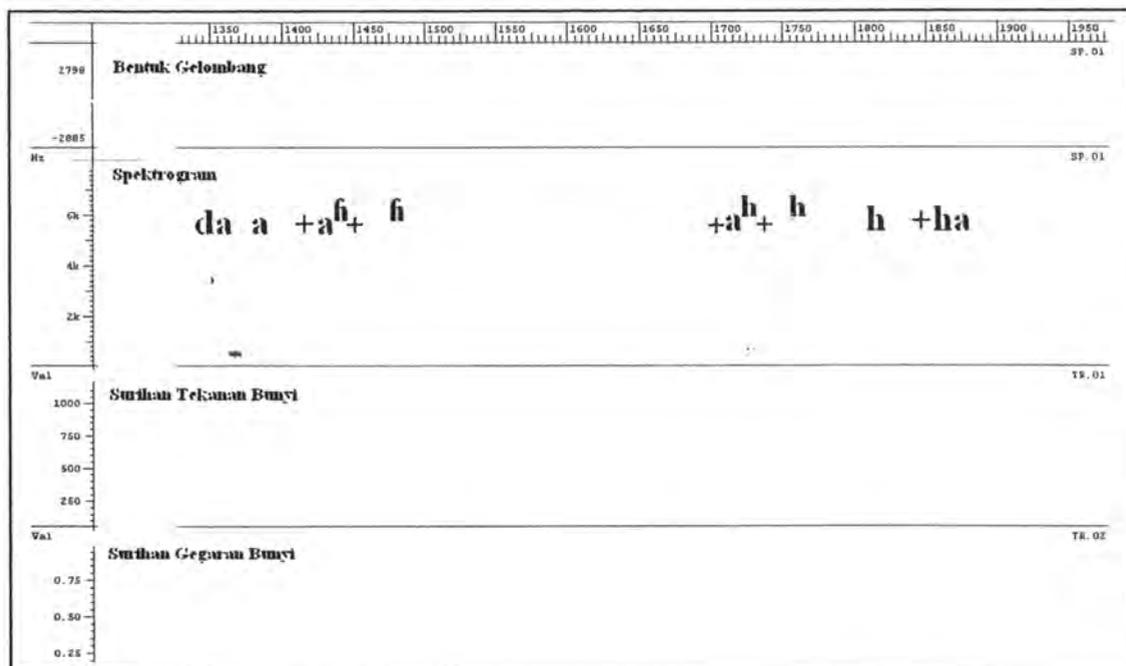
Lampiran 5. kata *sedih* /s↔.dih/ [s↔di^h] (masa 0.4253 saat)



Lampiran 6. kata *menuduh* /m↔.nu.duh/ [m↔nudu^h] (masa 0.4384 saat)



Lampiran 7. kata *pilihan* /pi.li.han/ [pili^hlan] (masa 0.3850 saat)



Lampiran 8. kata *mudah-mudahan* /mu.dah-mu.da.han/ [muδ^h-muda^hηan]

PEMBERDAYAAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN BAHASA DAN KEARIFAN LOKAL¹

Sahlan²
(Universitas Haluoleo)

I. Pendahuluan

Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 32 butir (2) dirumuskan bahwa "*Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional*". Demikian pula dalam penjelasan Pasal 36 UUD 1945 ditegaskan bahwa, "*Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik, maka bahasa-bahasa itu dipelihara juga oleh Negara*". Dengan demikian, pelestarian bahasa daerah menjadi sangat penting karena di samping sebagai alat komunikasi bagi penuturnya, juga menjadi unsur budaya dalam memperkaya keberagaman kebudayaan nasional.

Lukitan (2003) mengemukakan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keragaman bahasa dan sastra daerah, tetapi sebagian besar tergolong sebagai bahasa kecil karena penuturnya di bawah satu juta orang. Sejalan dengan itu, Ferguson (1971) menyimpulkan bahwa bahasa-bahasa kecil makin lama makin menyusut jumlah penuturnya akibat tidak memiliki tradisi tulis. Suatu bahasa yang menyusut penuturnya dapat berakibat punahnya bahasa yang bersangkutan. Fakta-fakta menunjukkan bahwa bahasa-bahasa di Irian Jaya, Nusa Tenggara, dan beberapa daerah lain hanya didukung oleh beberapa ribu, ratusan, bahkan di antaranya hanya puluhan penutur (Mbetse, 2003:5).

Dalam kaitan itu, bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara masuk pada kategori bahasa-bahasa kecil. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Parawansa, dkk. (1981) disimpulkan bahwa situasi kebahasaan di Sulawesi Tenggara sekitar 20 bahasa yang sebagian besar tersebar di Kabupaten Buton. Bahasa-bahasa tersebut bisa terancam punah jika tidak ada upaya pihak-pihak yang terkait untuk pelestarian bahasa daerah. Seperti yang disinyalir Oleh Fishman (1991) dan Reyhner (1999) bahwa tahapan ancaman punahnya bahasa dapat terjadi apabila generasi muda tidak mampu lagi berbicara dengan generasi tua dalam hal-hal adat dan budaya lokal.

2. Upaya Pelestarian Bahasa-Bahasa di Sulawesi Tenggara

Era otonomi daerah dan desentralisasi pengelolaan kebudayaan dewasa ini memerlukan kepedulian baru bagi kita terhadap nasib bahasa-bahasa daerah yang terancam punah. Pertanyaan yang lebih relevan untuk dijawab adalah "bagaimana kita dapat menjaga agar bahasa-bahasa daerah tidak punah serta bagaimana upaya untuk menggalakkan kembali apresiasi masyarakat terhadap sastra daerah?" Upaya yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut sejalan dengan makna butir (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah beserta berbagai peraturan pelaksanaannya, "*bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah*"

Sehubungan dengan isi undang-undang tersebut, pengembangan kembali fungsi-fungsi bahasa daerah dalam sendi-sendi kehidupan sosial-budaya sangat penting dalam pemertahanan bahasa daerah. Halliday (1977) menawarkan nilai-nilai budaya dan perangkat norma sosial diwariskan melalui kemasakan bahasa daerah. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan dan sosial menjadi upaya yang cukup strategis. Pendidikan dan pembelajaran bahasa dan sastra daerah sebaiknya dilaksanakan secara optimal dan pragmatis melalui pendidikan formal. Begitu pula pemberdayaan lembaga-lembaga tradisional melalui aksi-aksi kultural, sosial, dan keagamaan.

Naisbitt dan Aburdene (1990) mengemukakan bahwa saat ini negara-negara berkembang mulai menyadari kembali makna warisan masa lalu melalui semangat nasionalisme budaya. Sejalan dengan itu, Mbetse (2003) mengemukakan melalui otonomi daerah peluang pemberdayaan bahasa daerah masih tetap terbuka melalui dua ranah, yaitu (a) ranah adat dan budaya lokal, dan (b) ranah keagamaan. Fakta menunjukkan bahwa di Sulawesi Tenggara telah terjadi kesenjangan lingual dan kultural lokal pada generasi. Mengacu pada kedua pandangan di atas, pemberdayaan bahasa daerah di Sulawesi Tenggara, khususnya bahasa-bahasa daerah masyarakat Buton dapat melalui berbagai ranah antara lain, (1) ranah budaya dan sastra lokal (2) ranah adat dan aksi sosial masyarakat, dan (3) ranah keagamaan. Uraian singkat ketiga ranah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

¹ Disajikan pada Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah, 18-20 Juli 2010 di Baubau.

² Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, dosen di Universitas Haluoleo.

2.1 Pemberdayaan Bahasa Daerah Melalui Ranah Budaya dan Sastra Lokal

Kegiatan budaya daerah dalam sejumlah konteks tidak dapat dipisahkan dari bahasa daerah. Kegiatan tersebut merupakan kewenangan para pemimpin lembaga adat yang banyak daerah sudah melemah bahkan hilang perannya sejak puluhan tahun yang silam. Lukitan (2003) mengemukakan bahwa bahasa dan sastra daerah dapat berperan mendukung ketahanan budaya bangsa melalui kontribusinya dalam (a) memperkaya keragaman budaya bangsa, yaitu jika identitas dan keunikannya tetap dipertahankan, (b) menyosialisasikan nilai-nilai budaya masyarakat penuturnya jika bahasa daerah difungsikan sebagai alat komunikasi, dan (c) memperkuat serta memperkaya nilai-nilai budaya, jika bahasa dan sastra daerah dipertahankan serta dikembangkan masyarakat yang bersangkutan. Peran yang dimaksudkan oleh Lukitan pada butir (a) di atas dapat terwujud jika eksistensi bahasa dan sastra daerah tetap dipertahankan.

Keanekaragaman potensi budaya daerah dalam banyak aspeknya dapat dijadikan bahan dan ajang pemberdayaan kembali bahasa daerah. Banyak potensi adat, budaya, dan sastra daerah yang nyaris tenggelam oleh pengaruh globalisasi. Upacara tradisional, kegiatan adat, atau aksi-aksi sosial merupakan sarana penyatu kelompok-kelompok masyarakat yang masih cukup potensial dalam pemberdayaan bahasa-bahasa daerah. Pada ranah sastra, masyarakat Buton sangat kaya dengan bermacam-macam karya sastra baik tertulis maupun lisan. Bentuk-bentuk kabanti, legenda, ungkapan bijak, dongeng, dan puisi-puisi asli sangat potensial dijadikan bahan pembelajaran di sekolah.

Banyak para ahli yang menyimpulkan bahwa antara bahasa dengan budaya tidak dapat dipisahkan. Silzer (1990) mengemukakan bahwa bahasa dengan kebudayaan merupakan dua buah fenomena yang saling terikat, ibarat dua sisi mata uang. Pada satu sisi berupa sistem bahasa dan pada sisi yang lain berupa sistem budaya. Apa yang tampak pada budaya akan tercermin dalam bahasa, begitu pula sebaliknya. Pandangan tersebut sejalan dengan Masinambouw (1985) yang menyimpulkan bahwa bahasa dan budaya merupakan dua sistem yang melekat pada manusia. Kebudayaan merupakan suatu sistem yang mengatur interaksi manusia di dalam suatu masyarakat dan bahasa merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana berlangsungnya interaksi.

Berdasarkan kedua pandangan di atas menyiratkan bahwa penggunaan bahasa daerah pada suatu masyarakat dapat menggambarkan budaya dari masyarakat yang memiliki bahasa itu. Dalam kaitan itu, Edward Sapir dan Benjamin Lee Worf mengemukakan gagasan bahwa bahasa bukan hanya menentukan corak budaya, tetapi juga menentukan cara dan lainnya akan mempunyai corak budaya dan jalan pikiran yang berbeda pula. Perbedaan budaya dan alam pikiran manusia pada dasarnya bersumber dari perbedaan-perbedaan bahasa, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa bahasa dalam suatu masyarakat tidak mungkin bisa melahirkan pikiran dan kebudayaan. Jika bahasa memengaruhi kebudayaan dan jalan pikiran manusia, ciri-ciri yang ada dalam suatu bahasa akan tercermin pada sikap dan budaya penuturnya.

2.2 Pemberdayaan Bahasa Daerah Melalui Ranah Adat dan Aksi Sosial

Sebagai alat komunikasi, setiap bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pendengarnya. Komunikasi melalui bahasa dapat dikatakan berhasil apabila pesan yang disampaikan dapat diterima pendengar seperti apa yang dimaksudkan pembicara. Sibarani (2003) mengemukakan bahwa interaksi masyarakat yang sangat beragam, sistem komunikasi yang luas, perkembangan teknologi yang canggih, dan kebijakan pemerintah menyebabkan bahasa daerah terkadang tidak lagi digunakan untuk mengungkapkan konsep pikiran dan budaya daerah secara bebas, tetapi telah digantikan oleh Bahasa Indonesia. Seolah-olah ada perintah untuk tidak berbahasa daerah di depan umum, meskipun peserta komunikasi itu berasal dan lebih fasih berbahasa daerah. Bahkan anehnya, ada orang yang merasa "malu" berbahasa daerah jika didengar orang dari daerah lain. Sebaliknya, ada orang yang merasa tidak nyaman jika dia mendengar orang berbahasa daerah.

Sibarani (2003) mengemukakan faktor penyebab penutur bahasa daerah tidak lagi menggunakan bahasa daerah disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, mereka sudah terbiasa dalam pergaulan dengan masyarakat dari daerah lain sehingga terbawa-bawa dan lebih terlatih dalam komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. *Kedua*, mereka malu berbahasa daerah untuk kepentingan kewibawaan dan "berbahaya" dalam pelestarian bahasa daerah. Situasi seperti ini banyak terlihat pada generasi muda saat ini.

Bahasa daerah merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dilestarikan. Pelestarian bahasa daerah secara efektif dapat dilakukan hanya dengan menggunakan bahasa tersebut dalam kegiatan berkomunikasi. Dalam kaitan itu, Pemerintah menetapkan landasan hak hidup serta pelestarian bahasa daerah dalam beberapa momen penting. *Pertama*, rumusan butir ketiga Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 tidaklah mengabaikan bahasa-bahasa daerah tetapi hanya mengatakan bahwa suku-suku bangsa di Indonesia perlu menjunjung satu bahasa persatuan, Bahasa Indonesia tanpa menghilangkan bahasa daerah. *Kedua*, penjelasan Pasal 36 UUD 1945 dengan jelas menyiratkan bahwa bahasa-bahasa daerah tetap digunakan oleh penuturnya dan dipelihara oleh Negara.

2.3 Pemberdayaan Bahasa Daerah Melalui Ranah Keagamaan

Masyarakat Buton sejak masa kesultanan diidentifikasi sebagai masyarakat yang relegius. Sebagai masyarakat yang relegius kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat sangat menonjol dalam konteks

keanekaragaman budaya (multikultur). Setiap agama, dengan berbagai kegiatannya menggunakan bahasa sebagai sarana utama, baik kegiatan ritual maupun kegiatan dakwah. Bahasa daerah dapat menjadi sarana komunikasi dalam kegiatan-kegiatan pengajian, khutbah, dan pengajaran agama. Pengalaman pada beberapa daerah disadari bahwa aktualisasi nilai-nilai keagamaan sangat dirasakan lebih efektif jika diungkapkan dalam bahasa daerah.

Di Indonesia masih ada daerah yang secara konsisten menggunakan bahasa daerah sebagai sarana komunikasi keagamaan. Masyarakat Jawa dan Bugis-Makasar misalnya, mereka mengekspresikan perasaan religius dengan bahasa daerah. Fungsi ekspresif ini berkaitan dengan nuansa dan emosi religius yang memang lebih tepat diungkapkan dengan bahasa daerah. Bahasa daerah yang dikuasai dan digunakan sejak kecil dalam lingkungan mereka sebagai B1 (bahasa ibu) dirasakan akan lebih mampu dipahami oleh pendengarnya. Jadi, pemberdayaan bahasa daerah sebagai sarana komunikasi dalam ranah keagamaan dapat menjadi strategi pelestarian bahasa daerah. Harus diakui bahwa kelompok profesional keagamaan seperti para pendakwa, para tokoh agama merupakan pemimpin kelompok informal yang mempunyai pengaruh besar dalam pelestarian bahasa-bahasa daerah.

3. Menggali Kearifan Lokal Melalui Sastra Daerah

Istilah *kearifan lokal* dispesifikasi dari istilah '*kearifan lokal*' yang secara harfiah diartikan sebagai pengetahuan lokal. Secara konsep istilah *kearifan lokal* dapat mengacu pada pendapat para ahli. Menurut Gunawan (2003) *kearifan lokal* merupakan hasil adaptasi dari suatu komunitas yang berasal dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan perkataan lain, *kearifan lokal* merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk bertahan hidup pada suatu lingkungan yang manyatu dengan sistem *kepercayaan*, *norma*, dan *budaya* yang diekspresikan pada *tradisi* masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

Kearifan lokal dipandang sebagai suatu adaptasi pengalaman hidup yang dikomunikasikan secara turun-temurun menjadi *tradisi*. Menurut Sztompka (2008) konsep tradisi itu merupakan substansi dan isi semua yang kita warisi dari masa lalu. Pada tingkat *makro*, tradisi adalah keseluruhan yang diwarisi suatu masyarakat dari fase-fase historis terdahulu menjadi 'warisan historis'. Pada tingkat *mezzo*, tradisi merupakan apa saja yang diwarisi komunitas atau kelompok dari fase kehidupannya terdahulu menjadi 'warisan kelompok'. Pada tingkat *mikro*, tradisi merupakan apa saja yang diwarisi individu dari biografinya terdahulu menjadi 'warisan pribadi'. Jadi, dalam konteks *kearifan lokal* hubungan antara masa lalu dengan masa kini haruslah lebih dekat. Suatu *tradisi* mencakup kelangsungan masa lalu pada masa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini adalah berasal dari masa lalu. Untuk memahami tentang masa lalu dapat ditelaah melalui sastra daerah sebagai salah satu tradisi yang dikhawatirkan dapat berubah.

Perubahan tradisi atau kearifan lokal dimungkinkan karena adanya pembauran atau benturan dengan tradisi baru dari budaya kelompok masyarakat lain. Benturan itu dapat terjadi antara tradisi masyarakat lokal dengan salah satu budaya masyarakat kultur lainnya. Sebagai akibat benturan, Maran (2007) menyimpulkan bahwa hampir tanpa kecuali tradisi atau kearifan lokal masyarakat pribumi selalu dipengaruhi oleh budaya-budaya asing, sehingga terjadi daur ulang (dibentuk ulang) bahkan menjadi musnah dalam kehidupan masyarakat lokal. Ada Benturan tradisi dalam suatu masyarakat yang salah satunya adalah benturan tradisi lokal dengan budaya-budaya baru dari luar etnis.

3.1 Kearifan Lokal pada Tradisi Tulis Kesultanan Buton

Dalam Mukaddimah Martabat Tujuh memuat falsafah hidup masyarakat Buton yang telah berlaku sejak masa pra-kerajaan yang digunakan secara turun temurun. Falsafah hidup tersebut tertuang pada Mukaddimah naskah Martabat Tujuh yang berbunyi, "*Bhinci-Bhinciki Kuli*" yang artinya 'mencubit kulit sendiri'. Ungkapan tersebut merupakan landasan dasar keseluruhan isi naskah Martabat Tujuh. Jika dianalisis makna yang terkandung dalam ungkapan tersebut bernuansa filosofis yang menurut pandangan para sejarawan seperti yang dikemukakan Lubis (1986), Daud (1990), dan Said (2005) terinspirasi pada ajaran tasawuf yang bernafaskan sendi-sendi Islam.

Secara semantik ungkapan '*Bhinci-Bhinciki Kuli*' pada Mukaddimah Martabat Tujuh memiliki makna harfiah 'mencubit kulit sendiri'. Jika kita maknai secara mendalam berarti, ketika kita mencubit diri kita maka sakitnya akan terasa sama ketika kita mencubit kulit orang lain. Oleh karena itu, jangan senantiasa mencubit kulit orang lain sebab dia akan merasakan sakitnya seperti yang kita rasakan. Menurut Abdullah (2005) ungkapan *Bhinci-Bhinciki Kuli* mengandung falsafah sosial yang sangat mendalam yang telah dipegang teguh oleh masyarakat Buton sampai saat ini.

Pendapat tersebut merupakan bukti adanya implementasi falsafah hidup pada masa Kesultanan Buton dalam kehidupan masyarakat Buton saat ini. Kandungan falsafah *Bhinci-Bhinciki Kuli* mengajarkan kehidupan sosial yang lebih harmonis, ketentraman, saling menghargai dan toleransi. Falsafah ini ternyata memiliki daya tahan (resistensi) yang cukup kuat dalam masyarakat Buton, karena mengakar yang diakui sebagai ajaran untuk kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Falsafah ini menjadi perekat masyarakat Buton sebagai pegangan hidup bermasyarakat.

Implementasi falsafah *Bhinci-Bhinciki Kuli* melahirkan 'Sara Pataanguna' yakni empat landasan dasar kehidupan bersama. Keempat falsafah tersebut adalah

- (1) *Pomae-maeaka*, 'saling menghormati sesama manusia'
- (2) *Popia-piaraka*, 'saling menjaga perasaan sesama manusia'
- (3) *Pomaa-maasiaka*, 'saling menyayangi sesama manusia'
- (4) *Poangka-angkataka*, 'saling mengangkat derajat sesama manusia'.

3.2 Kearifan Lokal dalam Tradisi Lisan Masyarakat Buton

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi lisan merupakan kearifan lokal yang perlu digali. Menggali kearifan lokal dapat dilakukan tidak hanya pada cerita rakyat, tetapi juga pada bentuk sastra lisan lainnya, seperti pada kabanti dan ungkapan tradisional. Dalam tradisi lisan pada masyarakat Buton, paling tidak terdapat tradisi masyarakat yang telah menjadi *kearifan lokal*, yaitu (a) semangat kebersamaan, (b) rela untuk berkorban, (c) berani membela kebenaran, (d) kasih sayang terhadap sesama, dan (d) pandai bersyukur sebagai hamba Allah.

Semangat kebersamaan atau kesetiakawanan sosial sering juga muncul dalam sastra lisan. Dalam sastra lisan, selalu diingatkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang perlu berinteraksi satu dengan yang lain. Untuk menyampaikan pesan kesetiakawanan sosial sering dimunculkan dalam suatu bentuk musuh bersama, misalnya figur penguasa yang zalim, makhluk jadi-jadian yang buas dan kejam, bencana alam, atau bentuk-bentuk musuh bersama lainnya.

Nilai kearifan lokal lainnya yang sering tertuang dalam sastra lisan terutama cerita rakyat, yaitu sifat kepahlawanan, keberanian membela kebenaran. Sering digambarkan dalam tokoh utama sebagai orang yang sakti. Ia sering digambarkan mengalah walaupun diperlakukan semena-semena oleh tokoh-tokoh jahat hingga pada batas toleransi membuat pendengarnya menjadi jengkel atau marah.

Kearifan Lokal pada aspek religius banyak ditemukan pada kabanti dan kata bijak yang banyak menyampaikan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama. Nilai-nilai tersebut merupakan ajaran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat untuk menangkal budaya-budaya barat yang berkembang melalui kehidupan moderen.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, pembelajaran cerita rakyat menjadi sangat penting untuk diberikan kepada siswa. Masalahnya ialah sastra daerah termasuk cerita rakyat sangat sarat dengan nilai kearifan lokal yang harus diperkenalkan kepada anak secara dini. Melalui pembelajaran cerita rakyat dengan berbagai kreativitas guru akan mudah menanamkan nilai-nilai moral, agama, kasih sayang, dan pelestarian alam. Di samping itu, melalui pembelajaran cerita lisan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa daerah. Hal ini pula lebih mendekati pada penerapan KTSP yang lebih berorientasi pada budaya lokal.

4. Pengajaran Sastra Lisan Sebagai Upaya Pelestarian Bahasa

Pada bagian awal telah dikemukakan bahwa pengajaran sastra daerah sering termarginalkan. Guru lebih tertarik pada pengajaran sastra modern seperti cerpen, novel, puisi, dan drama dibandingkan materi sastra daerah. Padahal jika dikaitkan dengan penerapan kurikulum di sekolah saat ini, baik KBK maupun KTSP, unsur-unsur lokal harus lebih ditonjolkan, termasuk pengajaran telaah sastra. Sukatman (2009) mengemukakan bahwa pengajaran sastra daerah pada kurikulum di sekolah saat ini jarang dikembangkan dalam pembelajaran bahasa. Jika ada materi sastra daerah yang disajikan cenderung tidak sesuai dengan lingkungan pembelajar.

Menghadapi kenyataan seperti di atas, para pendidik perlu mencari strategi dan kreativitas untuk pengajaran sastra daerah. Bukankah suatu keberhasilan pembelajaran tidak semata bergantung pada kuantitas pembelajaran, tetapi juga ditentukan oleh kualitas dan intensitas pembelajaran tersebut? Yang paling pokok dalam pembelajaran sastra daerah adalah bagaimana guru dapat mengupayakan pembelajaran secara mendalam sehingga menyentuh perasaan siswa, dapat menyenangkan siswa, dan tidak terbebani dengan teori yang berlebihan.

4.1 Pembelajaran Mendongeng

Pembelajaran mendongeng dalam konteks pembelajaran di sekolah dapat menjadi sarana pengembangan berbagai kompetensi siswa. Ketika seorang ibu mendongeng kepada anaknya atau seorang nenek mendongeng kepada cucunya, pada dasarnya sang anak atau cucu tersebut telah memperoleh kompetensi yang sangat membekas dalam kehidupan anak tersebut. Begitu pula seorang guru dapat mendongeng untuk memberikan kreativitas pembelajaran di kelas.

Jika konteks pembelajaran cerita dilakukan oleh guru dengan baik, mendongeng dapat memberikan suasana yang menyenangkan terhadap jalannya pembelajaran. Mendongeng dapat dimanfaatkan sebagai pemantapan kemampuan berbahasa daerah siswa serta menanamkan nilai-nilai kearifan lokal. Pengajaran bahasa tentu dapat memberikan kompetensi bagi siswa dalam keterampilan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis). Begitu pula pada bidang pengajaran lainnya seperti; penyampaian budi pekerti, masalah moral, ramah lingkungan, dan agama.

Walaupun ceritra dongeng telah banyak dijadikan film, kekuatan mendongeng secara lisan tetap menjadi penting. Kekuatan mendongeng adalah daya ingat mendongeng melalui kemampuan membaca dan menangkap esensi dongeng serta kemampuan merefleksi kembali dongeng ke dalam imajinasi. Siswa dapat mengembangkan dongeng dengan bahasa sendiri untuk disesuaikan dengan peserta. Dengan demikian, mendongeng memerlukan sebuah keterampilan yang bagi siswa menjadi penting untuk membentuk kompetensi mereka.

4.2 Teknik Mendongeng Sebagai Pelestarian Bahasa Daerah

Priyono (2001) dalam bukunya "Terampil Mendongeng" memberikan resep pembelajaran sesuai dengan pengalamannya dalam mendongeng. Menurut beliau untuk kepentingan pembelajaran sastra lisan, kita dapat menerapkan lima cara dalam menyajikan cerita di depan kelas.

- 1) *Bercerita tanpa alat peraga*, yakni sekadar mengandalkan kemampuan vokal, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang nenek atau kakek kepada cucunya atau seorang ibu atau bapak kepada anaknya. Biasanya pencerita bersikap penuh kasih sayang. Cerita yang disampaikan hanya hafalan secara turun temurun. Kebiasaan bercerita semacam ini biasanya lebih santai dan akrab, sehingga dapat menyenangkan bagi pendengarnya. Cara semacam ini dapat digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dapat juga dibuat variasi sebagai kreativitas guru, misalnya dengan membentuk kelompok-kelompok dan salah seorang siswa menjadi pencerita.
- 2) *Bercerita dengan alat gambar*, yakni pencerita mempersiapkan alat peraga yang berupa gambar atau cerita bergambar. Dari gambar yang sederhana biasa pencerita mengembangkan menjadi cerita yang panjang sesuai keinginan guru. Ada beberapa kegunaan bercerita dengan gambar yaitu, (a) pendengar dapat termotivasi dengan keindahan gambar, (b) mempermudah pencerita mengikuti alur cerita secara tepat. Pembelajaran di sekolah cara seperti ini lebih menarik karena perhatian pendengar pada aspek visual. Di samping itu melalui gambar pendengar juga akan terusik imajinasinya dan melalui keindahan gambar.
- 3) *Bercerita dengan boneka*, yakni cara bercerita dengan menggunakan boneka sebagai alat peraga. Pencerita dengan boneka memerlukan pemahaman karakter boneka tersebut dan berlagak seakan-akan hidup dalam dunia boneka. Boneka yang digunakan tidak jauh beda dengan dengan dalang wayang, yakni menggunakan tangan sebagai penggerak boneka sehingga pencerita secara bebas menggerakkan boneka dalam dialog. Pencerita biasanya seolah-olah berbicara sebagai *boneka*, sehingga tercipta humor-humor alamiah.
- 4) *Bercerita model teater*, yakni bentuk bercerita melalui permainan dengan gaya teatral. Cara ini biasanya dilakukan oleh beberapa orang, sehingga pencerita harus menguasai seni pertunjukan. Pencerita ibarat seorang dalang atau narator yang menguasai segalanya. Cerita biasanya dibagi menjadi beberapa adegan sesuai dengan alur cerita yang diselingi alunan musik.
- 5) *Bercerita melalui lagu (tembang)*, yakni pencerita membawakan cerita dalam bentuk nyanyian. Pencerita melagukan sesuatu yang mengandung unsur cerita sehingga dapat mencairkan otak siswa yang menikmati lagu sambil menyelami isi cerita. Bagi pencerita model ini akan memudahkan untuk mengingat alur cerita, bahkan dapat memudahkan untuk melakukan pengembangan cerita sesuai dengan kebutuhan pengajar.

4.3 Memilih Bahan Ajar Sastra Lisan

Memilih bahan ajar cerita rakyat tak semudah memilih bahan-bahan bacaan karya sastra lainnya. Memilih bahan pengajaran cerita rakyat memerlukan berbagai pertimbangan matang dan cermat dari guru. Endraswara (2002) mengemukakan bahwa salah satu kriteria yang dipertimbangkan adalah ketepatan dengan peserta, terutama tentang keinginan mereka, usia mereka, lingkungan mereka, kemanfaatan bagi mereka. Secara umum beliau mengemukakan tiga hal penting yang harus dipertimbangkan dalam memilih cerita rakyat, yaitu

- 1) *Tuntutan keinginan peserta didik*. Hal ini menunjuk pada kesesuaian sastra lisan dengan harapan. Cerita rakyat yang menurut pandangan guru dapat menarik belum tentu dapat mengasyikkan bagi peserta didik, sebab antara guru dengan peserta didik terkadang memiliki wawasan yang berbeda. Untuk itu, sebaiknya pemilihan bahan cerita rakyat tidak hanya dilakukan oleh guru tetapi juga dipilih oleh siswa sendiri.
- 2) *Kondisi serta lingkungan peserta didik*. Hal ini penting dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kompetensi dasar yang perlu dimiliki oleh siswa. Kompetensi dasar siswa tentang cerita rakyat tentu yang sejak kecil mereka dengar secara lokal dan berkelanjutan. Itulah sebabnya, karya sastra lokal perlu dipertimbangkan untuk menjadi bahan pembelajaran di sekolah. Jika guru menerapkan pertimbangan-pertimbangan lokal, sejalan dengan aspek kontekstual yang saat ini menjadi tuntutan kurikulum di sekolah.
- 3) *Nilai-nilai atau pesan dalam cerita rakyat*. Nilai dan pesan yang terkandung dalam sastra lisan perlu dipertimbangkan secara matang. Banyak sastra lisan bagus menurut alur ceritanya atau bahasa yang digunakan, tetapi mengandung budaya sadisme atau erotisme sehingga menjadi tidak cocok untuk menjadi bahan pengajaran cerita rakyat. Oleh karena itu, seorang guru hendaknya mampu mengemas cerita menjadi bahan pembelajaran agar memiliki nilai-nilai pendidikan yang dapat dihayati oleh siswa.

5. Penutup

Pemanfaatan dan pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan dan sosial menjadi upaya yang cukup strategis. Pendidikan dan pembelajaran bahasa dan sastra daerah sebaiknya dilaksanakan secara optimal dan pragmatis melalui pendidikan formal. Begitu pula pemberdayaan lembaga-lembaga tradisional melalui lembaga adat, budaya, aksi sosial, keagamaan, dan pembelajaran sastra daerah .

Bahasa dan sastra daerah dan pengajarannya perlu mendapat perhatian besar dari semua pihak karena sastra daerah merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun temurun. Masih banyak produk sastra daerah bertebaran di daerah masih belum teridentifikasi sehingga kemungkinan kepunahan dapat terjadi. Oleh karena itu, usaha yang bijak adalah telaah sastra daerah melalui penelitian-penelitian para akademisi, dan pengajaran sastra daerah di sekolah-sekolah perlu dioptimalkan agar generasi baru paham tentang budaya-budaya leluhurnya.

Daftar Pustaka

- Endraswara, Suwardi. 2008. *Metodologi Penelitian Sastra: Epistimologi, Model, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Medpress.
- Ferguson, Charles. 1971. *National Sociolinguistics Profile Formula*, dalam William Bright (Ed.) *Sociolinguistics*. New York: Mouton & Co.
- Fisman, J.A. 1991. *Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundation of Assistance Threatened languages*. Clevedon UK: Multilingual Matters.
- Halliday, M.A.K. 1977. *Explorations in the Functions of Language*. London: Edward Arnold
- Lakitan, Benyamin. 2003. *Peran Bahasa dan Sastra Daerah dalam Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Mbete, Aron Meko. 2003. *Pemekaran Fungsi Bahasa Daerah Demi Ketahanan Budaya Bangsa*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Said D. 2005. *Transformasi Nilai-nilai Pemerintahan Kesultanan Butun: Suatu Telaah Sejarah*. Makalah. Baubau: Panitia Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara IX.
- Semitz, Tomas A. 2007. *Modern Leterary Theory and Ancient Texts: An Introduction*. New York: Blackwell-Publihing
- Sibarani, Robert. 2003. *Fungsi Bahasa Etnik untuk Memperkuat Kebudayaan*. Makalah. Jakarta: Konggres Bahasa Indonesia VIII.

BUTON, FEMINISME, DAN WA ODE WULAN RATNA

Syaifuddin

(Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)

1. Pendahuluan

Karya sastra dapat diperlakukan sebagai teks otonom dan menjadi sebuah dunia rekaan yang diciptakan di atas sejumlah unsur yang sudah selesai dan lengkap. Saat karya sastra diterima oleh masyarakat pembaca, ia telah menjadi teks yang lengkap. Pengarang sebagai pencipta karya itu telah lepas dengan teks. Di sinilah, karya sastra bukan lagi milik pengarang, melainkan milik pembaca. Pembacalah sekarang yang menentukan "arah" karya sastra tersebut. Pihak yang memberi makna pada sastra adalah pembaca. Di sisi lain, sastra merupakan pencerminan persoalan yang terjadi di masyarakat. Ia adalah pantulan fenomena sosial yang diangkat dalam suatu jalinan cerita dengan menggunakan bahasa sebagai media penyampaiannya. Di samping sebagai cermin, sastra juga dapat berfungsi sebagai penyampai suara pengarang sekaligus menjadi wahana kritik atas kemapanan dan kesenjangan sosial budaya.

Karya sastra sebagai karya yang diciptakan seorang manusia yang disebut sastrawan, mengandung gagasan atau pemikiran sang penulis. Pemikiran tersebut dapat berupa saran maupun kritik. Saran dan kritik tentunya selalu bermula dari kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat. Kenyataan sosial yang menyimpang dari norma-norma menjadi sumber inspirasi besar bagi penulis untuk memosisikan dirinya sebagai pengkritik. Namun demikian, sebuah karya sastra—novel, puisi, dan cerpen—tidak selalu memuat secara keseluruhan beragam persoalan tersebut. Ada persoalan-persoalan tertentu yang menjadi fokus analisisnya.

Salah satu persoalan yang banyak mendapat sorotan dalam karya sastra Indonesia mutakhir adalah ketidakadilan yang berbasis gender. Banyak karya sastra yang lahir menyuarakan semangat pembebasan atas belenggu yang melilit perempuan. Semangat pembebasan ini sekaligus bermaksud mengembalikan perempuan ke posisi yang sebenarnya. Semangat ini disebut sebagai feminisme. Dengan demikian, tokoh, peristiwa, alur, latar, tema, dan amanat karyanya dirancang sedemikian rupa untuk tujuan kesetaraan gender. Penulis berangkat dari suatu kenyataan sosial dan asumsi bahwa telah terjadi perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Sastra adalah salah satu sarana ampuh untuk menyuarakan ide feminisme. Lewat ide, amanat, alur, dan tokoh-tokohnya seorang pengarang memiliki keleluasaan untuk mengadakan pemberontakan atas kemapanan negatif yang berakar dalam suatu tatanan masyarakat. Feminisme tidak semata-mata berarti sebuah ide kesetaraan gender yang dapat ditulis oleh pengarang berjenis kelamin apa saja. Tetapi semangat feminisme lebih menitikberatkan perempuan pengarang untuk menuangkan gagasan besarnya. Melalui karya sastra atau kritik sastra feminis pengarang dapat membongkar relasi sosial antara pria dan wanita yang timpang. Sastra sebagai karya fiksi dan imajinatif menjadi senjata ampuh untuk menghancurkan apa yang disebut Simone de Beauvoir sebagai *the second sex* atau *being for others* (ada untuk orang lain).

Kritik sastra feminis menurut Yoder (dalam Suharto, 2005: 5) adalah pengkritik memandang sastra dengan kesadaran khusus, kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan budaya, sastra, dan kehidupan kita. Jenis kelamin inilah yang membuat perbedaan di antara semuanya yang juga membuat perbedaan pada diri pengarang, pembaca, perwatakan, dan faktor luar yang memengaruhi situasi karang-mengarang.

Indonesia adalah negara yang lahir dari berbagai wilayah-wilayah kerajaan yang tersebar di berbagai nusantara. Sistem patriarki yang paternalistik banyak mengakar di ranah masyarakat tradisional yang feodal. Dampaknya adalah perempuan selalu berada pada posisi "di bawah" dan tidak memiliki kemungkinan untuk mengekspresikan diri sebagaimana pria.

Wa Ode Wulan Ratna dalam cerpennya "La Runduma", dimuat di dalam buku *Cari Aku di Canti*, diterbitkan oleh Lingkaran Pena Kreativa tahun 2008, hadir untuk mengkritisi budaya patriarki yang mengakar pada masyarakat Buton. Melalui tokoh utama cerpennya, Harima, pengarang melawan pandangan bahwa derajat seorang perempuan harus ditentukan oleh pria (bapaknya) sebagai perpanjangan tangan budaya patriarki.

2. Unsur Pembangun Cerpen *La Runduma*

Sebagai sebuah karya prosa, cerpen "La Runduma" memiliki unsur-unsur pembangunnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa unsur-unsur pembangun itu sangat menentukan kualitas dan terjalannya peristiwa di dalam cerpen. Dengan kata lain, unsur pembangun itu merupakan struktur yang utuh di dalam menopang kehadiran sebuah karya cerpen. Cerita yang baik adalah ketika penulis berhasil mengikat ceritanya dalam balutan struktur yang menarik. Kehadiran unsur-unsur itu akan menjadi penentu klimaks, jalannya cerita, serta leraian di penghujung cerita. Penulis memiliki keleluasaan untuk mengolah ceritanya berdasarkan unsur-unsur yang

dipilihnya. Berdasarkan pemahaman tersebut telah ditentukan empat unsur pembangun "La Runduma" yaitu alur, tokoh, latar, dan tema & amanat.

2.1 Alur

Peristiwa di dalam cerpen ini berjalan dalam balutan penceritaan yang bergerak maju. Peristiwa dimulai dengan sebuah prolog yang merupakan awal terjadinya peristiwa. Adapun prolog itu adalah "Aku masih perawan. Sungguh. Aku masih perawan! Tapi mengapa gendang itu bisa pecah, Ayah?" Kalimat di atas diungkapkan oleh Johra sebagai tokoh utama, sebagai penangkal atas tuduhan tidak perawan, di akhir cerita. Bagian lain yang merupakan gerak menuju konflik adalah kisah dari Johra sendiri tentang hubungannya dengan La Runduma, kekasihnya yang bekerja sebagai buruh pelabuhan. Kita simak penuturan tokoh Johra tersebut "Lelaki itu ayahku. Namanya Maulidun. Sudah hampir 20 tahun ia menjadi pawang penabuh gendang pilihan pada tiap *posuo*. Aku membencinya, sebab ia tak menyukai La Runduma, lelaki yang tak bisa pergi dari hatiku".

Konflik batin terjadi pada diri Johra dan ayahnya terjadi ketika acara adat *posuo*, ritual pingitan, akan dilangsungkan dan Johra menjadi salah satu pesertanya. Bagi Johra *posuo* adalah sebuah ritual yang mengungkung hak-haknya sebagai wanita. Itulah sebabnya, meskipun ia mengikutinya, ia sebetulnya menolaknya. Hal ini kulakukan demi ayahku semata, batinnya.

Persoalan lain yang memicu terjadinya konflik adalah keinginan Maulidun, ayah Johra, untuk menikahkannya dengan lelaki lain yang sederajat kastanya. Hal ini ditampik Johra dengan keyakinan bahwa semua manusia sama derajatnya di hadapan Tuhan. Klimaks terjadi saat gendang ayah Johra pecah sebagai tanda bahwa salah seorang peserta *posuo* tidak lagi perawan. Masyarakat menuduh bahwa Johralah yang melakukan tindakan asusila itu. Akan tetapi justru Riwa, tokoh lain yang melanggar kesucian ritual. Akibatnya, Maulidun, pingsan karena mengira anaknya yang kehilangan keperawanannya. Cerita berakhir dengan cukup menegangkan saat Johra mangkir dari prosesi *posuo* sebelum berakhir, dengan jalan lari bersama kekasih pilihan hatinya, La Runduma.

2.2 Tokoh

Meskipun jarang menyebut sosok di dalam cerita ini, tetapi dapat diketahui bahwa tokoh utama cerita ini adalah Johra. Sosok Johralah yang menjadi pusat penceritaan, konflik, dan pengembangan cerita. Ia mengemban semangat perlawanan pada budaya *posuo* yang dianggap menindas hak asasi perempuan. Budaya ini dianggap bagian dari warisan turun-temurun yang diabadikan dalam bingkai patriarki yang kental. Seandainya bukan karena ayahnya yang memaksa untuk mengikuti ritual ini, ia akan menolak ikut serta. Akan tetapi, perlawanannya diperlihatkan menjelang ritual yang bermartabat ini berakhir. Ia melarikan diri dari *suo*, tempat para gadis dirumahkan. Bahkan pelariannya tidak sendiri, tetapi bersama kekasihnya, La Runduma. Tokoh Johra menolak pemosisian perempuan di bawah perintah laki-laki dengan cara melarikan diri. Ini adalah pembangkangan ekstrim yang dilakukan seorang sosok perempuan atas kebudayaan yang dianggap suci ini.

Maulidun adalah tokoh lain yang perannya cukup signifikan. Ia adalah ayah Johra yang merupakan simbol budaya patriarki. Dialah yang mengharuskan Johra mengikuti ritual ini dengan baik. Ia selalu mengawasi anaknya agar mengikuti seluruh rangkaian *posuo* dengan tertib serta tidak menyalahi setiap urutannya. Baginya, mengikuti adat yang turun-temurun ini adalah suatu kewajiban budaya bagi setiap gadis Buton. Barang siapa yang mengingkarinya, sama saja dengan mengkhianati nenek moyang Buton sendiri. Ada keyakinan bahwa gadis yang tidak mengikuti ritual ini belum utuh sebagai keturunan Buton yang baik.

Tokoh lain adalah Riwa dan La Runduma. Riwa pada dasarnya adalah gadis yang penurut. Ia mengikuti seluruh rangkaian *posuo* dengan takzim. Tak ada kesan penolakan dalam dirinya. Matanya selalu berbinar dalam melewati tahap demi tahap *posuo*. Akan tetapi justru dialah yang sebetulnya pembangkang yang menodai kesucian *posuo*. Ia telah melakukan hubungan gelap dengan pacarnya di lokasi tempat peserta *posuo* dipingit. Sebagai akibat perbuatannya itu, gendang Maulidun pecah sebagai tanda bahwa salah seorang anak gadis itu telah melakukan zina. La Runduma adalah kekasih Johra. Meskipun hanya sekali muncul dalam cerita, mulai dari awal sampai akhir cerita ia selalu diungkit-ungkit oleh Johra. Dialah harapan Johra untuk melakoni kehidupan. Meskipun ia bekerja sebagai buruh pelabuhan, cinta Johra padanya sangat tulus. Menjelang *posuo* berakhir dia datang membawa Johra lari dari ritual ini.

2.3 Latar

Cerpen "La Runduma" berlatar Baubau (Buton) dan kebudayaannya. Ritual *posuo* merupakan acara pingitan yang berada di Buton. Hal ini sangat jelas dengan istilah-istilah tertentu yang hanya ada di ranah kebudayaan Buton. Berikut ini adalah kutipan yang menyiratkan Buton sebagai latar cerpen tersebut.

"Semua orang Buton percaya, termasuk aku, putri Buton sejati, bahwa *posuo* adalah ritual bagi anak gadis untuk menjadikannya dewasa dan mampu mengurus rumah tangga. Acara pingitan yang menyeramkan ini menempatkanku dan tujuh gadis lainnya dalam *suo* yang pengap dan lembab

tanpa penerangan cahaya apapun. Sungguh suatu pingitan yang aneh dan aku melakukannya karena ayah.”

Kutipan di atas adalah sebuah tanda yang cukup tegas bahwa latar cerita itu ada di Buton. Penyebutan Buton di dalam cerpen di atas dimaksudkan sebagai penanda kebudayaan. Sesungguhnya peristiwa yang terjadi di dalam cerpen itu ada di Kota Baubau. Keraton Buton dan Gunung Nona berada di wilayah Kota Baubau. Selanjutnya, kutipan di bawah ini cukup kuat untuk menegaskan bahwa kebudayaan Buton merupakan hal utama yang dibicarakan sekaligus sebagai latar kejadian, sebagai berikut.

“Usai berjalan jauh dari Keraton Buton, tibalah kami di Gunung Nona. Tempat itu tampak sepi dinaungi perkebunan langsung dan kecapi. Aku tahu, di sinilah aku akan memulai dahagaku. Ah Run, ke manakah ruh usai ia luruh? Aku mencabik-cabik sepi dengan meremas-remas ujung jemari kedua tanganku. Sungguh menyedihkan, pada malam-malam nanti segala kelam menjadi begitu panjang seperti tanpa ujung dan kesunyian pingsan di tengah hutan. Aku hanya bisa menunggu kapan nasib berbalik arah dan menempatkanku pada posisi yang kuinginkan.”

Penggunaan istilah budaya yang khas Buton dan nama tokoh lelaki sebagai kekasih Johra adalah tanda lain sebagai penegas latar Buton, seperti kutipan di bawah ini.

“Aku menemu, berbaris di antrian yang paling belakang. Para *bhisa* mendoa-doa, tabuhan gendang tampak berat sebab ada satu gendang yang pecah. Para gadis yang telah dimandikan akan didandani dan akan menggunakan busana *eja kolemba*.”

Buton dan kebudayaannya mendapat tempat yang spesial di dalam cerita ini. Penulis menguasai secermat mungkin kebudayaan Buton, khususnya mengenai ritual pingitan yang disebut *posuo*. Cerita yang dipaparkan sangat hidup di dalam kebudayaan Buton yang memikat. Melalui pemahaman budaya Buton yang utuh penulis menghasilkan karya yang kuat. Pembaca akan mudah mengetahui kebudayaan Buton lengkap dengan peristiwa budaya yang melingkupinya. Memang demikian, cerita yang memikat dan berkarakter hanya lahir dari cerita yang berlatar kebudayaan.

2.4 Tema dan Amanat

Cerpen “La Runduma” bertema pembelengguan kemerdekaan perempuan dan upaya perlawanannya (feminisme). Sejak awal, cerita ini dimulai dengan sikap perlawanan Johra terhadap ayahnya, Maulidun. Sikap tersebut dinyatakan dalam kesadaran sebagai wanita yang dikekang kebebasannya. Tokoh Johra mengatakan bahwa ia sebenarnya menolak ikut ritual *posuo* karena bertentangan dengan jiwanya yang menginginkan kebebasan. Berikut ini kutipan sikap Harima di bagian awal cerpen, sebagai berikut.

Lelaki itu ayahku. Namanya Maulidun. Sudah hampir 20 tahun ia menjadi pawang penabuh gendang pilihan pada tiap *posuo*. Aku membencinya, sebab ia tak menyukai La Runduma, lelaki yang tak bisa pergi dari hatiku. La Runduma bukanlah lelaki rupawan, dan hanya pekerja serabutan. Sebab itu ayahku tak suka padanya. Sebab lainnya, ia menginginkan aku menikah dengan laki-laki yang sederajat. Untuk itulah aku ikut ritual adat ini.

Maulidun mengikutkan Johra, anaknya, dalam ritual untuk mempertahankan dan melahirkan kesederajatan dengan kasta yang tinggi. Ketika anaknya mengikuti ritual ini, ia pun akan dinikahkan dengan pria lain yang sederajat pula. Tanpa mengikuti *posuo*, Johra tidak akan mendapatkan calon suami yang sederajat. Akan tetapi, Johra hanya menginginkan hal yang lain, kawin dengan lelaki pilihannya sendiri, yaitu La Runduma, seorang pekerja serabutan. Hal ini menegaskan bahwa cerita ini mengangkat tema pembelengguan kemerdekaan perempuan dan upaya perlawanannya. Maulidun adalah simbol budaya patriarki yang akan dilawan, sedangkan Johra adalah simbol feminisme yang akan melawan.

Upaya perlawanan Johra membutuhkan waktu dan kesabaran. Ia mengikuti *posuo* agar keinginannya untuk lari dengan pria lain dapat tercapai. Sebelum proses pingitan selesai, ia telah memilih lari dari rumah pingitan bersama kekasihnya, La Runduma. Perlawanan yang dilakukan Johra dapat diketahui melalui kisah pelarian Johra dan La Runduma di bawah ini.

"Ah, cempaka itu, Run, andai untuk kita. Diam-diam aku pamit tanpa menyelesaikan adegan terakhir. "La Rundumaaa... bajingan tengik kau!!!" "Tenang, Pak. Tenang!" "Apa dia kesurupan?" "Aku tak tahu." "Anaknya melarikan diri." "Pak Maulidun kan punya ilmu, pasti ia dapat menebak siapa yang sudah tidak perawan." "Tidak perawan?" "Ya, ada satu gadis yang tidak perawan. Gendangnya pecah berkali-kali." "Astaga! Anaknyakah?" "Sialan kau La Runduma! Dunia akhirat tak akan kurestui." "Pegangi dia. Dia syok. Bagaimana ini, apa acara masih dilanjutkan?" "Lanjutkan saja, istri Moji sudah datang." "Tapi jumlahnya ganjil. Kalau ia tanya bagaimana?" "Bilang saja yang satu sakit."

Perasaan Johra atas sikapnya yang memilih lari dari ritual budaya yang suci itu menyiratkan akan adanya pembangkangan terhadap budaya patriarki yang mengurungnya, seperti kutipan di bawah ini.

"Aku seperti hewan yang lepas dari sangkar. Begitu terpesona melihat alam melintang. Aku berhamburan seperti daun-daun kering, sambil meneriaki namamu. Dalam rindang itu aku lihat matahari mengiris-ngiris pepohonan langsung dan kecap. Kau tampak bersinar ditimpa cahayanya. "Lama sekali kau baru datang." "Masa? Aku ingin mereka semua terjaga dulu dalam resah." "Mau ke mana kita?" "Ke tempat yang jauh." Ah Run, ke manakah ruh usai ia luruh? Kami beranjak tanpa meninggalkan jejak. Tapak-tapak itu begitu ringan. Melangkah dan meninggalkan segala rahasia yang tak perlu lagi diketahui. Oalah Ayah..., mengapa kau menuduhku tidak perawan? Diam-diam di sana kisruh. Ada hati yang tidak setuju, ada hati yang cemburu."

3. Cerpen *La Runduma* dan Buton dalam Sorotan Feminisisme

Cerpen diawali dengan tuturan tokoh Johra yang sudah menyiratkan adanya perlawanan dirinya terhadap otoritas ayahnya dalam penentuan jodohnya. Maulidun, ayah Johra, menginginkan agar kelak Johra menikah dengan laki-laki yang lebih pantas, yang sederajat dengan kastanya. Penulis mengutip tuturan atau kisah Johra mengenai ketidaksukaannya terhadap sikap ayahnya itu sebagai berikut.

"Lelaki itu ayahku. Namanya Maulidun. Sudah hampir 20 tahun ia menjadi pawang penabuh gendang pilihan pada tiap *posuo*. Aku membencinya, sebab ia tak menyukai La Runduma, lelaki yang tak bisa pergi dari hatiku. La Runduma bukanlah lelaki rupawan, dan hanya pekerja serabutan. Sebab itu ayahku tak suka padanya. Sebab lainnya, ia menginginkan aku menikah dengan laki-laki yang sederajat. Untuk itulah aku ikut ritual adat ini."

Johra menyatakan tidak menyukai ayahnya sendiri karena lelaki yang dicintainya tidak disukai oleh ayahnya. Selain karena tidak sederajat, pekerjaan La Runduma, kekasih Johra, tidak jelas atau serabutan saja. Jika ayah Johra mengizinkan anaknya kawin dengan pekerja serabutan, maka martabatnya akan jatuh di hadapan masyarakat Buton. Keikutsertaan Johra di dalam ritual *posuo* adalah upaya untuk mengesahkan kemartabatannya. Dengan demikian, tidak ada jalan lain bagi Johra untuk menikah dengan La Runduma, lelaki yang "tidak bermartabat".

Akan tetapi, Johra tidak menerima begitu saja keinginan ayahnya untuk mengikuti ritual *posuo* sampai tuntas dan meleraikannya dari La Runduma. Sikap Maulidun adalah pencerminan budaya patriarki yang kental. Ia beranggapan bahwa nasib anaknya, khususnya menyangkut perjodohan, sepenuhnya berada di tangannya. Keyakinan Maulidun sebagai wakil budaya patriarki sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh Beauvoir (dalam Djokosujatno, 2003:127) bahwa laki-laki diposisikan sebagai *self* dan perempuan adalah *others*. Akibatnya, perempuan dirugikan karena mereka ditempatkan pada posisi kedua, yakni sesudah laki-laki. Adapun dasar pemikirannya adalah karena *self* selalu memperlakukan *other* sebagai pelengkap bagi dirinya. Dengan kata lain *other* mendapatkan dirinya, secara sadar atau tidak, sebagai objek. Sikap Maulidun yang merupakan budaya turun-temurun itu dianggap sebagai sesuatu yang mengikat bagi setiap gadis Buton yang menanjak ke masa remaja. Maulidun adalah penjelmaan *self*, sedangkan Johra adalah *other*.

Johra sebagai sosok yang mengemban ide feminisme berpikiran bahwa belitan tradisi ini harus dilawan karena hanya akan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Kutipan di bawah ini memperlihatkan keteguhannya akan ketidaksukaannya dengan ritual *posuo* sebagai berikut.

"Semua orang Buton percaya, termasuk aku, putri Buton sejati, bahwa *posuo* adalah ritual bagi anak gadis untuk menjadikannya dewasa dan

mampu mengurus rumah tangga. Acara pingitan yang menyeramkan ini menempatkanku dan tujuh gadis lainnya dalam *suo* yang pengap dan lembab tanpa penerangan cahaya apapun. Sungguh suatu pingitan yang aneh dan aku melakukannya karena ayah.”

Johra dengan tegas mengatakan bahwa keikutsertaannya pada acara itu, semata-mata karena paksaan ayahnya, Maulidun. Salah satu tujuan dilaksanakannya *posuo* adalah agar anak gadis Buton mampu mengurus rumah tangga. Mengurus rumah tangga dianggap pekerjaan yang hanya dilakukan oleh gender perempuan. Pandangan stereotip ini memang mendapat pengukuhan oleh lembaga-lembaga adat yang berpengaruh di masyarakat. Akan tetapi, apakah Johra menerima begitu saja kenyataan itu pada dirinya? Ternyata tidak, ia tidak hanya melawan sebatas di dalam hati dan pikiran, tetapi dibuktikan dalam tindakan nyata. Hal ini akan kita ketahui pada bagian akhir analisis ini.

Sebagai tindakan diskriminasi yang membelenggu perempuan, menurut Siswanti (2003:22) bahwa sistem patriarki yang bersifat paternalistik masih membelenggu kaum perempuan. Kalangan konservatif menganggap ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan secara sosial maupun hukum adalah takdir Tuhan. Nilai-nilai moral dan sosial yang dianut itu sudah tentu bersifat *male bias*. Sistem kekuasaan yang ada memiliki ciri laki-laki yang memiliki otoritas untuk menguasai dan mendominasi kehidupan perempuan di segala bidang, baik politik, ekonomi, dan sosial. Situasi ini melahirkan pembagian peran dan posisi yang sangat diskriminatif antara laki-laki dan perempuan.

Maulidun, seperti sosok yang dimaksud oleh Siswanti di atas, adalah perwujudan kaum konservatif yang menganggap perbedaan perempuan dan laki-laki dalam peran sosial sebagai takdir Tuhan. Melalui karya sastra (cerpen), Wa Ode Wulan Ratna menjadikannya sebagai wahana untuk menyampaikan ide feminismenya. Ternyata, masih menurut Siswanti bahwa tampaknya dunia konstruksi laki-laki tidak sebatas pada struktur lembaga konkrit saja, tapi juga merambah nilai abstrak, yaitu ide. Wilayah sastra (bahasa secara umum) juga menjadi ajang kepentingan laki-laki untuk melanggengkan kekuasaannya. Laki-laki menggunakan sastra untuk membentuk dunia lewat bahasa laki-laki (*male linguistik*).

Dengan demikian, cerpen “La Runduma” bisa dikatakan sebagai sistem penyampaian material (*mediosphere*) ideologi feminisme Wa Ode Wulan Ratna. Apalagi telah dimaklumi bahwa karya sastra bagi seorang sastrawan merupakan kontemplasi dan pengendapan pengalaman batin yang terdalam. Realitas masyarakat di Buton direspon secara imajinatif dan konseptual dalam bentuk karya sastra oleh pengarang. “La Runduma” merupakan wujud dialektika antara pengarang dengan kondisi sosialnya itu dalam bentuk karya sastra (bahasa).

Sastra sebagai *mediosphere* erat kaitannya dengan manusia sebagai “binatang simbolis” (*animal symbolicum*). Manusia dalam mengomunikasikan ide-idenya membutuhkan media (perantara), sastra bisa menjadi salah satunya. Media memiliki peran penting agar ide yang kuat bisa menjadi aksi yang efektif. Ideologi atau pandangan dunia sebagai salah satunya sangat berkepentingan terhadap keberadaan dunia untuk membantu proses diseminasi (penyebaran) nilai agar menjadi sistem keyakinan secara massif.

Wulan Ratna menggunakan bahasa (karya sastra) sebagai senjatanya untuk melawan ketidakadilan yang berbasis gender. Sebelum menyatakan pemberontakannya yang lain, Wulan Ratna membeberkan kisah pilu yang menerpa peserta *posuo*. Berikut ini kutipannya:

”Usai berjalan jauh dari Keraton Buton, tibalah kami di Gunung Nona. Tempat itu tampak sepi dinaungi perkebunan langsung dan kecapi. Aku tahu, di sinilah aku akan memulai dahagaku. Ah Run, ke manakah ruh usai ia luruh? Aku mencabik-cabik sepi dengan meremas-remas ujung jemari kedua tanganku. Sungguh menyedihkan, pada malam-malam nanti segala kelam menjadi begitu panjang seperti tanpa ujung dan kesunyian pingsan di tengah hutan. Aku hanya bisa menunggu kapan nasib berbalik arah dan menempatkanku pada posisi yang kuinginkan.”

Kenyataan di atas memosisikan perempuan pada tempat yang tidak bermartabat menurut pengarang. Olehnya itu, Johra, tokoh utamanya melakukan perlawanan, baik langsung maupun tidak langsung. Ide perlawanan itu dinilai sangat efektif dalam membangun kesadaran di kalangan pembaca sastra, khususnya kaum perempuan. Melalui dunia yang dibangunnya, penulis pun melontarkan kritikan tajam terhadap budaya patriarki yang dibalut sistem paternalisme. Perasaan Johra dan pernyataan ayahnya merupakan momen-momen paling kelam bagi seorang perempuan. Perempuan selalu direndahkan martabatnya dan harus mendekam di dalam *suo*, rumah pingitan, tanpa bisa berkomunikasi dengan lingkungan luarnya. Berikut kutipannya:

”Asap dupa menyapu seluruh tubuhku. Itulah sesi *pauncura*, sesi pertama untuk mengukuhkanku menjadi peserta *posuo*. *Parika* berdecap-decap melafalkan doa. Dan,

ayahku, bergerak lamban menyentuh gelas. Mereguk isinya yang menuntaskan dahaga. Matanya pijar menyalibku. Apakah kau ingat pertengkaran kita pada hari-hari sebelumnya, Ayah?

"La Runduma itu bajingan, Johra. Percayalah pada bapakmu yang tua ini. Aku ini orang pintar. Banyak ilmu telah kupelajari. Dan La Runduma hanyalah bajingan sejati." Ah, hatiku, Run, betapa merahnya terbakar oleh kata-kata ayah."

Pernyataan Maulidun bahwa La Runduma adalah bajingan, didasari oleh kenyataan bahwa lelaki itu tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya pekerja serabutan saja. Sangat tidak pantas menikah dengan Johra, perempuan bermartabat yang sementara mengikuti *posuo*. Diikutiannya Johra bersama gadis-gadis Buton lainnya, menurut Wa Ode Wulan Ratna ditinjau dari sudut feminisme, adalah sebuah tindak pemaksaan. Mereka tidak dapat menolak karena dianggap menyalahi aturan adat istiadat yang berlangsung secara turun temurun. Tentunya, pandangan Wa Ode Wulan Ratna sebagai penulis masih dapat diperdebatkan lagi karena ada juga anggapan bahwa tradisi, termasuk *posuo*, memiliki nilai kearifan lokal.

Menurut Muhammad (2007:237) bahwa kekerasan terhadap perempuan kini telah terbuka sebagai fakta-fakta nyata, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Fenomena sosial tentang kekerasan terhadap perempuan ini dapat kita baca setiap hari dalam media massa lokal maupun nasional. Kita juga dapat membaca kenyataan ini dari data-data lapangan yang dilaporkan oleh lembaga-lembaga sosial yang memfokuskan kerjanya pada upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan sumber-sumber informasi tersebut kita mencatat bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan ternyata telah memasuki ruang pribadi dan ruang publik dalam bentuknya yang beraneka ragam dan melibatkan banyak pihak, pribadi-pribadi, lembaga sosial, dan negara. Realitas ini tentu saja meresahkan dan sekaligus mengancam eksistensi kaum perempuan secara khusus dan moralitas kemanusiaan. Kekerasan apa pun bentuknya dan terhadap siapa pun adalah bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Pendapat Muhammad tersebut telah memberikan penjelasan kepada kita bahwa kekerasan telah terstruktur sedemikian rupa dan korbannya terutama pada perempuan. Dialog antara Riwa, salah satu tokoh dalam "La Runduma" dengan Johra, memberi pemahaman lebih jauh mengenai dampak psikologis sifat paternalistik seorang ayah (Maulidun) terhadap anaknya (Johra) berikut ini:

"Kau mau menikah?" tanya Riwa kembali.

"Sebenarnya aku tak mau. Tapi ayahku mau aku menikah."

Sesungguhnya menikah bagi seorang perempuan adalah sebuah pilihan. Demikian pula dengan calon pasangannya merupakan pilihan paling suci baginya, karena kelak pasangannya itu akan menentukan kehidupannya di masa akan datang. Di dalam kebudayaan yang paternalistik, menikah bagi seorang perempuan sepenuhnya berada dalam kekuasaan ayah. Ayah, sebagai pimpinan rumah tangga, berhak menentukan siapa calon pasangan dan kapan pernikahannya. Bahkan, jika perempuan menolak, ia akan diberi sanksi adat yang dapat meruntuhkan martabatnya sebagai manusia dan sebagai perempuan. Kondisi ini, dalam sudut pandang feminisme, semakin membuat perempuan tidak dapat menikmati kebebasan memilih sebagai haknya.

Meskipun aturan dalam ritual *posuo* sangat ketat, akan tetapi ada saja cela bagi pesertanya untuk melawan aturan itu. Bahkan ironisnya, pelanggaran itu tidak hanya dilakukan dalam bentuk tidak mengikuti prosesi secara utuh, tetapi dengan melakukan "hubungan gelap" dengan laki-laki yang menjadi kekasihnya. Tindakan ini dalam pandangan agama Islam (agama yang dianut masyarakat Buton) merupakan perilaku amoral dan hukumnya haram. Di sinilah letak kontroversinya gagasan Wa Ode Wulan Ratna yang digambarkan melalui tokoh-tokohnya. Artinya, gagasan kesetaraan gender dan perjuangan perempuan meraih haknya, dilakukan, salah satunya, dengan cara melanggar aturan agama.

Awal penodaan *posuo* itu dimulai ketika sang laki-laki datang pada malam hari dan bertemu dengan peserta *posuo* pada waktu yang telah disepakati jauh sebelumnya. Pelanggaran ini sungguh mencoreng kesucian *posuo* sebagai ritual yang dianggap bermartabat. Akan tetapi, hal ini sengaja dimasukkan oleh Wa Ode Wulan Ratna sebagai pengarangnya, yang dianggap sebagai bagian dari upaya perlawanan. Kutipan di bawah ini, menceritakan pelanggaran melalui "persebadanan" yang justru dilakukan Riwa, salah satu peserta yang sangat bersemangat mengikuti ritual itu, sebagai berikut:

"Malam lindap. Siapakah di antara kami yang keluar malam-malam berjingkrak dengan hati-hati menembusi sunyi? Mataku menatap keluar jendela. Tak ada bulan yang membiaskan bayangan. Gelap itu gulita. Tapi di sana, aku dengar, selain tabuhan gendang-gendang itu, ada nafas dan bau perempuan dan lelaki memadu cinta karena rindu dan cemburu.

Aku bangkit perlahan dari tapaku. Berharap tak ada mata yang terjaga. Kuraba-raba malam mencari pegangan. Pada satu sisi di balik kamar mandi. Bau mesum berhembus seperti bau pesing. Bau itu sungguh menyengat sehingga membuat

kepalaku pening. Aku mafhum pada zaman ini. Tapi siapakah dua orang muda yang berkasih-kasih itu? Mungkin aku cemburu, sebab kau belum datang dan membawaku pergi dari acara yang akan membuatku menyesal seumur hidupku.”

Tindakan pelanggaran yang dilakukan Riwa, sesungguhnya juga ingin dilakukan oleh Johra sebagai tokoh utama. Kata hatinya “mungkin aku cemburu, sebab kau belum datang dan membawaku pergi dari acara yang akan membuatku menyesal seumur hidupku” adalah keinginan untuk melakukan hal yang sama yang diperbuat oleh Riwa. Johra ingin La Runduma datang dan membawanya pergi jauh dari ritual yang terasa menyiksanya itu. Jiwa kritis Johra membuatnya lebih peka terhadap praktik ketidakadilan, penindasan, dan diskriminasi yang diusung sistem yang selalu berusaha mengekalkan stereotip lelaki dan perempuan dalam peran tradisional mereka. Hal inilah yang mendorong sang tokoh utama untuk mempertanyakan kembali manfaat *posuo* serta berusaha melarikan diri. Ia berusaha bebas dari pandangan yang menganggap perempuan hanya sebagai objek seks atau dikontrol tubuhnya lewat seksualitasnya. Kutipan di bawah ini menjelaskan betapa *posuo* penuh dengan keunikan dan pelanggaran. Ada peserta yang tampak tulus mengikutinya, akan tetapi telah menodainya. Di dalam cerita ini, Riwa dan Johra, masing-masing mengusung semangat penolakan yang berbeda. Riwa menolak dengan cara “berhubungan badan” dengan kekasihnya, sedangkan di akhir cerita nanti, Johra melawan dengan cara melarikan diri dari ritual yang belum selesai.

”Menurutku *posuo* juga seperti sekolah kepribadian. Mungkin itu satu nilai yang aku suka selain nilai tanpa mengeluarkan dana yang banyak serta tak perlu bertahun-tahun kursus kepribadian. Aku belajar bagaimana cara duduk perempuan, gaya berjalan, bahkan sampai *pakole*. Aku perhatikan Riwa. Gadis itu begitu lugu dan menurut. Ia senang semua acara *posuo*. Apakah semalam aku bermimpi, Run. Ada seorang gadis bersama kekasihnya di kamar mandi, memendam rasa dan suara? Hatiku berdegupan dengan gilanya. Siapakah di antara kami yang berbuat? Ya, tentunya selain aku dan Riwa. Apakah Nila? Apakah Endah? Aku jarang bercakap dengan mereka, sebab mereka terlalu dewasa dan terlalu serius dengan upacara.”

Hal yang menarik dalam diri Johra adalah adanya semacam perenungan dan pertentangan batin. Ia telah banyak mengkritisi *posuo* karena dianggap mengungkung kebebasannya sebagai perempuan. Di sisi lain ia juga mendapatkan manfaat dari ritual ini, sebagaimana yang dikutip di atas, yaitu sebagai sekolah kepribadian yang dapat membentuk karakternya sebagai perempuan.

Proses menuju klimaks cerpen ini sungguh menegangkan, ketika Johra berada dalam tekanan batin mengetahui para pelaksana *posuo* berkumpul untuk membicarakan pecahnya gendang tabuh-tabuhan.

”Aku tak mau tahu, tapi sore itu *parika*, para *bhisa*, dan para penabuh gendang berkumpul di halaman. Aku tahu, gendang ayah memang pecah semalam. Dan, sekarang mereka sedang bermusyawarah. Menerka-nerka siapa gerangan yang menodai malam. Mungkin semua kepala keluarga telah bersumpah kalau anak gadisnya masih perawan. Apakah ayah juga bersumpah? Ia tidak mempercayaku.”

Menurut keyakinan para pemangku adat di Buton, jika ada gendang yang pecah pada saat ritual berlangsung, berarti ada peserta yang tidak perawan lagi. Gendang milik Maulidun pecah, dan mengira anaknya, Johra, yang telah menodai kesucian *posuo*. Orang tua peserta *posuo* masing-masing bersumpah bahwa anaknya masih perawan saat *posuo* belum dilaksanakan. Mereka tidak paham penodaan itu bisa dilakukan oleh anak-anaknya saat mengikuti ritual itu selama delapan hari delapan malam. Percakapan antara Riwa dan Johra di bawah ini adalah bukti bahwa keduanya menolak ritual ini. Mereka sepakat untuk melakukan perlawanan dengan caranya masing-masing. Ada kontradiksi antara kesungguhan Riwa mengikuti *posuo* dan hubungan gelap yang dilakukannya. Ia gembira mengikuti *posuo* justru karena di ritual ini ia dapat bebas bertemu dan “berhubungan” dengan kekasihnya. Berikut kutipannya:

”Tiba-tiba kulihat mata Riwa dengan binar kebahagiaannya. Betapa ia menjalankan adat ini sepenuh hati. Aku ingat, suatu saat ia pernah berbisik padaku saat aku sedang melamun, “Apa yang kau pikirkan, Johra?” Aku tak menyahut. “Apakah kau merasa terkurung di sini dan ingin melarikan diri?” “Ya, aku ingin melarikan diri.” “Harusnya ada yang menjemputmu.” “Akan ada, Riwa. Tapi aku takut.”

"Aku tahu, akan ada. Dan kau tak usah takut. Terbanglah sebelum sayapmu lemah dan mati."

Pernyataan Johra yang ingin melarikan diri dan arahan Riwa agar "terbanglah sebelum sayapmu lemah dan mati" merupakan ide-ide pemberontakan terhadap penindasan yang membelit mereka. Keduanya telah membuktikan upaya perlawanan itu. Ide perlawanan yang termaktub di dalam cerpen tersebut adalah bagian dari strategi pengarangnya untuk melawan budaya patriarki. Predikat perempuan yang selalu ditandai dengan "pasif", stereotip kultural ini tentu saja harus dipatahkan dengan penulisan yang bersudut pandang perempuan. Penulisan feminim dapat membawa sesuatu kepada eksistensi bentuk alternatif atas hubungan, persepsi, dan ekspresi. Dengan demikian, menulis menjadi suatu tindakan revolusioner. Karenanya, menghadirkan perempuan dalam karya sastra akan menandai seksualitas dan tubuh mereka untuk menunjukkan adanya kebebasan perempuan pada bingkai simbolik sosial yang baru. Semua ini untuk mengubah seksualitas perempuan yang selama ini diasingkan dan dihapuskan dalam proses-proses literatur dan teks.

Sebenarnya, di dalam realitas pelaksanaan ritual *posuo* di Buton, tidak akan mungkin terjadi tindakan fatal sebagaimana yang dilakukan oleh Riwa dan Johra. Akan tetapi, hal itu dimungkinkan di dalam cerita (sastra) sebagai bagian dari kebebasan pengarang untuk memasukkan gagasannya. Wa Ode Wulan Ratna sebagai penulis telah berhasil memasukkan gagasan itu, walau dengan sebuahh kontroversi. Ditinjau dari segi moral, persetujuan Riwa dan kekasihnya di dalam proses *posuo* jelas tidak bisa diterima.

Sehubungan dengan hal itu, hak-hak perempuan menjadi sesuatu yang berharga di dalam cerpen ini. Menurut Kartika (1999:6) bahwa seperti juga setiap lelaki, setiap perempuan terlepas dari keberadaannya (apakah seorang ibu, pekerja, dokter, pemimpin serikat buruh, imigran, prajurit, pengungsi, atau tahanan politik sekalipun) memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar oleh pihak lain.

Di sinilah muatan feminisme yang begitu kental di dalam cerpen "La Runduma". Sebelum ritual *posuo* berakhir, Johra meninggalkan arena itu bersama kekasihnya, La Runduma. La Runduma datang ke *suo* lantas membawa Johra ke dunia bebas. Ia merenggut Johra dari cengkeraman adat yang dianggap Johra sendiri sebagai pengekang hak asasinya. Berikut ini adalah kutipan kekalapan Maulidun saat mengetahui anaknya, melarikan diri bersama La Runduma:

"Ah, cempaka itu, Run, andai untuk kita. Diam-diam aku pamit tanpa menyelesaikan adegan terakhir."

"La Rundumaaa... bajingan tengik kau!!!"

"Tenang, Pak. Tenang!"

"Apa dia kesurupan?"

"Aku tak tahu."

"Anaknya melarikan diri."

"Pak Maulidun kan punya ilmu, pasti ia dapat menebak siapa yang sudah tidak perawan."

"Tidak perawan?"

"Ya, ada satu gadis yang tidak perawan. Gendangnya pecah berkali-kali."

"Astaga! Anaknyakah?"

"Sialan kau La Runduma! Dunia akhirat tak akan kurestui."

"Pegangi dia. Dia syok. Bagaimana ini, apa acara masih dilanjutkan?"

"Lanjutkan saja, istri Moji sudah datang."

"Tapi jumlahnya ganjil. Kalau ia tanya bagaimana?"

"Bilang saja yang satu sakit."

Maulidun kesurupan karena benar-benar merasa malu dan terhina. Anaknya melarikan diri dari prosesi adat yang sangat agung itu. Baginya, La Runduma adalah sang biadab yang harus bertanggung jawab. Ia tidak hanya mencoreng muka Maulidun sekaligus melukai wajah adat istiadat yang dihormati di Buton. Lebih parahnya lagi, ia menduga anaknya yang sudah tidak perawan atau melakukan tindakan asusila pada suatu malam bersama La Runduma. Sikap Johra yang melarikan diri dari ritual ini, baginya adalah hak sepenuhnya yang dimiliki secara asasi. Ia tidak lagi menganggap bahwa nasib perempuan tidak lagi ditentukan adat yang penuh budaya patriarki. Baginya, sudah saatnya perempuan menentukan jalannya sendiri. Perempuan harus menjadi subjek bagi kehidupannya, bukan sekadar objek atas perlakuan laki-laki.

Sikapnya yang tegas dan tangkas itu dinyatakan dalam bentuk kegembiraan saat memandang alam yang lepas. Alam yang terbentang adalah wujud dari kebebasan manusia yang harus diraihinya. Kebebasan yang sekarang didapatnya adalah bentuk perlawanan atas kungkungan yang dialami selama dalam ritual *posuo*. Berikut ini adalah pernyataan batinnya secepat setelah melarikan diri bersama La Runduma.

"Aku seperti hewan yang lepas dari sangkar. Begitu terpesona melihat alam melintang. Aku berhamburan seperti daun-daun kering, sambil meneriaki namamu. Dalam rindang itu aku lihat matahari mengiris-ngiris pepohonan langsung dan kecap. Kau tampak bersinar ditimpa cahayanya."

Meskipun demikian, prosesi ritual setelah kehilangan Johra tetap dilaksanakan. Akan tetapi ia telah kehilangan roh dan martabatnya sebagai ritual yang suci. Seorang pesertanya melarikan diri dan menodai kegiatan itu. Hal yang mengagetkan adalah yang tidak perawan sesungguhnya bukan Johra, tetapi Riwa. Padahal dari awal mengikuti *posuo*, Riwa selalu menampakkan wajah yang berbinar, sedangkan Johra begitu tertekan. Sikap Riwa adalah ironis jika dihubungkan dengan sikapnya yang rela "menodai" kegiatan itu. Akan tetapi, kecerdasan Wa Ode Wulan Ratna sebagai penulis patut diacungi jempol. Ia seakan menjebak pembaca untuk menuduh bahwa Johra yang tidak perawan.

Ketika Johra sudah lepas dari kungkungan adat dan ia berada dalam pangkuan kekasih, ia menumpahkan keluh-kesah dan kegembiraan hatinya, sebagai berikut.

"Ah Run, ke manakah ruh usai ia luruh? Kami beranjak tanpa meninggalkan jejak. Tapak-tapak itu begitu ringan. Melangkahi dan meninggalkan segala rahasia yang tak perlu lagi diketahui. Oalah Ayah..., mengapa kau menuduhku tidak perawan?"

Diam-diam di sana kisruh. Ada hati yang tidak setuju, ada hati yang cemburu."

Johra merasakan betapa "tapak-tapak itu begitu ringan" ketika ia melangkah bersama keputusannya sendiri yang lepas dari jangkauan ayahnya. Sebagai perempuan yang tetap menjaga martabatnya, ia pun mempertanyakan "oalah... Ayah, mengapa kau menuduhku tidak perawan?" Ia telah mampu mengatasi pengaruh dari adat istiadat serta kungkungan aturan ayahnya, juga berhasil mempertahankan kesuciannya sebagai perempuan Buton. Johra masih perawan. Kini, ia telah bersama kekasihnya, La Runduma, yang menjadi pujaan hatinya.

Sebagai pengarang, Wa Ode Wulan Ratna berhasil "memasukkan" ide feminisme dan kesetaraan gender di dalam karyanya. Antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapatnya. La Runduma, laki-laki pekerja serabutan, telah memilih Johra sebagai calon pasangan hidupnya. Sedangkan Johra memilih La Runduma sebagai kekasih yang akan mendampinginya. Keduanya melakukan dengan ketulusan dan kemerdekaan.

Begitulah akhir kisah La Runduma, Johra, dan Riwa di dalam cerpen tersebut. Johra berhasil keluar dari ritual *posuo*. Riwa mengikuti ritual sampai selesai tetapi justru dia menodai prosesi turun-temurun itu. Dari sudut pandang feminisme radikal (Barat), gagasan perlawanan ini berhasil. Akan tetapi dari sudut pandang moral dan tradisi itu sendiri, tentunya tidak bisa diterima dan akan memantik perdebatan yang panjang.

4. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, akan diambil beberapa kesimpulan dengan mengacu pada tujuan penelitian sebagai berikut.

- 1) Struktur yang membangun cerpen "La Runduma" karya Wa Ode Wulan Ratna adalah alur, tokoh, latar, tema, dan amanat. Struktur tersebut memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam membangun cerita menjadi menarik.
- 2) Ide feminisme yang terdapat di dalam cerpen "La Runduma" karya Wa Ode Wulan Ratna sangat kuat dan menjadi tema sentral. Gagasan kesetaraan gender, kritik terhadap budaya patriarki, membela hak-hak perempuan, dan ide feminisme lainnya sangat dominan dalam setiap bagian-bagian cerita. Tokoh utama yang diusung di dalam cerpen itu hadir untuk membawa pesan-pesan feminisme. Tokoh yang mengusung budaya lama (patriarki) dilawan dan dikalahkan oleh tokoh-tokoh perempuan sebagai pembawa peran kesetaraan gender.
- 3) Sebagai pengarang, Wa Ode Wulan Ratna berhasil "memasukkan" ide feminisme dan kesetaraan gender di dalam karyanya. Antara laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapatnya. Akan tetapi, kebebasan dan persamaan hak itu dilakukan dengan cara kontroversial, yaitu melarikan diri dari prosesi *posuo* dan melakukan "hubungan gelap" di dalam ritualnya.

Daftar Pustaka

- Arvia, Gadis dkk. 2003. *Perempuan dalam Seni Sastra*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Djokosujatno, Apsanti. 2003. *Wanita dalam Kesusastraan Prancis*. Magelang: Indonesia Tera.
- Kartika, Sandra. 1999. *Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Panduan bagi Jurnalis*. Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan
- Muhammad, Husein. 2007. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LkiS.
- Ratna, Waode Wulan. 2008. *Cari Aku di Canti*. Jakarta: Lingkar Pena Kreativa.
- Suharto dan Sugihastuti. 2005. *Kritik Sastra Feminis Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

**BAHASA WOLIO DI KERAJAAN BUTON
(SATU KAJIAN BERDASARKAN NASKAH KUNO)**

**La Niampe
(Universitas Haluoleo, Kendari)**

1. Pendahuluan

Dalam sejarah permasyarakatan Nusantra, Kerajaan Buton tercatat sebagai salah satu kerajaan yang memiliki sejumlah peninggalan tradisi tulis atau yang biasa disebut naskah kuno (manuskrip). Melalui hasil-hasil peninggalan tersebut dapat diketahui berbagai informasi mengenai kehidupan orang Buton yang beraspak masa lampau; tentang kebudayaannya, hukum adatnya, sejarahnya, hubungannya dengan negeri lain, agamanya, termasuk bahasa yang digunakan untuk menuliskan naskah-naskah kuno tersebut.

Melalui kesakasian tertulis itu dapat diketahui bahwa ada tiga bahasa yang pernah digunakan di pusat pemerintahan Kerajaan Buton pada masa itu yaitu bahasa Melayu, bahasa Arab, dan bahasa Wolio. Ketiga-tiga bahasa itu sangat penting untuk dikaji dari berbagai aspek, baik aspek kesejarahan maupun aspek ketatabahasannya, akan tetapi pada kesempatan ini pembicaraan saya hanya terfokus pada kajian terhadap pemakaian BAHASA WOLIO di kerajaan Buton.

2. Pemakaian Bahasa Wolio Versi Naskah Kuno

Berdasarkan bukti-bukti tertulis, tampaknya pemakaian bahasa Wolio secara tertulis di pemerintahan kerajaan Buton dapat dipastikan baru berkembang kemudian, yaitu setelah pemakaian bahasa Melayu dan bahasa Arab. Hasil penelusuran saya di berbagai koleksi naskah Buton seperti (Koleksi Abdul Mulku Zahari di Keraton Buton, koleksi Arsip Nasional RI dan Perpustakaan Nasional RI di Jakarta, koleksi KITLV dan Universiteit Bibliotheek di Leiden Negeri Belanda) menunjukkan bahwa angka tarikh atau tahun penulisan naskah Buton berbahasa Melayu dan Arab umumnya berada pada kisaran abad XVII dan XVIII sedangkan naskah-naskah Buton yang ditulis dalam bahasa Wolio usianya relatif muda yaitu berada pada kisaran awal abad XIX. Hasil karya para ulama dan cendekiawan Buton seperti Muhammad Idrus Kaimuddin, Haji Abdul Ganiu, Haji Abdul Rakhim, dan La Kobu (Yarona Labuandiri) berada pada kisaran angka tahun dimaksud.

Meskipun belum ada penelitian khusus di bidang linguistik historis komparatif mengenai perkembangan kosa kata bahasa Wolio, akan tetapi dapat dipastikan bahwa kosa kata bahasa ini sehingga mencapai fungsinya secara maksimal karena mengadopsi unsur-unsur serapan dari berbagai bahasa, terutama bahasa Melayu, Arab, dan pancana (lihat Anceaux, 1987).

3. Tulisan Wolio "Buri Wolio"

Tulisan Arab dan Jawi di Kerajaan Buton tidak hanya meningkatkan derajat keintelektualan tokoh-tokoh Buton akan tetapi juga mampu meningkatkan keilmiahannya bahasa Wolio sehingga mampu mencapai derajat kewibawaannya Bahasa Wolio ditengah-tengah perkembangan bahasa-bahasa lain di dunia.

Tulisan Wolio atau buri Wolio pada prinsipnya diadopsi dari aksara Arab-Melayu. Akan tetapi, sebagian dalam penggunaannya telah mengalami penyesuaian berdasarkan ciri-ciri khusus bahasa Wolio. Oleh karena itulah dalam sistem transliterasi harus dipertimbangkan hal-hal di bawah ini.

Aksara Arab yang Digunakan

Tampaknya tidak semua aksara Arab digunakan untuk melambangkan fonem bahasa Wolio. Hal ini sebagaimana terlihat di bawah ini.

Aksara Arab dan Wolio

ARAB	TRANSLITERASI	WOLIO	TRANSLITERASI
ا	a	ا	a
ب	b	ب	b/β
ت	t	ت	t
ث	ts		
ج	j	ج	j

ح	h	ح	h
ك	kh		
د	d	د	d/D
ذ	dz		
ر	r	ر	r
ز	z	ز	z
س	s	س	s
ش	sy		
ص	sh		
ض	dh		
ط	th		
ظ	zh		
ا	a		
غ	gh		
ف	f	ف	f
ق	q		
ك	k	ك	k
ل	l	ل	l
م	m	م	m
ن	n	ن	n
و	w	و	w
ه	h	ه	h
ا	a		
ي	y	ي	y
ا	c		
ن	ng		
و	p		
ن	g		
ي	ny		

Berdasarkan Tabel di atas, dari 29 buah huruf Arab hanya 17 buah huruf yang digunakan dalam penulisan fonem bahasa Wolio yaitu; ا, ب, ت, ج, د, ح, ز, ر, س, ف, ك, ل, م, ن, و, ه, dan ي. Sementara itu 5 buah

huruf yaitu, **ح**, **ع**, **ق**, **ك**, dan **پ** dan diadopsi dari huruf Arab Melayu. Selain itu, terdapat 2 buah huruf yaitu **ب** dan **د** mengalami variasi fonem (alofon) yang kemudian dilatinkan seperti berikut; **ب** = b/β dan **د** = d/D artinya

ب yang menyatakan *regresif* dilambangkan dengan /b/

ب yang menyatakan *ingresif* dilambangkan dengan /β/

د yang menyatakan *hambat biasa* dilambangkan dengan /d/

د yang menyatakan fonem *dental ingresif* dilambangkan dengan /D/

Tanda Vokal

Dalam tulisan Wolio terdapat 5 buah tanda vokal seperti terlihat di bawah ini.

Tanda Vokal

Wolio	Latin
	a
	i
	u
	e
	o

Huruf Saksi

Dalam tulisan wolio dijumpai tiga jenis huruf saksi “ا”, “و” dan “ي”. Ketentuan penggunaan ketiga huruf tersebut adalah sebagai berikut;

Huruf Saksi “ا”

Huruf saksi “ا” menyatakan vokal ‘a’ panjang ditransliterasikan sebagai ‘â’.

Huruf Saksi “ا”

Teks	Transliterasi	Terjemahan	Halaman
داعي	dângiya	Ada	3
بايان	Bâ-bâna	pertama-tama	3
كاقاك	Kâpâka	Sebab	6
ييراتا	Yoaratâ	Harta	4
مسكانن	Moşagânana	Yang lainnya	15

Huruf Saksi “و”

Ketentuan penggunaan huruf saksi “و” dalam transliterasi adalah;

- Huruf saksi “و” yang menyatakan vokal panjang ditransliterasikan menjadi “û”.
- Huruf saksi “و” yang menyatakan vokal “o” panjang ditransliterasikan menjadi “ô”.

c. Huruf saksi “و” yang menyatakan unsur diftong ditransliterasikan menjadi “o”.

Contoh ketiga ketentuan tersebut dapat dilihat di bawah ini.

Huruf Saksi “و”

Teks	Transliterasi	Terjemahan	Halaman
مقو	Mpû	Sungguh	4
روح	Rûhi	Ruh	8
تتو	Totû	Betul	69
سوم	Sômo	Hanya	26
يعك	Yingkô	Engkau	3
مبور	Mbôre	Tempat	26
كو	Kao	Hanya	26
قيم	Qaomu	Kaum	45
كقتو	Kapitalao	kapten laut	30

Huruf Saksi “ي”

Ketentuan penggunaan huruf saksi “ي” dalam transliterasi adalah;

- Huruf saksi “ي” yang menyatakan vokal “ i ” panjang ditransliterasikan menjadi “ i ”.
- Huruf saksi “ي” yang menyatakan vokal “ e ” panjang ditransliterasikan menjadi “ e ”.

Contoh kedua ketentuan tersebut dapat dilihat di bawah ini.

Huruf Saksi “ي”

Teks	Transliterasi	Terjemahan	Halaman
سي	Sî	Ini	3
ييلي	Yaßali	Mengubah	9
يسيتم	Yosîtumo	Itulah	7
تي	Tê	Dan	11

4. Bahasa Wolio Sebagai Bahasa Islam

Menurut Pendapat saya, bahasa Wolio merupakan salah satu bahasa yang dirahmati oleh Allah SWT bersama-sama dengan bahasa Arab (bahasa Ibu Nabi Muhammad SAW), bahasa Parsi, bahasa Urdu, bahasa Swahili, serta bahasa Melayu. Penutur bahasa Wolio pada masa itu (masa kesultanan Buton) barangkali hanya menjangkau 1/1.000.000 jumlah pemeluk umat Islam di dunia yang juga merupakan jumlah yang paling kecil dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang menggunakan sistim tulisan Arab lainnya. Ciri utama bahasa Islam itu adalah apabila telah menerima Islam mak telah menerima pula sistem tulisan yang berazaskan tulisan Arab. Penggunaan sistem tulisan atau aksara berazaskan aksara Arab tentu sangat besar manfaatnya, selain

menguatkan citra dan ciri keislaman juga dapat memelihara sebutan atau lafaz istila yang digunakan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dalam bahasa Arab yang betul seperti istila asalnya yang berkaitan dengan akidah keislaman.

5. Fungsi Tulisan Wolio.

Secara kuantitas, kehadiran tulisan Wolio (buri Wolio) sebagai media komunikasi tertulis di lingkungan kerajaan Buton berarti menambah jumlah tulisan yang digunakan yaitu tulisan-tulisan Arab dan tulisan Jawa. Apabila tulisan Arab digunakan untuk menyampaikan berbagai ide dalam bahasa Wolio. Berdasarkan bukti-bukti tertulis, tampaknya ketiga bahasa dimaksud (Arab, Melayu dan Woli) digunakan sebagai bahasa resmi didalam lingkungan kerajaan buton. Beberapa naskah kuno berbahasa arab hasil karya seorang ulama sufi besar dari Buton yang juga sultan Buton pada abad XIX bernama Muhammad Idrus Kaimuddin seperti naskah berjudul: *DIYA AL-ANWAR FI TAFSIYAT AL-ALDAR* (15/146/SYAM), 1252 H, *FATH AR-RAHIM FI AD – TAUHID RABB AL-AZIM* (/S/124/SYAM) *KITAB HIDAYAT AL-BASYIR FI MA'RIFAT AL-QADIR* (/S/51/SYAM) *MUNASAR AL-QULUB FI- AZIKRI WA MUSYAHADAT ALAM AL- GUYUB* (/S/145/SYAM) *SABIL AS-SALAM LI BULUG AL- MARAN* (/S/61/SYAM).

Penggunaan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi umumnya dipakai untuk menuliskan ajaran keagamaan, undang-undang ketatanegaraan dan surat-menyurat antara kerajaan (surat-surat Sultan Buton dengan Raja-raja di Nusantara serta surat-surat sultan Buton kepada Gurnadur Jenderal Kompeni Belanda).

Daftar Pustaka

- Achadiati. 2001. *Katalog Naskah Buton Koleksi Abdul Mulku Zahari*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Acheaux. J.C. 1987. *Wolio Dictionary (Wolio – English – Indonesia)*. Dordrecht: Foris Publ.
- A. Hamid, Rogayah. 2006. *Kesultanan Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- 2006. *Kesultanan Melayu Kedah*. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- 2006. *Kesultanan Melayu Kelantan*. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Abdul Rahim, Rohani. 1992. *Undang-Undang Islam di Asia Tenggara*. . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Braginsky, V.I. 1998. *Yang Indah Berfaedah dan Kamal*. Sejarah Sastra Melayu dalam Abad 7 – 19. Jakarta: INIS.
- Collin, James T. 2009. *Bagasa Sanskerta Dan Bahasa Melayu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Choo Ming, Ding. 2009. *Pengajian di Alam Melayu: Dari Tradisi Manuskrip Ke Maklumat Digital*. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia.
- De Hollander. J.J. 1984. *Pedoman Bahasa dan Sastra Melayu*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Haja Musa, Hashim. 2006. *Islam dan Kebahasaan Melayu (dalam Jurnal Pengajian Melayu hlm. 34-89)*. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Mekayu Universitas Malaya.
- Ishak, Othman. 1997. *Hubungan Antara Undang-Undang Islam Dengan Undang-Undang Adat*. . Kualar Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Juhari Moain, Amat. 2009. *Sejarah Perancangan Bahasa Melayu Johor. Di Negeri Johor*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- La Niampe, 2009. *Nasihat Sultan Muhammad Idrus Ibnu Badaruddun al-Butuni*. Kendari: FKIP Unhalu.
- 2009. *Nasehat Syekh Haji Abdul Ganiu Al-Butuni*. Kendari: FKIP Unhalu.
- 2009. *Undang-Undang Buton Versi Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin*. Kendari: FKIP Unhalu.
- 2009. *Syair Ajonga Inda Malusa: Pengantar dan Suntingan Naskah*. Kendari: FKIP Unhalu
- 2009. *Undang-Undang Buton Versi Muhammad Isa*. Kendari: FKIP Unhalu
- 2009. *Silsila Bangsawan Buton: Komentaran dan Suntingan Naskah*. Kendari: FKIP Unhalu
- 2010. *Dari Melayu Kenegeri Buton (Sejarah Terbebtuknya Kerajaan Melayu Buton dan dan Silsilah Rajanya)*. Kendari: FKIP Unhalu
- 2008. *Manuskrip Melayu Sumber Maklumat Pribumi Melayu*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Schoorl, Pim. 2003. *Masyarakat Sejarah dan Budaya Buton*. Jakarta: Penerbit Jambatan
- Yunus, Abdul Rahim. 1995. *Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton*. Jakarta: INIS.

**SENI PERTUNJUKAN KABANTI:
SOAL PEWARISAN BUDAYA DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH¹**

Asrif
(Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)

1. Pendahuluan

Kabanti, sebagaimana halnya seni pertunjukan lainnya di Indonesia merasakan pasang-surutnya perlakuan pemerintah dan masyarakat dalam menentukan eksistensinya di dalam masyarakat. Pertunjukan kabanti pada masyarakat Buton telah melalui fase perjalanan yang panjang yang konon telah ada sebelum masyarakat Buton menganut ajaran Islam².

Sebelum abad 17, kabanti telah menjadi seni pertunjukan yang dikonsumsi oleh masyarakat Buton dan pada abad 19 sebagian kabanti mengalami transformasi dari lisan ke tulisan. Transformasi kabanti dari lisan ke tulisan yang kemudian dilisankan kembali dapat dinilai sebagai upaya pihak keraton dan mungkin juga masyarakat dalam melestarikan kabanti yang semula hanya menjadi ingatan kolektif masyarakat.

Pada jenis kabanti yang lain, yakni kabanti yang ada di luar keraton, masyarakat memperlakukan seni pertunjukan tersebut dengan sangat cair. Kabanti dapat diciptakan oleh siapa saja, dipertunjukan di mana saja, dan untuk kegiatan menghibur masyarakat awam yang tidak terbatas oleh tembok keraton, kasta, jenis kelamin, dan usia. Karena kabanti jenis ini berkembang di luar keraton atau tepatnya di daerah-daerah pesisir, saya menyebutnya dengan nama kabanti pesisir. Penamaan ini untuk membedakan jenis kabanti yang berkembang di tengah masyarakat luas tidak mengeksklusifkan diri hanya pada acara keagamaan, tetapi justru memainkan peran yang tidak dijamah oleh kabanti keraton. Dengan demikian, baik kabanti keraton ataupun kabanti masyarakat, memperoleh tempat untuk berkembang sejalan dengan lingkungan di mana kabanti itu berada.

Eksistensi kabanti seperti yang digambarkan di atas berjalan secara alami. Tidak ditemukan adanya penerapan aturan yang mengendalikan pertunjukan kabanti. Pihak Kesultanan Buton pada masa lalu dan pemerintah daerah saat ini membiarkan pertunjukan kabanti terselenggara sesuai dengan keinginan masyarakat. Perlakuan pihak penguasa—Kesultanan Buton dan pemerintah daerah saat ini—dapat dianggap sebagai bentuk kebijakan penguasa yang mempersilakan masyarakat menembangkan pertunjukan kabanti sesuai dengan kehendak masyarakat. Kebijakan penguasa tersebut—entah disadari atau tidak disadari—berdampak pada peluang masyarakat untuk mewariskan pertunjukan kabanti sampai saat ini.

Peluang yang diberikan oleh penguasa kepada masyarakat untuk mengembangkan dan mewariskan kabanti seharusnya menjadikan pertunjukan kabanti tetap eksis sampai saat ini. Akan tetapi, dalam kenyataannya, pertunjukan kabanti saat ini berjalan terseok-seok, senandungan suara *pakkabanti* dan tabuhan gendang dan petikan irama gambus kabanti nyaris tak terdengar. Pertunjukan kabanti mulai jarang terlihat, hanya sesekali saja terlihat pertunjukan kabanti. Kalaupun ada pertunjukan kabanti, peristiwa tersebut hanya dapat disaksikan di rumah orang-orang yang masih memiliki rasa penghargaan budaya yang berkategori “baik”. Orang yang mempertunjukkan kabanti, baik pengundang atau pelaku, kadang disebut sebagai orang tradisional, kuno, dan tidak mau mengikuti perubahan zaman.

Atas kondisi seperti yang dipaparkan di atas, tulisan ini berupaya menjelaskan perlakuan penguasa dan masyarakat dalam mewariskan pertunjukan kabanti, seperti apa bentuk pewarisan yang diterapkan penguasa dan juga masyarakat. Selain itu, tulisan ini akan melihat bentuk kebijakan kebudayaan yang ditempuh penguasa terhadap kabanti.

2. Pewarisan Kabanti dalam Masyarakat Buton

Pewarisan kabanti dalam bentuk lisan yang ditulis dan dilisankan kembali adalah cara penguasa lama—Kesultanan Buton—mendokumentasikan yang berarti mewariskan kabanti ke masa kini dan akan datang. Pendokumentasian kabanti ke dalam naskah berdampak pada masih ditemukannya berbagai naskah kabanti keraton, khususnya pada masyarakat yang mendiami lingkungan keraton. Naskah-naskah kabanti tersebut menjadi pegangan para *pakkabanti* ketika mengisi acara *maulid* yang diselenggarakan oleh suatu keluarga.

Selama ini, pewarisan kabanti tidak dilakukan secara formal atau melalui suatu pendidikan dan pelatihan pada lembaga-lembaga formal seperti sanggar atau sekolah. Umumnya, pewarisan kabanti terjadi secara alamiah, yakni melalui suatu proses pewarisan yang terjadi secara tidak langsung. Pelaku kabanti

¹ Disampaikan dalam Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara di Kota Baubau, 18—20 Juli 2010.

² Pada abad 17 seiring dengan masuk Islam ke Kerajaan Buton, kabanti mulai didokumentasikan ke dalam naskah. (La Niampe, 2000: 1). Mengacu kepada deskripsi La Niampe tersebut berarti kabanti telah ada sebelum masyarakat Buton menganut ajaran agama Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertunjukan kabanti telah ada sebelum abad 17.

mewarisi pertunjukan kabanti melalui proses peniruan tidak sadar setelah sering menonton atau mengikuti pertunjukan kabanti. Proses pewarisan seperti ini disebut Bouvier (2002: 354—355) sebagai proses penghayatan yang tidak sadar. Menurut Bouvier, penghayatan tidak sadar terjadi dari kebiasaan menonton dan mendengarkan sejak kanak-kanak pasti akan menimbulkan peniruan yang mungkin saja kemudian digalakkan atau disempurnakan, atau sebaliknya.

Proses pewarisan seperti yang digambarkan oleh Bouvier terjadi pada pewarisan atau cara mempelajari seni pertunjukan dalam masyarakat Madura. Dari sekian banyak seni pertunjukan yang diamati Bouvier, tampaknya semua seni pertunjukan tersebut terwariskan secara tidak sadar. Proses pewarisan yang seperti itu dialami pula oleh para pelaku pertunjukan kabanti yang mewarisi pertunjukan kabanti dari sebuah proses penghayatan tidak sadar.

Sepintas, tampaknya penguasa telah berhasil mewariskan kabanti ke dalam kehidupan sosial masyarakat sampai saat ini. Pada acara-acara keagamaan, semisal *maulid*, pelaku kabanti menyenandungkan kabanti yang dibaca dari naskah. Naskah-naskah tua hasil karya cipta para sultan dan bangsawan keraton pada masa lampau masih bisa dinikmati hingga saat ini. Situasi tersebut akan berbeda jika kabanti keraton tidak dinaskahkan. Para pelaku kabanti mungkin akan mengalami kesulitan ketika mencipta kabanti keraton yang umumnya berisi tentang falsafah hidup.

Keberhasilan penguasa mewariskan kabanti keraton ternyata tidak berjalan mulus sampai saat ini. Ketidakmulusan pewarisan kabanti dapat diketahui dari jumlah pelaku kabanti cenderung berkurang. Para pelaku kabanti rata-rata telah berusia tua, itupun jumlah mereka yang sangat terbatas. Pertunjukan kabanti seolah hanya sebagai kenangan yang masih diingat dengan jelas oleh para tetua, tetapi sebaliknya bagi generasi muda. Pertunjukan kabanti di mata generasi muda hanya sebagai cerita turun-temurun yang hanya sesekali dilihat. Tidak ada keinginan yang kuat untuk menikmati apalagi mempelajari pertunjukan kabanti. Keadaan tersebut semakin diperparah dengan sikap masyarakat Buton yang juga mulai “enggan” mengundang pelaku kabanti untuk mengisi acara *maulid*.

Pada masa kini, pertunjukan kabanti mengalami masa-masa sulit. Kabanti yang penuh dengan senandung falsafah hidup, yang oleh tetua Buton dianggap sebagai senandung yang berisi ajaran moral, tidak lagi menjadi sebuah pertunjukan budaya yang populer seperti pada masa Kesultanan Buton masih berdiri. Asumsi Anoeграjekti (2006: 814) bahwa hidup-matinya sebuah kesenian sangat dipengaruhi oleh kebijakan penguasa yang cenderung “menyesuaikan” kesenian tersebut dengan keinginan penguasa tampaknya tidak berlaku bagi hidup-matinya kabanti. Penyesuaian yang dimaksudkan Anoeграjekti seperti pemberlakuan tata tertib dan kewajiban membuat penyesuaian-penyesuaian untuk menjaga nilai-nilai seni yang telah diidentifikasi dan dilegitimasi sesuai kriteria pemerintah.

Pada kasus kabanti keraton, pemerintah daerah—Pekab Buton dan Pemkot Baubau—tidak melakukan “penyesuaian” seperti yang dimaksudkan Anoeграjekti. Pertunjukan kabanti merupakan kuasa masyarakat adat yang menurut pengamatan penulis, jauh dari intervensi pemerintah. Pemerintah tidak melakukan intervensi karena pertunjukan kabanti keraton difungsikan hanya untuk kepentingan adat dan agama semata, bukan sebagai pertunjukan profan sebagaimana banyak kesenian pertunjukan saat ini. Akan tetapi, pada kenyataannya pertunjukan kabanti tidak memperlihatkan perkembangan yang positif dan menggembirakan, malah sebaliknya, dari hari ke hari, pertunjukan kabanti jarang digelar dan terdengar.

Pertunjukan kabanti yang seharusnya tetap lestari karena aman dari “gangguan” penguasa, memunculkan dugaan-dugaan mengenai penyebab ketidaklestariannya tersebut. *Pertama*, nilai-nilai keislaman masyarakat Buton, khususnya di lingkungan keraton Buton tidak “sedalam” ketika masa masyarakat Buton masih sebagai daerah otonom Kesultanan yang sangat teguh dengan ajaran agama Islam. *Kedua*, kabanti keraton merupakan salah satu bentuk kebudayaan “eksklusif” masyarakat Buton yang karena eksklusifnya itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang keraton. *Ketiga*, pertunjukan kabanti keraton selalu berdasar pada naskah keraton yang tidak mudah dimiliki oleh orang atau pihak lain di luar lingkungan keraton. *Keempat*, sikap pemerintah daerah yang kurang atau tidak memfungsikan tradisi atau kultur masyarakat Buton, khususnya pertunjukan kabanti sebagai tradisi yang wajar diwariskan. Pemerintah daerah saat ini hanya berpacu pada pembangunan fisik tetapi lemah pada pembangunan kebudayaan, minimal melanjutkan tradisi positif yang pernah ada dalam sendi-sendi masyarakat Buton masa lampau.

Situasi yang berbeda justru terjadi pada pertunjukan kabanti masyarakat. Walaupun tidak sepopuler pada masa sebelum tahun 1980-an, tetapi kabanti masyarakat masih dapat dijumpai pada acara-acara hiburan masyarakat, misalnya pada acara pernikahan, sunatan, syukuran atau oleh seseorang yang secara sengaja melantunkan kabanti untuk menghibur diri. Kabanti masyarakat merupakan kabanti yang jauh dari nuansa kabanti keraton. Pertunjukan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, laki-laki atau perempuan. Karena sifatnya yang lebih cair, kabanti masyarakat memiliki peluang yang lebih “beruntung” untuk diwariskan ke generasi berikutnya. Acara pernikahan, sunatan, dan syukuran lebih sering dilakukan daripada acara *maulid* yang hanya sekali dalam satu tahun. Tingginya ruang kabanti masyarakat untuk dipertunjukan memberi peluang yang lebih banyak dan luas kepada masyarakat untuk menonton, mendengar, dan meniru pertunjukan kabanti yang sedang ditontonnya. Oleh karena itu, pewarisan secara tidak sadar, sebagaimana yang

ditemukan Bouvier pada masyarakat Madura, lebih terbuka lebar dibandingkan dengan peluang mengenal kaꦁanti keraton.

Ada perbedaan mencolok antara kaꦁanti keraton dan kaꦁanti masyarakat. Jika kaꦁanti keraton sulit diintervensi oleh kepentingan penguasa, maka justru pada kaꦁanti masyarakat kadang diintervensi oleh penguasa. Misalnya, pada acara pemerintah, syair yang disenandungkan *pakkaꦁanti* masyarakat kadang disisipi oleh pesan-pesan pemerintah atau kelompok yang mengundangnya. Pada kampanye pemilihan anggota legislatif atau pemilihan gubernur/bupati/walikota, *pakkaꦁanti* dapat diminta untuk menggunakan kostum yang menunjukkan ciri perseorangan atau kelompok yang mengundangnya. Tentunya pesan yang disampaikan juga sesuai dengan selera sang pengundang. Situasi yang dialami oleh kaꦁanti masyarakat tersebut sulit terjadi pada kaꦁanti keraton karena kaꦁanti keraton hanya diperuntukkan pada acara-acara adat dan keagamaan.

Dari kedua kasus pewarisan kaꦁanti, yakni antara kaꦁanti keraton yang tanpa intervensi penguasa dan kaꦁanti masyarakat yang dapat diintervensi penguasa diperoleh suatu kesimpulan awal bahwa seni pertunjukan yang mampu menerima dan beradaptasi dengan situasi justru mampu berkembang dan bertahan sampai saat ini. Sebaliknya, seni pertunjukan yang paten, ketat, dan eksklusif justru sulit mempertahankan diri dari perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Asumsi saya ini bertolak belakang dengan asumsi Anoeграjekti yang justru melihat intervensi sebagai bentuk pelemahan yang berdampak ketidakberlangsungan kesenian tersebut.

3. Kebijakan Kebudayaan terhadap Kaꦁanti

Eksistensi sebuah produk kebudayaan banyak dipengaruhi oleh penerapan kebijakan budaya, baik kebijakan itu sebagai kehendak yang lahir dari penguasa ataupun dari masyarakat. Ada hubungan yang selaras antara kebijakan kebudayaan di satu sisi dan eksistensi atau aktualisasi kebudayaan pada sisi yang lain. Produk kebudayaan akan tetap hidup dan berkembang jika kebijakan atas kebudayaan tersebut berpihak kepada eksistensi kebudayaan, sebaliknya produk kebudayaan yang kurang atau tidak berpihak akan berdampak pada melemahnya eksistensi kebudayaan di tengah masyarakat.

Hubungan yang selaras antara kebijakan dan eksistensi kebudayaan dapat terlihat pada situasi yang dialami pertunjukan kaꦁanti. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal, saat ini pertunjukan kaꦁanti kurang menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pertunjukan kaꦁanti mulai jarang digelar yang oleh masyarakat pendukungnya. Adakah hubungannya dengan kebijakan kebudayaan, baik kebijakan tersebut sebagai kehendak penguasa ataupun kehendak masyarakat? Pada bagian ini, akan dipaparkan kebijakan kebudayaan terhadap pertunjukan kaꦁanti.

Sejak masa Kesultanan hingga masa pemerintahan NKRI, penulis tidak atau belum memperoleh keterangan mengenai adanya penerapan kebijakan yang "merugikan" pertunjukan kaꦁanti. Tidak adanya perlakuan pemerintah yang merintangikan perkembangan kaꦁanti sebagaimana Anoeграjekti melihat kebijakan kebudayaan yang diterapkan pemerintah atas kebudayaan-kebudayaan masyarakat Using (2006). Jika pada masyarakat Using, pemerintah melakukan pengawasan, pembinaan, dan pencitraan baru, bahkan intervensi pemerintah sampai pada urusan gending-gending *gandrung*, maka intervensi pemerintah tersebut tidak terjadi pada pertunjukan kaꦁanti. Pertunjukan kaꦁanti adalah ruang yang tanpa intervensi pemerintah.

Ketiadaan intervensi pemerintah terhadap pertunjukan kaꦁanti, pada satu sisi saya nilai sebagai bentuk ketiadaan kebijakan pemerintah atas pertunjukan kaꦁanti, namun pada sisi yang lain saya melihat, mungkin ketiadaan intervensi ini merupakan bentuk kebijakan kebudayaan yang diterapkan pemerintah, yakni tidak melakukan intervensi terhadap pertunjukan kaꦁanti. Pemerintah atau penguasa memberi ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan sendiri produk kebudayaan mereka yang bernama kaꦁanti.

Kenyataan yang dialami kaꦁanti saat ini, berbeda dengan kaꦁanti pada masa lalu. Saya menduga ketiadaan kebijakan pemerintah daerah pada masa sekarang terhadap pertunjukan kaꦁanti ternyata berdampak buruk pada perkembangan kaꦁanti. Pertunjukan kaꦁanti yang merupakan pertunjukan pada acara adat dan keagamaan seyogyanya mendapat ransangan dari pemerintah atau penguasa. Tentunya, ransangan tersebut bukan dalam hal pengemasan dan pencitraan baru, tetapi dalam bentuk pengaktifan lembaga-lembaga adat yang memiliki peran besar dalam pengembangan kaꦁanti. Hilangnya berbagai lembaga adat pada masyarakat Buton ternyata turut menyeret pertunjukan kebudayaan yang bernuansa adat dan keagamaan. Oleh karena itu, intervensi pemerintah/penguasa tidak selamanya berdampak pada pelemahan budaya pertunjukan masyarakat. Justru, intervensi pemerintah—tentunya intervensi yang positif—dapat berdampak pada penguatan pertunjukan kebudayaan sebagaimana yang terjadi pada masa Kesultanan Buton.

Penyebab melemahnya pertunjukan *gandrung* pada masyarakat Using (Anoeграjekti, 2006), kekaburan hakikat tari *melemang* pada masyarakat Kepulauan Riau (Rohana, 2006: 771—797), dan intervensi pemerintah atas seni musik dan pertunjukan masyarakat Madura (Bouvier, 2002: 421) tidak secara mutlak dapat diakui sebagai faktor-faktor yang menyebabkan pertunjukan kaꦁanti menjadi melemah. Pada kasus pertunjukan *gandrung* pemerintah menerapkan kebijakan yang memberlakukan tata tertib dan kewajiban membuat penyesuaian-penyesuaian untuk menjaga nilai-nilai seni yang telah diidentifikasi dan dilegitimasi sesuai kriteria

pemerintah. Pembinaan dilakukan secara langsung dan rutin oleh penilik kebudayaan, baik yang menyangkut organisasi, administrasi maupun teknik penyajian seni.

“...Situasi seperti ini memungkinkan untuk munculnya penerapan standarisasi estetika bagi setiap peserta, seperti kostum, gending, dan penyajian tari” (hlm. 815).

“Pertunjukan *gandrung* telah menjadi produk wisata yang dikemas menjadi sebuah pentas yang atraktif, dengan menampilkan penari muda belia, waktu dipersingkat, telah kehilangan makna lokal yang tenggelam bersama hingar-bingar lagu *gandrung* yang dikonsumsi untuk tujuan pariwisata” (hlm. 817).”

Kebijakan pemerintah atas nasib pertunjukan *gandrung* sebenarnya masih dapat dimaklumi karena pertunjukan *gandrung* yang diamati Anoegrajekti adalah pertunjukan *gandrung* untuk kepentingan pariwisata. Untuk kepentingan pariwisata, pertunjukan kebudayaan yang membutuhkan waktu pertunjukan yang lama, tempat dan suasana yang khusus, memang sulit untuk dipentaskan sebagai atraksi pariwisata. Anoegrajekti tidak memisahkan pertunjukan *gandrung* yang asli dan untuk kepentingan masyarakat dengan pertunjukan *gandrung* untuk kepentingan pariwisata

Nasib yang dialami pertunjukan *gandrung* agak berbeda dengan nasib tari *melemang* di Kepulauan Riau. Tari *melemang* awalnya mendapat dukungan pemerintah dan masyarakat untuk direvitalisasi dan dikembangkan menjadi pertunjukan tari masyarakat Kepulauan Riau. Langkah-langkah revitalisasi telah dilakukan dan bahkan berhasil menghadirkan kembali komunitas tari *melemang*. Persoalan muncul ketika bentuk utuh tari *melemang* hadir ke tengah masyarakat, beberapa kelompok masyarakat yang tergabung ke dalam sanggar-sanggar justru mengadopsi tari *melemang*. Tari *melemang* diadopsi dan dimodifikasi (kreasi baru), tidak hanya bentuknya yang menjadi lebih energik, bergairah, tetapi termasuk nama tari yang kemudian dikreasi menjadi tari *tandak melemang*.

Akibatnya, bukan tari *melemang* yang kesohor dan menjadi identitas ke-Melayu-an orang Kepulauan Riau, tetapi justru tari *tandak melemang* yang menjadi identitas orang Kepulauan Riau. Dikatakan menjadi identitas karena tari *melemang* “asli” justru ditinggalkan dan tari *tandak melemang* tetap eksis dalam berbagai iven.

“Tari ini (tari *melemang*) tidak pernah dipentaskan lagi. Penarinya sebagian besar sudah kembali berkulat dengan mesin-mesin pabrik di kawasan industri Lobam. Pengurusnya telah kembali ke laut untuk menangkap udang dan ikan di Teluk Bintan yang persediaannya semakin hari semakin menipis” (Rohana, 2006: 795).

Nasib yang dialami penari dan pengurus tari *melemang* berbanding terbalik dengan penari dan pengurus tari *tandak melemang*. Rohana melihat, ada kekecewaan dari pembina tari *melemang*.

“... sejak tahun 1986, ketika Tari Melemang Tanjungpisau-Penaga dikatakan akan dilestarikan supaya dapat memberi kebanggaan kepada Riau, saya meneruskan usaha bapak untuk terus berusaha agar orang semakin mengenal tari ini. Namun, untuk mengharapkan undangan dari pemerintah sangat jarang. ... kadang saya merasa pemerintah hanya setengah hati dalam usaha melestarikan kesenian rakyat ini” (hlm. 792).

“Dulu, katanya mau mengembangkan kesenian kita. Sekarang dipakai sendiri. Ke mana-mana, dia bawa tarian Melemang. Dapat uang banyak lagi”, demikian Edi melihat perkembangan Tari Melemang yang dibawakan oleh Sanggar Sanggam (hlm. 795).

Kekisruhan yang terjadi pada tari *gandrung* dan tari *melemang* disebabkan karena kedua bentuk pertunjukan tersebut diperlakukan pemerintah sebagai atraksi pariwisata (pertunjukan *gandrung*) dan sebagai identitas ke-Melayu-an orang Kepulauan Riau (tari *melemang*). Kebijakan pemerintah yang menjadikan kedua pertunjukan tersebut sebagai pertunjukan yang eksklusif berdampak pada tingginya minat dan keinginan individu/kelompok untuk menguasai dan memiliki pertunjukan tersebut. Perselisihan yang terjadi tidak hanya antara pemerintah sebagai pemilik kebijakan, tetapi justru melebar ke perselisihan antara pelaku seni pertunjukan.

Situasi yang berbeda dengan tari *gandrung* dan tari *melemang* dapat dilihat pada seni pertunjukan pada masyarakat Madura. Pada masyarakat Madura, pertunjukan kesenian cenderung sebagai kebutuhan masyarakat setempat. Tiap-tiap pelaku pertunjukan berkesempatan menggelar pertunjukan yang dinegosiasikan dengan masyarakat yang mengundangnya, termasuk bersedia melakukan negosiasi dengan kebijakan kebudayaan yang dikehendaki oleh pemerintah.

Pertunjukan kesenian pada masyarakat Madura bukannya tanpa intervensi pemerintah, tetapi bagaimana para pelaku pertunjukan melakukan negosiasi merupakan cara efektif yang ditempuh para pelaku pertunjukan untuk tetap eksis dalam masyarakat. Seni pertunjukan dalam masyarakat Madura menjalin hubungan ganda dengan orde sosial: seni mempertahankan atau mengancam, dan tidak selalu dengan cara sengaja, langsung, atau spontan. Oleh karena itu, para penjamin orde sosial dalam suatu rezim yang tidak menerima kritik atau dalam suatu rezim yang otoriter, cukup mengenal kemampuan praktik dan pertunjukan kesenian, mereka berusaha mengendalikan kesenian itu. *Genre kesenian yang menggunakan pertuturan merupakan sasaran empuk yang harus disensor*. Kanwil Depdikbud ditugasi untuk menyensor skenario teater (Bouvier, 2002: 421).

Yampolsky (1995) menilai campur tangan pemerintah, khususnya pada persoalan pantas-tidaknya unsur-unsur pertunjukan memiliki resiko yang lebih subtansif, yakni dimensi komunal seni tradisi. Ketetapan estetika justru akan meniadakan aspek-aspek makna yang berasal tidak hanya pada suara, kata-kata, gerakan atau simbol-simbol, melainkan juga pada siapa yang mementaskan, siapa yang melihat, dan apa signifikansi lokal dari pementasan itu.

Kekhawatiran Yampolsky sangat beralasan. Sikap Pemerintah yang cenderung melakukan "sensor" atas gerak, bahasa, kostum, dan sebagainya demi estetika berdampak pada "penghilangan" makna suatu pertunjukan. Kemasan atas gerak, bahasa, kostum dan lainnya memang dapat dimaklumi sepanjang "roh" pertunjukan tidak dihilangkan.

Pada pertunjukan kabanti, intervensi pemerintah diperlukan untuk kembali menggiatkan lembaga-lembaga adat yang merupakan tempat sandaran komunitas atau pelaku pertunjukan kabanti. Pada sisi yang lain, masyarakat berkesempatan untuk tetap melestarikan pertunjukan kabanti. Upaya masyarakat memang ada, namun tidak dalam bentuk pertunjukan langsung. Pertunjukan kabanti yang semula dapat dilihat secara langsung, saat ini mulai ditransformasi ke dalam bentuk audio-visual. Masyarakat melakukan perekaman ke dalam cakram padat (*compact disk/CD*) sehingga dapat dengan mudah dinikmati oleh masyarakat di manapun berada. Cara ini memang berdampak pada semakin berkurangnya jumlah pelaku kabanti, akan tetapi hanya dengan cara ini masyarakat Buton dapat terus menikmati kabanti dan menghidupkan kembali kenangan akan masa lalu, masa ketika pertunjukan kabanti masih menjadi pertunjukan yang sakral dan eksklusif.

4. Kasus-kasus Kebijakan Kebudayaan di Indonesia: Bahan Renungan Menuju Kebijakan Pelestarian Kabanti

Kasus-kasus penerapan kebijakan kebudayaan terhadap kesenian pertunjukan di Indonesia dapat dijadikan dasar dalam menata kembali kebijakan yang tepat. Pemerintah dan masyarakat dapat membandingkan beberapa dampak kebijakan kebudayaan di tempat lain untuk melihat kebijakan kebudayaan yang selama ini telah diterapkan dalam suatu masyarakat atau baru akan diterapkan pada masyarakat setempat. Tujuannya yakni agar ketidakefektifan pemilihan kebijakan kebudayaan tidak terjadi lagi pada perumusan kebijakan kebudayaan pada masa berikutnya.

Salah satu kasus kebijakan kebudayaan yang berdampak pada melemahnya eksistensi kesenian pertunjukan dapat dilihat pada kasus seni pertunjukan di Sulawesi Selatan. Monoharto dkk. (2004) menyoroti kebijakan pemerintah setempat yang mengemas seni tradisional menjadi tontonan kaum kota dan wisata. Berbagai embel-embel identitas baru, simbol, kostum, dan riasan ditancapkan pada seni tradisi dan para pelakunya.

"Mereka "dipaksa" memakai kostum serba baru, tetapi asing. Diberi motif-motif atau tata rias—*make up* dari bahan kimia, diajari tata krama pentas dan pembatasan durasi pertunjukan, dibiasakan bergaul dengan teknologi *sound system*, tata cahaya yang sama sekali bukan budayanya. Telah terjadi intervensi yang dapat membunuh karakter aslinya. Pudar sudah suasana bersahaja, eksotis dan aslinya, keberadaannya menjadi seni kemasan" (hlm. 8).

Pengemasan seni pertunjukan seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan dan di banyak daerah di Indonesia juga mulai dirasakan di daerah Buton. Pemerintah daerah mulai menggembor-gemborkan program wisata budaya untuk mendukung wisata bawah lautnya. Mungkin saja, pengemasan seni pertunjukan menjadi pilihan pemerintah dalam "menjual" seni pertunjukan. Langkah ini tentunya tidak salah. Hanya saja, pengemasan seni tradisi seperti yang dimaksudkan Monoharto dkk. menjadikan seni itu sebagai seni yang asing bagi masyarakat setempat.

Polemik kebijakan kebudayaan tidak hanya terjadi pada daerah-daerah yang baru mengikrarkan diri untuk menjadi daerah tujuan wisata budaya. Bali misalnya, dikenal telah lama dikenal sebagai daerah tujuan wisata dengan segudang kebijakan kebudayaan untuk menata kebudayaan setempat. Akan tetapi, segudang penerapan kebijakan kebudayaan tampaknya belum mampu memberi rasa "aman" terhadap produk kebudayaan Bali yang asli.

Kebijakan pemerintah terhadap kebudayaan Bali tidak hanya menjadi bahan perhatian masyarakat Bali ataupun pemerintah Indonesia. Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, Bali bahkan ditetapkan sebagai

“museum hidup” (Picard, 2006: 55). Selain pemerintah kolonial Belanda, pemerintah Indonesia juga mencanangkan Bali sebagai daerah tujuan pariwisata. Akan tetapi, menurut Picard, kebijakan kebudayaan pemerintah Indonesia tidak memosisikan kebudayaan sebagai tradisi yang hidup dalam masyarakat. Picard menulis

“Sejak tahun 1993, pemerintah melangkah lebih jauh dengan memutuskan 27 provinsi menjadi daerah tujuan pariwisata. Dalam kaitan itu, masing-masing provinsi dianjurkan untuk mencatat objek wisata alam serta tradisi budayanya, yang kemudian dipromosikan sebagai *atraksi wisata* yang merupakan ciri khasnya” (hal. 79).

Pada bagian lain, Picard melihat ada persoalan rumit pada kebijakan kebudayaan Bali. Peningkatan kunjungan wisata yang di satu sisi memberi dampak positif bagi pendapatan masyarakat dan pada sisi lain menggerogoti atau mencemari tradisi masyarakat, melahirkan sikap ambivalen para akademisi Bali dalam penanganan kebijakan kebudayaan. Picard menulis

“... tidaklah mengherankan kalau kaum akademis Bali bersikap ambivalen: pariwisata tampak sebagai penyakit maupun sebagai obat. Sebagai sesuatu yang dibutuhkan sekaligus sesuatu yang tak dapat ditampik, pendeknya berperan selaku penggerak utama pembangunan dan perangsang modernisasi yang didamba-dambakan dan sekaligus dikhawatirkan” (hal. 189).

“Untuk menghindari ancaman “polusi kebudayaan”, orang Bali dianjurkan untuk memperkuat lembaga-lembaga adat dan keteguhan moral mereka, dengan pengertian bahwa semakin kukuh landasan pijakan—dalam hal ini dasar religius yang menjadi jati diri mereka—semakin teguh pula sikap mereka dalam menghadapi godaan-godaan yang ditimbulkan oleh uang para wisatawan” (hal. 198).

Sangat menarik membicarakan persoalan kebijakan kebudayaan yang terjadi di Indonesia. Pergumulan-pergumulan untuk menentukan arah kebijakan kebudayaan Indonesia bukanlah perkara mudah. Holt (2000) menguraikan kekisruhan pencarian identitas kesenian Indonesia. Sebagian kalangan menghendaki identitas kesenian Indonesia bersumber dari karya-karya seniman Indonesia. Padahal, tidak sedikit karya-karya seniman Indonesia justru berkiblat ke Barat (Amerika dan Eropa).

Holt mengatakan sejarah modern Indonesia dimulai pada hari kemerdekaan Indonesia. Mulai saat ini, “tradisi-tradisi baru membentuk dan juga mengambil akar”. Perdebatan akan ke mana arah seni di Indonesia semakin merebak dengan apa yang disebut perdebatan besar (polemik kebudayaan). Yang diharapkan adalah lahirnya seni (rupa) yang “tak dapat terjadi di mana-mana, kecuali di Indonesia”. Pencarian identitas nasional sering dikaitkan dengan gaya dalam seni rupa Indonesia. Mencari jati diri menjadi fenomena yang penting yang belum pernah terjadi sebelumnya selama sebelum kemerdekaan. Gaya-gaya serta ungkapan yang berbeda mulai bermunculan. Seperti Affandi dengan karya “Belajar Melukis Diri Sendiri” yang sketsanya dibuat tahun 1994 (hlm. 288—386).

Tulisan Holt ini mengkritik cara pencarian identitas kesenian Indonesia. Holt menuding, penentu kebijakan ingin menemukan kesenian yang “tak terdapat di mana-mana, kecuali di Indonesia”. Padahal, menurut Holt, para pelaku kesenian di Indonesia justru berkiblat ke Barat. Kritikan Holt diungkapkannya dengan meminjam karya Affandi “Belajar Melukis Diri Sendiri”.

Penentuan kebijakan kebudayaan banyak dipengaruhi oleh “arahan” dari pemerintah pusat. Misalnya, seperti yang dikemukakan Sedyawati (1995) dalam *Pertemuan Sastrawan IX* di Sumatra Barat. Sedyawati menyarikan amanat dasar UUD 1945 beserta penjelasannya, khususnya yang berkenaan dengan kebudayaan, sebagai berikut.

“Pemerintah harus memajukan kebudayaan nasional, sedangkan pengertian dari “kebudayaan nasional” itu sendiri mencakupi keseluruhan hasil akal-budinya bangsa Indonesia, termasuk yang berasal dari luar tetapi dianggap dapat memperkaya kebudayaan bangsa, serta juga yang berasal dari kebudayaan lama dan asli yang merupakan *puncak-puncak kebudayaan* di daerah-daerah” (hal. 145).

Frasa *puncak-puncak kebudayaan* sengaja saya tulis miring. Pada frasa tersebut, ada ketidakpahaman saya atas maksud *puncak-puncak kebudayaan*. Yang mana dan apa indikator puncak-puncak kebudayaan itu? Dugaan saya, sikap pemerintah daerah yang mengidentifikasi beberapa budaya daerah dan menjadikannya sebagai identitas suatu kelompok merupakan akibat dari pemahaman mengenai *puncak-puncak kebudayaan* ini. Istilah *puncak-puncak kebudayaan* berdampak pada sikap perlakuan berlebih-lebihan terhadap budaya yang disebut *puncak-puncak kebudayaan* dan sebaliknya menganaktirikan budaya yang tidak masuk dalam kelompok

puncak-puncak kebudayaan. Budaya yang tidak masuk ke dalam kategori *puncak-puncak kebudayaan* telah menjadi budaya “rendahan” yang kemudian mengubur dirinya.

Istilah *puncak-puncak kebudayaan* sebaiknya tidak lagi menjadi alat penyaring untuk menentukan kebudayaan yang terbaik. Pemerintah daerah tidak perlu terjebak pada istilah *puncak-puncak kebudayaan* dan tetap memperlakukan semua bentuk kebudayaan berdiri sejajar atau memperlakukan semua bentuk kebudayaan sebagai puncak-puncak kebudayaan.

Gonjang-ganjing kebijakan kebudayaan seperti yang selama ini menjadi bahan diskusi pada acara-acara bertema polemik kebudayaan, menurut Lindsay (1995: 657) disebabkan oleh dua masalah pokok, yakni *pertama* pendefinisian kembali seni-seni pertunjukan daerah (*pre-national*) menjadi suatu bentuk “tradisi” yang bisa diterima secara nasional dan *kedua*, pendefinisian dan komodifikasi budaya untuk kepentingan pariwisata. Masalah pokok yang pertama menuntut terjadinya perubahan etika dan estetika suatu seni pertunjukan yang bisa mencerminkan semangat dan gagasan nasional. Sedangkan pada masalah pokok yang kedua, Lindsay berpandangan akan terjadi perubahan fungsi, pola, dan bentuk seni-seni pertunjukan sebagai upaya memenuhi pariwisata.

Persoalan kebijakan kebudayaan dapat pula kita amati dari perkembangan kebudayaan di negara-negara tetangga. Takashi (1997) membandingkan kebijakan pemerintah Jepang dan Indonesia/Malaysia dalam memperlakukan pertunjukan tradisional. Takashi menilai pertunjukan kesenian di Kalimantan Timur dan Serawak (Malaysia) masih lebih baik dibandingkan dengan pertunjukan kesenian di Jepang. Berbeda dengan di Jepang, di Kalimantan (Sarawak dan Kalimantan Timur) kasus pada musik *Simuy* dan *Sapek* lebih oportunis dan pengaruh kebijakan pemerintah tidak terlalu besar. Oportunis yang dimaksud adalah pertunjukan *Simuy* dapat saja dimainkan di luar konteks ritual. Sedangkan, pada *Sapek*, Pemerintah Malaysia tidak terlalu mengintervensi perkembangan pertunjukan karena menyerahkan keputusannya pada masyarakat.

Tampaknya, di tengah carut-marutnya kebijakan kebudayaan yang diterapkan pemerintah Indonesia, ternyata kebijakan kebudayaan di Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan kebijakan kebudayaan di negara Jepang, setidaknya seperti itulah yang dikatakan Takashi. Namun demikian, bukan berarti bahwa karena Indonesia sedikit lebih baik dari Jepang, maka kita akan menutup mata dan membiarkan kebijakan kebudayaan berjalan tanpa pengawasan sama sekali.

5. Penutup

Pertunjukan kesenian tradisional tidak lagi hanya mengemban fungsi sebagai pertunjukan adat atau keagamaan. Lebih jauh dari itu, pertunjukan kesenian tradisional telah bergerak ke arah pertunjukan profan untuk kepentingan pariwisata. Pertunjukan kesenian mulai mentransformasi dan menegosiasikan diri dengan lingkungan baru yang melingkupinya, tidak lagi hanya menjadi milik masyarakat lokal tempat kesenian itu dipertunjukan, tetapi telah menjadi hiburan bagi banyak orang yang berasal dari berbagai daerah.

Walaupun pertunjukan kañanti belum mentransformasi diri sebagai atraksi pariwisata (kañanti keraton), tidak berarti bahwa pola pewarisan yang selama ini bergerak dalam masyarakat akan tetap dipertahankan. Rendahnya pelestarian tradisi kañanti keraton sebaiknya perlu mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat dan pemerintah daerah perlu membicarakan suatu pendekatan baru yang kontekstual, dengan mempertimbangkan perkembangan kehidupan masyarakat saat ini, tempat kañanti tersebut akan dikembangkan. Cara atau pola pewarisan lama tetap menjadi bagian yang perlu dipahami untuk melihat bagian-bagian pola pewarisan yang dapat digunakan pada masa kini dan akan datang.

Pada kasus kañanti, kebijakan pemerintah daerah atau campur tangan pemerintah setempat dalam mengaktifkan lembaga-lembaga adat dan agama sangat dibutuhkan untuk menata kembali kegiatan-kegiatan masyarakat yang mulai tidak tertata. Lembaga adat dan agama merupakan lembaga yang selama ini menjadi sandaran pelaksanaan prosesi adat dan keagamaan. Oleh karena itu, jika lembaga adat dan agama tidak berfungsi dengan baik, maka berbagai pertunjukan kebudayaan yang mengiringi kegiatan adat dan agama akan turut tidak berfungsi.

Daftar Pustaka

- Anoegrajekti, Chintya Novi. 2006. “Kesenian Using: Resistensi Komunitas Pinggir”. (Laporan Penelitian) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI. Jakarta.
- Bouvier, Helene. 2002. *La matiere des emotions. Lets arts du temps et du spectacle dans la societe madouraise (Indonesie)*. Telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul baru *Lebur! Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Holt, Claire. 2000. *Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia*. Bandung. Diterjemahkan oleh Prof. Dr. R.M. Soedarsono dari Buku berjudul *Art in Indonesia, Continues dan Change*. New York: Ithaca.
- Lindsay, Jennifer. 1995. “Cultural Policy and the Performing Arts in Southeast Asia” *BKI-IV*.
- Monoharto, Gunawan, et.al. 2004. *Seni Tradisional Sulawesi Selatan*. Makassar: Lamacca Press.

- Picard, Michel. 2006. *Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Rohana, Siti. 2006. "Tari Melemang: Mencari Identitas di Tengah Puing-Puing Sejarah" Laporan Penelitian tentang *Kebijakan Kebudayaan di Masa Orde Baru*. Pusat penelitian dan Pengembangan Masyarakat dan Kebudayaan LIPI. Jakarta.
- Salim HS, Hairus. 2006. "Pergumulan Politik Seni: Pengalaman Komunitas Tutup Ngisor". Laporan Penelitian tentang *Kebijakan Kebudayaan di Masa Orde Baru*. Pusat penelitian dan Pengembangan Masyarakat dan Kebudayaan LIPI. Jakarta.
- Sedyawati, Edi. 2007. "Pewarisan Nilai Sastra dan Moral Bangsa" dalam *Keindonesiaan dalam Budaya 1*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- 2007. "Kebijakan Pembinaan Seni Budaya di Indonesia" dalam *Keindonesiaan dalam Budaya*. Buku 1. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Takashi, Simeda. 1997. "Ritual, Pertunjukan Rakyat, dan Turisme: Kasus di Jepang dan Kalimantan. *Pertunjukan Jalanan*. Jurnal Seni Pertunjukan Indonesia, Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia Thn. VIII-1997.
- Tim Lembaga Research Kebudayaan Nasional (LRKN)—LIPI. 1984. *Kapita Selekta Manifestasi Kebudayaan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Yampolsky, Philip. "Force for Change in the Regional Performing Arts of Indonesia". Dalam *Brijdragen*. Dell 151, 1995.
- Vickers, Adrian. 2009. *Peradaban Pesisir: Menuju Sejarah Asia Tenggara*. Diterjemahkan oleh Arif B. Prasetyo. Denpasar: Pustaka Larasan.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Komisi A
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 20 Juli 2010, 14.30—16.00 wita
Judul Makalah	: Seni Pertunjukan <i>Kabanti</i> ; Soal Pewarisan Budaya dan Kebijakan Pemerintah
Penyaji/Pembicara	: Asrif, S.Pd., M.Hum.
Pemandu	: Sry Satria Catur Wisnu Sasangka, M.Hum.
Pencatat	: Syaifuddin, S.Pd.
Jumlah Peserta	: 40 orang

TANYA JAWAB

La Ode Muh. Anshari Idris (Tokoh Masyarakat Buton)

Pertanyaan/Saran

Istilah *Kabanti* di Buton intinya adalah petuah yang di dalamnya tersimpul masalah tauhid, akhlak dan tasawuf. *Kabanti*, seperti yang Saudara maksud, yang berkembang di wilayah pesisir ada yang diiringi oleh alat musik, seperti gambus, dan cenderung ke berbalas pantun. Mohon diklarifikasi apakah hal yang seperti itu dapat disebut *Kabanti*?

Jawaban/Tanggapan

Kabanti yang berkembang di luar keraton diperlakukan oleh masyarakat sebagai sebuah seni. Seni yang berkembang tersebut digabungkan dengan alat musik sehingga terdengar lebih menghibur, khususnya bagi para nelayan dan pelaut yang sedang atau sudah melaut. *Kabanti* dapat diciptakan oleh siapa saja, dipertunjukkan di mana saja, dan untuk kegiatan menghibur masyarakat awam yang tidak terbatas oleh tembok keraton, kasta, jenis kelamin, dan usia. Karena *kabanti* jenis ini berkembang di luar keraton atau tepatnya di daerah-daerah pesisir, saya menyebutnya dengan nama *kabanti* pesisir. Penamaan ini untuk membedakan jenis *kabanti* yang berkembang di tengah masyarakat luas tidak mengeksklusifkan diri hanya pada acara keagamaan, tetapi justru memainkan peran yang tidak dijamah oleh *kabanti* keraton. Dengan demikian, baik *kabanti* keraton ataupun *kabanti* masyarakat, memperoleh tempat untuk berkembang sejalan dengan lingkungan di mana *kabanti* itu berada. Adapun isi yang dikandungnya juga berasal dari berbagai macam tema, khususnya masalah kehidupan sosial dan agama.

SINTAKSIS BAHASA KODEOHA (Suatu Kajian Transformasi Generatif)

Mantiasah R.
(Universitas Negeri Makassar)

1. Pendahuluan

Bahasa Kodeoha sebagai salah satu bahasa daerah mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan dan perkembangannya dijamin oleh UUD 1945. Bahasa daerah sebagai aset budaya bangsa dapat berperan pada dunia global karena bahasa daerah dapat dipandang sebagai *cultural industry* sebagaimana negara menempatkan ekonomi dan industri dalam percaturan dunia global. Melalui bahasa daerah konsep-konsep produk budaya dapat dijadikan sarana identitas bangsa, baik dalam bidang ekonomi, diplomasi politik maupun kebudayaan.

Sejalan dengan perkembangan sejarah dan masyarakat Indonesia, terjadi implikasi sosial dalam pemakaian bahasa di masyarakat khususnya dalam penggunaan bahasa daerah. Semakin besar perubahan sosial dipicu oleh teknologi informasi dan telekomunikasi, semakin banyak bahasa dan kebudayaan asing masuk ke dalam lingkup bahasa dan budaya Indonesia. Bahasa daerah, khususnya dalam menghadapi perubahan zaman, semakin hari semakin banyak tidak dipergunakan oleh penuturnya sehingga bahasa tersebut bisa punah atau mati.

Sebagai salah satu bahasa daerah di Sulawesi Tenggara yang masih dipakai secara aktif oleh penuturnya, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat, bahasa Kodeoha digunakan juga sebagai alat komunikasi dan berfungsi sebagai alat pendukung kebudayaan daerah bagi masyarakatnya.

Bahasa Kodeoha merupakan rumpun bungkung Tolaki cabang barat yang terletak di Kecamatan Kodeoha di pesisir barat sebelah utara Kolaka. Penutur bahasa Kodeoha bermukim di empat desa dalam wilayah kecamatan Kodeoha kabupaten Kolaka bagian utara yaitu: desa Lametuna, desa Kalu-Kaluku, desa Mala-Mala, dan desa Tiwu dengan jumlah penutur ± 1500 orang. Selanjutnya, dijelaskan oleh Akriem (1999) bahwa luas wilayah Kodeoha yaitu dari arah selatan berbatasan dengan kerajaan Mekongga di Lasao, sedangkan dari arah utara berbatasan dengan kerajaan luwu. Hal ini diperjelas oleh Anderson (2000) bahwa wilayah Kodeoha berada di pesisir barat sebelah utara Kolaka dan dihuni oleh ± 1500 penduduk. Mata pencaharian masyarakat Kodeoha umumnya adalah bertani atau berkebun dan pada umumnya suku Kodeoha beragama Islam.

Penutur bahasa Kodeoha lebih banyak dipengaruhi oleh bahasa Tolaki. Perbedaan yang tampak antara bahasa Kodeoha dan bahasa Tolaki terletak pada beberapa kosakata juga cara dan irama ucapan. Jika dilihat dari segi kosakatanya, semua kata dalam bahasa Kodeoha berakhir dengan bunyi vokal serta tidak ditemukan adanya konsonan rangkap baik di awal maupun di tengah kata. Dengan melihat kosakata bahasa Kodeoha tersebut dapat dikatakan bahwa bahasa Kodeoha termasuk bahasa vokal. Hal ini yang membedakan antara bahasa Kodeoha dengan bahasa Tolaki.

Bahasa Kodeoha biasanya dikatakan lebih halus daripada bahasa Tolaki. Bahasa Kodeoha ini hanya digunakan sebagai bahasa keluarga dan lingkungan suku saja dan jika masyarakat Kodeoha melakukan interaksi dengan orang luar, penutur bahasa Kodeoha lebih banyak menggunakan bahasa Tolaki. Melihat situasi seperti ini, ada kecenderungan bahwa bahasa Kodeoha ini pun akan mengalami pergeseran dan ada kemungkinan akan lebih cepat mengalami kepunahan.

Penelitian tentang bahasa Kodeoha, baik yang menggunakan pendekatan struktural maupun pendekatan TTG untuk semua aspek kebahasaan (fonologi, morfologi, maupun sintaksis) belum pernah dilakukan. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti bahasa ini secara akurat, khususnya pada bidang sintaksis. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian awal yang memberikan pemerian yang jelas tentang sintaksis bahasa Kodeoha.

Sintaksis adalah bidang tataran linguistik yang secara tradisional disebut tata bahasa atau gramatika. Sintaksis membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata lain atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran (Chaer, 1994: 206). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Tata bahasa Transformasi Generatif (TTG). Alasan peneliti menggunakan teori Tata bahasa Transformasi Generatif (TTG) adalah karena teori TTG memiliki beberapa **keunggulan**, di antaranya adalah TTG memiliki empat prinsip yang khas yaitu tuntas, konsisten, sederhana, dan alamiah.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di sebelumnya, masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kaidah struktur frasa dalam bahasa Kodeoha?

2. Bagaimanakah kaidah leksikon dan kaidah pembentukan kata dalam bahasa Kodeoha?
3. Bagaimanakah kaidah transformasi dalam bahasa Kodeoha?

Tujuan penelitian ini adalah memberikan deskripsi tentang sintaksis bahasa Kodeoha yang lebih lengkap melalui:

1. perumusan kaidah struktur frasa;
2. perumusan kaidah leksikon dan kaidah pembentukan kata;
3. perumusan kaidah transformasi .

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan informasi mengenai sintaksis bahasa Kodeoha khususnya dalam penggunaan analisis model Transformasi Generatif.
- b. Dapat menjadi dokumen atau data kebahasaan.
- c. Menambah wawasan kita dalam usaha mengembangkan linguistik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan kontribusi bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Kodeoha.
- b. Dapat menjadi landasan atau acuan dalam penyusunan bahan ajar muatan lokal bahasa Kodeoha di Sekolah-sekolah dasar yang ada di daerah Kodeoha.

Teori tata bahasa transformasi generatif yang diterapkan dalam tulisan ini adalah '*Revised Extended Standard Theory*' yang telah dimodifikasi. Dalam tata bahasa transformasi versi ini, fungsi-fungsi gramatikal dinyatakan secara eksplisit dalam kaidah-kaidah sintaksis. Di samping itu, transformasi versi ini tetap bersifat abstrak dan dalam penerapannya lebih praktis dan cukup bermanfaat bagi peneliti di lapangan karena dapat memberikan penekanan terhadap jenjang analisis seperti kata, frasa, dan klausa. (Daly, 1981:iii). Adapun buku acuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya Usman (2004) yang diadopsi dari '*Tools for Analyzing the World's Languages: Morphology and Syntax*' karya Bickford (1998).

2. Metode Penelitian

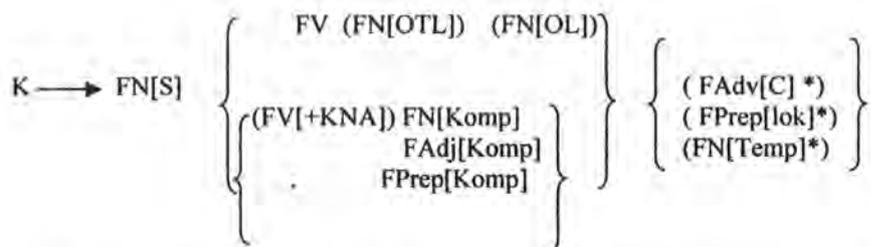
Penelitian ini bersifat deskriptif dan termasuk penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah intuisi atau kompetensi penutur asli yang dituangkan dalam bentuk wacana lisan bahasa Kodeoha berupa narasi, hortatori, ekspositori, prosedural, dan dialog. Data diperoleh dari narasumber dari tiap-tiap desa, yaitu dari desa Mala-Mala, desa Lametuna, desa Kalu-Kaluku, dan desa Tiwu. Masing-masing desa diwakili oleh dua orang narasumber.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode linguistik lapangan dan dalam pengumpulan data digunakan teknik elisitasi dan perekaman. Selanjutnya, data dianalisis dengan mengacu kepada metode analisis TTG yang telah dikembangkan oleh Bickford dan pengolahan korpus bahasa dilakukan dengan menggunakan program linguistik komputer (*computational linguistics*) *shoebox version 5.0* yang dikembangkan oleh *Summer Institute of Linguistics (SIL)*.

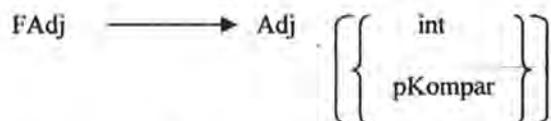
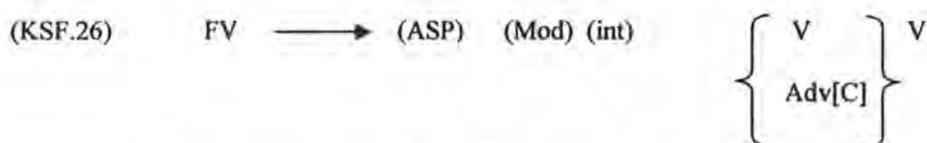
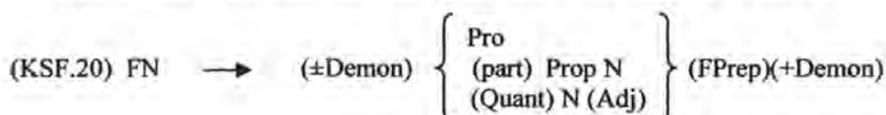
3. Hasil dan Pembahasan

Analisis data yang telah dilakukan menunjukkan hasil-hasil sebagai berikut.

- a. Ditinjau dari segi struktur kalimat, BKO memiliki tipe dasar SVO, dengan varian VSO dan VOS. Penentuan tipe dasar struktur ini berdasarkan pada frekuensi pemunculannya dalam suatu bahasa. Hal ini dibuktikan bahwa dalam BKO, hampir semua kalimat atau klausa diawali dengan FN[S]. Adapun varian struktur lainnya yaitu VSO apabila verbanya dimarkahi oleh kasus ergatif, dan VOS apabila verbanya dimarkahi oleh kasus absolutif. Kedua pemarkah kasus ini melekat pada akhir verba. Adapun kedua bentuk varian tersebut berupa bentuk turunan atau transformasi dari SVO. Berdasarkan tipe dasar ini maka BKO memiliki lima 5 (lima) macam pola dasar. Pola dasar tersebut dapat dikelompokkan ke dalam lima urutan pola dasar sebagai berikut : (1) urutan pola dasar yang terdiri atas FN[S] dan FV, (2) pola dasar yang terdiri atas FN[S], FV, dan FN[OL], (3) pola dasar yang terdiri atas FN[S], FV, FN[OL], dan FN[OTL], (4) pola dasar yang terdiri atas FN[S], FV[+KNA], dan FN atau FAdj sebagai Komp Non Aktif (KNA), dan (5) pola dasar yang terdiri atas FN[S], FV[+KNA], verbanya berupa verba gerakan atau verba keberadaan, dan FPrep sebagai Komp Non Aktif (KNA). Kelima pola dasar kalimat ini dapat diperluas dengan memasukkan oblik-oblik seperti oblik adverbial, temporal, atau lokatif.

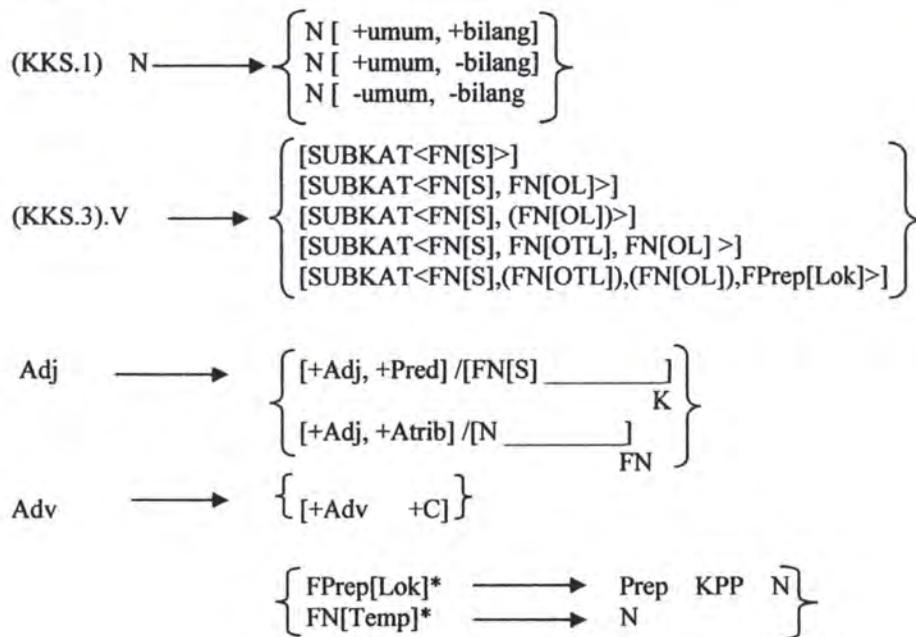


- b. Dari segi Frasa; Frasa sebagai unit tatabahasa, lebih tinggi tatarannya daripada tataran kata tetapi lebih rendah daripada tataran kalimat, merupakan pemadu kalimat, dapat terdiri atas satu kata atau kelompok kata yang berintikan salah satu kategori leksikal serta mempunyai fungsi tertentu dalam kalimat. Frasa Nomina (disingkat FN) adalah frasa yang intinya terdiri atas nomina. Frasa ini dapat berupa kata atau kelompok kata yang dapat berfungsi sebagai subjek (S), objek (OL), objek tak langsung (OTL), pelengkap (Komp). Frasa nomina yang berfungsi sebagai Komp. disebut FKomp. FV merupakan frasa yang intinya terdiri atas verba selalu berfungsi sebagai P (predikat) dalam suatu kalimat. FPrep adalah satuan sintaksis terkecil yang berintikan atau diawali dengan preposisi, berfungsi sebagai penunjuk lokatif. FPrep yang berfungsi sebagai lokatif selalu didahului oleh kata penunjuk arah (KPA) atau kata penunjuk posisi (KPP). FAdj adalah satuan sintaksis terkecil yang berintikan adjektiva, dapat berfungsi sebagai pelengkap (Komp) suatu kalimat. FAdj yang berfungsi sebagai Komp disebut FKomp. FAdv adalah satuan sintaksis terkecil yang berintikan Adverbial (Adv) digunakan sebagai yang menyatakan Cara (C) dan kadang-kadang dengan makna lain seperti Waktu dan Lokasi. Frasa adverbial yang menyatakan cara (C) disebut sebagai adverbial sejati, terdiri atas kata yang dapat dimodifikasi oleh kadar. Adverbial sejati ini sangat mirip dengan Adjektiva, dan FAdv yang menyatakan Waktu dan Lokasi pada umumnya digunakan sebagai oblik. Kaidah umum untuk struktur frasa-frasa tersebut di atas sebagai berikut :

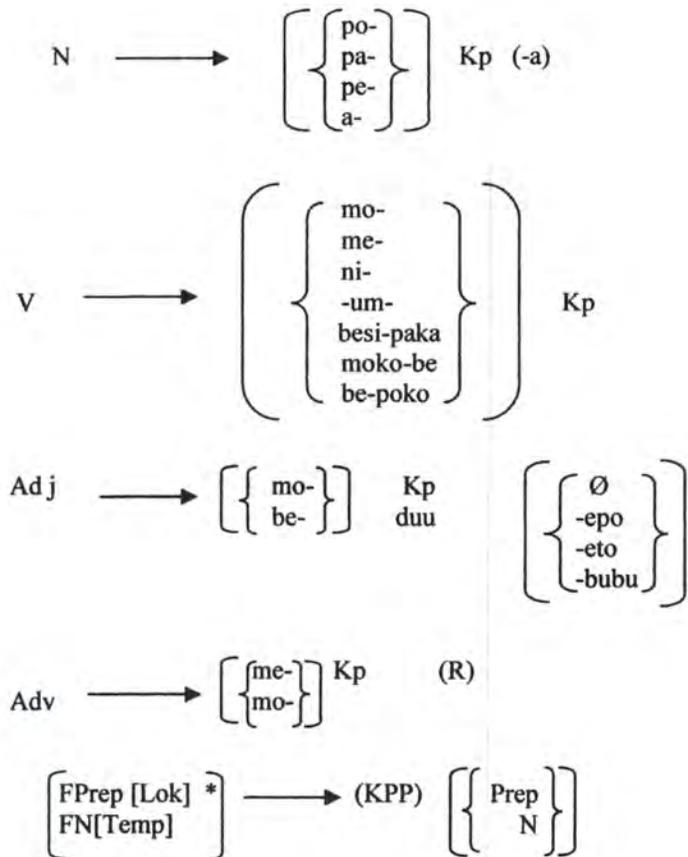


- c. Leksikon BKO, merupakan daftar kata-kata yang tepat satuan-satuan dasar yang ada dalam BKO. Tanpa leksikon, KSF yang telah dirumuskan tidak mempunyai arti apa-apa. Leksikon berfungsi untuk mengisi kategori-kategori leksikal tertentu dalam KSF untuk mendapatkan untaian akhir yang membentuk struktur batin dari suatu kalimat. Struktur batin ini menjadi masukan bagi subkomponen transformasi yang mengolahnya menjadi struktur lahir dengan menerapkan kaidah transformasi. Satuan-satuan dasar yang ada dalam BKO tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori leksikal tertentu berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki bersama, baik ciri-ciri semantis maupun ciri-ciri sintaksis. Kategori leksikal terdiri atas dua macam yaitu (a) kategori leksikal mayor, dan (2) kategori leksikal minor. Kategori leksikal mayor meliputi N, V, Adj, dan Adv. Sedangkan, kategori leksikal minor meliputi kata depan (Prep), kata penghubung (Konj), dan Det (kata penentu). Dari segi bentuknya, nomina terdiri atas dua yakni nomina pangkal (Np) dan nomina turunan. Nomina turunan dibentuk dengan menambahkan imbuhan pada kata pangkal (Kp) yang dapat berupa Np, verba pangkal (Vp), adjektif pangkal (Adjp), atau numeralia pangkal (Nump). Kata pangkal adalah bentuk kata terkecil yang menjadi dasar bagi pembentukan suatu kata, dapat juga berupa

kata turunan yang menjadi dasar pembentukan kata lain dengan menambahkan imbuhan kepadanya. Nomina BKO dibagi ke dalam dua sub kategori yaitu nomina +umum dan nomina -umum (nomina nama diri) yang masing-masing dilambangkan dengan N1 dan N2. Selanjutnya, nomina umum dibagi lagi ke dalam subkategori nomina terbilang (countable) dan subkategori nomina tak terbilang (uncountable) yang masing-masing dilambangkan dengan N3 dan N4. Verba, selanjutnya disingkat V adalah unsur wajib FV. Dari segi bentuknya, V dapat berwujud sebagai Vp dan verba turunan. Vp adalah bentuk verba yang terkecil yang menjadi asal suatu kata sedangkan verba turunan adalah verba yang dibentuk dengan menambahkan imbuhan (afiks) kepada kata pangkal (Kp) yang dapat berupa Vp, atau Np. V dalam BKO dikelompokkan ke dalam beberapa subkategori tertentu menurut ciri-ciri sintaksisnya yaitu : (1) verba bervalensi satu yaitu verba yang hanya memerlukan FN yang berfungsi sebagai subjek tanpa FN yang berfungsi sebagai objek, (2) verba bervalensi dua yaitu verba yang muncul dalam kalimat bersama dengan dua FN yang masing-masing berfungsi sebagai subjek dan objek, tanpa FN yang berfungsi sebagai objek tak langsung, (3) verba bervalensi tiga yaitu verba yang muncul dalam kalimat bersama tiga FN yang masing-masing berfungsi sebagai subjek, objek, dan objek tak langsung. (4) Verba yang selalu muncul dengan FPrep yang berfungsi sebagai Lok. Verba ini boleh bervalensi satu atau dua. Adjektiva merupakan unsur wajib FAdj. Adj juga merupakan salah satu unsur pemadu FN atau FV. Adjektiva dapat berwujud sebagai adjektiva pangkal atau adjektiva turunan adjektiva turunan dapat dibentuk dengan menambahkan afiks-afiks kepada Kp yang dapat berupa Adj_p, N_p, atau V_p. Adjektiva dalam BKO dapat dikelompokkan ke dalam subkategori-subkategori tertentu menurut ciri-ciri sintaksis yang dimilikinya, yaitu dengan melihat fungsi-fungsi sintaksis yang dapat diisinya dalam kalimat. , Adj dapat menduduki dua fungsi sintaksis utama, yaitu (1) fungsi predikatif dan (2) fungsi atributif. Adv adalah sebagai unsur pemadu dari FAdv , Adv dapat dibedakan atas 2 macam yakni Adv. **sejati** dan **oblik**. Adv sejati yakni adverbial yang menyatakan cara sedangkan oblik yakni keterangan yang menyatakan tempat terjadinya suatu peristiwa (Lok), atau keterangan yang menyatakan waktu terjadinya suatu peristiwa (Temp). Adv cara adalah satu-satunya Adv. yang mempunyai bentuk turunan yang dibentuk dengan menambahkan prefiks mo- dan atau me- kepada Kp, sedangkan oblik dalam BKO pada umumnya diisi oleh FPrep yang berfungsi sebagai Lok dan FN yang berfungsi sebagai Temp. Kaidah-kaidah untuk subkategorisasi ini sebagai berikut :



Kategori-kategori leksikal, khususnya kategori-kategori leksikal mayor terdiri atas kata pangkal dan bentuk turunan. Bentuk-bentuk turunan dibentuk dengan menerapkan kaidah-kaidah pembentukan kata (KKPK) seperti berikut:



4. Kesimpulan

Jenis transformasi yang terdapat dalam BKO ada dua yaitu : (1) transformasi pemindahan, dan (2) transformasi pelesapan. Transformasi pemindahan mencakup (a) pemindahan FV, (b) pemindahan FV disertai penambahan partikel dan intonasi khusus pada pembuatan kalimat tanya sederhana, (c) pemindahan FN[+KT], dan pemindahan FPrep[+KT] dalam pembentukan kalimat tanya informasi, dan (d) pemindahan klausa disertai pengubahan V dengan fitur +ERG pada pembuatan kalimat sematan, dan (2) transformasi pelesapan yaitu pelesapan FN[persona 2] pada pembuatan kalimat perintah.

Adapun kaidah-kaidah transformasi dalam BKO dapat dilihat sebagai berikut :

(KTr.1) Pemindahan FV (opsional)

Ambil FV dan pindahkan ke awal kalimat.

(KTr.2) Pemindahan V dalam Pertanyaan (opsional)

Ambil [+V] dan letakkan di awal K disertai intonasi khusus

(KTr.3) Pemindahan FN[+KT] (opsional)

Pindahkan FN[S, +KT] ke depan V

(KTr.4) Pemindahan FPrep[+KT] (opsional)

Pindahkan FPrep[Lok, +KT] ke depan V

(KTr.5) Pelesapan Subjek Imperatif (opsional)

Dalam [K FN[persona 2] V[+imperatif]...] :Lesapkan FN[persona 2]

(KTr.6) Pemindahan Klausa (wajib)

Sematkan klausa ke dalam FN[S], V dengan fitur [+Erg], kemudian pindahkan Demon setelah FV dalam klausa sematan

5. Saran

Penelitian tentang Sintaksis Bahasa Kodeoha ini merupakan penelitian awal tentang bahasa tersebut. Oleh karena itu penelitian lanjutan oleh pemerhati bahasa khususnya pemerhati bahasa daerah masih sangat diperlukan, karena masih banyak aspek dari bahasa tersebut yang belum pernah tersentuh tangan peneliti, seperti aspek fonologi, morfologi, semantik, dan lain sebagainya.

Mengingat bahwa masih banyak aspek-aspek bahasa atau rahasia-rahasia bahasa khususnya dalam bahasa Kodeoha yang masih belum terungkap maka disarankan kepada peneliti berikutnya untuk tetap menggunakan teori TTG ini karena seperti diketahui bahwa teori TTG mampu mengungkap rahasia-rahasia dari suatu bahasa. Kepada para ahli bahasa dan atau penentu kebijakan dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional agar dapat menyebarluaskan atau menjadikan bahasa Kodeoha sebagai salah satu bahasa yang diajarkan di Sekolah-sekolah sebagai mata pelajaran muatan lokal di daerah kecamatan Kodeoha pada khususnya dan daerah Kolaka bagian Utara pada umumnya. Dengan demikian, *kekhawatiran* akan punahnya bahasa Kodeoha ini akan hilang.

Daftar Pustaka

- Akriem, Abdul Djilil. 1999. *Pemekaran Wilayah dalam tinjauan sejarah dan Budaya*. Makala, Kolaka.
- Bickford, J. Abert. 1998. *Tools for Analyzing the World's Languages: Morphology and Syntax*. Summer Institute of Linguistics, USA.
- Chaer, Abdul. 1994. *Linguistik Umum*. Bineka Cipta, Jakarta
- Usman, Moses. 2004. *Alat Penganalisis Bahasa-bahasa di Dunia: Morfologi dan Sintaksis*. Diadopsi dari *Tools for Analyzing the World's Languages: Morphology and Syntax*, UNHAS, Makassar.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Komisi D
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 20 Juli 2010, 16.00 – 17.30
Penyaji/Pemakalah	: Dr. Mantasiah Rifai
Judul Makalah	: Sintaksis Bahasa Kodeoha
Pemandu	: Ramlah Mappau, S.S., M. Hum.
Pencatat	: Asri, S.S., M. Hum.
Jumlah Peserta	: 40 orang

TANYA JAWAB

T. David Anderson (Australia)

Pertanyaan/Saran

Bagaimana kesan Ibu mengenai penutur bahasa Kodeoha, apa mereka homogen, apakah mereka optimis mengenai kelangsungan bahasa Kodeoha?

Jawaban

Penutur bahasa Kodeoha yang berjumlah 1500 orang mulai berkurang, penutur malu menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Mereka lebih cenderung menggunakan bahasa daerah lain (bugis) karena mereka menganggap bahasa bugis lebih berprestise dibandingkan bahasa daerahnya.

Drs. B. Trisman, M. Hum.

Pertanyaan/Saran

Adakah sekolah yang menerapkan muatan lokal di sana sebagai upaya pelestarian bahasa Kodeoha?

Jawaban

Ada beberapa sekolah dasar yang menerapkan bahasa daerah sebagai muatan lokal tetapi muatan lokalnya adalah bahasa Tolaki bukan bahasa Kodeoha.

NILAI ETIKA DAN KESANTUNAN DALAM BERBAHASA DAERAH¹

Hilaluddin Hanafi²

(Universitas Haluoleo, Kendari)

1. Pengantar

Bahasa daerah yang hidup dan berkembang di Indonesia mencapai 741 bahasa. Sebagian kecil bahasa daerah tersebut berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah lebih dari 15 bahasa, termasuk bahasa daerah pendatang.

Keberagaman bahasa daerah yang ditopang oleh keberagaman etnis dan tradisi menandakan kekayaan budaya yang dimiliki oleh tiap daerah termasuk daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Keberagaman bahasa ini perlu dipelihara dan dilestarikan sebagai identitas serta jati diri bangsa dan daerah. Dalam pasal 32 UUD 1945 sudah jelas dinyatakan bahwa "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional".

Tulisan ini memfokuskan perhatian pada nilai etika dan kesantunan dalam berbahasa daerah khususnya Bahasa Bugis di Sulawesi Tenggara. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh keadaan masyarakat kita Sulawesi Tenggara khususnya dan Republik Indonesia umumnya telah meminimalkan penggunaan bahasa daerah khususnya Bahasa Bugis. Menurut penulis, meminimalkan penggunaan tidak apa-apa, tetapi yang terjadi di masyarakat lebih dari meminimalkan, yaitu munculnya perasaan rendah diri, kurang keren, perasaan lucu sendiri jika menggunakan bahasa daerahnya, dalam hal ini Bahasa Bugis secara khusus. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada masukan dari ilmuwan dan pemerintah tentang bahasa daerah kita, ke depan Bahasa Bugis secara khusus dan bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara secara umum akan lenyap di telan zaman (globalisasi).

Tulisan ini akan membuat pembaca dan masyarakat berpikir mengapa bahasa daerah sangat penting untuk kita lestarikan? Apakah kekuatan bahasa daerah yang sesungguhnya? Apakah cuma sebagai identitas dan jati diri suatu etnis dan pemer kaya khazanah budaya bangsa atau ada yang lain?

2. Nilai Etika dan Kesantunan dalam Berbahasa Daerah

Burhanuddin Salam (1987:1) menyebutkan bahwa etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan nilai dan norma moral tersebut. Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Seorang akademisi dan rohaniawan Murni Suseno mengatakan bahwa etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Etika justru hanya melakukan refleksi kritis atas norma atau ajaran moral tersebut atau kita juga bisa mengatakan bahwa moralitas adalah petunjuk konkrit yang siap pakai tentang bagaimana kita harus hidup. Etika juga merupakan perwujudan dan pengejawantahan secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap pakai. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi kita orientasi bagaimana dan ke mana kita harus melangkah dalam hidup ini. Tetapi bedanya moralitas langsung mengatakan kepada kita; inilah caranya Anda harus melangkah. Sebaliknya etika harus mempersoalkan; apakah saya harus melangkah dengan cara itu dan mengapa harus dengan cara itu? (Salam, 1987: 2).

Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena setiap tindakannya selalu lahir dari keputusan pribadi yang bebas dengan selalu bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakannya itu, karena memang ada alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang kuat mengapa ia bertindak begitu. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalankan hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang patut dilakukan. Oleh karena itu etika merupakan bagian dari wujud pokok budaya yang pertama yaitu gagasan atau sistem ide. Menyangkut masalah budaya atau kebudayaan di sini, bukan berarti budaya dalam arti yang sempit, yang hanya bergerak dalam tataran seni (*art*) seperti seni tari, seni rupa, seni pahat, seni suara, seni suara atupun seni drama. Namun menyangkut tentang hal ikhwal terkait dengan hajat hidup manusia sebagai makhluk sosial dalam hal ini penggunaan bahasa daerah.

¹ Makalah ini disampaikan pada Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara

² Penulis adalah dosen pada Prog. Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Haluoleo.

Bahasa menjadi ciri identitas satu bangsa. Melalui bahasa orang dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat, bahkan dapat mengenali perilaku dan kepribadian masyarakat penuturnya. Oleh karena itu, masalah kebahasaan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat penuturnya, (Sugono dalam Sukmawati, 2006: 1).

Kesantunan dalam bertutur menurut Brown dan Levinson (1978/1987); Leech (1983); Sachiko Ide (1989) sangat penting diperhatikan dalam kehidupan sosial untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi dalam setiap interaksi komunikasi. Namun, kesantunan dalam bertutur diterapkan secara berbeda pada setiap kebudayaan karena setiap teks tidak bisa terlepas dari konteksnya.

Bahasa daerah sebagai komponen budaya merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang hidup dan berkembang yang harus dijaga kelestariannya. Bahasa Bugis merupakan salah satu bahasa yang terdapat di Sulawesi Tenggara. Dalam penggunaan bahasa daerah sikap penutur harus selalu memperhitungkan kepada siapa ia akan bicara, dimana, dan mengenai apa.

Etika falsafah atau hukum membedakan hal yang baik dan yang buruk dalam kelakuan manusia, sedangkan moral adalah ukuran baik buruknya tingkah laku yang menyangkut pengontrolan diri, keyakinan diri, dan kedisiplinan tindakan (Dreyer dalam Oktavianus, 2006: 126). Adapun kesopanan/kesantunan dalam bahasa mencerminkan tingginya peradaban suatu bangsa atau tingginya martabat seseorang (Poedjosoedarmo, 2001: 186), dalam bahasa Bugis dapat dilihat dari ungkapan berikut:

"nikny sulapaka appakna tauw aymitu ni sirin niy pecen niy pGlin n niy pdGkn nikanaya sulapak appakna tau, iamintu niak sirikna, niak paccena, niak pangngalikna, na niak panngadakkanna"
(artinya "yang disebut kesegiempatan manusia ialah manusia yang memiliki harga diri, rasa kesetiakawanan, menghargai orang lain, dan memiliki sifat sopan santun").

Etika dan kesantunan dalam berbahasa khususnya bahasa daerah Bugis sangat nampak dan jelas. Hal inilah yang menurut penulis berbeda dengan bahasa Indonesia, apalagi dengan bahasa asing, khususnya Bahasa Inggris. Menurut penulis pada umumnya penutur Bahasa Bugis menggunakan dua cara yang berhubungan dengan etika dan kesantunan dalam berbahasa, yaitu 1) menggunakan *pemmali* (pamali); 2) menggunakan sistem sapaan; dan 3) menggunakan kata 'iye'. Berikut penulis deskripsikan etika dan kesopanan dalam bahasa Bugis.

3. Penggunaan *Pemmali*

Pemmali merupakan istilah dalam masyarakat Bugis yang digunakan untuk menyatakan larangan kepada seseorang yang berbuat dan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai, tetapi larangan ini bersifat tidak langsung. *Pemmali* dalam Bahasa Bugis terdiri atas dua macam yaitu a) *pemmali* bentuk perkataan dan b) *pemmali* bentuk perbuatan atau tindakan.

Contoh *Pemmali a* :

- 1) balawo 'tikus' (mengakibatkan gagal panen) kata ini diganti dengan '*punnah tanae*' artinya penguasa tanah.
- 2) buaja 'buaya' (dapat menyebabkan sang makhluk marah) kata ini diganti dengan '*punna uwa'e*' 'penguasa air'

Contoh *Pemmali b* :

- 1) *Riapemmalianggi ana' darae makkelong ri dapurengnge narekko mannasui* 'pantangan bagi seorang gadis menyanyi di dapur apabila sedang memasak atau sedang menyiapkan makanan' (akibat jika larangan ini dilanggar gadis tersebut akan mendapatkan jodoh yang sudah tua).
- 2) *Riapemmalianggi matindro esso tau'e ri sese denapa natabbawa ujuna tau mate engkari bali bolata* 'pantangan orang tidur siang jika jenazah yang ada di tetangga kita belum diberangkatkan ke kuburan.

Berdasarkan contoh-contoh di atas dapat diketahui bahwa *pemmali* adalah merupakan nilai budaya yang sarat dengan muatan pendidikan. *Pemmali* ini merupakan penggunaan bahasa beretika dan secara santun, menegur terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang (suku Bugis) yang melakukan perbuatan yang tidak baik tetapi tidak secara langsung pada lawan bicara. Dengan menggunakan *pemmali* orang yang ditegur atau dilarang melakukan sesuatu tidak merasa tersinggung.

4. Penggunaan Sapaan

Bahasa Bugis memiliki sistem sapaan yang berhubungan dengan kesantunan berbahasa artinya jika sistem sapaan ini tidak dipergunakan dalam berkomunikasi, pembicara/penutur dianggap kurang sopan, atau dianggap kurang ajar dan lain-lain. Contoh:

1. Sapaan Berdasarkan Umur
Daeng "kakak kandung atau orang yang lebih tua dari penutur yang banyak berjasa pada penutur".
Puang "orang tua kandung atau sapaan orang yang tua dan berperangai baik dan berpendidikan".
2. Sapaan Berdasarkan Kedudukan
Andi "orang kaya yang dermawan dan bijaksana"

5. Penggunaan Kata 'Iye'

Kata *iye* untuk menggantikan kata 'ya' dalam bahasa Indonesia, merupakan kata yang santun dalam menjawab pertanyaan yang bisa dijawab dengan 'ya' dalam bahasa Indonesia. Tetapi penggunaan *iye* ini digunakan oleh penutur yang lebih rendah umurnya, jabatannya, pendidikannya dibandingkan lawan tuturnya.

Daftar Pustaka

- Christomy, T. & Untung Yuwono. (Peny.) 2004. *Semiotika Budaya*. Kampus UI Depok: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya.
- Eelen, Gino. 2001. *Kritik Teori Kesantunan*. Abdul Syukur Ibrahim (Ed.) Surabaya: Airlangga University Press.
- Fairclough, Norman. 1992. *Discourse and Sosial Change*. Dalam Linguistik Indonesia, Tahun ke 24 (1) 2006.
- Haliday, Hasan. 1994. Bahasa, Konteks, dan Teks. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
(http://id.wikipedia.org/wiki/bahasa_indonesia)
<http://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/bahasa-daerah-semakin-punah/>
- Kramsch, Claire. 1998. *Language and Culture*. Oxford: Oxford University Press.
(www.facebook.com/topic.php?uid=68399574870&topic=16730 'Forum Komunikasi Mahasiswa Bone _Yogyakarta FKMB-Y').

PERUBAHAN MAKNA PUNGUTAN KATA BAHASA ARAB DALAM BAHASA WOLIO

Firman A.D.

(Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)

1. Pendahuluan

Dalam pertumbuhan dan perkembangan sebuah bahasa tidak terlepas dari kontak bahasa, khususnya bahasa asli setempat dengan bahasa pendatang. Kontak bahasa yang terjadi antara dua atau lebih bahasa bisa saling memengaruhi, baik dari segi tata bahasa, pembentukan, pemaknaan, pengucapan, dan penyerapan kata atau istilah. Tidak ada satu bahasa di dunia yang terlepas dari pengaruh bahasa atau dialek lain. Misalnya, ada beribu-ribu kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Bahasa Inggris yang melengkapi dan memperkaya Bahasa Indonesia.

Kontak bahasa akan melahirkan berbagai macam peristiwa kebahasaan. Masyarakat tutur yang terbuka, artinya, yang mempunyai hubungan dengan masyarakat tutur lain, tentu akan mengalami kontak bahasa. Peristiwa-peristiwa kebahasaan sebagai akibat adanya kontak bahasa itu adalah apa yang dalam sosiolinguistik disebut *bilingualisme*, *diglosia*, *alih kode*, *campur kode*, *interferensi*, *integrasi*, *konvergensi*, dan *pergeseran bahasa* (Chaer dan Agustina, 2004: 84).

Masuknya ajaran agama Islam di Buton telah mengubah status Kerajaan Buton menjadi kerajaan Islam. Menurut Malim (1961: 7—8) Islam mulai memasuki Kerajaan Wolio (Buton) di awal abad ke-15. Pada tahun 1412 M, Raja Mulae Sangia i Gola mendengar berita bahwa ada seorang penyiar agama di pantai timur Buton. Baginda mengundang penyiar itu dan langsung beliau masuk Islam, tetapi masyarakat belum diajak serta dan belum ikut memeluk Islam. Pada tahun 1564 M, jadi sekitar 400 tahun yang lalu, dengan pimpinan Abdul Wakid bin Syarif Sulaiman dari Djohor, barulah Raja Wolio (Sultan Murhum-Sultan Buton yang pertama) dengan seluruh rakyat memeluk agama Islam. Pemeluk agama itu disertai dengan usaha pendalaman yang keras.

Ketika Kerajaan Buton berada pada masa kejayaannya, Bahasa Wolio menjadi bahasa resmi kerajaan. Pengaruh bahasa Arab masuk ke dalam Bahasa Wolio bersamaan dengan masuknya ajaran Islam ke Pulau Buton. Bentuk tulisan Bahasa Wolio diambil dari huruf Arab-Melayu yang disebut *Buri Wolio*. Kosakata dalam Bahasa Wolio banyak menyerap kosakata dari Bahasa Arab dan Bahasa Melayu. Kosakata yang diserap tersebut mengalami proses adaptasi fonologis ke dalam Bahasa Wolio yang berciri bahasa vokalis.

Kata sebagai satuan dari perbendaharaan kata sebuah bahasa mengandung dua aspek yaitu aspek bentuk dan aspek makna. Sesuai dengan judul makalah ini akan diuraikan secara ringkas perubahan makna yang terjadi dalam pungutan kata Bahasa Arab dalam Bahasa Wolio.

Menurut Chaer (2003: 310—311), secara sinkronis makna sebuah kata atau leksem tidak akan berubah; tetapi secara diakronis ada kemungkinan dapat berubah. Dalam masa relatif singkat, makna sebuah kata akan tetap sama, tidak berubah; tetapi dalam waktu yang relatif lama ada kemungkinan makna sebuah kata akan berubah. Namun, perubahan tersebut kemungkinan tidak berlaku untuk seluruh kosakata dalam sebuah bahasa, bisa saja hanya terjadi pada beberapa kosakata saja.

Ada istilah yang umum kita dengar bahwa makna itu ada di balik kata. Jika berbicara mengenai makna, salah satu bidang linguistik yang bersinggungan dengan hal tersebut adalah semantik. Keraf (1987: 95—96) mengemukakan bahwa ketepatan suatu kata untuk mewakili suatu hal, barang atau orang, tergantung dari makna, yaitu relasi antara bentuk (istilah) dengan pengarahannya (referennya). Kenyataan lain yang juga dihadapi oleh setiap pemakai bahasa adalah bahwa makna kata tidak selalu bersifat statis. Dari waktu ke waktu, makna kata dapat mengalami perubahan sehingga akan menimbulkan kesulitan baru bagi pemakai yang terlalu bersifat konservatif. Oleh karena itu, untuk menjaga agar pilihan kata selalu tepat, setiap penutur bahasa harus selalu memperhatikan perubahan-perubahan makna yang terjadi.

Perubahan makna itu tidak saja mencakup bidang waktu, tetapi dapat juga mencakup persoalan tempat. Sebuah kata dengan arti yang mula-mula dikenal oleh semua anggota masyarakat bahasa, pada suatu waktu akan bergeser maknanya pada suatu wilayah waktu tertentu, sedangkan wilayah-wilayah lainnya masih tetap mempertahankan makna yang asli.

2. Perubahan Wilayah Makna Pungutan Kata Bahasa Arab

Perubahan makna kata atau leksem ada beberapa macam di antaranya perubahan yang meluas dan perubahan yang menyempit. Menurut Ullmann dan Allan (dalam Ruskhan, 2000: 78), perluasan dan penyempitan makna itu sebetulnya terjadi sebagai akibat dari perubahan wilayah makna. Berikut akan dikemukakan kedua jenis perubahan wilayah makna tersebut.

a. Perluasan Makna

Perluasan makna menyangkut makna ujaran yang lebih luas daripada makna yang terkandung dalam bahasa modelnya. Perhatikan data berikut.

- (1) *Aana-aana humai yinda matau adati.*
(Anak-anak itu tidak tahu adat.)

Kata *adati* dipungut melalui pungutan kata bahasa Arab *adat* (عادة). Kata *adat* (عادة) di dalam bahasa modelnya bermakna 'biasanya atau kadang-kadang'. Namun dalam bahasa penerima kata tersebut bukan hanya bermakna suatu hal yang biasa dilakukan, melainkan lebih luas dari itu, yakni aturan yang lazim diikuti atau dilakukan oleh orang-orang sejak dahulu kala. Demikian juga kata *ahali*, di dalam bahasa asalnya, *ahli* (أهل) bermakna 'pengikut atau keturunan', dipungut ke dalam bahasa penerima dengan makna mahir, di samping bermakna keturunan dan paham sekali dalam suatu hal ilmu, sehingga kata *ahali* mengalami perluasan dalam bahasa penerima. Jadi, dalam kalimat tersebut kata *adat* dapat bermakna orang/anak-anak yang tidak tahu aturan.

Kata *alamatina* dipungut dari bahasa modelnya *alamat* (علامة). Kata tersebut juga pungutan kata yang mengalami perluasan makna. Kata *alamatina* bermakna 'tanda', baik dalam bahasa modelnya maupun bahasa penerima. Namun, dalam bahasa penerima *alamatina* juga bisa berarti nama tempat tinggal seseorang. Kedua makna tersebut dalam bahasa penerima dapat dilihat dalam kalimat berikut.

- (2) *Ande akomingku biwita, alamatina betapogera.*
(Kalau bergerak bibir kita tanda akan bertengkar.)
(3) *Iapai alamatina i Jupanda?*
(Di mana alamatnya di Ujung Pandang?)

Kata *haku* juga berasal dari bahasa Arab *hak* (حق) yang bermakna 'benar', baik itu di dalam bahasa sumber maupun bahasa penerima. Akan tetapi, di dalam bahasa penerima, *hak* mengalami perluasan makna, yaitu makna milik.

- (4) *A kohaku duka incia a harataa ibolina mancuanaana.*
(Berhak juga ia pada peninggalan orang tuanya.)
(5) *Fakawaka yifadangu mohusara tamatoumea kahaku tee kabatili yidunia.*
(Jika kita tiba di tempat berkumpul pada hari kiamat, kita akan mengetahui kebenaran dan keburukan di dunia.)

Khilafu juga kata pungutan kata bahasa Arab dari kata *khilaf* (خلاف) yang bermakna 'perbedaan'. Di dalam bahasa penerima *khilafu* bermakna 'keliru; salah yang tidak disengaja'. Maksudnya adalah perilaku yang berbeda dari aturan yang ada dan perilaku itu dianggap keliru yang dilakukan dengan tidak sengaja.

- (6) *A emani maafu roonamo akhilafu.*
(Meminta maaf karena khilaf/keliru.)

Di dalam bahasa modelnya, *fakir* (فقير) bermakna orang yang tidak berharta; serba kekurangan. Kata ini hampir sama maknanya dengan *miskin* (مسكين). Kata *miskin* bermakna orang yang tidak berharta, tetapi punya penghasilan dan penghasilan tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi, di dalam bahasa penerima kata *fakiri* dan *miskini* memiliki makna yang sama, yaitu orang yang tidak berharta, serba kekurangan. Biasanya kata *fakir* selalu diikuti dengan kata *miskin* menjadi fakir dan miskin. Jadi di dalam bahasa penerima kata fakir mengalami perluasan makna. Berikut contoh dalam kalimat.

- (7) *Fakiri bemo tarimana kadawuna rangkaya.*
(Orang miskin yang akan menerima pemberian orang kaya.)

b. Penyempitan Makna

Ada beberapa kata bahasa Arab yang juga mengalami penyempitan setelah dipungut ke dalam bahasa Wolio. Beberapa data berikut yang menggambarkan keadaan tersebut.

- (8) *Nea kamata kainawa okapute, sukurumo iopu momalangan, osiitumo buruhani momalape.*
(Jika melihat cahaya terang yang putih, sukurlah pada Tuhan yang Mahatinggi, itulah pertanda yang baik.)
(9) *Rohina itu tuladana haliki, rohimo itu amboore ibarajaza.*
(Roh itu banyangan sang pencipta, roh itulah yang tinggal di alam barzah.)

- (10) *Juaaka togasaka nafasimu, bolialimba duka apesua. Osiitumo ksbungkalena hijabu.*
(Yang kedua, tahan napasmu, jangan keluar dan juga jangan masuk. Itulah pembuka **hijab**.)
- (11) *Mincuanapo isarongi ahafili nee sabutuna ahafili quraani.*
(Belumlah dinamakan **penghafal** kalau hanya **menghafal** Al-Quran.)
- (12) *Inda saha tauhidli imani tee sia-sia osaronaka Isilamu nea nainda bea tandai opuna.*
(Tidak sah **tauhid** iman dan sia-sia mengaku Islam kalau tidak mengenal Tuhannya.)
- (13) *Sahabatina kapaaisa i tana.*
(**Temannya** membawa turun jemuran ke tanah.)
- (14) *Nee upeelu beu matau sarona saorangomo ieono hutuba.*
(Jika ingin engkau tahu namanya dengar saja saat **khotbah**.)

Kata *buruhani* berasal dari kata *burhan* (برهان) yang bermakna bukti, sedangkan di dalam bahasa penerima kata *buruhani* merupakan istilah dalam agama Islam yang berarti tanda yang nyata dan bukti dari Allah swt. Kata *haliki* dalam bahasa model *khaliq* (خالق) bermakna pencipta, maksudnya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan untuk agama apa pun. Namun, di dalam bahasa penerima kata *haliki* sebagai pewatas yang menunjukkan penyempitan makna yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi.

Kata *hijabu*, berasal dari kata *hijab* (حجاب), di dalam bahasa asalnya bermakna 'pembatas'. Di dalam bahasa Wolio kata itu hanya digunakan dalam istilah agama Islam, yaitu dinding pembatas antara laki-laki dan perempuan, dinding yang membatasi hati manusia dengan Allah. Kata *hafili* (hafal) dipungut dari pungutan kata dari bahasa Arab modelnya *HiFD* (حفظ) yang bermakna menjaga, memelihara, dan menghafal. Namun, di dalam bahasa penerima, kata *hafili* menunjukkan penyempitan makna yaitu 'masuk dalam ingatan.'

Tauhidli adalah kata pungutan dari bahasa Arab, *tauhid* (توحيد) yang bermakna 'persatuan', 'pengesaan'. Di dalam bahasa penerima, kata *tauhidli* dipakai untuk istilah agama Islam saja yang maknanya 'keesaan Allah, kuat kepercayaan bahwa Allah itu satu'. Kata *sahabati*, pungutan dari bahasa Arab dari kata *sahabat* (صحابة), bermakna 'sahabat, rekan, perkumpulan, pengikut'. Namun, di dalam bahasa penerima terjadi penyempitan makna, kata *sahabati* hanya bermakna 'kawan akrab', 'teman akrab'.

Kata *hutuba* (khotbah) juga dipungut dari infinitif *KhuTBah* (خطبة). Kata ini diturunkan dari verba *KhaTaB* (خطب). Kata *hutuba* dalam bahasa modelnya bermakna 'pidato, orasi'. Kemudian dipungut ke dalam bahasa Wolio terdapat penyempitan makna, yakni berpidato tentang ajaran agama.

3. Perubahan Makna karena Evaluasi atau Konotasi Pungutan Kata Bahasa Arab

Perubahan makna karena evaluasi atau konotasi muncul pada penutur karena akibat penilaian afektif atau emosional. Perubahan makna ini meliputi ameliorasi dan peyorasi.

a. Ameliorasi

Ameliorasi adalah perubahan makna yang mengakibatkan sebuah ungkapan menggambarkan hal yang lebih baik dari semula, misalnya kata 'wanita' sekarang mempunyai arti hormat, dulu hanya berarti yang diinginkan (Kridalaksana, 2001: 12). Perubahan makna dalam pungutan bahasa Arab yang berkaitan dengan nilai rasa yang membaik (ameliorasi) ditemukan dalam pungutan kata. Data berikut adalah contohnya.

- (15) *O umina daangia i Jakarta.*
(**Ibunya** masih di Jakarta.)
- (16) *Kandawuna oto i awi pitu wati wafati.*
(Kecelakaan kemarin menyebabkan tujuh wakil kepala desa **wafat**.)

Kata *umi* merupakan pungutan kata bahasa Arab dari kata *um* (أم) yang hanya memiliki arti 'ibu'. Namun, setelah dipungut ke dalam bahasa Wolio kata tersebut mengandung nilai rasa yang membaik. Dalam *Kamus Wolio-Indonesia* dikemukakan makna kata *umi* yaitu panggilan untuk ibu (hanya dipergunakan bagi yang berkedudukan tinggi). Panggilan *umi* hanya diperuntukkan bagi ibu yang dianggap memiliki strata sosial yang tinggi (terhormat). Berdasarkan makna tersebut dapat dikatakan bahwa kata *umi* mengandung nilai rasa yang lebih baik dalam bahasa Wolio.

Data ameliorasi lainnya dapat dilihat pada kata *wafati* yang berasal dari kata *wafat* (وفاة). Makna kata *wafati* (wafat) adalah meninggal dunia khususnya bagi orang terhormat, seperti raja atau orang-orang besar ternama. Dalam bahasa modelnya, kata *wafat* (وفاة) hanya bermakna 'kematian, ajal, atau akta keterangan kematian' dan bersinonim dengan kata *mata* (مات) artinya 'mati'. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa makna kata *wafati* dalam bahasa penerima mengandung nilai rasa yang membaik dibandingkan dengan nilai rasa dalam bahasa sumbernya.

b. Peyorasi

Peyorasi adalah perubahan makna yang mengakibatkan sebuah ungkapan menggambarkan sesuatu yang lebih tidak enak, tidak baik, dan sebagainya; misalnya kata 'perempuan' sudah mengalami peyorasi karena dulu artinya 'yang menjadi tuan'. (Kridalaksana, 2001: 173). Pungutan kata yang mengandung nilai rasa yang menurun atau peyorasi dikemukakan seperti dalam data berikut.

(17) *Rohi namu opuana oana siimpo molahirina.*

(Roh neneknya ada pada anaknya yang baru lahir.)

(18) *Boli u kofeeli jahanamu!*

(Jangan angkat berbuat jahat!)

Kata *rohi* berasal dari kata *ruh* (روح). Kata *ruh* (روح), dalam bahasa asalnya, bermakna nafas, jiwa, roh, atau roh suci. Kata tersebut dalam bahasa penerimanya mengalami penurunan nilai rasa karena kata tersebut hanya merujuk ke roh orang yang telah meninggal dunia (roh manusia). Kata *roh* di sini mengalami penyempitan makna. Jadi, pungutan kata *rohi* mengalami penurunan nilai rasa (peyorasi) karena terasa lebih memiliki nilai rasa yang kurang baik, misalnya penggunaan istilah dalam bahasa Wolio *rohi madaki* (roh jahat).

Pada contoh berikutnya, kata *jahanamu* (jahanam) berasal dari kata *jahanam* (جهنم) juga mengandung nilai rasa yang menurun. Dalam bahasa modelnya, *jahanam* (جهنم) hanya merujuk ke salah satu nama neraka di akhirat. Namun, dalam bahasa penerima kata tersebut bukan hanya merujuk ke nama neraka saja, melainkan juga merujuk ke sifat atau tingkah laku negatif. Dalam agama Islam, neraka Jahanam adalah neraka yang paling di bawah atau tempat bagi orang-orang yang paling berdosa atau neraka yang peling kejam siksaannya di antara neraka-neraka lain. Penggunaan kata *jahanamu* dalam bahasa penerima seolah-olah memvonis seseorang karena kelakuannya yang lebih pantas berada di neraka Jahanam. Jadi, pungutan kata *jahanamu* (jahanam) mengalami penurunan nilai rasa karena memiliki nilai rasa yang kurang baik.

4. Perubahan Makna karena Makna Majasi dalam Pungutan Kata Bahasa Arab

Kata bahasa Wolio yang berbentuk pungutan kata bahasa Arab yang menyangkut perubahan makna karena majasi hanya ditemukan bentuk metafora atau kiasan dan metonimia.

a. Metafora

Metafora adalah pemakaian kata atau ungkapan lain untuk objek atau konsep lain berdasarkan kias atau persamaan, misalnya, kaki gunung, kaki meja, berdasarkan kias pada kaki manusia (Kridalaksana, 2001:136). Dengan kata lain, makna kata yang menyatakan sesuatu dengan kias perwujudan. Dari data yang terkumpul, makna kiasan atau metaforis dapat ditemukan dalam pungutan kata. Berikut ini akan dikemukakan contohnya.

(19) *Okalalaki sabutunamo iwei, tee malingu kabelokana dunia.*

(Kebangsawanan hanya di sini, segala kebesaran hanya hiasan dunia.)

Pungutan kata *kabelokana dunia* di dalam bahasa modelnya adalah *mata'uddunya* (متاع الدنيا). Kata *kabelokana* memiliki sifat 'mewah, kaya, dan indah'. Manusia di dunia memiliki kecenderungan untuk memburu kemewahan, baik berupa harta maupun tahta. Kemewahan yang diburu manusia, seperti hiasan, sewaktu-waktu bisa hilang, lepas, atau ditinggalkan kapan saja. Jadi sifatnya hanya sementara termasuk *okalalaki* (kebangsawanan/tahta). Keberadaan harta dan tahta dalam kehidupan manusia dipandang sebagai hiasan yang menghiasi dunia (*kabelokana dunia*). Dengan demikian, antara *okalalaki* (kebangsawanan/tahta) dengan *kabelokanan dunia* (hiasan dunia) adalah dua makna yang cenderung sama. Contoh lainnya dapat dilihat dalam data berikut.

(20) *Adikaaka inca imasiaku, nganga randana batua imimiaka. Ositumo jaohara amala, mosuluwina bari-baria feeli.*

(Menaruh hati pada yang disayangi-Nya, nurani hamba yang Dia sayangi. Itulah permata amal yang menyinari semua perilaku).

Pungutan kata *jaohara amala* juga mengandung makna metaforis. Kata tersebut sebagian merupakan pungutan kata dan sebagian lagi berupa pungutan terjemahan (sulih) dari bahasa modelnya *mata'ul amal* (العمل متاع). *Jaohara amal* (permata amal) bukan berarti amal yang dihiasi dengan permata yang terang sehingga menjadi indah. Kata tersebut bermakna amal yang sangat baik yang akan menuntun perilaku seseorang ke arah yang benar. Jika ada seseorang yang disayangi dan dicintai oleh Allah swt, perilaku orang tersebut akan selalu ke jalan yang baik dan benar dan selalu mendapat petunjuk dan tuntunan-Nya. Jadi, keindahan dan kesucian jiwa orang yang disayang dan dicintai oleh Allah swt amalnya seperti permata yang bersinar.

b. Metonimia

Metonimia adalah majas yang menyatakan sesuatu langsung nama atau pemakaian nama untuk benda yang berasosiasi atau yang menjadi atributnya. Ada sebuah data yang menunjukkan perubahan makna metonimia dalam pungutan kata. Datanya adalah sebagai berikut.

(21) *Sapadana a barasanji adheba momanga.*

(Sesudah membaca *barzanji* mereka *dheba*.)

Ruskhan, dalam tulisannya yang berjudul *Tinjauan Leksikal Pungutan Bahasa Arab Laras Keagamaan dalam Bahasa Indonesia* (2005) mengemukakan bahwa kata *barasanji* (*barzanji*) awalnya adalah nama seorang pengarang buku yang mengungkapkan puji-pujian kepada Nabi Muhammad saw. Namun, di dalam bahasa penerima buku itu lebih dikenal dengan *barasanji*. Sebagaimana contoh yang dikemukakan, membaca *barasanji* bukan berarti membaca pengarang yang bernama *Barzanji*, lengkapnya Syekh Ja'far al-Barzanji bin Husen bin Abdul karim, melainkan maknanya membaca atau mengucapkan puji-pujian bacaan puji-pujian yang berisi riwayat Nabi Muhammad yang dibuat oleh Barzanji. Dalam masyarakat Wolio dikenal istilah *dheba* (dapat dilihat pada contoh kalimat 89) yaitu lagu dalam membaca *barzanji* bersama-sama.

5. Simpulan

Makna pungutan kata Bahasa Arab ke dalam Bahasa Wolio mengalami beberapa perubahan, di antaranya perubahan wilayah makna termasuk di dalamnya perluasan dan penyempitan makna; perubahan makna karena evaluasi atau konotasi mencakup ameliorasi dan peyorasi; dan perubahan makna karena makna majasi termasuk metafora atau kiasan dan metonimia.

Daftar Pustaka

- Chaer, Abdul. 2003. *Linguistik Umum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. 2004. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
Keraf, Gorys. 1987. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia.
Kridalaksana, Harimurti. 2001. *Kamus Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Malim, La Ode. 1961. *Membara di Api Tuhan*. Djakarta: Timun Mas.
Ruskhan, Gaffar, dkk. 2000. *Pungutan Padu Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdiknas.
Ruskhan, Gaffar. 2005. "Tinjauan Leksikal Pungutan Bahasa Arab Laras Keagamaan dalam Bahasa Indonesia" (tesis) Jakarta: Universitas Indonesia.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Komisi B
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 20 Juli 2010, 13.00—14.30 wita
Judul Makalah	: Perubahan Makna Pungutan Kata Bahasa Arab dalam Bahasa Wolio
Penyaji/Pembicara	: Firman A.D., S.S.
Pemandu	: Muh. Yunus
Pencatat	: Laila Kurniawaty, S.Pd., M.A.
Jumlah Peserta	: 40 orang

TANYA JAWAB

Drs. La Ode Muzadi (Tokoh Masyarakat Buton)

Pertanyaan /Saran

Dalam perkembangannya Bahasa Wolio memang mendapat pengaruh dari Bahasa Arab. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan aksara Arab dan banyaknya kosakata Bahasa Arab yang mewarnai Bahasa Wolio. Itu terjadi secara alamiah. Kasus di Baubau sekarang adalah kebijakan Pemerintah Kota Baubau memperkenalkan aksara Hangul (Korea) kepada masyarakat melalui dunia pendidikan. Apakah hal ini dapat juga disebut sebagai kontak bahasa?

Jawaban/Tanggapan

Menurut saya itu bukan kontak bahasa karena tidak melalui sebuah proses (tahap) dan tidak didukung oleh keinginan penuh masyarakat penutur Bahasa Ciacia. Berdasarkan sejarah, aksara (bahasa) Arab yang masuk ke Kerajaan Buton melalui berbagai bidang dalam masyarakat, di antaranya perdagangan, perkawinan, dan penyebaran agama. Bahasa Arab memang betul-betul diterima dan diresapi oleh masyarakat bersama dengan penyiaran agama Islam. Karena tingkat keberterimaan bahasa Arab dalam masyarakat Wolio tinggi menyebabkan berbagai aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan tulis-menulis menggunakan aksara Arab berbahasa Wolio (*Buri Wolio*) sampai saat ini.

Sangat berbeda kasusnya dengan aksara Hangul yang akan digunakan dalam bahasa Ciacia. Aksara Hangul baru masuk ke Kota Baubau karena adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkot Baubau dengan lembaga HSK (Korea). Kemudian, hasil perjanjian tersebut yang akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Akmaluddin (Guru SMUN di Baubau)

Pertanyaan /Saran

Seberapa besar pengaruh Bahasa Arab terhadap Bahasa Wolio?

Jawaban/Tanggapan

Pengaruh Bahasa Arab terhadap Bahasa Wolio sangat besar. Salah satu contoh nyata adalah penggunaan aksara Arab dalam Bahasa Wolio yang dikenal dengan *Buri Wolio*. Selain itu, Bahasa Arab juga berpengaruh terhadap pemberian nama orang tua kepada anaknya, seperti nama La Mohama (Muhammad), La Rasidi (Rasyid artinya Mahapandai), dan masih banyak yang lainnya.

PELESTARIAN BAHASA DAERAH MORONENE SEBAGAI KEKAYAAN BUDAYA DAERAH SULAWESI TENGGARA

Anton Ferdinan
(Forum Ilmiah Guru Kabupaten Bombana)

1. Latar Belakang

Bahasa Moronene merupakan salah satu bahasa yang hidup dan berkembang di Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara administratif, wilayah yang didiami oleh mayoritas penutur Bahasa Moronene terdapat di Kabupaten Bombana. Wilayah ini dulunya merupakan bagian dari Pemerintahan Kabupaten Buton.

Dalam perkembangan selanjutnya, Bahasa Moronene cenderung mengalami kemunduran dalam pemakaiannya. Hal tersebut tidak terlepas dari bergesernya nilai-nilai dan peradaban masyarakat dalam era teknologi dan komunikasi yang tidak lagi mengenal batas-batas wilayah.

2. Asal Usul Suku, Bangsa, Bahasa, dan Budaya Moronene di Sulawesi Tenggara

Suku bangsa Moronene merupakan komunitas masyarakat yang menghuni jazirah selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Wilayah yang didiami oleh Suku Moronene meliputi wilayah Poleang, Rumbia, Kabaena, dan Watubangga.

Sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli antropologi dan ilmuwan mengenai asal-usul Suku Moronene dan sejak kapan orang-orang Moronene mulai menghuni daerah Sulawesi Tenggara.

Dari berbagai literatur dan penjelasan dari informan masyarakat di wilayah Moronene menyebutkan bahwa Suku Moronene mempunyai pertalian darah dengan Suku Mori di Malili, Suku Toraja, To Bungku, To Laiwui, To Mekongga yang mendiami daratan Kolaka, Suku Tolaki (To Konawe) yang mendiami daratan Kendari, Suku Wawonii, Menui, dan Kulisusu (Rustam Tamburaka, Media Kita, Minggu, 18 Agustus 1996).

Versi lain menyebutkan bahwa Suku Moronene juga mempunyai pertalian darah dengan orang-orang Luwu melalui kisah *Sawerigading* sehingga penamaan Suku Moronene untuk versi Luwu dan Bugis menyebutnya *mangurunene* yang artinya satu nenek atau seketurunan melalui *Sawerigading*. Penyebutan *To Moronene* menurut versi Bugis dikisahkan ketika cucu *Sawerigading* terpencah dan menemukan kelompok komunitas yang tinggal di sebuah tempat yang disebut *Nene*, mereka lalu menyebutnya Moronene (Wawancara Abdul Madjid Mansa, B.A, September 2000).

Menurut Drs. Zainuddin Tahyas, M.Si., Suku Moronene seketurunan dengan Suku Moro di Filipina Selatan yang datang memasuki daratan Sulawesi Utara, kemudian bergeser ke Sulawesi Tenggara, dan berdiam di sekitar Sungai Lasolo, Danau Towuti, dan Danau Matana. Dari sini kemudian mereka bergeser ke tenggara hingga jazirah selatan Sulawesi Tenggara.

Suku Moronene ini kemudian mendiami jazirah Sulawesi Tenggara bagian selatan dan Pulau Kabaena. Pada zaman dulu juga membentuk kerajaan-kerajaan yang menurut cerita tradisional mereka berasal dari langit atau dari luar (Rustam E. Tamburaka, 1999:11).

Versi lain menyebutkan bahwa Suku Moronene adalah kelompok komunitas yang dahulu bermukim di sebuah tempat yang disebut *Laa Moronene* artinya Sungai Moronene. Di lembah sungai ini ditumbuhi pohon-pohon *nene* (resam) dan sejenisnya. Komunitas yang bermukim di tempat ini sekitar ratusan tahun silam kelak berkembang dan menamakan diri Suku Moronene.

Di Moronene sendiri, lazim ditemukan kata-kata seperti *morelemo* (semacam lemon), *morompoo* (semacam mangga), *morobite* (semacam sirih). Lembah Sungai Moronene ini terletak di Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu, yang sekarang berada di Kabupaten Bombana. Selanjutnya, orang di luar wilayah Moronene menyebutnya *To Moronene* yang berarti orang Moronene.

3. Batas Wilayah Moronene

Suku Moronene dahulu membentuk sebuah sistem pemerintahan yang memiliki wilayah kerajaan tersendiri yang dikenal dengan Kerajaan Moronene. Wilayah Moronene itu sendiri dahulu lebih luas dari yang ada sekarang, Watubangga, tepatnya di Tondowolio, merupakan batas wilayah Moronene yang berbatasan dengan Kerajaan Mekongga. Hukaea di padang ilalang yang membentang luas di sebelah timur wilayah Moronene merupakan batas daerah Moronene dengan Kerajaan Konawe (Tolaki)

Daerah Moronene dan Kabaena merupakan wilayah otonom dan mengatur dirinya sendiri, sedangkan Barata adalah kerajaan merdeka yang tergabung dalam Kerajaan Buton yang bebas mengatur dirinya sendiri dan mempunyai dewan-dewan kerajaan sendiri (Anonim, Aneka Budaya Daerah Sultra, 1978/1979:34).

Menurut Asisten Laiwoi Tanah Kolaka dalam suratnya yang dikeluarkan di Baubau tanggal 11 Juli 1927, No. 3278/CIO, tertulis:

Vervelg mijn fono 6 dezer No.3201/CIO gren verloop als velght: "Mulai dari Tondowolio menuju ke hulu Sungai Poleang mengikuti lereng gunung Mendoke terus ke mangga Butung. Disebelah Barat Laut Gunung Pusu Mendoke, yaitu tanahnya Kolaka. Disebelah Utara tanahnya Kendari dan disebelah Selatan serta barat daya tanahnya Rumbia-Poleang (Moronene). Dimana-mana terdapat bahasa Moronene dan bamboo duri itu adalah tanahnya Poleang-Rumbia (Moronene). Dan dimana-mana terdapat Bahasa Mekongga itu adalah tanahnya Kolaka dan Kendari.

Di hulu Sungai Poleang terdapat kubur-kubur (kuburan) orang-orang tua dari bangsa Moronene karena itulah tandanya pada kami bahwa tanah itu, tanah Poleang – Rumbia. Sewaktu Gouverment masuk, maka batas Poleang dengan Kolaka ke Sungai Towari (Poleang). Batas Rumbia dengan Kendari ke Sungai Lanowulu, sementara batas gunung Pusu Mendoke belum dipindahkan. (Sumber: Surat Asistent Resident Laiwoi Tanah Kolaka, Baubau 11 Juli 1927).

Tiga tahun kemudian tepatnya tahun 1930 dalam sebuah surat Verklaring menyebutkan sebagai berikut:

VERKLARING

Kami La Naini, Mantri besar matanajo, ngitoeng, Hulp Bestuurs Asisten dan Moenara, Djoeroetoelis Mokole Rumbia, Commissieleden dari pihak Boeton tentang pembijaraan sipat (batas) antara Kolaka dan Poleang-Roembia, menerangkan seperti jang terseboet di bawah ini:

Mengingatkan sipat (batas) antara Laewoe dan Boeton sebeloemja Pemerintahan Belanda Masoek, maka sipat Kolaka dan Poleang- Roembia jang baroe ini masih salah, sebab sipat yang doeloe menoeroet pengetahoean Mokole dan kepala-kepala kampoeng Poleang –Roembia jaitoe Tondo Wolio (Pagar Boeton) menoedjoe ke tempat jang dinamai Poeoe Lemo (hoeloe kali Poleang) teroes ke Goenoeng Poesoe Mendoke. Djoega pemeriksaan jang baroe ini, jang bernama kali Popalia.

Menoeroet pertimbangan kami, pengetahoean Mokole dan kepala-kepala Kampoeang terseboet di atas ada benar, sebab diantara kali Towari dan Tondo Wolio ada orang-orang Moronene jang tinggal serta masoek ke pemerintahan Kolaka. Orang-orang terseboet sebeloemnja pemerintah Belanda Masoek, membajar oepeti (Soraoe) kepada Mokole Roembia jang sekarang ini. Jaitoe Intera.

Djadi menoeroet pertimbangan kami, sipat (batas) jang sebaik-baiknja, jaitoelah: Moelai dari Tondo Bolio menoedjoe ke Poeoe Lemo (hulu kali Poleang dan teroes ke goenoeng Poesoe Mendoke. Hal ini terserah atas pertimbangan pemerintah, sekiranya tidak akan toeroet sipat jang doeloe.

*Baoebaoue, 5 Maart 1930
De Mantri Besar Matanajo
De Hulp Bestuurs Asistent,
De Djoeroetoelis.*

(Verklaring, Baoebaoue 5 Maart 1930)

Berdasarkan berbagai sumber tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah Moronene sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka, tepatnya di Tondowolio, Kecamatan Watubangga, dan Kabupaten Kendari, tepatnya di Sungai Mandu-Mandula, perbatasan Kecamatan Tinanggea Kabupaten Kendari (Peta Wilayah Admistrasi Kecamatan se-Sulawesi Tenggara 1989).

Sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores dan sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone. Hal ini sejalan dengan penuturan orang-orang tua di perbatasan Moronene dan Mekongga bahwa batas wilayah Moronene dengan Mekongga (Kolaka) tepatnya di Tondowolio, Kecamatan Watubangga.

4. Pelestarian Bahasa Daerah dan Budaya Moronene

Bahasa merupakan alat komunikasi manusia yang mendukung kemajuan peradaban. Bahasa menjadi tali kesinambungan sejarah umat manusia sehingga manusia dapat mencapai kemajuan melalui proses pembelajaran masa lalu. Pada kehidupan nyata, berbahasa nasional maupun berbahasa ibu merupakan hakk asasi manusia yang mutlak. Selain itu, hilangnya satu bahasa sama dengan melenyapkan satu peradaban umat manusia.

Menurut Konvensi Roma Oktober 1996, kita semua wajib melawan *culture genocide*, termasuk pelarangan bahasa. Seperti sering ditegaskan pendiri (*founding father*) republik kita, kekuatan dan keperkasaan bangsa Indonesia justru terletak pada kemajemukannya sesuai semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Bahasa Moronene saat ini cenderung mengalami kemerosotan dalam perkembangan dan pengembangannya. Hal ini dapat kita lihat dalam komunitas masyarakat penutur Bahasa Moronene yang cenderung meniru-niru gaya bahasa dari luar sebagai dampak majunya teknologi melalui siaran televisi. Jika hal ini terus menerus dibiarkan terjadi, prediksi akan terjadinya kepunahan satu bahasa di Sulawesi Tenggara akan menjadi kenyataan.

Oleh karena itu, menjadi tugas kita semua untuk ikut memikirkan bagaimana bahasa Moronene dapat tetap bertahan dan hidup dalam masyarakat Sulawesi Tenggara. Persoalan yang dihadapi dalam pengembangan

Bahasa Moronene berdasarkan pengamatan di lapangan dan sejumlah fakta dan data menunjukkan bahwa ketika daerah Kabupaten Bombana belum terbentuk, guru-guru di tingkat sekolah dasar di wilayah Poleang, Rumbia, dan Kabaena mengakui bahwa mereka masih dapat mengajarkan bahasa daerah Moronene di sekolah-sekolah dasar sebagai salah satu muatan lokal.

Digunakannya bahasa Moronene sebagai salah satu muatan lokal di sekolah dasar saat itu tidak lepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Buton ketika itu yang mengeluarkan surat edaran tentang buku-buku bahasa Moronene yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan proses belajar mengajar untuk muatan lokal. Namun, setelah Kabupaten Bombana terbentuk melalui Undang-Undang No. 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara, pengajaran muatan lokal bahasa daerah Moronene seakan hilang di telan bumi. Ini sangat disayangkan. Pertanyaan yang muncul kemudian, mengapa ini bisa terjadi? Begitu tidak berartikah bahasa daerah Moronene sehingga tidak lagi diberikan ruang untuk berkembang di daerahnya sendiri? Inilah pertanyaan yang menarik untuk didiskusikan.

Untuk memecahkan persoalan ini sesungguhnya tidaklah sulit, Menurut pandangan penulis, langkah-langkah konkrit yang harus diambil dalam upaya pelestarian Bahasa Moronene sebagai kekayaan budaya bangsa salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten Bombana perlu membuat sebuah payung hukum berupa peraturan daerah (perda) sebagai tindak lanjut pelaksanaan Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat dan Permedagri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.

Fakta lain di lapangan menunjukkan bahwa penutur Bahasa Moronene, khususnya di Poleang, seakan kurang percaya diri menggunakan bahasanya sendiri sehingga kelihatan bahwa mereka lebih senang menggunakan "bahasa di luar bahasa ibunya" dalam komunikasi sehari-hari.

Dengan melihat fakta seperti itu, dari hasil penelusuran dan penelitian sederhana ini dengan melakukan wawancara kepada sejumlah penutur bahasa Moronene di Poleang, ditemukan salah satu alasan yang perlu kajian lebih lanjut bahwa rupanya ada trauma yang mendalam dari peristiwa masa lalu yang ada kaitannya dengan gejolak DI/TII di daerah Poleang. Pada saat itu mereka yang tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa di luar dari bahasa Moronene menjadi incaran untuk "dihabisi".

Salah satu upaya konkrit yang dapat dilakukan dalam upaya pelestarian bahasa dan budaya Moronene adalah melalui kemauan politik dari pemimpin di negeri ini dengan memberikan legitimasi berupa peraturan daerah (perda) untuk memasukkan bahasa daerah Moronene sebagai salah satu muatan lokal di sekolah-sekolah dengan tetap mengacu pada latar belakang historis daerah yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Bombana hendaknya memiliki tanggung jawab dalam pelestarian Bahasa Moronene dengan mengalokasikan anggaran yang sesuai dalam pengkajian kebudayaan lokal sebagai salah satu aset budaya daerah yang perlu dilestarikan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.

- a. Perencanaan Bahasa Moronene
- b. Kebijakan Penggunaan Bahasa Moronene
- c. Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Moronene

Upaya yang telah dilakukan saat ini dalam rangka pelestarian Bahasa Moronene adalah penerbitan ceritra-ceritra rakyat daerah Moronene melalui media-media lokal.

5. Budaya Daerah Moronene

Salah satu tradisi masyarakat Moronene yang masih tumbuh dan berkembang saat ini adalah tradisi dalam pelaksanaan pesta perkawinan. Tradisi tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- a. *Tua Petotoa* yaitu berupa kain putih 1 (satu) pis bersama kelengkapannya dan tidak diambil lagi oleh yang membawa *tua mentaa*.
- b. *Tua Pehembang* yaitu kain putih 1 (satu) pis bersama kelengkapan adat lainnya yang akan diambil kembali oleh yang membawa setelah seluruh prosesi adat perkawinan selesai dilaksanakan.
- c. *Tua Porerei* yaitu kain putih 1 (satu) pis bersama kelengkapan adat lainnya dan tidak diambil lagi oleh yang membawa akan tetapi pada saat mengantar *tua mentaa* tersebut oleh *pabitara* (juru bicara) akan disampaikan bahwa *tua mentaa* ini bertujuan untuk *porerei* artinya ada sesuatu yang diinginkan pembawa *tua mentaa*.
- d. *Tua Pinokombule* yaitu *tua mentaa* yang diantar oleh kelompok masyarakat adat Moronene dengan tujuan untuk turut meramaikan dan memeriahkan upacara adat yang sedang berlangsung. Pada saat *tua mentaa* diantar maka akan diterima oleh seorang *pabitara* dengan menggunakan bahasa kiasan yang mengandung majas dalam bahasa Moronene yang disebut *Pompalili*.

Mengapa dalam ritual adat Moronene selalu menggunakan kain putih? Karena kain putih melambangkan kebersihan hati. Apabila ada salah paham yang pernah terjadi agar diputihkan (dimafkan).

Bilamana ada yang melanggar sumpah atau ikrar yang telah diucapkan, kain putih itulah yang akan membalut tubuh pelanggar sumpah itu nantinya.

6. Tarian Daerah Moronene.

Di daerah Moronene juga dikenal tarian yang sudah merakyat dan menjadi sarana hiburan masyarakat dalam berbagai acara maupun kegiatan, misalnya dalam acara penyambutan tamu-tamu agung dari luar wilayah Moronene. Tarian-tarian itu antara lain sebagai berikut.

Tarian Lulo

Tarian *Lulo* berkembang hampir di seluruh wilayah Moronene. Tarian *Lulo* ini sudah dianggap sebagai tarian umum dalam berbagai pesta atau hajatan dan sekaligus berfungsi sebagai sarana hiburan rakyat.

Agar tarian tersebut dapat dinikmati dan terlaksana dengan baik, ada aturan main yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi bagi siapa saja yang akan masuk dalam tarian ini. Tata cara memasuki arena Tari Lulo adalah sebagai berikut.

- 1) Apabila ada seorang pemuda yang akan masuk dalam Tari Lulo yang sedang berlangsung, terlebih dahulu pemuda tadi harus mohon izin dengan cara bertepuk tangan 3 (tiga) kali di sebelah kanan orang yang hendak dimasuki. Setelah mendengar isyarat tersebut, orang yang bermaksud bergabung dalam Tari Lulo akan diberikan kesempatan menikmati acara Lulo dengan terlebih dahulu memberikan jemarinya dan berada di sebelah kiri.
- 2) Apabila Tari Lulo sedang berlangsung dan seorang pemuda hendak bergabung, jangan masuk di sela-sela antara pria dan wanita yang sedang bergandengan tangan karena akan membuat ketersinggungan pemuda yang sedang bergandengan tangan tersebut. Terkadang kesalahan ini bisa berakibat fatal. Lalu dimanakah kita dapat menggabungkan diri? Perlu dilihat, bila yang bergandengan tangan adalah perempuan dengan perempuan, di antara kedua perempuan tersebut dapat dimasuki oleh seorang pemuda. Demikian pula jika yang sedang bergandengan tangan itu adalah laki-laki dan perempuan, di antara keduanya kita dapat masuk dengan ketentuan terlebih dahulu mohon izin dengan isyarat yang telah ditetapkan.

Tarian Lulo sebagai sarana hiburan rakyat memiliki beragam variasi, yaitu 1) Lulo Kameda, 2) Lulo Malese, 3) Lulo Baris Bunga, 4) Lulo Patabe, 5) Lulo Pata-Pata, dan 6) Lulo Segi Empat. Berdasarkan jenis variasi Lulo ini dapat dibedakan berdasarkan gerakan-gerakan sesuai musik pengiringnya. Namun, secara sederhana gerakan dasarnya pada prinsipnya sama. Tergantung dalam hajatan atau kegiatan apa acara Tari Lulo itu diselenggarakan.

Menurut tradisi masyarakat Moronene, Tari Lulo diselenggarakan sebagai sarana untuk *metiro* yaitu seorang pemuda yang sedang melakukan penjajakan untuk mencari jodoh. Karena dahulu gadis-gadis Moronene hanya akan keluar rumah pada saat ada acara Lulo dan bagi pemuda yang belum menikah akan menjadi kesempatan untuk mencari calon pasangannya yang sesuai dengan hatinya. Biasanya calon yang sudah ditemukan melalui Tari Lulo kelak akan dipersunting menjadi seorang istri.

Menurut Nelwan ihwal Tarian Lulo berawal dari sebuah pesta kemenangan sebagai bentuk penghargaan kepada *Tamalaki* Kerajaan Moronene yang berhasil dalam sebuah pertempuran. Oleh karena itu diadakanlah tarian tersebut sekaligus menjadi sarana hiburan.

7. Kesenian Teater dan Pertunjukan Daerah Moronene

Dalam kegiatan pertunjukan atau kegiatan pesta pernikahan menurut tradisi adat perkawinan Moronene, apabila hendak melangsungkan pernikahan diwajibkan untuk menata lokasi pesta dengan menggunakan aksesoris pelengkap berupa *Tua Mentaa* dan *Tua Nibale*. Keduanya berupa kain panjang berwarna putih.

Masyarakat Moronene rupanya memiliki rutinitas dan tradisi tersendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam masyarakatnya yang biasa disebut dengan:

- a. *Kongkosa* yaitu pertemuan atau musyawarah yang diprakarsai oleh pemimpin atau atas perintah *Mokole* untuk berkumpul guna membicarakan pelaksanaan tugas perangkat-perangkat kerajaan pada unit-unit terkecil dalam sebuah pemukiman atau perkampungan masyarakat;
- b. *Ndondoua* yaitu pertemuan atau musyawarah dalam rangka hajatan atau kegiatan untuk melaksanakan pesta pernikahan anak perempuan atau laki-laki;
- c. *Mewiwusoi* adalah kegiatan berupa upacara adat yang bermakna ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta doa kepada leluhur (*Sangia*) yang telah memberikan hasil panen dalam satu musim tanam dalam setahun;
- d. *Pebelaiha Pae* adalah upacara adat untuk mengawali panen raya yang dilakukan oleh *Tumpuroo* atau dukun padi;
- e. *Momua* adalah kegiatan yang dilakukan setiap tahun setelah pelaksanaan panen padi. Tujuannya adalah menyimpan hasil panen di *Kampiri* sebagai persediaan pada masa paceklik. *Kampiri* merupakan salah

satu simbol kemakmuran negeri Moronene. Hasil panen yang disimpan di lingkungan kerajaan bertujuan untuk perbekalan apabila ada kegiatan berupa *Kongkosa*, *Tepoawa* atau rapat-rapat, dan musyawarah di kampung-kampung yang didatangi oleh tamu-tamu dari luar.

8. Penutup

a. Kesimpulan

Eksistensi sebuah kelompok masyarakat akan nampak bila budaya dan bahasa masyarakat itu terpelihara dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aktivitas masyarakat pendukung kebudayaan itu sendiri. Untuk menunjang kelangsungan dan pengembangan bahasa Moronene, perlu ada langkah-langkah konkrit sebagai berikut.

- 1) Pelestarian budaya dan bahasa Moronene perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Sulawesi Tenggara, khususnya Pemerintah Kabupaten Bombana, dalam bentuk kemauan politik yang dilandasi payung hukum dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang akan menjadi dasar bagi pemangku kebijakan dalam upaya pelestarian dan pemertahanan budaya Moronene.
- 2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah saatnya bersama-sama perguruan tinggi di daerah ini membuka Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- 3) Muatan lokal dalam bahasa daerah di sekolah-sekolah perlu dilegitimasi melalui penekanan dari Dinas Pendidikan agar memasukkan bahasa daerah sebagai mata pelajaran atau muatan lokal dalam proses belajar mengajar, khususnya pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

b. Saran

Masalah yang dihadapi dalam pengembangan dan pembinaan bahasa daerah cukup kompleks. Oleh karena itu, kepada para pemerhati dan peneliti bahasa kami sarankan untuk melakukan kajian dan penelitian bahasa daerah yang lebih mendalam lagi. Penelitian tentang bahasa dan budaya di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Bombana masih sangat sedikit. Ini terbuka bagi siapa pun untuk melakukan berbagai kajian-kajian yang mendalam sebagai upaya mengabdikan diri untuk kepentingan ilmu pengetahuan, terutama sumber daya budaya yang harus terus digali potensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 1943 *Kunini Dan Tabea Damontoe*. Taubonto: Stambuk Silsilah Keturunan Mokole Poleang.
- Andersen, David T. 1999. *Moronene Phonologi*. Dallas TX, USA : SIL International.
- Andersen, David T. 1999. *Moronene Numbers*. Jakarta :Nusa.
- Arifin, Munaser. 2006. *Sangia Nibandera Penyebar Agama Islam di Tanah Mekongga*.Kendari: Taman Budaya Sultra.
- Aslinda. 2007. *Pengantar Sociolinguistik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Asri.2008. *Ungkapan Dalam Perkawinan Adat Moronene*. Kendari: Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara.
- Burhanuddin, B. 1995. *Situasi Bahasa Daerah Di Sulawesi Tenggara* .Kendari: Balai Penataran Guru Depdikbud Sultra.
- , 1979/1980 *Sejarah Masa Revolusi Fisik Daerah Sulawesi Tenggara* Depdikbud Daerah Sultra.
- , 1976. *Monografi Daerah Sulawesi Tenggara*. Kendari.
- Laidig, Wyn D. 1999. *Studies In Sulawesi Linguistic Part VI*. Jakarta: Nusa.
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Mead, David 1999. *Studies In Sulawesi Linguistics Part V*. Jakarta : Nusa.
- Media Kita Sabtu, 9 September 1995
- Rambe, 1993. *Adat Perkawinan Moronene (Dalam Upaya Melestarikan Kebudayaan Moronene) Sulawesi Tenggara*.
- Taalami, Laode 2008. *Mengenal Kebudayaan Wakatobi*. Jakarta: Granada.
- Tahyas, Zainuddin. 1999. *Kabaena:Sejarah, Budaya dan Falsafah Hidup Masyarakatnya*. Depok: Usaha Kami.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Komisi D
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 20 Juli 2010, 16.00 – 17.30
Penyaji/Pemakalah	: Anton Ferdinan, S. Pd.
Judul Makalah	: Pelestarian Bahasa Moronene Sebagai Kekayaan Budaya Sulawesi Tenggara
Pemandu	: Ramlah Mappau, S.S., M. Hum.
Pencatat	: Asri, S.S., M. Hum.
Jumlah Peserta	: 40 orang

TANYA JAWAB

Asri, S. S., M. Hum. (Staf Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)

Pertanyaan/Saran

Bagaimana pendapat Pak Anton mengenai pergeseran bahasa Moronene khususnya di daerah Poleang dan kita mengetahui bahwa di daerah Poleang masyarakat lebih cenderung menggunakan bahasa Bugis sebagai bahasa sehari-harinya dibandingkan dengan bahasa daerahnya?

Jawaban

Apa yang telah dikhawatirkan telah terjadi di Bombana khususnya di daerah Poleang. Pergeseran bahasa Moronene tidak diimbangi dengan usaha pelestarian bahasa Moronene. Di sekolah muatan lokal justru mata pelajaran bahasa Inggris dan pertanian yang diajarkan. Diknas belum bersikap tegas dalam hal pengajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di sekolah. Perlu ada rekomendasi dari pemerintah setempat dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan melestarikan bahasa daerah.

T. David Anderson (Australia)

Pertanyaan/Saran

Saran saya bagaimana kalau di *facebook* dibuatkan semacam grup pencinta bahasa Moronene?

Jawaban

Hal semacam ini sudah ada yang melakukan, khususnya teman-teman dari Pulau kabaena yang membuat grup pencinta Moronene di *facebook*.

SASTRA LISAN *KABANTI* SEBAGAI RUANG REKULTURASI BUDAYA BUTON¹

Sumiman Udu
(Universitas Haluoleo)

1. Pengantar

Sebagai salah satu daerah kesultanan, Buton memiliki nilai-nilai budaya yang dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan masyarakatnya². Nilai-nilai budaya itulah yang membawa Buton menuju sebuah puncak kejayaan di masa lalu³. Namun, kejayaan dan kemasyhuran budaya Buton tersebut tinggallah cerita pengantar tidur. Masyarakat Buton hari ini sudah mengikuti berbagai tren kehidupan modern⁴ dan melupakan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas dirinya.

Di masa lalu, nilai-nilai budaya Buton tersebut disosialisasikan melalui tradisi *kabanti*. Hal ini dapat dilihat dari berbagai teks *kabanti* yang sudah ditulis misalnya, *kabanti Anjonga Inda Malusa*, *Paiasa Mainawa*, dan *Bula Malino*. Di samping itu, masyarakat Buton juga mengenal tradisi lisan *kabanti* dalam berbagai kehidupannya. Nilai-nilai budaya tersebut terus-menerus disosialisasikan dalam masyarakat melalui performansi *kabanti* dalam bentuk lisan. Melalui performansi *kabanti* itulah nilai-nilai budaya tersebut tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat pendukungnya dari waktu ke waktu.

Nilai-nilai budaya Buton yang berlandaskan Islam mengalami akulturasi dengan nilai-nilai budaya lokal dalam teks-teks *kabanti*. Dalam teks *kabanti Anjonga Inda Malusa* karya Abdul Ganiu misalnya, beliau menjelaskan konsep syariat dan makrifat dalam dunia Islam dengan menggunakan teks-teks *kabanti* yang gampang diingat dan dikenang oleh masyarakat. Berbagai nasihatnya tentang kehidupan, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat, ditemukan dalam teks-teks *kabanti*. Nasihat-nasihat tersebut merupakan inti sari dari ajaran Islam.

Di samping itu, teks *kabanti* juga menjelaskan nilai-nilai budaya Buton yang berhubungan dengan konsep seks masyarakat Buton yang diabadikan dalam teks *Kaluku Panda Atuwu Incana Dempa*⁵. Jika dijelaskan dalam bentuk prosa atau ceramah, konsep-konsep yang berisi tentang nilai-nilai budaya Buton tersebut akan mendapatkan kendala terutama dari masyarakat yang jarang ke masjid atau mereka yang selalu bersentuhan dengan dunia *kaindea*⁶. Namun, karena dinyanyikan dalam bentuk *kabanti*, nilai-nilai budaya Buton tersebut dapat dilantunkan di berbagai tempat, misalnya tempat judi, tempat minum di *kaindea*, di tempat pesta, di laut, dan di kebun. Selanjutnya, apabila konsep seks tersebut diajarkan dalam bentuk ceramah atau diskusi, ia bisa menciptakan diskusi yang berisi tentang pornografi. Akan tetapi, karena dilantunkan melalui teks-teks *kabanti* sehingga aspek pornografi tersebut dibungkus dalam bahasa konotasi atau bahasa sastra yang memiliki makna yang halus dan tidak vulgar. Dengan demikian, hampir seluruh aktivitas masyarakat Buton dapat disentuh oleh *kabanti* dan diterima dalam berbagai kehidupan masyarakat Buton (Udu, 2009: 3-4).

Dewasa ini, nilai budaya Buton yang pernah disosialisasikan dalam berbagai teks *kabanti* tersebut masih tetap tersimpan dalam berbagai naskah. Namun, saat ini masyarakat kehilangan berbagai momentum untuk mendengarkan/menyaksikan performansi *kabanti* atau yang ada dalam naskah-naskah tersebut sehingga nilai-nilai budaya Buton masih membeku dalam naskah yang masih dirahasiakan oleh pemiliknya.

Di sisi lain, tradisi lisan *kabanti* mengalami berbagai dinamika baru dalam kehidupan masyarakat Buton modern. Tingkat kesibukan yang tinggi dan banyaknya alternatif hiburan sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi menyebabkan *kabanti* sebagai hiburan masyarakat Buton sudah mulai ditinggalkan. Bahkan dalam beberapa diskusi dengan anak sekolah dan remaja, mereka bahkan tidak lagi mengenal *kabanti* dalam kehidupan mereka⁷. Dengan demikian, hilangnya *kabanti* dari kehidupan masyarakat Buton menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk menerima nilai-nilai budaya Buton dari leluhur mereka sehingga tidak

¹ Disampaikan dalam seminar internasional yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara bekerja sama dengan Pemerintah Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara.

² Nilai-nilai budaya Buton tersebut terpatrit dalam konsep *pobinci-binciki kuli* yang diaplikasikan melalui konsep *pomaamasika*, *maemaeka*, *popia-piaraka*, dan *poangka-angkataka*.

³ Buton mengalami masa kejayaan pada masa Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin yaitu sekitar abad ke-19

⁴ Tren kehidupan yang materialistik dan individual yang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan hidupnya yang materialisme

⁵ *Kaluku Panda Atuwu Incana Dempa* dikarang oleh La Kobu yang bergelar Metapasina Ba'adia yang ditulis sebagai petunjuk bagi mereka yang hendak berkeluarga (Ali Rusdin, 2002: 118).

⁶ Dimasa lalu, banyak diskusi dilakukan dalam *kaindea* yang merupakan daerah konservasi hutan yang banyak ditumbuhi oleh pohon konau atau pohon aren. Di sanalah banyak diskusi dilakukan sambil minum dan mereka menghibur diri dengan syair-syair *kabanti*. Untuk kepentingan itulah banyak nilai-nilai budaya Buton yang diabadikan dalam teks-teks *kabanti*.

⁷ Dalam bedah buku *Perempuan dalam Kabanti* di Kecamatan Wangi-Wangi, mereka bukan bertanya tentang bagaimana perempuan dalam *kabanti*, melainkan mereka bertanya apa itu *kabanti* (hasil diskusi tanggal 29 Maret 2010).

salah kalau dewasa ini masyarakat, khususnya remaja, lebih memilih melakukan tindakan anarkis dari pada bersabar dalam menyelesaikan suatu persoalan.

Oleh karena itu, tradisi lisan *kabanti* atau penglisanan *kabanti* merupakan ruang rekulturasi budaya Buton dewasa ini sehingga masyarakat Buton kembali mengenal nilai-nilai budayanya. Dengan demikian, bangsa Buton memiliki kesempatan untuk bangkit kembali sebagai bangsa yang besar, bangsa yang berbudaya dan bermartabat.

Penelitian ini, dilakukan dengan menelusuri fungsi dan peran *kabanti* dalam menyosialisasikan dan merekonstruksi nilai-nilai budaya Buton di masa lalu dan saat ini. Di samping itu, penelitian ini juga dilakukan dengan melihat peran dan fungsi *kabanti* dalam melakukan rekulturasi budaya Buton dewasa ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi guna melihat berbagai perkembangan masyarakat Buton dalam menerima kebudayaannya.

2. *Kabanti* dan Pembentukan Nilai-Nilai Budaya Buton di Masa Lalu

Berdasarkan *Hikayat Negeri Buton*, negara Buton telah berdiri sekitar awal abad 14 (bdk, Udaya, 2006). Sebelum Buton menjadi sebuah negara, nilai-nilai budaya Buton telah tumbuh dan berkembang jauh sebelum negara Buton terbentuk. Tentunya, banyak sarana yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat, dan salah satu sarana dalam menyosialisasikan nilai-nilai budaya tersebut adalah terdapatnya tradisi *kabanti* baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Bentuk lisan *kabanti* mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat Buton, dan hampir seluruh *kadia* yang tersebar dalam empat *barata*, mulai dari *barata* Tiworo di Barat sampai *barata* Kaledupa di timur, dari Kulisusu di Utara sampai *barata* Muna di Selatan. Semua itu mengenal tradisi lisan *kabanti* sebagai tradisi sastra yang paling populer menyentuh sampai di hati. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh La Ode Nsaha bahwa *kabanti* merupakan karya sastra yang paling digemari dan menyentuh sampai di hati penggemarnya (La Ode Nsaha, 1987/19877: 235).

Sebagaimana fungsi sastra pada umumnya, *kabanti* memiliki fungsi sebagai hiburan dan bermanfaat (Horace dalam Welek dan Warren 1995: 25). Dalam fungsinya sebagai hiburan, *kabanti* menjadi hiburan yang paling disukai oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan *kabanti* dalam berbagai kehidupan mereka, mulai di kebun oleh petani, di laut oleh nelayan, sampai pekerja di bangunan atau di perahu, semuanya menyanyikan *kabanti* sebagai penghilang rasa jenuh dalam menjalankan seluruh aktifitasnya (bdk, Udu, 2009: 59).

Dalam fungsinya sebagai sarana sosialisasi nilai-nilai budaya, *kabanti* berisi mutiara-mutiara kebijaksanaan yang mengandung nilai-nilai budaya yang tinggi. Seorang pelantun *kabanti* pengantar tidur akan menidurkan anak-anaknya dengan bahasa-bahasa yang lembut dan berisi tentang nilai-nilai budaya yang luhur. Misalnya, penanaman nilai-nilai agar hubungan laki-laki dan perempuan yang sedarah itu dapat dihindari maka ditemukan teks *kabanti* sebagai berikut.

E ara topada mobasamo
E mou te tuhanto tomeri

Kalau kita sudah sama-sama dewasa
Walau pun sudara kita harus waspada

Teks *kabanti* di atas menggambarkan betapa seorang ibu sangat hati-hati dalam menjaga hubungan anak laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Buton. Nilai-nilai budaya Buton yang tidak menginginkan kawin inses atau perkawinan saudara dikontrol melalui teks-teks *kabanti* yang disosialisasikan sejak manusia Buton masih bayi. Pada saatnya nanti nilai-nilai budaya tersebut menjadi karakter atau pengetahuan orang Buton ketika menjadi dewasa.

Dalam kehidupan masyarakat Buton di masa lalu, dikenal istilah *nabu polo* bagi pelaku perzinahan saudara. Masyarakat Buton melarang perzinahan, dan pelaku perzinahan dianggap sebagai manusia yang tidak manusiawi. Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat Buton khususnya masyarakat Wangi-Wangi menganal teks *kabanti* sebagai berikut.

E tehawa mbea di pooli
E di olo nasintuwu ano

Nafsu yang tidak dapat dikontrol
Di lautlah tempat perbaikannya

Untuk memperbaiki moral masyarakat Buton di bidang seks tersebut, di masa lalu, nilai-nilai itu disosialisasikan melalui *kabanti Kaluku Panda Atuwu Incana Dempa*. Dalam teks *kabanti* tersebut, generasi Buton mendapatkan pemahaman mengenai nilai-nilai budaya yang berhubungan dengan pembentukan karakter dalam kehidupan rumah tangga. Masyarakat Buton percaya bahwa kualitas seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu (1) faktor genetik, (2) faktor pembuatannya, dan (3) faktor perawatannya. Di dalam teks *kabanti Kaluku Panda Atuwu Incana Dempa* dijelaskan tata cara berhubungan seks itu dengan kutipan berikut.

Podo saide boli ukaago-ago
Pombulayitu bolipo sau pombula

Pelan-pelan dan jangan terburu-buru
Menanam itu jangan asal menanam

Ukamatapea wao molagi
Urango pea guntu rende ngkalelei

Lihat tanda hujan yang terus menerus
Engkau dengarkan bunyi yang merata

Teks di atas menjelaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan seks tidak boleh dilakukan dengan cara terburu-buru. Pekerjaan apa pun jika dilakukan secara terburu-buru hasilnya tidak akan memuaskan. Di dalam teks *kabanti* juga dijelaskan peringatan bahwa dalam menanam jangan asal menanam. Karena menanam (melakukan seks) dengan cara terburu-buru akan memengaruhi kualitas seks dan kualitas keturunan (Udu, 2007: 10).

Berikutnya, pada baris *lukamatapea wao molagi* "lihat tanda hujan yang terus menerus", *urango pea guntu rende ngkalelei* "engkau dengarkan bunyi yang merata", menjelaskan tentang tata cara rangsangan yang harus dilakukan pada semua daerah sensitif yang ada pada tubuh masing-masing pasangan (bagian sensitif pada kedua pasangan). Rangsangan harus merata baru dilakukan penanaman (melakukan penetrasi).

Sehubungan dengan waktu penetrasi, dalam naskah *kabanti Kaluku Panda* (KP) digambarkan bahwa harus ada tanda pasrah dari seorang istri baru melakukan penetrasi. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut.

Daangiapo tandana bibitona tawakala
Kumalintina pasaramo aumbamo
Pentaamea waona posaranakaa
Iweitumo maka upombulaia

Ada dahulu tanda kilat tawakal
Tanda pasrah pada Tuhan telah ada
Nantikanlah hujan yang menjadi harapan
Di situlah baru engkau menanam

Teks di atas merupakan petunjuk dalam melakukan hubungan seks yang menjelaskan bahwa rangsangan harus merata ke seluruh tubuh, dan perempuan telah tawakal baru dapat melakukan penetrasi. Hal ini dapat dilihat dari kilat dan guntur yang telah merata ke seluruh tubuh dan itu pertanda hujan telah dekat (Udu dalam Darmawan, 2009: 266-267).

Penggunaan teks-teks *kabanti* sebagaimana yang dijelaskan tersebut merupakan ruang sosialisasi nilai-nilai moral dalam masyarakat Buton. Melalui teks-teks *kabanti* semua itu dapat dilantunkan dengan mengungkapkannya melalui bahasa yang santun dan tinggi nilainya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pembentukan karakter masyarakat Buton dimasa lalu sedikit banyak dipengaruhi oleh kehadiran *kabanti* yang selalu dijadikan sebagai sarana pembelajaran nilai-nilai moral bagi generasi Buton. Sampai saat ini, bahkan sebagian masyarakat Buton masih tetap melantunkan teks-teks *kabanti* itu sebagai pengantar tidur atau mungkin sebagai sebuah nostalgia yang dilakukan orang-orang tua Buton pada masa lalu. Mereka selalu melantunkan teks-teks *kabanti* sebagai pengantar tidur bagi anak atau cucu-cucunya¹. Di samping itu, di masa lalu dan bahkan sampai sekarang di daerah pedesaan yang belum banyak disentuh oleh kemajuan teknologi, bayi masih selalu ditidurkan dengan *kabanti*.

3. *Kabanti* Sebagai Ruang Reklukturasi Budaya Buton

Berkurangnya nilai-nilai budaya Buton dari kehidupan masyarakatnya dewasa ini merupakan hal yang mengkhawatirkan, terutama bagi kelangsungan kehidupan budaya Buton di masa yang akan datang. Banyaknya penyelewengan nilai-nilai budaya dalam masyarakat Buton dapat berimplikasi pada pembangunan Buton secara umum. Beberapa indikator yang menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya Buton itu telah hilang dari masyarakatnya adalah banyaknya kerusakan moral dalam masyarakat Buton, mulai dari maraknya kehidupan seks bebas² sampai dengan banyak kasus pengrusakan hutan³ atau lingkungan serta tindakan korupsi yang marajalela di masyarakat Buton. Tindakan-tindakan seperti ini merupakan tanda bahwa nilai *kangkilo* dalam masyarakat Buton tidak lagi menjadi karakter hidup masyarakatnya, tetapi mereka lebih banyak melakukan *limpagi* dan *sabaragau* dalam kehidupan mereka.

Oleh karena itu, untuk kembali menanamkan nilai-nilai budaya Buton kepada masyarakat Buton dewasa ini diperlukan langkah strategis yaitu menghidupkan kembali *kabanti* sebagai sarana komunikasinya. Di samping sebagai sarana komunikasi nilai-nilai budaya seperti yang telah dijelaskan, *kabanti* juga merupakan ruang reklukturasi bahasa-bahasa daerah yang ada di negeri Buton⁴.

Di dalam masyarakat Buton dewasa ini, anak-anak yang menggunakan bahasa ibu bahasa Indonesia banyak ditemukan di daerah perkotaan. Gejala itu juga sudah mulai ditemukan di pedalaman. Jika gejala ini dibiarkan terus-menerus, bahasa-bahasa yang ada di daerah kesultanan Buton pelan-pelan akan hilang dan

¹ Sehubungan dengan hal tersebut, salah seorang anak Buton mengatakan bahwa sejak kecil saya selalu ditidurkan oleh kakeku dengan *kabanti* Bula Malino, (wawancara, Kamaruddin, 34 tahun tanggal 25 juni 2010).

² Munculnya video porno dalam masyarakat Buton merupakan bukti bahwa betapa rendahnya pemahaman nilai-nilai budaya dalam masyarakat Buton.

³ Data kerusakan hutan di daerah Buton dewasa ini merupakan bentuk dari hilangnya nilai-nilai budaya yang diabadikan dalam teks *kabanti*.

⁴ Gejala bahasa yang ada di dalam masyarakat Buton adalah anak-anak Buton sudah banyak yang berbahasa ibu bukan bahasa daerah Buton menjadi gejala sistematis akan lenyapnya bahasa-bahasa daerah di Buton di masa yang akan datang.

dengan sendirinya nilai-nilai budaya Buton akan hilang dari masyarakat pendukungnya. Bahasa merupakan kunci dari pengembangan suatu kebudayaan tertentu.

Dengan demikian, untuk menghidupkan kembali *kabanti* di tengah-tengah masyarakat Buton diperlukan kebijakan pemerintah di daerah-daerah eks-kesultanan Buton sebagai berikut: (1) kebijakan bersama mengenai *kabanti* sebagai identitas kebudayaan Buton; (2) kebijakan dalam dunia pendidikan agar anak-anak Buton diberi pembelajaran *kabanti* sebagai muatan lokal di sekolah; (3) selalu dilakukan lomba dan festival *kabanti* setiap tahun di Buton; (4) perlunya mengusung maestro *kabanti* dari setiap daerah dan bahasa yang ada di dalam wilayah kesultanan Buton; dan (5) diperlukan keinginan bersama agar *kabanti* dikembalikan fungsinya seperti pada masa lalu.

Penggunaan *kabanti* dalam proses rekulturasi budaya Buton dapat memberikan berbagai informasi mengenai berbagai nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat Buton dan moral masyarakat terhadap lingkungan dan keinginan untuk mengikuti hawa nafsu. Sehubungan hal tersebut dalam teks *kabanti Bula Malino* dinyatakan sebagai berikut.

Ee, karoku Bega-Bega yumalango
Yinda yufikiri kampo dona umurumu
Matemo yitu tayomo papogako
Te malingu saßara manganamu

Wahai diriku, janganlah mabuk
Tidakkah engkau pikirkan sisa umurmu?
Kematianlah yang akan menceraikanmu
Dengan semua anakmu

Temo duka saßara musirahamu
Wutitinayi tawa mosaganana
Ee karoku yada-yadari karomu
Nafusumu Bega-Bega yuyoseya

Dan juga dengan semua kenalanmu
Famili atau yang lain-lainnya
Wahai diriku, ajar-ajarilah dirimu
Nafsumu jangan terlalu ikuti

Jika teks *kabanti* tersebut masih tetap hidup dan menjadi karakter masyarakat Buton dewasa ini, dapat dipastikan bahwa tidak ada satu pun orang Buton yang mabuk dengan kehidupan dunia. Dengan demikian, baik masyarakat maupun pemerintah Buton akan tetap bekerja untuk membangun bangsa ini, mereka akan berpikir untuk memberi apa pun kepada bangsa ini, dan mereka tidak akan berpikir untuk mengambil apa pun dari bangsa ini.

Melalui teks-teks *kabanti*, moral masyarakat Buton tetap terjaga karena setiap individu Buton memiliki kontrol internal melalui nilai-nilai Buton tersebut dan akan menjadi karakter dirinya. Penanaman nilai-nilai Buton tersebut, sebagaimana diungkapkan dalam teks *kabanti* berikut.

Tabeyanamo nafusu rayudiyah
Nafusu sarongi marudiyah
Mo sarowu guru Bemoyadariko
Yinda molawana yada-yadari karomu

Kecuali nafsu radiyah
Nafsu yang dinamakan mardiyah
Walau seribu guru yang mengajariumu
Tiada bandingnya mengajari diri sendiri

Teks *kabanti* di atas tetap dilantunkan dalam kehidupan masyarakat Buton maka dapat melahirkan generasi muda yang dapat mengenal fitrah dirinya dan tidak menuruti hafsunya. Di samping itu, masyarakat Buton akan mampu melakukan refleksi atas segala tindakan dan perbuatannya sebagai sarana pembelajaran bagi dirinya. Pengalaman dalam hidupnya akan menjadi guru bagi dirinya karena *kabanti* merupakan ruang refleksi dari seseorang tentang apa yang dilakukannya dan akan dilakukannya. Melalui teks-teks *kabanti*lah masyarakat Buton dapat merefleksikan dan merencanakan kembali kehidupannya.

Untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya Buton dewasa ini diperlukan suatu kesadaran dan langkah bersama untuk kembali melantunkan *kabanti* di dalam berbagai kehidupan masyarakat Buton. Di sini, diperlukan keinginan politik dari pemerintah di eks-kesultanan Buton untuk memberikan ruang agar *kabanti* dapat tumbuh dan berkembang, terutama di sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintahan.

Di samping itu, pemikiran untuk menghidupkan *kabanti* sebagai salah satu asset daerah merupakan modal masyarakat Buton dalam memasuki era ekonomi kreatif. Potensi *kabanti* yang hadir dalam berbagai kesenian dan tradisi masyarakat Buton dapat menjadi salah satu asset ekonomi yang tidak akan pernah habis. Dengan demikian, *kabanti* dapat dikembangkan menjadi salah satu atraksi budaya yang dapat melengkapi tujuan wisata alam dan sejarah di tanah Buton. Misalnya, dengan menetapkan festival *kabanti* dalam kalender tahunan pariwisata Buton sehingga dapat mendorong tumbuhnya *kabanti* dalam kehidupan masyarakat Buton. Seiring dengan tumbuhnya *kabanti* diharapkan nilai-nilai budaya Buton juga akan terus tumbuh dan berkembang sampai di masa yang akan datang. Dengan melakukan festival *hekomba'a*¹ akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan potensi *kabanti* dan nilai-nilai budaya yang ada di dalamnya.

¹ Tradisi *hekomba'a* merupakan tradisi pembuatan api unggun di bawah sinar purnama, sambil melantunkan *kabanti*. Di samping itu, sambil melantunkan *kabanti* gadis-gadis mengerjakan berbagai kegiatan seperti menganyam tikar dan memasak minyak kelapa.

4. *Kabanti* Sebagai Ruang Akulturasi Budaya Lokal dan Global

Perjalanan bangsa Buton sebagai salah satu bangsa besar yang ada di negeri bawah angin ini dapat dilihat dari kemampuan bangsa Buton dalam melakukan adaptasi dengan berbagai perkembangan yang terjadi¹. Kemampuan bangsa Buton dalam melakukan berbagai penyesuaian ini tentunya memiliki strategi yang sesuai dengan berbagai dinamika kehidupan masyarakat tersebut.

Salah satu strategi bangsa Buton untuk tetap menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan dunia lainnya adalah kemampuan leluhur Buton dalam mengadaptasi berbagai perkembangan tersebut dengan menggunakan *kabanti* sebagai ruang akulturasinya. Melalui *kabanti*, masyarakat Buton bisa lebih luwes dalam menghadapi berbagai perubahan dan sekaligus menjadi sarana komunikasi yang paling efektif dalam menyeleksi berbagai nilai-nilai baru yang masuk ke dalam masyarakat Buton (Udu, 2010: 7).

Dalam perannya sebagai media akulturasi budaya lokal dan global, *kabanti* memiliki peran strategis dalam rangka menyeleraskan berbagai isu-isu global dalam masyarakat Buton. Untuk itu, penelusuran mengenai peran *kabanti* dapat dilakukan dalam berbagai dinamika perkembangan kebudayaan masyarakat Buton dalam hubungannya dengan berbagai perkembangan global. Untuk kepentingan itu, teks-teks *kabanti* telah memberikan beberapa contoh bagaimana masyarakat Buton memperlakukan berbagai dinamika perubahan budaya global. Untuk memperlakukan budaya global tersebut, masyarakat Buton mengenal *kabanti* sebagai berikut.

E tedaga todamba akone

Pendatang harus dilayani

E ako nomelalo-melalo

Agar sering datang

E te daga atu ntekokabi

Pendatang itu seperti mata kail

E sasampino dintogo nomo

Kalau terlepas ia akan pergi ke kampungnya

Dua bait teks *kabanti* tersebut memperlihatkan bahwa *kabanti* sebagai media akulturasi budaya lokal dan global dalam masyarakat Buton memiliki peran strategis terutama dalam upaya mempertemukan dua kebudayaan, yaitu budaya lokal dan global. Bait pertama menyampaikan bentuk keterbukaan masyarakat Buton terhadap budaya baru dan bait ke dua juga memberikan perhatian kepada masyarakat Buton untuk tetap waspada terhadap pendatang atau budaya baru. Dua bait *kabanti* di atas menggambarkan keterbukaan budaya Buton dalam menerima budaya baru atau global, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadirnya berbagai hal baru dalam masyarakat Buton. Nanun, di sisi lain, masyarakat Buton tidak mau kehilangan identitas lokalnya dengan memberikan perhatian bahwa budaya baru yang disimbolkan dengan kata *daga* itu akan selalu pulang atau belum tentu membawa nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Buton. Dari dua teks *kabanti* tersebut terlihat adanya peran *kabanti* sebagai media akulturasi budaya lokal dan global dalam masyarakat Buton di masa lalu.

Nilai-nilai universal yang ada dalam masyarakat Buton juga diperkenalkan ke dalam dunia global, misalnya konsep seks, *motika*², *kaindea*³, dan *untu*⁴. Melalui teks-teks *kabanti*lah semua itu diperkenalkan kepada dunia. Sementara di sisi lain, nilai-nilai global yang belum dikenal oleh masyarakat Buton masuk melalui teks-teks *kabanti* ke dalam kehidupan masyarakat Buton, tanpa mengalami penolakan yang tajam. Di sini dilihat bagaimana nilai-nilai universal Islam itu masuk ke dalam masyarakat Buton melalui lantunan *kabanti*.

Pemikiran masyarakat Buton tentang pentingnya pendidikan dibandingkan dengan harta benda, merupakan salah satu cara pandang masyarakat Buton tentang hidup, di tengah pandangan masyarakat dunia yang kapitalis dan materialistik. Masyarakat Buton lebih memilih menikahkan anak-anaknya dengan seorang sarjana atau orang berpendidikan dibandingkan dengan mengawinkan anak-anaknya dengan orang yang berharta. Untuk menyosialisasikan nilai kearifan lokal masyarakat Buton tersebut kepada dunia, mereka menggunakan teks-teks *kabanti* sebagai berikut.

E mou ane nambena-mbena

Walaupun ada kilauan harta

E kumetao la nsumikola

Saya akan menunggu yang sedang sekolah

E tesikola buntu te buku

Sekolah itu hanyalah buku

E temangaji tengkura ani

Tetapi yang mengkaji AlQuran

Dua bait teks *kabanti* di atas merupakan ruang akulturasi budaya Buton dengan budaya global seperti nilai-nilai ajaran Islam yang menghargai ilmu pengetahuan. Di samping itu, persentuhan masyarakat Buton

¹ Bangsa Buton pernah bertahan dalam beberapa abad, mulai abad XV sampai dengan akhir 1960 ketika mereka tidak mampu lagi mengangkat sultan sebagai symbol pemerintahannya.

² Konsep kearifan lokal masyarakat Buton tentang pengelolaan hutan.

³ Konsep pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat berisi masyarakat di daerah hutan berkewajiban menjaga keutuhan *kaindea*, dan mereka berhak untuk mengambil kayu atau bambu dengan izin *sara* (bdk, Nur Arafah, 2009).

⁴ Konsep kearifan lokal masyarakat Buton tentang karang atau laut. Mereka mempunyai mitos-mitos atau legenda tertentu tentang sebuah daerah (karang), yang pada akhirnya akan dihormati dan dihargai oleh masyarakat sebagai daerah perlindungan adat.

dengan berbagai perkembangan peradaban masyarakat modern yang berbasis ilmu pengetahuan akhirnya direspon oleh teks-teks *kabanti*. Persentuhan nilai-nilai lokal dan global dalam kehidupan masyarakat Buton tersebut menjadi nilai baru dalam kehidupan masyarakat Buton dewasa ini.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Buton terhadap nilai-nilai budayanya dan untuk memperkuat kebudayaan Buton agar tetap mampu bertahan dan beradaptasi dalam berbagai dinamika perkembangan global diperlukan rekulturasi nilai-nilai budaya Buton melalui teks-teks *kabanti* sehingga dapat disosialisasikan kepada masyarakat Buton dan dunia pada umumnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Mursal Esten (1999: 105) bahwa sastra lisan dapat menjadi sumber bagi suatu penciptaan budaya baru di dalam masyarakat modern. Dengan demikian, *kabanti* sebagai salah satu tradisi lisan masyarakat Buton dapat menjadi inspirasi dalam menciptakan kebudayaan baru dalam masyarakat pendukungnya.

5. Kondisi Masyarakat Buton dalam Konteks Budaya Lokal dan Global

Sebagai masyarakat maritim, masyarakat Buton telah lama melakukan berbagai kontak dengan berbagai belahan dunia lainnya. Sejak dulu, masyarakat Buton khususnya di Kepulauan Tukang Besi telah melakukan kontak ekonomi dengan beberapa negara besar di dunia, misalnya China, Protugis, Belanda, dan Timur Tengah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa bukti arkeologi yang ditemukan di beberapa benteng di Kepulauan Tukang Besi¹. Ini merupakan bukti bahwa masyarakat Buton telah lama memiliki kesiapan dalam melakukan kerjasama global. Hal ini disebabkan karena sejak abad XV bangsa Buton memiliki hubungan dengan Turki, Johor, Patani, Burnai Darusalam, Mesir, India, dan beberapa negara di dunia. Bahkan, Buton telah memiliki sistem pemerintahan *barata* yang otonom².

Namun, setelah Buton masuk ke dalam NKRI tahun 1960-an, otonomi Buton untuk melakukan hubungan luar negeri³ sudah diambil alih oleh pemerintah pusat R.I. di Jakarta. Kebijakan ini berdampak pada kehidupan politik luar negeri bangsa Buton. Sehingga ini akan memengaruhi keberadaan masyarakat Buton di era globalisasi. Di sisi yang lain, mudarnya nilai-nilai lokal dalam konteks keindonesiaan dewasa ini juga dialami oleh bangsa Buton sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia saat ini⁴. Hilangnya nilai-nilai lokal masyarakat Buton akibat tekanan ekonomi sebagai dampak dari budaya global, menyebabkan banyaknya nilai-nilai lokal yang hilang, terutama pada generasi muda Buton yang sudah mengenyam pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi. Akibatnya, nilai-nilai Buton tersebut banyak yang hilang dan bahkan rumah kebudayaan seperti *kabanti* pun dipertanyakan oleh mahasiswa Universitas Terbuka Pokjar Wangi-Wangi dan siswa Madrasah Tsanawiah Negeri Wanci⁵.

Namun, ditinjau dari jalur perdagangan, masyarakat Buton sejak tahun 60-an atau bahkan jauh sebelumnya telah melakukan hubungan perdagangan global dengan beberapa negara di dunia⁶. Bahkan sampai saat ini, mereka masih melakukan hubungan ekonomi dengan Singapura dan Malaysia, walaupun masih dianggap sebagai penyeludup⁷. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi masyarakat Buton, khususnya di daerah Kepulauan Tukang Besi sejak dulu, telah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan globalisasi yang ada⁸.

Kondisi masyarakat Buton dalam konteks budaya lokal dan global memiliki ketegangan budaya yang cukup besar. Di satu sisi, kepentingan budaya global dengan pasarnya dan di sisi yang lain, kearifan budaya lokal dengan keseimbangan alamnya. Oleh karena itu, agar nilai-nilai budaya lokal dapat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah serbuan budaya global yang berbasis pasar diperlukan rekulturasi budaya lokal terus-menerus melalui teks-teks *kabanti* sehingga nilai-nilai budaya lokal tersebut dapat menjadi identitas

¹ Laporan kajian teknis benteng yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi 2008.

² Sementara Amerika Serikat (AS) yang mengatasnamakan diri sebagai negara pertama yang mempraktekkan sistem pemerintahan demokrasi setelah dua ratus tahun (1776) dengan sistem federasi, setelah bangsa Buton mempraktekkan demokrasi dalam suatu sistem pemerintahan kesultanan Buton. Sistem federasi Amerika merupakan interteks dari sistem *barata* yang ada di Buton.

³ Dalam sistem pemerintahan kesultanan Buton, hanya ada dua hal yang diatur oleh pemerintah pusat, yaitu hubungan luar negeri dan masalah pertahanan keamanan. Di masa kesultanan Buton, daerah otonom (*barata*) tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan luar negeri dan memutuskan perang sebelum berkonsultasi dengan pemerintah pusat di Wolio.

⁴ Salah satu kegagalan bangsa Indonesia dalam pembangunan kebudayaan adalah terfokusnya pembangunan kebudayaan pada masyarakat tertentu yang dominan, sementara rumah-rumah kecil kebudayaan yang lain dilakukan upaya sistematis untuk mematikan kebudayaan tersebut. Akibatnya banyak masyarakat Indonesia yang mengalami distorsi kebudayaan, dan bahkan mengalami krisis identitas yang pada akhirnya bangsa ini mengalami krisis moral yang sangat mengerikan (bdk, Rahman, 1999: viii).

⁵ Dalam acara peluncuran tiga buku yaitu buku "*Perempuan dalam kabanti: Tinjauan Sostofemnis*", "*Spru Bahari Orang Buton*", dan buku "*Sejarah Kota-Kota Pantai di Sulawesi Tenggara*", tanggal 29 April 2010 di Aula Madrasah Tsanawiah Wanci. Siswa malah bertanya apa itu *kabanti*. Ini merupakan dampak dari mudarnya kebudayaan lokal, dan terus bergerak dan dominannya budaya global dalam masyarakat Buton.

⁶ Beberapa keramik yang tersebar di beberapa benteng di Wakatobi menunjukkan bahwa keramik itu adalah motif China, Protugis, Belanda, dan beberapa tembikar dalam negeri, hasil penelitian bersama tim di Benteng Tindoi, Mandati Tonga, Togo Melengo Kapota dan Patua di Tomia, (pengamatan tanggal 15-22 Oktober 2008).

⁷ Puncak penyeludupan masyarakat Buton adalah ketika dilakukan operasi gabungan oleh pemerintah R.I. pada tahun 1988 di Kepulauan Tukang Besi. Pada waktu itu banyak pedagang dari Kepulauan itu yang ditahan dan disita barang dagangannya oleh aparat kepolisian.

⁸ Aktivitas penyeludupan ini mengakibatkan hilangnya hutan di beberapa daerah yang ada di Buton. Pengambilan rotan dengan tujuan bisnis ini yang pada akhirnya berdampak pada kelestarian hutan yang selama ini dikonservasi oleh masyarakat adat, bahkan berdampak besar pada hilangnya ekosistem burung di daerah kepulauan ini.

masyarakat lokal dan sekaligus dapat menyeleksi nilai-nilai budaya global yang sesuai dengan nilai-nilai dasar masyarakat Buton.

6. Penutup

Masyarakat Buton memiliki budaya lokal yang perlu dilestarikan. Salah satu media untuk menyosialisasikan nilai-nilai lokal tersebut adalah media *kabanti* sebagai media rekulturasi budaya Buton. Selanjutnya, Buton juga tidak dapat terlepas dari perkembangan budaya global sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi serta perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk dapat menyaring berbagai bentuk dan gaya dari budaya global tersebut diperlukan kemampuan budaya setempat untuk tetap menyeleksi dan menyaring nilai-nilai global tersebut terutama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal Buton. Untuk kepentingan tersebut, sejak lama masyarakat Buton telah menyiapkan *kabanti* sebagai media penyaring dan protes masyarakat terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Oleh karena itu, *kabanti* sebagai media akulturasi budaya Buton dan global merupakan bukti kelenturan kebudayaan dalam melestarikan dan menerima kebudayaan baru dalam berbagai dinamika kebudayaan masyarakat Buton sehingga rekulturasi nilai-nilai budaya lokal melalui teks-teks *kabanti* perlu terus-menerus dipupuk dan dikembangkan. *Kabanti* juga sekaligus sebagai sarana untuk menyeleksi dan menyeleraskan nilai-nilai baru yang diterima masyarakat Buton.

Daftar Pustaka

- Arafah, Nur. 2009. *Kaindea: Adaptasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan di Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi*. Bogor: Disertasi Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Darmawan, M. Yusran. *Naskah Buton, Naskah Dunia: Prosiding Simposium Internasional IX Pernaskahan Nusantara di Kota Baubau*. Baubau: Penerbit Respect.
- Esten, Mursal. 1999. *Desentralisasi Kebudayaan*. Bandung: Angkasa.
- Hamid, Abdul Rahman. 2010. *Spirit Bahari Orang Buton*. Makassar: Raihan Intermedia.
- Hasaruddin, 2005. *Kabanti Palasa Mainawa: Sebuah Kajian Filologi*. Bandung: Tesis Pascasarjana Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.
- La Niampe, 1998. *Kabanti Bula Malino : Kajian Filologis Sastra Wolio Klasik*. Bandung : Universitas Padjadjaran: Tesis Program Pascasarjana.
- La Ode Nsaha, Tamburaka dan Asis. 1978/1979. *Aneka Budaya Sulawesi Tenggara*. Kendari: Proyek Penggalian Nilai-Nilai Budaya Sulawesi Tenggara.
- Rahman, Nurhayati dan Adiwimarta, Sri Sukesi. 1999. *Antologi Sastra Daerah Indonesia: Cerita Rakyat Suara Rakyat*. Jakarta: Masyarakat Pernaskahan Indonesia – Yayasan Obor Indonesia.
- Rusdin, Ali. 2002. *Kaluku Panda: Telaah Filologis Naskah Wolio*. Bandung: Tesis Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Udu, Sumiman dkk. 2008. *Studi Awal Benteng Mandati Tonga Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi*: Wangi-Wangi: Laporan Hasil Penelitian kerja sama Yayasan Keprihatinan Bangsa dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi.
- _____. 2008. *Studi Awal Benteng Patua Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi*: Wangi-Wangi: Laporan Hasil Penelitian kerja sama Yayasan Keprihatinan Bangsa dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi.
- _____. 2008. *Studi Awal Benteng Tindo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi*: Wangi-Wangi: Laporan Hasil Penelitian kerja sama Yayasan Keprihatinan Bangsa dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi.
- _____. 2008. *Studi Awal Benteng Togo Molengo II Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi*: Wangi-Wangi: Laporan Hasil Penelitian kerja sama Yayasan Keprihatinan Bangsa dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi.
- _____. 2006. *Citra Perempuan dalam Kabanti: Tinjauan Sosiofeminis*. Yogyakarta: Tesis Pascasarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada.
- Udu, Sumiman. 2007. *Konsep Seks Masyarakat Buton dalam Kabanti Kaluku Panda Atuwu Incana Dempa*. Bima: Makalah Simposium Internasional yang dilaksanakan oleh Masyarakat Pernaskahan Nusantara bekerja sama dengan Yayasan Samparaja.
- _____. 2008. *Kabanti sebagai Media Pembelajaran Sastra pada Anak Usia Dini*. Kendari. Majalah Humanika Edisi Maret 2009 Vol. 1
- _____. 2009. *Perempuan dalam Kabanti: Tinjauan Sosiofeminis*. Yogyakarta: Diandra.
- _____. 2010. *Trasisi Lisan Kabanti: Ruang Akulturasi Budaya Lokal dan Global dalam Masyarakat Buton*. Palembang: Makalah Seminar Internasional Bahasa dan Sastra yang dilaksanakan oleh Forkibastra dan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Komisi A
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 20 Juli 2010, 14.30—16.00 wita
Judul Makalah	: Sastra Lisan <i>Kabanti</i> Sebagai Ruang Rekulturasi Budaya Buton
Penyaji/Pembicara	: Sumiman Udu, S.Pd., M.Hum.
Pemandu	: Sry Satria Catur Wisnu Sasangka, M.Hum.
Pencatat	: Syaifuddin, S.Pd.
Jumlah Peserta	: 40 orang

TANYA JAWAB

Susanto Zuhdi (Universitas Indonesia)

Pertanyaan/Saran

Apakah dalam menembangkan *kabanti* atau apakah isi *kabanti* itu adalah petuah mengenai minum arak? Ini tentunya bertentangan dengan *kabanti* yang kita ketahui yang isinya berkaitan dengan akhlak dan tauhid.

Jawaban/Tanggapan

Di sinilah salah satunya letak perbedaan *kabanti* yang berkembang di keraton dan di luar keraton. Memang pada umumnya, *kabanti* yang ditulis oleh para sufi dan sultan mengandung nilai-nilai keagamaan. Yang berkembang di luar keraton (seperti di pesisir) cakupan kandungannya lebih luas. Teks *kabanti* juga menjelaskan nilai-nilai budaya Buton yang berhubungan dengan konsep seks masyarakat Buton, misalnya dalam *kabanti Kaluku Panda Atuwu Incana Dempa*. Jika dijelaskan dalam bentuk prosa atau ceramah, konsep-konsep yang berisi tentang nilai-nilai budaya Buton tersebut akan mendapatkan kendala, terutama dari masyarakat yang jarang ke masjid atau mereka yang selalu bersentuhan dengan dunia *kaindea* (daerah konservasi hutan). Namun, karena dinyanyikan dalam bentuk *kabanti*, nilai-nilai budaya Buton tersebut dapat dilantunkan di berbagai tempat, misalnya tempat judi, tempat minum di *kaindea*, di tempat pesta, di laut, dan di kebun. Selanjutnya, apabila konsep seks tersebut diajarkan dalam bentuk ceramah atau diskusi, ia bisa menciptakan diskusi yang berisi tentang pornografi. Akan tetapi, karena dilantunkan melalui teks-teks *kabanti* sehingga aspek pornografi tersebut dibungkus dalam bahasa konotasi atau bahasa sastra yang memiliki makna yang halus dan tidak vulgar. Dengan demikian, hampir seluruh aktivitas masyarakat Buton dapat disentuh oleh *kabanti* dan diterima dalam berbagai kehidupan masyarakat Buton.

Dimasa lalu, banyak diskusi dilakukan dalam *kainde* yang merupakan daerah konservasi hutan yang banyak ditumbuhi oleh pohon konau atau pohon aren. Di sanalah banyak diskusi dilakukan sambil minum dan mereka menghibur diri dengan syair-syair *kabanti*. Untuk kepentingan itulah banyak nilai-nilai budaya Buton yang diabadikan dalam teks-teks *kabanti*.

**PELESTARIAN BAHASA MELALUI PENELUSURAN KEKERABATAN
BAHASA-BAHASA DALAM WILAYAH ADMINISTRATIF YANG BERBEDA
(Tinjauan terhadap Isolek Bonerate di Lepas Pantai Selatan Pulau Sulawesi)**

Sandra Safitri

(Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)

1. Pendahuluan

Salah satu cara melestarikan bahasa-bahasa daerah yang tersebar di Indonesia adalah dengan menelusuri hubungan kekerabatan bahasa-bahasa yang berada dalam lingkup administratif yang berbeda. Dengan mengetahui hubungan kekerabatan bahasa-bahasa yang terpisahkan oleh wilayah administratif setidaknya dapat diperoleh informasi mengenai status sebuah bahasa yang secara tidak langsung upaya pelestarian bahasa tersebut dapat lebih terarah.

Informasi mengenai keberadaan sebagian rumpun Muna-Buton yang dituturkan di kawasan lepas pantai selatan Pulau Sulawesi telah lama diketahui berdasarkan penelitian Esser (1938), Snedoon (1975), Noordyun (1971), Adriani (1981), dan Collins (1982 dan 1987). Kepulauan lepas pantai selatan Pulau Sulawesi yang masuk ke dalam wilayah tutur subrumpun Muna-Buton adalah sebagian wilayah Pulau Selayar, Pulau Bonerate, dan Pulau Barang-Barang. Penelitian-penelitian tersebut menginformasikan bahasa Laiyolo di Pulau Selayar, bahasa Bonerate di Pulau Bonerate, dan bahasa Barang-Barang di Pulau Barang-Barang memiliki hubungan kekeluargaan yang erat dengan bahasa-bahasa di kepulauan lepas pantai tenggara Pulau Sulawesi. Bahasa Laiyolo dan bahasa Barang-Barang berhubungan dengan bahasa Wolio di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Demikian pula bahasa Bonerate berhubungan dengan bahasa Binongko di Pulau Binongko. Namun, penelitian-penelitian terdahulu belum menginformasikan kejelasan status hubungan kekerabatan bahasa-bahasa tersebut.

Walaupun demikian, hal tersebut telah menunjukkan bahwa batas bahasa tidak dapat disamakan dengan batas administratif. Mayoritas bahasa-bahasa yang dituturkan di kepulauan lepas pantai selatan pulau Sulawesi (kecuali Selayar) termasuk dalam keluarga bahasa-bahasa Muna-Buton. Keluarga bahasa-bahasa Muna-Buton sebagian besar terdapat di kepulauan lepas pantai tenggara Pulau Sulawesi. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya belum mengkaji lebih lanjut mengenai status hubungan kekerabatan bahasa-bahasa tersebut. Oleh karena itu, Bonerate lebih umum dikenal sebagai bahasa tersendiri yang memiliki hubungan kekerabatan yang erat dengan bahasa-bahasa di Kepulauan Wakatobi. Tulisan ini menelusuri lebih lanjut status hubungan bahasa Bonerate dengan bahasa-bahasa yang terdapat di Kepulauan Wakatobi.

2. Tinjauan Pustaka

Hubungan bahasa Bonerate yang digunakan di Kepulauan Selayar di bagian selatan Pulau Sulawesi, dengan bahasa di Kepulauan Tukangbesi di bagian tenggara Pulau Sulawesi sudah diketahui sejak Elbert (dalam Collins, 2007) mencatat persamaannya dengan bahasa Wanci. Walaupun Adriani (dalam Collins, 2007) tidak dapat mengkalsifikasikan bahasa Bonerate, Esser (dalam Collins, 2007) memang mengelompokkannya dengan bahasa di kepulauan Tukangbesi. Collins (dalam Collins, 2007) membandingkan data Bonerate dengan data Binongko dan menemukan beberapa inovasi fonologi bersama serta persentase persamaan leksikon yang tinggi.

Collins (2007) memaparkan penelitian yang menunjukkan hubungan bahasa-bahasa di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan sebagai berikut.

Di Sulawesi Selatan terdapat beberapa komunitas yang bertuturkan bahasa yang dilasifikasikan sebagai bahasa dalam Cabang Muna-Buton. Kebanyakan bahasa dalam cabang Austronesia ini didapati di Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti bahasa Muna sendiri dan bahasa Buton di kepulauan Tukangbesi. Namun di Sulawesi Selatan sudah dijejaki tiga bahasa dalam cabang Muna-Buton ini. Dapat dikatakan bahwa semua bahasa Muna-Buton di Sulawesi Selatan terletak di daerah periferi batas-batas provinsi.

Hubungan bahasa Bonerate yang digunakan di pulau-pulau jauh di bagian tenggara Sulawesi Selatan, dengan bahasa di Kepulauan Tukangbesi di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah diketahui sejak Elbert (1911-1912) mencatat persamaannya dengan bahasa Wanci. Walaupun Adriani (1914:265-266) tidak dapat mengkalsifikasikan bahasa Bonerate, Esser (1938) memang mengelompokkannya dengan bahasa di kepulauan Tukangbesi. Namun, Salzner (1960) mengikuti Kriebel (1920) yang mencemooh bahasa Bonerate sebagai "een mengelmoes" (lihat diskusi bagian 1 di atas); Salzner melabelkan bahasa Bonerate sebagai "Mischsprache". Dua puluh lima tahun lalu klasifikasi diusahakan dengan menuruti metode Linguistik Bandingan Historis secara sistematis. Collins (1982) membandingkan data Bonerate dengan data Binongko (kedua korpus itu dicatatnya sendiri) dan menemukan beberapa inovasi fonologi bersama serta kadar persamaan leksikon yang tinggi. Jadi klasifikasi Esser (1938) ternyata benar.

Demikian pula Safitri (2010) membandingkan data Binongko dan Bonerate secara kuantitatif dan kualitatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa status hubungan kekerabatan Binongko dan Bonerate merupakan bahasa yang sama. Perbedaan fonologi yang dijumpai hanyalah merupakan variasi-variasi dialektal yang tidak menimbulkan perbedaan bahasa.

Berangkat dari hasil-hasil penelitian tersebut dapatlah disusun suatu hipotesis bahwa jika Bonerate dan Binongko merupakan bahasa yang sama, besar kemungkinan Bonerate merupakan salah satu dialek dari bahasa Wakatobi (bahasa di Kepulauan Wakatobi, pantai tenggara Pulau Sulawesi). Penelitian Pusat Bahasa (2008) menyimpulkan bahwa bahasa-bahasa di Kepulauan Wakatobi merupakan satu bahasa. Berikut ini merupakan hasil penghitungan kekerabatan bahasa-bahasa yang dituturkan di Kepulauan Wakatobi oleh Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 1

Hasil Perhitungan Dialektometri Daerah Pakai Bahasa Wakatobi

No.	DAERAH PENGAMATAN YANG DIPERBANDINGKAN	PERSENTASE PERBEDAAN	STATUS ISOLEK
1.	Wanci – Kaledupa	43,03%	Perbedaan Subdialek
2.	Wanci – Tomia	39,99%	Perbedaan Subdialek
3.	Wanci – Binongko	41,79%	Perbedaan Subdialek
4.	Kaledupa – Tomia	44,18%	Perbedaan Subdialek
5.	Kaledupa – Binongko	45,23%	Perbedaan Subdialek
6.	Tomia – Binongko	33,13%	Perbedaan Subdialek

(Tim Pemetaan Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara, 2007)

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Binongko dengan bahasa-bahasa yang dituturkan di Kepulauan Wakatobi (Wanci, Kaledupa, dan Tomia) merupakan satu bahasa. Dengan demikian hipotesis sementara yang terbentuk Bonerate bukanlah merupakan suatu bahasa tersendiri melainkan merupakan salah satu dialek dari bahasa Wakatobi. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai hubungan Bonerate dengan dialek-dialek Wakatobi lainnya selain Binongko.

3. Analisis Kuantitatif Kekerabatan Isolek Bonerate dengan Dialek-Dialek Bahasa Wakatobi

Analisis kuantitatif kekerabatan isolek Bonerate dengan dialek-dialek bahasa Wakatobi dapat dilakukan dengan metode leksikostatistik ataupun dialektometri. Pusat Bahasa (2008) telah melakukan analisis kuantitatif terhadap kekerabatan bahasa-bahasa di Kepulauan Wakatobi dengan menggunakan metode dialektometri. Oleh karena itu, dalam tulisan ini analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode leksikostatistik agar hasil yang diperoleh saling melengkapi dengan hasil analisis yang dilakukan Pusat Bahasa.

Hasil analisis leksikostatistik terhadap Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko, dan Bonerate dapat dijabarkan sebagai berikut: Wanci-Kaledupa 80 %; Wanci-Tomia 79 %; Wanci-Binongko 79 %; Kaledupa-Tomia 83 %; Kaledupa-Binongko 85 %; Tomia-Binongko 91 %; Binongko-Bonerate 82 %; Tomia-Bonerate 81 %; Kaledupa-Bonerate 81 %; dan Wanci-Bonerate 70 %. Hasil analisis tersebut juga dapat dijabarkan dalam suatu tangga kekerabatan sebagai berikut:

Tabel 2

Persentase Kekerabatan Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko, dan Bonerate

Wanci	70%			
Kaledupa	81%	80%		
Tomia	81%	79%	83%	
Binongko	82%	79%	85%	91%
Bonerate	Wanci	Kaledupa	Tomia	

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif tersebut, diperoleh gambaran bahwa hubungan kekerabatan kelima isolek tersebut sangat erat bahkan dapat digolongkan sebagai bahasa yang sama. Adanya penyimpangan dari batas penentuan status hubungan kekerabatan (di bawah 80 %) hanya ditunjukkan oleh Wanci. Namun, hal ini masih dapat ditinjau kembali melalui analisis kualitatif dengan melihat hubungan kekerabatan di antara kelima isolek tersebut dengan bentuk purbanya juga dengan hubungannya dengan bahasa-bahasa lain yang masih tergolong dalam subrumpun Muna-Buton (dalam hal ini dapat diambil data bahasa Wolio dan Laiyolo).

4. Analisis Kualitatif Kekebabatan Isolek Bonerate dengan Dialek-Dialek Bahasa Wakatobi

Analisis kualitatif kekebabatan isolek Bonerate dengan dialek-dialek bahasa Wakatobi dapat dilihat melalui penelusuran unsur-unsur fonologi dan leksikal kosakata kelima isolek tersebut.

Penelusuran Unsur Fonologi

► Inovasi konsonan bilabial menjadi frikatif

Inovasi konsonan bilabial menjadi frikatif dapat dijumpai pada inovasi konsonan bilabial *b berubah menjadi (Wktb) [v]. Dalam rumpun bahasa Muna-Buton, inovasi ini hanya dijumpai pada dialek-dialek bahasa Wakatobi. Umumnya bahasa-bahasa dalam rumpun Muna-Buton tetap terefleksi sebagai [b]. Hal ini dapat dilihat pada beberapa contoh berikut ini.

PAN	Wanci	Kaledupa	Tomia	Binongko	Bonerate	Gloss
*bəRu	vɔɔu	vɔɔu	vɔɔu	vɔɔu	vɔ:ewu	baru
*batu	vatu	vatu	vatu	vatu	va:tu	batu
*bulu	vulu	vulu	vulu	vulu	vulu	bulu
*binay	vɔvine	vɔvine	vɔvine	vɔvine	vɔvine	perempuan

Bandingkan contoh tersebut dengan contoh berikut ini.

PAN	Wolio	Laiyolo	Ciacia	Muna	Gloss
*bəRu	b ^h a:u	ba:wu	wukɔu	bɔɔu	baru
*batu	b ^h atu	ba:tu	wacu	kɔntu	batu
*bulu	b ^h ulu	bul:u	wulu	vɔ:	bulu
*binay	b ^h ɔvine	payi:ne	mowine	hɔbinɛnɔ	perempuan

Contoh-contoh tersebut dapat dijadikan acuan awal untuk membuktikan acuan awal untuk menggabungkan isolek Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko, dan Bonerate sebagai satu bahasa, meskipun hasil perhitungan leksikostatistik Wanci dan Bonerate berada pada tataran 70 %.

Penelusuran Unsur Leksikon

► Kesamaan Leksikal Dialek-Dialek Wakatobi

Walaupun hasil perhitungan leksikostatistik isolek Wanci dengan isolek Bonerate menunjukkan sedikit kerenggangan untuk dimasukkan dalam kategori satu bahasa, contoh berikut ini memperlihatkan beberapa kosakata yang sama digunakan di kelima isolek tersebut.

Wanci	Kaledupa	Tomia	Binongko	Bonerate	Gloss
ɔnɔ	ɔnɔ	ɔnɔ	ɔnɔ	ɔ:nɔ	awan
kɔtti	kɔtti	kɔtti	kɔtti	kɔtti	balik
kɔmba	kɔmba	kɔmba	kɔmba	kɔmba	bulan
kɛnɛ	kɛnɛ	kɛnɛ	kɛnɛ	kɛ:ne	dengan
kɔni	kɔni	kɔni	kɔni	kɔ:ni	gigi
biru	biru	biru	biru	bi:ru	hitam

Dari contoh tersebut, beberapa di antaranya memperlihatkan adanya inovasi leksikal yang hanya dialami oleh kelima isolek tersebut. PAN *qitəm (hitam) > maɛta (Wl), etta (Lay), mokito (CC), dan kaito (Mn), sedangkan dalam isolek Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko, dan Bonerate terefleksi sebagai -biru dan -biru. Contoh lain yang menunjukkan hal serupa adalah PAN *bulən > bula (Wl), bu:la (Lay), wula (CC), dan vula (Mn), sedangkan dalam isolek Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko, dan Bonerate terefleksi sebagai kɔmba.

► Kesamaan Leksikon Wanci dengan Isolek Kaledupa

Salah satu faktor yang menyebabkan hasil perhitungan leksikostatistik isolek Wanci dengan Bonerate berada pada tataran 70 % adalah adanya pengelompokan dalam bahasa Wakatobi itu sendiri. Wanci dan Kaledupa yang lokasinya berdekatan menggunakan leksikon yang berbeda dengan kelompok Tomia, Binongko, dan Bonerate. Hal tersebut dapat dilihat pada contoh berikut ini.

Wanci	Kaledupa	Tomia	Binongko	Bonerate	Gloss
ahu	ahu	lukapi	lukapi	luka:pi	api
kɔ'ɔ	kɔ'ɔ	gɔpɔ	gɔpɔ	gɔ:pɔ	asap
tɔɔɛ	tɔ'ɔɛ	tɔɔha	tɔɔha	tɔɔ:ha	besar
bɔbɔ	bɔbɔ	vɔbɔ	vɔbɔ	vɔ:bɔ	cium
mavi	mavi	ta ^y i	ta ^y i	ta:yi	laut

Penentuan Status Isolek Bonerate sebagai Dialek Bahasa Wakatobi

Analisis kuantitatif dan kualitatif menunjukkan bahwa Bonerate dapat dikelompokkan sebagai dialek dari bahasa Wakatobi. Walaupun hasil perhitungan leksikostatistik Bonerate dengan Wanci menunjukkan penyimpangan, isolek Bonerate (dugaan sementara) masih tetap dapat dikelompokkan sebagai dialek dari bahasa Wakatobi. Hal ini disebabkan hasil perhitungan leksikostatistik Bonerate dengan dialek-dialek Wakatobi lainnya (Tomia dan Binongko) berada pada kisaran 80 %.

Hasil analisis tersebut diperkuat lagi dengan bukti-bukti kualitatif yang diperoleh melalui penelusuran fonologi dan leksikon yang menunjukkan kedekatan isolek Bonerate dengan dialek-dialek Wakatobi lainnya (Wanci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko). Berdasarkan penelusuran leksikon diperoleh pula adanya kedekatan Wanci dengan Kaledupa dan kedekatan Tomia, Binongko, dan Bonerate.

5. Pelestarian Bahasa Melalui Penelusuran Kekerabatan dalam Wilayah Administratif yang Berbeda

Analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap isolek Bonerate dengan dialek-dialek Wakatobi lainnya telah menunjukkan bahwa isolek Bonerate yang selama ini lebih dikenal sebagai bahasa tersendiri, bahasa Bonerate, ternyata berpeluang besar untuk dikategorikan sebagai salah satu dialek dari bahasa Wakatobi. Dengan demikian pelestarian bahasa Wakatobi hendaklah jangan hanya terbatas pada dialek-dialek Wakatobi yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai langkah pertama untuk memperkuat hipotesis ini dilakukan penelitian yang mendalam terhadap hubungan kekerabatan antara isolek Bonerate dengan dialek-dialek Wakatobi lainnya. Apabila hipotesis ini telah dapat dibuktikan dengan sejumlah data yang memadai, maka dapatlah dibuat kesimpulan yang akurat mengenai status isolek Bonerate sebagai salah satu dialek dari bahasa Wakatobi dan bukan sebagai bahasa tersendiri.

Oleh karena itu, pemisahan wilayah administratif janganlah menjadi penghalang upaya pelestarian bahasa-bahasa daerah yang tersebar di Indonesia. Hendaklah pelestarian bahasa daerah menjadi tanggung jawab bersama. Kajian ini telah membuktikan bahwa pelestarian bahasa di Provinsi Sulawesi Selatan bukanlah tanggung jawab masyarakat Sulawesi Selatan saja karena sebagian bahasa di Sulawesi Selatan merupakan bagian dari bahasa di Sulawesi Tenggara. Demikian pula sebagian bahasa di Sulawesi Tenggara ada pula yang merupakan bagian dari bahasa di Sulawesi Tengah (seperti Bungku dan Tolaki).

6. Simpulan

Kajian ini hanya merupakan contoh kecil terhadap salah satu cara pelestarian bahasa. Suatu hal yang dapat dipetik dari kajian ini adalah pemisahan wilayah administratif hanyalah pemisahan untuk mempermudah mengoordinisasi masyarakat. Penentuan batas bahasa memang tidak dapat disejalkan dengan penentuan batas administratif.

Daftar Pustaka

- Anttila, Raimo. 1989. *Historical and Comparative Linguistics*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Bynon, Theodora. 1977. *Historical Linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Campbell, Lyle. 1998. *Historical Linguistics: An Introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Collins, James T. 2007. "Sejarah Perbandingan Bahasa-Bahasa Sulawesi Selatan" dalam Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Selatan. Makassar: Panitia Kongres.
- Crowley, Terry. 1987. *An Introduction to General Linguistics*. Oxford: Oxford University Press.
- Dyen, Issodore. 1975. *Linguistics Subgrouping and Lexicostatistics*. Paris: Mouton The Hague.
- Donohue, Mark. 1995. *The Tukang Besi Language of Southeast Sulawesi Indonesia*. Australia: The Australian National University.
- Esser, S.J. 1938. *Talen In Atlas van Tropsich Nederland*. Amsterdam: Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap.
- Fernandez, Inyo Yos. 1995. "Bahasa Bima dan Komodo, Kajian Linguistik Historis Komparatif terhadap Dua Bahasa NTB dan NTT Secara Kualitatif dan Kuantitatif di Bidang Leksikon dan Fonologi". Laporan Penelitian. Yogyakarta: FIB Universitas Gadjah Mada.
- Lauder, Multamia, Buha Aritonang, Wati Kurniawaty, Hidayatul Astar. 2000. *Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia: Propinsi Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdiknas.
- Lauder, Multamia, Buha Aritonang, Wati Kurniawati, Hidayatul Astar. 2000. *Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia: Propinsi Sulawesi Selatan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdiknas.

- Lauder, Multamia. 1997. *Pedoman Pengenalan dan Penulisan Bunyi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Mahsun. 1995. *Dialektologi Diakroni: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahsun. 2007. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahsun. 2008. "Pemetaan Bahasa-Bahasa Daerah di Indonesia". Makalah dalam Kongres Bahasa Indonesia IX. Jakarta: Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional.
- Mbete, Aron Meko. 2002. *Metode Linguistik Diakronis*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Noorduyn, J. 1991. "The Languages of Sulawesi". dalam *Papers in Austronesian Linguistics No. 1*. halaman 137-150. H. Steinhauer (Ed). Australia: The Australian National University.
- Pusat Bahasa. 2008. *Bahasa-Bahasa di NKRI*. Dendy Sugono, Mahsun, Inyo Yos Fernandez, Kisyani Laksono, Multamia Lauder, dan Nadra (Ed). Jakarta: Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional.
- Safitri, Sandra. 2008. "Hubungan Bahasa Bonerate di Sulawesi Selatan dan Bahasa Pulo (Binongko) di Sulawesi Tenggara" dalam *Kandai*, Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra volume 1, tahun III. halaman 88-104. Kendari: Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.
- _____. 2010. "Isolek Bonerate dan Binongko, Dua Isolek di Pantai Selatan dan Tenggara Pulau Sulawesi: Kajian Linguistik Komparatif dan Dialektologi" *Thesis*. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Sneddon, James N. 1995. "Situasi Linguistik di Pulau Sulawesi" dalam *PELLBA 8*. halaman 139-175. Editor: Soenjono Dardjowidjojo. Jakarta: Lembaga Bahasa UNIKA Atma Jaya.
- The International Phonetic Association. 2001. *Handbook of the International Phonetic Association: A Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wurm, S.A. dan B. Wilson. 1975. *English Finderlist of Reconstructions in Austronesian Languages*. Canberra: Australian National University.
- Yamaguchi, Masao. 1991. "Perwujudan Fonem Proto Austronesia dalam Bahasa-Bahasa Sulawesi Selatan dan Sekitarnya". Dalam Kumpulan Makalah Simposium Internasional tentang Bahasa Daerah di Asia Tenggara. Yogyakarta: Pusat Studi Bahasa-Bahasa Asia Tenggara-Pasifik Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Komisi C
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 20 Juli 2010, 14.30—16.00 wita
Judul Makalah	: Pelestarian Bahasa Melalui Penelusuran Kekerabatan Bahasa-Bahasa dalam Wilayah Administratif yang Berbeda (Tinjauan terhadap Isolek Bonerate di Lepas Pantai Selatan Pulau Sulawesi)
Penyaji/Pembicara	: Sandra Safitri
Pemandu	: Neil Armstrong, S.S., M.Hum.
Pencatat	: Mahmudin Mulyadi, S.Pi.
Jumlah Peserta	: 40 orang

TANYA JAWAB

Dr. Inyo Yos Fernandez (Universitas Gadjah Mada)

Pertanyaan /Saran

Penelitian-penelitian mengenai hubungan kekerabatan rumpun Muna-Buton sejauh ini belum dijelaskan secara rinci. Penelitian yang telah dilakukan oleh Saudari Sandra dan Rahmawati masih berupa penelitian lingkaran-lingkar luar dari hubungan kekerabatan rumpun bahasa Muna-Buton. Penelitian ini sebaiknya ditindaklanjuti dengan melihat hubungannya dalam kelompok lingkaran tengah agar penelitian hubungan kekerabatan dalam rumpun bahasa Muna-Buton dapat dilakukan secara komprehensif.

Jawaban/Tanggapan

Terima kasih atas saran dari Bapak, saran tersebut akan kami tindak lanjuti dalam penelitian-penelitian ke depan.

Prof. Dr. Masao Yamaguchi (Universitas Setsunan, Jepang)

Pertanyaan /Saran

Saya senang karena ternyata hubungan kekerabatan bahasa-bahasa kelompok lepas pantai Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara telah mendapat perhatian dari peneliti-peneliti muda kita.

Saya ingin mengetahui data yang digunakan dalam penulisan makalah ini ada berapa jumlahnya dan sumbernya dari mana?

Bentuk rekonstruksi apa yang Saudari gunakan dalam menyusun tulisan ini?

Jawaban/Tanggapan

Terima kasih atas tanggapan Bapak.

Data dalam tulisan ini berupa 200 kosakata dasar Swadesh yang bersumber dari data tim pemetaan Pusat Bahasa, Kemdiknas.

Tulisan ini masih berupa pengamatan kasar saya dalam melihat hubungan isolek Wanci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko di Sulawesi Tenggara dengan isolek Bonerate di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, untuk sementara dalam tulisan ini saya menggunakan *top-down reconstruction* untuk melihat refleksi fonem Proto Austronesia dalam kelima isolek tersebut.

NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM SASTRA WOLIO

Rifai Nur
(Universitas Haluoleo)

Tak ada mesin penggerak organisasi yang lebih bertenaga dalam meraih keunggulan dan keberhasilan masa depan, kecuali visi yang menarik, berpengaruh, dan dapat diwujudkan, serta mendapat dukungan luas (Burt Nanus)

1. Latar Belakang

Nilai-nilai demokrasi sesungguhnya merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan nilai itu sebuah pemerintahan demokratis dapat ditegakkan. Nilai-nilai itu antara lain adalah kebebasan, menghormati orang lain, kesetaraan, kerja sama, persaingan, dan kepercayaan. Nilai-nilai tersebut sudah melekat pada kehidupan sosial dan politik masyarakat di Kerajaan Buton sejak abad ke-13 dan menjadikan Kerajaan Buton bermartabat pada zamannya di Kawasan Timur Indonesia.

Nilai-nilai itu telah berurat-berakar dalam kehidupan masyarakat dan mengalami pasang-surut sesuai dengan dinamika Kerajaan Buton. Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis untuk menemukembangkan kembali nilai-nilai itu untuk kemajuan daerah Buton sekarang dan yang akan datang. Kejayaan dan kemasyhuran Kerajaan Buton pada masa lalu dapat disimak dengan menelaah karya sastra Wolio, baik tertulis maupun lisan.

Melalui karya tersebut dapat ditemukan rasionalisasi kekuasaan yang melingkupi ruang lingkup kekuasaan seorang raja dalam tampuk pemerintahan. Yang menjadi raja atau pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat yang mewakilkan wewenang kekuasaannya itu kepada salah seorang yang terbaik di antara mereka yang kemudian melahirkan kelas *kaomu*, *walaka*, dan *papara*. Inheren dengan lahirnya kelas, maka dilakukan distribusi wewenang antara kelas *kaomu* dan *walaka* dan desentralisasi wewenang politik yang melahirkan hak otonomi daerah atas sembilan kampung pendiri kerajaan. Differensiasi ancaman dihalau oleh wilayah gerbang menuju Wolio di batasi dengan benteng sehingga tidak semua ancaman sampai kepada Wolio (pusat kekuasaan). Peningkatan peran politik rakyat dengan memelihara kesadaran elit kerajaan bahwa mereka berkuasa karena diberi wewenang, dianggap mampu, terbaik, dan mau mengurus kepentingan rakyat. Mencegah berkembangnya kekuasaan absolut dari rezim otoriter yang bertumpu pada penggunaan represi fisik dan ideologis untuk mendapatkan ketaatan warga negara.

Kekuasaan negara diatur sehingga tidak mudah untuk disalahgunakan dalam pelaksanaannya. Ada pembagian dan pembatasan wewenang kekuasaan pada setiap pejabat negara atas beberapa bidang kekuasaan, guna mencegah adanya dominasi atau monopoli kekuasaan yang dapat membuat pejabat penguasanya itu berubah menjadi absolut dan kemudian bersikap otoriter dan bertindak zalim terhadap rakyat.

2. Pembahasan

Kemajuan Kerajaan Buton sebagai salah satu kerajaan maritim di Indonesia pada masa lampau bisa dibaca dan ditemukan di arsip keluarga Kesultanan Buton, arsip nasional Makassar dan Jakarta. Bahkan catatan tentang Kerajaan/Kesultanan Buton ada yang tersimpan di arsip beberapa negara, seperti Belanda dan Portugis. Terdapat pula arsip pribadi dan keluarga yang masih disimpan secara pribadi. Dokumen itu ada yang bisa dibaca oleh selain pemiliknya, tetapi diyakini masih ada yang tidak bisa dibaca oleh publik.

Dokumen itu ada yang disadur dari naskah karya sastra dan ada yang sengaja ditulis oleh sekretaris kerajaan sebagai catatan kegiatan raja, ada pula yang berasal dari cerita rakyat yang kemudian ditulis. Karya-karya itu penting untuk dijahit dalam membangun kembali kejayaan Buton.

Di antara khasanah kekayaan masa lampau Buton itu salah satunya yang menarik untuk di temukembangkan adalah nilai-nilai demokrasi. Dengan nilai-nilai itu Kesultanan Buton memiliki kekuatan dan bermartabat sebagai salah satu kerajaan yang berpengaruh di Kawasan Timur Indonesia pada masanya.

Kerajaan Wolio Buton (baca Buton) dibangun oleh pemimpin "Patalimbona" bersama-sama dengan "Miapatamiana". Pemimpin 4 kampung, yaitu Kampung; Baluwu, Peropa, Gundu-Gundu, dan Barangkatopa. Miapatamiana adalah empat orang pemimpin armada pada abad ke 14; Sipajonga, Simalui, Sitamanajo, dan Sijawangkat¹. Keempat pemimpin itu (migran pendiri perkampungan Wolio dan Kerajaan Buton). Kerajaan

¹ Miapatamiana yaitu para pemimpin armada bermusyawarah untuk memperatukan diri dengan mendirikan perkampungan, melalui perintah keempat pemimpin armada tersebut, para pengikut melakukan "welia" yaitu tebas pada suatu tempat yang kemudian dikenal dengan Wolio

itu bernama Wolio, yang kemudian berubah menjadi Buton dengan pusat pemerintahan Wolio (tempat kita berdiskusi hari ini). Kerjaan ini berdiri pada abad ke 14 dengan raja/ratu pertama adalah Wakaka. Menurut Tamburaka (2003: 22) Wakaka memangku tahta kerajaan pada tahun 1338 dan berakhir pada tahun 1376.

Wakaka terpilih melalui suatu musyawarah yang diikuti oleh sepuluh orang pemimpin. Kesepuluh orang itu duduk melingkar. Mereka bertukar pikiran saling menakar siapa yang terbaik di antara mereka (semuanya orang baik-baik dan memiliki keutamaan). Dalam musyawarah itu, salah seorang di antara mereka bertindak sebagai pemimpin pertemuan dan berinisiatif menawarkan kepada satu persatu peserta musyawarah untuk menjadi raja, tetapi tidak satu pun bersedia. Selanjutnya pemimpin musyawarah melanjutkan dengan cara menghitung, yakni: "ise, jua, tolu, poa, dima, noo, pitu, walu, sio, sapuluh tengko ode". Sapuluh tengko ode bermakna kamu yang terbaik (hitungan kesepuluh) untuk memimpin negeri ini. Jadi kepemimpinan negeri ini akan diserahkan kepadamu. Wakaka terpilih sebagai kepala negara yang pertama Kerajaan Buton karena dia yang terbaik di antara yang baik dan pemimpin visioner.

Tatacara pemilihan kepala negara tersebut dipertahankan dan diundangkan dengan "Murtabat Tujuh", meskipun Kerajaan Buton berbentuk monarki kostitusional. Berdasar atas tata cara itu, setiap suksesi kepala negara tetap melalui mekanisme pemilihan yang dilakukan majelis "Patalimbona". Majelis ini kemudian berkembang menjadi "Siolimbona" yaitu 9 orang yang merupakan perwakilan dari 9 kampung.

Pencalonan dilakukan secara terbuka, tetapi lebih diutamakan dari keluarga kerajaan, khususnya putera mahkota. Setiap calon diseleksi berdasarkan kriteria: dewasa, berkeluarga, *siddik, tabliq, amanat, dan fathani*.¹ Putera mahkota yang belum dewasa dan belum berkeluarga gugur sampai yang bersangkutan memenuhi kriteria yakni dewasa dan berkeluarga. Kriteria berkeluarga terkait dengan penegakan moral yakni mencegah raja melakukan tindakan asusila. Perbuatan asusila tabu bagi raja dan masyarakat Buton, sebagai contoh sultan ke-8 di jatuhkan hukuman "gogoli" yaitu hukuman gantung menggunakan tali merah karena pelanggaran moral (Al Mujazi Mulku, 2010).²

Mengenai asal-usul Ratu Wakaka, ada yang mengatakan berasal dari Kerajaan Majapahit ada pula yang mengatakan berasal dari Wolio yakni seorang wanita yang keluar dari "Bulo Gading" (bambu kuning). Versi pertama, Tamburaka mengatakan bahwa Wakaka juga pendatang dari Majapahit. Versi kedua, dikemukakan oleh La Ode Manarfa bahwa Wakaka didapatkan dari dalam "bulo gading" yang di belah di atas batu³. Batu itu kemudian diberi nama batu "Papoa" (batu yang pada bagian tengahnya ada lubang yang menyerupai kelamin wanita). Batu itu kemudian dijadikan tempat pelantikan raja-raja dan atau sultan Kesultanan Buton.

Kemungkinan lain Wakaka⁴ berasal dari Kalimantan Timur (Kerajaan Kutai) yang bermigrasi melalui Sulawesi Selatan. Hal itu didasarkan pada penyebutan Wakaka sama dengan Wekoila (ratu I Kerajaan Konawe) dan We Tenriabeng saudara kembar Sawerigading (putra Batara Lattu raja ke-2 di Kerajaan Luwu), juga penyebutan "Wakka" untuk perahu yang ditumpangi. Mungkin pula Wakaka berasal dari Melayu.⁵

Diduga Wakaka berasal dari Melayu, karena: (1) pada abad itu hubungan melayu dan Majapahit terputus karena ekspedisi Majapahit ke Sriwijaya dan Melayu. Melayu tidak mau lagi ke Jawa membeli rempah-rempah melainkan langsung ke Maluku melalui Selayar dan Buton, (2) Wakaka dengan mudah diterima oleh "Miapatamiana". Kemudahan itu kemungkinan terjadi karena Miapatamiana dan Wakaka berasal dari daerah yang sama dan telah saling mengenal, (3) jika Wakaka berasal dari Majapahit, kelompok Miapatamiana sulit

berti membuat perkampungan, "Tamburaka, Sejarah Sulawesi Tenggara dan 40 Tahun Sultra Membangun, Laporan Penelitian yang tidak diterbitkan, 2003, hal. 21" Lihat juga Zahari "Sejarah dan Adat FIY Darul Butuni, Jakarta, 1977, hal. 26.

¹ Zahari, Abdul Mulku, 1977, Sejarah dan Adat FIY Darul Butuni, Jakarta, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

² Wawancara dengan Al Mujazi Mulku keluarga sekretaris kerajaan, pengelola museum Kesultanan Buton.

³ Tempat membelah bulo gading diberi nama "batu Papoa" artinya anak kami. Anak putrid dari Bulu Gading ini diberi nama Wakaka, juga dikenal dengan nama Mobetena I Tombula, maksudnya kulit kuning langsung. Ketika Wakaka di bawah menghadap Betoambari dalam cuaca buruk sehingga dia dipayungi dan diringi dengan bunyi gendang. Peristiwa memayungi Wakaka itu kemudian menjadi tradisi pelantikan raja-raja Kerajaan Buton. Rifai Nur dan La Ode Dirman, "Orientasi Nilai Budaya Orang Buton", Unhalu, 1994, 18-19. Lihat pula "Tamburaka, 2003, hal. 21, "tidak lama kemudian datang pula Wakaka yang dikawal oleh Dungku Cangia dan diusung ke tempat perkampungan mereka yang kemudian dinamai "Lelemangura".

⁴ penggunaan kata Wakaka di kenal di Luwu dalam bahasa Mori "Waka", menumpang perahu dan bahasa Bugis Kuno "Wakka" yaitu menumpang perahu. Apakah migrasi perdana dari tempat asal yang belum pasti lokasinya (boleh jadi Kalimantan Timur) yang penduduknya menggunakan bahasa yang serumpun dengan bahasa yang digunakan Sulawesi Selatan. Sementara Luwu berusaha mempertahankan kekuasaannya di kedua ujung timur dan barat, Teluk Bone dengan tetap menguasai Bira (Waniaga) dan Selayar (Silaja), serta menancapkan sedikit pengaruhnya di Buton (Wolio), Pelras, 2006: 131-132.

⁵ Mungkin pula Wakaka berasal dari Melayu, hal itu didasarkan pada upaya Melayu untuk mendapatkan cengkeh langsung dari Maluku. Pada abad ke 14. Melayu tidak lagi melalui Jawa, melainkan melalui Selayar dan Selat Buton. Pelras, 2006: 129. Adapun Wakaka berasal dari Majapahit didasarkan atas berita dalam Nagarakertagama yang menyebutkan perluasan wilayah kekuasaan ke wilayah timur Indonesia, termasuk Luwu-Banggai, Luwu dan Buton. Namun Pelras menyangsikan berita itu karena tidak pasti apakah Jawa pernah melancarkan ekspedisi militer ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan terkemuka Sulawesi Selatan, meskipun dalam tradisi lisan Buton terdapat cerita kedatangan pasukan yang dipimpin oleh perdana menteri Majapahit Gadjah Mada pada masa kekuasaan raja Hayam Wuruk. Bahkan disebutkan ... salah satu musuh yang diperangi di laut oleh Sawerigading malah disifatkan sebagai Jawa Wolio yang berarti "Jawa Buton", di Luwu sendiri terdapat tempat bernama Mancapai (Majapahit), Pelras, 2006: 130.

menerima Wakaka, karena hubungan diplomatik Majapahit-Melayu terputus, (4) Pelras tidak menemukan dokumen dan naskah "Nagarakartagama" adanya ekspedisi Majapahit ke kawasan Timur Indonesia (Pelras, 2006: 129-130)

Faham totem yang melekat pada Ratu Wakaka bahwa dia berasal dari "*bulo gading*" merupakan simbol. *Bulo gading* dapat diartikan sebagai bambu yang paling indah dan menarik di antara jenis bambu lainnya. *Bulo gading* juga dapat diartikan sebagai tempat atau asal Wakaka. *Bulo gading* simbol dari kebaikan, keutamaan, dan kecantikan, bahwa Wakaka adalah wanita cantik dengan sifat-sifat yang baik dan terpuji, cerdas, pemimpin yang dipanuti dan pemersatu. Upaya penokohan Wakaka sebagai manusia yang berbeda dengan umumnya manusia bertujuan agar Wakaka dapat diterima secara luas oleh masyarakat sebagai ratu dan pemimpinnya. Pelras (2006) mengatakan bahwa penokohan raja yang berasal dari luar bertujuan untuk mempertahankan posisi raja di tengah-tengah penduduk setempat agar dia tetap eksis memerintah dan dapat diterima secara luas.

Penokohan itu ternyata efektif menjadikan Ratu Wakaka sebagai kepala negara yang dapat mempersatukan dan menjaga keutuhan wilayah kekuasaannya hampir 40 tahun lamanya. Wakaka sebagai pemimpin negara baru yang terletak di jalur transportasi utama di Kawasan Timur Indonesia merupakan suatu reputasi besar, terutama keberhasilan itu dilakukan oleh seorang perempuan. Dari uraian tersebut dan naskah-naskah yang menjadi fakta-fakta sejarah ditemukan nilai-nilai demokrasi di dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan sosial Kerajaan Buton.

Nilai Kebebasan-Kesetaraan Warga dan Gender

Pemilihan Wakaka secara demokratis sebagai ratu pertama oleh sembilan laki-laki yang berpengalaman sebagai pemimpin kelompok dan kampung dengan sebutan *sapuluh tengko Ode*, menunjukkan bahwa di dalam masyarakat Buton sudah berkembang nilai demokrasi, yaitu kebebasan, kesetaraan antarwarga dan kesetaraan gender. Nilai kebebasan menyatakan pendapat, kesetaraan warga dan kesetaraan gender adalah hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin dengan undang-undang dalam sebuah sistem politik demokratis (Dhal, 1971). Kebebasan ini diperlukan untuk kemajuan suatu bangsa karena kebebasan warga baik individu maupun berkelompok menjadi prasyarat mutlak bagi kemajuan suatu bangsa. Kemajuan yang dicapai oleh kesultanan Buton pada masa lampau adalah buah dari berkembangnya nilai kebebasan, kesetaraan warga dan gender. Khusus nilai kesetaraan gender; pengakuan atas persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan telah berkembang. Masyarakat pada masa itu mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang sama sebagai makhluk sosial. Mengakui bahwa Laki-laki dan perempuan mempunyai akses yang sama dalam politik, sosial, dan ekonomi.

Walaupun dalam perkembangan kerajaan Buton, nilai ini kemudian mengalami pasang-surut dalam aplikasinya. Perubahan itu sejalan dengan lahirnya kelas-kelas dalam masyarakat Buton seperti, *kaomu* dan *walaka*, pada masa raja ke-2, kemudian dijustifikasi melalui "*Murtabat Tujuh*" oleh raja ke-6. Di samping berkembang dan menguatnya budaya patriakal dengan demostifikasi perempuan yang cukup kuat, yang menjadikan perempuan hanya memiliki peran kerumahtanggaan

Selanjutnya raja yang terpilih dilantik melalui suatu prosesi pelantikan di atas batu *Popua*. Raja dipayungi dan payung itu diputar, di atas payung diikatkan seutas tali dari kain merah. Raja duduk di atas batu kemudian pada punggungnya dituliskan sumpah atau janji yang sampai hari ini belum diketahui isi sumpah itu (Al Mujazi Mulku). Selain sumpah sakral yang ditulis di punggung raja oleh pemimpin spritual terdapat pula janji yang dikrarkan yaitu, "*Bolimokaro Sumana Lipu*" artinya mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi dan atau golongan.

Dari tata cara pemilihan Raja Buton tersebut didapati pula nilai kebebasan berpartisipasi dan berkelompok. Kebebasan berpartisipasi dan berkelompok dalam suatu organisasi diperlukan bagi setiap warga negara (Dhal, 1971). Kebebasan tersebut adalah memberikan suara pada pemilihan kepala negara (raja), kebebasan melakukan kontak dengan raja, dan kebebasan mencalonkan diri dan orang lain pada pemilihan raja. Nilai-nilai itu berlaku sejak pemilihan raja pertama di Kerajaan Buton. Walaupun dalam perkembangan selanjutnya mengalami perubahan, raja dipilih dari calon-calon yang diajukan secara terbuka. Meskipun bersifat terbuka tetapi dibatasi, karena calon diutamakan dari keturunan raja. Jadi hanya terbuka kesempatan bagi kelas *kaomu* dengan kriteria:

- a. *Siddiq*, artinya benar dan jujur dalam segala hal serta ridha berkorban untuk kebenaran;
- b. *Tabliq*, artinya mampu menyampaikan segala perkataan yang mendatangkan manfaat kepada rakyat;
- c. *Amanat*, artinya mempunyai rasa kepercayaan terhadap rakyat dan sebaliknya dipercaya oleh rakyat;
- d. *Fathani*, artinya pandai dan fasih berbicara.¹

¹ Zahari, Abdul Mulku, et al., 1977, Sejarah dan Adat FIY Darul Butuni, Jakarta, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen dan Kebudayaan.

Khusus putera mahkota selain memenuhi kriteria tersebut juga harus dewasa dan berkeluarga (Al Mujazi Mulku).

Peletakan "tali merah" di atas payung dimaksudkan selain sebagai asesoris lebih penting menjadi simbol peringatan adanya pelaksanaan "hukuman mati" kepada raja jika melanggar sumpahnya, baik sumpah yang diikrarkan maupun sumpah sakral yang dituliskan di punggung raja. Sumpah yang dikrarkan yaitu "*Bolimokaro Sumana Lipu*", janji untuk tidak mendahulukan kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok di atas kepentingan negara. Kemudian penulisan sumpah di punggung raja bernilai sakral dan bersifat sumpah kutukan. Apabila raja melanggar dia akan kena kutukan, yakni "tujuh turunan raja itu terkutuk".

Jadi sejatinya tak ada raja yang melanggar janji yang luput dari sanksi hukum. Seorang raja dapat lepas dari hukuman fisik, seperti hukuman mati, tetapi tak dapat menghindari dari hukuman moral yang bersifat kutukan. Masyarakat meyakini bahwa sumpah sakral yang bersifat kutukan mutlak sehingga sangat efektif dalam menciptakan "*good governance*" dan "*clean government*" yaitu pemerintahan yang bersih dan baik.

Nilai Rasa Percaya (*Trust*), Saling Menghormati, dan Kerja Sama

Bolimokaro sumana lipu, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompok melahirkan nilai demokrasi yaitu rasa percaya. Janji ini dikuatkan oleh peraturan kerajaan atau "*Sarana Wolio*" yaitu: "*Mataua ingkoo opebaangina sara itana Wolio sii pata angu kabarina. Baabaa opemae-maeaka, rua anguaka opo pia-piara, talu angu aka opo maa-maasiaka, pataangkana opo angka-angkatau*" (Zahari, et al., 2002). Artinya, ketahuilah kamu sekalian permulaan ketentuan permulaan syarat di negeri Wolio ini empat pokok jumlahnya, pertama takut-menakuti, kedua pelihara-memelihara, ketiga sayang-menyayangi, dan keempat hormat-menghormati. Dari naskah tersebut ditemukan nilai hormat- menghormati dan nilai rasa percaya rakyat terhadap raja dan jajarannya, adanya jaminan rakyat tidak akan mengalami ketakutan, kecurigaan, kekhawatiran, dan permusuhan. Raja akan terus menumbuhkan saling percaya raja terhadap rakyatnya, sebaliknya rakyat terhadap rajanya, begitupun di antara sesama warga, individu, maupun kelompok.

Selain nilai rasa percaya "*bolimokaro sumana lipu* dan *Sarana Wolio*" mengandung pula nilai demokrasi yakni kerja sama. Kerja sama tumbuh karena ada kebebasan, hormat-menghormati dan saling percaya. Kerjasama dimungkinkan terjadi karena setiap orang atau kelompok bersedia untuk mengorbankan sebagian dari apa yang diperoleh dari kerja sama tersebut. Nilai ini tidak berarti mengabaikan persaingan. Persaingan meliputi kebebasan berbeda pendapat semangat petualang orang-orang Buton. Kesediaan bekerja sama dan berbeda pendapat mendorong individu dan kelompok bersaing satu sama lain dalam mencapai tujuan yang lebih baik. Dengan nilai-nilai demokrasi itu, Kesultanan Buton mampu membangun diplomasi dan kerjasama, baik bilateral maupun multilateral.

Nilai tersebut melekat pula pada kontrak sosial yang melahirkan Kerajaan Buton. *Patalimbona* maupun *siolimbona* menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Negara Federal¹ (Kerajaan Buton), masing-masing daerah pembentuk kerajaan memperoleh wewenang sisa. Wewenang sisa yang melekat pada *Patalimbona* dan atau *Siolimbona* melahirkan otonomi yang luas. Bentuk ini bertahan hingga Agustus 1950, yang diselingi dengan bentuk negara kesatuan pada 1945-1946. Otonomi yang luas pada daerah pembentuk kerajaan menunjukkan adanya nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena otonomi daerah adalah salah satu wujud dari pelaksanaan demokrasi (Rauf, 2005 dan Nur, 2007: 35).

Demokrasi menuntut adanya kebebasan daerah untuk mengatur dirinya sendiri (otonomi daerah). Otonomi dibutuhkan oleh daerah untuk memperkuat kemandirian daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng pertahanan Kerajaan Buton. Kemandirian daerah bertujuan pula untuk mencapai kemajuan di segala bidang sesuai dengan pandangan dan kebutuhan masyarakatnya. Pada masa lampau dilaksanakan dalam konteks negara federal, tetapi sejak tahun 1950-an otonomi daerah dilaksanakan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Demokrasi telah membudaya di dalam masyarakat Buton dan telah berhasil mengantarkan Kerajaan/Kesultanan Buton sebagai salah satu negara yang berpengaruh di kawasan timur Indonesia pada masanya. Apakah daerah Buton saat ini masih bisa berpengaruh di kawasan timur Indonesia? Saya mengajak kita semua untuk bermimpi mewujudkan kebesaran Buton di masa lalu terulang lagi ke depan.

Untuk mewujudkan mimpi itu, perlu ditemukembangkan kembali nilai-nilai demokrasi yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Buton dan merefleksikannya dalam keseharian kita. Nilai-nilai itu sangat relevan dengan demokratisasi yang sedang dan akan terus digalakkan oleh pemerintah dan segenap elemen bangsa Indonesia.

¹ Kerajaan Buton berbentuk negara federal, hal itu didasarkan pada wewenang yang luas pada daerah pembentuk kerajaan. Masing-masing daerah menjalankan wewenang yang luas yang hampir sama dengan pemerintah federal. Daerah-daerah itu merupakan kerajaan-kerajaan kecil dengan otonomi yang luas.

3. Penutup

Kejayaan Kerajaan/Kesultanan Buton pada masa lampau dapat tercapai salah satu faktor penyebabnya adalah pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan kemasyarakatan. Nilai-nilai demokrasi yang berkembang pada saat itu adalah: nilai kebebasan, nilai kesetaraan warga dan gender (nilai ini mengalami pasang surut dalam aplikasinya), kerja sama, menghormati orang lain, persaingan dan nilai rasa percaya antarwarga negara, warga dan negara, serta negara dan rakyatnya. Nilai-nilai demokrasi itu melekat pada: pemilihan raja, tata cara pelantikan raja, sumpah raja pendirian kerajaan, penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.

Jayalah Buton Jayalah Indonesiaku

Daftar Pustaka

- Andaya, Leonard, Y., 2006, *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke 17*, Edisi ke 2, Makassar, Innawa, Diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok dari Buku *The Heritage of Arung Palakka: A History Of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth century*, The Hague, Martinus Nijhoff, Leiden, 1981.
- Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, 2005, Editor Syamsuddin Haris, Jakarta, LIPI Press.
- Dhal, Robert, A., 1971, *Polyarch: Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press.
- Nur, Rifai, 2007, *Otonomi Daerah: Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaannya di Sulawesi Selatan 1950-1959*, Disertasi tidak diterbitkan, U.I., Depok.
- Nur, Rifai dan La Ode Dirman, 1994, *Orientasi Nilai Budaya Orang Buton*, Tidak diterbitkan, Unhalu, Kendari.
- Pelras, Christian, 2006, *Manusia Bugis*, Jakarta, Nalar, Diterjemahkan dari Buku *The Bugis*, Oxpord: Blackwell Publishers Ltd, 1996.
- Tamburaka, Rustam, E., et al., 2004, *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 40 Tahun Sultra Membangun*, Tidak diterbitkan, Kendari.
- Wellek, Rene and Austin Warren, 1982, *Theory of Literature*, Penguin Books Ltd. Australia.
- Zahari, Abdul Mulku, 2002, *Katalog Naskah Buton*, Masyarakat Pernaskahan Nusantara, Yayasan Obor Indonesia.
- _____ et al., 1997, *Sejarah dan Adat FIY Darul Butuni*, Jakarta, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAHASA CIACIA DALAM PERADABAN DI LINGKUNGANNYA

La Ode Alirman
(Tokoh Masyarakat Buton)

1. Pendahuluan

"Ane mupake Bajuno mia koie kabie bajumu".

Jika engkau memakai baju orang lain jangan buang bajumu.

1.1 Asal Usul Bahasa Ciacia

Rumpun bahasa Suai :

- Kamaru,
- Lasalimu
- Ciacia
- Lontoi
- Kaimbulawa
- Kambe-Kambero
- Busoa
- Kase
- Kaisabu

Kata *cia* artinya tidak. Mungkin bahasa ini disebut Ciacia karena banyaknya kata *cia*. Bahasa Ciacia lahir dari rumpun bahasa Suai. Ada beberapa pendapat mengenai asal-usul Bahasa Ciacia, sebagai berikut.

- Tidak ada kampung bernama Ciacia.
- Dahulu masyarakat Wakatobi membeli beras merah dari Lasalimu, Pasarwajo, atau Sampolawa mereka namakan beras dari Suai.
- Mulai ada di bagian selatan pulau Buton bersama datangnya rombongan Sijawangkti, salah seorang Mia Patamiana.
- Datang bersama tibanya Wa Kaa-Kaa Raja, pertama di Buton dari negeri Cina, yang rombongannya mendarat di Wabula sehingga diperkirakan ada kemiripan bahasa Ciacia dengan bahasa Cina.
- Sudah menjadi bahasa penduduk asli di bagian selatan pulau Buton.

1.2 Ciri Khas Bahasa Ciacia.

Beberapa ciri khas Bahasa Ciacia sebagai berikut

- Semua kata berahir dengan huruf vocal, tidak ada konsonan
- Terdapat konsonan khusus /B/, /D/, (pengucapannya udara ditekan ke dalam mulut) dan huruf /d/
- Awalan bisa juga menjadi ahkiran (*no-mokito Baju-no, a-lumpa-a*)
- Hukum bahasanya bisa MD atau DM (*Inda'u ma'a isa, Isa maa'e inda'u*).
- Terdapat huruf konsonan yang diucapkan berbeda (R)

Bahasa Ciacia dapat dituliskan dengan menggunakan Aksara Wolio. Secara umum Dialek bahasa Ciacia dapat dibagi menjadi tiga rumpun besar yaitu:

a. Ciacia Kapara'e:

- Tira, Lande, dan Sampuabalo Wapulaka,
- Batuatas, Wapulaka, Burangasi, Pogalampa, Rano
- Rumpun Lapandewa (Sempa-Sempa, Rongi, Kaindea, Kaongke-ongkea, dan Tambunaloko)
- Todombulu, Saumolewa, Lapola
- Rumpun Laporo,
- Wakaokili
- Wabula, Wolowa, Matanauwe.
- Lasalimu-Ambuau
- Binongko (Wali, Oihu, Waloyindi, Lagongga, Wakarumende, Haka)

b. Ciacia Mbahae :

- Sampolawa (Mambulu, Katilombu dan Uwebonto)
- Wawoangi, Wawulaka, Makolona
- Masiri, Honelalo (Majapahit)

- c. **Ciacia Taina :**
 - Takimpo-Kondowa- Holimombo.

1.3 Penyebaran Masyarakat Berbahasa Ciacia

Pada zaman kesultanan, rumpun masyarakat penutur bahasa Ciacia meliputi wilayah yang masing-masing memiliki peranan sebagai berikut.

- Kapala Meja (Batauga),
- Bobato Mancuana (Sampolawa),
- Matana Sorumba (Lapandewa dan Wabula),
- Antona Soronga (Laporo).

Pada zaman sekarang penutur bahasa Ciacia meliputi wilayah:

Kabupaten Buton: Kecamatan Batauga (sebagian), Sampolawa (seluruhnya), Batuatas, Lapandewa, Pasarwajo, Wabula, Wolowa, Siotapina, dan sebagian Lasalimu Selatan.

Kota Baubau: Kecamatan Sorawolio; di Gonda Baru, Karya Baru, Kaisabu Baru (*Resettlement* tahun 1967-1971).

Kabupaten Wakatobi : Kecamatan Binongko meliputi Kelurahan Wali, Desa Jaya Makmur, Lagongga (Onelaro), Kampo-kampo (Wakarumende), Kecamatan Togo Binongko, Desa Hou (Oihu), Desa Waloyindi (Mole), dan Desa Haka.

Di luar Pulau Buton:

Kecamatan Wawonii, Kabupaten Konawe meliputi Desa Masolo dan Desa Nambo Jaya

Maluku Utara: Jiku Tamu di Pulau Obi, Jiku Hai di Obi Latu, Desa Gandasuli Pulau Bacan, Sanana, Desa Laoseng di Taliabo, Desa Mano di Gamumu.

Pulau Buru: Desa Pasir Putih (Batuatas dan Wali), Nanali (Batuatas), Waipandang (Makolona, Wawulaka), Karang Jaya (Lapandewa, Oihu), Saliang (Sampolawa).

Seram Barat Pulau Kelang: Tihu, Tiang Bendera, Gadoo, Tonu, Tomi-Tomi, Mangga Bongko, Pulau Sanahuni, Pasir Panjang, Huaroa, Eli, dan Asanjawa.

Daratan Pulau Seram; Melati, Nagalema, Olatu, Kambelu, Wayasi, Limboro, Tuhi Lesy, Air Pepaya, mayoritas dari Holimombo.

Kalimantan Timur Samarinda: Kelurahan Delima, Kelurahan Pahlawan (dari Lapandewa), Kelurahan Kebun Sayur, Sudimulyo, Pasar Sungai Dama (Gunung Sejuk rumpun Laporo), Kelurahan Sampaja, Jalan Kakap.

Bangka Belitung Kampung Nelayan Satu Sungai Liat (Sampolawa), Tanjung Gunung, Tanjung Berikat (Batuatas),

Pamana, Maumere, dan banyak lagi tersebar di seluruh Indonesia.

2. Beberapa Konsep Dasar Bahasa Ciacia dalam Peradaban

Dalam peradaban masyarakat Ciacia, bahasa memegang peranan utama dan sangat mendasar karena bahasa yang diucapkan adalah “**bahasa rasa**” atau “**ungkapan rasa**”. Fungsinya adalah sebagai sumber untuk membentuk suatu kepribadian warganya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjadikannya berbudi pekerti yang luhur, berbudi bahasa yang santun dan beradab sebagai manifestasi dari ajaran agama Islam yang dianutnya. Konsep dasar dalam berbahasa Ciacia dikenal dengan ungkapan-ungkapan :

- “*Pogau Cuminda, Batanga Tumantu*” artinya Bahasa yang jelas, kata yang pasti.
- “*Bembe totapu wukuno, manusia totapu pogauno*” artinya kambing yang diikat pada lehernya, manusia diikat pada ucapannya. -
- “*Kolie kaala laBi kolie kapake laBa*” artinya jangan mengambil lebih, jangan berkata bohong.
- “*TaDe asa hora asa, alalo asina 'a*” artinya berdiri bersama duduk bersama.

Sejak dini hingga remaja seorang anak telah mengalami pengetahuan sopan santun berbahasa yang membentuk pribadinya melalui kisah dalam dongeng-dongeng (misalnya *Anangkaelu, La Mangantalo, La Kambata*), legenda, atau peringatan dalam bentuk ungkapan, sindiran, dan perumpamaan (*misili*) seperti:

Pomali: (sesuatu yang pantang atau tabu untuk dilakukan menyangkut etika dan keselamatan)

- *Pomali toma'a imatano BoBa* artinya jangan makan di bendul pintu, *Pomali topikancuDa moapu holeo, Bara nokangkanai matano jini* artinya jangan melempar sore hari nanti terkena matanya jin.
- *Pomali topikamangkacu, nomotompu isie elanto*, artinya tidak boleh berbahasa kotor (caci maki) kita punya lidah bisa putus.
- *Pomali toma'a kalongko-longko*, artinya jangan makan dalam keadaan telungkup.

- *Pomali toma'a kaDese lopa, tokolopo isie* artinya jangan makan pisang kembar, nanti kamu kena panyakit gondok.
- *Palengara*: memotong pembicaraan orang.
- *LoBontonga*: mengambil kesimpulan sendiri dalam musyawarah.
- *Minculawa*: asal menjawab saja

Setiap pelanggaran atas pantangan atau hal yang tabu (*pomali*) yang masih tetap dilakukan akan dikenai sanksi-sanksi dalam Bahasa Ciacia seperti :

- *SoDompuhe* atau *CuDumpuhe* artinya penyakit berupa demam yang tidak bisa sembuh
- *Salaho* berarti sifat dan perbuatannya kelainan, tidak benar lagi
- *Ririmpuda* artinya penyakit kuning atau hepatitis, malaria tropika
- *Mateapu* artinya pucat pasi karena kurang darah, diabetes, tbc.
- *Ngkawurea/Silimodai/KuliDaa* artinya penyakit kusta.

Dalam pergaulan dituntut dengan berbagai cara bertutur sapa dan bercengkerama serta nasihat-nasihat:

- *Tabea*, yang diartikan permisi atau mohon izin wajib diucapkan jika hendak melintas di hadapan orang atau memulai suatu pembicaraan dalam musyawarah.
- *Jou*, panggilan penghormatan kepada seorang pejabat atau mantan pejabat atau tokoh dalam musyawarah adat.
- *Ane kapolaloi mai kabua-bua (mouse) atawa kalambe kolie kakotaro iworuno kawea (ngoi)* artinya jika engkau berpapasan dengan anak gadis jangan engkau berada di bawah angin.
- *Ane kapilingka-lingka (pihangka-hangka/piwila-wilaka) ka'ita manuno mia Bara kacuDa'e (Pando'e/Panawue), tondono mia para karungga'e* artinya jika engkau berjalan-jalan melihat ayamnya orang jangan engkau lempar, pagar orang jangan engkau bongkar.

Panggilan:

So'o = kamu untuk sesama umur atau yang lebih muda usianya

Simiu = untuk yang lebih tua.

Ingkita = untuk orang tua yang dihormati atau pejabat syara atau pemerintah masa kini.

Sebagai ungkapan penghormatan kepada seseorang sering menggunakan nama panggilan:

- *Ama La Misi* = ayahnya la Misi
- *Ama Wa Nesi (awanesi)* = Ayahnya Wa Nesi
- *Ina Wa Loji* = mamanya Wa Loji
- *Ina La Mia* = Mamanya La Mia
- *Ompu* = kakek atau nenek
- *Ompu-Ompu* = cucu
- *La Kolu, La Ai, La Ude* = nama panggilan untuk anak kecil laki-laki.
- *Wa Ai, Wa Uje, Wa Ngkuje* = nama Panggilan untuk anak kecil perempuan
- *Ode, ODe* = bapak atau laki-laki dewasa dari kaum bangsawan
- *Ida/ daida/Wauwa* = orang tua dari kaum bangsawan dihormati
- *Taata/Paapa* = Ibu/Mama untuk orang yang dihormati dari kalangan bangsawan.

Dalam adat istiadat atau acara yang berhubungan dengan peradatan dalam rumpun Ciacia ada semacam bahasa khusus yang menjadi tuntunan yang dikenal dengan *Batata* yaitu rangkaian kata-kata yang berisikan permohonan kepada Allah sang pencipta agar negeri ini senantiasa mendapat rahmat dan ridanya. Juga bila ada yang berbuat kezaliman atau kejahatan agar mendapatkan hukuman yang setimpal. Semua dilakukan dalam bahasa daerah Ciacia. *Batata* yang cukup terkenal adalah "*Batata Burangasi*". Ada beberpa *Batata* yang senantiasa diucapkan setiap upacara adat seperti *Ma'acia* (Lapandewa), *PikaBacua*, *Pikandeliala*, *Pidoa'ano Kuri* (Wabula), *Riapa* (Batutas, Wapulaka, Binongko) di antaranya *Gora'a* yaitu permintaan kepada Allah agar rakyat di negeri Ciacia tempat pelaksanaan *Gora'a* dilakukan senantiasa mendapat rahmat dan lindungannya, diridai dalam segala aktivitasnya dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai hamba dan *halifahtullah* di dunia. Bagi mereka yang melakukan kezaliman atau perbuatan buruk yang merugikan orang banyak atau seluruh isi negeri akan mendapat azab dan kutukan berupa beberapa penyakit atau binasa sekalipun.

Batata Gora'a permohonan:

Pindongoa'u simiu Allahu Kawasano Ompu, manga rabuno manga pandeno, jumaga-jagano korondo komintalea, munta-muntano kato'o, kaburi Dumawu-Dawuno razakii rahamati, culungiau pindongoa'u. Agumora isiemo manusiano liwuana (disebutkan negeri mana acara goraa ini dilaksanakan). Sadia nakoDaDi nako'umuru nakobahagia, nasanduu-Duu, napolagi-lagiaso mai syarano, wacino, paraBelano, mai pamarintano, ra'eyatino ahacuno ruahacuno, mai kakalambeno,

anamohaneno, ka'iyarono. Nami BaBa namikokombu, mamuDa'aso nowa'a toruku, nowa'a kolowu manusiano. Namisii-sii namilana-lana, namiwungano lampaha, namitombuno kaumu, namitombuno Bete, nami 'anano koicu, nami'anano lompa, nami'anano kulupiso. Gumora isiemo rajakiino liwuana, para'e nitauno naDumane'ewite, para'e nipinimbulano naDumaDi wite, namanuru naBangu, naBanguaso pikampo, naBanguaso piliwua.

Artinya : Dengarkanlah wahai Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui, Pemilik siang dan malam, yang menentukan nasib dan takdir, yang memberikan rezeki. Tolonglah, dengarkan aku. Kumohonkan manusia di negeri ini (disebutkan nama negeri tempat *Gora'a* dilaksanakan). Senantiasa hidup berumur panjang, berbahagia, damai bersama *syaranya, waci,* dan *ParaBelanya*, dengan pemerintah dan rakyatnya seluruhnya, yang seratus atau duaratus orang, gadis-gadis atau para janda serta pemuda-pemudanya. Terpikat hatinya, tegak setia bagai tiang penyangga agar manusianya berkembang mengalir mengisi lembah, mengisi bukit-bukit. Beranak cucu, bercicit berbuyut, seperti bibit bayam, seperti kelompok ikan *kaumu*, kelompok ikan *tembang*, seperti kelompok anaknya ikan lele, kelompok ikan *lompa*, rombongan burung pipit. Kumohonkan rezekinya negeri ini, apa yang ditanam akan tumbuh subur, semua yang kami lakukan senantiasa terwujud untuk membangun kampung, membangun daerah.

Batata Gora'a Sumpah:

Bara bundono, Bara lumalono, bara humorano iliwumamiana, naka'eje-eje, namohangusi, nasoba-soba katauno, soba-soba kapandeno, naBaligau, narungga-rungga kamondo, nantumale-ntale kasaangu, sadia naloBontonga, napalengara, saBaragau. Masangia namoropu namosoka, naBale namotoBe, nahumara namosogka, naBungku mbai kandamu-ndamuno kaDese, nasumunde mbai kakau, nasoDompuhe (cuDumpuhe), naririmpuDa, nangkawurea, namateapu isie, nalaintoBe.

Artinya: Barang siapa yang datang, yang lewat ataupun yang tinggal di negeri ini, berlaku jahat, zalim, sombong, menunjukkan kejagoannya, pamer kehebatannya, melawan kebenaran, mengubah kesepakatan, menceraikan persatuan, selalu memutuskan sendiri, memotong pembicaraan orang, berlaku seenaknya sendiri. Semoga hancur binasa, berkembang (bunga) dia gugur, berdahan dia patah, akan bungkuk seperti anak pisang baru tunas, badannya melengkung seperti kukuran kelapa (condong ke belakang), ditimpa sakit demam yang susah sembuh, penyakit kuning, kusta, pucut pasi kurang darah, dan akan mati muda.

Adapula *Batata Sokaia* yang merupakan acara pelantikan sekaligus penyumpahan bagi para pemimpin *syara kadie* seperti *ParaBela*. Dalam acara *Sokaia* ini tidak saja sang pemimpin yang disumpah tetapi rakyatnya pun ikut disumpah agar tidak mengkhianati pemimpinnya. Demikian pula sang pemimpin disumpah agar tidak mengkhianati rakyatnya. Sumpah *Sokaia* ini sangat mengikat antara pemimpin *syara* dengan rakyat sehingga mereka senantiasa saling percaya, saling mengasihi, saling mencintai dalam membangun kesejahteraan seluruh negeri. Siapapun yang berkhianat di antaranya telah menunggu kutukan dan musibah yang akan menimpanya berupa penyakit yang susah disembuhkan atau meninggal dunia secara tidak umum.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang keberadaan bahasa Ciacia sebagai salah satu bahasa daerah di Sulawesi Tenggara yang memiliki bentuk tersendiri dan mempunyai peran dalam budaya untuk membangun peradaban manusia di lingkungannya.

- a. Bahasa Ciacia telah hidup ratusan tahun berdampingan dengan bahasa daerah lainnya di daerah Buton Sulawesi tenggara.
- b. Penutur bahasa Ciacia selain di Pulau Buton, cukup luas juga penyebarannya di beberapa daerah di Indonesia
- c. Menjadi perekat persatuan bagi komunitasnya meskipun terdiri atas berbagai rumpun.
- d. Mempunyai struktur dan keunikan tersendiri dengan adanya beberapa huruf tertentu dan dialek yang beragam, namun tetap saling mengerti antara rumpunnya.
- e. Bahasa Ciacia memiliki sumpah khusus bagi warganya baik sebagai rakyat maupun sebagai pemimpin agar senantiasa bersatu, saling mengasihi, dan tidak saling menghina.

3.2 Saran

- a. Bahasa daerah digunakan mulai dari rumah tangga hingga dalam pergaulan di mana saja jika bertemu sesama penuturnya.
- b. Untuk menjaga agar tidak kehilangan identitas dan untuk melestarikan bahasa daerah Ciacia perlu adanya penelitian khusus lebih lanjut di seluruh wilayah penuturnya oleh para ahli bahasa sehingga terdokumentasikan dengan baik dan benar.
- c. Bahasa Ciacia tetap dijadikan bahasa sehari-hari dalam rumah tangga dan menjadi muatan lokal dalam pembelajaran sekolah dilingkungannya berdampingan dengan bahasa Wolio yang menjadi bahasa persatuan daerah Buton dan Kota Baubau secara keseluruhan.

LAMPIRAN

Beberapa Contoh perbedaan kosa kata bahasa Ciacia Kapara'e dengan Ciacia Mbahae :

Kapara'e	Mbahae	Artinya
<i>au</i>	<i>mantoa</i>	anjing
<i>aBaBa</i>	<i>awongko</i>	satu ikat
<i>akalu/akalulu</i>	<i>akale'e</i>	sebuah
<i>BoBo</i>	<i>wondu</i>	cium
<i>Beka</i>	<i>mbuta</i>	kucing
<i>Bua</i>	<i>mondawu</i>	jatuh
<i>cuke'e/cungke'e</i>	<i>Di'incu</i>	itu/disitu
<i>cumbu (kacumbu)</i>	<i>busu (kabusu)</i>	tinju
<i>taDu/pimbula</i>	<i>cika</i>	tanam
<i>inde'e</i>	<i>ie'e</i>	siapa
<i>inda'u</i>	<i>ia'u</i>	saya
<i>isa</i>	<i>kenta</i>	ikan
<i>hangka/wila</i>	<i>lingka</i>	jalan
<i>hora</i>	<i>pingkora</i>	duduk
<i>kajawa/katamana</i>	<i>ngkaowiwi</i>	ubi jalar
<i>kunde'e</i>	<i>kaluku</i>	kelapa
<i>kuDa</i>	<i>kabu</i>	batuk
<i>kui</i>	<i>bucu</i>	singgah
<i>konie</i>	<i>Bora'e</i>	mengetahui
<i>luku</i>	<i>guo</i>	email gigi
<i>mbaimpa'a</i>	<i>mbahae</i>	bagaimana
<i>moncuru/minoko</i>	<i>mooDo</i>	tidur
<i>panawu/pando</i>	<i>cuDa</i>	lempar
<i>paDe</i>	<i>kapulu</i>	parang
<i>para'e</i>	<i>haeno</i>	apa
<i>sangkola</i>	<i>soami</i>	kukusan
<i>to'aru/Dohata</i>	<i>Bari</i>	banyak
<i>una</i>	<i>Dika</i>	taruh/simpan
<i>wala-wala/kowala'a</i>	<i>raneo</i>	pagi
<i>winalu</i>	<i>Baku</i>	bekal

Beberapa Imbuhan (Afiksasi) dalam bahasa Ciacia:

Awalan (Prefiks) : a, ci, pi, pe, po, no, mi, mo, ka, pika.

Contoh :	<i>tongku:</i>	lembar	<i>atongku :</i>	satu lembar
	<i>BeBe :</i>	pukul	<i>ciBeBe :</i>	terpukul/dipukul
			<i>poBeBe :</i>	saling pukul
			<i>noBeBe :</i>	memukul
	<i>ala :</i>	ambil	<i>kaBeBe :</i>	peremukul
	<i>taDu :</i>	tanam	<i>piala :</i>	mengambil
	<i>panawu:</i>	lempar	<i>mitadu :</i>	menanam
	<i>lumpa :</i>	lompat	<i>pikapanawu:</i>	melempar
			<i>alumpa'a :</i>	satu lompatan

Sisipan (Infiks) : *um, in,*

<i>sampu :</i>	turun	<i>sumampu:</i>	akan turun
<i>solo :</i>	dukung	<i>sumolo :</i>	akan dukung.

Ahiran (Sufiks) : e, no, mo, pali, isie

<i>pisi :</i>	pijit	<i>pisie :</i>	dipijit
<i>ela :</i>	lidah	<i>etano :</i>	lidahnya
<i>ala :</i>	ambil	<i>alamo :</i>	ambilah
<i>molengo:</i>	lama	<i>molengopali :</i>	terlalu lama
<i>Dawu :</i>	beri/kasi	<i>Dawuisie :</i>	berikan padanya

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Komisi C
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 20 Juli 2010, 13.00—14.30 wita
Judul Makalah	: Bahasa Ciacia dalam Peradaban di Lingkungannya
Penyaji/Pembicara	: Drs. La Ode Alirman
Pemandu	: Drs. Ali Arham, M.M.P.
Pencatat	: Mulawati, S.Pd.
Jumlah Peserta	: 40 orang

TANYA JAWAB

La Edi (Tokoh Masyarakat Buton)

Pertanyaan/Saran

Penutur bahasa Ciacia lebih dari 1 juta jiwa, oleh karena itu bahasa Ciacia memang layak untuk diakui keberadaannya sebagai bahasa sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Prof. Dr. Multamia Lauder dalam penyajian makalahnya pada sidang pleno tanggal 19 Juli 2010. Bagaimana tanggapan Bapak? Apakah sudah ada penelitian penyebaran bahasa Ciacia dan penelitian sastra lisan Ciacia?

Jawaban/Tanggapan

Kami setuju dengan pendapat Bapak bahwa bahasa Ciacia memang layak bahkan harus diakui sebagai sebuah bahasa.

Penelitian aspek kebahasaan untuk bahasa Ciacia sudah banyak dilakukan oleh para peneliti bahasa, khususnya dari kalangan perguruan tinggi.

La Ode Maididun (Tokoh Masyarakat Buton)

Pertanyaan/Saran

Saya sependapat dengan penanya pertama akan status bahasa Ciacia mengingat jumlah penuturnya yang cukup banyak.

Kita ketahui bahwa bahasa daerah telah diatur dalam UUD 1945. Oleh karena itu melalui forum ini saya mengimbau agar pihak pemerintah daerah juga mengatur lebih rinci tentang bahasa daerah di wilayah pakai bahasa tersebut dalam suatu undang-undang atau peraturan daerah.

Jawaban/Tanggapan

Kami setuju dengan pendapat Bapak. Mudah-mudahan hasil kongres ini dapat dijadikan pijakan oleh pihak pemerintah daerah dalam menyusun suatu undang-undang atau peraturan daerah yang mengatur tentang bahasa daerah dalam wilayah pakainya.

Pamuda (Tokoh Masyarakat Buton)

Pertanyaan /Saran

Tampaknya peserta kongres yang hadir adalah orang tua, generasi mudanya kurang. Hal ini tentu sangat disayangkan.

Apakah ada yang pernah dilakukan untuk melestarikan bahasa Ciacia?

Jawaban/Tanggapan

Mudah-mudahan walaupun yang hadir dalam kongres ini kebanyakan generasi tua tetap tidak menyurutkan harapan kita untuk melestarikan bahasa dan sastra daerah. Para orang tua yang menghadiri kegiatan ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan hasil kongres kepada anak-anak mereka.

Banyak usaha yang telah dilakukan untuk pelestarian bahasa Ciacia di antaranya berupa penelitian-penelitian aspek kebahasaan, penyusunan kamus, dan penggunaan bahasa Ciacia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bila berada di rumah.

MAKNA SUPERIORITAS TOKOH ADIK DALAM CERITA RAKYAT MORONENE

Heksa Biopsi P.H.
(Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)

1. Pendahuluan

Fakta bahwa sastra memiliki fungsi sebagai fungsi penyampai pesan atau amanat dari penciptanya sudah sangat bisa diterima. Sekecil atau sebesar apapun, seorang pencipta karya sastra pasti mempunyai angan-angan ideal yang ingin disampaikannya melalui sebuah karya. Sastra dalam berbagai bentuknya mampu menjadi wadah bagi setiap ungkapan yang disarati oleh makna. Pemuatan makna dilakukan oleh pencipta dengan serangkaian pengharapan terhadap penikmatnya. Puisi dengan untaian kata-kata yang membutuhkan pendalaman terhadap setiap baitnya mampu melakukan fungsi sebagai pengemban amanat penciptanya. Bahkan pantun, sebuah bentuk puisi yang sederhana, digunakan sebagai sarana penyampaian pesan sejak masa lampau.

Cerita rakyat (folklor) merupakan salah satu bentuk sastra yang biasanya dikategorikan ke dalam kelompok sastra lisan walaupun pada zaman sekarang sudah banyak sekali cerita rakyat yang dibukukan, dipentaskan, bahkan diekspos di dunia maya. Hal ini bisa dimaklumi karena cerita rakyat sebagai sastra tradisional (*traditional literature*) merupakan suatu bentuk ekspresi masyarakat pada masa lalu yang umumnya disampaikan secara lisan (Mitchell dalam Nurgiyantoro, 2005:163).

Tidak terkecuali sastra lisan (dalam hal ini dongeng rakyat) yang kemunculannya merupakan hasil kreativitas kolektif sebuah komunitas di sebuah daerah tertentu. Banyak tuntunan atau ajaran hidup tertuang dalam aliran cerita yang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Para orang tua bermaksud mengajarkan suatu pesan moral kepada generasi di bawahnya melalui kata-kata yang terangkai dalam sebetuk cerita yang diharapkan mampu menggugah nilai rasa di dalam kalbu pendengarnya.

Apabila nasehat-nasehat dilontarkan berupa ujaran-ujaran biasa, tentu akan terkesan menggurui dan belum tentu yang mendengarnya bisa menerima dengan lapang hati. Ketika pesan tersebut terselip dengan halus dalam sebuah cerita, yang sasaran utamanya adalah anak-anak, maka besar harapan mereka akan menangkap pesan moral yang ditiptikan tanpa paksaan dengan segenap kemampuan mereka mencerna kisah tersebut. Sebuah perasaan dilukiskan ke dalam karya sastra, karya hati ataupun jiwa menjadi jauh beretika dan berestetika dalam menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain.

Di antara pesan yang banyak diamanatkan oleh para orang tua kepada generasi penerusnya adalah nilai-nilai keberanian dan keyakinan terhadap kemampuan yang ada. Banyak cerita yang mengisahkan perjuangan seseorang dalam mencapai suatu tujuan. Dengan kemampuan yang ada, si tokoh tersebut dikisahkan dapat memperoleh hasil yang diharapkan.

2. Makna Superioritas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata superioritas adalah nomina yang mengandung arti keunggulan; kelebihan.

Superioritas atau dominasi seorang tokoh atas tokoh lainnya ketika menghadapi konflik di dalam sebuah cerita tentu mengemban pesan tertentu dari si empunya cerita untuk para penikmat atau pendengarnya. Sebagaimana kita pahami bahwa sastra selalu membawa misi sebagai teladan bagi umat manusia dalam berkehidupan. "Salah satu fungsi sastra adalah sebagai sarana fatwa dan nasihat. Sastra banyak memberikan fatwa kepada pembaca baik secara langsung maupun secara tidak langsung" (Tasai, 2003:57).

Tokoh di dalam sebuah cerita yang diatur sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan unggul atau superior mengemban amanat khusus dari pencipta untuk penikmatnya. Ketika ia digambarkan sebagai orang yang kuat secara fisik, bisa jadi pesan yang hendak disampaikan adalah pentingnya kita menjaga stamina tubuh kita sebagai wujud rasa syukur terhadap karunia Tuhan.

Cerita Rakyat Moronene, *La Ganta-ganta Da Rake Namo Mandara*

Cerita ini berkisah tentang dua orang anak kakak beradik yang tinggal dengan ibu mereka di sebuah desa. Dalam sebuah negeri, tinggal dua orang anak laki-laki dengan seorang ibu yang sudah tua. Anak laki-laki itu bernama I Nanambo dan I La Ganta-Ganta, yang kakak I Nanambo dan yang adik I La Ganta-Ganta. I La Ganta-Ganta seorang anak yang lucu-lucu dan cerdas. Dalam negeri itu tinggal pula laki isteri dengan seorang anak laki-laki. Nama orang-orang besar itu Tangkasuala'a dan Kasuala.

Ketiga orang-orang itu, suka sekali makan daging. Terlebih-lebih daging manusia. Orang-orang itu sangat ditakuti penduduk negeri itu. Tangkasuala'a (1) dengan anak isterinya besar sekali dan tinggi sekali.

Pada suatu hari, ibu Nanambo dan Laganta-ganta meninggal dunia. Setelah tiba hari yang ketiganya, maka si Nanambo menyuruh Laganta-laganta pergi ke sebuah kampung untuk mengundang lebe (2) yang akan melebehkan arwah makam (ibunya).

Lebe yang tinggal di kampung yang akan dikunjungi Laganta-ganta sebentar tidak diketahui namanya. Hanya yang diketahui Nanambo, bahwa Lebe yang tinggal dalam kampung itu berjanggut dari itu pesan Nanambo kepada Laganta-ganta supaya ia mengundang seorang lebe yang berjanggut, nanti ia pergi mengambil kerbau yang hendak disembelih. Sesudahnya Nanambo dan Laganta-ganta masing-masing berangkat. Laganta-ganta berangkat tiba di kampung tempat lebe. Ia keliling di kampung itu tidak didapatinya seorang pun yang berjanggut. Hanya seekor kambing jantan yang berjanggut. Oleh sebab Laganta-ganta suka yang lucu-lucu, maka diburunya kambing jantan yang berjanggut sambil dipanggilnya, "Hai lebe, marilah engkau ke tempat saya, untuk lebehan ibuku". Tetapi kambing jantan yang berjanggut itu berjalan terus lari; sambil berbunyi, "Mbeee, mbeeee...!"

Sesudahnya Laganta-ganta lelah memburu kambing berjanggut, pulanglah ia dengan terengah-engah kepayahan. Setelah Laganta-ganta bertemu dengan Nanambo, maka Nanambo bertanya, "Di manakah lebe yang kau undang?"

"Hmm, lucu lebe, lebe yang berjanggut di sana, dia lari-lari sambil dia berkata mbeee, mbeeee.... Wah, bukan lebe itu, melainkan kambing! Ha, ha, ha, ha, padahal binatang dangau". Sengaja berlucu-lucuan si Laganta-ganta.

Marahlah Nanambo mendengar kata-kata lucu si Laganta-ganta, lalu berkata, "Pergilah engkau memanggil seorang laki-laki yang tua, untuk mengatur (menjaga) daging kerbau yang akan dimasak, nanti saya pergi mencari lebe".

"Daulat tuanku!" Lucu-lucu si Laganta-ganta, sambil berjalan. Dan sambil berjalan ia berpikir, "Alangkah baiknya, kalau Tangkasuala'a yang saya panggil dan saya coba-coba menipu dan mengakali dan kalau dapat, saya akan membunuhnya, supaya tidak ada lagi yang memakan orang-orang dalam kampung".

Sesudah Laganta-ganta berpikir demikian, singgahlah ia ke rumah Tangkasuala'a, lalu berkata, "Ya nenek, saya disuruh kakakku mengundang nenek datang ke rumah kami untuk menjaga dan mengatur daging kerbau kami, yang sebentar akan dimasak untuk orang-orang yang menyelesaikan kubur ibu kami". Jawab Tangkasuala'a, "Baiklah! Kita bawa juga bersama-sama adikmu Kasuala'a, supaya engkau beri makan daging".

Lalu berangkatlah ketiganya bersama-sama menuju rumah Nanambo. Sesampainya di tempat kerbau yang telah disembelih maka Tangkasuala'a terus menjerit semua daging kerbau, sehingga tulang-tulangnya saja yang ditinggalkan, lalu ia berkata, "Hai Laganta-ganta, biarlah engkau layani adikmu Kasuala'a dan saya kembali membawakan daging bibimu". Setelah Tangkasuala'a pergi, Laganta-ganta mulai memberi makan kepada Kasuala'a.

Oleh sebab Kasuala'a terlalu banyak makan daging, maka La Ganta-ganta berkata, "Coba buka mulut dan tutup matamu, supaya saya suapi baik-baik". Sesudah La Ganta-ganta memasukkan seruas tulang paha kerbau ke dalam mulut si Kasuala'a lalu dipukul dan masuk kerongkongan si Kasuala'a sehingga mati. Melihat peristiwa itu tamu-tamu mereka ketakutan, lalu pulang lari bersama.

Nanambo dan La Ganta-ganta pun terus lari bersembunyi di sebelah luar pagar rumah. Belum sempat lari jauh Tangkasuala'a datang.

Setelah dilihatnya Kasuala'a keadaan mati, maka dicarilah Nanambo dan La Ganta-ganta. Oleh karena Tangkasuala'a dapat jalan untuk bertemu dengan mereka, maka dipanggil; katanya, "O, Nanambo!" Bisik Nanambo kepada La Ganta-ganta supaya diam. tetapi malahan si La Ganta-ganta berteriak, "Di sini kami bersembunyi!" Sangat marah Nanambo kepada La Ganta-ganta, lalu keduanya lari sekuat-kuatnya sampai mereka pada suatu tempat kumpulan suluran berduri (kamo woto), lalu menyuruh masuk bersembunyi di bawah kumpulan kamo woto.

Karena Tangkasuala'a terlalu tinggi, maka tidak mudah masuk ke dalam tempat itu. Tidak berapa lama kemudian datanglah Tangkasuala'a di tempat persembunyian Nanambo dan La Ganta-ganta lalu Tangkasuala'a memanggil, "Hai La Ganta-ganta! di manakah engkau?" Nanambo yang sangat takut, membisiki adiknya, katanya, "Jangan kasihan menyahut!" Berteriaklah La Ganta-ganta yang katanya, "Di sini kami ada bersembunyi!" Tangkasuala'a terus berusaha untuk memasuki tempat itu.

Karena sukarnya bagi Tangkasuala'a untuk masuk di tempat itu maka sempatlah mereka lari sehingga sampai pada suatu sungai yang lebar sekali dan dalam sekali pula.

Di dalam sungai yang besar itu banyak sekali buaya yang besar-besar. La Ganta-ganta mengajak Nanambo memotong beberapa bambu, disambung-sambungannya dijadiannya titian untuk menyeberang. sesudah itu, menyeberanglah mereka ke seberang sungai besar itu. Dan titian itu ditariknya lalu dipotong-potongnya supaya tidak dapat dipergunakan lagi.

Sesudah titian itu dipotong-potong berdirilah La Ganta-ganta di pinggir sungai sengaja memperlihatkan diri pada Tangkasuala'a. Tidak berapa lama kemudian Tangkasuala'a datang, lalu turun bertanya, "Bagaimana jalan sehingga kamu sampai di situ?"

“Janganlah La Ganta-ganta memberitahukan jalan kita”, kata Nanambo. Malahan La Ganta-ganta berkata, “Kami berusaha ijuk banyak-banyak lalu kami bungkuskan tebal-tebal dari kepala sampai di ujung kaki, lalu kita ikat baru menutup mata terus kami terjun dengan kepala lebih dahulu ke dalam sungai itu. Tiba-tiba keluar berdiri di tepi ini.”

“Kalau begitu lemparkan kemari parangmu itu supaya dapat pergi mengambil ijuk banyak-banyak dan saya membungkus seluruh tubuhku dan saya terjun seperti kamu!”

“Jangan kasihan La Ganta-ganta memberikan parang kita,” kata Nanambo. Malahan parangnya dilemparkannya kepada Tangkasuala'a, dan katanya, “Sesudah nenek selesai mengambil ijuk, nenek lemparkan kembali.”

Parang itu diambil Tangkasuala'a, lalu pergi mengambil ijuk. Sekembalinya dari mengambil ijuk, dilemparkannya parang itu kembali. Sesudah itu, ijuk yang banyak itu dibungkuskannya ke seluruh tubuhnya lalu terjun ke sungai, terus disambut buaya-buaya dalam sungai itu lalu dimakan mereka.

3. Superioritas Tokoh Adik dalam Cerita Rakyat Moronene

Sebelum sampai kepada pemaknaan, terlebih dahulu konsep superior yang dilekatkan pada tokoh adik dieksplorasi, diperbandingkan dengan sikap kakak terhadap adiknya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencapai sebuah simpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Superioritas akan tampak pada perilaku tokoh, yang tercermin dalam deskripsi perbuatan dan ucapannya.

I Nanambo

I Nanambo adalah kakak I La Ganta-ganta. Seperti umumnya kakak terhadap adiknya, I Nanambo bersikap sebagai senior terhadap juniornya. Ia yang memberikan perintah ketika ada suatu pekerjaan dalam keluarga. Di dalamnya termasuk wewenang membagi tugas demi lancarnya seluruh proses pekerjaan. Senioritas I Nanambo tampak dalam keleluasaannya menyuruh I La Ganta-ganta pergi ke sebuah kampung untuk memanggil seorang *lebe* (pemuka agama). *Lebe* ini akan ditugasi *melebekan* (mendoakan) arwah ibu mereka. Tampak pula ketika ketika I La Ganta-ganta melakukan kesalahan karena membawa seekor kambing, bukan seorang *lebe*, I Nanambo memarahi adiknya itu. Ia tidak menanggapi lelucon yang sengaja dilakukan oleh La Ganta-ganta.

Tetapi, sesungguhnya I Nanambo bukan seorang pemberani. Tatkala I La Ganta-ganta membawa raksasa Tangkasuala'a dan berhasil membunuh anaknya, ia dan adiknya dikejar-kejar Tangkasuala'a. Di dalam pengejaran ini tampaknya nyali I Nanambo sebagai kakak yang terlihat kacil dibandingkan adiknya. Pertama, ketika keduanya bersembunyi I Nanambo menyuruh adiknya diam supaya Tangkasuala'a tidak mengetahui tempat persembunyian mereka. Kedua, ketika I La Ganta-ganta bermaksud memperdaya Tangkasuala'a, I Nanambo melarangnya karena merasa ketakutan. Begitulah watak I Nanambo yang merasa superior terhadap adiknya hanya karena posisinya sebagai kakak, tetapi sesungguhnya ia seorang yang pengecut.

I La Ganta-ganta

I La Ganta-ganta digambarkan sebagai seorang anak yang lucu dan cerdas. Sifatnya yang suka melucu terlihat ketika ia ditugasi mencari seorang *lebe* untuk mendoakan arwah ibunya yang meninggal, ia hanya diberi tahu bahwa ciri-ciri *lebe* adalah berjanggut. Karena setelah berkeliling kampung tidak berjumpa dengan seorang pun yang memiliki janggut, ia nekad membawa pulang seekor kambing yang berjanggut dengan tujuan membuat lelucon. Namun ternyata leluconnya itu tak ditanggapi positif oleh sang kakak.

Di samping suka melucu, ternyata I La Ganta-ganta juga seorang anak yang peduli terhadap kehidupan orang-orang di kampungnya. Warga kampung sudah lama hidup dalam keadaan tidak tenang karena ada sebuah keluarga raksasa yang hidup di sana. Keluarga raksasa ini sangat gemar makan daging, terutama daging manusia. Sudah banyak warga yang menjadi korbannya.

I La Ganta-ganta berniat membunuh Tangkasuala'a, raksasa yang acap memakan warga kampung itu. Niat ini dilaksanakan ketika ia ditugasi oleh kakaknya mencari orang untuk mengatur hidangan daging di upacara selamatan ibunya yang sudah meninggal. Alih-alih memanggil seorang warga yang sudah biasa bertugas mengatur hidangan daging, I La Ganta-ganta malah memanggil Tangkasuala'a. Hal itu dilakukannya dengan tujuan ingin membunuh Tangkasuala'a, supaya tidak ada lagi yang memakan orang-orang dalam kampung.

I La Ganta-ganta melaksanakan niatnya dengan terlebih dahulu membunuh anak Tangkasuala'a yang bernama Kasuala'a. Ia menjejali mulut Kasuala'a dengan seruas tulang paha kerbau ketika Tangkasuala'a pulang hendak membawakan isterinya daging, dan anak raksasa itu menjerit-jerit terus meminta daging sementara daging kerbau sudah habis. Akibatnya, Kasuala'a tewas dan Tangkasuala'a sangat marah mengetahui apa yang terjadi pada anaknya.

Menghadapi kemarahan Tangkasuala'a, I La Ganta-ganta bermaksud memperdayanya sehingga mudah untuk membunuhnya. Dalam proses pengejaran ini, I La Ganta-ganta tidak mempedulikan kakaknya yang melarang dirinya melawan Tangkasuala'a. I La Ganta-ganta justru menyahut ketika Tangkasuala'a

memanggilnya sehingga raksasa itu pun mengetahui tempat persembunyian mereka. Namun, I La Ganta-ganta yang cerdas menjebaknyanya ke tempat yang penuh dengan sulur berduri (*kamo woto*). Ketika Tangkasuala'a kesusahan membebaskan diri dari kamo woto, I La Ganta-ganta mengajak kakaknya berlari hingga tiba di tepi sungai yang lebar, dalam, dan banyak buayanya. Di situ I La Ganta-ganta mengajak kakaknya membuat titian bambu untuk menyeberang. Setelah sampai di seberang, ia memotong titian bambu itu sehingga tidak bisa digunakan lagi. Ketika Tangkasuala'a tiba di tepi sungai itu, dan bertanya bagaimana cara kedua anak tersebut menyeberang, I La Ganta-ganta memberikan jawaban dusta. Dikatakannya bahwa mereka membungkus rapat-rapat tubuh mereka dengan ijuk yang dicari di tepian sungai, lalu terjun dengan kepala terlebih dahulu ke dalam sungai. Dan tanpa disebutkan alasannya, ia mengatakan bahwa dengan demikian tahu-tahu mereka sudah berada di seberang sungai. Perkataannya ini dipercayai, dan ditiru oleh Tangkasuala'a dan menyebabkan raksasa itu menemui ajalnya.

Dari dongeng Moronene ini tampak jelas I La Ganta-ganta sebagai anak cerdas, cerdas, dan pemberani. Ia bisa membaca kekuatan Tangkasuala'a sebagai pihak lawan. Kekuatan fisik dan kekuatan fikiran menjadi pertimbangan I La Ganta-ganta dalam melakukan tindakannya. Ia tidak mempedulikan kakaknya bukan karena tidak hormat, melainkan karena ia ingin mewujudkan niatnya membunuh Tangkasuala'a demi kedamaian di kampungnya.

Tangkasuala'a dan Kasuala'a

Tangkasuala'a seorang raksasa yang mempunyai anak dan isteri (tokoh isteri tidak diceritakan di dalam kisah ini). Kasuala'a anak Tangkasuala'a. Anak raksasa ini memiliki kebiasaan suka makan banyak-banyak, terutama daging. Ia tidak peduli di manapun dan siapapun yang mengasuhnya, yang penting ia diberi makan. Tangkasuala'a berwatak serakah. Ia tidak peduli tugas mengatur hidangan daging untuk para tamu, yang terpenting baginya adalah isteri, anak, dan dirinya.

Selain itu, digambarkan pula karakter Tangkasuala'a yang bodoh. Ketika mengejar I Nanambo dan I La Ganta-ganta beberapa kali ia dibodohi oleh I La Ganta-ganta. Ketika ia dengan mudah dijebak di sebuah tempat yang dipenuhi sulur berduri. Yang lebih parah lagi ketika ia percaya bahwa I Nanambo dan I La Ganta-ganta berhasil menyeberang dengan cara membungkus rapat-rapat tubuh mereka dengan sejumlah besar ijuk, lalu melompat ke dalam sungai dengan posisi kepala di bawah. Cara yang sesungguhnya sangat tidak masuk akal ini kemudian diikutinya sehingga ia akhirnya tewas dimangsa buaya.

4. Penutup

Cerita *La Ganta-ganta Da Rake Namo Mandara*, cerita rakyat Sulawesi Tenggara menempatkan tokoh I La Ganta-ganta (adik) sebagai tokoh yang berinisiatif sekaligus melaksanakan niat membunuh sang raksasa. Kedudukannya sebagai adik tidak secara otomatis menyebabkan dirinya inferior dari kakaknya. Justru dialah yang bertindak sebagai penyusun strategi sekaligus eksekutor Tangkasuala'a. Pemaknaan dari kisah ini adalah tidak selamanya kaum muda (secara umum pihak yang terlihat lebih lemah) berada di bawah kemampuan orang yang lebih tua, baik dalam hal kecerdikan, kecerdasan, maupun keberanian. Bagi orang yang lebih tua, tersirat pesan untuk tidak meremehkan kemampuan juniornya, dan mau mengakui segala kelebihan yang dimiliki juniornya itu.

Sisi lain yang terkandung dalam konsep superioritas tokoh adik dalam cerita ini adalah sebagai motivasi bagi orang yang merasa tidak percaya diri. Memaksimalkan potensi yang ada bisa dijadikan kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan. Kedudukan dalam strata sosial pun acap menjadi sebuah kendala ketika dihadapkan pada suatu masalah. Dengan dimunculkannya tokoh adik sebagai pemrakarsa tindakan dalam cerita ini, pencerita bermaksud membesarkan hati mereka yang dianggap lemah atau inferior. Kekalahan Tangkasuala'a memberikan pesan bahwa tidak selamanya kekuatan fisik harus dilawan dengan fisik juga. Kerap kali orang yang mengandalkan kekuatan fisiknya bisa tumbang dengan kekuatan fikiran.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan. *et.al.* 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*. Jakarta : Balai Pustaka.
Nurgiyantoro, Burhan. 2005. *Sastra Anak: Pengantar Pemahaman Dunia Anak*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Tasai, S. Amran. 2003. *Bahan Penyuluhan: Sastra Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
Hasil Tim Inventarisasi sastra Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara, belum diterbitkan.

KOGNAT BAHASA WOLIO-JAWA

Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka
(Pusat Bahasa)

1. Pendahuluan

Bahasa Wolio tidak dapat dilepaskan dengan masyarakatnya, yaitu Buton. Beberapa abad yang lalu, tepatnya sekitar tahun 1700—1800-an, menurut Gani dkk. (1986), bahasa ini digunakan sebagai alat komunikasi resmi kerajaan Buton, bahkan juga menjadi alat komunikasi sehari-hari warganya. Namun, saat ini bahasa Buton hanya digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari di daerah Baubau. Gani dkk juga menjelaskan bahwa aksara yang digunakan adalah aksara Serang, yaitu aksara Arab yang mengalami sedikit modifikasi untuk pelambangan fonem tertentu. Pelambangan bunyi /e/ digunakan tanda < yang diletakkan di bawah huruf Hijaiyah, pelambangan bunyi /ε/ digunakan tanda < yang diletakkan di atas huruf Hijaiyah, dan pelambangan bunyi /o/ digunakan tanda √ yang diletakkan di atas huruf Hijaiyah. Penamaan aksara Arab dengan sebutan aksara Serang mengindikasikan bahwa antara masyarakat Buton dan masyarakat Serang telah terjalin hubungan yang sangat akrab, bahkan bisa jadi aksara Arab yang digunakan oleh masyarakat Buton saat itu dibawa, diperkenalkan, dan diajarkan oleh orang Serang (Seran/Seram) yang telah belajar bahasa Arab, entah belajar ke Gresik atau belajar ke Perak.

Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca Pupuh 13 dan 14 menyebutkan beberapa wilayah Majapahit. Pupuh 14 bait 5 dalam *Tafsir Sejarah Negara Kertagama* (Mulyana, 2006:346) menyebutkan, "Tersebar pulau-pulau Makasar, Buton, Banggawi Kunir, Galian, serta Salayar, Sumba, Solot, Muar. Lagi pula, Wanda(n), Ambon atau pulau Maluku, Wanin, Seran, Timor, dan beberapa pulau-pulau lain." Selain itu, cerita rakyat yang berkembang di Buton mengabarkan bahwa Raja Buton yang ke-4, Turade, mengakui kekuasaan Majapahit dan ia diberi empat tanda sebagai penguasa oleh pemerintah pusat (Majapahit). Meskipun telah berabad-abad silam, informasi dalam *Negara Kertagama* dan cerita rakyat tersebut mengisyaratkan bahwa Buton pernah menjadi bagian Majapahit. Oleh karena itu, sedikit atau banyak warna Majapahit di daerah Buton pasti masih dapat dilacak, baik dalam religi, kebiasaan, maupun bahasa yang digunakannya.

Tulisan ini hanya akan melacak hubungan yang pernah terjalin antara Buton dan Jawa, terutama dalam hal kekerabatan bahasa. Kekerabatan bahasa itu ditengarai oleh adanya sejumlah kognat bahasa Wolio dan bahasa Jawa yang diduga bersumber pada bahasa yang sama. Kognat juga bisa mengungkapkan kesamaan atau keserupaan bentuk.

2. Kognat Wolio-Jawa

2.1 Penambahan, Pengurangan, dan Variasi Fonem

Berikut disajikan sejumlah data yang dijarang dengan menggunakan kosakata dasar swadesh yang diduga merupakan kognat Wolio-Jawa. Data berikut diperoleh dari Kantor Bahasa Kendari.

Wolio	Jawa	Indonesia
[ɔulɔ]	[ulɔ]	'ular'
[abula]	[wulan]	'bulan'
[amate]	[mati]	'mati'
[arata]	[ratɔ]	'rata'
[ate]	[ati]	'hati'
[bebe]	[bebeʔ]	'bebek'
[b ^h ali]	[b ^h ali]	'pulang'
[b ^h anui]	[b ^h ɔñu]	'air'
[b ^h atu]	[watu]	'batu'
[b ^h iti]	[bitis/wantIs]	'betis'
[bula]	[^m bulan]	'bulan'
[dɛndɛ]	[dɛndɛŋ]	'dendeng'
[gunu]	[gunUy]	'gunung'
[jara jara]	[dɔrɔ]	'merpati'
[jara]	[jaraŋ]	'kuda'
[kenta]	[kantaŋ]	'kentang'
[kɔmba kɔmba]	[kambaŋ]	'bunga'
[kadɔndɔ]	[kadɔndɔŋ]	'kedondong'

[kamba kamba]	[kʌmbaŋ]	'bunga'
[kanda]	[kanɕaŋ]	'kandang'
[langgara]	[laŋgar]	'musala'
[mab ^h ɔŋkɔ]	[b ^h ɔŋkɔ]	'busuk, mati'
[maijɔ]	[ijɔ]	'hijau'
[manu manu]	[manu ^ɔ]	'burung'
[manu]	[manu ^ɔ]	'burung'
[maputi]	[putih]	'putih'
[pana]	[panah]	'panah/busur'
[pataʔ]	[pat]	'empat'
[pitu]	[pitu]	'tujuh'
[raŋɔ]	[raŋɔ/ruŋu]	'dengar'
[ra:]	[rah]	'darah'
[rua: ɲu]	[ro]	'dua'
[srikaya]	[srikɔyɔ]	'mandalika'
[suli]	[sulij]	'seruling'
[tana]	[taŋah]	'tengah'
[talina]	[talinaŋ]	'telinga'
[talɔ]	[taɭu]	'tiga'
[ulɔ]	[ulɔ]	'ular'

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa bahasa Wolio merupakan bahasa yang bertipe vokalik. Hal itu dikarenakan setiap kata selalu berakhir dengan vokal. Jika terdapat leksikon bahasa Jawa yang berakhir dengan konsonan, leksikon tersebut akan mengalami vokalisasi dengan dua cara, yaitu menanggalkan bunyi konsonan akhir atau menambahkan vokal pada kata tersebut. Perhatikan data berikut.

Bahasa Jawa	Bahasa Wolio	Indonesia
[^m bulan]	[bula]	'bulan'
[bebɛʔ]	[bebɛ]	'bebek'
[dɛndɛŋ]	[dɛndɛ]	'dendeng'
[jaraŋ]	[jara]	'kuda'
[rah]	[ra:]	'darah'
[laŋgar]	[laŋgara]	'surau'
[pat]	[pata]	'empat'
[kanɕaŋ]	[kandana]	'kandang'
[ruaŋ]	[ruaŋa]	'ruang'
[nanas]	[nanasa]	'nenas'

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa leksikon [^mbulan] 'bulan', [bebɛʔ] 'bebek', [dɛndɛŋ] 'dendeng', [jaraŋ] 'kuda', dan [rah] 'darah' dalam bahasa Jawa akan mengalami penanggalan konsonan dalam bahasa Wolio sehingga akhir kata akan berbentuk vokal (silaba terbuka). Dalam bahasa Wolio leksikon tersebut akan berubah menjadi [bula] 'bulan', [bebɛ] 'bebek', [dɛndɛ] 'dendeng', [jara] 'kuda', dan [ra:] 'darah'. Sementara itu, leksikon bahasa Jawa [laŋgar] 'surau', [pat] 'empat', [kanɕaŋ] 'kandang', dan [nanas] 'nenas' akan mengalami penambahan fonem vokal /a/ dalam bahasa Wolio sehingga leksikon tersebut akan berakhir dengan vokal. Dalam bahasa Wolio leksikon tersebut akan berubah menjadi [laŋgara] 'surau', [pata] 'empat', [kandana] 'kandang', [ruaŋa] 'ruang', dan [nanasa] 'nenas'.

Dalam bahasa Jawa baru kata *rah* ([rah]) 'darah' hanya digunakan dalam ragam *krama* (ragam halus) karena leksikon tersebut merupakan leksikon *krama*, sedangkan dalam ragam biasa atau dalam ragam *ngoko* digunakan kata *getih* ([gɛtɪh]). Penjelasan yang dapat diberikan adalah bahwa pada zaman Majapahit, kata *rah* digunakan sebagai pengungkap makna 'darah' daripada kata *getih*. Leksikon *getih* diperkirakan muncul ketika bahasa Jawa dibuat bertingkat-tingkat oleh penguasa Mataram Islam (abad 16), yaitu saat penguasa memerlukan leksikon *ngoko* dan *krama*. Leksikon *ngoko* diperuntukkan rakyat jelata dan leksikon *krama* diperuntukkan bangsawan atau para penguasa.

Bahasa Wolio tidak mengenal bunyi /ʌ/ pada posisi awal atau suku kata awal. Setiap bunyi /ʌ/ dalam bahasa Jawa—bahkan mungkin bahasa yang lain yang diserap dalam bahasa ini—akan menjadi bunyi /a/ dalam bahasa Wolio. Perhatikan data berikut.

Bahasa Jawa	Bahasa Wolio	Indonesia
[kʌntaŋ]	[kɛnta]	'kentang'
[kʌmbaŋ]	[kamba]	'bunga'
[ɾʌŋð]	[raŋɔ]	'dengar'
[tʌŋah]	[taŋa]	'tengah'
[taliŋan]	[taliŋa]	'telinga'
[tʌlu]	[talɔ]	'tiga'
[tʌnʌn]	[tanuna]	'tenun'

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa fonem /ʌ/ pada leksikon [kʌntaŋ] 'kentang', [kʌmbaŋ] 'bunga', [ɾʌŋð] 'dengar', [tʌŋah] 'tengah', [taliŋan] 'telinga', [tʌlu] 'tiga', dan [tʌnʌn] 'tenun' dalam bahasa Jawa akan berubah menjadi fonem /a/ dalam bahasa Wolio. Dalam bahasa Wolio leksikon tersebut akan berubah menjadi [kɛnta] 'kentang', [kamba] 'bunga', [raŋɔ] 'dengar', [taŋa] 'tengah', [taliŋa] 'telinga', [talɔ] 'tiga', dan [tanuna] 'tenun'.

Hal yang menarik dalam data tersebut tampak pada leksikon [kɛnta]. Seharusnya jika mengikuti perubahan bunyi yang sistematis, sebagaimana tampak dalam data, leksikon [kʌntaŋ] akan berubah menjadi [kanʌtaŋ] atau [kanʌta] dalam bahasa Wolio dan bukan berubah menjadi [kɛnta]. Kenyataan seperti itu memperlihatkan bahwa tidak semua fonem vokal /ʌ/ pada suku kata awal dalam bahasa Jawa akan berubah menjadi fonem /a/ dalam bahasa Wolio karena ternyata dapat saja berubah menjadi fonem /ɛ/ dan mengalami metatesis. Untuk itu, diperlukan data pendukung yang lebih banyak untuk mendukung pendapat di atas.

Dalam bahasa Jawa baru kata [ɾʌŋð] 'dengar' tidak pernah ditemukan, yang ada adalah kata *rungu* [ruŋu] 'dengar'. Kata [ɾʌŋð] merupakan leksikon Jawa Kuna (leksikon Kawi) yang sering digunakan dalam naskah *kakawin* Jawa Kuna (Zaman Teguh Darmawangsa) seperti *Wirathaparwa* atau pada *kidung* zaman Jawa Tengah seperti *Negara Kertagama* atau *kidung Suta Suma*. Meskipun secara diakronis dalam bahasa Jawa terdapat dua linambang untuk menyatakan makna 'dengar', leksikon [raŋɔ] dalam bahasa Wolio pastilah berasal dari leksikon [ɾʌŋð] (Jawa Kuna) dan bukan berasal dari leksikon [ruŋu] karena leksikon [ruŋu] merupakan leksikon Jawa baru, sedangkan [ɾʌŋð] lebih sering digunakan pada zaman Majapahit dan sebelumnya. Dari sisi historis Kerajaan Buton tidak pernah berhubungan dengan kerajaan Mataram Islam (Jawa baru), tetapi pernah menjadi bagian dari kerajaan Majapahit (Jawa Kuna/Jawa Tengah).

2.2 Pemaknaan Beda

Dalam bahasa Wolio terdapat penggunaan linambang yang sama dengan konsep yang berbeda. Berikut disajikan beberapa data.

Wolio	Jawa
[bɛbɛ] 'itik'	[bɛbɛʔ] 'bebek'
[manu] 'ayam'	[manUʔ] 'burung'
[manu manu] 'burung'	[manuʔ manuʔ] 'banyak burung'
[dalanɔ] 'lubang'	[dalan] 'jalan'
[jara jara] 'merpati'	[dɔɾɔ dɔɾɔ] 'banyak merpati'
[kaitɛla] 'jagung'	[telɔ] 'ubi'

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa linambang [bɛbɛ] dalam bahasa Wolio bermakna 'itik', sedang dalam bahasa Jawa [bɛbɛʔ] bermakna 'bebek'. Untuk mengungkapkan makna 'itik' dalam bahasa Jawa digunakan leksikon [mentɔŋ] atau [ɛntɔŋ]. Linambang [manu] dalam bahasa Wolio bermakna 'ayam', seperti halnya bahasa-bahasa Nusantara yang lain, sedangkan dalam bahasa Jawa, leksikon [manUʔ] bermakna 'burung'. Untuk mengungkapkan makna 'ayam', linambang yang digunakan dalam bahasa Jawa adalah *pitik* ([pitɪʔ]), sedangkan untuk mengungkapkan makna 'burung' dalam bahasa Wolio, linambang yang digunakan adalah *manu-manu* ([manu manu]). Demikian pula kata [jara] dan [jara jara] dalam bahasa Wolio merupakan dua linambang yang berbeda maknanya. Kata *jara* bermakna 'kuda', sedangkan *jara-jara* bermakna 'burung merpati'. Dalam bahasa Jawa untuk mengungkapkan makna 'burung merpati' digunakan linambang [dɔɾɔ], sedangkan untuk mengungkapkan makna 'kuda' digunakan linambang [jʰaran].

Leksikon [dalanɔ] dalam bahasa Wolio dan [dalan] dalam bahasa Jawa merupakan leksikon yang mempunyai kemiripan makna. Kata [dalanɔ] dalam bahasa Wolio bermakna 'lubang', sedangkan [dalan] dalam bahasa Jawa bermakna 'jalan'. Jika dicermati lebih lanjut, lubang juga merupakan 'salah satu jalan keluar' sehingga secara tidak langsung kedua kata tersebut merupakan kata kognat.

Sementara itu, untuk mengungkapkan makna 'jagung' dalam bahasa Wolio digunakan leksikon [kaitɛla], sedangkan dalam bahasa Jawa leksikon [telɔ] digunakan untuk mengungkapkan makna kata 'ubi'. Apakah [kaitɛla] 'jagung' dan [telɔ] 'ubi' merupakan kognat? Ataukah secara kebetulan saja kata itu sama bentuk tapi maknanya berbeda, masih sulit untuk dijelaskan. Namun, penggunaan linambang yang sama oleh dua bahasa atau lebih belum tentu menunjukkan bahwa leksikon tersebut merupakan kognat, bisa saja penggunaan linambang yang sama itu terjadi secara kebetulan. Contoh lain tampak pada leksikon *bae* [b^haɛ], *ganda* [gɔndɔ], dan *lincak* [linca^ʔ] yang dalam bahasa Wolio bermakna 'padi', 'gondok', dan 'lincak' atau 'cepat'. Namun, dalam bahasa Jawa kata *bae*, *ganda*, dan *lincak* bermakna 'saja', 'bau', dan 'balai-balai'. Ketiga kata tersebut bukan termasuk kata kognat Wolio-Jawa.

2.3 Bentuk Adjektiva

Kognat adjektiva atau frasa adjektival Wolio-Jawa juga dapat dilacak dengan berdasarkan pada beberapa data berikut.

Wolio	Jawa	Indonesia
[mab ^h ɔŋkɔ]	[b ^h ɔŋkɔ]	'busuk, mati'
[majɔ]	[ijɔ]	'hijau'
[maputi]	[putlh]	'putih'

Data tersebut memperlihatkan bahwa adjektiva bahasa Wolio selalu didahului bentuk *ma* sehingga leksikon bahasa Jawa [b^hɔŋkɔ] 'busuk/mati', [ijɔ] 'hijau', dan [put^h] 'putih' akan menjadi [mab^hɔŋkɔ] 'busuk/mati', [majɔ] 'hijau', dan [maputi] 'putih' dalam bahasa Wolio. Data lain—yang bukan merupakan kognat Wolio-Jawa—juga memperlihatkan hal itu, yaitu bahwa adjektiva dalam bahasa Wolio selalu didahului bentuk *ma*. Amatilah data berikut.

[malapɛ] 'baik'	[maidi:di] 'kecil'	[masɔɖɔ] 'panas'
[mab ^h ahɔ] 'basah'	[matu ^ʔ] 'kering'	[maratɛ] 'panjang'
[makasu] 'dekat'	[marɔmbu] 'kotor'	[magɔɔ] 'sempit'
[magari] 'dingin'	[makuri] 'kuning'	[makapa] 'tebal'
[maɛta] 'hitam'	[mararu] 'licin'	[maniti] 'tipis'
[maɔgɛ] 'besar'	[makatɛ] 'lurus'	[matutu] 'tumpul'
[mariɖɔ] 'jauh'	[malɛi] 'merah'	[mapɔɖɔ] 'pendek'

Adjektiva dalam bahasa Wolio lazimnya memang ditandai dengan penggunaan *ma* seperti data di atas, tetapi ditemukan pula data adjektiva dalam bahasa Wolio yang tidak menggunakan penanda *ma*. Jika dilekati *ma*, adjektiva berikut tidak akan berterima dalam bahasa Wolio.

[kasara] 'kasar'	→	[*makasara]
[batu:] 'kering'	→	[*mabatu:]
[kasɔ] 'kosong'	→	[*makasɔ]
[buke] 'penuh'	→	[*mabuke]
[sukarɔ] 'sedih'	→	[*masukarɔ]
[barani] 'berani'	→	[*mabarani]
[linca ^ʔ] 'cekatan/cepat'	→	[*malinca ^ʔ]
[^ʔ alusu] 'halus'	→	[*ma ^ʔ alusu]
[kaɛya] 'kaya'	→	[*makaɛya]

Penambahan *ma* di sebelah kiri leksikon adjektiva menyebabkan bentuk-bentuk bertanda * menjadi takberterima. Ketakberterimaan itu kemungkinan disebabkan leksikon *kasara*, *batu*, *kasu*, *buke*, *sukaro*, *barani*, *lincak*, '*ulusa*, dan *kaeya* bukan merupakan leksikon asli Wolio melainkan merupakan leksikon serapan.

2.4 Bentuk Numeralia

Kognat Wolio-Jawa dalam numeralia atau frasa numeralia juga dapat dilacak dengan berdasarkan pada beberapa data berikut.

Wolio	Jawa	Indonesia
[rua: ɲu]	[ru ^w a]	'dua'
[taluanɲu]	[tʌlu]	'tiga'

[pata: ɲu]	[pat]	'empat'
[lima: ɲu]	[limɔ]	'lima'
[nama: ɲu]	[nʌm]	'enam'
[pituayɲu]	[pitu]	'tujuh'
[waluayɲu]	[wɔlu]	'delapan'

Data tersebut memperlihatkan bahwa bahasa Wolio menggunakan penanda [aju] untuk mengungkapkan bilangan. Numeralia bahasa Jawa [ru^wa] 'dua', [tʌlu] 'tiga', [pat] 'empat', [limɔ] 'lima', [nʌm] 'enam', [pitu] 'tujuh', dan [wɔlu] 'delapan' setelah diserap ke dalam bahasa Wolio akan berubah menjadi [ruayɲu], [taluyɲu], [pata: ɲu], [lima: ɲu], [nama: ɲu], [pituayɲu], dan [waluayɲu] dalam bahasa Wolio. Leksikon [ru^wa] atau [rwa] 'dua' merupakan leksikon bahasa kawi, yaitu leksikon bahasa Jawa kuna yang sering digunakan oleh rakawi (penyair) dalam membuat kakawin atau kidung. Dalam bahasa Jawa baru leksikon [ru^wa] atau [rwa] berubah menjadi [ro] atau [loro] 'dua'. Secara diakronis, leksikon [ru^wa]-lah—dan bukan *ro* (Jawa baru)—yang lebih masuk akal diserap ke dalam bahasa Wolio dengan penyesuaian morfologis seperti yang telah dijelaskan di atas.

Yang menarik, bahasa Wolio dalam mengungkapkan bilangan 11—19 dan 21—29 tidak seperti bahasa Jawa yang memakai penanda *las* dan *kur*. Bahasa Wolio menggunakan penjumlahan seperti berikut.

[sapulu sa: ɲu]	'sepuluh satu'	→	sebelas
[sapulu rua: ɲu]	'sepuluh dua'	→	dua belas
[sapulu taluayɲu]	'sepuluh tiga'	→	tiga belas
[sapulu pata: ɲu]	'sepuluh empat'	→	empat belas
[sapulu pituayɲu]	'sepuluh tujuh'	→	tujuh belas
[sapulu waluayɲu]	'sepuluh delapan'	→	delapan belas
[ruapulu sa: ɲu]	'dua puluh satu'		
[ruapulu rua: ɲu]	'dua puluh dua'		
[ruapulu taluayɲu]	'dua puluh tiga'		
[ruapulu pata: ɲu]	'dua puluh empat'		
[ruapulu pituayɲu]	'dua puluh tujuh'		
[ruapulu waluayɲu]	'dua puluh delapan'		

Untuk menyatakan bilangan tingkatan dalam bahasa Wolio digunakan penanda [kawana] yang terletak di sebelah kiri numeralia. Makna leksikon [kawana] sepadan dengan 'ke-' dalam bahasa Indonesia.

[kawana rua: ɲu]	'kedua'
[kawana taluayɲu]	'ketiga'
[kawana pata: ɲu]	'keempat'
[kawana lima: ɲu]	'kelima'
[kawana nama: ɲu]	'keenam'
[kawana pituayɲu]	'ketujuh'
[kawana waluayɲu]	'kedelapan'

3. Penutup

Bahasa Wolio merupakan bahasa yang bertipe vokalik karena tidak ada satu kata pun yang berakhir dengan silaba tertutup atau berakhir dengan fonem konsonan. Semua kata harus berakhir dengan fonem vokal dan hampir semua fonem vokal digunakan sebagai penutup leksikon (--V#). Untuk itu, bahasa Wolio sering menambah vokal atau mengurangi konsonan suatu leksikon tertentu sebelum leksikon itu menjadi warga bahasa Wolio. Fonem vokal /ʌ/ tidak pernah muncul dalam semua posisi, baik di awal, tengah, maupun akhir kata.

Adjektiva dalam bahasa Wolio selalu ditandai dengan penggunaan bentuk *ma* yang selalu melekat di sebelah kiri adjektiva itu, sedangkan numeralianya ditandai dengan penggunaan bentuk *angu* yang selalu melekat di sebelah kanan numeralia tersebut. Untuk menyatakan numeralia tingkat digunakan bentuk *kawana* yang selalu terletak di sebelah kiri numeralia yang diwatasinya.

Daftar Pustaka

- Ayatrohaedi. 1981. *Dialektologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- Adelaar, K. Alexander. 1994. *Bahasa Melayik Purba Rekonstruksi Fonologi dan Sebagian dari Leksikon dan Morfologi*. Jakarta: RUL.
- Gani, H. Ambo dkk. 1986. *Morfologi Kata Kerja Bahasa Wolio*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- J.C. Anceaux. 1994. *Pijar-Pijar*. Jakarta: RUL.
- Kantor Bahasa Kendari. 2008. "Penelitian Kekerabatan dan Pemetaan Bahasa di Indonesia Kuesioner Kosakata Dasar dan Kata Budaya Dasar." Kendari: Kantor Bahasa.
- Mahsun. 1995. *Dialektologi Diakronis Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Muthalib, Abdul, Zalili Sailan, Abdul Kadir Mulya. 1993. *Morfologi Nomina Bahasa Wolio*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Mastuti, Dwi Woro Retno dan Hastho Bramantyo. 2009. *Kakawin Sutasoma Mpu Tantular*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Slametmuljana. 2006. *Tafsir Sejarah Nagara Kretagama*. Yogyakarta: LKiS.
- Suparno. 1993. *Dasar-Dasar Linguistik*. Yogyakarta: Mitra Gama Widya.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Komisi C
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 20 Juli 2010, 14.30—16.00 wita
Judul Makalah	: Kognat Bahasa Wolio-Jawa
Penyaji/Pembicara	: Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka
Pemandu	: Neil Armstrong, S.S., M.Hum.
Pencatat	: Mahmudin Mulyadi, S.Pi.
Jumlah Peserta	: 40 orang

TANYA JAWAB

La Ode Muhammad Syarif Makmum

Pertanyaan /Saran

Mengenai sejarah hubungan Buton dan Jawa, saya juga ingin menambahkan apa yang telah dikemukakan oleh Bapak Sri Sastria. Menurut sejarah asal-usul raja-raja Buton adalah dari Jawa (Sri Batara). Moyangnya dari Kerajaan Majapahit, yaitu Raja Majapahit Jaya Negara.

Jawaban/Tanggapan

Terima kasih atas penjelasan tambahan dari Bapak La Ode Muhammad Syarif Makmum.

Dr. Inyo Yos Fernandez

Pertanyaan /Saran

Mengenai kognat Wolio-Jawa saran saya sebaiknya dilihat dari bentuk proto polinesianya agar dapat dilihat mana yang benar-benar merupakan bentuk pinjaman. Hal ini dilakukan agar hubungan bahasa Wolio dan bahasa Jawa dapat lebih jelas.

Jawaban/Tanggapan

Terima kasih atas saran dari Bapak, saran tersebut akan kami tindak lanjuti dalam penelitian-penelitian ke depan.

**RELASI BAHASA LAIYOLO DAN SELAYAR DI PULAU SELAYAR SULAWESI SELATAN
DENGAN WOLIO DI SULAWESI TENGGARA
(KAJIAN LINGUISTIK HISTORIS KOMPARATIF)**

**Rahmawati
(Universitas Gadjah Mada)**

1. Pendahuluan

Sulawesi adalah wilayah yang mencakup lima provinsi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara, beserta pulau-pulau kecil yang berada di sekitarnya. Di pulau ini terdapat sekitar 113 bahasa¹ yang hanya dituturkan oleh sekelompok masyarakat. Meskipun demikian, terdapat satu suku yang jumlah penuturnya cukup banyak, jika dibandingkan dengan bahasa yang lain, yaitu bahasa Bugis. Penutur bahasa ini paling banyak bermukim di semenanjung tengah, di antara daerah Pinrang dan Watampone yang secara administratif berada di kawasan Sulawesi Selatan. Mereka yang tinggal di bagian selatan merupakan kelompok yang telah dikenal sejak zaman dulu kala dengan kepiawaian maritimnya dan selama berabad-abad berperan dalam penyebaran orang Austronesia di seantero nusantara, mengingat Sulawesi adalah kepulauan maritim. Banyaknya pulau-pulau kecil di sebelah selatan Sulawesi Selatan dan di pulau selatan Sulawesi Tenggara, menyebabkan keanggotaan kelompok bahasa ini sukar untuk ditentukan (Berg, 1988). Hal ini mendorong minat para linguis untuk mengungkap misteri tentang situasi linguistik di Sulawesi.

Meskipun terpisah secara administratif dan jarak, bahasa di pulau-pulau kecil lepas pantai Sulawesi Tenggara ternyata mempunyai kemiripan bentuk dengan bahasa-bahasa di pulau lepas pantai Sulawesi Tenggara. Esser (1938) mengelompokkan bahasa-bahasa sekerabat di Sulawesi ke dalam tujuh kelompok yang salah satunya adalah kelompok Muna-Buton yang terdiri atas (a) Muna-Buton, (b) Buton Selatan, (c) Kelompok Kepulauan Tukang Besi (Kalaota, Larompa, Bonerate), (d) Wolio dan Laiyolo. Berdasarkan pengelompokan ini, dapat dilihat bahwa bahasa Bonerate dan Laiyolo adalah dua bahasa yang berada dalam wilayah administratif Sulawesi Selatan, yaitu di Pulau Selayar. Namun, mereka diklasifikasikan ke dalam kelompok bahasa Wolio yang berada di Sulawesi Tenggara. Terjadi perbedaan pendapat dengan Adriani (1914:272-275) yang mengelompokkan Laiyolo ke dalam kelompok Bahasa Makassar di Sulawesi Selatan.

Safitri (2010) membuktikan bahwa relasi kekerabatan tidak bisa dipisahkan dengan batas administratif, tertuang dalam penelitian yang berjudul *Binongko dan Bonerate², Dua Isolek di Kepulauan Lepas Pantai Tenggara dan Selatan Pulau Sulawesi*. Penelitian itu menggunakan dua pendekatan, yakni kuantitatif dan kualitatif³. Sebagai langkah awal penelitian digunakan teknik leksikostatistik untuk mengetahui tingkat relasi kekerabatan isolek Bonerate dan Binongko. Bahasa yang diperbandingkan untuk mengetahui presentasi kekerabatannya adalah bahasa Bonerate, Binongko, Wolio, dan Laiyolo⁴. Dari hasil analisis tersebut, ditemukan bahwa isolek Bonerate dan isolek Binongko berada pada tingkat bahasa yang sama dalam kelompok bahasa Muna-Buton (85%). Demikian pula, isolek Wolio mempunyai hubungan kekerabatan dengan isolek Laiyolo sebesar 67%, yang berada pada level subkeluarga bahasa. Namun, dalam kajian ini, tidak ikut dibandingkan dengan bahasa Selayar, mengingat bahasa Bonerate dipengaruhi oleh bahasa tersebut.

Demikian pula dengan pengelompokan yang menuai pertentangan di antara para linguis, yaitu pengelompokan bahasa-bahasa di Makassar. Grimes dan Grimes (1987) membagi subkelompok bahasa Makassar menjadi tiga kelompok bahasa, yaitu Lakiung, Konjo, dan Selayar, tapi Laggole (1995, dalam Junaid, 1997:2) dan SIL (2006) menganggap bahasa Selayar dan bahasa Konjo adalah bahasa yang berbeda⁵. Adanya kesimpangsiuran antara status kebahasaan Wolio, Selayar, dan Laiyolo, sehingga dibutuhkan pengkajian lebih lanjut.

Kesimpangsiuran mengenai status bahasa Selayar terjawab oleh penelitian Wahida (2009) yang berjudul *Bahasa Selayar di Pulau Selayar*. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif berhasil dibuktikan bahwa Bahasa Selayar bukan merupakan salah satu dialek bahasa Makassar melainkan telah berkembang menjadi bahasa sendiri. Di satu sisi, pendekatan kualitatif diupayakan sebagai evidensi secara sinkronis yang menunjukkan bahwa di bidang fonologi dan leksikon⁶, bahasa Konjo mempunyai lebih banyak persamaan dengan Selayar dibanding dengan Lakiung. Di lain sisi, pendekatan kuantitatif dilakukan dengan

¹Dalam SIL 2006 (pg. 59-72) tentang *Bahasa-bahasa di Indonesia*, telah dideskripsikan bahasa-bahasa yang terdapat di Sulawesi, berjumlah 113 bahasa.

² Dituturkan oleh penduduk yang berada di Pulau Bonerate, wilayah Kabupaten Selayar.

³ Untuk mencari evidensi melalui refleksi fonem-fonem pada etymon PAN

⁴ Bahasa Laiyolo dan Wolio digunakan sebagai data sekunder karena kedua isolek tersebut masing-masing dekat dengan bahasa yang diteliti.

⁵ Bahasa Selayar dan Konjo berada pada wilayah administratif yang sama yaitu Sulawesi Selatan

⁶ Bahasa laiyoilo digunakan sebagai data sekunder.

teknik leksikostatistik, untuk mengetahui relasi kekerabatan bahasa antara Selayar, Lakiung, dan Konjo yang hasilnya berada pada tingkat keluarga bahasa. Namun, dalam usaha untuk mengetahui tingkat kekerabatan bahasa yang saling berpengaruh itu, tidak diikutsertakan bahasa Laiyolo yang dalam hal ini statusnya belum jelas dan cukup memengaruhi bahasa Selayar.

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini bertujuan (1) menjembatani apa yang telah dilakukan oleh Wahida (2009) dan Sandra (2010), yaitu dengan mencari relasi kekerabatan di antara ketiga bahasa, yakni Laiyolo, Wolio, dan Selayar, sehingga dapat diketahui hubungan secara keseluruhan bahasa-bahasa yang berada di kepulauan maritim tenggara dan selatan Sulawesi; (2) menjawab kesimpangsiuran atas status ketiga bahasa tersebut; dan (3) menjelaskan hubungan historis ketiga bahasa tersebut.

2. Gambaran Singkat Buton, Selayar, dan Laiyolo

2.1 Buton

Buton adalah salah satu pulau terbesar di antara pulau yang berada di selatan/tenggara jazirah Sulawesi Tenggara. Sejak awal abad XIV, nama Buton terkenal di Nusantara sebagai daerah yang berada dalam batas pengawasan Majapahit¹. Bahasa yang digunakan adalah Wolio². Wilayah Kesultanan Buton meliputi pulau-pulau Buton, Muna, Kabaena, dan pulau-pulau kecil sekitar Buton, Muna, ke arah selatan Kepulauan Tukang Besi³ (Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomiya, Kapota, Langkesi, dan Binongko), serta daerah-daerah Poleang dan Rumbia di ujung barat daya jazirah Sulawesi Tenggara. Wilayah Kerajaan Buton terletak pada 121° 40' Bujur Timur dan 124° 50' Bujur Timur Serta 4° 2' Lintang Selatan dan 6° 20' Lintang Selatan.

Cikal bakal Kerajaan Buton adalah daerah Kalampa di desa Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Pulau Buton. Daerah ini merupakan daerah yang kemudian berkembang menjadi Kampung Gundu-Gundu dan Barangkatopa (dalam Haziroen:1994). Masuknya pengaruh agama Islam yang dibawa oleh Syaikh Abdul Wahid yang berasal dari Semenanjung Melayu (Johar) mengubah bentuk pemerintahan kerajaan menjadi kesultanan. Penduduk Buton termasuk ras Deutro Melayu yang penyebarannya dimulai dari daratan Asia melalui Annam, Tonkin, Indo-Cina, Kamboja, terus ke Asia Tenggara kepulauan.

Selain karena letak geografisnya, masyarakat Kesultanan Buton adalah masyarakat bahari yang memiliki kegemaran berdagang. Bukan hanya itu, Kesultanan Buton juga memusatkan perhatian pada laut sebagai sumber penghasilan kerajaan. Hal tersebut membuka peluang bagi Kesultanan Buton untuk saling berinteraksi dengan kerajaan-kerajaan lainnya seperti Kerajaan Ternate, Gowa, Bone serta kerajaan kecil lainnya.

2.2 Selayar

Kepulauan Selayar adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang mendapat julukan sebagai kabupaten maritim. Tidak mengherankan karena kabupaten ini memiliki panjang pantai lebih dari daratannya. Bukan hanya itu, kepulauan ini sangat strategis sebagai jalur perdagangan yang menjadikannya sebagai salah satu daerah yang penting dalam sejarah perdagangan di Indonesia. Ibukota Kabupaten Selayar terletak di Kota Benteng. Letak geografis, wilayah di sebelah selatan agak ke Timur Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya pada 05° 42' - 07° 35' Lintang Selatan dan 120° 15' - 122° 30' Bujur Timur. Luas wilayah tercatat 903,35 Km² yang mencakup 10 kecamatan yang terdiri atas 67 desa dan 9 kelurahan yang dipisahkan oleh lautan. Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba, sebelah Timur dengan Laut Flores, sebelah Barat dengan Laut Flores dan Selat Makassar, dan wilayah Selatan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Selayar yang terdiri atas pulau-pulau yang tersebar dengan jarak yang cukup jauh, mempunyai pengaruh besar terhadap akses pelayaran.

Penutur Selayar berasal dari ras Austronesia, Melayu-Polinesia, Sulawesi, Sulawesi Selatan, dan Makassar (SIL, 2006:68). Lebih lanjut, SIL (1983:68) pernah meneliti tentang bahasa Selayar dan dinyatakan bahwa bahasa itu memiliki kesamaan dialek dengan bahasa Makassar sebesar 69%. Angka tersebut menempatkan bahasa Selayar dan bahasa Makassar berada pada level keluarga bahasa.

2.3 Laiyolo

Laiyolo adalah salah satu daerah di Kepulauan Selayar, Kecamatan Bontosikuyu yang beribukotakan Pariangan. Secara geografis, wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bontoharu, sebelah Timur berbatasan dengan Taka Bonerate, sebelah Barat dengan Laut Flores, dan wilayah Selatan dengan Pasimasunggu.

¹ Seperti yang ditulis Mpu Prapanca dalam Negarakertagama pupuh XIV bait ke-5

² Wolio merupakan bahasa utama pada zaman Sultan di Baubau dan beberapa masyarakat di sekitarnya dan dahulu digunakan oleh kaum bangsawan di daerah itu (SIL, 2006:72).

³ Dengan bertambah luasnya wilayah Kerajaan Buton, wilayah pemerintahan dibedakan atas wilayah inti (Bonto dan Bobata), Moronene (Pulau Koba Ena, Poleang, Rumbia), dan Barata (daerah yang diharapkan dapat menjaga keamanan dan kestabilan dari kekuasaan asing yaitu kepulauan wakatobi)

Bahasa Laiyolo¹ hanya dituturkan oleh orang-orang tua yang memiliki usia diatas 40 tahun. Selain menguasai bahasa Laiyolo, mereka juga menggunakan bahasa Selayar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bahasa ini tidak lagi dikuasai oleh generasi muda. Bahasa ini perlu mendapat perhatian dari para linguist seperti adanya upaya pelestarian dan pemertahanan bahasa karena bahasa ini sudah terancam punah.

3. Relasi Kekekabatan Wolio, Selayar, dan Laiyolo secara Kuantitatif

Relasi kekerabatan antara bahasa Wolio, Selayar, dan Laiyolo dapat diketahui dengan menggunakan metode komparatif yang bersifat kuantitatif melalui teknik leksikostatistik. Pendekatan kuantitatif ini dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai hubungan kekerabatan. Crowley (1987:192) menguraikan empat langkah yang dilakukan dalam penerapan leksikostatistik, yaitu (1) pengumpulan data, (2) penentuan kognat atau set kognat, (3) penghitungan persentasi kognat, dan (4) penentuan hubungan kekerabatan antarbahasa. Untuk mengetahui tingkat kekerabatan, hasil persentasi kognat yang sudah diketahui, kemudian dihubungkan dengan kategori tingkat kekerabatan bahasa seperti yang direkomendasikan oleh Crowley (1987):

Tingkat pengelompokan	Persentasi kognat
Dialek sebuah bahasa (<i>dialect of language</i>)	81-100%
Bahasa dari keluarga bahasa (<i>family</i>)	36-81%
Keluarga bahasa dari trah bahasa (<i>stock</i>)	12-36%
Trah bahasa dari suku bahasa (<i>mesophylum</i>)	4-12%
Suku bahasa dari ras bahasa (<i>macrophyllum</i>)	1-4%

Penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang diajukan oleh Crowley sebagai berikut.

Pertama, data-data yang diyakini valid telah terkumpul. Data tersebut berupa daftar kosakata ketiga bahasa yang terdiri atas 139 glos².

Kedua, setelah data dikumpulkan, kemudian ditentukan glos yang berkerabat atau kognat. Berdasarkan pemeriksaan daftar kata, terdapat tiga macam hubungan antarkognat yang didasarkan pada fonologi komparatif yang dipaparkan oleh Hale (2004), Janda (2004), dan Ohala (2004), yaitu: (1) berkognat, apabila pasangan kata sama atau mirip secara fonologis, (2) tidak berkognat, apabila pasangan kata berbeda, dan (3) tidak jelas, apabila pasangan kata mirip, tetapi mengalami perubahan bunyi yang tidak alami atau masih perlu penjelasan lebih lanjut melalui rekonstruksi. Namun, kata yang tidak jelas kognatnya dihitung sebagai kognat dengan asumsi bahwa kata-kata dengan perubahan bunyi yang tidak alami yang berulang-ulang mempunyai hubungan (Meillet, 1970).

Ketiga, membuat persentase kerabat. Pada tahap ini dilakukan perhitungan terhadap jumlah glos yang dibandingkan. Perhitungan tersebut dilakukan dengan cara membagi jumlah kata kerabat dengan glos yang dibandingkan kemudian dikalikan seratus persen, sehingga diperoleh persentasi jumlah kekerabatan.

Keempat, menurut Crowley (1987) penyusunan silsilah kekerabatan dimulai dengan (1) menyusun tabel relasi antar bahasa berdasarkan persentasi kognat yang paling dekat, (2) mencari makna yang secara signifikan lebih tinggi daripada yang lain, (3) mencari tingkat selanjutnya dari hubungan tersebut, kemudian (4) membuat silsilah hipotesis dari bahasa-bahasa tersebut dan menarik kesimpulan mengenai hubungan dalam silsilah secara umum.

Tabel 1. Persentase Relasi kekerabatan Bahasa Wolio, Selayar, dan Laiyolo

Wolio		
67	Laiyolo	
42	55	Selayar

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil perhitungan leksikostatistik menunjukkan persentasi relasi kekerabatan ketiga bahasa pada tabel (1) sebagai berikut: 1) Wolio – Laiyolo, 67%; 2) Wolio – Selayar, 42%; dan 3) Laiyolo – Selayar, 55%. Berdasarkan hal itu dapat dinyatakan bahwa meskipun bahasa Laiyolo di Kepulauan Selayar yang secara administratif berbeda dengan bahasa Wolio di Sulawesi Tenggara didapatkan hasil perhitungan relasi kekerabatan kedua bahasa masing-masing adalah keluarga bahasa. Hal ini menjawab kesimpangsiuran para linguist tentang status Bahasa Laiyolo dan Bahasa Wolio, serta turut membenarkan klasifikasi Esser (1938) yang telah mengklasifikasikan Laiyolo dan Wolio berada pada subkelompok Muna-Buton.

Relasi kekerabatan antara Bahasa Laiyolo dan Selayar berada pada level 55%, berada pada level bahasa dari keluarga bahasa. Kedua bahasa itu berada pada wilayah administratif yang sama, tapi presentasi kognat

¹ Penutur meliputi 250 orang (SIL, 2006:64)

² Jumlah Swadesh yang terdapat dalam Holle list

tertinggi ditunjukkan oleh Wolio dan Laiyolo yang notabene berada di wilayah administratif yang berbeda. Diasumsikan bahwa bahasa Selayar dan Laiyolo adalah bahasa yang berbeda, adanya glos yang kognat ditengarai sebagai pinjaman karena bahasa Selayar sangat mempengaruhi Laiyolo.

Persentasi terkecil ditunjukkan oleh relasi kekerabatan bahasa Wolio dan bahasa Selayar, yaitu 42%. Berdasarkan persentase kognat ketiga bahasa tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa Wolio, Selayar, dan Laiyolo merupakan sebuah bahasa dari sebuah keluarga bahasa. Dalam hal ini, bahasa Wolio dan Laiyolo lebih dekat jika dibandingkan dengan bahasa Selayar. Untuk lebih jelas melihat garis silsilah bahasa Wolio, Selayar, dan Laiyolo, dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



4. Hubungan Historis Buton, Selayar, dan Laiyolo

Pada abad XVI, Kerajaan Gowa di bawah pimpinan Karaeng Tumapa'risi Kallona (1510-1546) mulai melakukan ekspansi kekuasaan dengan menaklukkan negeri-negeri sekitarnya, baik melalui jalur perang maupun tekanan. Raja Gowa kemudian memungut '*sabu kati*' dari Bulukumba dan Selayar, serta menguasai aktivitas pelayaran dan perdagangan untuk melakukan ekspansi ke Buton, Selayar, Seram, Baru, Timur, dan Flores. (ibid dalam Wahida: 2009:40).

Selayar banyak dipengaruhi oleh Kerajaan Gowa karena Selayar dalam perdagangan maritim selalu mendapat pengawasan dari Makassar. Hal tersebut juga berpengaruh pada perkembangan bahasa Selayar karena banyak dipengaruhi oleh Makassar sehingga status kebahasaannya menjadi simpang siur. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kontak yang begitu panjang bahasa Selayar banyak melakukan peminjaman kata, sehingga banyak leksikal maupun fonologis mirip dengan Makassar. Oleh karena itu, timbul anggapan bahwa Selayar adalah dialek dari bahasa Makassar, yakni adanya kemiripan bunyi bahasa antara Makassar dan Selayar.

Dari hasil perhitungan leksikostatistik didapati bahwa bahasa Laiyolo dan Wolio merupakan anggota subkelompok Muna-Buton. Jika dihubungkan dengan sejarah pada masa Kesultanan Buton yang membagi wilayah menjadi tiga bagian, salah satunya adalah wilayah *Barata* yang merupakan sistem pertahanan pemerintahan. Wilayah ini dianggap dan diharapkan dapat menjaga keamanan dan kestabilan dari kekuasaan asing. Daerah Barata ini meliputi Muna, Tiworo, Kalingsusu/Kulisusu, dan Kaledupa serta Kepulauan Tukang Besi. Karena pada masa itu terjadi perebutan kekuasaan, konon ada sekelompok prajurit yang membangun pertahanan di salah satu daerah Selayar, mereka tidak mau kembali dan hidup menetap di daerah itu. Bahasa yang digunakan dinamakan bahasa Laiyolo. Generasi muda banyak yang tidak bisa menuturkan bahasa ini, mereka lebih memilih menggunakan bahasa Selayar ataupun Makassar dialek Lakiung, yang menyebabkan bahasa ini terancam punah.

5. Simpulan dan Saran

Analisis kekerabatan bahasa Selayar, Wolio, dan Laiyolo berdasarkan teknik leksikostatistik menunjukkan bahwa tingkat kekerabatan bahasa Wolio dan Laiyolo berada pada tataran 67%, bahasa Laiyolo dan Selayar berada pada tataran 55%, dan bahasa Wolio dan Selayar berada pada tataran 42%. Hal ini berarti bahwa bahasa Wolio, Selayar dan Laiyolo merupakan sebuah bahasa dari sebuah keluarga bahasa, karena bahasa Wolio dan Laiyolo lebih dekat jika dibandingkan dengan bahasa Selayar. Tulisan ini turut membenarkan apa yang telah Esser (1938) klasifikasikan mengenai pengelompokan bahasa-bahasa di Sulawesi.

Tulisan ini sebagai pemicu bagi penelitian selanjutnya dalam upaya penelusuran kata-kata pinjaman yang terdapat pada bahasa Wolio, Selayar, dan Laiyolo, mengingat bahasa tersebut sering mengalami saling kontak yang cukup intensif, sehingga akan ada pengaruh timbal balik antara Selayar – Laiyolo, Laiyolo – Wolio, dan Selayar–Wolio. Tulisan ini hanya pada tataran kuantitatif, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih lanjut mengenai relasi kekerabatan bahasa-bahasa tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat ditelusuri lebih mendalam, yaitu pada tataran fonologi, morfologi, leksikon, dan sintaksis. Dengan demikian, dapat diketahui alur inovasi yang dialami bahasa tersebut.

Daftar Pustaka

- Adriani, N. 1925. *De Minahassische Talen*. Di dalam BTLV 81: 134-164
- Arlloto, Anthony. 1972. *Introduction to historical Linguistics*. Reprint of the ed. Publishing by Houghton Mifflin, New York.
- Campbell, Lyle. 1998. *Historical Linguistic: An Introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Crowley, Terry. 1987. *An Introduction to Historical Linguistics*. Port Moresby: University of Papua New Guinea.
- Esser. S. J. 1938. *In Atlas Van Tropics Nederland*. Amsterdam: Koninklijk Nederlandsch Aardijskundig Genootschag.
- Fernandez, Inyo Yos. 1996. *Relasi Historis Kekerabatan Bahasa Flores, Kajian Linguistik Historis Komparatif Terhadap Sembilan Bahasa di Flores*. Flores: Nusa Indah, Ende.
- Kridalaksana, H. 1980. *Linguistics Reconstruction of Migration. Termuat dalam yang Tersurat dan yang Tersirat*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Mahsun, M.S. 1995. *Dialektologi Diakronis, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Noorduyn, J. 1991. "The language of Sulawesi" dalam *Papers in Austronesian Linguistics No. 1*. Halaman 137-150. H. Steinhauer (Ed). Australia: the Australian National University.
- Melalatoa, M. Junus. 1995. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia Jilid L-Z*. Jakarta: Depdikbud Republik Indonesia.
- Poedjosoedarmo, Soepomo. 2008. "Perubahan Bahasa". Makalah yang disampaikan pada Ceramah Ilmiah Linguistik yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Melayu-Melayu. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Safitri, Sandra. 2010. *Binongko dan Bonerate, Dua Isolek di Kepulauan Lepas Pantai Tenggara dan Selatan Pulau Sulawesi*. Tesis. Yogyakarta: FIB Universitas Gadjah Mada.
- SIL. 2006. *Bahasa-Bahasa di Indonesia*. Jakarta. SIL International.
- Sneddon, J. N. 1995. "Situasi Linguistic di Pulau Sulawesi" dalam PELLBA 8. Halaman 139-175. Editor: Soenjono Dardjowidjojo. Jakarta: Lembaga Bahasa UNIKA Atma Jaya.
- Wahida. 2009. *Bahasa Selayar di Pulau Selayar (Kajian Dialektologi dan Linguistik Historis Komparatif)*. Tesis. Yogyakarta: FIB Universitas Gadjah Mada.
- Zuhdi, susanto, G.A. Ohorella, M. Said D. 1996. *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton*. Jakarta: Depdikbud.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Komisi C
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 20 Juli 2010, 14.30—16.00 wita
Judul Makalah	: Relasi Bahasa Laiyolo dan Selayar di Pulau Selayar Sulawesi Selatan dengan Wolio di Sulawesi Tenggara (Kajian Lingustik Historis Komparatif)
Penyaji/Pembicara	: Rahmawati, S.Pd.
Pemandu	: Neil Armstrong, S.S., M.Hum.
Pencatat	: Mahmudin Mulyadi, S.Pi.
Jumlah Peserta	: 40 orang

TANYA JAWAB

La Ode Muhammad Syarif Makmum

Pertanyaan /Saran

Mengenai sejarah hubungan Buton dan Selayar, saya ingin sedikit menambahkan apa yang telah dikemukakan oleh Saudari Rahmawati. Menurut sejarah Buton, memang ada hubungan perkawinan antara Sultan Buton dengan putri-putri dari Kepulauan Selayar. Sultan Buton II menikah dengan putri raja dari Kalaota. Sultan Buton III menikah dengan putri dari Selayar.

Jawaban/Tanggapan

Terima kasih atas penjelasan tambahan dari Bapak La Ode Muhammad Syarif Makmum.

Dr. Inyo Yos Fernandez (Universitas Gadjah Mada)

Pertanyaan /Saran

Penelitian-penelitian mengenai hubungan kekerabatan rumpun Muna-Buton sejauh ini belum dijelaskan secara rinci. Penelitian yang telah dilakukan oleh Saudari Rahmawati dan Sandra masih berupa penelitian lingkaran-lingkar luar dari hubungan kekerabatan rumpun bahasa Muna-Buton. Penelitian ini sebaiknya ditindaklanjuti dengan melihat hubungannya dalam kelompok lingkaran tengah agar penelitian hubungan kekerabatan dalam rumpun bahasa Muna-Buton dapat dilakukan secara komprehensif.

Jawaban/Tanggapan

Terima kasih atas saran dari Bapak, saran tersebut akan kami tindak lanjuti dalam penelitian-penelitian ke depan.

PEMERTAHANAN DAN PERGESERAN BAHASA IBU DI POLEANG KABUPATEN BOMBANA: SUATU PENGAMATAN AWAL

Asri

(Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)

1. Pendahuluan

Manusia, budaya, dan bahasa adalah sesuatu yang saling berkaitan. Sejak lahir manusia mulai belajar berbahasa dan bahasa adalah produk budaya. Perlahan tetapi pasti manusia sejak pertama –mulai lahir– mulai belajar menguasai salah satu bahasa yang ada di sekitar lingkungan atau di sekitar tempat tinggalnya dan bahasa itu tentunya akan dijadikan sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu. Bahasa yang dikuasai olehnya itulah, ia berinteraksi dengan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya beranjak remaja manusia sudah menguasai bahasa kedua karena sudah dapat berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas atau pada lingkungan atau tempat tinggal yang berbeda dengan lingkungan sebelumnya. Lambat laun manusia dapat melupakan bahasa pertamanya dan tetap mempertahankan bahasa keduanya. Peristiwa ini dapat saja dialami oleh pengguna bahasa dan dari sinilah mulai terjadi pergeseran dan pemertahanan bahasa.

Pemertahanan bahasa menyangkut masalah sikap dan penilaian terhadap suatu bahasa untuk tetap menggunakan bahasa tersebut di tengah-tengah bahasa lainnya yang beragam. Hal yang menarik adalah penggunaan bahasa pertamanya cenderung menurun akibat adanya bahasa baru yang mempunyai fungsi superior. Pemertahanan bahasa lebih menyangkut masalah sikap atau penilaian terhadap penutur suatu bahasa untuk tetap menggunakan bahasa tersebut di tengah-tengah bahasa lainnya. Salah satu isu yang cukup menonjol dalam kajian tentang pergeseran dan pemertahanan adalah ketidakberdayaan minoritas imigran mempertahankan bahasa asalnya dalam persaingan dengan bahasa mayoritas yang dominan dan supraetnis. Pergeseran bahasa juga menyangkut masalah mobilitas penutur sebagai akibat perpindahan penutur atau penggunaan bahasa ibu, kemudian tidak menggunakan lagi. Ini terjadi ketika pendatang harus berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan menggunakan bahasa penduduk setempat yang sementara menanggalkan bahasanya sendiri.

Bombana adalah daerah yang pluralis didiami berbagai ragam suku, baik suku asli maupun suku pendatang. Moronene adalah salah satu suku asli yang ada di Sulawesi Tenggara mendiami wilayah Bombana selebihnya adalah suku pendatang. Suku Moronene menggunakan Bahasa Moronene sebagai bahasa ibunya. Salah satu suku pendatang yang ada di Bombana adalah Suku Bugis dan bahasa yang digunakan adalah Bahasa Bugis sebagai bahasa ibunya. Bahasa Moronene dan Bugis sebagai bahasa ibu oleh penggunanya juga telah mengalami pergeseran dan pemertahanan. Banyak faktor sehingga terjadi pergeseran dan pemertahanan bahasa ibu di Bombana. Faktor-faktor tersebutlah yang akan dibahas lebih lengkap pada makalah ini.

2. Pergeseran Bahasa

Pergeseran bahasa menyangkut masalah mobilitas penutur, di mana sebagai akibat dari perpindahan penutur atau para penutur yang tadinya menggunakan bahasa ibu kemudian menjadi tidak menggunakannya lagi (Chaer, 2004:142). Pergeseran bahasa dapat juga menyangkut masalah penggunaan bahasa oleh seorang penutur atau sekelompok penutur yang terjadi akibat perpindahan dari satu masyarakat tutur ke masyarakat tutur lain.

Bahasa mengalami pergeseran jika penggunaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua tidak seimbang. Ketika keseimbangan ini tidak ada lagi, dua kemungkinan yang akan muncul. Kemungkinan yang pertama adalah bahasa pertama tetap bertahan, kedua bahasa pertama tersingkirkan oleh bahasa kedua. Pergeseran bahasa pertama atau bahasa ibu ke bahasa kedua telah dirasakan berbagai kalangan. Timbul kekhawatiran bahwa secara perlahan tetapi pasti bahasa ibu mengalami pergeseran. Banyak faktor sehingga pergeseran penggunaan bahasa pertama ke bahasa kedua terjadi, ini dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini.

Ilustrasi ini terjadi di salah satu daerah yang ada di Kabupaten Bombana yaitu di Poleang. Poleang merupakan daerah pluralis yang didiami berbagai ragam suku. Suku asli daerah ini adalah suku Moronene dan bahasa daerahnya adalah Bahasa Moronene. Selain itu suku yang dominan adalah suku yang berasal dari Sulawesi Selatan yaitu Bugis, Makassar, dan Mandar. Kata Moronene merupakan kata yang terdiri dari kata 'Moro' dan 'Nene'. Kata 'Moro' dalam Bahasa Moronene berarti semacam atau serupa. Contoh: Morolemo (Moro dan Lemo) artinya yang serupa/semacam lemon. Kata 'Nene' dalam Bahasa Moronene berarti resam (pohon resam). Jadi, penamaan Moronene adalah berasal dari nama sejenis tumbuhan yang menyerupai pohon resam.

Seorang anak bahasa pertamanya adalah bahasa daerah Moronene. Lalu, ketika bergaul dengan lingkungan sekitarnya dia menguasai salah satu bahasa daerah pendatang yaitu Bahasa Bugis. Lambat laun ia menyadari bahwa Bahasa Bugis lebih penting atau membawa manfaat yang sangat besar baginya. Hal ini membuat dia lebih memilih Bahasa Bugis daripada Bahasa Moronene sebagai bahasa daerahnya dalam

berinteraksi. Dengan demikian, posisi Bahasa Moronene sebagai bahasa yang utama bagi si anak menjadi bergeser sebagai bahasa yang dinomorduakan. Kasus seperti ini disebut dengan kasus pergeseran. Hal ini terjadi karena faktor kedwibahasaan.

Faktor kedwibahasaan bukanlah satu-satunya faktor penyebab terjadinya pergeseran bahasa. Terdapat beberapa faktor lain yang juga merupakan penyebab yang sangat rentan terhadap peristiwa pergeseran bahasa. Faktor-faktor tersebut disebabkan oleh beberapa hal berikut.

Menurut Sumarsono dan Partana (2002:237) pergeseran bahasa juga disebabkan oleh sekolah. Sekolah sering juga dituding sebagai faktor penyebab bergesernya pemakaian bahasa ibu karena sekolah biasanya mengajarkan bahasa lain kepada anak-anak. Hal ini pula yang kadangkala menjadi penyebab bergesernya posisi bahasa daerah. Para orang tua enggan mengajari anaknya bahasa daerah karena mereka berpikir bahwa anaknya akan susah memahami mata pelajaran yang disampaikan oleh gurunya dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Akibatnya anak tidak mampu berbahasa daerah atau paling tidak anak hanya dapat memahami bahasa daerah tanpa mampu berinteraksi. Hal ini juga terjadi di daerah Poleang karena sekolah di daerah ini belum menerapkan pengajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal. Semestinya pemerintah menerapkan pengajaran bahasa daerah setempat sebagai muatan lokal.

Faktor selanjutnya adalah faktor perpindahan penduduk. Hal ini sesuai dengan pernyataan Chaer (2004:142), pergeseran bahasa (*language shift*) menyangkut masalah penggunaan bahasa oleh seorang penutur atau sekelompok penutur yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari satu masyarakat tutur ke masyarakat tutur yang lain.

Daerah Poleang dikenal sebagai daerah pluralis yang didiami berbagai ragam suku. Oleh karena itu mobilisasi penduduk daerah ini sangat tinggi. Pergeseran bahasa juga dapat terjadi karena masyarakat yang didatangi jumlahnya sangat kecil dan terpecah-pecah. Dengan kata lain, pergeseran bahasa bukan disebabkan oleh masyarakat yang menempati sebuah wilayah, melainkan oleh pendatang yang mendatangi sebuah wilayah. Kasus seperti ini terjadi di wilayah Poleang.

3. Pemertahanan Bahasa

Keadaan dan masalah yang dihadapi bahasa Moronene dewasa ini sudah banyak diungkapkan dalam berbagai diskusi, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, di forum akademik maupun nonakademik. Di satu sisi, dari waktu ke waktu muncul keprihatinan (baik dari pakar, pemerhati, maupun pecinta Bahasa Moronene) akan menyusutnya jumlah penutur dan pemakaian bahasa Moronene serta menyusutnya minat masyarakat mempelajari Bahasa Moronene. Untuk mengatasi persoalan itu diperlukan identifikasi akar masalahnya. Salah satu penyebab tidak digunakannya bahasa Moronene dalam pergaulan keseharian masyarakat Moronene, terutama generasi mudanya, adalah kekurangmampuan Bahasa Moronene untuk memenuhi kebutuhan penuturnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan kondisi seperti itu ada kecenderungan penutur berpindah ke bahasa lain, biasanya bahasa kedua (Bahasa Indonesia), sebagai wahana penyampai gagasan yang memungkinkan komunikasi berjalan lebih lancar.

Salah satu upaya pemertahanan Bahasa Moronene yang harus dilakukan adalah melalui jalur pendidikan. Maksudnya, di samping diajarkan sebagai salah satu mata pelajaran atau muatan lokal, bahasa Moronene juga harus digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah pada tingkat taman kanak-kanak dan dasar.

Pemerintah daerah pun harus menggagas pembuatan perda tentang Bahasa Moronene, seperti yang dilakukan beberapa daerah di Indonesia. Hadirnya perda setidaknya dapat mengatur para pendatang untuk turut serta menggunakan Bahasa Moronene dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian, harapan agar Bahasa Moronene dapat eksis di daerahnya sendiri.

Di atas telah dijelaskan bahwa pergeseran bahasa terjadi perpindahan penduduk, terdapat pula masyarakat yang tetap mempertahankan bahasa pertamanya dalam berinteraksi dengan sesama mereka meskipun mereka adalah masyarakat minoritas. Kasus pemertahanan bahasa terjadi pada masyarakat Bugis yang berada di Poleang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka tetap mempertahankan Bahasa Bugis. *Pertama*, wilayah pemukiman mereka terkonsentrasi pada satu tempat yang secara geografis agak terpisah dari wilayah pemukiman masyarakat Moronene. *Kedua*, adanya toleransi dari masyarakat Moronene untuk menggunakan Bahasa Bugis dalam berinteraksi dengan golongan masyarakat Bugis. *Ketiga*, adanya loyalitas yang tinggi dari masyarakat Bugis sebagai konsekuensi kedudukan atau status bahasa ini yang menjadi lambang identitas diri masyarakat Bugis.

Masyarakat Moronene ini, selain menggunakan Bahasa Moronene dan Bahasa Bugis, juga menggunakan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diperlakukan secara berbeda oleh mereka. Dalam anggapan mereka Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada Bahasa Moronene.

4. Penamaan Lokasi

Kata Poleang dari berasal dari asal kata *polea* yang artinya dalam Bahasa Moronene *penyeberangan*. Daerah Poleang dialiri sebuah sungai besar yang disebut dengan Sungai Poleang. Di daerah aliran sungai ini didiami oleh Suku Moronene yang menamakan dirinya *To Polea*. Khusus di muara sungai didiami oleh

beberapa Suku Bugis dan membuat persawahan dan Sungai Polea ini dinamakan *Salo Poleang*. Lambat laun masyarakat lebih senang menyebut kata Poleang daripada kata Polea. Begitu juga dengan penamaan Lameong-Meong. Penamaan Lameong-Meong berasal dari Bahasa Moronene, yaitu Lameo-Meo. Lameo-Meo dalam bahasa Moronene berarti daerah yang sepanjang sungainya ditumbuhi tumbuhan *Meo*. Dalam bahasa Moronene, 'meo' adalah sejenis pohon besar yang batangnya dapat dibuat papan. Kedatangan suku-suku lain di Bombana, khususnya Suku Bugis telah mengubah penamaan lokasi Lameo-Meo. Suku Bugis yang dikenal sebagai pemakai bahasa konsonan telah memengaruhi penamaan lokasi Lameo-Meo menjadi Lameong-Meong. Dari dua contoh penamaan lokasi di atas terjadi pergeseran dan pemertahanan bahasa.

5. Penutup

Usaha pelestarian dan pemertahanan bahasa daerah tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat penutur bahasa. Bahasa daerah dapat terus berkembang bukan dengan memperbanyak seminar, kongres, simposium dan lain sebagainya, melainkan dengan menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa yang berprestise.

Banyak yang dapat dilakukan agar bahasa daerah dapat dipandang berharga dihadapan penuturnya sendiri. Agar bahasa daerah tetap bertahan beberapa usaha yang harus dilakukan di antaranya, tetap berusaha menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa pertama bagi anak-anak di lingkungan keluarga. di lingkungan sekolah bahasa daerah dijadikan mata pelajaran wajib untuk muatan lokal pada tingkat dasar utamanya tingkat taman kanak-kanak dan pendidikan dasar. Menerbitkan bahan pustaka yang berbahasa daerah sehingga bahasa daerah tidak saja dipelajari secara lisan tetapi juga secara tertulis. Tak kalah pentingnya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembelajaran bahasa dan sastra daerah untuk guru bahasa bahasa dan sastra daerah.

Daftar Pustaka

- Chaer, Abdul dan Agustina Leony. 2004. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta.
Kushartanti, dkk (eds). 2005. *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Sumarsono dan Partana Paina. 2002. *Sosiolinguistik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Komisi D
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 20 Juli 2010, 14.30 – 16.00
Penyaji/Pemakalah	: Asri, S.S., M. Hum.
Judul Makalah	: Pemertahanan dan Pergeseran Bahasa Ibu di Poleang Kabupaten Bombana: Suatu Pengamatan Awal
Pemandu	: Ramlah Mappau, S.S., M. Hum.
Pencatat	: Lia Amaliah Muhlisi, S. T.
Jumlah Peserta	: 40 orang

TANYA JAWAB

Umi Kalsum (Guru SMUN di Kab. Bombana)

Pertanyaan/Saran

Bagaimana situasi penggunaan bahasa daerah di wilayah ini (Bombana), kita ketahui bahwa Bombana adalah daerah didiami berbagai macam etnis atau suku?

Jawaban/Tanggapan

Pergeseran bahasa daerah di Bombana akan terus terjadi utamanya pergeseran bahasa Moronene sebagai bahasa daerah penduduk asli Bombana. Daerah Bombana adalah daerah pluralis yang didiami beberapa etnis utamanya etnis pendatang dari Sulawesi Selatan. Hal ini akan mempengaruhi situasi kebahasaan di daerah ini. Daerah ini didiami oleh etnis Moronene dan etnis pendatang seperti etnis Bugis, Makassar, Mandar, Jawa serta Bali dan masing-masing menggunakan bahasa daerahnya sebagai bahasa sehari-hari utamanya di lingkungan keluarga. Ada hal menarik yang terjadi di daerah ini yaitu pada saat transaksi di pasar, bahasa yang dipakai pada umumnya adalah bahasa salah satu etnis pendatang yaitu etnis Bugis. Penjual dan pembeli walaupun berlainan etnis tetapi yang digunakan adalah bahasa Bugis. Fenomena ini adalah hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

David T. Anderson (SIL)

Pertanyaan/Saran

Penggunaan bahasa Moronene khususnya di daerah Poleang memang sudah mulai jarang digunakan apalagi terdesak dengan bahasa daerah pendatang. Penutur bahasa Moronene utamanya kalangan pemuda sudah jarang menggunakan bahasa ibunya. Mereka lebih suka menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah pendatang yang dikuasainya. Khusus di daerah-daerah mayoritas penduduk asli Moronene mereka masih setia menggunakan bahasa Moronene.

Jawaban/Tanggapan

Untuk mempertahankan bahasa Moronene tentunya banyak hal yang harus dilakukan dan tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Ada hal pernyataan menarik yang telah disampaikan Pak Anderson pada makalahnya yaitu orang yang akan menentukan hidup matinya bahasa daerah adalah para pengantin baru di kampung. Bagaimana caranya memberi pengertian kepada mereka bahwa mereka mesti berbahasa Moronene dengan anak mereka yang akan lahir. Selain itu penggunaan bahasa Moronene perlu disosialisasikan di mana-mana seperti pada kegiatan yang biasa dihadiri oleh ibu muda dan ayah muda di kampung, yaitu Dasa Wisma (PKK) dan Posyandu juga instansi yang memiliki jaringan sampai ke tingkat desa, antara lain Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

FENOMENA SASTRACYBER : SUATU UPAYA PEMBELAJARAN SAstra SECARA INDEPENDEN

Hasnarianti
(Universitas Muhammadiyah Makassar)

1. Pendahuluan

Sastra Indonesia mutakhir diwarnai beragam defenisi dan polemik yang menyertai perjalanannya. Pernah menghangat perdebatan tentang sastra kontekstual versus sastra universal di era 80-an, lalu belakangan menyusul sejumlah polemik tentang sastra buku, sastra majalah, sastra koran, sastra saiber, sastra komunitas, dan terakhir sastra *facebook*.

2. Seluk Beluk *Sastracyber*

Istilah *sastracyber* mulai populer memang baru belakangan ini. Sejak tahun 2001 baru merebak istilah demikian. Yakni, pada saat budaya internet mulai berkecamuk di negeri ini. Melalui internet tersebut, muncul *sastracyber*. Apapun yang terjadi, kehadiran *sastracyber* seakan-akan telah menabuh “gong besar” dunia sastra. Meskipun pada dasarnya banyak anggapan negatif yang bermunculan bahwa kehadiran *sastracyber* hanya sekadar karya orang yang kurang kerjaan. Anggapan ini memang menyakitkan sehingga perlu perhatian secara khusus dari pemerhati sastra untuk mengkaji sejauhmanakah peran *sastracyber* dalam memunculkan karya-karya yang bagus dan telah memiliki etos yang mapan sebagai sebuah terobosan inovatif yang tidak menimbulkan salah paham dan simpang siur.

Istilah *sastracyber*, dapat dirunut dari asal katanya. *cyber*, dalam bahasa Inggris tidaklah berdiri sendiri, melainkan terjalin dengan kata lain seperti *cyberspace*, *cybernate*, dan *cybernetics*. *Cyberspace* berarti ruang (berkomputer) yang saling terjalin membentuk budaya di kalangan mereka. *Cybernate*, berarti pengendalian proses menggunakan computer. *Cybernetics*, berarti mengacu pada sistem kendali otomatis, baik dalam sistem komputer maupun jaringan syaraf. Dari pengertian ini dapat dikemukakan bahwa *sastracyber* adalah aktivitas sastra yang memanfaatkan komputer atau internet.

Munculnya *sastracyber* telah menyuguhkan tradisi dan realitas tersendiri bagi penulis puisi. Sebab, yang terjun langsung dalam komunitas *sastracyber* harus memiliki keahlian (*skill*) yang andal dalam bidang kemajuan teknologi komunikasi seperti internet.

Pada dasarnya, penulis yang tertarik terjun ke dunia *sastracyber* tidak datang begitu saja, akan tetapi ada beberapa pertimbangan yang telah dipikirkan secara matang bahwa keikutsertaannya dalam menuangkan karyanya di komunitas *sastracyber* disebabkan alasan berikut.

Pertama, mungkin mereka ingin mencari model baru kreativitas dan ingin meninggalkan tradisi lama yang menjenuhkan. Mereka menganggap bahwa *sastracyber* adalah ladang baru yang menjanjikan. *Sastracyber* akan lebih mewakili keinginan dan daya juang kreativitas, karena masih terbatas yang berminat. Daya saing mereka pun masih terbatas sehingga karya seperti apa saja akan semakin diakui eksistensinya.

Kedua, mereka ada yang ingin mencari popularitas secara instan. Lewat *Sastracyber* yang terbatas komunitasnya, sebaliknya diri pengarang akan lebih mudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Nama mereka akan terangkat dan segera terkenal ke seluruh jaringan *cyber*.

Ketiga, ada di antara mereka yang sekadar iseng bermain internet dan ingin meloloskan diri dari penjara sastra koran. Mereka beranggapan bahwa sastra koran dan buku terlalu hegemonik. Masing-masing penerbit memiliki strategi, ada model KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme) di dalamnya, sehingga tak semua karya penulis pemula tercakup. Itulah sebabnya, *Sastracyber* menjadi tawaran yang menarik. Berarti *sastracyber* menjadi ladang menjebol sistem sastra yang pernah ada, yaitu sistem yang kondusif.

3. Dilema Sastra Cetak

Sastra adalah suara yang dapat lahir dari kesunyian. Wujud yang inheren dari karya sastra, sebagai representasi suara yang berasal dari kesunyian itu, adalah tulisan yang dibukukan. Ketika orang berbicara mengenai karya sastra, pembicaraan itu akan selalu mengimplikasikan adanya buku. Bila karya sastra hadir dalam bentuk nonbuku, misalnya di radio, di koran, bahkan di majalah, karya itu tidak akan disebut sebagai sastra, melainkan sastra radio, sastra koran, dan sastra majalah.

Media massa, sebagai suatu wilayah keberadaan orang banyak yang hiruk-pikuk bukanlah tempat yang baik untuk perkembangan dan pertumbuhan sastra dan bahkan mungkin keberadaan sastra dianggap tidak (akan) pernah ada. Ada beberapa kemungkinan representasi dari sastra, terutama pada sastra buku, misalnya buku merupakan suatu entitas yang mandiri dan dapat berdiri sendiri. Sebagai sesuatu yang mandiri, yang terpisah dari yang lain, buku mempunyai suatu garis batas yang tegas dan jelas, serta memisahkannya dari yang lain. Ia

mempunyai batas yang jelas mengenai awal dan akhirnya. Garis batas inilah yang dapat merepresentasikan garis batas antara sastra dan dunia yang ada di luarnya.

Dominasi sastra koran, sastra radio, dan sastra majalah tersebut menimbulkan suatu permasalahan baru. Pada mulanya, tuntutan penerimaan dan pengakuan terhadap sastra radio, dan sastra majalah, khususnya pada sastra koran, dilakukan atas nama demokrasi. Akan tetapi, sastra yang demikian ternyata membangun struktur birokratis dan totalitarianismenya sendiri. Bila sebelumnya yang menjadi penguasa pada dunia sastra buku adalah para kritikus dan sastrawan senior, pada sastra koran yang menjadi penguasanya adalah para redaktur. Reaksi terhadap kecenderungan ini adalah kelahiran sebuah gerakan secara umum dikenal sebagai gerakan sastra pedalaman. Gerakan tersebut merupakan gerakan dari masyarakat sastra yang berada dalam lingkungan geografis yang jauh dari pusat kekuasaan media. Mereka menciptakan berbagai media lokal yang mereka kelola sendiri dengan redaksi dan dengan cara seleksi secara sendiri. Karena terjadi komunikasi dan usaha saling menyalurkan antara sastrawan dari satu lokalitas dengan yang lainnya, gerakan tersebut bukanlah gerakan perlawanan daerah lokal, ataupun pedalaman terhadap pusat, melainkan gerakan perlawanan dari mereka yang merasa diabaikan dan diperlakukan tidak adil terhadap penguasa tunggal yang dianggap sangat sepihak. Keadaan yang ironis dan dilematis demikian akhirnya dapat dipecahkan dengan hadirnya internet.

Sejak dunia sastra merambah ke dalam dunia maya (internet), lewat berbagai blog yang gratisan, hampir setiap orang dapat memublikasikan teks-teks sastra ciptaannya. Bahkan, teks sastra yang tergolong kurang bermutu isinya, dapat dengan mudah terpublikasikan. Inilah hal yang hampir mustahil terjadi dalam sastra koran, sebab untuk dapat meloloskan teks sastranya di sebuah media cetak minimal harus lolos dari seleksi sang redaktur

Keterkungkungan kreativitas penciptaan sastra di media cetak memunculkan era baru dalam penciptaan sastra digital. Era digital ini setidaknya sudah dimulai ketika teknologi internet merambah belahan negara berkembang, termasuk Indonesia, menjelang millineum II lalu. Situs-situs *online* lokal yang di dalamnya memuat karya sastra - kemudian disebut Sastra *Cyber* - bisa dengan mudah ditemukan dengan hanya memasukkan kata kunci di mesin pencari. Menyebut salah satu diantaranya adalah www.sastracyber.net, situs sastra *online* yang dikelola oleh Yayasan Multimedia Sastra.

Keberlangsungan sastra *cyber*, adalah melalui blog-blog yang disediakan secara gratis, yang hampir tidak mengenal batasan-batasan otoritas seperti yang dialami oleh sastra koran. Hal ini dipandang baik, karena membuat atau mampu mendorong para calon sastrawan untuk berekspresi melalui tulisan atau sastra. Selain situs *online* yang dikelola oleh komunitas, masih ada lagi situs yang dikelola oleh personal atau *webblog*. Berapa jumlah blog yang di dalamnya memuat karya sastra, semacam puisi atau cerpen? Yang jelas, banyak sekali jumlahnya. Hampir semua pengarang atau penyair terkenal, tentu saja, mereka yang melek dengan internet, memiliki blog.

Apa yang dilakukan oleh para pengelola situs sastra *online* atau *blogger* yang dengan sengaja atau tidak menuangkan ide-ide sastranya di blog, memang tidak dalam rangka melawan dominasi sastra cetak, seperti koran. Tapi secara sadar atau tidak, dengan sendirinya telah memberikan pengakuan bahwa media internet memiliki pengaruh yang lebih luas jika dibanding dengan media cetak. Kemudahan yang ditawarkan, bisa jadi para *blogger* itu akan lebih memilih medium internet ini sebagai tempat untuk menuangkan karya sastranya.

Alasannya, tidak harus mencetak, tidak butuh prangko, tidak harus menunggu konfirmasi dari redaktur, belum lagi jika harus dikembalikan. Dengan blog, seorang penyair, pengarang dari yang senior maupun yang masih coba-coba, bisa memuatnya sendiri. Setelah karya dimuat, saat itu juga dapat diakses oleh siapapun.

Persoalan sastra koran dan sastra *cyber* hanyalah persoalan medianya saja. Jika sastra koran selalu mengenal batasan-batasan yang dikendalikan oleh otoritas sang redaksi dan selera pasar, sedangkan sastra *cyber* hampir tidak mengenal batasan-batasan yang dikendalikan oleh otoritas tersebut. Setiap orang bebas memiliki blog gratis yang dapat dijadikan sebagai media untuk memublikasikan karya-karyanya. Selain itu, koran mengenal batasan dimensi ruang dan waktu. Pembacanya hanya kebetulan mereka yang berlangganan dan dibatasi oleh waktu penerbitan. Untuk rubrik sastra dan budaya biasanya terbit setiap hari Minggu yang seringkali hanya dijadikan sebagai hiburan tambahan, melengkapi kolom-kolom keluarga dan entertainment lainnya.

Namun, harus diakui pula bahwa koran dan media cetak telah mempunyai andil dalam membesarkan nama-nama sastrawan. Bahkan, Kompas kini dianggap menjadi barometer perkembangan sastra mutakhir. Tidak heran jika ada yang mengatakan jangan pernah mengaku dirinya sebagai seorang pengarang apabila karyanya belum pernah dimuat dalam Koran nasional tersebut. Menganggap koran atau media cetak menjadi satu-satunya sumber untuk membuat seseorang menjadi sastrawan juga sebuah pendapat yang menyesatkan pada era digital ini.

4. Maraknya Sastracyber Sebagai Salah Satu Upaya Pengembangan Sastra Mutakhir

Dunia sastra kerap kali ditempatkan sebagai sesuatu yang sakral dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan tertentu. Menulis sastra diibaratkan seperti seorang empu yang tengah menempa keris sakti mandra guna, tidak sederhana, dan melewati ritual-ritual khusus. Namun, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seketika

menggantung pandangan itu. Kehadiran internet yang semakin semarak dalam sepuluh tahun terakhir telah menciptakan sebuah fenomena baru berupa *sastracyber*. Coba saja telusuri dengan mesin pengunduh Google, dengan mudah ditemukan segala macam hal yang berkaitan dengan sastra, entah itu berupa puisi, cerpen atau esai. Fenomena sastra *cyber* juga semakin diperkuat dengan hadirnya situs-situs yang memberikan wadah untuk berekspres secara cuma-cuma seperti Blogspot, Wordpress, Friendster, dan Facebook.

Dalam waktu seketika dunia *cyber* pun melunturkan tembok anggapan bahwa sastra hanya milik orang-orang yang telah dibaptis sebagai sastrawan. Sastra pun menjelma dalam wujud yang lebih cair dan bumi. Perkembangan sastra *cyber* yang begitu pesat melumat sekat-sekat batas. Tidak ada kasta, semuanya berada dalam satu ruang dan setara, tanpa embel-embel penulis ternama atau penulis pemula. Semuanya bebas menuangkan apa saja yang ada di kepalanya, mulai dari kata-kata puitis hingga sumpah serapah. "Seseorang dengan mudah dapat mengakses penulis favoritnya dan bukan tidak mungkin penulis itu juga akan mampir ke blog dia," kata cerpenis Eka Kurniawan kepada Jurnal Nasional, Rabu (4/2).

Eka mengatakan, kebebasan dan kesetaraan yang ditawarkan dunia *cyber* dapat menumbuhkan kepercayaan diri seseorang untuk menulis. Tentu saja hal tersebut ikut merangsang terciptanya budaya menulis di Indonesia.

5. *Sastracyber* Merupakan Ruang Terbuka Pembelajaran Sastra Independen

Pada dasarnya, *sastracyber* bukan semata-mata memindahkan tulisan sastra di koran atau majalah ke media *cyber*. Dunia *cyber* memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh media lain seperti bunyi atau gerak. Kelebihan-kelebihan itu yang kemudian harus dipertajam untuk membedakan sastra *cyber* dengan sastra lainnya.

Eksperimen bentuk penulisan sastra di dunia *cyber* pernah dilakukan oleh Eka di blog pribadinya www.ekakurniawan.com. Dengan menggunakan program khusus Eka membuat puisi Chairil Anwar berubah bentuk setiap kali hurufnya diklik. "Tentu saja bentuk tersebut tidak dapat dipindahkan ke majalah atau buku." Eka menuturkan, salah satu kelebihan sastra *cyber* adalah memangkas jarak antara penulis dan pembaca. Di media cetak sebuah karya harus melewati tahapan panjang seperti editor dan penerbit, maka pada media *cyber* karya dapat langsung menyapa pembacanya. Hubungan interaktif seperti ini yang kemudian membuat sastra *cyber* terasa lebih "hidup" dibanding sastra koran atau majalah. Bila untuk sastra cetak seorang penulis harus menunggu dalam hitungan bulan atau minggu supaya karyanya mendapat respons, pada sastra *cyber* penulis hanya perlu menunggu dalam hitungan detik.

Penyair sekaligus penggiat sastra *cyber* Saut Situmorang mengatakan, dialog interaktif merupakan sesuatu yang positif bagi perkembangan sastra Indonesia. Masukan-masukan yang didapat dari dialog tersebut dapat menjadi cikal bakal lahirnya bentuk baru. "Dari sanalah sastra *cyber* dapat memperkaya khazanah sastra tanah air," Selain melahirkan variasi baru, dialog interaktif sekaligus menjadi filter untuk menyaring kualitas tulisan. Harus diakui kemudahan yang diberikan oleh media *cyber* menghasilkan banyak karya dengan berbagai tingkat kualitas dari yang pantas diacungi jempol hingga yang hanya berupa "sampah".

Medy Loekito mengatakan, bila pada media cetak sebuah karya disaring oleh seorang redaktur, pada dunia *cyber* pembaca dari berbagai pelosok dunia akan menjadi redaktur yang menilai kualitas sebuah karya. "Redaktur di dunia *cyber* terkadang lebih kejam dibanding dengan redaktur di media massa. Mereka tidak segan-segan melontarkan cacian apabila karya tersebut dianggap tidak berkualitas," kata penulis antologi puisi Jakarta, Senja Hari ini. Lebih lanjut Medy menuturkan, seperti di media lain dalam dunia *cyber* juga terdapat seleksi alam, yaitu hanya karya berkualitas yang dapat bertahan, sementara sisanya akan terbuang begitu saja. "Persaingan di dunia *cyber* itu tidak mudah karena setiap saat orang bisa memuji maupun memaki. Sehingga tetap saja hanya orang-orang memiliki kualitas yang bisa eksis," tutur perempuan yang pernah meluncurkan antologi puisi digital, *Cyberpuitika*. Secara logika maupun estetika sastra *cyber* memang berbeda dengan sastra di media lain. Misalnya di media cetak sebuah karya dinilai terlebih dulu baru sampai ke pembaca, sementara pada media *cyber* karya sampai dulu ke pembaca baru kemudian dinilai.

Logika dalam dunia *cyber* menciptakan keleluasaan lebih bagi para pembaca. Jika di media cetak selera pembaca ditentukan oleh redaktur (karena redaktur yang memutuskan karya apa yang dimuat minggu ini), pada media *cyber* pembaca bebas menentukan seleranya. "Di dunia *cyber* pembaca benar-benar memiliki kekuatan mutlak untuk memilih dan menilai," kata Eka.

Tidak hanya kebebasan atau kesetaraan, dunia *cyber* juga menawarkan kelebihan berupa jangkauan yang sangat luas sehingga dapat ikut membantu memperkenalkan sastra Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Jika melalui koran, sebuah karya hanya bisa diakses sampai negara tetangga atau negara yang terdapat kedutaan Indonesia, maka untuk media *cyber* jarak bukan sebuah masalah.

Lebih jauh maraknya tulisan sastra di internet juga memberikan dampak positif bagi otonomi konten dan mengurangi ketergantungan terhadap konten berbahasa asing. "Ini merupakan sesuatu yang penting mengingat rata-rata tips atau *review* di dunia *cyber* masih menggunakan bahasa asing."

Sementara itu Saut melihat bahwa kehadiran *sastracyber* bukan untuk membunuh sastra cetak, tetapi memberikan ruang yang lebih luas dan bebas untuk berekspres. "Dunia *cyber* menciptakan wadah dan bentuk

baru.” Keterbatasan ruang untuk menggelontorkan ekspresi di media cetak memang menjadi fenomena tersendiri. Untuk koran misalnya, setiap minggu hanya ada satu cerpen dan beberapa puisi yang dapat dimuat. Tentu saja untuk dapat dimuat dan diapresiasi seorang penulis harus menunggu dalam waktu lama. Belum lagi hambatan senioritas, di mana penulis yang sudah terkenal akan memiliki kesempatan lebih besar untuk dimuat dibandingkan penulis baru. “Bisa saja lantaran saking banyaknya karya yang masuk para redaktur tidak lagi menyeleksi karya berdasarkan kualitas, tetapi berdasarkan nama besar,” ujar Saut.

Eka juga tidak sepakat bila maraknya sastra di dunia *cyber* hanya dipandang sebagai euphoria sesaat. Ia yakin bahwa teknologi *cyber* akan terus berkembang dan melahirkan bentuk-bentuk baru. “Antara lain jurnalisme warga yang bertutur mengenai cerita sehari-hari, tulisan seperti ini mungkin tidak tertampung di media cetak seperti koran atau majalah,” kata Eka.

6. Facebook Sebagai Media Kreatif Mencipta Sastra

Berbicara tentang sastra Indonesia mutakhir, sungguh tak lagi mudah. Kita telah menemukan sejumlah karya sastra multimedia, yang lahir dari hati dan pikiran para blogger dan kini merebak liar fenomena facebook. Sejak munculnya situs sastra www.sastracyber.net beberapa tahun lalu, aliran dan gerak kreativitas kesusastraan di jejaring maya ini terus menderas. Dan secara objektif, para *blogger* dan *facebooker* itupun sudah banyak lahir jadi penulis di koran-koran. Inilah sastra kontemporer kita paling objektif. Banyak karya yang bertaburan di ranah maya itu terkadang justru mengalahkan kualitas karya-karya yang muncul di koran.

Terlepas dari polemik tentang kualitas, fenomena facebook dalam perjalanan sastra Indonesia kontemporer menjadi penting diperbincangkan. Paling tidak, kehadiran facebook terbukti telah mampu memicu gairah dan tradisi **menulis** di kalangan pengguna. Bahkan telah banyak dari mereka mulai tampil dan berkompetisi di berbagai media massa baik lokal maupun nasional.

Persoalan kualitas pun akhirnya dipermasalahkan juga. Namun, persoalan ini hanyalah seleksi alam yang akan berbicara. Pengunjung sastra *cyber*, adalah pengunjung yang cerdas dan kritis. Mereka dapat membedakan teks sastra yang berkualitas dan yang tidak. Teks sastra *cyber* yang kurang memperhatikan mutu, pelan tapi pasti akan ditinggalkan oleh pengunjungnya. Teks sastra yang selama ini muncul secara online tetap dapat menunjukkan penjelajahan rasio akal budi dan nurani dalam totalitas kepengarangan.

Kini, agaknya dikotomi sastra koran versus sastra *cyber* harus mulai dikikis. Zaman sudah jauh bergeser, dari dunia sebelum literasi menuju dunia postliterasi. Produk postliterasi semacam internet sudah saatnya dimanfaatkan dengan baik oleh calon-calon pengarang. Sebuah kemustahilan apabila ingin menjadi pengarang terkenal hanya mengandalkan media cetak tanpa sedikitpun mau melirik media internet yang demikian jauh mampu menembus batasan dimensi ruang dan waktu.

Dan menariknya, facebook juga mampu merangsang gairah penerbitan buku-buku sastra meskipun masih terbatas dilakukan sejumlah komunitas. Salah satu buku karya para *facebooker* yang saat ini ramai dibicarakan di jejaring maya adalah Merah yang Meremah. Buku ini merupakan kumpulan puisi 10 Penyair Perempuan di Facebook yaitu Dewi Maharani, Faradina Izdihary, Helga Worotitjan, Kwek Li Na, Nona Muchtar, Pratiwi Setyaningrum, Shinta Miranda, Susy Ayu, Tina K dan Weni Suryandari. Perlu diketahui, 10 perempuan ini berasal dari berbagai tempat di tanah air, bahkan ada yang berasal dari Taiwan. Hasilnya sungguh mengejutkan, sebab buku ini mendapat tanggapan serius dari sejumlah sastrawan Indonesia. Leonowens SP, misalnya, menyebutkan bahwa puisi-puisi dalam buku itu menyentuh, imajinatif, sarat makna, dan cerdas.

Medy Loekito, penyair Indonesia yang kerap menulis buku, mengatakan bahwa hadirnya buku itu mengejutkan. “Sungguh mengejutkan membaca perkembangan puisi penyair wanita Indonesia yang ditampilkan lewat media *cyber*. Tampak dengan jelas betapa kebebasan yang disediakan oleh media *cyber* ini terutama Facebook betul-betul tidak tersia-siakan. Dan kemampuan penyair wanita Indonesia “menjinakkan” media *cyber* ini jelas berperan penting bagi perkembangan sastra Indonesia.

Selain penerbitan buku, berbagai komunitas sastra juga bermunculan di facebook. Komunitas Anak Sastra, misalnya, hadir di facebook sebagai penggiat sastra dan linguistik. “Kami menyadari peranan bahasa dan sastra begitu besar dalam menunjang Indonesia yang mampu melawan budaya Globalisasi. Majalah Bahasaku Jayalah Sastraku,” begitu pengelola menuliskan tagline-nya.

Akun lain adalah bernama Komunitas Mata Aksara, sebagaimana tercantum di bilik infornya, hadir untuk mengambil peran sebagai wadah telaah sastra, penerbitan dan workshop penulisan. Lebih jauh, komunitas ini juga memfokuskan komitmennya terhadap telisik sastra dan penulisan populer, kajian budaya (*cultural studies*), kajian spiritual, kajian sosial, dan kajian pendidikan. Di jejaring ini, tercatat sebagai dewan redaksi Handoko F Zainsam, Khrisna Pabichara, Salahudin Gz, Yayan R. Triyansyah. Beberapa nama ini sudah mulai muncul dalam intensitas terbatas di sejumlah media.

7. Penutup

Kehadiran *sastracyber* memang telah menyuguhkan sistem sastra yang unik. Sedikit banyak, melalui *sastracyber* para penulis telah membangun sebuah ekologi sastra terbaru. Dari sini pula, para penulis mencoba membuat situs yang monumental. Oleh karena itu, melalui forum maya tersebut, para pemerhati sastra dunia

dapat saling tegur sapa. Setidaknya akan tahu bahwa nama Ahmadun Y. Herfanda, Sutardji Chalzoum Bachri, dan Danarto—karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa lain di dunia. Dengan demikian, mereka semakin terkenal di dunia. Mereka telah *go internasional*.

Dengan kata lain, *sastracyber* telah merobek sekat-sekat Negara dalam bersastra. Persoalan waktu, tempat dan kesempatan menjadi semakin terpampang. Gerakan-gerakan sastra pedalaman, sastra marginal, dan sastra eksi dapat menghirup nafas segar. Mereka tak harus pasrah dengan paham sentralistik sastra, yang selalu mendewakan pulsi lebih hebat, melainkan berubah menjadi decentering, dan hak-hak hidup sastra etnis puu akan terwadahi. Jika demikian, subangan *sastracyber* memang boleh diacungi jempol.

Sastracyber ternyata mampu membebaskan imajinasi penulis untuk menciptakan eksperimen-eksperimen sesuka hati. Di media ini, tak ada “penjara” kreatifitas, seperti halnya sastra Koran dan buku yang erlalu kaku. Akibatnya, cipta sastra semakin liar dan menyusup ke sebuah pengembaraan panjang. Hal semacam ini telah di lakukan Afrizal Malna (Faruk, 2001 :246)

Keuntungan lain yang bisa dipetik atas kehadiran *sastracyber* yaitu (1) dapat melakukan kontak personal sehingga diantara penulis semakin memahami keluh kesah penulis lain. Masalah kreativitas, alamat penulis lain, cara mengirimkan karya kemana saja dan seterusnya dapat digal dalam dunia *cyber*. Ini berarti hubungan antarpenulis semakin akrab dan pragamtis. (2) para pemerhati *sastracyber* dapat dengan mudah engetahui apresiasi di antara mereka. Bahasa yang digunakan juga semakin cair, enak, dan gaul. Bahasa tidak harus formal, diatur harus ini itu seperti halnya membuat skripsi saja. Penulia bebas mengumbar keinginan, menyederhanakan atau mengulur bahasa. Karena bahasanya sangat komunikatif, makna pun segera dapat ditangkap.

Daftar Pustaka

- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Medpress.
- Hawe Pos. *Sastra Cyber dan Matinya Sastra Koran*. Dikutip dari Hawe Pos Edisi Cultural Studies 21/Maret/VI/2007
- Harian Sumut Pos. *Facebook dan Sastra Kita*, dikutip dari <http://www.hariansumutpos.com/2010/01/facebook-dan-sastra-kita.html>
- H.T, Faruk. 2001. *Beyond Imagination: Sastra Mutakhir dan Ideologi*. Yogyakarta: Gama Media Offset.
- Sumardjo, Jakob. 1995. *Sastra dan Massa*. Bandung: Penerbit ITB.
- Windy. 2010. *Dilema Sastra Cyber*. Dikutip dari <http://www.situseni.com>.

GAYA BAHASA DALAM CERITA RAKYAT TOLAKI: UPAYA MENGGALI POTENSI LOKAL SEBAGAI PEMERKAYA BUDAYA BANGSA

Herianah
(Balai Bahasa Ujung Pandang)

1. Pendahuluan

Membicarakan kehidupan sastra secara keseluruhan tidak terlepas dari persoalan kesastraan daerah. Sastra daerah, khususnya sastra lisan, merupakan warisan budaya daerah turun temurun dan mempunyai nilai-nilai luhur yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan dalam hubungan dengan usaha pembinaan dan penciptaan sastra.

Di wilayah Kepulauan Nusantara terdapat ratusan bahasa daerah yang hidup berdampingan dengan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Salah satu di antaranya adalah bahasa Tolaki yang terdapat di Sulawesi Tenggara. Selain bahasa Tolaki di wilayah tersebut terdapat pula bahasa daerah lain antara lain bahasa Binongko, bahasa Mawasangka, dan bahasa Ciacia (Mulya, dkk., 2004:1). Dalam makalah ini dikhususkan pada pemakaian bahasa Tolaki.

Usaha mengungkapkan sastra daerah, khususnya sastra lisan Tolaki bukan berarti menampilkan sifat kedaerahan, melainkan penelusuran terhadap unsur kebudayaan daerah yang perlu dilaksanakan karena bahasa dan sastra daerah merupakan sumber yang tak pernah kering bagi kesempurnaan keutuhan budaya nasional kita. Sastra lisan merupakan kekayaan budaya, khususnya kekayaan sastra, dan sebagai modal apresiasi sastra sebab sastra lisan telah membimbing anggota masyarakat ke arah apresiasi dan pemahaman gagasan berdasarkan praktik yang telah menjadi tradisi selama berabad-abad. Sastra lisan merupakan dasar komunikasi antara pencipta dan masyarakat dalam arti bahwa karya atau ciptaan yang berdasarkan kepada sastra lisan akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat (Rusyana dalam Sande, dkk., 1986:1).

Penelitian terhadap sastra lisan Tolaki memberikan suatu gambaran atau pencerminan kepribadian masyarakat Tolaki dan alam sekitarnya sehingga hasil-hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti terhadap pengembangan sastra, khususnya sastra di Indonesia.

Bahasa Tolaki ini mempunyai jumlah penutur yang begitu banyak di Sulawesi Tenggara, penuturnya sekitar 35%--50%. Menurut catatan monografi, daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terletak antara 3°-6° lintang selatan dan antara 120° 45' - 124° 06' bujur timur dan luas daerah tersebut berkisar 149.740 km.

Ditinjau dari segi lapisan sosial pemakainya, bahasa Tolaki dibedakan atas tiga jenis yakni, *Pulura Anakia* (bahasa golongan bangsawan), *Tulura Lolo* (bahasa golongan menengah), dan *Tulura Ata* (bahasa golongan bawah) (Mukhtar, 2010)

Bahasa golongan bangsawan adalah bahasa yang dipakai dalam berkomunikasi antarsesama bangsawan. Bahasa bangsawan penuh dengan aturan sopan santun. Bahasa ini disebut juga bahasa *Mombokulai* (melebihkan, meninggikan), bahasa *Mombe 'Owose* (membesarkan, bahasa Matabea (memohon), dan bahasa *Mombo Na'ako* (menghargai).

Bahasa golongan menengah adalah bahasa yang dipakai di kalangan masyarakat umum. Meskipun berbeda namun tidak ada perbedaan derajat antara pembicara dan pendengar.

Bahasa golongan bawah adalah bahasa yang dipakai dalam kalangan budak. Bahasa itu disebut juga bahasa *Dalo Laggai* (bahasa orang-orang bodoh), maksudnya bahasa yang kurang mengikuti aturan bahasa umum agar mudah dipahami orang pendengarnya. Bahasa ini tampak dalam wujud *Tulura Bendelaki Tulura Magamba* (bahasa yang menunjukkan kesombongan), dan dalam wujud *Tulura Te'Oha-oha* (bahasa yang paling kasar kedengarannya).

Orang Tolaki juga mengenal adanya bahasa yang disebut *Tulura Ndonomotuo* (bahasa orang-orang tua), *Tulura Mbandita* atau *Tulura Andeguru* (bahasa ulama), *Tulura Ndottea* atau *Mbabitara* (bahasa upacara adat), dan *Tulura Mbu'akoi* (bahasa dukun).

Bahasa orang-orang tua adalah bahasa yang dipakai orang-orang tua dalam memberikan nasihat, petuah, ajaran-ajaran leluhur bagi hidup dan kehidupan, terutama kepada generasi muda. Bahasa ulama adalah bahasa seorang ulama dalam berbicara mengenai ilmu dan pengetahuan tentang dunia hakiki, dunia metafisika, dunia gaib, dan dunia akhirat. Bahasa upacara adat adalah bahasa yang dipakai juru bicara dalam urusan adat perkawinan dan urusan peradilan. Bahasa dukun adalah bahasa yang dipergunakan pada upacara-upacara yang bersifat ritual maupun dalam saat-saat membicarakan mengenai makhluk halus dan dunia gaib. Bahasa dukun banyak mengandung pernyataan menyembah, memuja, memuji, dan minta perlindungan terhadap makhluk halus, roh nenek moyang, dewa, dan Tuhan. Bahasa dukun ini disebut juga bahasa *Kulura Mesomba* (bahasa menyembah), dan *Tulura Mongoni-ngoni* (bahasa minta berkah).

Sastra lisan Tolaki penyebarannya secara lisan dan hanya berdasarkan atas daya ingat penuturnya sehingga tidak mustahil sangat mudah mengalami perubahan dan menyimpang dari bentuknya yang asli. Sehubungan dengan hal itu jelaslah bahwa penelitian terhadap sastra lisan Tolaki sangatlah penting.

Dalam sastra lisan Tolaki dapat dikaji dari segi kebahasaan antara lain dengan melihat bagaimana penggunaan gaya bahasa dalam sastra lisan ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa dalam sastra lisan Tolaki. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat luas khususnya penutur bahasa Tolaki tentang gaya bahasa dalam sastra Tolaki.

2. Jenis-Jenis Gaya Bahasa

Cara menyampaikan pikiran atau perasaan ataupun maksud-maksud lain menimbulkan gaya bahasa. Gaya bahasa ialah susunan perkataan yang terjadi karena perasaan yang timbul atau hidup dalam hati penulis, yang menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam hati pembaca. Gaya bahasa itu menghidupkan kalimat dan memberi gerak pada kalimat. Gaya bahasa itu untuk menimbulkan reaksi tertentu dan untuk menimbulkan tanggapan pikiran kepada pembaca.

Gaya bahasa merupakan cara penggunaan bahasa secara khusus untuk mendapatkan efek tertentu. Dalam karya sastra efek ini adalah efek estetis yang turut menyebabkan karya sastra bernilai seni. Nilai seni karya sastra tidak semata-mata disebabkan oleh gaya bahasa saja, juga disebabkan oleh gaya bahasa bercerita ataupun penyusunan alurnya. Akan tetapi, gaya bahasa sangat besar sumbangannya kepada pencapaian nilai seni karya sastra.

Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa secara khusus untuk mendapatkan nilai seni. Hal ini seperti dikemukakan bahwa gaya bahasa adalah cara yang khas dipakai seseorang untuk mengungkapkan diri (gaya pribadi). Selanjutnya dikatakan bahwa gaya bahasa itu susunan perkataan yang terjadi karena perasaan dalam hati pengarang yang dengan sengaja atau tidak, menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam hati pembaca. Selanjutnya, dikatakan pula bahwa gaya bahasa itu selalu subjektif dan tidak akan objektif.

Gaya bahasa ini adalah cara ekspresi kebahasaan dalam prosa ataupun puisi. Gaya bahasa itu adalah bagaimana seorang penulis berkata mengenai apa pun yang dikatakannya. Selanjutnya, Kridalaksana (1982) menjelaskan bahwa gaya bahasa adalah (1) pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau menulis, (2) pemakaian ragam bahasa tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, dan (3) gaya bahasa itu merupakan keseluruhan ciri-ciri bahasa sekelompok penulis sastra.

Tarigan (1986), mengemukakan bahwa gaya bahasa adalah bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Selanjutnya, dikatakannya bahwa penggunaan gaya bahasa tertentu dapat mengubah atau menimbulkan konotasi tertentu. Gaya bahasa dan kosakata mempunyai hubungan erat, hubungan timbal balik. Kian kaya kosakata seseorang, kian beragam pulalah gaya bahasa yang dipakainya. Peningkatan pemakaian gaya bahasa jelas turut memperkaya kosakata pemakainya.

Dari uraian di atas, tampak ada bermacam-macam definisi mengenai pengertian gaya bahasa. Akan tetapi, pada umumnya definisi ini menunjukkan persamaan, yaitu gaya bahasa itu cara bertutur dengan cara tertentu untuk mendapatkan efek tertentu, yaitu efek estetis atau efek kepuhitan.

Gaya bahasa yang beraneka ragam itu menurut Tarigan (1986) secara umum dapat dibagi dalam empat kelompok yaitu: (1) gaya bahasa perbandingan, (2) gaya bahasa pertentangan, (3) gaya bahasa pertautan, dan (4) gaya bahasa perulangan.

Dalam cerita rakyat ini akan dilihat gaya bahasa apa saja yang terdapat di dalam Syair-syair tersebut.

3. Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2000) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan dalam peristilahannya.

Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman dan Akbar, 2000). Selanjutnya, diungkapkan bahwa ciri penelitian kualitatif adalah sumber data yang berupa latar alamiah (*natural setting*). Data dikumpulkan secara langsung dari lingkungan nyata dalam situasi sebagaimana adanya, yang dilakukan oleh subjek dalam kegiatan sehari-hari.

Penelitian ini dikatakan deskriptif kualitatif karena berusaha mendeskripsikan fakta berupa gaya bahasa yang digunakan dalam Struktur Sastra Lisan Tolaki. Metode yang digunakan adalah kepustakaan dengan teknik baca, simak, dan catat. Sumber data berasal dari buku Struktur Sastra Lisan Tolaki yang dihimpun oleh J.S. Sande, dkk. (1986).

4. Pembahasan

a. Gaya Bahasa Perbandingan

1) Simile

Perumpamaan atau simile adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dan dianggap sama. Perbandingan itu secara eksplisit dijelaskan dengan pemakaian kata pembandingan seperti, ibarat, dan semacamnya (Tarigan, 1986:10).

Contoh:

- (1) *Lai'ito moia To Ulu Ndara Hanga, anoto'eni inano, Ndina Iaro. "Nawono kuri wulelenggu hendehende kunde kumiki'lko, kenomeonasako, keno hende omanu laakoto nggombeotadari, kombetiolumu."* (To Tambarano Wuta, 1986:58)

"Pada suatu peristiwa ada seorang laki-laki yang gagah perkasa bernama To Ulu Ndara Hanga. Tibatiba ia dipanggil oleh ibunya yang bernama Ndina Iaro. "Hai anakku, saya perhatikan engkau selama ini ibarat seekor ayam betina, sudah mencari sarang untuk bertelur".

Pada cerita *To Tambarano Wuta* ini menceritakan tentang seorang pemuda yang mencari pasangan hidup. Dalam alur cerita ini aspek kebahasaan yang ditemukan adalah penggunaan gaya bahasa simile. Gaya bahasa simile ditandai dengan perbandingan dua hal yang berlainan. Dalam cerita ini pemuda *To Ulu Ndara Hanga* yang mencari jodohnya diibaratkan dengan seekor ayam betina yang mencari sarang untuk bertelur. Penggunaan gaya bahasa simile menambah unsur estetis dalam cerita ini.

2) Personifikasi

Personifikasi atau penginsanan ialah jenis majas yang melekatkan sifat-sifat insani kepada barang yang tidak bernyawa dan ide yang abstrak (Tarigan, 1986:17).

Contoh:

- (2) *Tara-tarambu'uno Oleo itono nggiro'o laa mona mona o ana, hendehendeika O wula. Mano ieto mbele-mbele'osunopo kioki noteko'ia toono rnga mbera kadadi saba nolalomokula'a pepearino mataoleo ronga pearino anaoleoko ana'akono oleo. Laa'ito ona mo'ia o wula anoposua akala keno tete'embeanopokokairo ana'akono oleo. Lakonoto ona o wula umulukee oleo aropekini. La'iroto mekini anote'eni o wulaa "I nowono-kuri oleo kaa'ito ana'akomu." Ari'akuto inaku kumaa iro ana'akonggu.* (Pepeli'ano Oloe'ano Owula, 1986:184).

(Pada awalnya matahari mempunyai anak, demikian pula bulan, manusia atau hewan tidak ada yang dapat hidup karena pancaran sinar matahari supaya matahari memakan anaknya. **Bulan mengajak matahari mencari-carian kutu.** Sementara mereka mencari-carian kutu, bulan berkata, "Hai matahari, kalau engkau setuju, makanlah anakmu". Semua anak saya sudah saya makan).

Pada contoh (2) terdapat cerita tentang asal mula peredaran matahari dan bulan. Pada cerita ini terdapat gaya bahasa personifikasi atau penginsanan pada bulan dan matahari. Pada cerita ini digambarkan matahari dan bulan bertingkah laku seperti manusia. Bulan dan matahari saling mencari kutu dan berbicara seperti halnya manusia. Dengan demikian cerita ini digolongkan ke dalam gaya bahasa personifikasi.

b. Gaya Bahasa Pertentangan

1) Hiperbola

Hiperbola adalah sejenis gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan jumlahnya, ukuran, atau sifatnya dengan maksud memberi penekanan pada suatu pernyataan atau situasi untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Gaya bahasa ini melibatkan kata-kata, frase, atau kalimat. (Tarigan, 1985:55).

Contoh:

- (3) *Pebungusakono lako I Mawaha Bubu telalo' itokaa i Mawaha Inea sumo'i maa imbee ari' anotokaa, ano'amba lakotu'u i ngpa to'oto nolaa banggano lakonokaa mbule-mbiha i Mewaha Inea. Kadukadu'ito nopebaho'ako iwoimata noru'ti sala. Sabutono laa nggo dunggu i laikano i lakonoto metobedowo anomate.* (Lakoano I Batulu Momeko-meko, 1996:151)

"Sepeninggalnya I Mawaha Bubu, datanglah I Mawaha Inea dan tinggal memberi kode, tetapi sia-sia karena tinggal bekasnya saja. Ia terus ke pelabuhan tempat perahunya, tetapi perahu sudah tidak ada lagi dan akhirnya I Mawaha Inea kembali. **Dalam perjalanan pulang, sepanjang jalan ia bermandikan air mata.** Sesaat akan tiba di rumah, ia menikam dirinya dan matilah ia.

Gaya bahasa hiperbola yang terdapat dalam cerita *Lakoano I Batulu Momeko-meko* 'Batulu Pergi Memancing'. Dalam cerita ini sikap berlebih-lebihan ditunjukkan oleh *I Mawaha Inea* yang merasa kecewa karena ditinggalkan oleh perahu yang ia tambatkan sendiri di pelabuhan. Dalam perjalanan pulang *I Mawaha Inea* merasa sedih dan menangis. Dalam cerita ini pengarang berusaha menghidupkan suasana sedih sehingga

digunakanlah gaya bahasa hiperbol. Gaya bahasa hiperbol diperlihatkan oleh kalimat "Dalam perjalanan pulang, sepanjang jalan ia bermandikan air mata". Karena kesedihan yang mendalam I Mawaha Inea menangis bermandikan air mata. Hal ini adalah hal yang berlebih-lebihan sehingga kalimat ini dimasukkan dalam gaya bahasa hiperbol.

2) Klimaks

Gaya bahasa klimaks diturunkan dari kalimat yang bersifat periodik. Klimaks adalah semacam gaya bahasa yang mengandung urutan-urutan pikiran yang setiap kali semakin meningkat kepentingannya dari gagasan-gagasan sebelumnya. (Keraf, 1985:124).

Contoh:

(4) *Laa'ito mo'ia Oheo anotepehawario no'onggo mopembaharo-ndowu. Ingoniakonokaa nggiro'o lakonoto lako mosalei, saa arino mosalei lakonoto tumuehi'i. Saa arino tumuehi'i lakonoto humunu'i. Saa arino humunu'i lakonoto umenggai'i, saa arino umenggai'i lakonoto walai'i. Saa arino mombopohakee otowu lakonoto alee sumaira'i pembahorano.* (Oheo, 1986:108).

"Pada suatu waktu Oheo berniat hendak membuka perkebunan tebu. Pada saat itu juga ia pergi merambah hutan. Hutan itu ia babat keseluruhannya. Untuk selanjutnya dibakarnya dan seterusnya dibersihkan secara keseluruhan. Secara berturut-turut dipagarinya, ditanaminya, dan selanjutnya ia menyanginya dan memeliharanya."

Pada cerita rakyat ini mengandung gaya bahasa klimaks. Hal ini ditandai dengan adanya kata yang mengandung tingkatan atau gradasi yang semakin tinggi kepentingannya. Tingkat gradasi yang dimaksud terdapat pada Oheo dalam membuka hutan dimulai dengan membakar, selanjutnya ia membersihkan hutan tersebut. Setelah itu Oheo memagari hutan, menanami dengan tanaman, dan selanjutnya ia menyangi dan memeliharanya. Adanya gradasi dalam cerita ini menunjukkan adanya penggunaan gaya bahasa klimaks.

c. Gaya Bahasa Pertautan

1) Eufemisme

Eufemisme ialah ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar dan dianggap merugikan atau yang tidak menyenangkan. Misalnya meninggal, tinja, tunakarya. Namun, eufemisme dapat juga dengan mudah melemahkan kekuatan diksi karangan (Tarigan, 1986:128). Dalam sastra Tolaki ditemukan pula gaya bahasa eufemisme sebagai berikut:

(5) *Aro'amba itooro lako sumomba I Mawaha Bubu, laa iropo nggo dunggu mengapa i ngapano Mekole i Aasakindahi, iepo anoto;arikee tano i Mawaha ineaki laa lako niwatu'akono. Lakonotokaa lau-lau nggo mesumbele dowo, ano'amba i Batulu tekono rumako'i anoto'eninggee, "O hapo pera keu'o aloisako`kei-Mawaha Inea toono salako-lakono." Ano'amba inaku maa buna-buna ikambale wulaa laaa aku mona. I lakonoto i Mawaha Bubu mbule mehi tunggee i woi-matano anote'eni, "Maa nggoo hapoto itoono, karwatumbuhako'oto mano keulako mekasarai'aku akuikaa mbule-mbendua.* ((Lakoano I Batulu Momeko-meko, 1996:157)

"I Mawaha Bubu di dalam perjalanannya sesaat hampir tiba berlabuh di pelabuhan Mokole (raja) di seberang laut, barulah ia tahu bahwa bukan I Mawaha Inea yang ia ikuti. Lalu ia akan membunuh diri, tetapi Batulu serentak mememeluknya, seraya berkata, "Apakah yang engkau cintai terhadap I Mawaha Inea, seorang pemuda gelandangan, sedangkan saya jangankan harta lain, ikambele wulaa pun saya tak punyai". Kemudian I Mawaha Bubu menyapu air matanya seraya berkata. "Ya apa bole buat, saya akan turuti engkau. Akan tetapi, apabila engkau berlaku tidak senonoh kepadaku, maka saya akan kembali kepadanya.

Gaya bahasa eufemisme dalam cerita ini ditandai oleh penggunaan ungkapan yang lebih halus sebagai ungkapan yang kasar. Sikap merendah dalam cerita ini diperlihatkan oleh Batulu yang dengan rasa rendah hati mengatakan pada I Mawaha Bubu bahwa dirinya hanyalah seorang pemuda gelandangan yang tak mempunyai harta, bahkan *ikambele wula* saja tak ia miliki. Dengan adanya sikap merendah ini menunjukkan bahwa kalimat-kalimat dalam cerita ini dimasukkan pada gaya bahasa eufemisme.

2) Sinekdoke

Sinekdoke ialah majas yang menyebutkan nama bagian sebagai pengganti nama keseluruhannya atau sebaliknya (Moeliono, 1984:3).

Contoh:

(6) *Laa'ito mo'ia odonga ano lako mopaapamba iwoi. Laaito lako, ano leumune tumambeli owonggi laa mepotapa iwawo watu. Te'enio odonga, "Tanggakoto wodo wonggo numunuo elomu iwawo watu".* (Owonggi ronga Odonga, 1986:124).

“Tersebutlah suatu kisah antara siput dan rusa. Suatu ketika rusa berjalan-jalan ke tepi sungai. Di sana ia melihat seekor siput sementara merayap dengan lidahnya di atas sebuah batu”.

Pada contoh ini terdapat gaya bahasa pertautan jenis sinekdoke. Kalimat yang mengandung gaya bahasa ini terdapat pada kalimat “Seekor siput merayap dengan lidahnya di atas sebuah batu”. Pada cerita ini seekor siput sedang merayap tapi dengan lidah, dalam hal ini hanya lidah yang disebutkan atau yang ditonjolkan padahal seharusnya yang merayap seluruh anggota tubuh siput itu. Oleh karena itu kata siput dipakai sebagai pengganti kata seluruh anggota badan siput tersebut sehingga kalimat-kalimat dalam cerita ini dimasukkan pada gaya bahasa pertautan jenis sinekdoke.

d. Gaya bahasa Perulangan (Repetisi)

Perulangan atau repetisi adalah gaya bahasa yang mengandung perulangan bunyi, suku kata, kata atau frase, ataupun bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai (Tarigan, 1996:180)

1) Anadiplosis

Anadiplosis adalah sejenis gaya bahasa repetisi, di mana frase terakhir dari suatu klausa atau kalimat menjadi frase pertama dari klausa atau kalimat berikutnya (Tarigan, 1986:203)

Contoh:

- (7) *Sangia Mbu'u pe'anakee Sangia Mbendua, Sangia Mbendua pe'anakee Batara Langi, Batara Langi Pe'anakee Batara Guru, Batara Guru le'ito tuutudu i laawuta no'ului amano nggotudumeparenda i laawuta. I Wenggila Timo Arope'anakee Batara Lattu, Batara Lattu umale'i Iwe datu Sangga Sangia I Purihatu. (Saweringadi, 1996:43)*

“Sangia Mbu'u berputrakan Sangia Mbendua, Sangia Mbendua berputrakan Batara Langi; Batara Langi berputrakan Batara Guru, Batara Guru inilah yang diutus oleh ayahnya untuk memerintah di bumi. Wenggila Tino berputrakan Batara Lattu; Batara Lattu memperisitri Wedatu Sanggu, putri Sangia Purittahi (Sangia yang bersemayam /berkuasa di dasar laut).

Pada contoh (7) terdapat gaya bahasa perulangan atau repetisi jenis anadiplosis. Pada cerita ini terdapat perulangan kata pada nama tokoh cerita. Pada kalimat pertama tokoh *Sangia Mbendua* diulang sebanyak dua kali. Pada klausa pertama terdapat nama *Sangia Mbendua* yang ditulis pada akhir klausa, dan pada klausa selanjutnya *Sangia Mbendua* menjadi awal pada klausa berikutnya. Demikian pula tokoh *Batara Langi* diulang sebanyak dua kali. Pada klausa pertama terdapat kata *Batara Langi* yang ditulis pada akhir klausa, tetapi menjadi awal pada klausa berikutnya. Demikian pula dengan kata *Batara Guru* dan *Batara Lattu* diulang sebanyak dua kali. Perulangan kata juga terdapat pada kata *pe'anakee* ‘berputrakan’ yang diulang sebanyak empat kali. Perulangan ini sangat bermanfaat untuk memberikan kejelasan dan informasi tentang silsilah keluarga dalam cerita ini.

2) Tautotes

Tautotes adalah gaya bahasa perulangan atau repetisi atas sebuah kata berulang-ulang dalam sebuah konstruksi (Tarigan, 1986:190).

Contoh:

- (8) *Uhaakaeno Lelewuta ie'ito nggo sumusua mbaee.
Uhaakaeno Lelewonua ie'ito nggo tewali pande nggasu moowaolaika.
Uhaakaeno Lelengambo ie'ito nggo tewali mbusopu
Uhaakaeno Tina nggapa ie'ito nggo rapuno langgai mbuuakooi
Uhaakaeno Tina sabe ie'ito nggo rapuno mbuututu wulaa.
Uhaakaeno Tina wana ie'ito nggo rapuno pasomba. (Dalo-Dalo Mbinasabu, 1986:128)*

“Uhaakaeno Lelewuta putra yang sulung mempunyai rezeki di bidang pertanian dengan hasil yang melimpah.

Uhaakaeno Lelewonua putra kedua akan menjadi tukang kayu

Uhaakaeno Lelengamo putra yang ketiga akan menjadi tukang besi.

Uhaakaeno Putri Tinanggapa akan bersuamikan seorang dukun kampung.

Uhaakaeno Putri Tina Sabe akan bersuamikan nelayan

Uhaakaeno Putri Tina Wana akan bersuamikan tukang mas”.

Gaya bahasa Tautotes pada contoh (8) ditandai dengan adanya perulangan pada kata *uhaakaeno* (semacam mantra) dan kata *ie'ito nggo* yang diulang sebanyak tiga kali dan *ie'ito nggo rapuno* yang diulang sebanyak tiga kali. Penggunaan gaya bahasa tautotes ini sangat mendukung isi cerita karena data ini berupa ucapan-ucapan mantra yang diucapkan oleh seorang dukun. Kepergian Lelewuta ke seorang dukun karena permintaan Baginda Raja untuk mengetahui rezeki anak-anaknya.

5. Penutup

Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis (pemakai bahasa). Sebuah gaya bahasa yang baik mengandung unsur kejujuran, sopan santun, dan menarik.

Dalam sastra lisan Tolaki sarat dengan gaya bahasa yang menambah nilai estetis dalam alur cerita. Dalam pembahasan gaya bahasa yang diemukan dalam sastra lisan Tolaki sebagai berikut. Gaya bahasa perbandingan terdiri atas gaya bahasa: simile dalam cerita: *To Tambarano Wuta*; personifikasi dalam cerita: *Pepeliano Oleo ano Owula*. Gaya bahasa pertentangan terdiri atas gaya bahasa: hiperbola dalam cerita: *Lakoano I Batulu Momeko-meko*; klimaks dalam cerita: *Oheo*. Gaya bahasa pertautan terdiri atas gaya bahasa: eufimisme dalam cerita: *Lakoano I Batulu Momeko-meko*; sinekdoke dalam cerita: *Owongi rongga Donga*. Gaya bahasa repetisi terdiri atas gaya bahasa: anadiplosis dalam cerita *Saweringadi*; tautotes dalam cerita: *Dalo-Dalo Mbinasabu*.

Daftar Pustaka

- Keraf, Gorys. 1985. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Kridalaksana. Harimurti. 1982. *Kelas kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Moeliono, Anton M. 1984. *Diksi dan Pilihan Kata*. Jakarta: PPPGB.
- Moleong, Lexy J. 1997. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulya, Abdul Kadir dkk. 2004. *Sistem Sapaan Bahasa Tolaki*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Mukhtar, Jamal. 2010. "Mitos Molowu dan Saweringadi dalam Cerita Rakyat Sulawesi Tenggara: Kajian Antropolinguistik". Tesis tidak diterbitkan. PPs Unhas.
- Sande, J.S.dkk. 1986. *Struktur Sastra Lisan Tolaki*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud.
- Tarigan, Henry Guntur. 1986. *Pengajaran Gaya Bahasa*. Bandung: Angkasa.
- Usman, H. dan P. S. Akbar. 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Komisi D
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 20 Juli 2010, 14.30—16.00 wita
Judul Makalah	: Gaya Bahasa dalam Cerita Rakyat Tolaki: Upaya Menggali Potensi Lokal Sebagai Pemer kaya Budaya Bangsa
Penyaji/Pembicara	: Herianah, S.S, M.Pd.
Pemandu	: Ramlah, S.S, M.Hum.
Pencatat	: Lia Amaliah Muhlisi, S.T.
Jumlah Peserta	: 40 orang

TANYA JAWAB

La Ode Yusri S.Pd. (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)

Pertanyaan/Saran

Gaya bahasa sepertinya ada pada setiap cerita rakyat. Yang ingin saya tanyakan kepada ibu, apakah gaya bahasa itu terdapat pada setiap cerita rakyat Tolaki, dan berapa cerita rakyat yang ibu ambil sebagai sumber data.

Jawaban/Tanggapan

Pada dasarnya gaya bahasa merupakan cara penggunaan bahasa secara khusus untuk mendapatkan efek tertentu termasuk nilai seni. Gaya bahasa itu sendiri merupakan ekspresi penulis dalam mengungkapkan diri, yang menimbulkan suatu perasaan tertentu dalam hati pembaca. Dalam setiap cerita rakyat Tolaki menurut saya mengandung gaya bahasa, walaupun hanya dalam beberapa jenis saja, misalnya gaya bahasa perulangan saja, atau klimaks saja. Dalam makalah saya ini, cerita rakyat yang dijadikan sebagai sumber data ada delapan cerita yaitu *To Tambarano Wuta*, *Pepeliano Oleo ano Owula*, *Lakoano I Batulu Momeko-meko*, *Owongi ronga Donga*, *Saweringadi*, dan *Dalo-Dalo Mbinasabu*. Demikian penjelasan saja semoga dapat dimengerti.

Bambang Kaswanti Purwo (Univ. Atmajaya Jakarta)

Pertanyaan/ Saran

Coba tunjukkan gaya bahasa klimaks pada makalah anda. Bagian yang manakah yang menunjukkan adanya verba pada contoh kalimat tersebut yang menunjukkan adanya peningkatan gagasan?

Jawaban/Tanggapan

Gaya bahasa klimaks adalah gaya bahasa yang mengandung urutan-urutan pikiran yang setiap kali semakin meningkat kepentingannya dari gagasan-gagasan sebelumnya.

Pada makalah saya, gaya bahasa klimaks ditandai dengan adanya peningkatan gagasan yang ditandai dengan adanya verba aktif yaitu merambah hutan, memabat hutan secara keseluruhan, membakar hutan, membersihkan, memagari, menanami, menyangi dan memelihara hutan. Dengan adanya verba ini menunjukkan adanya peningkatan gagasan dari hal terkecil sampai terbesar. Demikian penjelasan saya pak, semoga dapat diterima dengan baik.

PERANAN SASTRA DALAM PEMERTAHANAN NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL SEBAGAI PEMERKUKUH IDENTITAS DAN KETAHANAN BANGSA DALAM ERA GLOBALISASI

Rosida Tiurma Manurung
(U.K. Maranatha Bandung)

1. Dampak Globalisasi terhadap Jati Diri Bangsa

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kekayaan nilai budaya yang beragam. Pada kenyataannya, arus globalisasi telah membawa dampak terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Globalisasi merupakan suatu fenomena yang berkembang cepat. Globalisasi membuat masyarakat bergerak terus dalam proses pengglobalan. Globalisasi sudah menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Hal tersebut terjadi karena adanya kemudahan mengakses komunikasi, informasi, dan teknologi negara-negara maju. Globalisasi telah menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang mesti dijawab dan dipecahkan. Akan tetapi, kita dapat memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan.

Globalisasi itu berlangsung di semua bidang seperti ideologi politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta sosial budaya. Dampak globalisasi di bidang sosial budaya sudah terasa. Kebudayaan modern dan global sudah merasuk ke dalam jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai budaya lokal seperti nilai-nilai yang menyangkut etika, estetika, moral, agama, sosial, dan cara pandang diri sudah mulai terkikis, memudar, bahkan boleh jadi sudah sulit terlacak.

Jati diri bangsa atau identitas bangsa bisa meluntur karena derasnya arus globalisasi. Globalisasi telah membawa dampak negatif terhadap keutuhan dan ketahanan bangsa. Bangsa ini sudah mulai berpaling dan berkiblat kepada budaya luar. Bagaimana kelokalan kita dapat dipertahankan dan tetap eksis jika kita sendiri tidak menerapkan dan menjiwai nilai-nilai budaya lokal. Jika nilai-nilai kelokalan telah hilang, bagaimana identitas bangsa dapat dipertahankan?

Dengan demikian, diperlukan suatu upaya untuk memperkuat nilai-nilai budaya lokal. Pemerkuhan budaya lokal sangat diperlukan untuk mengatasi ancaman, kendala, atau tantangan yang datang dari luar yang dapat mengancam kelangsungan hidup dan eksistensi produk budaya lokal. Upaya untuk mempertahankan dan memperkuat jati diri bangsa, salah satunya ialah melalui sastra. Sastra Indonesia banyak mengandung nilai-nilai budaya lokal. Warna lokal yang bersifat dan mengusung kedaerahan yang tentu saja mencerminkan keindonesiaan. Sastra Indonesia banyak mencerminkan suasana dan lokasi, falsafah, etnis, kekhasan, keunikan, atmosfer, keindahan, serta keberagaman Nusantara. Sastra lokal mengungkapkan kekayaan berbagai etnis dan menonjolkan khazanah kedaerahan yang tentu saja merupakan warna lokal yang termasuk identitas bangsa Indonesia.

2. Nilai-nilai Lokal dalam Sastra

2.1 Nilai Positif dalam Sastra

Sastra mampu mengukuhkan nilai-nilai lokal yang positif dalam pikiran dan perasaan bangsa Indonesia. Sastra mampu menjadi alat penapis atau penyaring pengaruh dari luar. Dengan sastra, kita bisa menjadi manusia yang kreatif, berwawasan, futuristik, dan berkualitas jika kita dapat menangkap nilai-nilai positif dalam sastra. Menurut Djojonegoro (1984: 425) sastra selain mampu memberikan nilai-nilai positif, juga dapat membantu mengembangkan sikap positif terhadap perkembangan ipteks yang tidak dapat dibendung itu.

Zoelton (Ed.) 91984: 79) mengatakan bahwa sastra, filsafat, dan agama dapat dijadikan sarana untuk menumbuhkan jiwa kemanusiaan yang halus, manusiawi, dan berbudaya. Adapun Santayana (1986: 4) mengatakan bahwa sastra dapat menjadi pegangan hidup. Jelaslah, sastra dapat membentuk karakter dan kepribadian baik secara personal maupun secara sosial. Djojonegoro (1984: 426) mengungkapkan bahwa sastra merupakan bagian yang sangat penting dan memegang peranan dalam peradaban bangsa apa pun di mana pun di dunia ini. Dapat ditegaskan bahwa sastra selain dapat dijadikan alat untuk melestarikan nilai-nilai peradaban, juga sastra dapat dijadikan alat untuk menciptakan masyarakat modern yang memiliki rasa kebangsaan. Menurut Darma (1995: 105) sastra yang baik senantiasa menyuguhkan ajakan kepada pembaca untuk menjunjung tinggi moral bahkan sastra dapat dijadikan ajang pendidikan.

Membaca karya sastra, kita dimungkinkan untuk mendapatkan masukan, dorongan, dan gugahan tentang manusia, masyarakat, dan kehidupan. Dengan membaca karya sastra, kita memperoleh banyak pengalaman, seperti pengalaman sosial, ideologi, spiritual, intelektual, atau pengalaman tentang alam semesta.

2.2 Citra Keindonesiaan dan Lokalitas dalam Sastra

Sastra merupakan karya yang dapat dijadikan alat untuk mempertahankan jati diri atau identitas bangsa karena dalam sastra Indonesia terkandung citra keindonesiaan. Citra tersebut dapat dikonstruksi dan dibangun

keahlian yang khusus. Guru pun harus merekonstruksi pola pikir mereka dalam perspektif multikultural. Buku-buku sastra merupakan sumber pembelajaran sastra, tetapi yang tersimpan di perpustakaan sekolah masih sedikit dan terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah dan masyarakat secara bahu-membahu diimbau untuk mengadakan program penggalangan dana untuk menambah koleksi buku sastra di perpustakaan-perpustakaan sekolah baik di kota besar maupun sekolah terpencil.

Masyarakat harus diberi penyuluhan dan pencerahan bahwa perbedaan itu indah, harus dihargai, dan diterima. Masyarakat Indonesia harus diajari dan diberi contoh mengenai sikap toleransi, setia kawan, tidak memaksakan kehendak, tidak main hakim sendiri, serta tidak memikirkan diri sendiri dan kelompoknya.

Kementerian Informasi dan Komunikasi harus secara tegas menyaring tayangan-tayangan yang kurang mendidik, main hakim sendiri, sarat dengan tindakan kekerasan, memojokkan salah satu etnis, dan pornografi di televisi. Di samping itu, secara tegas situs-situs porno harus diblokir dan ditutup. Lewat tayangan televisi dan berita di media cetak, dapat disisipi dengan ajaran tentang toleransi, pengendalian diri, moralitas, kesantunan, dan nasionalisme dalam masyarakat.

Sastrawan diimbau untuk terus melahirkan karya-karya sastra yang mencerminkan keindonesiaan dan lokalitas yang kental. Sastrawan sudah seharusnya mengangkat tema-tema yang menyoroti khazanah kekayaan budaya, kearifan lokal, moralitas, budi pekerti, agama, perbedaan kelas sosial, perbedaan etnis dan budaya, perbedaan gender, dan kecintaan terhadap bangsa. Sastrawan secara sadar atau tidak telah menjadi pemeran utama dalam upaya memperkuat identitas dan ketahanan bangsa.

4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, hal-hal yang ditemukan adalah sebagai berikut.

- a. Sastra mampu mengukuhkan nilai-nilai lokal yang positif dalam pikiran dan perasaan bangsa Indonesia.
- b. Sastra mampu menjadi alat penapis atau penyaring pengaruh dari luar.
- c. Sastra merupakan bagian yang sangat penting dan memegang peranan dalam peradaban bangsa apa pun di mana pun di dunia ini.
- d. Anak-anak sudah harus disugahi bacaan sastra yang mengandung plot dan karakter yang positif, menampilkan keragaman nilai budaya, dan disertai dengan ilustrasi yang menarik dan menawan tentang khazanah budaya lokal yang bercirikan Indonesia.
- e. Guru harus jeli memilih bahan ajar yang sarat dengan nilai-nilai tradisi dan budaya lokal.
- f. Depdiknas harus berani memasukkan pembelajaran sastra multikultural dengan warna lokal dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, atau bahkan pendidikan tinggi.
- g. Masyarakat harus diberi penyuluhan dan pencerahan bahwa perbedaan itu indah, harus dihargai, dan diterima.
- h. Lewat tayangan televisi dan berita di media cetak, dapat disisipi dengan ajaran tentang toleransi, pengendalian diri, moralitas, kesantunan, dan nasionalisme dalam masyarakat.
- i. Sastrawan diimbau untuk terus melahirkan karya-karya sastra yang mencerminkan keindonesiaan dan lokalitas yang kental.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan. 1999. *Telaah Bahasa dan Sastra*. Depdiknas: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Cultural Studies. 2000. *Teori Sastra Pengantar Komprehensif*. Jakarta: Jalasutra Egleton Terry.
- Depdikbud. 2004. *Kamus Besar Bahasa Baku*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rudy, Rita Inderawati. 2008. "Paradigma Baru Pengajaran Apresiasi Sastra Indonesia" (Makalah). Jakarta: Pusat Bahasa.
- Susilastri Dian. 2009. Sastra Indonesia Berwarna "Lokal": *Think Globally and Act Locally*. Balai Bahasa Surabaya: Pelantra.

MODALITAS DALAM UNGKAPAN TRADISIONAL MUNA: ANALISIS WACANA KRITIS

Ramlah Mappau
(Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)

1. Pendahuluan

Di dalam berkomunikasi manusia memerlukan sarana untuk mengungkapkan ide, gagasan, isi pikiran, maksud, dan realitas. Sarana yang dapat mewujudkan kebutuhan manusia itu adalah bahasa. Bahasa adalah suatu sistem yang sistematis. Oleh karena itu, bahasa dapat dipelajari dan dapat diperoleh secara alamiah. Mempelajari sistem suatu bahasa berarti kita dapat mengenal sistem budaya masyarakatnya. Bahasa merupakan alat untuk mengonstruksi identitas individu ataupun masyarakatnya. Pemilihan bahasa tertentu dari golongan masyarakat tertentu atau antara satu wilayah atau daerah dengan daerah memiliki hak untuk menggunakan bahasa (modalitas), khususnya dalam menyampaikan dan memberikan wejangan atau petuah. Ada individu dan kelompok masyarakat yang tidak menggunakan pilihan modalitas dalam menyampaikan satu konsep yang sama sekalipun itu masih dalam satu budaya, tetapi diungkapkan dalam bahasa yang berbeda.

Kegiatan berbahasa sebagai alat representasi identitas masyarakat yang merupakan praktik budaya yang berfungsi penting untuk memediasi aspek nilai dan materi dari keberadaan manusia. Halliday mengemukakan bahwa salah satu fungsi bahasa adalah untuk memelihara hubungan antarsesama manusia dengan menyediakan wahana ungkap terhadap status, sikap sosial, individual, taksiran, dan penilaian. Ini memasukkan partisipan ke dalam interaksi bahasa. Selain itu, pandangan Halliday memandang bahasa dapat menentukan peran dari situasi yang memungkinkan terjadinya peran-peran komunikasi satu sama lain. Setiap bahasa memadukan pilihan demi pilihan. Pembicaranya dapat mengubah peran komunikasi sendiri, membuat pernyataan-pertanyaan, jawaban, seruan, membuat pernyataan mengajukan pertanyaan, dan memberi perintah.

Pemakaian modalitas bukanlah sesuatu yang tak bertujuan. Ia dihadirkan untuk menyatakan sikap pembicara terhadap lawan tuturnya. Fairclough (2003) menyatakan bahwa identitas sebagian orang ditentukan oleh cara kita menggunakan bahasa yang dapat dideteksi lewat sistem modalitas dan evaluasi. Hal ini terkait dengan bagaimana penutur mengomitminkan diri terhadap apa yang dianggap benar dan perlu (modalitas) dan apa yang dikehendaki dan tidak dikehendaki juga baik buruk (evaluasi). Modalitas tidak hanya terkait dengan pemakaian bahasa yang sesuai dengan kaidah, tetapi modalitas berkaitan pula dengan komitmen seseorang ketika merealisasikan *speech function*. Halliday menyatakan bahwa fungsi-fungsi bahasa dapat diungkapkan secara gramatikal dengan sistem *mood (modalitas)* yang di dalamnya pilihan pokoknya adalah deklaratif, interogatif, imperatif dan sebagainya.

Ungkapan tradisional yang merupakan salah satu bagian dari folklor masih hidup dalam sejarah peradaban masyarakat suku Muna saat ini, meskipun diungkapkan dalam bahasa yang berbeda. Selain itu, genre tersebut masih dapat ditemukan dalam naskah-naskah sejarah dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh pemerhati budaya dan bahasa. Genre yang dituturkan dalam bahasa daerah Muna ini dapat menunjukkan relasi sosial, ide atau gagasan, pandangan, nilai-nilai budaya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran untuk dijadikan pedoman dalam menapaki hidup yang lebih baik, bersahaja, beretika, dan bermartabat. Hal ini dapat memberikan gambaran realitas masyarakat pendukungnya pada masa lampau dan tidak mustahil terefleksi pada masa kini

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian tentang modalitas diharapkan dapat menjawab pertanyaan modalitas apa saja digunakan dalam ungkapan tradisional, dan bagaimana modalitas digunakan dalam Ungkapan Tradisional Muna dalam menyajikan pandangan atau ideologi dan kekuasaan masyarakat Muna. Paradigma yang digunakan dalam penelitian awal ini adalah analisis wacana kritis.

2. Kerangka konsep

Ungkapan tradisional adalah kalimat pendek yang disarikan dari pengalaman yang panjang. Ungkapan tradisional bukanlah satu kata, tetapi sekelompok kata, kalimat, yang membentuk satu kesatuan wacana yang bermakna yang tidak dapat dipisahkan dari konteks tuturannya (Carventes dalam Danandjaja, 1984: 13). Kartomiharjo (dalam Purwo, 2000) menjelaskan bahwa wacana melibatkan kondisi sosial yang secara spesifik dapat diterangkan sebagai kondisi sosial tentang produksi dan kondisi sosial dalam menginterpretasikan teks. Dengan demikian, ungkapan dipandang sebagai wacana dan sebagai praktik sosial. Hal ini dimungkinkan seseorang perlu melihatnya sebagai analisis tentang hubungan antara teks, proses produksi, dan kondisi sosial, baik kondisi yang erat hubungannya dengan konteks sosial maupun kondisi yang lebih luas yang berhubungan dengan kondisi lembaga dan struktur sosial.

Fairclough memandang wacana dalam tiga dimensi yang terintegrasi dalam satu kesatuan, yaitu analisis terhadap teks, proses produksi, konsumsi, dan distribusi teks, dan analisis sosiokultural terhadap peristiwa

Sikap yang tampak dalam kutipan (1) diperuntukkan khusus pada anak perempuan. Anak perempuan dalam pandangan masyarakat tradisional Muna seharusnya memiliki sikap yang tidak boleh menunjukkan sikap yang tidak terpuji. Keharusan itu ditunjukkan dengan penggunaan modalitas *beano* (harus). Penggunaan modalitas ini menunjukkan suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh lawan tutur khususnya wanita (anak gadis). Penggunaan modalitas ini tidak hanya tampak pada bahasa asal, tetapi juga pada bahasa sasaran.

Ungkapan (2) ditujukan kepada orang kedua yang ditandai dengan penggunaan kata *omu dan mu* yang berarti 'kamu' tidak diketahui siapa yang dimaksud, tetapi terdapat penutur dan lawan tutur. Modalitas yang digunakan dalam tuturan (2), yaitu modalitas *paelawano* (sebaiknya). Modalitas ini tampak pada bahasa asal maupun bahasa sasaran. Modalitas *paelawano* memiliki retraksi lebih rendah dibandingkan dengan modalitas *harus*. Penggunaan modalitas *paelawano* menunjukkan otoritas penutur terhadap lawan tutur untuk melakukan suatu tindakan, yaitu mengajar diri sendiri. Dengan demikian, penutur memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lawan tutur.

Ungkapan dalam kutipan (3) disebut *nomotehi be nimokado* yang artinya hal-hal yang dilarang dan boleh dilakukan. Ungkapan yang dinasihatkan ini dituturkan oleh pemuka agama atau tokoh adat ketika upacara Katoba, yaitu upacara yang dilakukan apabila anak telah menginjak usia 8--10 tahun. Di dalam ungkapan tersebut, digunakan modalitas *tobea* 'harus'. Modalitas ini diulang hingga tiga kali, pengulangan kata *tobea* menyebabkan kadar restriksi sangat tinggi. Tokoh adat memerintahkan kepada anak untuk menghormati adik, kakak, orang tua, orang yang lebih muda, ataupun sesama teman sebaya. Jadi, seorang anak yang telah beranjak dewasa harus memahami dan mengerti apa yang boleh dan tidak dilakukan.

Masyarakat lama dalam beraktivitas tidak dapat dilepaskan dari norma-norma adat. Norma-norma adat berkembang secara turun temurun dalam upaya mencari keseimbangan dalam tatanan kehidupan. Norma itu dijadikan pedoman atau pegangan dalam bermasyarakat ataupun membina hubungan seisi rumah di dalam rumah tangga. Modalitas epistemik dengan makna keteramalan ditandai dengan penggunaan modal *akan*, seperti yang tampak dalam kutipan berikut ini.

- (4) "Seise kamukula woliwu mina mikiri
Seribu pimpinan/orang tua kampung tidak ahli
hayatino nohansuru hayati woliwumu
dia hancur kampungmu

Seorang pemimpin yang tidak mempunyai keahlian dalam melaksanakan tugasnya akan membawa kepada kehancuran.

Dalam ungkapan Muna, modalitas 'keakanan' biasanya ditunjukkan melalui penggunaan kata *doho* ataupun *mada kaawu*, tetapi dalam kutipan (4) di atas tidak tampak adanya modalitas tersebut. Modalitas *akan* hanya tampak pada bahasa asal, tidak pada bahasa sasaran. Dengan demikian, modalitas yang bermakna 'keakanan' disesuaikan dengan maksud atau makna ungkapan yang digunakan. Makna yang ingin disampaikan penutur terhadap lawan tutur dalam kutipan (4) adalah keahlian dalam suatu jabatan atau pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang jika itu tidak dimiliki oleh seorang pemimpin sehingga pemimpin dapat diprediksi tidak akan mampu melaksanakan tugasnya dan dianggap dapat menghancurkan harapan masyarakatnya. Ungkapan ini pada dasarnya tidak hanya dituturkan masyarakat lama, tetapi saat ini dapat kita dengar atau temukan, khususnya dalam bidang politik, yaitu pemilu, seperti jargon 'pilih ahlinya'.

Modalitas Deontik

Penggunaan modalitas deontik menunjukkan sikap pembicara terhadap peristiwa yang didasarkan pada kaidah sosial berupa kewenangan pribadi atau kewenangan resmi. Kewenangan pribadi ditimbulkan oleh adanya perbedaan usia, jabatan, atau status sosial antara seseorang dan orang lain dan kewenangan resmi yang berasal dari ketentuan atau peraturan yang telah disepakati bersama untuk mengatur aktivitas kehidupan kelompok masyarakat.

Dalam Ungkapan Tradisional Muna, penggunaan modalitas deontik mempunyai restriksi tertentu yang kadarnya terkait dengan unsur pembentuk perintah itu. Berdasarkan hasil telaah ini terungkap bahwa kadar restriksi terkait dengan langsung tidaknya larangan atau perintah, modalitas yang digunakan, dan panjang pendeknya tuturan yang membangun suatu perintah.

Modalitas deontik dengan makna larangan yang tampak dalam Ungkapan Tradisional Muna, melalui penggunaan modalitas *jangan* (*mina, kono, koe, koo, bhahi*), *tidak boleh* (*mina, mina naembali, nanaembali*)

- (5) "Koobaru ongkaule mie bhaimu, beane.

Jangan senang orang teman/orang lain
naewine naefua dangkumaulehu dua

(Jangan mengejek atau menghina orang lain karena menghina orang lain sama dengan menghina diri sendiri).

yang lebih halus dan sarat perintah atau larangan. *Ofalia*, tabu atau pantang dilakukan, disentuh, ataupun diucapkan karena sarat dengan kekuatan yang mencemarkan atau merusak kekuatan hidup seseorang.

Dimensi Praksis Wacana Ungkapan Tradisional

Untuk melihat fenomena penggunaan modalitas dalam Ungkapan Tradisional Muna berdasarkan perspektif Analisis Wacana Kritis, suatu wacana melibatkan pelaku dan konteks tuturan. Karena tema yang diusung Ungkapan Tradisional Muna adalah kepemimpinan, kesetiaan, adat istiadat, pelaku dalam tuturan bukanlah sesuatu yang tunggal, atau tidak hanya dituturkan oleh satu orang, tetapi terdiri atas beberapa orang, yaitu orang tua (tokoh adat), pimpinan sedangkan lawan tuturnya adalah anak remaja, orang tua, orang bawahan.

4. Simpulan

Ungkapan Tradisional Muna sarat dengan modalitas, hal ini disebabkan potensi seseorang untuk memengaruhi sikap dan perilaku orang lain karena kedudukan, status sosial lebih tinggi baik dalam keluarga maupun individu dalam masyarakat lama mempunyai kekuasaan atas orang yang di bawahnya. Sikap dari pola perilaku tertentu tampak dalam penggunaan modalitas. Modalitas digunakan dalam Ungkapan Tradisional Muna yang dapat mengungkapkan ideologi dan kekuasaan, meliputi modalitas epistemik dengan makna keharusan yang ditandai dengan pemakaian kata *beano*, *tobea*, dan *paelawano*, modalitas deontik dengan makna perintah atau larangan ditandai dengan pemakaian bentuk *naembali*, *mina naembali* 'jangan' dan 'tidak boleh', dan modalitas *ofalia* (tidak boleh/jangan).

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan. 1992. *Modalitas dalam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Berg, Rene Van Den. 2001. *Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna*. Kupang: Arta Wacana Press.
- Dananjaya, James. 1984. *Foklor Indonesia*. Jakarta: Tempiring.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Tata Kelakuan Di Lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Daerah Sulawesi Tenggara*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Eriyanto. 2006. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta. LKis.
- Fairclough. 1989. *Langue dan Power*. Jakarta:
- Rahmawati. 2005. *Ungkapan Tradisional Muna*. Kendari: Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Sobur, Alex. 2006. *Analisis Teks Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

"*Andea La Andea*"

Bahasa Ciacia

Andea la andea
Tophada-padha andea
Andea wasakalambe

Nomondo wasakalambe
Dhaempo mparae-mparae
Nomondo lawuta nggadhi
Maka nokonggiu ragi

Konggiu ragi round
Kotaimburi mbungano
Mbungano wasakalambe
Simbou mburino ncura

Minam onanga-nangae
Katembokano lalono
Moapa lalono bhara
Labua nota loncikai

Labua nota loncikai
Noita lapano nggawu
Lapano nggawuari
sondawuano ncoasi
Ncoasi ambuwaemo
Noleleaso ncoenete

Ncoenete ngkawe
Notau pandu lapandu
Nolapa-lapae ngalu
Nosolai mbibhito

Mbibhitono kotogono
Guntu tana i ghambali
Mbibhito lancangia
Notampa padha i mata

Iyoolu potondarino
Leleano wasina ronto
Komea alilinga'em
Sawali anggulu panda
Labua nontobhe ntonga

Pimbolino wawono
Limbongano dhati mana
Tumbuano aita'e
Garao lasao ngkito
Liwo-liwono kondalo
Garao lapande mata
Panatarino Ntodhuku

Nawono ngkanawa-nawa
Sampeno kasampe-sampe
I bhawono ncurugaa
I pintu Ghasulullah

Bahasa Indonesia

Hai teman-teman
Kita semua bersahabat
Hai teman pemudi

Kalau hanya pemudi
Belum ada apa-apa
Setelah ada pemuda
Baru ada bermacam suara

Bermacam suara dan rupanya
Berwarna-warni bunganya
Bunganya gadis
Seperti tulisan surat

Setelah kupikir-pikir
Dalam hatinya
Mengapa dihatinya
Sebabnya ragu-ragu.

Sebabnya ragu-ragu
Dia melihat lapisan kabut
Di tempat itu
dia jatuh cinta
Cintanya dikemblikan/ditolak
Supaya datang yang baru

Orang yang baru tidak jadi
Dia putus asa
Dipisah-pisahkan angin
Disambar petir

Petirnya penguasa kampung
Gumuruh tanah di sebelah
Kilat yang tersembunyi
hanya tampak di mata

Di awan rapat (euaea mendung)
Jalannya si gadis lugu
Hampir aku lupa
Tetapi setelah aku ingat
Sebabnya patah tengah

Karena turunnya (dari awal)
Tumbuh dari mana
Tempat tumbuhnya kelihatan
Ternyata si kayu hitam
Penghuni lautan
Ternyata suka melirik juga
Kepada idaman orang banyak

Nyawanya adalah nyawa buatan/ciptaan
Letaknya berada di atas
Di atas surga
Di pintu Rasullulah

Kabhanci di atas melukiskan kehidupan muda-mudi di dunia fana ini yang bermula dari perkenalan yang kemudian menjalin hubungan cinta kasih yang diwarnai dengan adanya persaingan antara sesama teman untuk mewujudkan kasih sayangnya kepada seseorang (gadis). Di mana dalam perjalanan cintanya ternyata ada berbagai macam sifat yang diperlihatkan oleh si gadis lugu itu. Setelah melihat tingkah laku kekasihnya, pemuda yang menjadi idola gadis tersebut timbul rasa curiga dan

BahasaCiacia

Tadhem lapande joge
Mongulemo tumeteno ganda
Nawuluepotamberoe
Ane lalono nomai

Kodha-kodha nalumeo
Nosari-sari bungano ponda
Sakureteno ganda-ganda
Nopojo jambe mbulawa
Nopopalumpa kagasia

Tapojandi mai mboseno
Topimata i kondalo
Labua nomboso molengo
Mparae nindosano

Labua nomboso molengo
Nopindongo ragino mpulu
Ragino pulu mparae
Ragino pulu pantono

Pangulu mudha-mudha
Maka namburi ncuali
Moali namoali
Mburiano ngkolalono
Sange yuwe nolingkum

Piam lingkuno mbose
Mbose nontolaom
Nambule namoalim

Bharia-bharia nggiu ragi
Notara i lingkuno uwa
Ane lantono uwa
Nambule i mbaleno
Napipiam lakiaso ntamate

Bahasa Indonesia

Bangkitlah para peminat joget
 Sudah lelah yang memukul gendang
 Yang jauh segera datang
 Bila ingin datang

Burung-burung akan terbang
 Mengintai bunga pandan
 Setelah berbunyi gendang
 Berlombalah selendang mas
 Turut meramaikan pesta

Berjanji dengan perantau
 Selalu menatap ke laut
 Sebab merantau lama
 Apakah ada kesalahannya

Sebab merantau lama
 Bila mendengar berita
 Berita yang bagaimana
 Berita yang betul

Duluan dugaan/kecurigaan
 Baru terima berita yang benar
 Sungguh susah
 Menebak hati orang
 Sedangkan air sudah berombak

Apalagi hati seorang perantau
 Sudahterlanjur merantau
 Susah untuk kembali

Semua berita itu
 Bergantung pada likunya urat
 Kalau timbulnya urat
 Dikembalikan saja ke pangkalnya
 Apalagi nantinya akan mati

Pada bait I merupakan panggilan kepada orang-orang yang masih berada di tempat duduknya agar segera mengisi acara keramaian.

Bait II melukiskan suasana pesta dan orang-orang yang sedang menyaksikan pesta. Orang-orang yang akan turun/masuk lapangan pesta telah bersiap-siap dan seterusnya memilih pasangan yang cocok untuknya, terutama bagi kaum pria. Diibaratkan seperti yang berlomba dalam mengintai mangsanya bersama-sama.

Bait III dan IV merupakan sindiran bagi orang-orang (gadis) yang mengikat hati atau bertunangan dengan perantau yang sudah sekian lama tak kembali. Karena kecewa dengan kabar yang diperolehnya dari kampung halaman, akhirnya perantau tersebut berat untuk kembali. Dari uraian di atas sudah jelas bahwa kabhanci ini mengandung nilai sosial bagi masyarakat.

Kabhanci Sarauda

Kabhanci ini hanya dilagukan dalam suatu pertemuan, baik sifatnya resmi maupun tidak resmi, yang menghendaki kesimpulan akhir dari pembahasan suatu masalah. Kabhanci ini dilagukan menjelang suatu pertemuan berakhir, biasanya dilaksanakan di rumah atau balai pertemuan. Kabhanci jenis *sarauda* merupakan wahana penyaluran aspirasi seseorang demi mencapai satu kesatuan pandang dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya. Selain itu, ia berguna untuk mendapatkan kesimpulan yang berupa pesan dan kesan dari suatu pertemuan. Kabhanci ini dilagukan antara dua orang secara berbalasan tanpa musik pengiring.

Pada bait I dan II kabhanci di atas merupakan gambaran keadaan suatu rumah tangga yang telah berantakan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kedua belah pihak keluarga untuk turun tangan menyelesaikan kemelut rumah tangganya.

Bait III dan IV melukiskan kepergian seseorang dari keluarganya karena kekecewaan yang dialaminya tak dapat dikendalikan lagi. Bait V dan VI merupakan penilaian dua belah pihak keluarga terhadap orang yang telah pergi tadi. Ternyata kepergiannya bersumber dari kekecewaan yang sengaja dibuat-buat agar beralasan kepergiannya.

Kemudian pada bait VII dan VIII merupakan nasihat kepada orang yang telah ditinggalkan, bahwa jangan hiraukan lagi orang yang telah pergi. Engkau lihat saja anaknya. Anaknya(-mu) sama seperti perawakan ayahnya.

Pada bait IX sampai XII menggambarkan iba pihak keluarga istri kepada orang yang pergi merantau tiada tujuan pasti. Ia sengsara karena keputusannya. Akhirnya, ia menjadi malu untuk kembali. Secara keseluruhan (utuh) kabhanci di atas mengandung arti bahwa segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita harus dipikirkan terlebih dahulu untung ruginya agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Dengan demikian, maka kabhanci di atas mengandung nilai-nilai pendidikan bagi masyarakat.

Kabhanci Male-Male

Jenis kabhanci ini hanya boleh dilagukan oleh orang tua yang dapat menguasainya dengan baik, bila ada orang yang meninggal dan atas permintaan keluarga yang ditinggalkan. Kabhanci male-male ini berfungsi untuk menghibur keluarga duka sekaligus memberikan nasehat dan pesan-pesan kepada pihak keluarga yang ditinggalkan agar mereka merelakan atas berpulangnya salah satu anggota keluarga yang dicintainya itu.

Kabhanci tersebut dapat menanamkan kesadaran bagi manusia tentang kehadiran dan keberadaan manusia di alam fana ini. Manusia sebagai makhluk ciptaan hanya hidup sementara untuk berbuat kebajikan dan beramal, kemudian menuju kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. *Male-male* ini dilagukan dengan ekspresi jiwa/perasaan sehingga dapat menciptakan suasana kekeluargaan dan persaudaraan antara sesama warga setempat yang mendengarnya. Adapun bentuk kabhanci sebagai berikut:

Bahasa Ciacia

Kitam lae mpangulum
Dhampu acumucuni kapindam
Ane natumondu kapindam
Atumonto mbakasim

Kaasi mbakasino wajamauri
Nololam yinawano
Norato i donia malo
Kaasi mbuleno wange

Nomalimua ratono
Ratono mai mbuleno
Ane cungkaliwu-liwu
Tonto ririno oleo

Mou ririno oleo
Tak sebanding dirinya
Ane natumondu wutono
Tonto angkano limano

Mou angkano limano
Dhaem lawano wutono
Gorimpu mateno bula
Nomate kokambolosi

Ane notondu satondunom
Dhampu i lawano ncurugaa
Makatamo takapotabu mindua

Bahasa Indonesia

Silahkan anda duluan
Nanti saya ikuti langkahmu
Bila hilang jejakmu
Saya akan menatap bayangmu

Kasihanku bekas wajah riang
Telah hilang nyawanya
Sudah sampai di akhirat
Kasihanku yang pulang sana

Sangat mulia datangnya
Datang dan pulangnya
Bila engkau rindu
Tataplah sinar mentari

Biar pun sinar mentari
Tidak sebanding dirinya
Bila hilang dirinya
Lihat saja anaknya

Biar ada anaknya
Tak lawan dirinya
Bukan matinya bulan
Setelah mati berganti lagi

Bila hilang selamanya
Nanti di pintu surga
Baru berjumpa lagi

yang bersifat gotong royong. Kabhanci Ciacia mengandung nilai-nilai budaya luhur. Nilai-nilai budaya tersebut sebagai berikut.

Nilai Sosial

Kabhanci dianggap memiliki nilai sosial karena dapat menimbulkan gairah hidup dan dorongan sosial yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku serta sikap individu atau masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat J.M. Watkaat (1985: 21) yang berpendapat bahwa apabila berisikan dorongan-dorongan sosial yang berkenaan dengan jenis-jenis tingkah laku dan hubungan antara individu dengan individu, antara masyarakat dengan masyarakat, karya sastra tersebut memiliki nilai sosial.

Pendapat tersebut sesuai dengan efek yang ditimbulkan oleh sastra kabhanci yang dapat menumbuhkan semangat bagi seseorang yang mendengarkannya sehingga menimbulkan kesadaran dan terpanggil untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kesadaran untuk memacu hubungan kerja sama ini telah ditumbuhkembangkan sejak dulu. Apabila nilai ini ditanamkan pada pekerjaan apapun, kekompakan masyarakat tetap terjaga.

Nilai Pendidikan

Suatu karya sastra bernilai pendidikan apabila kabhanci yang di dalamnya berisikan petuah-petuah dan nasehat-nasehat yang berguna bagi pembentukan sikap dan moral seseorang. Kabhanci ini selalu didengarkan dengan alunan suara yang menarik perhatian bagi yang mendengarkannya. Karya tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat menarik perhatian orang, selain keindahan bahasa, cerita, dan nasihatnya.

Nilai Religius (Keagamaan)

Nilai lain yang dapat dijumpai dalam sastra lisan kabhanci adalah pemujaan kepada keagungan pencipta. Pada dahulu kala, ketika itu masyarakat Ciacia masih jauh dari kemodernan, kabhanci berfungsi untuk menanamkan dan menimbulkan arti magis dan mistik dalam kehidupan masyarakatnya. Dengan demikian, walaupun belum mengenal pendidikan formal, masyarakat (nenek moyang) sudah percaya adanya Tuhan. Oleh karena itu, dalam karya sastra kabhanci ada yang memuja keagungan Tuhan Maha Pencipta.

Nilai Estetis (Keindahan)

Nilai estetis yang dapat dijumpai dalam kabhanci yaitu yang dapat membangkitkan perasaan, menarik perhatian, dan menimbulkan tanggapan kepada orang yang menyimaknya. Secara umum, sesuatu karya sastra dikatakan indah apabila dapat menimbulkan keharuan kepada penikmatnya.

Dalam kaitannya dengan uraian di atas, Slamet Mulyana (1951: 110) mengatakan bahwa suatu yang indah adalah sesuatu yang dapat menggetarkan sukma, menggugah perasaan, dan memberikan kepuasan rohani kepada penikmatnya. Oleh karena itu, dalam hubungannya dengan upaya untuk melagukan kabhanci Ciacia seseorang perlu memperhatikan keindahan lagunya agar orang yang mendengarkannya turut dan terbawa dalam keharuan.

Nilai Kemanusiaan

Sesuatu ciptaan sastra bernilai unsur-unsur kemanusiaan yang menjadi cermin gejolak jiwa masyarakat yang dituangkan melalui sastra lisannya. Ini merupakan wujud perasaan seseorang yang diungkapkan dengan memakai media bahasa lisan yang berisikan: cinta kasih, belas kasihan, kerinduan, kedukaan, tangis dan dosa, penderitaan, ketakutan, keadilan, dan kejujuran, yang terdapat dalam kabhanci Ciacia.

Uraian beberapa nilai sastra di atas yang merupakan gambaran tentang isi yang terkandung di dalam sastra lisan Kabhanci Ciacia dapat dijadikan acuan dalam menata masyarakat di era global seperti sekarang ini.

4. Kesimpulan

Kabhanci merupakan bagian dari sastra lisan Ciacia yang sangat berperan dalam kehidupan bermasyarakat Buton pada zaman dahulu, terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari dan pelaksanaan pesta-pesta rakyat maupun adat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam kabhanci Ciacia yang masih relevan seperti gotong royong, saling memotivasi, dan kepercayaan pada sang pencipta, dapat dijadikan acuan dalam membangun kehidupan bermasyarakat, khususnya Buton dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, diharapkan kepada orang tua agar dapat mewariskan kabhanci Ciacia kepada generasi penerus (remaja) sehingga mereka dapat memahami dan menggunakannya secara baik dan tepat dalam setiap bentuk kegiatan bermasyarakat bersama dalam bingkai NKRI pada era globalisasi ini.

STRATEGI PEMERTAHANAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH DI ERA GLOBALISASI¹

Muh. Alamsah²
(Universitas Muhammadiyah Kendari)

1. Pengantar

Bahasa daerah yang hidup dan berkembang di Indonesia mencapai 741 bahasa. Sebagian kecil bahasa daerah tersebut berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan jumlah lebih dari 15 bahasa, termasuk bahasa daerah pendatang.

Keberagaman bahasa daerah yang ditopang oleh keberagaman etnis dan tradisi menandakan kekayaan budaya yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tenggara. Keberagaman bahasa ini perlu dipelihara dan dilestarikan sebagai identitas serta jati diri bangsa dan daerah. Dalam pasal 32 UUD 1945 sudah jelas dinyatakan bahwa "Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional".

Tulisan ini memfokuskan perhatian pada strategi pemertahanan bahasa dan sastra daerah di Sulawesi Tenggara dalam era globalisasi. Walaupun demikian ide-ide tentang strategi pemertahanan bahasa dan sastra daerah dapat dikembangkan dan diterapkan pula pada bahasa-bahasa lain di Nusantara, khususnya pada bahasa-bahasa yang terancam punah.

Pemertahanan bahasa dan sastra daerah di Sulawesi Tenggara dalam menghadapi era globalisasi sangat penting untuk dilakukan mengingat di Sulawesi Tenggara terdapat bahasa-bahasa daerah yang perlu dilestarikan sebagai identitas dan jati diri suatu etnis dan pemer kaya khazanah budaya bangsa.

Daerah-daerah lain, seperti di Jawa (Solo, Grobongan, Wonosari) Bali, Palangkaraya, dan Sunda, masyarakatnya bekerja sama dengan pemerintah daerah telah melakukan hal-hal dalam upaya pemertahanan bahasa dan sastra daerah, misalnya dengan membuat Perda tentang penggunaan bahasa daerah pada hari-hari tertentu, atau juga lewat Surat Keputusan Bupati yang juga berisi tentang kewajiban menggunakan bahasa daerah pada hari tertentu, meningkatkan penelitian-penelitian bahasa daerah, pembuatan kamus bahasa daerah, pelestarian budaya wayang, dan memasukkan bahasa daerah sebagai mulok.

Informasi di atas menginspirasi kita (masyarakat Sulawesi Tenggara) untuk bisa menjaga dan melestarikan kebudayaan Sulawesi Tenggara yang salah satunya adalah bahasa dan sastra daerah yang terdapat di Sulawesi Tenggara.

Masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya adalah masyarakat yang multilingual. Maksudnya masyarakat yang mampu menggunakan lebih dari satu bahasa. Misalnya seorang masyarakat Tolaki mampu menggunakan bahasa Tolaki, bahasa Indonesia, maupun bahasa daerah lain yang berdekatan dengan wilayah tempat tinggalnya.

Sulawesi Tenggara memiliki sejumlah kelompok bahasa daerah dengan dialek yang berbeda-beda. Perbedaan dialek ini memperkaya khasanah kebudayaan Indonesia. Kelompok bahasa daerah di Sulawesi Tenggara dan dialeknya masing-masing adalah sebagai berikut.

A. Kelompok Bahasa Tolaki terdiri atas:

1. Dialek Mekongga
2. D. Konawe
3. D. Moronene
4. D. Wawonii
5. D. Kulisusu
6. D. Kabaena

B. Kelompok Bahasa Muna terdiri atas:

1. D. Tiworo
2. D. Mawasangka
3. D. Gu
4. D. Katobengke
5. D. Siompu
6. D. Kadatua

¹ Makalah ini disampaikan pada Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara

² Penulis adalah dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univ. Muhammadiyah Kendari.

- a. komponen bangsa yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat;
- b. pendidikan yaitu formal, nonformal, dan *informal* (cetak miring tambahan dari penulis) (Sugono, 2005).

Strategi yang bisa kita terapkan untuk mempertahankan bahasa dan sastra daerah di era globalisasi adalah sebagai berikut.

1) Pengadaan Lomba Berbahasa dan Bersastra Daerah

Lomba-lomba yang bernuansa kedaerahan perlu digalakkan agar masyarakat merasa memiliki karakteristik kedaerahan tersebut. Dengan melaksanakan lomba yang bernuansa kedaerahan, masyarakat merasa termotivasi untuk senang dan suka mempelajari bahasa dan sastra daerah. Melalui lomba tersebut juga memberi peningkatan prestise yang dimiliki oleh bahasa dan sastra daerah. Bukan hanya prestise, tetapi juga berhubungan dengan peningkatan perbaikan ekonomi warga yang memenangkan lomba tersebut.

2) Peningkatan Penelitian Bahasa dan Sastra Daerah

Di era globalisasi sekarang ini, tenaga-tenaga kebahasaan bidang bahasa daerah belum memadai (Sugono: 2007).

Penelitian-penelitian bahasa dan sastra daerah perlu untuk dilaksanakan mengingat aturan penggunaan bahasa daerah, kamus-kamus bahasa daerah, tata bahasa daerah (standar), dan penelitian sastra daerah (lisan) belum begitu memadai (Ashur, 2000). Misalnya kamus-kamus bahasa daerah di Sulawesi Tenggara belum lengkap (khususnya yang berhubungan dengan mulok), hasil penelitian sastra daerah dan bahasa-bahasa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara belum lengkap serta belum terdokumentasikan dengan baik.

Dengan melaksanakan penelitian bahasa daerah dan sastra daerah semakin tercipta tenaga-tenaga kebahasaan yang profesional, serta bahasa dan sastra daerah yang menjadi obyek penelitian secara langsung terdokumentasikan. Namun, aspek yang perlu diperhatikan juga adalah hasil penelitian dan buku-buku pedoman bahasa dan sastra daerah. Kalau kita mampu menyebarluaskan, wajib untuk disebarluaskan bukan hanya untuk disimpan dan ditata dengan rapi di perpustakaan yang menunggu pembacanya jika punya waktu untuk membacanya.

3) Penamaan Toko, Tempat Umum/Layanan yang Bernuansa Kedaerahan

Sekarang ini penamaan toko-toko dan tempat umum pada umumnya menggunakan bahasa asing dan bahasa Indonesia, tetapi yang paling banyak digunakan adalah bahasa asing (bahasa Inggris).

Berdasarkan hasil observasi penulis ternyata di daerah Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari, masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang bangga dengan etnisnya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk nama toko mereka, nama tempat jualan mereka (kios, kedai), dan identitas transportasi (mobil) mereka.

Menggunakan bahasa daerah untuk nama toko dan tempat umum dan lain-lain maka secara langsung telah turut melestarikan bahasa daerah yang bersangkutan, serta menunjukkan wujud kecintaan penutur terhadap bahasa daerahnya. Bukankah kata cinta harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya sekadar kata yang tidak bermakna.

4) Keterlibatan Media Massa Cetak dan Elektronik Dalam Melestarikan dan Mengembangkan Bahasa dan Sastra Daerah Daerah

Menurut penulis sebaiknya di Sulawesi Tenggara terdapat media massa yang khas dan khusus menggunakan bahasa daerah tertentu atau setiap media massa menyiapkan sedikitnya tiga kolom untuk penulisan artikel dengan menggunakan bahasa daerah. Hal ini sangat membantu dalam memotivasi wartawan media massa atau penulis-penulis artikel untuk menguasai bahasa daerahnya masing-masing. Dengan demikian, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita dituntut untuk mengetahui bahasa daerah kita masing-masing. Bukankah globalisasi demikian?

5) Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal (Mulok) di Sekolah TK Sampai pada Perguruan Tinggi

Bahasa daerah dan sastra daerah menurut penulis wajib untuk dijadikan muatan lokal di setiap daerah jika kita benar-benar merasa khawatir dengan kondisi bahasa dan sastra daerah kita, bukan saja untuk jenjang TK tetapi jika perlu sampai ke perguruan tinggi.

Mulok wajib ada di TK, SD, SLTP, dan SMA, khususnya bahasa dan sastra daerah, karena masa usia dini sampai usia remaja pada umumnya anak-anak waktunya lebih banyak di rumah yang dalam komunikasi dengan orang tua umumnya menggunakan bahasa daerah. Melalui dukungan proses pembelajaran bahasa daerah di sekolah mereka sangat cepat memahami bahasa daerahnya. Demikian juga halnya dengan pembelajaran sastra daerah sangat penting untuk pembentukan kepribadian anak.

Dalam perguruan tinggi pun mulok wajib ada karena sebagai contoh dan teladan untuk penggunaan bahasa daerah untuk jenjang pendidikan yang lebih rendah. Menurut penulis hal ini penting dilakukan untuk mencegah adanya perasaan yang tidak adil dan perasaan yang menganggap bahwa jika mereka dewasa bahasa

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kaelan. 2002. *Filsafat Bahasa (Masalah dan Perkembangannya)*. Yogyakarta: Paradigma
- Mahmud et.al. 1995. *Struktur Bahasa Mekongga*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Rene van den Berg dan La Ode Sidu. Kamus bahasa Muna – Indonesia Edisi 1. tahun 1996. Jakarta: Penerbit Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Sugono, Dendi. 2005. *Kebijakan Bahasa Dalam Pemasyarakatan Bahasa Indonesia (Bahan Makalah Seminar)*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- 2007. *Kebijakan Bahasa Daerah Dalam Era Otonomi Daerah (Rakor Perguruan Tinggi Hotel Parama 21-23 Agustus 2007)*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- http://id.wikipedia.org/wiki/bahasa_indonesia
- <http://pondokbahasa.wordpress.com/2008/12/07/pemetaan-bahasa-bahasa-daerah-di-indonesia/>
- <http://bataviase.co.id/node/43604>
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>
- <http://www.beritaindonesia.co.id/humaniora/bahasa-daerah-semakin-punah/>
- www.sastra-indonesia.com.

terjalin pun bukan merupakan tanya-jawab. Melainkan saling menanggapi sesuai isi permasalahan. *Kinoho sara* biasa diucapkan pada kegiatan upacara adat, khususnya adat pelamaran. Bentuk *kinoho sara* terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pertama sebagai pernyataan pihak laki-laki dan bagian kedua sebagai jawaban pihak perempuan. Pada bagian selanjutnya adalah dialog saling berbalasan antara kedua pihak. Setiap bagian bait memiliki kandungan pesan sesuai dengan kebutuhan yang dimaksud. Secara umum, *kinoho* merupakan dialog teratur dan saling bergantian antara dua penutur/pembicara, misalnya pemuda dan pemudi, yang berisi penyampaian isi hati di antara keduanya. Seperti halnya bentuk pantun, *kinoho* terdiri atas bait-bait yang setiap baitnya terdiri atas empat baris (larik), baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi.

Dialog dimulai oleh pihak laki-laki yang isinya berupa salam pendahuluan atau salam pembuka. Bagian kedua berupa maksud dan tujuan kedatangan pihak laki-laki untuk melakukan pinangan. Bagian ketiga, berupa tanggapan pihak perempuan terhadap pihak laki-laki. Bagian keempat merupakan bagian inti, yaitu peminangan yang isinya berupa syarat-syarat yang harus disediakan oleh pihak laki-laki untuk pihak perempuan yang dilamar. Bagian kelima diakhiri dengan nasihat-nasihat terhadap hubungan laki-laki dan perempuan kelak setelah melangsungkan pernikahan.

Jumlah bait dari setiap tuturan antara pihak laki-laki dan perempuan tidak sama, karena pada dasarnya *kinoho sara* bukan merupakan tanya jawab. Melainkan dialog antara pembicara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Hanya hal-hal yang dianggap penting saja untuk ditanggapi, sedangkan tuturan lainnya hanya berupa pemberitahuan dan tidak perlu mendapat tanggapan. Contoh tuturan *kinoho sara* seperti berikut ini.

Tuturan jurubicara pihak laki-laki:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) <i>Ie inggomiu pamarendano wonua</i>
<i>Inggomiu pabitara inemore</i>
<i>Inggomiu anamotoo la ulusala</i>
<i>Inggomiu mbuana mbuwulele</i> | Wahai pemerintah negeri
Juru bicara kenamaan perempuan
Para orang tua perintis
Bapak dan ibu sebagai orang tua anak |
| (2) <i>akiti buake mokodunggui</i>
<i>une-unemani patudumami</i>
<i>laa nileu akomami tinunggai mami</i>
<i>ikeni peoyahai</i> | dengan nyata akan kami sampaikan
maksud dan tujuan kami
Kedatangan dan kehadiran kami
di tempat ini |

Tuturan jurubicara pihak perempuan:

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) <i>Laiito leuito luwuakono</i>
<i>Mbuito taataala</i>
<i>Nggoo nggooleu leuito</i>
<i>Kaduito kuuito koaito</i>
<i>Manggo hapopohae tinekoo ako</i>
<i>Laa ala nio olu leuito</i>
<i>Leuitotembono tetuka sukatino</i> | Telah datang semuanya
Tak ada lagi yang dinanti
Yang akan datang telah ada
Yang akan datang telah datang |
| (2) <i>Uanggo sumarui tumuluraai</i>
<i>Atopededeia ito pada mbendo arikee</i>
<i>Ohawo otuomiu nileu akomiu</i>
<i>Lakokoito dungguikoito</i> | Guna menyatakan ke hadapan kita
untuk mendengarkan agar diketahui
akan maksud kedatangannya
dengan ini kerjakanlah dan sampaikanlah |

3. Bahasa Puitik *Kinoho Sara*

Unsur bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi harus sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bahasa puitik akan menunjukkan fungsinya sebagai bahasa puitik. Fungsi puitik akan tampak bila penekanan tuturan ada pada pesan, seperti irama, perubahan suara, pengulangan bunyi-bunyian atau rima yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian khusus. Pembicaraan lapis suara atau bunyi ditujukan pada bunyi-bunyian atau pola yang bersifat khas atau khusus, yaitu yang digunakan untuk mendapatkan efek puitis atau nilai seni. Misalnya, bunyi-bunyi asonansi atau perulangan bunyi vokal yang sama *a, i, e, o*, atau *u*, serta perulangan bunyi-bunyi konsonan. Unsur bunyi dalam puisi merupakan hasil penataan kata dalam struktur kalimat (Fananie, 2001: 102).

Pada pantun, susunan bunyi merupakan bagian yang harus ada karena struktur tersebut merupakan bagian penanda bentuk. Menurut Slamet Muljana, 1956 (dalam Pradopo, 1987:32), dalam puisi, bunyi sebuah kata selain berfungsi sebagai simbol arti dan untuk orkestrasi juga digunakan sebagai peniru bunyi (*onomatope*), lambang suara (*klanksymboliek*), dan kiasan suara (*klankmetaphoor*). Karena mengandung bahasa puitik, *kinoho sara* membentuk pola khusus dengan bunyi-bunyian estetika bahasa berdasarkan ulangan suara seperti halnya

Perlengkapan dan mas kawin kami
Yang terdiri atas
Kalung emas sebagai alat pengikat
Gong sebagai alat pendengung
Kerbau untuk modal hidup
Cincin hidung tanda kerbau tanda kerbau hidup
Kain kaci tanda kesucian hati
Sarung buat pengganti pakaian
Baju untuk pakaian pengantin
Loyang tempat memandikan bayi
Timba untuk timba mandi
Lampu untuk penerangan
Pakaian untuk pengganti pakaian yang lapuk

Bait (3) dan (4) merupakan tuturan yang mementingkan kontak pendengaran, sehingga tuturan tersebut berfungsi fatik. Pengulangan kata *aripine* dan *nikato* di setiap awal kalimat merupakan unsur bahasa yang berfungsi untuk menarik perhatian pendengar atau lawan bicara yaitu pihak perempuan yang akan dilamar. Bait (3) menunjukkan makna 'putusan hasil pembicaraan'. Pembicara pihak laki-laki sebenarnya bermaksud memberi penegasan makna pada pihak perempuan bahwa pihak mereka telah mempunyai hasil keputusan. Bait ini mengandung pesan inti untuk tuturan selanjutnya dan hal yang ditunggu-tunggu oleh pihak perempuan.

Pihak perempuan dapat dengan jelas mengetahui barang-barang yang telah disiapkan oleh pihak laki-laki untuk diberikan pada pihak perempuan. Dalam ragam percakapan biasa, penyampaian tentang barang-barang tersebut tentu merupakan hal biasa dan tidak menarik. Namun, penyampaian informasi dengan menggunakan unsur bahasa yang berfungsi menarik perhatian pendengar (khususnya pihak perempuan), yaitu dengan irama dan bunyi perulangan kata *nikaato*, menyebabkan tuturan tersebut menjadi berbeda. *Kontak* (melalui indera pendengaran) yang diciptakan oleh pembicara terhadap pendengarnya berjalan dengan efektif, maka fungsi bahasa inilah yang dimaksudkan dapat menentukan proses komunikasi lisan berjalan efektif.

4. *Kinoho Sara* Sebagai Bentuk Komunikasi Lisan

Pada dasarnya *kinoho sara* merupakan tuturan adat yang biasa dilakukan dalam ritual upacara perkawinan adat Tolaki. Isinya beragam, tergantung pembagian jenisnya. Karena bentuknya berupa tuturan, *kinoho sara* dapat disebut sebagai satu bentuk proses komunikasi lisan, karena memenuhi unsur-unsur komunikasi pada umumnya, yaitu 1) proses penyampaian informasi; 2) dilakukan oleh seorang pembicara atau penutur; 3) ada yang mendengar atau lawan bicara; 4) ada pesan yang disampaikan; 5) ada saluran yang digunakan; dan 6) ada respon balik yang diperoleh (Vanoye dalam Zaimar: 341)

Hoed (2008, 183-185) mengemukakan tentang keterkaitan antara komunikasi lisan dengan tradisi lisan. Secara umum disebutkan bahwa komunikasi lisan memiliki ciri-ciri khusus yang harus menjadi perhatian, khususnya jika ingin melakukan kajian bahasa dalam komunikasi lisan, khususnya tradisi lisan. Sehingga pada akhirnya bisa ditarik simpulan bahwa komunikasi lisan merupakan dasar tradisi lisan. Selanjutnya, dikatakan bahwa komunikasi lisan sangat erat kaitannya dengan bahasa yang digunakan dalam tuturan sehingga fungsi bahasa pun menjadi aspek penting dalam komunikasi lisan. Dalam tulisannya, Hoed mengemukakan teori Jakobson tentang fungsi-fungsi bahasa. Dalam komunikasi harus ada enam faktor yang terlibat, yaitu pengirim, penerima, hal yang dibicarakan, pesan, kode, dan kontak. Teori fungsi bahasa yang dikemukakan Jakobson dapat menunjukkan fungsi bahasa yang dihasilkan dari tuturan, khususnya dari segi aspek tekanan bahasa yang digunakan saat bertutur.

Eksistensi sebuah kegiatan adat yang bersifat lisan tergantung bagaimana proses penyampaian secara lisan itu berlangsung dengan baik. Dengan kata lain, unsur-unsur komunikasi harus ada sebagai syarat terciptanya komunikasi yang efektif. Dalam ilmu komunikasi secara umum, sebuah proses komunikasi bisa berlangsung dengan adanya unsur-unsur komunikasi, yaitu pengirim atau pemberi pesan, penerima pesan, acuan, pesan, saluran komunikasi, serta terjadi respon balik. Dalam *kinoho sara*, pengirim pesan adalah penutur atau pembicara yang dalam bahasa Tolaki disebut sebagai *pabiithara*, yaitu orang yang secara khusus dipilih untuk berbicara menyampaikan maksud dan tujuan dari sebuah pelamaran. Pembicara *kinoho sara* harus ada dari kedua belah pihak, pihak laki-laki yang mengajukan lamaran dan pihak perempuan yang akan dilamar. Penerima pesan, yaitu orang yang mendengar penyampaian pesan dari pembicara. Adapun pesan yang dimaksudkan dalam proses komunikasi adalah informasi yang disampaikan oleh pembicara. Dalam *kinoho sara*, pesan tersebut terkandung dalam bait-bait yang isinya dapat secara tersirat maupun tersurat. Saluran komunikasi dalam penyampaian *kinoho sara* berupa suara dengan irama dan tekanan tertentu. Ciri khusus dari proses komunikasi lisan adalah produksinya menggunakan alat bicara, sedangkan penerimanya menggunakan indera pendengaran, ciri khusus yang paling menonjol adalah didengar dan tatap muka (Hoed, 2008; 184).

LAPORAN SIDANG

Sidang : Komisi C
Hari, Tanggal, Pukul : Selasa, 20 Juli 2010, 13.00—14.30 wita
Judul Makalah : Perubahan Makna Pungutan Kata Bahasa Arab dalam Bahasa Wolio
Penyaji/Pembicara : Zakiyah M. Husba
Pemandu : Drs. Ali Arham, M.M.P.
Pencatat : Mulawati, S.Pd.
Jumlah Peserta : 40 orang

TANYA JAWAB

Sandra Safitri, S.S., M.A. (Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)

Pertanyaan /Saran

Sebagai salah satu kekayaan budaya Nusantara, *Kinoho* yang ada dalam masyarakat Tolaki perlu dipelihara dan dilestarikan keberadaannya. Menurut Ibu, pelestarian seperti apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah sehingga *Kinoho* itu bisa dikenal oleh masyarakat luas?

Jawaban/Tanggapan

Memang harus diakui bahwa *Kinoho* yang ada dalam masyarakat Tolaki penggunaannya masih seputar sebagai media dan kelengkapan adat semata. Pemerintah dan masyarakat harus mengupayakan suatu cara yang ampuh dalam upaya melestarikan budaya *Kinoho* ini sehingga bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam setiap acara adat yang menghadirkan *Kinoho* perlu didokumentasikan, misalnya dalam bentuk buku, sehingga dapat disebarluaskan dan dibaca oleh masyarakat luas. Selain itu, melalui buku tersebut dapat juga dijadikan sebagai bahan muatan lokal di sekolah. Upaya lainnya adalah *Kinoho* juga bisa dikemas dalam bentuk seni pertunjukan sehingga bisa ditampilkan kapan dan di mana saja dalam sebagai bentuk sarana hiburan. Tampilan dalam bentuk pertunjukan bisa dipertontonkan tidak hanya di Sulawesi Tenggara, tapi di tingkat nasional dan internasional.

Pemeliharaan ayam itu dapat dimanfaatkan dagingnya atau telurnya. Semua itu merupakan hal yang dekat—bahkan melekat—pada sebagian besar masyarakat Jawa.

3. Wujud Pembedaan Konsep Acuan yang Tercermin dalam Kosakata

Satu fenomena yang disebut acuan dari suatu kosakata bahasa Jawa cenderung dibedakan satu dengan lainnya berada berdasarkan pada latar serta keberadaannya. Langkah pembedaan ini merupakan wujud renik pemilihan yang memang berbeda satu sama lain. Adapun wujud konkretnya adalah sebagai berikut. Kata *mangklik-mangklik*, apabila dilihat wujud katanya, keduanya tidak berbeda dan sekaligus mencerminkan perbedaan konsep yang masih dalam satu lingkup konsep yang sama, yaitu "keberadaan". Akan tetapi, apabila pandangan renik kita tujukan kepada fenomena tersebut, tampaklah bahwa fenomena tersebut berkaitan dengan latar keberadaan itu sendiri. Kata *mangklik-mangklik* menggambarkan keberadaan suatu benda yang posisinya nyaris jatuh yang disebabkan oleh letak benda yang posisinya nyaris jatuh atau yang disebabkan letak benda itu sendiri mungkin kurang sempurna menempatkannya atau mungkin pula relatif terlalu tinggi tempatnya sehingga membahayakan keselamatan benda itu.

Adapun kata *mangkruk-mangkruk* menggambarkan fenomena keberadaan suatu benda yang disikapi oleh orang yang melihat atau memandang keberadaan benda itu secara "tidak senang", karena mengganggu pemandangan. Sebagai contoh sebuah gelas (kotor) yang terletak di tengah sebuah meja yang hingga berhari-hari masih tetap di situ—dalam arti gelas itu sudah tidak terpakai lagi—dan keadaan ini membuat suasana tidak sedap dipandang. Gelas tersebut tidak selayaknya berada di tempat itu. Jadi, sebenarnya keberadaan gelas tersebut tidak dikehendaki. Konsep yang serupa dengan yang terkandung dalam kata *mangkruk-mangkruk* adalah konsep yang terkandung dalam kata *thenguk-thenguk*. Namun, kata *thenguk-thenguk* menggambarkan suatu hal yang bukan benda mati melainkan untuk benda hidup, yaitu manusia; seperti *Bocah kok mung thenguk-thenguk bae* (Anak hanya duduk diam, dalam arti tidak mau bekerja).¹

Kata *mangklik-mangklik*, *mangkruk-mangkruk*, *thenguk-thenguk* berbeda dengan kata *tura-turu*, *nongas-nangis*, *ngguya-ngguyu*. Perbedaan yang dimaksud adalah yang satu harus muncul dalam bentuk ulang seperti itu (tidak pernah terdiri hanya satu kata saja, yaitu *mangklik*, *mangkruk*, *thenguk*), sedangkan yang lain dapat muncul sendiri, yaitu *turu* (tidur), *nangis* (nangis), *ngguyu* (tertawa).

Adapun kosakata lain yang menggambarkan fenomena keadaan manusia sebagai pelaku budaya adalah kata *jegagik* yang biasanya muncul sebagai frase dengan kata *mak* menjadi *mak jegagik*. Bentuk tersebut menggambarkan 'keadaan manusia atau pelaku yang terperanjat, kecewa, atau terkejut karena berpapasan'. Dengan kata lain, konsep yang terkandung dalam bentuk tersebut diwarnai oleh peristiwa yang tidak diharapkan atau ditemui secara tiba-tiba, misalnya peristiwa ketika seseorang berjalan dan nyaris menabrak orang lain, atau mendapatkan jalan buntu, atau bertemu dengan seseorang yang tidak dikehendaki. Hal yang serupa dengan bentuk *mak jegagik* adalah *mak clingkrik*, seperti dalam kalimat *Kucing kuwi mak clingkrik munggah meja* (tiba-tiba kucing naik ke meja). *Mak clingkrik* itu menggambarkan peristiwa kucing yang sedang meloncat. Peristiwa ini tidak diinginkan oleh orang yang mengucapkan kalimat itu. Ada pula peristiwa yang diinginkan oleh pembicara, misalnya seseorang yang memerintah kepada adiknya atau temannya agar membonceng sepedanya, perintahnya sebagai berikut. *Mbok wis munggha mak clingkrik ngono bae rak uwis* (ayo lekas naik membonceng). Di sini *mak clingkrik* juga menggambarkan peristiwa naik ke boncengan. Demikian pula bentuk *mak jedhul* (menggambarkan tiba-tiba muncul), *mak tlolor* (menggambarkan tiba-tiba timbul memanjang), *mak byar* (menggambarkan tiba-tiba terang), *mak pet* (menggambarkan tiba-tiba gelap atau tidak pernah datang), *mak sliwer* (menggambarkan keadaan tiba-tiba ada yang melintas cepat).

Bentuk yang mengandung sikap "membedakan" terhadap suatu fenomena tampak pada bentuk yang menggambarkan sesuatu yang jatuh, yakni *mak blug*, *mak gedebug*, *mak tledhik*, *mak kringkel*, *mak dlosor*, *mak srog* atau *mak cengkrek*. Meskipun sikap membedakan terhadap sesuatu itu secara relatif menurut ukuran yang relatif panjang (*mak dlosor*), dan sikap yang memandang keadaan, seperti tiba-tiba jatuh meringkuk (*mak kringkel*), keadaan tiba-tiba jatuh terduduk (*mak srog* atau *mak cegre*), keadaan tiba-tiba melintas (*mak sliwer*).

Ada juga ditemukan kata-kata seperti *pating krembyah* yang menggambarkan 'keadaan orang/hewan banyak bawaandan tidak rapi, banyak rumai-rumbai', dan *mentiyung* menggambarkan dahan yang melengkung (nyaris patah).

Sikap-sikap yang memandang suatu fenomena yang dijadikan acuan dari satu kosakata—yang mungkin muncul sebagai frasa—tidak terlepas dari adat atau budaya yang melingkupinya. Oleh karena itu, apa yang terjadi dalam memandang suatu konsep hingga melahirkan suatu bentuk bahasa—seperti kosakata—tidak terlepas dari budaya yang melingkupinya, dalam kaitan ini budaya yang dimaksud adalah budaya masyarakat Jawa yang melahirkan kata-kata Jawa yang bersifat khas. Kekhasan yang dimaksud—menurut hemat penulis—bentuk-bentuk yang telah dibicarakan sulit dicari padanannya dalam bahasa lain, misalnya bahasa Indonesia. Oleh karena itu,

¹ Kata *thenguk-thenguk* kadang-kadang juga berbentuk *thengik-thengik* pada daerah tertentu.

UPAYA PELESTARIAN DAN PEMERTAHANAN BAHASA DI DAERAH PLURALIS

La Ode Mane Mbeu

(Ketua Ikatan Alumni Pascasarjana (IKALPAS) Unhalu Kendari
dan Kepala SMA Negeri 1 Konda, Konawe Selatan)

1. Pendahuluan

Latar Belakang

Bahasa dalam fungsinya sebagai alat komunikasi tidak mungkin dapat menghindari kontak dengan bahasa-bahasa lain termasuk bahasa asing. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk melestarikan dan mengembangkannya dengan harapan bahasa tersebut tidak punah karena pengaruh kontak dengan bahasa-bahasa lainnya.

Bahasa daerah yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di Indonesia, termasuk di jazirah kabupaten Konawe Selatan tidak luput dari pengaruh yang mungkin saja dapat mengikisnya baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Dalam kaitan ini menjadi sebuah kewajiban moral bagi semua komponen bangsa dan sebagai kebutuhan mendesak untuk menjaga dan melestarikannya, serta mengembangkannya.

Konstitusi negara Republik Indonesia telah menyatakan bahwa bahasa daerah yang dipakai di wilayah negara Republik Indonesia perlu dipelihara. Hal ini jelas tertuang pada pasal 32 (2) bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (<http://imbasadi.blogspot.com/2009/2/>, 14 Juli 2010).

Sehubungan dengan pernyataan ketentuan UUD 1945 di atas, fungsi dan kedudukan bahasa daerah yang sangat urgen untuk pembangunan daerah tidak akan berfungsi signifikan jika hanya sekedar dipelihara sebagai kekayaan bangsa. Akan tetapi, yang tidak kalah pentingnya adalah merevitalisasi pelestarian dan pengembangannya. Hal ini penting oleh karena pengabaian akan hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi bahasa daerah yang tentu saja dapat membawanya pada kepunahan.

Bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional yang hidup dan berkembang senantiasa akan mengalami perubahan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan jaman. Pada era globalisasi saat ini, kecemasan dari berbagai pihak mulai muncul terkait dengan adanya gejala akan punahnya beberapa bahasa daerah yang prosesnya begitu cepat. Alwi (2000) membagi gejala proses kepunahan itu dalam tiga kategori, dua di antaranya perlu diwaspadai. Proses dimaksud adalah: (1) bahasa tersebut tidak lagi dikuasai sehingga tidak dapat digunakan oleh generasi penutur bahasa yang bersangkutan; (2) etnik tertentu tidak lagi menggunakan bahasa daerahnya; dan (3) bahasa yang tidak terancam punah.

Berdasarkan gejala-gejala kepunahan bahasa daerah di atas, maka setidaknya terdapat tiga faktor yang memberikan pengaruh agar bahasa daerah tersebut dapat eksis (bertahan) yaitu: tradisi tulis, gunakan dalam proses pendidikan, dan gunakan sebagai pendukung kebudayaan.

Permasalahan

Permasalahan yang tampak di wilayah Konawe Selatan sebagai salah satu daerah pluralis yang dapat memengaruhi kepunahan bahasa daerah jika diidentifikasi setidaknya terdapat 5 hal. Kelima hal tersebut adalah: (1) sikap generasi muda penutur bahasa daerah yang kurang positif pada bahasa daerahnya; (2) jumlah penutur bahasa daerah etnik tertentu yang relatif sedikit; (3) adanya pengesampingan penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi anggota keluarga yang menikah beda suku; (4) tidak berkembangnya budaya tulis dengan menggunakan bahasa daerah; dan (5) adanya anggapan bahwa bahasa daerah tidak memiliki kegunaan praktis.

Searah dengan hasil identifikasi permasalahan di atas maka yang menjadi fokus bahasan dalam makalah ini adalah upaya apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan dan kebanggaan daerah dan bangsa Indonesia?

Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dari tulisan ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk menyebarluaskan informasi tentang upaya pelestarian dan pemertahanan bahasa yang terkait dengan kebijakan pemerintah di daerah pluralis.
- b. Untuk menyebarluaskan informasi tentang upaya-upaya praktis dalam rangka pelestarian dan pemertahanan bahasa di daerah pluralis.

dapat menetralkan anggapan generasi muda bahwa bahasa daerah tidak berfungsi praktis dan mengatasi salah persepsi tentang peran dan kedudukan bahasa daerah dalam berbagai aspek pembangunan daerah.

Oleh Cafestudi (2010: 1) bahwa usaha-usaha pembinaan dan pengembangan bahasa daerah dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- a. Inventarisasi bahasa daerah, yang dimaksudkan adalah menginventarisasi bahasa daerah dalam segala aspeknya, termasuk pengajaran dan penelitian, perencanaan, pembinaan dan pengembangannya. Kegiatan seperti ini dapat berjalan manakala dijadikan sebagai skala prioritas, dan dilaksanakan atas dasar kerjasama dengan pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, lembaga-lembaga yang relevan, atau perorangan baik di pusat maupun di daerah; tersedia tenaga yang cukup, cakap dan terlatih dalam bidang penelitian bahasa; dan peningkatan mutu pemakaian. Di samping itu perlu disusun dan dilaksanakan program diklat bahasa daerah bagi para pejabat dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten/kota.
- b. Memperkenalkan kepada masyarakat bentuk-bentuk kebudayaan yang ditulis dalam bahasa daerah baik yang lama maupun baru, baik yang bersifat saduran ataupun terjemahan ke dalam bahasa Indonesia.
- c. Mendorong dan merangsang para penulis untuk menulis dan menerbitkan berbagai tulisan berbahasa daerah melalui sebuah proyek dan menyediakan hadiah bagi mereka yang berhasil menyelesaikan tulisan dan atau menerbitkannya.

Menurut Antara (2010: 2) bahwa untuk melestarikan bahasa daerah maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengenalkannya kepada anak-anak sejak dini (<http://www.antarasumut.com>, 14 Juli 2010). Jika mencermati pernyataan ini, sesungguhnya isyarat kuat yang diberikan ialah agar bahasa daerah digunakan dari keluarga, masyarakat, dan pada lingkungan yang lebih luas. Caranya adalah dengan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa utama di samping Bahasa Indonesia dalam keluarga, menggunakan keterangan dua bahasa kemasam bahan dagangan di pasar-pasar, di toko, warung dan lain-lain, serta menggunakan bahasa daerah sebagai pengajaran muatan lokal di kecamatan, desa/kelurahan yang mayoritas etnisnya menggunakan bahasa daerah tertentu tanpa harus dipaksakan untuk mengikuti bahasa daerah dari etnis mayoritas di wilayah kabupaten/kota, melakukan lomba menulis dalam bahasa daerah, dan melakukan kegiatan bercerita dalam bahasa daerah.

Pemertahanan bahasa erat kaitannya dengan kepunahan bahasa akibat interaksi bahasa sehingga terjadi pergeseran bahasa yang perlahan-lahan menuju kepunahan bahasa. Pergeseran bahasa dan kepunahan bahasa sesungguhnya merupakan dua sisi mata uang. Pergeseran bahasa dapat berupa menggeser ke bahasa lain atau bahasa yang tergeser oleh bahasa lainnya.

Menurut Purba (2006: 3) bahwa untuk pemertahanan bahasa daerah, upaya yang dapat dilakukan adalah menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas 1 hingga di kelas 3 Sekolah Dasar, memupuk budaya tradisi daerah dan sastra daerah serta aksara daerah dalam segala bentuknya jika ada. Selanjutnya Thomson dalam Purba (2006: 2) menguraikan bahwa pemertahanan bahasa dapat dilakukan dengan 5 strategi yaitu: (1) menetapkan bahasa secara yuridis, (2) menggunakannya dalam proses pembelajaran, (3) menggunakannya dalam proses pelayanan masyarakat, (4) menetapkannya sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, dan (5) membangun lembaga yang menangani bahasa (<http://imbasadi1993.blogspot.com>, 14 Juli 2010). Hal ini menegaskan bahwa upaya pelestarian bahasa daerah dan pemertahanannya harus digalakan mulai dari bawah hingga ke tingkat penentu kebijakan dan atau sebaliknya.

3. Simpulan dan Saran

Simpulan

Bertolak dari uraian pembahasan yang telah diutarakan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Upaya untuk melestarikan, pemertahanan dan pengembangan bahasa daerah dapat dilakukan melalui berbagai langkah baik yang bersifat kebijakan dan kebijaksanaan maupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan praktis.
- b. Upaya kebijakan dan/atau kebijaksanaan dapat dilakukan antara lain dengan penetapan kedudukan dan fungsi bahasa daerah di dalam peraturan daerah, sedangkan upaya yang bersifat praktis antara lain dapat dilakukan dengan lomba cerita, menulis, dan berpidato bahasa daerah.

Saran

Sesuai dengan rumusan simpulan di atas disarankan hal-hal sebagai berikut.

- a. Kiranya pemerintah daerah dapat berkonsentrasi untuk menjadi upaya pelestarian, pemertahanan, dan pengembangan bahasa daerah sebagai skala prioritas sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing.
- b. Kiranya semua komponen masyarakat daerah terutama etnis penutur bahasa daerah tertentu agar membantu pemerintah melestarikan, memertahankan, dan mengembangkan bahasa daerahnya melalui

**TEMA KETIDAKADILAN GENDER DALAM CERITA RAKYAT MUNA
"WA ODE GINUNDURI" DAN CERITA RAKYAT BALI "TUUNG KUNING"
(KAJIAN SASTRA BANDINGAN)**

**Rahmawati
(Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)**

1. Pendahuluan

Keragaman agama, budaya, bahasa, dan suku bangsa yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia adalah sebuah kekayaan yang harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Keragaman tersebut menjadi identitas masing-masing suku bangsa. Perbedaan identitas yang ada bukan untuk memperuncing perbedaan budaya yang ada antara satu suku dengan suku lainnya, tetapi semakin menunjukkan keunikan budaya sekaligus memperkaya kebudayaan bangsa. Identitas yang beragam dapat ditelusuri pertalian atau benang merah. Salah satunya dengan menelusuri dan mempertemukan hasil-hasil kesusastraan masing-masing. Sastra daerah adalah salah satu warisan budaya daerah yang berkembang dalam masyarakat pendukungnya. Keberadaannya dapat menjadi salah satu sumber daya untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional. Pemahaman terhadap aspek-aspek yang terdapat dalam sastra daerah sebuah suku bangsa akan memudahkan untuk lebih mengenali dan memahami pandangan dan perilaku masyarakat pendukungnya.

Salah satu jenis sastra daerah yang banyak tersebar di setiap suku bangsa di Indonesia adalah cerita rakyat. Sebagai kekayaan sastra, sekaligus kekayaan budaya, cerita rakyat tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga dapat memberikan sesuatu yang bernilai bagi kehidupan. Dalam kapasitasnya sebagai kekayaan budaya dapat dipastikan bahwa cerita rakyat sarat dengan ide-ide yang positif, buah pikiran yang luhur, dan pengalaman jiwa yang berharga.

Ada kalanya sebuah cerita rakyat dengan motif yang sama bisa dijumpai di daerah lain. Misalnya cerita yang bermotif penipuan yang tokoh utamanya bukan kancil yaitu cerita rakyat Brunei Darussalam berjudul "Anak Saudagar Memilih Jodoh", cerita Rakyat Minangkabau berjudul "Umbuak Dibalah Umbuak" (Tipu dibalas dengan tipu), "cerita rakyat Melayu di Indonesia berjudul," Babi, Rusa, Kijang, dan Kera". Demikian halnya dengan dua cerita rakyat yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini yakni cerita rakyat Muna "Wa ode Ginunduri" dan cerita rakyat Bali "Tuung Kuning". Kedua cerita ini memiliki banyak persamaan baik dari segi tema cerita maupun dari struktur cerita yang lainnya. Kedua cerita menarik untuk dibandingkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya.

Mengenai persamaan dan perbedaan, kedua cerita rakyat ini akan dikaji dengan menggunakan teori sastra bandingan. Hakikat kajian sastra bandingan adalah mencari perbedaan atau kelainan, di samping persamaan atau pertalian antara dua atau lebih teks sastra. Menurut Rene Wellek (1989:47-50) salah satu kajian sastra bandingan adalah kajian sastra lisan, khususnya cerita rakyat dan migrasinya serta bagaimana dan kapan cerita rakyat itu masuk ke dalam penulisan secara lebih artistik. Lebih lanjut, Wellek mengemukakan bahwa dalam praktiknya istilah sastra bandingan menyangkut studi hubungan antara dua kesusastraan atau lebih. Pengertian sederhana itu juga dapat diartikan sebagai studi dengan masalah-masalah lain di dalam sastra. Studi banding ini umumnya membahas mengenai relasi di antara dua buah karya sastra yang berbeda budaya, tetapi memiliki kesejajaran baik dari segi bentuk maupun isi.

Idealnya, karya-karya yang digunakan dalam telaah bandingan dibaca dalam bahasa aslinya sehingga bisa diperoleh ilustrasi budaya yang tepat dalam mencapai kesimpulan. Tetapi karya dalam bahasa terjemahan pun bisa dijadikan objek penelitian bandingan asalkan penelitian yang dilakukan tidak menyentuh masalah stilistika. Dengan menggunakan terjemahan kita masih bisa membandingkan kecenderungan tematik dan aspek lain di luar gaya bahasa dalam karya-karya yang kita bandingkan (Damono, 2005:12).

Karya-karya sastra dari berbagai daerah dapat dijadikan sebagai sarana untuk lebih memahami sistem perilaku, agama, adat istiadat, politik, dan unsur budaya lainnya. Melalui kajian bandingan, persamaan yang dimiliki oleh tiap daerah dapat ditonjolkan untuk menghindari timbulnya perpecahan.

2. Tinjauan Isi Cerita

2.1 Sinopsis Wa ode Ginunduri

Cerita rakyat Muna ini terdapat dalam buku Cerita Rakyat Sulawesi Tenggara (Mitologis dan Legendaris) disusun oleh Tim Proyek dan Pencatatan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1978/1979.

Ringkasan isi ceritanya sebagai berikut.

Wa ode Ginunduri adalah putri seorang kepala negeri. Sewaktu ia dihamilkan, ayahnya akan bepergian. Sebelum berangkat kepala negeri berpesan, apabila kelak anaknya lahir laki-laki hidupilah, dan kalau ia

perbuatannya yang sangat kejam terhadap anak perempuannya. Ia mulai menyadari bahwa ternyata anak perempuan pun dapat berguna sebagaimana halnya dengan anak laki-laki. Anak perempuannya telah berhasil membuat sebuah pakaian yang sangat dibutuhkan oleh orang lain. Setelah menyadari kesalahannya itu, ayahnya merasakan kesedihan yang sangat dalam dan membuatnya jatuh sakit.

Sementara itu, seorang nenek yang sudah tua bangka datang ke rumah kepala kampung untuk mengambil api. Saat itu dilihatnya ada bangkai anak manusia di bawah tangga yang sudah terpotong-potong. Kemudian bangkai tersebut diambilnya, lalu dibawa ke rumahnya dan disimpan dalam peti. Setiap malam senin dan jumat bangkai itu diperiksanya dan diberinya kemenyan selama seminggu. Pada malam jumat terakhir, ia membuka kembali peti itu dan ternyata bangkai yang telah terpotong-potong tadi telah bersambung kembali dan Wa Ode Ginunduri hidup kembali. Wa Ode Ginunduri hanya merasa bangun dari tidur yang sangat panjang. Ketika ia bangun, ia merasa sangat lapar, namun nenek tidak mempunyai makanan kecuali sebutir telur. Wa Ode Ginunduri menggenggam telur itu dan meniatkan segala apa yang diinginkannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Semua keinginan yang diniatkan olehnya dikabulkan. Akhirnya Wa Ode Ginunduri dan nenek dapat hidup bahagia dengan segala kemewahan.

2.2 Sinopsis Tuung Kuning

Cerita Tuung Kuning dimuat dalam buku kumpulan cerita berjudul *Kembang Rampe Kasustraan Bali Purwa*, diterbitkan oleh Balai Bahasa Denpasar tahun 1978. Sinopsis ceritanya adalah sebagai berikut.

Cerita *Tuung Kuning* mengisahkan tentang seorang penjudi bernama I Puduk. Setiap Dia sangat sering menang dalam taruhan. Mulanya, ia hanya memiliki dua ekor ayam taruhan, namun karena sering menang, jumlah ayamnya semakin banyak. Saking banyaknya, istrinya sudah tidak sanggup lagi memeliharanya. Apalagi dalam kondisi sang istri tengah hamil besar.

Suatu hari I Puduk hendak berjudi ke sebuah tempat yang berada di sebelah utara gunung. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada istrinya, jika melahirkan bayi laki-laki hendaknya dipelihara dengan baik dan apabila bayi yang lahir perempuan hendaknya dibunuh dan dagingnya diberikan kepada ayam peliharaannya. Setelah berpesan demikian, I Puduk kemudian pergi meninggalkan istrinya.

Tidak berapa lama kemudian, istri I Puduk melahirkan seorang bayi perempuan. Sang ibu sangat gundah dan sedih hatinya. Dia tidak tega melihat anaknya dibunuh oleh sang suami. Dia kemudian pergi ke rumah orang tuanya guna menitipkan bayinya agar selamat dari maut. Setelah itu sang ibu kembali ke rumah seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tiap hari ia melihat putrinya ke rumah orang tuanya. Bayi itu diberi nama I Tuung Kuning. Semakin hari anak itu tumbuh semakin besar dan akhirnya menjadi seorang gadis dan pandai menenun.

Sementara itu, diceritakan I Puduk telah kembali dari perjalanannya berjudi. Setibanya di rumah ia langsung menanyakan keberadaan anaknya. Dengan terbata-bata sang istri menjawab bahwa yang dilahirkannya berjenis kelamin wanita dan sudah direcah untuk ayam taruhannya. Pada saat sang istri berkata seperti itu, salah satu ayam berkokok bahwa yang dilahirkan telah ditiptkan pada neneknya, sedangkan yang direcah hanya ar-arinya. I Puduk kembali mendengarkan secara saksama kokokan ayamnya dan suara seperti itu terulang kembali. I Puduk segera memanggil istrinya dan mempertanyakan keberadaan anak perempuan yang dilahirkannya. Sang istri terdiam dan ketakutan. I Puduk mengancam istrinya apabila tidak mau berterus terang. Tanpa daya kemudian sang istri terpaksa menjelaskan semuanya. Ketika itu pula I Puduk menyuruh istrinya untuk menjemput putri mereka. Sang istri berangkat ke rumah orang tuanya dengan perasaan hancur. Setibanya di sana, dilihatnya sang anak tengah menenun. Mereka kemudian berpamitan kepada sang nenek. Nenek tua itu dengan sedih melepas kepergian cucu yang sejak bayi dipeliharanya.

Setibanya di rumah, I Puduk tercengang melihat anak yang baru pertama kali dilihatnya. Dia kemudian mengajak Tuung Kuning pergi ke sebuah hutan. Setibanya di sebuah pohon besar, I Puduk kemudian mengutarakan niatnya untuk membunuh I Tuung Kuning. Dia menghunus sebilah prang lalu mengayunkannya ke tubuh sang putri. Ajaib sekali, I Tuung Kuning diselamatkan oleh bidadari dan menerbangkannya ke sorga. I Puduk tidak menyadari bahwa yang ditebas hanyalah sebatang pisang. Dia tetap melihat pohon itu bagaikan tubuh putrinya. Setelah selesai merecah batang pisang itu, I Puduk kemudian kembali ke rumahnya dan membagikan recahan batang pisang itu kepada semua ayamnya. Setelah memakan recahan pohon itu, semua ayamnya mati. Kejadian-kejadian itu ternyata memulihkan ingatan I Puduk. Akhirnya, ia sadar menyesali perbuatannya, dan terus menyebut putrinya.

Sementara itu, I Tuung Kuning telah berada di sorga dan selalu sedih memikirkan ayahnya yang konon tidak makan dan minum memikirkan dirinya. Atas dasar kasihan, dia memohon kepada dewata surga agar berkenan mengembalikan dirinya ke dunia menemui kedua orang tuanya. Para dewata pun mengabulkannya dan membawa I Tuung Kuning kembali kepada orang tuanya. Ayah dan ibunya sangat bahagia melihat anaknya kembali.

Kedatangan Tuung Kuning terdengar sampai ke istana. Sang raja berkeinginan melihat rupa seorang gadis yang pernah melihat surga dan berhadapan dengan para dewa. Melihat keberadaan Tuung Kuning, akhirnya sang raja terpicik dan kemudian meminangnya.

melakoni pekerjaan menenun sebagai pekerjaan sambilan sejak dahulu. Masyarakat Bali sejak dahulu sudah menanam kapas yang diolah menjadi benang kemudian dijadikan kain.

Struktur sosial masyarakat Bali dan masyarakat Muna menampakkan bentuk dan susunan yang sama yakni bersifat feodal. Hal seperti ini, sangat kuat memengaruhi sebuah daerah bekas kerajaan. Masalah penamaan tokoh utama dalam kedua cerita menyoroti pada status sosial yang dimiliki oleh tokoh. Dalam masyarakat Muna seorang anak perempuan yang berasal dari golongan *kaomu dan walaka* berhak memakai nama Wa Ode di depan namanya. Dalam cerita WG, nama tokoh utama menunjukkan status sosialnya sebagai anak seorang kepala negeri. Demikian halnya dalam masyarakat Bali, ada tiga pelapisan sosial secara tradisional, yakni *brahmana, Ksatria, wesia, dan sudra*. Aturan-aturan dalam pemberian nama sesuai kelas sosialnya di masyarakat. Adapun nama Tuung Kuning adalah nama yang sering dipakai oleh kelompok masyarakat biasa. Tokoh Tuung Kuning lahir dari seorang rakyat biasa.

2) Latar cerita

Penyebutan latar tempat terjadinya peristiwa terdapat perbedaan. Cerita WG menyebut nama tempat pengasingan tokoh Wa Ode Ginunduri yakni sebuah gunung yang disebut gunung Wasindori-dori. Dalam cerita TK tidak disebutkan nama tempat yang menjadi latar cerita. Latar yang disebut dalam TK hanya sebuah tempat perjudian yang berada di sebelah utara gunung,

3) Alur

Kedua cerita memiliki alur yang sama. Cerita diawali dengan kepergian kedua tokoh bapak meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua. Sebelum berangkat, keduanya berpesan kepada istrinya agar membunuh bayinya apabila berjenis kelamin perempuan. Kedua tokoh ibu berusaha menyelamatkan putri mereka dengan mengungsikannya ke tempat lain kemudian melaporkan kepada suami mereka bahwa anak perempuannya sudah dibunuh. Klimaks cerita terjadi pada saat kedua tokoh bapak kembali dan mengetahui bahwa istrinya telah berbohong. Dalam WG kebohongan sang istri terbongkar dari seekor burung Bubu yang lupa diberi makan. Sedangkan dalam cerita TK kebohongan ibu Tuung Kuning diketahui dari seekor ayam peliharaan suaminya.

Setelah mengetahui kebohongan tersebut, kedua tokoh bapak menjadi murka dan berusaha mencari tahu tempat persembunyian anaknya untuk dibunuh. Pada akhir cerita dikisahkan, Wa Ode Ginunduri dapat dihidupkan kembali setelah ditolong oleh seorang nenek, dan Tuung Kuning ditolong oleh seorang bidadari. Akhirnya, keduanya hidup dengan bahagia. Bapak Wa Ode Ginunduri meninggal karena penyesalan yang dalam, sedangkan bapak Tuung Kuning hidup bersama dengan anaknya.

4) Tema dan amanat cerita

Shipley (dalam Burhan, 2006) mengartikan tema sebagai subjek wacana, topik umum, atau masalah utama yang dituangkan dalam cerita. Tema menjadi dasar untuk menyusun atau mengembangkan sebuah cerita. Kedua cerita rakyat ini mempunyai tema yang sama, yakni ketidakadilan gender. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial budaya, misalnya laki-laki dianggap dianggap kuat, jantan, perkasa, dan rasional, sedangkan perempuan dianggap lembut, cantik (indah), keibuan, dan irasional. Gender mengacu pada perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis adalah perbedaan jenis kelamin (*sex*) yang merupakan kodrat Tuhan, dan oleh karenanya secara permanen berbeda. Gender mencakup perbedaan perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Oleh karena itu, gender berubah dari masa ke masa.

Dalam kedua cerita, ketidakadilan gender dapat dilihat dari tindakan kedua tokoh laki-laki yang menempatkan para tokoh wanita dalam cerita sebagai "objek". Ukuran ketidakadilan itu muncul dalam bentuk subordinasi, stereotif, dan kekerasan. Dominasi laki-laki terhadap perempuan sudah terlihat sejak awal cerita. Pada saat-saat istrinya sedang hamil tua, menantikan kelahiran anaknya keduanya mengadakan perjalanan. Kepergian kedua suami tersebut meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap perempuan. Seorang perempuan yang sedang dalam keadaan hamil sangat membutuhkan kehadiran seorang suami untuk berbagi suka dan duka.

Sebelum berangkat, keduanya berpesan agar membunuh anaknya jika anak yang dilahirkannya perempuan sedangkan apabila yang lahir laki-laki hendaknya dihidupi. Perintah suami kepada istri untuk membunuh anak perempuannya menunjukkan dominasi suami terhadap istrinya. Baginya istri tidak punya hak apapun terhadap anak-anaknya. Tugas seorang istri hanya melahirkan anak dan mengikuti semua perintah suami. Penolakan Kepala Negeri terhadap kehadiran seorang bayi perempuan dalam keluarganya tidak diungkapkan secara implisit dalam cerita. Namun, dari keseluruhan jalinan cerita diketahui bahwa bagi Kepala Negeri anak laki-laki dapat lebih berguna daripada anak wanita. Selain itu bagi Kepala negeri anak laki-laki dapat menjadi pewaris kedudukan dan jabatannya sebagai kepala negeri. Anggapan bahwa anak perempuan tidak berguna adalah suatu kekeliruan. Wa Ode Ginunduri dapat membuktikan bahwa meskipun dirinya seorang perempuan, tetap dapat berguna bagi orang lain. Dengan tekun ia dapat menenun biji kapas yang ditemukannya di pinggir jalan menjadi pakaian untuk ayahnya. Pakaian merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Disamping dapat melindungi dari segala cuaca juga dapat menjaga adab kesopanan. Kemampuan Wa Ode Ginunduri

mahluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Binatang seperti ayam diciptakan dan dipelihara untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam konteks kebudayaan Bali yang patrilineal kondisi ini mencerminkan inferioritas wanita (wanita adalah nomor dua dibanding laki-laki).

Persamaan universal yang terlihat dalam kedua cerita adalah sikap seorang ibu kepada anaknya. Di bagian dunia manapun seorang ibu tidak akan rela melihat anaknya disiksa atau pun dibunuh. Seorang ibu akan berusaha berbuat apa saja agar anaknya dapat selamat. Demikian pula dengan kedua tokoh ibu dalam cerita, meskipun mendapat ancaman dari suaminya, mereka tetap berusaha menyelamatkan anaknya seperti yang dilakukan oleh kedua tokoh ibu dalam WG dan TK. Persamaan lainnya adalah kedua tokoh anak memiliki keterampilan yang sama yakni menenun. Hal ini menunjukkan bahwa pada zaman dahulu pekerjaan menenun dianggap sebuah pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh seorang anak perempuan.

Amanat kedua cerita ini adalah hendaknya kita tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada anak-anak kita baik laki-laki maupun perempuan. Tuhan menciptakan manusia dengan harkat dan martabat yang sama. Pendidikan formal dan informal yang diterimanya akan menempa setiap pribadi untuk menjadi orang yang berbakti bagi bangsa, negara, dan agama.

3. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuat simpulan sebagai berikut. Cerita WG dan cerita TK adalah dua buah cerita rakyat yang mempunyai struktur cerita yang sama. Kedua cerita dibungkus dengan tema yang sama yakni ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender yang dapat dilihat dalam kedua cerita dapat dilihat dari perilaku kedua tokoh laki-laki yang berperan sebagai suami dan ayah dalam cerita. Tindakan ketidakadilan terhadap perempuan meliputi subordinasi dan kekerasan. Salah satu penyebab timbulnya perilaku yang menempatkan perempuan sebagai "objek" laki-laki masih adalah kentalnya budaya patriarkhal yang mewarnai kehidupan masyarakat Muna maupun masyarakat Bali. Perempuan dalam budaya patriarkhal menjadi subordinasi kaum laki-laki lebih.

Daftar Pustaka

- Bagus, I Gusti Ngurah dan I Ketut Ginarsa. 1978. *Kembang Rampe Kasustraan Bali Purwa*. Singaraja : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Damono, Sapardi Djoko. 2005. *Pegangan Penelitian Sastra Bandingan*. Jakarta. Depdiknas. Pusat Bahasa.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1978/1979. *Cerita Rakyat Sulawesi Tenggara (Mitologis dan Legendaris)*. Proyek-Proyek dan Pencatatan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya.
- Nurgiyantoro, Burhan. 2006. *Teori Pengkajian Fiksi*. Gajah Mada University.
- Wellek, Rene dan Austin Warren. 1989. *Teori Kesusasteraan*. Diindonesiakan oleh Melani Budianta. Jakarta. Gramedia.

Awal tercipta dan penggunaan kedua bahasa ibu, yaitu bahasa Bugis dan bahasa Makassar, pada dasarnya hanya sebatas masing-masing kelompok etnis pendukungnya. Misalnya, bagi kelompok suku bangsa Bugis atau disebut juga orang Bugis, tentu dengan bahasa Bugisnya. Begitu pula untuk kelompok suku bangsa Makassar atau disebut juga orang Makassar, tentu dengan bahasa Makassar. Hanya saja, dalam melihat perkembangan zaman, kedua kelompok bahasa lokal dimaksud, yaitu bahasa Bugis dan Makassar penggunaannya tidak lagi terpatok pada kelompok masyarakat yang disinyalir sebagai pemilik. Tetapi dalam hal ini semua orang bisa mengetahui, mengerti hingga sampai pada tatanan menggunakannya, terutama ke arah usaha membangun sebuah kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Apalagi ketika masyarakat dimaksud tumbuh dan berkembang pada sebuah wilayah berpenduduk multikultural, tentu ada bahasa lokal yang menjadi populer, selain Bahasa Indonesia yang sudah dicaplok sebagai bahasa untuk semua masyarakat Indonesia.

2. Tentang Bahasa Daerah Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan

Sekilas Hadirnya Bahasa Daerah Bugis dan Makassar

Banyak pendapat para ahli dalam menyorot tentang penemuan atau penciptaan kedua aksara lontara dimaksud, yaitu Bugis-Makassar. Misalnya, oleh Ahmad (2009) dikatakan bahwa aksara lontara Bugis dan Makassar berasal dari aksara sansekerta yang mengalami penyerderhanaan pada abad ke-16 Masehi, oleh seorang Syahbandar bernama Daeng Pamatte dari Kerajaan Gowa. Saat itu tampuk kerajaan atau pemerintahan kerajaan Gowa dipimpin oleh Karaeng Tumapakrisik Kallonna. Pendapat Kern (dalam Ahmad, 2009) mengatakan bahwa tulisan Bugis-Makassar bersumber pada huruf *dewanagari* (sansekerta). Pendapat Kern lebih diperkuat oleh Nakanishi (dalam Ahmad, 2009) yang mengatakan bahwa aksara lontara berasal dari tulisan India (*Indian scripts*).

Lain lagi dengan pendapat para budayawan Indonesia, khusus budayawan yang tergolong ke dalam kelompok etnis suku bangsa Bugis-Makassar. Para budayawan tersebut mengungkapkan pendapatnya bahwa aksara Lontara merupakan aksara asli dari komunitas pendukungnya, yaitu suku bangsa Bugis dan Makassar. Justru aksara Lontara sebagaimana dikenal, bukan merupakan pencampuran atau asimilasi budaya masyarakat lain. Mattulada (2006) mengatakan bahwa Lontara itu lahir terkait dengan pandangan mitologi orang Bugis-Makassar yang mengatakan bahwa alam semesta ini sebagai "*sulapak eppa walasuji*", yang berarti bentuknya segi empat belah ketupat. Itulah sebabnya ketika kata *walasuji* diasumsikan sebagai sebuah konsep, kata *walasuji* itu sendiri berasal dari kata *wala*, yaitu sejenis pagar, pemisah, dan penjaga, sedangkan kata *suji* itu sendiri, berarti putri.

Fungsi dan Peran Bahasa Daerah Bugis dan Makassar

Dahulu, kedua bahasa daerah yang dijadikan sorotan dalam tulisan ini, yaitu Bahasa Bugis dan Bahasa Makassar, merupakan sebuah media atau alat komunikasi yang bersifat lokal. Kedua jenis bahasa ini diketahui berperan sangat penting, terutama dalam usaha membangun kehidupan masyarakat pendukungnya ke arah yang lebih presentatif. Salah satu bentuk kegiatan yang dianggap lebih presentatif waktu itu adalah usaha mengembangkan berbagai konspirasi kebudayaan pada dua suku bangsa pendukungnya, yaitu Suku Bugis dan Makassar dengan menggunakan bahasa pengantar adalah Bahasa Bugis dan Bahasa Makassar sesuai wilayah sebarannya.

Artinya, untuk area pengembangan kebudayaan Bugis, Bahasa Bugislah yang dijadikan alat penghubung. Sebaliknya, ketika area yang dijadikan sasaran pengembangan adalah kelompok Suku Makassar, yang dijadikan alat penghubung atau bahasa pengantar adalah Bahasa Makassar. Kedua bahasa daerah dimaksud posisinya sangat penting karena keduanya berada pada posisi yang spesifik dibanding dengan bahasa-bahasa daerah lain, khususnya yang berada di wilayah Sulawesi Selatan, seperti bahasa Toraja, termasuk bahasa Mandar yang sebelum terjadi pemekaran wilayah juga berada dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi seperti ini dimungkinkan karena kedua bahasa ini hadir pada tatanan dengan ciri tersendiri, yaitu sebagai bahasa yang terlahir dan berdiri dengan sebuah kekuatan atas kepemilikan aksara khusus yang disebut aksara *lontaraq* (lontara). Aksara Lontara yang kita kenal, awal kelahirannya disebut aksara Bugis-Makassar karena suku lain boleh dikatakan tidak memilikinya.

Orang Bugis menyebut bahasanya dengan sebutan *bahasa ugi*, tulisannya disebut "*uki ugi*". Sedangkan bagi orang Makassar menyebut bahasanya sendiri dengan sebutan *bahasa mangkasara*, tulisannya "*ukiran mangkasara*", (Ahmad, 2009). Lea Pamungkas mengatakan bahwa Matthes mengumpulkan demikian banyak naskah kesusastraan di daerah persebaran kedua suku bangsa dimaksud, yaitu Bugis dan Makassar dalam bentuk lontara dan bentuk buku dari bahan kertas. Satu naskah di antaranya adalah naskah *La Galigo* atau sebutan lokalnya adalah *sure' Galigo*. *Sure'* dimaksud ini adalah berisi himpunan cerita mitologi yang oleh banyak orang, khususnya bagi orang Bugis-Makassar, dianggap memiliki nilai keramat. Dalam naskah lainnya yang memuat kumpulan amanat dan nasihat nenek moyang disebut *rapang*, yang berisikan undang-undang dan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin adat (Lea Pamungkas, 1977).

Dahulu, dalam usaha memasyarakatkan bahasa Bugis dan Makassar, terutama yang erat kaitannya dengan dunia pendidikan formal, masih terlihat menjanjikan. Sebab posisi bahasa daerah beberapa tahun silam, selain digunakan sebagai bahasa pengantar dalam berbagai momen pelaksanaan kegiatan seperti diungkapkan sebelumnya, bahasa daerah masih menjadi perhatian setiap pengambil kebijakan dalam dunia pendidikan formal. Dalam usaha mempekenalkan bahasa daerah, khususnya bahasa daerah Bugis dan Makassar di kalangan anak didik sesuai wilayah persebarannya ketika itu, para penyusun kurikulum mata pelajaran setiap tahunnya tetap memberi porsi sebagai mata pelajaran yang tidak dibedakan dengan mata pelajaran lainnya. Dengan termuatnya dalam mata pelajaran bahasa daerah, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah lanjutan tingkat atas, setiap anak usia sekolah dapat mempelajarinya seperti saat mempelajari mata pelajaran lain. Artinya, dengan memasukkan bahasa daerah dalam mata pelajaran di setiap jenjang sekolah, hasil yang paling minimal didapatkan setiap anak yang menjadi generasi penerus adalah masih adanya bentuk rangsangan dalam usaha mengetahui bahasanya sendiri.

Memasuki sebuah masa yang dikenal dengan era globalisasi, harapan-harapan mempertahankan keutuhan bahasa daerah, khususnya bahasa daerah Bugis dan Makassar, dewasa ini berada dalam kondisi memprihatinkan. Padahal kedua bahasa daerah ini merupakan aset budaya yang perlu mendapat perhatian dalam usaha melestarikannya. Namun kenyataannya, apa yang menjadi harapan kita semua, justru kedua bahasa daerah ini justru mendapatkan perlakuan atau porsi yang kurang baik jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dalam dunia pendidikan.

Adapun wujud yang paling mendasar sehingga bahasa daerah kurang mendapat perhatian untuk dilestarikan, terutama yang terkait dengan dunia pendidikan formal, adalah terjadinya pengurangan jam belajar di setiap jenjang pendidikan, khususnya di jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Bahkan, pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), mata pelajaran bahasa daerah sama sekali tidak dimasukkan lagi dalam kurikulum mata pelajaran, yang sebelumnya diketahui masih menjadi salah satu mata pelajaran pada setiap jurusan. Khusus di perguruan tinggi tertentu, walau jurusan bahasa daerah tetap dibuka, jurusan dimaksud tidak berkembang seperti jurusan-jurusan lainnya karena kurang diminati.

Faktor Lingkungan Keluarga/Rumah Tangga

Lingkungan keluarga, dalam hal ini rumah tangga, merupakan sebuah lembaga non-formal. Lembaga terkecil itu berfungsi sebagai tempat pembinaan awal (*basic training*) terhadap masing-masing anggota keluarga. Sebab dalam lembaga ini diketahui bernaung kedua orang tua sebagai pembina dan sang anak sebagai orang yang membutuhkan pembinaan dasar sebelum memasuki jenjang pendidikan formal. Rumah tangga inilah yang menjadi tempat pembangun dan pengenalan karakter anggota keluarga.

Dalam fungsinya sebagai lembaga pembinaan awal, rumah tangga erat kaitannya dengan pelestarian bahasa daerah. Kenyataannya dewasa ini boleh dikatakan tidak berfungsi lagi secara maksimal seperti dulu. Terjadinya kondisi seperti ini diakibatkan berbagai faktor. Salah satu faktor yang dianggap paling menonjol adalah gensi sosial. Artinya, seorang anggota keluarga, dalam hal ini seorang anak, yang sudah mengenyam pendidikan di kota-kota besar dijejali dengan Bahasa Indonesia, khususnya di perguruan tinggi, yang secara langsung dapat memengaruhi lingkungan keluarga, terutama dalam bertutur sapa.

Salah satu contoh mendasar adalah ketika sang anak tersebut kembali ke kampung halamannya akan merasa gensi lagi kalau menggunakan bahasa daerahnya yang sudah lama dikuasainya. Tetapi anak yang bersangkutan justru berusaha lebih memopulerkan Bahasa Indonesia yang digunakan di dunia tempat yang bersangkutan mengenyam pendidikan, baik di lingkungan masyarakat terlebih lagi di lingkungan keluarganya sendiri. Kondisi seperti inilah yang menjadi salah satu unsur penyebab bahasa daerah kurang berkembang. Sebab orang-orang yang diharapkan memopulerkan bahasa daerahnya sendiri, justru membatasi penggunaan bahasa daerahnya sendiri.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kurang berkembangnya bahasa daerah, khususnya bahasa daerah Bugis-Makassar, disebabkan oleh bahasa daerah yang tidak diberi porsi, minimal sejajar dengan Bahasa Indonesia. Misalnya, di lingkungan pendidikan formal dewasa ini, terutama tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, porsi pembelajaran bahasa daerah justru mengalami pengurangan jam belajar. Bahkan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, justru dihilangkan sama sekali sebagai mata pelajaran bahasa daerah sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Selain faktor pendidikan, faktor gensi sosial juga sangat memengaruhi kurang berkembangnya penggunaan bahasa daerah. Misalnya, setiap orang yang merasa diri hidup dalam dunia modern akan merasa gensi ketika dalam lingkungan masyarakat, khususnya di lingkungan rumah tangganya, menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa dalam bertutur sapa. Ereka merasa lebih terhormat ketika dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia.

SISTEM AFIKSASI NOMINA DALAM BAHASA MUNA DIALEK MAWASANGKA

Aji Prasetyo
(Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara)

1. Pendahuluan

Bahasa Muna dialek Mawasangka termasuk salah satu bahasa daerah yang menjadi alat komunikasi bagi masyarakat penuturnya yang mendiami bagian selatan Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Pemakai bahasa ini tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Gu, Kecamatan Lakudo, dan Kecamatan Mawasangka itu sendiri. Ketiga wilayah itu biasa disebut dengan istilah Gulamas. Seperti halnya bahasa Indonesia, bahasa Muna dialek Mawasangka juga mengenal kelas kata nomina atau kata benda.

Dalam bentuk tulisan, bahasa Muna dialek Mawasangka memang sudah jarang digunakan dalam surat-menyurat. Tulisan yang berbahasa Muna dialek Mawasangka lebih banyak ditemukan dalam naskah-naskah lama. Akan tetapi, dalam bentuk lisan, bahasa Muna dialek Mawasangka masih hidup dan berkembang di antara penutur-penutur bahasa Muna. Oleh karena itu, sangat diperlukan penelitian yang memfokuskan pada salah satu kategori kata yang dalam penelitian ini lebih difokuskan pada kategori nomina. Nomina mempunyai frekuensi pemakaian yang cukup tinggi karena dalam fungsi kalimat dapat menduduki fungsi subjek, objek, dan pelengkap.

Afiks adalah sebuah bentuk, biasanya berupa morfem yang diimbuhkan pada sebuah dasar dalam proses pembentukan kata (Chaer, 2003: 177). Afiksasi merupakan satu di antara beberapa proses morfologi, yakni proses yang mengubah leksem menjadi kata kompleks. Dalam proses ini, afiks berperan sebagai alat pembentuk kata. Afiks tersebut kemudian melekat pada bentuk dasar tertentu. Nomina sebagai kategori kata dapat terbentuk melalui proses ini. Baik alat pembentuk maupun bentuk dasar dalam proses morfologi sama-sama berstatus sebagai morfem. Dalam pelekatan kedua morfem tersebut menjadi satu satuan dapat terjadi proses yang disebut proses morfofonemik. Proses morfofonemik merupakan peristiwa yang terjadi karena pertemuan morfem dengan morfem (Kridalaksana, 1993: 183).

Proses morfologi mempunyai fungsi gramatikal dan fungsi semantik. Fungsi gramatikal adalah fungsi yang berhubungan dengan ketatabahasaan, sedangkan fungsi semantik adalah fungsi yang berhubungan dengan makna (Ramlan, 1997: 106).

Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari kalimat. Dalam penelitian inidibahas juga mengenai fungsi nomina dalam bahasa Muna dialek Mawasangka jika digunakan dalam kalimat. Selain itu, digunakan teori semantik untuk menganalisis makna afiks-afiks pembentuk nomina dalam bahasa Muna dialek Mawasangka.

2. Nomina Bahasa Muna Dialek Mawasangka

2.1 Ciri Nomina dalam Bahasa Muna Dialek Mawasangka

Ciri nomina dapat diketahui dengan cara mengamati tiga hal, yaitu ciri morfologis, ciri sintaksis, dan ciri semantisnya.

2.1.1 Ciri Morfologis

Berdasarkan ciri morfologis, kata-kata yang dikategorikan sebagai nomina dalam bahasa Muna dialek Mawasangka adalah kata-kata yang mengandung afiks yang berupa prefiks, seperti *o-*, *ka-*, *se-*, *ne-*, *be-*, *sao-*, *kao-*, *noko-*, *manso-*, *kafo-*, *nefo-*, *nefeka-*, dan *kafoko-*. Di samping itu, ada juga afiks yang berupa konfiks, seperti *po-no*, *me-no*, *ko-no*, *ka-a*, *kao-a*, dan *be-no*. Ada juga sufiks, tetapi jumlahnya terbatas, seperti *-i* dan *-no*. Selain itu, ada juga gabungan infiks dan sufiks, yaitu *-um-no*.

Nomina yang diturunkan dengan menggunakan prefiks *o-* banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh:

beka 'kucing' → *obeka* 'kucing'
galu 'kebun' → *ogalu* 'kebun'

Prefiks *o-* dapat juga bergabung dengan bentuk dasar verba dalam membentuk nomina. Akan tetapi, prefiks *o-* ini harus didampingi perefiks *ne-* atau *ka-* sehingga menjadi prefiks rangkap *one-* atau *oka-*.

Contoh:

oli 'beli' → *oneoli* 'yang dibeli'
sapu 'jahit' → *onesapu* 'yang dijahit'

Nomina yang diturunkan dengan prefiks *ka-* sangat produktif karena kata dasarnya dapat berupa nomina, verba, dan adjektiva.

Penurunan nomina dengan menggunakan prefiks *nefeka-* hanya dapat terjadi pada kelas kata dasar adjektiva. Nomina yang diturunkan dengan prefeks ini termasuk tidak banyak ditemukan.

Contoh:

moinda 'jernih' → *nefekamoinda* 'sesuatu yang dijernihkan'

lola 'tinggi' → *nefekalola* 'sesuatu yang ditinggikan'

Seperti halnya dengan prefiks *nefeka-*, prefiks *kafoko-* hanya dapat membentuk nomina jika didampingi dengan kelas kata dasar adjektiva.

Contoh:

ndeli 'licin' → *kafokondeli* 'alat pelicin'

kumpe 'kental' → *kafokokumpe* 'alat pengental'

Seperti halnya dengan prefiks *nefeka-* dan *kafoko-*, penurunan nomina dengan menggunakan prefiks *kafeka-* hanya dapat dilakukan jika didampingi dengan bentuk dasar adjektiva.

Contoh;

bala 'besar' → *kafekabala* 'alat pembesar'

suhe 'cantik' → *kafekasuhe* 'alat kecantikan'

Penurunan nomina dengan menggunakan konfiks *ne-i* hanya mungkin jika didampingi dengan kelas kata dasar verba.

Contoh:

ala 'ambil' → *nelai* 'yang diambil semua'

owa 'bawa' → *neowai* 'yang dibawa semua'

Konfiks *ne-li* hanya dapat membentuk nomina jika didampingi dengan kelas kata dasar verba.

Contoh:

sangke 'angkat' → *nesangkeli* 'yang diangkat'

tofa 'cuci' → *netofali* 'yang dicuci semua'

Penurunan nomina dengan menggunakan konfiks *ne-si* hanya mungkin dilakukan jika dilekatkan pada bentuk dasar verba.

Contoh:

pongko 'pukul' → *neponkosi* 'yang dipukuli'

buna 'cabut' → *nebunasi* 'yang dicabuti semua'

Seperti halnya dengan konfiks *ne-i*, *ne-li*, dan *ne-si*, konfiks *ne-pi* ini juga hanya membentuk nomina jika dilekatkan pada bentuk dasar verba.

Contoh:

basa 'baca' → *nebasapi* 'yang dibaca semua'

salo 'minta' → *nesalopi* 'yang dimintai semua'

Penurunan nomina dengan menggunakan konfiks *kao-a* dimungkinkan jika didampingi oleh kelas kata dasar verba dan adjektiva. Akan tetapi, konfiks *kao-a* tidak produktif dalam membentuk nomina.

Contoh:

lodo 'tidur' → *kaolodoa* 'tempat tidur'

lolanu 'mabuk' → *kaololanua* 'tempat mabuk'

imo 'bahagia' → *kaoimoa* 'kebahagiaan'

lumbu 'marah' → *kaolumbua* 'kemarahan'

Penurunan nomina dengan menggunakan konfiks *kae-a* dapat terjadi jika dilekatkan pada kelas dasar verba maupun nomina.

Contoh:

wanu 'cuci tangan' → *kaewanua* 'tempat cuci tangan'

oli 'beli' → *kaolia* 'tempat membeli sesuatu'

paeasa 'cermin' → *kaepaeasaa* 'tempat bercermin'

paso 'paku' → *kaepasoa* 'tempat memaku'

Konfiks *ka-a* dapat membentuk nomina jika berdampingan dengan kata dasar verba atau adjektiva. Akan tetapi, konfiks *ka-a* lebih produktif bergabung dengan kata dasar verba.

Contoh:

balanda 'belanja' → *kabalandaa* 'tempat berbelanja'

tiehe 'istirahat' → *katiendea* 'tempat istirahat'

tongo 'diam' → *katongoa* 'tempat berdiam diri'

banaha 'benar' → *kabanahaa* 'kebenaran'

maende 'bangga' → *kamaendea* 'kebanggaan'

Penurunan nomina dengan konfiks *po-no* dapat muncul jika bergabung dengan kata dasar nomina dan verba.

(6) *Hobineno napohaso mina se daoa.*

'Istrinya berjualan minyak di pasar'

Istrinya berjualan minyak di pasar

Contoh di atas menunjukkan bahwa nomina dalam bahasa Muna dialek Mawasangka dapat menduduki fungsi pelengkap seperti kata *doi* dan *mina*.

2.1.3 Ciri Semantis

Ciri semantis di sini dilihat dari peran-peran sintaksisnya. Peran sintaksis adalah pengisi fungsi menurut makna. Peran sintaksis itu mengacu pada aspek makna konstituen sintaksis kalimat (Sudaryanto, 1991: 65). Di dalam bahasa Muna dialek mawasangka, nomina mempunyai peran-peran pendamping inti. Berikut ini penjelasannya.

2.1.3.1 Peran Agentif

Peran agentif adalah peran yang mengacu pada pelaku. Pelaku adalah maujud yang melakukan tindakan. Pelaku itu merupakan partisipan yang melaksanakan, menyebabkan-akibatkan, mendorong, atau mengontrol situasi yang dinyatakan dalam predikat.

Contoh:

(1) *Mieno tangasa nedagani galu.*

'Orangnya sedang menjaga kebun.'

(2) *Amano nefekatai bangka.*

'Ayahnya sedang memperbaiki perahu.'

2.1.3.2 Peran Benefaktif

Peran benefaktif adalah peran yang mengacu pada pengguna atau pemanfaat. Pengguna atau pemanfaat itu adalah maujud insani yang mengambil kegunaan atau manfaat dari suatu kegiatan.

Contoh:

(3) *Anai deolianda baju hobinekua.*

'Anak-anak dibelikan baju oleh istri saya.'

2.1.3.3 Peran Lokatif

Peran lokatif adalah peran yang mengacu pada tempat. Tempat itu adalah maujud yang merupakan ruang terjadinya tindakan atau adanya keadaan.

Contoh:

(4) *Insaidi taeoli kenta we daoa.*

'Kami membeli ikan di pasar'

2.1.3.4 Peran Reseptif

Peran reseptif adalah peran yang mengacu pada penerima. Penerima itu adalah maujud insani yang menerima suatu tindakan.

Contoh:

(5) *Padagano nowaao setuwu baju sao anai moelu*

'Pedagang itu memberi satu lembar baju kepada anak yatim'.

2.1.3.5 Peran Objektif

Peran objektif adalah peran yang mengacu pada penderita. Penderita itu adalah maujud yang dikenai atau yang dihasilkan dalam suatu tindakan.

Contoh:

(6) *Kahambauno dodaganiane mie.*

'Kerbaunya dijagai orang.'

2.1.3.6 Peran Kompanional

Peran Kompanional atau komitatif adalah peran yang mengacu pada kompanyon kesalingan. Kompanyon kesalingan itu adalah maujud yang merupakan "pekerja sama" dalam hubungan timbal-balik.

Contoh:

(7) *Fokoamaao nokowamba be sabangkano.*

'Paman berunding dengan temannya.'

3. Afiks-Afiks Pembentuk Nomina dalam Bahasa Muna Dialek Mawasangka

Nomina dalam bahasa Muna dialek Mawasangka terdiri atas dua macam, yaitu nomina dasar dan nomina turunan. Nomina dasar adalah nomina yang belum mengalami pengimbuhan atau afiksasi, perulangan, dan pemajemukan, sedangkan nomina turunan adalah nomina yang telah mengalami ketiga proses tersebut. Untuk lebih jelasnya gambar berikut ini.

Karena ada kecenderungan penghilangan fonem /n/, bentuk *nentisa* dan *nentao* lebih sering diucapkan dengan lafal *netisa* dan *netao*.

5. Simpulan

Proses morfologi nomina adalah proses mengubah leksem menjadi kata berkategori nomina. Nomina dalam bahasa Muna dialek Mawasangka diidentifikasi dengan mengamati ciri morfologis, ciri sintaksis, dan ciri semantis.

Penelitian ini menitikberatkan perhatiannya pada proses pembentukan nomina melalui proses afiksasi. Afiks-afiks yang berpotensi membentuk nomina dalam Bahasa Muna dialek Mawasangka adalah *o-*, *ka-*, *se-*, *ne-*, *be-*, *sao-*, *noko-*, *manso-*, *kafo-*, *nefo-*, *nefeka-*, dan *kafoko-*. Di samping itu, ada juga afiks yang berupa konfiks, seperti *po-no*, *me-no*, *ko-no*, *ka-a*, *kao-a*, dan *be-no*. Ada juga sufiks, tetapi jumlahnya terbatas, seperti *-i* dan *-no*. Selain itu, ada juga gabungan infiks dan sufiks, yaitu *-um-no*. Afiks-afiks yang menurunkan nomina tersebut ada yang bersifat infleksional dan derivasional. Afiks infleksional maksudnya afiks yang dapat melekat pada kelas kata nomina dalam membentuk nomina, sedangkan afiks derivasional maksudnya afiks yang dapat melekat pada kelas kata selain nomina dalam membentuk nomina. Afiks yang bersifat derivasional inilah yang dapat membentuk nominalisasi. Nominalisasi adalah nomina yang berasal dari kelas kata lain karena proses afiksasi. Nominalisasi dalam bahasa Muna dialek Mawasangka dapat melalui dua kelas kata, yaitu kelas kata verba dan kelas kata adjektiva.

Pertemuan afiks-afiks tersebut dengan kata dasar tertentu mengakibatkan terjadinya peristiwa morf fonemik. Proses morf fonemik yang terjadi dalam bahasa Muna dialek Mawasangka tidak banyak ditemukan. Dari penelitian yang dilakukan hanya ditemukan proses penambahan fonem jika diikuti nomina dengan fonem awal /t/ dan /p/.

Dengan adanya proses afiksasi dipastikan ada makna baru untuk kata dasar yang mengalami proses afiksasi. Apalagi ada beberapa afiks yang membentuk nomina bergabung dengan kelas kata selain nomina, seperti verba dan adjektiva.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan dkk. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- _____. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Chaer, Abdul. 2003. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kridalaksana, Harimurti. 1993. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- _____. 1994. *Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2007. *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulya, Abdul Kadir dkk. 1990. *Morfologi dan Sintaksis Bahasa Mawasangka*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____. 1994. *Sistem Morfologi Verba Bahasa Mawasangka*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Mursalin, Said dkk. 1983. *Struktur Bahasa Mawasangka*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ramlan, M. 1997. *Morfologi: Suatu Tinjauan Deskriptif*. Yogyakarta: CV Karyono.
- Sailan, Zalili dkk. 1999. *Sistem Morfologi Nomina Bahasa Mawasangka*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud.
- Samsuri. 1978. *Analisa Bahasa*. Jakarta: Erlangga.
- Siregar, Marinda G. dkk. 2000. *Konstruksi Frasa dengan Kata Yang*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Sudaryanto. 1991. *Tata Bahasa Baku Bahasa Jawa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- _____. 1992. *Metode Linguistik ke Arah Memahami Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- _____. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Yatim, Nurdin dkk. 1991. *Morfologi Kata Kerja Bahasa Muna*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

3.1. Metafora

Metafora merupakan gaya perbandingan yang bersifat tidak langsung dan implisit. Hubungan antar sesuatu yang pertama dengan yang kedua hanya bersifat sugestif, tidak ada kata-kata petunjuk pembandingan eksplisit (Nurgiyantoro 1998:229).

Penggunaan metafora dalam antologi ini diwakili oleh puisi *Angin Besahabat* dan *Tikus Berdasi*. Puisi *Angin Besahabat* yang ditulis oleh *Hasnah* menggunakan kalimat *Raja siang memancarkan sinarnya*. Dalam kalimat ini metafora ditunjukkan dengan penggunaan ungkapan *raja siang* yang menggambarkan matahari. Penggunaan majas ini, dimaksudkan agar kalimat dalam puisi terdengar lebih estetis dan kaya makna.

Metafora juga dapat kita lihat dalam puisi berjudul *Tikus Berdasi* karya *Ria Afriani*. Kalimat tersebut adalah *Hai tikus berdasi*, penggunaan metafora telah ditunjukkan oleh judul puisi ini. Hal tersebut diperetegas dengan kalimat pembuka dalam puisi ini. Puisi ini menuangkan kegelihan penulis tentang rendahnya moral sebagian orang yang hidup di bangsa ini. Metafora *tikus berdasi* untuk menyematkan perilaku tikus yang identik dengan hal-hal yang berbau busuk dengan sifat manusia.

3.2. Personifikasi

Merupakan gaya bahasa yang memberi sifat-sifat benda mati dengan sifat-sifat seperti yang dimiliki manusia sehingga dapat bersikap dan bertingkah laku sebagaimana halnya manusia (Nugiyantoro 1998:229). Menurut Pradopo (1994:75) personifikasi adalah gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati seolah-olah memiliki sifat manusia.

Penggunaan majas personifikasi dalam antologi ini ditemukan hampir di tiap puisi. Pembahasan tentang majas ini akan diwakili oleh puisi *Alyasin* berjudul *Jeritan Gaza* dan puisi *Hima* berjudul *Niat Hidup*. Penggunaan metafora dalam puisi berjudul *Jeritan Gaza* diwakili oleh kalimat *rentetan peluru menari, memecah keheningan pagi*. Kata *menari* yang disandingkan dengan *peluru* digunakan untuk mendapatkan kesan dramatis dan tragis. Dengan penggunaan kata-kata ini, pembaca seolah-olah berangan-angan berada di tempat tersebut.

Hima dalam puisi *Niat Hidup*, menggunakan kalimat *kala mentari membangunkan dari lelap*. Kata *membangunkan* disematkan pada kata *mentari*. Dalam kalimat digambarkan seolah-olah mentari memiliki organ-organ yang dapat digerakkan untuk membangunkan manusia. Kesan estetis kembali menjadi alasan penggunaan majas ini dalam sebuah puisi.

3.3. Hiperbola

Hiperbola adalah majas perbandingan yang melukiskan sesuatu dengan mengganti peristiwa atau tindakan sesungguhnya dengan kata-kata yang lebih hebat pengertiannya untuk menyengatkan arti.

Contoh:

Selebihnya, rumah ini tetap lembah nestapa buat saya.

Majas ini diwakili oleh satu puisi karya *Ria Afriani* berjudul *Tersesat*. Kalimat hiperbola ditunjukkan oleh kalimat *tinggallah aku sendiri dibantai kesepian*. Kalimat yang dapat menyengatkan makna adalah *sendiri dibantai kesepian*. Kalimat ini meluaskan makna dari suasana sendiri tanpa seorang pun dapat membantunya.

4. PENUTUP

Penggunaan majas adalah hal yang penting dalam menulis puisi. Hal ini dilakukan untuk membedakan penulisan puisi dengan penulisan prosa yang cenderung lugas. Penulis pemula yang ada dalam antologi ini juga menggunakannya walaupun variasi penggunaannya belum banyak.

Fungsi majas untuk menciptakan efek yang lebih kaya, lebih efektif, dan lebih sugestif dalam karya sastra telah disadari oleh para penulis ini. Majas yang banyak digunakan adalah personifikasi dan metafora.

Daftar Pustaka

Nurgiyantoro, Burhan. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Pradopo, Rachma Djoko. 1994. *Prinsip-Prinsip Kritik Sastra*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Waluyo, Herman J. 1994. *Pengkajian Cerita Fiksi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

